RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja TW 1 dan Capaian Renstra 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 35
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 45

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 47
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 49
3.3. Program dan Kegiatan 54

BAB IV PENYUSUNAN RENCAN KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 58
4.1. Catatan Penting 58
4.2. Kaidah Pelaksanaan 58
4.3. Rencana Tindak Lanjut 59

BAB V PENUTUP 69

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616/IV.01/HK/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima)

tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Wali Kota BandarLampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : ***"BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT"***

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan Langkah - langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah dalam hal pembangunan pendidikan di Kota Bandar Lampung diarahkan untuk membentuk SDM berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-2 (dua) dalam RPJMD Tahun 2021–2026 yaitu ***Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat,*** dan misi ke-5 (lima) ***Mengembangkan masyarakat agamis, Berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang Religius,*** Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, pada Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun Anggaran 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Intervensi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025;
17. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ssdimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang mengkaji program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang

menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD-P Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Wali Kota.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025.
3. Sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Triwulan I berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3.2. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik

jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang rencana kerja Perubahan dan Pendanaan Tahun 2025.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TRIWULAN 1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel terlampir dibawah :

Tabel 1

Realisasi Belanja Program bersumber APBD Kota Bandar Lampung

Tahun 2025 TW 1

NO	KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	BELUM TEREALISASI
I	1.01	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN	672.435.116.199	200.798.877.360	471.636.238.839
A	1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	475.688.080.545	184.942.926.320	290.745.154.225
1	1.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239.999.834	-	239.999.834
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	104.999.403		104.999.403
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.000.689		25.000.689
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	109.999.742		109.999.742
2	1.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	471.233.315.441	183.846.705.320	287.386.610.121
	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	470.521.275.650	183.663.515.320	286.857.760.330
	1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	712.039.791	183.190.000	528.849.791
3	1.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	216.430.282	-	216.430.282
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.509		5.000.509
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.940.723		82.940.723
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.999.542		9.999.542
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000		20.000.000
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.999.508		39.999.508
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000		8.000.000
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.490.000		50.490.000

NO	KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	BELUM TEREALISASI
4	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	-	100.000.000
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000		
5	1.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	174.999.896	-	174.999.896
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-		-
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	174.999.896		174.999.896
6	1.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.482.000.000	1.084.000.000	1.398.000.000
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	250.000.000	-	250.000.000
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.232.000.000	1.084.000.000	1.148.000.000
7	1.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.241.335.092	12.221.000	1.229.114.092
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.000.000		45.000.000
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.330.000		176.330.000
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.005.092		20.005.092
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000	12.221.000	987.779.000
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-
B	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	193.499.328.802	13.617.651.040	179.881.677.762
1	1.01.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	96.413.146.640	938.012.040	95.475.134.600
	1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	854.154.996	-	854.154.996
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	10.213.114.544	938.012.040	9.275.102.504
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebeluer Sekolah		-	-
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Siswa	2.453.460.000	-	2.453.460.000
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa	298.658.559	-	298.658.559
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	855.000.000	-	855.000.000
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	4.076.880.728	-	4.076.880.728
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	77.094.049.980	-	77.094.049.980
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	49.999.833	-	49.999.833
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunikasi Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	24.000.000	-	24.000.000
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan Infrastuktur TIK	493.828.000	-	493.828.000

NO	KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	BELUM TEREALISASI
2	1.01.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	76.103.782.688	12.679.639.000	63.424.143.688
	1.01.02.2.02.0059	Penambahan Ruang Kelas Baru	-	-	-
	1.01.02.2.02.0014	Rehalitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	17.330.282.100	11.439.068.000	5.891.214.100
	1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah			-
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	5.768.299.353	215.000.000	5.553.299.353
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Siswa	2.453.400.000	1.025.571.000	1.427.829.000
	1.01.02.2.02.0036	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	531.579.659		531.579.659
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa	400.022.000		400.022.000
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-		-
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	300.000.000		300.000.000
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	49.220.199.988		49.220.199.988
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	49.999.833		49.999.833
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunikasi Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	49.999.755		49.999.755
3	1.01.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	13.454.199.600	-	13.454.199.600
	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	250.000.000		250.000.000
	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	13.130.199.803		13.130.199.803
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000		50.000.000
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunikasi Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	23.999.797		23.999.797
4	1.01.02.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.528.199.874	-	7.528.199.874
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.000.000.000		1.000.000.000
	1.01.02.2.04.0012	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	99.999.874		99.999.874
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6.428.200.000		6.428.200.000
C	1.01.04	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	3.247.706.852	2.238.300.000	1.009.406.852
1	1.01.04.2.01	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.247.706.852	2.238.300.000	1.009.406.852
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	99.999.847	-	99.999.847

NO	KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	BELUM TEREALISASI
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidik Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.147.707.005	2.238.300.000	909.407.005
II	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.473.483.396	290.045.000	1.183.438.396
A	2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	949.999.256	290.045.000	659.954.256
1	2.22.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	949.999.256	290.045.000	659.954.256
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	949.999.256	290.045.000	659.954.256
B	2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	490.592.861	-	490.592.861
1	2.22.03.2.01	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	490.592.861	-	490.592.861
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	127.592.904		127.592.904
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	362.999.957		362.999.957
C	2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	32.891.279	-	32.891.279
1	2.22.04.2.01	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.891.279	-	32.891.279
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data Informasi sejarah	32.891.279		32.891.279
		TOTAL JUMLAH URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	673.908.599.595	201.088.922.360	472.819.677.235

Tabel 2

Tabel Capaian E.81 APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2023

Tabel 3

Tabel TC-29 APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2022

Tabel 4

Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2024

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA						REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		Catatan Analisis
				TAHUN 2021 (thn n-2)	TAHUN 2022 (thn n-1)	TAHUN 2023 (Thn n)	TAHUN 2024 (Thn n+1)	TAHUN 2025 (Thn n+1)	TAHUN 2026 (Thn n+1)	TAHUN 2022 (thn n-1)	TAHUN 2023 (Thn n)	TAHUN 2024 (Thn n)	TAHUN 2021 (Thn n)	TAHUN 2022 (Thn n+1)	
PENDIDIKAN															
	Angka Rata – Rata Lama Sekolah			*10,95*	*10,96*	*10,98*	*10,99*	*11*	*11*	*10,97*	*10,96*	*10.99*			
	Angka Harapan Lama Sekolah			*15,37*	*16,14*	*16,95*	*17,8*	*18,68*	*18,68*	*14,70*	*14,71*	*14.73*			
Program Pengelolaan Pendidikan															
	APK PAUD			*49,36*	*54,30*	*59,73*	*65,70*	*72,27*	*79,49*	*36,12*	*43,15*	*46,17*			
	APK SD/MI			*112,34*	*116,83*	*121,51*	*126,37*	*131,42*	*131,42*	*111,05*	*104,72*	*99,54*			
	APM SD/MI			*99,33*	*99,43*	*99,53*	*99.63*	*99,73*	*99,73*	*93,71*	*86,73*	*95,42*			
	APK SMP/MTs			*100,22*	*104,23*	*108,40*	*112.74*	*117,25*	*117,25*	*103,86*	*100,8*	*101,14*			
	APM SMP/MTs			*82,17*	*84,23*	*86,33*	*88,49*	*90,70*	*90,70*	*80,41*	*80,15*	*93,62*			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini			*96,72*	*97,72*	*98,72*	*99,72*	*100*	*100*	*74,78*	*43,33*	*67,46*			

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA						REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		Catatan Analisis
				TAHUN 2021 (thn n-2)	TAHUN 2022 (thn n-1)	TAHUN 2023 (Thn n)	TAHUN 2024 (Thn n+1)	TAHUN 2025 (Thn n+1)	TAHUN 2026 (Thn n+1)	TAHUN 2022 (thn n-1)	TAHUN 2023 (Thn n)	TAHUN 2024 (Thn n)	TAHUN 2021 (Thn n)	TAHUN 2022 (Thn n+1)	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar			*98,21*	*98,46*	*98,71*	*98,96*	*99,21*	*99,46*	*89,70*	*99,59*	*94,81*			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan			*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	-	*100*	*95,31*			
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan															
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV			*84,84*	*85,90*	*86,97*	*88,06*	*89,16*	*89,16*	*84,44*	81,11				
Kebudayaan															

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA						REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		Catatan Analisis
				TAHUN 2021 (thn n-2)	TAHUN 2022 (thn n-1)	TAHUN 2023 (Thn n)	TAHUN 2024 (Thn n+1)	TAHUN 2025 (Thn n+1)	TAHUN 2026 (Thn n+1)	TAHUN 2022 (thn n-1)	TAHUN 2023 (Thn n)	TAHUN 2024 (Thn n)	TAHUN 2021 (Thn n)	TAHUN 2022 (Thn n+1)	
	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi			*62*	*74*	*83*	*92*	*100*	*100*	*62*	*74*				
	Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan			*4*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*12*	*5*				
	Jumlah Sejarah Yang Dilakukan Pembinaan			*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*5*	*1*				

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung pada Tahun 2024, target capaian kinerja tahun 2024 serta target capaian kinerja pelayanan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Target Kinerja Pelayanan Pendidikan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Nasional 2024	Target 2024	Capaian 2023	Capaian 2024	%	Keterangan (Kategori Capaian)
	Harapan Lama Sekolah	Harapan Rata Lama Sekolah	%		14,64	14,72	14,73	100	**Baik Sekali**
	Angka Rata - Rata Lama Sekolah	Angka Rata - Rata Lama Sekolah	%		10,98	10,97	10,99	100	**Baik Sekali**
1	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	APK PAUD	%	47,81	65,70	43,15	46,17	70	**Baik**
2	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	APK SD/MI	%	101,49	126,37	99,44	99,54	79	**Baik**
3	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	APM SD/MI	%		99,63	89,98	95,42	96	**Baik**
4	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS	APK SMP/MTS	%	98,11	112,74	100	101,14	90	**Baik**
5	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	APM SMP/MTS	%		88,49	80,15	93,62	106	**Baik Sekali**
6	Meniingkatnya partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%		98,72	50,41	67,46	68	**Baik**
7	Meniingkatnya partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	Meniingkatnya partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%		98,96	72,07	94,81	96	**Baik**

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Nasional 2024	Target 2024	Capaian 2023	Capaian 2024	%	Keterangan (Kategori Capaian)
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan	Meniingkatnya partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan dasar	%		100	-	95,31	95	**Baik**
8	Meningkatnya Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%		88,06	81,11	81,11	93,26	**Baik**
11	Meningkatnya Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Angka		92	74	74	100	**Baik**
12	Meningkatnya Sanggar seni yang lestari	Sanggar seni yang lestari	Angka		5	5	5	100	**Baik**
13	Meningkatnya Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	Angka		1	1	1	100	**Baik**

Dari tabel yang tersaji diatas, maka dapat disusun analisis kinerja sebagai berikut :

1. sasaran meningkatnya aksesbilitas pendidikan dan kualitas pendidikan
   a. Untuk Capaian APK PAUD di tahun 2024 sebesar 43,15%, hal ini disebabkan karena terjadinya data ganda di setiap satuan pendidikan PAUD, setelah dilakukan Verifikasi Data Melalui Aplikasi Dapodik maka APK PAUD menjadi turun. sedangkan untuk Penghitungan APK PAUD tahun 2024 sedang dilakukan Verifikasi Data Pada Dapodik, dalampencapaian pada indikator ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini sudah semakin meningkat. Kesadaran masyarakat tersebut didorong oleh semakin representatifnya sarana dan prasarana PAUD, bertambahnya lembaga penyelenggara PAUD dan adanya peningkatan kompetensi pendidik PAUD. Guna untuk pencapaian peningkatan kinerja dibidang ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didukung Anggaran sebesar Rp 13.438.537.526,-
   .

b. Keberhasilan peningkatan keseimbangan rasio rata-rata APK dan APM pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs, hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah mengenai batas usia masuk sekolah yang diterapkan pada aplikasi data pokok pendidikan. Guna untuk pencapaian peningkatan kinerja dibidang ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didukung Anggaran sebesar Rp 208.786.670.398,-.

2. Meningkatnya pelestarian adat istiadat, budaya dan tradisi masyarakat :

Peningkatan kinerja pada sasaran ini tidak menunjukkan angka yang signifikan, karena pada sasaran ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan yang bersifat pelestarian pada benda dan seni budaya. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang berada dalam pengelolaan urusan Bidang Kebudayaan adalah Moseum Lampung yang berada di Kecamatan Labuhan Ratu. Peningkatan pelestarian seni budaya dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh tingginya animo masyarakat pada kegiatan-kegiatan seni budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang didukung anggaran sebesar Rp 1.898.899.408-

2.2 DATA PENDUKUNG PENINGKATAN KINERJA

Tabel 2.1 Data Jumlah Sekolah Status Akreditasi Jenjang PAUD Tahun 2024

TK							KB						SPS					
Kecamatan	**A**	**B**	**C**	**BELUM**	**TIDAK DIISI**	**JMLH**	**A**	**B**	**C**	**BLM**	**TIDAK DIISI**	**JMH**	**A**	**B**	**C**	**BELUM**	**TIDAK DIISI**	**JML**
Kec. Bumi Waras	1	1	1	2	0	**6**	5	4	3	6	0	**19**	0	1	0	3	0	**4**
Kec. Enggal	3	2	1	4	0	**10**	2	2	1	2	0	**7**	0	1	3	2	0	**6**
Kec. Kedamaian	6	4	3	6	0	**20**	3	5	3	7	0	**18**	0	1	1	2	0	**4**
Kec. Kedaton	9	5	3	3	0	**20**	4	3	1	4	0	**12**	1	1	0	4	0	**5**
Kec. Kemiling	18	15	5	12	0	**51**	8	5	2	6	0	**21**	1	1	1	4	0	**7**
Kec. Labuhan Ratu	5	3	2	7	0	**21**	3	4	1	4	0	**12**	0	0	1	1	0	**2**
Kec. Langkapura	5	5	4	4	0	**19**	5	3	2	1	1	**12**	0	0	0	2	2	**2**
Kec. Panjang	4	3	3	6	0	**18**	7	5	3	13	0	**28**	0	1	1	2	0	**6**

TK							KB						SPS					
Kecamatan	**A**	**B**	**C**	**BELUM**	**TIDAK DIISI**	**JMLH**	**A**	**B**	**C**	**BLM**	**TIDAK DIISI**	**JMH**	**A**	**B**	**C**	**BELUM**	**TIDAK DIISI**	**JML**
Kec. Rajabasa	6	5	5	10	0	**28**	5	3	3	5	0	**17**	0	0	0	3	0	**3**
Kec. Sukabumi	5	3	2	7	0	**21**	5	4	3	6	0	**17**	0	1	2	3	0	**6**
Kec. Sukarame	10	8	6	8	0	**33**	4	4	3	6	0	**17**	0	0	1	3	0	**4**
Kec. Tanjung Karang Barat	7	6	4	6	0	**24**	6	5	3	10	0	**24**	0	0	0	2	0	**2**
Kec. Tanjung Karang Pusat	5	5	3	3	0	**16**	3	1	1	7	0	**12**	0	0	1	2	0	**4**
Kec. Tanjung Karang Timur	4	2	1	7	0	**13**	2	4	1	4	0	**12**	0	0	2	4	0	**6**
Kec. Tanjung Senang	5	4	3	9	0	**20**	6	4	2	11	0	**23**	0	0	1	3	0	**4**
Kec. Teluk Betung Barat	1	3	1	2	0	**7**	1	2	1	4	0	**8**	0	1	1	2	0	**4**
Kec. Teluk Betung Selatan	2	2	2	4	0	**12**	3	4	1	5	0	**14**	0	0	1	2	0	**3**

TK							KB						SPS					
Kecamatan	**A**	**B**	**C**	**BELUM**	**TIDAK DIISI**	**JMLH**	**A**	**B**	**C**	**BLM**	**TIDAK DIISI**	**JMH**	**A**	**B**	**C**	**BELUM**	**TIDAK DIISI**	**JML**
Kec. Teluk Betung Timur	0	1	1	1	0	**6**	1	2	1	4	0	**9**	0	1	1	4	0	**6**
Kec. Teluk Betung Utara	3	3	1	7	0	**15**	3	2	2	8	0	**15**	0	1	1	6	0	**8**
Kec. Way Halim	5	5	1	6	1	**17**	4	3	2	6	0	**15**	0	0	1	4	0	**6**
Kota Bandar Lampung	**104**	**85**	**52**	**114**	**1**	**377**	**80**	**69**	**39**	**119**	**0**	**312**	**2**	**10**	**19**	**58**	**2**	**89**

Tabel 2.2 Data Jumlah Sekolah Status Akreditasi Jenjang SD Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah		Jumlah	Akreditasi			
		Negeri	Swasta		A	B	C	Bulum
1	Bumiwaras	8	3	**11**	1	12	2	1
2	Enggal	6	1	**7**	5	2	0	0
3	Kedamaian	6	5	**11**	3	8	0	1
4	Kedaton	7	3	**10**	2	10	0	1
5	Kemiling	13	6	**19**	5	10	2	2
6	Labuhan Ratu	8	2	**10**	3	6	0	1
7	Langkapura	8	4	**12**	5	6	0	0
8	Panjang	10	4	**14**	3	11	1	0
9	Rajabasa	7	8	**15**	6	9	1	1
10	Sukabumi	10	2	**12**	2	10	1	1
11	Sukarame	6	6	**12**	4	5	0	1
12	Tanjung Karang Barat	14	3	**17**	5	10	0	0
13	Tanjung Karang Pusat	8	5	**13**	7	4	0	0
14	Tanjung Karang Timur	6	0	**6**	2	8	0	0
15	Tanjungsenang	9	3	**12**	2	9	0	0
16	Teluk Betung Barat	5	0	**5**	1	5	0	0
17	Teluk Betung Selatan	18	8	**18**	6	11	3	0
18	Teluk Betung Timur	9	1	**10**	3	4	2	0
19	Teluk Betung Utara	8	5	**13**	3	8	1	1
20	Way Halim	9	5	**14**	6	5	1	2
	Total	**167**	**74**	**241**	**78**	**153**	**13**	**12**

Tabel 2.3 Data Jumlah Sekolah Status Akreditasi Jenjang SMP Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah		Jumlah	Akreditasi			
		Negeri	Swasta		Akred A	Akred B	Akred C	Belum
1	Bumiwaras	1	2	**3**	0	1	2	0
2	Enggal	5	5	**10**	6	3	0	1
3	Kedamaian	1	8	**9**	3	3	1	0
4	Kedaton	1	7	**8**	1	5	2	0
5	Kemiling	4	9	**13**	4	2	1	3
6	Labuhan Ratu	2	4	**6**	2	3	1	0
7	Langkapura	1	2	**3**	2	1	0	0
8	Panjang	4	5	**9**	3	3	2	1
9	Rajabasa	3	9	**12**	5	4	0	0
10	Sukabumi	2	4	**6**	0	3	1	2
11	Sukarame	4	3	**7**	4	1	1	1
12	Tanjung Karang Barat	2	2	**4**	7	5	2	1
13	Tanjung Karang Pusat	2	10	**12**	7	5	1	1
14	Tanjung Karang Timur	0	3	**3**	1	1	1	0
15	Tanjungsenang	2	5	**7**	2	4	0	0
16	Teluk Betung Barat	2	3	**5**	1	1	0	0
17	Teluk Betung Selatan	2	4	**6**	4	2	0	1
18	Teluk Betung Timur	2	2	**4**	0	2	1	0
19	Teluk Betung Utara	4	4	**8**	1	5	1	1
20	Way Halim	1	2	**3**	1	1	0	1
	Total	**45**	**93**	**138**	**54**	**55**	**17**	**14**

Tabel 2.4 Rekap Data Siswa dan Guru Satuan Pendidikan Dasar (SD)

Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Bumiwaras	3.409	195
2	Enggal	3.886	185
3	Kedamaian	3.350	196
4	Kedaton	2.582	155
5	Kemiling	7.506	390
6	Labuhan Ratu	3.086	180
7	Langkapura	4.329	229
8	Panjang	5.308	241
9	Rajabasa	5.594	348
10	Sukabumi	5.469	251
11	Sukarame	4.991	264
12	Tanjung Karang Barat	5.704	298
13	Tanjung Karang Pusat	5.908	310
14	Tanjung Karang Timur	3.116	163
15	Tanjungsenang	4.845	265
16	Teluk Betung Barat	1.586	75
17	Teluk Betung Selatan	5.795	313
18	Teluk Betung Timur	4.105	181
19	Teluk Betung Utara	3.916	208
20	Way Halim	5.632	331
	Total	**90.117**	**4.778**

Tabel 2.5 Rekap Data Siswa dan Guru Satuan Pendidikan Dasar (SMP)

Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Bumiwaras	431	33
2	Enggal	4.568	299
3	Kedamaian	1.484	131
4	Kedaton	1.128	98
5	Kemiling	3.882	304
6	Labuhan Ratu	2.266	180
7	Langkapura	1.439	98
8	Panjang	3.162	183
9	Rajabasa	4.488	299
10	Sukabumi	2037	123
11	Sukarame	3.626	231
12	Tanjung Karang Barat	2.042	139
13	Tanjung Karang Pusat	3.206	227
14	Tanjung Karang Timur	301	30
15	Tanjungsenang	2.422	182
16	Teluk Betung Barat	1.321	84
17	Teluk Betung Selatan	2.295	152
18	Teluk Betung Timur	1.085	64
19	Teluk Betung Utara	3.505	228
20	Way Halim	1.014	55
	Total	**45.702**	**3.140**

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 secara umum cukup baik, dengan memperhatikan indikator pencapaian sasaran kinerja pelayanan pendidikan dan capaian kinerja keuangan. Namun demikian untuk pencapaian optimal per-indikator pelayanan masih menemui beberapa hambatan dan permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah :

1. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Belum oprtimalnya ketersediaan dan kualitas pendidikan dasar;
3. Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam pelayanan pendidikan non formal;
4. Belum meningkatnnya kualitas dan kesetaran pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Belum optimalnya kepastian dan pembinaan pendidikan karakter;
6. Masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari;
7. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya;

Sehubungan dengan isu-isu penting yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai institusi pelayanan publik bidang pendidikan dan Kebudayaan, beberapa hal yang menjadi tantangan sekaligus peluang pada upaya peningkatan layanan pendidikan adalah :

1. Tersedianya SDM pengolah PAUD dengan kualitas pendidikan yangtidak sesuai.
2. Adanya program sekolah gratis untuk pendidikan dalam 9 tahun.
3. Masih belum paham tentang ketersediaan pelayanan pendidikan nonformal.
4. Dukungan Anggaran untuk peningkatan kualitas dan kesetaraanpendidik dan tenaga kependidikan.
5. Adanya kebijakan penerapan kurikulum 2013.
6. Nilai-nilai luhur dijadikan momentum untuk peserta didik.
7. Keberagaman kekayaan budaya.
8. Peningkatan kualitas SDM pelaku budaya.

Beberapa permasalahan tersebut menjadi catatan penting dalam rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024, selain hal itu dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didukung dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung perlu diperhatikan masalah Kebudayaan karena mulai tahun 2017 kebudayaan menjadi bagian dari Dinas Pendidikan untuk dipertimbangan dalam pengambilan keputusan manajerial demi perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang.

BAB III

TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Standarisasi Pelayanan melalui Akreditasi

   Dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan, masing-masing lembaga penyelenggara satuan pendidikan perlu dievaluasi untuk memperoleh gambaran kinerja satuan pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan melalui Akreditasi Sekolah.

2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar

   Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. SPM Pendidikan Dasar diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.

3. Pemantapan Kurikulum

   Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Penghentian pelaksanaan Kurikulum 2013 berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Desember 2014 dan Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014, memutuskan menghentikan implementasi Kurikulum 2013, dan hanya melaksanakan secara terbatas pada sekolah-sekolah tertentu yang memenuhi standar pelaksanaan Kurikulum 2013. Di Kota Bandar Lampung mulai tahun 2016 sudah menerapkan Sekolah Kurikulum 2013 sejumlah 150 sekolah untuk jenjang SD dan 70 Sekolah untuk jenjang SMP, sehingga seluruh sekolah 220 untuk semua jenjang.

4. Penguatan manajemen pendidikan berbasis IT

   Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta meluasnya perkembangan infrastuktur informasi global telah mengubah pola dan cara kegiatan di berbagai bidang termasuk pendidikan. Sistem jaringan pendidikan skala nasional (Jardiknas) dan Dapodik dibangun dengan harapan proses pengelolaan data dan informasi pendidikan dapat dilaksanakan lebih mudah, cepat, terintegrasi dan transparan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Tahun 2023 didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas pokok dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026.

Tabel 3.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
							Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1.	Meningkatkan aksebilitas dan kualitas pendidikan	1.1	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan yang berkualitas bagi	1.1.1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,93	10,97						11,00
				1.1.2	Angka Harapan Lama Sekolah	14,64	14,70						14,75

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
							Target	Target	Target	Target	Target	Target	
			Masyarakat	1.1.3	APK PAUD	49,36	49,36	54,30	59,73	65,70	72,27	79,49	79,49
				1.1.4	APK SD/MI	108,14	112,35	116,83	121,51	126,37	131,42	131,42	131,42
				1.1.5	APM SD/MI	91,32	99,33	99,43	99,53	99,63	99,73	99,73	99,73
				1.1.6	APK SMP/MTs	96,37	102,22	104,23	108,40	112,74	117,25	117,25	117,25
				1.1.7	APM SMP/MTs	80,17	82,17	84,23	86,33	88,49	90,70	90,70	90,70
				1.1.7	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan	95,72	96,72	97,72	98,72	99,72	100	100	100

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
							Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Usia Dini								
				1.1.8	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar dan Menengah	97,96	98,21	98,46	98,71	98,96	99,21	99,46	99,46
				1.1.9	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
							Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Pendidikan Kesetaraan								
		1.2	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.2.1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	83,79	84,84	85,90	86,97	88,06	89,16	89,16	89,16
2.	Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan melindungi cagar	2.1	Meningkatnya Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah	2.1.1	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisa	52	62	74	83	92	100	100	100

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
							Target	Target	Target	Target	Target	Target	
	budaya				si								
				2.1.2	Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan	0	4	5	5	5	5	5	5
				2.1.2	Jumlah Sejarah Yang Dilakukan Pembinaan	0	1	1	1	1	1	6	6

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan realisasi kinerja pelayanan pendidikan dan kinerja keuangan pada tahun 2024, dan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran seperti dijabarkan di atas, rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2025 sebagaimana tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Bersumber APBD Kota Bandar Lampung

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								720.070.819.350,00						798.708.085.085,00
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								718.176.019.842,00						756.644.685.935,00
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								718.176.019.842,00						798.834.985.935,00
1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								481.916.186.817,00						528.172.987.935,00
1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								91.490.795,00						96.074.935,00
1	01	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
					Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 % 66 %	3 Dokumen	100 %	83.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	88.079.000,00
1	01	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
					Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 % 66 %	1 Dokumen	100 %	28.888.854,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00
1	01	01	2.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
					Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 % 66 %	5 Laporan	100 %	29.999.941,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	32.999.935,00
1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								477.588.879.250,00						534.879.880.000,00
1	01	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
					Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan Opd Yang Akuntabel	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 % 66 %	3377 Orang/bulan	100 %	476.578.025.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3377 Orang/bulan	524.235.025.500,00
1	01	01	2.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan														
					Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan Opd Yang Akuntabel	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 % 66 %	1 Dokumen	100 %	565.480.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	633.996.000,00
1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								446.751.651,00						385.739.500,00
1	01	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi														
					-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	10.999.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.096.900,00
1	01	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
					-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Paket	-	198.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	13.860.000,00
1	01	01	2.06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
					-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	10.991.467,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.090.600,00
1	01	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
					-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.000.000,00
1	01	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
					-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	81.989.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.900.000,00

1	01	01	2.06	0008	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	8.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.500.000,00
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan Tamu														
						-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	12.900.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD														
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	155.842.123,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	189.000.000,00
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									200.000.000,00					220.000.000,00
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	15 Unit	-	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	220.000.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									2.484.000.000,00					2.217.000.000,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	33.000.000,00
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	2.184.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.184.000.000,00
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.530.472.141,00					1.585.735.000,00
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	40.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	69.025.000,00
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Unit	-	210.280.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	241.908.000,00
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Unit	-	11.820.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	13.002.000,00
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	1.268.442.141,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.100.000.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									229.271.765.924,00					219.989.435.200,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									105.138.704.538,00					113.052.574.800,00
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
						-	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Paket	-	1.250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5 Paket	1.375.000.000,00
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
						-	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	360 Peserta Didik	-	298.658.358,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	360 Peserta Didik	328.524.400,00
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
						-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Orang	-	1.342.399.812,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	1.476.639.700,00
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	166 Satuan Pendidikan	-	147.173.944,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	166 Satuan Pendidikan	161.091.300,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	182 Satuan Pendidikan	-	77.774.489.821,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	182 Satuan Pendidikan	85.551.949.000,00
1	01	02	2.01	0030	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik															
						-	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7250 Paket	-	8.670.999.358,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	7250 Paket	9.537.099.000,00
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru															
						-	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	9 Ruang	-	6.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9 Ruang	6.200.000.000,00
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah															
						-	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	24 Ruang	-	9.651.072.540,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	24 Ruang	9.816.179.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									103.647.965.860,00						84.410.255.400,00
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah															
						-	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	24 Ruang	-	9.946.849.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	24 Ruang	0.300.000.000,00
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah															
						-	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Paket	-	1.750.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket	1.300.000.000,00
1	01	02	2.02	0058	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa															
						-	Jumlah Siswa yang mengikuti Ajang Kompotisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	560 Peserta Didik	-	800.022.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompotisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	560 Peserta Didik	880.024.200,00
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama															
						-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	200 Orang	-	122.299.312,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	134.529.700,00
1	01	02	2.02	0001	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah															
						-	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	65 Satuan Pendidikan	-	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan	65 Satuan Pendidikan	330.197.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															
						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	138 Satuan Pendidikan	-	49.330.499.821,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	138 Satuan Pendidikan	54.272.349.000,00
1	01	02	2.02	0053	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik															
						-	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti proses belajar	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	99559 Satuan Pendidikan	-	8.521.579.785,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Didik yang mengikuti proses belajar	99559 Satuan Pendidikan	9.375.737.700,00
1	01	02	2.02	0069	Pembangunan Ruang Kelas Baru															
						-	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	9 Ruang	-	32.229.245.444,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9 Ruang	6.300.000.000,00
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik															
						-	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7250 Paket	-	7.058.870.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	7250 Paket	7.765.017.000,00
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									15.173.395.326,00						24.490.035.000,00
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD															
						-	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Satuan Pendidikan	-	349.999.975,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan	384.999.900,00
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD															

						-	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	600 Satuan Pendidikan	-	12.823.585.551,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	600 Satuan Pendidikan	14.105.955.100,00
1	01	02	2.04			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							7.311.500.000,00						8.091.650.000,00
1	01	02	2.04	0017		Pengelolaan Dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan													
						-	Jumlah Sekolah Nonformal/kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	60 Satuan Pendidikan	-	6.311.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	60 Satuan Pendidikan	6.821.650.000,00
1	01	02	2.04	0018		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
						-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1000 Peserta Didik	-	1.100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1000 Peserta Didik	1.210.000.000,00
1	01	04				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							6.980.057.101,00						7.686.862.800,00
1	01	04	2.01			Pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							6.980.057.101,00						7.686.862.800,00
1	01	04	2.01	0001		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1.399.999.916,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1.539.999.900,00
1	01	04	2.01	0002		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
						-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga kependidikan satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Laporan	-	5.580.057.185,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Laporan	6.186.862.900,00
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.890.899.406,00						2.858.799.100,00
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.890.899.406,00						2.858.799.100,00
2	22	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							690.999.256,00						769.999.100,00
2	22	02	2.01			Pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							690.999.256,00						769.999.100,00
2	22	02	2.01	0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan													
						-	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Objek	-	690.999.256,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek	769.999.100,00
2	22	05				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							1.125.900.243,00						2.008.200.200,00
2	22	05	2.01			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							1.125.900.243,00						2.008.200.200,00
2	22	05	2.01	0001		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional													
						-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Orang	-	75.000.243,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	3 Orang	882.500.200,00
2	22	05	2.01	0003		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional													
						-	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Lembaga	-	1.050.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	1.153.700.000,00
2	22	04				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH							74.999.909,00						82.499.800,00
2	22	04	2.01			Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							74.999.909,00						82.499.800,00
2	22	04	2.01	0003		Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah													
						-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	-	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	74.999.909,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	82.499.800,00
												TOTAL	720.070.919.250,00						759.703.455.035,00

BAB IV
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025

4.1 CATATAN PENTING

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan aspek legalitas, kebersamaan dengan menampung berbagai masukan dari berbagai fihak utamanya stakeholders pendidikan sehingga, sehingga berhasil disusun dokumen perencanaan untuk satu tahun ke depan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dengan demikian seluruh jajaran di Kantor Dinas Pendidikan Kota, Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik Sanggar Kegiatan Belajar serta sekolah terikat akan dokumen perencanaan ini.

Dengan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini, diharapkan pula dapat mendorong partisipasi masyarakat khususnya stakeholders pendidikan dan Budaya dalam pengelolaan pendidikan dan Budaya, sehingga lebih ikut bertanggung jawab dalam pembangunan layanan pendidikan dan Budaya yang lebih berkualitas.

4.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026. Kaidah Pelaksanaan Renja Perubahan sebagai berikut :

1. Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025;
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan layanan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebelum ditetapkannya Renja Perubahan iniberpedoman pada Renja Perubahan periode tahun sebelumnya.

4.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2025 yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran pendidikan sendiri maupun stakeholder yang berkepentingan. Semoga Renja Perubahan ini dapat dipedomani sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025.

RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA
KOTA BANDAR LAMPUNG

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN				
	1.1	Latar Belakang				
	1.2	Landasan Hukum				
	1.3	Maksud dan Tujuan				
	1.4	Sistematika Penulisan				
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN				
		Formulir E.81				
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH				
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	BAB IV	PENUTUP				

Bandar Lampung, 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Bandar Lampung

M.YUDHI, SH.,MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700925 199803 1 006

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.	
	Plt. Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	Diona Martinalova,S.Pi.,MM.	
	JF Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida,

DINI PURNAMAWATY,S.E., M.SI.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan.				
4.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masingPerangkat Daerah sesuai surat edaranwalikota.				
5.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah				
6.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.		√	Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Bandar Lampung

M.YUDHI, SH.,MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700925 199803 1 006

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.**	
	Plt. Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	**Diona Martinalova,S.Pi.,MM.**	
	JF Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida,

DINI PURNAMAWATY,S.E., M.SI.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten /kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, 2025

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.**	
	Plt. Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	**Diona Martinalova,S.Pi.,MM.**	
	JF Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida,

DINI PURNAMAWATY,S.E., M.SI.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP.19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

			Hal.
BAB I	**PENDAHULUAN**		
	1.1	Latar Belakang	I.1
	1.2	Landasan Hukum	I.4
	1.3	Maksud dan Tujuan	I.7
	1.4	Sistematika Penulisan	I.7
BAB II	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**		
		Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan / Tahun 2025 Formulir E-81	II.1
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**		III.1
		Rincian Perubahan Program dan Pagu Program serta Tabel TC-33 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	
BAB IV	**PENUTUP**		IV.1

LAMPIRAN 10
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616/IV.01/HK/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 360 ayat (2) dan Pasal 361 ayat (1) yang menjelaskan mengenai tahapan penyusunan Renja Perubahan, termasuk penyusunan rancangan perubahan Renja dan penyajian rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat di bidang ketenagakerjaan yang berorientasi pada hasil yang akan di capai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Isu ketenagakerjaan khususnya penanggulangan pengangguran yang dihadapi Kota Bandar Lampung merupakan isu strategis yang harus mendapat perhatian. Keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, kemampuan dan keterampilan angkatan kerja terdidik pada

umumnya tidak sesuai dengan kebutuhan kerja yang tersedia. Sementara setiap tahun terdapat penambahan jumlah angkatan kerja dari lulusan sekolah dan siap masuk pasar kerja. Kesemuanya itu menyebabkan angka pengangguran semakin meningkat setiap tahun dengan berbagai dampak sosial yang ditimbulkannya. Menghadapi masalah tersebut maka diperlukan kebijakan dalam usaha memperluas kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja secara menyeluruh dan terpadu sebagai upaya Penanggulangan Pengangguran.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia menjadi salah satu upaya dalam perluasan kesempatan kerja karena kualitas sumber daya manusia menduduki peran sangat penting dalam persaingan untuk memasuki pasar kerja. Melimpahnya jumlah tenaga kerja dengan kualitas yang mendukung diharapkan menjadi faktor produksi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan ketrampilan yang dapat meningkatkan daya saing, efisiensi dan produktivitas tenaga kerja.

Masalah kesejahteraan pekerja merupakan agenda lainnya yang harus mendapat perhatian. Kesejahteraan pekerja terkait erat dengan tingkat upah pekerja, rendahnya tingkat upah pekerja berdampak negatif terhadap upaya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja sehingga dapat menghambat upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif diperusahaan dan peningkatan daya saing perusahaan.

Terkait dengan masalah ketenagakerjaan tersebut diatas maka Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung melakukan berbagai upaya dan kebijakan serta program yang diarahkan berdampak langsung maupun tidak langung terhadap penciptaan kesempatan kerja dan kesejahteraan pekerja. Implementasi dari upaya dimaksud harus terlebih dahulu tersusun dalam dokumen perencanaan sebagai satu kesatuan termasuk didalamnya adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusun Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapoatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung;
10. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Tenaga kerja Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan antar sektor pembangunan dan mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Selain itu Penyusunan Renja Perubahan Dinas Tenaga kerja Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini bertujuan antar lain sebagai berikut :

1. Terwujudnya sinkronisasi dan sinergi Pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pemerintahan Pusat.
2. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
3. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BE

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan / Tahun 2025.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun sebelumnya.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKA DAERAH.

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas tenaga Kerja Kota Bandar Lampung adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggunjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung selama Tahun 2025.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel TC 30 berikut :

TABEL TC 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA

KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN				Proyeksi		Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja	-	1	Persentase Informasi Data Ketenagakerjaan yang disusun Berbasis Sistem Informasi	50	100	100	100	0	0	0	0	100	100	Berpluktuasi
			2	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja	27,5	29,25	30,75	31,25	27,92	27,44	32,94	33,18	31,75	31,75	Berpluktuasi
			3	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Bebasis Kompetensi	20	50	75	75	0	100	80	0	80,00	80,00	Berpluktuasi
			4	Rasio Penduduk Yang Bekerja	91,2	93,12	92,55	94,81	91,15	92,09	92,57	92,56	95,70	95,70	Berpluktuasi
			5	Rasio Kesempatan Kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	91,21	92,57	93,02	93,97	91,15	92,09	92,57	92,56	94,42	94,42	Berpluktuasi
			6	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	2,84	3,41	3,52	4,79	5,5	41,35	43,92	54,12	4,79	4,79	Berpluktuasi
			7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70	72,35	74,9	76,62	67,18	66,7	66,05	66,25	78,26	79,86	Berpluktuasi
			8	Persentase sengketa pengusaha - pekerja per tahun	55,73	55,21	54,68	52,32	8,27	0,74	1,15	0,33	51,55	51,55	Berpluktuasi

			9	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	39,58	42	49,02	52,63	39,47	52,63	52,94	64,52	53,92	53,92	Berpluktuasi
			10	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan.	50	62	75	79	1,7	5,33	1,62	0,77	82	85	Berpluktuasi

Untuk hasil Realisasi Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, meliputi 4 (empat) program yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Tahun 2025 dengan target anggaran sebesar Rp. 4.878.748.492,- pada triwulan II (dua) Tahun 2025 terrealisasi sebesar Rp. 2.031.902.344,- atau 41,65%.
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

   Tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 472.297.153,- pada triwulan II (dua) belum ada realisasi atau realisasi masih 0 %
3. Program Penempatan Tenaga Kerja

   Tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 29.979.471,- pada triwulan II (dua) belum ada realisasi atau realisasi masih 0 %
4. Program Hubungan Industrial

   Tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 191.234.112,- pada triwulan II (dua) belum ada realisasi atau realisasi masih 0 %

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel E-81 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

A. Program Kegiatan Setelah Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 terdapat :

- 3 (tiga) Program Utama terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan.
- 1 (satu) Program Penunjang, yang terdiri dari 6 (enam) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan.

4 (empat) Program sebagai berikut :

I. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan dengan Anggaran Murni sama dengan pada Anggaran Perubahan sebesar Rp. 472.297.153;

II. Program Penempatan Tenaga Kerja.

Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (1) Sub Kegiatan dengan Anggaran Murni sebesar Rp. 81.480.298,00 dan Anggaran Perubahan sebesar Rp. 29.979.471;

III. Program Hubungan Industrial

Program Hubungan Industrial memiliki 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan Anggaran Murni sama

dengan pada Anggaran Perubahan sebesar Rp. 191.234.112,-

IV. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 6 (enam) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan dengan Anggaran Murni sebesar Rp. 5.085.341.892,00 dan Anggaran Perubahan sebesar Rp. 4.917.148.492,-

Secara rinci perubahan program kegiatan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berisi penyesuaian terhadap Renja yang telah disusun sebelumnya dengan mempertimbangkan perkembangan situasi, kebutuhan masyarakat serta dinamika pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan. Renja Perubahan ini juga memuat uraian hasil evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah terrealisasi sampai dengan triwulan II di tahun 2025. Output Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Formulir E-81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG

PERIODE PELAKSANAAN s.d. TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (N-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024) YANG DIEVALUASI (N-3) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2023 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14÷8)		17 = (16/7)*100		18
	Meningkatnya penyelenggaraan bidang urusan tenaga kerja dan transmigrasi	**2**					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**33.873.866.572,76**		**4.721.097.723,00**		**5.572.259.228,00**		**964.831.782,00**		**1.067.070.562,00**		-		-		**2.031.902.344,00**		**36,46**		**6.753.000.067,00**		**19,94**	
		2	**07**				**TENAGA KERJA**				**33.873.866.572,76**		**4.721.097.723,00**		**5.572.259.228,00**		**964.831.782,00**		**1.067.070.562,00**		-		-		**2.031.902.344,00**		**36,46**		**6.753.000.067,00**		**19,94**	
		2	**07**				**Dinas Tenaga Kerja**				**33.873.866.572,76**		**4.721.097.723,00**		**5.572.259.228,00**		**964.831.782,00**		**1.067.070.562,00**		-		-		**2.031.902.344,00**		**36,46**		**6.753.000.067,00**		**19,94**	
		2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**PERSEN**	**98,00**	**29.461.270.403,05**	**98,00**	**4.529.840.290,00**	**98,00**	**4.878.748.492,00**		**964.831.782,00**		**1.067.070.562,00**		-		-		**2.031.902.344,00**	**50,00**	**41,65**	**41,86**	**6.561.742.634,00**	**42,71**	**22,27**	**Dinas Tenaga Kerja**
		2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**98,00**	**163.375.000,00**	**98,00**	**91.172.161,00**	**98,00**	**26.626.619,00**		-		-		-		-	**50,00**	-	**50,00**	-	**148,00**	**91.172.161,00**	**151,02**	**55,81**	
		2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Disnaker	Dokumen	12,00	163.375.000,00	2,00	91.172.161,00		26.626.619,00		-		-		-		-		-		-		91.172.161,00		55,81
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12,00				2,00		0,50		**0,50**						**1,00**		50,00		1,00		8,33	
		2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100,00**	**24.275.557.715,05**	**100,00**	**3.527.212.708,00**	**100,00**	**4.180.494.053,00**		**854.431.782,00**		**962.670.562,00**		-		-	**50,00**	**1.817.102.344,00**	**50,00**	**43,47**	**49,29**	**5.344.315.052,00**	**49,29**	**22,02**	
		2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Disnaker yang Tersedia	Kali	84,00	23.339.718.730,05	14,00	3.409.097.723,00		4.042.376.823,00		854.431.782,00		933.150.562,00						1.787.582.344,00		44,22		5.196.680.067,00		22,27
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	36,00				36,00		36,00		36,00				24,00		66,67		24,00		66,67	
		2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja yang Terlaksana baik	Bulan	72,00	771.311.000,00	12,00	66.480.000,00		115.253.540,00		-		29.520.000,00						29.520.000,00		25,61		96.000.000,00		12,45
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4,00				1,00		0,25		0,25				0,50		50,00		0,50		12,50	
		2	07	01	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				164.527.985,00		51.634.985,00		22.863.690,00		-		-						-		-		51.634.985,00		31,38
												1,00		1,00		0,25		0,25													
		2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**1.478.666.388,00**	**98,00**	**274.514.221,00**	**98,00**	**185.610.713,00**		-		-		-		-	-	-	-	-	-	**274.514.221,00**	-	**18,56**	
		2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	6,00	61.182.185,00	1,00	9.998.934,00		9.681.966,00		-								-		-		9.998.934,00		16,34
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		0,25		0,25				0,50		50,00		0,50		10,00	

NO	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (N-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024) YANG DIEVALUASI (N-3) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2023 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14+8)		17 = (16/7)*100		18	
1		2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor ya	Bulan	72,00	303.854.213,00	12,00	58.499.365,00		61.935.681,00		-							[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	58.499.365,00	[redacted]	19,25	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		0,25		0,25				0,50		50,00		0,50		10,00			
		2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	72,00	92.642.490,00	12,00	12.998.414,00		9.984.410,00		-							[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	12.998.414,00	[redacted]	14,03	
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		0,25		0,25				0,50		50,00		0,50		10,00			
		2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Bulan	72,00	59.770.000,00	12,00	18.000.000,00		18.000.000,00		-							[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	18.000.000,00	[redacted]	30,12	
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4,00				1,00		0,25		0,25				0,50		50,00		0,50		12,50			
		2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	72,00	324.413.500,00	12,00	57.999.942,00		55.674.110,00		-							[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	57.999.942,00	[redacted]	17,88	
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		0,25		0,25				0,50		50,00		0,50		10,00			
		2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang	Bulan	72,00	50.340.000,00		4.860.000,00		4.860.000,00		-							[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	4.860.000,00	[redacted]	9,65	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5,00				1,00		0,25		0,25				0,50		50,00		0,50		10,00			
		2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100,00	123.215.000,00	97,18	19.000.000,00		19.000.000,00		-							[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	19.000.000,00	[redacted]	15,42	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4,00				1,00		0,25		0,25				0,50		50,00		0,50		12,50			
		2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	463.249.000,00	64,18	93.157.566,00		6.474.546,00		-							[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	93.157.566,00	[redacted]	20,11	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4,00				1,00		0,25		0,25				0,50		50,00		0,50		12,50			
		2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**895.461.300,00**	**12,82**	**178.311.200,00**	**98,00**	**10.807.107,00**		-		-		-		-	-	-	-	-	**12,82**	**178.311.200,00**	**13,08**	**19,91**	
		2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Meubelair Kantor	Persen	100,00	306.401.300,00		98.445.000,00		-		-						-	[redacted]	-	[redacted]	#DIV/0!	[redacted]	98.445.000,00	[redacted]	32,13	
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	47,00				7,00		2,00		2,00				4,00		57,14		4,00		8,51			
		2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan Kantor	Persen	100,00	504.030.000,00		68.900.000,00		-		-						-	[redacted]	-	[redacted]	#DIV/0!	[redacted]	68.900.000,00	[redacted]	13,67	
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9,00				1,00		0,25		0,25				0,50		50,00		0,50		5,56			
		2	07	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	6,00	85.030.000,00	1,00	10.966.200,00		10.807.107,00		-							[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	10.966.200,00	[redacted]	12,90	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	123,00				20,00		5,00		5,00				10,00		50,00		10,00		8,13			
		2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**1.791.750.000,00**	**12,00**	**332.040.000,00**	**100,00**	**314.640.000,00**		**72.000.000,00**		**72.000.000,00**		-		-	**50,00**	**144.000.000,00**	**50,00**	**45,77**	**50,00**	**476.040.000,00**	**50,00**	**26,57**	
		2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	72,00	190.000.000,00	12,00	20.040.000,00		26.640.000,00		-							[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	20.040.000,00	[redacted]	10,55	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Laporan	4,00				1,00		0,25		0,25				0,50		50,00		0,50		12,50			
		2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	72,00	1.601.750.000,00		312.000.000,00		288.000.000,00		72.000.000,00		72.000.000,00					[redacted]	144.000.000,00	[redacted]	50,00	[redacted]	456.000.000,00	[redacted]	28,47	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4,00		12,00		1,00		0,25		0,25				0,50		50,00		0,50		12,50			
		2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**856.460.000,00**	**12,00**	**126.590.000,00**	**98,00**	**160.570.000,00**		**38.400.000,00**		**32.400.000,00**		-		-	**50,00**	**70.800.000,00**	**51,02**	**44,09**	**62,00**	**197.390.000,00**	**63,27**	**23,05**	
		2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1,00	245.000.000,00	1,00	37.020.000,00		48.070.000,00		14.400.000,00		12.000.000,00					[redacted]	26.400.000,00	[redacted]	54,92	[redacted]	63.420.000,00	[redacted]	25,89	
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00				1,00		0,25						0,25		25,00		0,25		25,00			

NO	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (N-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024) YANG DIEVALUASI (N-3) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2023 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14+8)		17 = (16/7)*100		18
		2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	1,00	522.250.000,00	7,00	73.190.000,00		96.120.000,00		24.000.000,00		20.400.000,00						44.400.000,00		46,19		117.590.000,00		22,52	
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7,00				7,00		2,00		2,00						4,00		57,14		4,00		57,14		
		2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah waktu pemeliharaan Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	89.210.000,00	12,00	16.380.000,00		16.380.000,00		-								-		-		16.380.000,00		18,36	
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	27,00				27,00		6,00		6,00						12,00		44,44		12,00		44,44		
																									Rata-Rata Capaian Kinerja		50,00		41,65		42,71		22,27
																									Predikat Kinerja		SR		SR		SR		SR
		2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**PERSENTASE INFORMASI DATA KETENAGAKERJAAN YANG DISUSUN**	**PERSEN**	**100,00**	**430.150.475,00**		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Penyedian informasi ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung**	**Persen**	**100,00**	**430.150.475,00**		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Penyusunan data informasi ketenagakerjaan melalui penggunaan teknologi dan s	Persen	100,00	430.150.475,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan	120,00						-		-		-		-		-		-		-		-	
																									Rata-Rata Capaian Kinerja		-		-		-		-
																									Predikat Kinerja		-		-		-		-
		2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**PROPORSI TENAGA KERJA YANG BERUSAHA SENDIRI DAN PEKERJA BEBAS KELUARGA TERHADAP TOTAL**	**PERSEN**	**31,75**	**1.055.034.336,25**		-	**29,25**	**472.297.153,00**		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
								RESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN	**PERSEN**	**80,00**		**5,00**		**50,00**										-		-		**5,00**		**6,25**		
		2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan**	**Orang**	**240,00**	**640.514.911,25**	-	-	**40,00**	**424.408.789,00**		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelaksanaan peningkatan ketrampilan bagi pencari kerja (perluasan kesempatan kerja/pengurangan pengangguran)	Orang	40,00	540.286.965,00	40,00	-		395.516.200,00												-		-		-		-	
								Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	240,00				40,00										-		-		-		-		
		2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				100.227.946,25														-		-		-		-	
								Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023	Orang	50,00			-	50,00	28.892.589,00								-		-		-		-		
		2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Meningkatnya Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina**	**LPK**	**300,00**	**162.300.425,00**		-	**50,00**	**19.131.134,00**										-		-		-		-		-
		2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Meningkatnya Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina	LPK	40,00	162.300.425,00	50,00	-		19.131.134,00										-		-		-		-	
								Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	300,00				50,00										-		-		-		-		
		2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya**	**Perusahaan**	**50,00**	**252.219.000,00**	**10,00**	-	**15,00**	**28.757.230,00**										-		-		**10,00**		**20,00**		-
		2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah bimbingan konsultansi produktivitas di perusahaan	Perusahaan	25,00	252.219.000,00	10,00	-		28.757.230,00										-		-		-		-	
								Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	107,00				15,00		4,00		4,00						8,00		53,33		8,00		7,48		
																									Rata-Rata Capaian Kinerja		-		-		3,13		-
																									Predikat Kinerja		SR		SR		SR		SR

NO	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (N-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024) YANG DIEVALUASI (N-3) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2023 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14÷8)		17 = (16/7)*100		18
		2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA	PERSEN	95,70	964.180.382,81	91,10	-	93,12	29.979.471,00		-							-	-	-	-	91,10	-	95,19	-	
								RASIO KESEMPATAN KERJA TERHADAP PENDUDUK USIA 15	PERSEN	94,42		91,15		92,57								-		-		91,15		96,54		
								BESARAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG	PERSEN	4,79		5,50		3,41								-		-		5,50		114,82		
								TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)	PERSEN	79,86		67,18		72,35								-		-		67,18		84,12		
		2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Orang	70,00	623.117.882,81	248,00	-	85,00	-		-						-	-	-	-	248,00	-	354,29	-	
		2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				319.628.976,56	248,00					-						-		-		-		-	
								Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	30,00			-	30,00	-							-		-		-		-	
		2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				303.488.906,25						-						-		-		-		-	
								Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	Orang	40,00			-	40,00	-							-		-		-		-	
		2	07	04	2.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatamn) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI dan PMI yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	5,00	341.062.500,00		-		29.979.471,00		-		-					-	-	-	-	-	-	-	
		2	07	04	2.04	01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)				341.062.500,00		-		29.979.471,00		-						-		-		-		-	
								Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Orang	5,00			-	5,00								-		-		-		-	
																								Rata-Rata Capaian Kinerja		-		-		97,67		-
																								Predikat Kinerja		-		-		ST		SR
		2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE SENGKETA PENGUSAHA-PEKERJA	PERSEN	51,55	1.963.230.975,65	8,27	191.257.433,00	55,21	191.234.112,00		-						-	-	-	-	8,27	191.257.433,00	16,04	9,74	
								BESARAN KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA	PERSEN	53,92		39,47		42,00								-		-		39,47		73,20		
								PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK/PP/PKB, LKS, BIPATRIT, STRUKTUR	PERSEN	82,00		1,70		62,00								-		-		1,70		2,07		
		2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah	Pelaksanaan penetapan UMK dan sosialisasi KHL Kota Bandar Lampung.	SK	1,00	1.963.230.975,65	1,00	191.257.433,00	1,00	191.234.112,00		-						-	-	-	-	1,00	191.257.433,00	100,00	9,74	
		2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Pencapaian Standar Upah Minimal Kesejahteraan Pekerja.	Persen	100,00	1.963.230.975,65	12,00	191.257.433,00		191.234.112,00		-						-		-		-	191.257.433,00		9,74	
								Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek	Laporan	72,00				12,00		3,00		3,00				6,00		50,00		6,00		8,33		
																								Rata-Rata Capaian Kinerja		-		-		30,44		9,74	
																								Predikat Kinerja		SR		SR		SR		SR	
																								Rata-Rata Capaian Kinerja		10,00		8,33		34,79		6,40	
																								Predikat Kinerja		SR		SR		SR		SR	

Tabel T-C.29.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN 2024

Nama Perangkat Daerah: DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG **Lembar:.....**

Kode						Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan / Sub Kegiatan *(output)*		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024					Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2025)		
												Target Renja Tahun Lalu (2024)		Realisasi Renja Tahun Lalu (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						3		4		5		6		7		8 = (7/6) *100%	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4) * 100%
						Tolak Ukur	Jenis	Nilai	Sat	Nilai	Sat	Nilai	Sat	Nilai	Sat		Nilai	Sat	Nilai	Sat	
2	**07**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	Absolut	72	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00	12	Bulan	60	Bulan	83,33
2	**07**	**01**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas															
2	07	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kumulatif	72	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00	12	Bulan	60	Bulan	83,33
2	**07**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**														
2	07	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kumulatif	36	Orang / Bulan	36	Orang / Bulan	36	Orang / Bulan	36	Orang / Bulan	100,00	36	Orang / Bulan	36	Orang / Bulan	100,00
2	07	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kumulatif	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	1	Dokumen	4	Dokumen	80,00
2	07	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kumulatif	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	20,00	1	Dokumen	3	Dokumen	75,00
2	**07**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														
2	07	01	2.06	01		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kumulatif	5	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	4	Paket	80,00
2	07	01	2.06	02		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kumulatif	5	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	4	Paket	80,00
2	07	01	2.06	03		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kumulatif	5	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	4	Paket	80,00
2	07	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kumulatif	5	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	4	Paket	80,00
2	07	01	2.06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kumulatif	5	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	4	Paket	80,00
2	07	01	2.06	06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kumulatif	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	Dokumen	80,00
2	07	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kumulatif	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	4	Laporan	80,00
2	07	01	2.06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kumulatif	5	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	4	laporan	80,00
2	**07**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor														
2	07	01	2.07	05		Pengadan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kumulatif	235	Unit	94	Unit	47	Unit	47	Unit	100,00	47	Unit	188	Unit	80,00
2	07	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kumulatif	45	Unit	18	Unit	9	Unit	9	Unit	100,00	9	Unit	36	Unit	80,00

2	07	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kumulatif	615	Unit	246	Unit	123	Unit	123	Unit	100,00	123	Unit	492	Unit	80,00
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**															
2	07	01	2.08	02	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kumulatif	72	Laporan	36	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12	Laporan	60	Laporan	83,33
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kumulatif	72	Laporan	36	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12	Laporan	60	Laporan	83,33
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**															
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kumulatif	5	Unit	2	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	1	Unit	4	Unit	80,00
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kumulatif	35	Unit	14	Unit	7	Unit	7	Unit	100,00	7	Unit	28	Unit	80,00
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kumulatif	135	Unit	52	Unit	27	Unit	27	Unit	100,00	27	Unit	106	Unit	78,52
2	**07**	**02**			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Persentase Informasi Data Ketenagakerjaan yang disusun Berbasis Sistem Informasi**															
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Penyediaan informasi ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung															
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Kumulatif	120	Perusahaan	0	Perusahaan	0	Perusahaan	0	Perusahaan	0%	0	Perusahaan	0	Perusahaan	0,00
2	**07**	**03**			**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja**															
						Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Bebasis Kompetensi															
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri**															
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kumulatif	240	Orang	40	Orang	40	Orang	32	Orang	80,00	40	Orang	112	Orang	46,67
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kumulatif	45	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	0,00	8	Lembaga	8	Lembaga	17,78
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Meningkatnya Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina**															
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Kumulatif	300	Lembaga	0	Lembaga	50	Lembaga	0	Lembaga	0,00	50	Lembaga	50	Lembaga	16,67
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya**															
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Kumulatif	107	Perusahaan	0	Perusahaan	10	Perusahaan	0	Perusahaan	0,00	12	Perusahaan	12	Perusahaan	11,21
						Rasio Penduduk Yang Bekerja		95,70	Persen										94,81	Persen	99,07
						Rasio Kesempatan Kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas		94,42	Persen										93,97	Persen	99,52
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		4,79	Persen										4,79	Persen	100,00

						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		79,86	Persen											76,62	Persen	95,94
2	07	04	2.01		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**																	
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		400	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	100	Orang	100	Orang	25,00
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD		135	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	30	Orang	30	Orang	22,22
2	07	04	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri/luar negeri.																
2	07	04	2.03	03	Job fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Kumulatif	1891	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	272	Orang	272	Orang	14,38
2	07	04	2.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**																	
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kumulatif	23	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	5	Orang	5	Orang	21,74
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	Persentase sengketa pengusaha - pekerja per tahun																
2	07	05	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Pelaksanaan penetapan UMK dan sosialisasi KHL Kota Bandar Lampung.																
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kumulatif	72	Laporan	36	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	60	Laporan	83,33%
2	07	05	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan**	Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan.																
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kumulatif	218	Perkara	56	Perkara	31	Perkara	31	Perkara	100%	31	Perkara	118	Perkara	54,13%
3	32	04			**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**	Cakupan masyarakat di wilayah kumuh yang mendapatkan pemahaman transmigrasi dibandingkan total wilayah kumuh																
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman.																
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	Kumulatif	240	Kepala Keluarga	0	Kepala Keluarga	40	Kepala Keluarga	0	Kepala Keluarga	0%	0	Kepala Keluarga	0	Kepala Keluarga	0,00%

TABEL 3.3
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)						KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	utang	usulan		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						DINAS TENAGA KERJA									5.595.097.723,00						
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									5.595.097.723,00						
	2	07				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									5.595.097.723,00	5.830.376.823,00	5.610.659.228,00	38.400.000,00			
40	2	07	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi		98.00 %		98.00 %		98%	5.055.097.723,00	5.085.341.892,00	4.917.148.492,00				
	2	07	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		100.00 %		100.00 %		98%	80.000.000,00	**74.126.619,00**	**26.626.619,00**				
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	80.000.000,00	74.126.619,00	26.626.619,00				DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib** **Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**		-		-		**100%**	**3.825.577.723,00**	**4.183.494.053,00**	**4.180.494.053,00**				
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		36 Orang/bulan		36 Orang/bulan		36 Orang/bulan	3.759.097.723,00	4.042.376.823,00	4.065.240.513,00				DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1 dokumen	66.480.000,00	118.253.540,00	115.253.540,00				DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD						98%	465.210.000,00	257.950.243,00	**224.010.713,00**				
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket		1 paket	30.000.000,00	9.681.966,00	9.681.966,00				DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket		1 paket	80.000.000,00	67.737.272,00	81.135.681,00				DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket		1 paket	50.000.000,00	9.984.410,00	9.984.410,00				DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket		1 paket	35.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00				DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket		1 paket	75.000.000,00	55.674.110,00	74.874.110,00				DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen		1 Dokumen		1 dokumen	12.000.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00				DINAS TENAGA KERJA

	2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	40.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00				DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	143.210.000,00	73.012.485,00	6.474.546,00				DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		98.00 %		98.00 %		98%	152.000.000,00	**132.960.977,00**	**10.807.107,00**				
	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		47 Unit		47 Unit		7 Unit	47.000.000,00	0,00	0,00				DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		9 Unit		9 Unit		1 Unit	88.000.000,00	122.153.870,00	0,00				DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		123 Unit		123 Unit		20 Unit	17.000.000,00	10.807.107,00	10.807.107,00				DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		-		-		100%	396.400.000,00	**314.640.000,00**	**314.640.000,00**				
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		-		-		1 Laporan	60.400.000,00	26.640.000,00	26.640.000,00				DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12.00 Laporan		12.00 Laporan		1 Laporan	336.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00				DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Inventaris Kantor yang Terpelihara Umum Kantor yang disediakan		12 Bulan		12 Bulan		98%	135.910.000,00	**122.170.000,00**	**160.570.000,00**				
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1.00 Unit		1.00 Unit		1 Unit	37.020.000,00	33.670.000,00	48.070.000,00				DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7.00 Unit		7.00 Unit		7 Unit	73.190.000,00	72.120.000,00	96.120.000,00				DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		27.00 Unit		27.00 Unit		27 Unit	25.700.000,00	16.380.000,00	16.380.000,00				DINAS TENAGA KERJA
41	2	07	03			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja		-		-		50%	260.000.000,00	**472.297.153,00**	**472.297.153,00**				
	2	07	03	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri		-		-		40 orang	195.000.000,00	**424.408.789,00**	**424.408.789,00**				
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		40 Orang		40 Orang		40 orang	160.000.000,00	395.516.200,00	395.516.200,00				DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		10 Lembaga		10 Lembaga		50 orang	35.000.000,00	28.892.589,00	28.892.589,00				DINAS TENAGA KERJA

	2	07	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**		Meningkatnya jumlah lembaga pelatihan kerja (LPK) yang dibina		-		-		50 LPK	30.000.000,00	**19.131.134,00**	**19.131.134,00**				
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		50 Lembaga		50 Lembaga		50 Lembaga	30.000.000,00	19.131.134,00	19.131.134,00				DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.04		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**		Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya		20 Perusahaan		20 Perusahaan		15 Perusahaan	35.000.000,00	**28.757.230,00**	**28.757.230,00**				
	2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas		20 Perusahaan		20 Perusahaan		15 Perusahaan	35.000.000,00	28.757.230,00	28.757.230,00				DINAS TENAGA KERJA
42	**2**	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Rasio penduduk yang bekerja Rasio Kesempatan Kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas		78,26 Persen 4,79 Persen 95,7 Persen 94.42 %		78,26 Persen 4,79 Persen 95,7 Persen 94.42 %		72,35%	70.000.000,00	**81.480.298,00**	29.979.471,00				
	2	07	04	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan didalam negeri/luar negeri		75orang		75orang		_	35.000.000,00	0,00	0,00				
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja						_	35.000.000,00	0,00	0,00				DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah CPMI dan PMI yang mendapatkan peningkatkan kompetensi		-		-		0	35.000.000,00	**29.979.471,00**	**29.979.471,00**				
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		7 Orang		7 Orang		5 orang	35.000.000,00	29.979.471,00	29.979.471,00				DINAS TENAGA KERJA
43	2	07	05			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan. Persentase sengketa pengusaha - pekerja per tahun		52.32 % 52.63 % 79 %		52.32 % 52.63 % 79 %		42% 62% 55,21%	210.000.000,00	**191.257.480,00**	**191.234.112,00**				
	2	07	05	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Pelaksanaan penetapan UMK dan sosialisasi KHL Kota Bandar Lampung		1 SK		1 SK		1 SK	210.000.000,00	**191.257.480,00**	**191.234.112,00**				
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan	210.000.000,00	191.257.480,00	191.234.112,00				DINAS TENAGA KERJA

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	√			
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	√			
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung,

Dra. MARYAMAH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670620 199303 2 005

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung

RINI PURNAMAWATY.S.E.M. Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700218 199303 2 002

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si**	
	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	**RENI MARITA SUDEMI, S.H.,M.H**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Pengolahan data dan informasi	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan	√			
4.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran Walikota	√			
5.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah	√			
6.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan		√	Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung,

Dra. MARYAMAH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670620 199303 2 005

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung

DINI PUSPITAWATY.S.E.M. Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19700218 199303 2 002

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si**	
	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	**RENI MARITA SUDEMI, S.H.,M.H**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN VALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Telah selesai
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Telah Sesuai

Bandar Lampung, Juli 2025

	Diverifikasi : Juli 2025	Tanda Tangan
1	**Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si**	
	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	**RENI MARITA SUDEMI, S.H.,M.H**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung

PEMERINTAH KOTA BAPPERIDA BANDAR LAMPUNG

[illegible]NAMAWATY.S.E.M. Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Landasan Hukum I-2

1.3. Maksud dan Tujuan I-5

1.4. Sistematika Penulisan I-6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan/Tahun 2025 ..... II-7

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kenja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung tahun 2023 disusun sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan/Tahun 2025

Formulir 2.1

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

LAMPIRAN 11
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616/IV.01/HK/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusenan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Bappeda yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 tahun 2025 tentang Perubahan Renja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat Pagu Anggaran Program dan Kegiatan, Perubahan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Penambahan Kegiatan Baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak di jadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya perubahan Renja tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada Dokumen Perencanaan Tahunan di tingkat Perangkat Daerah;

b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Taliun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57)

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke a menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jan ka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintali Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);
16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 12);
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);
20. Peraturan Walt Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan Perubahan Program dan Kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD tahun 2025, yang otomatis akan merubah targat kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam merumuskan Perubahan Alokasi Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025.
b. Menjadi Pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD tahun 2025
c. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam Rencana Operasional
d. Memelihara Konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan Tahun 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra OPD.

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam merumuskan Perubahan Alokasi Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025, serta menjadi Pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD tahun 2025

Evaluasi terhadap Perubahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan urusan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2025 yaitu Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas PPPA sampai dengan 30 Maret 2025 adalah sebesar Rp.923.067.272,00 atau 25.00 persen dari dana yang tersedia dalam DPA total sebesar Rp. 9.302.803.913,00 dapat dijabarkan sebagai berikut tabel E.81, sebagai berikut :

Formulir E. 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, dengan Target Kinerja :

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2021 S/D 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) s.d TRIWULAN IV)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN IV TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14+8)		17 = (16/7)*100		18
		2	08				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				45,462,250,721.23		17,870,860,235.50		9,302,083,913.00		923,067,272.00		-		-		-		923,067,272.00		9.92			18,793,927,507.50		41.34	
		2	08				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak				45,462,250,721.23		17,870,860,235.50		9,302,083,913.00		923,067,272.00		-		-		-		923,067,272.00		9.92			18,793,927,507.50		41.34	
	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN URUSAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PERSEN	98.00	31,122,614,954.99	86.11	12,704,360,658.00	98.00	4,803,426,275.00	25.00	896,719,372.00		-		-		-	25.00	896,719,372.00	25.51	18.67	25.00	13,601,080,030.00	25.51	43.70	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
		2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100.00	408,114,768.75	99.99	123,522,320.00	100.00	139,249,817.00	25.00	12,446,000.00		-		-		-	25.00	12,446,000.00	25.00	8.94	70.00	135,968,320.00	70.00	33.32	
		2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Dinas PPPA	Dokumen	5.00	204,057,384.38	5.00	30,000,000.00															5.00	30,000,000.00	100.00	14.70	
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	25.00																					
		2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Dinas PPPA	Dokumen	25.00	204,057,384.37		93,522,320.00		139,249,817.00		12,446,000.00								12,446,000.00		8.94	-	105,968,320.00	-	51.93	
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	25.00		15.00		5.00		1.00							1.00		20.00		16.00		64.00		
		2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100.00	26,542,466,441.14	93.00	11,329,821,097.00	100.00	3,730,882,431.00	25.00	797,723,092.00		-		-		-	25.00	797,723,092.00	25.00	21.38	25.00	12,127,544,189.00	25.00	45.69	
		2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Tersedia	Kali	14.00	25,327,903,285.51	14.00	10,865,824,997.00		3,615,423,913.00		775,744,592.00								775,744,592.00		21.46	14.00	11,641,569,589.00	100.00	45.96	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	40.00		28.00		32.00		25.00							-		-		-		-		
		2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas PPPA yang Terlaksana	Bulan	12.00	1,037,713,422.50	12.00	330,533,500.00		95,285,673.00		11,480,000.00								11,480,000.00		12.05	12.00	342,013,500.00	100.00	32.96	
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5.00		3.00		1.00		0.25							0.25		25.00		3.25		65.00		
		2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas PPPA	Dokumen	1.00	176,849,733.13	1.00	133,462,600.00		20,172,845.00		10,498,500.00								10,498,500.00		52.04	1.00	143,961,100.00	100.00	81.40	
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5.00		3.00		1.00		0.25							0.25		25.00		3.25		65.00		
		2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persen	100.00	34,728,750.00	100.00	-	100.00	22,880,209.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12.00	34,728,750.00	12.00	-	12.00	22,880,209.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98.00	920,394,745.71	88.77	230,934,358.00	98.00	228,668,937.00	25.00	9,175,000.00		-		-		-	25.00	9,175,000.00	25.51	4.01	25.00	240,109,358.00	25.51	26.09	
		2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	1.00	24,873,234.77	1.00	6,342,150.00		5,492,734.00										-		-	1.00	6,342,150.00	100.00	25.50	
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		3.00		1.00		-							-		-		3.00		60.00		
		2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1.00	144,772,551.68	1.00	59,761,700.00		39,999,589.00										-		-	1.00	59,761,700.00	100.00	41.28	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		3.00		1.00		-							-		-		3.00		60.00		
		2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1.00	47,311,112.68	1.00	14,167,930.00		6,935,851.00										-		-	1.00	14,167,930.00	100.00	29.95	
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5.00		3.00		1.00		-							-		-		3.00		60.00		
		2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12.00	14,284,016.91	12.00	6,537,500.00		4,200,000.00										-		-	12.00	6,537,500.00	100.00	45.77	
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		3.00		1.00		-							-		-		3.00		60.00		
		2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1.00	137,518,692.57	1.00	50,166,790.00		24,999,939.00		3,820,000.00								3,820,000.00		15.28	1.00	53,986,790.00	100.00	39.26	
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5.00		3.00		1.00		0.15							0.15		15.00		3.15		63.00		
		2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1.00	24,486,886.13	1.00	11,100,000.00		4,200,000.00		700,000.00								700,000.00		16.67	1.00	11,800,000.00	100.00	48.19	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5.00		3.00		1.00		0.25							0.25		25.00		3.25		65.00		
		2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100.00	102,028,692.19	100.00	29,722,500.00		15,000,000.00		4,655,000.00								4,655,000.00		31.03	100.00	34,377,500.00	100.00	33.69	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5.00		3.00		1.00		0.25							0.25		25.00		3.25		65.00		
		2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalana Dinas Kantor	Persen	100.00	425,119,558.78	100.00	53,135,788.00		127,840,824.00										-		-	100.00	53,135,788.00	100.00	12.50	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5.00		3.00		1.00		-							-		-		3.00		60.00		
		2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98.00	794,123,320.87	98.00	182,078,383.00	98.00	184,639,928.00	25.00	-		-		-		-	25.00	-	25.51	-	61.50	182,078,383.00	62.76	22.93	
		2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor	Paket	1.00	253,371,252.27	1.00	66,858,383.00		99,649,928.00										-		-	1.00	66,858,383.00	100.00	26.39	
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5.00				1.00									-		-		-		-		
		2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	5.00	204,057,384.38	-	65,995,000.00		84,990,000.00										-		-	-	65,995,000.00	-	32.34	
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5.00				1.00		-							-		-		-		-		

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2021 S/D 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) s.d TRIWULAN IV)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN IV TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
									K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9	10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14+8)		17 = (16/7)*100		18
		2	08	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasara Pendukung Gedung Kantor	Paket	1.00	336,694,684.22	1.00	49,225,000.00											1.00	49,225,000.00	100.00	14.62	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5.00										-		-		-		-	
		2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100.00**	**1,382,488,779.15**	**87.00**	**500,568,500.00**	**100.00**	**248,400,000.00**	**25.00**	**60,325,280.00**		-		-		-	**25.00**	**60,325,280.00**	**25.00**	**24.29**	**25.00**	**560,893,780.00**	**25.00**	**40.57**	
		2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12.00	68,019,128.13	12.00	35,068,500.00		14,400,000.00		3,325,280.00								3,325,280.00		23.09	12.00	38,393,780.00	100.00	56.45	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5.00		3.00		1.00		0.25								0.25		25.00		3.25		65.00		
		2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12.00	1,314,469,651.02	12.00	465,500,000.00		234,000,000.00		57,000,000.00								57,000,000.00		24.36	12.00	522,500,000.00	100.00	39.75	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	5.00		3.00		1.00		0.25								**0.25**		25.00		3.25		65.00		
		2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**1,040,298,149.37**	**85.12**	**337,436,000.00**	**98.00**	**248,704,953.00**	**25.00**	**17,050,000.00**		-		-		-	**25.00**	**17,050,000.00**	**25.51**	**6.86**	**25.00**	**354,486,000.00**	**25.51**	**34.08**	
		2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1.00	226,265,629.71	1.00	110,700,000.00		40,670,000.00		6,600,000.00								6,600,000.00		16.23	1.00	117,300,000.00	100.00	51.84	
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5.00		3.00		1.00		0.25								0.25		25.00		3.25		65.00		
		2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	2.00	303,889,058.72	2.00	122,288,000.00		35,920,000.00		10,450,000.00								10,450,000.00		29.09	2.00	132,738,000.00	100.00	43.68	
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15.00		6.00		1.00		0.25								0.25		25.00		6.25		41.67		
		2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit	1.00	510,143,460.94	1.00	104,448,000.00		172,114,953.00										-		-	1.00	104,448,000.00	100.00	20.47	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	5.00		3.00		1.00		-								-		-		3.00		60.00		
																							Rata-Rata Capaian Kinerja		**25.51**	**18.67**			**25.51**	**43.70**	
																							Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
		2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**IDG (INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER)**	**ANGKA**	**74.00**	**4,420,505,000.00**	**73.50**	**1,645,028,450.00**	**74.00**	**1,009,999,756.00**	**0**	**3,820,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	**3,820,000.00**	-	**0.38**	-	**1,648,848,450.00**	-	**37.30**	
								PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD	**LEMBAGA**	**122.00**		**93.00**		**100.00**		**0**		-		-		-		-		-		-		-		
								PERSENTASE JUMLAH PEREMPUAN YANG MENDAPATKAN KETERAMPILAN	**PERSEN**	**100.00**		**90.63**		**100.00**		**0**		-		-		-		-		-		-		-		
		2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota**	**Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**5.00**	**69,457,500.00**	**3.00**	**57,088,300.00**	**1.00**	**59,999,850.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.00**	**57,088,300.00**	**60.00**	**82.19**	
		2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan	Dokumen	5.00	69,457,500.00	**3.00**	57,088,300.00	**1.00**	59,999,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	57,088,300.00	60.00	82.19	
		2	**08**	**02**	**2.03**		**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga**	**Orang**	**7,200.00**	**4,420,505,000.00**	**4,300.00**	**1,645,028,450.00**	**1,500.00**	**949,999,906.00**	-	**3,820,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	**3,820,000.00**	-	**0.40**	**4,300.00**	**1,648,848,450.00**	**59.72**	**37.30**	
		2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kepasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Orang	100.00	4,420,505,000.00	100.00	1,645,028,450.00		949,999,906.00		3,820,000.00								3,820,000.00		0.40	100.00	1,648,848,450.00	100.00	37.30	
								Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	7,100.00		4,300.00		**1,500.00**		-								-		-		4,300.00		60.56		
																							Rata-Rata Capaian Kinerja		-	**0.38**			-	**58.87**	
																							Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**R**	
		2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**CAKUPAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN**	**PERSEN**	**100.00**	**772,539,185.76**	**100.00**	**828,418,150.00**	**100.00**	**391,146,931.00**	**25.00**	**3,447,900.00**		-		-		-	**25.00**	**3,447,900.00**	**25.00**	**0.88**	**25.00**	**831,866,050.00**	**25.00**	**107.68**	
								PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	**PERSEN**	**100.00**		**60.86**		**100.00**		**25.00**								**25.00**		**25.00**		**25.00**		**25.00**		
		2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Orang**	**260.00**	**1,164,109,269.19**	**52.00**	**288,903,000.00**	**52.00**	**101,500,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**288,903,000.00**	-	**24.82**	
		2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Orang	52.00	602,563,125.00	52.00	246,698,000.00		101,500,000.00	-							-		-		52.00	246,698,000.00	100.00	40.94	
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5.00		3.00		1.00		-								-		-		3.00		60.00		
		2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Orang	50.00	561,546,144.19	50.00	42,205,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50.00	42,205,000.00	100.00	7.52	
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	100.00		20.00		-		-		-		-		-		-		-		20.00		20.00		
		2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**	**Layanan**	**20.00**	**1,118,098,428.12**	**20.00**	**273,105,000.00**	**20.00**	**114,647,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**273,105,000.00**	-	**24.43**	
		2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Kasus	20.00	1,118,098,428.12	20.00	273,105,000.00		114,647,000.00								-		-		20.00	273,105,000.00	100.00	24.43	
								Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	Layanan	100.00		20.00		20.00		-								-		-		20.00		20.00		
		2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkataan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan**	**Tahun**	**1.00**	**2,899,237,812.94**	**1.00**	**266,410,150.00**	**1.00**	**174,999,931.00**	-	**3,447,900.00**	-	-	-	-	-	-	-	**3,447,900.00**	-	**1.97**	**1.00**	**269,858,050.00**	**100.00**	**9.31**	

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2021 S/D 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) s.d TRIWULAN IV)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN IV TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
									K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9	10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14+8)		17 = (16/7)*100		18
		2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Penguatan Kegiatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Orang	100.00	1,192,662,062.94	99.50	73,556,000.00													99.50	73,556,000.00	99.50	6.17	
								Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	100.00																-		-		
		2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Kali	12.00	1,706,575,750.00	12.00	192,854,150.00		174,999,931.00		3,447,900.00							3,447,900.00		1.97		12.00	196,302,050.00	100.00	11.50	
								Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5.00		3.00		1.00										-				3.00		60.00		
																							Rata-Rata Capaian Kinerja		25.00	0.88			25.00	107.68	
																							Predikat Kinerja		SR	SR			SR	ST	
		2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PERSENTASE OPD/LEMBAGA PEMERINTAH YANG MENGIMPLEMENTASIKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER	PERSEN	83.88	4,851,220,993.13	51.67	1,006,915,560.00	67.78	2,562,998,785.00		-		-		-		-		-		-		-	25.84	1,006,915,560.00	30.80	20.76	
		2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	Persen	67.78	4,851,220,993.13	67.78	1,006,915,560.00	67.78	2,562,998,785.00		-		-		-		-		-		-	-	-	33.89	1,006,915,560.00	50.00	20.76	
		2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PUG dan Perencanaan Penganggaran yang Responsi/Gender pada OPD / kecamatan	Persen	77.00	430,715,993.13	77.00	60,298,100.00		39,999,739.00		-		-		-		-		-		-		-	77.00	60,298,100.00	100.00	14.00	
								Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Keseataan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	5.00		3.00		1.00		0.05								0.05		5.00		3.05		61.00		
		2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Mendapatkan Pengetahuan dan Ketrampilan Pengembangan Usaha Ekonomi	Orang	35.00	4,420,505,000.00	35.00	946,617,460.00		2,522,999,046.00		-		-		-		-		-		-		-	35.00	946,617,460.00	100.00	21.41	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Dokumen	5.00		3.00		1.00		0.20								0.20		20.00		3.20		64.00		
																							Rata-Rata Capaian Kinerja		-	-			30.80	20.76	
																							Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
		2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMERINTAH	PERSEN	3.54	479,422,343.75	3.29	125,194,500.00	3.54	49,999,401.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	1.00	-	125,694,500.00	-	26.22	
								PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA SWASTA	PERSEN	63.57		63.37		63.57		-		-		-				-		-		-		-		
								RASIO KDRT YANG TERTANGANI	PERSEN	1.53		1.28		1.53		-		-		-				-		-		-		-		
								PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN	PERSEN	56.31		56.06		56.31		-		-		-				-		-		-		-		
		2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	3.54	479,422,343.75	3.29	125,194,500.00	3.54	49,999,401.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	1.00	1.65	125,694,500.00	46.47	26.22	
								Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Persen	63.57		63.37		63.57		-		-		-				-		-		31.69		49.84		
								Rasio Kdrt yang Tertangani	Persen	1.53		1.28		1.53		-		-		-				-		-		0.64		41.83		
								Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	56.31		56.06		56.31		-		-		-				-		-		28.03		49.78		
		2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak	Persen	85.00	479,422,343.75	85.00	125,194,500.00		49,999,401.00		500,000.00								500,000.00		1.00	85.00	125,694,500.00	100.00	26.22	
								Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	5.00		3.00		1.00		0.25								0.25		25.00		3.25		65.00		
																							Rata-Rata Capaian Kinerja		-	1.00			-	26.22	
																							Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
		2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	KOTA BANDAR LAMPUNG MENJADI KOTA LAYAK ANAK	TINGKAT CAPAIAN	NINDYA	1,533,523,343.75	NINDYA	365,698,420.00	NINDYA	150,000,000.00	-	18,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	18,080,000.00	-	12.05	-	383,778,420.00	100.00	25.03	
								INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)	PERSEN	71.70		73.00		71.70		-		-		-				-		-		-		-		
		2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Madya	1,109,357,312.50	Nindya	359,948,920.00	Nindya	150,000,000.00	-	18,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	18,080,000.00	108.31	12.05	-	378,028,920.00	100.00	34.08	
								Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Persen	71.70		71.70		71.70		-		-		-				-		150.00		-		-		
		2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Nindya	1,109,357,312.50	Nindya	359,948,920.00		150,000,000.00		18,080,000.00							18,080,000.00		12.05	Nindya	378,028,920.00	100.00	34.08	
								Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	5.00		3.00		1.00		0.20								0.20		20.00		3.20		64.00		
		2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak Daerah	Persen	100.00	424,166,031.25	100.00	5,749,500.00															100.00	5,749,500.00	100.00	1.36	
		2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Daerah	Persen	100.00	424,166,031.25	100.00	5,749,500.00													100.00	5,749,500.00	100.00	1.36	
								Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5.00																						
																							Rata-Rata Capaian Kinerja		-	12.05			100.00	25.03	
																							Predikat Kinerja		SR	SR			ST	SR	
		2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	CAKUPAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN	PERSEN	100.00	2,282,424,899.85	100.00	1,195,244,497.50	100.00	334,512,765.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	0.15	-	1,195,744,497.50	-	52.39	
								PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	PERSEN	100.00		100.00		100.00										-		-		-		-		
		2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	Persen	100.00	72,930,375.00	43.40	13,021,500.00															43.40	13,021,500.00	43.40	17.85	
								Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif																									
		2	08	07	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Progarm dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan dan Perkawinan Anak yang Bekerjasama dengan Lembaga Pemerhati Anak Lembaga Pemerhati	Persen	85.00	72,930,375.00	85.00	13,021,500.00													85.00	13,021,500.00	100.00	17.85	
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan	Perangkat Daerah	100.00																						
		2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat	Persen	100.00	2,015,499,727.35	100.00	806,644,700.00	100.00	265,492,765.00		500,000.00		-		-		-		500,000.00	-	0.19	-	807,144,700.00	-	40.05	

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2021 S/D 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) s.d TRIWULAN IV)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN IV TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV									
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14+8)		17 = (16/7)*100		18
		2	08	07	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendamping Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan	Persen	90.00	1,663,344,617.03	90.00	305,427,000.00															90.00	305,427,000.00	100.00	18.36	
								Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	100.00		20.00												20.00		20.00		
		2	08	07	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi PAAR dan Pos Curhat kepada Masyarakat	Persen	85.00	352,155,110.32	85.00	501,217,700.00															85.00	501,217,700.00	100.00	142.33	
								Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	Dokumen	5.00		1.00												1.00		20.00		
		2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	100.00		20.00	239,601,095.00	20.00	149,999,765.00	-	500,000.00							-	500,000.00	-	0.33	20.00	240,101,095.00	20.00		
		2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan	100.00		20.00	221,973,000.00	20.00	115,493,000.00	-	-							-	-	-	-	20.00	221,973,000.00	20.00		
		2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Hak-hak Anak**	**Tahun**	**5.00**	**193,994,797.50**	**1.00**	**213,117,500.00**	**1.00**	**69,020,000.00**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	**1.00**	**213,117,500.00**	**20.00**	**109.86**	
		2	08	07	2.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Teknis Perlindungan Anak dan Perempuan	Bulan	12.00	193,994,797.50	12.00	76,465,000.00			-	-	-	-							12.00	76,465,000.00	100.00	39.42	
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	Dokumen	5.00		1.00												1.00		20.00		
		2	08	07	2.03	0006	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan/men dapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	100.00		100.00	136,652,500.00	100.00	69,020,000.00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	100.00	136,652,500.00	100.00		
																										Rata-Rata Capaian Kinerja		-	0.15			-	52.39	
																										Predikat Kinerja		SR	SR			SR	R	

Bandar Lampung, 09 Maret 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

(Dra. MARYAMAH)

NIP. 19670620 199303 2 005

PERKIRAAN PENCAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2025

Pada Tahun 2025 ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mendapatkan anggaran sebesar Rp. 8.865,071,519,00 yang berasal dari Dana APBD, DAK dan DAU untuk pelaksanaan 7 Program yang terdiri dari 1 Program Penunjang dan 6 Program Pokok. Diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% baik realisasi keuangan maupun pencapaian realisasi fisiknya.

Berikut ini rincian dari 6 Program pokok yang didukung dengan 10 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

   1) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan sebagai berikut :
      a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Sosial dan Ekonomi

      Input : Dana yang tersedia Rp. 59.999.850,00
      Output : Peningkatan Penguataan dan Pengembangan SDM Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
      Outcome : Meningkatnya Partisifasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

   2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Input : Dana yang tersedia Rp.925.643.531,00
Output : Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas
Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Program Perlindungan Perempuan didukung dengan 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, yaitu :

1). Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (DAK).

Input : Dana yang tersedia Rp. 101.500.000,00
Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program & Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2). Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK).

Input : Dana yang tersedia Rp.114.647.000,00
Output : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Outcome : Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi

3). Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Input : Dana yang tersedia Rp. 174.999.931,00
Output : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Outcome : Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga didukung dengan 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, yaitu :

1). Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/ Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Input : Dana yang tersedia Rp. 34.116.885,00
Output : Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Keserataan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia
Outcome : Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota

b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (DAU)

Input : Dana yang tersedia Rp.2.175.239.046,00
Output : Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupten/Kota
Outcome : Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan sistem data Gender dan Anak didukung dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

1). Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.

Input : Dana yang tersedia Rp. 49.999.401,00
Output : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia

Outcome : Tersedianya Data Gender dan Anak di Kabupaten/Kota

5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) didukung dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

1). Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (DAU)

Input : Dana yang tersedia Rp.154.841.816,00
Output : Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media & Dunia Usaha.
Outcome : Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.

6. Program Perlindungan Khusus Anak didukung dengan 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, yaitu :

1). Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut

a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota.

Input : Dana yang tersedia Rp. 149.999.765,00

Output : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Outcome : Tersedianya Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK (DAK)

Input : Dana yang tersedia Rp.115.493.000,00

Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

Outcome : Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut

a. Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (DAK)

Input : Dana yang tersedia Rp.69.020.000,00

Output : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kewenangan Kabupaten / Kota

Outcome : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kewenangan Kabupaten / Kota

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Menurut Peraturan Pemerintah RI No.6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung masuk dalam katagori pelayanan penunjang yang mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender
2. Persentase Jumlah Perempuan yang mendapatkan Keterampilan.
3. Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Terselesaikan.
4. Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Terselesaikan.
5. Tingkat Capaian Kota Layak Anak

Hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 realisasi pelaksanaan program kegiatan APBD dan DAK Kota Bandar Lampung mencapai 27,08 Persen Realisasi pelaksanaan program kegiatan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak jauh dari target pencapaian. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung pada tahun 2025 melaksanakan 7 (Tujuh) program 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub kegiatan seperti yang dijabarkan sebelumnya.

Program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026 hasil pencapaian kinerja dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak akan menjadi tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja yang telah ditentukan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi di bidang pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program prioritas yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun 2021 - 2026. Program Prioritas tersebut selanjutnya diimplementasikan kedalam Rencana Kerja dalam bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan beserta pendanaannya.

Adapun Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2025 terdiri dari 7 (tujuh) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan yang terinci pada tabel 3.1, (terlampir) :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
      c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   h. Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Mebel
   b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemelihara Barang Milik Daeah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

   a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

   a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota(DAK).
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   a. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
    1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
        a. Pelaksanaan Komunikasi. Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
        b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
    1. Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
        a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
    1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
        a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
    1. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
        a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
        b. Koordinasi Pelaksanaan Layanann AMPK

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    a. Peningkatan Kapasitas SDM Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (DAK)

Tabel 3.1 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target, dan Pagu Pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									**8,238,984,913.00**	**9,302,083,913.00**	**9,621,071,519.00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									**8,238,984,913.00**	**9,302,083,913.00**	**9,621,071,519.00**	
	2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									**8,238,984,913.00**	**9,302,083,913.00**	**9,621,071,519.00**	
44	**2**	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**4,301,022,208.00**	**4,803,426,275.00**	**4,739,571,294.00**	
	2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**61,624,902.00**	**139,249,817.00**	**139,249,817.00**	
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	5	5	5	61,624,902.00	139,249,817.00	139,249,817.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD**	**Tersedianya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**3,714,678,528.00**	**3,730,882,431.00**	**3,730,882,431.00**	
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang/bulan	32	32	32	3,600,984,913.00	3,615,423,913.00	3,615,423,913.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	84,313,406.00	95,285,673.00	95,285,673.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	29,380,209.00	20,172,845.00	20,172,845.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**08**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**hasil terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD**	**hasil terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**24,570,000.00**	**22,880,209.00**	**22,880,209.00**	
	2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	12	12	12	24,570,000.00	22,880,209.00	22,880,209.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**168,413,307.00**	**228,668,937.00**	**164,748,525.00**	
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3,655,091.00	5,492,734.00	5,492,734.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	25,398,733.00	39,999,589.00	39,999,589.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6,941,432.00	6,935,851.00	6,935,851.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3,975,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	23,297,426.00	24,999,939.00	24,999,939.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3,900,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	12,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	89,245,625.00	127,840,824.00	63,920,412.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**62,643,383.00**	**184,639,928.00**	**184,639,928.00**	
	2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	29,618,383.00	99,649,928.00	99,649,928.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	33,025,000.00	84,990,000.00	84,990,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**169,500,000.00**	**248,400,000.00**	**248,400,000.00**	
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	13,500,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	156,000,000.00	234,000,000.00	234,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**99,592,088.00**	**248,704,953.00**	**248,770,384.00**	
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	44,430,000.00	40,670,000.00	40,670,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1	1	1	39,270,000.00	35,920,000.00	35,920,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	15,892,088.00	172,114,953.00	172,180,384.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
45	**2**	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)**	**IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)**	**Angka**	**Angka**	**74**	**74**	**74**	**1,534,999,884.00**	**1,009,999,756.00**	**985,643,381.00**	
								Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	**Persentase ARG pada belanja Langsung APBD**	**Lembaga**	**Lembaga**	**122**	**122**	**122**				
								Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	**Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**				
	2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**59,999,905.00**	**59,999,850.00**	**59,999,850.00**	
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	59,999,905.00	59,999,850.00	59,999,850.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga**	**Orang**	**Orang**	**1500**	**1500**	**1500**	**1,474,999,979.00**	**949,999,906.00**	**925,643,531.00**	
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	Orang	1500	1500	1500	1,474,999,979.00	949,999,906.00	925,643,531.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
46	**2**	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan**	**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**294,256,956.00**	**391,146,931.00**	**391,146,931.00**	
								Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**				
	2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Orang**	**Orang**	**52**	**52**	**52**	**101,500,000.00**	**101,500,000.00**	**101,500,000.00**	
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	101,500,000.00	101,500,000.00	101,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**	**Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**	**Layanan**	**Layanan**	**20**	**20**	**20**	**117,757,000.00**	**114,647,000.00**	**114,647,000.00**	
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	Layanan	20	20	20	117,757,000.00	114,647,000.00	114,647,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkataan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan**	**Peningkataan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan**	**Tahun**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**74,999,956.00**	**174,999,931.00**	**174,999,931.00**	
	2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	74,999,956.00	174,999,931.00	174,999,931.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
47	**2**	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**%**	**%**	**83.88**	**83.88**	**83.88**	**1,646,999,722.00**	**2,562,998,785.00**	**2,965,355,931.00**	
	2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**%**	**%**	**83.88**	**83.88**	**83.88**	**1,646,999,722.00**	**2,562,998,785.00**	**2,965,355,931.00**	
	2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	Dokumen	1	1	1	34,999,959.00	39,999,739.00	34,116,885.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1,611,999,763.00	2,522,999,046.00	2,931,239,046.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
48	**2**	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**%**	**%**	**3.54**	**3.54**	**3.54**	**34,998,048.00**	**49,999,401.00**	**49,999,401.00**	
								Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	**Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta**	**%**	**%**	**63.57**	**63.57**	**63.57**				
								Rasio KDRT yang Tertangani	**Rasio KDRT yang Tertangani**	**%**	**%**	**1.53**	**1.53**	**1.53**				
								Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**%**	**%**	**56.31**	**56.31**	**56.31**				

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**%**	**%**	**3.54**	**3.54**	**3.54**	**34,998,048.00**	**49,999,401.00**	**49,999,401.00**	
								Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	**Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta**	**%**	**%**	**63.57**	**63.57**	**63.57**				
								Rasio KDRT yang Tertangani	**Rasio KDRT yang Tertangani**	**%**	**%**	**1.53**	**1.53**	**1.53**				
								Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**%**	**%**	**56.31**	**56.31**	**56.31**				
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	Dokumen	1	1	1	34,998,048.00	49,999,401.00	49,999,401.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
49	**2**	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Tingkat Capaian**	**Tingkat Capaian**	**Nindya**	**Nindya**	**Nindya**	**100,000,000.00**	**150,000,000.00**	**154,841,816.00**	
								Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	**%**	**%**	**71.70**	**71.70**	**71.70**				
	2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Tingkat Capaian**	**Tingkat Capaian**	**Nindya**	**Nindya**	**Nindya**	**100,000,000.00**	**150,000,000.00**	**154,841,816.00**	
								Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	**%**	**%**	**71.70**	**71.70**	**71.70**				
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	Organisasi	1	1	1	100,000,000.00	150,000,000.00	154,841,816.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
50	**2**	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan**	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**326,708,095.00**	**334,512,765.00**	**334,512,765.00**	
								Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	**Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**				
	2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat**	**Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**257,688,095.00**	**265,492,765.00**	**265,492,765.00**	
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	Orang	20	20	20	139,965,095.00	149,999,765.00	149,999,765.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan	Layanan	20	20	20	117,723,000.00	115,493,000.00	115,493,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Hak-hak Anak**	**Terpenuhinya Hak-hak Anak**	**Tahun**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**69,020,000.00**	**69,020,000.00**	**69,020,000.00**	
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	Orang	100	100	100	69,020,000.00	69,020,000.00	69,020,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selain menjadi pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang, dengan demikian akan diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

EVA DWIANA

TABEL 3.1

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									**8,238,984,913.00**	**9,302,083,913.00**	**9,621,071,519.00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									**8,238,984,913.00**	**9,302,083,913.00**	**9,621,071,519.00**	
	2 08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									**8,238,984,913.00**	**9,302,083,913.00**	**9,621,071,519.00**	
44	**2 08 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**4,301,022,208.00**	**4,803,426,275.00**	**4,739,571,294.00**	
	2 08 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**61,624,902.00**	**139,249,817.00**	**139,249,817.00**	
	2 08 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	5	5	5	61,624,902.00	139,249,817.00	139,249,817.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD**	**Tersedianya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**3,714,678,528.00**	**3,730,882,431.00**	**3,730,882,431.00**	
	2 08 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang/bulan	32	32	32	3,600,984,913.00	3,615,423,913.00	3,615,423,913.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	84,313,406.00	95,285,673.00	95,285,673.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	29,380,209.00	20,172,845.00	20,172,845.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**hasil terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD**	**hasil terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**24,570,000.00**	**22,880,209.00**	**22,880,209.00**	
	2 08 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	12	12	12	24,570,000.00	22,880,209.00	22,880,209.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**168,413,307.00**	**228,668,937.00**	**164,748,525.00**	
	2 08 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3,655,091.00	5,492,734.00	5,492,734.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	25,398,733.00	39,999,589.00	39,999,589.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6,941,432.00	6,935,851.00	6,935,851.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3,975,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	23,297,426.00	24,999,939.00	24,999,939.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3,900,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	12,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	89,245,625.00	127,840,824.00	63,920,412.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**62,643,383.00**	**184,639,928.00**	**184,639,928.00**	
	2 08 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	29,618,383.00	99,649,928.00	99,649,928.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	33,025,000.00	84,990,000.00	84,990,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**169,500,000.00**	**248,400,000.00**	**248,400,000.00**	
	2 08 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	13,500,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	156,000,000.00	234,000,000.00	234,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**99,592,088.00**	**248,704,953.00**	**248,770,384.00**	
	2 08 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	44,430,000.00	40,670,000.00	40,670,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1	1	1	39,270,000.00	35,920,000.00	35,920,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	15,892,088.00	172,114,953.00	172,180,384.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
45	**2**	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)**	**IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)**	**Angka**	**Angka**	**74**	**74**	**74**	**1,534,999,884.00**	**1,009,999,756.00**	**985,643,381.00**	
								Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	**Persentase ARG pada belanja Langsung APBD**	**Lembaga**	**Lembaga**	**122**	**122**	**122**				
								Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	**Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**				
	2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**59,999,905.00**	**59,999,850.00**	**59,999,850.00**	
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	59,999,905.00	59,999,850.00	59,999,850.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga**	**Orang**	**Orang**	**1500**	**1500**	**1500**	**1,474,999,979.00**	**949,999,906.00**	**925,643,531.00**	
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	Orang	1500	1500	1500	1,474,999,979.00	949,999,906.00	925,643,531.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
46	**2**	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan**	**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**294,256,956.00**	**391,146,931.00**	**391,146,931.00**	
								Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**				
	2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Orang**	**Orang**	**52**	**52**	**52**	**101,500,000.00**	**101,500,000.00**	**101,500,000.00**	
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	101,500,000.00	101,500,000.00	101,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**	**Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**	**Layanan**	**Layanan**	**20**	**20**	**20**	**117,757,000.00**	**114,647,000.00**	**114,647,000.00**	
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	Layanan	20	20	20	117,757,000.00	114,647,000.00	114,647,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkataan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan**	**Peningkataan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan**	**Tahun**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**74,999,956.00**	**174,999,931.00**	**174,999,931.00**	
	2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	74,999,956.00	174,999,931.00	174,999,931.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
47	**2**	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**%**	**%**	**83.88**	**83.88**	**83.88**	**1,646,999,722.00**	**2,562,998,785.00**	**2,965,355,931.00**	
	2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**%**	**%**	**83.88**	**83.88**	**83.88**	**1,646,999,722.00**	**2,562,998,785.00**	**2,965,355,931.00**	
	2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	Dokumen	1	1	1	34,999,959.00	39,999,739.00	34,116,885.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1,611,999,763.00	2,522,999,046.00	2,931,239,046.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
48	**2**	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**%**	**%**	**3.54**	**3.54**	**3.54**	**34,998,048.00**	**49,999,401.00**	**49,999,401.00**	
								Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	**Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta**	**%**	**%**	**63.57**	**63.57**	**63.57**				
								Rasio KDRT yang Tertangani	**Rasio KDRT yang Tertangani**	**%**	**%**	**1.53**	**1.53**	**1.53**				
								Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**%**	**%**	**56.31**	**56.31**	**56.31**				

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**%**	**%**	**3.54**	**3.54**	**3.54**	**34,998,048.00**	**49,999,401.00**	**49,999,401.00**	
								Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	**Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta**	**%**	**%**	**63.57**	**63.57**	**63.57**				
								Rasio KDRT yang Tertangani	**Rasio KDRT yang Tertangani**	**%**	**%**	**1.53**	**1.53**	**1.53**				
								Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**%**	**%**	**56.31**	**56.31**	**56.31**				
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	Dokumen	1	1	1	34,998,048.00	49,999,401.00	49,999,401.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
49	**2**	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Tingkat Capaian**	**Tingkat Capaian**	**Nindya**	**Nindya**	**Nindya**	**100,000,000.00**	**150,000,000.00**	**154,841,816.00**	
								Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	**%**	**%**	**71.70**	**71.70**	**71.70**				
	2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Tingkat Capaian**	**Tingkat Capaian**	**Nindya**	**Nindya**	**Nindya**	**100,000,000.00**	**150,000,000.00**	**154,841,816.00**	
								Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	**%**	**%**	**71.70**	**71.70**	**71.70**				
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	Organisasi	1	1	1	100,000,000.00	150,000,000.00	154,841,816.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
50	**2**	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan**	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**326,708,095.00**	**334,512,765.00**	**334,512,765.00**	
								Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	**Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**				
	2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat**	**Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**257,688,095.00**	**265,492,765.00**	**265,492,765.00**	
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	Orang	20	20	20	139,965,095.00	149,999,765.00	149,999,765.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan	Layanan	20	20	20	117,723,000.00	115,493,000.00	115,493,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Hak-hak Anak**	**Terpenuhinya Hak-hak Anak**	**Tahun**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**69,020,000.00**	**69,020,000.00**	**69,020,000.00**	
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	Orang	100	100	100	69,020,000.00	69,020,000.00	69,020,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Formulir E. 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG

PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, dengan Target Kinerja :

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2021 S/D 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) s.d TRIWULAN IV)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN IV TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV									
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14÷8)		17 = (16/7)*100		18
		2	08				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				45,462,250,721.23		17,870,860,235.50		9,302,083,913.00		923,067,272.00		-		-		-		923,067,272.00		9.92		18,793,927,507.50		41.34	
		2	08				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak				45,462,250,721.23		17,870,860,235.50		9,302,083,913.00		923,067,272.00		-		-		-		923,067,272.00		9.92		18,793,927,507.50		41.34	
	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN URUSAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PERSEN	98.00	31,122,614,954.99	86.11	12,704,360,658.00	98.00	4,803,426,275.00	25.00	896,719,372.00		-		-		-	25.00	896,719,372.00	25.51	18.67	25.00	13,601,080,030.00	25.51	43.70	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
		2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100.00	408,114,768.75	99.99	123,522,320.00	100.00	139,249,817.00	25.00	12,446,000.00		-		-		-	25.00	12,446,000.00	25.00	8.94	70.00	135,968,320.00	70.00	33.32	
		2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Dinas PPPA	Dokumen	5.00	204,057,384.38	5.00	30,000,000.00															5.00	30,000,000.00	100.00	14.70	
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	25.00																					
		2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Dinas PPPA	Dokumen	25.00	204,057,384.37		93,522,320.00		139,249,817.00		12,446,000.00		-		-		-		12,446,000.00		8.94		105,968,320.00		51.93	
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	25.00		15.00		5.00		1.00						1.00		20.00		16.00		64.00		
		2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100.00	26,542,466,441.14	93.00	11,329,821,097.00	100.00	3,730,882,431.00	25.00	797,723,092.00		-		-		-	25.00	797,723,092.00	25.00	21.38	25.00	12,127,544,189.00	25.00	45.69	
		2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Tersedia	Kali	14.00	25,327,903,285.51	14.00	10,865,824,997.00		3,615,423,913.00		775,744,592.00		-		-		-		775,744,592.00		21.46	14.00	11,641,569,589.00	100.00	45.96	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	40.00		28.00		32.00		25.00										-		
		2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas PPPA yang Terlaksana	Bulan	12.00	1,037,713,422.50	12.00	330,533,500.00		95,285,673.00		11,480,000.00		-		-		-		11,480,000.00		12.05	12.00	342,013,500.00	100.00	32.96	
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5.00		3.00		1.00		0.25						0.25		25.00		3.25		65.00		
		2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas PPPA	Dokumen	1.00	176,849,733.13	1.00	133,462,600.00		20,172,845.00		10,498,500.00		-		-		-		10,498,500.00		52.04	1.00	143,961,100.00	100.00	81.40	
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5.00		3.00		1.00		0.25						0.25		25.00		3.25		65.00		
		2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persen	100.00	34,728,750.00	100.00	-	100.00	22,880,209.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12.00	34,728,750.00	12.00	-	12.00	22,880,209.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98.00	920,394,745.71	88.77	230,934,358.00	98.00	228,668,937.00	25.00	9,175,000.00		-		-		-	25.00	9,175,000.00	25.51	4.01	25.00	240,109,358.00	25.51	26.09	
		2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	1.00	24,873,234.77	1.00	6,342,150.00		5,492,734.00		-		-		-		-		-		-	1.00	6,342,150.00	100.00	25.50	
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		3.00		1.00		-										3.00		60.00		
		2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1.00	144,772,551.68	1.00	59,761,700.00		39,999,589.00		-		-		-		-		-		-	1.00	59,761,700.00	100.00	41.28	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		3.00		1.00		-										3.00		60.00		
		2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1.00	47,311,112.68	1.00	14,167,930.00		6,935,851.00		-		-		-		-		-		-	1.00	14,167,930.00	100.00	29.95	
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5.00		3.00		1.00		-										3.00		60.00		
		2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12.00	14,284,016.91	12.00	6,537,500.00		4,200,000.00		-		-		-		-		-		-	12.00	6,537,500.00	100.00	45.77	
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		3.00		1.00		-										3.00		60.00		
		2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1.00	137,518,692.57	1.00	50,166,790.00		24,999,939.00		3,820,000.00		-		-		-		3,820,000.00		15.28	1.00	53,986,790.00	100.00	39.26	
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5.00		3.00		1.00		0.15						0.15		15.00		3.15		63.00		
		2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1.00	24,486,886.13	1.00	11,100,000.00		4,200,000.00		700,000.00		-		-		-		700,000.00		16.67	1.00	11,800,000.00	100.00	48.19	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5.00		3.00		1.00		0.25						0.25		25.00		3.25		65.00		
		2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100.00	102,028,692.19	100.00	29,722,500.00		15,000,000.00		4,655,000.00		-		-		-		4,655,000.00		31.03	100.00	34,377,500.00	100.00	33.69	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5.00		3.00		1.00		0.25						0.25		25.00		3.25		65.00		
		2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalana Dinas Kantor	Persen	100.00	425,119,558.78	100.00	53,135,788.00		127,840,824.00		-		-		-		-		-		-	100.00	53,135,788.00	100.00	12.50	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5.00		3.00		1.00		-										3.00		60.00		
		2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98.00	794,123,320.87	98.00	182,078,383.00	98.00	184,639,928.00	25.00	-		-		-		-	25.00	-	25.51	-	61.50	182,078,383.00	62.76	22.93	
		2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor	Paket	1.00	253,371,252.27	1.00	66,858,383.00		99,649,928.00		-		-		-		-		-		-	1.00	66,858,383.00	100.00	26.39	
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5.00				1.00		-										-		-		
		2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	5.00	204,057,384.38	-	65,995,000.00		84,990,000.00		-		-		-		-		-		-	-	65,995,000.00	-	32.34	
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5.00				1.00		-										-		-		

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2021 S/D 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) s.d TRIWULAN IV)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN IV TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV									
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14÷8)		17 = (16/7)*100		18
		2	08	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasara Pendukung Gedung Kantor	Paket	1.00	336,694,684.22	1.00	49,225,000.00															1.00	49,225,000.00	100.00	14.62	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5.00																					
		2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100.00**	**1,382,488,779.15**	**87.00**	**500,568,500.00**	**100.00**	**248,400,000.00**	**25.00**	**60,325,280.00**	-	-	-	-	-	-	**25.00**	**60,325,280.00**	**25.00**	**24.29**	**25.00**	**560,893,780.00**	**25.00**	**40.57**	
		2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12.00	68,019,128.13	12.00	35,068,500.00		14,400,000.00		3,325,280.00								3,325,280.00		23.09	12.00	38,393,780.00	100.00	56.45	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5.00		3.00		1.00		0.25							0.25		25.00	3.25		65.00			
		2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12.00	1,314,469,651.02	12.00	465,500,000.00		234,000,000.00		57,000,000.00								57,000,000.00		24.36	12.00	522,500,000.00	100.00	39.75	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	5.00		3.00		1.00		0.25							**0.25**		25.00	3.25		65.00			
		2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**1,040,298,149.37**	**85.12**	**337,436,000.00**	**98.00**	**248,704,953.00**	**25.00**	**17,050,000.00**	-	-	-	-	-	-	**25.00**	**17,050,000.00**	**25.51**	**6.86**	**25.00**	**354,486,000.00**	**25.51**	**34.08**	
		2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1.00	226,265,629.71	1.00	110,700,000.00		40,670,000.00		6,600,000.00								6,600,000.00		16.23	1.00	117,300,000.00	100.00	51.84	
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5.00		3.00		1.00		0.25							0.25		25.00	3.25		65.00			
		2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	2.00	303,889,058.72	2.00	122,288,000.00		35,920,000.00		10,450,000.00								10,450,000.00		29.09	2.00	132,738,000.00	100.00	43.68	
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15.00		6.00		1.00		0.25							0.25		25.00	6.25		41.67			
		2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit	1.00	510,143,460.94	1.00	104,448,000.00		172,114,953.00		-		-		-		-		-	1.00	104,448,000.00	100.00	20.47	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	5.00		3.00		1.00												3.00		60.00			
																							Rata-Rata Capaian Kinerja				**25.51**	**18.67**			**25.51**	**43.70**	
																							Predikat Kinerja				**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
		2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**IDG (INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER)**	**ANGKA**	**74.00**	**4,420,505,000.00**	**73.50**	**1,645,028,450.00**	**74.00**	**1,009,999,756.00**	**0**	**3,820,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	**3,820,000.00**	-	**0.38**	-	**1,648,848,450.00**	-	**37.30**	
								PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD	**LEMBAGA**	**122.00**		**93.00**		**100.00**		**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								PERSENTASE JUMLAH PEREMPUAN YANG MENDAPATKAN KETERAMPILAN	**PERSEN**	**100.00**		**90.63**		**100.00**		**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota**	**Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**5.00**	**69,457,500.00**	**3.00**	**57,088,300.00**	**1.00**	**59,999,850.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.00**	**57,088,300.00**	**60.00**	**82.19**	
		2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan	Dokumen	5.00	69,457,500.00	**3.00**	57,088,300.00	**1.00**	59,999,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	57,088,300.00	60.00	82.19	
		2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga**	**Orang**	**7,200.00**	**4,420,505,000.00**	**4,300.00**	**1,645,028,450.00**	**1,500.00**	**949,999,906.00**	-	**3,820,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	**3,820,000.00**	-	**0.40**	**4,300.00**	**1,648,848,450.00**	**59.72**	**37.30**	
		2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Orang	100.00	4,420,505,000.00	100.00	1,645,028,450.00		949,999,906.00		3,820,000.00								3,820,000.00		0.40	100.00	1,648,848,450.00	100.00	37.30	
								Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	7,100.00		4,300.00		**1,500.00**		-							-		-	4,300.00		60.56			
																							Rata-Rata Capaian Kinerja				-	**0.38**			-	**58.97**	
																							Predikat Kinerja				**SR**	**SR**			**SR**	**R**	
		2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**CAKUPAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN**	**PERSEN**	**100.00**	**772,539,185.76**	**100.00**	**828,418,150.00**	**100.00**	**391,146,931.00**	**25.00**	**3,447,900.00**	-	-	-	-	-	-	**25.00**	**3,447,900.00**	**25.00**	**0.88**	**25.00**	**831,866,050.00**	**25.00**	**107.68**	
								PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	**PERSEN**	**100.00**		**60.86**		**100.00**		**25.00**							**25.00**		**25.00**		**25.00**		**25.00**		
		2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Orang**	**260.00**	**1,164,109,269.19**	**52.00**	**288,903,000.00**	**52.00**	**101,500,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**288,903,000.00**	-	**24.82**	
		2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Orang	52.00	602,563,125.00	52.00	246,698,000.00		101,500,000.00		-								-		-	52.00	246,698,000.00	100.00	40.94	
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5.00		3.00		1.00												3.00		60.00			
		2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Orang	50.00	561,546,144.19	50.00	42,205,000.00															50.00	42,205,000.00	100.00	7.52	
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	100.00		20.00														20.00		20.00			
		2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**	**Layanan**	**20.00**	**1,118,098,428.12**	**20.00**	**273,105,000.00**	**20.00**	**114,647,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**273,105,000.00**	-	**24.43**	
		2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Kasus	20.00	1,118,098,428.12	20.00	273,105,000.00		114,647,000.00		-								-		-	20.00	273,105,000.00	100.00	24.43	
								Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	Layanan	100.00		20.00		20.00												20.00		20.00			
		2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan**	**Tahun**	**1.00**	**2,899,237,812.94**	**1.00**	**266,410,150.00**	**1.00**	**174,999,931.00**	-	**3,447,900.00**	-	-	-	-	-	-	-	**3,447,900.00**	-	**1.97**	**1.00**	**269,858,050.00**	**100.00**	**9.31**	

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2021 S/D 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) s.d TRIWULAN IV)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN IV TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14÷8)		17 = (16/7)*100		18
		2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Penguatan Kegiatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Orang	100.00	1,192,662,062.94	99.50	73,556,000.00															99.50	73,556,000.00	99.50	6.17		
								Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	100.00																-		-				
		2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Kali	12.00	1,706,575,750.00	12.00	192,854,150.00		174,999,931.00	-	3,447,900.00								3,447,900.00		1.97	12.00	196,302,050.00	100.00	11.50		
								Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5.00		3.00		1.00		-								-		-		3.00		60.00		
																								Rata-Rata Capaian Kinerja		25.00	0.88			25.00	107.68	
																								Predikat Kinerja		SR	SR			SR	ST	
		2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PERSENTASE OPD/LEMBAGA PEMERINTAH YANG MENGIMPLEMENTASIKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER	PERSEN	83.88	4,851,220,993.13	51.67	1,006,915,560.00	67.78	2,562,998,785.00														25.84	1,006,915,560.00	30.80	20.76		
		2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	Persen	67.78	4,851,220,993.13	67.78	1,006,915,560.00	67.78	2,562,998,785.00														33.89	1,006,915,560.00	50.00	20.76		
		2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PUG dan Perencanaan Penganggaran yang Responsi/Gender pada OPD / kecamatan	Persen	77.00	430,715,993.13	77.00	60,298,100.00		39,999,739.00	-	-											77.00	60,298,100.00	100.00	14.00		
								Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Keseataan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	5.00		3.00		1.00		0.05								0.05		5.00		3.05		61.00		
		2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Mendapatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pengembangan Usaha Ekonomi	Orang	35.00	4,420,505,000.00	35.00	946,617,460.00		2,522,999,046.00	-												35.00	946,617,460.00	100.00	21.41		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Dokumen	5.00		3.00		1.00		0.20								0.20		20.00		3.20		64.00		
																								Rata-Rata Capaian Kinerja		-	-			30.80	20.76	
																								Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
		2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMERINTAH	PERSEN	3.54	479,422,343.75	3.29	125,194,500.00	3.54	49,999,401.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	1.00	-	125,694,500.00	-	26.22		
								PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA SWASTA	PERSEN	63.57		63.37		63.57		-		-		-		-		-		-		-		-		
								RASIO KDRT YANG TERTANGANI	PERSEN	1.53		1.28		1.53		-		-		-		-		-		-		-		-		
								PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN	PERSEN	56.31		56.06		56.31		-		-		-		-		-		-		-		-		
		2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	3.54	479,422,343.75	3.29	125,194,500.00	3.54	49,999,401.00		500,000.00								500,000.00		1.00	1.65	125,694,500.00	46.47	26.22		
								Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Persen	63.57		63.37		63.57		-		-		-		-		-		-		31.69		49.84		
								Rasio KDRT yang Tertangani	Persen	1.53		1.28		1.53		-		-		-		-		-		-		0.64		41.83		
								Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	56.31		56.06		56.31		-		-		-		-		-		-		28.03		49.78		
		2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak	Persen	85.00	479,422,343.75	85.00	125,194,500.00		49,999,401.00		500,000.00							500,000.00		1.00	85.00	125,694,500.00	100.00	26.22		
								Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	5.00		3.00		1.00		0.25								0.25		25.00		3.25		65.00		
																								Rata-Rata Capaian Kinerja		-	1.00			-	26.22	
																								Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
		2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	KOTA BANDAR LAMPUNG MENJADI KOTA LAYAK ANAK	TINGKAT CAPAIAN	NINDYA	1,533,523,343.75	NINDYA	365,698,420.00	NINDYA	150,000,000.00	-	18,080,000.00	-	-	-	-	-	-	18,080,000.00	-	12.05	-	383,778,420.00	100.00	25.03		
								INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)	PERSEN	71.70		73.00		71.70		-		-		-		-		-		-		-		-		
		2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Madya	1,109,357,312.50	Nindya	359,948,920.00	Nindya	150,000,000.00	-	18,080,000.00	-	-	-	-	-	-	18,080,000.00	108.31	12.05	-	378,028,920.00	100.00	34.08		
								Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Persen	71.70		71.70		71.70		-		-		-		-		-		150.00		-		-		
		2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Nindya	1,109,357,312.50	Nindya	359,948,920.00		150,000,000.00		18,080,000.00							18,080,000.00		12.05	Nindya	378,028,920.00	100.00	34.08		
								Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penemuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	5.00		3.00		1.00		0.20								0.20		20.00		3.20		64.00		
		2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak Daerah	Persen	100.00	424,166,031.25	100.00	5,749,500.00															100.00	5,749,500.00	100.00	1.36		
		2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Daerah	Persen	100.00	424,166,031.25	100.00	5,749,500.00															100.00	5,749,500.00	100.00	1.36		
								Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5.00																						
																								Rata-Rata Capaian Kinerja		-	12.05			100.00	25.03	
																								Predikat Kinerja		SR	SR			ST	SR	
		2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	CAKUPAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN	PERSEN	100.00	2,282,424,899.85	100.00	1,195,244,497.50	100.00	334,512,765.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	0.15	-	1,195,744,497.50	-	52.39		
								PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	PERSEN	100.00		100.00		100.00												-		-		-		
		2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	Persen	100.00	72,930,375.00	43.40	13,021,500.00															43.40	13,021,500.00	43.40	17.85		
								Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif																										
		2	08	07	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan dan Perlawinan Anak yang Bekerjasama dengan Lembaga Pemerhati Anak Lembaga Pemerhati	Persen	85.00	72,930,375.00	85.00	13,021,500.00															85.00	13,021,500.00	100.00	17.85		
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan	Perangkat Daerah	100.00																						
		2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat	Persen	100.00	2,015,499,727.35	100.00	806,644,700.00	100.00	265,492,765.00		500,000.00								500,000.00		0.19	-	807,144,700.00	-	40.05		

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2021 S/D 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) s.d TRIWULAN IV)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN IV TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14÷8)		17 = (16/7)*100		18
		2	08	07	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendamping Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan	Persen	90.00	1,663,344,617.03	90.00	305,427,000.00															90.00	305,427,000.00	100.00	18.36	
								Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	100.00		20.00												20.00		20.00		
		2	08	07	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi PAAR dan Pos Curhat kepada Masyarakat	Persen	85.00	352,155,110.32	85.00	501,217,700.00															85.00	501,217,700.00	100.00	142.33	
								Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	Dokumen	5.00		1.00												1.00		20.00		
		2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	100.00		20.00	239,601,095.00	20.00	149,999,765.00	-	500,000.00								500,000.00	-	0.33	20.00	240,101,095.00	20.00	
		2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan	100.00		20.00	221,973,000.00	20.00	115,493,000.00	-	-								-	-	-	20.00	221,973,000.00	20.00	
		2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Hak-hak Anak**	**Tahun**	**5.00**	**193,994,797.50**	**1.00**	**213,117,500.00**	**1.00**	**69,020,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.00**	**213,117,500.00**	**20.00**	**109.86**	
		2	08	07	2.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Teknis Perlindungan Anak dan Perempuan	Bulan	12.00	193,994,797.50	12.00	76,465,000.00															12.00	76,465,000.00	100.00	39.42	
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	Dokumen	5.00		1.00												1.00		20.00		
		2	08	07	2.03	0006	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih danmen dapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	100.00		100.00	136,652,500.00	100.00	69,020,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	136,652,500.00	100.00		
																								Rata-Rata Capaian Kinerja		-	**0.15**			-	**52.39**	
																								Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**R**	

Bandar Lampung, 09 Maret 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

(Dra. MARYAMAH)
NIP. 19670620 199303 2 005

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selain menjadi pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang, dengan demikian akan diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

EVA DWIANA



PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Sesuai
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	BAB I	**PENDAHULUAN**	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
	BAB II	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**	√			
	2.1	Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah smpai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan / Tahun 2025	√			
		Tabel E .81				
	BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
	BAB V	**PENUTUP**	√			

Bandar Lampung, Juli 2025
Kepala Dinas Pangan

ICHWAN ADJI WIBOWO SPt.,MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720623 200003 1 003

Diverifikasi :		Tanda Tangan
1	**Dr.REIN SUSINDA HESTY S.Sos, M.Si**	
	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
2	**SUHERMAN**	
	Fungsional Perencana Muda	

Mengetahui

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.

Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuain		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Sesuai
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
5.	Dokumen perubahan renja perangkat daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025
Kepala Dinas Pangan

ICHWAN ADJI WIBOWO SPt.,MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720623 200003 1 003

Diverifikasi :		Tanda Tangan
1	**Dr.REIN SUSINDA HESTY S.Sos, M.Si**	
	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
2	**SUHERMAN**	
	Fungsional Perencana Muda	

Mengetahui

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan sudah sesuai berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah telah sesuai dengan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.

Bandar Lampung, Juli 2025
Kepala Dinas Pangan

ICHWAN ADJI WIBOWO SPt.,MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720623 200003 1 003

Diverifikasi :		Tanda Tangan
1	**Dr.REIN SUSINDA HESTY S.Sos, M.Si**	
	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
2	**SUHERMAN**	
	Fungsional Perencana Muda	

Mengetahui

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN 12
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana

Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untukjangkawaktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Perubahan Renja Dinas Pangan Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan Dinas Pangan yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Walikota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : ***"BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT"***

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi:

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa,

dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kota Bandar Lampung yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pangan. Dengan demikian Dinas Pangan menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-4 (empat) dalam RPJMD Tahun 2021–2026 yaitu ***'Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.'*** Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, Dinas Pangan menyusun Perubahan Renja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Pangan Tahun 2021-2026 dan RKPD Perubahan Tahun 2025 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pangan pada Tahun Anggaran 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pangan Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar

Lampung Tahun 2025 -2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 1, nomor register: 01/1622/BL/2025);

13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 3 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Dinas Pangan dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pangan Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD perubahan Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Wali Kota.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Pangan dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025.
3. Sebagai acuan bagi Dinas Pangan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun kedepan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pangan Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan/Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2025.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang tabel rincian perubahan program, kegiatan, target dan pagu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan/Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pangan Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kota Bandar Lampung. Hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kota Bandar Lampung pada Tahun 2025.

Perubahan Renja 2025 ini untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2025

Berikut ini program dan kegiatan tahun 2025 yang teralisasi beserta capaian kinerjanya:

Pada Tabel 2. (E.81) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Juni Tahun 2025 pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Total anggaran Dinas Pangan tahun 2025 adalah Rp. 7.823.803.845,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.376.179.626,00.

Realisasi Capaian keuangan mencapai 43 % (sangat rendah) dengan rincian sebagai berikut:

1)PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Total anggran Rp. 115.726.312,00 realisasi fisik kegiatan telah mencapai 50 % tetap realisasi keuangan Rp. 26.355.250,00 atau sebesar 23%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi fisik telah mencapai 50% selaras dengan realisasi keuangan telah mencapai 50% atau sebesar Rp.1.838.730.351,00 dari Rp.3.701.403.845,00
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Rp.110.430.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 29.880.000,00 atau sebesar 20,97%
3. Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan/Semestaeran SKPD anggaran sebesar Rp.25.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp.0,00 (0%)

c. Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pagu sebesar Rp. 39.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 18.000.000,00 atau dengan persentase sebesar 46 %
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Pagu sebesar Rp. 55.000.000,00 realisasi fisik sebesar 0% realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor, realisasi fisik sebesar 0% keuangan sebesar Rp.14.987.713,00 atau sebesar 0 %

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu Rp.49.999.683,00 realisasi fisik sebesar 50 % realisasi keuangan sebesar Rp.15.441.000,00 atau sebesar 31%.
3. Penyediaan Bahan logistik Kantor, realisasi fisilk sebesar 50% keuangan sebesar Rp.25.000.000,00 atau sebesar 0%.
4. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan dengan pagu Rp.24.999.683,00 realisasi fisik 0%, realisasi keuangan sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0 %.
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Udangan, realisasi realisasi fisik sebesar 0% , realisasi keuangan sebesar Rp.2.500.00,00 atau sebesar `0%.
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu anggaran Rp25.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp.0,00 atau 0%.
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi dengan anggaran Rp.72.323.262,00 realisasi fisik 0% realisasi keuangan Rp. 0,00 atau sebesar 0%

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp. 69.922.261,00 realisasi fisik 0% realisasi keuangan Rp. 0,00 atau sebesar 0%.
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan anggaran Rp.49.500.000,00 realisasi fisik 0% realisasi keuangan Rp. 0,00 atau sebesar 0%.
3. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran Rp.69.663.152,00 realisasi fisik 0% realisasi keuangan 0% atau sebesar 0%.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi 0% dengan Anggran Rp. 18.000.000,00.

2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi 0% dengan Anggran Rp. 17.850.000,00.
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor anggaran Rp. 312.000.000,00 realisasi keuangan Rp. 156.000.000,00 atau sebesar 50%.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan, anggaran sebesar Rp.42.430.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp.13.068.000,00.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan dengan pagu 155.070.000,00 realisasi keuangan Rp. 37.530.000,00 atau 24%.

2)PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 realisasi keuangan Rp. 0,00 atau sebesar 0%.
2. Peningkatan Ketahanan pangan keluarga dengan anggaran Rp.150.000.000,00 realisasi keuangan Rp.0,-atau sebesar 0%
3. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.143.000.000,00 realisasi keuangan Rp.0,00 atau sebesar 0%

4. Pemantauan Harga dan pasokan Pangan dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 realisasi keuangan Rp.0,00 atau sebesar 0%.
5. Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000, realisasi keuangan Rp. 0,00 atau sebesar 0%
6. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dengan anggaran sebesar Rp. 49.999.936,00 realisasi keuangan Rp. 0,00 atau sebesar 0%

b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan pangan Kabupaten/Kota

1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp.1.200.000.000,00 atau dengan realisasi sebesar Rp.1.198.838.275,00 realisasi fisik 100% atau 99,9%**.**
2. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp.200.000.000,00 atau dengan realisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%.

c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun, dengan Anggran Rp.50.000.000,00 realisasi keuangan Rp.0,-atau sebesar 0%
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dengan anggaran Rp.180.000.000,00 realisasi fisik 20 % realisasi keuangan Rp.21.042.000,-atau sebesar 11,69%

3)PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

1.Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, dengan Anggran Rp.79.815.864,- realisasi keuangan Rp.0,-atau sebesar 0%

b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp.107.999.420,00 realisasi fisik 0% , realisasi keuangan Rp.0,- atau sebesar 0%
2. Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi dengan anggaran sebesar Rp.149.999.924,00 realisasi fisik 0% , realisasi keuangan Rp.0,- atau sebesar 0%
3. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kotadengan anggaran sebesar Rp.49.999.880,00 realisasi fisik 0% , realisasi keuangan Rp. 0,- atau sebesar 0%

4) PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

1. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.50.000.000,00 realisasi keuangan Rp. 0,00 atau sebesar 0%, realisasi kegiatan 0%
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu Rp. 99.999.824,00 realisasi keuangan Rp. 0,00 atau sebesar 0%, realisasi kegiatan 0%
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan anggran Rp,49.999.032,00 realisasi keuangan Rp.0,- atau sebesar 0%, realisasi kegiatan 0%
4. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggran Rp. 79.992.164,00 realisasi keuangan Rp. 0,- atau sebesar 0%, realisasi kegiatan 0%

Berikut ini adalah ringkasan realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas pangan Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Realisasi Anggaran Belanja

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI	SISA
		Rp.	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	**7.823.803.845,00**	**3.376.179.626,00**	43,15	Rp 4.447.624.219
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**4.995.805.597,00**	**2.135.436.601,00**	**42,74**	**Rp 2.860.368.996**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**115.726.312,00**	**26.355.250,00**	22,77	Rp 89.371.062
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.726.312,00	26.355.250,00	22,77	Rp 89.371.062
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.836.833.845,00**	1.868.610.351,00	48,70	Rp 1.968.223.494
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.701.403.845,00	1.838.730.351,00	49,68	Rp 1.862.673.494
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	110.430.000,00	29.880.000,00	27,06	Rp 80.550.000
	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan/Semestaeran SKPD	25.000.000,00		0,00	Rp 25.000.000
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	**94.000.000,00**	**18.000.000,00**	19,15	Rp 76.000.000
	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	39.000.000,00	18.000.000,00	46,15	Rp 21.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.000.000,00		0,00	Rp 55.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**214.810.027,00**	**15.441.000,00**	7,19	Rp 199.369.027
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.987.713,00		0,00	Rp 14.987.713
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.999.683,00	15.441.000,00	30,88	Rp 34.558.683
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00		0,00	Rp 25.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.999.369,00		0,00	Rp 24.999.369
	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.500.000,00		0,00	Rp 2.500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00		0,00	Rp 25.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.323.262,00		0,00	Rp 72.323.262
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-			Rp -
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**189.085.413,00**	-	0,00	Rp 189.085.413
	Pengadaan Mebel	69.922.261,00		0,00	Rp 69.922.261

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.500.000,00		0,00	Rp	49.500.000
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	69.663.152,00		0,00	Rp	69.663.152
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**347.850.000,00**	156.000.000,00	44,85	Rp	191.850.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00		0,00	Rp	18.000.000
	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	17.850.000,00		0,00	Rp	17.850.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312.000.000,00	156.000.000,00	50,00	Rp	156.000.000
	Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**197.500.000,00**	51.030.000,00	25,84	Rp	146.470.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.430.000,00	13.500.000,00	31,82	Rp	28.930.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.070.000,00	37.530.000,00	24,20	Rp	117.540.000
2	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**2.252.999.600,00**	**1.240.743.025,00**	55,07	Rp	1.012.256.575
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**542.999.936,00**	-	0,00	Rp	542.999.936
	Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya	50.000.000,00		0,00	Rp	50.000.000
	Peningkatan Ketahanan pangan keluarga	150.000.000,00		0,00	Rp	150.000.000
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	143.000.000,00		0,00	Rp	143.000.000
	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	50.000.000,00		0,00	Rp	50.000.000
	Pemantauan Stok Pangan	-			Rp	-
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	100.000.000,00		0,00	Rp	100.000.000
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	49.999.936,00		0,00	Rp	49.999.936
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota	**1.400.000.000,00**	**1.198.838.275,00**	85,63	Rp	201.161.725
	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	1.200.000.000,00	1.198.838.275,00	99,90	Rp	1.161.725
	Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	200.000.000,00		0,00	Rp	200.000.000
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**309.999.664,00**	**41.904.750,00**	13,52	Rp	268.094.914
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	59.999.872,00	16.790.000,00	27,98	Rp	43.209.872

	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	200.000.000,00	25.114.750,00	12,56	Rp	174.885.250
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per tahun	49.999.792,00		0,00	Rp	49.999.792
3	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**324.999.792,00**	**-**	0,00	Rp	324.999.792
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**74.999.988,00**		0,00	Rp	74.999.988
	Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan,	74.999.988,00		0,00	Rp	74.999.988
	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kab/kota	**249.999.804,00**		0,00	Rp	249.999.804
	Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	50.000.000,00		0,00	Rp	50.000.000
	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	149.999.924,00		0,00	Rp	149.999.924
	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	49.999.880,00		0,00	Rp	49.999.880
4	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**249.998.856,00**		0,00	Rp	249.998.856
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**249.998.856,00**		0,00	Rp	249.998.856
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00		0,00	Rp	50.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	99.999.824,00		0,00	Rp	99.999.824
	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	50.000.000,00		0,00	Rp	50.000.000
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	49.999.032,00		0,00	Rp	49.999.032
	Total 7.823.803.845,00 3.376.179.626,00 43,15 Rp 4.447.624.219					
	Total	**7.823.803.845,00**	**3.376.179.626,00**	43,15	**Rp**	**4.447.624.219**

Pada keseluruhan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 baik yang terlaksana maupun belum terlaksana secara maksimal, memiliki implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD, diantaranya berdampak pada pencapaian target pada program kerja RENSTRA OPD dan Kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai target capaian Renstra.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, untuk menghindari ketidak terlaksananya kegiatan di tahun berikutnya, Dinas Pangan Kota Bandar Lampung akan mengambil strategi dan kebijakan seperti melakukan perencanaan dan penganggaran yang lebih terukur dan reliable, mengupayakan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa setiap awal tahun anggaran.

NO	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH S.D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) sd TRIWULAN I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 sd TRIWULAN I (%).		REALISASI KINRJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=10+11+12+13		15=14/9x100		16=14+8		17=16/7*100		18
								Tolak Ukur		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	% (K)	% (Rp)	
							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
		2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**38.890.971.270,71**		**21.547.078.603**		**8.023.803.845**	-	-	**0,000**	-	-		-		-	**1.165.590.812**		**15**		**22.712.669.415**		**58**	
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan Pangan							**Hasil penlaian akuntabilitas kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)**	**nilai**	**79,1**		**73,25 (BB)**		**80**		-	**0,000**		-		-		-		**77,2**	-	**97,60**			Dinas Pangan
		2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjnag urusan pemerintah bidang pangan**	**persen**	**98**	**31.623.492.122,95**	**98**	**14.889.498.811**	**98**	**4.995.805.597**	**30**	**1.165.590.812**	**0,000**	-		-		-	30	**1.165.590.812**	**30,6122449**	**23,331388**	**30**	16.055.089.623	30,61224	50,77	Dinas Pangan
		2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen Perencanaa, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**%**	**100**	**411.025.686,75**	**100**	**293.366.080**	**100**	**115.726.312**	30	-	0		-		-	30	-	**30**	**0,00**	**30**	293.366.080,0	30	71,37	Dinas Pangan
		2	**09**	**01**	**2.01**	**0001**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Dinas pangan	dokumen	6	411.025.686,75	6	293.366.080		115.726.312		-		-				-		0		**6**	293.366.080,0	100	71,37	Dinas Pangan
0								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	30		18		6		4		0,000		-		-	4		**67**		**22**		73,33333		
		2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen Pelaporan keuanga OPD yang akuntabel**	**%**	**100**	**50.706.884.814,73**	**100**	**11.443.539.131**	**100**	**3.836.833.845**	**20**	**1.050.825.812**	**0,000**	-	-		-		**20**	**1.050.825.812**	**20**	27,387837	**20**	12.494.364.943	20	24,64	Dinas Pangan
		2	**09**	**01**	**2.02**	**0001**	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN Dinas Pangan kota Bandar Lampung	kali	14	49.934.762.050,73	14	**11.151.129.131**		3.701.403.845		1.039.825.812								1.039.825.812		**28,09**		12.190.954.943,0		24,41	Dinas Pangan
								jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	31		27		27		27		0,0		0		0	0		-		**0**		0		
		2	**09**	**01**	**2.02**	**0003**	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Pangan tersedia	dokumen	12	772.122.568,000	12	**262.410.000**		110.430.000		11.000.000								11.000.000		**9,9610613**		273.410.000,0		35,41	Dinas Pangan
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	200		180		40		12		0		-		-	12		**30**		**12**		6		
		2	**09**	**01**	**2.02**	**0007**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	4	65.000.000,0	2	30.000.000,00	1	25.000.000	0,3	-	0,0		-		-	0	-	**30**	**0**	**0**	30.000.000,0	7,5	46,15	Dinas Pangan
		2	**09**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	100	64.652.275,0	30	**30.750.000**	30	**94.000.000**		########## ###	**0,000**		-		-	-	**18.000.000**	-	**19,148936**	**0**	48.750.000,0	0	75,40337908	
		2	**09**	**01**	**2.05**	**0003**	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	4	60.000.000,0	1	30.750.000,00	1	39.000.000	0,3	18.000.000	0,0		-		-	0,3	18.000.000	**30**	**46,153846**	**0**	18.000.000,0	7,5	30	Dinas Pangan
		2	**09**	**01**	**2.05**	**0009**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	8	64.652.275,0	0	0	5	55.000.000	-		0		-		-	-		-	**0**	**0**	-	0	0	Dinas Pangan

NO	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH S.D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) sd TRIWULAN I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 sd TRIWULAN I (%).		REALISASI KINRJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=10+11+12+13		15=14/9x100		16=14+8		17=16/7*100		18
								Tolak Ukur		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	% (K)	% (Rp)	
		2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Dasar operasional OPD**	**%**	**98**	**818.345.152,1**	**98**	**373.107.250**	**98**	**214.810.027**	**30**	-	**0,000**		-		-		30	-	**31**	**0**	**30**	373.107.250,0	30,61	45,59	Dinas Pangan
		2	**09**	**01**	**2.06**	**0001**	Penyediaan Komponen instalasi/penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket Komponen instalasi/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	6	23.539.158,0	3	**28.075.000**	1	14.987.713	-		0,0		-		-		-	-	**0,00**	0,00	**0**	57.749.000	0,00	245	Dinas Pangan
		2	**09**	**01**	**2.06**	**0002**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	6	17.364.375,0	3	**57.749.000**	1	49.999.683	0,3		0,0		-		-		0,3	-	**30,0**	**0**	**3**	57.749.000,0	55,00	333	Dinas Pangan
		2	**09**	**01**	**2.06**	**0004**	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	6	77.287.500,0	4	**40.960.000**	1	25.000.000	0,3		0,0		-		-		0,3	-	**30,0**	0,00	**4**	68.958.150	71,67	89,22	Dinas Pangan
		2	**09**	**01**	**2.06**	**0005**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	6	141.358.815,0	1	68.958.150		24.999.369										-		**0**		68.958.150,0		48,78	Dinas Pangan
								jumlah paket barang Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	6		3		1		0,3		0,0		-		-		0,30		**30,0**		**0**		5,00		
		2	**09**	**01**	**2.06**	**0006**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	dok	6	28.016.666,0	1	**13.420.000**		2.500.000										-		**0**		**1**	13.420.000,0	16,67	47,90	Dinas Pangan
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	paket	5		3		1		0,3		0,0		-		-		0,3		**30,0**		**0**		6		
		2	**09**	**01**	**2.06**	**0008**	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase layanan makanan dan minuman tamu	persen	100	147.947.453,0	100	**41.580.000**		25.000.000										-		**0,00**		**100**	41.580.000,0	100	28,10	Dinas Pangan
								Jumlah laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	6		3		1		0,35		0,0		-		-		0,4		**35,0**		**0**		5,83		
		2	**09**	**01**	**2.06**	**0009**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	partisipasi dalam rapat rapat konsultasi luar daerah	laporan	%	201.797.831,0	0	**122.365.100**		72.323.262										-					-		0,00	Dinas Pangan
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	5		3		1		-		0,000		-		-		-		**0**		**0**		0		
		2	**09**	**01**	**2.06**	**0010**	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	10.000.000,0	1	-	1		0,3		0,0						0,3		**30,0**	**#DIV/0!**	**1**	-	130	42	Dinas Pangan
		2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	100	723.517.840,0	100	**1.078.312.000**	100	**189.085.413**	-	-	**0**		-		-		-	-	-	0	**0**	302.180.000	0	41,8	Dinas Pangan
		2	**09**	**01**	**2.07**	**0002**	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	477.980.000,0	7	**642.691.000**	7			-	0						0	-	**0**	#DIV/0!			0	0	Dinas Pangan
		2	**09**	**01**	**2.07**	**0005**	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	102.500.000,0	48	109.291.000,00	17	69.922.261	3		0		-		-		3	-	**18**	**0**				0	Dinas Pangan
		2	**09**	**01**	**2.07**	**0006**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	20	136.017.840,0	18	302.180.000	9	49.500.000	-		0,000		-		-		-	-	-	**0**	**0**	302.180.000,0		222,16	Dinas Pangan
		2	**09**	**01**	**2.07**	**0011**	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	20	300.000.000,0	10	**24.150.000**	13	69.663.152	5		0		-		-		5,0	-	**38**	**0**					Dinas Pangan
		2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang kebutuhan OPD**	**%**	**98**	-	**98**	**1.152.839.000**	**98**	**347.850.000**	**25**	**78.000.000**	**0,000**		-		-		**25**	**78.000.000**	**26**	22,423458	**25**	112.839.000	25,51	25,5	Dinas Pangan

NO	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH S.D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) sd TRIWULAN I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 sd TRIWULAN I (%).		REALISASI KINRJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGAKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV									
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=10+11+12+13		15=14/9x100		16=14+8		17=16/7*100		18
								Tolak Ukur		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	% (K)	% (Rp)	
		3	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	90.000.000,0	1	30.000.000	1	18.000.000	0,3		0,000		-		-		0,3	-	0						Dinas Pangan
		2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Persentase penyediaan layanan jasa pemeliharaan perlengkapan kantor	paket	1	30.325.973,0	1	34.839.000		17.850.000		-						-				34.839.000,0		114,9	Dinas Pangan
								jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	5		3		1		0,3		0,000		-		-		0,3		30,0	0					
		2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan tenaga kontrak yang trersedia	bulan	72	2.870.171.036,6	10	1.088.000.000		312.000.000		78.000.000						78.000.000		25	10	1.166.000.000,0	13,88889	40,62	Dinas Pangan
								jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	5		3		1		0,3		0,000		-		-		0,3		30,0		0		6		
		2	09	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris kantor yang Terpelihara**	%	98	1.289.993.723,0	98	517.585.350	98	197.500.000	30	18.765.000	0		-		-		30	18.765.000	31	9,5012658	30	536.350.350,0	30,61224	41,58	Dinas Pangan
		2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	unit	1	377.234.427,0	1	131.908.430		42.430.000								-		0	1	131.908.430	100	34,97	Dinas Pangan
								jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	unit	1		1		1		1		0,000		-		-		1		100	1	100			
		2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional /lapangan yang tersedia	unit	16	1.289.993.723,0	16	385.676.920		155.070.000		18.765.000						18.765.000		12,100987	16	404.441.920	100	31,35	Dinas Pangan
								Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	unit	16		39		16		16		0,000		-		-		16		100	23		143,75			
	Rata rata capaian kinerja program																								98	11			20	66	
	Predikat																								ST	T			S	S	
	Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi Seimbang dan aman Untuk							**Skor PPH**	skor	**87**			-	86,75				0,000		-		-		-		**0,00**			5.762.209.210			
		2	09	03			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**				5.973.585.283,00		**5.762.209.210**		**2.452.999.600**	-	-	**0,000**		-		-		-	-		**0**	**0**	5.762.209.210,0		96,5	
								Ketersediaan Pangan Utama	%	**110**		**128,19**	-	105		**128,19**								**128,19**		**100**			-	0	0	Dinas Pangan
								Ketersediaan energi per kapita	kkal/Kap/hari	**2540**		**3096**	-	2540		**3096**								**3096,00**		**122**			-	0	0	Dinas Pangan
								Kertersediaan protein per kapita	gram/kapita/hari	**72,22**		**68,95**	-	72,22		**68,95**								**80,00**		**116,03**			-	0	0	Dinas Pangan
								pencapaian skor PPH	skor	**87**		**93,2**	-	86,75		**93,20**								**90,19**		**104**			-	0	0	Dinas Pangan

NO	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH S.D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) sd TRIWULAN I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 sd TRIWULAN I (%).		REALISASI KINRJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=10+11+12+13		15=14/9x100		16=14+8		17=16/7*100		18
								Tolak Ukur		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	% (K)	% (Rp)	
		2	09	03	2,01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**%**	**110**	**2.547.315.175**	**128**	**665.982.500**	**####**	**542.999.936**	**105,00**	-	**0,000**		-		-		**105**	-	**102,94**	0	**129**	111.613.500	1,172727	1,172727273	Dinas Pangan
		2	**09**	**03**	**2,01**	**0001**	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Data Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen	**6**		1															**1**		16,66667		
								Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Neraca Bahan Makanan (NBM)	laporan	5	542.658.494	1	**111.613.500**	1													**0**	111.613.500,0	0	20,56790805	Dinas Pangan
		2	**09**	**03**	**2,01**	**0003**	Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya	data distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	dokumen	6																			0		
								Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	6	379.688.357	3	**115.611.500**	1	50.000.000	0,3	-	0,0		-		-		0,3	-	**30**	**0**	**0**	115.611.500,0	5	30,4490506	Dinas Pangan
		2	**09**	**03**	**2,01**	**0007**	Peningkatan Ketahanan pangan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	keluarga	100	500.000.000	0	**6.000.000**	30	150.000.000	-		0,000		-		-		-	-	**-**	**0**	**0**	129.333.000,0	0	25,8666	Dinas Pangan
		2	**09**	**03**	**2,01**	**0011**	Pemantauan Stock Pangan	Informasi Stok Pangan	dokumen	3	600.000.000	1	**129.333.000**	1												**0**	16.295.000,0	0	2,715833333	Dinas Pangan
		2	**9**	**3**	**2.01**	**8**	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen	Laporan	2	300.000.000			1	143.000.000															Dinas Pangan
		2	**09**	**03**	**2,01**	**0013**	Penyusunan prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten.kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	dokumen	3	180.000.000	1	**16.295.000**	1	50.000.000	0,3		0,000		-		-		0,3	-	**30,0**	**0**		287.129.500,0	0	159,5163889	Dinas Pangan
		2	**09**	**03**	**2,01**	**0004**	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Data Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	dokumen	6		1															**1**		16,66667		
								Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	laporan	5	892.410.961,00	0	**287.129.500**	1													**0**	287.129.500,0	0	32,1745824	Dinas Pangan
		2	**09**	**03**	**2,01**	**15**	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	dokumen	1				1	100.000.000															Dinas Pangan
		2	**09**	**03**	**2,01**	**16**	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Informasi Neraca Bahan (NBM)	dokumen	1				1	49.999.936															
		2	**09**	**03**	**2,02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Penguatan cadangan pemerintah**	%	50	580.191.281		**4.478.689.960**	50	**1.600.000.000**	**20**	-	**0,000**		-				**20**	-	**40**	**0**		4.478.689.960,0	0		
		2	**09**	**03**	**2,02**	**0003**	Pengadaan Cadangan pemerintah Kabupaten/Kota	penambahan jumlah cadangan pangan pemerintah	ton	50		0															**0**		0		
								Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton	50	580.191.281	390,486	**4.478.689.960**	44	1.200.000.000	25	-	0,000		-		-		25,000	-	**57**	0	**415**	-	830,972	0,00	Dinas Pangan
							Penyaluran Cdangan pangan							40	200.000.000															
		2	**09**	**03**	**2,02**	**0005**	Penyaluran Cadangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	ton	390				20	200.000.000	40														

NO	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH S.D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) sd TRIWULAN I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 sd TRIWULAN I (%).		REALISASI KINRJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV									
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=10+11+12+13		15=14/9x100		16=14+8		17=16/7*100		18
								Tolak Ukur		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	% (K)	% (Rp)	
		2	09	03	2,04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**PPH konsumsi (angka kecukupan gizi)**	**skor**	**87**	**239.695.314**		**617.536.750**	**50**	**309.999.664**	-	-	**0,000**		-		-		-		-	0	**93,2**	-	107,13	107,13	Dinas Pangan
		2	**09**	**03**	**2,04**	**0001**	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	tersedianya data target konsumsi Pangan per kapita per tahun	dokumen	**1**	239.695.314	**1**	65.459.000		59.999.872													**1**	32.998.000,0	100	13,76664377	Dinas Pangan
								Target konsumsi Pangan per kapita per tahun	dokumen	5		3		1		0,30		0,000		-		-		0,3		**30**	**0**	**3**		66		
		2	**09**	**03**	**2,04**	**0002**	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksanya kegiatan pameran	kali	2	1.098.637.178	2	552.077.750		200.000.000													2	76.431.000,0	100	6,96	Dinas Pangan
								Terlaksananya lomba cipta menu tingkat kota bandar lampung	kali	1		1													1		100		
								terlaksannya sosialisasi dan pembinaan penganekaragaman konsumsi Pangan	kali	2		2				-		-		-		-				**2**		100		
								jumlah pemberdayan Kelompok Masyarakat dalam penganekaragaman	laporan	5		3		1		0,2		0,000		-		-		0,2		**20**	**0**	**0**		4		
		2	**09**	**03**	**2,04**	**0003**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita per tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun							49.999.792																
	Rata rata capaian kinerja program																								90	-			85	85	
	Predikat																								**T**	R			T	T	
		2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**persentase daerah rawan pangan**	**%**	**5**	**333.293.727,81**	**2**	**512.668.682**	**5**	**324.999.792**	-	-	**0,000**		-		-		-		-	**0**	**0**	512.668.682,0	0	153,82	Dinas Pangan
		2	**09**	**04**	**2,01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**persentase pemutakhiran analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan**	%	100	**333.293.728**	**100**	**201.052.100**	**100**	**74.999.988**	-	-	**0,000**		-		-		-		-	0	**0**	201.052.100	0	0	Dinas Pangan
		2	**09**	**04**	**2,01**	**0001**	Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	peta ketahanan pangan dan Kerentanan pangan tingkat kecamatan	dokumen	2	333.293.728	1	**201.052.100**		74.999.988													**1**	201.052.100,0	50	60,32	Dinas Pangan
								Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	dokumen	2		3		1		0,3		0,000		-		-		0,3		**30,0**	**0**	**0**		15		
		2	**09**	**04**	**2,02**		**Penanganan Kerawanan pangan kewenangan kabupaten/Kota**	**jumlah daerah rawan dan rentan pangan yang tertangani**	**kelurahan**	**10**	**450.000.000**	**6**	**311.616.582**	**2**	**249.999.804**	-	-	**0,000**		-		-		-		-	**0**	**0**	311.616.582,0	0		Dinas Pangan
		2	**09**	**04**	**2,02**	**0003**	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	laporan	1	321.104.900	1	182.721.482	1	50.000.000	-	-	0,000		-		-		-		-		**0**	**0**		0		Dinas Pangan
		2	**09**	**04**	**2,02**	**02**	Pelaksanaan pengadaan , pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	jumlah cadangan pangan pemerintah yang disalurkan ke masyarakat (beras)	ton	24	128.895.100	24	128.895.100													**24**	128.895.100,0	100	100	Dinas Pangan
								Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dok	1		1													**1**		100		Dinas Pangan

NO	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH S.D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) sd TRIWULAN I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 sd TRIWULAN I (%).		REALISASI KINRJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV									
1	2	3					4	5	6	7		8		9	10		11		12		13		14=10+11+12+13		15=14/9x100		16=14+8		17=16/7*100		18
								Tolak Ukur		K	Rp.	K	Rp.	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	% (K)	% (Rp)	
		2	09	04	2,02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	dokumen	1				149.999.924																
		2	09	04	2,02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	dokumen	1				49.999.880																
	Rata rata capaian kinerja program																							**90,0**	**-**			**64,2**	**53,2**	
	Predikat																							**T**	**R**			S	SR	
	Terjaminnya keamanan dan mutu Pangan Segar							persentase jumlah sampel pangan segar yang diuji dan aman dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah total sampel yang diuji dalam kurun waktu 1 tahun						87,5																
		2	09	05			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar**	**%**	**88**	**960.600.136,95**	**87,5**	**382.701.900**	**87,5**	**249.998.856**		-	**0,000**		-		-		-		-		-	**0**	**0**	382.701.900,0	0,00	39,84	Dinas Pangan
		2	**09**	**05**	**2,01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern**	**%**	**88**	**960.600.136,95**	**87,5**	**382.701.900**	**87,5**	**249.998.856**	**30,00**	-	**0,000**		-		-		**30,00**	-	**34,29**	0	**30**	168.451.500	34,09091	34,09090909	Dinas Pangan
		2	09	05	2,01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	dokumen	**1**		**11**					**0,000**		-		-		-							
		2	09	05	2,01	0009	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	data jumlah pelaku usaha yang dilatih , dan jumlah produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang sudah tersertifikasi dan teregistrasi	pelaku usaha PSAT (sudah tersertifikasi maupun belum)	75	476.133.897	**75**	**168.451.500**		49.999.032						-		-			**75**		168.451.500	100	35,37901861	Dinas Pangan
								Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	dokumen	6		3		1	-		0,000		-		-		-		**0**	**0**	**0**		0		
		2	09	05	2,01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasar tradisional dan modern yang diawasi dan dibina	pasar	8	484.466.240	8	**214.250.400**		99.999.824						-		-			**8**		106.077.100,0	100	21,89566398	Dinas Pangan
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	5		3		1	-		0,000		-		-		-		-	**0**	**3**		60		
		2	09	05	2,01	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	laporan	1		-		1	50.000.000	-		0,000		-		-		-							
	Rata rata capaian kinerja program																							**87,5**	**-**			**85,0**	**39,8**	
	Predikat																							**T**	**SR**			T	SR	
										Jumlah Total Anggaran Seluruh Program				**8.023.803.845**		**1.165.590.812**	**0,000**	-	-	-	-			**1.165.590.812**			**14,53**		**22.712.669.415**			

NO	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH S.D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) sd TRIWULAN I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 sd TRIWULAN I (%).		REALISASI KINRJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV									
1	2	3					4	5	6	7		8		9	10		11		12		13		14=10+11+12+13		15=14/9x100		16=14+8		17=16/7*100		18
								Tolak Ukur		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	% (K)	% (Rp)	
											Total capaian Kinerja dan anggranm dari seluruh program												14,53	91	3			63	61	
											Predikat Kinerja dari seluruh program												Sangat rendah	ST	R			T	SR	
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
	Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																														
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung berikutnya*):																														

Catatan :Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Interval	Predikat Penilaian Realisasi Kinerja
91% <100%	Sangat Tinggi
76%< 90%	Tinggi
66%< 75%	Sedang
51%< 65%	Rendah
< 50%	Sangat Rendah

Bandar Lampung, Maret 2025
KEPALA DINAS PANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

ICHWAN ADJI WIBOWO, SPt.,MM
NIP.19720623 200003 1 003

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Rencana Pergeseran Dan Perubahannya

Pada Anggaran pendapapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 terdapat Rencana Perubahan Anggaran pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung. Sesuai yang diamanahkan oleh pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden No 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta diperkuat oleh edaran Sekertaris Daerah Kota Bandar Lampung No 343 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Adapun total pengurangan anggran Dinas Pangan Kota Bandar Lampung ditetapkan sebesar Rp.376.948.377,00

Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	Selisih
2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Rp 50.000.000	Rp 36.500.000	Rp 10.669.793
2.09.03.2.01.0007 Peningkatan ketahanan Pangan keluarga	Rp 150.000.000	Rp 98.749.181	Rp 51.250.819
2.09.03.2.01.0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 44.060.760	Rp 5.939.240
2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Rp 100.000.000	Rp 77.600.000	Rp 22.400.000
2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Rp 49.999.936	Rp 40.577.656	Rp 9.422.280
2.09.03.2.02.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 200.000.000	Rp 185.750.000	Rp 14.250.000
2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Rp 75.000.000	Rp 66.250.000	Rp 8.750.000
2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Rp 59.999.872	Rp 49.984.898	Rp 10.014.974
2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Rp 49.999.792	Rp 39.330.000	Rp 10.669.792
2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Rp -
2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 45.200.000	Rp 4.800.000
2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Rp 149.999.924	Rp 132.300.000	Rp 17.699.924
2.09.04.2.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Rp 49.999.880	Rp 38.679.880	Rp 11.320.000
2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 19.900.000	Rp 30.100.000
2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal	Rp 99.999.824	Rp 99.922.617	Rp 77.207
2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Rp 50.000.000	Rp 49.300.000	Rp 700.000
2.09.05.2.01.0009 Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Rp 49.999.032	Rp 36.836.748	Rp 13.162.284
2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 115.726.312	Rp 107.741.784	Rp 7.984.528
2.09.01.2.05.0009 Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Rp 55.000.000,00	Rp 22.500.000	Rp 32.500.000
2.09.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 39.000.000,00	Rp 42.500.000	-Rp 3.500.000
2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 72.323.262	Rp 35.722.200	Rp 36.601.062
2.09.01.2.07.0005 Pengadaan mebel	Rp 69.922.261	Rp 45.373.237	Rp 24.549.024
2.09.01.2.07.0006 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 49.500.000	Rp 38.500.000	Rp 11.000.000
2.09.01.2.07.0011 Pengaaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp 69.663.152	Rp 23.075.702	Rp 46.587.450
REKAP PENGURANGAN ANGGARAN			Rp 376.948.377

Total anggaran pagu murni Dinas Pangan tahun 2025 adalah sebesar Rp.7.823.803.845,00 dengan realisasi hingga Triwulan I (satu) sebesar Rp. 1.165.590.812,00 dan setelah terjadi pergeseran anggaran

(yaitu Rp. 7.823.803.845,00 dikurangi efisiensi sebesar Rp.376.948.377,00) menjadi Rp.7.491.645.468,00 Selain itu, terdapat pembayaran hutang tahun lalu sehingga terjadi penambahan anggaran lagi sebesar Rp. 44.490.000,00 pada 3 kegiatan, Adapun rincian terhutang adah sebagai berikut:

No	Kode rekening	Sub kegiatan	Terhutang
1	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Rp.16.790.000,00
2	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp.12.100.000,00
3	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.15.900.000,00

Dengan demikian total Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (disingkat RKPD-Perubahan) Tahun 2025 adalah sebesar **Rp.7.491.645.468,00** Secara Rinci Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan Dinas Pangan Tahun 2025 ada pada Tabel 4.1

TABEL 4.1.

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sumber Dana
								Target Capian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	5	6	7
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN**				**Rp7.823.803.845,00**		**Rp 7.491.645.468,00**	**DAU**
2	**09**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**		**98%**	**Rp4.995.805.597,00**	**98%**	**Rp 4.858.813.729,00**	**DAU**
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**		**100%**	**Rp 115.726.312,00**	**100%**	**Rp 123.641.784,00**	
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	6 dokumen	Rp 115.726.312,00	6 dokumen	Rp 123.641.784,00	PAD
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**		**100%**	**Rp3.836.833.845,00**	**100%**	**Rp3.836.833.845,00**	

2	09	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bandar Lampung	27 orang/bulan	Rp 3.701.403.845,00	27 orang/bulan	Rp 3.701.403.845,00	DAU
2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bandar Lampung	1 dokumen	Rp 110.430.000,00	1 dokumen	Rp 110.430.000,00	DAU
2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan/Semestaeran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Bandar Lampung	1laporan	Rp 25.000.000,00	1laporan	Rp 25.000.000,00	DAU
2	**09**	**01**	**2.05**		**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**		**100%**	**Rp 94.000.000,00**	**100%**	**Rp 45.000.000,00**	
2	09	01	2.05	0003	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 dokumen	Rp 39.000.000,00	1 dokumen	Rp 42.500.000,00	DAU
2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 orang	Rp 55.000.000,00	2 orang	Rp 2.500.000,00	DAU
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**		**98%**	**Rp 214.810.027,00**	**98%**	**Rp 171.039.161,00**	
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bandar Lampung	1 paket	Rp 14.987.713	1 paket	Rp 14.987.713	DAU
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bandar Lampung	1 paket	Rp 49.999.683	1 paket	Rp 49.999.683	DAU

2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bandar Lampung	1 paket	Rp 25.000.000	1 paket	Rp 25.000.000	DAU
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bandar Lampung	1 paket	Rp 24.999.369	1 paket	Rp 24.999.369	DAU
2	09	01	2.06	0006	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bandar Lampung	1 dokumen	Rp 2.500.000	1 dokumen	Rp 2.500.000	DAU
2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bandar Lampung	1 laporan	Rp 25.000.000	1 laporan	Rp 25.000.000	DAU
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bandar Lampung	1 laporan	Rp 72.323.262	1 laporan	Rp 28.552.396	DAU
2	09	01	2.06	0003	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	Bandar Lampung	1 laporan	Rp -	1 laporan	Rp -	DAU
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**		**98%**	**Rp 189.085.413,00**	**98%**	**Rp 136.948.939,00**	
2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bandar Lampung	1 unit	Rp 69.922.261	1 unit	Rp 75.373.237	DAU
2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bandar Lampung	1 unit	Rp 49.500.000	1 unit	Rp 38.500.000	DAU
2	09	01	2.07	0011	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bandar Lampung	1 unit	Rp 69.663.152	1 unit	Rp 23.075.702	DAU
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**		**98%**	**Rp 347.850.000,00**	**98%**	**Rp 347.850.000,00**	
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bandar Lampung	1 unit	18.000.000	1 unit	18.000.000	DAU

2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bandar Lampung	1 laporan	17.850.000	1 laporan	17.850.000	DAU
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bandar Lampung	1 laporan	312.000.000	1 laporan	312.000.000	DAU , PAD
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**		**98%**	**Rp 197.500.000,00**	**98%**	**Rp 197.500.000,00**	
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bandar Lampung	1 Unit	Rp 42.430.000,00	1 Unit	Rp 42.430.000,00	DAU
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bandar Lampung	22 unit	Rp 155.070.000,00	22 unit	Rp 155.070.000,00	DAU
2	**09**	**03**			**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Ketersediaan Pangan Utama**		105	**2.252.999.600**	105	**2.144.442.494**	
						Ketersediaan Energi per kapita		2530kkal/Kap/hari		2530kkal/Kap/hari		
						Ketersediaan Protein per Kapita		72,20gram/kapita/hari		72,20gram/kapita/hari		
						Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah		50		50		
						Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)		86.75		86.75		

2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Ketersediaan Pangan Utama**		**102%**	**Rp 542.999.936,00**	**102%**	**Rp 440.487.597,00**	
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Bandar Lampung	1 laporan	Rp 50.000.000,00	1 laporan	Rp 36.500.000,00	DAU
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan pangan keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	Bandar Lampung	30 keluarga	Rp 150.000.000,00	30 keluarga	Rp 98.749.181,00	PAD
2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	1 laporan	Rp 143.000.000,00	1 laporan	Rp 143.000.000,00	DAU
2	09	03	2.02	0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	1 dokumen	Rp 50.000.000,00	1 laporan	Rp 44.060.760,00	PAD,DAU
2	09	03	2.01	00015	Pemantauan harga dan pasokan Pangan	Informasi Stok Pangan	Bandar Lampung	1 dokumen	Rp 100.000.000,00	1 dokumen	Rp 77.600.000,00	DAU
2	09	03	2.02	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan	Bandar Lampung	1 dokumen	Rp 49.999.936,00	1 dokumen	Rp 40.577.656,00	PAD
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota**	**Penguatan cadangan pangan pemerintah**		50 persen	**Rp1.400.000.000,00**	50 persen	**Rp 1.385.750.000,00**	
2	09	03	2.02.	0003	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	100 ton	Rp 1.200.000.000,00	100ton	Rp 1.200.000.000,00	DAU

2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	50 ton	Rp 200.000.000,00	50 ton	Rp 185.750.000,00	DAU
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**PPH konsumsi**		**skor 86.50**	**Rp 309.999.664,00**	**skor 86.50**	**Rp 318.204.897,00**	
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Bandar Lampung	1 dokumen	Rp 59.999.872,00	1 dokumen	Rp 66.774.897,00	DAU
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bandar Lampung	1 laporan	Rp 200.000.000,00	1 laporan	Rp 212.100.000,00	DAU
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Bandar Lampung	1 laporan	Rp 49.999.792,00	1 laporan	Rp 39.330.000,00	DAU,PAD
2	**09**	**04**			**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Persentase Daerah Rawan Pangan**		**5 Persen**	**Rp 324.999.792,00**	**5 Persen**	**Rp 282.429.880,00**	
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**		**2 dokumen**	**Rp 74.999.988,00**	**2 dokumen**	**Rp 66.250.000,00**	
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan,	Peta dan analisis ketahanan Pangan dan kerentanan Pangan yang dimutahirkan	Bandar Lampung	2 dokumen	Rp 74.999.988,00	2 dokumen	Rp 66.250.000,00	DAU
2	09	04	2.02		**Penanganan kerawanan pangan kewenangan kab/kota**	**Jumlah lokasi tertangani**		**2 lokasi**	**Rp 249.999.804,00**	**2 lokasi**	**Rp 216.179.880,00**	
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten /Kota	Bandar Lampung	1 laporan	Rp 50.000.000,00	1 laporan	Rp 45.200.000,00	DAU,PAD

2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Bandar Lampung	1 laporan	Rp 149.999.924,00	1 laporan	Rp 132.300.000,00	DAU
2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	1 dokumen	Rp 49.999.880,00	1 dokumen	Rp 38.679.880,00	DAU
2	**09**	**05**			**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**		**87.5**	**Rp 249.998.856,00**	**87.5**	**Rp 205.959.365,00**	
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern**		**87.5**	**Rp 249.998.856,00**	**87.5**	**Rp 205.959.365,00**	
2	09	05	2.01	0009	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan	Bandar Lampung	1 dokumen	Rp 50.000.000,00	1 dokumen	Rp 19.900.000,00	DAU
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	1 dokumen	Rp 99.999.824,00	1 dokumen	Rp 99.922.617,00	DAU
2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Bandar Lampung	1 dokumen	Rp 50.000.000,00	1 dokumen	Rp 49.300.000,00	DAU
2	09	05	2.01	0009	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	1 dokumen	Rp 49.999.032,00	1 dokumen	Rp 36.836.748,00	DAU

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana kerja (Renja) 2025 menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamik pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Rencana kerja (Renja) 2025 selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Dinas Pangan juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pangan dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Dipindai dengan CamScanner

PERUBAHAN RENCANA KERJA

2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	**BAB I**	**PENDAHULUAN**	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	**BAB II**	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN**	√			
		Formulir E.81	√			
3	**BAB III**	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	√			
4	**BAB IV**	**PENUTUP**	√			

Bandar Lampung, 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung,

YUSNADI FERIANTO, SE., MM
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19750212 199703 1 003

Diverifikasi : Tanggal		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, S.T., M.Si.	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	FITRI YANTI, S.T., M.Si.	
	Fungsional Perencanaan Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan.	√			
4.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masingPerangkat Daerah sesuai surat edaranwalikota.	√			
5.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah	√			
6.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.		√	Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung,

YUSNADI FERIANTO, SE., MM
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19750212 199703 1 003

Diverifikasi : Tanggal		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, S.T., M.Si.	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	FITRI YANTI, S.T., M.Si.	
	Fungsional Perencanaan Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi RenjaPerangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Diverifikasi : Tanggal		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, S.T., M.Si.	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	FITRI YANTI, S.T., M.Si.	
	Fungsional Perencanaan Bapperida Kota Bandar Lampung	

Bandar Lampung, 2025
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19700218 199303 2 00

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-4
1.3. Maksud dan Tujuan I-10
1.4. Sistematika Penulisan I-11

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN II-1

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan/ Tahun 2025 ..... II-1

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH III-1

BAB IV. PENUTUP IV-1

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
NOMOR :

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah di tahap terakhir dari RPJPD Kota Bandar Lampung. RPJMD tersebut memuat perkiraan maju rencana pengeluaran selama 5 tahun sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tiap tahunnya dengan memperhatikan kondisi perekonomian, isu-isu strategis, asumsi ekonomi dan estimasi penerimaan/pengeluaran Kota Bandar Lampung yang dalam perjalannannya dapat terjadi perubahan-perubahan. Oleh karenanya untuk memastikan tercapainya target rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang jika diperlukan dilakukan perubahan terhadap RKPD tahun berjalan yang disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam perjalanan pelaksanaan rencana pembangunan tahunan tersebut.

Desain perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2025 yang disusun pada tahun 2024 dan telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025, saat ini dalam pelaksanaannya harus mengalami penyesuaian atau perubahan mengingat pada tahun berjalan menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah. Selain itu, perubahan RKPD Tahun 2025 juga memperhatikan hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2025 serta asumsi

dan kondisi terkini sehingga rencana pembangunan Kota Bandar Lampung pada beberapa sektor mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan proses kerja. Namun demikian terdapat beberapa hal yang tetap menjadi perhatian seperti tantangan global dan dukungan terhadap pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi misi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan sinergi yang erat dari semua pihak dan pelaku kepentingan baik pemerintah, swasta, pelaku usaha serta seluruh masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan perubahan RKPD tahun 2025 sebagai dasar dalam penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun 2025. Secara garis besar, perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 didasarkan pada :

1. Perubahan proyeksi dan alokasi belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik seiring dengan perubahan proyeksi pendapatan daerah.
2. Penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024.
3. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan atas evaluasi APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I.

Selain itu perubahan RKPD tahun 2025 dilakukan dalam rangka menyesuaikan perencanaan pembangunan dengan kondisi ekonomi terkini (realitas ekonomi). Kondisi tersebut tentunya perlu direspon secara tepat dengan mengoptimalkan peluang yang ada guna memastikan relevansi pada sasaran ekonomi makro yang ditetapkan.

Perubahan RKPD tahun 2025 disusun dengan tahapan (a) Penyusunan rancangan perubahan RKPD; (b) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (c) penetapan perubahan RKPD. Adapun Perubahan RKPD 2025 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berjalan. Perumusan rancangan Perubahan RKPD mencakup analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi triwulan II tahun berjalan, penelaahan terhadap kebijakan, perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah beserta perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif. Pada perumusan rancangan perubahan RKPD, DPRD dapat memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada Kepala Derah melalui aplikasi e-planning ataupun secara tertulis dalam rapat dengar pendapat. Bila rancangan perubahan RKPD telah disetujui oleh Kepala Daerah, ditindak lanjuti dengan membuat surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan rancangan peraturan kepala daerah tentang perubahan RKPD setelah difasilitasi oleh Gubernur selanjutnya dapat ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD 2025 sekaligus juga sebagai dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah, dan pedoman penyusunan KUA Perubahan APBD serta Perubahan PPAS.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 108);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 32 Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025 sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

II.1 Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan/tahun 2025

Formulir E.81

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

III.1 Tabel Rincian Perubahan program, kegiatan, sub kegiatan, Target dan pagu pada perubahan Rencana kerja perangkat daerah Tahun 2025

Bab IV. Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan/Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung merupakan perubahan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan capaian kinerja. Pada tahun anggaran 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, yang dijabarkan dalam **8 (Delapan) Program, 17 (Tujuh Belas) Kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan.**

Realisasi Anggaran per tanggal 1 januari 2025 sampai dengan 30 Maret 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 13.794.007.893,- dari pagu yang tersedia dalam DPA 2025 sebesar Rp. 77.354.191.155,- atau sebesar 17,83%.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp. 60.661.930.681,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.559.882.893,- atau 22.35% yang dijabarkan dalam beberapa subkegiatan berupa:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 29.993.937,- dan belum terealisasi.
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 29.999.920,- dan belum terealisasi.
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 20.254.191.155,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.916.701.893,- atau sebesar 29.21% tersedianya gaji dan tunjangan ASN.
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 258.756.975,- dan belum terealisasi.
5. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan belum terealisasi.
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 19.999.439,- dan belum terealisasi.
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 179.999.121,- dan belum terealisasi.
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 59.999.310,- dan belum terealisasi.
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 143.000.000,- dan belum terealisasi.
10. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 159.840.545,- dan terealisasi sebesar Rp. 40.353.000,- atau sebesar 25,25% tersedianya barang cetak dan pengadaan.
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 84.000.000,- dan belum terealisasi.

12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 100.002.439,- dan belum terealisasi.
13. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp235.000.000,- dan belum terealisasi.
14. Pengadaan Meubel dengan anggaran sebesar Rp.166.751.870,- dan belum terealisasi.
15. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan belum terealisasi.
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 128.200.000,- dan belum terealisasi.
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 25.200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.842.000.000 atau sebesar 23,18% tersedianya pelayanan administrasi perkantoran.
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 38.670.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.408.000,- atau sebesar 29,50% terlaksananya pemeliharaan kendaraan mobil dan jabatan.
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 12.117.330.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.664.618.000,- atau sebesar 13,74% tersedianya kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional.
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 981.195.970,- dan terealisasi sebesar Rp.84.802.000,- atau

sebesar 8,64% tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp. 401.067.120,- dan dijabarkan dalam dua kegiatan berupa:

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/kota didukung anggaran sebesar Rp.400.000.000,- dan dijabarkan dalam satu sub kegiatan berupa:

    1.1. Penyusunan RPPLH Kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp.400.000.000,- dan belum terealisasi.

2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/kota didukung anggaran sebesar Rp.1.067.120,- dan dijabarkan dalam satu sub kegiatan berupa:

    2.1. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 1.067.120,- dan belum terealisasi.

3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup didukung anggaran sebesar Rp. 575.000.000,- dan dijabarkan dalam tiga kegiatan berupa:

1. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota didukung anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan dijabarkan dalam dua sub kegiatan berupa:
    1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan belum terealisasi.
    1.2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan belum terealisasi.

2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan dijabarkan dalam satu sub kegiatan berupa:
    2.1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan belum terealisasi.

3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan dijabarkan dalam satu sub kegiatan berupa:
    3.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan belum terealisasi.

4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) ada satu kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati didukung anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan dijabarkan dalam satu kegiatan berupa:

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/kota didukung anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan dijabarkan dalam satu sub kegiatan berupa:

    1.1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 234.125.000,- atau 58,53% tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang dikelola.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ada satu kegiatan didukung anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- dan dijabarkan dalam satu kegiatan berupa:

1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kab/kota didukung anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- dan dijabarkan dalam satu sub kegiatan berupa:

    1.1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan belum realisasi.

    1.2. Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan belum realisasi.

6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat ada satu kegiatan didukung anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan dijabarkan dalam satu kegiatan berupa:

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/kota didukung anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan dijabarkan dalam satu sub kegiatan berupa:

    1.1. Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat /dunia usaha /dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan belum realisasi.

7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup ada satu kegiatan didukung anggaran sebesar Rp. 99.999.936,- dan dijabarkan dalam satu kegiatan berupa:

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) didukung anggaran sebesar Rp. 99.999.936,- dan dijabarkan dalam satu sub kegiatan berupa:

    1.1. Pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kab/kota dengan anggaran sebesar Rp. 99.999.936,- dan belum realisasi.

8) Program Pengelolaan Sampah

Program Pengelolaan Sampah ada satu kegiatan pengelolaan sampah didukung anggaran sebesar Rp. 14.891.193.418,- dan dijabarkan dalam satu kegiatan berupa:

1. Pengelolaan Sampah didukung anggaran sebesar Rp.14.891.193.418,- dan dijabarkan dalam tiga sub kegiatan berupa:

    1.1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- dan belum terealisasi.

    1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan anggaran sebesar Rp. 14.511.193.418,- dan belum terealisasi.

    1.3. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/kota atau TPA/TPST regional dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan belum realisasi.

Formulir E. 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

PERIODE PELAKSANAAN s.d. TRIWULAN I TAHUN 2025

PER MARET 2025

Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

ASARA	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TW I TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
	URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV												
									K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14÷8)/2		(17) = (16/7)*100		(18)	
2. UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																
2.11 LINGKUNGAN HIDUP																																
										407,124,548,567.00		185,691,463,864.00		77,354,191,155.00		13,794,007,893.00								13,794,007,893.00		17.83		199,485,471,757.00		48.999	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**Angka**	**62,89**		**58.36**		**62.48**										**0.00**								
							Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	**Nilai**	**71,78 (BB)**		**78.55**		**77.76**		**78.55**								**78.55**								
	2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**	**%**	**98**	**387,585,452,217.00**	**98.00**	**172,683,677,130.00**	**98.00**	**60,661,930,681.00**	**22.00**	**13,559,882,893.00**							**22.00**	**13,559,882,893.00**	**21.56**	**22.35**	**60.00**	**186,243,560,023.00**	**61.22**	**48.05**		
	2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**%**	**90**	**1,095,000,000.00**	**90.00**	**155,550,950.00**	**90.00**	**59,993,857.00**	**20**	-							**20.00**	-	**18.00**	-	**55.00**	**155,550,950.00**	**61.11**	**14.21**		
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	15	535,000,000.00	9	50,237,650.00	3	29,993,937.00		-							-	-	0.00	-	9.00	50,237,650.00	**60.00**	9.39		
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	9	560,000,000.00	6	105,313,300.00	2	29,999,920.00									-	-	0.00	-	6.00	105,313,300.00	**66.67**	18.81		
	2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang**	**%**	**90**	**119,030,454,453.00**	**90**	**64,579,251,691.00**	**90**	**20,512,948,130.00**	**18**	**5,916,701,893.00**							**18.00**	**5,916,701,893.00**	**16.20**	**28.84**	**54.00**	**70,495,953,584.00**	**60.00**	**59.23**		
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	246/70	117,404,854,453.00	246/42	63,930,646,391.00	246/14	20,254,191,155.00	246/3	5,916,701,893.00							246/14	5,916,701,893.00	246/10	29.21	246/52	69,847,348,284.00	74.28	59.49		
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	5	1,445,600,000.00	3	643,630,000.00	1	258,756,975.00		-							0.00	-	0.00	-	3.00	643,630,000.00	60.00	44.52		
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	5	180,000,000.00	3	4,975,300.00										0.00	-			3.00	4,975,300.00	60.00	2.76		
	2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**90**	**470,000,000.00**	**90**	**12,883,781.00**	**90**	**75,000,000.00**	**20**	-							**20.00**	-	**22.22**	-	**55.00**	**12,883,781.00**	**61.11**	**2.74**		
	2	11	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	4	10,000,000.00													0.00	-			0.00	-	**0.00**	-		
	2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	460,000,000.00	0	12,883,781.00	5	75,000,000.00		-							0.00	-	0.00	-	0.00	12,883,781.00	**0.00**	2.80		
	2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**tahun**	**5**	**3,435,530,000.00**	**3**	**1,312,296,373.00**	**1**	**746,840,854.00**		**40,353,000.00**							**0.00**	**40,353,000.00**	**0.00**	**5.40**	**3.00**	**1,352,649,373.00**	**60.00**	**39.37**		

	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	146,030,000.00	3	53,123,200.00	1	19,999,439.00		-							0.00	-	0.00	-	3.00	53,123,200.00	60.00	36.38		
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	750,000,000.00	3	367,008,700.00	1	179,999,121.00		-							0.00	-	0.00	-	3.00	367,008,700.00	60.00	48.93		
	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	410,000,000.00	3	153,021,675.00	1	59,999,310.00		-							0.00	-	0.00	-	3.00	153,021,675.00	60.00	37.32		
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	277,500,000.00	3	77,469,500.00	1	143,000,000.00		-							0.00	-	0.00	-	3.00	77,469,500.00	60.00	27.92		
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	785,000,000.00	3	471,173,650.00	1	159,840,545.00		40,353,000.00							0.00	40,353,000.00	0.00	25.25	3.00	511,526,650.00	60.00	65.16		
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	143,000,000.00	36	63,160,000.00	1	84,000,000.00		-							0.00	-	0.00	-	36.00	63,160,000.00	60.00	44.17		
	2	11	01	2.06	0008	Fasiltasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasiltasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	99,000,000.00	0	-	1	-		-							0.00	-	0.00	#DIV/0!	0.00	-	0.00	-		
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	825,000,000.00	3	127,339,648.00	1	100,002,439.00		-							0.00	-	0.00	-	3.00	127,339,648.00	60.00	15.44		
	2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**paket**	**5**	**36,151,000,000.00**	**3**	**1,270,255,680.00**	**1**	**801,751,870.00**	**0.06**	-							**0.06**	-	**6**	-	3.06	**1,270,255,680.00**	**61.20**	**3.51**		
	2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	21	34,800,000,000.00	-	883,050,000.00	1	235,000,000.00		-							0.00	-	0.00	-	0.00	883,050,000.00	**0.00**	2.54		
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Meibel yang Disediakan	unit	5	790,000,000.00	-	177,825,680.00	1	166,751,870.00		-							0.00	-	0.00	-	0.00	177,825,680.00	**0.00**	22.51		
	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	5	561,000,000.00	2	209,380,000.00	1	400,000,000.00	0.55	-							0.55	-	55.00	-	2.55	209,380,000.00	**51.00**	37.32		
	2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**tahun**	**5**	**155,952,134,786.00**	**3**	**67,701,698,595.00**	**1**	**25,328,200,000.00**	**0.24**	**5,842,000,000.00**							**0.24**	**5,842,000,000.00**	24	**23.07**	3.24	**73,543,698,595.00**	**64.80**	**47.16**		
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	2,363,100,000.00	36	426,969,445.00	12	128,200,000.00		-							0.00	-	0.00	-	36.00	426,969,445.00	**60.00**	18.07		
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	153,589,034,786.00	36	67,274,729,150.00	12	25,200,000,000.00	3	5,842,000,000.00							3.00	5,842,000,000.00	25.00	23.18	39.00	73,116,729,150.00	**65.00**	47.61		
	2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpatihara**	**tahun**	**5**	**71,451,332,978.00**	**3**	**37,651,740,060.00**	**1**	**13,137,195,970.00**	**0.31**	**1,760,828,000.00**							**0.31**	**1,760,828,000.00**	**31.00**	**13.40**	3.31	**39,412,568,060.00**	**66.20**	**55.16**		
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	334,700,000.00	3	166,634,750.00	1	38,670,000.00	0.25	11,408,000.00							0.25	11,408,000.00	25.00	29.50	3.25	178,042,750.00	65.00	53.19		
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1055	66,769,500,178.00	555	35,468,779,710.00	211	12,117,330,000.00	54.00	1,664,618,000.00							54.00	1,664,618,000.00	25.59	13.74	609.00	37,133,397,710.00	57.73	55.61		
	2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	775	4,347,132,800.00	195	2,016,325,600.00	155	981,195,970.00	44.00	84,802,000.00							44.00	84,802,000.00	28.39	8.64	239.00	2,101,127,600.00	30.84	48.33		
							Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**Angka**	**62.89**		**58.38**		**62.48**									**0.00**	-	**0**		**58.38**	-	**92.83**				
							Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD Kota Bandar Lampung	**%**	**1.44**		**1.94**		**1.43**									**0.00**	-	**0**		**4.71**	-	**327.08**				
							RPPLH Kabupaten/Kota	**dokumen**	**5**	**600,000,000.00**	**0**	**1,008,169,556.00**	**0**	**401,067,120.00**	-	-							**0.00**	-	**0**	-	**0.00**	**1,008,169,556.00**	**0.00**	**168.03**		

| | | |

	2	11	03	2.03	0008	Koordinasi dan sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kab/kota yang dilaksanakan	kegiatan	2	100,000,000.00			1.00	-									0.00	-	0	#DIV/0!	0.00	-	0.00	-		
	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kab/kota yang dilaksanakan	kegiatan	4	500,000,000.00			1.00	250,000,000.00	0.44	-							0.44	-	44	-	0.44	-	11.00	-		
	2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANAEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**dokumen**	**1**	**2,810,860,766.00**	**1**	**1,400,928,850.00**	**-**	**400,000,000.00**	**-**	**234,125,000.00**							**0.00**	**234,125,000.00**	**-**	**58.53**	**1**	**1,635,053,850.00**	**100.00**	**58.17**		
							Master Plan Ruang Terbuka Hijau	**dokumen**	**1**		**0**		**-**		**0**							**0.00**	**-**			**0**		**0.00**				
							Peningkatan Presentase Ruang Terbuka Hijau	**%**	**4.90**		**4.60**		**4.60**		**0**							**0.00**		**0**		**4.60**		**93.88**				
	2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH**	**paket**	**5**	**2,810,860,766.00**	**1**	**1,400,928,850.00**	**1**	**400,000,000.00**		**234,125,000.00**							**0.00**	**234,125,000.00**	**0.00**	**58.53**	**1.00**	**1,635,053,850.00**	**0.20**	**58.17**		
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	1	250,000,000.00	1	99,394,000.00											0.00	-			1.00	99,394,000.00	100.00	39.76		
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	ha	23279221	1,718,625,000.00	1318.80	1,301,534,850.00	439.60	400,000,000.00		234,125,000.00							0.00	234,125,000.00	0.00	58.53	439.60	1,535,659,850.00	439.60	89.35		
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	unit	4	842,235,766.00	0.00	-											0.00	-			0.00	-	**0.00**	-		
	2	**11**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**64**	**748,210,409.00**	**62**	**39,455,928.00**	**63**	**275,000,000.00**		**-**							**0.00**	**-**	**0**	**-**	**62.00**	**39,455,928.00**	**96.88**	**5.27**		
	2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegaiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan**	**%**	**64**	**748,210,409.00**	**62**	**39,455,928.00**	**63**	**275,000,000.00**		**-**							**0.00**	**-**	**0**	**-**	**62.00**	**39,455,928.00**	**96.88**	**5.27**		
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomdasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	**1**	-			1.00	75,000,000.00									**0.00**	-	0.00	-	-	-		
	2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	badan usaha	90	748,210,409.00	90 perusahaan x/1 laporan	39,455,928.00	90	200,000,000.00	11	-							11.00	-	12.22	-	13.12	19,727,964.00	14.58	2.64		
	2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**sekolah**	**15 sekolah**	**500,000,000.00**	**0**	**-**	**3**	**50,000,000.00**		**-**							**0.00**	**-**	*0*		0.00	**-**	**-**	**-**		
	2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**sekolah**	**15 sekolah**	**500,000,000.00**	**0**	**-**	**3**	**50,000,000.00**		**-**							**0.00**	**-**	*0*		0.00	**-**	**-**	**-**		
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	entitas	15	500,000,000.00	-	-	3.0.00	50,000,000.00		-							0.00	-	0.00	-	0.00	-	**0.00**	-		

| | | |

	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	dokumen	5	8,635,416,903.00	3	8,284,732,800.00	1	14,511,193,418.00	1	-								1.00	-	100.00	-	4.00	8,284,732,800.00	80.00	95.94		
	2	11	11	2.01	0019	Pengurangan Sampah Melalui Pendauran Ulang Sampah	Jumlah Sampah yang terdaur ulang	Ton	5	450,000,000.00	1353491	172,760,000.00	54.750	-	1015025	-							10150	-	1853927	#DIV/0!	23,685.16	172,760,000.00	473703.20	38.39		
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kab/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemerosesan akhir sampah di TPA/TPST kab/kota ata TPA/TPST regional	Ton	1332.250	600,000,000.00	266450	1,176,337,000.00	266450	100,000,000.00	79387.50	-							79388	-	29794.52	-	345,837.50	1,176,337,000.00	25958.90	196.06		
																								Predikat Kinerja										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**407,124,548,567.00**		**185,691,463,864.00**		**77,354,191,155.00**		**13,794,007,893.00**							**13,794,007,893.00**		**17.83**		**199,485,471,757.00**		**48.999**				
TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																13,794,007,893.00																		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																																			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:																																			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2025 ini rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung mengalami perubahan anggaran dari sebelumnya secara keseluruhan pada rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 8 (delapan) Program, 17 (Tujuh belas) Kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan antara lain :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**
   - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
     - 1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
     - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
     - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
     - 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.
   - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
     - 1.3.1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang.
   - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
     - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
     - 1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
     - 1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
     - 1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
     - 1.4.5. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan.

1.4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

1.5.2. Pengadaan Meubel.

1.5.3. Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya.

1.6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.61. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

1.62. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.71. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

1.72. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

1.73. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

2.1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota.

2.1.1. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota.

2.2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kab/kota.

2.2.1. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

3.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

3.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

3.1.2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

3.2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

3.2.1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

3.3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

3.3.1. Koordinasi,Sinkronisasi Rehabilitasi.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).

4.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

4.1.1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

5.1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

5.1.2. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota dan Peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

6.1. Pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/kota.

6.1.1. Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat /dunia usaha /dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

7.1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.

7.1.1. Pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kab/kota.

8. Progam Pengelolaan Persampahan.

8.1. Pengelolaan Sampah

8.1.1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.

8.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan.

8.1.3. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/kota atau TPA/TPST regional.

Dengan diterbitkannya peraturan baru yaitu Peraturan Walikota Bandar Lampung No 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Derah Tahun 2025 yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan baru, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung juga mengalami perubahan. Format Perubahan untuk Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang telah disesuaikan dengan peraturan Walikota Bandar Lampung No 34 Tahun 2025 tertuang dalam Tabel 3.1.

TABEL 3.1

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KET
Urusan	Bidang Urusan	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	11				LINGKUNGAN HIDUP									61,355,099,455.00	77,354,191,155.00	82,512,925,279.00	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP									61,355,099,455.00	77,354,191,155.00	82,512,925,279.00	
2	11	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Persen	Persen	98	98	98	57,634,695,942.50	60,886,738,745.00	61,701,597,494.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	Persen	90	90	90	225,000,000.00	59,993,857.00	28,535,422.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	2	2	3	150,000,000.00	29,993,937.00	18,615,502.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3	2	2	75,000,000.00	29,999,920.00	9,919,920.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	Persen	90	90	90	17,259,369,557.00	20,512,948,130.00	20,512,948,130.00	Dinas Lingkungan Hidup

2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bula n	Orang/ Bula n	246	246/14	246/14	17,014,169,557.00	20,254,191,155.00	20,254,191,155.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	220,200,000.00	258,756,975.00	258,756,975.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	Dokumen	1	0	0	25,000,000.00	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persen		90			100,000,000.00	75,000,000.00	50,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang	5	5	5	100,000,000.00	75,000,000.00	50,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	tahun	tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	610,510,000.00	746,840,854.00	771,840,854.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penarangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penarangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20,010,000.00	19,999,439.00	19,999,439.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	100,000,000.00	179,999,121.00	179,999,121.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	50,000,000.00	59,999,310.00	59,999,310.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	212,500,000.00	143,000,000.00	143,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tahun	Tahun	1	1	1	110,000,000.00	159,840,545.00	159,840,545.00	Dinas Lingkungan Hidup

2	11	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	12	1	1	18,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	100,000,000.00	100,002,439.00	125,002,439.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	paket	paket	paket	paket	paket	4,551,846,814.00	801,751,870.00	801,751,870.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	5	1	1	4,120,000,000.00	235,000,000.00	235,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	7	5	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	201,846,814.00	166,751,870.00	166,751,870.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	7	6	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	230,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	tahun	tahun	tahun	tahun	tahun	22,752,100,000.00	25,328,200,000.00	25,448,200,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		384,100,000.00	128,200,000.00	128,200,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		22,368,000,000.00	25,200,000,000.00	25,320,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Inventaris Kantor yang Terpelihara	tahun	tahun	tahun	tahun	tahun	12,135,869,571.50	13,362,004,034.00	14,088,321,218.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1			48,400,000.00	38,670,000.00	38,670,000.00	Dinas Lingkungan Hidup

2	11	1	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	211	211	211	11,190,185,771.50	12,242,138,064.00	13,111,779,834.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	9	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	155	155	155	897,283,800.00	1,081,195,970.00	937,871,384.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH Kabupaten/Kota	RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen				743,101,250.00	401,067,120.0 0	344,967,120.00	Dinas Lingkungan Hidup
							RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	Dokumen	Dokumen	Ada	Ada	Ada				
							KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota	KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota	Dokumen	Dokumen	Ada	Ada	Ada				
2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	RPPLH Kota Bandar Lampung	RPPLH Kota Bandar Lampung	Dokumen	Dokumen	Ada	Ada	Ada	243,101,250.00	400,000,000.0 0	343,900,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	2.01	6	PenyusunanRPPLH Kab/Kota	PenyusunanRPPLH Kab/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kab/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kab/kota dan Mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen RPPLH Kab/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kab/kota dan Mengakomodir arahan RPPLH Provinsi		dokumen	0	1	1	243,101,250.00	400,000,000.00	343,900,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	2.02		Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota	Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota	KLHS Kota Bandar Lampung	KLHS Kota Bandar Lampung	dokumen	dokumen	1	1	1	500,000,000.00	1,067,120.00	1,067,120.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	2.02	5	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	dokumen	dokumen	2	1	1	500,000,000.00	1,067,120.00	1,067,120.00	Dinas Lingkungan Hidup

2	11	3			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil pengukuran Indeks Kualitas air	Hasil pengukuran Indeks Kualitas air	indeks	indeks	58,60	58,60	58,60	646,202,500.00	499,600,000.00	433,510,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
							Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	indeks	indeks	81,40	81,40	81,40				
							Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	indeks	34,13	34,13	34,13				
							Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	Persen	8	8	8				
2	11	3	2.01		Pencegahan, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium	DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium	paket	paket	paket	paket	paket	396,202,500.00	250,000,000.00	194,010,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.01	1	Koordinasi,Sinkronisasi ,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	dokumen	1	0	0	146,202,500.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	-	100,000,000.00	54,900,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.01	15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	Dokumen	1	1		250,000,000.00	150,000,000.00	139,110,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.02		Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	DIKPLHD Kota Bandar Lampung	DIKPLHD Kota Bandar Lampung	Dokumen	Dokumen	1			100,000,000.00	75,000,000.00	64,900,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.02	1	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyaraka t	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	Laporan	1			100,000,000.00	75,000,000.00	64,900,000.00	Dinas Lingkungan Hidup

2	11	3	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara	Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara	lokasi	lokasi	lokasi			150,000,000.00	174,600,000.00	174,600,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.03	13		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dolumen	Kegiatan	1			150,000,000.00	174,600,000.00	174,600,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen	Dokumen				598,102,812.50	400,000,000.00	400,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
							Master Plan Ruang Terbuka Hijau	Master Plan Ruang Terbuka Hijau	Dokumen	Dokumen							
							Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau	Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	Persen	4,70	4,70	4,70				
2	11	4	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH	Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH	paket	paket	paket	1	1	598,102,812.50	400,000,000.00	400,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/kota	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/kota	Ha	Ha	469.58	439.6	439.6	598,102,812.50	400,000,000.00	400,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persen		63			0.00	229,900,000.00	123,857,672.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegaiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegaiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan	Persen	Persen	63	63	63	0.00	229,900,000.00	123,857,672.00	Dinas Lingkungan Hidup

2	11	6	2.01	1		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Izin Lingkungan yang ditebitkan		Laporan	1				75,000,000.00	47,682,672.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	2.01	9	Pengawasan PerizinanBerusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yangditerbitkanolehPemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawasan PerizinanBerusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yangditerbitkanolehPemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan	Badan	90	90	90		154,900,000.00	76,175,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
									Usaha	Usaha							
2	11	9			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	sekolah	sekolah	3	3	3	100,000,000.00	359,936.00	359,936.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	9	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	sekolah	sekolah	3	3	3	100,000,000.00	359,936.00	359,936.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/DuniaUsaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	sekolah	Entitas	3	3	3	100,000,000.00	359,936.00	359,936.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota		Persen		100			50,000,000.00	45,331,936.00	45,331,936.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH	Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH	Persen		100			50,000,000.00	45,331,936.00	45,331,936.00	Dinas Lingkungan Hidup

2	11	10	2.01	4	Pengelolaan Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota (Pengelolaan Pengaduan)	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangan	Dokumen	Pengaduan	1	1	1	50,000,000.00	45,331,936.00	45,331,936.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah yang Ditangani	Timbulan Sampah yang Ditangani	Persen	Persen	82	82	82	1,582,996,950.00	14,891,193,418.00	19,463,301,121.00	Dinas Lingkungan Hidup
							Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	Persen	Persen	18	18	18				
							Persentase Cakupan Area Pelayanan	Persentase Cakupan Area Pelayanan	Persen	Persen	100	100	100				
							Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Persen	Persen	100	100	100				
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung	Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung	Persen	Persen	100,00	100,00	100,00	1,582,996,950.00	14,891,193,418.00	19,463,301,121.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Laporan		1			200,000,000.00	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	3	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA /TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Ton		266.45				0	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	4		Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		kelompok		7	7	282,996,950.00	280,000,000.00	280,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup

2	11	11	2.01	5		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		Dokumen		1	1	1,000,000,000.00	14,511,193,418.00	0	19,083,301,121.0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	20		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		jumlah sampah yang tertangani melalui pemerosesan akhir sampah di TPA/TPST kab/kota ata TPA/TPST regional		TON			266.45	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025 menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025 selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 bagi seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

2025

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU				
	2.1	Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenan/tahun 2025	√			
		Formulir E.81				
3	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH				
	3.1	Tabel Rincian Perubahan Progran, Kegiatan, Sub Kegiatan , Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	√			
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, Juli 2025

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Bandar Lampung,

FEBRIANA, S.STP., M.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19860216 200602 2 001

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	**Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si** **NIP. 19690801 199303 2 009**	
	Kabid Pemerintah dan Pembangunan Manusia	
2	**KOMSIYAH, S.Sos.,MM** **NIP.19711205 199203 2 004**	
	Perencana Ahli Muda	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung,

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19706218 199303 2 002

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	mengkaji hasil evaluasi renja-perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenan	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan Perubahan pagu indikatif untuk masing-masing dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Bandar Lampung,

FEBRIANA, S.STP., M.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19860216 200602 2 001

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	**Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si** **NIP. 19690801 199303 2 009**	
	Kabid Pemerintah dan Pembangunan Manusia	
2	**KOMSIYAH, S.Sos.,MM** **NIP.19711205 199203 2 004**	
	Perencana Ahli Muda	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung,

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang..... 1

1.2.Landasan Hukum 3

1.3.Maksud dan Tujuan..... 6

1.4.Sistematika Penulisan..... 8

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 9

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERENGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616/IV.01/HK/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya,ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat OPD;
b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Bappeda yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1114);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);

21. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;
22. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
23. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam merumuskan perubahan alokasi program, kegiatan, indikator dan target serta pagu indikatif Rencana Kerja Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029;

b. Sebagai acuan penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan RKA/DPA bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sesuai dengan Pemetaan dan Pemutakhiran yang tersedia pada lampiran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan diubah ke Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dan diubah kembali menjadi Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah lalu diubah kembali menjadi Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

c. Merumuskan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sepanjang tahun 2025;

d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangkamenengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

2.1 Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan/Tahun 2025

Formulir E.81

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tabel Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (dengan indikator sesuai dengan Kepmendagri)

Bab IV Penutup

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Didalam suatu kegiatan membutuhkan evaluasi untuk dapat menilai semua kekurangan dan kelebihan dalam suatu organisasi menjalankan kegiatan tersebut, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu membuat evaluasi Renja untuk dapat menilai seberapa jauh kegiatan yang sudah berjalan serta membuat perencanaan kerja yang baik untuk tahun yang akan datang, Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I tahun 2025, capaian tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan. Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, kajian evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang

bersangkutan, berikut evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Disusun berdasarkan kegiatan yang ada dan terealisasi pada Perangkat Daerah tahun anggaran 2025

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.

1.3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.3.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

1.3.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

1.4.5 Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan;

1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

1.4.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu;

1.4.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi;

1.4.9 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD.

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1 Pengadaan Mebel;

1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

1.5.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan;

1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

2.1 Penataan Pendaftaran Penduduk

2.1.1 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan .

2.2 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

2.2.1 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

3.1 Pelayanan Pencatatan Sipil

3.1.1. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.

4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

4.1 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

4.1.1 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

4.1.2 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan;

4.1.3 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

FORMULIR E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG
Provinsi Lampung
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG
PERIODE PELAKSANAAN s.d. TRIWULAN I TAHUN 2025

Indikator dan Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Sasaran RKPD :

NO	SASARAN	Kode Rekening					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SD. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2024 (AKHIR PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAEARAH		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV									
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		14 =10+11+12+13		15 = 14/9*100		16 =(14+8)		17=(16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
2.01. PERENCANAAN																																
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG											**Rp 91,544,349,811**		**Rp 9,042,226,705**		**Rp 12,495,769,719**		**Rp 1,706,439,532**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp 1,706,439,532**		**12**		**Rp 9,962,606,562**		**35**	
1.	**Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							**Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)**	**Skor**	**76,16-79,10 (BB)**		**80.15**		**81.00**		**80.15**		**80.15**		**80.15**				**80.15**		**98.95**		**77.16**		**97.54**		Disdukcapil Kota Bandar Lampung
1.1		**2**	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang**	**Persen**	**100**	**Rp 85,269,402,375**	**100%**	**Rp 7,982,907,030**	**100%**	**10,949,773,199**	**20**	**Rp 1,367,361,182**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	**-**	**80.00**	**1,367,361,182**	**12**	**12.49**	**81**	**9,350,268,212**	**1**	**10.97**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
1.1.1		**2**	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100**	**Rp 1,917,800,000**	**100%**	**Rp 19,409,500**	**100%**	**31,664,446**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	**-**	**80.00**	**-**	**8000**	**-**	**81**	**19,409,500**	**81**	**1.01**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	**12**	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dokumen	5	Rp 155,000,000	5	Rp 19,409,500	-	-	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dokumen	5	Rp 155,000,000	-	-	5	31,664,446	1	Rp -	1	Rp -	1	-	1	-	4		**80**	-	**4**	-	**80**	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	**12**	01	2.01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi Kependudukan terkait dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta dukungan manajemen, serta Pembuatan Tim terkait	bukan	12	Rp 881,400,000																				
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi Kependudukan terkait dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta dukungan manajemen, serta Pembuatan Tim terkait	dokumen	5	Rp 881,400,000	5	Rp -																
1.1.2		**2**	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**98**	**Rp 33,628,526,095**	**98**	**Rp 5,404,741,013**	**100**	**6,620,655,219.00**	**25**	**Rp 989,063,547**	**25**	**Rp -**	**25**	**Rp -**		**Rp -**	**75**	**Rp 989,063,547**	**75**	**15**	**173**	**6,393,804,560**	**177**	**19.01**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tersedia	orang	53	Rp 22,730,920,880	53	Rp 5,288,311,013	-	-	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tersedia	orang	53	Rp 32,478,848,595	-	-	53	6,495,769,719.00	53	Rp 954,888,547	53	Rp -	53	-	53	-	53	954,888,547	100	15	53	954,888,547	**100**	**2.94**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terlaksana	dokumen	5	Rp 525,250,000	5	Rp 116,430,000	-	-	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terlaksana	dokumen	5	Rp 624,427,500	-	-	12	124,885,500	3	Rp 34,175,000	3	Rp -	3	-	3	-	12	34,175,000	100	27		34,175,000	-	**5.47**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kualitas SDM Dalam Pemenuh Kompetensi Jabatan**	**bulan**	**12**	**Rp 1,660,047,630**	12	**Rp -**																		

NO	SASARAN	Kode Rekening					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SD. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2024 (AKHIR PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAEARAH		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		14 =10+11+12+13		15 = 14/9*100		16 =(14+8)		17=(16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
2.01. PERENCANAAN																																
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG											**Rp 91,544,349,811**		**Rp 9,042,226,705**		**Rp 12,495,769,719**		**Rp 1,706,439,532**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp 1,706,439,532**		**12**		**Rp 9,962,606,562**		**35**	
1.	**Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							**Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)**	**Skor**	**76,16-79,10 (BB)**		**80.15**		**81.00**		**80.15**		**80.15**		**80.15**				**80.15**		**98.95**		**77.16**		**97.54**		Disdukcapil Kota Bandar Lampung
1.1		**2**	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang**	**Persen**	**100**	**Rp 85,269,402,375**	**100%**	**Rp 7,982,907,030**	**100%**	**10,949,773,199**	**20**	**Rp 1,367,361,182**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	**-**	**80.00**	**1,367,361,182**	**12**	**12.49**	**81**	**9,350,268,212**	**1**	**10.97**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Adm. Kependudukan; Media Cetak dan/atau Media Elektronik dan Media Lainnya secara mantap	kec	20	Rp 1,450,000,000	20	Rp -																			
							Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Adm. Kependudukan; Media Cetak dan/atau Media Elektronik dan Media Lainnya secara mantap	orang	500	Rp 1,660,047,630																			
1.1.4		**2**	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98**	**Rp 12,564,886,145**	**98**	**Rp 400,146,985**	**98**	**647,525,033**	**96**	**Rp 16,719,709**	**96**	**Rp -**	**96**	**Rp -**	**96**	**Rp -**	**96**	**Rp 16,719,709**	**98**	**3**	**194**	**416,866,694**	**198**	**3.32**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	**12**	**01**	**2.06**	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	paket	1	Rp 73,500,000	1	Rp 12,673,750	-	-	-	**Rp -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	paket	1	Rp 73,270,475	-	-	1	14,654,095	1	Rp -	1	Rp -	1	-	1	-	1	-	100	-	1	-	100	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	**12**	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia, ribbon, toner, cartridge, film printer, pembersih printer, formulir dan buku, kartu SAM, Kartu Identitas Anak,	paket	1	Rp 7,323,789,490	1	Rp 121,455,000	-	-	-	**Rp -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia, ribbon, toner, cartridge, film printer, pembersih printer, formulir dan buku, kartu SAM, Kartu Identitas Anak,	paket	1	Rp 918,785,250	-	-	1	183,757,050	1	Rp -	1	Rp -	-	-	1	-	1	-	100	-	1	-	100	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	**12**	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	paket	1	Rp 115,011,170	1	Rp 16,437,350																			
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	paket	1	Rp 113,117,485	-	-	1	22,623,497	1	Rp -	1	Rp -	1	-			1	-	**100**	-	**1**	-	**100**	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	**12**	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	paket	1	Rp 20,000,000	1	Rp 1,957,500																			
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	paket	1	Rp 36,000,000	-	-	1	7,200,000	1	Rp -	1	Rp -	1	-	1		1	-	**100**	-	**1**	-	**100**	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	**12**	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	paket	1	Rp 692,582,500	1	Rp 131,350,000																			
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	paket	1	Rp 973,190,000	-	-	1	194,638,000	1	Rp -	1	Rp -			1	-	1	-	**100**	-	**1**	-	**100**	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	**12**	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	paket	1	Rp 30,000,000	1	Rp 6,000,000																			
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	paket	1	Rp 30,000,000	-	-	1	6,000,000	1	Rp 1,500,000	1	Rp -	1	-	1	-	1	1,500,000	100	25	1	**1,500,000**	**100**	**5.00**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	**12**	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	laporan	12	Rp 80,000,000	12	Rp 2,401,000																			

NO	SASARAN	Kode Rekening					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SD. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2024 (AKHIR PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAEARAH		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		14 =10+11+12+13		15 = 14/9*100		16 =(14+8)		17=(16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
2.01. PERENCANAAN																																
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG											Rp 91,544,349,811		Rp 9,042,226,705		Rp 12,495,769,719		Rp 1,706,439,532		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 1,706,439,532		12		Rp 9,962,606,562		35	
1.	**Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							**Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)**	**Skor**	**76,16-79,10 (BB)**		**80.15**		**81.00**		**80.15**		**80.15**		**80.15**				**80.15**		**98.95**		**77.16**		**97.54**		Disdukcapil Kota Bandar Lampung
1.1		**2**	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang**	**Persen**	**100**	**Rp 85,269,402,375**	**100%**	**Rp 7,982,907,030**	**100%**	**10,949,773,199**	**20**	**Rp 1,367,361,182**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	**-**	**80.00**	**1,367,361,182**	**12**	**12.49**	**81**	**9,350,268,212**	**1**	**10.97**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
							Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	laporan	12	Rp 104,500,000	-	-	12	20,900,000	3	Rp -	3	Rp -	3	-			9	-	75	-	9	-	75	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	laporan	12	Rp 911,147,820	12	Rp 84,416,635																			
							Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	laporan	12	Rp 716,285,000	-	-	12	143,257,000	3	Rp 15,219,709	3	Rp -			3	-	9	15,219,709	75	11	9	**15,219,709**	75	2.12	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Tersedianya Dukcapil Go Digital, pembangunan zona integritas dan inovasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	dokumen	2	Rp 154,730,000	2	Rp 23,455,750																			
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Tersedianya Dukcapil Go Digital, pembangunan zona integritas dan inovasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	dokumen	2	Rp 272,476,955	-	-	2	54,495,391	2	Rp -	2	Rp -			2	-	2	-	100	-	2	-	100		Disdukcapil Kota Bandar Lampung
1.1.5		**2**	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98**	**Rp 18,137,242,505**	**98**	**Rp 620,082,091**	**100**	**2,117,448,501**	**100**	**-**	**100**	**-**		**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**198**	**620,082,091**	**202**	**3.42**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	paket	1	Rp 625,000,000	1	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	paket	1	Rp 450,634,705	-	-	1	90,126,941	1	Rp -	1	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	unit	7	Rp 6,745,000,000	7	Rp 620,082,091																			
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	unit	7	Rp 9,386,607,800			7	1,877,321,560	7	-	7	-			7	-	7	-	7	-	100	-	7	-	100	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	unit	8	Rp 805,000,000	8	Rp -																			
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	unit	8	Rp 750,000,000			8	150,000,000	8	-	8	-					8	-	100	-	8	-	100	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
1.1.6		**2**	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**bulan**	**12**	**Rp 15,349,050,000**	**12**	**Rp 1,396,737,253**	**12**	**1,297,560,000**	**3**	**Rp 341,440,502**	**3**	**Rp -**	**3**	**Rp -**	**3**	**Rp -**	**12**	**341,440,502**	**100**	**26**	**24**	**1,738,177,755**	**200**	**11.32**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	buah	12	Rp 124,200,000	12	Rp 21,737,253	-	-	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	**341,440,502**	-	-	-	-	-	-	-
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	buah	12	Rp 247,800,000	-	-	12	49,560,000	3	Rp 5,440,502	3	Rp -	3	-	**3**	-	12	5,440,502	**100**	**11**	**12**	**5,440,502**	**100**	**2.20**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	laporan	12	Rp 8,861,250,000	12	Rp 1,375,000,000	-	-	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	laporan	12	Rp 6,240,000,000	-	-	12	1,248,000,000	3	Rp 336,000,000	3	Rp -	3	-	**3**	-	12	336,000,000	**100**	**27**	**12**	**336,000,000**	**100**	**5.38**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung

NO	SASARAN	Kode Rekening					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SD. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2024 (AKHIR PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAEARAH		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		14 =10+11+12+13		15 = 14/9*100		16 =(14+8)		17=(16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
2.01. PERENCANAAN																																
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG											**Rp 91,544,349,811**		**Rp 9,042,226,705**		**Rp 12,495,769,719**		**Rp 1,706,439,532**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp 1,706,439,532**		**12**		**Rp 9,962,606,562**		**35**	
1.	**Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							**Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)**	**Skor**	**76,16-79,10 (BB)**		**80.15**		**81.00**		**80.15**		**80.15**		**80.15**				**80.15**		**98.95**		**77.16**		**97.54**		Disdukcapil Kota Bandar Lampung
1.1		**2**	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang**	**Persen**	**100**	**Rp 85,269,402,375**	**100%**	**Rp 7,982,907,030**	**100%**	**10,949,773,199**	**20**	**Rp 1,367,361,182**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	**-**	**80.00**	**1,367,361,182**	**12**	**12.49**	**81**	**9,350,268,212**	**1**	**10.97**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
1.1.7		**2**	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**peren**	**98**	**Rp 2,011,850,000**	**12**	**Rp 141,790,188**	**12**	**234,920,000**	**3**	**Rp 20,137,424**	**3**	**Rp -**	**3**	**Rp -**	3	**Rp -**	**12**	**20,137,424**	**100**	**9**	**24**	**161,927,612**	**24**	**8.05**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	unit	1	Rp 175,925,000	1	Rp 43,635,500																			
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	unit	1	Rp 203,350,000			1	40,670,000	1	Rp 9,825,000	1	Rp -	1	-	1	-	1	9,825,000	100	24	1	9,825,000	**100**	**4.83**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	unit	3	Rp 301,250,000	3	Rp 47,099,060																			
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	unit	3	Rp 216,850,000			3	43,370,000	3	Rp 10,312,424	3	Rp -	3	-	**3**	-	3	10,312,424	100	24	3	10,312,424	**100**	**4.76**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	unit	8	Rp 396,000,000	8	Rp 8,955,000																			
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	unit	8	Rp 539,400,000			8	107,880,000	8	-	8	-	8	-	8	-	8	-	100	-	8	-	**100**	**-**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	unit	2	Rp 140,000,000	2	Rp 42,100,628																			
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	unit	2	Rp 215,000,000			2	43,000,000	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	100	-	2	-	**100**	**-**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
																								Rata-rata Capaian Kinerja		**12**	**12**	**-**	**-**	**1**	**11**	
																								Predikat Kinerja		**SR**	**SR**	**-**	**-**	**SR**	**SR**	
2		**2**	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**- Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)** **- Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK** **- IKM Pelayanan**	**persen**	**98**	**Rp 2,345,615,115**	**98**	**258,736,325**	**98**	**531,801,174**	**50**	**339,078,350**		**-**		**-**		**-**	**50**	**339,078,350**	**5**	**64**	**148**	**597,814,675**	**151**	**151.02**	
		2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Penerapan KTP Berbasis NIK**	**Persen**	**98**	**Rp 1,985,615,115**	**98**	**197,546,900**	**98**	**384,311,617**		**339,078,350**					**232**	-		**339,078,350**	-	88	**98**	**536,625,250**	**100**	**100.00**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EL, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan \	Jumlah Pelayanan Prima dalam peningkatan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	kec	20	Rp 2,231,637,021	**-**	**197,546,900**			**-**	**Rp -**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EL, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan \	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	kec	20	Rp 1,985,615,115	20	Rp 197,546,900	20	384,311,617	20	339,078,350	20	-	**20**	-	20	-	80	339,078,350	400	88	**100**	**536,625,250**	**500**	**500.00**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung

NO	SASARAN	Kode Rekening					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SD. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2024 (AKHIR PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAEARAH		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		14 =10+11+12+13		15 = 14/9*100		16 =(14+8)		17=(16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
2.01. PERENCANAAN																																
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG											**Rp 91,544,349,811**		**Rp 9,042,226,705**		**Rp 12,495,769,719**		**Rp 1,706,439,532**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp 1,706,439,532**		**12**		**Rp 9,962,606,562**		**35**	
1.	**Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							**Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)**	**Skor**	**76,16-79,10 (BB)**		**80.15**		**81.00**		**80.15**		**80.15**		**80.15**				**80.15**		**98.95**		**77.16**		**97.54**		Disdukcapil Kota Bandar Lampung
1.1		**2**	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang**	**Persen**	**100**	**Rp 85,269,402,375**	**100%**	**Rp 7,982,907,030**	**100%**	**10,949,773,199**	**20**	**Rp 1,367,361,182**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	**-**	**80.00**	**1,367,361,182**	**12**	**12.49**	**81**	**9,350,268,212**	**1**	**10.97**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
3		**2**	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**	**kec**	**20**	**Rp 360,000,000**	**20**	**Rp 61,189,425**	**20**	**147,489,557**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	-	100	-	**40**	**61,189,425**	**200**	**200.00**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	12	02	2.03	01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Perjalanan Dinas Rakernas dan Bimtek Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	kec	20	Rp 144,985,585	20	Rp 61,189,425																				
							Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	kec	20	Rp 360,000,000	20	Rp 61,189,425	20	147,489,557	20	-	20	-	20	-	20	-	80	-	60	-	100	61,189,425	500	**500.00**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
																								Rata-rata Capaian Kinerja		**5**	**64**	**-**	**-**	**151**	**151**	
																								Predikat Kinerja		**SR**	**R**	**-**	**-**	**ST**	**ST**	
4		**2**	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**	**Persen**	**100**	**Rp 697,996,101**	**100**	**188,245,000**	**100**	**232,665,367**	**20**	**Rp -**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**		80	-	**80**	-	**180**	**188,245,000**	180	**180.00**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah Akta Kelahiran yang Terbit**	**persen**	**100**	**Rp 697,996,101**	**100**	**188,245,000**	**100**	**232,665,367**	**20**	**Rp -**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	-	80	-	**80**	-	**180**	**188,245,000**	180	**180.00**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	12	03	2.01	02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	kec	20	Rp 335,011,147																				
							Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	kec	20	Rp 697,996,101	20	Rp 188,245,000	20	232,665,367	20	-	20	-	20	-	20	-	80	-	20	-					
																								Rata-rata Capaian Kinerja		**80**	**-**	**-**	**-**	**180**	**180**	
																								Predikat Kinerja		**T**	**SR**	**-**	**-**	**ST**	**ST**	
2		**2**	**12**	**04**			**PROGRAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update**	**persen**	**98**	**Rp 3,231,336,220**	**12**	**Rp 612,338,350**	**12**	**781,529,979**	**12**	**Rp -**	**12**	**Rp -**	**12**	**Rp -**	**12**	-	**12**	-	100	-	**24**	**612,338,350**	**24**	**24.49**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	**persen**	**98**	**Rp 3,231,336,220**	**98**	**Rp 612,338,350**	**100**	**Rp 781,529,979**	**100**	**Rp -**	**100**	**Rp -**	**100**	**Rp -**	**100**	**Rp -**	**98**	-	98	-	**196**	**612,338,350**	**200**	**200.00**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan pameran lampung expo dan lampung fair	bulan	12	Rp 511,804,300	12	Rp 171,889,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan pameran lampung expo dan lampung fair	persen	98	Rp 1,245,388,305	-	-	12	249,077,661	3	-	3	-	3	-	3	-	12	-	100	-	**12**	**-**	**12**	**12.24**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah spanduk, banner dan media informasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	bulan	12	Rp 300,013,185	12	Rp 80,126,000			-	**Rp -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
							Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah spanduk, banner dan media informasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	unit	438	Rp 878,919,040	-	-	12	175,783,808	3	-	3	-	3	-	3	-	12	-	100	-	**12**	**-**	**3**	**2.74**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
		2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	kec	20	Rp 370,121,653					-	**Rp -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

NO	SASARAN	Kode Rekening					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SD. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2024 (AKHIR PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAEARAH		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV									
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		14 =10+11+12+13		15 = 14/9*100		16 =(14+8)		17=(16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
2.01. PERENCANAAN																																
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG											Rp 91,544,349,811		Rp 9,042,226,705		Rp 12,495,769,719		Rp 1,706,439,532		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 1,706,439,532		12		Rp 9,962,606,562		35	
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil							Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	Skor	76,16-79,10 (BB)		80.15		81.00		80.15		80.15		80.15				80.15		98.95		77.16		97.54		Disdukcapil Kota Bandar Lampung
1.1		2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang	Persen	100	Rp 85,269,402,375	100%	Rp 7,982,907,030	100%	10,949,773,199	20	Rp 1,367,361,182	20	-	20	-	20	-	80.00	1,367,361,182	12	12.49	81	9,350,268,212	1	10.97	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
							Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	kec	20	Rp 1,107,028,875	20	Rp 360,322,600	20	356,668,510	20	-	20	-	20	-	20	-	80	-	400	-			-	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
																								Rata-rata Capaian Kinerja		100	-	-	-	24	24	
																								Predikat Kinerja		ST	SR	-	-	SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														12	12,495,769,719.00	20	Rp 1,706,439,532	20	-	20	-	20	-	80	1,706,439,532	12	12	81	9,350,268,212	675	74.83	
TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																										8,000	-	-	-			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										80	SR	-	-			

Faktor Pendorong Keberhasilan

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya

Bandar Lampung, 14 April 2025

Mengetahui
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandar Lampung,

FEBRIANA, S.STP., M.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19860216 200602 2 001

PERKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung memiliki Anggaran Sebesar Rp. 12.495.769.719 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 10.373.560.083 dan Belanja Modal Sebesar Rp. 2.122.209.636.

Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 1.076.439,00 Belanja Modal sebesar Rp. 0 diharapkan dapat lebih baik lagi dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2024 yang lalu, baik realisasi fisik maupun keuangannya. Berdasarkan hasil penilaian kinerja terhadap Program maupun Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025, serta perkiraan capaian Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2026.

Rincian lebih lanjut tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tersaji dalam lampiran (table 2).

Penyusunan Matrik Evaluasi Tahun 2025 Sebagaimana Tabel 2.1 berikut

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Jumlah Anggaran Belanja pada RKPD/Renja Murni Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung mempunyai Program sebanyak 4 Program, kegiatan sebanyak 10 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 10.540.485.119 ,-

3.2 Jumlah Anggaran Belanja pada APBD Murni Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung mempunyai Program sebanyak 4 Program, kegiatan sebanyak 10 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 12.495.769.719 ,-

3.3 Jumlah Anggaran Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2025

Pada perubahan Anggaran 2025, terdapat pengurangan pagu dari beberapa sub kegiatan sebesar Rp. 572.170.917,- dan penambahan pagu dan sub kegiatan sebesar Rp. 552.578.333,- sehingga pagu Anggaran menjadi Rp. 12.476.177.135,-

3.4 Jumlah Sub Kegiatan yang berubah pagunya pada Renja Perubahan tahun 2025 di bandingkan APBD pergeseran

Ada beberapa sub kegiatan yang mengalami perubahan/pergeseran yang akan diusulkan penambahan/pengurangan pagu anggaran yaitu :

a) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
b) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

c) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
d) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
e) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ;
f) Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
g) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil;
h) Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
i) Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
j) Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan.

Sehingga ada perubahan penambahan pagu murni sebesar Rp. 12.495.769.719,- menjadi sebesar Rp. 12.476.177.135,-

3.5 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

3.5.1 Tujuan

Tujuan organisasi pada dasarnya jangka panjang, yang harus diselesaikan selama waktu itu, dan akan mengarahkan kinerja tahunan organisasi. Tujuan mencerminkan pernyataan kondisi yang diinginkan dan bukan merupakan proses atau aktivitas. Untuk merealisasikan pelaksanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, perlu ditetapkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program SKPD secara umum. Disamping itu juga dalam rangka

memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicator) yang terukur.

Adapun tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung adalah :

"*Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien*"

3.5.2 Sasaran

Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan atau penyempurnaan yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan dengan berhasil. Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi pada kegiatan yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Sasaran ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung selama kurun waktu jangka menengah 5 tahun sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

"**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan"**

3.5.3 Strategi

Strategi pada Dinas Kpendudukan dan Pencatatn Sipil adalah :

1. Meningkatkan cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Indeks Kepuasan Masyarakat)
3. Meningkatkan kualitas Teknologi

3.5.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan dari strategi diatas adalah :

1. Pengembangan Inovasi Pelayanan
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
3. Penataan Sistem Jaringan

3.6 PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Faktor-faktor pertimbangan rumusan program dan kegiatan faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Kerja 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Renstra OPD dan Perubahan RPJMD Kota Bandar Lampung
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan terdapat 4 Program 10 Kegiatan dan 27 sub kegiatan yang direncanakan akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2025.
c. Perubahan pada RKPD awal terjadi setelah dilakukan analisis pada kegiatan yang tercantum pada dokumen Rencana Kerja tahun 2025 dan perkiraan kebutuhan pada tahun 2025.
d. Tabel rencana program dan kegiatan 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung pada perubahan anggaran tahun 2025 dikarenakan terkait Mapping Klasifikasi Modifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait berdasarkan Peraturan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdiri dari :

1. **Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dengan Pagu Anggaran **Semula sebesar *Rp. 183.757.020,-*** dan mengalami perubahan anggaran berupa **pengurangan jumlah anggaran sebesar *Rp. 27.530.972,-*** sehingga **total keseluruhan sebesar *Rp. 156.226.078,-***

2. **Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** dengan Pagu Anggaran **Semula sebesar *Rp. 194.638.000,-*** dan mengalami perubahan anggaran berupa **pengurangan jumlah anggaran sebesar *Rp. 38.927.600,-*** sehingga **total keseluruhan sebesar *Rp. 155.710.400,-***

3. **Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** dengan Pagu Anggaran **Semula sebesar *Rp. 143.257.000,-*** dan mengalami perubahan anggaran berupa **pengurangan jumlah anggaran sebesar *Rp. 71.628.500,-*** sehingga **total keseluruhan sebesar *Rp. 71.628.500,-***

4. **Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** dengan Pagu Anggaran **Semula sebesar *Rp. 1.668.321.560,-*** dan mengalami perubahan anggaran berupa **pengurangan jumlah anggaran sebesar *Rp. 250.000.000,-*** sehingga **total keseluruhan sebesar *Rp. 1.418.321.560,-***

5. **Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Pemerintahan di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk** dengan Pagu Anggaran **Semula sebesar *Rp. 147.489.557,-*** dan mengalami perubahan anggaran berupa **pengurangan jumlah anggaran sebesar *Rp. 74.712.919,-***, sehingga **total keseluruhan sebesar *Rp. 72.776.638,-***

6. **Kegiatan Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan sipil** dengan Pagu Anggaran **Semula sebesar *Rp. 232.665.367,-*** dan mengalami perubahan anggaran berupa **pengurangan jumlah anggaran sebesar *Rp. 30.000.000,-***, sehingga **total keseluruhan sebesar *Rp. 202.665.367,-***

7. **Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** dengan Pagu Anggaran **Semula sebesar *Rp. 356.668.510,-*** dan mengalami perubahan anggaran berupa **pengurangan jumlah anggaran sebesar *Rp. 79.370.926,-***, sehingga **total keseluruhan sebesar *Rp. 277.297.584,-***

8. **Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** dengan Pagu Anggaran **semula sebesar *Rp. 1.248.000.000***,- dan mengalami perubahan anggaran berupa **penambahan anggaran sebesar *Rp.144.000.000,-*** sehingga total keseluruhan **menjadi *Rp.1.392.000.000,-***

9. **Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blanko KTP-El** dengan Pagu Anggaran **semula sebesar *Rp.384.311.617,-*** dan mengalami perubahan anggaran berupa **penambahan anggaran sebesar *Rp.408.578.333*** sehingga total keseluruhan **menjadi *Rp.792.889.950,-***

Tabel Rencana Program dan Kegiatan 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Daftar Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1,647,464,032,221.32							1,693,480,785,855.52	
1	01				PENDIDIKAN							678,540,520,150.12							710,390,375,132.62	
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							678,540,520,150.12							710,390,375,132.62	
1	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	98.00	98.00	98.00	98.00	408,519,000,697.62			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98.00	429,281,213,232.49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	80,850,000.00						100.00	83,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	3	3	3	28,875,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	30,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Pendidikan	Dokumen	2		1		25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		26,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3			1							1		
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan	Dokumen	6	3	3		26,975,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		27,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	12			3							3		
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	404,335,102,447.62						100.00	424,870,118,582.50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pendidikan yang Tersedia	Kali	28	14	14		403,441,767,697.62	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		423,950,118,582.50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	3,451			3,451							3,451		
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Pendidikan yang Terlaksana	Bulan	24	12	12		893,334,750.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		920,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98.00	98.00	98.00	98.00	328,690,000.00						98.00	349,094,650.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	11,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	11,500,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	49,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	53,594,650.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	11,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	12,500,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100.00		100.00		25,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.00	25,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1									
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	52,440,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	55,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	6	1	1		8,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		9,500,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4			1							1		
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Persen	100.00	100.00	100.00		11,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		12,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4			1							1		
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100.00	100.00	100.00		160,000,000.00	Bandar Lampung	APBD					170,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**95,000,000.00**							**98.00**	**100,000,000.00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	01	2.07	06	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	90	15	15	15	95,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15	100,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**2,327,709,500.00**							**98.00**	**2,431,500,000.00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Laporan	24	12	12		110,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		115,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Laporan	24	12	12		2,217,709,500.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		2,316,500,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**1,351,648,750.00**							**98.00**	**1,447,500,000.00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	3	3	3	115,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	122,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	10	10	75,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10	80,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	6	1	1	1	11,550,000.00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	12,500,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	6	1	1	1	2,598,750.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	3,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	6	1	1	1	1,147,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	1,230,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	01	02			**Program Pengelolaan Pendidikan**	**APK PAUD**	**Angka**	**79.49**	**36.12**	**59,73**	**65,70**	**248,448,771,952.50**			**Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi**		**72.27**	**258,457,777,025.13**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
						APK SD	**Angka**	**131.42**	**111.05**	**116,83**	**121,51**							**126.37**		
						APM SD	**Angka**	**99.73**	**93.71**	**99.43**	**99,53**							**99.63**		
						APK SMP	**Angka**	**117.25**	**103.86**	**104,23**	**108,40**							**112.74**		
						APM SMP	**Angka**	**90.70**	**80.41**	**84,23**	**86,33**							**88.49**		
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini	**Persen**	**100.00**	**82.46**	**97.72**	**98.72**							**99.72**		
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar	**Persen**	**99.46**	**82.43**	**98.46**	**98.71**							**98.96**		
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan	**Persen**	**100.00**	**89.70**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
1	01	02	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Meningkatkan APK SD**	**Angka**	**131.42**	**111.05**	**116.83**	**121.51**	**115,907,345,952.50**						**126.37**	**121,702,726,750.13**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
						Meningkatkan APM SD	**Angka**	**99.73**	**93.71**	**99.43**	**99.53**							**99.63**		
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	12	2	2	2	8,937,400,000.00	Bandar Lampung	APBD				2	9,384,270,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	90	10	15	15	8,594,405,952.50	Bandar Lampung	DAK				15	9,024,216,750.13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Gedung Sekolah Yang Di Rehab	Sekolah	8	3	4		5,794,740,000.00	Bandar Lampung	DAK				4	6,084,400,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	8			2									
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Siswa	79,650	-	13,275	13,275	10,712,700,000.00	Bandar Lampung	APBD				13,275	11,248,335,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	432		72	72	414,700,000.00	Bandar Lampung	APBD				72	435,435,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	600		100	100	1,990,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				100	2,089,500,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	18		3	3	220,200,000.00	Bandar Lampung	APBD				3	231,210,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan dana Bos Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1,328	182	182	241	79,243,200,000.00	Bandar Lampung	APBD				241	83,205,360,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02		**Pendidikan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama**	**Meningkatkan APK SMP**	**Angka**	**117.25**	**103.86**	**104.23**	**108.40**	**113,153,286,000.00**						**112.74**	**116,397,505,775.00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
						Meningkatkan APM SMP	**Angka**	**90.70**	**80.41**	**84.23**	**86.33**							**88.49**		
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	48	8	8	8	30,452,520,000.00	Bandar Lampung	APBD				8	31,975,146,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	18	3	3	3	7,515,700,000.00	Bandar Lampung	DAK				3	7,891,485,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	30	-	5	5	2,205,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				5	2,315,250,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket	43,500	-	7,250	7,250	5,824,770,000.00	Bandar Lampung	APBD				7,250	6,116,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	6	1	1	1	55,125,000.00	Bandar Lampung	APBD				1	57,880,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Bulan	24	3	12		17,658,000,000.00	Bandar Lampung	APBD					18,540,900,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	132,452			33,113							33,113		
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	486		81	81	503,118,000.00	Bandar Lampung	APBD				81	528,200,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	600	100	100	100	324,450,000.00	Bandar Lampung	APBD				100	340,672,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	6	1	1	1	299,103,000.00	Bandar Lampung	APBD				1	314,057,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	642	45	45	138	48,315,500,000.00	Bandar Lampung	APBD				138	48,317,915,775.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Meningkatkan APK PAUD**	**Angka**	**79.49**	**36.12**	**59.73**	**65.70**	**14,703,490,000.00**						**65.70**	**15,438,664,500.00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Paud	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	24	-	4	4	619,690,000.00	Bandar Lampung	APBD				4	650,674,500.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	610	5	5	600	14,083,800,000.00	Bandar Lampung	DAK				600	14,787,990,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Disalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal**	**Lembaga Non Formal**	**126**	**21**	**21**	**21**	**4,684,650,000.00**						**21**	**4,918,880,000.00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Bulan	24	-	12		198,450,000.00	Bandar Lampung	APBD					208,370,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	11,332			2,833							2,833		
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan dana Bop Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	17	1	1	12	4,486,200,000.00	Bandar Lampung	DAK				1	4,710,510,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**04**			**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Kualifikasi Guru S1/DIV**	**Persen**	**89.16**	**84.44**	**85.90**	**86.97**	**21,572,747,500.00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi**		**88.06**	**22,651,384,875.00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Dilaksananya Pengelolaan Manajemen Pendataan Sertifikasi**	**Bulan**	**72**	**12**	**12**	**12**	**21,572,747,500.00**						**12**	**22,651,384,875.00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Buku	6	1	1	1	4,635,040,000.00	Bandar Lampung	APBD				1	4,866,792,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan*	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Mendapat Insentif	Guru	19,480	9,740	9,740		16,937,707,500.00	Bandar Lampung	APBD					17,784,592,875.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	20			5							5		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	02				KESEHATAN							406,374,840,858.32							412,474,471,001.00	
					DINAS KESEHATAN							301,236,980,974.87							317,748,364,786.93	
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Kesehatan	Persen	98.00	98.00	98.00	98.00	172,483,953,387.37			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98.00	179,347,844,019.92	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50,000,000.00						100.00	60,000,000.00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen	12 Dokumen (6 Dokumen Renja dan 6 Dokumen Perubahan Renja)	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	60,000,000.00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	78,976,763,159.37						100.00	84,487,636,580.54	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kesehatan yang Tersedia	Kali	28	14	14		78,726,763,159.37	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Kesehatan		84,237,636,580.54	Dinas Kesehatan
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	4,776			1,194							1,194		
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Kesehatan yang Terlaksana	Bulan	24	12	12		250,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan		250,000,000.00	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	25,000,000.00						100.00	25,000,000.00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	80.00	80.00	80.00		25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Kesehatan		25,000,000.00	Dinas Kesehatan
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40.00			10							10		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98.00	98.00	98.00	98.00	242,500,000.00						98.00	242,600,000.00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	20,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan	1	20,000,000.00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	75,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan	1	75,000,000.00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	10,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan	1	10,000,000.00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	04	Peneyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100.00	100.00	100.00		41,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan		41,250,000.00	Dinas Kesehatan
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan	1	50,000,000.00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	2	1	1		7,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan		7,500,000.00	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4			1							1		
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100.00	100.00	100.00		8,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan		8,750,000.00	Dinas Kesehatan
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100.00	100.00	100.00		30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan		30,100,000.00	Dinas Kesehatan
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**885,000,000.00**							**98.00**	**545,320,000.00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1			1	440,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan			Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4			1	200,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan	1	190,000,000.00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	1	1	1	145,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan	1	189,320,000.00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4			1	100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan	1	166,000,000.00	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**24,639,974,318.00**							**98.00**	**25,904,571,529.38**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	24	12	12		190,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan		200,000,000.00	Dinas Kesehatan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	24	12	12		24,449,974,318.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan		25,704,571,529.38	Dinas Kesehatan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**967,869,910.00**							**98.00**	**1,385,869,910.00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Kesehatan	1	60,000,000.00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8 unit mobil. 38 unit motor	8 unit mobil. 38 unit motor	8 unit mobil. 38 unit motor	8 unit mobil. 38 unit motor	517,869,910.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan	8 unit mobil. 38 unit motor	517,869,910.00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	1	1	1	10,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Dinas Kesehatan	1	10,000,000.00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1	1	1	195,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Dinas Kesehatan	1	498,000,000.00	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1	1	1	195,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dinas Kesehatan	1	300,000,000.00	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan pelayanan BLUD**	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**	**Unit**	**31**	**31**	**31**	**31**	**66,696,846,000.00**	**Bandar Lampung**	**BLUD**					**66,696,846,000.00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	31	31	31	31	66,696,846,000.00	Bandar Lampung	BLUD			31 puskesmas	1	66,696,846,000.00	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup**	**Angka**	**2**	**2**	**2**	**2**	**126,677,962,830.00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi**		**2**	**136,346,703,271.63**	**Dinas Kesehatan**
						Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	**Kasus**	**10**	**15**	**10**	**10**							**10**		
						Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	**Persen**	**6.20**	**6.60**	**6.50**	**6.40**							**6.30**		
						Tingkat Prevalensi Tubercolosis per 100.000 Penduduk	**Kasus**	**379**	**207**	**393**	**386**							**384**		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**persen**	**84.00**	**80.00**	**80.00**	**82.00**	**31,887,388,965.00**						**82.00**	**35,188,315,608.57**	**Dinas Kesehatan**
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	12	3	3	2	8,500,000,000.00	Bandar Lampung	DAK			Dinas Kesehatan	2	7,561,129,510.15	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	12			3	180,000,000.00	Bandar Lampung	DAK			Dinas Kesehatan	3	180,000,000.00	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya peralatan fogging	Persen	84.00	80.00	80.00		5,773,112,260.00	Bandar Lampung	DAK			Dinas Kesehatan		5,773,112,257.50	Dinas Kesehatan
						Fokus Peningkatan pelayanan di Puskesmas dengan menggunakan alat kesehatan yang sesuai standar dan aman	Persen	84.00	80.00	80.00										
						Tersedianya alat kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan covid 19	Persen	80.00	80.00	80.00										
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	124			31							31		
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase kalibrasi peralatan kesehatan di Puskesmas	persen	80.00	75.00	80.00		180,000,000.00	Bandar Lampung	DAK			Dinas Kesehatan		110,250,000.00	Dinas Kesehatan
						Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	Unit	124			31							31		
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase pengadaan obat dan vaksin	persen	80.00	80.00	80.00		9,163,370,105.00	Bandar Lampung	APBD, DAK			Dinas Kesehatan		13,472,917,243.14	Dinas Kesehatan
						Persentase vitamin untuk pencegahan covid19	persen	80.00	80.00	80.00										
						Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	4			1							1		
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase bahan habis pakai untuk pencegahan dan penanggulangan covid19 Tersedianya kebutuhan obat dan BMHP di Puskesmas baik jenis maupun jumlahya	persen	80.00	80.00	80.00		8,090,906,600.00	Bandar Lampung	APBD, DAK			Dinas Kesehatan		8,090,906,597.78	Dinas Kesehatan
						Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	4			1							1		
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**persen**	**84.00**	**65.00**	**80.00**	**82.00**	**94,740,573,865.00**						**82.00**	**101,058,276,463.06**	**Dinas Kesehatan**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Presentase cakupan pemeriksaan ibu hamil Terlaksananya pertemuan peningkatan tablet FE pada IBU Hamil media penyuluhan untuk Ibu Hamil	Persen	90.00	90.00	90.00		120,461,900.00	Bandar Lampung	DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung		120,461,906.25	Dinas Kesehatan
						Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100.00	100.00	100.00										
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18,563			18,563							18,563		
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah kasus kematian ibu bersalin	kasus	18	20	18		65,000,000.00	Bandar Lampung	DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung		65,000,000.00	Dinas Kesehatan
						Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	Persen	100.00	100.00	100.00										
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18,568			18,563							18,563		
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	18,066			18,066	50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD, DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung	18,066	50,000,000.00	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah kasus kematian balita	kasus	3	3	3		155,446,950.00	Bandar Lampung	APBD, DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung		160,594,251.56	Dinas Kesehatan
						Pelayanan kesehatan balita	Persen	100.00	100.00	100.00										
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	86,268			86,268							86,268		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase pertemuan pengelolaan program UKS - tersedianya Raport Kesehatan Ku SD/MI	persen	45.00		45.00		74,597,900.00	Bandar Lampung	DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung		74,597,906.25	Dinas Kesehatan
						pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	persen	100.00		100.00										
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	154,145			154,145							154,145		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase upaya pencegahan menular dan tidak menular	persen	55.00		55.00		55,000,000.00	Bandar Lampung	DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung		55,000,000.00	Dinas Kesehatan
						pelayanan kesehatan pada usia produktif	persen	100.00		100.00										
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	743,139			743,139							743,139		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase deteksi dini penyakit tidak menular	persen	80.00		80.00		50,000,000.00	Bandar Lampung	DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung		50,000,000.00	Dinas Kesehatan
						pelayanan kesehatan pada usia lanjut	persen	100.00		100.00										
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	88,000			88,000							88,000		
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase upaya pencegahan penyakit menular dan tidak tidak menular	persen	70.00	65.00	70.00		50,000,000.00	Bandar Lampung	DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung		50,000,000.00	Dinas Kesehatan
						pelayanan kesehatan penderita hipertensi	persen	100.00	100.00	100.00										
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	196,149			196,149							196,149		
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	persen	72.00	-	70.00		50,000,000.00	Bandar Lampung	DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung		50,000,000.00	Dinas Kesehatan
						pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	persen	100.00	-	100.00										
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	70,647			70,647							70,647		
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terselenggaranya upaya pencegahan penyakit menular dan tidak tidak menular	persen	82.00	-	82.00		65,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung		65,000,000.00	Dinas Kesehatan
						pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	persen	100.00	-	100.00										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1,851			1,851							1,851		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	persen	82.00	-	82.00		60,000,000.00	Bandar Lampung	DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung		60,000,000.00	Dinas Kesehatan
						pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	persen	100.00	-	100.00										
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	21,426			21,426							21,426		
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	persen	83.00	-	83.00		50,715,000.00	Bandar Lampung	DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung		50,715,000.00	Dinas Kesehatan
						pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (ftuman immunidefisiensi virus)	persen	100.00	-	100.00										
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	28,981			28,981							28,981		
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	20			5	87,000,000.00	Bandar Lampung	APBD, DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung	5	90,000,000.00	Dinas Kesehatan

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana danatau Berpotensi Bencana	Persentase ambulans yang siap dan layak jalan	persen	100.00	100.00	100.00		6,000,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung		613,395,000.00	Dinas Kesehatan
						Persentase petugas kesehatan dalam pelayanan siaga bencana	persen	100.00	100.00	100.00										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	24			6						6		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase pelayanan gizi masyarakat	persen	84.00	-	82.00		888,740,900.00	Bandar Lampung	DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung		888,740,975.00	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	24			6						6		
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase peningkatan kebugaran jasmani dan kesehatan kerja masyarakat di kota Bandar Lampung	persen	82.00	-	82.00		87,798,200.00	Bandar Lampung	APBD, DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung		87,798,138.75	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	12			3						3		
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase perbaikan kesehatan lingkungan di kota Bandar Lampung	persen	82.00	-	82.00		217,301,100.00	Bandar Lampung	APBD, DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung		217,301,096.25	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	12			3						3		
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase pelayanan promosi kesehatan	persen	82.00	80.00	82.00		37,995,800.00	Bandar Lampung	DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung		37,995,733.13	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	12			3						3		
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap, cakupan imunisasi bagi balita dan anak sekolah, cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemilogi <24 jam, cakupan jemaah calon haji mendapat pelayanan kesehatan menuju istithah	persen	95.00	92.00	95.00		140,017,500.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung		140,017,500.00	Dinas Kesehatan
						persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	persen	75.00	71.00	75.00										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	12			3						3		
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase pengelolaan kesehatan ODMK	persen	80.00	80.00	80.00		41,895,000.00	Bandar Lampung	APBD, DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung		41,895,000.00	Dinas Kesehatan
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	1,851			1,851						1,851		
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	persen	80.00	-	80.00		22,050,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung		22,050,000.00	Dinas Kesehatan
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	1,851			1,851						1,851		
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien Baru TB Paru dan BTA Positif (Sembuh dan Pengobatan lengkap)/ Persentase Pasien Paru TB Baru BTA+ yang menyelesaikan Pengobatan (Sembuh maupun Pengobatan lengkap)	persen	80.00	80.00	80.00		180,000,000.00	Bandar Lampung	APBD, DAK			Dinas Kesehatan		2,556,143,218.13	Dinas Kesehatan
						Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	persen	100.00	100.00	100.00										
						Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit berbasis lingkungan lainnya (diare, malaria, dll)	persen	90.00	90.00	90.00										
						insiden TB per 100.000 penduduk	angka	231/100.000	231/100.000	231/100.000										
						peresentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	persen	8.00	8.90	8.90										
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	12			3						3		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Kota Bandar Lampung yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan dengan Program P2KM	jiwa	307,244.00	307,244.00	307244.00		31,351,119,000.00	Bandar Lampung	APBD			Instalasi Farmasi		36,630,117,134.00	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	20			5							5		
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah jamban pasang surut di wilayah pesisir pantai Bandar Lampung	paket	2	1	1		195,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan dan Puskesmas		210,000,000.00	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	4			1							1		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas	31	31	31		24,628,153,765.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan		27,743,834,302.50	Dinas Kesehatan
						Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan manajemen puskesmas sesuai standar	Puskesmas	31	31	31										
						Jumlah dana operasional 2 Puskesmas Rawat Inap	persen	100.00	100.00	100.00										
						Tersedianya dana operasional 10 Puskesmas Rawat Jalan	persen	100.00	100.00	100.00										
						dana operasional 50 Pustu yang tersedia	persen	100.00	100.00	100.00										
						Data Keuangan BLUD yang tersedia	persen	100.00	100.00	100.00										
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	20			5							5		
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	kelurahan siaga aktif (posyandu dan poskeskel aktif	persen	85.00	85.00	85.00		29,233,779,750.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan dan Puskesmas		29,233,779,750.00	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	20			5							5		
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya re-akreditasi	Puskesmas	16	8	8		739,501,100.00	Bandar Lampung	APBD & Dak			Dinas Kesehatan dan Puskesmas		1,649,789,551.25	Dinas Kesehatan
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	31			31							31		
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	terlaksananya pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	persen	85.00	85.00	85.00		44,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan dan Puskesmas		44,050,000.00	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	4			1							1		
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**persen**	**84.00**	**50.00**	**80.00**	**80.00**	**50,000,000.00**							**80.00**	**100,111,200.00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan secara transparan dan akuntabel dan tersedianya akses pengaduan masyarakat	persen	100.00	50.00	100.00		50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kesehatan		100,111,200.00	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	4			1							1		
1	**02**	**03**			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase SDM Kesehatan dengan Kompetensi sesuai Standar**	**Persen**	**83.00**	**71.00**	**73.00**	**75.00**	**243,928,125.00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi**		**75.00**	**256,124,531.25**	**Dinas Kesehatan**
						Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar	**persen**	**62.00**	**59.00**	**60.00**	**60.00**							**60.00**		
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**persen**	**84.00**	**80.00**	**80.00**	**82.00**	**243,928,125.00**							**82.00**	**256,124,531.25**	**Dinas Kesehatan**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	100	100		100	243,928,125.00	Bandar Lampung	APBD, DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100	256,124,531.25	Dinas Kesehatan

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	**02**	**04**			**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar**	**Persen**	**96.00**	**80.00**	**93.00**	**94.00**	**468,317,850.00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi**		**94.00**	**366,733,742.50**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase industri rumah tangga sesuai standar**	**Persen**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**200,000,000.00**						**80.00**	**207,855,542.50**	**Dinas Kesehatan**
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	Persentase Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	Persen	100.00	-	100.00		200,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan dan Puskesmas		207,855,542.50	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	20			5						5		
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindaak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar**	**Persen**	**100.00**	**-**	**100.00**	**100.00**	**268,317,850.00**						**100.00**	**158,878,200.00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Persentase Teralksanaanya Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Persen	100.00	-	100.00		268,317,850.00	Bandar Lampung	APBD, DAK						158,878,200.00	Dinas Kesehatan
						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	200			50						50		
1	**02**	**05**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Persentase Masyarakat ber PHBS**	**Persen**	**80.00**	**50.00**	**75.00**	**73.00**	**1,362,818,782.50**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi**		**73.00**	**1,430,959,221.63**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persen**	**80.00**	**50.00**	**72.00**	**74.00**	**601,665,907.50**						**74.00**	**617,887,907.50**	**Dinas Kesehatan**
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Tersedia media penyuluhan di sarana pelayanan kesehatan	persen	72.00	50.00	72.00		601,665,907.50	Bandar Lampung	APBD, DAK						617,887,907.50	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	20			5						5		
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**	**persen**	**84.00**	**45.00**	**80.00**	**82.00**	**681,567,125.00**						**82.00**	**733,485,564.13**	**Dinas Kesehatan**
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase terlaksananya promosi kesehatan mellalui berbagai media promosi	persen	72.00	45.00	72.00		681,567,125.00	Bandar Lampung	APBD, DAK				74.00	733,485,564.13	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	20			5						5		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	02	05	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**	**persen**	**84.00**	-	**82.00**	**82.00**	**79,585,750.00**						**82.00**	**79,585,750.00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase 'terlaksananya monitoring dalam upaya pemberdayaan masyarakat	persen	72.00	-	72.00		79,585,750.00	Bandar Lampung	APBD, DAK					79,585,750.00	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	8			2							2		
					RSUD A. DADI TJOKRODIPO							**102,740,726,412.02**							**108,611,725,924.27**	
1	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**	**Persen**	**98.00**	**80.80**	**98.00**	**98.00**	**34,029,445,040.00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhanksm dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**36,464,880,483.65**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**14,338,012.50**						**100.00**	**15,054,913.65**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	30	6	6	6	14,338,012.50	Bandar Lampung	APBD			RSUD A. Dadi Tjokrodipo	6	15,054,913.65	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**		**24,443,424,915.00**							**26,319,559,351.00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN RSUD A. Dadi Tjokrodipo yang Tersedia	Jumlah	28 Kali	14 Kali	14 Kali		24,298,159,515.00	Bandar Lampung	APBD			ASN RSUD A. Dadi Tjokrodipo		26,167,030,681.00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan												
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan RSUD A. Dadi Tjokrodipo yang Terlaksana	Bulan	24	12	12		145,265,400.00	Bandar Lampung	APBD			RSUD A. Dadi Tjokrodipo		152,528,670.00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98,205,187.50**						**98.00**	**103,115,447.00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	2	1	1		51,266,250.00	Bandar Lampung	APBD			RSUD A. Dadi Tjokrodipo		53,829,563.00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit													
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	2	1	1		46,938,937.50	Bandar Lampung	APBD			RSUD A. Dadi Tjokrodipo		49,285,884.00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit													
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Bulan**	**72**	**12**	**12**	**12**	**9,473,476,925.00**						**12**	**10,027,150,772.00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	24	12	12		927,753,750.00	Bandar Lampung	APBD			RSUD A. Dadi Tjokrodipo		974,141,438.00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	24	12	12		8,545,723,175.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak RSUD A. Dadi Tjokrodipo		9,053,009,334.00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	02	02			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**60,311,281,372.02**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan**		**100.00**	**63,326,845,440.62**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
						Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk	**Perbandingan**	**1.:5526**	**1 : 9637**	**1.:1689**	**1.:6407**							**1.:6042**		
1	02	02	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengadaan Alat Kesehatan E-Catalog dan Obat Bagi Pasien**	**Paket**	**12**	**1.61**	**2**	**2**	**18,880,757,125.02**						**2**	**19,824,794,981.62**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	6	1	1	1	14,960,869,972.02	Bandar Lampung	DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung	1	15,708,913,470.62	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	6	1.39	1	1	3,919,887,153.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	1	4,115,881,511.00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tk.Daerah Kab/Kota**	**Sarana dan Prasarana Pelayanan RSUD yang Tersedia**	**Bulan**	**72**	**12**	**12**	**12**	**41,430,524,247.00**						**12**	**43,502,050,459.00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah sarana dan prasarana untuk ke penunjangan kegiatan pelayanan (obat,BHP,makan pasien,PMI,dll) Pendapatan BLUD dan Makan Petugas Resiko Tinggi (APBD)	Bulan	24	12	12		41,430,524,247.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	12	43,502,050,459.00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Disediakan	Dokumen	4			1									
1	02	03			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu**	**Persen**	**100.00**	**50.00**	**100.00**	**100.00**	**8,400,000,000.00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi**		**100.00**	**8,820,000,000.00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	03	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**8,400,000,000.00**						**100.00**	**8,820,000,000.00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terlaksananya Penanggulangan Covid-19	Persen	100.00	100.00	100.00		8,400,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	100.00	8,820,000,000.00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
						Terlaksananya Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan	Persen	100.00	100.00	100.00								100.00		
						Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung	Persen	100.00	100.00	100.00								100.00		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang													
1	03				**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**375,005,640,614.50**							**392,202,145,145.23**	
					DINAS PEKERJAAN UMUM							**373,030,090,614.50**							**390,226,595,145.23**	
1	03	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**88,016,218,483.20**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**92,417,029,407.36**	**Dinas Pekerjaan Umum**

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**309,225,000.00**						**100.00**	**324,686,250.00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24 Laporan (6 Laporan Evaluasi Renja, 6 Laporan Evaluasi LPJ, 6 Laporan LKIP, 6 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan)	4 Laporan (1 Laporan Evaluasi Renja, 1 Laporan Evaluasi LPJ, 1 Laporan LKIP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan)	4 Laporan (1 Laporan Evaluasi Renja, 1 Laporan Evaluasi LPJ, 1 Laporan LKIP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan)	4 Laporan (1 Laporan Evaluasi Renja, 1 Laporan Evaluasi LPJ, 1 Laporan LKIP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan)	309,225,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pekerjaan Umum	4 Laporan (1 Laporan Evaluasi Renja, 1 Laporan Evaluasi LPJ, 1 Laporan LKIP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan)	324,686,250.00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**6,457,956,214.50**						**100.00**	**6,780,854,025.23**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pekerjaan Umum yang Tersedia	Kali	28	14	14		5,916,628,714.50	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pekerjaan Umum		6,212,460,150.23	Dinas Pekerjaan Umum
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	360			90							90		
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72	12	12	12	462,577,500.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pekerjaan Umum	12	485,706,375.00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	6 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	78,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pekerjaan Umum	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	82,687,500.00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**525,000,000.00**						**100.00**	**551,250,000.00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	80.00	80.00	80.00		525,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pekerjaan Umum		551,250,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	10			10							10		
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**808,151,918.70**						**98.00**	**848,559,514.64**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	284,879,693.70	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pekerjaan Umum	1	299,123,678.39	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	252,844,725.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pekerjaan Umum	1	265,486,961.25	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	32,812,500.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pekerjaan Umum	1	34,453,125.00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	59,115,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pekerjaan Umum	1	62,070,750.00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	2	1	1		12,600,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pekerjaan Umum		13,230,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4			1							12		
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100.00	100.00	100.00		8,400,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pekerjaan Umum		8,820,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4			1							1		
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100.00	100.00	100.00		157,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pekerjaan Umum		165,375,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**52,500,000.00**						**98.00**	**55,125,000.00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	6	1	1		52,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pekerjaan Umum		55,125,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	100			25							25		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**77,946,750,000.00**						**98.00**	**81,844,087,500.00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	24	12	12		74,205,600,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pekerjaan Umum		77,915,880,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	24	12	12		3,741,150,000.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak Dinas Pekerjaan Umum		3,928,207,500.00	Dinas Pekerjaan Umum
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**1,916,635,350.00**						**98.00**	**2,012,467,117.50**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	2	2	70,455,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Pekerjaan Umum	2	73,977,750.00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	27	27	27	1,811,005,350.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Dinas Pekerjaan Umum	27	1,901,555,617.50	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	6	1	1	1	35,175,000.00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Dinas Pekerjaan Umum	1	36,933,750.00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**02**			**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenagan Kota**	**Persen**	**0.00**	**21.89**	**25.73**	**17.15**	**8,290,590,000.00**			**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas**		**8.576**	**8,705,119,500.00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenagan Kab/Kota**	**Ha**	**0.00**	**21.89**	**25.73**	**17.15**	**8,290,590,000.00**						**17.15**	**8,705,119,500.00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	02	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Persentase Luas Embung Yang direhabilitasi	Persen	75.00	70.00	75.00		210,000,000.00	Bandar Lampung	APBD					220,500,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	8			2							2		
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km	50	7.29	20	30	8,080,590,000.00	Bandar Lampung	APBD				30	8,484,619,500.00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**03**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum**	**Persen**	**46.82**	**45.10**	**45.82**	**46.32**	**15,379,140,000.00**			**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas**		**46.82**	**16,148,097,000.00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
						Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan	**Persen**	**64.30**	**85.76**	**62.80**	**63.30**						**63.80**		
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penduduk berakses air minum**	**Persen**	**46.82**	**32.46**	**45.82**	**46.32**	**15,379,140,000.00**						**46.32**	**16,148,097,000.00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
						Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	**Persen**	**64.30**	**85.76**	**62.80**	**63.30**						**63.30**		
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase jumlah penduduk yang memiliki akses air bersih yang layak	Persen	64.30	62.30	62.80		15,379,140,000.00	Bandar Lampung	APBD, DAK				63.30	16,148,097,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
						Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	liter/ detik	1,318			1,177.00							1,224.08		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	**03**	**05**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**	**Persen**	**62.50**	**87.50**	**61.00**	**61.50**	**10,513,938,600.00**			**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas**		**62.00**	**9,984,635,530.00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase rumah Tinggal Bersanitasi**	**Persen**	**62.50**	**87.50**	**61.00**	**61.50**	**10,513,938,600.00**						**61.50**	**9,984,635,530.00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	unit	1			1	2,000,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				1	2,500,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Persen	61.00	60.50	61.00		5,413,938,600.00	Bandar Lampung	APBD,DAK					5,684,635,530.00	Dinas Pekerjaan Umum
						Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	400			100							100		
1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit				2	1,600,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				1	800,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	05	2.01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	M3/hari				3	1,500,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				2	1,000,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**06**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**Persen**	**70.47**	**66.47**	**67.47**	**68.47**	**19,110,000,000.00**			**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas**		**68.47**	**20,065,500,000.00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**Persen**	**70.47**	**66,47**	**67.47**	**68.47**	**19,110,000,000.00**						**68.47**	**20,065,500,000.00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang Ditangani	Persen	70.47	66,47	67.47		9,660,000,000.00	Bandar Lampung	APBD					10,143,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
						Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	M	49,486.9			11,508.6							12,084.0		
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Cakupan Saluran Drainase Yang Ditangani	Persen	100.00	100.00	100.00		9,450,000,000.00	Bandar Lampung	APBD					9,922,500,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
						Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	7,525			1,750							1,838		
1	**03**	**07**			**Program Pengembangan Permukiman**	**Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantab**	**Persen**	**87.59**	**85.01**	**86.09**	**86.59**	**69,526,638,190.80**			**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi**	**Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas**		**87.09**	**73,002,970,100.34**	**Dinas Pekerjaan Umum**
						Rasio Jumlah Lampu PJU terhadap Panjang Jalan Kota	**Angka**	**22.70**	**20.70**	**21.20**	**21.70**							**22.20**		
1	**03**	**07**	**2.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi mantab**	**Persen**	**87.59**	**85.01**	**86,09**	**86.59**	**69,526,638,190.80**						**86.59**	**73,002,970,100.34**	**Dinas Pekerjaan Umum**
						Rasio jumlah lampu PJU terhadap panjang jalan kota	**Titik Lampu /Km**	**22.70**	**13.05**	**21.20**	**21.70**							**21.70**		
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi mantab	Persen	86,09	85.59	86,09		69,526,638,190.80	Bandar Lampung	APBD					73,002,970,100.34	Dinas Pekerjaan Umum
						Rasio jumlah lampu PJU terhadap panjang jalan kota	Titik Lampu /Km	21.20	20.70	21.20										
						Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	12			3							3		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	**03**	**08**			**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Persentase Pemenuhan Gedung Kantor Pemerintah**	**Persen**	**80.00**	**75.59**	**77.00**	**78.00**	**87,893,396,064.65**			**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas**		**79.00**	**91,888,065,867.88**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri**	**Persen**	**80.00**	**75.59**	**77.00**	**78.00**	**87,893,396,064.65**						**79.00**	**91,888,065,867.88**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri	Persen	77.00	76.00	77.00		87,893,396,064.65	Bandar Lampung	APBD					91,888,065,867.88	Dinas Pekerjaan Umum
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	140			35							35		
1	**03**	**10**			**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap**	**Persen**	**87.31**	**85.60**	**85.81**	**86.31**	**73,250,169,275.85**			**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas**		**86.81**	**76,912,677,739.64**	**Dinas Pekerjaan Umum**
						Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	**Angka**	**1.46**	**1.31**	**1.46**	**1.46**							**1.46**		
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**	**Persen**	**87.81**	**84.50**	**85,81**	**86,31**	**73,250,169,275.85**						**86,31**	**76,912,677,739.64**	**Dinas Pekerjaan Umum**
						Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk		**1.46**	**1.31**	**1.46**	**1.47**							**1.47**		
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Presentase Panjang jaringan Jalan Kota Dalam Kondisi Mantab	Persen	86.59	85.59	86.59		48,081,870,084.15	Bandar Lampung	APBD, DAK					50,485,963,588.36	Dinas Pekerjaan Umum
						Panjang Jalan yang Dibangun	KM	50.26			11.66							12.24		
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Presentase Pemeliharaan Panjang Jalan Kota dalam Kodisi Baik	Persen	100.00	100.00	100.00		15,225,000,000.00	Bandar Lampung	APBD					15,986,250,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
						Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	KM	62.93			14.60							15.33		
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Presentase Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	88.84	83,84	84,84		8,735,799,191.70	Bandar Lampung	APBD					9,172,589,151.29	Dinas Pekerjaan Umum
						Panjang Jembatan yang Dibangun	M	172.41			40.00							42.00		
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Cakupan Jembatan rusak yang direhabilitasi	Persen	100.00	100.00	100.00		1,207,500,000.00	Bandar Lampung	APBD					1,267,875,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M	14,223.41			3,300.00							3,465.00		
1	**03**	**11**			**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi**	**Angka**	**60.00**	**-**	**45.00**	**50.00**	**1,050,000,000.00**			**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas**		**55.00**	**1,102,500,000.00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
						Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi	**Angka**	**55.00**	-	**25.00**	**35.00**							**45.00**		
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Teramoil Konstruksi**	**Rasio tenaga operator/teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Angka**	**60.00**	-	**45.00**	**50.00**	**525,000,000.00**						**50.00**	**551,250,000.00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
						Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi	**Persen**	**55.00**	-	**25.00**	**35.00**							**35.00**		
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	Orang	60.00	-	45.00	50.00	525,000,000.00	Bandar Lampung	APBD					551,250,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Rasio tenaga operator/teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Orang**	**60.00**	-	**45.00**	**50.00**	**525,000,000.00**						**50.00**	**551,250,000.00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
						Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi	**Persen**	**55.00**	-	**25.00**	**35.00**							**35.00**		
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Orang	60	-	45	50	262,500,000.00	Bandar Lampung	APBD				50	275,625,000.00	Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	55.00	-	25.00		262,500,000.00	Bandar Lampung	APBD						275,625,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
						Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan	16			4							4		
1	**03**				**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**							**1,975,550,000.00**							**1,975,550,000.00**	
1	**03**	**08**			**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Persentase SLF yang Diterbitkan**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**1,093,750,000.00**			**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas**		**100.00**	**1,093,750,000.00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
						Persentase KRK yang Terbit	**Persen**	**100.00**	**84.25**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**1,093,750,000.00**						**100.00**	**1,093,750,000.00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK)	Persen	100.00	84.25	100.00		700,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bnadar Lampung			700,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Jumlah SLF yang Diterbitkan	Persen	100.00	100.00	100.00										
						Jumlah SLF Rumah Tinggal Tunggal,Deret, atau Bangunan usaha Mikro Yang Dirbitkan	Persen	100.00	100.00	100.00										
						Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	80			20							20		
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Berkala SLF	Persen	100.00		100.00		36,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung			36,750,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	20			5							5		
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang terbit	Dokumen					105,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung			105,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	8			2							2		
1	03	08	2.01	06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung Cagar Budaya yang terdata	Persen			100.00		126,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung			126,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	Dokumen	20			5							5		
1	03	08	2.01	07	Bantuan Teknis Bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Bangunang Gedung Cagar Budaya yang Tertangani	Persen			100.00		126,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya di Kota Bandar Lampung			126,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bantuan teknis	Dokumen	12			3							3		
1	**03**	**09**			**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda**	**Persen**	**100.00**	**75.00**	**100.00**	**100.00**	**688,544,274.00**			**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan**		**100.00**	**700,000,000.00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda**	**Persen**	**100.00**	**75.00**	**100.00**	**100.00**	**688,544,274.00**						**100.00**	**700,000,000.00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	1			1	150,000,000.00						1	150,000,000.00	
1	03	09	2.01	05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Orang	500			500	150,000,000.00						500	150,000,000.00	
1	03	09	2.01	06	Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Pengawasan 12 bulan, Data hasil Pengawasan Perumahan dan Permukiman	Persen	100.00	100.00	100.00		388,544,274.00	Bandar Lampung	APBD					400,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	4			1							1		
1	**03**	**12**			**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**	**Persen**	**56.20**	**54.26**	**54.65**	**55.15**	**3,082,687,500.00**			**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan**		**55.15**	**4,182,687,500.00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
						Luasan RTH Publik sebesar 20Persen dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan	**Persen**	**4.90**	**4.40**	**4.40**	**4.60**						**4.60**		
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**	**Persen**	**56.20**	**54.26**	**54.65**	**55.15**	**2,482,687,500.00**						**55.15**	**3,582,687,500.00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
						Luasan RTH Publik sebesar 20Persen dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan	**Persen**	**4.90**	**4.40**	**4.40**	**4.60**						**4.60**		
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR	paket	1		1		2,400,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		3,500,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Subtansi Teknis RTR	paket	1		1										
						Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR	paket	1		1										
						Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	4			1							1		
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Operasionalisasi Tim BKPRD Kota Bandar Lampung	Persen	100.00		100.00		55,125,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		55,125,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	4			1							1		
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Perda RTRW Kota Bandar Lampung	Dokumen	1		1		27,562,500.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		27,562,500.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	4			1							1		
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah**	**Dokumen**	**48**			**12**	**600,000,000.00**						**12**	**600,000,000.00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sikronisasi Pemanfaatan Ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	48			12	250,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	12	250,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	4			1	350,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	12	350,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	04				PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							315,000,000.00							330,750,000.00	
					DINAS PEKERJAAN UMUM							315,000,000.00							330,750,000.00	
1	04	02			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rusunawa yang Terpelihara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	315,000,000.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas		100.00	330,750,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase luas kawasan kumuh di kota Bandar Lampung	Persen	2.84	1.317	3.84	3.84	315,000,000.00						3.84	330,750,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase luas kawasan kumuh di kota Bandar Lampung	Persen	3.84	1.317	3.84		315,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung		330,750,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
						Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	1,400			350							360		
					DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							28,636,338,820.54							28,636,338,820.54	
1	04	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Persen	98.00	98.00	98.00	98.00	5,904,819,861.08			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98.00	5,467,972,424.08	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100.00	100.00		100.00	30,000,000.00						100.00	25,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perumahan dan Permukiman	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	25,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	4,239,675,629.08						100.00	4,239,675,629.08	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perumahan dan Permukiman yang Tersedia	Kali	28	14	14		4,124,675,629.08	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Perumahan dan Permukiman		4,124,675,629.08	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan													
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman yang Terlaksana	Bulan	24	12	12		115,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perumahan dan Permukiman		115,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100.00		100.00	100.00	60,000,000.00						100.00	60,000,000.00	
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	80.00		80.00		60,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Perumahan dan Permukiman		60,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	55			55							55		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	**04**	**01**	**2.06.**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**434,930,978.00**						**98.00**	**217,033,541.00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	5,129,178.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perumahan dan Permukiman	1.00	5,129,178.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	75,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perumahan dan Permukiman	1	43,757,563.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	9,001,800.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perumahan dan Permukiman	1	9,001,800.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100.00	100.00	100.00		60,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perumahan dan Permukiman		28,125,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	75,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perumahan dan Permukiman	1	25,220,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1	1	1		10,800,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perumahan dan Permukiman		10,800,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen													
1	04	01	2.06	09	Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100.00	100.00	100.00		200,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perumahan dan Permukiman		95,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24			6							6		
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**478,000,000.00**						**98.00**	**453,000,000.00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	60	10	10	10	50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perumahan dan Permukiman	10	25,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.07	06	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60	10	10	10	316,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perumahan dan Permukiman	10	316,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30	5	5	5	112,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perumahan dan Permukiman	5	112,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**380,250,000.00**						**98.00**	**379,050,000.00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	24	12	12		65,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perumahan dan Permukiman		63,800,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	24	12	12		315,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak Dinas Perumahan dan Permukiman		315,250,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**281,963,254.00**						**98.00**	**94,213,254.00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	33,532,088.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Perumahan dan Permukiman	1	33,532,088.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	3	3	50,431,166.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Dinas Perumahan dan Permukiman	3	50,431,166.00	Dinas Perumahan dan Permukiman

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	04	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	5	5	198,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman	5	10,250,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**	**02**			**Program Pengembangan Perumahan (SPM)**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana**	**Persen**	**100.00**		**100.00**	**100.00**	**300,000,000.00**			**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan**		**100.00**	**300,000,000.00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100.00**		**100.00**	**100.00**	**50,000,000.00**						**100.00**	**50,000,000.00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	4			1	50,000,000.00						1	50,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**	**02**	**2.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang tersusun**	**Persen**	**100.00**		**100.00**	**100.00**	**50,000,000.00**						**100.00**	**50,000,000.00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	02	2.02	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	4			1	50,000,000.00						1	50,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100.00**		**100.00**	**100.00**	**200,000,000.00**						**100.00**	**200,000,000.00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	02	2.03	04	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Persentase warga negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100.00		100.00		200,000,000.00	Bandar Lampung	APBD					200,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	8			2							2		
1	**04**	**03**			**Program Kawasan Permukiman**	**Persentase RTLH Yang Tertangani**	**Persen**	**83.11**	**31.20**	**23.63**	**43.89**	**21,400,000,000.00**			**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas**		**43.89**	**21,600,000,000.00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase RTLH yang Tertangani**	**Persen**	**83.11**	**31.20**	**23.63**	**43.89**	**21,400,000,000.00**						**43.89**	**21,600,000,000.00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	562.00	924.00	700.00	600.00	21,000,000,000.00	Bandar Lampung	APBD, DAK				600.00	21,000,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Luas kawasan Permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Ha	34.81	259.78	174.89		400,000,000.00	Bandar Lampung	APBD					600,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	8			2							2		
1	**04**	**05**			**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**	**Persen**	**100.00**		**100.00**	**100.00**	**205,000,000.00**			**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas**		**100.00**	**205,000,000.00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**	**Persen**	**100.00**		**100.00**	**100.00**	**205,000,000.00**						**100.00**	**205,000,000.00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	100.00		100.00		105,000,000.00	Bandar Lampung	APBD					105,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	8			2							2		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	04	05	2.01	05	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Dokumen	4			1	100,000,000.00						1	100,000,000.00	
1	**05**				**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**94,290,526,147.98**							**97,099,789,166.75**	
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**52,032,580,766.98**							**54,791,843,785.75**	
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**50,419,132,467.98**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**53,097,723,071.75**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**60,000,000.00**						**100.00**	**75,000,000.00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Satpolpp	Dokumen	10	5	5		60,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Satuan Polisi Pamong Praja		75,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	20			5						5		
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**8,876,699,020.98**						**100.00**	**9,205,419,425.75**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Satpol PP yang Tersedia	kali	28	14	14		8,686,699,020.98	Bandar Lampung	APBD			ASN Satuan Polisi Pamong Praja		8,975,419,425.75	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan													
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Satpol PP yang Terlaksana	bulan	24	12	12		190,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Satuan Polisi Pamong Praja		230,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100,000,000.00**						**100.00**	**150,000,000.00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	80.00	80.00	80.00		100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN Satuan Polisi Pamong Praja		150,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang													
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**197,000,000.00**						**98.00**	**351,000,000.00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	15,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Satuan Polisi Pamong Praja	1	28,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	45,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Satuan Polisi Pamong Praja	100.00	80,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	9,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Satuan Polisi Pamong Praja	100.00	35,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Satuan Polisi Pamong Praja	100.00	60,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Persen	100.00	100.00	100.00		8,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Satuan Polisi Pamong Praja		28,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen													
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4			1	15,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Satuan Polisi Pamong Praja	100.00	25,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100.00	100.00	100.00		50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Satuan Polisi Pamong Praja		65,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4			1	20,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Satuan Polisi Pamong Praja	1	30,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**121,000,000.00**						**98.00**	**178,000,000.00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	1		1		16,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Satuan Polisi Pamong Praja		28,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit													
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	2	1	1		70,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Satuan Polisi Pamong Praja		100,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit													
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit					35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Satuan Polisi Pamong Praja	1	50,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**40,299,700,000.00**						**98.00**	**42,108,000,000.00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1	20,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Satuan Polisi Pamong Praja	1	40,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	24	12	12		40,279,700,000.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja		42,068,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**764,733,447.00**						**98.00**	**1,030,303,646.00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	37,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja	1	75,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	20	20	20	680,733,447.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja	20	845,303,646.00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					29,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja		60,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					18,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja		50,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**			**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**1,613,448,299.00**			**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**		**100.00**	**1,694,120,714.00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
						Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**1,054,448,299.00**						**100.00**	**1,096,120,714.00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	02	2.01	02	Penindakkan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Elektabilitas penerapan perda/perwali tentang penertiban pkl dikota bandar lampung	kali	360	360	360		410,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung		420,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah kasus gangguan ketintraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertibandan penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Kasus													

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah siskamling di kota bandar lampung	Persen	77.00	77.00	77.00		100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung		110,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentrama, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Dokumen	4			1							1		
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan sdm linmas di kota bandar lampung	Persen	77.00	77.00	77.00		180,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung		200,500,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	4			1							1		
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan pengetahuan dan kapasitas sdm pol pp	Persen	77.00	77.00	77.00		364,448,299.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung		365,620,714.00	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang												
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**559,000,000.00**						**100.00**	**598,000,000.00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pengawasan atas kepatuhan melalui operasi penegakan perda	kali	288	144	144		334,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung		348,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Laporan	4			1							1		
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Bupati/Walikota	Jumlah ketenteraman dan ketertiban umum bagi masyarakat melalui operasi yustisi dikota bandar lampung	kali	48	24	24		225,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung		250,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota yang dapat ditangani sesuai SOP	Laporan	4			1							1		
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**42,257,945,381.00**							**42,307,945,381.00**	
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**39,804,311,881.00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**39,804,311,881.00**	**BPBD**
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**8,634,054,469.00**						**100.00**	**8,634,054,469.00**	**BPBD**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN BPBD yang Tersedia	Bulan	28	14	14		7,903,074,469.00	Bandar Lampung	APBD			ASN BPBD		7,903,074,469.00	BPBD
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	90			90							90		
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan BPBD yang Terlaksana	Bulan	24	12	12		730,980,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPBD		730,980,000.00	BPBD
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**900,500,000.00**						**100.00**	**900,500,000.00**	**BPBD**
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6	1	1	1	850,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN BPBD	1	850,500,000.00	BPBD
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	80.00	80.00	80.00		50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN BPBD		50,000,000.00	BPBD
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	120			30							30		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**1,169,864,412.00**						**98.00**	**1,169,864,412.00**	**BPBD**
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	15,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPBD	12	15,000,000.00	BPBD
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	39,739,562.00	Bandar Lampung	APBD			BPBD	12	39,739,562.00	BPBD
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	16,534,850.00	Bandar Lampung	APBD			BPBD	12	16,534,850.00	BPBD
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	24	12	12		840,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPBD		840,000,000.00	BPBD
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	6	1	1	1	41,390,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPBD	1	41,390,000.00	BPBD
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	2	1	1		7,200,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPBD		7,200,000.00	BPBD
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	40			10							10		
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	24	12	12		210,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPBD		210,000,000.00	BPBD
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**1,518,800,000.00**						**98.00**	**1,518,800,000.00**	**BPBD**
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6	1	1	1	650,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPBD	1	650,000,000.00	BPBD
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	2	2	2	456,100,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPBD	2	456,100,000.00	BPBD
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	2	2	2	412,700,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPBD	2	412,700,000.00	BPBD
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**24,002,175,000.00**						**98.00**	**24,002,175,000.00**	**BPBD**
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	24	12	12		1,292,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPBD		1,292,000,000.00	BPBD
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	24	12	12		22,710,175,000.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak BPBD		22,710,175,000.00	BPBD
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**3,578,918,000.00**						**98.00**	**3,578,918,000.00**	**BPBD**
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	2	2	118,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan BPBD	2	118,000,000.00	BPBD
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	27	27	27	2,397,918,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional BPBD	27	2,397,918,000.00	BPBD

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	20	20	163,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan dan Mesin Lainnya BPBD	20	163,000,000.00	BPBD
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit		2	2	2	900,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya BPBD	2	900,000,000.00	BPBD
1	**05**	**03**			**Program Penanggulangan Bencana**	**Cakupan Pelayanan Bencana Daerah**	**Persen**	**100.00**	-	**100.00**	**100.00**	**1,650,000,000.00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,**	**Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan**		**100.00**	**1,700,000,000.00**	**BPBD**
						Kelurahan Siaga Bencana	**Angka**	**12**	-	**6**	**8**							**10**		
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi**	**Dokumen**	**4**			**1**	**300,000,000.00**						**1**	**350,000,000.00**	**BPBD**
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	4			1	300,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	350,000,000.00	BPBD
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persen**	**100.00**		**100.00**	**100.00**	**1,050,000,000.00**							**100.00**	**1,050,000,000.00**	**BPBD**
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	120		70	75	100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	75	100,000,000.00	BPBD
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	10		2	2	150,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPBD	2	150,000,000.00	BPBD
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	20			5	800,000,000.00					Masyarakat Kota Bandar Lampung	5	800,000,000.00	BPBD
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan**	**Orang**					**300,000,000.00**							**300,000,000.00**	**BPBD**
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	4			1	100,000,000.00					Masyarakat Kota Bandar Lampung	100	100,000,000.00	BPBD
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	100			100	200,000,000.00					Masyarakat Kota Bandar Lampung	100	200,000,000.00	BPBD
1	**05**	**04**			**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Mnajemen Kebakaran (WMK)**	**Persen**	**82.00**		**76.00**	**78.00**	**803,633,500.00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,**	**Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan**		**80.00**	**803,633,500.00**	**BPBD**
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persen**					**803,633,500.00**							**803,633,500.00**	**BPBD**
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2		1	2	453,633,500.00	Bandar Lampung	APBD			BPBD	1	453,633,500.00	BPBD
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/ Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa / Kelurahan	2	-	1	2	350,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPBD	1	350,000,000.00	BPBD

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	**06**				**SOSIAL**							**24,745,766,948.18**							**26,111,935,921.00**	
					DINAS SOSIAL							**24,745,766,948.18**							**26,111,935,921.00**	
1	**06**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**4,800,041,935.18**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**5,164,992,657.73**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**18,762,558.00**						**100.00**	**19,700,000.00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	2	2	2	18,762,558.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Sosial	2	19,700,000.00	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**4,159,620,622.18**						**100.00**	**4,448,802,065.73**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	Kali	28	14	14		4,060,020,622.18	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Sosial		4,344,222,065.73	Dinas Sosial
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	100												
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Administrasi keuangan terlaksana	Bulan	24	12	12		99,600,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Sosial		104,580,000.00	Dinas Sosial
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**5,000,000.00**						**100.00**	**5,250,000.00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Persentase peningkatan pegawai	Persen	80.00	80.00	80.00		5,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Sosial		5,250,000.00	Dinas Sosial
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20			5							5		
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**140,200,001.00**						**98.00**	**148,959,000.00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	9,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Sosial	1	9,450,000.00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	02	Penyediaaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	30,000,001.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Sosial	1	31,500,000.00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	10,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Sosial	1	10,500,000.00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	6,025,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Sosial	1	6,325,250.00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	11,200,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Sosial	1	11,760,000.00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	1	1	1	5,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Sosial	1	5,250,000.00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah layanan makanan dan minuman tamu	Persen	100.00	100.00	100.00		3,975,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Sosial	100.00	4,173,750.00	Dinas Sosial
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4			1							1		
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan perjalanan dinas kantor	Persen	100.00	100.00	100.00		65,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Sosial	100.00	70,000,000.00	Dinas Sosial
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1									

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	**06**	**01**	**2.07**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**								**98.00**	**42,000,000.00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Di Sediakan	Unit	2									Dinas Sosial	2	42,000,000.00	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**357,326,666.00**						**98.00**	**375,192,900.00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang tersedia	Bulan	24	12	12		90,576,666.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Sosial		95,105,400.00	Dinas Sosial
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan keuangan kantor yang tersedia	Bulan	24	12	12		266,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak Dinas Sosial		280,087,500.00	Dinas Sosial
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**119,132,088.00**						**98.00**	**125,088,692.00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	35,032,088.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Sosial	1	36,783,692.00	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15	15	15	22,100,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Dinas Sosial	15	23,205,000.00	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	15	15	52,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Dinas Sosial	15	54,600,000.00	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	3	3	10,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Sosial	3	10,500,000.00	Dinas Sosial
1	**06**	**02**			**Program Pemberdayaan Sosial**	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial**	**Persen**	**87.00**	**81.14**	**78.00**	**81.00**	**9,722,480,198.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**84.00**	**10,208,603,457.00**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**02**	**2.03**		**Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota**	**Presentase pelayanan pengelolaan kelembagaan sosial**	**Persen**	**87.00**	**81.14**	**78.00**	**81.00**	**9,722,480,198.00**						**81.00**	**10,208,603,457.00**	**Dinas Sosial**
1	06	02	2.03	03	Peningkatan kemampuan kompetensi sumber kesejahteraan sosial keluaraga kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya peringatan hari pahlawan dan pemberian bantuan terhadap keluarga pahlawan	Orang	140	70	70		102,105,198.00	Bandar Lampung	APBD			Keluarga Pahlawan		104,110,457.00	Dinas Sosial
						Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	280			70							70		
1	06	02	2.03	04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya organisasi keagamaan yang dibantu	Persen	100.00	100.00	100.00		8,972,375,000.00	Bandar Lampung	APBD			Organisasi Keagamaan		9,418,493,000.00	Dinas Sosial
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	100			250							250		
1	06	02	2.03	05	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Terlaksananya kelembagaan sosial	Kecamatan	20	20	20		648,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Lembaga Sosial		686,000,000.00	Dinas Sosial
						Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	60			16							15		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	**06**	**04**			**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial**	**Persen**	**88.00**	**6.14**	**77.00**	**80.00**	**1,341,145,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**84.00**	**1,358,202,000.00**	**Dinas Sosial**
						Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		**Dinas Sosial**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial**	**Presentase pelayanan Rehabilitasi lansia, penyandang cacat dan orang terlantar yang tertangani**	**Orang**			**50**		**1,151,145,000.00**							**1,168,202,000.00**	**Dinas Sosial**
1	06	04	2.01	01	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	65	50	50	76,445,000.00	Bandar Lampung	APBD			Penyandang Cacat	50	84,067,000.00	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	02	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	134	134	134	134	60,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Penyandang Cacat	134	60,000,000.00	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200			50	500,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				50	500,000,000.00	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	80			20	314,700,000.00	Bandar Lampung	APBD			Penyandang Cacat	20	324,135,000.00	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi pembuatan NIK, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak.	Jumlah orang yg terpenuhi kebutuhan pembuatan NIK, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas kewenangan kab/kota.	Orang	1,600			400	200,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Penyandang Disabilitas	400	200,000,000.00	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA diluar panti sosial**	**Presentase pelayanan pengelolaan rehabilitasi sosial**	**Orang**			**108**	**108**	**190,000,000.00**						**108**	**190,000,000.00**	**Dinas Sosial**
1	06	04	2.02	08	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	108	117	108	108	20,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Orang Terlantar	108	20,000,000.00	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Terlaksananya Gelandangan psikotik orgil yang tertib	Orang	22	17	22		170,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Gelandangan dan Pengemis		170,000,000.00	Dinas Sosial
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	4			1							1		
1	**06**	**05**			**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial**	**Persen**	**24.00**	**1.99**	**21.00**	**22.00**	**4,314,474,815.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**22.00**	**4,812,512,806.27**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota**	**Pelayanan pengelolaan pendampingan PKH dan data PMKS PSKS**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4,314,474,815.00**						**100**	**4,812,512,806.27**	**Dinas Sosial**
1	06	05	2.02	01	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Terlaksananya verval data PMKS dan PSKS yang terlaksana	Kecamatan	20	20	20		500,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Penmerintah Kota Bandar Lampung		500,000,000.00	Dinas Sosial
						Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	92,698			92,698							92,698		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Petugas Pendampingan dalam Pencairan Bantuan	Orang	189	189	189		3,814,474,815.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung		4,312,512,806.27	Dinas Sosial
						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	55,948			55,948							55,948		
1	**06**	**06**			**Program Penanganan Bencana**	**Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat**	**Persen**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**4,567,625,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**100.00**	**4,567,625,000.00**	**Dinas Sosial**
						Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Mengunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	**Persen**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**						**100.00**		
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial**	**Kecamatan**	**20**	**20**	**20**	**20**	**4,567,625,000.00**						**20**	**4,567,625,000.00**	**Dinas Sosial**
1	06	06	2.01	01	Penyediaan makanan	Terlaksananya bantuan Terhadap masyarakat Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	orang	20	20	20		3,567,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung		3,567,625,000.00	Dinas Sosial
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	37,024			37,024							37,024		
1	06	06	2.01	02	Penyediaan sandang	Jumlah orang yg mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yg tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenagan kab/kota.	Orang	9,000			2,250	500,000,000.00	B. Lampung	APBD				2,250	500,000,000.00	Dinas Sosial
1	06	06	201	03	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi kewenangan kab/kota	Unit	80			20	350,000,000.00	B. Lampung	APBD				20	350,000,000.00	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	05	Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yg mendapatkan pelayanan dukungan psikososial	Orang	800			200	150,000,000.00	B. Lampung	APBD				200	150,000,000.00	Dinas Sosial
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							-							-	
2	**07**				**TENAGA KERJA**							**5,706,679,648.46**							**6,066,725,102.68**	
					DINAS TENAGA KERJA							**5,706,679,648.46**							**6,066,725,102.68**	
2	**07**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**4,714,368,955.83**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**5,024,798,875.43**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**				**39,800,000.00**							**43,900,000.00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen			2	2	39,800,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Tenaga Kerja	2	43,900,000.00	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,851,968,590.21**						**100.00**	**4,133,458,741.52**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Disnaker yang Tersedia	kali	28	14	14		3,735,573,590.21	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Tenaga Kerja	14	3,997,063,741.52	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan													
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja yang Terlaksana baik	Bulan	28	12	12		116,395,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Tenaga Kerja	12	136,395,000.00	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**238,700,365.62**						**98.00**	**252,160,133.91**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			1	1	9,101,400.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Tenaga Kerja	1	10,900,000.00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			1	1	48,884,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Tenaga Kerja	1	49,700,000.00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			1	1	14,801,465.62	Bandar Lampung	APBD			Dinas Tenaga Kerja	1	16,940,133.91	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Bulan			12		8,700,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Tenaga Kerja		10,270,000.00	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
2	07	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			1	1	52,264,500.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Tenaga Kerja	1	54,870,000.00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Bulan			12		7,800,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Tenaga Kerja		8,700,000.00	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen													
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100.00		100.00		19,700,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Tenaga Kerja		20,980,000.00	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4			1							1		
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100.00		100.00		77,449,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Tenaga Kerja		79,800,000.00	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**147,000,000.00**						**98.00**	**153,900,000.00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.07	05	Pengadan Mebel	Persentase Pengadaan Meubelair Kantor	Persen			100.00		47,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Tenaga Kerja		49,900,000.00	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit													
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan Kantor	Persen			100.00		88,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Tenaga Kerja		89,700,000.00	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit													
2	07	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	paket			1		12,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Tenaga Kerja		14,300,000.00	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit													
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**297,350,000.00**						**98.00**	**299,350,000.00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.08	02	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	24	12	12		30,600,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Tenaga Kerja		32,600,000.00	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	24	12	12		266,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak Dinas Tenaga Kerja		266,750,000.00	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**139,550,000.00**						**98.00**	**142,030,000.00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Tenaga Kerja	1	41,000,000.00	Dinas Tenaga Kerja

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	7	7	86,050,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Dinas Dinas Tenaga Kerja	7	86,050,000.00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					13,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan dan Mesin Dinas Tenaga Kerja		14,980,000.00	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**02**			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Persentase Informasi Data Ketenagakerjaan yang Disusun Berbasis Sistem Informasi**	**Persen**	**100.00**		**100.00**	**100.00**	**110,029,500.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**		**100.00**	**115,530,975.00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Penyediaan informasi ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung**	**Persen**	**100.00**		**100.00**	**100.00**	**110,029,500.00**						**100.00**	**115,530,975.00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Penyusunan data informasi ketenagakerjaan melalui penggunaan teknologi dan sistem informasi / web system	Persen	100.00		100.00		110,029,500.00	Bandar Lampung	APBD				100.00	115,530,975.00	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan											1		
2	**07**	**03**			**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja**	**Persen**	**31.75**	**-**	**29.25**	**30.75**	**205,327,946.25**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**		**31.25**	**215,594,343.56**	**Dinas Tenaga Kerja**
						Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi	**Persen**	**80.00**	**5.00**	**50.00**	**75.00**							**75.00**		
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri**	**Orang**		**-**	**40**	**40**	**137,502,946.25**						**40**	**143,550,343.56**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang		-	40	40	137,502,946.25	Bandar Lampung	APBD				40	143,550,343.56	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Meningkatnya Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina**	**LPK**		**-**	50	50	**25,900,000.00**						50	**28,150,000.00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga		-	50	50	25,900,000.00	Bandar Lampung	APBD				50	28,150,000.00	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya**	**perusahaan**		**10**	**12**	**15**	**41,925,000.00**						**15**	**43,894,000.00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan		10	12	15	41,925,000.00	Bandar Lampung	APBD				15	43,894,000.00	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Rasio penduduk yang bekerja**	**Persen**	**95.70**	**91.10**	**93.12**	**92.55**	**248,062,500.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**		**94.81**	**260,465,625.00**	**Dinas Tenaga Kerja**
						Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	**Persen**	**94.42**	**91.15**	**92.57**	**93.02**						**93.97**		
						Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	**Persen**	**4.79**	**5.50**	**3.41**	**3.52**						**4.79**		
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	**Persen**	**79.86**	**67.18**	**72.35**	**74.90**						**76.62**		
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri**	**Orang**		**-**	**80**	**85**	**248,062,500.00**						**85**	**260,465,625.00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	04	2.03	03	Job fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang		-	80	85	248,062,500.00	Bandar Lampung	APBD				85	260,465,625.00	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun**	**Persen**	**51.55**	**8.27**	**55.21**	**54.68**	**428,890,746.38**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**		**52.32**	**450,335,283.69**	**Dinas Tenaga Kerja**
						Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	**Persen**	**53.92**	**39.47**	**42.00**	**49.02**						**52.63**		
						Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	**Persen**	**82.00**	**1.70**	**62.00**	**75.00**						**79.00**		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan penetapan UMK dan sosialisasi KHL Kota Bandar Lampung.**	**SK**		-	**1**	**1**	**321,735,000.00**						**1**	**332,100,000.00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pencapaian Standar Upah Minimal Kesejahteraan Pekerja	Persen	100.00	-	100.00		321,735,000.00	Bandar Lampung	APBD					332,100,000.00	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan													
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100.00**	-	**100.00**	**100.00**	**107,155,746.38**						**100.00**	**118,235,283.69**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/ Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencapaian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100.00	-	100.00		107,155,746.38	Bandar Lampung	APBD					118,235,283.69	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara													
2	**08**				**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**8,424,083,809.14**							**8,839,582,727.10**	
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**8,424,083,809.14**							**8,839,582,727.10**	
2	**08**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**4,954,328,884.14**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**5,202,045,328.35**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**33,075,000.00**						**100.00**	**34,728,750.00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	01	2.01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15 Dokumen (Renja, LKIP, LPPD, LPJ dan RKA)	5 Dokumen (Renja, LKIP, LPPD, LPJ dan RKA)	5 Dokumen (Renja, LKIP, LPPD, LPJ dan RKA)	5 Dokumen (Renja, LKIP, LPPD, LPJ dan RKA)	33,075,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5 Dokumen (Renja, LKIP, LPPD, LPJ dan RKA)	34,728,750.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**4,250,651,529.47**						**100.00**	**4,463,184,105.94**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	01	2.02	01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Tersedia	kali	28	14	14		4,053,786,924.47	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		4,256,476,270.69	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	128			32									
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas PPPA yang Terlaksana	Bulan	24	12	12		168,199,605.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		176,609,585.25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
2	08	01	2.02	05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	28,665,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	30,098,250.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**149,183,799.67**						**98.00**	**156,642,989.65**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	4,031,622.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	4,233,203.10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	23,465,713.64	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	24,638,999.32	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	7,668,504.90	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	8,051,930.15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	24	12	12		2,315,250.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2,431,012.50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	22,289,959.13	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	23,404,457.09	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-uangan yang Tersedia	Paket	6	1	1	1	3,969,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		4,167,450.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4			1							1		
2	08	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	16,537,500.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		17,364,375.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4			1							1		
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalana Dinas Kantor	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	68,906,250.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		72,351,562.50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**128,716,875.00**						**98.00**	**135,152,718.75**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor	Paket	2	1	1		41,068,125.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		43,121,531.25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4			1							1		
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	2	1	1		33,075,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		34,728,750.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4			1							1		
2	08	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasara Pendukung Gedung Kantor	Paket	2	1	1		54,573,750.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		57,302,437.50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4			1							1		
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**224,083,125.00**						**98.00**	**235,287,281.25**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik yang Tersedia	Bulan	24	12	12		11,025,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		11,576,250.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	24	12	12		213,058,125.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		223,711,031.25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**168,618,555.00**						**98.00**	**177,049,482.75**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	36,674,662.50	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	38,508,395.63	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	2	2	49,256,392.50	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	51,719,212.13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	82,687,500.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	86,821,875.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**02**			**Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)**	**Angka**	**74**		**73**	**73**	**840,000,000.00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi**		**74**	**882,000,000.00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
						Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	**Lembaga**	**122**		**34**	**64**							**93**		
						Presentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	**Persen**	**100.00**		**71.88**	**81.25**							**90.63**		
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga**	**Orang**	**5,000.00**	**0**	**1,000**	**1,500**	**840,000,000.00**						**1,500**	**882,000,000.00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	5,000.00	0	1,000	1,500	840,000,000.00						1,500	882,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**			**Program Perlindungan Perempuan**	**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**659,413,965.00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi**		**100.00**	**692,384,663.25**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
						Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**6**	**1**	**1**	**1**	**163,873,500.00**						**1**	**172,067,175.00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Orang	104 Orang	52 Orang	52 Orang		105,000,000.00	Bandar Lampung	APBD					110,250,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaann Kebijakan , Program & Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4			1							1		
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota (DAK)	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Orang	40 Kasus	20 Kasus	20 Kasus		58,873,500.00	Bandar Lampung	DAK					61,817,175.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	20			20							1		
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota**	**Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**	**Layanan**	**40.00**	**20.00**	**20.00**	**25.00**	**181,228,950.00**							**190,290,397.50**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Kasus	40 Kasus	20 Kasus	20 Kasus		181,228,950.00	Bandar Lampung	DAK					190,290,397.50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	25			25							30		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkataan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan**	**Tahun**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**314,311,515.00**	Bandar Lampung	**APBD**					**330,027,090.75**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	100	100	100	100	188,311,515.00	Bandar Lampung	APBD				100	197,727,090.75	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	kali	12	12	12		126,000,000.00	Bandar Lampung	APBD					132,300,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4			1						2		
2	**08**	**04**			**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Presentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Persen**	**83.88**	**6.17**	**35.55**	**51.67**	**441,708,750.00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan**		**67.78**	**463,794,187.50**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Persen**	**83.88**	**6.17**	**35.00**	**52.00**	**441,708,750.00**						**52.00**	**463,794,187.50**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kg dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PUG dan Perencanaan Penganggaran yang Responsi/Gender pada OPD/kecamatan	Persen	67.78	77.00	18.88		72,345,000.00	Bandar Lampung	APBD					75,962,250.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Keseretaan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	4			1						1		
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang mendapatkan keterampilan untuk peningkatan ekonomi keluarga	Orang	200	-	200		369,363,750.00	Bandar Lampung	APBD					387,831,937.50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah Perempuan yang mendapatkan keterampilan untuk peningkatan ekonomi produktif	Orang	40	35	40										
						Jumlah Perempuan Mendapatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	Orang	100	-	100										
						Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupten/Kota	Laporan	4			1						1		
2	**08**	**05**			**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persen**	**3.54**	**2.54**	**2.79**	**3.04**	**145,667,760.00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi**		**3.29**	**152,951,148.00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
						Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	**Persen**	**63.57**	**62.97**	**62.97**	**63.17**						**63.37**			
						Rasio KDRT yang Tertangani	**Persen**	**1.53**	**0.53**	**0.78**	**1.03**						**1.28**			
						Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	**Persen**	**56.31**	**55.31**	**55.56**	**55.81**						**56.06**			
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persen**	**3.54**	**2.54**	**2.79**	**3.04**	**145,667,760.00**						**3.29**	**152,951,148.00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
						Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	**Persen**	**63.57**	**62.97**	**62.97**	**63.17**						**63.37**			
						Rasio KDRT yang Tertangani	**Persen**	**1.53**	**0.53**	**0.78**	**1.03**						**1.28**			
						Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	**Persen**	**56.31**	**55.31**	**55.56**	**55.81**						**56.06**			
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	6	1	1	1	78,750,000.00	Bandar Lampung	APBD				1	82,687,500.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender & Anak Dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupeten/Kota	Dokumen	6	1	1	1	66,917,760.00	Bandar Lampung	APBD				1	70,263,648.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**08**	**06**			**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Tingkat Capaian**	**Nindya**	**Madya**	**Madya**	**Madya**	**246,750,000.00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan**		**Nindya**	**259,087,500.00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
						Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**Persen**	**71.70**	-	**66.20**	**68.40**							**71.70**		
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Tingkat Capaian**	**Nindya**	**Madya**	**Madya**	**Madya**	**178,500,000.00**						**Nindya**	**187,425,000.00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
						Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**Persen**	**71.70**	-	**66.20**	**68.40**							**71.70**		
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Nindya	Madya	Madya		178,500,000.00	Bandar Lampung	APBD					187,425,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah , Non Pemerintah, Media & Dunia Usaha	Organisasi	37			37						37		
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Forum Anak Daerah**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**68,250,000.00**						**100.00**	**71,662,500.00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00		68,250,000.00	Bandar Lampung	APBD					71,662,500.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4			1						1		
2	**08**	**07**			**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**1,136,214,450.00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan**		**100.00**	**1,187,319,900.00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
						Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**						**100.00**		
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**114,105,450.00**						**100.00**	**114,105,450.00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
						Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**						**100.00**		
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	20	20	20	20	114,105,450.00	Bandar Lampung	APBD				20	114,105,450.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**967,509,000.00**						**100.00**	**1,015,884,450.00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota (DAK)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	30	30	30	30	313,240,200.00	Bandar Lampung	DAK				30	328,902,210.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas aktivis PATBM di masyarakat	Persen	100.00	100.00	100.00		654,268,800.00	Bandar Lampung	APBD					686,982,240.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah sosialisasi PAAR dan Pos Curhat kepada Masyarakat	Persen	100.00	100.00	100.00										
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4			1						1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembanagn Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah**	**Terpenuhinya Hak-hak Anak**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**1**	**54,600,000.00**						**1**	**57,330,000.00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	54,600,000.00	Bandar Lampung	APBD				1	57,330,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
												-							-	
2	**09**				**PANGAN**							**6,039,799,212.51**							**6,435,842,017.25**	
					DINAS PANGAN							**6,039,799,212.51**							**6,435,842,017.25**	
2	**09**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**5,101,376,570.51**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**5,429,303,519.25**	**Dinas Pangan**
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**36,750,000.00**						**100.00**	**38,587,500.00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			6 dokumen (RKA ,Renstra RENJA, , LKIP, LPJ, LPPD)	6 dokumen (RKA ,Renstra RENJA, , LKIP, LPJ, LPPD)	36,750,000.00	Bandar Lampung	APBD				6 dokumen (RKA ,Renstra RENJA, , LKIP, LPJ, LPPD)	38,587,500.00	Dinas Pangan
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**4,497,765,161.51**						**100.00**	**4,811,261,522.00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN Dinas Pangan kota Bandar Lampung	kali	28	14	14		4,430,405,161.51	Bandar Lampung	APBD					4,740,533,522.00	Dinas Pangan
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	32			32							32		
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Pangan tersedia	Bulan	24	12	12		67,360,000.00	Bandar Lampung	APBD					70,728,000.00	Dinas Pangan
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
2	**09**	**01**	**2.05**		**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persen**	**100.00**			**100.00**	**15,000,000.00**						**100.00**	**15,750,000.00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8			2	15,000,000.00						2	15,750,000.00	Dinas Pangan
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**78,895,344.00**						**98.00**	**82,840,129.00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6		1	1	2,500,000.00	Bandar Lampung	APBD				1	2,625,000.00	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	6		1	1	15,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				1	15,750,000.00	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penyediaan makanan dan minuman rapat	Persen	100.00	100.00	100.00		15,000,000.00	Bandar Lampung	APBD					15,750,000.00	Dinas Pangan
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	6	1	1	1	12,332,150.00	Bandar Lampung	APBD				1	12,948,775.00	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	06	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	paket	2	1	1		2,500,000.00	Bandar Lampung	APBD					2,625,000.00	Dinas Pangan
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase layanan makanan dan minuman tamu	Persen	100.00	100.00	100.00		13,125,000.00	Bandar Lampung	APBD					13,781,250.00	Dinas Pangan
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4			1							1		
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	partisipasi dalam rapt rapat konsultasi luar daerah	Persen	100.00	100.00	100.00		18,438,194.00	Bandar Lampung	APBD					19,360,104.00	Dinas Pangan
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**		**98.00**	**98.00**	**65,000,000.00**						**98.00**	**52,500,000.00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2			1	50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				1	52,500,000.00	Dinas Pangan
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4		1	1	15,000,000.00	Bandar Lampung	APBD						Dinas Pangan
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**259,131,232.00**						**98.00**	**272,087,793.60**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Persentase penyediaan layanan jasa pemeliharaan perlengkapan kantor	bulan	12	12			4,506,232.00							4,731,543.60	Dinas Pangan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan tenaga kontrak yang trersedia	bulan	24	12	12		254,625,000.00	Bandar Lampung	APBD					267,356,250.00	Dinas Pangan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**148,834,833.00**						**98.00**	**156,276,574.65**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	33,465,705.00	Bandar Lampung	APBD				1	35,138,990.25	Dinas Pangan
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	16	16	16	115,369,128.00	Bandar Lampung	APBD				16	121,137,584.40	Dinas Pangan
2	**09**	**03**			**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**Persen**	**110.00**	**98.00**	**100.00**	**102.00**	**728,699,580.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**105.00**	**786,329,283.00**	**Dinas Pangan**
						Ketersediaan Energi per kapita	**(kkal/kap hari)**	**2,540.00**	**2,490.00**	**2,510.00**	**2,520.00**							**2,530.00**		
						Ketersediaan Protein per Kapita	**(gr/kap/hari)**	**72.22**	**60.00**	**72.16**	**72.18**							**72.20**		
						Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	**Persen**	**60.00**	-	**30.00**	**40.00**							**50.00**		
						Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	**skor**	**87.00**	**85.40**	**86.20**	**86.50**							**86.75**		
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**Persen**	**110.00**	**102.00**	**100.00**	**102.00**	**227,137,050.00**						**102.00**	**250,418,598.00**	**Dinas Pangan**
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	4	1	1	1	48,532,050.00	Bandar Lampung	APBD					53,506,585.00	Dinas Pangan
2	09	03	2.01	03	Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	4	1	1	1	33,957,000.00	Bandar Lampung	APBD					37,437,593.00	Dinas Pangan
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Laporan	4	1	1	1	144,648,000.00	Bandar Lampung	APBD					159,474,420.00	Dinas Pangan

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**09**	**03**	**2.02.**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota**	**Penguatan cadangan pangan pemerintah**	**Persen**	**74.08**		**0.00**	**10.00**	**110,250,000.00**							**115,762,500.00**	**Dinas Pangan**
2	09	03	2.02.	03	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton	50.00		30.00	10.00	110,250,000.00						10.00	115,762,500.00	Dinas Pangan
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**PPH konsumsi**	**skor**	**86.50**	**85.00**	**86.20**	**86.50**	**391,312,530.00**						**86.50**	**420,148,185.00**	**Dinas Pangan**
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	dokumen	6	1	1	1	214,740,540.00	Bandar Lampung	APBD				1	225,477,567.00	Dinas Pangan
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksanya kegiatan pameran Bandar Lampung Expo dan Lampung fair	kali	2	1			176,571,990.00	Bandar Lampung	APBD					194,670,618.00	Dinas Pangan
						Terlaksananya lomba cipta menu tingkat kota bandar lampung	kali	1	1											
						terlaksannya sosialisasi dan pembinaan penganekaragaman konsumsi Pangan	kali	2	2											
						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	4			1							1		
2	**09**	**04**			**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Persentase Daerah Rawan Pangan**	**Persen**	**5.00**	**8.00**	**7.00**	**6.00**	**54,022,500.00**						**5.00**	**56,723,625.00**	**Dinas Pangan**
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Dihasilkan**	**Dokumen**	**12**	**1**	**2**	**2**	**54,022,500.00**						**2**	**56,723,625.00**	**Dinas Pangan**
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan,	Peta dan analisis ketahann Pangan dan kerentanan Pangan yang dimutahirkan	Dokumen	12	1	2	2	54,022,500.00	Bandar Lampung	APBD				2	56,723,625.00	Dinas Pangan
2	**09**	**05**			**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**	**Persen**	**88.00**	**85.50**	**86.00**	**87.00**	**155,700,562.00**						**87.50**	**163,485,590.00**	**Dinas Pangan**
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern**	**Persen**	**88.00**	**85.50**	**86.00**	**87.00**	**155,700,562.00**						**87.50**	**163,485,590.00**	**Dinas Pangan**
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	data jumlah pelaku usaha yang dilatih , dan jumlah produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang sudah tersertifikasi dan teregistrasi	Pelaku usaha PSAT (sudah tersertifikasi maupun belum)	75	48	75		77,175,000.00	Bandar Lampung	APBD					81,033,750.00	Dinas Pangan
						Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	4			1							1		
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasar tradisional dan modern yang diawasi dan dibina	lokasi (Pasar tradisional dan) modern	8	8	8		78,525,562.00	Bandar Lampung	APBD					82,451,840.00	Dinas Pangan
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**10**				**PERTANAHAN**							**100,000,000.00**							**100,000,000.00**	
					DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							**100,000,000.00**							**100,000,000.00**	
2	**10**	**02**			**Program Pengelolaan Izin Lokasi**	**Persentase Penerbitan Izin Lokasi**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100,000,000.00**						**100.00**	**100,000,000.00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
2	**10**	**02**	**2.01**		**Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian Izin Lokasi**	**Izin**	**12**	**-**	**2**	**2**	**100,000,000.00**						**2**	**100,000,000.00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Dokuem Izin Lokasi yang dterbitkan	Dokumen	8	-	2	2	100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	2	100,000,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	**11**				**LINGKUNGAN HIDUP**							**69,880,763,243.00**							**73,549,619,565.56**	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**69,880,763,243.00**							**73,549,619,565.56**	
2	**11**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**62,583,603,857.00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**66,088,602,210.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**150,000,000.00**						**90.00**	**170,000,000.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	15	3	3	3	75,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup	3	85,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	2	2	2	75,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup	2	85,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**19,036,106,554.00**						**90.00**	**20,376,270,013.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN DLH yang Tersedia	kali	28	14	14		18,790,906,554.00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Lingkungan Hidup		20,106,270,013.00	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	253			253							253		
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan DLH yang Terlaksana	Tahun	2	1	1		220,200,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup		240,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
2	11	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan DLH	Tahun	2	1	1		25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup		30,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	4			1							1		
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**75,000,000.00**						**90.00**	**85,000,000.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					75,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Lingkungan Hidup		85,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**tahun**	**6 tahun**	**1 tahun**	**1 tahun**	**1 tahun**	**455,510,000.00**						**1 tahun**	**571,000,000.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penarangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	20,010,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup	1 tahun	24,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup	1 tahun	120,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup	1 tahun	65,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	2	1	1		42,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup		45,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tahun	2	1	1		110,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup		125,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4			1	18,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup	1	24,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Tahun	2	1	1		15,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup		18,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4			1							1		
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	2	1	1		100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup		150,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
2	**11**	**01**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**6,280,000,000.00**						**paket**	**6,335,000,000.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	33	11	3	4	6,120,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup		6,120,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5		1	1	100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup		140,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	07	06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	1	1	1	60,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup		75,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**tahun**	**6**	**1**	**1**	**1**	**25,245,200,000.00**							**1**	**26,546,823,465.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	1	1	1	365,200,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup	1	387,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	1	1	1	24,880,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup	1	26,159,323,465.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**11,341,787,303.00**							**tahun**	**12,004,508,732.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					48,400,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Lingkungan Hidup		58,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					10,596,103,503.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Dinas Operasional Dinas Lingkungan Hidup		11,196,008,732.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					697,283,800.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup		750,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**02**			**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**RPPLH Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**Ada**		**Ada**		**520,500,000.00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	**Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan**			**431,525,000.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
						RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	**Dokumen**	**Ada**		**Ada**	**Ada**							**Ada**		
						KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**							**Ada**		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota**	**RPPLH Kota Bandar Lampung**	**Dokumen**	**Ada**		**Ada**	**Ada**	**220,500,000.00**						**Ada**	**131,525,000.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Megakomodir RPPLH Kabupaten/kota	Dokumen	4			1	220,500,000.00					Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	131,525,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota**	**KLHS Kota Bandar Lampung**	**dokumen**	**3**	**1**		**1**	**300,000,000.00**						**1**	**300,000,000.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	3	1		1	300,000,000.00					Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	300,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**			**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Hasil pengukuran Indeks Kualitas air**	**indeks**	**58,60**	**57,00**	**58,00**	**58,30**	**661,000,000.00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	**Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan**		**58,60**	**623,050,000.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
						Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	**indeks**	**81,50**	**81,10**	**81,20**	**81,30**							**81,40**		
						Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	**indeks**	**35,82**	**29,06**	**30,75**	**32,44**							**34,13**		
						Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	**Persen**	**10.00**	**5.00**	**6.00**	**7.00**							**8.00**		
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**411,000,000.00**						**paket**	**423,050,000.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Inventarisasi GRK dan Kampung Iklim	dokumen dan lokasi	1 dokumen 10 lokasi	2 lokasi	1 dokumen		111,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung		123,050,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	4			1						1		
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	6	1	1	1	300,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Lingkungan Hidup	1	300,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota**	**DIKPLHD Kota Bandar Lampung**	**Dokumen**	**6**	**1**	**1**	**1**	**100,000,000.00**						**1**	**100,000,000.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	03	2.02	01	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	6	1	1	1	100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	100,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota**	**Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara**	**lokasi**	**lokasi**		**lokasi**	**lokasi**	**150,000,000.00**						**lokasi**	**100,000,000.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dolumen	4			1	150,000,000.00					Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	100,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**04**			**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**Dokumen**	**Ada**		**Ada**		**696,125,000.00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	**Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan**			**720,931,250.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
						Master Plan Ruang Terbuka Hijau	**Dokumen**	**Ada**		**Ada**										
						Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau	**Persen**	**4,90**	**4,40**	**4,40**	**4,60**							**4,70**		
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**696,125,000.00**						**paket**	**720,931,250.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	4			1	125,000,000.00						1	125,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Dokumen Master Plan Ruang Terbuka Hijau dan jumlah Bibit tanaman	paket	1 dokumen, 5 paket	1 dokumen, 1 paket	1 paket		246,125,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		270,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
						Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/kota	Ha	658			658							658		
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	4			1	325,000,000.00						1	325,931,250.00	Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**11**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**64.00**	**70.00**	**61.00**	**61.00**	**121,275,000.00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	**Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan**		**61.00**	**127,338,750.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegaiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan**	**Persen**	**64,00**	**70.00**	**61,00**	**62,00**	**121,275,000.00**						**62,00**	**127,338,750.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	06	2.01	03	Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pengawasan IL dan IPPLH)	Jumlah Usaha/Kegiatan Diawasi	perusahaan	180	90	90		121,275,000.00	Bandar Lampung	APBD			Perusahaan		127,338,750.00	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	4			1							1		
2	**11**	**09**			**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**sekolah**	**3**		**3**	**3**	**100,000,000.00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	**Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan**		**3**	**100,000,000.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**sekolah**	**3**		**3**	**3**	**100,000,000.00**						**3**	**100,000,000.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	sekolah	3		3	3	100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				3	100,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**10**			**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**77,175,000.00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	**Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan**		**100.00**	**81,033,750.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**77,175,000.00**						**100.00**	**81,033,750.00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota (Pengelolaan Pengaduan)	Jumlah penanganan pengaduan	Persen	100.00	100.00	100.00		77,175,000.00	Bandar Lampung	APBD					81,033,750.00	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	4			1							1		
2	**11**	**11**			**Program Pengelolaan Persampahan**	**Timbulan Sampah yang Ditangani**	**Persen**	**80.00**	**84.00**	**85.00**	**85.00**	**5,121,084,386.00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	**Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan**		**82.00**	**5,377,138,605.56**	**Dinas Lingkungan Hidup**
						Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	**Persen**	**20.00**	**5.00**	**10.00**	**15.00**							**18.00**		
						Persentase Cakupan Area Pelayanan	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
						Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	**Persen**	**100.00**	**89.00**	**95.00**	**100.00**							**100.00**		
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung**	**Persen**	**100,00**	**89,00**	**95,00**	**100,00**	**5,121,084,386.00**						**100,00**	**5,377,138,605.56**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	5		1	1	70,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				1	90,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA /TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Paket	1		1		100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD					120,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	665.27			675.55							661.77		
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kk	6,905	810	845	1,100	282,996,950.00	Bandar Lampung	APBD				1,200	392,996,950.00	Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	6	1	1	1	4,668,087,436.00	Bandar Lampung	APBD. DAK				1	4,774,141,655.56	Dinas Lingkungan Hidup
2	**12**				**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**12,514,233,593.00**							**12,514,233,593.00**	
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**12,514,233,593.00**							**12,514,233,593.00**	
2	**12**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**9,497,476,073.00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**9,497,476,073.00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**207,280,000.00**						**98.00**	**207,280,000.00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	19 Dokumen (1 Dokumen LPJ, 1 Dokumen LPPD, 1 Dokumen LAKIP, 1 Dokumen Evaluasi Renstra, 5 Dokumen Evaluasi Renja, 5 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV serta 5 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2020, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2021 serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2021)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2021, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2021, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022)	31,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2021, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022)	31,000,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5 Dokumen (1 Dokumen LPJ, 1 Dokumen LPPD, 1 Dokumen LAKIP, 1 Dokumen Penetapan Kinerja dan 1 Perubahan Penetapan Kinerja)		5 Dokumen (1 Dokumen LPJ, 1 Dokumen LPPD, 1 Dokumen LAKIP, 1 Dokumen Penetapan Kinerja dan 1 Perubahan Penetapan Kinerja)	5 Dokumen (1 Dokumen LPJ, 1 Dokumen LPPD, 1 Dokumen LAKIP, 1 Dokumen Penetapan Kinerja dan 1 Perubahan Penetapan Kinerja)	176,280,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Dokumen (1 Dokumen LPJ, 1 Dokumen LPPD, 1 Dokumen LAKIP, 1 Dokumen Penetapan Kinerja dan 1 Perubahan Penetapan Kinerja)	176,280,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**					**4,062,708,049.00**							**4,062,708,049.00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tersedia	Kali	28	14	14		3,957,658,049.00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3,957,658,049.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan													
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terlaksana	Bulan	24	12	12		105,050,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		105,050,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**290,000,000.00**							**290,000,000.00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	500			500	290,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		290,000,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**						**2,479,013,024.00**							**2,479,013,024.00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	14,700,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	14,700,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	1,995,968,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1,995,968,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	23,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	23,000,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100.00	100.00	100.00		4,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		4,000,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	209,513,024.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	209,513,024.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	6	1	1		6,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		6,000,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen													
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100.00	100.00	100.00		16,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		16,000,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4			1							1		
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100.00	100.00	100.00		188,886,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		188,886,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4			1	20,946,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	20,946,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**392,750,000.00**							**98.00**	**392,750,000.00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					29,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		29,250,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	7	7	7	337,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	337,500,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	8	8	8	26,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	26,000,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**1,863,090,000.00**						**98.00**	**1,863,090,000.00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	24	12	12		24,840,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		24,840,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	24	12	12		1,838,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1,838,250,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**		**98.00**			**202,635,000.00**							**202,635,000.00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	12			35,185,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		35,185,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12			60,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Dinas Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		60,250,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	1			79,200,000.00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		79,200,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1			28,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		28,000,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**			**Program Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**	**Persen**	**100.00**	**97.00**	**99.00**	**100.00**	**2,306,757,520.00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**100.00**	**2,306,757,520.00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
						Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	**Sudah**	**Sudah**	**Sudah**	**Sudah**	**Sudah**							**Sudah**		
						IKM Pelayanan	**Persen**	**87.69**	**84.27**	**85.11**	**85.96**							**86.62**		
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Penerapan KTP Berbasis NIK**	**Kecamatan**	**20**	**20**	**20**	**20**	**2,076,757,520.00**						**20**	**2,076,757,520.00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Pelayanan Prima dalam peningkatan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Kecamatan	20	20	20		2,076,757,520.00	Bandar Lampung	DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung	20	2,076,757,520.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen													
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**	**Kecamatan**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**230,000,000.00**						**20.00**	**230,000,000.00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	02	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Perjalanan Dinas Rakernas dan Bimtek Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kecamatan	20.00	20.00	20.00		230,000,000.00	Bandar Lampung	DAK			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.00	230,000,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	4			1									

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	12	03			**Program Pencatatan Sipil**	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**	**Persen**	**100.00**	**97.00**	**98.00**	**99.00**	**230,000,000.00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**100.00**	**230,000,000.00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
						Cakupan Penerbitan Akta Nikah	**Persen**	**65.00**	**45.00**	**50.00**	**55.00**							**60.00**		
2	12	03	2.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah Akta Kelahiran yang terbit**	**Persen**	**100.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**230,000,000.00**						**20.00**	**230,000,000.00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	Kecamatan	20.00	20.00	20.00		230,000,000.00	Bandar Lampung	DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung		230,000,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	4			1						1		
2	12	04			**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update**	**Persen**	**98.00**	**94.00**	**95.00**	**96.00**	**480,000,000.00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**96.00**	**480,000,000.00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	04	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informsi Administrasi Kependudukan**	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**480,000,000.00**						**100.00**	**480,000,000.00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	6	1	1	1	150,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	1	150,000,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	6	1	1	1	150,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	1	150,000,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	4			1	180,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	1	180,000,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**				**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**4,943,564,015.92**							**5,251,775,671.65**	
												-							-	
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							**4,943,564,015.92**							**5,251,775,671.65**	
2	**13**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**3,543,126,515.92**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**3,781,317,045.65**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**20,000,000.00**						**98.00**	**20,000,000.00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	5,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	18 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	15,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**01**	**2.02**	**06**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,136,860,196.40**						**100.00**	**3,350,479,910.15**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Kali	28	14	14		3,051,710,196.40	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat		3,265,329,910.15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan													

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang terlaksana	Bulan	24	12	12		80,150,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	80,150,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	11	1	2	2	5,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Masyarakat	2	5,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**20,000,000.00**						**80.00**	**30,000,000.00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0rang	36	6	6	6	20,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat	6	30,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**90,500,000.00**						**98.00**	**100,500,000.00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	22,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Masyarakat	1	22,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan makanan dan minuman rapat	Persen	100.00	100.00	100.00		13,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Masyarakat	100.00	23,500,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	12,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Masyarakat	1	22,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	1	1	1	3,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Masyarakat	1	3,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelaksanaan perjalanan dinas kantor	Paket	2	1	1		40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Masyarakat	1	30,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
2	**13**	**01**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**72,500,000.00**						**98.00**	**72,500,000.00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	138	23	23	23	42,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Masyarakat	23	42,500,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	138	6	6	6	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Masyarakat	6	30,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**72,750,000.00**						**100.00**	**72,750,000.00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kerja Kontrak yang tersedia	Bulan	24	12	12		72,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak Dinas Pemberdayaan Masyarakat	12	72,750,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
2	**13**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**130,516,319.52**						**98.00**	**135,087,135.50**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	47,389,319.52	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat	1	41,960,135.50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	8	8	8	71,117,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Dinas Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat	8	71,117,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	13	13	13	13	12,010,000.00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat	13	22,010,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**13**	**04**			**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL Milik Kemendagri**	**Persen**	**100.00**	**57.54**	**50.00**	**75.00**	**403,687,500.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**75.00**	**549,871,876.00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri**	**Persen**	**100.00**	**57.54**	**50.00**	**75.00**	**403,687,500.00**						**75.00**	**549,871,876.00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Data Profil Kelurahan pada sistem Informasi Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Permendagri no. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan	Dokumen	2 laporan Rekap PRODESKEL	1 laporan Rekap PRODESKEL	1 laporan Rekap PRODESKEL		201,843,750.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		274,935,938.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	4			1							1		
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Data evaluasi perkembangan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan Permendagri no. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Dokumen	6 Laporan Rekap EPDESKEL	1 Laporan Rekap EPDESKEL	1 Laporan Rekap EPDESKEL		201,843,750.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemberdayaan Masyarakat		274,935,938.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	4			1							1		
2	**13**	**05**			**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**	**Persen**	**95.00**	**95.00**	**95.00**	**95.00**	**996,750,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**95.00**	**920,586,750.00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
						Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	**Persen**	**95.00**	**50.00**	**95.00**	**95.00**						**95.00**		
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah**	**Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat**	**Usaha**	**145 Usaha**	**120 Usaha**	**120 usaha**	**126 usaha**	**996,750,000.00**	Bandar Lampung	APBD				**126 usaha**	**920,586,750.00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi pengembangan usaha Kecil dan Menengah yang mencakup Pemasaran, Produksi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Usaha	Data 145 Usaha yang difasilitasi	Data 120 Usaha yang difasilitasi	Data 120 usaha yang difasilitasi		150,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			UKM		200,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	4			1							1		
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Pelaporan Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan Kota Bandar Lampung sesuai Permendagri nomor 42 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dokumen	5 Laporan Penyelenggaraan BBGRM	1 Laporan Penyelenggaraan BBGRM	1 Laporan Penyelenggaraan BBGRM			Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		200,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	3										1		
2	13	05	2.02	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	4			1	150,000,000.00						1	86,693,750.00	
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Sosialisasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat kelurahan	Dokumen	5 Laporan Pelaksanaan Sosialisasi	n/a	1 Laporan Pelaksanaan Sosialisasi		400,375,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	1 Laporan Pelaksanaan Sosialisasi 1	433,893,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	4			1									
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	4			1	296,375,000.00					TP-PKK	1 Laporan Pelaksanaan Sosialisasi		Dinas Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**14**				**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**38,716,151,228.23**							**40,281,518,789.25**	
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**38,716,151,228.23**							**40,281,518,789.25**	
2	**14**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**5,828,653,345.90**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**6,120,086,012.80**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	**14**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**27,550,000.00**						**98.00**	**28,927,500.00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	4	4	4	27,550,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	28,927,500.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Penyusunan Laporan Keuangan OPD Tepat Waktu**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**4,643,788,373.00**						**100.00**	**4,868,946,178.30**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kali	28	14	14		4,452,090,646.00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4,674,695,178.30	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	116			29							29		
2	14	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bulan	72	24	12		180,701,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		182,701,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5		1	1	10,996,727.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	11,550,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kualitas SDM Dalam pemenuhan kompetensi jabatan**	**Persen**	**80.00**		**80.00**	**80.00**	**10,500,000.00**						**80.00**	**11,025,000.00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	145		29	29	10,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29	11,025,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Oprasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**108,784,790.00**						**98.00**	**116,134,029.50**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	6,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	6,000,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	26,984,790.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	28,334,029.50	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	8,550,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	9,550,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	20,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	20,000,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	4,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	4,000,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	6	1	1		3,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3,250,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4			4							4		
2	14	01	2.07	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100.00	100.00	100.00		40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		45,000,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
2	**14**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Sarana dan Prasarana OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**55,000,000.00**						**98.00**	**65,000,000.00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.07	05	Pengadaan mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	1		1		30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		35,000,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20			5							5		
2	14	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor	Paket	2	1	1		25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		30,000,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4			1							1		
2	**14**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Oprasional OPD**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**761,000,000.00**						**100.00**	**785,000,000.00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	24	12	12		155,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		155,000,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	24	12	12		606,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		630,000,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
2	**14**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan dinas,sarana dan prasarana OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**222,030,182.90**						**98.00**	**245,053,305.00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	33,075,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	3	3	149,293,932.90	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Dinas Operasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	163,978,305.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	5	5	21,236,250.00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	23,000,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.09	06	Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	20,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	25,000,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**02**			**Program Pengendalian Penduduk**	**Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**654,885,000.00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan**		**100.00**	**687,629,250.00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**7 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**7 Kegiatan**	**7 Kegiatan**	**654,885,000.00**						**7 Kegiatan**	**687,629,250.00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah pengolahan data kependudukan setiap bulan	Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan			175,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		183,750,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	4			1							1		
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana	Paket	1 Kegiatan		1 Kegiatan		55,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		57,750,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	4			1							1		
2	14	02	2.02	04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Peta Demografi Kependudukan	Paket	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		135,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		141,750,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	Dokumen	4			1							1		
2	14	02	2.02	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	jumlah Analisa Program KB Bulanan	Paket	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		130,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		136,500,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	4			1							1		
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga	Paket	1 Kegiatan		1 Kegiatan		159,885,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		167,879,250.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	4			1							1		
2	**14**	**03**			**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Total Fertility Rate (TFR)**	**Persen**	**2.21**	**2.37**	**2.25**	**2.24**	**22,092,973,245.00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi**		**2.22**	**23,197,621,907.25**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
						Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	**Persen**	**0,25**	**0.32**	**0.28**	**0,27**							**0,26**		
						Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	**Persen**	**67,60**	**52.84**	**67.45**	**67,50**							**67,55**		
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	**Persen**	**18,05**	**20.75**	**19,06**	**19,01**							**18,08**		
						Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	**Persen**	**66.01**	**52.39**	**61.99**	**63.59**							**64,90**		
						Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	**Persen**	**67,20**	**52.84**	**66,80**	**66,95**							**67,15**		
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Persen**	**4 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**4 Kegiatan**	**4 Kegiatan**	**310,114,612.50**						**4 Kegiatan**	**325,620,343.13**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kebutuhan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kegiatan	2	1	1		199,864,612.50	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1 kegiatan	209,857,843.13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	4			1							1		
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	48			12	110,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	12	115,762,500.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persen**	**6 Kegiatan**	**4 Kegiatan**	**6 Kegiatan**	**6 Kegiatan**	**15,714,256,530.00**							**6 Kegiatan**	**16,499,969,356.50**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Paket	Pengadaan kendaraan roda Empat, IUD KIT,BKB KIT Pembangunan UPT, DLL	Pengadaan kelengkapan SIGA, IUD KIT, Pembangunan UPT, DLL	Pengadaan kendaraan roda Dua, IUD KIT, Pembangunan UPT, DLL		1,396,323,967.50	Bandar Lampung	DAK			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		1,466,140,165.88	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	8			2							2		
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Meningkatnya Peran/ Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Paket	126 PPKBD dan 2774 Sub PPKBD	126 PPKBD dan 2774 Sub PPKBD	126 PPKBD dan 2774 Sub PPKBD		14,317,932,562.50	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		15,033,829,190.63	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	2,900			2,900							2,900		
2	**14**	**03**	**203**		**Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsiii serta pelaksanaan Pellaayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan**	**24 Laporan**			**6 Laporan**	**5,758,852,102.50**						**6 Laporan**	**6,046,794,707.63**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	03	203	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen	4			1	49,612,500.00	Bandar Lampung	APBD			Faskes dan Jejaringnya	1	52,093,125.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	203	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	8			2	393,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	2	413,437,500.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	203	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	48			12	41,790,000.00	Bandar Lampung	APBD			Faskes dan Jejaringnya	12	43,879,500.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	203	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Repsroduksi Di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatann	Orang	2,900			2,900	4,832,699,602.50	Bandar Lampung	DAK			Masyarakat Kota Bandar Lampung	2,900	5,074,334,582.63	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	203	11	Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	48			12	441,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	12	463,050,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**3**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Kebutuhan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Persen**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**309,750,000.00**						**2 Kegiatan**	**325,237,500.00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	3	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Cakupan kesertaan Ber-KB di Kota Bandar Lampung	Paket	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		126,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	1 kegiatan	132,300,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	4			1							1		
2	14	3	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Pembinaan Lintas Sektor di Kampung KB	Paket	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		183,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kampung KB	1 kegiatan	192,937,500.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**14**	**04**			**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB**	**Persen**	**95.00**	**65.83**	**90.00**	**92.00**	**10,139,639,637.33**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan**		**92.00**	**10,276,181,619.20**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persen**	**3 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**9,786,839,637.33**						**3 Kegiatan**	**9,905,741,619.20**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Keseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Persentase Kualitas Anggota Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia	Paket	1825 Kader Bina Keluarga	1825 Kader Bina Keluarga	1825 Kader Bina Keluarga		9,651,839,637.33	Bandar Lampung	APBD			Kader BKB		9,763,991,619.20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						persentase pendapatan Keluarga Sejahtera														
						Peningkatan Pemahaman tentang Kesehatan Reproduksi Remaja														
						Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelpmpok	134			134						134		
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Pengetahuan pengelola Poktan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R)	Paket	1 kegiatan		1 kegiatan		135,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kelompok Kegiatan		141,750,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	4			1						1		
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persen**	**3 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**352,800,000.00**						**3 Kegiatan**	**370,440,000.00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	04	2.02	03	Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Poktan yang dibina program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIK-R)	Paket	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		352,800,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		370,440,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1						1		
2	**15**				**PERHUBUNGAN**							**34,743,904,996.11**							**36,135,038,751.40**	
					DINAS PERHUBUNGAN							**34,743,904,996.11**							**36,135,038,751.40**	
2	**15**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**26,703,472,454.71**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**31,449,604,916.08**	**Dinas Perhubungan**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**70,500,000.00**						**100.00**	**99,673,089.08**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	36	6	6	6	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				6	55,125,000.00	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	1	1	1	40,500,000.00	Bandar Lampung	APBD				1	44,548,089.08	Dinas Perhubungan

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**15,345,965,688.71**						**100.00**	**18,776,293,016.34**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dishub yang Tersedia	Bulan	24	12	12		15,002,465,688.71	Bandar Lampung	APBD					18,397,354,846.01	Dinas Perhubungan
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	660			165							165		
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dishub yang Terlaksana	bulan	24	12	12		307,500,000.00	Bandar Lampung	APBD					275,900,625.00	Dinas Perhubungan
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	54	7	7	7	21,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				7	22,050,000.00	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	54	7	7	7	15,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				7	80,987,545.33	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**222,400,000.00**						**100.00**	**276,360,000.00**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	1		1	122,400,000.00	Bandar Lampung	APBD				1	73,500,000.00	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	990		165	165	100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				165	46,305,000.00	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	990					Bandar Lampung	APBD				165	46,305,000.00	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05		Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	990.00					Bandar Lampung	APBD				165	110,250,000.00	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**579,210,456.00**						**98.00**	**701,285,483.12**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	42,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				1	44,100,000.00	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	15,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				1	22,909,950.00	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	bulan	24	12	12		190,648,000.00	Bandar Lampung	APBD					207,433,170.00	Dinas Perhubungan
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	180,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				1	239,474,693.12	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	bulan	72	12	12		9,948,000.00	Bandar Lampung	APBD					10,967,670.00	Dinas Perhubungan
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4			1							1		
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	bulan	72	12	12		141,614,456.00	Bandar Lampung	APBD					176,400,000.00	Dinas Perhubungan
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**1,613,142,500.00**						**98.00**	**1,738,906,637.04**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	32		8	2	1,181,250,000.00	Bandar Lampung	APBD				2	1,240,312,500.00	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	55		55	55	200,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				55	255,107,012.04	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	90	15	15	15	99,750,000.00	Bandar Lampung	APBD				15	104,737,500.00	Dinas Perhubungan

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	15	01	2.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	1	1	1	132,142,500.00	Bandar Lampung	APBD				1	138,749,625.00	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**8,212,800,000.00**						**98.00**	**9,054,612,000.00**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia	bulan	24	12	12		355,800,000.00	Bandar Lampung	APBD					392,269,500.00	Dinas Perhubungan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	bulan	24	12	12		7,857,000,000.00	Bandar Lampung	APBD					8,662,342,500.00	Dinas Perhubungan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**659,453,810.00**						**98.00**	**802,474,690.50**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	1	1	1	52,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				1	57,330,000.00	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	207	22	22	22	446,375,410.00	Bandar Lampung	APBD				22	576,012,370.50	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	370	55	55	55	21,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				55	22,050,000.00	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1	1	1	115,500,000.00	Bandar Lampung	APBD				1	121,275,000.00	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1	1	1	24,578,400.00	Bandar Lampung	APBD				1	25,807,320.00	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Persentase Pelayanan Angkutan Darat**	**Persen**	**0.0950**	**0.0770**	**0.0875**	**0.0900**	**7,755,232,541.40**			**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas**		**0.0925**	**4,371,000,835.32**	**Dinas Perhubungan**
						Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar dalam Kondisi Baik	**Persen**	**98.00**	**96.00**	**96.00**	**97.00**						**97.00**		
						Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	**Kejadian**	**180.00**	**175.00**	**195.00**	**190.00**						**185.00**		
2	**15**	**02**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Tingkat Pelayanan Pada Jalan Arteri**	**tingkat pelayanan**	**B**	**C**	**C**	**C**	**2,146,421,000.00**						**C**	**2,504,350,800.00**	**Dinas Perhubungan**
						Tingkat Pelayanan Pada Jalan Kolektor	**tingkat pelayanan**	**B**	**C**	**C**	**C**							**C**		
						Rasio volume lalu lintas pada jalan arteri	**rasio**	**0.35**	**0.54**	**0.47**	**0.46**							**0.45**		
						Rasio volume lalu lintas pada jalan kolektor	**rasio**	**0.40**	**0.65**	**0.50**	**0.50**							**0.45**		
						Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali	**rasio**	**80.00**	**40.00**	**75.00**	**75.00**							**75.00**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	**rasio**	**0.73**	**0.76**	**0.71**	**0.72**							**0.72**		
						Rasio Konektivitas Nasional	**rasio**	**29.35**	**-**	**28.95**	**29.05**							**29.15**		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Pemenuhan Data Teknis Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	Persen	-				300,000,000.00	Bandar Lampung	APBD					231,525,000.00	Dinas Perhubungan
						Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	rasio	0.695		0.695										
						Rasio Konektivitas Nasional	rasio	28.85		28.95										
						Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	4			1							1		
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang Terlaksana	Paket	4	2	2		200,000,000.00	Bandar Lampung	APBD					544,083,750.00	Dinas Perhubungan
						Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	4			1							1		
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang Terkendali	Paket	4	1	2		1,646,421,000.00	Bandar Lampung	APBD					1,728,742,050.00	Dinas Perhubungan
						Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	4			1							1		
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik**	**Persen**	**0.94**	**0.90**	**0.90**	**0.92**	**1,008,355,138.40**						**0.92**	**673,947,895.32**	**Dinas Perhubungan**
						Persentase tersediannya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,guardril) pada jalan kota dalam kondisi baik	**Persen**	**0.85**	**0.75**	**0.75**	**0.80**						**0.80**		
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	ls	LS	ls	ls	ls	105,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				ls	110,250,000.00	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Paket	12 Paket	2 paket	2 paket	2 paket	650,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				2 paket	297,675,000.00	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Paket	24 Paket	4 paket	4 paket	4 paket	253,355,138.40	Bandar Lampung	APBD				4 paket	266,022,895.32	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun**	**orang/ barang**	**325,000.00**	**936,838.00**	**305,000.00**	**310,000.00**	**150,000,000.00**						**310,000.00**	**198,450,000.00**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	terminal	36 terminal	6 terminal	6 terminal	6 terminal	150,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				6 terminal	198,450,000.00	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) lokasi perparkiran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**	**Persen**	**0.25**	**0.15**	**0.15**	**0.18**	**99,482,250.00**						**0.18**	**104,456,362.50**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	2.04	01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang Terlaksana	Paket	6	3	3		99,482,250.00	Bandar Lampung	APBD					104,456,362.50	Dinas Perhubungan
						Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	4			1							1		
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**	**Persen**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**4,000,974,153.00**						**1.00**	**845,695,777.50**	**Dinas Perhubungan**
						Jumlah Uji KIR angkutan umum	**uji**	**14,100**	**13,300**	**13,300**	**13,500**							**13,700**		
						Tersediannya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	**unit**	**1**	**0**	**0**	**1**							**1**		
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	12	2	2	2	3,500,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				2	336,262,500.00	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	6	1	1	1	467,304,153.00	Bandar Lampung	APBD				1	472,312,102.50	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	6	1	1	1	23,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				1	25,357,500.00	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	6	1	1	1	10,670,000.00	Bandar Lampung	APBD				1	11,763,675.00	Dinas Perhubungan

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**15**	**02**	**2.11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum**	**orang/ barang**	**1,000,000.00**	**44,705.00**	**900,000.00**	**925,000.00**	**350,000,000.00**						**950,000.00**	**44,100,000.00**	**Dinas Perhubungan**
						Meningkatnya Load Faktor angkutan umum	**Persen**	**65.37**	**90.74**	**55.37**	**60.37**							**60.37**		
						Jumlah Arus penumpang angkutan umum	**orang**	**190,000.00**	**164,615.00**	**170,000.00**	**175,000.00**							**180,000.00**		
						Rasio Ijin Trayek	**rasio**	**0.03**	**6.54**	**0.02**	**0.02**							**0.02**		
2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6	-	1	1	350,000,000.00						1	44,100,000.00	Dinas Perhubungan
2	**15**	**05**			**Program Pengelolaan Perkeretaapian**	**Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Yang dijaga**	**Kejadian**	**1**	**-**	**1**	**1**	**285,200,000.00**			**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas**		**1**	**314,433,000.00**	**Dinas Perhubungan**
2	**15**	**05**	**2.03**		**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat pertumbuhan Perlintasan Sebidang Kereta Api Dengan Jalan Raya**	**Persen**	**20.00**	**-**	**20.00**	**20.00**	**50,000,000.00**						**20.00**	**55,125,000.00**	**Dinas Perhubungan**
2	15	05	2.03	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangannya Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	6	-	1	1	50,000,000.00						1	55,125,000.00	Dinas Perhubungan
2	**15**	**05**	**2.05**		**Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Kecelakaan di pintu Perlintasan Kereta Api Yang dijaga**	**Kejadian**	**4.00**	**-**	**8.00**	**7.00**	**235,200,000.00**						**7.00**	**259,308,000.00**	**Dinas Perhubungan**
						Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Bandar Lampung	**Kejadian**	**4.00**	**-**	**8.00**	**7.00**							**7.00**		
2	15	05	2.05	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Terkendali	bulan	24	15	12		235,200,000.00							259,308,000.00	Dinas Perhubungan
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	4			1							1		
2	**16**				**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**10,535,554,068.48**							**11,062,331,771.90**	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**10,535,554,068.48**							**11,062,331,771.90**	
2	**16**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**5,189,351,406.75**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**5,448,818,977.09**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**66,150,000.00**						**100.00**	**69,457,500.00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	2	1	1	33,075,000.00						1	34,728,750.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	6	1	1	1	33,075,000.00						1	34,728,750.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**4,157,439,423.48**						**100.00**	**4,365,311,394.65**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan asn yang tersedia	Persen	98.00	98.00	98.00		3,846,589,548.48							4,038,919,025.90	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	45			41							41		
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	administrasi keuangan yang tersedia	Persen	100.00	100.00	100.00		277,774,875.00						100.00	291,663,618.75	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	1	1	1	33,075,000.00						1	34,728,750.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**16,537,500.00**						**98.00**	**17,364,375.00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	20	20	20	16,537,500.00						20	17,364,375.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**209,521,856.25**						**98.00**	**219,997,949.06**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1	1	1	27,316,642.50						98.00	28,682,474.63	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persen	98.00	98.00	98.00	98.00	10,296,798.75						98.00	10,811,638.69	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persen	98.00	98.00	98.00	98.00	32,199,615.00						98.00	33,809,595.75	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah layanana makanan dan minuman rapat	Persen	98.00	98.00	98.00		25,048,800.00							26,301,240.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
2	16	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persen	98.00	98.00	98.00	98.00	13,230,000.00						98.00	13,891,500.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	presentase Pelaksanaan perjalanan dinas kantor	Persen	98.00	98.00	98.00		101,430,000.00							106,501,500.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**51,817,500.00**						**98.00**	**54,408,375.00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Persen	98.00	98.00	98.00		24,806,250.00						98.00	26,046,562.50	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8			2									
2	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persen	98.00	98.00	98.00		27,011,250.00						98.00	28,361,812.50	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8			2									
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**536,917,500.00**						**98.00**	**563,763,375.00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang tersedia	Persen	98.00	98.00	98.00		2,205,000.00							2,315,250.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan tenaga kontrak yang tersedia	Persen	98.00	98.00	98.00		534,712,500.00							561,448,125.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**150,967,627.02**						**98.00**	**158,516,008.37**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	36,969,127.02						1	38,817,583.37	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	3	3	25,357,500.00						3	26,625,375.00	Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	5	5	16,537,500.00						5	17,364,375.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan gedung kantor	Unit	1	1	1	1	66,150,000.00						1	69,457,500.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	5,953,500.00						1	6,251,175.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**02**			**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi**	**Persen**	**95.00**	**95.00**	**95.00**	**95.00**	**2,832,061,661.73**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**95.00**	**2,973,664,744.82**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**presentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik**	**Persen**	**95.00**	**95.00**	**95.00**	**95.00**	**2,832,061,661.73**						**95.00**	**2,973,664,744.82**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi publik	jumlah media informasi	Tahun	2	1	1		49,612,500.00							52,093,125.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan PengelolaanMedia Komunikasi Publik	Dokumen	4			1							1		
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	jumlah sistem informasi pelayanan publik yang dikelola secara terpadu	Tahun	2	1	1		1,507,757,514.48							1,583,145,390.20	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	4			1							1		
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui PPID dan website	Tahun	2	1	1		38,587,500.00							40,516,875.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	4			1							1		
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah	Tahun	2	1	1		1,236,104,147.25							1,297,909,354.61	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	4			1							1		
2	**16**	**03**			**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Presentase aplikasi IT dan aplikasi e-government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik**	**Persen**	**100.00**	**80.00**	**85.00**	**85.00**	**2,514,141,000.00**						**90.00**	**2,639,848,050.00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
						Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	**Persen**	**95.00**	**90.00**	**95.00**	**95.00**							**95.00**		
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik**	**Persen**	**95.00**	**95.00**	**95.00**	**95.00**	**927,643,500.00**						**95.00**	**974,025,675.00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	Tahun	2	1	1		927,643,500.00							974,025,675.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	2			2							2		
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikas (SIDALMENTAL)**	**Persen**	**0.95**	**95.00**	**95.00**	**95.00**	**1,586,497,500.00**						**95.00**	**1,665,822,375.00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	jumlah menara telekomunikasi yang diawasi	Tahun	2	1	1		220,500,000.00							231,525,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4			1							1		
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	jumlah jenis database yang terintegrasi	Tahun	2	1	1		1,222,672,500.00							1,283,806,125.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Pengkajian dan Penelitian Sistem Keamanan data	Tahun	2	1	1		143,325,000.00							150,491,250.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	53			53							53		
2	**17**				**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**7,166,570,985.41**							**7,588,478,326.18**	
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							**7,166,570,985.41**							**7,588,478,326.18**	
2	**17**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan menengah**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**4,142,535,825.41**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**4,333,027,283.18**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**75,000,000.00**							**100.00**	**80,000,000.00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Dokumen	10	5	5		75,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM		80,000,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	20			**5**							**5**		
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,268,939,575.41**							**100.00**	**3,491,465,345.68**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Koperasi dan UKM yang tersedia	Kali	28	14	14		3,178,939,575.41	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM		3,401,465,345.68	Dinas Koperasi dan UKM
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	104			26							26		
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Koperasi dan UKM yang Terlaksana		24	12	12		90,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM		90,000,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**1.00**	**1.00**	**1.00**		**28,000,000.00**								**28,000,000.00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	5	5	5	28,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM	5	28,000,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**		**98%**	**98%**	**98%**		**101,036,928.00**								**106,002,615.50**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	25,636,928.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM	1	26,602,615.50	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	3,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM	1	3,000,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat		1.00	1.00	1.00		11,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM		15,000,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	27,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM	1	27,000,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia		2	1	1		5,400,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM		5,400,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen													
2	17	01	2.06	09	Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor		1.00	1.00	1.00		29,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM		29,000,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**		**98%**	**98%**	**98%**		**217,000,000.00**							**175,000,000.00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	2	1	1		90,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM		100,000,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1			1							1		
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	2	1	1		67,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM		75,000,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20			5							5		
2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	2	1	1		60,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM			Dinas Koperasi dan UKM
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20			5									
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**374,500,000.00**							**98.00**	**374,500,000.00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	72	12	12		35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM		35,000,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	72	12	12		339,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM		339,500,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**78,059,322.00**							**98.00**	**78,059,322.00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	6	6	33,532,088.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM	6	33,532,088.00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	1	1	39,527,234.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM	1	39,527,234.00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	32	8	8	8	5,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Koperasi dan UKM	8	5,000,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
2	**17**	**03**			**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan untuk Koperasi**	**Persen**	**35.89**		**31.02**	**33.09**	**100,000,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**35.11**	**115,762,500.00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi**		**5,98**		**2,48**	**3,67**	**100,000,000.00**							**3,67**	**115,762,500.00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	30		5	5	50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Koperasi dan UMKM	5	55,762,500.00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Unit Usaha	30		5	5	50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Koperasi dan UMKM	5	60,000,000.00	Dinas Koperasi dan UKM

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**17**	**04**			**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Persentase koperasi aktif**	**Persen**	**47.85**	**45.23**	**45.90**	**46.50**	**90,000,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**47.21**	**90,000,000.00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dama 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi**			**27,22**	**31,25**	**32,69**	**90,000,000.00**						**32,69**	**90,000,000.00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	80	80	80	80	90,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Koperasi dan UMKM	80	90,000,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
2	**17**	**05**			**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi**	**Persen**	**0.50**	**0.22**	**0.29**	**0.36**	**505,310,160.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**0.43**	**531,825,668.00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wiilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi**		**60**	**22**	**24,80**	**31,80**	**505,310,160.00**						**48.80**	**531,825,668.00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
						Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian		**0,13**	**0.09**	**0,10**	**0,11**							**0.12**		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	1,080	75	180	180	505,310,160.00	Bandar Lampung	APBD			Koperasi dan UMKM	180	531,825,668.00	Dinas Koperasi dan UKM
2	**17**	**06**			**Program Pemberdayaan dan Perlindunran Koperasi**	**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	**Persen**	**5.38**	**2.30**	**3.99**	**4.66**	**1,293,725,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**4.87**	**1,363,911,250.00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
						Persentase fasilitasi penerbitan Sertifikat Nomor induk Koperasi (NIK)	**Persen**	**29.54**	**18.02**	**22.83**	**25.00**							**27.12**		
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi**			**0,25**	**0,50**	**0,75**	**1,293,725,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Koperasi dan UMKM**	**1.01**	**1,363,911,250.00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk dikuatkan manajemen produksinya, standarisasinya, perlindungan usahanya dan restrukturisasi usahanya	Koperasi	10	5	5		1,293,725,000.00	Bandar Lampung	APBD			Koperasi dan UMKM		1,363,911,250.00	Dinas Koperasi dan UKM
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	120			30							30		
2	**17**	**07**			**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro**	**Persen**	**26.80**	**12.50**	**18,40**	**21.00**	**375,000,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**23.60**	**433,951,625.00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
						Persentase UKM Non BPR LKM Aktif	**Persen**	**42,75**	**35.40**	**38.00**	**38,50**							**40,50**		
						Persentase BPR/LKM Aktif	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk**		**4,20**	**3,10**	**3,40**	**3,60**	**375,000,000.00**						**3.90**	**433,951,625.00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
						Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan		**7,80**	**6,70**	**7,05**	**7,30**							**7.50**		
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	120	20	20	20	60,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Koperasi dan UMKM	20	50,000,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	60					Bandar Lampung	APBD			Koperasi dan UMKM	15	68,951,625.00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	03	Fasiliitasi Kemudahan perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	170	25	25	30	65,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Koperasi dan UMKM	30	60,000,000.00	Dinas Koperasi dan UKM

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	260	30	30			Bandar Lampung	APBD			Koperasi dan UMKM	50	65,000,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	240	30	30	30	250,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Koperasi dan UMKM	30	190,000,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
2	**17**	**08**			**Program Pengembangan UMKM**	**Persentase Usaha Mikro dan Kecil**	**Persen**	**68.50**	**64.40**	**65.50**	**66.50**	**660,000,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**67.30**	**720,000,000.00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
						Pertumbuhan Produktivitas UMKM	**Persen**	**8.20**	**2.05**	**3.40**	**4.70**							**5.40**		
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran**	**Persen**	**8,20**	**0.02**		**2.15**	**660,000,000.00**						**2.40**	**720,000,000.00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah promosi dan pemasaran produk-produk UMKM	Kali	14	7	7		660,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Koperasi dan UMKM		720,000,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
						Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	28			7							7		
												-							-	
2	**18**				**PENANAMAN MODAL**							**15,439,830,547.00**							**16,457,657,695.25**	
												-							-	
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**15,439,830,547.00**							**16,457,657,695.25**	
2	**18**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**14,050,281,042.00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**15,020,130,715.00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**67,500,000.00**						**98.00**	**80,000,000.00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15 Dokumen (2 Dokumen Renstra, 1 Dokumen Penetapan Kinerja, 6 Dokumen Renja dan 6 Dokumen Perubahan Renja)		2 Dokumen (1 Dokumen Renja Tahun 2023 dan 1 Dokumen Perubahan Renja Tahun 2022)	2 Dokumen (1 Dokumen Renja Tahun 2024 dan 1 Dokumen Perubahan Renja Tahun 2023)	12,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2 Dokumen (1 Dokumen Renja Tahun 2024 dan 1 Dokumen Perubahan Renja Tahun 2023)	15,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dokumen	1 Dokumen RKA		1 Dokumen RKA Tahun 2023		10,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP		12,500,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4			1							1		
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dokumen	1 Dokumen Perubahan RKA		1 Dokumen Perubahan RKA Tahun 2022		10,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 Dokumen Perubahan RKA Tahun 2023	12,500,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dokumen	8 Dokumen (1 Dokumen LPJ, 1 Dokumen LPPD, 1 Dokumen LAKIP, 1 Dokumen Evaluasi Renstra, 5 Dokumen Evaluasi Renja, 5 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	5 Dokumen (1 Dokumen LPJ, 1 Dokumen LPPD, 1 Dokumen LAKIP, 1 Dokumen Penetapan Kinerja dan 1 Dokumen Renstra)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2021, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022)		15,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP		15,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	12			3							3		
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5 Dokumen (1 Dokumen LPJ, 1 Dokumen LPPD, 1 Dokumen LAKIP, 1 Dokumen Penetapan Kinerja dan 1 Perubahan Penetapan Kinerja)		5 Dokumen (1 Dokumen LPJ, 1 Dokumen LPPD, 1 Dokumen LAKIP, 1 Dokumen Penetapan Kinerja dan 1 Perubahan Penetapan Kinerja)	5 Dokumen (1 Dokumen LPJ, 1 Dokumen LPPD, 1 Dokumen LAKIP, 1 Dokumen Penetapan Kinerja dan 1 Perubahan Penetapan Kinerja)	20,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5 Dokumen (1 Dokumen LPJ, 1 Dokumen LPPD, 1 Dokumen LAKIP, 1 Dokumen Penetapan Kinerja dan 1 Perubahan Penetapan Kinerja)	25,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**12,156,781,042.00**							**100.00**	**13,010,630,715.00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Tersedia	Kali	84.00	14.00	14.00		12,019,281,042.00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Penanaman Modal dan PTSP	14.00	12,860,630,715.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan													
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Terlaksana	Bulan	72.00	12.00	12.00		110,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12.00	115,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
2	18	01	2.02	05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	12,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	15,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan		12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	15,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	20,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100.00**			**100.00**	**50,000,000.00**						**100.00**	**50,000,000.00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	72			72	50,000,000.00					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	72	50,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**561,000,000.00**						**98.00**	**599,500,000.00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	3,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	4,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	200,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	215,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	20,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	22,500,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100.00		100.00		10,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP		15,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	200,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	215,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	6	1	1		7,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP		8,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen													
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100.00	100.00	100.00		20,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP		20,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4			1							1		
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100.00	100.00	100.00		100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP		100,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**125,000,000.00**						**98.00**	**140,000,000.00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	6		1		10,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	15,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit													
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	6	1	1		80,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	100,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit													
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	6		1	1	10,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	15,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit													
2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	10,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**820,000,000.00**						**98.00**	**830,000,000.00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	72	12	12	12	195,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12	200,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	72	12	12	12	625,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12	630,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**270,000,000.00**						**98.00**	**310,000,000.00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	2	5	5	40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5	45,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14 Unit (3 Unit Mobil, 11 Unit Motor)	14 Unit (3 Unit Mobil, 11 Unit Motor)	14 Unit (3 Unit Mobil, 11 Unit Motor)	14 Unit (3 Unit Mobil, 11 Unit Motor)	190,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Dinas Penanaman Modal dan PTSP	14 Unit (3 Unit Mobil, 11 Unit Motor)	195,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	1	1	1	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	50,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6			1	15,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	20,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**02**			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Jumlah/Nilai Investasi PMA**	**Dolar ($)**	**689,294,277.84**		**649,658,354.09**	**659,403,229.40**	**110,000,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**669,294,277.84**	**115,000,000.00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
						Jumlah/Nilai Investasi PMDN	**Juta Rupiah (Rp)**	**2,445,964.76**		**2,277,138.25**	**2,311,295.33**							**2,345,964.76**		
						Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	**Orang/ Perusahaan**	**10.35**		**8.85**	**9.35**							**9.85**		
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau**	**persentase**	**100.00**		**100.00**	**100.00**	**110,000,000.00**						**100.00**	**115,000,000.00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	5		1	1	110,000,000.00					Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	115,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**03**			**Program Promosi Penanaman Modal**	**Persentase Promosi Penanaman Modal**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**135,000,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**100.00**	**140,000,000.00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Promosi Investasi Daerah**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**135,000,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**				**100.00**	**140,000,000.00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	6	1	1	1	135,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	140,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**04**			**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**IKM Bidang Perizinan**	**Angka**	**87.20**	**85.50**	**85.60**	**86.30**	**660,000,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**86.70**	**670,000,000.00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Ketepatan Waktu Pemenuhan Pelayanan Perizinan**	**hari**	**14**	**14**	**14**	**14**	**660,000,000.00**						**14**	**670,000,000.00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Meningkatnya Sistem Pelayanan Perizinan	persentase	96.00	92.00	93.00		280,000,000.00	Bandar Lampung	APBD					285,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	500			500							500		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Perizinan Sesuai Fungsinya	persentase	100.00	100.00	100.00		380,000,000.00	Bandar Lampung	APBD					385,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	500			500						500		
2	**18**	**05**			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN**	**Persen**	**23.69**	**35.75**	**18.47**	**20.21**	**359,549,505.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**21.95**	**377,526,980.25**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengendalian Nilai Investasi PMDN**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**359,549,505.00**						**100.00**	**377,526,980.25**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sikronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pemantauan Investasi PMDN	Persen	100.00	100.00	100.00		53,250,750.00	Bandar Lampung	DAK					55,913,287.50	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	500			500						500		
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sikronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pembinaan Investasi PMDN	Persen	100.00	100.00	100.00		199,797,255.00	Bandar Lampung	DAK					209,787,117.75	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	500			500						500		
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengawasan Investasi PMDN	Persen	100.00	100.00	100.00		106,501,500.00	Bandar Lampung	DAK					111,826,575.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	500			500						500		
2	**18**	**06**			**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase Penyajian Data Penanaman Modal**		**85.00**		**83.00**	**84.00**	**125,000,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**85.00**	**135,000,000.00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan secara Terpadu**		**85.00**		**83.00**	**84.00**	**125,000,000.00**						**85.00**	**135,000,000.00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	06	2.01	01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan secara Terpadu		85.00		83.00	84.00	125,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				84.00	135,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	4			1						500		
												-							-	
2	**19**				**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**14,732,228,479.00**							**15,262,554,173.00**	
												-								
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							**14,732,228,479.00**							**15,262,554,173.00**	
2	**19**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**4,355,576,773.00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**4,641,567,452.00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**35,000,000.00**						**100.00**	**35,000,000.00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	5	7	7	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemuda dan Olahraga	7	35,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,484,892,051.00**						**100.00**	**3,723,633,494.00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dispora yang Tersedia	Kali	28	14	14		3,410,592,051.00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pemuda dan Olahraga		3,649,333,494.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	112			28							28		
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dispora yang Terlaksana	Bulan	24	12	12		74,300,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemuda dan Olahraga		74,300,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100.00**		**100.00**	**100.00**	**24,500,000.00**						**100.00**	**31,500,000.00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	295		59	59	19,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemuda dan Olahraga	59	25,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10		2	2	5,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pemuda dan Olahraga	2	6,500,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**108,534,722.00**						**98.00**	**141,083,958.00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	15,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemuda dan Olahraga	1	20,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	9,794,722.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemuda dan Olahraga	1	13,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100.00	100.00	100.00		10,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemuda dan Olahraga		12,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	9,240,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemuda dan Olahraga	1	13,083,958.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumah Bahan Bacaan Kantor dan Peralatab Perundang - undangan yang Tersedia	Paket	6	1	1		4,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemuda dan Olahraga		6,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4			1							1		
2	19	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100.00	100.00	100.00		10,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemuda dan Olahraga		12,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4			1							1		
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Peralatan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100.00	100.00	100.00		50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemuda dan Olahraga		65,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kabutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**58,600,000.00**						**98.00**	**56,100,000.00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	1	1	1	48,600,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemuda dan Olahraga	1	41,100,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	1	1	1	10,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemuda dan Olahraga	1	15,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**551,250,000.00**						**100.00**	**551,250,000.00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	72.00	12.00	12.00		551,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak Dinas Pemuda dan Olahraga	12.00	551,250,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**92,800,000.00**						**100.00**	**103,000,000.00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	36,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Pemuda dan Olahraga	1	36,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	1	1	2,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Dinas Pemuda dan Olahraga	1	2,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	4	4	54,800,000.00	Bandar Lampung	APBD			Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga	4	65,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**02**			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**1,020,125,000.00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan**		**100.00**	**1,084,131,250.00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
						Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	**Persen**	**3.99**	**2.00**	**3.66**	**3.77**						**3.88**		
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**296,300,000.00**						**100.00**	**327,115,000.00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	145.00	45.00	20.00	20.00	43,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemuda Kota Bandar Lampung	20.00	45,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	190.00	40.00	30.00	30.00	33,300,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemuda Kota Bandar Lampung	30.00	35,115,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	150.00		30.00	30.00	100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemuda Kota Bandar Lampung	30.00	112,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi Perlindungan Pemuda, Advokasi Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	300.00		60.00	60.00	120,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Atlit dan Pelatih Kota Bandar Lampung	60.00	135,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**723,825,000.00**						**100.00**	**757,016,250.00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Seleksi Calon Paskibra Tingkat Kecamatan dan Kota Bandar Lampung	Orang	480.00	80.00	80.00		723,825,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemuda Kota Bandar Lampung		757,016,250.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Mental dan Montivasi di Kalangan Atlit Kota Bandar Lampung yang Terbina	Orang	240.00	40.00	40.00										
						Mental dan Motivasi di Kalangan Pelatih Kota bandar Lampung yang Terbina	Orang	100.00		20.00										
						Keimanan dan Ketaqwaan untuk Atlit dalam Aspek Religius	Orang	200.00		40.00										
						Keimanan dan Ketaqwaan untuk Pelatih dalam Aspek Religius	Orang	100.00		20.00										
						Pendataan Kewirausahaan Muda di 20 Kecamatan Kota Bandar Lampung	kec	100.00		20.00										
						Pendataan Organisasi Pemuda di 20 Kecamatan Kota Bandar Lampung	kec	100.00		20.00										
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	4			1							1		
2	**19**	**03**			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Cakupan Pembinaan Olahraga**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**8,275,026,706.00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi**		**100.00**	**8,401,280,471.00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
						Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi	**Persen**	**100.00**	**12.96**	**50.00**	**87.03**							**100.00**		
						Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara	**Persen**	**100.00**	**33.33**	**50.00**	**66.67**							**83.33**		
						Peningkatan Prestasi Olahraga	**Jumlah**	**10.00**	**10.00**	**10.00**	**10.00**							**10.00**		
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100.00**		**100.00**	**100.00**	**25,000,000.00**						**100.00**	**30,000,000.00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Orang	100.00		20.00	20.00	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Atlit dan Pelatih Kota Bandar Lampung	20.00	30,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah kabupaten/Kota**	**Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**873,160,000.00**						**100.00**	**893,160,000.00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Olahraga dan Kompetisi Olahraga (PERWOSI)	Orang	6,000.00	1,000.00	1,000.00		453,160,000.00	Bandar Lampung	APBD			Perwosi		453,160,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	4			1							1		
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Penyelenggaraan Open Tournament Bola Voly Walikota Bandar Lampung	Grup	144.00	24.00	24.00		420,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		440,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Cabang Olahraga	Persen	95.00		95.00										
						Penyelenggaraan Kejuaraan Cabang Olahraga Tenis Lapangan	Persen	95.00		95.00										
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingat Daerah Provinsi**	**Persen**	**98.00**		**98.00**	**98.00**	**375,000,000.00**						**98.00**	**380,000,000.00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlit Daerah	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Kota	Persen	97.00		97.00		300,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		300,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi	Persen	97.00		97.00										
						Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah	Persen	97.00		97.00										
						Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional	Persen	97.00		97.00										
						Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)	Persen	97.00		97.00										
						Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	400			100							100		
2	19	03	2.03	05	Koordinas dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Pendataan Sarana dan Prasarana Se-Kota Bandar Lampung yang Tersedia	Buku	300.00		50.00		75,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pemuda dan Olahraga		80,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	4			1							1		
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelolahragaan**	**Persen**	**100.00**		**100.00**	**100.00**	**6,004,951,400.00**						**100.00**	**6,004,951,400.00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Pembinaan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	1		1	1	6,004,951,400.00	Bandar Lampung	APBD			KONI	1	6,004,951,400.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**996,915,306.00**						**100.00**	**1,093,169,071.00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan Car Free Day	Orang	6,000.00	1,000.00	1,000.00		861,915,306.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung		948,169,071.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rekreasi di Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung	Persen	95.00		95.00										
						Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Dalam Rangka HUT Kota Bandar Lampung	Persen	95.00		95.00										
						Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Dalam Rangka HUT HAORNAS	Persen	95.00		95.00										
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	4			1							1		
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Layak dan memadai yang Tersedia	Paket	6	1	1		135,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung		145,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang Layak dan memadai yang Tersedia	Paket	6	1	1										
						Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Dokumen	4			1							1		
2	**19**	**04**			**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan**	**Persen**	**100.00**		**100.00**	**100.00**	**1,081,500,000.00**						**100.00**	**1,135,575,000.00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persen**	**100.00**		**100.00**	**100.00**	**1,081,500,000.00**						**100.00**	**1,135,575,000.00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	1		1	1	1,081,500,000.00						1	1,135,575,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**20**				**STATISTIK**							**383,118,750.00**							**402,274,687.50**	
												-							-	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**383,118,750.00**							**402,274,687.50**	
2	**20**	**02**			**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik**	**Ada/Tidak**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**383,118,750.00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**Ada**	**402,274,687.50**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**pengembangan dan implementasi sistem informasi data statistik**	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	**383,118,750.00**						**ada**	**402,274,687.50**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Operasional Literasi data dan Informasi	Tahun	2	ada	ada		110,250,000.00							115,762,500.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	4			1						1		
2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	jumlah jenis database yang terintegrasi	Tahun	2	1	1		55,125,000.00							57,881,250.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	800			200						200		
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Penyusunan Data Sektoral	Tahun	2	1	1		192,937,500.00							202,584,375.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	4			1						1		
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	jumlah infrastruktur data dan informasi yang terpelihara	Tahun	2	1	1		24,806,250.00							26,046,562.50	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	4			1						1		
					PERSANDIAN							**1,397,686,119.48**							**1,467,570,425.45**	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**1,397,686,119.48**							**1,467,570,425.45**	
2	**21**	**02**			**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik**	**Persen**	**95.00**	**85.00**	**95.00**	**95.00**	**1,397,686,119.48**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**95.00**	**1,467,570,425.45**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**95.00**	**95.00**	**95.00**	**95.00**	**1,397,686,119.48**						**95.00**	**1,467,570,425.45**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	6	1	1	1	60,637,500.00						1	63,669,375.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	6	1	1	1	1,144,318,389.48						1	1,201,534,308.95	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	1	1	1	1	192,730,230.00						20	202,366,741.50	Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**22**				**KEBUDAYAAN**							**2,143,575,000.00**							**2,250,751,750.00**	
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**2,143,575,000.00**							**2,250,751,750.00**	
2	**22**	**02**			**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi**	**Jumlah**	**100**	**62**	**74**	**83**	**964,425,000.00**			**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**		**83**	**1,012,646,250.00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dilaksanakannya Pentas Seni Pengembangan dan Pembinaan Budaya**	**Kegiatan**	**5**	**4**	**4**	**5**	**964,425,000.00**						**5**	**1,012,646,250.00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	4	4	4	4	964,425,000.00						4	1,012,646,250.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**03**			**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Kesenian yang dilestarikan**	**Jumlah**	**5**	**4**	**4**	**5**	**811,650,000.00**			**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**		**5**	**852,230,500.00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan**	**Keg**	**6.00**	**1.00**	**1.00**	**Keg**	**811,650,000.00**						**0.00**	**852,230,500.00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
						Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/ Pendukung Pertunjukan Seni	**Persen**	**0.95**	**0.90**	**0.91**	**0.92**						**0.93**		
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional*	Jumlah Pengadaan Alat Musik Tradisional	Set	2	1	1		162,750,000.00							170,887,500.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang												
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan	Lembaga	5		1	1	648,900,000.00						1	681,343,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**04**			**Program Pembinaan Sejarah**	**Jumlah Sejarah yang Dilakukan Pembinaan**	**Kegiatan**	**6**	**1**	**1**	**1**	**367,500,000.00**			**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**		**1**	**385,875,000.00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cagar Budaya Yang Di Lestarikan**	**Keg**	**6**	**1**	**1**	**1**	**367,500,000.00**						**1**	**385,875,000.00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
						Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Yang Dilindungi	**Unit**	**31**	**5**	**5**	**5**							**5**		
						Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan	**Unit**	**46**	**7**	**7**	**7**							**8**		
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data Dan Informasi Sejarah*	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Buku	6	1	1	1	367,500,000.00						1	385,875,000.00	

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**23**				**PERPUSTAKAAN**							**5,254,271,400.56**							**5,584,085,302.05**	
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**5,254,271,400.56**							**5,584,085,302.05**	
2	**23**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**4,997,131,400.56**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**5,309,038,302.05**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Peyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Dokumen**	**35**	**5**	**6**	**6**	**40,000,000.00**						**6**	**40,000,000.00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	29	4	5	5	30,000,000.00						5	30,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	6	1	1	1	10,000,000.00						1	10,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Ketepatan Waktu**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,929,716,573.04**						**100.00**	**4,197,642,733.15**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang tersedia	Kali	14	100.00	14		3,827,516,573.04							4,095,442,733.15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	39			39							39		
2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasin Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Terlaksana	Bulan	12	100.00	12		102,200,000.00							102,200,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100.00**		**100.00**	**100.00**	**15,000,000.00**						**100.00**	**25,000,000.00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			4	4	15,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	25,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**100.00**	**1.00**	**100.00**	**100.00**	**171,537,858.52**						**100.00**	**182,018,599.90**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	1	1	2	5,000,000.00						1	6,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	30,000,000.00						1	30,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	10,850,000.00						1	12,850,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100.00	1 Tahun	100.00		10,900,000.00							12,900,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
2	23	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	11,287,858.52						1	12,768,599.90	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1	1 Tahun	1		45,000,000.00							45,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	28			7							7		
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100.00	1 Tahun	100.00		3,500,000.00							5,500,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	48			12							12		
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100.00	1 Tahun	100.00	100.00	55,000,000.00						100.00	57,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barak Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**309,000,000.00**						**100.00**	**309,000,000.00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	40			10	93,500,000.00						10	96,500,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	4			1	165,500,000.00						1	175,500,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	16			4	50,000,000.00						4	66,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**272,400,000.00**						**98.00**	**272,400,000.00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	24	12	12		78,400,000.00							78,400,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48			12							12		
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	24	12	12		194,000,000.00							194,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48			12							12		
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**100.00**	**1.00**	**100.00**	**100.00**	**259,476,969.00**						**100.00**	**268,476,969.00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	45,532,088.00						1	45,532,088.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	6	6	178,944,881.00						6	180,944,881.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	42	1	1	10	10,000,000.00						10	15,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabitilasi sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	1	1	2	25,000,000.00						2	27,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**			**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun**	**Persen**	**24.00**	**16.60**	**18.50**	**0.05**	**232,140,000.00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan**		**0.06**	**250,047,000.00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**			**0.20**			**135,000,000.00**							**155,000,000.00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	bahan pustaka siap layan, peralatan outomasi yang tersedia dan sistem informasi yang terkelola	bahan pustaka siap layan, Paket	7500 Buku, 6 Paket	1250.	1250 Buku, 1 Paket		40,000,000.00							40,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen TIK berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan	3			3							3		
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksemplar	400	-	100	100	25,000,000.00						100	30,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	125	-	25	25	20,000,000.00						25	20,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peserta	350	50	40	40	20,000,000.00						40	30,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Buku			450	450	30,000,000.00						450	35,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Persen, Peserta, Perpustakaan , TBM, Kelurahan,**	**450 Peserta dan 5 Perpustakaan**	**20.00**	**450 Peserta dan 5 Perpustakaan**	**450 Peserta dan 5 Perpustakaan**	**97,140,000.00**						**450 Peserta dan 5 Perpustakaan**	**95,047,000.00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	12	2	2	2	22,140,000.00						2	20,047,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di Tempat-tempat umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	30	10	5	5	20,000,000.00						5	20,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Baca Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	350	100	50	50	35,000,000.00						50	35,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	18	3	3	3	20,000,000.00						3	20,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**03**			**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Koleksi Naskah Kuno dan Nasional yang Teridenfifikasi**	**Jumlah**	**33**		**3**	**5**	**25,000,000.00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan**		**5**	**25,000,000.00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**23**	**03**	**2.02**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Koleksi Budaya Etnis Nusantara di Kota Bandar Lampung**	**Naskah**	**33 Naskah**	-	**3 Naskah**	**5 Naskah**	**25,000,000.00**						**5 Naskah**	**25,000,000.00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Eksemplar	100	-	100	100	25,000,000.00						5 Naskah	25,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**				**KEARSIPAN**							**215,069,375.00**							**227,072,843.00**	
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**215,069,375.00**							**227,072,843.00**	
2	**24**	**02**			**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku**	**Persen**	**24.00**	**16.60**	**18.50**	**20.30**	**160,220,000.00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**20.30**	**169,481,000.00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kapasitas SDM Bagi Pengelola Arsip tentang Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta**	**Persen**	**50.00**	**50.00**	**0.50**	**0.50**	**33,000,000.00**						**0.50**	**107,511,000.00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah OPD yang telah dibina dan dimonev	SKPD	13 SKPD	9	10 SKPD		13,000,000.00	Bandar Lampung	APBD					50,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	400			400							400		
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	SDM pengelola arsip dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Peserta	50 Peserta		30 Peserta		20,000,000.00	Bandar Lampung	APBD					57,511,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	600			600							600		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**		**Persen**	**1000 Berkas**	**0.50**	**1 Paket, 1000 Berkas**	**1000 Berkas**	**107,220,000.00**						**1000 Berkas**	**21,970,000.00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip			10	10	85,250,000.00	Bandar Lampung	APBD						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	500		500	500	21,970,000.00	Bandar Lampung	APBD				500	21,970,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Pembinaan Secara Teknis Terhadap ASN dan Pegawai Swasta**	**Paket**	**1 Paket**	**0.50**		**1 Paket**	**20,000,000.00**						**1 Paket**	**40,000,000.00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	54	-		54	20,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				54	10,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Terbinanya ASN Unit Kearsipan	Peserta	60 Peserta	50 Peserta										30,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**			**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Arsip yang Teridentifikasi untuk Dimusnahkan**	**Jumlah**	**960.00**	**100.00**	**130.00**	**150.00**	**54,849,375.00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**150.00**	**57,591,843.00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memilikin retensi di bawah 10 tahun**	**Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Mmeiliki retensi di Bawah 10 Tahun**	**Arsip**	**990 Arsip**	**100 Arsip**	**130 Arsip**	**150 Arsip**	**24,849,375.00**						**150 Arsip**	**27,591,843.00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	990	100	130	150	24,849,375.00	Bandar Lampung	APBD				150	27,591,843.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**	**2.03**		**Peyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan**	**Jumlah Arsip Daerah Terselamatkan**	**Berkas, Paket**	**1 Paket**	**1500 Berkas**	**1 Paket**	**1 Paket**	**30,000,000.00**						**1 Paket**	**30,000,000.00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Arsip	80	-	1	20	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				20	30,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
												-							-	
3	**25**				**KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**6,147,551,651.83**							**6,479,140,721.73**	
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							**6,147,551,651.83**							**6,479,140,721.73**	
3	**25**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**5,032,368,026.83**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**5,355,697,915.48**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**26,000,000.00**						**100.00**	**26,000,000.00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	24	4	4		26,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan	4	26,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	12			3							3		
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,725,574,365.58**						**100.00**	**3,976,564,571.17**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kali	28	14	14		3,585,574,365.58	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Kelautan dan Perikanan		3,836,564,571.17	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	33			33							33		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Layanan Administrasi Keuangan	Bulan	24	12	12		140,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan		140,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	48			12							12		
3	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**39,000,000.00**						**100.00**	**15,000,000.00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2			1	27,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan			Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang				2	12,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	3	15,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**201,540,000.00**						**98.00**	**222,400,000.00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	13,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan	1	15,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	42,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan	1	42,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	22,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan	1	25,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Adanya makanan dan minuman rapat	Persen	100.00	100.00	100.00		30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan		35,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6.00	1.00	1.00	1.00	27,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan	1.00	30,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Adanya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	72.00	12.00	12.00		5,040,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan		5,400,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen													
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Layanan makanan dan minuman tamu	Persen	100.00	100.00	100.00		7,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan		10,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4			1							1		
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase partisipasi Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00		55,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan		60,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
3	**25**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**66,000,000.00**						**98.00**	**120,000,000.00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	5		1		16,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan		35,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit													
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin penunjang	Paket	6	1	1		30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan		45,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit													
3	25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	5		1		20,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan		40,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit													
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**711,651,161.25**						**98.00**	**715,651,844.31**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan Internet	Bulan	24	12	12		56,901,161.25	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan		60,901,844.31	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Jasa pelayanan umum kantor	Bulan	24	12	12		654,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak Dinas Kelautan dan Perikanan		654,750,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**262,602,500.00**						**98.00**	**280,081,500.00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	33,530,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Kelautan dan Perikanan	1	33,530,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					136,072,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Dinas Kelautan dan Perikanan		136,551,500.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Layanan pemeliharaan peralatan dan mesin gedung kantor	Unit				16	12,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan dan Mesin Dinas Kelautan dan Perikanan	16	15,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		1	1	65,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan	1	75,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					16,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Gedung Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan		20,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman**	**Persen**	**0.03**	**0.03**	**0.03**	**0.03**	**452,025,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**0.03**	**474,626,250.00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
						Cakupan Bina Kelompok Nelayan	**Persen**	**40.00**	**33.00**	**34.00**	**36.00**							**38.00**		
						Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	**Persen**	**58.48**	**58.48**	**58.48**	**58.47**							**58.47**		
						Produksi Perikanan Tangkap	**Ton**	**3,309.11**	**3,057.12**	**3,118.26**	**3,180.62**							**3,244.23**		
3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**27.00**	**17.00**	**20.00**	**22.00**	**336,262,500.00**						**22.00**	**353,075,625.00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	Unit					336,262,500.00	Bandar Lampung	DAK			Usaha Perikanan Tangkap		353,075,625.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya peranan nelayan kecil di bidang perikanan tangkap**	**Persen**	**10.00**	**2.00**	**2.00**	**2.00**	**50,000,000.00**						**2.00**	**40,000,000.00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah nelayan yang dibantu untuk pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha	Nelayan	700.00	500.00	200.00		50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Nelayan		40,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha													
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**50,762,500.00**						**100.00**	**51,550,625.00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan proses pelelangan berjalan dengan baik	Bulan	24	12	12		50,762,500.00	Bandar Lampung	APBD			Pelelangan Ikan		51,550,625.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan (TPI)	Layanan													

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	**25**	**03**	**2.06**		**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran SampaiDengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau,Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen pendaftaran kapal berukuran sampai dengan 10 GT**	**Dok**	**4**			**1**	**15,000,000.00**						**1**	**30,000,000.00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	2.06	02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Layanan proses penerbitan pendaftaran kapal perikanan ukuran sampai dengan 10 GT	Persen	100.00				15,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung		30,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha												
3	**25**	**04**			**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Produksi Perikanan Budidaya**	**Ton**	**143.50**	**132.58**	**135.23**	**137.93**	**143,325,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**140.69**	**150,491,250.00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan**	**Persen**	**10.00**		**2.00**	**2.00**	**25,000,000.00**						**2.00**	**30,000,000.00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kolompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	17.00			5.00	5,000,000.00					Podakan	5.00	5,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan pendampingan kepada Pembudidayaan Ikan	Persen	100.00		100.00	100.00	20,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pembudidaya Ikan	100.00	25,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok												
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya**	**Persen**	**12.00**	**2.00**	**2.00**	**2.00**	**118,325,000.00**						**2.00**	**120,491,250.00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota	Dok	1			1	10,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan			Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Unit					98,325,000.00	Bandar Lampung	APBD, DAK			Pembudidaya Ikan	2.00	110,491,250.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	UPR yang tersertifikasi CPIB dan CBIB	Unit	4			1	5,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1.00	5,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Laporan	4			1							1		
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Lokasi budidaya yang dimonitoring	Persen	4.00			1.00	5,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1.00	5,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
3	**25**	**05**			**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	**Compliance (Persentase Kepatuhan) Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan**	**Persen**	**9.00**	**1.50**	**2.50**	**4.00**	**66,646,125.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**4.00**	**69,978,431.25**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**05**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan kawasan yang dipantau dari kegiatan ilegal fishing dan RZKAW**	**Persen**	**5.00**	**2.00**	**2.00**	**4.00**	**66,646,125.00**						**4.00**	**69,978,431.25**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen						Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	69,978,431.25	Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidan Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Compliance (Persentase Kepatuhan) Usaha Bidang Perikanan Budidaya	Persen	9.00	1.50	2.50	4.00	66,646,125.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung			Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Laporan				1								
3	**25**	**06**			**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Angka Konsumsi Ikan**	**Kg/Kap/Th**	**43.14**	**34.87**	**36.54**	**37.93**	**453,187,500.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**37.93**	**428,346,875.00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Terbitnya surat ijin usaha perikanan**	**Dok**	**62.00**		**1.00**	**10.00**	**21,275,000.00**						**10.00**	**27,338,750.00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	5		1	1	21,275,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Kelautan dan Perikanan	1	27,338,750.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Terbitnya ijin edar dan halal produk**	**Dok**	**19.00**			**4.00**	**50,000,000.00**						**4.00**	**60,000,000.00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	29			7	50,000,000.00					Pelaku Usaha Perikanan	7	60,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai ekspor hasil perikanan**	**USD**	**127,000.00**	**85,000.00**	**90,000.00**	**100,000.00**	**381,912,500.00**						**100,000.00**	**341,008,125.00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	UPI yang terbangun berstandar HACCP	Unit	3.00	1.00	2.00		381,912,500.00	Bandar Lampung	APBD, DAK			Pelaku Usaha Perikanan		341,008,125.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Pelaku Usaha	4			1						1		
												-							-	
3	**26**				**PARIWISATA**							**12,143,238,016.12**							**11,254,149,916.97**	
												-								
					DINAS PARIWISATA							**12,143,238,016.12**							**11,254,149,916.97**	
3	**26**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penujang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**5,985,913,016.12**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**5,576,458,666.97**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100,000,000.00**						**100.00**	**105,000,000.00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	12	12	12	100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	12	105,000,000.00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,705,876,875.82**						**100.00**	**3,891,170,719.65**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN Dinas Pariwisata yang tersedia	Kali	28	14	14		3,578,867,868.82	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pariwisata		3,757,811,262.30	Dinas Pariwisata
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan													

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	26	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Pariwisata yang Terlaksana	Bulan	24	12	12		127,009,007.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata		133,359,457.35	Dinas Pariwisata
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100**	**10,500,000.00**						**100**	**11,025,000.00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	2	2	2	10,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pariwisata	2	11,025,000.00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**394,847,001.30**						**98.00**	**414,589,351.37**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	5,147,001.30	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	5,404,351.37	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	78,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	81,900,000.00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	27,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	28,350,000.00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	1.00	1.00	1.00		25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata		26,250,000.00	Dinas Pariwisata
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	75,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	79,275,000.00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		4,200,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata		4,410,000.00	Dinas Pariwisata
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4			1							1		
3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100.00	100.00	100.00		30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata		31,500,000.00	Dinas Pariwisata
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4			1							1		
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100.00	100.00	100.00		150,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata		157,500,000.00	Dinas Pariwisata
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
3	**26**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**1,005,164,139.00**						**98.00**	**346,672,345.95**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang disediakan	Unit	1			1	425,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata			Dinas Pariwisata
3	26	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2			2	30,164,139.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	2	31,672,345.95	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	1	1	1	60,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	63,000,000.00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	6	6	6	490,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	6	252,000,000.00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**549,937,500.00**	Bandar Lampung	APBD				**98.00**	**577,434,375.00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	24	12	12		66,150,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata		69,457,500.00	Dinas Pariwisata
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	24	12	12		483,787,500.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kntrak Dinas Pariwisata		507,976,875.00	Dinas Pariwisata
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**219,587,500.00**						**98.00**	**230,566,875.00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	27,121,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Pariwisata	1	28,477,575.00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	2	2	15,666,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Dinas Pariwisata	2	16,449,300.00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	48	8	8	8	10,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Dinas Pariwisata	8	10,500,000.00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	36	6	6	6	150,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata	6	157,500,000.00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	16,800,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dinas Pariwisata	1	17,640,000.00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**			**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase Kunjungan wisata**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**1,238,200,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**100.00**	**1,037,610,000.00**	**Dinas Pariwisata**
						PAD Sektor Pariwisata	**Persen**	**25.60**	**23.40**	**23.45**	**23.50**	-						**25.55**	-	
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara**	**orang**	**1,045,902.53**	**215,623.00**	**819,492.00**	**860,466.60**	**188,587,500.00**						**903,490.00**	**198,016,875.00**	**Dinas Pariwisata**
						Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara	**orang**	**2,255.19**	**2,000.00**	**1,767.00**	**1,855.35**							**1,948.00**		
						Jumlah Destinasi Baru yang dikembangkan	**lokasi**	**2 Lokasi**	**2 Lokasi**	**2 Lokasi**	**2 Lokasi**							**2 Lokasi**		
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	4			1	188,587,500.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	198,016,875.00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola**	**Laporan**	**6**	**1**	**1**	**1**	**1,049,612,500.00**						**1**	**839,593,125.00**	
3	26	02	2.03	03	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	4	2	2	4	899,612,500.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	4	682,093,125.00	Dinas Pariwisata
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	4			1	150,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	157,500,000.00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**03**			**Program Pemasaran Pariwisata**	**Lama kunjungan Wisata**	**Hari**	**1.90**	**1.73**	**1.60**	**1.70**	**735,250,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**1.80**	**772,012,500.00**	**Dinas Pariwisata**
						Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara	**Rupiah/ Kunjungan**	**1,800,000.00**	**1,425,000.00**	**1,500,000.00**	**1,600,000.00**							**1,700,000.00**		
						Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara	**Rupiah/ Kunjungan**	**10,550,000.00**	**9,980,000.00**	**10,100,000.00**	**10,250,000.00**							**10,400,000.00**		
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Lama Kunjungan wisatawan Nusantara**	**hari**	**1.90**	**1.56**	**1.60**	**1.70**	**735,250,000.00**						**1.70**	**772,012,500.00**	**Dinas Pariwisata**
						Lama Kunjungan wisatawan mancanegara	**hari**	**1.90**	**1.90**	**1.60**	**1.70**							**1.70**		
						Jumlah event promosi yang diikuti	**event**	**20.00**	**-**	**20.00**	**20.00**							**20.00**		
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	4			1	605,125,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	635,381,250.00	Dinas Pariwisata
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	6	1	1	1	130,125,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	136,631,250.00	Dinas Pariwisata

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	**26**	**04**			**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Persen**	**2.38**	**1.17**	**2.35**	**2.36**	**127,500,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**2.36**	**133,875,000.00**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**04**	**2.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif**	**UMKM**	**470.00**	**430.00**	**440.00**	**450.00**	**127,500,000.00**						**450.00**	**133,875,000.00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	04	2.02	02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	5		1	1	52,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pelaku Ekonomi Kreatif	1	55,125,000.00	Dinas Pariwisata
3	26	04	2.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	5		1	1	75,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pelaku Ekonomi Kreatif	1	78,750,000.00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**05**			**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif**	**Persen**	**100.00**	**28.57**	**50.00**	**75.00**	**4,056,375,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**		**75.00**	**3,734,193,750.00**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah indutri baru yang mendukung MICE (jasa usaha)**	**Jasa Usaha**	**20.00**	**50.00**	**20.00**	**20.00**	**3,956,375,000.00**						**20.00**	**3,629,193,750.00**	**Dinas Pariwisata**
						Jumlah SDM Pariwisata yang profesional	**Orang**	**50.00**	**50.00**	**50.00**	**50.00**							**50.00**		
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Duta Wisata Kota Bandar Lampung	Pasang	15 Pasang	15 Pasang	15 Pasang		500,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		525,000,000.00	Dinas Pariwisata
						Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya (Jumlah Duta Wisata Kota Bandar Lampung)	Orang	30			30							30		
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Ragam Festival Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan	Festival	3	3	3		551,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		578,812,500.00	Dinas Pariwisata
						Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Jumlah Ragam Festival Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan)	Orang	1,200			300							300		
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) (Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Sadar Wisata)	Orang	50	50	50	50	655,125,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	50	687,881,250.00	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Jumlah Lokakarya dan Dialog Jasa Usaha Pariwisata (Hotel, Restoran, Tempat Hiburan) yang dilaksanakan)	Orang	50	50	50	50	250,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50	262,500,000.00	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Event Festival yang dilaksanakan	Festival	4	4	4		2,000,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		1,575,000,000.00	Dinas Pariwisata
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Jumlah Event Festival yang dilaksanakan)	Laporan	4			1							1		
3	**26**	**05**	**2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Laporan**	**2**			**1**	**100,000,000.00**						**1**	**105,000,000.00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	300			50	100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	50	105,000,000.00	Dinas Pariwisata

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
												-							-	
3	**27**				**PERTANIAN**							**18,301,720,882.48**							**19,424,711,167.59**	
												-							-	
					DINAS PERTANIAN							**18,301,720,882.48**							**19,424,711,167.59**	
3	**27**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**12,828,183,446.86**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**14,209,711,167.59**	**Dinas Pertanian**
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**85,000,000.00**						**100.00**	**85,000,000.00**	**Dinas Pertanian**
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan OPD (buah)	Dokumen	8	4	4		85,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pertanian		85,000,000.00	Dinas Pertanian
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	16			4						4		
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**9,655,099,419.46**						**100.00**	**11,440,869,338.82**	**Dinas Pertanian**
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	Bulan	24	12	12		9,405,099,419.46	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pertanian		11,140,869,338.82	Dinas Pertanian
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan													
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi keuangan Dinas Pertanian yang terlaksana	Bulan	24	12	12		250,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pertanian		300,000,000.00	Dinas Pertanian
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1						1		
3	**27**	**01**	**2.05**	**09**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**20,000,000.00**						**100.00**	**20,000,000.00**	**Dinas Pertanian**
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	5	5	5	20,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pertanian	5	20,000,000.00	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**209,400,067.40**						**98.00**	**215,157,868.77**	**Dinas Pertanian**
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	6,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pertanian	1	6,000,000.00	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Bulan	24	12	12		65,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pertanian		65,000,000.00	Dinas Pertanian
						Komputer PC/Notebook dan Kelengkapannya yang tersedia	Paket	6	1	1										
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	7,400,067.40	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pertanian	1	7,557,868.77	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makan dan Minum Rapat	Paket	2	1	1		15,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pertanian		20,600,000.00	Dinas Pertanian
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pertanian	1	50,000,000.00	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Bulan	24	12	12		6,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pertanian		6,000,000.00	Dinas Pertanian
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Partisipasi dalam Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah	Paket	10	5	5		60,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pertanian		60,000,000.00	Dinas Pertanian
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**540,000,000.00**						**98.00**	**110,000,000.00**	**Dinas Pertanian**
3	27	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	1			1	350,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pertanian			Dinas Pertanian
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8			2	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pertanian	2	30,000,000.00	Dinas Pertanian
3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mebeleur kantor yang tersedia	Paket	4	2	2		160,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pertanian		80,000,000.00	Dinas Pertanian
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	24			8							8		
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**1,700,000,000.00**						**100.00**	**1,700,000,000.00**	**Dinas Pertanian**
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyediakan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	24	12	12		200,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pertanian		200,000,000.00	Dinas Pertanian
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
3	27	01	2.08	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	24	12	12		1,500,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak Dinas Pertanian		1,500,000,000.00	Dinas Pertanian
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**618,683,960.00**						**98.00**	**638,683,960.00**	**Dinas Pertanian**
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	33,532,088.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Pertanian	1	33,532,088.00	Dinas Pertanian
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	50	50	50	414,151,872.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Dinas Pertanian	50	434,151,872.00	Dinas Pertanian
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	150,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Gedung Kantor Dinas Pertanian	1	150,000,000.00	Dinas Pertanian
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	21,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Gedung Dinas Pertanian	1	21,000,000.00	Dinas Pertanian
3	**27**	**02**			**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Produktivitas Padi**	**kw/ha**	**59.10**	**58.00**	**58.50**	**58.75**	**1,470,000,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**		**58.95**	**1,385,000,000.00**	**Dinas Pertanian**
						Produktivitas Jagung	**kw/ha**	**49.30**	**48.50**	**48.50**	**48.87**							**49.15**		
						Produksi Daging	**Ton/Tahun**	**5,497.32**	**5,431.64**	**5,180.24**	**5,283.35**							**5,389.52**		
						Produksi Telur	**Ton/Tahun**	**134.67**	**-**	**126.90**	**129.43**							**132.03**		
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Sarana pertanian dan partisipasi promosi produk pertanian yang tersedia**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**270,000,000.00**						**100.00**	**300,000,000.00**	**Dinas Pertanian**
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang terpelihara	Paket	4	2	2		180,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana Pertanian	2.00	200,000,000.00	Dinas Pertanian
						Jumlah pengawasan penggunaan pengawasan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Laporan	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Keikutsertaan Dinas Dalam Promosi Pembangunan	Kali	4	2	2		90,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana Pendukung Pertanian	2.00	100,000,000.00	Dinas Pertanian
						Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	4			1							1		
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Bibit tanaman hias, buah-buahan, sayuran, dan tanaman perkebunan yang ditanam**	**Paket**	**4**	**4**	**4**	**4**	**1,050,000,000.00**						**4**	**935,000,000.00**	**Dinas Pertanian**
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Bibit Tanaman Perkebunan untuk Rehabilitasi (Kakao)	Bibit	3,000		3,000		600,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Petani		485,000,000.00	Dinas Pertanian
						Bibit Tanaman Perkebunan untuk Rehabilitasi (Kopi)	Bibit	2,000		2,000										
						Pengadaan Bibit Toga, Bibit Sayuran, Bibit Buah, dan Bimbingan Teknis Pemanfaatan	Paket	4		4										
						Bibit Tanaman Perkebunan untuk Rehabilitasi (Kakao)	Bibit	3,000		3,000										
						Bibit Tanaman Perkebunan untuk Rehabilitasi (Kopi)	Bibit	2,000		2,000										
						Pengadaan Bibit Toga, Bibit Sayuran, Bibit Buah, dan Bimbingan Teknis Pemanfaatan	Paket	4		4										
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	4			1							1		
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Tersedianya bahan baku tembakau berkadar nikotin rendah	kg/ha	2,675	1,335	1,340		450,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Petani		450,000,000.00	Dinas Pertanian
						Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	4			1							1		
3	**27**	**02**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Jumlah Bibit Ternak Kelinci yang Tersedia**	**Paket**	**6**	**1**	**1**	**1**	**150,000,000.00**						**1**	**150,000,000.00**	**Dinas Pertanian**
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	250			250	150,000,000.00						250	150,000,000.00	Dinas Pertanian
3	**27**	**03**			**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Sumur Bor untuk Peningkatan Produksi Pertanian**	**Jumlah**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**3,400,000,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**		**20.00**	**3,310,000,000.00**	**Dinas Pertanian**
						Persentase Pembangunan, Rrehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	**Persen**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**							**80.00**		
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah prasarana pertanian yang terpantau**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100,000,000.00**						**100.00**	**110,000,000.00**	**Dinas Pertanian**
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Produksi Padi di Kecamatan Rajabasa	ton/ha	1,143.90	1,143.90			50,000,000.00					Petani		50,000,000.00	Dinas Pertanian
						Lahan pertanian pangan berkelanjutan/ LP2B, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LPC2B yang dikelola	Dokumen	4			1							1		
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Harga komoditi pertanian di tingkat produsen di Bandar Lampung yang terpantau	Kecamatan	10	5	5		50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		60,000,000.00	Dinas Pertanian
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Laporan	4			1							1		
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah pembangunan prasarana pertanian**	**Paket**	**6.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**3,300,000,000.00**						**1.00**	**3,200,000,000.00**	**Dinas Pertanian**
3	27	03	**2.02**	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukung	Jumlah balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	3		1			Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	200,000,000.00	Dinas Pertanian
3	27	03	**2.02**	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	1	1	1	1	3,300,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	3,000,000,000.00	Dinas Pertanian

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	**27**	**04**			**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Angka Kejadian Penyakit**	**Persen**	**8.20**	**7.50**	**6.80**	**6.10**	**253,537,435.62**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**		**5.40**	**270,000,000.00**	**Dinas Pertanian**
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**45,000,000.00**						**100.00**	**50,000,000.00**	**Dinas Pertanian**
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Desinfektinasi secara massal yang terlaksana	Kecamatan	20	20	20		45,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung		50,000,000.00	Dinas Pertanian
						Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Laporan	4			1							1		
3	**27**	**04**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**58,537,435.62**						**100.00**	**60,000,000.00**	**Dinas Pertanian**
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan dan Pemeriksaan Pemotongan Hewan dan Pemotongan Hewan Qurban yang terlaksana	Kecamatan	20	20	20		58,537,435.62	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung		60,000,000.00	Dinas Pertanian
						Jumlah Pengawasan atas penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	4			1							1		
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100,000,000.00**						**100.00**	**100,000,000.00**	**Dinas Pertanian**
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pengawasan atas penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	6	1	1	1	100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	1	100,000,000.00	Dinas Pertanian
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner**	**Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan Kelompok Pengolah Produk Peternakan yang terlaksana**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**50,000,000.00**						**100.00**	**60,000,000.00**	**Dinas Pertanian**
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	6.00	1.00	1.00	1.00	50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	1.00	60,000,000.00	Dinas Pertanian
3	**27**	**05**			**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Persen**	**100.00**		**100.00**	**100.00**	**50,000,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**		**100.00**	**50,000,000.00**	**Dinas Pertanian**
3	**27**	**05**			**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100.00**		**100.00**	**100.00**	**50,000,000.00**						**100.00**	**50,000,000.00**	**Dinas Pertanian**
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme, Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang ditangani	Ha	1		1	1	50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	1	50,000,000.00	Dinas Pertanian
3	**27**	**07**			**Program Penyuluhan Pertanian**	**Cakupan Bina Kelompok Petani**	**Persen**	**85.00**		**70.00**	**75.00**	**300,000,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**		**80.00**	**200,000,000.00**	**Dinas Pertanian**
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Penyuluhan pertanian yang terlaksana**						**300,000,000.00**							**200,000,000.00**	**Dinas Pertanian**
3	27	07	2.01	01	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	1		1	1	50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Petani	1	50,000,000.00	Dinas Pertanian
3	27	07	2.01	02	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	1		1	1	200,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kelompok Tani	1	100,000,000.00	Dinas Pertanian
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan pertanian	Unit	1		1	1	50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Penyuluh Pertanian	1	50,000,000.00	Dinas Pertanian

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	**30**				**PERDAGANGAN**							**14,093,746,767.35**							**14,900,994,367.66**	
												-							-	
					DINAS PERDAGANGAN							**14,093,746,767.35**							**14,900,994,367.66**	
3	**30**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**12,909,220,767.35**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**13,664,408,317.66**	**Dinas Perdagangan**
3	**30**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**28,500,000.00**						**100.00**	**28,500,000.00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perdagangan	Laporan	14	7	7		28,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perdagangan		28,500,000.00	Dinas Perdagangan
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	28			7						7		
3	**30**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**10,074,026,104.22**						**100.00**	**10,771,097,732.00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gajin dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda yang Tersedia	Kali	28	14	14		9,958,166,104.22	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Perdagangan		10,655,237,732.00	Dinas Perdagangan
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	95			95							95		
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bulan	24	12	12		115,860,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perdagangan		115,860,000.00	Dinas Perdagangan
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	48			12							12		
3	**30**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**10,000,000.00**						**100.00**	**15,000,000.00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.95	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	4	4	4	10,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Perdagangan	4	15,000,000.00	Dinas Perdagangan
3	**30**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**232,870,870.78**						**98.00**	**234,455,471.00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	4,167,240.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perdagangan	1	5,000,000.00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	37,403,202.38	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perdagangan	1	43,013,683	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	5,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perdagangan	1	7,000,000.00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan dan Makanan Minuman Rapat	Bulan	72	12	12		24,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perdagangan		24,750,000.00	Dinas Perdagangan
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	116,550,428.40	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perdagangan	1	133,205,471	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	72	12	12		4,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perdagangan		4,500,000.00	Dinas Perdagangan
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24			6							6		
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	72	12	12		40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perdagangan		60,000,000.00	Dinas Perdagangan
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	**30**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**355,782,616.69**						**98.00**	**392,021,666.00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	2	1	1		111,759,991.69	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perdagangan		132,935,991.00	Dinas Perdagangan
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	280			70							70		
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	2	1	1		130,630,500.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perdagangan		145,693,550.00	Dinas Perdagangan
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	80			20							20		
3	30	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	2	1	1		113,392,125.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perdagangan		113,392,125.00	Dinas Perdagangan
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20			5							5		
3	30	01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**1,964,764,845.00**						**98.00**	**1,980,057,118.00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	24	12	12		99,229,845.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perdagangan		114,522,118.00	Dinas Perdagangan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	24	12	12		1,865,535,000.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak Dinas Perdagangan		1,865,535,000.00	Dinas Perdagangan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48			12							12		
3	**30**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**243,276,330.66**						**98.00**	**243,276,330.66**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	42,194,561.64	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Perdagangan	1	42,194,561.64	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	8	8	8	190,473,094.02	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Dinas Perdagangan	8	190,473,094.02	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	17	17	17	17	6,034,875.00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Dinas Perdagangan	17	6,034,875.00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	15	15	15	4,573,800.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dinas Perdagangan	15	4,573,800.00	Dinas Perdagangan
3	**30**	**04**			**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting**	**Persen**	**25.00**	**20.00**	**19.00**	**18.00**	**434,991,375.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**		**17.00**	**456,740,944.00**	**Dinas Perdagangan**
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisonal**	**Pasar**	**9**	**9**	**9**	**9**	**434,991,375.00**						**9**	**456,740,944.00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintergrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Publikasi Perkembangan Harga Pasar	Pasar	9	9	9		80,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung		80,000,000.00	Dinas Perdagangan
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	Tahap	3	3	3		354,991,375.00	Bandar Lampung	APBD			Pasar		376,740,944.00	Dinas Perdagangan
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	4			1							1		
3	**30**	**05**			**Program Pengembangan Ekspor**	**Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan**	**Persen**	**100.00**	**33.00**	**20.00**		**606,209,625.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**			**636,520,106.00**	**Dinas Perdagangan**
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti**	**Kali**	**4**	**4**	**4**	**5**	**606,209,625.00**						**5**	**636,520,106.00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	05	2.01	2.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di Ikuti	Kali	4	4	4		606,209,625.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		636,520,106.00	Dinas Perdagangan
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	5			5							5		
3	**30**	**06**			**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang**	**Persen**	**87.00**	**69.54**	**86.00**	**86.50**	**143,325,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**		**86.80**	**143,325,000.00**	**Dinas Perdagangan**
						Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi	**Persen**	**87.00**	**10.57**	**86.00**	**86.50**							**86.80**		
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang**	**UTTP**	**2,100**	**1,800**	**1,900**	**2,000**	**143,325,000.00**						**2,000**	**143,325,000.00**	**Dinas Perdagangan**
						Jumlah UTTP BDKT dan SN yang sudah di awasi	**UTTP**	**1,100**	**800**	**900**	**1,000**							**1,000**		
						Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi	**Kasus**	**16**	-	**2**	**3**							**3 Kasus**		
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang	UTTP	1,900	1,800	1,900		80,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			UTTP		80,000,000.00	Dinas Perdagangan
						Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	2,100			2,000							2,100		
3	30	06	2.02	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang DI awasi	UTTP	900	800	900		63,325,000.00	Bandar Lampung	APBD			UTTP		63,325,000.00	Dinas Perdagangan
						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	1,000			1,000							1,000		
3	**31**				**PERINDUSTRIAN**							**11,753,212,032.68**							**13,395,753,854.63**	
					DINAS PERINDUSTRIAN							**11,753,212,032.68**							**13,395,753,854.63**	
3	**31**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian**						**3,624,672,890.68**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**			**3,860,367,810.00**	**Dinas Perindustrian**
3	**31**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**34,104,000.00**						**100.00**	**34,104,000.00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	2	1	1		8,400,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian		8,400,000.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Dokumen	6	3	3		25,704,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian		25,704,000.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ihktisari realisasi kinerja SKPD	Laporan	16			4							4		
3	**31**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntable**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,852,738,190.68**						**100.00**	**3,049,656,260.00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	Bulan	28	14	14		2,744,060,990.68	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Perindustrian		2,936,145,260.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	80			20							20		
3	31	01	2.02	03	Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang terlaksana	Bulan	24	12	12		92,677,200.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian		97,311,000.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	48			12							12		
3	31	01	2.02	05	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1		1		8,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian		8,200,000.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	4			1							1		
3	31	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Bulan	12		12		8,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian		8,000,000.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan	48			12							12		
3	**31**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**11,737,000.00**						**100.00**	**12,323,850.00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	80.00	80.00	80.00		11,737,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Perindustrian		12,323,850.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8			2							2		
3	**31**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**177,757,600.00**						**98.00**	**185,801,700.00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	5,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian	1	5,250,000.00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	44,995,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian	1	47,244,750.00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	14,672,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian	1	15,405,600.00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	16,875,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian	1	16,875,000.00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	38,000,600.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian	1	39,900,600.00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Paket	2	1	1		5,400,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian		5,670,000.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4			1							1		
3	31	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	%	100.00	100.00	100.00		8,715,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian		9,150,750.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4			1							1		
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	%	100.00	100.00	100.00		44,100,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian		46,305,000.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	**31**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**116,796,700.00**						**98.00**	**141,636,500.00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	Paket	1	1	0		20,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian		40,000,000.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	unit	2			1							6		
3	31	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeler Kantor	Paket	6	1	1		25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian		26,250,000.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah paket mebeler kantor	Unit	24			6							6		
3	31	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	5		1		40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian		42,000,000.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	12			3							3		
3	31	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	4			1	6,796,700.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian	1	7,136,500.00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	1		1		25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian		26,250,000.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	unit	12			5							5		
3	**31**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**		**340,500,000.00**							**342,975,000.00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Bulan	24	12	12		49,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Perindustrian		51,975,000.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak Yang Tersedia	Bulan	24	12	12		291,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak Dinas Perindustrian		291,000,000.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
3	**31**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**91,039,400.00**						**98.00**	**93,870,500.00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	1	1	3	48,039,400.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Perindustrian	3	50,441,000.00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.09	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	1	1	8	8,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Dinas Perindustrian	8	8,000,000.00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.09	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4			1	15,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Gedung Kantor Dinas Perindustrian	1	15,429,500.00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	40			10	10,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Perindustrian	10	10,000,000.00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		1	1	10,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dinas Perindustrian	1	10,000,000.00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**02**			**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Pertumbuhan Industri**	**Persen**	**2.77**	**1.95**	**2.52**	**2.62**	**7,729,539,142.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**		**2.71**	**9,116,436,044.63**	**Dinas Perindustrian**
						Cakupan IKM yang mendapatkan Pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (incremental)	**Persen**	**12.91**	**8.59**	**12.45**	**12.55**							**12.75**		
						Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	**Persen**	**27.27**	**9.09**	**13.64**	**18.18**							**22.73**		
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**%**	**91,00**	**91.00**	**91,00**	**91,00**	**7,729,539,142.00**						**91,00**	**9,116,436,044.63**	**Dinas Perindustrian**
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Industri	Jumlah Sumber Daya Industri yang tersedia	Orang	8		8		40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			SDM Industri		45,000,000.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri yang terlaksana	Paket	2	1	1		5,947,972,297.00	Bandar Lampung	ABPD, DAK			IKM		7,291,620,912.38	Dinas Perindustrian
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	4			1							1		
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Orang	415	55	360		1,706,566,845.00	Bandar Lampung	APBD			IKM		1,734,815,132.25	Dinas Perindustrian
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	4			1							1		
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Monitoring dalam evaluasi IKM Penerima Hibah yang terlaksana	IKM	285		285		35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			IKM		45,000,000.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	4			1							1		
3	**31**	**03**			**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**	**Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait**	**Persen**	**53.85**		**60.00**	**62.50**	**162,750,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkesadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**		**64.71**	**170,887,500.00**	**Dinas Perindustrian**
3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) Kecil dan IUI menegah yang diterbitkan**	**%**	**80,95**		**77,78**	**78,95**	**162,750,000.00**						**78,95**	**170,887,500.00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	15	84		15		82,950,000.00	Bandar Lampung	APBD			IKM		87,097,500.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan keseuaian persyaratan teknis perizinan, berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengnan resiko usaha menengah tinggi dan tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS	Dokumen	4			1							1		
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kota yang terlaksana	IKM	84		15		79,800,000.00	Bandar Lampung	APBD			IKM		83,790,000.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri dalam lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan Kabupten/Kota	Dokumen	4			1							1		
3	**31**	**04**			**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**IKM yang Terinformasi dalam SINAS**	**IKM**	**11**	**9**	**8**	**9**	**236,250,000.00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkesadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**		**9**	**248,062,500.00**	**Dinas Perindustrian**
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase data perusahaan Industri Kecil, Menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kota Bandar Lampung**		**0,75**	**0,24**	**0,32**	**0,44**	**236,250,000.00**						**0,44**	**248,062,500.00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain	IKM	30		30		78,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			IKM		82,687,500.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah dokumen hasil fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisa data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)	Dokumen	4			1							1		
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri yang terlaksana	IKM	40	10	30		78,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			IKM		82,687,500.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten/kota melalui SIINas	Dokumen	4			1							1		
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan IKM	IKM	30		30		78,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			IKM		82,687,500.00	Dinas Perindustrian
						Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten Kota dalam penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	**32**				**TRANSMIGRASI**							**41,862,807.00**							**43,955,947.35**	
					DINAS TENAGA KERJA							**41,862,807.00**							**43,955,947.35**	
3	**32**	**04**			**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**	**Cakupan Masyarakat di Wilayah Kumuh yang Mendapatkan Pemahaman Transmigrasi Dibandingkan Total Wilayah Kumuh**	**Persen**	**12.00**	**12.00**	**12.00**	**12.00**	**41,862,807.00**			**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan**		**12.00**	**43,955,947.35**	**Dinas Tenaga Kerja**
3	**32**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian**	**Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman.**	**%**	**100.00**	**12.00**	**50.00**	**70.00**	**41,862,807.00**						**70.00**	**43,955,947.35**	**Dinas Tenaga Kerja**
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Penyediaan Hasil Pendataan Terkait Transmigrasi Perkotaan	%	100.00	12.00	50.00		41,862,807.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	70.00	43,955,947.35	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepaa Keluarga											1		
4					**UNSUR PENDUKUNG**							**235,964,808,212.38**							**235,964,808,212.38**	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**125,706,917,057.60**							**132,439,254,613.82**	
4	**01**	**01**	**2.01**		**Program Administrasi Umum**	**Tingkat Layanan Administrasi Umum**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**99,054,955,884.34**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**100.00**	**104,570,035,720.82**	**Sekretariat Daerah**
						Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tepat Waktu	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**						**100.00**		
						Persentase OPD yang Mengumpulkan Laporan Kinerja (LAKIP) secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**						**100.00**		
						Persentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik	**Persen**	**80.00**	**90.00**	**90.00**	**95.00**						**95.00**		
						Persentase peningkatan kualitas pelayanan terhadap KDH/WKDH	**Persen**	**80.00**	**62.14**	**90.00**	**95.00**						**95.00**		
						Persentase kebijakan pemerintah daerah yang terpublikasi	**Persen**	**100.00**	**106.66**	**100.00**	**100.00**						**100.00**		
												-							-	
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**		**0.00**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**500,000,000.00**						**5 Dokumen**	**500,000,000.00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30	5	5	5	200,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah	5	200,000,000.00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LPJ, LKIP. LPPD, Laporan Terpa, Laporan Rewalisasi Fisik Keuangan Sekretariat Daerah yang Tersusun	Dokumen	6	3	3		175,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		175,000,000.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20			4						4		
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi, Tersusunnya Evaluasi Capaian Renja berkala dan Tahuna, Realisasi Fisik Keuangan Berkala serta Laporan Monitoring dan Evaluasi Program yang Terlaksana	Dokumen	3		0.00		125,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		125,000,000.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12			3						3		
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Meningkatkan adminitrasi keuangan perangkat daerah dan kinerja aparatur yang baik.**		**0.00**	**14 Bulan**	**14 Bulan**	**14 Bulan**	**34,173,268,055.61**						**14 Bulan**	**36,701,598,691.87**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Kali	28	14	14		33,116,602,113.65	Bandar Lampung	APBD			ASN Sekretaris Daerah		35,434,764,261.61	Sekretariat Daerah
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1,748			437							437		
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase tersedianya jasa admintrasi pelaksanaan tugas ASN yang sesuai dengan peraturan	Bulan	24	12	12		427,800,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		560,000,000.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	32			8		Bandar Lampung	APBD				8		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Kebutuhan jasa administrasi Keuangan yang Terpenuhi	Bulan	24	12	12		300,700,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		300,700,000.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	1	1	1	204,719,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah	1	282,687,488.30	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang Tersedia	Laporan	2	1	1		123,446,941.96	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		123,446,941.96	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	16			4							4		
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatkan kualitas SDM ASN dan meningkatkan disiplin aparatur pemerintah**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**399,314,250.00**						**100.00**	**576,814,250.00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Kali	4	2	2		247,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		350,000,000.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	28			7							7		
4	01	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Upacara Pemakaman yang Khidmat sebagai penghormatan terakhir bagi mantan Pejabat negara	Kali	2	1	1		76,814,250.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		76,814,250.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan tugas	Laporan	8			2							2		
4	01	01	2.05	11	Bimbinan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Meningkatkan kinerja dan pengetahun disiplin PNS	Persen	100	100	100		75,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		150,000,000.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200			50							50		
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**		**0.00**	**1 paket**	**1 paket**	**1 paket**	**9,001,246,471.00**						**1 paket**	**10,249,493,971.00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	66,717,500.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah	1	100,000,000.00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	400,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah	1	450,000,000.00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	444,035,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah	1	825,000,000.00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman	Bulan	24	12	12		1,296,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		1,500,000,000.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
4	01	01	2.06	05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	300,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah	1	350,000,000.00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	1	1	1	1,494,493,971.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah	1	1,524,493,971.00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Bulan	24	12	12		4,250,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		4,500,000,000.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4			1							1		
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	24	12	12		750,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		1,000,000,000.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**		**0.00**	**2 unit**	**3 unit**	**3 unit**	**11,300,000,000.00**						**3 unit**	**12,685,712,543.57**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah alat transportasi keperluan dinas/jabatan	Unit	3 unit	4 unit	5 unit		3,100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		3,485,712,543.57	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Unit	4			1							1		
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah alat transportasi keperluan dinas operasional/lapangan	Unit	5 unit	139 unit	150 unit		4,000,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		5,000,000,000.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	32			8							8		
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	26	11	15		650,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		650,000,000.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	600			150							150		
4	01	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	15				3,550,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		3,550,000,000.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	60			15							15		
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Bulan**	**72**	**12**	**12**	**12**	**28,833,501,115.57**						**12**	**28,833,501,115.57**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	24	12	12		18,310,251,115.57	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		18,310,251,115.57	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa penggunaan barang oleh sekretariat daerah	Bulan	24	12	12		835,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		835,000,000.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	24	12	12		9,688,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		9,688,250,000.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah terpelihara dengan baik**		**0.00**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**10,756,316,536.00**						**12 bulan**	**10,800,000,000.00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	101	101	101	101	3,256,316,536.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Sekretariat Daerah	101	3,300,000,000.00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	101	101	101	101	200,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Sekretariat Daerah	101	200,000,000.00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	120	120	120	120	350,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Sekretariat Daerah	120	350,000,000.00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	7	7	7	700,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Gedung Kantor Sekretariat Daerah	7	700,000,000.00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	7	7	7	6,250,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Daerah	7	6,250,000,000.00	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**		**0.00**	**14 Bulan**	**14 Bulan**	**14 Bulan**	**1,430,503,824.00**						**14 Bulan**	**1,430,503,824.00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang Tersedia	Bulan	28	14	14		1,430,503,824.00	Bandar Lampung	APBD			Kepala Daerah		1,430,503,824.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2			2							2		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Persentase adanya Dokumen ABK OPD dibagi jumlah OPD**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**561,745,965.38**						**100.00**	**589,833,263.64**	**Sekretariat Daerah**
						Persentase adanya dokumen anjab OPD dibagi jumlah OPD	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
						Persentase pengaduan pelayanan publik yang ditangani		**100.00**	**B**	**B**	**B**							**B**		
						Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		**B**	**100.00**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
						Persentase OPD yang melakukan surve IKM dibanding OPD yang seharusnya melakukan pelayanan IKM.		**100.00**	**1 Perda, 9 Perwali , 65 OPD**	**10 Perwali, 65 OPD**	**65 OPD, 10 Perwali**							**65 OPD, 10 Perwali**		
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Adanya Laporan Pertanggungawaban Sekretariat Kota, Adanya Data Evaluasi Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah, telah disusunnya Data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS dan Nomenklatur/Bobot Peringkat serta kualifikasi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung	OPD	10 Perwali , 65 OPD	65 OPD	65 OPD		237,626,050.00	Bandar Lampung	APBD							246,626,050.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	4			1							1		
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Adanya Dokumen Penetapan Kinerja Walikota, Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik, Adanya Buku Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan Publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.	OPD	65 OPD	90 Buku	90 Buku		167,108,600.00	Bandar Lampung	APBD			Dokumen Kota Sekretariat Daerah			177,195,898.26	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	4			1							1		
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Adanya Birokrasi Pemerintah yang Profesional, Tersusunnya Kembali (Penyempurnaan) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tepat sistematis dan Akuntabel	Buku	90 Buku				157,011,315.38	Bandar Lampung	APBD			Reformasi Sekretariat Daerah			166,011,315.38	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	4			1							1		
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,099,059,666.78**						**100.00**	**2,202,578,061.17**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Sistem Administrasi Penatausahaan Protokol KDH/WKDH		12 bulan	432 Buku, dan 400 Eksemplar	432 Buku, dan 400 Eksemplar	432 Buku, dan 400 Eksemplar	285,470,343.56	Bandar Lampung	APBD			Administrasi Protokol Sekretariat Daerah	432 Buku, dan 400 Eksemplar	335,470,343.56	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	4			1							1		
4	01	01	2.14	02	fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Buku Agenda Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan Data Informasi Melalui Buku Selayang Pandang		432 Buku, dan 400 Eksemplar	5 media elektronik,100 baliho spanduk dan banner, 8700 foto 150 kaset, 10 media cetak, 4 keping video	5 media elektronik,100 baliho spanduk dan banner, 8700 foto 150 kaset, 10 media cetak, 4 keping video	5 media elektronik,100 baliho spanduk dan banner, 8700 foto 150 kaset, 10 media cetak, 4 keping video	357,057,323.22	Bandar Lampung	APBD			Agenda Buku Sekretariat Daerah	5 media elektronik,100 baliho spanduk dan banner, 8700 foto 150 kaset, 10 media cetak, 4 keping video	410,575,717.61	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	4			1							1		
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Informasi Kepada Masyarakat Melalui Media cetak dan Elektronik, Spanduk, Baliho dan Banner, Dokumentasi Foto dan Video, Visualisasi Dinamika Pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung.		5 media elektronik,100 baliho spanduk dan banner, 8700 foto 150 kaset, 10 media cetak, 4 keping video				1,456,532,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		1,456,532,000.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
4	**01**	**02**			**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang Terlaksana dengan Baik**	**Persen**	**85.00**	**60.00**	**65.00**	**70.00**	**23,074,217,145.01**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**75.00**	**24,291,474,864.74**	**Sekretariat Daerah**
						Persentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	**Persen**	**100.00**	**90.00**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
						Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
						Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
						Persentase Penanganan Konflik Pertanahan	**Persen**	**70.00**	**0.00**	**60.00**	**65.00**							**60.00**		
						Persentase Luas Lahan Bersertifikat	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
						Persentase Kebijakan Daerah yang Telah Disahkan, Diputuskan dan Didokumentasikan	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
						Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
						Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani dapat Diselesaikan	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Meningkatnya Pengelolaan Tata Pemerintahan**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**1,283,147,767.13**								**1,347,305,155.48**	**Sekretariat Daerah**
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah	Persen	100.00	100.00	100.00		79,242,642.50	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		81,242,642.50	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	8			2							2		
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Sertifikat yang Diterbitkan dan Diserahkan kepada Masyarakat dibandingkan Jumlah Bidang Tanah yang Dibantu Pengurusan Sertifikatnya, Cakupan Kelurahan yang Dimonitoring Dibanding seluruh Kelurahan	Persen	100.00	100.00	100.00		658,326,304.63	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat		698,326,304.63	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	12			3							3		
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Rapat Kerja Koordinasi Walikota dengan OPD yang Terfasilitasi dibandingkan Target Raker/Rakor (1x per bulan), tingkat Partisipasi Pemkot dalam Kegiatan APEKSI dibandingkan Jumlah Kegiatan APEKSI, Nilai EKPPD Tinggi(3)	Persen	100.00	100.00	100.00		545,578,820.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		567,736,208.35	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	12			3							3		
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Meningkatnya Implementasi Kebijakan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**85.00**	**65.00**	**70.00**	**75.00**	**20,805,661,603.13**							**80.00**	**21,909,491,545.77**	**Sekretariat Daerah**
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental spiritual	Jumlah Kecamatan, Cabang Lomba,Jumlah Peserta Trainning Center Qori dan Qoriah, Jumlah Kafilah MTQ Tingkat Provinsi, Jumlah Petugas TPHD, Jumlah Peserta Festival Anak Sholeh, Jumlah Peserta Lomba Da'I,Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Keagamaan		840 Orang, 20 Kecamatan, 8 Cabang Lomba dan 100%	770 Orang, 20 Kecamatan, 8 Cabang Lomba dan 100%	840 Orang, 20 Kecamatan, 8 Cabang Lomba dan 100%		19,921,897,250.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat		20,935,489,112.49	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	24			6							6		
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kecamatan dan Kelembagaan	Orang	250	250	250		283,764,353.13	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat		361,502,433.28	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	4			1							1		
4	01	02	2.02	04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	400			100	250,000,000.00						100	262,500,000.00	

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
4	01	02	2.02	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	400			100	350,000,000.00						100	350,000,000.00	
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Kebijakan Daerah yang telah disahkan,diputuskan dan didokumentasikan**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**594,412,875.00**						**100.00**	**624,133,518.75**	**Sekretariat Daerah**
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang disahkan		700 Produk Hukum Daerah	53 Produk Hukum Daerah	700 Produk Hukum Daerah		168,732,500.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		178,732,500.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	2,800			700							700		
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara yang diputuskan dan Jumlah kelompok kadarkum yang mewakili di Tingkat Provinsi		4 Perkara dan 4 Kelompok Binaan	2 Perkara dan 3 Kelompok Binaan	4 Perkara dan 4 Kelompok Binaan		208,545,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		218,545,000.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	kasus	8			2							2		
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pengembangan 1 buah website dan buku himpunan produk hukum daerah dan terlaksananya penyuluhan hukum		1 Web dan 140 Buku dan 4 kali penyuluhan	1 Web dan 132 Buku dan 4 kali penyuluhan	1 Web dan 140 Buku dan 2 kali penyuluhan		217,135,375.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		226,856,018.75	Sekretariat Daerah
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	2,800			700							700		
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase KSD yang Terfasilitasi (Terbit MoU) dibandingkan dengan usulan KSD**	**Persen**	**80.00**	**60.00**	**65.00**	**70.00**	**390,994,899.75**						**70.00**	**410,544,644.74**	**Sekretariat Daerah**
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Program Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dalam menyiapkan Perumusan Kebijakan Daerah dan Pengordinasian Perumusan Kebijakan Daerah serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang fasilitasi kerja sama dalam negeri		1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		135,636,995.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		141,186,739.99	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	4			1							1		
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Program Fasilitasi Kerja sama luar negeri dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang fasilitasi kerja sama luar negeri		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		118,515,600.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		125,515,600.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	4			1							1		
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah program kerjasama dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah dan pengordinasian perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang evaluasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		136,842,304.75	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat Daerah		143,842,304.75	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Dokumen	4			1							1		
4	**01**	**03**			**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persentase Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti dan Digunakan untuk Analisa Kebijakan**	**Persen**	**100.00**	**70.00**	**80.00**	**90.00**	**3,577,744,028.25**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**100.00**	**3,577,744,028.25**	**Sekretariat Daerah**
						BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik	**Angka**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**							**5.00**		
						Persentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
						Persentase OPD yang melaporkan kegiatan secara online melalui TEPRA tepat waktu	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
						Tingkat partisipasi OPD, Swasta dan LSM dalam pelaksanaan evaluasi program Pembangunan	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
						Persentase Paket Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
						Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan PBJ	**Persen**	**100.00**	**80.00**	**90.00**	**95.00**							**100.00**		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**391,238,662.50**						**100.00**	**410,800,595.63**	**Sekretariat Daerah**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan monev kebijakan tata kelolanya		0.00	5 BUMD	5 BUMD		111,550,000.00	Bandar Lampung	APBD			BUMD		131,111,933.13	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan	Dokumen	20			5							5		
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian		5 BUMD	3 kegiatan	3 kegiatan		182,515,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		182,515,000.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	12			3							3		
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Mikro Kecil	Pelaksanaan koordinasi Sekretariat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan koordinasi kegiatan ekonomi mikro kecil		3 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		97,173,662.50	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		97,173,662.50	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	4			1							1		
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Laporan Penyusunan Program, Pengendalian Program Pembangunan dan Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**1,807,173,900.00**							**1,897,532,595.00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	03	2.02	01	fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen yang tersedia		0.00	75 buku	75 buku	75 buku	251,258,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	75 buku	291,616,695.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	4			1							1		
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Event yang dilaksanakan		75 buku	2 Event	2 Event	2 Event	1,128,560,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	2 Event	1,178,560,000.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	4			1							1		
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan yang dilaksanakan		2 Event	12 bulan	12 bulan	12 bulan	427,355,900.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	12 bulan	427,355,900.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	4			1							1		
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang**	**- Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama** **- Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif** **- Rasio nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan**		**0.00**	**- 0,5 %** **- 7,5 %** **- 30 %**	**- 0,5 %** **- 8 %** **- 35 %**	**- 0,5 %** **- 8,5 %** **- 40 %**	**1,379,331,465.75**					**- 0,5 %** **- 8,5 %** **- 40 %**	**1,379,331,465.75**	**Sekretariat Daerah**
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	- Penghematan Biaya - persentase kesesuaian RUP dibandingkan KAK - Jadwal proses seleksi/pemilihan/tender yang direncanakan memenuhi standar minimum - rata rata partisipasi penyedia barang/jasa dalam tender/seleksi - Persentase partisipasi penyedia barang/jasa yang sesuai dengan persyaratan tender/seleksi - Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif - Rasio nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan		- 0,5 % - 9,5 % - 50 %	- 2 % - 100 % - 100 % - 150 % - 100 % - 7,5 % - 30 %	- 2,5 % - 100 % - 100 % - 160 % - 100 % - 8 % - 35 %		210,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		210,000,000.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	4			1							1		
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	- Proses pengadaan selesai tepat waktu - kesesuaian dangan persyaratan kontrak - Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama - kepuasan pelanggan internal - kepuasan penyedia barang/jasa		- 3,25 % - 100 % - 100 % - 185 % - 100 % - 9,5 % - 50 %	- 100 % - 100 % - 0,5 % - 60 % - 75 %	- 100 % - 100 % - 0,5 % - 65 % -80 %		930,668,534.25	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		1,050,000,000.00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	dokumen	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	- Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan - 100 % - 100 % - 0,5 % - 80 % - 90 %		- 100 % - 100 % - 0,5 % - 80 % - 90 %	Level 3 7/9	Level 3 9/9		119,331,465.75	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		119,331,465.75	Sekretariat Daerah
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	orang	20			5	-						5	-	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**							**110,257,891,154.77**							**115,910,772,520.02**	
												-							-	
4	**02**	**01**			**Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota**	**Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**67,339,938,116.77**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**Ada**	**70,756,887,268.54**	**Sekretariat DPRD**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**561,594,000.00**						**100.00**	**554,931,000.00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	2	2	4	143,435,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	2.00	175,243,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	2	1	1		53,004,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1.00	51,668,000.00	Sekretariat DPRD
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4			1							1		
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	2	1	1		53,004,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1.00	51,668,000.00	Sekretariat DPRD
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4			1							3		
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Dokumen	24	4	4		100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	4.00	64,201,000.00	Sekretariat DPRD
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12			3							3		
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	2	2	2	212,151,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	2.00	212,151,000.00	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**8,765,043,268.77**						**80.00**	**8,794,300,268.54**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD yang Tersedia	Kali	28	14	14		7,169,889,268.77	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD		7,169,889,268.54	Sekretariat DPRD
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	58			58							58		
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD yang Terlaksana	Bulan	24	12	12		1,252,160,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD		1,252,160,000.00	Sekretariat DPRD
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	48			12							12		
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	1	1	1	72,020,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	83,572,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	76	12	12	16	235,615,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	12	251,044,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	2	2	2	35,359,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	2	37,635,000.00	Sekretariat DPRD

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kesegawaian SETWAN**	**Persen**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**608,811,000.00**						**80.00**	**608,811,000.00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6	1	1	1	49,811,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	49,811,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	8	8	60	559,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	8	559,000,000.00	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**3,057,782,088.00**						**80.00**	**4,808,979,000.00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	51,550,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	57,060,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	150,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	166,038,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	111,385,500.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	123,294,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	596,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	660,283,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	148,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	163,825,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	1	1	1	884,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	1,089,495,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6	1	1	1	165,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	182,642,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	1	1	1	951,096,588.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	2,366,342,000.00	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**3,357,351,000.00**						**80.00**	**2,545,904,000.00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	24	4	4	4	100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	4	88,553,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	28	4	4	8	1,157,239,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	4	657,239,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	19	3	3	4	434,470,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	3	434,470,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	52	9	9	7	1,665,642,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	9	1,365,642,000.00	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**6,885,414,000.00**					**Sekretariat DPRD**		**80.00**	**6,946,267,000.00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	Bulan	24	12	12		53,100,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD		58,777,000.00	Sekretariat DPRD
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4			1							1		
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	24	12	12		516,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD		571,176,000.00	Sekretariat DPRD
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	24	12	12		6,316,314,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD		6,316,314,000.00	Sekretariat DPRD
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**2,201,980,000.00**					**Sekretariat DPRD**	**80.00**	**2,158,605,000.00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	47,675,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	52,772,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	1	1	17	585,805,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	17	645,218,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	1	3	182,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	3	202,014,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	686,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	558,601,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4			1	700,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	700,000,000.00	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persen**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**39,659,339,760.00**					**Sekretariat DPRD**	**80.00**	**41,956,719,000.00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	72	1	1	12	36,959,339,760.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	12	40,909,012,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	78	4	4	50	2,500,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	50	881,669,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	55	1	1	50	200,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	50	166,038,000.00	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi DPRD**	**Persen**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**2,242,623,000.00**					**Sekretariat DPRD**	**80.00**	**2,382,371,000.00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	dokumen	6	1	1	1	276,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	409,425,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	6	1	1	1	49,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	54,239,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	6	1	1	1	700,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	701,084,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	1,217,623,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sekretariat DPRD	1	1,217,623,000.00	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**			**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**42,917,953,038.00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**Ada**	**45,153,885,251.48**	**Sekretariat DPRD**
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Persen**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**8,052,842,000.00**						**80.00**	**8,842,372,251.48**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	18	7	7	1	2,402,842,000.00						1	2,402,842,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	57	10	10	7	5,000,000,000.00						10	5,622,039,251.48	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	05	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	6	1	1	1	150,000,000.00						1	212,658,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	36	6	6	6	500,000,000.00						6	494,864,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dokumen tata tertib DPRD	Dokumen	5	1	1								1	109,969,000.00	Sekretariat DPRD

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**4,224,185,653.00**						**100.00**	**3,848,950,000.00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	6	1	1	1	850,000,000.00						1	769,790,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	6	1	1	1	850,000,000.00						1	769,790,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	6	1	1	1	850,000,000.00						1	769,790,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	6	1	1	1	850,000,000.00						1	769,790,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	6	1	1	1	824,185,653.00						1	769,790,000.00	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persen**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**6,877,392,885.00**						**80.00**	**7,186,604,000.00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	12	2	2	2	1,257,000,000.00						2.00	1,165,682,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	12	2	2	2	1,190,000,000.00						2.00	1,193,175,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	2	2	2	1,197,000,000.00						2.00	1,160,183,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	12	2	2	2	1,145,000,000.00						2.00	1,171,180,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	6	1	1	1	1,121,360,000.00						1.00	1,136,385,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	6	1	1	1	267,032,885.00						1.00	798,052,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	6	1	1	1	700,000,000.00						1.00	561,947,000.00	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persen**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**12,137,329,500.00**						**80.00**	**12,887,151,000.00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Orientasi Anggota DPRD	Kali	6	1	1								1.00	329,909,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	36	6	6	6	4,441,500,000.00						6.00	3,889,779,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	6	1	1	1	4,833,829,500.00						1.00	5,420,050,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	72	12	12	36	1,728,000,000.00						12.00	2,000,355,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	72	12	12	8	384,000,000.00						12.00	422,284,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Hubungan Masyarakat	Dokumen	12	2	2	2	250,000,000.00						2.00	274,924,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	6	1	1	1	500,000,000.00						1.00	549,850,000.00	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persen**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**8,617,077,000.00**						**80.00**	**8,311,131,000.00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	11	2	2	1	3,761,112,000.00						2	3,940,212,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	6	1	1	1	150,000,000.00						1	164,954,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	18	3	3	3	4,705,965,000.00						3.00	4,205,965,000.00	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persen**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**650,000,000.00**						**80.00**	**1,319,639,000.00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kode Etik DPRD pada Badan Kehormatan DPRD Kota Bandar Lampung	Dokumen	5	1	1								1	604,834,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	6	1	1	1	650,000,000.00						1	714,805,000.00	Sekretariat DPRD

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatas Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**Persen**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**2,359,126,000.00**						**80.00**	**2,758,038,000.00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	6	1	1	1	1,259,126,000.00						1	1,660,795,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	6	1	1	1	100,000,000.00						1	82,476,000.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	6	1	1	1	1,000,000,000.00						1	1,014,767,000.00	Sekretariat DPRD
5					**UNSUR PEUNUJANG**							**230,749,494,398.59**							**231,233,896,160.45**	
5	**01**				**PERENCANAAN**							**13,852,762,262.82**							**14,772,160,621.21**	
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**13,852,762,262.82**							**14,772,160,621.21**	
5	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**	**Persen**	**98.00**	**76.62**	**98.00**	**98.00**	**9,682,762,262.82**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**10,287,160,621.21**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**275,000,000.00**						**100.00**	**275,000,000.00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra Bappeda	Dokumen	1	1			65,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		65,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Dokumen Renja Bappeda Tahun 2022 dan Dokumen Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2021	Dokumen	2	2											
						Dokumen Renja Bappeda dan Perubahan Renja Bappeda	Dokumen	2		2										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8			2							2		
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Bappeda	Dokumen	1		1		35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		35,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4			1							1		
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA Bappeda	Dokumen	1		1		35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		35,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4			1							1		
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LPJ Bappeda, Dokumen LPPD Bappeda Dokumen LAKIP Bappeda	Dokumen	3	3			65,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		65,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Dokumen Evaluasi Renstra Bappeda	Dokumen	1	1											
						Dokumen Evaluasi Renja Bappeda, Dokumen Evaluasi Renja Triwulanan Bappeda dan Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda	Dokumen	3		3										
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	13			3							4		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi RKPD Kota Bandar Lampung	Dokumen	1	1			75,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		75,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Dokumen Evaluasi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 dan Dokumen Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung 2016-2021	Dokumen	2	2											
						Dokumen LPJ, Dokumen LPPD, Dokumen LAKIP, Dokumen Penetapan Kinerja dan Dokumen Perubahan Penetapan Kinerja	Dokumen	5		5										
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20			5							5		
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**7,439,262,262.82**						**100.00**	**7,933,660,621.21**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda yang Tersedia	Kali	28	14	14		7,144,262,262.82	Bandar Lampung	APBD			ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		7,633,660,621.21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	70			70							70		
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Bappeda yang Terlaksana	Bulan	24	12	12		190,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		195,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	6	1	1	1	40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	40,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	72	12	12	12	65,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12	65,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**170,000,000.00**						**80.00**	**175,000,000.00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4			1	50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	50,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	80.00	80.00	80.00		120,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		125,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40			10							10		
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**70.71**	**98.00**	**98.00**	**513,500,000.00**						**98.00**	**543,500,000.00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	6,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	6,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	100,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	35,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100.00	100.00	100.00		40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		40,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	85,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	85,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	1	1	1	12,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	12,500,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100.00	26.00	100.00		35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100.00	40,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4			1							1		
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100.00	28.91	100.00		200,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100.00	225,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1									
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	-	**98.00**	**98.00**	**550,000,000.00**						**98.00**	**625,000,000.00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3		1	1	300,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	300,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	60,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60	-	10	10	150,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10	150,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	60	-	10	10	50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10	55,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	1			Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10	60,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**315,000,000.00**						**100.00**	**325,000,000.00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	24	12	12		130,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		130,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	24	12	12		185,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Konrak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		195,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
5	**01**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**54.63**	**98.00**	**98.00**	**420,000,000.00**						**98.00**	**410,000,000.00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	5	5	7	225,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	230,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	7	7	50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	50,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	20	20	45,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20	50,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	80,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	**01**	**02**			**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,440,000,000.00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**100.00**	**2,690,000,000.00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
						Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
						Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya	**Dokumen**	**90.70**	**94.59**	**86.27**	**87.78**							**89.32**		
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA**	**Dokumen**	**Ada**			**Ada (Rancangan Awal RPJPD)**	**1,225,000,000.00**						**Ada (Ranperda RPJPD)**	**1,420,000,000.00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
						Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**									**Ada (Teknokratik RPJMD)**		
						Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**							**Ada**		
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Koordinasi Penentuan Gambaran Umum Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strtaegis Pembangunan Daerah Penyusunan RPJP, RPJMD, dan RKPD	Kali	10	5	5		300,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		320,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	7			2							2		
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJP, RPJMD, dan RKPD	Kali	3	2	1		125,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		75,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	6			2							1		
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan RPJP, RPJMD, dan RKPD	Kali	3	2	1		125,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		75,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	6			2							1		
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Penyusunan RPJP, RPJMD, dan RKPD	Kali	3	2	1		325,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		400,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	6			1							2		
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RPJMD	Dokumen	1	1			350,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		550,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Dokumen RKPD	Dokumen	4	2	2										
						Dokumen Laporan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Laporan	3	2	1										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	11			2							3		
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen**	**34**	**6**	**6**	**6**	**815,000,000.00**						**6**	**820,000,000.00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	6	1	1	1	250,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	250,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	6	1	1	1	65,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	70,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Evaluasi RKPD	Dokumen	1		1		500,000,000.00	Bandar Lampung	APBD					500,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Dokumen LKPJ dan Pengantar LKPJ Walikota	Dokumen	4	2	2										
						Dokumen LaporanTP/ UB/ DAK	Dokumen Laporan	2	1	1										
						Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda	Dokumen Laporan	1	1											
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	18			5							5		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	**01**	**02**	**2.04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung**	**Dokumen Laporan**	**4**			**1**	**400,000,000.00**						**6**	**450,000,000.00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	4			1	100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	125,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	4			1	300,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	325,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**			**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**89.19**	**90.08**	**1,730,000,000.00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**90.98**	**1,795,000,000.00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
						Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	**Persen**	**100.00**	**96.13**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
						Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya	**Persen**	**90.70**	**87.44**	**87.24**	**88.55**							**89.88**		
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Dokumen**	**12**	**2**	**2**	**2**	**700,000,000.00**						**2**	**715,000,000.00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
						Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Dokumen**	**12**	**2**	**2**	**2**							**2**		
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan	2	1	1		235,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		240,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kota Bandar Lampung	Dokumen	2	2												
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8			2							2		
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial	Dokumen Laporan	2	1	1		75,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		80,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	8			8							8		
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial	Dokumen Laporan	2	1	1		75,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		80,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	4			1							1		
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan	2	1	1		115,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		115,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4			1							1		
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Dokumen Laporan	2	1	1		100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		100,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	10			10							10		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Dokumen Laporan	2	1	1		100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		100,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	10			10						10		
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekononomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Dokumen**	**6**	**1**	**1**	**1**	**390,000,000.00**						**1**	**410,000,000.00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
						Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Dokumen**	**6**	**1**	**1**	**1**						**1**		
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	6	1	1	1	75,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	75,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Laporan	2	1	1		60,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	65,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	6			6						10		
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Laporan	2	1	1		60,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	65,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	6			6						10		
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	6		1	1	75,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	75,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen Laporan	1		1		60,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	65,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	4			4						10		
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen Laporan	1		1		60,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	65,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	4			4						10		
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan**	**Dokumen**	**6**	**1**	**1**	**1**	**640,000,000.00**						**1**	**670,000,000.00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
						Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan dan Kewilayahan	**Dokumen**	**6**	**1**	**1**	**1**	-					**1**		
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastuktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastuktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan	12	1	1	3	325,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	335,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastuktur	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastuktur	Dokumen Laporan	2	1	1		60,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		65,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastuktur	Perangkat Daerah	6			6						6		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastuktur	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastuktur	Dokumen Laporan	2	1	1		60,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		65,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastuktur	Perangkat Daerah	6			6						6		
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	6	1	1	1	75,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	75,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan	2	1	1		60,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		65,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	20			20						20		
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan	2	1	1		60,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		65,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	20			20						20		
												-							-	
5	**02**				**KEUANGAN**							**200,333,725,600.46**							**200,333,725,600.46**	
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**137,101,047,962.25**							**144,868,220,608.09**	
5	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**50,532,797,507.07**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**53,971,564,231.16**	**BPKAD**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**262,241,201.25**						**100.00**	**275,353,261.31**	**BPKAD**
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	12	2	2	2	40,807,800.00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	2	42,848,190.00	BPKAD
6	02	01	2.02	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	4			1	40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	1	42,000,000.00	BPKAD
7	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	4			1	33,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	1	34,650,000.00	BPKAD
8	02	01	2.04	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	4			1	40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	1	42,000,000.00	BPKAD
9	02	01	2.05	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	4			1	31,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	1	32,550,000.00	BPKAD
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	18	3	3	3	36,740,840.00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	3	38,577,882.00	BPKAD
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	30	5	5	5	40,692,561.25	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	5	42,727,189.31	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**46,018,401,150.32**						**100.00**	**49,233,653,056.58**	**BPKAD**
						Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN BPKAD yang tersedia	kali	28	14	14		45,716,592,436.82	Bandar Lampung	APBD			ASN BPKAD		48,916,753,907.40	BPKAD
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	127			127							127		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Administrasi keuangan BPKAD yang terlaksana	bulan	24	12	12		274,246,213.50	Bandar Lampung	APBD			BPKAD		287,958,524.18	BPKAD
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,240			1,240							1,240		
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan BPKAD	Dokumen	24	12	12		27,562,500.00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD		28,940,625.00	BPKAD
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteraan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	52			13							13		
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**131,712,229.69**						**100.00**	**138,297,841.17**	**BPKAD**
5	02	01	2.03	01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	2	2	2	131,712,229.69	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	2	138,297,841.17	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**44,100,000.00**						**100.00**	**44,100,000.00**	**BPKAD**
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	Persen	80.00	80.00	80.00		44,100,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN BPKAD		44,100,000.00	BPKAD
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7			7							7		
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**896,390,769.34**						**98.00**	**941,210,307.81**	**BPKAD**
5	02	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	1	1	3	44,100,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	1	46,305,000.00	BPKAD
5	02	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	1	1	4	198,450,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	1	208,372,500.00	BPKAD
5	02	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	11	1	1	6	31,200,750.00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	1	32,760,787.50	BPKAD
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	1	1	7	32,661,562.50	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	1	34,294,640.63	BPKAD
5	02	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	14	1	1	9	188,703,900.00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	1	198,139,095.00	BPKAD
5	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	11	1	1	6	27,562,500.00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD	1	28,940,625.00	BPKAD
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah layanan makanan dan minuman tamu	Persen	100.00	100.00	100.00		95,685,919.88	Bandar Lampung	APBD			BPKAD		100,470,215.87	BPKAD
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	13			10							1		
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan perjalanan dinas kantor	Persen	100.00	100.00	100.00		107,138,636.96	Bandar Lampung	APBD			BPKAD		112,495,568.81	BPKAD
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	11			8							1		
5	02	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Persentase pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Persen	100.00	100.00	100.00		170,887,500.00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD		179,431,875.00	BPKAD
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4			1							1		
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**171,789,345.00**						**98.00**	**180,378,812.25**	**BPKAD**
5	02	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor	Paket	2	1	1		115,762,500.00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD		121,550,625.00	BPKAD
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	32			8							8		
5	02	01	2.07	11	Pengadaaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	paket	2	1	1		56,026,845.00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD		58,828,187.25	BPKAD
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	20			5							5		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**2,400,418,125.00**						**98.00**	**2,520,439,031.25**	**BPKAD**
5	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	Bulan	24	12	12		180,810,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPKAD		189,850,500.00	BPKAD
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
5	02	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan tenaga kontrak yang tersedia	Bulan	24	12	12		2,219,608,125.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak BPKAD		2,330,588,531.25	BPKAD
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemmerintahan daerah**	**Inventaris kantor yang tersedia**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**607,744,686.47**						**98.00**	**638,131,920.79**	**BPKAD**
5	02	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	6	6	1	36,969,127.02	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan BPKAD	1	38,817,583.37	BPKAD
5	02	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	7	7	18	460,525,559.45	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional BPKAD	18	483,551,837.42	BPKAD
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	10	10	10	33,075,000.00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor BPKAD	10	34,728,750.00	BPKAD
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	77,175,000.00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor BPKAD	1	81,033,750.00	BPKAD
5	**02**	**02**			**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Opini BPK atas LKPD**	**Predikat**	**WTP**	**WDP**	**WTP**		**84,493,339,942.68**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**WTP**	**88,718,000,338.80**	**BPKAD**
						Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**								**100.00**		
						Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**								**100.00**		
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**5,282,250,123.84**						**100.00**	**5,546,362,628.99**	**BPKAD**
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	12	2	2	2	470,738,614.50	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	2	494,275,545.23	BPKAD
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	12	2	2	2	328,317,885.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	2	344,733,779.25	BPKAD
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah dokumen perda APBD dan dokumen perwal penjabaran APBD	Dokumen	4	2	2		467,741,990.84	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		491,129,090.38	BPKAD
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	4			2							2		
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen perda perubahan APBD dan dokumen perwal penjabaran perubahan APBD	Dokumen	4	2	2		524,311,515.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		550,527,090.75	BPKAD
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Dokumen	8			2							2		
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung	Dokumen	2	1	1		434,597,892.75	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		456,327,787.39	BPKAD
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	8			2							2		
5	02	02	2.01	10	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Persentase Koordiansi perencanaan anggaran pendapatan	Persen	100	100	100		2,665,697,155.75	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		2,798,982,012.49	BPKAD
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	12			3							3		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	02	02	2.01	11	Koordiansi perencanaan anggaran belanja daerah	Persentase Koordiansi perencanaan anggaran belanja daerah	Persen	100	100	100		390,845,070.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		410,387,323.50	BPKAD
						Jumlah Dokument Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	12			3							3		
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**4,440,310,116.32**							**100.00**	**4,662,325,622.15**	**BPKAD**
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan kas daerah	Persen	100.00	100.00	100.00		1,824,546,785.20	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		1,915,774,124.46	BPKAD
						Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	48			12							12		
5	02	02	2.02	02	Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah dokumen laporan SPD, laporan anggaran kas APBD dan laporan anggaran perubahan APBD-P pemerintah Kota Bandar Lampung	Dokumen	6	3	3		980,953,785.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		1,030,001,474.25	BPKAD
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	12			3							3		
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	persentase penyajian Data Gaji Pegawai Pemerintah Kota Bandar Lampung	Persen	100.00		100.00		360,267,342.75	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		378,280,709.89	BPKAD
						Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Dokumen	48			12							12		
5	02	02	2.02	07	Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah laporan buku kas umum, laporan posisi kas saldo kas daerah, laporan rekonsiliasi berita acara kasda, laporan harian pajak, laporan bulanan kertas kerja rekonsiliasi pajak	Laporan	10	5	5		340,674,705.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		357,708,440.25	BPKAD
						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Alisran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koodinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisai Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	20			5							5		
5	02	02	2.02	08	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	jumlah laporan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Laporan	2	1	1		75,331,013.63	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		79,097,564.31	BPKAD
						Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Dokumen	48			12							12		
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Persentase penerbitan SP2D secara tepat waktu setelah dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan berlaku	Persen	100.00	100.00	100.00		595,708,312.50	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		625,493,728.13	BPKAD
						Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Dokumen	216			54							54		
5	02	02	2.02	10	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan denga npenerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah peraturan dan keputusan tentang kebijakan belanja	Dokumen	2	1	1		262,828,172.25	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		275,969,580.86	BPKAD
						Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Dokumen	60			15							15		
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Opini BPK atas LKPD**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**981,900,856.76**							**WTP**	**1,030,995,899.61**	**BPKAD**
5	02	02	2.03	03	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah dokumen rancangan peraturan walikota tentang penjabaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen	6	3	3		211,079,688.75	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		221,633,673.19	BPKAD
						Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bulanan, triwulanan dan semesteran	Laporan	56			14							14		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	Dokumen	6	3	3		153,336,358.19	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		161,003,176.10	BPKAD
						Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	Laporan	4			1							1		
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	jumlah rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Dokumen	4	2	2		206,206,087.50	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		216,516,391.88	BPKAD
						jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Dokumen	20			5							5		
5	02	02	2.03	07	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	persentase penyelesaian kasus kerugian daerah	Persen	100.00	100.00	100.00		81,545,723.44	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		85,623,009.61	BPKAD
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Dokumen	4			1							1		
5	02	02	2.03	11	Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	Jumlah laporan prognosis semester 1 dan prognosis Semester 2	Laporan	4	2	2		271,552,695.75	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		285,130,330.54	BPKAD
						Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban pemerintah kabupaten kota	Orang	162			162 orang							162 orang		
5	02	02	2.03	12	Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kab/kota	Jumlah laporan keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas selama 1 tahun	Laporan	66	33	33		58,180,303.13	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	33 laporan	61,089,318.29	BPKAD
						Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	Lembaga	32			32							32 lembaga		
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat**	**Persen**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**72,493,744,263.15**						**1.00**	**76,118,424,876.31**	**BPKAD**
5	02	02	2.04	03	Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Jumlah tersusunnya dokumen administrasi pelaksanaan penatausahaan pinjaman daerah kota Bandar Lampung	Dokumen	2	1	1		51,039,135.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		53,591,091.75	BPKAD
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Laporan	4			1							1		
5	02	02	2.04	04	Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Jumlah pembayaran bunga pinjaman pemerintah daerah selama 1 tahun	Tahun	2	1	1		20,396,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		21,416,062,500.00	BPKAD
						jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Laporan	24			6							6		
5	02	02	2.04	08	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Penyaluran dana belanja hibah dan bantuan sosial	Persen	100.00	100.00	100.00		18,971,455,128.15	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		19,920,021,284.56	BPKAD
						Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Laporan	48			12							12		
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Penyaluran dana belanja tidak terduga	Persen	100.00	100.00	100.00		33,075,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		34,728,750,000.00	BPKAD
						Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Laporan	48			12							12		
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**1,295,134,582.61**						**100.00**	**1,359,891,311.74**	**BPKAD**
5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Jumlah laporan evaluasi indikator kesehatan fiskal , pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan dasar publik pemerintah kota Bandar Lampung	Laporan	2	1	1		312,669,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		328,302,450.00	BPKAD
						Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Dokumen	16			4							4		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Penyajian Basis Data Penyusunan Laporan Keuangan	Tahun	2	1	1		286,497,855.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		300,822,747.75	BPKAD
						Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistim informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	dokumen	48			12							12		
5	02	02	2.05	03	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Persentase OPD Yang memperoleh pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Persen	100	100	100		695,967,727.61	Bandar Lampung	APBD			Perangkat Daerah		730,766,113.99	BPKAD
						Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistim informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Orang	120			30							30		
5	**02**	**03**			**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,074,910,512.50**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan**		**100.00**	**2,178,656,038.13**	**BPKAD**
						Persentase Penilaian dan Penghapusan BMD sesuai dengan Usulan OPD	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,074,910,512.50**						**100.00**	**2,178,656,038.13**	**BPKAD**
5	02	03	2.01	01	Penyusunan standar harga	Jumlah dokumen penyusunan standar harga 2022	Dokumen	2	1	1		165,375,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		173,643,750.00	BPKAD
						Jumlah standar harga yang disusun	dokumen	4			1							1		
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan evaluasi penatausahaan barang milik daerah pada OPD	Persen	100.00	100.00	100.00		66,153,445.31	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		69,461,117.58	BPKAD
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	laporan	4			1							1		
5	02	03	2.01	07	Pengamanan barang milik daerah	Persentase sertifikasi tanah aset pemda	Dokumen	2	1	1		556,134,167.19	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		583,940,875.55	BPKAD
						Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	laporan	4			1							1		
5	02	03	2.01	08	Penilaian barang milik daerah	jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	laporan	4			1	400,000,000.00						1	420,000,000.00	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Persentase adanya hasil penilaian aset untuk pemindah tanganan dan penghapusan aset daerah	Persen	100.00	100.00	100.00		368,336,292.19	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		386,753,106.80	BPKAD
						Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	dokumen	80			20							20		
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Laporan mutasi barang daerah dan Daftar Mutasi barang daerah	laporan	4	2	2		318,911,607.81	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		334,857,188.20	BPKAD
						Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	dokumen	8			2							2		
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah	dokumen	4			1	200,000,000.00						1	210,000,000.00	
					BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH							**63,232,677,639.23**							**63,232,677,639.23**	
5	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**55,636,452,639.23**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**59,320,809,875.07**	**BPPRD**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**250,000,000.00**						**100.00**	**270,952,067.00**	**BPPRD**
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	2	2	2	50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD	2	50,000,000.00	BPPRD

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja BPPRD	Dokumen	6	3	3		200,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD		220,952,067.00	BPPRD
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4			1							1		
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**46,786,641,832.00**						**100.00**	**49,024,871,407.85**	**BPPRD**
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN BPPRD yang Tersedia	kali	28	14	14		45,915,433,832.00					ASN BPPRD		47,828,663,407.85	BPPRD
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	193			193							193		
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan BPPRD yang Terlaksana	Bulan	24	12	12		196,208,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD		246,208,000.00	BPPRD
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
5	02	01	2.02	05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	4			1	75,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD	1	100,000,000.00	BPPRD
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	66	11	11	11	600,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD	11	850,000,000.00	BPPRD
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100,000,000.00**						**100.00**	**642,457,912.62**	**BPPRD**
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket										ASN BPPRD		442,457,912.62	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Funesi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	80.00	80.00	80.00		100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN BPPRD		200,000,000.00	BPPRD
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	32			8		Bandar Lampung					8		BPPRD
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**788,000,000.00**						**98.00**	**914,000,000.00**	**BPPRD**
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	20,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD	1	60,000,000.00	BPPRD
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	198,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD	1	198,000,000.00	BPPRD
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	67,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD	1	90,000,000.00	BPPRD
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	80,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD	1	90,000,000.00	BPPRD
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	170,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD	1	198,000,000.00	BPPRD
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	1	1	1	3,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD	1	3,000,000.00	BPPRD
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100.00	100.00	100.00		50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD		75,000,000.00	BPPRD
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4			1							1		
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100.00	100.00	100.00		200,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD		200,000,000.00	BPPRD
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**0.98**	**0.98**	**0.98**	**0.98**	**795,000,000.00**						**0.98**	**522,000,000.00**	**BPPRD**
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	4 unit Roda 2 1 Unit Roda 1	4 unit Roda 2	4 unit Roda 2	1 unit Roda 4	300,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD			BPPRD

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	2	1	1		50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD		95,000,000.00	BPPRD
						Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	92			23			APBD				23		
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	2	1	1		195,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD		195,000,000.00	BPPRD
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Unit	72			18							18		
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	2	1	1		150,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD		100,000,000.00	BPPRD
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1			1							1		
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	2	1	1		100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD		132,000,000.00	BPPRD
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	4			1							1		
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**5,231,242,000.00**						**98.00**	**5,991,316,303.40**	**BPPRD**
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	24	12	12		250,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD		304,074,303.40	BPPRD
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4			1		Bandar Lampung	APBD				1		
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	24	12	12		4,981,242,000.00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak BPPRD		5,687,242,000.00	BPPRD
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	4			1		Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak BPPRD	1		
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**1,685,568,807.23**							**98.00**	**1,955,212,184.20**	**BPPRD**
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan BPPRD	1	50,000,000.00	BPPRD
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	66 Unit mobil, 60 motor	11 Unit mobil, 10 motor	11 Unit mobil, 10 motor	11 Unit mobil, 10 motor	498,230,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional BPPRD	11 Unit mobil, 10 motor	548,226,001.00	BPPRD
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25			25	44,338,807.23					Mebel Kantor	25 Unit	50,000,000.00	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	4	4	4	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor BPPRD	4 Unit	78,486,183.20	BPPRD
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	20	20	20	20	1,068,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			UPT BPPRD	20 Unit	1,228,500,000.00	BPPRD
5	**02**	**04**			**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pajak Daerah terhadap PAD**	**Persen**	**65.02**	**73.70**	**65.02**	**65.02**	**7,596,225,000.00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**65.02**	**7,976,036,250.00**	**BPPRD**
5	**02**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pajak Daerah terhadap PAD**	**Persen**	**65.02**	**73.70**	**65.02**	**65.02**	**7,596,225,000.00**						**65.02**	**7,976,036,250.00**	**BPPRD**
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Ketersesuaian Antara Target Pajak Daerah dan Potensi Pajak Daerah	Persen	100.00	76.24	100.00		800,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		800,000,000.00	BPPRD
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peraturan Tentang Pajak Daerah	Dokumen	2	1	1		214,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		214,500,000.00	BPPRD
						Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	dokumen	4			1							1		
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Informasi Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00		270,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD		270,000,000.00	BPPRD
						Persentase peliharaan Website BPPRD	Persen	100.00	100.00	100.00										
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	8			2							2		
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase pemeliharaan Software dan sesuai OP PBB	Persen	100.00	100.00	100.00		750,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD		750,000,000.00	BPPRD
						Jumlah sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	4			1							1		
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Up date data objek pajak Daerah	Persen	100.00	100.00			100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD		100,000,000.00	BPPRD
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	40			10							10		
5	02	04	2.01	06	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Pelaksanaan Proses Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame, Parkir, Air Bawah Tanah, Mineral Batuan Bukan Logam Secara Terpadu Online	Persen	100.00	100.00	100.00		650,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Wajib Pajak		650,000,000.00	BPPRD
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	28			7							7		
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Proses Penyediaan Administrasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB	Persen	100.00	100.00	100.00		350,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD		350,000,000.00	BPPRD
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak Daerah	31,248			7,812							7,812		
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Prosentase Update Basis Data PBB dan Tersedianya Formulir SPPT PBB dan DHKP	Persen	100.00	50.00	100.00		800,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			BPPRD		800,000,000.00	BPPRD
						Cetak Data OP PBB dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan wilayah Kota Bandar Lampung	Kecamatan	20												
						Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	8			2							2		
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persen	100.00		100.00		161,725,000.00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung		200,000,000.00	BPPRD
						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	40			10							10		
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Pengawasan Penyampaian SPPT PBB di 20 Kecamatan & 126 Kelurahan Kota Bandar Lampung	Kecataman	20	20	20		750,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Wajib Pajak		750,000,000.00	BPPRD
						Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	8			2							2		
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Penagihan Tunggakan Pajak	Persen	70.00	60.00	70.00		550,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Wajib Pajak		650,000,000.00	BPPRD
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak	Dokumen	24			6							6		
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00		300,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Wajib Pajak		341,536,250.00	BPPRD
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	231			231							231		
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Prosentase pembayaran pajak dengan omzet yang sebenarnya/real dari objek pajak	Persen	100.00	100.00	100.00		1,500,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		1,500,000,000.00	BPPRD
						Prosentase data pajak yang sesuai dengan omzet	Persen	100.00	100.00	100.00										
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	40			10							10		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap WP	Persen	100.00		100.00		100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Wajib Pajak		250,000,000.00	BPPRD
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penerelaan Retribusi Daerah	Laporan	8			2							2		
5	02	04	2.01	15	Elektronika Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	12			3	300,000,000.00	Bandar Lampung	APBD				3	350,000,000.00	BPPRD
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**							**11,572,756,535.31**							**12,256,997,438.78**	
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							**11,572,756,535.31**							**12,256,997,438.78**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**7,716,391,546.00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhanksam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**8,207,814,200.00**	**Badan Kepegawaian Daerah**
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**368,941,000.00**						**100.00**	**387,388,000.00**	**Badan Kepegawaian Daerah**
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	2	2	2	62,866,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	2	66,009,300.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5		1	1	37,800,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	39,690,000.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5		1	1	37,800,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	39,690,000.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18	3	3	3	145,425,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	3	152,696,200.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20		4	4	85,050,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	4	89,302,500.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**5,762,317,269.00**						**100.00**	**6,156,036,139.00**	**Badan Kepegawaian Daerah**
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN BKD yang Tersedia	Kali	28	14	14		5,280,153,869.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah		5,649,764,639.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan													
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan BKD yang Terlaksana	Bulan	24	12	12		255,363,400.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah		268,131,500.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
5	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Rekonsiliasi Pelaksanaan Akuntansi BKD	Bulan	12		12		56,700,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah		59,535,000.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4			1							1		
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5		1	1	56,700,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	59,535,000.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	5		1	1	56,700,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	59,535,000.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	5		1	1	56,700,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	59,535,000.00	Badan Kepegawaian Daerah

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**105,925,000.00**						**100.00**	**113,721,200.00**	**Badan Kepegawaian Daerah**
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5		1	1	37,800,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	39,690,000.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					68,125,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah		74,031,200.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuha Dasar Operasional OPD**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**539,584,400.00**						**100.00**	**566,563,300.00**	**Badan Kepegawaian Daerah**
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	17,940,100.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	18,837,100.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	93,555,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	98,232,700.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	46,777,500.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	49,116,300.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	%	100.00	100.00	100.00		41,709,800.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah		43,795,200.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	103,950,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	109,147,500.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	1	1	1	15,343,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	16,110,100.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Paket	1	1	1		12,409,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah		13,029,400.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4			1							1		
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	%	100.00	100.00	100.00		207,900,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah		218,295,000.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**350,860,177.00**						**98.00**	**365,903,961.00**	**Badan Kepegawaian Daerah**
5	03	01	2.07	05	Pengadan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					122,131,841.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah		126,008,100.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					176,753,336.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah		185,322,161.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	51,975,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1	54,573,700.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**302,739,100.00**						**98.00**	**317,876,000.00**	**Badan Kepegawaian Daerah**
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	24	12	12		37,300,300.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah		39,165,300.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	24	12	12		265,438,800.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah		278,710,700.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan inventaris kantor yang terpelihara**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**286,024,600.00**						**100.00**	**300,325,600.00**	**Badan Kepegawaian Daerah**
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	110,288,400.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1.00	115,802,800.00	Badan Kepegawaian Daerah

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	3	3	60,343,800.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	3.00	63,360,900.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	1	1	34,836,900.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1.00	36,578,700.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	28,350,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1.00	29,767,500.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	28,350,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1.00	29,767,500.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	23,855,500.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kepegawaian Daerah	1.00	25,048,200.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Formal**	**%**	**16.91**	**-**	**13.88**	**16.66**	**3,856,364,989.31**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**18.30**	**4,049,183,238.78**	**Badan Kepegawaian Daerah**
						Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Struktural	**%**	**76.88**	**-**	**63.81**	**75.90**							**82.05**		
						Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	**Jabatan**	**273.00**	**39.00**	**39.00**	**39.00**							**39.00**		
						Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	**Jabatan**	**1,449.00**	**207.00**	**207.00**	**207.00**							**207.00**		
						Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	**Jabatan**	**25,651.00**	**3,485.00**	**3,485.00**	**3,485.00**							**3,485.00**		
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN Pelamar Umum dan khusus, yang akan dilakukan penetapan NIP, peningkatan Status ASN, dan sumpah ASN**	**CPNS**	**8,400.00**	**800.00**	**1,000.00**	**1,200.00**	**2,165,331,789.31**						**1,200.00**	**2,276,098,638.78**	**Badan Kepegawaian Daerah**
						Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang diterbitkan BKN	**SK Pensiun**	**3,360.00**	**460.00**	**470.00**	**480.00**							**480.00**		
						Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	**Lembaga**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**							**1.00**		
						Jumlah data sistem informasi kepegawaian ASN yang tervalidasi	**Data ASN**	**70,000.00**	**9,000.00**	**9,500.00**	**10,000.00**							**10,000.00**		
						Jumlah updating data kepegawaian yang akurat	**Data ASN**	**70,000.00**	**9,000.00**	**9,500.00**	**10,000.00**							**10,000.00**		
						Jumlah penyelesaian data kepegawaian karpeg, karis, karsu yang di terbitkan BKN dan surat cuti ASN yang diterbitkan BKD	**Kartu Karpeg, Karis, Karsu dan Surat Cuti ASN**	**11,200.00**	**1,200.00**	**1,400.00**	**1,600.00**							**1,600.00**		
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Kebutuhan dan Jenis Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Foramsi	1,800.00	800.00	1,000.00		46,935,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN		49,281,700.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	4			1							1		
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Peserta yang lulus Seleksi PPPK Pelamar Umum dan Honorer yang akan dilakukan penetapan NIP PPPK	PPPK	1,800	800	1,000		283,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN		297,675,000.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	4			1							1		
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Peserta yang lulus Seleksi ASN Pelamar Umum dan khusus yang akan dilakukan penetapan NIP ASN, peningkatan Status ASN dan sumpah ASN	CPNS	1,800	800	1,000		1,065,124,589.31	Bandar Lampung	APBD			ASN		1,120,881,238.78	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	4			1							1		
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang diterbitkan BKN	SK Pensiun	930	460	470		82,328,400.00	Bandar Lampung	APBD			ASN		86,444,800.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	4			1							1		
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	1	1	1	448,358,800.00	Bandar Lampung	APBD			ASN	1	470,776,700.00	Badan Kepegawaian Daerah

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data sistem informasi kepagawaian ASN yang telah tervalidasi	Data ASN	18,500	9,000	9,500		77,962,500.00	Bandar Lampung	APBD			ASN		81,860,600.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4			1							1		
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepagawaian yang akurat dan berkualitas	Data ASN	18,500	9,000	9,500		77,962,500.00	Bandar Lampung	APBD			ASN		81,860,600.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	4			1							1		
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah penyelesaian kartu karpeg, karis, karsu dan surat cuti ASN	Kartu Karpeg, Karis, Karsu dan Surat Cuti ASN	2,600	1,200	1,400		83,160,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN		87,318,000.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	4			1							1		
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan**	**ASN**	**1,050.00**	**-**	**150.00**	**150.00**	**503,685,000.00**						**150.00**	**528,869,200.00**	**Badan Kepegawaian Daerah**
						Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	**Jabatan**	**273.00**	**-**	**39.00**	**39.00**							**39.00**		
						Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	**Jabatan**	**1,449.00**	**-**	**207.00**	**207.00**							**207.00**		
						Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah	**Jabatan**	**25,651.00**	**-**	**3,485.00**	**3,485.00**							**3,485.00**		
						Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober dan kenaikan gaji berkala tepat waktu	**SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala ASN**	**40,250.00**	**-**	**5,500.00**	**5,750.00**							**5,750.00**		
						Jumlah ASN yang lulus promosi ujian penyesuaian dan ujian dinas	**ASN**	**3,500.00**	**-**	**400.00**	**500.00**							**500.00**		
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan	ASN	300	220	150		212,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN	150.00	223,256,200.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung	Jabatan	78	19	39								39.00		
						Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terisi	Jabatan	414	-	207								207.00		
						Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terisi	Jabatan	6,970	83	3,485								3,485.00		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	4			1							1		
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober dan kenaikan gaji berkala tepat waktu	SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala ASN	10,788	5,288	5,500		207,900,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN	5,750.00	218,295,000.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	4			1							1		
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang lulus promosi ujian penyesuaian dan ujian dinas	ASN	700	300	400		83,160,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN	500.00	87,318,000.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN yang mengikuti pendidkan dan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan**	**ASN**	**1,700**	-	**200**	**250**	**961,493,200.00**						**250**	**1,007,067,700.00**	**Badan Kepegawaian Daerah**
						Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural serta Sertifikasi ASN	**Pejabat**	**8,333**	-	**1,049**	**1,249**							**1,249**		
						Jumlah ASN yang mendapatkan izin belajar, tugas belajar, beasiswa dan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	**ASN**	**100**	-	**100**	**100**							**100**		
						Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK)	**ASN**	**1,900**	-	**200**	**250**							**250**		
						Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota Bandar Lampung	**laporan**	**84**	-	**12**	**12**							**12**		
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	1,700	-	200	250	239,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN	250	248,450,000.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti proses Assessment	Pejabat	10	-	10		28,350,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN		29,767,500.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	4			1							1		
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural serta Sertifikasi ASN	Pejabat	1,049	-	1,049		377,855,500.00	Bandar Lampung	APBD			ASN		396,748,200.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	4			1							1		
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang lulus seleksi Izin Belajar dan Tugas Belajar, ASN yang menerima beasiswa dan Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	ASN	200	105	100		172,462,500.00	Bandar Lampung	APBD			ASN		181,085,600.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	4			1							1		
5	03	02	2.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang lulus Diklat fungsional dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	ASN	110		60		65,862,700.00	Bandar Lampung	APBD			ASN		69,155,800.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	4			1							1		
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK)	ASN	354	154	200		41,580,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN		43,659,000.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	4			1							1		
5	03	02	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	84	-	12	12	36,382,500.00	Bandar Lampung	APBD			ASN	12	38,201,600.00	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah SKP ASN Kota Bandar Lampung yang mendapatkan nilai baik pada aplikasi e-kinerja**	**SKP ASN**	**59,500.00**	-	**8,500.00**	**8,500.00**	**225,855,000.00**						**8,500.00**	**237,147,700.00**	**Badan Kepegawaian Daerah**
						Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	**ASN**	**7,000.00**	-	**1,000.00**	**1,000.00**							**1,000.00**		
						Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	**ASN**	**100.00**	-	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
						Jumlah penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	**Kasus**	**415.00**	-	**80.00**	**60.00**							**60.00**		
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah SKP ASN yang mendapatkan nilai baik dalam aplikasi e-kinerja ASN Kota Bandar Lampung	SKP ASN	17,000	8,500	8,500		77,962,500.00	Bandar Lampung	APBD			ASN		81,860,600.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4			1							1		
5	03	02	2.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	ASN	2,000	354	1,000		41,580,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN		43,659,000.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	4			1							1		
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN di Kota Bandar Lampung	ASN	200	3	100		41,580,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN		43,659,000.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang													

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang terselesaikan	Kasus	180	18	80		36,382,500.00	Bandar Lampung	APBD			ASN		38,201,600.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	4			1							1		
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan Izin Proses Perceraian Pegawai	ASN	100		50		28,350,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN		29,767,500.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	4			1							1		
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**2,315,250,000.00**							**2,431,012,500.00**	
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							**2,315,250,000.00**							**2,431,012,500.00**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,315,250,000.00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**100.00**	**2,431,012,500.00**	**Badan Kepegawaian Daerah**
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,315,250,000.00**						**100.00**	**2,431,012,500.00**	**Badan Kepegawaian Daerah**
						Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik	**Pejabat**	**10.00**	-	**10.00**	**10.00**							**10.00**		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum	%	100.00	-	100.00	100.00	2,054,106,600.00	Bandar Lampung	APBD			ASN	100.00	2,156,812,000.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	4			1							1		
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan danTenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi ,Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik	Pejabat	70.00	-	10.00	10.00	261,143,400.00	Bandar Lampung	APBD			ASN	10.00	274,200,500.00	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	4			1							1		
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**2,675,000,000.00**							**1,440,000,000.00**	
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**2,675,000,000.00**							**1,440,000,000.00**	
5	**05**	**02**			**Program Penelitian dan Pengembangan**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,675,000,000.00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan**		**100.00**	**1,440,000,000.00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
						Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	**Persen**	**92.59**	**55.56**	**92.59**	**92.59**							**92.59**		
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Dokumen**	**8**	**2**	**2**	**2**	**350,000,000.00**								
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung	Dokumen	1	1			350,000,000.00					Pemerintah Kota BandarLampung			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	3			2									

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
5	**01**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Dokumen**	**9**	**2**	**1**	**3**	**830,000,000.00**						**2**	**685,000,000.00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1			1	150,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota BandarLampung			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen Naskah Akademik Ranperda RIPPARDA	Dokumen	1	1			680,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota BandarLampung		685,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Dokumen DED (Master Plan)	Dokumen	1		1										
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Laporan	5			2							2		
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Dokumen**	**19**	**1**	**4**	**6**	**1,265,000,000.00**						**3**	**525,000,000.00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1			1	200,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota BandarLampung			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	Dokumen	2	1	1		275,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota BandarLampung		250,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	3			1						Pemerintah Kota BandarLampung	1		
5	05	02	2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	2			1	250,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota BandarLampung			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1			1	265,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota BandarLampung			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	5			1	150,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota BandarLampung	1	150,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	5		1	1	125,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota BandarLampung	1	125,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah**	**Dokumen**	**6**	**1**	**1**	**1**	**230,000,000.00**						**1**	**230,000,000.00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	05	02	2.04	01	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	6	1	1	1	230,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota BandarLampung	1	230,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	**01**				**UNSUR PENGAWAS**							**19,907,934,414.27**							**20,903,331,134.98**	
												-							-	
					INSPEKTORAT							**19,907,934,414.27**							**20,903,331,134.98**	
6	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Inspektorat**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**13,084,161,948.27**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**13,738,370,045.68**	**Inspektorat**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**92,792,586.60**						**100.00**	**97,432,215.93**	**Inspektorat**
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24			6	46,160,222.85	Bandar Lampung	APBD			Inspektorat	6	48,468,233.99	Inspektorat

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	24			6	46,632,363.75					Inspektorat	6	48,963,981.94	Inspektorat
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**10,042,540,313.40**						**100.00**	**10,544,667,329.07**	**Inspektorat**
	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat yang Tersedia	Kali	28	14	14		9,866,371,595.85	Bandar Lampung	APBD			Inspektorat		10,359,690,175.64	Inspektorat
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	79			79							79		
6	01	01	2.01	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Inspektorat yang Terlaksana	Bulan	24	12	12		125,408,294.55	Bandar Lampung	APBD			Inspektorat		131,678,709.28	Inspektorat
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
	01	01	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	6 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	6 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	6 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	6 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	50,760,423.00	Bandar Lampung	APBD			Inspektorat	6 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	53,298,444.15	Inspektorat
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**1,048,687,260.60**					**Inspektorat**	**100.00**	**1,101,121,623.63**	**Inspektorat**
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	6	1	1	1	84,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			ASN Inspektorat	1	88,200,000.00	Inspektorat
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	83	83	83	83	303,187,260.60	Bandar Lampung	APBD			ASN Inspektorat	83	318,346,623.63	Inspektorat
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	83	83	83	83	661,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			APIP	83	694,575,000.00	Inspektorat
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**730,478,275.17**					**Inspektorat**	**98.00**	**767,002,188.93**	**Inspektorat**
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	53,598,207.60	Bandar Lampung	APBD			Inspektorat	1	56,278,117.98	Inspektorat
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	4,379,476.50	Bandar Lampung	APBD			Inspektorat	1	4,598,450.33	Inspektorat
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	%	100.00	100.00	100.00		15,946,875.00	Bandar Lampung	APBD			Inspektorat		16,744,218.75	Inspektorat
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1		51,455,545.05	Bandar Lampung	APBD			Inspektorat		54,028,322.30	Inspektorat
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1	1	1		43,879,500.00	Bandar Lampung	APBD			Inspektorat		46,073,475.00	Inspektorat
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4			1							1		
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	%	100.00	100.00	100.00		9,696,225.00	Bandar Lampung	APBD			Inspektorat		10,181,036.25	Inspektorat
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4			1							1		
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Paket	1	1	1		551,522,446.02	Bandar Lampung	APBD			Inspektorat		579,098,568.32	Inspektorat
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**630,000,000.00**					**Inspektorat**	**98.00**	**661,500,000.00**	**Inspektorat**
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	52,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Inspektorat	1	55,125,000.00	Inspektorat
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	150	25	25	25	262,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Inspektorat	1	275,625,000.00	Inspektorat

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	120	20	20	20	315,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Inspektorat	1	330,750,000.00	Inspektorat
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**128,646,000.00**					**Inspektorat**	**98.00**	**135,078,300.00**	**Inspektorat**
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	24	12	12		2,646,000.00	Bandar Lampung	APBD			Inspektorat		2,778,300.00	Inspektorat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	24	12	12		126,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Inspektorat		132,300,000.00	Inspektorat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**411,017,512.50**					**Inspektorat**	**98.00**	**431,568,388.13**	**Inspektorat**
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	38,973,375.00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Dinas Jabatan Insoektorat	1	40,922,043.75	Inspektorat
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	7	7	261,794,137.50	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Dinas Operasional Inspektorat	7	274,883,844.38	Inspektorat
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	72	72	72	72	55,125,000.00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Inspektorat	72	57,881,250.00	Inspektorat
6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	215	215	215	215	55,125,000.00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Kantor Inspektorat	215	57,881,250.00	Inspektorat
6	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD**	**%**	**90.00**	**125.25**	**80.00**	**85.00**	**4,602,167,766.00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan**		**85.00**	**4,832,276,154.30**	**Inspektorat**
						Presentase Tindak Lanjut Temuan	**%**	**100.00**	**99.00**	**100.00**	**100.00**							**100.00**		
						Presentase Penangan Kasus Pengaduan	**%**	**90.00**	**135.00**	**85.00**	**90.00**							**90.00**		
6	**01**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD**	**%**	**90.00**	**85.00**	**85.00**	**85.00**	**4,203,169,259.10**					**Inspektorat**	**85.00**	**4,413,327,722.06**	**Inspektorat**
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Daerah	LHP	80	80	80	80	2,205,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Laporan Pengawasan OPD	80	2,315,250,000.00	Inspektorat
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Keuangan Pemerintah Daerah	LHP	13	13	13	13	735,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Laporan Pengawasan OPD	13	771,750,000.00	Inspektorat
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviu Kinerja	Laporan	66	11	11	11	630,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Laporan Kinerja OPD	11	661,500,000.00	Inspektorat
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu Keuangan	Laporan	24	4	4	4	252,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Laporan Keuangan OPD dan PEMKOT	4	264,600,000.00	Inspektorat
6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Kesepakatan	4	1	1	1	22,050,000.00	Bandar Lampung	APBD			APIP se Propinsi Lampung	1	23,152,500.00	Inspektorat
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	12	3	3	3	359,119,259.10	Bandar Lampung	APBD			Tindak Lanjut Temuan	3	377,075,222.06	Inspektorat

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
6	**01**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Presentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**%**	**90.00**	**85.00**	**85.00**	**85.00**	**398,998,506.90**					**OPD**	**85.00**	**418,948,432.25**	**Inspektorat**
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Kasus Kerugian Daerah yang Dapat Diselesaikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung	Kasus	20	20	20		55,123,513.20	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung		57,879,688.86	Inspektorat
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang ditangani	Laporan	20			5							5		
6	01	02	1.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Audit Khusus dan Kasus Penanganan Pengaduan	SPT	60	60	60		343,874,993.70	Bandar Lampung	APBD			ASN Pemkot Bandar Lanpung		361,068,743.39	Inspektorat
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	140			35							35		
												-							-	Inspektorat
6	**01**	**03**			**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP**	**%**	**85.00**	**133.00**	**75.00**	**80.00**	**2,221,604,700.00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Pemerintah Kota Bandar Lampung**	**80.00**	**2,332,684,935.00**	**Inspektorat**
												-							-	Inspektorat
6	**01**	**02**	**1.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP**	**%**	**85.00**	**133.00**	**75.00**	**80.00**	**2,221,604,700.00**					**OPD**	**80.00**	**2,332,684,935.00**	**Inspektorat**
6	01	02	1.01	01	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	OPD	5	10	5	5	157,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			OPD	5	165,375,000.00	Inspektorat
6	01	02	1.01	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dilakukan Penilaian Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	20			5	55,125,000.00	Bandar Lampung	APBD			OPD	5	57,881,250.00	Inspektorat
6	01	02	1.01	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantaasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantaasan Korupsi	Kegiatan	52	52	52	52	1,995,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			OPD	52	2,094,750,000.00	Inspektorat
6	01	02	1.01	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	OPD	52	52	52	52	13,979,700.00	Bandar Lampung	APBD			OPD	52	14,678,685.00	Inspektorat
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**							**286,669,438,699.20**							**300,834,664,075.88**	
7	**01**				**KECAMATAN**							**286,669,438,699.20**							**300,834,664,075.88**	
					KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT							**15,654,153,705.86**							**16,550,959,696.63**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**7,593,664,001.07**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**	**98.00**	**8,087,445,506.60**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**presentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**10,679,548.95**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**	**98.00**	**11,213,526.40**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	3,559,849.65	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	3,737,842.13	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	tahun	1.00		1.00		3,559,849.65	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat		3,737,842.13	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	1	1	1	3,559,849.65	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	3,737,842.13	Kecamatan Tanjung Karang Pusat

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**5,818,693,274.20**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**	**98.00**	**6,223,726,243.39**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	tahun	2	1	1		5,704,915,274.20	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat		6,104,259,343.39	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	49			49							49		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	tahun	1.00	1.00	1.00		113,778,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat		119,466,900.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**84,276,717.53**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**	**98.00**	**88,490,553.40**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	4,803,713.78	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	5,043,899.46	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	21,971,171.25	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	23,069,729.81	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	12,825,382.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	13,466,651.63	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	tahun	1.00	100.00	1.00		17,350,200.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat		18,217,710.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	11,576,250.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	12,155,062.50	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	tahun	1.00		1.00		15,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat		16,537,500.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**49,323,750.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**	**98.00**	**51,789,937.50**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	1	3	3	17,010,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	3	17,860,500.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	2	2	21,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	2	22,050,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	11,313,750.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	11,879,437.50	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**1,231,582,800.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**	**98.00**	**1,293,161,940.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	1	1	1	37,837,800.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	39,729,690.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	1	1	1	1,193,745,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	1,253,432,250.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**399,107,910.39**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**	**98.00**	**419,063,305.91**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	36,969,126.60	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	38,817,582.93	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	10	10	319,460,483.79	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	10	335,433,507.98	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	1	3	3	6,300,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	3	6,615,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	1	3	3	13,803,300.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	3	14,493,465.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	15,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	16,537,500.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	6,825,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	7,166,250.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,848,543,579.79**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**	**100.00**	**4,040,970,758.78**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**37,590,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**	**100.00**	**39,469,500.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	1	1	1	37,590,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	100.00	39,469,500.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,810,953,579.79**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**	**100.00**	**4,001,501,258.78**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6.00	1.00	1.00	1.00	3,810,953,579.79	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	100.00	4,001,501,258.78	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,462,257,125.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**	**80.00**	**1,535,369,981.25**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,112,257,125.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**	**80.00**	**1,167,869,981.25**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	1,112,257,125.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	1,167,869,981.25	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80.00**			**80.00**	**350,000,000.00**					**Kecamatan TanjungKarang Pusat**	**80.00**	**367,500,000.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan TanjungKarang Pusat	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan TanjungKarang Pusat	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan TanjungKarang Pusat	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan TanjungKarang Pusat	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan TanjungKarang Pusat	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan TanjungKarang Pusat	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan TanjungKarang Pusat	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan TanjungKarang Pusat	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan TanjungKarang Pusat	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan TanjungKarang Pusat	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,639,439,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**	**100.00**	**2,771,410,950.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,639,439,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**	**100.00**	**2,771,410,950.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,614,689,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	2,745,423,450.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	24,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	25,987,500.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**	**100.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**	**100.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	24,806,250.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	120	20	20	20	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	200	33,075,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	6	1	1	1	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	33,075,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Pusat	1	24,806,250.00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
					KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT							**15,123,606,366.36**							**15,879,786,684.68**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**6,965,063,592.61**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**7,313,316,772.24**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**29,400,000.00**						**98.00**	**30,870,000.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	10,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	11,025,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	2	1	1		10,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat		11,025,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4			1						1		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	8,400,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	8,820,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**5,824,503,645.16**						**98.00**	**6,115,728,827.42**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	2	1	1		5,705,307,645.16	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat		5,990,573,027.42	Kecamatan Tanjung Karang Barat
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	50			50							50		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	2	1	1		119,196,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat		125,155,800.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**62,988,388.05**						**98.00**	**66,137,807.45**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	3,246,686.10	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	3,409,020.41	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	17,426,040.45	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	18,297,342.47	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	7,629,961.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	8,011,459.58	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	19,687,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	20,671,875.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	4,498,200.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	4,723,110.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	2	1	1		10,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat		11,025,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**26,250,000.00**						**98.00**	**27,562,500.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	1	1	1	7,875,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	8,268,750.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	1	1	1	10,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	2	11,025,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	1	7,875,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	8,268,750.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**774,007,500.00**						**98.00**	**812,707,875.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	2	1	1		44,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat		46,856,250.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	2	1	1		729,382,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat		765,851,625.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**247,914,059.40**						**98.00**	**260,309,762.37**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	37,308,692.40	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	39,174,127.02	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	7	7	108,371,980.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	7	113,790,579.53	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	10	10	10	1,102,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	10	1,157,625.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	2	2	2	5,512,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	2	5,788,125.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	67,240,036.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	70,602,038.33	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	7	7	7	28,378,350.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	7	29,797,267.50	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,615,791,523.75**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**100.00**	**3,796,581,099.94**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**44,100,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**100.00**	**46,305,000.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	1	1	1	44,100,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	46,305,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,571,691,523.75**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**100.00**	**3,750,276,099.94**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	3,571,691,523.75	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	3,750,276,099.94	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,893,500,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**80.00**	**1,988,175,000.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,543,500,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**80.00**	**1,620,675,000.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	1,543,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	1,620,675,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80.00**			**80.00**	**350,000,000.00**					**Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**80.00**	**367,500,000.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,539,001,250.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**100.00**	**2,665,951,312.50**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,539,001,250.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**100.00**	**2,665,951,312.50**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,514,251,250.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	2,639,963,812.50	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	24,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	25,987,500.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**1.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelengggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**100.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	24,806,250.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	120	20	20	20	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	20	33,075,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	6	1	1	1	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	33,075,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat	1	24,806,250.00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
					KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR							**12,421,594,191.08**							**13,041,338,300.63**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**6,376,953,989.83**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**6,694,466,089.32**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**6,824,994.75**						**98.00**	**7,166,244.49**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	2,274,999.98	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	2,388,749.98	Kecamatan Tanjung Karang Timur

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	2	1	1		2,274,999.98	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur		2,388,749.98	Kecamatan Tanjung Karang Timur
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4			1						1		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	2,274,994.79	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	2,388,744.52	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**4,932,525,380.08**						**98.00**	**5,179,151,649.08**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	2	1	1		4,853,775,380.08	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur		5,096,464,149.08	Kecamatan Tanjung Karang Timur
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	38			38							38		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	2	1	1		78,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur		82,687,500.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**80,388,000.00**						**98.00**	**84,407,400.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	7,350,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	7,717,500.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	18,942,420.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	19,889,541.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	11,145,330.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	11,702,596.50	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	12,600,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	13,230,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	14,600,250.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	15,330,262.50	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	2	1	1		15,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur		16,537,500.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**36,750,000.00**						**98.00**	**38,587,500.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8	1	1	2	11,550,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	12,127,500.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	1	1	2	11,550,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	12,127,500.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	1	1	2	13,650,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	14,332,500.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**868,738,500.00**						**98.00**	**912,175,425.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	2	1	1		51,450,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur		54,022,500.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	2	1	1		817,288,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur		858,152,925.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**451,727,115.00**						**98.00**	**472,977,870.75**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	35,206,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	36,966,825.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	1	10	302,921,115.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	10	318,067,170.75	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	1	1	3	3,150,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	3	3,307,500.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	1	1	3	4,987,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	3	5,236,875.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1	1	6	78,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	6	82,687,500.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	26,712,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	26,712,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,831,815,901.25**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**	**100.00**	**2,973,406,696.31**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**32,382,525.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Timur**	**100.00**	**34,001,651.25**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	1	1	1	32,382,525.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	34,001,651.25	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,799,433,376.25**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Timur**	**100.00**	**2,939,405,045.06**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,799,433,376.25	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	2,939,405,045.06	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,045,343,500.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**	**80.00**	**1,097,610,675.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**795,343,500.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Timur**	**80.00**	**835,110,675.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	795,343,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	835,110,675.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80.00**			**80.00**	**250,000,000.00**					**Kecamatan Tanjung Karang Timur**	**80.00**	**262,500,000.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,057,230,800.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**	**100.00**	**2,160,092,340.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,057,230,800.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Timur**	**100.00**	**2,160,092,340.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,032,480,800.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	2,134,104,840.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	24,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	25,987,500.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**	**1.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Timur**	**100.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	24,806,250.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	120	20	20	20	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	20	33,075,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Timur**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	6	1	1	1	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	33,075,000.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Timur	1	24,806,250.00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
					KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA							**14,810,712,990.37**							**15,562,753,227.39**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**6,526,791,572.62**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**6,853,131,151.25**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**32,549,998.95**						**98.00**	**34,177,498.90**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	10,849,999.65	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	11,392,499.63	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	2	1	1		10,849,999.65	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara		11,392,499.63	Kecamatan Telukbetung Utara
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	10,849,999.65	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	11,392,499.63	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**5,080,428,477.47**						**98.00**	**5,334,449,901.34**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	2	1	1		4,977,981,027.47	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara		5,226,880,078.84	Kecamatan Telukbetung Utara
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	40			40							40		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	2	1	1		102,447,450.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara		107,569,822.50	Kecamatan Telukbetung Utara
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**75,838,875.05**						**98.00**	**79,630,818.81**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	4,121,250.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	4,327,312.50	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	16,994,197.55	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	17,843,907.43	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	11,563,177.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	12,141,336.38	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	15,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	16,537,500.00	Kecamatan Telukbetung Utara

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	11,660,250.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	12,243,262.50	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	2	1	1		15,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara		16,537,500.00	Kecamatan Telukbetung Utara
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**69,037,500.00**						**98.00**	**72,489,375.00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15		3	3	32,865,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	3	34,508,250.00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10		2	2	16,275,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	2	17,088,750.00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1		1	1	19,897,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	20,892,375.00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**911,410,500.00**						**98.00**	**956,981,025.00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	2	1	1		40,320,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara		42,336,000.00	Kecamatan Telukbetung Utara
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	2	1	1		871,090,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara		914,645,025.00	Kecamatan Telukbetung Utara
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**357,526,221.15**						**98.00**	**375,402,532.21**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	35,208,692.40	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	36,969,127.02	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	1	10	287,637,583.80	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	10	302,019,462.99	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	1	1	3	5,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	3	5,512,500.00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	1	1	3	5,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	3	5,512,500.00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	11,678,224.95	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	12,262,136.20	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	12,501,720.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	13,126,806.00	Kecamatan Telukbetung Utara

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**4,102,289,493.75**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Telukbetung Utara**	**100.00**	**4,318,908,555.94**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**33,143,250.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Utara**	**100.00**	**46,305,000.00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	1	1	1	33,143,250.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	46,305,000.00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**4,069,146,243.75**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Utara**	**100.00**	**4,272,603,555.94**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	4,069,146,243.75	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	4,272,603,555.94	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,503,417,999.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**	**Kecamatan Telukbetung Utara**	**80.00**	**1,578,588,898.95**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,203,417,999.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Utara**	**80.00**	**1,263,588,898.95**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	1,203,417,999.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	1,263,588,898.95	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80.00**			**80.00**	**300,000,000.00**					**Kecamatan Telukbetung Utara**	**80.00**	**315,000,000.00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Utara

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,567,963,925.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**	**Kecamatan Telukbetung Utara**	**100.00**	**2,696,362,121.25**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,567,963,925.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Utara**	**100.00**	**2,696,362,121.25**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,543,213,925.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	2,670,374,621.25	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	24,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	25,987,500.00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Telukbetung Utara**	**1.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Utara**	**100.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	24,806,250.00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	120	20	20	20	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	20	33,075,000.00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Telukbetung Utara**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Utara**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	6	1	1	1	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	33,075,000.00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Utara	1	24,806,250.00	Kecamatan Telukbetung Utara

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
					KECAMATAN TELUK BETUNGBARAT							**10,861,988,739.83**								**11,405,088,176.82**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**4,747,660,064.83**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**4,985,043,068.07**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**12,777,030.00**						**98.00**	**13,415,881.50**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	4,259,010.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	4,471,960.50	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	2	1	1		4,259,010.00	Bandar Lamounr	APBD			Kecamatan Telukbetunr Barat		4,471,960.50	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4			1						1		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	4,259,010.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	4,471,960.50	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**3,769,351,778.03**						**98.00**	**3,957,819,366.93**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	2	1	1		3,676,245,653.03	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat		3,860,057,935.68	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	29			29							29		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	2	1	1		93,106,125.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat		97,761,431.25	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**78,074,700.69**						**98.00**	**81,978,435.72**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	7,986,510.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	8,385,835.50	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	19,320,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	20,286,000.00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	7,598,123.19	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	7,978,029.35	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	15,582,630.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	16,361,761.50	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	11,837,437.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	12,429,309.38	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	2	1	1		15,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat		16,537,500.00	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**42,341,250.00**						**98.00**	**44,458,312.50**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	11,550,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	2	12,127,500.00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	1	11,550,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	12,127,500.00	Kecamatan Telukbetung Barat

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	1	19,241,250.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	20,203,312.50	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**640,426,499.07**						**98.00**	**672,447,824.02**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	2	1	1		26,460,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat		27,783,000.00	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	2	1	1		613,966,499.07	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat		644,664,824.02	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**204,688,807.05**						**98.00**	**214,923,247.40**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	39,171,825.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	41,130,416.25	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	1	10	130,921,350.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	10	137,467,417.50	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	1	1	5	11,040,015.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	5	11,592,015.75	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	1	1	3	10,955,617.05	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	3	11,503,397.90	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	6,300,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	6,615,000.00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	6,300,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	6,615,000.00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,644,588,800.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Telukbetung Barat**	**100.00**	**2,776,818,240.00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**28,946,137.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Barat**	**100.00**	**30,393,444.38**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	1	1	1	28,946,137.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	30,393,444.38	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,615,642,662.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Barat**	**100.00**	**2,746,424,795.63**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,615,642,662.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	2,746,424,795.63	Kecamatan Telukbetung Barat

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,411,935,775.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**	**Kecamatan Telukbetung Barat**	**80.00**	**1,482,532,563.75**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,161,935,775.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Barat**	**80.00**	**1,220,032,563.75**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	1,161,935,775.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	1,220,032,563.75	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80.00**			**80.00**	**250,000,000.00**					**Kecamatan Telukbetung Barat**	**80.00**	**262,500,000.00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Telukbetung Barat

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**1,947,554,100.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**	**Kecamatan Telukbetung Barat**	**100.00**	**2,044,931,805.00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**1,947,554,100.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Barat**	**100.00**	**2,044,931,805.00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	1,922,804,100.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	2,018,944,305.00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	24,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	25,987,500.00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Telukbetung Barat**	**1.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Barat**	**100.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	24,806,250.00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	120	20	20	20	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	20	33,075,000.00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daera**	**Kecamatan Telukbetung Barat**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Barat**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	6	1	1	1	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	33,075,000.00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	24,806,250.00	Kecamatan Telukbetung Barat
					KECAMATAN TELUKBETUNG SELATAN							**13,740,518,384.43**							**14,506,369,963.84**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**6,097,881,967.68**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**6,481,601,726.25**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**5,985,000.00**						**98.00**	**6,284,250.00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	1,995,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	2,094,750.00	Kecamatan Telukbetung Selatan

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	2	1	1		1,995,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan		2,094,750.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4			1						1		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	1,995,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	2,094,750.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**4,396,401,340.68**						**98.00**	**4,696,024,009.53**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	2	1	1		4,280,323,840.68	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan		4,579,946,509.53	Kecamatan Telukbetung Selatan
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	29			29							29		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	2	1	1		116,077,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan		116,077,500.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**97,509,259.05**						**98.00**	**101,407,780.37**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	8,688,750.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	9,123,187.50	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	20,359,551.45	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	21,377,529.02	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	13,747,125.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	14,434,481.25	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	19,425,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	20,396,250.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	19,538,832.60	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	19,538,832.60	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	2	1	1		15,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan		16,537,500.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**45,885,000.00**						**98.00**	**48,179,250.00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	1	2	2	17,850,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	2	18,742,500.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	10,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	2	11,025,000.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	2	2	17,535,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	2	18,411,750.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**1,129,103,325.00**						**98.00**	**1,185,558,491.25**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	2	1	1		35,721,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan		37,507,050.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	2	1	1		1,093,382,325.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan		1,148,051,441.25	Kecamatan Telukbetung Selatan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**422,998,042.95**						**98.00**	**444,147,945.10**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	35,208,692.40	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	36,969,127.02	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	5	5	297,774,320.55	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	5	312,663,036.58	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3		3	3	2,100,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	3	2,205,000.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1		1	1	6,825,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	7,166,250.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6		6	6	65,235,030.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	6	68,496,781.50	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		1	1	15,855,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	16,647,750.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,651,594,880.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**	**100.00**	**3,834,174,624.53**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**39,677,541.75**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Selatan**	**100.00**	**41,661,418.84**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	1	1	1	39,677,541.75	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	41,661,418.84	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,611,917,338.75**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Selatan**	**100.00**	**3,792,513,205.69**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	3,611,917,338.75	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	3,792,513,205.69	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,400,430,607.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**	**80.00**	**1,470,452,137.88**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,100,430,607.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Selatan**	**80.00**	**1,155,452,137.88**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	1,100,430,607.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	1,155,452,137.88	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80.00**			**80.00**	**300,000,000.00**					**Kecamatan Telukbetung Selatan**	**80.00**	**315,000,000.00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Selatan

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,480,360,928.75**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**	**100.00**	**2,604,378,975.19**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,480,360,928.75**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Selatan**	**100.00**	**2,604,378,975.19**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,455,610,928.75	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	2,578,391,475.19	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	24,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	25,987,500.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**	**1.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Selatan**	**100.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	24,806,250.00	Kecamatan Telukbetung Selatan

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	120	20	20	20	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	20	33,075,000.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Selatan**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	6	1	1	1	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	33,075,000.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Selatan	1	24,806,250.00	Kecamatan Telukbetung Selatan
					KECAMATAN KEDATON							**14,678,692,894.52**							**15,412,627,539.25**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**6,868,444,392.90**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**7,211,866,612.55**	**Kecamatan Kedaton**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**33,366,368.28**						**98.00**	**35,034,686.69**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	11,541,109.65	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	12,118,165.13	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	2	1	1		11,541,109.65	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton		12,118,165.13	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	10,284,148.98	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	10,798,356.43	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**5,175,815,659.02**						**98.00**	**5,434,606,441.97**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	2	1	1		5,065,250,659.02	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton		5,318,513,191.97	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	40			40							50		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	2	1	1		110,565,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton		116,093,250.00	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**105,775,530.00**						**98.00**	**111,064,306.50**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	6,332,550.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	6,649,177.50	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	21,367,080.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	22,435,434.00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	13,492,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	14,167,125.00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	27,562,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	28,940,625.00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	16,020,900.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	16,821,945.00	Kecamatan Kedaton

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	2	1	1		21,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton		22,050,000.00	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**63,543,748.45**						**98.00**	**66,720,935.88**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10		2	2	26,775,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	2	28,113,750.00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1		2	2	20,493,748.45	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	2	21,518,435.88	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1		2	2	16,275,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	2	17,088,750.00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**1,096,704,000.00**						**98.00**	**1,151,539,200.00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	2	1	1		24,150,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton		25,357,500.00	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	2	1	1		1,072,554,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton		1,126,181,700.00	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**393,239,087.15**						**98.00**	**412,901,041.50**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	35,208,679.80	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	36,969,113.79	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	1	10	277,719,897.35	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	10	291,605,892.21	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	1	1	5	5,643,750.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	5	5,925,937.50	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	1	1	10	7,875,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	10	8,268,750.00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	1	1	7	54,600,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	7	57,330,000.00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	12,191,760.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	12,801,348.00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,684,362,454.99**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Kedaton**	**100.00**	**3,868,580,577.74**	**Kecamatan Kedaton**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**35,847,945.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Kedaton**	**100.00**	**37,640,342.25**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	1	1	1	35,847,945.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	37,640,342.25	Kecamatan Kedaton

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,648,514,509.99**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Kedaton**	**100.00**	**3,830,940,235.49**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	3,648,514,509.99	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	3,830,940,235.49	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,460,003,725.25**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**	**Kecamatan Kedaton**	**80.00**	**1,533,003,911.51**	**Kecamatan Kedaton**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,110,003,725.25**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Kedaton**	**80.00**	**1,165,503,911.51**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	1,110,003,725.25	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	1,165,503,911.51	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80.00**			**80.00**	**350,000,000.00**					**Kecamatan Kedaton**	**80.00**	**367,500,000.00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Kedaton

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	04			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	%	100.00	100.00	100.00	100.00	2,555,632,321.38	Bandar Lampung	APBD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan	Kecamatan Kedaton	100.00	2,683,413,937.45	Kecamatan Kedaton
7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	100.00	100.00	100.00	100.00	2,555,632,321.38	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	100.00	2,683,413,937.45	Kecamatan Kedaton
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,530,882,321.38	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	2,657,426,437.45	Kecamatan Kedaton
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	24,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	25,987,500.00	Kecamatan Kedaton
7	01	05			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	100.00	100.00	100.00	100.00	55,125,000.00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Kedaton	1.00	57,881,250.00	Kecamatan Kedaton
7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	100.00	100.00	100.00	100.00	55,125,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	100.00	57,881,250.00	Kecamatan Kedaton
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	24,806,250.00	Kecamatan Kedaton
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	120	20	20	20	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	20	33,075,000.00	Kecamatan Kedaton
7	01	06			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	90.00	90.00	90.00	90.00	55,125,000.00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Kedaton	90.00	57,881,250.00	Kecamatan Kedaton
7	01	06	2.01		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	90.00	90.00	90.00	90.00	55,125,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	90.00	57,881,250.00	Kecamatan Kedaton
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	6	1	1	1	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	33,075,000.00	Kecamatan Kedaton
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedaton	1	24,806,250.00	Kecamatan Kedaton
												-							-	
					KECAMATAN SUKARAME							**14,500,100,723.59**							**15,225,105,759.77**	
7	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	98.00	98.00	98.00	98.00	7,556,300,889.39			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98.00	7,934,115,933.86	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	%	98.00	98.00	98.00	98.00	22,050,000.00						98.00	23,152,500.00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	7,350,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	7,717,500.00	Kecamatan Sukarame

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	2	1	1		7,350,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame		7,717,500.00	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4			1						1		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	7,350,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	7,717,500.00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**5,703,158,682.34**						**98.00**	**5,988,316,616.46**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	2	1	1		5,619,998,682.34	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame		5,900,998,616.46	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	51			51							50		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	2	1	1		83,160,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame		87,318,000.00	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**109,292,147.00**						**98.00**	**114,756,754.35**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	7,280,184.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	7,644,193.73	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	18,375,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	19,293,750.00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	13,790,962.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	14,480,510.63	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	27,321,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	28,687,050.00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	21,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	22,050,000.00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	2	1	1		21,525,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame		22,601,250.00	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**61,540,973.53**						**98.00**	**64,618,022.21**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	19,015,973.53	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	2	19,966,772.21	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	21,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	2	22,050,000.00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	21,525,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	2	22,601,250.00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**1,120,738,500.00**						**98.00**	**1,176,775,425.00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	2	1	1		53,130,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame		55,786,500.00	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	2	1	1		1,067,608,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame		1,120,988,925.00	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**539,520,586.52**						**98.00**	**566,496,615.85**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	35,208,692.40	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	36,969,127.02	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	1	1	240,761,894.10	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	252,799,988.81	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	1	3	3	2,100,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	3	2,205,000.00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	1	3	3	5,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	3	5,512,500.00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1	2	2	241,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	2	253,575,000.00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	14,700,000.02	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	15,435,000.02	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,067,333,020.68**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Sukarame**	**100.00**	**3,220,699,671.71**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**36,414,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Sukarame**	**100.00**	**38,234,700.00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	1	1	1	36,414,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	38,234,700.00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidk Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,030,919,020.68**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Sukarame**	**100.00**	**3,182,464,971.71**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	3,030,919,020.68	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	3,182,464,971.71	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,543,649,490.77**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**	**Kecamatan Sukarame**	**80.00**	**1,620,831,965.31**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,243,649,490.77**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Sukarame**	**80.00**	**1,305,831,965.31**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	1,243,649,490.77	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	1,305,831,965.31	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80.00**			**80.00**	**300,000,000.00**					**Kecamatan Sukarame**	**80.00**	**315,000,000.00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Sukarame

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,222,567,322.75**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**	**Kecamatan Sukarame**	**100.00**	**2,333,695,688.89**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,222,567,322.75**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Sukarame**	**100.00**	**2,333,695,688.89**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,197,817,322.75	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	2,307,708,188.89	Kecamatan Sukarame
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	24,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	25,987,500.00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Sukarame**	**1.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Sukarame**	**100.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	24,806,250.00	Kecamatan Sukarame

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	120	20	20	20	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	20	33,075,000.00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Sukarame**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Sukarame**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	6	1	1	1	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	33,075,000.00	Kecamatan Sukarame
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukarame	1	24,806,250.00	Kecamatan Sukarame
					KECAMATAN PANJANG							**18,066,020,383.47**							**18,969,321,402.65**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**6,369,132,886.49**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**6,687,589,530.81**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**32,588,966.66**						**98.00**	**34,218,414.99**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	10,862,988.89	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	11,406,138.33	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	2	1	1		10,862,988.89	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang		11,406,138.33	Kecamatan Panjang
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	10,862,988.89	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	11,406,138.33	Kecamatan Panjang
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**4,576,836,586.74**						**98.00**	**4,805,678,416.08**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	2	1	1		4,488,636,586.74	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang		4,713,068,416.08	Kecamatan Panjang
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	31			31							31		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	2	1	1		88,200,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang		92,610,000.00	Kecamatan Panjang
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**111,070,090.74**						**98.00**	**116,623,595.28**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	6,063,750.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	6,366,937.50	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	16,845,873.24	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	17,688,166.90	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	12,238,117.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	12,850,023.38	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	38,031,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	39,932,550.00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	21,616,350.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	22,697,167.50	Kecamatan Panjang

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	2	1	1		16,275,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang		17,088,750.00	Kecamatan Panjang
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**63,000,000.00**						**98.00**	**66,150,000.00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	27,300,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2	28,665,000.00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	17,850,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2	18,742,500.00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	17,850,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2	18,742,500.00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**1,101,607,500.00**						**98.00**	**1,156,687,875.00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	2	1	1		36,330,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang		38,146,500.00	Kecamatan Panjang
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	2	1	1		1,065,277,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang		1,118,541,375.00	Kecamatan Panjang
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**484,029,742.35**						**98.00**	**508,231,229.47**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	35,208,692.40	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	36,969,127.02	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	10	10	368,902,621.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	10	387,347,752.58	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	1	1	3	5,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	3	5,512,500.00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	1	1	3	5,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	3	5,512,500.00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1	1	2	52,496,628.45	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2	55,121,459.87	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	16,921,800.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	17,767,890.00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**5,787,624,459.49**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Panjang**	**100.00**	**6,077,005,682.46**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**41,532,750.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Panjang**	**100.00**	**43,609,387.50**	**Kecamatan Panjang**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	1	1	1	41,532,750.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	43,609,387.50	Kecamatan Panjang

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**5,746,091,709.49**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Panjang**	**100.00**	**6,033,396,294.96**	**Kecamatan Panjang**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	5,746,091,709.49	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	6,033,396,294.96	Kecamatan Panjang
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**2,210,189,237.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**	**Kecamatan Panjang**	**80.00**	**2,320,698,699.38**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,810,189,237.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Panjang**	**80.00**	**1,900,698,699.38**	**Kecamatan Panjang**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	1,810,189,237.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	1,900,698,699.38	Kecamatan Panjang
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80.00**			**80.00**	**400,000,000.00**					**Kecamatan Panjang**	**80.00**	**420,000,000.00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	8,000			2,000	40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2,000	42,000,000.00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	8,000			2,000	40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2,000	42,000,000.00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	8,000			2,000	40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2,000	42,000,000.00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	8,000			2,000	40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2,000	42,000,000.00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	8,000			2,000	40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2,000	42,000,000.00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	8,000			2,000	40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2,000	42,000,000.00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	8,000			2,000	40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2,000	42,000,000.00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	8,000			2,000	40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2,000	42,000,000.00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	8,000			2,000	40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2,000	42,000,000.00	Kecamatan Panjang

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	8,000			2,000	40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	2,000	42,000,000.00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,588,823,800.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**	**Kecamatan Panjang**	**100.00**	**3,768,264,990.00**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,588,823,800.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Panjang**	**100.00**	**3,768,264,990.00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	3,564,073,800.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	3,742,277,490.00	Kecamatan Panjang
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	24,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	25,987,500.00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Panjang**	**1.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Panjang**	**100.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	24,806,250.00	Kecamatan Panjang
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	120	20	20	20	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	20	33,075,000.00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Panjang**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Panjang**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	6	1	1	1	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	33,075,000.00	Kecamatan Panjang
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Panjang	1	24,806,250.00	Kecamatan Panjang
					KECAMATAN RAJABASA							**14,546,035,902.07**							**15,273,337,697.18**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**7,505,813,452.07**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**7,881,104,124.68**	**Kecamatan Rajabasa**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**36,382,500.00**						**98.00**	**38,201,625.00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	12,127,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	12,733,875.00	Kecamatan Rajabasa

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	2	1	1		12,127,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa		12,733,875.00	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4			1						1		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	12,127,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	12,733,875.00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**6,345,537,246.54**						**98.00**	**6,662,814,108.87**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	2	1	1		6,258,730,176.54	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa		6,571,666,685.37	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	57			57							57		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	2	1	1		86,807,070.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa		91,147,423.50	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**83,787,701.18**						**98.00**	**87,977,086.24**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	4,084,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	4,288,725.00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	21,159,705.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	22,217,690.25	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	3,762,565.80	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	3,950,694.09	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	26,040,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	27,342,000.00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	7,740,930.38	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	8,127,976.90	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	2	1	1		21,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa		22,050,000.00	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**37,091,471.55**						**98.00**	**38,946,045.13**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	18	1	1	3	21,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	3	22,050,000.00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	9,450,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	2	9,922,500.00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	6,641,471.55	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	2	6,973,545.13	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**703,510,500.00**						**98.00**	**738,686,025.00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	2	1	1		42,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa		44,100,000.00	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	2	1	1		661,510,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa		694,586,025.00	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**299,504,032.80**						**98.00**	**314,479,234.44**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	35,208,692.40	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	36,969,127.02	Kecamatan Rajabasa

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	1	10	219,812,090.40	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	6	230,802,694.92	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8	1	1	8	2,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	8	2,756,250.00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	1	1	5	2,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	5	2,756,250.00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	29,452,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	30,925,125.00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	9,780,750.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	10,269,787.50	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,022,410,037.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Rajabasa**	**100.00**	**3,173,530,539.38**	**Kecamatan Rajabasa**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**47,462,625.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Rajabasa**	**100.00**	**49,835,756.25**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	1	1	1	47,462,625.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	49,835,756.25	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,974,947,412.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Rajabasa**	**100.00**	**3,123,694,783.13**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,974,947,412.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	3,123,694,783.13	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,662,697,137.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**	**Kecamatan Rajabasa**	**80.00**	**1,745,831,994.38**	**Kecamatan Rajabasa**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,312,697,137.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Rajabasa**	**80.00**	**1,378,331,994.38**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	1,312,697,137.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	1,378,331,994.38	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80.00**			**80.00**	**350,000,000.00**					**Kecamatan Rajabasa**	**80.00**	**367,500,000.00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Rajabasa

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,244,865,275.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal**	**Kecamatan Rajabasa**	**100.00**	**2,357,108,538.75**	**Kecamatan Rajabasa**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,244,865,275.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Rajabasa**	**100.00**	**2,357,108,538.75**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,220,115,275.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	2,331,121,038.75	Kecamatan Rajabasa
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	24,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	25,987,500.00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Rajabasa**	**1.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Rajabasa**	**100.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	24,806,250.00	Kecamatan Rajabasa
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	120	20	20	20	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	20	33,075,000.00	Kecamatan Rajabasa

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Rajabasa**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Rajabasa**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	6	1	1	1	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	33,075,000.00	Kecamatan Rajabasa
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Rajabasa	1	24,806,250.00	Kecamatan Rajabasa
					KECAMATAN TANJUNG SENANG							**12,581,789,952.42**							**13,210,879,450.04**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**6,120,462,220.08**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**6,426,485,331.08**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**35,674,875.38**						**98.00**	**37,458,619.15**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	13,234,415.38	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	13,896,136.15	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	2	1	1		11,220,230.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang		11,781,241.50	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4			1						1		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	11,220,230.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	11,781,241.50	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**5,070,622,339.00**						**98.00**	**5,324,153,455.95**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	2	1	1		4,979,902,339.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang		5,228,897,455.95	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	37			37							50		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	2	1	1		90,720,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang		95,256,000.00	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**71,811,612.60**						**98.00**	**75,402,193.23**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	2,395,575.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	2,515,353.75	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	13,706,607.60	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	14,391,937.98	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	13,143,900.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	13,801,095.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	10,762,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	11,300,625.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	10,803,030.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	11,343,181.50	Kecamatan Tanjung Senang

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	2	1	1		21,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang		22,050,000.00	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**39,375,000.00**						**98.00**	**41,343,750.00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	18,375,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	2	19,293,750.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	15,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	2	16,537,500.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	5,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	2	5,512,500.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**567,724,500.00**						**98.00**	**596,110,725.00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	2	1	1		32,130,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang		33,736,500.00	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	2	1	1		535,594,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang		562,374,225.00	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**335,253,893.10**						**98.00**	**352,016,587.76**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	35,208,679.80	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	36,969,113.79	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	1	1	16	256,932,213.30	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	16	269,778,823.97	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	1	1	5	525,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	5	551,250.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	1	1	6	5,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	6	5,512,500.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	5	15,225,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	5	15,986,250.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	22,113,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	23,218,650.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,000,227,517.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Tanjung Senang**	**100.00**	**3,150,238,892.85**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**63,043,050.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Senang**	**100.00**	**66,195,202.50**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	1	1	1	63,043,050.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	66,195,202.50	Kecamatan Tanjung Senang

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,937,184,467.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Senang**	**100.00**	**3,084,043,690.35**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,937,184,467.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	3,084,043,690.35	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,230,468,215.34**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**	**Kecamatan Tanjung Senang**	**80.00**	**1,291,991,626.11**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**980,468,215.34**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Senang**	**80.00**	**1,029,491,626.11**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	980,468,215.34	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	1,029,491,626.11	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80.00**			**80.00**	**250,000,000.00**					**Kecamatan Tanjung Senang**	**80.00**	**262,500,000.00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Tanjung Senang

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,120,382,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**	**Kecamatan Tanjung Senang**	**100.00**	**2,226,401,100.00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,120,382,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Senang**	**100.00**	**2,226,401,100.00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,095,632,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	2,200,413,600.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	24,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	25,987,500.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Tanjung Senang**	**1.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Senang**	**100.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	24,806,250.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	120	20	20	20	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	20	33,075,000.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Tanjung Senang**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Senang**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	6	1	1	1	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	33,075,000.00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Senang	1	24,806,250.00	Kecamatan Tanjung Senang
					KECAMATAN SUKABUMI							**16,452,906,683.19**							**17,275,552,017.34**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**7,962,949,530.73**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**8,361,097,007.26**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**31,936,353.75**						**98.00**	**33,533,171.44**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	10,645,451.25	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	11,177,723.81	Kecamatan Sukabumi

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	2	1	1		10,645,451.25	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi		11,177,723.81	Kecamatan Sukabumi
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4			1						1		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	10,645,451.25	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	11,177,723.81	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**6,020,537,863.76**						**98.00**	**6,321,564,756.95**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	2	1	1		5,906,374,513.76	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi		6,201,693,239.45	Kecamatan Sukabumi
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	40			40							50		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	2	1	1		114,163,350.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi		119,871,517.50	Kecamatan Sukabumi
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**58,976,925.00**						**98.00**	**61,925,771.25**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	5,589,675.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	5,869,158.75	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	11,571,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	12,149,550.00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	9,423,750.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	9,894,937.50	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	11,812,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	12,403,125.00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	9,555,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	10,032,750.00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	2	1	1		11,025,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi		11,576,250.00	Kecamatan Sukabumi
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**38,115,000.00**						**98.00**	**40,020,750.00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	11,025,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	2	11,576,250.00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	9,450,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	2	9,922,500.00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	17,640,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	2	18,522,000.00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**1,386,209,047.97**						**98.00**	**1,455,519,500.36**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	2	1	1		28,190,925.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi		29,600,471.25	Kecamatan Sukabumi
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	2	1	1		1,358,018,122.97	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi		1,425,919,029.11	Kecamatan Sukabumi
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**427,174,340.25**						**98.00**	**448,533,057.26**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	36,969,114.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	38,817,569.70	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	1	10	272,891,232.60	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	10	286,535,794.23	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	1	1	3	1,102,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	3	1,157,625.00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	1	1	2	330,750.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	2	347,287.50	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1	1	6	102,547,108.65	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	6	107,674,464.08	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	13,333,635.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	14,000,316.75	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**4,097,850,922.46**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Sukabumi**	**100.00**	**4,302,743,468.58**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**46,305,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Sukabumi**	**100.00**	**48,620,250.00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	1	1	1	46,305,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	48,620,250.00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**4,051,545,922.46**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Sukabumi**	**100.00**	**4,254,123,218.58**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	4,051,545,922.46	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	4,254,123,218.58	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,542,505,923.75**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**	**Kecamatan Sukabumi**	**80.00**	**1,619,631,219.94**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,242,505,923.75**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Sukabumi**	**80.00**	**1,304,631,219.94**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	1,242,505,923.75	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	1,304,631,219.94	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80.00**			**80.00**	**300,000,000.00**					**Kecamatan Sukabumi**	**80.00**	**315,000,000.00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Sukabumi

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,739,350,306.25**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**	**Kecamatan Sukabumi**	**100.00**	**2,876,317,821.56**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,739,350,306.25**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Sukabumi**	**100.00**	**2,876,317,821.56**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,714,600,306.25	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	2,850,330,321.56	Kecamatan Sukabumi
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	24,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	25,987,500.00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Sukabumi**	**1.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Sukabumi**	**100.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	24,806,250.00	Kecamatan Sukabumi

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	120	20	20	20	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	20	33,075,000.00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Sukabumi**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Sukabumi**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	6	1	1	1	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	33,075,000.00	Kecamatan Sukabumi
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Sukabumi	1	24,806,250.00	Kecamatan Sukabumi
					KECAMATAN KEMILING							**21,542,744,479.56**							**22,543,955,339.91**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**8,979,889,009.56**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**9,428,883,460.04**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**11,340,000.00**						**98.00**	**11,907,000.00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	3,780,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	3,969,000.00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	2	1	1		3,780,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling		3,969,000.00	Kecamatan Kemiling
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	3,780,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	3,969,000.00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**7,082,748,101.31**						**98.00**	**7,436,885,506.38**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	2	1	1		6,984,638,201.31	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling		7,333,870,111.38	Kecamatan Kemiling
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	63			63							63		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	2	1	1		98,109,900.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling		103,015,395.00	Kecamatan Kemiling
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**116,527,101.60**						**98.00**	**122,353,456.68**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	11,316,915.75	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	11,882,761.54	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	42,086,023.35	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	44,190,324.52	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	1,697,587.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	1,782,466.88	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	22,050,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	23,152,500.00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	16,276,575.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	17,090,403.75	Kecamatan Kemiling

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	2	1	1		23,100,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling		24,255,000.00	Kecamatan Kemiling
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**63,000,000.00**							**98.00**	**66,150,000.00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	1	1	2	24,675,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2	25,908,750.00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	16,800,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2	17,640,000.00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	21,525,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2	22,601,250.00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**1,042,660,290.00**							**98.00**	**1,094,793,304.50**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	2	1	1		43,260,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling		45,423,000.00	Kecamatan Kemiling
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	2	1	1		999,400,290.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling		1,049,370,304.50	Kecamatan Kemiling
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**663,613,516.65**							**98.00**	**696,794,192.48**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	1	1	2	35,208,863.55	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	36,969,306.73	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	1	1	20	382,179,653.10	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	5	401,288,635.76	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	1	1	5	4,200,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	5	4,410,000.00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	1	1	4	4,200,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	4	4,410,000.00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	1	1	11	231,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	8	242,550,000.00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	5	6,825,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	7,166,250.00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**6,507,747,697.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Kemiling**	**100.00**	**6,833,135,082.38**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**84,220,500.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Kemiling**	**100.00**	**88,431,525.00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	1	1	1	84,220,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	88,431,525.00	Kecamatan Kemiling

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**6,423,527,197.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Kemiling**	**100.00**	**6,744,703,557.38**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	6,423,527,197.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	6,744,703,557.38	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,968,527,272.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**	**Kecamatan Kemiling**	**80.00**	**1,991,027,272.50**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,518,527,272.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Kemiling**	**80.00**	**1,518,527,272.50**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	1,518,527,272.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	1,518,527,272.50	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80.00**			**80.00**	**450,000,000.00**					**Kecamatan Kemiling**	**80.00**	**472,500,000.00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	9,000			2,250	45,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2,250	47,250,000.00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	9,000			2,250	45,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2,250	47,250,000.00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	9,000			2,250	45,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2,250	47,250,000.00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	9,000			2,250	45,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2,250	47,250,000.00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	9,000			2,250	45,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2,250	47,250,000.00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	9,000			2,250	45,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2,250	47,250,000.00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	9,000			2,250	45,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2,250	47,250,000.00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	9,000			2,250	45,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2,250	47,250,000.00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	9,000			2,250	45,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2,250	47,250,000.00	Kecamatan Kemiling

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	9,000			2,250	45,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	2,250	47,250,000.00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,976,330,500.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**	**Kecamatan Kemiling**	**100.00**	**4,175,147,025.00**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,976,330,500.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Kemiling**	**100.00**	**4,175,147,025.00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	3,951,580,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	4,149,159,525.00	Kecamatan Kemiling
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	24,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	25,987,500.00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Kemiling**	**1.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Kemiling**	**100.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	24,806,250.00	Kecamatan Kemiling
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	120	20	20	20	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	20	33,075,000.00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Kemiling**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Kemiling**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	6	1	1	1	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	33,075,000.00	Kecamatan Kemiling
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kemiling	1	24,806,250.00	Kecamatan Kemiling
					KECAMATAN ENGGAL							**12,634,671,097.05**							**13,266,404,651.90**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**5,895,859,914.15**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**6,190,652,909.86**	**Kecamatan Enggal**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**39,538,800.00**						**98.00**	**41,515,740.00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	13,179,600.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	13,838,580.00	Kecamatan Enggal

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	2	1	1		13,179,600.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal		13,838,580.00	Kecamatan Enggal
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4			1						1		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	13,179,600.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	13,838,580.00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**4,782,948,458.55**						**98.00**	**5,022,095,881.48**	**Kecamatan Enggal**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	2	1	1		4,696,008,458.55	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal		4,930,808,881.48	Kecamatan Enggal
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	38			38							38		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	2	1	1		86,940,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal		91,287,000.00	Kecamatan Enggal
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**75,463,560.90**						**98.00**	**79,236,738.95**	**Kecamatan Enggal**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	1,894,243.05	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	1,988,955.20	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	16,687,197.45	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	17,521,557.32	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	16,559,214.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	17,387,174.70	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	12,075,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	12,678,750.00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	11,972,906.40	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	12,571,551.72	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	2	1	1		16,275,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal		17,088,750.00	Kecamatan Enggal
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**37,275,000.00**						**98.00**	**39,138,750.00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10		2	2	15,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	2	16,537,500.00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8		2	2	11,025,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	2	11,576,250.00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10		2	2	10,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	2	11,025,000.00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**663,726,000.00**						**98.00**	**696,912,300.00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	2	1	1		18,900,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal		19,845,000.00	Kecamatan Enggal
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	2	1	1		644,826,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal		677,067,300.00	Kecamatan Enggal
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**296,908,094.70**						**98.00**	**311,753,499.44**	**Kecamatan Enggal**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	35,208,692.40	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	36,969,127.02	Kecamatan Enggal

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	1	10	227,794,062.30	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	10	239,183,765.42	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	1	1	5	6,300,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	5	6,615,000.00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	1	1	5	2,887,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	5	3,031,875.00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1	1	6	12,470,640.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	6	13,094,172.00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	12,247,200.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	12,859,560.00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,154,695,264.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Enggal**	**100.00**	**3,312,430,027.20**	**Kecamatan Enggal**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**43,270,500.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Enggal**	**100.00**	**45,434,025.00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	1	1	1	43,270,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	45,434,025.00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,111,424,764.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Enggal**	**100.00**	**3,266,996,002.20**	**Kecamatan Enggal**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	3,111,424,764.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	3,266,996,002.20	Kecamatan Enggal
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,262,382,579.90**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**	**Kecamatan Enggal**	**80.00**	**1,325,501,708.90**	**Kecamatan Enggal**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**962,382,579.90**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Enggal**	**80.00**	**1,010,501,708.90**	**Kecamatan Enggal**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	962,382,579.90	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	1,010,501,708.90	Kecamatan Enggal
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80.00**			**80.00**	**300,000,000.00**					**Kecamatan Enggal**	**80.00**	**315,000,000.00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Enggal

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,211,483,339.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal**	**Kecamatan Enggal**	**100.00**	**2,322,057,505.95**	**Kecamatan Enggal**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,211,483,339.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Enggal**	**100.00**	**2,322,057,505.95**	**Kecamatan Enggal**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,186,733,339.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	2,296,070,005.95	Kecamatan Enggal
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	24,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	25,987,500.00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Enggal**	**1.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Enggal**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Enggal**	**100.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	24,806,250.00	Kecamatan Enggal
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	120	20	20	20	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	20	33,075,000.00	Kecamatan Enggal

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Enggal**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Enggal**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Enggal**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	6	1	1	1	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	33,075,000.00	Kecamatan Enggal
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Enggal	1	24,806,250.00	Kecamatan Enggal
												-							-	
					KECAMATAN KEDAMAIAN							**14,163,170,755.08**							**14,871,329,292.84**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**6,464,488,228.33**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**6,787,712,639.75**	**Kecamatan Kedamaian**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**6,300,000.00**						**98.00**	**6,615,000.00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	2,100,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	2,205,000.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	2	1	1		2,100,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian		2,205,000.00	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	2,100,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	2,205,000.00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**4,940,757,146.38**						**98.00**	**5,187,795,003.70**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	2	1	1		4,857,597,146.38	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian		5,100,477,003.70	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	42			42							42		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	2	1	1		83,160,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian		87,318,000.00	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**73,787,280.00**						**98.00**	**77,476,644.00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	3,275,317.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	3,439,083.38	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	18,375,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	19,293,750.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	8,540,962.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	8,968,010.63	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	16,821,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	17,662,050.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	15,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	16,537,500.00	Kecamatan Kedamaian

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	2	1	1		11,025,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian		11,576,250.00	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**35,661,596.23**						**98.00**	**37,444,676.04**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	14,136,596.23	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	2	14,843,426.04	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	10,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	2	11,025,000.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	11,025,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	2	11,576,250.00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**1,082,938,500.00**						**98.00**	**1,137,085,425.00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	2	1	1		15,330,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian		16,096,500.00	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	2	1	1		1,067,608,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian		1,120,988,925.00	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**325,043,705.72**						**98.00**	**341,295,891.01**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	35,208,692.40	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	36,969,127.02	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	1	10	240,761,894.10	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	10	252,799,988.81	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	1	1	5	2,100,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	5	2,205,000.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	1	1	5	5,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	5	5,512,500.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	1	1	7	27,023,119.20	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	7	28,374,275.16	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	14,700,000.02	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	15,435,000.02	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,390,522,439.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Kedamaian**	**100.00**	**3,560,048,561.48**	**Kecamatan Kedamaian**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**36,414,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Kedamaian**	**100.00**	**38,234,700.00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	1	1	1	36,414,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	38,234,700.00	Kecamatan Kedamaian

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,354,108,439.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Kedamaian**	**100.00**	**3,521,813,861.48**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	3,354,108,439.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	3,521,813,861.48	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,756,939,388.75**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**	**Kecamatan Kedamaian**	**80.00**	**1,844,786,358.19**	**Kecamatan Kedamaian**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,406,939,388.75**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Kedamaian**	**80.00**	**1,477,286,358.19**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	1,406,939,388.75	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	1,477,286,358.19	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80.00**			**80.00**	**350,000,000.00**					**Kecamatan Kedamaian**	**80.00**	**367,500,000.00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	7,000			1,750	35,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1,750	36,750,000.00	Kecamatan Kedamaian

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	04			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	%	100.00	100.00	100.00	100.00	2,440,970,698.50	Bandar Lampung	APBD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan	Kecamatan Kedamaian	100.00	2,563,019,233.43	Kecamatan Kedamaian
7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	%	100.00	100.00	100.00	100.00	2,440,970,698.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	100.00	2,563,019,233.43	Kecamatan Kedamaian
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,416,220,698.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	2,537,031,733.43	Kecamatan Kedamaian
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	24,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	25,987,500.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	05			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	100.00	100.00	100.00	100.00	55,125,000.00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Kedamaian	1.00	57,881,250.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	%	100.00	100.00	100.00	100.00	55,125,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	100.00	57,881,250.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	24,806,250.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	120	20	20	20	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	20	33,075,000.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	06			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	90.00	90.00	90.00	90.00	55,125,000.00	Bandar Lampung	APBD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Kecamatan Kedamaian	90.00	57,881,250.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	06	2.01		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	90.00	90.00	90.00	90.00	55,125,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	90.00	57,881,250.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	6	1	1	1	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	33,075,000.00	Kecamatan Kedamaian
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Kedamaian	1	24,806,250.00	Kecamatan Kedamaian
												-							-	
					KECAMATAN TELUKBETUNG TIMUR							**12,008,586,591.19**							**12,609,015,920.75**	
7	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	98.00	98.00	98.00	98.00	5,505,234,204.94			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98.00	5,780,495,915.19	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	%	98.00	98.00	98.00	98.00	79,347,975.00						98.00	83,315,373.75	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	25,049,325.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	26,301,791.25	Kecamatan Telukbetung Timur

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	2	1	1		29,249,325.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur		30,711,791.25	Kecamatan Telukbetung Timur
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4			1						1		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	25,049,325.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	26,301,791.25	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**3,649,679,341.91**						**98.00**	**3,832,163,309.01**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	2	1	1		3,547,808,341.91	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur		3,725,198,759.01	Kecamatan Telukbetung Timur
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	25			25							25		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	2	1	1		101,871,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur		106,964,550.00	Kecamatan Telukbetung Timur
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**94,842,798.75**						**98.00**	**99,584,938.69**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	4,429,845.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	4,651,337.25	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	22,050,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	23,152,500.00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	18,525,858.75	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	19,452,151.69	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	16,537,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	17,364,375.00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	17,549,595.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	18,427,074.75	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	2	1	1		15,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur		16,537,500.00	Kecamatan Telukbetung Timur
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**124,715,322.59**						**98.00**	**130,951,088.72**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	1	1	3	82,963,125.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	3	87,111,281.25	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	17,497,197.59	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	2	18,372,057.47	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	24,255,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	25,467,750.00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**1,240,202,250.00**						**98.00**	**1,302,212,362.50**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	2	1	1		83,018,250.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur		87,169,162.50	Kecamatan Telukbetung Timur
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	2	1	1		1,157,184,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur		1,215,043,200.00	Kecamatan Telukbetung Timur
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**316,446,516.69**						**98.00**	**332,268,842.52**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	36,969,127.02	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	38,817,583.37	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	1	10	200,108,414.67	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	10	210,113,835.40	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	1	1	3	3,307,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	3	3,472,875.00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	1	1	3	3,583,125.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	3	3,762,281.25	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	49,612,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	52,093,125.00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	22,865,850.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	24,009,142.50	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,852,740,248.75**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Telukbetung Timur**	**100.00**	**2,995,377,261.19**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**39,348,750.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Timur**	**100.00**	**41,316,187.50**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	1	1	1	39,348,750.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	41,316,187.50	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,813,391,498.75**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Timur**	**100.00**	**2,954,061,073.69**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,813,391,498.75	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	2,954,061,073.69	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,461,070,312.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**	**Kecamatan Telukbetung Timur**	**80.00**	**1,534,123,828.13**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,161,070,312.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Timur**	**80.00**	**1,219,123,828.13**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	1,161,070,312.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	1,219,123,828.13	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80.00**			**80.00**	**300,000,000.00**					**Kecamatan Telukbetung Timur**	**80.00**	**315,000,000.00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Timur

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,079,291,825.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**	**Kecamatan Telukbetung Timur**	**100.00**	**2,183,256,416.25**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,079,291,825.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Timur**	**100.00**	**2,183,256,416.25**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,054,541,825.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	2,157,268,916.25	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	24,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	25,987,500.00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Telukbetung Timur**	**1.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Timur**	**100.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	24,806,250.00	Kecamatan Telukbetung Timur

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	120	20	20	20	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	20	33,075,000.00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Telukbetung Timur**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Timur**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	6	1	1	1	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	33,075,000.00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Timur	1	24,806,250.00	Kecamatan Telukbetung Timur
												-							-	
					KECAMATAN BUMI WARAS							**13,435,005,394.92**							**13,856,287,391.83**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**5,517,218,244.92**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**6,464,488,228.33**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**39,538,800.00**						**98.00**	**6,300,000.00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	13,179,600.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	2,100,000.00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	2	1	1		13,179,600.00	Bandar Lamoune	APBD			Kecamatan Bumi Waras		2,100,000.00	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4			1						1		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	13,179,600.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	2,100,000.00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**4,015,765,388.34**						**98.00**	**4,940,757,146.38**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	2	1	1		3,929,140,388.34	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras		4,857,597,146.38	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	31			31							31		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	2	1	1		86,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras		83,160,000.00	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**97,672,908.90**						**98.00**	**73,787,280.00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	8,688,750.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	3,275,317.50	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	28,973,656.95	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	18,375,000.00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	12,162,001.95	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	8,540,962.50	Kecamatan Bumi Waras

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	15,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	16,821,000.00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	11,098,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	15,750,000.00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	2	1	1		21,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras		11,025,000.00	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**49,842,698.33**						**98.00**	**35,661,596.23**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	1	2	2	15,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	2	14,136,596.23	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	2	2	18,342,698.33	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	2	10,500,000.00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	2	2	15,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	2	11,025,000.00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**1,038,187,500.00**						**98.00**	**1,082,938,500.00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	2	1	1		22,050,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras		15,330,000.00	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	2	1	1		1,016,137,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras		1,067,608,500.00	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**276,210,949.35**						**98.00**	**325,043,705.72**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	35,208,692.40	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	35,208,692.40	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	1	10	167,376,256.95	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	10	240,761,894.10	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	1	1	5	15,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	5	2,100,000.00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	1	1	5	15,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	5	5,250,000.00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1	1	6	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	6	27,023,119.20	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	10,626,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	14,700,000.02	Kecamatan Bumi Waras

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,822,726,915.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Bumi Waras**	**100.00**	**3,232,623,690.00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**33,152,175.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Bumi Waras**	**100.00**	**38,234,700.00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	1	1	1	33,152,175.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	38,234,700.00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3,789,574,740.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Bumi Waras**	**100.00**	**3,194,388,990.00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	3,789,574,740.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	3,194,388,990.00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,487,291,650.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**	**Kecamatan Bumi Waras**	**80.00**	**1,602,442,275.00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,237,291,650.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Bumi Waras**	**80.00**	**1,339,942,275.00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	1,237,291,650.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	1,339,942,275.00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80.00**			**80.00**	**250,000,000.00**					**Kecamatan Bumi Waras**	**80.00**	**262,500,000.00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Bumi Waras

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,497,518,585.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**	**Kecamatan Bumi Waras**	**100.00**	**2,440,970,698.50**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,497,518,585.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Bumi Waras**	**100.00**	**2,440,970,698.50**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,472,768,585.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	2,416,220,698.50	Kecamatan Bumi Waras
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	24,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	24,750,000.00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Bumi Waras**	**1.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Bumi Waras**	**100.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	24,806,250.00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	120	20	20	20	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	20	33,075,000.00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Bumi Waras**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Bumi Waras**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	6	1	1	1	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	33,075,000.00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Bumi Waras	1	24,806,250.00	Kecamatan Bumi Waras

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
												-							-	
					KECAMATAN LABUHAN RATU							**12,712,737,561.19**								**13,334,874,439.25**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**6,688,440,167.44**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**7,022,862,175.81**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**64,527,750.00**						**98.00**	**67,754,137.50**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	21,509,250.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	22,584,712.50	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	2	1	1		21,509,250.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu		22,584,712.50	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4			1						1		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	21,509,250.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	22,584,712.50	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**5,384,470,138.54**						**98.00**	**5,653,693,645.47**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	2	1	1		5,294,065,138.54	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu		5,558,768,395.47	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	55			55							55		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	2	1	1		90,405,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu		94,925,250.00	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**122,479,103.25**						**98.00**	**128,603,058.41**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	21,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	22,050,000.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	26,288,027.85	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	27,602,429.24	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	21,935,075.40	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	23,031,829.17	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	24,150,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	25,357,500.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	18,606,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	19,536,300.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	2	1	1		10,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu		11,025,000.00	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**76,125,000.00**						**98.00**	**79,931,250.00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	24,675,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	2	25,908,750.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	11,550,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	2	12,127,500.00	Kecamatan Labuhan Ratu

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	39,900,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	2	41,895,000.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**695,467,500.00**						**98.00**	**730,240,875.00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	2	1	1		29,400,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu		30,870,000.00	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	2	1	1		666,067,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu		699,370,875.00	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**345,370,675.65**						**98.00**	**362,639,209.43**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	35,208,692.40	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	36,969,127.02	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	1	10	169,356,983.25	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	10	177,824,832.41	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	1	1	5	2,205,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	5	2,315,250.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	1	1	3	5,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	3	5,512,500.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1	1	2	115,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	2	121,275,000.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	17,850,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	18,742,500.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,763,848,981.25**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Labuhan Ratu**	**100.00**	**2,902,041,430.31**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**38,813,250.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Labuhan Ratu**	**100.00**	**40,753,912.50**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	1	1	1	38,813,250.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	40,753,912.50	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,725,035,731.25**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Labuhan Ratu**	**100.00**	**2,861,287,517.81**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,725,035,731.25	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	2,861,287,517.81	Kecamatan Labuhan Ratu

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,078,105,912.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**	**Kecamatan Labuhan Ratu**	**80.00**	**1,118,511,208.13**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**778,105,912.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Labuhan Ratu**	**80.00**	**817,011,208.13**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	778,105,912.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	817,011,208.13	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80.00**			**80.00**	**300,000,000.00**					**Kecamatan Labuhan Ratu**	**80.00**	**301,500,000.00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1,500	30,000,000.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1,500	30,000,000.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1,500	30,000,000.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1,500	30,000,000.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1,500	30,000,000.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1,500	30,000,000.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1,500	30,000,000.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1,500	30,000,000.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1,500	30,000,000.00	Kecamatan Labuhan Ratu

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,072,092,500.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**	**Kecamatan Labuhan Ratu**	**100.00**	**2,175,697,125.00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,072,092,500.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Labuhan Ratu**	**100.00**	**2,175,697,125.00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,047,342,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	2,149,709,625.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	24,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	25,987,500.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Labuhan Ratu**	**1.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Labuhan Ratu**	**100.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	24,806,250.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	120	20	20	20	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	20	33,075,000.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Labuhan Ratu**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Labuhan Ratu**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	6	1	1	1	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	33,075,000.00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Labuhan Ratu	1	24,806,250.00	Kecamatan Labuhan Ratu
												-							-	
					KECAMATAN WAY HALIM							**16,203,564,154.13**							**16,982,297,486.84**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**6,948,446,476.64**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**7,264,423,925.47**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**8,045,730.00**						**98.00**	**8,448,016.50**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	2,681,910.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	2,816,005.50	Kecamatan Way Halim

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	2	1	1		2,681,910.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim		2,816,005.50	Kecamatan Way Halim
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4			1						1		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	2,681,910.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	2,816,005.50	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**5,239,838,712.72**						**98.00**	**5,470,385,773.36**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	2	1	1		5,130,691,212.72	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim		5,387,225,773.36	Kecamatan Way Halim
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	43			43							50		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	2	1	1		109,147,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim		83,160,000.00	Kecamatan Way Halim
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**100,791,088.07**						**98.00**	**105,830,642.48**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	7,092,907.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	7,447,552.88	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	15,119,003.55	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	15,874,953.73	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	22,719,952.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	23,855,950.13	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	15,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	16,537,500.00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	19,109,224.52	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	20,064,685.75	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	2	1	1		21,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim		22,050,000.00	Kecamatan Way Halim
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**44,100,000.00**						**98.00**	**46,305,000.00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	15,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	2	16,537,500.00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	15,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	2	16,537,500.00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	1	1	1	12,600,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	13,230,000.00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**1,235,272,500.00**						**98.00**	**1,297,036,125.00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	2	1	1		29,400,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim		30,870,000.00	Kecamatan Way Halim
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	2	1	1		1,205,872,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim		1,266,166,125.00	Kecamatan Way Halim
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**320,398,445.85**						**98.00**	**336,418,368.14**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	35,208,692.40	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	36,969,127.02	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	1	10	184,851,753.45	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	10	194,094,341.12	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	1	1	3	2,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	3	2,756,250.00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	1	1	5	2,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	5	2,756,250.00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	1	1	7	89,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	7	93,712,500.00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	5,838,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	6,129,900.00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**4,685,734,077.99**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Way Halim**	**100.00**	**4,920,020,781.89**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**32,226,286.05**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Way Halim**	**100.00**	**33,837,600.35**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	1	1	1	32,226,286.05	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	33,837,600.35	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**4,653,507,791.94**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Way Halim**	**100.00**	**4,886,183,181.54**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	4,653,507,791.94	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	4,886,183,181.54	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,502,615,599.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**	**Kecamatan Way Halim**	**80.00**	**1,577,746,379.48**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,202,615,599.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Way Halim**	**80.00**	**1,262,746,379.48**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	1,202,615,599.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	1,262,746,379.48	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80.00**			**80.00**	**300,000,000.00**					**Kecamatan Way Halim**	**80.00**	**315,000,000.00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Way Halim

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6,000			1,500	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1,500	31,500,000.00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,956,518,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**	**Kecamatan Way Halim**	**100.00**	**3,104,343,900.00**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,956,518,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Way Halim**	**100.00**	**3,104,343,900.00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,931,768,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	3,078,356,400.00	Kecamatan Way Halim
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	24,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	25,987,500.00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Way Halim**	**1.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Way Halim**	**100.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	24,806,250.00	Kecamatan Way Halim

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	120	20	20	20	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	20	33,075,000.00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Way Halim**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Way Halim**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	6	1	1	1	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	33,075,000.00	Kecamatan Way Halim
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Way Halim	1	24,806,250.00	Kecamatan Way Halim
					KECAMATAN LANGKAPURA							**10,530,837,748.90**							**11,057,379,636.34**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**5,281,349,212.64**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98.00**	**5,545,416,673.27**	**Kecamatan Langkapura**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**52,589,250.00**						**98.00**	**55,218,712.50**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	21,729,750.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	22,816,237.50	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	2	1	1		15,429,750.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura		16,201,237.50	Kecamatan Langkapura
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4			1						1		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	1	1	1	15,429,750.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	16,201,237.50	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**3,941,449,591.00**						**98.00**	**4,138,522,070.55**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	2	1	1		3,852,808,591.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura		4,045,449,020.55	Kecamatan Langkapura
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	34			34							34		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	2	1	1		88,641,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura		93,073,050.00	Kecamatan Langkapura
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**77,812,107.19**						**98.00**	**81,702,712.55**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	3,527,160.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	3,703,518.00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	22,439,703.30	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	23,561,688.47	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	7,482,743.89	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	7,856,881.08	Kecamatan Langkapura

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	22,302,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	23,417,100.00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	9,460,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	9,933,525.00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	2	1	1		12,600,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura		13,230,000.00	Kecamatan Langkapura
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**71,767,500.00**							**98.00**	**75,355,875.00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	27,825,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	2	29,216,250.00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	23,100,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	2	24,255,000.00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	1	2	20,842,500.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	2	21,884,625.00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**925,155,000.00**							**98.00**	**971,412,750.00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	2	1	1		36,330,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura		38,146,500.00	Kecamatan Langkapura
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	2	1	1		888,825,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura		933,266,250.00	Kecamatan Langkapura
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**100.00**	**98.00**	**98.00**	**212,575,764.45**							**98.00**	**223,204,552.67**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	35,208,692.40	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	36,969,127.02	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	10	10	130,642,072.05	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	10	137,174,175.65	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	1	1	4	1,575,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	4	1,653,750.00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	1	1	4	3,150,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	4	3,307,500.00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1	1	6	26,250,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	6	27,562,500.00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	15,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	16,537,500.00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,255,307,901.88**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Langkapura**	**100.00**	**2,368,073,296.97**	**Kecamatan Langkapura**

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**63,043,050.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Langkapura**	**100.00**	**66,195,202.50**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	1	1	1	63,043,050.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	66,195,202.50	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,192,264,851.88**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Langkapura**	**100.00**	**2,301,878,094.47**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	2,192,264,851.88	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	2,301,878,094.47	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,142,198,951.88**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**	**Kecamatan Langkapura**	**80.00**	**1,199,308,899.47**	**Kecamatan Langkapura**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**892,198,951.88**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Langkapura**	**80.00**	**936,808,899.47**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	892,198,951.88	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	936,808,899.47	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80.00**			**80.00**	**250,000,000.00**					**Kecamatan Langkapura**	**80.00**	**262,500,000.00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Langkapura

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5,000			1,250	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1,250	26,250,000.00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**1,741,731,682.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**	**Kecamatan Langkapura**	**100.00**	**1,828,818,266.63**	**Kecamatan Langkapura**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**1,741,731,682.50**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Langkapura**	**100.00**	**1,828,818,266.63**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	1	1	1,716,981,682.50	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	1,802,830,766.63	Kecamatan Langkapura
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	1	1	1	24,750,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	25,987,500.00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Langkapura**	**1.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Langkapura**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Langkapura**	**100.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	24,806,250.00	Kecamatan Langkapura
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	120	20	20	20	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	20	33,075,000.00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Langkapura**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Langkapura**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**55,125,000.00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Langkapura**	**90.00**	**57,881,250.00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	6	1	1	1	31,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	33,075,000.00	Kecamatan Langkapura
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	1	1	1	23,625,000.00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Langkapura	1	24,806,250.00	Kecamatan Langkapura

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
8					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							25,680,105,002.87							119,550,594,584.15	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							25,680,105,002.87							119,550,594,584.15	
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							25,680,105,002.87							119,550,594,584.15	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	98.00	98.00	98.00	98.00	3,148,047,502.87			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		100.00	3,374,188,709.15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	60,000,000.00						100.00	60,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4			1	30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	30,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LPJ, LKIP, LPPD, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta TEPRA Sekretariat Daerah	Dokumen	10	5	5		30,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		30,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	20			5						5		
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,762,579,046.87						100.00	2,949,764,580.15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pendidikan yang Tersedia	Kali	28	14	14		2,674,079,046.87	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		2,861,264,580.15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan				14							14		
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Honor Pengelola Administrasi Keuangan	Bulan	24	12	12		88,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		88,500,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4			1							1		
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persen	98.00	98.00	98.00	98.00	2,500,000.00						98.00	2,500,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembayaran Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	24	12	12		2,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		2,500,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	4			1							1		
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98.00	98.00	98.00	98.00	129,736,109.00						98.00	132,191,782.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	25,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	25,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	5,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	5,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Konsumsi Rapat dan Tamu	Bulan	24	12	12		13,675,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		13,675,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4			1							1		
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	15,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	15,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Bulan	24	12	12		6,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		6,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4			1							1		
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Teraksananya Perjaanan Dinas ke Luar Daerah	Bulan	24	12	12		65,061,109.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		67,516,782.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			1							1		
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98.00	98.00	98.00	98.00	80,000,000.00						98.00	80,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Paket	2	1	1		40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		40,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	36			6							6		

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
8	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Paket	2	1	1		40,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		40,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	36			6							6		
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**63,500,000.00**							**100,000,000.00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Biaya Telepon, Air, Listrik dan Internet	Bulan	24	12	12		15,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	50,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
8	01	01	2.08	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	Bulan	24	12	12		48,500,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	50,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4			1							1		
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**49,732,347.00**							**49,732,347.00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	1	1	1	33,532,088.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Tahun	33,532,088.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	1	1	1	6,200,259.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Tahun	6,200,259.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	1 Tahun	1 Tahun	5	10,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Tahun	10,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**02**			**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Persen**	**70.00**	**70.00**	**70.00**	**70.00**	**441,000,000.00**			**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daeah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal**		**70.00**	**463,050,000.00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Persen**		**70.00**	**70.00**	**70.00**	**441,000,000.00**						**70.00**	**463,050,000.00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	02	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terciptanya Forum Keberagaman Suku dalam Bingkai NKRI di Kota Bandar Lampung	Forum	1	1	1		50,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		50,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	3			1							1		
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	600	100	100	100	141,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	163,050,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Koordinasi Pemerintah dengan TNI dalam Revolusi Mental			20 Kec	20 Kec	20 Kec	250,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20 Kec	250,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	6,000			1,000						1,000		
8	**01**	**03**			**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu**	**Persen**	**70.00**	**70.00**	**70.00**	**70.00**	**18,858,000,000.00**			**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**		**70.00**	**112,741,150,000.00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**	**Persen**	**70.00**	**70.00**	**70.00**	**70.00**	**18,858,000,000.00**						**70.00**	**112,741,150,000.00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	600	-	100	100	295,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	470,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Parpol yg Menerima Bantuan Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan	Parpol	11	11	11		18,563,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		112,271,150,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	4			1						1		
8	**01**	**04**			**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Ormas yang dibina**	**Persen**	**50.00**	**50.00**	**50.00**	**50.00**	**889,825,000.00**			**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**		**50.00**	**514,311,750.00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Laporan Keberadaan & Pembinaan ORMAS**	**Persen**	**50.00**	**50.00**	**50.00**	**50.00**	**889,825,000.00**						**50.00**	**514,311,750.00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	6	1	1	1	724,450,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		340,668,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	4			1	165,375,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		173,643,750.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**05**			**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Persentase Penanganan Konflik Keagamaan dan Ras**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**550,000,000.00**			**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**		**100.00**	**600,000,000.00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**550,000,000.00**						**100.00**	**600,000,000.00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	600	50	50	100	100,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	125,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	300	100	100	50	150,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50	175,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	6	1	1	1	300,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	300,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**06**			**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan**	**Persen**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**1,793,232,500.00**			**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan**		**80.00**	**1,857,894,125.00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
						Persentase SDM yang mempunyai kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Diniterhadap Kerawanan Konflik Sosial	**Persen**	**60.00**	**60.00**	**60.00**	**60.00**							**60.00**	
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Konflik Sosial yang terselesaikan dan Kemampuan SDM dalam Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial**	**Persen**	**70.00**	**70.00**	**70.00**	**70.00**	**1,793,232,500.00**						**70.00**	**1,857,894,125.00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Diusun	Dokumen	6	1	1	1	175,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	200,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di DAerah	Pengamanan Cuti Bersama Hari Besar Nasional dan HUT Kota Bandar Lampung	Kali	6	3	3		300,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		325,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	1,800			300						300		
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	180	1 Tim	1 Tim	30	750,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30	750,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	6	1	1	1	68,232,500.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	82,894,125.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4			1	500,000,000.00	Bandar Lampung	APBD			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	500,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					JUMLAH TOTAL							**#REF!**							**#REF!**	

TABEL 5.1

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									10,540,485,119.00	12,495,769,719.00	11,923,598,802.00	-
2	12				KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									10,540,485,119.00	12,495,769,719.00	11,923,598,802.00	
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									10,540,485,119.00	12,495,769,719.00	11,923,598,802.00	
2	**12**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Persen**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**8,967,513,499.00**	**10,949,773,199.00**	**10,561,686,127.00**	
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**31,664,805.00**	**31,664,446.00**	**31,664,446.00**	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2021, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2021, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2021, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022)	31,664,805.00	31,664,446.00	31,664,446.00	
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**		**Persen**		**100.00**	**100.00**	**6,197,143,119.00**	**6,620,655,219.00**	**6,620,655,219.00**	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan		53	53	6,040,485,119.00	6,495,769,719.00	6,495,769,719.00	
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	5	5	156,658,000.00	124,885,500.00	124,885,500.00	
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**		**Persen**		**100.00**	**100.00**	**661,928,910.00**	**647,525,033.00**	**509,437,961.00**	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	14,654,535	14,654,095.00	14,654,095.00	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	183,765,880	183,757,050.00	156,226,078.00	
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	22,225,279	22,623,497.00	22,623,497.00	
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4,005,000	7,200,000.00	7,200,000.00	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	194,549,400	194,638,000.00	155,710,400.00	
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen		12	12	6,000,000	6,000,000.00	6,000,000.00	
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	12	12	16,000,000	20,900,000.00	20,900,000.00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	12	12	190,924,221	143,257,000.00	71,628,500.00	
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		1	1	1	29,804,595	54,495,391.00	54,495,391.00	
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**565,796,665.00**	**2,117,448,501.00**	**1,867,448,501.00**	
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit		1	1	139,369,572	90,126,941.00	90,126,941.00	
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	7	7	7	396,100,621	1,877,321,560.00	1,627,321,560.00	
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	8	8	8	30,326,472	150,000,000.00	150,000,000.00	
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**1,276,800,000.00**	**1,297,560,000.00**	**1,297,560,000.00**	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	12	12	28,800,000.00	49,560,000.00	49,560,000.00	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	12	12	1,248,000,000.00	1,248,000,000.00	1,248,000,000.00	
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**		**98.00**	**98.00**	**234,180,000.00**	**234,920,000.00**	**234,920,000.00**	
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit		1.00	1.00	44,430,000	40,670,000.00	40,670,000.00	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit		3.00	3.00	49,360,000	43,370,000.00	43,370,000.00	
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit		8.00	8.00	97,390,000	107,880,000.00	107,880,000.00	
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit		2.00	2.00	43,000,000	43,000,000.00	43,000,000.00	
2	**12**	**02**			**Program Pendaftaran Penduduk**	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**	**Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**	**Persen**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**654,908,458.00**	**531,801,174.00**	**457,088,255.00**	
							Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	**Sudah**	**Sudah**	**Sudah**	**Sudah**	**Sudah**				
							IKM Pelayanan	**IKM Pelayanan**	**Persen**	**Persen**	**85.96**	**85.96**	**85.96**				
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Penerapan KTP Berbasis NIK**	**Penerapan KTP Berbasis NIK**	**Kecamatan**	**Kecamatan**	**20**	**20**	**20**	**551,099,632.00**	**384,311,617.00**	**384,311,617.00**	
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	Dokumen	12	12	12	551,099,632.00	384,311,617.00	384,311,617.00	
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**	**Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**	**Kecamatan**	**Kecamatan**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**103,808,826.00**	**147,489,557.00**	**72,776,638.00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	
2	12	02	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	Laporan	1	12	12	103,808,826.00	147,489,557.00	72,776,638.00	
2	**12**	**03**			**Program Pencatatan Sipil**	**Program Pencatatan Sipil**	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**	**Persen**	**Persen**	**99.00**	**99.00**	**99.00**	**228,555,325.00**	**232,665,367.00**	**202,665,367.00**	
							Cakupan Penerbitan Akta Nikah	**Cakupan Penerbitan Akta Nikah**	**Persen**	**Persen**	**55.00**	**55.00**	**55.00**				
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah Akta Kelahiran yang terbit**	**Jumlah Akta Kelahiran yang terbit**	**Persen**	**Persen**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**228,555,325.00**	**232,665,367.00**	**202,665,367.00**	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	Laporan	1	1	1	228,555,325.00	232,665,367.00	202,665,367.00	
2	**12**	**04**			**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update**	**Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update**	**Persen**	**Persen**	**96.00**	**96.00**	**96.00**	**689,507,837.00**	**781,529,979.00**	**702,159,053.00**	
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informsi Administrasi Kependudukan**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informsi Administrasi Kependudukan**	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	**Persen**	**Persen**	**100.00**	**44.00**	**44.00**	**689,507,837.00**	**781,529,979.00**	**702,159,053.00**	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Laporan	1	12	12	231,034,070	249,077,661.00	249,077,661.00	
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	Dokumen	1	12	12	80,187,138	175,783,808.00	175,783,808.00	
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Laporan	1	20	20	378,286,629	356,668,510.00	277,297,584.00	
								JUMLAH TOTAL						**10,540,485,119.00**	**12,495,769,719.00**	**11,923,598,802.00**	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	√			
	2.1	Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/tahun 2024				
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 2025

Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandar Lampung

YUSTAM EFFENDI, S.E., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741211 199503 1 002

Mengetahui;
Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19701018 199303 2 002

Diverifikasi:	2025	Tanda Tangan
1	Dra. Rr. DH SULISTIORINI, M.Si. NIP.19690801 199303 2 009	
	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPERIDA	
2	DIAN STIAWATI, ST, MT NIP 19810310 200501 2 006	
	JF PERENCANAAN AHLI MADYA BAPPERIDA	

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	*Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah* sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025

Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandar Lampung

YUSTAM EFFENDI, S.E., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741211 199503 1 002

Mengetahui;
Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19701018 199303 2 002

Diverifikasi:	2025	Tanda Tangan
1	Dra. Rr. DH SULISTIORINI, M.Si. NIP.19690801 199303 2 009	
	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPERIDA	
2	DIAN STIAWATI, ST, MT NIP 19810310 200501 2 006	
	JF PERENCANAAN AHLI MADYA BAPPERIDA	

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, 2025

Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandar Lampung

YUSTAM EFFENDI, S.E., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741211 199503 1 002

Mengetahui;
Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19701018 199303 2 002

Diverifikasi:	2025	Tanda Tangan
1	Dra. Rr. DH SULISTIORINI, M.Si. NIP.19690801 199303 2 009	
	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPERIDA	
2	DIAN STIAWATI, ST, MT NIP 19810310 200501 2 006	
	JF PERENCANAAN AHLI MADYA BAPPERIDA	

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang 1

1.2.Landasan Hukum..... 2

1.3.Maksud dan Tujuan 5

1.4.Sistematika Penulisan 6

BAB II PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA OPD

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD sampai dengan triwulan 2 tahun 2025 7

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

LAMPIRAN 15
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616/IV.01/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2025

BAB I.

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan / implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat OPD;
b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025;
17. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025;

I.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD Tahun 2025, yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAAN (TAHUN 2025)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2026-2030. Sebagai keberlanjutan pembangunan maka dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dirumuskan dengan mendasarkan pada evaluasi Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi, dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan serta isu-isu penting yang harus disikapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung pada Tahun 2025.

Pada tahun anggaran 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam melaksanakan urusan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung melaksanakan 3 Program, 9 Kegiatan dan 23 Sub-Kegiatan.

Pada Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Bandar Lampung memiliki Anggaran sebesar Rp. 4.593.030.198,- . Realisasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat sampai dengan Bulan Juni Tahun 2025 sebesar Rp. 1.609.920.433,- .

Rincian lebih lanjut tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung sampai dengan Bulan Juni Tahun 2025 tersaji dalam lampiran (tabel-2.1).

Formulir E. 01

EVALUASI TERHADAP HASIL KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG

KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG

PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Indikator dan Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar lampung yang Mengacu pada Saaran RKPD

1. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah : 57
2. Persentase Keterediaan Data kabupaten yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Publikasi dalam Agka Kab/Kota dalam Angka dan PDRB Kab/Kota = 75 Kemendagri : 75%
3. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) : 51%
4. Persentase PPK Aktif : 120%
5. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat : 55%

No	Saaran	Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dimutakhirkan (n-1)		Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi s/d Triwulan ke IV (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV									
(1)	(2)						(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		= [(2 / 7)*100		(13) = d + 12		(14) = 13/5 * 100%		(15)
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			97,6	26.758.578.998,75	55,2	10.845.733.676,00	62,0	4.997.655.741,00	5,36	703.269.041,00	28,59	902.616.310,00	47,68	-	18,25	-	99,85	1.605.832.351,00	107,84	35,81	91,00	12.250.833.927,00	94,09	45,92	
								Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor / Predikat	7		57		57																				Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	%	98	22.018.777.198,22	98	9.827.837.253,00	96	3.774.538.818,00	16,67	703.269.041,00	28,57	902.616.310,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	1.605.832.351,00	#DIV/0!	35,29	#DIV/0!	10.577.319.814,00	75,00	47,86	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,05		Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	%	98	315.000.000,00	98	21.291.850,00	98	6.418.500,00	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-	91,02	-	73,5	23.291.850,00	75,00	53,78	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,05	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	45.000.000,00	1	4.709.500,00		4.424.520,00													1	4.709.500,00	100	10,63	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6		3		1								0		0,00		3		50,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,05	0005	Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Dokumen	1	110.000.000,00	1	16.522.450,00		2.015.512,00													1	16.522.450,00	100	18,12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15		6		3		2						3		100		9		60		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	%	98	19.597.801.801,65	98	8.007.913.908,00	98	3.588.637.814,00	25	668.269.041,00	25	677.676.340,00	-	-	-	-	50	1.345.945.381,00	91,01	37,50	73,02	9.334.009.747,00	75	47,65	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kali	24	19.016.160.801,65	14	7.702.288.591,00		3.606.710.794,00													14	8.053.873.172,00	100	87,17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
									Orang/Bulan	22		21		20		19	668.269.041,00		667.676.340,00					19	1.335.945.381,00	100	42,50	42		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang terlaksana	Bulan	12	410.500.000,00	12	329.700.000,00		120.417.500,00													12	124.833.000,00	100	6,35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5		1		1								1	10.000.000,00	100	12,13	6		80		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Laporan	1	42.500.000,00	1	15.934.875,00		1.845.720,00													1	16.164.175,00	100	39,64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
								Jumlah laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	33		4		2		1						1		50		5		50		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	%	98	340.000.000,00	98	14.000.000,00	98	23.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	49,98	14.000.000,00	67	0,48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Sesuai dengan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan kompetensi Pegawai	%	100	145.000.000,00	100	14.000.000,00		23.000.000,00													100	14.000.000,00	100	9,66	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
								Jumlah Pegawai Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15		3		2								0		0		1		33		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	%	98	903.000.000,00	98	333.207.807,00	98	154.829.477,00	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	45,93	339.207.807,00	67	58,79	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat/ATK kantor yang tersedia	Paket	1	150.000.000,00	1	150.117.197,00		50.645.850,00													1	150.117.197,00	100	69,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5		4		1								0		0		0		80		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,06	0004	Penyediaan bahan logistik Kantor	Jumlah layanan makanan dan minuman rapat	%	100	111.500.000,00	100	41.500.000,00		13.600.000,00													100	43.100.000,00	100	87,12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
								Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5		4		1								0		0		0		80		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang tersedia	Paket	1	102.000.000,00	1	47.550.070,00		20.943.434,00													1	47.550.070,00	100	46,62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5		3		1								0		0		0		60		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Paket	1	18.500.000,00	1	31.000.000,00		400.000,00													1	13.600.000,00	100	64,44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5		3		1								0		0		1		60		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelaksanaan penyelenggaraan dinas kantor	Paket	1	180.000.000,00	0	68.733.500,00		28.065.821,00													0	68.733.500,00	0	10,18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5		4		1								0		0		4		80		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,07		Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	%	98	423.909.000,00	98	182.616.550,00	98	135.544.995,00	-	-	98	42.657.800,00	-	-	-	-	98	42.657.800,00	91,01	31,63	73,03	183.667.000,00	35,00	48,29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,07	0003	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor	Paket	1	253.000.000,00	0	24.600.000,00		12.900.312,00													0	62.697.000,00	0	24,83	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30		8		24			42.657.800,00					24	42.657.000,00	100,00	83,84	33		100,67		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	1	170.000.000,00	1	115.010.600,00		83.054.644,00													1	115.010.000,00	100	67,65	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Unit	35		13		20								0		0,00	0,00	13				Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	%	98	435.500.500,00	85	329.500.800,00	98	174.500.000,00	25	41.000.000,00	25	33.500.000,00	-	-	-	-	50	80.500.000,00	91,01	46,39	64,03	410.000.000,00	94	99,93	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Rencana Kontrak yang tersedia	Bulan	12	435.500.000,00	12	329.500.000,00		174.500.000,00													12	410.000.000,00	100	99,93	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5		3		1	41.000.000,00		33.500.000,00					1	80.500.000,00	100	46,25	4		80		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	%	98	705.403.194,57	98	236.309.870,00	98	94.930.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	45,93	209.309.870,00	67	0,26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	Unit	1	267.648.194,57	1	102.309.615,00		46.670.000,00													1	174.829.615,00	100	65,32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1		1		1								0		0		1		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,09	0007	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	8	425.723.000,00	8	100.229.033,00		37.600.000,00													8	209.309.870,00	100	17,15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8		8		8								0		0		8		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		2	13	01	2,09	0009	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara	Paket	1	92.000.000,00	1	12.310.000,00		13.720.000,00													1	12.310.000,00	100	13,38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35		12		20								0		0		12		60		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
																									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		#DIV/0!		35		100,00	47,86	
																									PREDIKAT KINERJA		#DIV/0!		SR		SR	SR	

| | | |

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan Kondisi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung serta Program Pemerintah Kota Bandar Lampung maka Perubahan pada Program dan Kegiatan yang dirancang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung pada perubahan anggaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sub-Kegiatan 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dilakukan penyesuaian dikarenakan dilakukan pergeseran untuk Honorarium Pengguna Anggaran;
2. Sub-Kegiatan 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terdapat penambahan penganggaran untuk belanja Kebuhan Alat-Alat Tulis Kantor, Tinta Printer dan Karangan Bunga;
3. Sub-Kegiatan 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dilakukan pengurangan disebabkan oleh penghentian langganan surat kabar;
4. Sub-Kegiatan 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan penambahan anggaran untuk digunakan untuk berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri;
5. Sub-Kegiatan 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dilakukan penambahan penganggaran Bahan Bakar Kendaraan Dinas untuk Kendaraan Dinas dari Sekretariat Daerah;

6. Sub-Kegiatan 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel terdapat penambahan anggaran terkait belanja perabot kantor dalam bentuk gorden dan karpet;
7. Sub-Kegiatan 2.13.01.2.06.0009 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilakukan penambahan anggaran gaji untuk P3K Paruh Waktu dan Pramubhakti;
8. Sub-Kegiatan 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba desa dan Kelurahan ditambah untuk Belanja Cendera Mata, Belanja Makan dan Minuman Rapat dan Perjalanan Dinas dalam rangka penyelenggaraan Lomba Kelurahan Berprestasi tingkat Nasional;
9. Sub-Kegiatan 2.13.05.2.01.005 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat terdapat perubahan pada Kerangka Acuan Kerja dan Rincian pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran menyesuaikan pada perubahan Kerangka Acuan Kerja dimaksud;
10. Sub-Kegiatan 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dialihkan anggarannya untuk sub-kegiatan yang dianggap lebih prioritas.

Total perubahan (Penambahan) anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 108.309.524,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), rincian rencana program dan kegiatan beserta target kinerja dalam perubahan Renja Tahun 2025 disajikan dalam tabel-3.1.

TABEL PERMINTAAN PENAMBAHAN ANGGARAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN ANGGARAN 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan						Target Capaian Kinerja			sebelum	Sesudah	+ / -	Keterangan
2						3			4	7	8	9
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sebelum	Sesudah	Satuan				
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
2	13	01			I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.814.848.039,00	3.884.115.293,00	69.267.254,00	
2	13	01	2.01		Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.418.930,00	6.418.930,00	-	
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	Dokumen	4.403.020,00	4.403.020,00	-	
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	Dokumen	2.015.910,00	2.015.910,00	-	
2	13	01	2.02		Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.215.207.014,00	3.202.367.014,00	(12.840.000,00)	
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21	21	Org / bulan	3.066.720.794,00	3.066.720.794,00	-	
2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	Dokumen	146.937.500,00	134.097.500,00	(12.840.000,00)	
2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2	2	Laporan	1.548.720,00	1.548.720,00	-	
2	13	01	2.05		Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20.000.000,00	20.000.000,00	-	
2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2	2	Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
2	13	01	2.06		Program Administrasi Umum Perangkat Daerah				172.325.100,00	213.994.354,00	41.669.254,00	
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	Paket	75.545.650,00	117.464.750,00	41.919.100,00	
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	1	Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	1	Paket	20.848.604,00	20.848.604,00	-	
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	1	Dokumen	4.800.000,00	400.000,00	(4.400.000,00)	
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	Laporan	56.130.846,00	60.281.000,00	4.150.154,00	
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				131.906.995,00	135.544.995,00	3.638.000,00	
2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	24	26	Unit	48.852.351,00	52.490.351,00	3.638.000,00	
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20	20	Unit	83.054.644,00	83.054.644,00	-	
2	13	01	2.08		Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				174.000.000,00	198.000.000,00	24.000.000,00	
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	Laporan	174.000.000,00	198.000.000,00	24.000.000,00	

2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**94.990.000,00**	**107.790.000,00**	**12.800.000,00**	
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	2	Unit	43.670.000,00	43.670.000,00	-	
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional	8	8	Unit	37.600.000,00	50.400.000,00	12.800.000,00	
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15	15	Unit	13.720.000,00	13.720.000,00	-	
2	**13**	**04**			**II. Program Administrasi Pemerintahan Desa**				**199.928.599,00**	**321.970.969,00**	**122.042.370,00**	
2	**13**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**				**199.928.599,00**	**321.970.969,00**	**122.042.370,00**	
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi penyusunan Profil Desa	1	1	Dokumen Profil Kelurahan	-	-	-	
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba desa dan Kelurahan	1	1	Dokumen	199.928.599,00	321.970.969,00	122.042.370,00	
2	**13**	**05**			**III. Program Pemberdayaan Lembaga Adat dan Kemasyarakatan Hukum Adat**				**469.944.156,00**	**386.944.156,00**	**(83.000.000,00)**	
2	**13**	**05**	**2.01**		**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**469.944.156,00**	**386.944.156,00**	**(83.000.000,00)**	
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	1	Lembaga	89.365.834,00	89.365.834,00	-	
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	1	Dokumen	72.578.322,00	72.578.322,00	-	
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	1	Laporan	58.000.000,00	-	(58.000.000,00)	
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	1	Dokumen	250.000.000,00	225.000.000,00	(25.000.000,00)	
									4.484.720.794,00	**4.593.030.418,00**	**108.309.624,00**	

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BANDAR LAMPUNG

YUSTIAN EFFENDI, S.E.,M.H.
NIP. 19741211 199503 1 002

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *community based development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan masyarakat Kota Bandar Lampung selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

LAMPIRAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA OPD	Formulir

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Organisasi	: 2-13.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Lokasi Pelaksanaan	: Kota Bandar Lampung
Latar Belakang perubahan/ dianggarkan dalam :	
Perubahan APBD	Tahun Anggaran 2025

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Hasil Program	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	98%
Keluaran Kegiatan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	98%
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Pelaksanaan : Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		Rp	%
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5	BELANJA DAERAH				Rp 134.097.500				Rp 134.097.500	Rp -	0%
5.1	BELANJA OPERASI				Rp 134.097.500				Rp 134.097.500	Rp -	0%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp 134.097.500				Rp 134.097.500	Rp -	0%
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp 1.177.500				Rp 1.177.500	Rp -	0%
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp 1.177.500				Rp 1.177.500	Rp -	0%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos				Rp 1.177.500				Rp 1.177.500	Rp -	0%
	Materai	100	Lembar	Rp 11.775,00	Rp 1.177.500	100	Lembar	Rp 11.775,00	Rp 1.177.500	Rp -	0%

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		Rp	%
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5.1.02.02	**Belanja Jasa**				Rp 132.920.000				Rp 132.920.000	Rp -	0%
5.1.02.02.01.	**Belanja Jasa Kantor**				Rp 132.920.000				Rp 132.920.000	Rp -	0%
5.1.02.02.01.0001	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**				Rp 6.000.000				Rp 6.000.000	Rp -	0%
	Pengurus Barang Pengguna SKPD Spesifikasi : Honorarium Pengurus Barang Pengguna (1 org x 12 bulan)	12	ob	Rp 500.000,00	Rp 6.000.000	12	ob	Rp 500.000,00	Rp 6.000.000	Rp -	0%
5.1.02.02.01.0027	**Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer**				Rp 22.400.000				Rp 22.400.000	Rp -	0%
	Honorarium Operator Authorisasi Pemda Online (1 org x 12 bulan)	12	Org/Bln	Rp 400.000,00	Rp 4.800.000	12	Org/Bln	Rp 400.000,00	Rp 4.800.000	Rp -	0%
	Honorarium Operator Verificator Pemda Online (1 org x 12 bulan)	12	Org/Bln	Rp 300.000,00	Rp 3.600.000	12	Org/Bln	Rp 300.000,00	Rp 3.600.000	Rp -	0%
	Honorarium Operator Creator Pemda Online (1 org x 12 bulan)	12	Org/Bln	Rp 250.000,00	Rp 3.000.000	12	Org/Bln	Rp 250.000,00	Rp 3.000.000	Rp -	0%
	Honorarium Operator RUP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat (4 org x 8 bulan)	32	Org/Bln	Rp 250.000,00	Rp 8.000.000	32	Org/Bln	Rp 250.000,00	Rp 8.000.000	Rp -	0%
	Operator SIPD (1 org x 12 bulan)	12	Org/Bln	Rp 250.000,00	Rp 3.000.000	12	Org/Bln	Rp 250.000,00	Rp 3.000.000	Rp -	0%
5.1.02.02.01.0027	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**				Rp 96.360.000				Rp 96.360.000	Rp -	0%
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Spek : diatas 100jt s/d 250jt (2 org x 12 bulan)	24	ob	Rp 1.210.000,00	Rp 29.040.000	24	ob	Rp 1.210.000,00	Rp 29.040.000	Rp -	0%
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Spek : diatas 250jt s/d 500jt (2 org x 12 bulan)	24	ob	Rp 1.410.000,00	Rp 33.840.000	24	ob	Rp 1.410.000,00	Rp 33.840.000	Rp -	0%
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 org x 12 bulan)	12	ob	Rp 880.000,00	Rp 10.560.000	12	ob	Rp 880.000,00	Rp 10.560.000	Rp -	0%
	Honorarium Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bulan)	12	ob	Rp 770.000,00	Rp 9.240.000	12	ob	Rp 770.000,00	Rp 9.240.000	Rp -	0%
	PPK PFTK Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s d Rp 5 miliar	6	ob	Rp 2.280.000,00	Rp 13.680.000	0	ob	Rp -	Rp -	-Rp 13.680.000	-100%
	Honorarium Pengguna Anggaran: Spek: Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 miliar s/d Rp. 5 miliar (1 org x 6 bulan)	0	ob	Rp -	Rp -	6	ob	Rp 2.280.000,00	Rp 13.680.000	Rp 13.680.000	#DIV/0!
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**				Rp 8.160.000				Rp 8.160.000	Rp -	0%
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : - (1 org x 12 bulan)	12	ob	Rp 680.000,00	Rp 8.160.000	12	ob	Rp 680.000,00	Rp 8.160.000	Rp -	0%
JUMLAH BELANJA DAERAH					Rp 134.097.500				Rp 134.097.500	Rp -	0%

KEPALA

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		Rp	%
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

YUSTAM EFFENDI, S.E., M.H.
NIP. 19741211 199503 1 002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA OPD	Formulir

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Organisasi	: 2-13.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Lokasi Pelaksanaan	: Kota Bandar Lampung
Latar Belakang perubahan/ dianggarkan dalam :	
Perubahan APBD	Tahun Anggaran 2025

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Hasil Program	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98%	0,98
Keluaran Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket

Kelompok Sasaran Pelaksanaan : Kota Bandar Lampung

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		Rp	%
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5	BELANJA DAERAH				Rp 90.545.650				Rp 117.464.750	Rp 26.919.100	30%
5.1	BELANJA OPERASI				Rp 90.545.650				Rp 117.464.750	Rp 26.919.100	30%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp 90.545.650				Rp 117.464.750	Rp 26.919.100	30%
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp 90.545.650				Rp 117.464.750	Rp 26.919.100	30%
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp 90.545.650				Rp 117.464.750	Rp 26.919.100	30%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp 20.314.850				Rp 39.233.950	Rp 18.919.100	93%

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
	Binder Clip Spesifikasi : No, 200 Merk Kenko	100	Kotak	Rp 13.823,00	*Rp 1.382.300*	200	Kotak	Rp 13.823,00	*Rp 2.764.600*	*Rp 1.382.300*	100%
	Odner Spesifikasi : Gobi 8403F	150	Buah	Rp 24.326,00	*Rp 3.648.900*	450	Buah	Rp 24.326,00	*Rp 10.946.700*	*Rp 7.297.800*	200%
	Pena Spesifikasi : Joyko JK 100 Hitam Biru	50	Pack	Rp 23.550,00	*Rp 1.177.500*	50	Pack	Rp 23.550,00	*Rp 1.177.500*	*Rp -*	0%
	Gunting Spesifikasi : Gunting Gunindo KC-888	8	Buah	Rp 14.435,00	*Rp 115.480*	8	Buah	Rp 14.435,00	*Rp 115.480*	*Rp -*	0%
	Post It Spesifikasi : rainbow	50	Pcs	Rp 10.239,00	*Rp 511.950*	50	Pcs	Rp 10.239,00	*Rp 511.950*	*Rp -*	0%
	Mistar Spesifikasi : Besi 30 cm	8	Buah	Rp 9.623,00	*Rp 76.984*	8	Buah	Rp 9.623,00	*Rp 76.984*	*Rp -*	0%
	Penghapus Spesifikasi : Fiber Castel	6	Pack	Rp 30.717,00	*Rp 184.302*	6	Pack	Rp 30.717,00	*Rp 184.302*	*Rp -*	0%
	Tip Ex Spesifikasi : Kenko ke-01	12	Buah	Rp 6.143,00	*Rp 73.716*	12	Buah	Rp 6.143,00	*Rp 73.716*	*Rp -*	0%
	Isi Staples Spesifikasi : Seri : Max No, 3	50	Kotak	Rp 8.191,00	*Rp 409.550*	50	Kotak	Rp 8.191,00	*Rp 409.550*	*Rp -*	0%
	Buku Agenda Spesifikasi : Prioritas Kerja	20	Buah	Rp 22.989,00	*Rp 459.780*	20	Buah	Rp 22.989,00	*Rp 459.780*	*Rp -*	0%
	Stop Map Folio Biasa Spesifikasi : -	1500	Buah	Rp 2.969,00	*Rp 4.453.500*	1500	Buah	Rp 2.969,00	*Rp 4.453.500*	*Rp -*	0%
	Map Spesifikasi : Snelhecter Bahan : Karton Diamond Biola	500	Lembar	Rp 10.239,00	*Rp 5.119.500*	1500	Lembar	Rp 10.239,00	*Rp 15.358.500*	*Rp 10.239.000*	200%
	Buku Agenda Spesifikasi : KM BAMBOO	4	Buah	Rp 16.382,00	*Rp 65.528*	4	Buah	Rp 16.382,00	*Rp 65.528*	*Rp -*	0%
	Amplop Spesifikasi : Amplop Putih Paperline 90pps	20	Kotak	Rp 25.598,00	*Rp 511.960*	20	Kotak	Rp 25.598,00	*Rp 511.960*	*Rp -*	0%
	Amplop Kop Spesifikasi : Linen Abc - Uk, 11 X 20 Cm - Isi 100 Lembar,	20	Box	Rp 51.195,00	*Rp 1.023.900*	20	Box	Rp 51.195,00	*Rp 1.023.900*	*Rp -*	0%
	Stempel (Dinas Pemberdayaan Masyarakat) Spesifikasi : -	10	Buah	Rp 110.000,00	*Rp 1.100.000*	10	Buah	Rp 110.000,00	*Rp 1.100.000*	*Rp -*	0%
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**				*Rp 39.365.700*				*Rp 39.365.700*	*Rp -*	0%
	HVS Spesifikasi : F4 60 gram Merk : Sidu	150	Pack	Rp 57.338,00	*Rp 8.600.700*	150	Pack	Rp 57.338,00	*Rp 8.600.700*	*Rp -*	0%

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan			Volume	Satuan	Harga Satuan				
1	2	3	4	5		6 = (3 x 5)	7	8	9		10 = (7 x 9)	11	12
	HVS Spesifikasi : A4 70 gram Merk : Sidu	450	Rim	Rp 53.356,00	Rp	24.010.200	450	Rim	Rp 53.356,00	Rp	24.010.200	Rp -	0%
	HVS Spesifikasi : A3 70 gram Merk : Sidu	10	Rim	Rp 112.272,00	Rp	1.122.720	10	Rim	Rp 112.272,00	Rp	1.122.720	Rp -	0%
	Continous J-PLUS Spesifikasi : Continous Form 9,5 X 11 2 Ply NCR Warna / PP	12	Box	Rp 469.340,00	Rp	5.632.080	12	Box	Rp 469.340,00	Rp	5.632.080	Rp -	0%
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**				Rp	9.215.100				Rp	21.215.100	Rp 12.000.000	130%
	Tinta Spesifikasi : Epson L3110	90	Buah	Rp 102.390,00	Rp	9.215.100	90	Buah	Rp 102.390,00	Rp	9.215.100	Rp -	0%
	Tinta Spesifikasi : Epson 008	-	Buah	Rp -			48	Buah	Rp 250.000,00	Rp	12.000.000	Rp 12.000.000	#DIV/0!
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**				Rp	1.650.000				Rp	1.650.000	Rp -	0%
	Lampu Tabung LED (Dinas Pemberdayaan Masyarakat) Spesifikasi : Philips ledtube 8W 600mm 740 tl t8 ecofit 8 Watt 6...	15	Buah	Rp 110.000,00	Rp	1.650.000	15	Buah	Rp 110.000,00	Rp	1.650.000	Rp -	0%
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**				Rp	20.000.000				Rp	16.000.000	-Rp 4.000.000	-20%
	Karangan Bunga (Dinas Pemberdayaan Masyarakat) Spesifikasi :	40	Unit	Rp 500.000,00	Rp	20.000.000	32	Unit	Rp 500.000,00	Rp	16.000.000	-Rp 4.000.000	-20%
JUMLAH BELANJA DAERAH					Rp	90.545.650				Rp	117.464.750	Rp 26.919.100	30%

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

YUSTAM EFFENDI, S.E., M.H.
NIP. 19741211 199503 1 002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA OPD	Formulir

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program	: 2.13.01 PROGRAM MENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Lokasi Pelaksanaan	: Kota Bandar Lampung
Latar Belakang perubahan/ dianggarkan dalam :	
Perubahan APBD	Tahun Anggaran 2025

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Hasil Program	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98%	98%
Keluaran Kegiatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Pelaksanaan : Kota Bandar Lampung

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5	BELANJA DAERAH				Rp 4.800.000				Rp 400.000	-Rp 4.400.000	-92%
5.1	BELANJA OPERASI				Rp 4.800.000				Rp 400.000	-Rp 4.400.000	-92%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp 4.800.000				Rp 400.000	-Rp 4.400.000	-92%
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp 4.800.000				Rp 400.000	-Rp 4.400.000	-92%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp 4.800.000				Rp 400.000	-Rp 4.400.000	-92%

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				Rp 4.800.000				Rp 400.000	-Rp 4.400.000	-92%
	Surat Kabar Harian (Dinas PMK Kota Bandar Lampung) Spesifikasi : -	12	Bulan	Rp 400.000,00	Rp 4.800.000	1	Bulan	Rp 400.000,00	Rp 400.000	-Rp 4.400.000	-92%
JUMLAH BELANJA DAERAH					Rp 4.800.000				Rp 400.000	-Rp 4.400.000	-92%

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

YUSTAM EFFENDI, S.E., M.H.
NIP. 19741211 199503 1 002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA OPD	Formulir

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Organisasi	: 2-13.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Lokasi Pelaksanaan	: Kota Bandar Lampung
Latar Belakang perubahan/ dianggarkan dalam :	
Perubahan APBD	Tahun Anggaran 2025

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Hasil Program	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	98%
Keluaran Kegiatan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	98%
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit%	9 Unit

Kelompok Sasaran Pelaksanaan : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5	BELANJA DAERAH				Rp 37.600.000				Rp 50.400.000	Rp 12.800.000	34%
5.1	BELANJA OPERASI				Rp 37.600.000				Rp 50.400.000	Rp 12.800.000	34%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp 37.600.000				Rp 50.400.000	Rp 12.800.000	34%

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		Rp	%
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5.1.02.02	**Belanja Jasa**				Rp 8.000.000				Rp 8.000.000	Rp -	0%
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**				Rp 8.000.000				Rp 8.000.000	Rp -	0%
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, bea dan Perizinan**				Rp 8.000.000				Rp 8.000.000	Rp -	0%
	Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan; Spesifikasi : -	1	Ls	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000	1	Ls	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000	Rp -	0%
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**				Rp 29.600.000				Rp 42.400.000	Rp 12.800.000	43%
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Kantor**				Rp 29.600.000				Rp 42.400.000	Rp 12.800.000	43%
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang**				Rp -				Rp 12.800.000	Rp 12.800.000	#DIV/0!
	Biaya Pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional Roda Empat					1	Ls	Rp 12.800.000,00	Rp 12.800.000	Rp 12.800.000	#DIV/0!
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua**				Rp 29.600.000				Rp 29.600.000	Rp -	0%
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	8	Unit / Tahun	Rp 3.700.000,00	Rp 29.600.000	1	Unit / Tahun	Rp 29.600.000,00	Rp 29.600.000	Rp -	0%
JUMLAH BELANJA DAERAH					Rp 37.600.000				Rp 50.400.000	Rp 12.800.000	34%

Triwulan I	:	Rp	-
Triwulan II	:	Rp	-
Triwulan III	:	Rp	-
Triwulan IV	:	Rp	-
Jumlah		**Rp**	-

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BANDAR LAMPUNG

YUSTAM EFFENDI, S.E.,M.H.
NIP. 19741211 199503 1 002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA OPD	Formulir

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Organisasi	: 2-13.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Lokasi Pelaksanaan	: Kota Bandar Lampung
Latar Belakang perubahan/ dianggarkan dalam :	
Perubahan APBD	Tahun Anggaran 2025

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Hasil Program	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	98%
Keluaran Kegiatan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	98%
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan

Kelompok Sasaran Pelaksanaan : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5	BELANJA DAERAH				Rp 56.130.846				Rp 60.281.000	Rp 4.150.154	7%
5.1	BELANJA OPERASI				Rp 56.130.846				Rp 60.281.000	Rp 4.150.154	7%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp 56.130.846				Rp 60.281.000	Rp 4.150.154	7%
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				Rp 56.130.846				Rp 60.281.000	Rp 4.150.154	7%
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp 56.130.846				Rp 60.281.000	Rp 4.150.154	7%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp 56.130.846				Rp 60.281.000	Rp 4.150.154	7%

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		Rp	%
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
	Perjalanan Dinas Biasa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat). Spesifikasi : -	1	Ls	Rp 56.130.846,00	*Rp 56.130.846*	1	Ls	Rp 60.281.000,00	*Rp 60.281.000*	*Rp 4.150.154*	7%
JUMLAH BELANJA DAERAH					Rp 56.130.846				Rp 60.281.000	*Rp 4.150.154*	7%

Triwulan I	:	Rp	-
Triwulan II	:	Rp	-
Triwulan III	:	Rp	-
Triwulan IV	:	Rp	-
Jumlah		**Rp**	**-**

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BANDAR LAMPUNG

YUSTAN EFFENDI, S.E., M.H.
NIP. 19741211 199503 1 002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA OPD	Formulir

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Organisasi	: 2-13.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Lokasi Pelaksanaan	: Kota Bandar Lampung
Latar Belakang perubahan/ dianggarkan dalam :	
Perubahan APBD	Tahun Anggaran 2025

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Hasil Program	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	98%
Keluaran Kegiatan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	98%
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	24 Unit

Kelompok Sasaran Pelaksanaan : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		Rp	%
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5	BELANJA DAERAH				Rp 48.852.351				Rp 52.490.351	Rp 3.638.000	7%
5.1	BELANJA OPERASI				Rp -				Rp 3.638.000	Rp 3.638.000	#DIV/0!
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp -				Rp 3.638.000	Rp 3.638.000	#DIV/0!
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp -				Rp 3.638.000	Rp 3.638.000	#DIV/0!
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp -				Rp 3.638.000	Rp 3.638.000	#DIV/0!

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan kantor - Perabot Kantor**				Rp -				Rp 3.638.000	Rp 3.638.000	#DIV/0!
	Gordyn ; Spesifikasi : Merk TRIKALINDO	0	-	Rp -	Rp -	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Rp 2.889.000	Rp 2.889.000	#DIV/0!
	Karpet; Spesifikasi erk ALMAYA ukuran 160 x 230	0	-	Rp -	Rp -	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Rp 749.000	Rp 749.000	#DIV/0!
5.2	BELANJA MODAL				Rp 48.852.351				Rp 48.852.351	Rp -	0%
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**				Rp 48.852.351				Rp 48.852.351	Rp -	0%
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**				Rp 48.852.351				Rp 48.852.351	Rp -	0%
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**				Rp 43.184.460				Rp 43.184.460	Rp -	0%
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**				Rp 43.184.460				Rp 43.184.460	Rp -	0%
	Kursi Rapat; Spesifikasi : Merk : CHITOSE Type CAESAR-N	20	buah	Rp 909.223,00	Rp 18.184.460	20	buah	Rp 909.223,00	Rp 18.184.460	Rp -	0%
	Belanja Modal Mebel Sofa (DinasPemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung)Spesifikasi : Premium ; 321	1	Unit	Rp 25.000.000,00	Rp 25.000.000	1	Unit	Rp 25.000.000,00	Rp 25.000.000	Rp -	0%
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**				Rp 5.667.891				Rp 5.667.891	Rp -	0%
5.2.02.05.03.0003	**Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat**				Rp 5.667.891				Rp 5.667.891	Rp -	0%
	Kursi Kantor (Dinas Pemberdayaan Masyarakat) Spesifikasi : Kursi Direktur	3	buah	Rp 1.889.297,00	Rp 5.667.891	3	buah	Rp 1.889.297,00	Rp 5.667.891	Rp -	0%
JUMLAH BELANJA DAERAH					Rp 48.852.351				Rp 52.490.351	Rp 3.638.000	7%

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

YUSTAM EFFENDI, S.E. M.H.
NIP. 19741211 199503 1 002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA OPD	Formulir

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Organisasi	: 2-13.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Lokasi Pelaksanaan	: Kota Bandar Lampung
Latar Belakang perubahan/ dianggarkan dalam :	
Perubahan APBD	Tahun Anggaran 2025

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Hasil Program	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	98%
Keluaran Kegiatan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	98%
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	2 unit

Kelompok Sasaran Pelaksanaan : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		Rp	%
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5	BELANJA DAERAH				Rp 43.670.000				Rp 56.470.000	Rp 12.800.000	29%
5.1	BELANJA OPERASI				Rp 43.670.000				Rp 56.470.000	Rp 12.800.000	29%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp 43.670.000				Rp 56.470.000	Rp 12.800.000	29%

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		Rp	%
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp 5.000.000				Rp 5.000.000	Rp -	0%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp 5.000.000				Rp 5.000.000	Rp -	0%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, bea dan Perizinan				Rp 5.000.000				Rp 5.000.000	Rp -	0%
	Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan; Spesifikasi :-	1	Ls	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000	1	Ls	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000	Rp -	0%
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp 38.670.000				Rp 51.470.000	Rp 12.800.000	33%
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Kantor				Rp 38.670.000				Rp 51.470.000	Rp 12.800.000	33%
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang				Rp 38.670.000				Rp 51.470.000	Rp 12.800.000	33%
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat; Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1	Ls	Rp 38.670.000,00	Rp 38.670.000	1	Ls	Rp 38.670.000,00	Rp 38.670.000	Rp -	0%
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas ; Spesifikasi : Kendaraan Sewa dan Bagian Umum Sekretariat Daerah					1	Ls	Rp 12.800.000,00	Rp 12.800.000	Rp 12.800.000	#DIV/0!
JUMLAH BELANJA DAERAH					Rp 43.670.000				Rp 56.470.000	Rp 12.800.000	29%

Triwulan I	:	Rp -
Triwulan II	:	Rp -
Triwulan III	:	Rp -
Triwulan IV	:	Rp -
Jumlah		**Rp -**

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BANDAR LAMPUNG

YUSTAM EFFENDI, S.E., M.H.
NIP. 19741211 199503 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REEENENCE)

TAHUN ANGGARAN 2025

Penyelenggara	:	Pemerintah Kota Bandar Lampung
Instansi	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Program	:	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
Indikator Program	:	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan	:	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Tingkat Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelaku Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan	:	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga , Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
Sub Kegiatan	:	Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya.

I. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Peningkatan Peran Komunitas dalam Penanggulangan AIDS, TBC dan Malaria (ATM) dimulai dari peningkatan pengetahuan masyarakat tentang cara penanggulangan penyakit menular tersebut. Peningkatan pengetahuan akan menghasilkan pemahaman dan diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah penyebaran AIDS, Tuberkolosis dan Malaria (ATM).

Melalui lembaga kemasrarakatan yang ada dilingkungan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) dapat berperan aktif dalam upaya-upaya mencegah terjangkitnya AIDS, Tuberkolosis dan Malaria (ATM) melalui kesepakatan bersama atau aturan-aturan bersama yang dimulai oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut. Lembaga kemasyarakatan yang berdaya untuk melakukannya adalah lembaga yang memiliki kapasitas dari segi pengetahuan, wawasan dan strategi penanggulangan.

Pencegahan dan pengendalian AIDS-Tuberkulosis-Malaria (ATM) memerlukan peran lintas sektor, dan hal ini menjadi perhatian utama dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Peraturan ini menekankan pentingnya melibatkan berbagai sektor, termasuk sektor non-kesehatan, dalam upaya penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria

b. **Dasar Hukum**

1. Perpres No. 75 Tahun 2006 junto Perpres No. 124 tahun 2016 tentang Perubahan Alas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan Aids Nasional.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (Pasal 6 Ayat 1 PKK, Posyandu, Karangtaruna, RT, RK, Toko Adat, LPM).
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
4. Permenkes Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu.

2. **Maksud dan Tujuan**

a. **Maksud**

Maksud dilaksanakannya kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) adalah untuk memberdayakan melalui upaya bimbingan, pembinaan dan pemberdayaan.

b. **Tujuan**

Memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin.

3. **Sub-Kegiatan yang dilaksanakan**

Sub-Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna).

4. **Indikator dan keluaran**

a. **Indikator**

Meningkatnya swadaya Masyarakat atau peran serta Masyarakat dalam rangka pencegahan AIDS, Tuberkolosis dan Malaria (ATM).

b. **Keluaran**

Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) yang berperan serta dalam rangka pencegahan AIDS, Tuberkolosis dan Malaria (ATM) di lingkungannya masing-masing.

5. **Cara pelaksanaan Sub-Kegiatan**

a. **Metode Pelaksanaan Sub-Kegiatan**

Pembinaan terhadap Percepatan Penurunan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) di Kota Bandar Lampung Tahun 2025 melalui kegiatan pembinaan kader kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna).

b. **Tahapan Sub-Kegiatan**
   1. Persiapan Pelaksanaan
   2. Rapat Koordinasi
   3. Pelaksanaan Pembinaan
   4. Penyusunan Laporan Akhir dan Dokumen Hasil Kegiatan

6. **Lokasi Pelaksanaan**
   Mall Pelayanan Publik Gedung Sumergo Jalan Dokter Soesilo No.2 Kota Bandar Lampung.

7. **Jadwal pelaksanaan Sub-Kegiatan**
   a. **Waktu pelaksanaan kegiatan**

   Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) direncanakan dimulai pada bulan Agustus s.d Desember 2025.

   b. **Matriks Pelaksanaan Kegiatan**

No	URAIAN KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tahap Persiapan												
2	Rapat Kordinasi												
3	Pelaksanaan Pembinaan												
4	Penyusunan Laporan Sosialisasi dan Evaluasi.												

8. **Biaya**

Sumber pembiayaan Sub Kegiatan Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) berasal dari APBD Kota Bnadar Lampung Tahun Agggaran 2025.

9. **Resiko Sub-kegiatan**

Resiko tidak tercapainya keluaran sub kegiatan adalah sebagai berikut;

- Resiko pada tahap pelaksanaan yaitu Jumlah pengajar/pelatih yang kompeten terbatas.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan Sub-Kegiatan dimaksud.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

YUSTAN EFFENDI, S.E., M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741211995031002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA OPD	Formulir

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Organisasi	: 2-13.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program	: 2.13.04. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
Lokasi Pelaksanaan	: Kota Bandar Lampung
Latar Belakang perubahan/ dianggarkan dalam :	
Perubahan APBD	Tahun Anggaran 2025

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Hasil Program	Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri	Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri	100%	100%
Keluaran Kegiatan	Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri	Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri	100%	100%
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Pelaksanaan : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		Rp	%
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5	BELANJA DAERAH				Rp 199.928.599				Rp 321.970.969	Rp 122.042.370	61%
5.1	BELANJA OPERASI				Rp 199.928.599				Rp 321.970.969	Rp 122.042.370	61%

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp 199.928.599				Rp 321.970.969	Rp 122.042.370	61%
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp 53.528.599				Rp 145.026.174	Rp 91.497.575	171%
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp 53.528.599				Rp 145.026.174	Rp 91.497.575	171%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp 1.163.975				Rp 1.163.975	Rp -	0%
	Blok Note A4 Peperline	25	buah	Rp 12.184,00	Rp 304.600	25	buah	12.184,00	Rp 304.600	Rp -	0%
	Map, Dokumen Keper Merk : 60 Lembar Meta	25	buah	Rp 10.239,00	Rp 255.975	25	buah	10.239,00	Rp 255.975	Rp -	0%
	Name tag 7x10 Enter	25	buah	Rp 4.170,00	Rp 104.250	25	buah	4.170,00	Rp 104.250	Rp -	0%
	Pena Merk : Pilot BPTP	25	buah	Rp 3.311,00	Rp 82.775	25	buah	3.311,00	Rp 82.775	Rp -	0%
	Penghapus Fester F,Castel 708	25	buah	Rp 10.239,00	Rp 255.975	25	buah	10.239,00	Rp 255.975	Rp -	0%
	Pensil Faber Castel 2B	25	buah	Rp 6.416,00	Rp 160.400	25	buah	6.416,00	Rp 160.400	Rp -	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp 15.629.124				Rp 15.629.124	Rp -	0%
	BARANG CETAKAN Binding/ Jilid Hard Cover Digital	2	buah	Rp 102.390,00	Rp 204.780	2	buah	102.390,00	Rp 204.780	Rp -	0%
	Fotocopy Folio	40000	Lembar	Rp 256,00	Rp 10.240.000	40000	Lembar	256,00	Rp 10.240.000	Rp -	0%
	Cetak foto	180	Lembar	Rp 10.239,00	Rp 1.843.020	180	Lembar	10.239,00	Rp 1.843.020	Rp -	0%
	Cetak Spanduk Baliho dan Banner	10	per meter	Rp 40.478,00	Rp 404.780	10	per meter	40.478,00	Rp 404.780	Rp -	0%
	Cetak Backdrop	4	Buah	Rp 734.136,00	Rp 2.936.544	4	Buah	734.136,00	Rp 2.936.544	Rp -	0%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos				Rp 235.500				Rp 235.500	Rp -	0%
	Materai	20	Lembar	Rp 11.775,00	Rp 235.500	20	Lembar	11.775,00	Rp 235.500	Rp -	0%
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata								Rp 12.500.000	Rp 12.500.000	#DIV/0!
	Belanja Souvenir Kain Tapis					1	ls	12.500.000,00	Rp 12.500.000		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rapat Persiapan				Rp 36.500.000				Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	55%
	Nasi Kotak 2 hari x 30	60	kotak	Rp 35.000,00	Rp 2.100.000	60	kotak	35.000,00	Rp 2.100.000	Rp -	0%
	Snack 2 hari x 30	60	kotak	Rp 15.000,00	Rp 900.000	60	kotak	15.000,00	Rp 900.000	Rp -	0%
	Pembinaan sebelum penilaian lomba										
	Nasi Kotak 3 hari x 30	90	kotak	Rp 35.000,00	Rp 3.150.000	90	kotak	35.000,00	Rp 3.150.000	Rp -	0%
	Snack 3hari x 30	90	kotak	Rp 15.000,00	Rp 1.350.000	90	kotak	15.000,00	Rp 1.350.000	Rp -	0%
	Penilaian Lomba Kelurahan										
	Prasmanan Tim Penilai	100	Porsi	Rp 50.000,00	Rp 5.000.000	100	Porsi	50.000,00	Rp 5.000.000	Rp -	0%
	Snack Tim Penilai	100	kotak	Rp 15.000,00	Rp 1.500.000	100	kotak	15.000,00	Rp 1.500.000	Rp -	0%
	Nasi kotak peserta	300	kotak	Rp 35.000,00	Rp 10.500.000	300	kotak	35.000,00	Rp 10.500.000	Rp -	0%
	Snack peserta	300	kotak	Rp 15.000,00	Rp 4.500.000	300	kotak	15.000,00	Rp 4.500.000	Rp -	0%
	Pembinaan input data										
	Nasi kotak Tim Pembina 5 hari x 30 Orang	150	kotak	Rp 35.000,00	Rp 5.250.000	150	kotak	35.000,00	Rp 5.250.000	Rp -	0%
	Snack Tim Pembina 5 hari x 30 Orang	150	kotak	Rp 15.000,00	Rp 2.250.000	150	kotak	15.000,00	Rp 2.250.000	Rp -	0%

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
	Acara Persiapan Lomba Tingkat nasional										
	Nasi Kotak				Rp -	120	kotak	35.000,00	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000	#DIV/0!
	Snack				Rp -	120	kotak	15.000,00	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	#DIV/0!
	Pembinaan sebelum penilaian lomba tingkat nasional										
	Snack Tim Penilai				Rp -	90	kotak	15.000,00	Rp 1.350.000	Rp 1.350.000	#DIV/0!
	Nasi kotak peserta				Rp -	90	kotak	35.000,00	Rp 3.150.000	Rp 3.150.000	#DIV/0!
	Peserta Lomba acara tingkat nasional										
	Nasi Kotak				Rp -	100	kotak	35.000,00	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	#DIV/0!
	Snack				Rp -	100	kotak	15.000,00	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	#DIV/0!
	Pembinaan input data										
	Nasi Kotak				Rp -	90	kotak	35.000,00	Rp 3.150.000	Rp 3.150.000	#DIV/0!
	Snack				Rp -	90	kotak	15.000,00	Rp 1.350.000	Rp 1.350.000	#DIV/0!
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**				Rp -				Rp 58.997.575	Rp 58.997.575	#DIV/0!
	[illegible]	0	Stel	Rp -	Rp -	65	Stel	907.655,00	Rp 58.997.575	Rp 58.997.575	#DIV/0!
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp 146.400.000				Rp 146.400.000	Rp -	0%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp 102.400.000				Rp 102.400.000	Rp -	0%
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara dan Panitia**				Rp 1.000.000				Rp 1.000.000	Rp -	0%
	Honorarium Pembawa Acara	1	orang	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000	1	orang	1.000.000,00	Rp 1.000.000	Rp -	0%
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**				Rp 32.100.000				Rp 32.100.000	Rp -	0%
	Ketua 1 orang x 6 bulan	6	orang/bulan	Rp 750.000,00	Rp 4.500.000	6	orang/bulan	750.000,00	Rp 4.500.000	Rp -	0%
	Wakil Ketua 1 orang x 6 bulan	6	orang/bulan	Rp 600.000,00	Rp 3.600.000	6	orang/bulan	600.000,00	Rp 3.600.000	Rp -	0%
	Sekretaris 1 orang x 6 bulan	6	orang/bulan	Rp 500.000,00	Rp 3.000.000	6	orang/bulan	500.000,00	Rp 3.000.000	Rp -	0%
	Anggota 7 orang x 6 bulan	42	orang/bulan	Rp 500.000,00	Rp 21.000.000	42	orang/bulan	500.000,00	Rp 21.000.000	Rp -	0%
5.1.02.02.01.0027	**Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer**				Rp 69.300.000				Rp 69.300.000	Rp -	0%
	Honor Operator										
	Operator (Dinas PMK) 8 orang x 3 bulan	24	orang/bulan	Rp 150.000,00	Rp 3.600.000	24	orang/bulan	150.000,00	Rp 3.600.000	Rp -	0%
	Operator (Kelurahan dan Kecamatan) 126 orang x 3 bulan	438	orang/bulan	Rp 150.000,00	Rp 65.700.000	438	orang/bulan	150.000,00	Rp 65.700.000	Rp -	0%

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				Rp 44.000.000				Rp 44.000.000	Rp -	0%
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel				Rp 10.000.000				Rp 10.000.000	Rp -	0%
	Sewa kursi dan cover	340	unit	Rp 25.000,00	Rp 8.500.000	340	unit	25.000,00	Rp 8.500.000	Rp -	0%
	Sewa meja kotak dan cover	12	unit	Rp 125.000,00	Rp 1.500.000	12	unit	125.000,00	Rp 1.500.000	Rp -	0%
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio lainnya				Rp 5.000.000				Rp 5.000.000	Rp -	0%
	Sewa Sound system	1	unit	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000	1	unit	5.000.000,00	Rp 5.000.000	Rp -	0%
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum				Rp 29.000.000				Rp 29.000.000	Rp -	0%
	Sewa panggung	100	M2	Rp 250.000,00	Rp 25.000.000	100	M2	250.000,00	Rp 25.000.000	Rp -	0%
	Sewa tarup	16	Unit	Rp 250.000,00	Rp 4.000.000	16	Unit	250.000,00	Rp 4.000.000	Rp -	0%
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				Rp -				Rp 30.544.795	Rp 30.544.795	#DIV/0!
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp -				Rp 30.544.795	Rp 30.544.795	#DIV/0!
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp -				Rp 30.544.795	Rp 30.544.795	#DIV/0!
	[illegible]	0	Ls	Rp -	Rp -	1	Ls	Rp 30.544.795,00	Rp 30.544.795	Rp 30.544.795	#DIV/0!
JUMLAH BELANJA DAERAH					Rp 199.928.599				Rp 321.970.969	Rp 122.042.370	61%

Triwulan I	:	Rp	-
Triwulan II	:	Rp	-
Triwulan III	:	Rp	-
Triwulan IV	:	Rp	-
Jumlah		**Rp**	-

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BANDAR LAMPUNG

YUSTAM EFFENDI, S.E., M.H.
NIP. 19741211 199503 1 002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA OPD	Formulir

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Lokasi Pelaksanaan	: Kota Bandar Lampung
Later Belakang perubahan/ dianggarkan dalam :	
Perubahan APBD	Tahun Anggaran 2025

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Hasil Program	-	-	-	-
Keluaran Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga

Kelompok Sasaran Pelaksanaan : Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan di Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		Rp	%
1	2	3	4	5	6 = (3x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5	BELANJA DAERAH				Rp 89.365.834,00				Rp 89.365.834	Rp -	0%
5.1	BELANJA OPERASI				Rp 89.365.834,00				Rp 89.365.834	Rp -	0%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp 89.365.834,00				Rp 89.365.834	Rp -	0%
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp 84.065.834,00				Rp 84.065.834	Rp -	0%
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp 84.065.834,00				Rp 84.065.834	Rp -	0%

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Volume	Satuan	Harga Satuan			Volume	Satuan	Harga Satuan			Rp	%
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)		7	8	9	10 = (7 x 9)		11	12
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**				*Rp*	*35.125.688,00*				*Rp*	*35.125.688,00*	*Rp* -	0%
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor(fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman,ketertiban dan perlindungan masyarakat desa)												
	Album Foto (Dinas Pemberdayaan Masyarakat)												
	Spesifikasi: Album foto Jumbo 15 sheet hitam isi 180 lembar 3R/4R	1	Lembar	Rp 151.420,00	*Rp*	*151.420,00*	1	Lembar	Rp 151.420,00	*Rp*	*151.420,00*	*Rp* -	0%
	[-] Peserta Kegiatan												
	Blok Note												
	Spesifikasi: A4 Peperline	412	Buah	Rp 12.184,00	*Rp*	*5.019.808,00*	412	Buah	Rp 12.184,00	*Rp*	*5.019.808,00*	*Rp* -	0%
	Name Tag												
	Spesifikasi: Plastik Gantung	412	Buah	Rp 32.765,00	*Rp*	*13.499.180,00*	412	Buah	Rp 32.765,00	*Rp*	*13.499.180,00*	*Rp* -	0%
	Pena												
	Spesifikasi: Merk : Pilot Baliner	412	Buah	Rp 20.316,00	*Rp*	*8.370.192,00*	412	Buah	Rp 20.316,00	*Rp*	*8.370.192,00*	*Rp* -	0%
	Penghapus												
	Spesifikasi: Fester F,Castel 708	412	Buah	Rp 10.239,00	*Rp*	*4.218.468,00*	412	Buah	Rp 10.239,00	*Rp*	*4.218.468,00*	*Rp* -	0%
	Pensil												
	Spesifikasi: Faber Castel 2B	412	Buah	Rp 6.416,00	*Rp*	*2.643.392,00*	412	Buah	Rp 6.416,00	*Rp*	*2.643.392,00*	*Rp* -	0%
	Stop Map Folio Biasa												
	Spesifikasi: -	412	Buah	Rp 2.969,00	*Rp*	*1.223.228,00*	412	Buah	Rp 2.969,00	*Rp*	*1.223.228,00*	*Rp* -	0%
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**				*Rp*	*4.950.146,00*				*Rp*	*4.950.146,00*	*Rp* -	0%
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				*Rp*	*4.950.146,00*				*Rp*	*4.950.146,00*	*Rp* -	0%
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Peserta Kegiatan												
	Cetak Piagam /Sertifikat												
	Spesifikasi:	412	Lembar	Rp 5.120,00	*Rp*	*2.109.440,00*	412	Lembar	Rp 5.120,00	*Rp*	*2.109.440,00*	*Rp* -	0%
	[-] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak(fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman,ketertiban dan perlindungan masyarakat desa)												
	BARANG CETAKAN Binding/ Jilid Hard Cover Digital												
	Spesifikasi: Hard cover skripsi/ Tesis/ Desertasi	5	Buah	Rp 102.390,00	*Rp*	*511.950,00*	5	Buah	Rp 102.390,00	*Rp*	*511.950,00*	*Rp* -	0%

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan			Volume	Satuan	Harga Satuan			Rp	%
1	2	3	4	5		6 = (3 x 5)	7	8	9		10 = (7 x 9)	11	12
	Cetak Foto Spesifikasi: -	180	Pcs	Rp 10.239,00	Rp	1.843.020,00	180	Pcs	Rp 10.239,00	Rp	1.843.020,00	Rp -	0%
	Cetak Spanduk Baliho dan Banner Spesifikasi:	12	Meter	Rp 40.478,00	Rp	485.736,00	12	Meter	Rp 40.478,00	Rp	485.736,00	Rp -	0%
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**				Rp	43.990.000,00				Rp	43.990.000,00	Rp -	0%
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**												
	[-] rapat persiapan												
	Konsumsi Rapat, Makanan dan Minuman di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Spesifikasi: Nasi Kotak	40	Kotak	Rp 35.000,00	Rp	1.400.000,00	40	Kotak	Rp 35.000,00	Rp	1.400.000,00	Rp -	0%
	Konsumsi Rapat, Makanan dan Minuman di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Spesifikasi: Snack	40	Kotak	Rp 15.000,00	Rp	600.000,00	40	Kotak	Rp 15.000,00	Rp	600.000,00	Rp -	0%
	[-] Peserta Kegiatan												
	Konsumsi Rapat, Makanan dan Minuman di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Spesifikasi: Coffe Break	442	Porsi	Rp 30.000,00	Rp	13.260.000,00	442	Porsi	Rp 30.000,00	Rp	13.260.000,00	Rp -	0%
	Konsumsi Rapat, Makanan dan Minuman di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Spesifikasi: Prasmanan	442	Porsi	Rp 50.000,00	Rp	22.100.000,00	442	Porsi	Rp 50.000,00	Rp	22.100.000,00	Rp -	0%
	Konsumsi Rapat, Makanan dan Minuman di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Spesifikasi: Snack	442	Kotak	Rp 15.000,00	Rp	6.630.000,00	442	Kotak	Rp 15.000,00	Rp	6.630.000,00	Rp -	0%
5.1.02.02	**Belanja Jasa**				Rp	5.300.000,00				Rp	5.300.000	Rp -	0%
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**				Rp	5.300.000,00				Rp	5.300.000	Rp -	0%
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**				Rp	5.300.000,00				Rp	5.300.000,00	Rp -	0%
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		Rp	%
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
	[-] honorarium moderator-LPM [-] honorarium moderator Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panita Spesifikasi: Moderator	1	Orang/ Kegiatan	Rp 700.000,00	Rp 700.000,00	1	Orang/ Kegiatan	Rp 700.000,00	*Rp 700.000*	*Rp* -	0%
	[-] honorarium pembawa acara-LPM [-] honorarium pembawa acara Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panita Spesifikasi: Pembawa Acara	1	Orang/ Kegiatan	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	1	Orang/ Kegiatan	Rp 1.000.000,00	*Rp 1.000.000*	*Rp* -	0%
	[-] Honorarium Narasumber Narasumber/Pembahas (Tinggi) Spesifikasi: Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	4	Orang/ Jam	Rp 900.000,00	Rp 3.600.000,00	4	Orang/ Jam	Rp 900.000,00	*Rp 3.600.000*	*Rp* -	0%
JUMLAH BELANJA DAERAH					Rp 89.365.834,00				Rp 89.365.834	*Rp* -	0%

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

YUSTAM EFFENDI, S.E., M.H.
NIP. 19741211 199503 1 002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA OPD	Formulir

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Lokasi Pelaksanaan	: Kota Bandar Lampung
Latar Belakang perubahan/ dianggarkan dalam :	
Perubahan APBD	Tahun Anggaran 2025

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Hasil Program	-	-	-	-
Keluaran Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan

Kelompok Sasaran Pelaksanaan : Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan di Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		Rp	%
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5	BELANJA DAERAH				Rp 35.722.370				Rp -	-Rp 35.722.370	-100%
5.1	BELANJA OPERASI				Rp 35.722.370				Rp -	-Rp 35.722.370	-100%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp 35.722.370				Rp -	-Rp 35.722.370	-100%
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp 13.444.740				Rp -	-Rp 13.444.740	-100%
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp 13.444.740				Rp -	-Rp 13.444.740	-100%

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		Rp	%
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**				Rp 384.320				Rp -	-Rp 384.320	-100%
	Jilid Biasa Spesifikasi : -	20	Lembar	Rp 6.416,00	Rp 128.320	0	Lembar	Rp -	Rp -	-Rp 128.320	-100%
	Fotocopy Folio Spesifikasi : -	1000	Lembar	Rp 256,00	Rp 256.000	0	Lembar	Rp -	Rp -	-Rp 256.000	-100%
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**				Rp 353.250				Rp -	-Rp 353.250	-100%
	Benda Pos Spesifikasi : Materai	30	Lembar	Rp 11.775,00	Rp 353.250	0	Lembar	Rp -	Rp -	-Rp 353.250	-100%
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**				Rp 12.707.170				Rp -	-Rp 12.707.170	-100%
	Pakaian Batik Lampung untuk seragam pada acara Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional (Dinas Pemberdayaan Masyarakat) Spesifikasi : -	14	Stel	Rp 907.655,00	Rp 12.707.170	0	Stel	Rp -	Rp -	-Rp 12.707.170	-100%
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**				Rp 22.277.630				Rp -	-Rp 22.277.630	-100%
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**				Rp 22.277.630				Rp -	-Rp 22.277.630	-100%
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**				Rp 22.277.630				Rp -	-Rp 22.277.630	-100%
	Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : -	1	Ls	Rp 22.277.630,00	Rp 22.277.630	0	Ls	Rp -	Rp -	-Rp 22.277.630	-100%
	JUMLAH BELANJA DAERAH				Rp 35.722.370				Rp -	-Rp 35.722.370	-100%

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

YUSTAM EFFENDI, S.E., M.H.
NIP. 19741211 199503 1 002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA OPD	Formulir

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Lokasi Pelaksanaan	: Kota Bandar Lampung
Latar Belakang perubahan/ dianggarkan dalam :	
Perubahan APBD	Tahun Anggaran 2025

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Hasil Program	-	-	-	-
Keluaran Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Pelaksanaan : Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan di Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		Rp	%
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5	BELANJA DAERAH				Rp 250.000.000				Rp 225.000.000	-Rp 25.000.000	-10%
5.1	BELANJA OPERASI				Rp 250.000.000				Rp 225.000.000	-Rp 25.000.000	-10%
5.1.05	Belanja Hibah				Rp 250.000.000				Rp 225.000.000	-Rp 25.000.000	-10%
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				Rp 250.000.000				Rp 225.000.000	-Rp 25.000.000	-10%

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		Rp	%
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				Rp 250.000.000				Rp 225.000.000	-Rp 25.000.000	-10%
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				Rp 250.000.000				Rp 225.000.000	-Rp 25.000.000	-10%
	TP-PKK Kota Bender Lampung [HIBAH] Alamat : Jl. Majapahit	1	Ls	Rp 250.000.000,00	Rp 250.000.000	1	Ls	Rp 225.000.000,00	Rp 225.000.000	-Rp 25.000.000	-10%
JUMLAH BELANJA DAERAH					Rp 250.000.000				Rp 225.000.000	-Rp 25.000.000	-10%

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

YUSTAM EFFENDI, S.E., M.H.
NIP. 19741211 199503 1 002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA OPD	Formulir

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Organisasi	: 2-13.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Lokasi Pelaksanaan	: Kota Bandar Lampung
Latar Belakang perubahan/ dianggarkan dalam :	
Perubahan APBD	Tahun Anggaran 2025

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Hasil Program	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	98%
Keluaran Kegiatan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	98%
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit%	9 Unit

Kelompok Sasaran Pelaksanaan : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		Rp	%
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5	BELANJA DAERAH				Rp 37.600.000				Rp 50.400.000	Rp 12.800.000	34%
5.1	BELANJA OPERASI				Rp 37.600.000				Rp 50.400.000	Rp 12.800.000	34%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp 37.600.000				Rp 50.400.000	Rp 12.800.000	34%

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		Rp	%
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5.1.02.02	**Belanja Jasa**				Rp 8.000.000				Rp 8.000.000	Rp -	0%
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**				Rp 8.000.000				Rp 8.000.000	Rp -	0%
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, bea dan Perizinan**				Rp 8.000.000				Rp 8.000.000	Rp -	0%
	Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan; Spesifikasi : -	1	Ls	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000	1	Ls	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000	Rp -	0%
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**				Rp 29.600.000				Rp 42.400.000	Rp 12.800.000	43%
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Kantor**				Rp 29.600.000				Rp 42.400.000	Rp 12.800.000	43%
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang**				Rp -				Rp 12.800.000	Rp 12.800.000	#DIV/0!
	Biaya Pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional Roda Empat					1	Ls	Rp 12.800.000,00	Rp 12.800.000	Rp 12.800.000	#DIV/0!
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua**				Rp 29.600.000				Rp 29.600.000	Rp -	0%
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	8	Unit / Tahun	Rp 3.700.000,00	Rp 29.600.000	1	Unit / Tahun	Rp 29.600.000,00	Rp 29.600.000	Rp -	0%
JUMLAH BELANJA DAERAH					**Rp 37.600.000**				**Rp 50.400.000**	**Rp 12.800.000**	**34%**

Triwulan I	:	Rp -
Triwulan II	:	Rp -
Triwulan III	:	Rp -
Triwulan IV	:	Rp -
Jumlah		**Rp -**

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BANDAR LAMPUNG

YUSTAM EFFENDI, S.E.,M.H.
NIP. 19741211 199503 1 002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA OPD	Formulir

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Organisasi	: 2-13.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Lokasi Pelaksanaan	: Kota Bandar Lampung
Latar Belakang perubahan/ dianggarkan dalam :	
Perubahan APBD	Tahun Anggaran 2025

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Hasil Program	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	98%
Keluaran Kegiatan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	98%
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit%	9 Unit

Kelompok Sasaran Pelaksanaan : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		Rp	%
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5	BELANJA DAERAH				Rp 37.600.000				Rp 50.400.000	Rp 12.800.000	34%
5.1	BELANJA OPERASI				Rp 37.600.000				Rp 50.400.000	Rp 12.800.000	34%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp 37.600.000				Rp 50.400.000	Rp 12.800.000	34%

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		Rp	%
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp 8.000.000				Rp 8.000.000	Rp -	0%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp 8.000.000				Rp 8.000.000	Rp -	0%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, bea dan Perizinan				Rp 8.000.000				Rp 8.000.000	Rp -	0%
	Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan; Spesifikasi : -	1	Ls	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000	1	Ls	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000	Rp -	0%
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp 29.600.000				Rp 42.400.000	Rp 12.800.000	43%
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Kantor				Rp 29.600.000				Rp 42.400.000	Rp 12.800.000	43%
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang				Rp 29.600.000				Rp 42.400.000	Rp 12.800.000	43%
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	8	Unit / Tahun	Rp 3.700.000,00	Rp 29.600.000	1	Unit / Tahun	Rp 29.600.000,00	Rp 29.600.000	Rp -	0%
	Biaya Pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional Roda Empat					1	Ls	Rp 12.800.000,00	Rp 12.800.000	Rp 12.800.000	#DIV/0!
JUMLAH BELANJA DAERAH					Rp 37.600.000				Rp 50.400.000	Rp 12.800.000	34%

Triwulan I	:	Rp -
Triwulan II	:	Rp -
Triwulan III	:	Rp -
Triwulan IV	:	Rp -
Jumlah		**Rp -**

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BANDAR LAMPUNG

YUSTAM EFFENDI, S.E., M.H.
NIP. 19741211 199503 1 002

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *community based development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan masyarakat Kota Bandar Lampung selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	√			
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	√			
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Henny Maryuniwati,S.STP
Pembina (IV/a)
Nip. 19830605 200112 2002

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.	
	Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappperida Kota Bandar Lampung	
2	RENI MARITA SUDEMI, S.H., M.H.	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui;
Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung,

Dini Purnamawaty, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197002181993032002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan.	√			
4.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masingPerangkat Daerah sesuai surat edaranwalikota.	√			
5.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah	√			
6.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.		√	Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Henny Maryuniwati,S.STP
Pembina (IV/a)
Nip. 19830605 200112 2002

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.**	
	Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappperida Kota Bandar Lampung	
2	**RENI MARITA SUDEMI, S.H., M.H.**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui;
Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung,

Dra. Purnamawaty, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700218199303200 2

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi RenjaPerangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Telah Sesuai
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Telah Sesuai

Bandar Lampung, Juli 2025

Mengetahui;
Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung,

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.**	
	Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappperida Kota Bandar Lampung	
2	**RENI MARITA SUDEMI, S.H., M.H.**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

Dini Purnamawaty, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700218199303200 2

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN 16
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616/IV.01/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Untuk setiap daerah (Kota/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPB), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem top-down (dari atas ke bawah) sekarang bottom-up (dari bawah ke atas). Artinya, di era Otonomi Daerah ini maka kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah. Juga keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah serta didalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan

dalam 1 (satu) tahun, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD Kota Bandar Lampung.

Perubahan Renja Perangkat Daerah ini memuat rancangan kerangka ekonomi, program prioritas, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, serta penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 3406 Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 12);
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

19. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21).

I.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam merumuskan alokasi program dan kegiatan Perubahan pembangunan Tahun 2025;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung 2025 disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

2.1 Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan/Tahun 2025

Bab III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tabel rincian perubahan program,Kegiatan,Sub kegiatan, target dan pagu pada perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025

Bab IV Penutup

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan/Tahun 2025

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan 28 Maret 2025 adalah sebesar Rp. 2.807.299.807 atau 12.45 persen dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp.22.551.084.344. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi Perangkat Daerah. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

A. KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja . Realisasi anggaran sebesar Rp. 840.000 dan untuk kinerja sebesar 5 persen. SKPD

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi anggaran sebesar Rp. 887.904.660 dan untuk kinerja sebesar 30 persen.

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Realisasi anggaran sebesar Rp. 866.706.660 dan untuk kinerja sebesar 30 persen.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Realisasi anggaran sebesar Rp. 21.198.000 dan untuk kinerja sebesar 15 persen.

c. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi anggaran sebesar Rp. 12.422.000 dan untuk kinerja sebesar 8 persen.

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga Bangunan Kantor

Realisasi anggaran sebesar Rp. 0dan untuk kinerja sebesar 60 persen.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Realisasi anggaran sebesar Rp.0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.874.000 dan untuk kinerja sebesar 50 persen.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Realisasi anggaran sebesar Rp.9.888.000 dan untuk kinerja sebesar 99 persen.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 660.000 dan untuk kinerja sebesar 17 persen.

f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

g. Penyelenggaraan Rapat–rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Realisasi anggaran sebesar Rp.0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi anggaran sebesar Rp. 140.253.147 dan untuk kinerja sebesar 20 persen.

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 14.253. 147 dan untuk kinerja sebesar 10 persen.

b. Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor

Realisasi anggaran sebesar Rp. 126.000.000 dan untuk kinerja sebesar 20 persen.

F.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi anggaran sebesar Rp.3.505.000 dan untuk kinerja sebesar 2 persen.

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi anggaran sebesar Rp. 3.505.000 dan untuk kinerja sebesar 25 persen.

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai **23.47** persen.

2. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

a. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
   Realisasi anggaran sebesar Rp.0dan untuk kinerja sebesar 0 persen.
b. Pemetaan kependudukan.
   Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.
c. Penyusunan kajian dampak kependudukan.
   Realisasi anggaran sebesar Rp.0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

   Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai **25** persen.

3. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.085.125.000 dan untuk kinerja sebesar 10 persen.

a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal.
   Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk
   kinerja sebesar 0 persen.

b. Pengendalian Program KKBPK
Realisasi anggaran sebesar Rp.3.625.000 dan untuk kinerja sebesar 10 persen.

Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.085.500 dan untuk kinerja sebesar 14 persen.

a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB.
Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Realisasi anggaran sebesar Rp.2.166.829.400 dan untuk kinerja sebesar 35 persen.

Kegiatan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat an obat kontrasepsi serta pelaksanaan KB di Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

a. Penyediaan saranan penunjang pelayanan KB.
Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 untuk kinerja sebesar 0 persen.

b. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

c. Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak
Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

a. Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

b. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas.
Realisasi anggaran sebesar Rp.0 dan untuk
kinerja sebesar 0 persen.

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai **10.89** persen.

4. PROGRAM KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Realisasi anggaran sebesar Rp. 667.250.000 dan untuk kinerja sebesar 10 persen.

a. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga). Realisasi anggaran sebesar Rp.674.250.000 dan untuk kinerja sebesar 15 persen.

b. Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
Realisasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000 dan untuk kinerja sebesar 20 persen.

c. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola danPelaksana (Kader) Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK NON FISIK).
Realisasi anggaran sebesar Rp.0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen

Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Realisasi anggaran sebesar Rp.0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen

a. Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

b. Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai **26.60** persen.

Matriks Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan/Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1

Formulir E. 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDAR LAMPUNG

PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada sasaran RKPD

1. Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , dengan target kinerja 83 pada tahun 2026

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) s.d TRIWULAN I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																										
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	I		II		III		IV										
																K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14:8)		17 = (16/7)*100		18
		2	14				PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				225,103,985,664.00		50,536,245,214.00		22,551,094,344.00		2,807,299,807.00								2,807,299,807.00		12.45		53,393,545,021.00		23.70		
		2	14				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				225,103,985,664.00		50,536,245,214.00		22,551,094,344.00		2,807,299,807.00								2,807,299,807.00		12.45		53,393,545,021.00		23.70		
	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Sehendaliaya iuju pertumbuhan penduduk	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PERSEN	98.00	27,922,212,288.42	98.00	12,122,757,854.00	98.00	2,181,421,729.00	23.00	1,044,924,807.00								23.00	1,044,924,807.00	23.47	20.17	60.00	34,168,682,661.00	61.73	27.33	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	01	2.01		Penyusunan, Pengangguna, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penemuhan Dokumen Penyusunan, Penggunaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100.00	182,848,001.00	98.00	61,602,130.00	100.00	16,304,967.00	25.00	840,000.00								25.00	840,000.00	25.00	5.15	25.00	62,442,130.00	25.00	34.15	
		2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja SKPD	Dokumen	4.00	182,848,001.00	4.00	61,602,130.00		16,304,967.00		840,000.00								840,000.00		5.15	4.00	62,442,130.00	100.00	34.15	
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24.00		12.00		4.00		1.00								1.00		25.00		13.00		54.17		
		2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penuemhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100.00	28,929,435,435.52	100.00	8,466,920,997.00	100.00	4,107,040,195.00	25.00	807,904,660.00	-	-	-	-	-	-	25.00	807,904,660.00	25.00	21.62	25.00	9,354,825,647.00	25.00	32.34	
		2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14.00	27,816,489,470.52	14.00	8,051,114,632.00		3,952,634,344.00		866,706,660.00								866,706,660.00		21.92	14.00	8,917,821,292.00	100.00	32.06	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	29.00		29.00		29.00		29.00								29.00		100.00		29.00		100.00		
		2	14	01	2.02	0002	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bulan	12.00	1,075,705,000.00	12.00	402,512,370.00		147,196,520.00		21,198,000.00								21,198,000.00		14.40	12.00	423,710,370.00	100.00	39.39	
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5.00		2.00		1.00		0.25								0.25		25.00		2.25		45.00		
		2	14	01	2.02	0003	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Dokumen	12.00	37,240,965.00	12.00	13,293,985.00		7,209,331.00	-	-							-	-	-	-	12.00	13,293,985.00	100.00	35.70	
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5.00		3.00		1.00		-								-		-		3.00		60.00		
		2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80.00	75,000,000.00	80.00	1,500,000.00	80.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	1,500,000.00	100.00	2.00	
		2	14	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	174.00	75,000,000.00	29.00	1,500,000.00	29.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.00	1,500,000.00	16.67	2.00	
		2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98.00	746,491,993.00	98.00	598,700,761.00	98.00	161,081,377.00	25.00	12,422,000.00	-	-	-	-	-	-	25.00	12,422,000.00	25.51	7.71	25.00	611,122,761.00	25.51	81.87	
		2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12.00	33,760,000.00	12.00	14,556,500.00		5,058,807.00	-	-							-	-	-	-	12.00	14,556,500.00	100.00	43.12	
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		3.00		1.00		-								-		-		3.00		60.00		
		2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12.00	166,483,618.00	12.00	131,044,187.00		54,158,472.00	-	-							-	-	-	-	12.00	131,044,187.00	100.00	78.71	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		3.00		1.00		-								-		-		3.00		60.00		
		2	14	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12.00	53,348,375.00	12.00	16,802,437.00		3,742,821.00	-	1,874,000.00							-	1,874,000.00	-	30.07	12.00	18,676,437.00	100.00	35.07	
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5.00		3.00		1.00		0.25								0.25		25.00		3.25		65.00		
		2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12.00	125,000,000.00	12.00	52,250,000.00		25,000,000.00	-	-							-	-	-	-	12.00	52,250,000.00	100.00	-	
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		3.00		1.00		-								-		-		3.00		60.00		
		2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12.00	23,500,000.00	12.00	221,790,750.00		10,000,000.00	-	9,888,000.00							-	9,888,000.00	-	98.88	12.00	231,678,750.00	100.00	985.87	
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5.00		3.00		1.00		1.00								1.00		100.00		4.00		80.00		
		2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Bulan	12.00	19,500,000.00	12.00	9,906,000.00		4,000,000.00	-	660,000.00							-	660,000.00	-	16.50	12.00	10,566,000.00	100.00	54.18	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5.00		3.00		1.00		0.25								0.25		25.00		3.25		65.00		
		2	14	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Bulan	12.00	60,000,000.00	12.00	7,000,000.00															12.00	7,000,000.00	100.00	11.67	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5.00		2.00																2.00		40.00		
		2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	12.00	265,000,000.00	12.00	145,350,887.00		59,122,477.00	-	-							-	-	-	-	12.00	145,350,887.00	100.00	54.85	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5.00		3.00		1.00		-								-		-		3.00		60.00		
		2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98.00	919,418,800.00	98.00	922,218,800.00	98.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	922,218,800.00		101.39	
		2	14	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perantangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perantangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1.00	550,000,000.00	1.00	550,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

| | | |

| | | |

| | | |

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan program dan kegiatan yang ada berdasarkan Kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan dengan indikator/ukuran keberhasilan yaitu Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang ditunjang dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

a. Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas. Adapun dokumen yang disusun adalah :

- Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terdiri dari : Dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. ,Dokumen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Tahun 2025 dan Perubahan RKA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025;
- Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Dokumen Laporan Evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024, Dokumen Laporan Evaluasi Renja Triwulanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025, Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025; dan

- Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Dokumen LPJ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024, Dokumen LPPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024.

B. Program Pengendalian Penduduk

Program ini dilaksanakan dengan indikator/ukuran keberhasilan yaitu Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun, yang ditunjang dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

a. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota,

Adapun dokumen yang disusun adalah :

- Dokumen Pemetaan Kependudukan Tahun 2025
- Dokumen Kajian Dampak Kependudukan Tahun 2025
- Dokumen Data dan Informasi Keluarga Tahun 2025

C. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Program ini dilaksanakan dengan indikator/ukuran keberhasilan yaitu Total Fertility Rate (TFR), Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need), Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR), Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi, yang ditunjang dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal.
- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
- Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

D. PROGRAM KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Program ini dilaksanakan dengan indikator/ukuran keberhasilan yaitu Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB, yang ditunjang dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
   - Terlaksananya kegiatan kelompok BKB.

b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
   - Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Tabel 3.1 rincian perubahan program,Kegiatan,Sub kegiatan, target dan pagu pada perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025

TABEL 3.1

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									**24,440,386,144.00**	**22,551,084,344.00**	**25,414,241,588.00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									**24,440,386,144.00**	**22,551,084,344.00**	**25,414,241,588.00**	
	2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									**24,440,386,144.00**	**22,551,084,344.00**	**25,414,241,588.00**	
70	**2**	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**4,819,735,965.00**	**5,271,116,739.00**	**5,168,418,589.00**	
	2	**14**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**14,996,639.00**	**16,304,967.00**	**16,304,967.00**	
	2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	4	4	4	14,996,639.00	16,304,967.00	16,304,967.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**14**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**3,546,600,298.00**	**4,107,040,195.00**	**4,101,400,195.00**	
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang/bulan	29	29	29	3,356,200,633.00	3,952,634,344.00	3,952,634,344.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	182,950,872.00	147,196,520.00	141,556,520.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	7,448,793.00	7,209,331.00	7,209,331.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**14**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**%**	**80**	**80**	**80**	**15,000,000.00**	**15,000,000.00**	**15,000,000.00**	
	2	14	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	29	29	29	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**14**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**252,389,028.00**	**261,081,577.00**	**153,718,427.00**	
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4,878,514.00	5,058,807.00	5,058,807.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	54,474,722.00	54,158,472.00	46,795,322.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	14	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4,996,629.00	3,742,821.00	3,742,821.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	109,439,163.00	110,000,000.00	10,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3,600,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	50,000,000.00	59,121,477.00	59,121,477.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**14**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**777,100,000.00**	**662,000,000.00**	**662,000,000.00**	
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	201,100,000.00	158,000,000.00	158,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	576,000,000.00	504,000,000.00	504,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**14**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**213,650,000.00**	**209,690,000.00**	**219,995,000.00**	
	2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	46,000,000.00	45,430,000.00	45,430,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	3	3	3	155,000,000.00	149,680,000.00	159,985,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	12,650,000.00	14,580,000.00	14,580,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
71	**2**	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun**	**Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**317,599,406.00**	**89,423,599.00**	**89,423,599.00**	
	2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan**	**Kegiatan**	**3**	**3**	**3**	**317,599,406.00**	**89,423,599.00**	**89,423,599.00**	
	2	14	02	2.02	0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	29,999,922.00	29,636,042.00	29,636,042.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	Dokumen	1	1	1	257,599,736.00	29,914,725.00	29,914,725.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	29,999,748.00	29,872,832.00	29,872,832.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	%	%	2.21	2.21	2.21	8,735,751,813.00	9,879,065,450.00	11,056,260,450.00	
								Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	%	0,25	0,25	0,25				
								Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	%	%	67,60	67,60	67,60				
								Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	%	%	18,05	18,05	18,05				
								Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	%	66.01	66.01	66.01				
								Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	%	67,20	67,20	67,20				
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kegiatan	Kegiatan	3	3	3	102,279,600.00	141,790,883.00	141,790,883.00	
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	Laporan	12	12	12	19,999,793.00	37,106,088.00	37,106,088.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	82,279,807.00	104,684,795.00	104,684,795.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kegiatan	Kegiatan	2	2	2	6,749,805,180.00	7,508,553,855.00	8,735,053,855.00	
	2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	Unit	1	1	1	179,314,000.00	71,000,000.00	210,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	Orang	2900	2900	2900	6,570,491,180.00	7,437,553,855.00	8,525,053,855.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1	1	1	885,939,809.00	1,107,829,912.00	1,058,524,912.00	
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	Unit	1	1	1	115,000,000.00	135,811,672.00	86,506,672.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Laporan	12	12	12	672,339,809.00	888,498,240.00	888,498,240.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	Laporan	12	12	12	98,600,000.00	83,520,000.00	83,520,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Kegiatan**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**1**	**997,727,224.00**	**1,120,890,800.00**	**1,120,890,800.00**	
	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	Organisasi	1	1	1	445,998,499.00	571,445,400.00	571,445,400.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	Kampung	1	1	1	551,728,725.00	549,445,400.00	549,445,400.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
73	**2**	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB**	**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB**	**%**	**%**	**95**	**95**	**95**	**10,567,298,960.00**	**7,311,478,556.00**	**9,100,138,950.00**	
	2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarg Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarg Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Kegiatan**	**Kegiatan**	**2**	**2**	**2**	**10,480,049,454.00**	**7,236,234,366.00**	**8,892,744,366.00**	
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	Laporan	3	3	3	19,999,497.00	20,691,945.00	20,691,945.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kelompok	Kelompok	716	716	716	5,065,999,957.00	2,656,354,202.00	3,731,364,202.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	Kelompok	134	134	134	5,394,050,000.00	4,559,188,219.00	5,140,688,219.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Kegiatan**	**Kegiatan**	**2**	**2**	**2**	**87,249,506.00**	**75,244,190.00**	**207,394,584.00**	
	2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	Laporan	3	3	3	52,249,654.00	18,134,471.00	18,134,471.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	Organisasi	1	1	1	34,999,852.00	57,109,719.00	189,260,113.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB IV

PENUTUP

Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

EVA DWIANA

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	✓			
	1.1	Latar Belakang	✓			
	1.2	Landasan Hukum	✓			
	1.3	Maksud dan Tujuan	✓			
	1.4	Sistematika Penulisan	✓			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	✓			
	2.1	Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/tahun 2025				
		Formulir E.81 (dengan indikator sesuai dengan Kepmendagri nomor 900.1.15.5-3406Tahun 2024)	✓			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	✓			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (dengan indikator sesuai dengan Kepmendagri nomor 900.1.15.5-3406Tahun 2024)	✓			
4	BAB IV	PENUTUP	✓			

Bandar Lampung, 2025
Kepala Dinas Perhubungan,

SOCRAT PRINGGODANU, S.STP., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19820308 200012 1 001

Diverifikasi :		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST., M.Si	
	Plt. KABID INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	
2	FITRI YANTI, ST., M.Si	
	KASUBBID PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SERTA PERHUBUNGAN BAPPERIDA KOTA BANDAR LAMPUNG	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah,

DINI PURNAMAWATY, SE., M.Si.
Pembina TK. I
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	✓			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	✓			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025
Kepala Dinas Perhubungan,

SOCRAT PRINGGODANU, S.STP., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19820308 200012 1 001

Diverifikasi :		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST., M.SI	
	Plt. KABID INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	
2	FITRI YANTI, ST., M.SI	
	KASUBBID PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SERTA PERHUBUNGAN BAPPERIDA KOTA BANDAR LAMPUNG	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah,

DINI PURNAMAWATY, SE., M.Si.
Pembina TK. I
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berdasarkan realisasi DPA - Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Saat pelaksanaan Evaluasi Renja Perangkat Daerah telah sampai dengan triwulan II berkenaan dengan realisasi DPA Perangkat Daerah
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Program dan kegiatan prioritas perangkat daerah menjadi bahan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional

Bandar Lampung, 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah,

DINI PURNAMAWATY, SE., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19700218 199303 2 002

Diverifikasi :		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST., M.Si.	
	Plt. KABID INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	
2	FITRI YANTI, ST., M.Si	
	KASUBBID PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SERTA PERHUBUNGAN BAPPERIDA KOTA BANDAR LAMPUNG	

LEMBAR VERIFIKASI

Pada hari ini Tanggal *Bulan Juli Tahun Dua Ribu* Dua Puluh Lima, telah diverifikasi *Perubahan Rencana Kerja* (Renja) Dinas Perhubungan *Kota Bandar Lampung Tahun 2025* dan selanjutnya dapat diproses untuk disetujui dan disahkan oleh Walikota Bandar Lampung melalui *Keputusan Walikota Bandar* Lampung.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,

SOCRAT PRINGGODANU, S.STP., MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19820308 200012 1 001

Mengetahui/Menyetujui :

Plt. KEPALA BAPPERIDA
KOTA BANDAR LAMPUNG,

DINI PURNAMAWATY, SE., M.SI.
PEMBINA TK. I
NIP. 19700218 199303 2 002

VERIFIKATOR :

Plt. KEPALA BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
BAPPERIDA KOTA
BANDARLAMPUNG,

FITRI YANTI, ST., M.SI.
PEMBINA
NIP. 19740919 200003 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Bandar Lampung..... 15

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **II**
DAFTAR TABEL ..... **III**
DAFTAR ISI ..... **IV**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN **7**

2.1 Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan/Tahun 2025 7

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **19**

3.1 Rumusan Program/Kegiatan dari Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kota B. Lampung Tahun 2025 19

BAB IV PENUTUP **30**

LAMPIRAN 17
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Dinas Perhubungan yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;
b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);

16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

I.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan *Triwulan II Tahun Berkenaan*

2.1 Evaluasi terhadap hasil Renja *Perangkat Daerah sampai* dengan Triwulan I Tahun *Berkenaan/Tahun 2025*

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan *Perangkat Daerah*

Bab IV. Penutup

II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan/Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan perubahan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan capaian kinerja. Pada tahun anggaran 2025, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung pada tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan pagu anggaran Rp. 23.633.922.449 dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan yaitu :

   1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 28.500.000 dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

      1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran Rp. 28.500.000,-

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 13.908.142.449 dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran Rp. 11.365.642.449,-

1.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu anggaran Rp. 232.500.000,-

1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran Rp. 20.000.000,-

1.2.4 Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan pagu anggaran Rp. 20.000.000,-

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000 dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,-

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 237.980.000 dengan 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 29.998.166,-

1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran Rp. 15.000.000

1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran Rp. 35.000.000

1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu anggaran Rp. 73.001.834,-

1.4.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD dengan pagu anggaran Rp. 84.980.000

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 254.310,000 dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,-

1.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin dengan pagu anggaran Rp. 154.310.000

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 8.107.800.000,- dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran Rp. 355.800.000,-

1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran Rp. 7.752.000.000,-

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 947.190.000 dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran Rp. 87.860.000,-

1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran Rp. 784.330.000,-

1.7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000,-

2. **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** dengan pagu anggaran Rp. 3.529.230.000 dengan 6 (enam) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan yaitu :

2.1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 1.650.000.000,- dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

2.1.1 Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,-

2.1.2 Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 1.600.000.000,-

2.2 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 1.100.000.000 dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

2.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 1.000.000.000,-

2.2.2 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,-

2.3 Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan pagu anggaran Rp. 72.000.000 dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

2.3.1 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) dengan pagu anggaran Rp. 72.000.000,-

2.4 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

2.4.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,-

2.5 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran Rp. 567.230.000 dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

2.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,-

2.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran Rp. 354.230.000,-

2.5.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran Rp. 53.000.000,-

2.5.4 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran Rp. 10.000.000,-

2.6 Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

2.6.1 Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 40.000.000,-

3. **Program Pengelolaan Perkeretaapian** dengan pagu anggaran Rp. 706.490.000 dengan 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

3.1 Kegiatan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

3.1.1 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,-

3.2 Kegiatan Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 506.490.000 dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

3.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 506.490.000,-

Realisasi Anggaran Belanja sampai dengan 31 Maret 2025 pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp 6.110.265.578,-atau 22,1% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp.27.644.013.891. Evaluasi kinerja dan keuangan Renja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sampai dengan triwulan I Tahun 2025 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.1.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1) Bidang Lalu Lintas
   a. Masih kurangnya sarana pendukung operasional lalu lintas
   b. Masih kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas
   c. Manajemen kapasitas jalan yang ada di Kota Bandar Lampung perlu ditingkatkan terkait dengan tingginya pertumbuhan volume kendaraan diantaranya :
      - ❖ Pelayanan pada Jalan Arteri Primer masih perlu ditingkatkan,s ekurang-kurangnya B.
      - ❖ Pelayanan pada Jalan Arteri Sekunder masih perlu ditingkatkan,sekurang-kurangnya C.
      - ❖ Pelayanan pada Jalan Kolektor Primer masih perlu ditingkatkan,se kurang-kurangnya B.
      - ❖ Pelayanan pada Jalan Kolektor Sekunder masih perlu

ditingkatkan,sekurang-kurangnya C.

- ❖ Pelayanan pada Jalan Lokal Sekunder masih perlu ditingkatkan,sekurang-kurangnya D.

d. Belum direvisinya rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota serta rencana umum jaringan trayek perkotaan.

e. Meningkatnya pertumbuhan kendaraan tidak diimbangi dengan penambahan kapasitas jalan.

2) Bidang Angkutan Umum

a. Perlu penataan trayek angkutan umum yang sesuai dengan kondisi saat ini.

b. Belum maksimalnya peremajaan kendaraan angkutan umum sehingga belum dapat memenuhi ketepatan waktu perjalanan pada setiap trayek angkutan Kota Bandar Lampung.

c. Belum adanya kajian terkait penataan jaringan trayek angkutan umum perkotaan yang berbasis sistem angkutan umum massal.

3) Bidang Sarana Prasarana dan Pembinaan Keselamatan

a. Halte bus banyak yang belum direhabilitasi untuk meningkatkan performa maupun kelayakan dioperasikannya Bus BRT sebagai sarana angkutan umum masal (SAUM) Kota Bandar Lampung karena pembangunan dan pemeliharaan halte masih dilaksanakan pihak ke-3 (pengembang).

4) Bidang Perparkiran

a. Banyak kendaraan yang parkir ditempat yang tidak diperuntukannya sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas.

b. Belum adanya penataan perparkiran di tepi jalan umum.

c. Belum adanya penertiban juru parkir.

d. Masih banyaknya lahan parkir yang dikuasai oleh pihak tertentu.

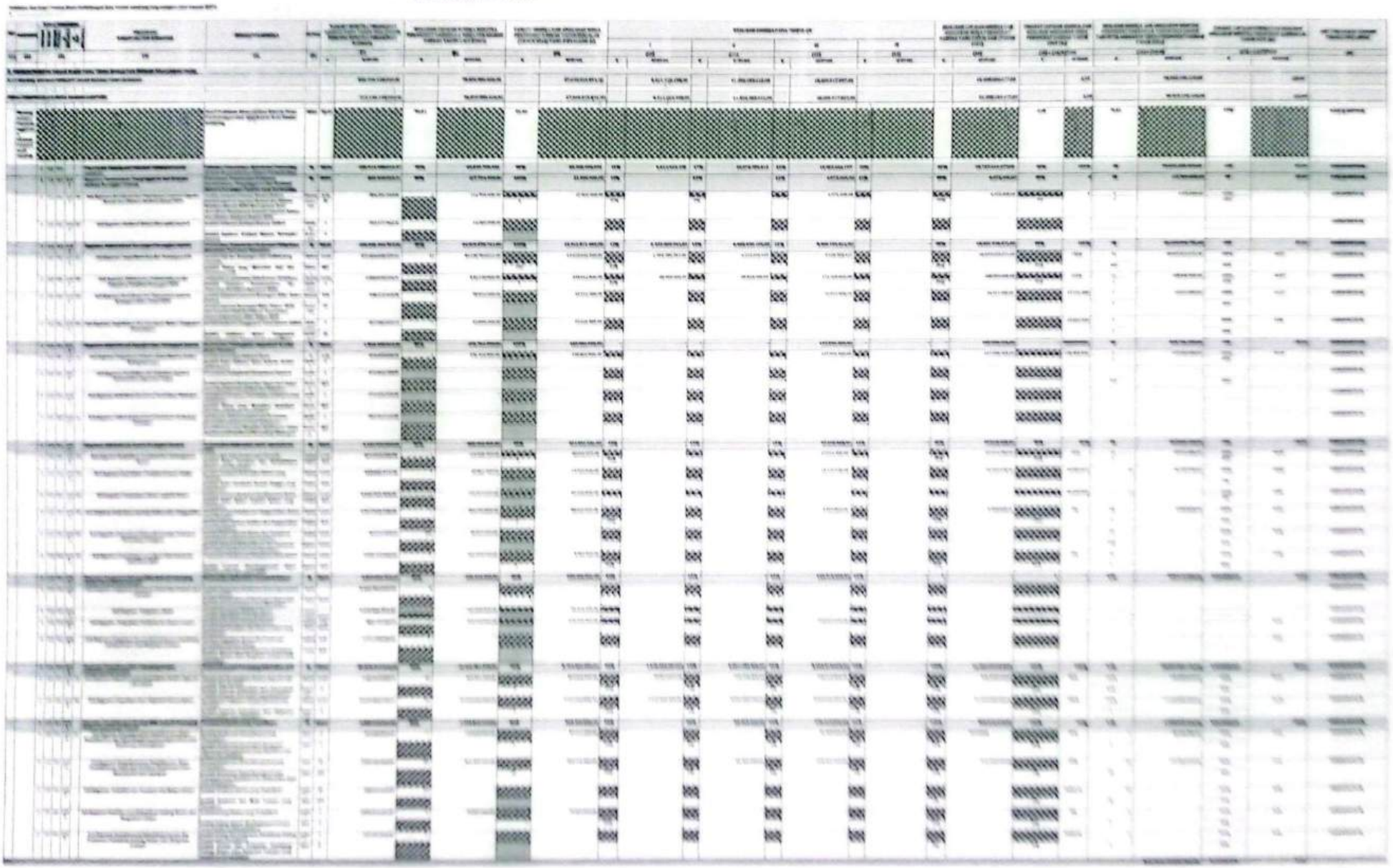
5) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

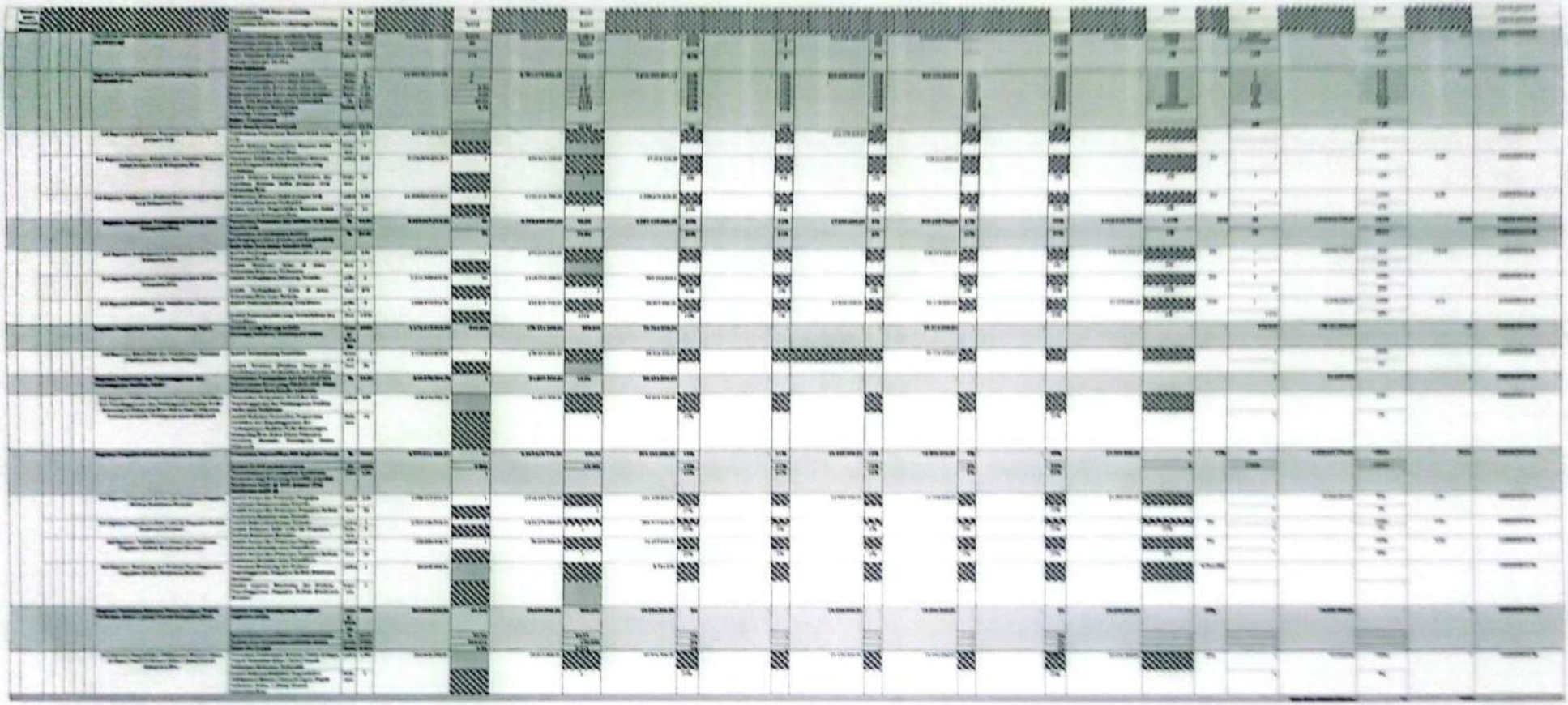
a. Peralatan pengujian kendaraan bermotor sudah berusia lebih dari 40 tahun dan tidak akurat saat dilakukan operasional.

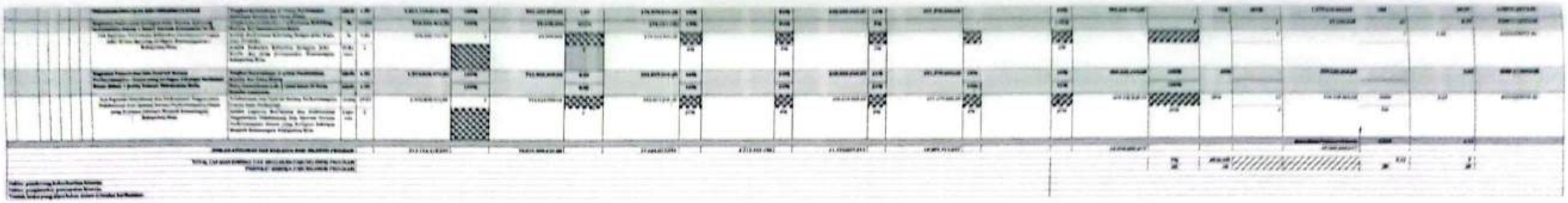
b. Kurangnya SDM dengan kualifikasi pengujian kendaraan bermotor.

6) UPT Terminal

Masih kurangnya sarana penunjang terminal sebagian banyak kendaraan yang tidak masuk kedalam terminal.








PEMERINTAH KOTA
BANDAR LAMPUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]

[illegible]											

			82%		82%				82%		
			82%		82%				82%		
	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	KOTA BANDAR LAMPUNG	-	-	-	-	APBD		1 paket	
	Sub Kegiatan Penyediaan Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerangan Jalan yang Tersedia	KOTA BANDAR LAMPUNG	1 paket		1 paket		APBD		2 paket	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terpelihara	KOTA BANDAR LAMPUNG	1 paket		1 paket		APBD		12 unit	
	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah orang/barang terlalui (turunan) bandara/ terminal per tahun		312.000,0		312.000,0					
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal yang Terpelihara	TERMINAL KOTA BL	5 terminal		5 terminal		APBD		5 terminal	
	Kegiatan Pemeliharaan Jalan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) lokasi perparkiran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung		18,00%		18%				18%	
	Sub Kegiatan Fasilitas Penunjang Perlengkapan Perolehan Jalan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemenuhan Pengoperasian Perolehan Jalan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang Terfasilitasi	KOTA BANDAR LAMPUNG	1 dokumen		1 dokumen		APBD		1 dokumen	
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum		100%		100%				100%	
		Jumlah Uji KIR angkutan umum		12.000,0		12.000,0				12.000,0	
		Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor Negara yang memiliki populasi kendaraan wajib uji 6000 (empat ribu) kendaraan wajib uji		1,0		1,0				1,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Tersedia	DISHUB KOTA BL	1 unit		1 unit		APBD		1 unit	
	Sub Kegiatan Penyediaan Balai Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Balai Uji yang Tersedia	DISHUB KOTA BL	1 dokumen		1 dokumen		APBD		1 dokumen	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	DISHUB KOTA BL	1 unit		1 unit		APBD		1 unit	
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	KOTA MADIUN / MENANG	1 laporan		1 laporan		APBD		1 laporan	
	Kegiatan Pemberian Rekomendasi Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan, Perlintasan Sebidang dan Pengendalian Operasional Angkutan	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum		120.000,0		120.000,0				120.000,0	
		Meningkatnya load factor angkutan umum		10,72%		10,72%				10,72%	
		Jumlah fasilitas pendukung angkutan umum		124.000,0		124.000,0				124.000,0	
		Rasio fasilitas		0,05		0,05				0,05	
	Sub Kegiatan Pengendalian Operasional Angkutan Orang dan Barang, Perlintasan Sebidang dan Pengawasan Angkutan Orang dan Barang	Pengendalian Operasional Angkutan Orang dan Barang, Perlintasan Sebidang dan Pengawasan Angkutan Orang dan Barang	KOTA MADIUN / MENANG	1 dokumen		1 dokumen		APBD		1 dokumen	
	Sub Kegiatan Pengendalian Operasional Angkutan Orang dan Barang, Perlintasan Sebidang dan Pengawasan Angkutan Orang dan Barang	Jumlah orang dan barang yang terangkut angkutan umum, Meningkatnya load factor angkutan umum, Jumlah fasilitas pendukung angkutan umum, Rasio fasilitas		1 dokumen		1 dokumen				1 dokumen	
	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C									
	Sub Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C	KOTA MADIUN / MENANG	1 dokumen		1 dokumen				1 dokumen	
	Kegiatan Pengelolaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pengujian Kendaraan Bermotor Negara, Pengujian Kendaraan Bermotor Negara Wajib Uji, Pengujian Kendaraan Bermotor Negara Wajib Uji	Jumlah Balai Uji yang Terpelihara, Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara, Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara, Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		1 dokumen		1 dokumen				1 dokumen	
	Kegiatan Pengelolaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pengujian Kendaraan Bermotor Negara, Pengujian Kendaraan Bermotor Negara Wajib Uji, Pengujian Kendaraan Bermotor Negara Wajib Uji	Jumlah Balai Uji yang Terpelihara, Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara, Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara, Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		1 dokumen		1 dokumen				1 dokumen	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pengujian Kendaraan Bermotor Negara, Pengujian Kendaraan Bermotor Negara Wajib Uji, Pengujian Kendaraan Bermotor Negara Wajib Uji	Jumlah Balai Uji yang Terpelihara, Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara, Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara, Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		1 dokumen		1 dokumen				1 dokumen	
	Kegiatan Pengelolaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pengujian Kendaraan Bermotor Negara, Pengujian Kendaraan Bermotor Negara Wajib Uji, Pengujian Kendaraan Bermotor Negara Wajib Uji	Jumlah Balai Uji yang Terpelihara, Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara, Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara, Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		1 dokumen		1 dokumen				1 dokumen	

III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Program/Kegiatan dari Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kota B. Lampung Tahun 2025

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung terdiri dari 3 (tiga) program perubahan. Program yang mengalami perubahan yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan pagu anggaran Rp. 23.661.166.391 dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan yaitu :

   1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 25.500.000 dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

      1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran Rp. 25.500.000,-

   1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 13.950.111.449 dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

      1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran Rp. 13.635.642.449,-

      1.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu anggaran Rp. 280.242.000,-

      1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran Rp. 17.191.500,-

1.2.4 Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan pagu anggaran Rp. 17.035.500,-

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000 dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,-

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 184.056.351 dengan 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 28.896.957,-

1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran Rp. 14.992.926,8

1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran Rp. 26.250.000

1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu anggaran Rp. 58.420.467,2,-

1.4.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran Rp. 55.496.000,-

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 254.208.591 dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran Rp. 99.964.339,-

1.4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran Rp. 154.244.252

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 8.131.800.000,- dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran Rp. 355.800.000,-

1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran Rp. 7.776.000.000,-

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 965.490.000 dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran Rp. 87.356.000,-

1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran Rp. 803.134.000,-

1.7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000,-

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan pagu anggaran Rp. 3.657.484.500 dengan 6 (enam) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan yaitu :

2.1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 1.636.033.500,- dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

2.1.1 Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 37.954.500,-

2.1.2 Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 1.598.079.000,-

2.2 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 1.083.139.000 dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

2.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 983.442.000

2.2.2 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dengan pagu anggaran Rp. 99.697.000,-

2.3 Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C dengan pagu anggaran Rp. 70.764.000 dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

2.3.1 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) dengan pagu anggaran Rp. 70.764.000,-

2.4 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan pagu anggaran Rp. 90.454.500 dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

2.4.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan pagu angggaran Rp. 90.454.500,-

2.5 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran Rp. 577.103.000 dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

2.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran Rp. 161.108.000,-

2.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran Rp. 504.557.000,-

2.5.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran Rp. 52.697.000,-

2.5.4 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran Rp. 8.741.000,-

2.6 Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

2.6.1 Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 49.990.500

3. **Program Pengelolaan Perkeretaapian** dengan pagu anggaran Rp. 978.079.000 dengan 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

3.1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkerataapian dengan pagu anggaran Rp. 300.000.000 dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

3.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian dengan pagu anggaran Rp. 300.000.000

3.2 Kegiatan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 175.222.000,- dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

3.2.1 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 175.222.000,-

3.3 Kegiatan Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 502.857.000 dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

3.3.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 502.857.000,-

Rencana Program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung tertuang dalam Tabel 3.1

3.2 Rumusan Program/Kegiatan dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota B. Lampung Tahun 2026

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung terdiri dari 3 (tiga) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan sumber anggaran berasal dari APBD dengan total nilai pagu anggaran pada tahun 2026 sebesar Rp. 109.083.861.939,12 ,- dengan penjabaran sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan pagu anggaran Rp. 24.289.263.139 dengan 6 (enam) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan yaitu :

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 60.000.000 dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran Rp. 30.000.000,-

1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 30.000.000

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 13.963.821.600 dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran Rp. 13.613.579.600

1.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu anggaran Rp. 310.242.000,-

1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran Rp. 20.000.000,-

1.2.4 Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan pagu anggaran Rp. 20.000.000,-

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 393.987.286,69 dengan 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

1.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 64.298.778,28,-

1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran Rp. 20.000.000

1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran Rp. 180.000.000

1.3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000

1.3.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran Rp. 64.608.508,41,-

1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 704.244.252 dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran Rp. 350.000.000

1.4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,-

1.4.3 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran Rp. 254.244.252

1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 8.131.800.000,- dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran Rp. 355.800.000,-

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran Rp. 7.776.000.000,-

1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 1.015.490.000 dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran Rp. 87.356.000,-

1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran Rp. 803.134.000,-

1.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000

1.6.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000,-

2. **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** dengan pagu anggaran Rp. 84.044.914.329,66 dengan 6 (enam) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan yaitu :

2.1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 1.650.000.000,- dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

2.1.1 Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,-

2.1.2 Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 1.600.000.000,-

2.2 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 81.450.691.499,34 dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

2.2.1 Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 150.691.499,34

2.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 81.200.000.000

2.2.3 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,-

2.3 Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C dengan pagu anggaran Rp. 72.000.000 dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

2.3.1 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) dengan pagu anggaran Rp. 72.000.000,-

2.4 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan pagu anggaran Rp. 70.000.000 dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

2.4.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan pagu angggaran Rp. 70.000.000,-

2.5 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran Rp. 752.222.830,32 dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

2.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,-

2.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran Rp. 489.222.829,66,-

2.5.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran Rp. 53.000.000,-

2.5.4 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran Rp. 10.000.000,-

2.6 Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

2.6.1 Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000

3. **Program Pengelolaan Perkeretaapian** dengan pagu anggaran Rp. 769.884.470,77 dengan 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

3.1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkerataapian dengan pagu anggaran Rp. 91.605.470,77 dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

3.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian dengan pagu anggaran Rp. 91.605.470,77

3.2 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 502.857.000 dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

3.3.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 502.857.000,-

3.3 Kegiatan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 175.222.000,- dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

3.2.1 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 175.222.000,-

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development (CBD)* yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle doum effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**	√			
		Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/tahun 2024				
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung,

RIZKY AGUNG ARIESHANTO, S.T.
Pembina
NIP. 1973047 200902 1 002

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1		
	(Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPERIDA	
2	Zeldayati Ningsih,S.H.,M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Muda	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung,

RIZKY AGUNG ARIESHANTO, S.T.
Pembina
NIP. 1973047 200902 1 002

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1		
	(Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPERIDA	
2	Zeldayati Ningsih,S.H.,M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Muda	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1		
	(Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPERIDA	
2	Zeldayati Ningsih,S.H.,M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Muda	

Bandar Lampung. 2025
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

KATA PENGANTAR iii

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-3
1.3. Maksud dan Tujuan I-6
1.4. Sistematika Penulisan I-7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 ..... II-1

2.1. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenan.....
Formulir E.81 .....

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH III-1

Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB IV PENUTUP IV-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	TABEL	HALAMAN
2.1	APBD MURNI DAN PERUBAHAN 2025 DISKOMINFO	II.1
2.2	EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2023 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG	II.2
3.1	APBD MURNI DAN PERUBAHAN 2025 DISKOMINFO	III.1
4	E81 REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025	LAMPIRAN
5	MATRIK 3.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	LAMPIRAN

LAMPIRAN 18
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 45/IV.01/HK/2025 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandar Lampung adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Diskominfo yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Diskominfo Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat OPD;
b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Bappeda yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antark egiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

I.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandar Lampung dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

II.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun berkenanan/Tahun 2025
Formulir E.81

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tebel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Bab IV. Penutup

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I BERKENAAN

2.1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN /TAHUN 2025 BERKENAAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung merupakan perubahan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan capaian kinerja.

Pada APBDP Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang dijabarkan dalam 5 Program, 11 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan. Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung sampai dengan 31 Mei 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 5.410.017.845,- atau 31% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp. 17.528.524.212,-. Sedangkan realisasi kinerja rata-rata mencapai 31%. Evaluasi Kinerja dan Keuangan Renja Dinas Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 .

Evaluasi kinerja dan keuangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 secara keseluruhan disajikan pada Formulir E.81.

Tabel 2.2
Evaluasi Triwulan I Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung

NO.			KEGIATAN							
			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentasi	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**6.460.135.895,00**	**2.203.862.510,00**	**34%**	**34%**	**34%**
	1		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Renja, RKA dan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung**		**51.817.298,00**	**18.568.150,00**	**36%**	**36%**	**36%**
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja, RKA dan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung	3 Dokumen	27.000.094,00	4.372.150,00	16%	16%	16%

		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya LAKIP, LPJ, LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung	3 Dokumen	24.817.204,00	14.196.000,00	57%	57%	57%
	2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan SKPD Tepat Waktu**	**100%**	**4.518.687.718,00**	**1.670.378.644,00**	**37%**	**37%**	**37%**
		3	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	4.272.238.798,00	1.587.509.644,00	37%	37%	37%
		4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	226.440.000,00	64.040.000,00	28%	28%	28%
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Laporan Keuangan akhir Tahun	1 Dokumen	20.008.920,00	18.829.000,00	94%	94%	94%
	3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan**	**1 ls**	**7.500.000,00**	**-**	**0%**	**0%**	**0%**
		6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal		7.500.000,00	-	0%	0%	0%
	4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD**		**231.455.879,00**	**106.085.017,00**	**46%**	**46%**	**46%**

		7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	30.164.544,00	12.738.000,00	42%	42%	42%
		8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	15.976.335,00	7.885.500,00	49%	49%	49%
		9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Makanan dan Minuman	100%	8.875.000,00	-	0%	0%	0%
		10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan		10.240.000,00	3.906.250,00	38%	38%	38%
		12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Rapat Koordiansi dan Konsultasi ke Luar Daerah		166.200.000,00	81.555.267,00	49%	49%	49%
	5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**437.500.000,00**	**-**	0%	0%	0%
		13	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	100%	437.500.000,00	-	0%	0%	0%
	6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	**840.000.000,00**	**358.000.000,00**	**43%**	**43%**	**43%**

		14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	24.000.000,00	8.000.000,00	33%	33%	33%
		15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	816.000.000,00	350.000.000,00	43%	43%	43%
	7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	**373.175.000,00**	**50.830.699,00**	**14%**	**14%**	**14%**
		16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	42.430.000,00	16.290.849,00	38%	38%	38%
		17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	100%	41.620.000,00	21.640.000,00	52%	52%	52%
		18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	181.625.000,00	9.899.850,00	5%	5%	5%

		19	Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	107.500.000,00	3.000.000,00	3%	3%	3%
2			**PROGRAM PEGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Tersebarluasnya Informasi dan Kegiatan Pembangunan Daerah Di Kota Bandar Lampung**		**4.750.071.964,00**	**775.772.460,00**	**16%**	**16%**	**16%**
	8		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**• Tersusunnya Informasi Layak Anak (ILA) Kota Bandar Lampung • Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah •Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Media Center dan Pelayanan PPID • Tersedianya Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah**		**4.750.071.964,00**	**775.772.460,00**	**16%**	**16%**	**16%**

		20	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif yang Mendiseminasikan Informasi yang Terdaftar pada OPD	1 Paket	3.237.043.274,00	427.552.960,00	13%	13%	13%
		21	Pelayanan Informasi Publik	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	12 bulan	1.495.994.829,00	348.219.500,00	23%	23%	23%
		22	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tersedianya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	1 Paket	17.033.861,00	-	0%	0%	0%
3			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**• Pemenuhan Kualitas Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa • Terselenggaranya Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika**		**5.927.940.084,00**	**2.313.419.200,00**	**39%**	**39%**	39%

	10		**Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Tersedianya Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTEL) -Terbentuknya Pengembangan dan Pengelolaan Data Center - Tersedianya Pengkajian dan Penelitian Sistem Keamanan Data**	**1 Ls 12 Bulan 12 Bulan**	**5.927.940.084,00**	**2.313.419.200,00**	**39%**	**39%**	**39%**
		23	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Tersedianya Jumlah Data dan Informasi yang dipetakan Berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah	1 Ls	3.344.903.730,00	1.183.750.000,00	35%	35%	35%
		24	Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Tersedianya Jumlah Dokumen Usulan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang Telah Dikonsultasikan Dengan Seluruh Perangkat Daerah	1 Dokumen	228.647.504,00	-	0%	0%	0%

		25	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Koneksi jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	1 Ls	2.354.388.850,00	1.129.669.200,00	48%	48%	47,98%
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
4			**Program Penyelenggaraan Stastistik Sektoral**	**Tersedianya Penyusunan Data dan Informasi Statistik Daerah Kota Bandar Lampung**		**131.412.154,00**	**61.217.675,00**	**47%**	**47%**	**47%**
	11		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota**	**• Terevaluasinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Bandar Lampung - Terbentuknya Operasional Literasi Data dan Informasi - Tersedianya Penyusunan Data Sektoral - Tersedianya Pembangunan Infrastruktur**	**1 Ls 12 Bulan**	**131.412.154,00**	**61.217.675,00**	**47%**	**47%**	**47%**
		26	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Daerah	Tersedianya Jumlah Pegawai yng Mendapatkan Pelatihan dibidang	100%	9.049.760,00	-	0%	0%	0%

				Statistik						
		27	Peningkatan Kualitas Data Setatistik Sektoral	Tersedianya Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Rlis Tepat Waktu	100%	53.961.039,00	43.502.675,00	81%	81%	81%
		28	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Tersedianya Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang Telah dilengkapi Metadata	100%	68.401.355,00	17.715.000,00	26%	26%	26%
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
5			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Terlaksananya Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Penggunaan Media Massa**		**258.964.115,00**	**55.746.000,00**	**22%**	**22%**	**22%**
	12		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	• Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Postelsus dan Penyiaran - Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bandar Lampung		**258.964.115,00**	**55.746.000,00**	**22%**	**22%**	**22%**

				- Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Persandian						
		29	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	100%	36.608.102,00	16.500.000,00	45%	45%	45%
		30	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bandar Lampung	100%	66.469.894,00	18.000.000,00	27%	27%	27%
		31	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tersedianya Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	100%	155.886.119,00	21.246.000,00	14%	14%	14%
						17.528.524.212,00	**5.410.017.845,00**	**31%**	**31%**	**31%**

2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung memiliki wewenang dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian. Adapun isu yang terkait ketiga urusan dalam hal kinerja pelayanan adalah :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

   Isu yang terkait Urusan Komunikasi dan Informatika :

   1) Belum optimalnya pelaksanaan system e-government dan aplikasi pendukungnya.
   2) Belum optimalnya pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat perlu ditingkatkan.
   3) Belum optimalnya pemerataan infrstruktur TIK untuk peningkatan pelayanan publik.
   4) Peningkatan kualitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.

2. Urusan Statistik

   Isu yang terkait Urusan Statistik :

   Akurasi data sektoral dari Perangkat Daerah yang kurang konsisten, sehingga masih terdapat perbedaan antara data yang dikeluarkan oleh BPS dan data Perangkat Daerah serta terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai Urusan Statistik.

3. Urusan Persandian

   Isu yang terkait Urusan Persandian :

Terbatasnya ketersediaan SDM yang menguasai urusan persandian serta belum optimalnya pengamanan terhadap sistem sandi daerah.

Secara garis besar Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung melingkupi program dan kegiatan yang berkaitan dengan :

1. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi Informasi Publik, Pemberdayaan Telematika, Pos dan Telekomunikasi, Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan lingkupnya.
3. Pembinaan dan pengawasan di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan dengan lingkupnya.
4. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur pemerintah kota dan instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi.
5. Pengkoordinasian komunikasi dan informatika.
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap Tugas dan Fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Melakukan kegiatan komunikasi publik melalui penyebaran dan penyerapan informasi.
9. Pengelolaan Basis Data.
10. Pembangunan, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengembangan di bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika.

BAB III.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung terdiri dari :

Tabel 3.1Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Urusan / Program	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	%
I	**DISKOMINFO** **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**	**5**	**11**	**30**	**12.948.013.798,00**	**22.552.041.421,00**	**9.604.027.623,00**	**57%**
1	**Urusan Komunikasi dan Informatika**	**3**	**10**	**24**	**12.503.329.683,00**	**22.161.665.152,00**	**(12.503.329.683,00)**	**56%**
	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		7	18	6.127.591.048,00	6.618.835.900,00	491.244.852,00	**108%**
	2 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		1	3	3.746.794.635,00	6.600.071.964,00	2.853.277.329,00	**57%**
	3 Program Aplikasi Informatika		1	3	2.628.944.000,00	8.942.757.288,00	6.313.813.288,00	29,40%
2	**Urusan Statistik**	**1**	**1**	**1**	**154.220.000,00**	**131.412.154,00**	**(22.807.846,00)**	117,36%
	1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		1	3	154.220.000,00	131.412.154,00	(22.807.846,00)	117,36%
3	**Urusan Pemerntahan Bidang Pengamanan Dan Persandian**	**1**	**1**	**1**	**290.464.115,00**	**258.964.115,00**	**(31.500.000,00)**	**89%**
	1 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		1	3	290.464.115,00	258.964.115,00	(31.500.000,00)	89,16%

Pada APBDP Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Melakukan 3 (tiga) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.

- Urusan Komunikasi dan Informatika
- Urusan Statistik
- Urusan Persandian

Untuk APBD perubahan Diskominfo dari Rp.12.948.013.798,00 menjadi 22.552.041.421,00 Total Penambahan Perubahan sebesar Rp.9.604.027.623,00 atau sebesar 57 Persen.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung dan memberikan umpanbalik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusandan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA

Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI

Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kesejahteraan Rakyat

MISI 6

Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih ,berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi

NO.		TUJUAN		SASARAN		STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN
1	6.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien ,Akuntabel Transparan dan Inovatif	6.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	6.1.2.1	Meningkatkan kualitas Perencanaan, akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1	Meningkatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah
							2	Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
							3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
							4	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah serta Kepatuhan terhadap Laporan Keuangan
			6.1.4	Terciptanya Inovasi Layanan Publik	6.1.4.1	Meningkatnya Akses Masyarakat dalam Informasi dan Layanan	1	Mengembangkan E-Government dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

							2	Memperkuat dan Memperluas Jangkauan Teknologi Komunikasi dan Informatika
							3	Menciptakan Inovasi Layanan di Segala Bidang
							4	Mengembangkan Penelitian untuk Inovasi Daerah
							5	Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk Memberikan Informasi dan Pelayanan Publik

TABEL 5.1
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								9,261,784,298.00	12,948,013,798.00	22,552,041,421.00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN								9,261,784,298.00	12,948,013,798.00	22,552,041,421.00
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								8,831,782,943.00	12,503,329,683.00	22,161,665,152.00
77	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian	98 Persen	98 Persen	98 Persen	98 Persen		5,481,782,943.00	6,127,591,048.00	6,618,838,900.00
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	98 Persen	98 Persen	98 Persen	98 Persen		30,000,000.00	54,000,188.00	77,000,094.00
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		15,000,000.00	27,000,094.00	27,000,094.00
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		15,000,000.00	27,000,094.00	50,000,000.00
	2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**		**4,414,584,298.00**	**4,520,847,718.00**	**4,542,204,927.00**
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan		4,167,784,298.00	4,272,238,798.00	4,295,756,007.00
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		226,800,000.00	228,600,000.00	225,440,000.00
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										

								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		20,000,000.00	20,008,920.00	20,008,920.00
	2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**		**15,000,000.00**	**15,000,000.00**	**7,500,000.00**
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang		15,000,000.00	15,000,000.00	7,500,000.00
	2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98 persen**	**98 persen**	**98 persen**	**98 persen**		**150,148,645.00**	**274,568,142.00**	**341,455,879.00**
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		35,000,000.00	30,164,544.00	30,164,544.00
	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		15,000,000.00	15,976,336.00	19,976,335.00
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		15,000,000.00	8,875,000.00	8,875,000.00

	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket		10,000,000.00	10,240,000.00	16,240,000.00
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		6,000,000.00	0.00	-
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		69,148,645.00	209,312,263.00	266,200,000.00
	2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									**300,000,000.00**	**437,500,000.00**
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									300,000,000.00	437,500,000.00
	2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**		**768,000,000.00**	**840,000,000.00**	**840,000,000.00**
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		744,000,000.00	816,000,000.00	816,000,000.00
	2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**		**104,050,000.00**	**123,175,000.00**	**373,175,000.00**
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		42,430,000.00	42,430,000.00	42,430,000.00
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		41,620,000.00	41,620,000.00	41,620,000.00
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		5,000,000.00	31,625,000.00	181,625,000.00
	2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit		15,000,000.00	7,500,000.00	107,500,000.00
78	**2**	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Presentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi**	**Presentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi**	**95 persen**	**95 persen**	**95 persen**	**95 persen**		**1,750,000,000.00**	**3,746,794,635.00**	**6,600,071,964.00**

	2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik**	**Presentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik**	**95 persen**	**95 persen**	**95 persen**	**95 persen**		**1,750,000,000.00**	**3,746,794,635.00**	**6,600,071,964.00**
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat									
								Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	20 Komunitas	20 Komunitas	20 Komunitas	20 Komunitas		868,000,000.00	2,471,760,774.00	4,087,043,274.00
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik									
								Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Permohonan	1 Permohonan	1 Permohonan	1 Permohonan		835,000,000.00	1,258,000,000.00	2,495,994,829.00
	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik									
								Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang		47,000,000.00	17,033,861.00	17,033,861.00
79	**2**	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik Presentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang Mendukung Smart City dan layanan Publik Yang berfungsi Baik**	**Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik Presentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang Mendukung Smart City dan layanan Publik Yang berfungsi Baik**	**0 persen 100 persen**	**0 persen 100 persen**	**0 persen 100 persen**	**0 persen 100 persen**		**1,600,000,000.00**	**2,628,944,000.00**	**8,942,757,288.00**

	2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTAL)**	**Persentase Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTAL)**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**		**1,600,000,000.00**	**2,628,944,000.00**	**8,942,757,288.00**
	2	16	03	2.02	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi										
								Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		83,426,201.00	726,153,730.00	6,359,720,934.00
	2	16	03	2.02	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah										
								Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		30,925,614.00	146,417,789.00	228,647,504.00
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota										

								Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	63 Perangkat Daerah	63 Perangkat Daerah	63 Perangkat Daerah	63 Perangkat Daerah		1,485,648,185.00	1,756,327,481.00	2,354,388,850.00
	2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								**190,001,355.00**	**154,220,000.00**	**131,412,154.00**
80	**2**	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Data dan Infirmasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik**	**Data dan Infirmasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik**	**Ada Ada/Tidak**	**Ada Ada/Tidak**	**Ada Ada/Tidak**	**Ada Ada/Tidak**		**190,001,355.00**	**154,220,000.00**	**131,412,154.00**
	2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**pengembangan dan implementasi sistem informasi data statistik**	**pengembangan dan implementasi sistem informasi data statistik**	**Ada persen**	**Ada persen**	**Ada persen**	**Ada persen**		**190,001,355.00**	**154,220,000.00**	**131,412,154.00**
	2	20	02	2.01	0007	Penginglcatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Penginglcatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral										
								Jumlah pegawai yang mendapatlcan pelatihan di bidang statistik	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang		15,000,000.00	15,000,000.00	9,049,760.00
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral										
								Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	95 Persentase	95 Persentase	95 Persentase	95 Persentase		106,600,000.00	70,818,645.00	53,961,039.00
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia										
								Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		68,401,355.00	68,401,355.00	68,401,355.00
	2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								**240,000,000.00**	**290,464,155.00**	**258,964,115.00**

81	**2**	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik**	**Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik**	**95 persen**	**95 persen**	**95 persen**	**95 persen**		**240,000,000.00**	**290,464,155.00**	**258,964,118.00**
	2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunkasi Perangkat Daerah**	**Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunkasi Perangkat Daerah**	**95 persen**	**95 persen**	**95 persen**	**95 persen**		**240,000,000.00**	**290,464,155.00**	**258,964,118.00**
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
								Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		70,000,000.00	36,608,102.00	36,608,102.00
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik										
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		100,000,000.00	66,459,894.00	66,459,894.00
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										

								Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah		70,000,000.00	187,386,119.00	155,686,119.00

APBD Murni dan Perubahan RENJA 2025 Diskominfo

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

No.	Urusan / Program		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	%
I	**DISKOMINFO** **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**		**5**	**11**	**30**	**12,948,013,798.00**	**17,528,524,212.00**	**4,580,510,414.00**	**74%**
1	**Urusan Komunikasi dan Informatika**		**3**	**10**	**24**	**12,503,329,683.00**	**17,138,147,943.00**	**(12,503,329,683.00)**	**73%**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		7	18	6,127,591,048.00	6,460,135,895.00	332,544,847.00	**105%**
	2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		1	3	3,746,794,635.00	4,750,071,964.00	1,003,277,329.00	**79%**
	3	Program Aplikasi Informatika		1	3	2,628,944,000.00	5,927,940,084.00	3,298,996,084.00	44.35%
2	**Urusan Statistik**		**1**	**1**	1	**154,220,000.00**	**131,412,154.00**	**(22,807,846.00)**	117.36%
	1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		1	3	154,220,000.00	131,412,154.00	(22,807,846.00)	117.36%
3	**Urusan Pemerntahan Bidang Pengamanan Dan Persandian**		**1**	**1**	1	**290,464,115.00**	**258,964,115.00**	**(31,500,000.00)**	**89%**
	1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		1	3	290,464,115.00	258,964,115.00	(31,500,000.00)	89.16%

TABEL 5B.1

Rencja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung

Periode Triwulan I Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Perangkat Daerah pada akhir Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Kinerja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (APBY periode pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
												I		II		III		IV											
					Fisik	Dan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17	18
					100	%	65,969,980,491	50	30,157,784,041.00	100	12,949,013,798.00	25	2,866,330,683.00							50	3,868,605,483	50	57	50	33,126,389,524	60	35		
Terwujudnya Tata kelola pemerintah yang efektif,efisien,n kuntabel transparan dan inovatif	Meningkatnya Penyelenggaran Urusan kewilayahan	0.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Sirosantroe	100	%	31,707,617,149	60	12,158,320,905.00	100	5,851,938,785.00	25	1,221,715,483.00							25.0	1,241,105,483	25.0	21.2	60.0	12,800,486,269	60.0	41.4	Dinas komunikasi dan informatika	
		0.06.01.1.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan/cos penunjukan dukungan pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	88	%	25,649,469,825	60	9,781,464,343.00	88	4,688,447,718.00	23	880,164,727.00							25.0	880,164,727	25.1	23.3	60.0	10,798,630,970	61.2	41.8	Dinas komunikasi dan informatika	
		0.06.01.1.01.01.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Orang	100%	25,010,870,057	61.00	9,125,579,243.00	61.00	4,272,238,798.00	41	869,515,727.00							41.0	869,515,727	41.0	22.7	41	10,092,894,970	41.0	41.5	Dinas komunikasi dan informatika	
				Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbaiki		12.00																							
		0.06.01.1.01.01.0002	Pelaksanaan Pembayaran dan Pengujian Verifikasi Keuangan BKD	Jumlah Dokumen Pembayaran dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang Diproses	Dokumen	100	1,318,741,355	2.00	536,300,000.00	1.00	198,200,000.00	0.25	11,000,000							0.25	11,000,000	25.0	5.6	2	547,630,000	49.0	51.0	Dinas komunikasi dan informatika	
				Administrasi Keuangan yang Terbaikan		12.00																							
		0.06.01.1.01.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD dan Laporan Hasil Monitoring Pengelolaan Keuangan Akhir Tahun OPD	Laporan	100	203,057,355	2.00	71,785,000.00	1.00	20,000,000.00	0.25	16,829,000							0.25	16,829,000	25.0	84.1	2	90,614,000	45.0	44.4	Dinas komunikasi dan informatika	
				Jumlah laporan capaian kinerja		12.00																							
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		88	%	102,028,692	60	23,250,000.00	88	15,000,000.00	23	0.00							25.0	0	25.1	0.0	60.0	23,250,000		22.8	Dinas komunikasi dan informatika	
		0.06.01.1.01.02.0001	Pendidikan dan Pelatihan Formal Berkelanjutan Tugas dan Fungsi	Jumlah Program Pendidikan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12.00	102,028,692	21.00	23,250,000.00	20.00	15,000,000.00	0.25	0.00							0.25	0	1.3	0.0	21	23,250,000	10.0	22.8	Dinas komunikasi dan informatika	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal		12.00																							
			Penyusunan, penggunaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan penunjukan dokumen Perencanaan, penggunaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	88	%	408,114,769	60	85,635,000.00	88	34,000,188.00	23	0.00							25.0	19,850,000.00	25.1	36.8	60.0	105,485,000		23.4	Dinas komunikasi dan informatika	
		0.06.01.1.01.03.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	100	203,057,355	2.00	85,100,000.00	1.00	27,000,094.00	0.25	0.00							0.25	0	25.0	0.0	2	80,100,000	45.0	19.7	Dinas komunikasi dan informatika	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12.00																							
		0.06.01.1.01.03.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	100	203,057,355	2.00	43,475,000.00	1.00	27,000,094.00	0.25	0.00							0.25	0	25.0	0.0	2	43,475,000	45.0	11.3	Dinas komunikasi dan informatika	
				Jumlah laporan capaian kinerja		12.00																							
			Administrasi umum perangkatdaerah	Penunjukan kebutuhan inventaris kantor	88	%	1,111,029,503	60	500,513,850.00	88	201,975,879.00	23	18,550,756.00							25.0	18,550,756	25.1	9.2	60.0	518,064,606		42.0	Dinas komunikasi dan informatika	
		0.06.01.1.01.04.0001	Penyediaan jasa surat menyurat dan pengiriman kantor	Jumlah Paket Kiriman dan Pengiriman Barang yang Disediakan	Paket	1.00	168,592,934	1.50	78,812,788.00	1.00	39,164,544.00	0.25	0.00							0.25	0	25.0	0.0	2	78,812,788	35.0	46.8	Dinas komunikasi dan informatika	
				Terwujudnya Tata Tertib Kantor, Terwujudnya Pemeliharaan dan Perawatan Kantor		12.00																							
		0.06.01.1.01.04.0002	Penyediaan jasa listrik kantor	Jumlah Daya Terpasang Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	84,296,467	1.50	33,048,461.00	1.00	15,976,315.00	0.25	0.00							0.25	0	25.0	0.0	2	33,048,461	35.0	53.8	Dinas komunikasi dan informatika	
				Jumlah Perawatan Kebersihan Kantor yang Tersedia		12.00																							
		0.06.01.1.01.04.0003	Penyediaan bahan bacaan kantor	Jumlah Bahan Bacaan yang Disediakan	Paket	1.00	168,592,934	1.50	121,330,000.00	1.00	8,875,000.00	0.25	0.00							0.25	0	25.0	0.0	2	121,330,000	35.0	61.5	Dinas komunikasi dan informatika	
				Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat		12.00																							
		0.06.01.1.01.04.0004	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Alat Tulis yang Disediakan dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	1.00	154,539,459	1.50	56,908,316.00	1.00	10,240,000.00	0.25	0.00							0.25	0	25.0	0.0	2	56,908,316	35.0	36.8	Dinas komunikasi dan informatika	
				Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia		12.00																							
		0.06.01.1.01.04.0005	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.00	625,175,979	1.50	179,919,282.00	1.00	106,133,000.00	0.25	18,550,756.00							0.25	18,550,756	25.0	13.6	2	198,469,038	35.0	31.7	Dinas komunikasi dan informatika	
				Penyediaan Perlengkapan Pendukung Rapat Kantor		12.00																							
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjukan kebutuhan inventaris kantor	88	%	113,043,038	60.00	123,000,000.00	88	130,000,000.00	23	0.00							25.0	0	25.5	0.0	60.0	123,000,000		80.4	Dinas komunikasi dan informatika	
		0.06.01.1.01.05.0001	Pengadaan Mobil	Jumlah Mobil Yang Disediakan	Unit	1.00	113,043,038	1.00	123,000,000.00	1.00	130,000,000.00	0.25	0.00							0.25	0	25.0	0.0	1	123,000,000	13.0	80.4	Dinas komunikasi dan informatika	
				Terwujudnya Kebersihan		12.00																							
		0.06.01.1.01.05.0002	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Barang dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1.00	190,041,864																					
			Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan dan Pemanfaatan Sarana/dan UPD	88	%	1,313,531,560	60	1,874,000,000.00	88	460,000,000.00	23	184,000,000.00							25.0	304,000,000	25.1	24.3	60.0	3,078,000,000		43.7	Dinas komunikasi dan informatika	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada akhir Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir periode pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
												I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 13/9 x 100		17	18
				Tolok Ukur	K	Ket	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Jumlah Kegiatan Pengelolaan Data Informasi Statistik Sektoral yang Terverifikasi dan Tervalidasi	Kegiatan	1.00	13,603,000	2.00	2,000,000.00	1.00	24,000,000.00	0.25	0.00							0.25	0	25.0	0.0	2	2,000,000	66.0	14.7	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Jumlah Jasa Konsultansi Pendataan, Survei dan Analisis yang Terverifikasi		10.00																							
				Jumlah Pengelolaan Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik	Kegiatan	1.00	1,298,917,714	2.00	1,872,000,000.00	1.00	816,000,000.00	0.25	200,000,000.00							0.25	200,000,000	25.0	25.0	2	2,072,000,000	66.0	62.9	Dinas Komunikasi dan	
				Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Terverifikasi		10.00																							
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**55**	**%**	**931,406,123**	60	**297,149,127.00**	**88**	**123,175,000.00**	**25**	**0.00**							**25.0**	**0**	**25.5**	**0.0**	80.6	**297,149,127**		**31.9**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan Dioperasikan Rutin/Bln	Unit	3.00	220,082,100	3.00	138,511,920.00	3.00	42,000,000.00	0.25	0.00							0.25	0	25.0	0.0	3	138,511,920	325.0	60.7	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara		10.00																							
				Jumlah Kendaraan Roda Empat atau Lebih yang Digunakan dan Dioperasikan Rutin dan Berkala/Unit	Unit	3.00	110,441,905	3.00	99,237,199.00	3.00	41,620,000.00	0.25	0.00							0.25	0	25.0	0.0	3	99,237,199	325.0	61.8	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara		10.00																							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada akhir Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
												I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/6 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17	18
				Tolok Ukur	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pemeliharaan prasarana dan peralatan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	Unit	1 set	332,038,602	6.00	38,506,000.00	0.80	83,621,000.00	0.25	0.00								0.25	0	0.0	0.0	6	38,506,000	126.0	67.7	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara		14 unit																							
			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Unit	1 set	806,114,398	1.00	0.00											0			1	0	100.0	0.0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Jumlah bangunan kantor yang Terpelihara		14 unit																							
			Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dimanfaatkan	Unit	1 set	36,730,525	6.00	12,400,000.00	1.00	7,500,000.00	0.25	0.00								0.25	0			6	12,400,000	125.0	33.8	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara		14 unit																							
Terwujudnya Infrastruktur Digital	Terbentuknya Layanan Pemerintah secara Digital		**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	100	%	17,472,934,741	60	8,839,857,615.00	100	1,488,634,888.00	25	441,150,000.00								25.0	441,150,000	25.0	62.7	60.0	9,171,107,615	60.0	13.6	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Informasi Publik yang Terpublikasi	100	%	17,472,934,741	60	8,839,857,615.00	100	1,488,634,888.00	25	441,150,000.00								25.0	441,150,000	25.0	62.7	60.0	9,171,107,615	60.0	13.6	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Program dan Media Komunikasi Publik	Informasi	1 set	330,086,077	2.00	22,800,000.00											0			2	52,800,000	48.0	10.7	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Terbentuknya Informasi Layak Anak (ILA) Kota Bandar Lampung		14 unit																							
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi Hasil Pelayanan Informasi Publik	Informasi	1 set	1,302,161,807	2.00	5,758,345,210.00	1.00	999,642,263.00	0.25	110,000,000.00								0.25	110,000,000	25.0	11.0	2	5,892,395,210	48.0	84.6	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		14 unit																							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Perangkat Daerah pada akhir Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
												I		II		III		IV												
				Tolok Ukur	K	Sat	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/6 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17	18
			Pengadaan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	3000	298,066,948	21.00	82,987,397.00	8333.33	17,033,861.00	0.25	0.00							0.25	0	1.3	0.0	21	82,987,397	106.3	34.8	Dinas komunikasi dan informatika	
				Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Media Center dan Pelayanan PPID		12000																							
		2.20.0.00.01.01	Koordinasi kemanfaatan Layanan Komunikasi Informasi Pemerintah	Jumlah Sekretariat Komunikasi Antara Masyarakat, Media dan Komunikator Antar Pemerintahan Terbentuk Program atau Kegiatan	Sekretariat	1	7,626,188,355	1.50	6,685,882,700.00	1.00	2,471,766,774.00	0.25	289,100,000.00							0.25	289,100,000	25.0	32.1	2	6,884,982,700	35.0	90.5	Dinas komunikasi dan informatika	
				Terwedianya Pemberitaan Informasi Pembangunan Daerah		12000																							
Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk pertumbuhan ekonomi		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi IT dan aplikasi E-government yang memenuhi security dan konten politik yang berlogo Isik	85	%	1,721,128,650	60	7,094,851,021.00	85	1,162,694,000.00	15	1,183,750,000.00							15.0	1,183,750,000	17.6	97.4	60.0	8,278,601,021	70.6	104.7	Dinas komunikasi dan informatika	
				Persentase infrastruktur IT yang berlogo Isik	35	%																							
			Pengelolaan e-government dan Keamanan Informasi Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan e-government dan Keamanan Informasi Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	85	%	1,721,128,650	60	7,094,851,021.00	85	1,162,694,000.00	15	1,183,750,000.00							15.0	1,183,750,000	17.6	97.4	60.0	8,278,601,021	70.6	104.7	Dinas komunikasi dan informatika	
		2.20.0.00.01.01	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	1,721,128,650	2.50	7,094,851,021.00	2.00	1,756,372,481.00	0.25	0.00							0.25	0	12.5	0.0	3	7,094,851,021	107.5	124.0	Dinas komunikasi dan informatika	
				Terwedianya Kebijakan Jaringan Intra Pemerintah Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik		12000																							
		2.20.0.00.01.01	Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Sekretariat Tim Pengembangan dan Pengelolaan E - Government Antar Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat	1	1,300,182,555	1.50	498,667,031.00	1.00	166,417,769.00	0.25	0.00							0.25	0	25.0	0.0	2	498,667,031	35.0	16.7	Dinas komunikasi dan informatika	
				Terwedianya Koordinasi dan Monitoring Sistem Informasi Pengendalian Menteri Teknis/Kepala LPNK/Sekretaris Utama		12000																							
		2.20.0.00.01.01	Pengelolaan Portal Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Portal Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	7,543,321,309	1.50	6,527,206,867.00	1.00	1,259,393,738.00	0.25	1,183,750,000.00							0.25	1,183,750,000	25.0	94.0	2	7,710,956,867	175.0	102.2	Dinas komunikasi dan informatika	
				Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Data Center		12000																							
		2.20.0.00.01.01	Koordinasi dan Monitoring Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Koordinasi dan Monitoring Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	1	886,148,666	1.50	119,363,300.00												0	2	119,363,300	2.8	13.5	Dinas komunikasi dan informatika	
						12000																							
STATISTIK																													
	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	ADA	1301	2,363,604,702	ada	417,362,000.00	ADA	154,220,000.00	ada	37,715,000.00							ada	0	ada	0.0	ada	417,362,000	ada	17.7	Dinas komunikasi dan informatika	
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	pengembangan dan implementasi sistem informasi data statistik	ADA	1301	2,363,604,702	ADA	417,362,000.00	ADA	154,220,000.00	ADA	37,715,000.00							ADA	0	ADA	0.0	ADA	417,362,000	ADA	17.7	Dinas komunikasi dan informatika	
		2.20.0.00.01.01	Koordinasi dan Monitoring Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Sekretariat Koordinasi dan Kelembagaan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Sekretariat	1	880,181,281	1.50	79,050,000.00															1	79,050,000	20.0	11.5	Dinas komunikasi dan informatika	
				Terlaksananya evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Bandar Lampung		12000																							
		2.20.0.00.01.01	Pengelolaan kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Daerah	Jumlah SDM yang Mengelola Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Daerah	Orang	12000	840,066,661	25.00	75,135,000.00	15.00	15,000,000.00	0.25	0.00							0.25				25	75,135,000	25.1	13.3	Dinas komunikasi dan informatika	
				Terwedianya Layanan Data dan Informasi		12000																							
		2.20.0.00.01.01	Pengelolaan Kualitas Data Statistik Sektoral	Jumlah Sekretariat Statistik Sektoral yang Dibangun	Sekretariat	1	1,190,334,762	1.50	242,252,000.00	1.00	70,816,665.00	0.25	0.00							0.25				2	242,252,000	35.0	10.4	Dinas komunikasi dan informatika	
				Terwedianya Data Statistik		12000																							
		2.20.0.00.01.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Berasal Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Sekretariat Statistik	Unit	1	355,043,038	1.50	20,725,000.00	1.00	58,401,353.00	0.25	17,715,000.00							0.25				1	20,725,000	125.0	13.5	Dinas komunikasi dan informatika	
				Terwedianya Pembangunan Infrastruktur Data Elektronik		12000																							
PERSANDIAN																													
	Meningkatnya keamanan siber lingkungan Pemerintah Daerah		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	85	%	1,613,074,085	60	1,256,842,499.00	85	290,466,115.00	15	0.00							15.0	0	15.8	0.0	60.0	1,256,842,499	83.2	14.6	Dinas komunikasi dan informatika	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada akhir Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Direvisi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir) periode pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023(i)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
												I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/6 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17	18
				Tolok Ukur	K	Satu	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pelayanan Informasi Publik, Pengelolaan Informasi Pemerintah Daerah dan Komunikasi Publik	**Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Saluran Komunikasi Perangkat Daerah**	85	%	8,63,079,000	60	1,350,602,109.00		200,466,113.00	0.25	0.00							0.3	0	#DIV/0!	0.0	85.0	1,350,602,899	63.1	24.6	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Persiapan Sebelum Tata Kelola Komunikasi Informasi dan Indikasi Komunikasi Sesuai Permintaan Instansi Kabupaten/Kota	Terlaksana			150	70,777,987.00	1.00	36,608,102.00	0.25	0.00							0.25	0			2	70,777,987	35.0	18.9	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Terlaksana Pemeliharaan dan Pengawasan Perangkat dan Penggunaan																									
				Pelaksanaan Komunikasi Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Layanan Sebelum Komunikasi Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Layanan			150	931,080,512.00	1.00	66,408,894.00	0.25	0.00							0.25	0			2	931,080,512	35.0	12.2	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Terlaksana Pengembangan dan Pengelolaan Website																									
				Penyelenggaraan Layanan Komunikasi Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Berbasis Elektronik	Perangkat Daerah		1,380,055,000	180	254,784,000.00	1.00	187,346,119.00	0.25	0.00							0.25				1	254,784,000	125.0	11.4	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Terjaminnya garansi Pengadaan Perangkat pasca dan Pemeliharaan Call																									
																					Rata-rata Capaian Kinerja							
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						57,926,916,456		25,001,091,342		12,946,013,798.00		2,666,330,483.80		-		-		-		Prediksi Kinerja 2,268,465,485								
																					TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...		RVALUE	24.2			#VALUE!	14.8		
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...		RVALUE	D			#VALUE!	K		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pelaksanaan kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka perbaikan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam kerja PD tahun berikutnya:



PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS KOPERASI DAN UKM
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	**BAB I**	**PENDAHULUAN**	✓			
	1.1	Latar Belakang	✓			
	1.2	Landasan Hukum	✓			
	1.3	Maksud dan Tujuan	✓			
	1.4	Sistematika Penulisan	✓			
2	**BAB II**	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN**	✓			
		Formulir E.81	✓			
3	**BAB III**	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	✓			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	✓			
4	**BAB IV**	**PENUTUP**	✓			

Bandar Lampung, Juli 2025

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kota Bandar Lampung

RIANA APRIANA, AP.MM
Pembina utama Muda
NIP. 19750427 199311 2 001

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Dr. REIN SUSINDA HESTY,S.Sos.,M.Si**	
	Kabid Perekonomian dan SDA Bapperida	
2	**HARI SUBAGIYO, ST,M.Si**	
	Staf Pelaksana Bapperida	

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida,

Dini Purnamawaty,S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP197002181993032002

Dipindai dengan CamScanner

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan.	✓			
4.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masingPerangkat Daerah sesuai surat edaranwalikota.	✓			
5.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah	✓			
6.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.		√	Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kota Bandar Lampung

RIANA APRIANA, AP.MM
Pembina utama Muda
NIP. 19750427 199311 2 001

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	Dr. REIN SUSINDA HESTY,S.Sos.,M.Si	
	Kabid Perekonomian dan SDA Bapperida	
2	HARI SUBAGIYO, ST,M.Si	
	Staf Pelaksana Bapperida	

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida,

Dini Purnamawaty,S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP197002181993032002

Dipindai dengan CamScanner

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi RenjaPerangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, Juli 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida,

Dini Purnamawaty,S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP197002181993032002

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	Dr. REIN SUSINDA HESTY,S.Sos.,M.Si	
	Kabid Perekonomian dan SDA Bapperida	
2	HARI SUBAGIYO, ST,M.Si	
	Staf Pelaksana Bapperida	

Dipindai dengan CamScanner

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN 19
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Dinas Koperasi dan UKM yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;
b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Kepmendagri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran dan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomoenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
15. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025.
3. Sebagai acuan bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BEKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaiannya Sampai Dengan Triwulan I Berkenaan/Tahun 2025

Rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran dari perencanaan tahunan, Rencana Strategis, RENJA tahun sebelumnya dan Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Pada dokumen RENJA 2025 ini, selain me-*review* tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan, berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

Laporan tersebut untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanan misi OPD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk program dan kegiatan, dengan pelaksanaan secara periodik. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung ini menyajikan hasil yang telah dicapai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2025.

Anggaran Perubahan belanja total Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2025 sebesar Rp.9.317.719.882,00 dengan 6 program dan 12 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan. Realisasi belanja Program dan kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni tahun 2025 sebesar Rp.792.284.226,00 atau pencapaian kinerja keuangan sebesar 22,59%.

Pagu anggaran belanja untuk Gaji dan tunjangan sebesar RP. 2.928.391.230,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.251.712.277,00 dengan realisasi anggaran sebesar 20,45%. Adapun program dan kegiatan serta capaian persentasenya sampai dengan bulan Juni tahun

2025 pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel Rekapitulasi Realisasi Belanja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung s/d Triwulan ke-1 TA. 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA PAGU ANGGARAN	%
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuten/Kota**	**4,006,493,777.00**	**792.284.226,00**	**3.214.209.551,00**	19,78
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**84,023,224.00**	4.000.000,00	**80.023.224,00**	4,76
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84,023,224.00	4.000.000,00	80.023.224,00	4,76
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.997.073.230**	**611.981.837.00**	**2.385.091.393,00**	20,42
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,928,391,230.00	598.931.837,00	2.329.459.393,00	20,45
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	68.682.000	13,050,000.00	55.632.000,00	19
	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	**15,000,000**	-	**15,000,000.00**	0.00
	Sub Kegiatan Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi	15,000,000	-	15,000,000.00	0.00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**170.140.863,00**	**32.366.288.00**	**131.774.575,00**	19,02
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,231,317.00	6.839.500,00	20.391.817,00	25,12
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,050,527.00	-	0	0.00

	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21,000,000	-	0	0
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26,999,019	1,565,000.00	25,434,019.00	5.80
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,400,000,00	1.350.000,00	4.050.000,00	25,00
	Sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	84.460.000,00	22,611,788.00	61.848.212,00	26,77
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**69,413,612.00**	**-**	**69,413,612.00**	0.00
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	24,112,092.00	-	24,112,092.00	0.00
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45,301,520.00	-	45,301,520.00	0.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**603,592,848.00**	**135.471.413.00**	**468.121.435.00**	22,44
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	85,192,848.00	15.871.413,00	69.321.435,00	18,63
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	518,400,000.00	119.600.000,00	398.800.000.00	23,07
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**67,250,000.00**	**8.464.688.00**	**58.785.312.00**	12,59
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,170,000.00	5.364.000,00	34.806.000.00	13,35

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19,250,000.00	3.100.688	16.149.312,00	16,11
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	7,830,000	-	7,830,000.00	0.00
2	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**75,052,192.00**	**-**	**75,052,192.00**	0.00
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**75,052,192.00**	-	**75,052,192.00**	0.00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	75,052,192.00	-	75,052,192.00	0.00
3	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**40,481,016.00**		**40,481,016.00**	0.00
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**40,481,016.00**		**40,481,016.00**	0.00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	40,481,016.00		40,481,016.00	0.00
4	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**1,100,364,245.00**	**-**	**1,100,364,245.00**	0.00
	Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**1,100,364,245.00**	**-**	**1,100,364,245.00**	0.00

	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	0.00
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah	100,364,245.00	-	100,364,245.00	0.00
5	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**	**3,572,579,906.00**	**0**	**3,572,579,906.00**	0.00
	Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan	**3,572,579,906.00**	**0**	**3,572,579,906.00**	0.00
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	0.00
	Sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	572,579,906.00	0	572,579,906.00	0.00
6	**Program Pengembangan UMKM**	**522,748,746.00**	**0**	**522,748,746.00**	0.00
	Kegiatan Pengembangan Usaha mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	**522,748,746.00**	**0**	**522,748,746.00**	0.00
	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	522,748,746.00	0	522,748,746.00	0.00
	JUMLAH	**9,317,719,882.00**	**792.284.226,00**	**8.525.435.656,00**	9,66

Beberapa program/kegiatan sampai dengan bulan Maret 2025 ada yang belum terserap anggarannya dan belum dilaksanakan kegiatannya dikarenakan belum tersedianya dana. Berikut ini Program dan Kegiatan yang telah berjalan sampai dengan bulan Maret 2025 sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, dengan anggaran sebesar Rp.4.006.493.777,00 dan terealisasi sebesar Rp.792.284.226,00 atau sebesar 19,78% dengan capaian kinerja sebesar 25,00%. Anggaran yang tersedia tersebut dialokasikan di beberapa kegiatan meliputi:

   1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.84.023.224,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.000.000,00 atau sebesar 4,76% dengan capaian kinerja 25% pada sub kegiatan:

   1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp.84.023.224,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.000.000 atau sebesar 4,76% dengan capaian kinerja 25%

   2.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.2.997.073.230,00 terealisasi sebesar Rp.611.981.837,00 atau sebesar 20,42% dengan capaian kinerja 25% yang terdiri dari sub kegiatan :

   2.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp.2.928.391.230,00 dan terealisasi sebesar Rp.598.931.837,00 atau sebesar 20,45% dengan capaian kinerja 25%

2.1.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp.68.682.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.13.050.000,00 atau sebesar 19,00% dengan capaian kinerja 50%

3.1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 15.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dengan capaian kinerja 0% yang terdiri dari sub kegiatan :

2.1.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dengan capaian kinerja 0%

4.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.170.140.863,00 dan terealisasi sebesar Rp.32.366.288,00 atau sebesar 19,02% dengan capaian kinerja 25% yang terdiri dari beberapa sub kegiatan:

3.1.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp.27.231.317,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.839.500,00 atau sebesar 25,12% dengan capaian kinerja 25%.

3.1.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp.5.050.527,00 dan terealisasi sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dengan capaian kinerja 50%.

3.1.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp. 21.000.000 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dengan capaian kinerja 0%.

3.1.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp.26.999.019,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.565.000,00 atau sebesar 5,80% dengan capaian kinerja 25%.

3.1.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran Rp. 5.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.350.000,00 atau sebesar 25% dengan capaian kinerja 25%.

3.1.6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp.84.460.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.22.611.788,00 atau sebesar 26,77% dengan capaian kinerja 25%.

5.1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.69.413.612,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0% dengan capaian kinerja 0% yaitu pada sub kegiatan :

4.1.1. Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp.24.112.092,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0% dengan capaian kinerja 0%.

4.1.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp.45.301.520,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0% dengan capaian kinerja 0%.

6.1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp.603.592.848,00 dan terealisasi sebesar Rp.135.471.413,00 atau sebesar 22,44% dengan capaian kinerja 25%. Dana Tersebut dialokasi pada dua sub kegiatan antara lain:

7.1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Lainnya dengan anggaran Rp.85.192.848,00 dan

terealisasi sebesar Rp.15.871.413,00 atau sebesar 18,63% dengan capaian kinerja 25%.

5.1.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp.518.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 398.000.000,00 atau sebesar 23,07% dengan capaian kinerja 25%.

7.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.67.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.464.688,00 atau sebesar 12,59% dengan capaian kinerja 25%. Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini terbagi menjadi tiga sub kegiatan antara lain :

6.1.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp.40.170.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.364.000,00 atau sebesar 26,71% dengan capaian kinerja 25%.

6.1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.19.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.100.688,00 atau sebesar 16,11% dengan capaian kinerja 25%.

6.1.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar 7.830.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dengan capaian kinerja 0%.

2. **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi** dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, dengan anggaran sebesar Rp. 75.052.192,00 dan terealisasi sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dengan capaian kinerja sebesar 25%. Anggaran yang tersedia tersebut dialokasikan di satu kegiatan meliputi:

   2.1. **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya sama 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 75.052.192,00 dan terealisasi sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dengan capaian kinerja 25% pada sub kegiatan:

      2.1.1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 75.052.192,00 dan terealisasi sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dengan capaian kinerja 25%.

3. **Program Pedidikan dan Latihan Perkoperasian** dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, dengan anggaran sebesar Rp.40.481.016,00 dan terealisasi sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dengan capaian kinerja sebesar 25%. Anggaran yang tersedia tersebut dialokasikan di satu kegiatan meliputi:

   3.1. **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp.40.481.016,00 dan terealisasi sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dengan capaian kinerja 25% pada sub kegiatan:

3.1.1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan anggaran sebesar Rp.40.481.016,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0,00% dengan capaian kinerja 25%.

4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, dengan anggaran sebesar Rp.1.100.364.245,00 dan terealisasi sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dengan capaian kinerja sebesar 25%. Anggaran yang tersedia tersebut dialokasikan di satu kegiatan meliputi:

4.1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.1.100.364.245,00 dan terealisasi sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dengan capaian kinerja 25% pada sub kegiatan:

4.1.1. Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Rp.1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0,00% dengan capaian kinerja 25%.

4.1.2. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses, Akses Pembiayaan, penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi usaha Koperasi Kewenangan koperasi dan Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp.100.364.245,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0,00% dengan capaian kinerja 25%.

5. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha kecil dan Usaha Mikro** dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, dengan anggaran sebesar Rp.3.572.579.906,00 dan terealisasi sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dengan capaian kinerja sebesar 25%. Anggaran yang tersedia tersebut dialokasikan di satu kegiatan meliputi:

   5.1. Pemberdayaan Kegiatan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan,Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan anggaran sebesar Rp. 3.572.579.906,00 dan terealisasi sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dengan capaian kinerja 25% pada sub kegiatan:

   5.1.1. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro dengan anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0,00% dengan capaian kinerja 25%.

   5.1.2. Pemberdayaan dan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan anggaran sebesar Rp.572.579.906,00 dan terealisasi sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dengan capaian kinerja 25%.

6. **Program Pengembangan UMKM** dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, dengan anggaran sebesar Rp. 522.748.746,00 dan terealisasi sebesar Rp.288.410.294,00 atau sebesar 55,17% dengan capaian kinerja sebesar 50%. Anggaran yang tersedia tersebut dialokasikan di satu kegiatan meliputi:

6.1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan anggaran sebesar Rp.522.748.746,00 dan terealisasi sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dengan capaian kinerja 25% pada sub kegiatan:

6.1.1. Fasiltasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi dengan anggaran sebesar Rp.522.748.746,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0% dengan capaian kinerja 25%.

Berikut ini program dan kegiatan tahun 2025 yang teralisasi beserta capaian kinerjanya dapat dilihat Pada Tabel 2. (E.81) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Fomulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung
Triwulan I Tahun 2025

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN n-1) (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (Persen)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (Persen)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
														I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = (12/7)*100		14 = (12+6)		15 = (14/5)*100		16
2	**17**				**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**43.040.475.086,45**		**17.548.250.080,00**		**8.596.391.230,00**		**792.284.226,00**		-		-		-		**792.284.226,00**		**9,22**		**18.340.534.306,00**		**42,61**	
2	**17**				**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				**43.040.475.086,45**		**17.548.250.080,00**		**8.596.391.230,00**		**792.284.226,00**		-		-		-		**792.284.226,00**		**9,22**		**18.340.534.306,00**		**42,61**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**PERSEN**	**98,00**	**25.579.440.892,75**		**11.093.537.417,00**	**98,00**	**3.886.493.777,00**	-	**792.284.226,00**	-	-	-	-	-	-	-	**792.284.226,00**	-	**20,39**	-	**11.885.821.643,00**	-	**46,47**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100,00**	**450.000.000,00**		**218.075.000,00**	**100,00**	**84.023.224,00**	-	**4.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	**4.000.000,00**	-	**4,76**	-	**222.075.000,00**	-	**49,35**	
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Dokumen	30,00	450.000.000,00	10,00	49.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	49.900.000,00	33,33	11,09	
						Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	30			168.175.000,00	5,00	84.023.224,00	0	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	-	4,76	-	172.175.000,00	-	#DIV/0!	
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100,00**	**20.371.191.021,04**		**8.597.951.898,00**	**100,00**	**2.981.533.230,00**	-	**611.981.837,00**	-	-	-	-	-	-	-	**611.981.837,00**	-	**20,53**	-	**9.209.933.735,00**	-	**45,21**	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Koperasi dan UKM yang tersedia	Kali	14	19.861.891.021,04	14	1.848.062.571,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	1.848.062.571,00	100,00	9,30	
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	26			6.506.799.327,00	26,00	2.928.391.230,00	0	598.931.837,00	-	-	-	-	-	-	-	598.931.837,00	-	20,45		7.105.731.164,00		#DIV/0!	
2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Koperasi dan UKM yang Terlaksana	Bulan	72,00	509.300.000,00	26,00	63.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,00	63.700.000,00	36,11	12,51	
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	25,00	-		179.390.000,00	1,00	53.142.000,00	0	13.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	13.050.000,00	-	24,56	-	192.440.000,00	-	#DIV/0!	
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100,00**	**166.000.000,00**		-		**15.000.000,00**											-	-	-	-	-	-	-	
2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	80,00	166.000.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	25				5,00	15.000.000,00		-									-	-	-	-	-	-	-	
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**622.931.939,71**		**350.283.647,00**	**98,00**	**185.680.863,00**	-	**32.366.288,00**	-	-	-	-	-	-	-	**32.366.288,00**	-	**17,43**	-	**382.649.935,00**	-	**61,43**	
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Paket	6,00	153.931.939,71	4,00	21.025.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	21.025.000,00	66,67	13,66	
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	5			76.936.098,00	1,00	27.231.317,00	1,00	6.839.500,00	-	-	-	-	-	-	1,00	6.839.500,00	100,00	25,12	1,00	83.775.598,00	20,00	-	
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	6,00	22.000.000,00	4,00	2.974.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	2.974.000,00	66,67	13,52	
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	5			10.798.298,00	1,00	5.050.527,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	100,00	-	1,00	10.798.298,00	20,00	#DIV/0!	
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	1,00	80.000.000,00	4,00	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	11.000.000,00	400,00	13,75	
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5			46.642.000,00	1,00	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.642.000,00	-	-	
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	6,00	163.000.000,00	4,00	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	25.000.000,00	66,67	15,34	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN n-1) (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (Persen)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (Persen)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV												
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = (12/7)*100		14 = (12+6)		15 = (14/5)*100		16	
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia	Paket	5			80.376.350,00	1,00	26.999.019,00		1.565.000,00								1.565.000,00		5,80		81.941.350,00			
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	6,00	34.000.000,00	4,00	5.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	5.400.000,00	66,67	15,88	
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	5			16.200.000,00	1,00	5.400.000,00	-	1.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000,00	-	25,00	-	17.550.000,00	-	-	
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	170.000.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	5			83.931.901,00	1,00	100.000.000,00	-	22.611.788,00	-	-	-	-	-	-	-	22.611.788,00	-	22,61						##########	
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**1.258.962.000,00**		**189.393.150,00**	**98,00**	**69.413.612,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**189.293.150,00**	-	**15,04**	
2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas bermotor	Unit	3,00	40.000.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	6	533.500.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25		32,00	61.450.000,00	22,00	24.112.092,00	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	61.450.000,00	0	-	
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	6,00	451.462.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25				4,00	45.301.520,00	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	-	
2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	4,00	234.000.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Paket	3			127.843.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.843.150,00	-	-	
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98,00**	**2.242.000.000,00**		**1.459.972.182,00**	**98,00**	**483.592.848,00**	-	**135.471.413,00**	-	-	-	-	-	-	-	**135.471.413,00**	-	**28,01**	-	**1.595.443.595,00**	-	**71,16**	
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	72,00	205.000.000,00	48,00	10.186.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00	10.186.190,00	66,67	4,97	
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	60			79.785.992,00	12,00	85.192.848,00	3,00	15.871.413,00	-	-	-	-	-	-	3,00	15.871.413,00	25,00	18,63	3,00	95.657.405,00	5,00	-	
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	72,00	2.037.000.000,00	48,00	274.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00	274.000.000,00	66,67	13,45	
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	60			1.096.000.000,00	12,00	398.400.000,00	3,00	119.600.000,00	-	-	-	-	-	-	3,00	119.600.000,00	25,00	30,02	3,00	1.215.600.000,00	5,00	-	
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**468.355.932,00**		**277.961.540,00**	**98,00**	**67.250.000,00**	-	**8.464.688,00**	-	-	-	-	-	-	-	**8.464.688,00**	-	**12,59**	-	**286.426.228,00**	-	**61,16**	
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	6,00	201.192.528,00	6	26.958.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	26.958.000,00	100,00	13,40	
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	Unit	1			103.818.500,00	1,00	40.170.000,00	0	5.364.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.364.000,00	0	0	-	109.182.500,00	-	-	
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	1,00	237.163.404,00	1	31.316.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	31.316.100,00	100,00	13,20	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN n-1) (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (Persen)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (Persen)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = (12/7)*100		14 = (12+6)		15 = (14/5)*100		16
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6			93.788.940,00	5,00	19.250.000,00	1,00	3.100.688,00							1,00	3.100.688,00	0	16,11	1,00	96.889.628,00	16,67	-	
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	5,00	30.000.000,00	11,00	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	4.500.000,00	220,00	15,00	
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	25,00			17.580.000,00	11,00	7.830.000,00	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.580.000,00	-	-	
																						Rata-Rata Capaian Kinerja		-	20,39				46,47	
																						Predikat Kinerja		SR	SR				SR	SR
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN UNTUK KOPERASI	PERSEN	35,89	561.762.500,00		61.145.000,00	35,11	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	61.145.000,00	-	10,88	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Koperasi	175,00	561.762.500,00		61.145.000,00	80,00	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	61.145.000,00	-	10,88	
2	17	03	2.01	0001	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang sehat kelembagaannya dan meningkat akuntabilitasnya	Koperasi	150,00	271.762.500,00																					
						Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Unit Usaha	400		320,00	43.970.000,00													0	0	320,00	43.970.000,00	80,00	0	
2	17	03	2.01	0002	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kepatuhan koperasi terhadap perundang-undangan	Koperasi	50,00	290.000.000,00																					
						Jumlah koperasi yang mematuhi perundang-undangan koperasi kewenangan kabupaten/kota	Unit Usaha	250			17.175.000,00							0		0							17.175.000,00			
																						Rata-Rata Capaian Kinerja		-	-				10,88	
																						Predikat Kinerja		SR	SR				SR	SR
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	PERSEN	47,85	540.000.000,00		189.360.664,00	47,21	75.052.192,00	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	189.360.664,00	-	35,07	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi	Persen	37,50	540.000.000,00		189.360.664,00	35,18	75.052.192,00	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	189.360.664,00		35,07	
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi usaha simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	Koperasi	80,00	540.000.000,00	80	11.455.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	11.455.000,00	100,00	2,12	
						Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Unit Usaha	400			177.905.664,00	80,00	75.052.192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.905.664,00		-	
																						Rata-Rata Capaian Kinerja		-	-				35,07	
																						Predikat Kinerja		SR	SR				SR	SR
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERTUMBUHAN JUMLAH ANGGOTA KOPERASI	PERSEN	0,50	2.749.509.778,37		800.530.800,00	0,43	40.481.016,00	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	800.530.800,00	-	29,12	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi	Persen	60,00	2.749.509.778,37		800.530.800,00	48,80	40.481.016,00	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	800.530.800,00	-	29,12	
						Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	Persen	0,13				0,12		0		0		0														
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta peningkatan kualitas SDM perkoperasian	Orang	116,00	2.749.509.778,37	100,00	23.400.600,00															100,00	23.400.600,00	86,21	0,85	
						Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Orang	900			777.130.200,00	50,00	40.481.016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.130.200,00	-	-	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN n-1) (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (Persen)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (Persen)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV												
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = (12/7)*100		14 = (12÷6)		15 = (14/5)*100		16	
																						Rata-Rata Capaian Kinerja		-	-				29,12	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI	PERSEN	5,38	6.887.108.250,00		1.889.342.300,00	4,87	225.364.245,00	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.889.342.300,00	-	27,43	
						PERSENTASE FASILITASI PENERBITAN SERTIFIKAT NOMOR INDUK KOPERASI (NIK)	PERSEN	29,54				27,12		0		0		0		-	-	-	-	-	-	-	-					
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi	Persen	1,26	6.887.108.250,00		1.889.342.300,00	1,01	225.364.245,00	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.889.342.300,00	-	27,43	
2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan koperasi dan keanggotaan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi melalui pemberdayaannya	Koperasi	30,00	6.887.108.250,00	30,00	90.618.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	90.618.400,00	100,00	1,32	
						Koperasi dengan keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	250		50	1.798.723.900,00	50,00	225.364.245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	1.798.723.900,00	20,00	0	
																						Rata-Rata Capaian Kinerja		-	-			-	27,43	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	RASIO PERTUMBUHAN WIRAUSAHA BARU BERSKALA MIKRO	PERSEN	26,80	2.252.951.625,00		1.278.113.504,00	23,60	3.710.000.000,00	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.278.113.504,00		56,73	
						PERSENTASE UKM NON BPR LKM AKTIF	PERSEN	42,75				40,51		0		0		0		-	-	-	-	-	-	-	-					
						PERSENTASE BPR/LKM AKTIF	PERSEN	100,00				100,00		0		0		0		-	-	-	-	-	-	-	-					
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk	Persen	4,20	2.252.951.625,00		1.318.203.904,00	3,90	3.710.000.000,00	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.318.203.904,00		58,51	
						Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	Persen	26,80				7,50		0		0		0		-	-	-	-	-	-	-	-					
2	17	07	2.01	0001	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terpetakan potensi	Pelaku Usaha	20	360.000.000,00	20	58.410.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	58.410.000,00	100,00	16,23	
						Jumlah unit usaha yang produktif , bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen	Unit Usaha	150,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang bermitra	Pelaku Usaha	20,00	198.951.625,00	20	240.795.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	240.795.500,00	100,00	121,03	
						Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	90			427.800.104,00	100,00	3.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427.800.104,00	-	#DIV/0!	
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi perizinan usaha	Pelaku Usaha	-	312.000.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	Unit Usaha	125				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberikan pelatihan	Pelaku Usaha	20,00	242.000.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Unit Usaha	120			491.000.000,00	500,00	710.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491.000.000,00	-	#DIV/0!	
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah kecamatan yang tersedia kredit ekonomi kerakyatan	Kecamatan	20,00	1.140.000.000,00	20	20.017.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	20.017.500,00	100,00	1,76	
						Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Orang	100			80.180.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.180.800,00	-	0	
																						Rata-Rata Capaian Kinerja		-	-			-	56,73	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			SR	R	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE USAHA MIKRO DAN KECIL	PERSEN	68,50	4.469.702.040,33		2.236.220.395,00	67,30	659.000.000,00	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236.220.395,00	-	50,03	
						PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS UMKM	PERSEN	8,20				5,40		0		0		0		-	-	-	-	-	-	-	-					

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN n-1) (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (Persen)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (Persen)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = (12/7)*100		14 = (12+6)		15 = (14/5)*100		16
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran**	**Persen**	**2,70**	**4.664.854.040,33**		**2.236.220.395,00**	**2,40**	**659.000.000,00**	**0**	-	**0**	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.236.220.395,00**		**47,94**	
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah promosi dan pemasaran produk-produk UMKM	Kali	7,00	4.274.550.040,33	7	30.201.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7,00**	**30.201.850,00**	**100,00**	**0,71**	155
						Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Unit Usaha	150,00			1.836.073.045,00	30	659.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.836.073.045,00**	-	**#DIV/0!**	
					Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK NON FISIK)	Jumlah peserta pelatihan Kop dan UKM	Orang	116,00	390.304.000,00	**116**	369.945.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																					Rata-Rata Capaian Kinerja		-				50,03	
																					Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Program/kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 dan rencana Pergeseran dan Perubahannya

Pada Anggaran pendapapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 terdapat Rencana Perubahan Anggaran pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Sesuai yang diamanahkan oleh pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden No 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta diperkuat oleh edaran Sekertaris Daerah Kota Bandar Lampung No 343 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Adapun total pengurangan anggran Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung ditetapkan sebesar Rp.398.671.348,00

SUB KEGIATAN	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	SELISIH
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84.023.224,00	84.023.224,00	-
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.928.391.230,00	2.928.391.230,00	-
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	53.142.000,00	53.142.000,00	-
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00	15.000.000,00	-
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.231.317,00	27.231.317,00	-
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.050.527,00	5.050.527,00	-
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	-
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.999.019,00	26.999.019,00	-
Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.400.000,00	5.400.000,00	-

Sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Sub Kegiatan Mebel	24.112.092,00	24.112.092,00	-
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.301.520,00	45.301.520,00	-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	85.192.848,00	85.192.848,00	-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	398.400.000,00	398.400.000,00	-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.170.000,00	40.170.000,00	-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Kendaraan Operasional atau Lapangan	19.250.000,00	19.250.000,00	-
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	7.830.000,00	7.830.000,00	-
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	75.052.192,00	75.052.192,00	-
Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	40.481.016,00	40.481.016,00	0
Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	225.364.245,00	100.364.245,00	125.000.000,00
Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0
Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha mikro	710.000.000,00	572.579.906,00	137.420.094,00
Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	659.000.000,00	522.748.746,00	136.251.254,00
	8.596.391.230,00	**8.197.719.882,00**	**398.671.348,00**

Total anggaran pagu murni Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah sebesar Rp.8.596.391.230,00 dengan realisasi hingga Triwulan I (satu) sebesar Rp.792.248.226,00 dan setelah terjadi pergeseran anggaran (yaitu Rp. 7.823.803.845,00 dikurangi efisiensi sebesar (yaitu Ro.8.596.391.230,00 dikurangi efisiensi sebesar Rp.398.671.348,00) menjadi Rp.8.197.719.882,00. Selain itu, terdapat penambahan anggaran dan terdapat sub kegiatan

baru sebesar Rp.1.120.000.000,00 pada 2 sub kegiatan, adapun rincian adalah sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	PENAMBAHAN ANGGARAN
1	2.17.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.000.000,00
2	2.17.07.2.01.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00
			1.120.000.000,00

Dengan demikian total Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (disingkat RKPD-Perubahan) Tahun 2025 adalah sebesar Rp.9.317.719.882,00

Secara Rinci Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025 ada pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									**5.101.935.330,00**	**8.596.391.230,00**	**9.317.719.882,00**	
						DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH									**5.101.935.330,00**	**8.596.391.230,00**	**9.317.719.882,00**	
82	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan menengah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan menengah	persen	persen	98	98	98	3.817.815.330,00	3.886.493.777,00	4.006.493.777,00	
	2	17	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas		persen	persen	100	100	100	60.000.000,00	84.023.224,00	84.023.224,00	
	2	17	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	5	5	5	60.000.000,00	84.023.224,00	84.023.224,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	Persen	Persen	100	100	100	2.986.635.330,00	2.981.533.230,00	2.997.073.230,00	
	2	17	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang/bulan	26	26	26	2.931.935.330,00	2.928.391.230,00	2.928.391.230,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	54.700.000,00	53.142.000,00	68.682.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	persen	100	100	100	50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	17	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	5	5	5	50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	persen	persen	98	98	98	179.400.000,00	185.680.863,00	170.140.863,00	
	2	17	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	25.000.000,00	27.231.317,00	27.231.317,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.000.000,00	5.050.527,00	5.050.527,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	17	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	25.000.000,00	26.999.019,00	26.999.019,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	84.460.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	persen	persen	98	98	98	43.000.000,00	69.413.612,00	69.413.612,00	
	2	17	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	20.000.000,00	24.112.092,00	24.112.092,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	17	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	23.000.000,00	45.301.520,00	45.301.520,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD	persen	persen	98	98	98	424.000.000,00	483.592.848,00	603.592.848,00	
	2	17	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	88.000.000,00	85.192.848,00	85.192.848,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENEN
	2	17	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	336.000.000,00	398.400.000,00	518.400.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang terpelihara	Inventaris kantor yang terpelihara	persen	persen	98	98	98	74.780.000,00	67.250.000,00	67.250.000,00	
	2	17	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	42.430.000,00	40.170.000,00	40.170.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	5	5	5	27.350.000,00	19.250.000,00	19.250.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	11	11	11	5.000.000,00	7.830.000,00	7.830.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
83	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	persen	persen	4785	4785	4785	70.000.000,00	75.052.192,00	75.052.192,00	
	2	17	04	201		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh kopperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh kopperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi	persen	persen	375,00	375,00	375,00	70.000.000,00	75.052.192,00	75.052.192,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	17	04	201	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota											
								Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	Unit Usaha	80	80	80	70.000.000,00	75.052.192,00	75.052.192,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
84	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi	Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi	persen	persen	5,00	5,00	5,00	50.000.000,00	40.481.016,00	40.481.016,00	
	2	17	05	201		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi	persen	persen	13	13	13	50.000.000,00	40.481.016,00	40.481.016,00	
	2	17	05	201	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi											
								Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		Orang	Orang	30	30	30	50.000.000,00	40.481.016,00	40.481.016,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase fasilitasi penerbitan Sertifikat Nomor induk Koperasi (NIK)		persen		5,38	5,38	5,38	205.120.000,00	225.364.245,00	1.100.364.245,00	
								Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		persen		2954	2954	2954				
	2	17	06	201		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi		persen		126	126	126	205.120.000,00	225.364.245,00	1.100.364.245,00	
	2	17	06	201	0004		Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota											
									Jumlah koperasi yang difasilitasi kemitraannya		unit usaha	0	0	126	0,00	0,00	1.000.000.000,00	
	2	17	06	201	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota											
								Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Unit Usaha	50	50	50	205.120.000,00	225.364.245,00	100.364.245,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
86	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro	persen	persen	268	268	268	300.000.000,00	3.710.000.000,00	3.572.579.906,00	
								Persentase BPR/LKM Aktif	Persentase BPR/LKM Aktif	persen		100	100	100				
								Persentase UKM Non BPR LKM Aktif	Persentase UKM Non BPR LKM Aktif	persen		4275	4275	4275				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	17	07	201		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk	persen		424	424	424	300.000.000,00	3.710.000.000,00	3.572.579.906,00	
								Rasio usaha mikro yag diberikan dukungan fasilitas pelatihan	Rasio usaha mikro yag diberikan dukungan fasilitas pelatihan	persen		78,00	78,00	78,00				
					0002		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro											
									Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro		unit usaha	0	90	90	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
	2	17	07	201	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro											
								Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		Unit Usaha		100	100	100	300.000.000,00	710.000.000,00	572.579.906,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
87	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Usaha Mikro dan Kecil		persen		82,00	82,00	82,00	659.000.000,00	659.000.000,00	522.748.746,00	
								Pertumbuhan Produktivitas UMKM		persen		685,00	685,00	685,00				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	17	08	201		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		persen		27,00	27,00	27,00	659.000.000,00	659.000.000,00	522.748.746,00	
	2	17	08	201	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi												
								Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		Unit Usaha		30	30	30	659.000.000,00	659.000.000,00	522.748.746,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UKM juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan UKM dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

EVA DWIANA

Dipindai dengan CamScanner

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	√			
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	√			
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, Juli 2025

Plt.Kepala Dinas Kesehatan
Kota Bandar Lampung,

Desti Megaputri,SP.,MT
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 19691202 199503 2 002

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si. Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappperida Kota Bandar Lampung	
2	RENI MARITA SUDEMI, S.H., M.H. Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui;
Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung,

Dinia Purnamawaty, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.197002181993032002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan.	√			
4.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masingPerangkat Daerah sesuai surat edaranwalikota.	√			
5.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah	√			
6.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.		√	Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025

Plt.Kepala Dinas Kesehatan
Kota Bandar Lampung,

Desti Megaputri,SP.,MT
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 19691202 199503 2 002

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.**	
	Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappperida Kota Bandar Lampung	
2	**RENI MARITA SUDEMI, S.H., M.H.**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui;
Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung,

Dini Purnamawaty, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197002181993032002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi RenjaPerangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Telah Sesuai
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Telah Sesuai

Bandar Lampung, Juli 2025

Mengetahui;
Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung,

Dini Purnamawaty, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197002181993032002

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.**	
	Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappperida Kota Bandar Lampung	
2	**RENI MARITA SUDEMI, S.H., M.H.**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		
BAB I	**PENDAHULUAN**	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Landasan Hukum	I-2
	1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja	I-5
	1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**	II-1
BAB III	**KINERJA DAN PENGANGGARAN**	III-1
BAB IV	**PENUTUP**	IV-1

LAMPIRAN 02
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616/IV.01/HK/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, mandiri dan transparan di bidang perencanaan pembangunan daerah guna mencapai sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2025, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 telah dilakukan perubahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025, perubahan tersebut didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, dimana terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga adanya perubahan, pergeseran, penambahan, dan penghapusan pada indikator, target kinerja/program dan anggaran Tahun 2025.

Dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 tersebut, maka Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan perlu diubah dan disesuaikan guna menjamin sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan perencanaan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandar

Lampung. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 secara simultan dilakukan dengan mempedomani perubahan-perubahan arah kebijakan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Untuk itu, sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 yang didasarkan atas hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025. Dalam hal ini, faktor utama perubahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ditujukan untuk mencapai target kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana Kerja lingkup Dinas Kesehatan Kota Bandar Lmapung terutama berupa pergeseran anggaran antar kegiatan, penambahan/penghapusan kegiatan, atau penambahan/pengurangan jumlah anggaran serta target dan indikator kinerja untuk menyesuaikan dengan upaya pencapaian target dalam rangka mewujudkan visi Kota Bandar Lampung yaitu "*Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat".*

I.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 3406 Tahun 2024;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 12);
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);
20. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21).

I.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025;

b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang
I.2 Landasan Hukum
I.3 Maksud dan Tujuan
I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Kerja (Renja) Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sampai dengan triwulan I Tahun 2025, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program atau kegiatan Renstra Dinas Kesehatan, adapun tabel evaluasi hasil Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2. Dapat dijelaskan bahwa Anggaran yang mendukung Program kegiatan kesehatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2025 berdasarkan Indikator Sasaran dan Target dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 346.785.440.161,00 dengan realisasi sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 48.601.226.986,00 (14,01%).

Anggaran tersebut diperuntukan bagi 5 Program dan 18 kegiatan dan 73 Sub Kegiatan bidang kesehatan. Berdasarkan dari Tabel 2, Evaluasi Triwulan I Tahun 2025, dari 18 kegiatan yang dijalankan belum semua dapat memenuhi target capaian yang telah ditentukan, hal ini disebabkan belum banyaknya kegiatan yang dapat dijalankan. Berikut kegiatan yang sampai dengan triwulan I telah dilaksanakan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas. Capaian indikator pada triwulan I sebesar 0% Pencapaian indikator ini didukung oleh sub kegiatan :
   a. Penyusunan dokumen perencanan perangkat daerah penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 29.999.879,00 sampai dengan

triwulan I belum ada realisasi. Output kegiatan berupa cetak dokumen perencanaan dan evaluasi akan dilaksanakan pada triwulan ke 3.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator capaian berupa Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel, realisasi anggaran pada triwulan I mencapai 29,64 persen. Pencapaian indikator ini didukung oleh sub kegiatan :
   a. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN

      Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 121.858.464.783,00 terealisasi sebesar 36.146.825.807,00 atau mencapai 29,66 persen. Pencapaian kegiatan berupa pembayaran Pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan daerah. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 232.887.565,00 terealisasi sebesar Rp. 38.700.000,00 atau mencapai 16,62 persen. Pencapaian kegiatan berupa pembayaran honorarium pelaksana kegiatan bagi PPK dan PPTK.
3. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan indikator capaian berupa Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD. Realisasi anggaran pada triwulan I baru mencapai 10,80 persen dari anggaran sebesar Rp. 387.812.425,00. Pencapaian realisasi anggaran ini didukung oleh sub kegiatan :
   a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dengan jumlah anggaran Rp29.991.525,00 terealisasi sebesar Rp. 5.783.300,00 atau mencapai 19,28 persen. Pencapaian kegiatan berupa penyediaan peralatan listrik kebutuhan kantor

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Jumlah anggaran Rp. 74.999.333,00 terealisasi sebesar Rp. 9.492.200,00 atau mencapai 12,66 persen. Indikator capaian berupa penyediaan peralatan tulis kantor untuk kelancaran administrasi perkantoran.

c. Penyediaan peralatan rumah tangga

   Dengan jumlah anggaran Rp. 17.059.060,00 terealisasi sebesar Rp. 5.008.900,00 atau mencapai 29,36 persen.

   Dengan indikator capaian berupa penyediaan peralatan rumah tangga untuk menjaga kebersihan kantor.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

   Dengan jumlah anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.7.425.000,00 atau mencapai 14,85 persen. Indikator capaian berupa penyediaan makan minum kegiatan rapat kantor.

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

   Dengan jumlah anggaran Rp. 77.499.921 terealisasi sebesar Rp. 7.815.000,00 atau mencapai 10,08 persen.

   Dengan indikator capaian berupa penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan. Jumlah anggaran Rp. 10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.400.000,00 atau mencapai 24 persen.

   Dengan indikator capaian berupa penyediaan bahan bacaan kantor dan peraturan perundang-undangan yang tersedia.

g. Fasilitasi Kunjungan Tamu

   Dengan jumlah anggaran Rp. 28.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.960.000,00 atau mencapai 14,14 persen.

   Indikator capaian berupa penyediaan makan minum kunjungan tamu kantor.

h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   Dengan jumlah anggaran Rp. 100.262.586,00. Sampai dengan

trwiwulan ke- I belum ada realisasi dikarenakan belum adanya kegiatan perjalanan dinas keluar kota.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator berupa Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD. Capaian realisasi pada triwulan I mencapai Rp. 3.403.908.679,00 (21,42%) dari anggaran Rp.15.889.000.000,00. Pencapaian indikator ini didukung oleh sub kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      Dengan jumlah anggaran Rp. 186.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 25.583.679,00 atau mencapai 13,75 persen. Dengan indikator capaian berupa pembayaran pemakaian listrik, air dan jasa komunikasi kantor Dinas Kesehatan dan Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan.
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
      Dengan jumlah anggaran Rp. 15.703.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.378.325.000,00 atau mencapai 21,51 persen. Dengan indikator capaian berupa pembayaran gaji tenaga kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Inventaris Kantor yang Terpelihara. Capaian realisasi pada triwulan I mencapai 0,70 persen atau Rp. 4.704.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 671.224.402,00 Pencapaian indikator ini didukung oleh sub kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.Dengan jumlah anggaran Rp. 43.670.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.704.000,00 atau mencapai 10,77 persen. Dengan indikator capaian berupa terpeliharanya kendaraan Dinas Jabatan Kepala Dinas Kesehatan.

6. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dengan indikator Tersedianya anggaran untuk operasional BLUD Puskesmas. Capaian realisasi pada triwulan I masih mencapai 0 persen atau Rp.0 dari alokasi anngaran sebesar Rp. 78.696.846.000,00 Pencapaian indikator ini didukung oleh sub kegiatan :

   Pelayanan dan Penunjang BLUD, jumlah anggaran Rp. 78.696.846.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0 atau mencapai 0

3.2.1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp. 126.125.467.888,00 Output kinerja dari program adalah menurunnya angka/kasus kematian bayi (AKB). Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita, prevalensi tuberkulosis. Realisasi anggaran sebesar Rp. 8.965.204.100 (7,11%). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 13.184.428.336,00 dan realisasi anggaran Rp. 0 (0%).

1.2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.112.783.484.527,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.965.204.100,00 (7,95%). Kegiatan ini didukung oleh 32 sub kegiatan yaitu :

1.2.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Dukungan anggaran sebesar Rp. 1.341.389.821,00 sumber aggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah terlaksananya workshop skrening layak hamil. cakupan pemeriksaan ibu hamil, terlaksananya pertemuan peningkatan tablet FE pada

ibu Hamil, tersedianya media penyuluhan untuk Ibu Hamil. Sampai dengan trwiwulan 1 belum ada realisasi anggaran. Realisasi fisik kegiatan tercapai 7,84 persen.

1.2.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Dukungan anggaran sebesar Rp. 99.999.812,00. Output kinerja yang ingin dicapai adalah menurunnya kasus kematian ibu bersalin. Sampai dengan Triwulan 1 belum ada realisasi untuk kegiatan ini. saat ini kegiatan masih dilaksanakan.

1.2.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir Dukungan anggaran sebesar Rp. 99.999.882,00. Output kinerja yang ingin dicapai adalah cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan. Realisasi anggaran Rp. 4.230.000,00 (4,23%).

1.2.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Dukungan anggaran sebesar Rp. 99.999.856,00. Output kinerja Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sampai dengan Triwulan 1 belum ada realisasi untuk kegiatan ini. saat ini kegiatan masih dilaksanakan.

1.2.5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar. Dukungan anggaran sebesar Rp. 679.899.875,00 sumber aggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah Terlaksananya pelatihan pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan tindak pidana perdagangan orang. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Rp 0 (0%)

1.2.6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Dukungan anggaran sebesar Rp. 79.999.920,00 Output kinerja yang ingin dicapai adalah pemeriksaan kesehatan pada usia produktif (15-59 tahun) melalui Posbindu (Pos

Pembinaan Terpadu) untuk deteksi dini penyakit tidak menular baik berasal dari keturunan maupun perubahan pola hidup, seperti penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis/diabetes melitus, hipertensi dan penyakit lainnya. Saat ini jumlah posbindu aktif sebanyak 705. Belum ada realisasi anggaran pada kegiatan ini. Realisasi kegiatan yang telah dilakukan 30 persen.

1.2.7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Dukungan anggaran sebesar Rp. 445.299.903,00. Realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 0 (0%). Kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai 20 persen

1.2.8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Dukungan anggaran sebesar Rp. 109.999.928,00. Output kinerja yang ingin dicapai adalah pelaksanaan evaluasi dan monitoring serta kesehatan pada usia produktif (15-59 tahun) melalui Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) untuk deteksi dini penyakit hipertensi/tekanan darah tinggi. Belum ada realisasi anggaran pada kegiatan ini. Realisasi kegiatan yang telah dilakukan 20 persen.

1.2.9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Dukungan anggaran sebesar Rp. 94.995,684,00 Output kinerja yang ingin dicapai adalah pemeriksaan kesehatan dalam upaya deteksi dini penyakit diabetes melitus di masyarakat kegiatan telah dilaksanakan melalui Posbindu, Puskesmas dan jaringannya. Belum ada realisasi anggaran pada kegiatan ini. Realisasi kegiatan yang telah dilakukan 20 persen.

1.2.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Dukungan anggaran sebesar Rp. 394.399.876,00 Output kinerja yang ingin dicapai adalah pengelolaan dan penatalaksanaan deteksi dini ornag dengan gangguan jiwa berat. Sumber anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus/DAK non Fisik yang tersebar di 31 Puskesmas Realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 0 (0%). Kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai 20 persen

1.2.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Dukungan anggaran sebesar Rp. 939.550.000,00 sumber aggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kegiatan penyakit tuberkulosis. Pelaksanaan sosialisasi sistem informasi terpadu tuberkulosis (SITB). Penemuan Kasus TBC dengan pemeriksaan TCM. Realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 0 (0%). Kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai 20 persen

1.2.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Dukungan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00. Output kinerja yang ingin dicapai adalah pelaksanaan deteksi orang resiko HIV ke masyarakat, resiko tertular HIV (populasi kunci). Pelaksanaan pengadaan bahan habis pakai pemeriksaan resiko HIV dalam proses. Belum ada realisasi anggaran pada kegiatan ini. Realisasi kegiatan yang telah dilakukan 20 persen.

1.2.13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana

Dukungan anggaran sebesar Rp. 963.018.000,00. Realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.

127.420.000,00 (13,23%) Penggunaan anggaran dari sub kegiatan diperuntukkan operasional pelayanan ambulan gratis dan kendaraan jenazah. Output kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan ambulan dan kendaraan ambulan jenazah gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat Kota Bandar lampung yang memerlukan pelayanan kegawatdaruratan. Masyarakat Kota Bandar Lampung dapat menggunakan fasilitas pelayanan ambulan gratis ini melalui call center nomor 0822 78221 400 yang siap melayani masyarakat 24 jam, kapan saja dibutuhkan.

1.2.14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 4.988.129.051,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus/DAK bidang kesahatan tahun 2025. Penggunaan anggaran dari sub kegiatan ini diperuntukkan beberapa pertemuan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat dan upaya penanggulangan stunting mulai dari penyusunan regulasi, pemantapan kompetensi petugas dalam pelayanan gizi dan penanggulangan stunting serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 (0%) dengan output kegiatan 25 persen.

1.2.15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olah raga

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 276.639.948,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 (0%) dengan output kegiatan 20 persen.

1.2.16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 576.699.959,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 (0%) dengan output kegiatan 20 persen.

1.2.17. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 212.109.525,00. Alokasi anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun anggaran 2025. Alokasi anggaran dipergunakan untuk pertemuan koordinasi lintas program dan sektor dalam upaya pelayanan promosi kesehatan ke masyarakat. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 (0%) ouput kegiatan 40 persen.

1.2.18. Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.579.634.904,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 (0%) ouput kegiatan 25 persen.

1.2.19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 210.799.760,00. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 realisasi keuangan Rp. 0 (0%). Realisasi kegiatan telah berjalan 20 persen.

1.2.20. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 4.885.350.000,00. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 realisasi keuangan Rp. 0 (0%). Realisasi kegiatan telah berjalan 20 persen.

1.2.21. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Sub Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 68.310.091.252,00, Realisasi sebesar Rp. 6.347.724.100 (9,29%). Pencapaian kegiatan sebesar 25 persen berupa pembayaran klaim Rumah Sakit dan Puskesmas bagi pasien yang menggunakan fasilitas program pelayanan

kesehatan masyarakat jaminan kesehatan masyarakat perkotaan.

1.1.22. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional

Sub Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 175.180.000,00, Alokasi anggaran ini dipergunakan untuk membiayai pengambilan dan pengiriman sampel daraah dalam program deteksi dini pencegahan dan pengendaalian penyakit ILI dan stunting. Realisasi sebesar Rp. 26.559.731. (0%). Pencapaian kegiatan sampai dengan triwulan ketiga masih belun terealasi maksimal Karen kegiatan dimulai pada awal triwulan kedua, saat ini kegiatan pengambilan dan pengiriman sampel darah masih berlangsung.

1.2.23. Operasional Pelayanan Puskesmas

Sub kegitan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 7.623.137.677,00 terserap/terealisasi sebesar sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 sebesar Rp. 0 (0%).

Alokasi anggaran berupa Bantuan Operasiona Puskesmas (BOK) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun 2025. Anggaran dipergunakan untuk dukungan kegiatan pelayanan di 31 Puskesmas terutama pelayanan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat).

1.2.24. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.16.848.186.900,00 sumber anggaran APBD Kota Bandar Lampung dan DAK Bidang kesehatan tahun 2025. Realisasi anggaran Rp. 2.485.830.000,00 (14,75%). Sampai dengan triwulan 1 realisasi anggaran ini

digunakan untuk pembayaran insentif kader Posyandu dan Poskeskel sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Posyandu dan Poskeskel, dan untuk bantuan kepada Posyandud alam pemberian makanan tambahan bagi bayi balita. Makanan tambahan inidiberikan kepada semua sasaran bayi dan balita di kegiatan Posyandu tanpa melihat status gizinya. Hal ini dilakukan sebagai stimulan motivasi bagi para orang tua untuk membawa bayi dan balita ke pelayanan Posyandu setiap bulannya.

1.2.25. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 49.999.792,00. Belum realisasi anggaran untuk kegiatan ini. Pelaksanaan dan persiapan akreditasi saat ini sedang berproses dan berjalan 25 persen.

1.2.26. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 74.999.792,00. Alokasi anggaran dipergunakan bagi investigasi dalam upaya pencegahan apabila ada kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Belum realisasi anggaran untuk kegiatan ini, kegiatan sedang dalam proses pelaksanaan

1.2.27. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah.

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 75.000.000. Alokasi anggaran dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagai upaya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah melalui peningkatan kapasitas petuga kesehatan di Puskesmas. Belum realisasi anggaran untuk kegiatan ini, kegiatan sedang dalam proses pelaksanaan

1.2.28. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis. Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 100.000.000,00. Sumber anggaran APBD ini dipergunakan untuk penanggulangan TBC di kota Bandar Lampung. Sampai dengan triwulan 1 belum ada realisasi anggaran, proses kegiatan telah berjalan 20 persen.

1.2.29. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV). Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 75.000.000,00. Sumber anggaran APBD ini dipergunakan untuk penanggulangan orang dengan HIV di kota Bandar Lampung. Sampai dengan triwulan 1 belum ada realisasi anggaran, proses kegiatan telah berjalan 20 persen.

1.2.30. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Malaria. Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 49.699.936,00. Alokasi anggaran dipergunakan untuk penanggulangan malaria di kota Bandar Lampung. Yaitu untuk pembelian larvasida dan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) malaria. RDT ini digunakan sebagai deteksi/pemeriksaan skrening malaria. Sampai dengan triwulan 1 realisasi anggaran Rp.0 (0%). Proses pengadaan larvasida dan RDT malaria sedang berproses.

1.2.31. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi. Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 752.184.932,00. Alokasi anggaran dipergunakan dalam upaya penguatan Kesehatan Reproduksi dan Calon Pengantin, Penguatan Program Kesehatan Terhadap Perempuan dan Kesehatan Terhadap Anak, Penguatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dalam Siklus Hidup melalui advokasi lintas sektor. Sampai dengan triwulan 1 realisasi anggaran baru Rp. 0 (0%) .

1.2.32. Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak. Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 472.088.042,00. Alokasi anggaran dipergunakan untuk kegiatan biaya permeriksaan skrining hipotiroid kongenital (SHK), Audit Kasus Kematian Ibu dan Anak. Alokasi anggaran ini tersebardi 31 Puskesmas. Sampai dengan triwulan 1 realisasi anggaran Rp. 0 (0%) .

1.2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 157.555.025,00. Alokasi anggaran dipergunakan untuk pelaksanaan pengelolaan sistem informasi di Dinas Kesehatan. Realisasi anggaran Rp.0 (0%) yang dipergunakan untuk updating portal web Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai sarana penyebarluasan informasi.

3.2.2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp. 1.336.373.398,00. Output kinerja dari program adalah Persentase Sumber daya manusia kesehatan dengan kompetensi sesuai standar 71 persen dan persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 60 persen. Sampai dengan Trwiwulan 1 belum ada realisasi anggaran. Proses kegiatan berjalan 25 persen.

3.2.3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp. 317.854.659,00. Dengan Output kinerja berupa terlaksananya pembinaan monitoring dan evaluasi sarana kefarmasian (apotek, toko obat) dan industri makanan rumah tangga yang ada di wilayah Kota

Bandar Lampung. Sampai dengan triwulan 1 belum ada realisasi anggaran pada program ini dikarenakan kegiatan sedang berproses. Proses kegiatan mencapai 25 persen. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 (0%).

3.2.4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp. 1.089.529.901,00. Dengan realisasi output kinerja berupa pemberdayaan masyarakat dalam upaya hidup sehat. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 (0%) yang didukung oleh 2 sub kegiatan:

1.1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Kegiatan ini didukung anggaran Rp. 600.499.778,00 yang terdiri dari :

- Dana hibah dalam bentuk uang Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Bandar Lampung sejumlah Rp.500.499.778,00.
- Untuk updating data kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) bersumber dari DAK bidang kesehatan tahun 2025 sebesar Rp. 100.000.000,00.

1.2. Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif tingkat daerah Kabupaten/kota. Didukung dengan satu sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup bersih dan sehat dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00. Sampai dengan triwulan belum ada realisasi anggaran, proses kegiatan berjalan 20 persen.

Formulir E. 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2021 S/D 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) s.d TRIWULAN I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14+8)		17 = (16/7)*100		18
		1	02				**Dinas Kesehatan**				**1.860.202.588.436,50**		**934.163.188.488,21**		**346.785.440.161,00**		**48.601.226.986,00**							**48.601.226.986,00**		**14,01**		**982.764.415.474,21**		**52,83**		
		1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KESEHATAN**	**PERSEN**	**98,00**	**658.996.511.549,82**	**98,00**	**414.426.647.342,00**	**98,00**	**217.916.214.315,00**	**20,00**	**39.636.022.886,00**							**20,00**	**39.636.022.886,00**	**20,41**	**18,19**	**59,00**	**454.062.670.228,00**	**60,20**	**68,90**	**Dinas Kesehatan**
		1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100,00**	**70.000.000,00**	**100,00**	**70.283.813,00**	**100,00**	**29.999.879,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**50,00**	**70.283.813,00**	**50,00**	**100,41**	
		1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dinas kesehatan	Dokumen	2,00	70.000.000,00	2,00	70.283.813,00		29.999.879,00											2,00	70.283.813,00	100,00	100,41	
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen	10,00		4,00		2,00												4,00		40,00		
		1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100,00**	**493.313.759.064,82**	**100,00**	**333.605.511.034,00**	**100,00**	**122.091.352.348,00**	**20,00**	**36.185.525.807,00**							**20,00**	**36.185.525.807,00**	**20,00**	**29,64**	**100,00**	**369.791.036.841,00**	**100,00**	**74,96**	
		1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN dinas kesehatan yang Tersedia	kali	14,00	491.881.759.064,82	14,00	332.909.485.384,00		121.858.464.783,00		36.146.825.807,00								36.146.825.807,00		29,66	14,00	369.056.311.191,00	100,00	75,03	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	292,00		182,00		182,00		182,00						-		-		182,00		-		
		1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan dinas kesehatan yang Terfasilitasi	Bulan	12,00	1.432.000.000,00	12,00	696.025.650,00		232.887.565,00		38.700.000,00								38.700.000,00		16,62	12,00	734.725.650,00	100,00	51,31	
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00		2,00		1,00		0,25						0,25		0,25		2,25		45,00		
		1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100,00**	**25.000.000,00**	**12,50**	**9.600.000,00**	**100,00**	**50.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6,25**	**9.600.000,00**	**6,25**	**38,40**	
		1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	100,00	25.000.000,00		9.600.000,00		50.000.000,00												9.600.000,00		38,40	
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20,00		12,00		25,00												12,00		60,00		
		1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**1.455.600.000,00**	**98,00**	**1.072.445.729,00**	**98,00**	**387.812.425,00**		**41.884.400,00**								**41.884.400,00**		**10,80**	**49,00**	**1.114.330.129,00**	**50,00**	**76,55**	
		1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	120.000.000,00	1,00	84.450.850,00		29.991.525,00		5.783.300,00								5.783.300,00		19,28	1,00	90.234.150,00	100,00	75,20	
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00		2,00		1,00		0,25						0,25		0,25		2,25		45,00		
		1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	450.000.000,00	1,00	269.864.971,00		74.999.333,00		9.492.200,00								9.492.200,00		12,66	1,00	279.357.171,00	100,00	62,08	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00		2,00		1,00		0,25						0,25		0,25		2,25		45,00		
		1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	60.000.000,00	1,00	46.308.913,00		17.059.060,00		5.008.900,00								5.008.900,00		29,36	1,00	51.317.813,00	100,00	85,53	
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00		2,00		1,00		0,25						0,25		0,25		2,25		45,00		
		1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100,00	247.500.000,00	100,00	167.474.000,00		50.000.000,00		7.425.000,00								7.425.000,00		14,85	100,00	174.899.000,00	100,00	70,67	
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00		2,00		1,00		0,25						0,25		0,25		2,25		45,00		
		1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	300.000.000,00	1,00	223.999.996,00		77.499.921,00		7.815.000,00								7.815.000,00		10,08	1,00	231.814.996,00	100,00	77,27	
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00		2,00		1,00		0,25						0,25		0,25		2,25		45,00		
		1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1,00	45.000.000,00	1,00	37.100.000,00		10.000.000,00		2.400.000,00								2.400.000,00		24,00	1,00	39.500.000,00	100,00	87,78	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5,00		2,00		1,00		0,25						0,25		0,25		2,25		45,00		
		1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100,00	52.500.000,00	100,00	52.849.500,00		28.000.000,00		3.960.000,00								3.960.000,00		14,14	100,00	56.809.500,00	100,00	108,21	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5,00		2,00		1,00		0,25						0,25		0,25		2,25		45,00		
		1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	180.600.000,00	100,00	190.397.499,00		100.262.586,00												100,00	190.397.499,00	100,00	105,42	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00		2,00		1,00												2,00		40,00		
		1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**3.121.920.000,00**	**49,00**	**1.217.000.000,00**	**98,00**	**99.979.261,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**24,50**	**1.217.000.000,00**	**25,00**	**38,98**	
		1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1,00	550.000.000,00	1,00	547.000.000,00															1,00	547.000.000,00	100,00	99,45	
		1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	1,00	871.920.000,00																			
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4,00																				
		1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	1,00	850.000.000,00		670.000.000,00		99.979.261,00												670.000.000,00		78,82	
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00		1,00		1,00												1,00		100,00		
		1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	1,00	850.000.000,00																			
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00																				
		1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**154.199.033.021,00**	**100,00**	**76.706.204.118,00**	**100,00**	**15.889.000.000,00**		**3.403.908.679,00**								**3.403.908.679,00**		**21,42**	**50,00**	**80.110.112.797,00**	**50,00**	**51,95**	
		1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	1.150.000.000,00	12,00	547.325.118,00		186.000.000,00		25.583.679,00								25.583.679,00		13,75	12,00	572.908.797,00	100,00	49,82	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00		2,00		1,00		0,25						0,25		0,25		2,25		45,00		
		1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	10,00	153.049.033.021,00	10,00	76.158.879.000,00		15.703.000.000,00		3.378.325.000,00								3.378.325.000,00		21,51	10,00	79.537.204.000,00	100,00	51,97	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00		-		1,00		0,25						0,25		0,25		0,25		5,00		
		1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**6.811.199.464,00**	**98,00**	**1.745.602.648,00**	**98,00**	**671.224.402,00**	**25,00**	**4.704.000,00**							**25,00**	**4.704.000,00**	**25,51**	**0,70**	**61,50**	**1.750.306.648,00**	**62,76**	**25,70**	
		1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1,00	315.980.004,00	1,00	91.938.150,00		43.670.000,00		4.704.000,00								4.704.000,00		10,77	1,00	96.642.150,00	100,00	30,59	
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5,00		1,00		1,00												1,00		20,00		
		1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	3.095.219.460,00	12,00	1.241.425.202,00		457.666.802,00												12,00	1.241.425.202,00	100,00	40,11	

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2021 S/D 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) s.d TRIWULAN I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV									
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14-8)		17 = (16/7)*100		18
		1	02				**Dinas Kesehatan**				**1.860.202.588.436,50**		**934.163.188.488,21**		**346.785.440.161,00**		**48.601.226.986,00**		-		-		-	**48.601.226.986,00**		**14,01**		**982.764.415.474,21**		**52,83**	
							Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perlatannya	Unit	230,00		184,00		92,00		-		-		-	-				184,00			80,00		
		1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	60.000.000,00	1,00	41.750.000,00		20.000.000,00								-			1,00	41.750.000,00	100,00	69,58	
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70,00		30,00		13,00												30,00		42,86		
		1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	1.000.000.000,00	2,00	230.508.296,00	1,00	100.000.000,00								-		-	2,00	230.508.296,00	200,00	23,05	
		1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	800.000.000,00																		
		1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	1.540.000.000,00	1,00	139.981.000,00		49.887.400,00								-			1,00	139.981.000,00	100,00	9,09	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00		1,00		1,00												1,00		100,00		
		1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan**	**Unit Kerja**	**31,00**	**86.504.386.000,00**	**31,00**	**124.623.640.549,66**	**31,00**	**78.696.846.000,00**	**31,00**							-		-	**15,50**	**124.623.640.549,66**	**50,00**	**144,07**	
		1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	31,00	86.504.386.000,00	31,00	124.623.640.549,66	31,00	78.696.846.000,00	31,00							-		-	31,00	124.623.640.549,66	100,00	144,07	
																							Rata-Rata Capaian Kinerja		**20,41**	**18,19**			**60,20**	**68,90**	
																							Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**R**	**S**	
		1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER 1000 KELAHIRAN HIDUP**	**ANGKA**	**2,00**	**1.195.493.757.327,02**	**2,00**	**514.163.363.423,21**	**2,00**	**126.125.467.888,00**	-	**8.965.204.100,00**	-	-	-	-	-	**8.965.204.100,00**	-	**7,11**	**2,00**	**523.128.567.523,21**	**100,00**	**43,76**	
								ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP	**KASUS**	**10,00**		**4,00**		**10,00**												**4,00**		**40,00**		
								PREVALENSI STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA ANAK BADUTA (BAWAH DUA TAHUN)	**PERSEN**	**6,20**		**4,13**		**6,20**										**200,00**		**4,13**		**133,39**		
								TINGKAT PREVALENSI TUBERCULOSIS PER 100.000 PENDUDUK	**KASUS**	**379,00**		**370,00**		**384,00**												**370,00**		**97,63**		
		1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	**Pemenuhan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**84,00**	**199.647.629.128,59**	**80,00**	**68.490.392.433,00**	**84,00**	**13.184.428.336,00**	**20,00**	-	-	-	-	-	-	**20,00**	-	**23,81**	-	**50,00**	**68.490.392.433,00**	**59,52**	**34,31**	
		1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Bangunan Puskesmas Campang Raya, Puskesmas Sumur Batu, Kupang Kota	Puskesmas	3,00	48.175.654.417,20	3,00	7.648.337.800,00													3,00	7.648.337.800,00	100,00	15,88	
								Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	2,00		3,00														3,00		150,00		
		1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	6,00	2.443.907.030,00	4,00	3.777.020.530,00													4,00	3.777.020.530,00	66,67	154,55	
		1	02	02	2.01	0013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan di IFK dan Puskesmas sesuai standar	Persen	100,00	2.768.127.295,00	100,00	1.575.250.000,00													100,00	1.575.250.000,00	100,00	56,91	
								Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1,00		1,00														1,00		100,00		
		1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya peralatan fogging fokus Peningkatan pelayanan di Puskesmas dengan menggunakan alat kesehatan yang sesuai standar dan aman tersedianya alat kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan covid 19	Persen	80,00	33.085.414.558,30	80,00	23.538.472.754,00													80,00	23.538.472.754,00	100,00	71,14	
								Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1,00		1,00														1,00		100,00		
		1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase Kalibrasi Peralatan Kesehatan di Puskesmas	Persen	60,00	646.000.000,00	60,00	246.284.850,00													60,00	246.284.850,00	100,00	38,12	
								Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit	1,00		1,00														1,00		100,00		
		1	02	02	2.01	0016	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase pengadaan obat dan vaksin Persentase vitamin untuk penceghahan covid19	Persen Persen	80,00	60.074.491.342,31	80,00	20.884.662.476,00													80,00	20.884.662.476,00	100,00	34,76	
								Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	5,00		1,00														1,00		20,00		
		1	02	02	2.01	0017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase bahan habis pakai untuk penceghahan dan penanggulangan covid19 Tersedianya kebutuhan obat dan BMHP di Puskesmas baik jenis maupun jumlahnya	Persen	80,00	52.454.034.485,78	80,00	10.820.364.023,00													80,00	10.820.364.023,00	100,00	20,63	
								Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	5,00		1,00														1,00		20,00		
		1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit			1,00	102.180.000,00													1,00	102.180.000,00			
		1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket			1,00	9.165.590.805,00	1,00	13.109.428.572,00													1,00	9.165.590.805,00			
		1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,Vaksin,Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket			1,00	136.788.000,00	1,00	74.999.764,00													1,00	136.788.000,00			
		1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**84,00**	**995.325.339.398,44**	**80,00**	**440.729.729.987,71**	**84,00**	**112.783.484.527,00**	**19,00**	**8.965.204.100,00**	-	-	-	-	-	**19,00**	**8.965.204.100,00**	**22,62**	**7,95**	**49,50**	**449.694.934.087,71**	**58,93**	**45,18**	
		1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Presentase cakupan pemeriksaan ibu hamil Terlaksananya pertemuan peningkatan tekler PE pada IBU Hamil media penyuluhan untuk Ibu Hamil	Persen	90,00	705.835.750,00	90,00	1.220.051.600,00		1.341.389.821,00								-		-	90,00	1.220.051.600,00	100,00	172,85	
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	92.815,00		39.184,00		19.592,00												39.184,00		42,22		
		1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah kasus kematian ibu bersalin	Kasus	14,00	158.350.750,00	14,00	1.059.401.000,00		99.999.812,00								-		-	14,00	1.059.401.000,00	100,00	669,02	
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	90.330,00		23.378,00		18.702,00												23.378,00		25,88		
		1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	90.330,00		22.264,00	389.494.000,00	17.811,00	99.999.882,00	-	4.230.000,00						4.230.000,00		4,23	22.264,00	393.724.000,00	24,65		
		1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah kasus kematian balita	Kasus	2,00	920.623.095,31	2,00	401.414.300,00		99.999.856,00								-		-	2,00	401.414.300,00	100,00	43,60	
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	431.340,00		173.024,00		86.512,00												173.024,00		40,11		
		1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	770.725,00	437.099.750,00	194.302,00	1.160.089.250,00	155.442,00	679.899.875,00								-		-	194.302,00	1.160.089.250,00	25,21	265,41	
		1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	100,00	143.750.000,00	943.081,00	1.982.251.250,00	188.616,00	79.999.920,00								-		-	943.081,00	1.982.251.250,00	943.081,00	1.378,96	
		1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	440.000,00	146.961.000,00	185.988,00	241.046.000,00	92.994,00	445.299.903,00								-		-	185.988,00	241.046.000,00	42,27	164,02	
		1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase upaya pencegahan penyakit menular dan tidak tidak menular	Persen	100,00	117.180.000,00	65,00	1.549.684.464,00		109.999.928,00											65,00	1.549.684.464,00	65,00	1.322,48	

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2021 S/D 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) s.d TRIWULAN I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH								
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14-8)		17 = (16/7)*100		18
		1	02				Dinas Kesehatan				1.860.202.588.436,50		934.163.188.488,21		346.785.440.161,00		48.601.226.986,00								48.601.226.996,00		14,01		982.764.415.474,21		52,83		
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	########		400.002,00		200.001,00												400.002,00				40,00		
		1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persen	100,00	113.400.000,00	-	2.884.849.768,00		94.995.684,00													2.884.849.768,00		2.543,96		
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	83.220,00		37.288,00		18.644,00												37.288,00				44,81		
		1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Terselenggaranya upaya penceghahan penyakit meniular dan tidak tidak meniular	Persen	100,00	226.100.000,00	-	62.672.500,00		394.399.876,00													62.672.500,00		27,72		
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	9.255,00		3.764,00		1.882,00												3.764,00				40,67		
		1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persen	100,00	189.000.000,00		3.463.609.500,00		939.550.000,00													3.463.609.500,00		1.832,60		
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	106.970,00		46.948,00		23.474,00												46.948,00				43,89		
		1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Persen	100,00	297.160.000,00	-	669.462.000,00		100.000.000,00													669.462.000,00		225,29		
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	140.300,00		56.120,00		28.060,00												56.120,00				40,00		
		1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Persen	100,00		50,00	86.767.450,00													50,00	86.767.450,00	50,00	-		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	25,00		1,00														1,00				4,00		
		1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Persentase ambulans yang siap dan layak jalan	Persen	100,00	4.121.480.000,00	100,00	13.074.080.500,00		963.018.500,00		127.420.000,00								127.420.000,00		13,23	100,00	13.201.500.500,00	100,00	320,31		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	25,00		7,00		6,00		1,00								1,00		16,67		8,00		32,00				
		1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase pelayanan gizi masyarakat	Persen	100,00	5.303.983.400,00	-	8.808.030.419,00		4.988.129.051,00													8.808.030.419,00		166,06		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	30,00		2,00		6,00												2,00				6,67		
		1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase peningkatan kebugaran jasmani dan kesehatan kerja masyarakat di Kota Bandar Lampung	Persen	100,00	514.445.330,00		68.085.000,00		276.639.948,00													68.085.000,00		13,23		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	15,00		1,00		1,00												1,00				6,67		
		1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase perbaikan kesehatan lingkungan di kota Bandar Lampung	Persen	100,00	1.273.256.309,95	-	1.045.328.100,00		576.699.959,00													1.045.328.100,00		82,10		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	15,00		2,00		3,00												2,00				13,33		
		1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase pelayanan promosi kesehatan	Persen	80,00	377.995.733,13	80,00	1.000.938.100,00		212.109.525,00													1.000.938.100,00	100,00	264,80		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	15,00		2,00		3,00												2,00				13,33		
		1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap, cakupan imunisasi bagi balita dan anak sekolah, cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiligi <24 jam, cakupan jemaah calon haji mendapat pelayanan kesehatan menuju istitbah	Persen	92,00	140.017.500,00	92,00	1.510.808.500,00		1.579.634.904,00											92,00	1.510.808.500,00	100,00	1.079,01		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	15,00		2,00		3,00												2,00				13,33		
		1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase pengelolaan kesehatan ODMK	Persen	80,00	245.480.000,00	80,00	193.486.000,00		210.799.760,00													193.486.000,00	100,00	78,82		
								Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	9.255,00		3.702,00		1.851,00												3.702,00				40,00		
		1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Persen	80,00	130.200.000,00	-	59.660.000,00														59.660.000,00		45,82		
								Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	9.255,00		1.851,00														1.851,00				20,00		
		1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien Baru TB Paru dan BTA Positif (Sembuh dan Pengobatan lengkap)/ Persentase Pasien Paru TB Baru BTA+ yang menyelesaikan Pengobatan (Sembuh maupun Pengobatan lengkap), Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD, Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit berbasis lingkungan lainnya (diare, malaria, dll)	Persen	70,00	14.977.492.235,00	70,00	7.034.587.872,00		4.885.350.000,00											70,00	7.034.587.872,00	100,00	46,97		
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	15,00		4,00		3,00												4,00				26,67		
		1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Kota Bandar Lampung yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan dengan Program FKRM	Jiwa	307.244,00	227.548.108.405,05	307.244,00	199.617.693.494,00		68.310.091.252,00		6.347.724.100,00						6.347.724.100,00		9,29	307.244,00	205.965.417.594,00	100,00	90,52		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	5,00		2,00		1,00		0,25								0,25		25,00		2,25		45,00		
		1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket			1,00	27.976.000,00	1,00	175.180.000,00											1,00	27.976.000,00				
		1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	5,00	1.040.000.000,00																			
		1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	1,00																				
		1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan manajemen puskesmas sesuai standar Jumlah dana operasional 2 Puskesmas Rawat Inap Tersedianya dana operasional 10 Puskesmas Rawat Jalan; - Tersedianya dana operasional 50 Pustu - Tersedianya data keuangan BLUD	Puskesmas Puskesmas Persen Persen	31,00	553.366.707.260,00	31,00	158.574.254.483,71		7.825.137.827,00											31,00	158.574.254.483,71	100,00	28,28		
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	25,00		6,00		5,00												6,00				24,00		
		1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Keluruhan siaga aktif (posyandu dan poskesdel aktif	Persen	85,00	171.292.714.000,00	85,00	32.456.613.252,00		16.848.186.900,00		2.485.830.000,00						2.485.830.000,00		14,75	85,00	34.942.443.252,00	100,00	20,40		
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	25,00		6,00		5,00		1,00								1,00		20,00		7,00		28,00		
		1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya re-akreditasi	Puskesmas	8,00	11.279.798.880,00	8,00	247.193.900,00		49.999.792,00											8,00	247.193.900,00	100,00	2,19		
								Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	80,00		8,00		8,00												8,00				10,00		

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. KEINJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2021 S/D 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) s.d TRIWULAN I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGING JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																									
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14-8)		17 = (16/7)*100		18
		1	02				**Dinas Kesehatan**				**1.860.202.588.436,50**		**934.163.188.488,21**		**346.785.440.161,00**		**48.601.226.986,00**							**48.601.226.986,00**		**14,01**		**982.764.415.474,21**		**52,83**		
		1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan			1,00	116.700.000,00	1,00	74.999.792,00													1,00	116.700.000,00			
		1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Persen	85,00	258.200.000,00	85,00	347.410.900,00		75.000.000,00													85,00	347.410.900,00	100,00	134,55	
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	30,00		2,00		1,00												2,00		6,67		
		1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang			80,00	351.715.000,00	80,00	100.000.000,00													80,00	351.715.000,00			
		1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang			70,00	144.150.000,00	70,00	75.000.000,00													70,00	144.150.000,00			
		1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang			30,00	76.589.534,00	30,00	49.699.936,00													30,00	76.589.534,00			
		1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen			1,00	827.949.351,00	1,00	752.184.932,00													1,00	827.949.351,00			
		1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen			1,00	1.975.686.500,00	1,00	472.088.042,00													1,00	1.975.686.500,00			
		1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**84,00**	**520.788.800,00**	**80,00**	**240.961.600,00**	**80,00**	**157.555.025,00**													**40,00**	**240.961.600,00**	**47,62**	**46,27**	
		1	02	02	2.03	0001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	5,00	365.788.800,00																				
		1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan secara transparan dan akuntabel dan tersedianya akses pengaduan masyarakat	Persen	50,00	155.000.000,00	50,00	240.961.600,00		157.555.025,00													50,00	240.961.600,00	100,00	155,46	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	5,00		2,00		1,00												2,00		40,00		
																								Rata-Rata Capaian Kinerja		**50,00**	**7,11**			**92,75**	**43,76**	
																								Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**ST**	**SR**	
		1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**PERSENTASE SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DENGAN KOMPETENSI SESUAI STANDAR**	**PERSEN**	**83,00**	**1.909.195.397,37**	**76,50**	**2.435.398.248,00**	**80,00**	**1.336.373.398,00**													**38,25**	**2.435.398.248,00**	**46,08**	**127,56**	
								PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN 9 (SEMBILAN) JENIS TENAGA KESEHATAN SESUAI STANDAR	**PERSEN**	**62,00**		**60,00**		**60,00**														**30,00**		**48,39**		
		1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**84,00**	**574.320.008,00**	**80,00**	**1.009.996.608,00**	**80,00**	**74.999.942,00**													**40,00**	**1.009.996.608,00**	**47,62**	**175,86**	
		1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Tersedianya insentif tenaga kesehatan NON ASN dalam penanggulangan covid 19	Orang	100,00	400.000.000,00	100,00	821.074.608,00		74.999.942,00													100,00	821.074.608,00	100,00	205,27	
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	100,00		200,00		100,00														200,00		200,00		
		1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya data laporan keuangan BLUD Puskesmas	Persen	50,00	174.320.008,00	50,00	188.922.000,00															50,00	188.922.000,00	100,00	108,38	
								Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	5,00		1,00														1,00		20,00		
		1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**84,00**	**1.334.875.389,37**	**80,00**	**1.425.401.640,00**	**80,00**	**1.261.373.456,00**													**40,00**	**1.425.401.640,00**	**47,62**	**106,78**	
		1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan Jumlah dokumen rencana Kebutuhan SDM Kesehatan dan profil SDM Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	Persen	60,00	1.334.875.389,37	60,00	1.425.401.640,00		1.261.373.456,00													60,00	1.425.401.640,00	100,00	106,78	
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	100,00		300,00		100,00														300,00		300,00		
																								Rata-Rata Capaian Kinerja						**47,24**	**127,56**	
																								Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**ST**	
		1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**PERSENTASE SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN SESUAI DENGAN STANDAR**	**PERSEN**	**96,00**	**2.658.322.579,78**	**61,91**	**899.126.375,00**	**95,00**	**317.854.659,00**													**30,96**	**899.126.375,00**	**32,24**	**33,82**	
		1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase pengelolaan apotek,toko obat,toko alat kesehatan, optik dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar**	**Persen**	**100,00**	**1.296.615.529,78**	**100,00**	**211.058.975,00**	**100,00**	**142.214.659,00**													**50,00**	**211.058.975,00**	**50,00**	**16,28**	
								Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	**Persen**																						
		1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Melaksanakan monitoring, pembinaan dan pemeriksaan setempat sarana pelayanan kefarmasian Terlaksananya pengelolaan obat puskesmas dan sistem E Logistik di instalasi farmasi Terlaksananya penyuluhan keamanan kosmetik bagi klinik kecantikan dan salon kecantikan Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan jajanan anak sekolah - terbinanya pedagang jajanan anak sekolah	Persen	100,00	1.296.615.529,78	100,00	211.058.975,00		142.214.659,00													100,00	211.058.975,00	100,00	16,28	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	25,00		6,00		5,00												6,00		24,00		
		1	**02**	**01**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase industri rumah tangga sesuai standar**	**Persen**	**100,00**	**745.230.250,00**	**80,00**	**444.678.600,00**	-	-													**40,00**	**444.678.600,00**	**40,00**	**59,67**	
		1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Terlaksanaanya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	Persen	80,00	745.230.250,00	80,00	444.678.600,00															80,00	444.678.600,00	100,00	59,67	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	25,00		6,00														6,00		24,00		
		1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase terlaksanaanya industri rumah tangga sesuai standar**	**Persen**	**100,00**	**616.476.800,00**	**100,00**	**243.388.800,00**	**100,00**	**175.640.000,00**													**50,00**	**243.388.800,00**	**50,00**	**39,48**	
		1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Terlaksanaanya Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Persen	100,00	616.476.800,00	100,00	243.388.800,00		175.640.000,00													100,00	243.388.800,00	100,00	39,48	

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2021 S/D 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) s.d TRIWULAN I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH					K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14/8)		17 = (16/7)*100		18
		1	02				**Dinas Kesehatan**				**1.860.202.588.436,50**		**934.163.188.488,21**		**346.785.440.161,00**		**48.601.226.986,00**		-		-		-		**48.601.226.986,00**		14,01		**982.764.415.474,21**		**52,83**	
								Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	5,00		3,00		1,00												3,00				60,00			
																								Rata-Rata Capaian Kinerja		-		-		**22,24**	**33,92**	
																								Predikat Kinerja		**SR**		**SR**		**SR**	**SR**	
		1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE MASYARAKAT BER PHBS**	**PERSEN**	**90,00**	**1.144.801.582,50**	**82,50**	**2.238.653.100,00**	**75,00**	**1.089.529.901,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**41,25**	**2.238.653.100,00**	**45,83**	**195,55**	
		1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**80,00**	**413.648.707,50**	**72,00**	**1.389.322.300,00**	**72,00**	**600.499.778,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**36,00**	**1.389.322.300,00**	**45,00**	**335,87**	
		1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Tersedia media penyuluhan di sarana pelayanan kesehatan	Persen	50,00	413.648.707,50	50,00	1.389.322.300,00		600.499.778,00										-		-	50,00	1.389.322.300,00	100,00	335,87	
								Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	25,00		6,00		5,00												-				6,00		24,00		
		1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**	**Persen**	**84,00**	**656.567.125,00**	**80,00**	**559.430.800,00**	**80,00**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**40,00**	**559.430.800,00**	**47,62**	**85,21**	
		1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase terlaksananya promosi kesehatan melalui berbagai media promosi	Persen	45,00	656.567.125,00	45,00	559.430.800,00		100.000.000,00										-		-	45,00	559.430.800,00	100,00	85,21	
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	25,00		6,00		5,00												-				6,00		24,00		
		1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**	**Persen**	**84,00**	**74.585.750,00**	**40,00**	**289.900.000,00**	**80,00**	**389.030.123,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20,00**	**289.900.000,00**	**23,81**	**388,68**	
		1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase terlaksananya monitoring dalam upaya pemberdayaan masyarakat	Persen	80,00	74.585.750,00		289.900.000,00		389.030.123,00										-		-		289.900.000,00		388,68	
								Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	10,00		1,00		1,00												1,00				10,00			
																								Rata-Rata Capaian Kinerja		-		-		**45,83**	**195,55**	
																								Predikat Kinerja		**SR**		**SR**		**SR**	**ST**	

BAB III

KINERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Oleh sebab itu, Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 disusun dengan bentuk matriks yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan sumber dana sebelum perubahan dan sesudah perubahan untuk Tahun 2025. Matriks Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1

TABEL .1

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RENJA TAHUN 2025	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RENJA TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						DINAS KESEHATAN									**341.173.667.097,00**	**346.785.440.161,00**	**413.121.355.752,10**	
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									**341.173.667.097,00**	**346.785.440.161,00**	**413.121.355.752,10**	
	1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									**341.173.667.097,00**	**346.785.440.161,00**	**413.121.355.752,10**	
7	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kesehatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kesehatan**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**212.928.141.709,00**	**217.916.214.315,00**	**217.838.184.990,10**	
	1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**24.999.748,00**	**29.999.879,00**	**18.799.967,00**	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2	2	24.999.748,00	29.999.879,00	18.799.967,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**112.110.092.619,00**	**122.091.352.348,00**	**122.350.053.175,10**	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang/bulan	1194	1194	1194	111.907.198.719,00	121.858.464.783,00	122.117.165.610,10	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	202.893.900,00	232.887.565,00	232.887.565,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**%**	**80**	**80**	**80**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**25.000.000,00**	
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	25	25	25	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**437.555.518,00**	**387.812.425,00**	**305.550.585,00**	
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	29.994.779,00	29.991.525,00	29.991.525,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	75.000.000,00	74.999.333,00	70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	17.060.763,00	17.059.060,00	17.059.060,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	50.000.000,00	50.000.000,00	37.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	77.499.976,00	77.499.921,00	70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	28.000.000,00	28.000.000,00	21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	150.000.000,00	100.262.586,00	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kanto**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kanto**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**676.018.927,00**	**99.979.261,00**	**90.000.000,00**	
	1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit	Unit	1			550.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	126.018.927,00	99.979.261,00	90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**20.185.000.000,00**	**15.889.000.000,00**	**15.637.685.561,00**	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	186.000.000,00	186.000.000,00	202.360.561,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	19.999.000.000,00	15.703.000.000,00	15.435.325.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RENJA TAHUN 2025	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RENJA TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**747.628.897,00**	**671.224.402,00**	**714.249.702,00**	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	47.430.000,00	43.670.000,00	43.670.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	92	92	92	478.557.552,00	457.666.802,00	500.692.102,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	15	15	15	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	151.753.745,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	49.887.600,00	49.887.600,00	49.887.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**		**Unit**	**31**	**31**	**31**	**78.696.846.000,00**	**78.696.846.000,00**	**78.696.846.000,00**	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	Unit	31	31	31	78.696.846.000,00	78.696.846.000,00	78.696.846.000,00	DINAS KESEHATAN
8	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup**	**Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup**	**Angka**	**Angka**	**2**	**2**	**2**	**125.084.953.855,00**	**126.125.467.888,00**	**192.759.085.106,00**	
								Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	**Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup**	**Kasus**	**Kasus**	**10**	**10**	**10**				
								Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	**Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)**	**Persen**	**Persen**	**6,2**	**6,2**	**6,2**				
								Tingkat Prevalensi Tubercolosis per 100.000 Penduduk	**Tingkat Prevalensi Tubercolosis per 100.000 Penduduk**	**Kasus**	**Kasus**	**379**	**379**	**379**				
	1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**%**	**%**	**84**	**84**	**84**	**18.465.841.795,00**	**13.184.428.336,00**	**14.958.984.370,00**	
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Unit		3			179.535.500,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		Unit		1			8.279.685.000,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		Unit		1			179.786.200,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	Paket	1	1	1	9.666.835.659,00	13.109.428.572,00	14.908.675.572,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	Paket	1	1	1	159.999.436,00	74.999.764,00	50.308.798,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**%**	**%**	**84**	**84**	**84**	**106.327.112.895,00**	**112.783.484.527,00**	**177.684.293.283,00**	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	19592	19592	19592	1.038.870.000,00	1.341.389.821,00	1.146.681.864,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	18702	18702	18702	991.300.000,00	99.999.812,00	31.130.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RENJA TAHUN 2025	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RENJA TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	17811	17811	17811	372.000.000,00	99.999.882,00	47.690.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	86512	86512	86512	142.499.863,00	99.999.856,00	62.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	155442	155442	155442	1.064.500.000,00	679.899.875,00	689.849.296,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	754465	754465	754465	149.999.746,00	79.999.920,00	51.425.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	92994	92994	92994	150.000.000,00	445.299.903,00	394.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	200001	200001	200001	99.999.887,00	109.999.928,00	69.002.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	18644	18644	18644	1.812.506.060,00	94.995.684,00	66.909.348,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Orang	1882	1882	1882	149.999.584,00	394.399.876,00	352.553.206,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Orang	23474	23474	23474	3.502.760.000,00	939.550.000,00	706.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Orang	28060	28060	28060	407.300.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	Dokumen	1	1	1	952.286.000,00	963.018.500,00	1.011.827.237,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Dokumen	1	1	1	7.966.517.000,00	4.988.129.051,00	9.995.418.273,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Dokumen	1	1	1	99.999.707,00	276.639.948,00	262.433.936,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	908.475.000,00	576.699.959,00	451.590.875,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	823.644.600,00	212.109.525,00	212.109.525,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.552.379.097,00	1.579.634.904,00	1.085.342.552,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	Orang	1851	1851	1851	99.999.957,00	210.799.760,00	182.144.790,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Orang	Orang	1851			40.500.000,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	Dokumen	1	1	1	7.104.464.036,00	4.885.350.000,00	3.852.577.145,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Dokumen	1	1	1	49.310.091.378,00	68.310.091.252,00	126.549.739.139,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	90.200.000,00	175.180.000,00	175.180.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Dokumen	Dokumen	1			99.999.835,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.011.467.000,00	7.623.137.677,00	4.351.870.065,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	Dokumen	1	1	1	17.118.032.900,00	16.848.186.900,00	23.967.014.781,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	Unit	12	8	8	74.998.419,00	49.999.792,00	49.999.792,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RENJA TAHUN 2025	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RENJA TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	Laporan	1	1	1	116.900.000,00	74.999.792,00	59.283.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	124.999.802,00	75.000.000,00	59.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	Orang	80	80	80	384.300.000,00	100.000.000,00	82.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	Orang	70	70	70	195.700.000,00	75.000.000,00	50.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	Orang	30	30	30	84.913.024,00	49.699.936,00	48.524.936,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	951.500.000,00	752.184.932,00	744.720.114,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.334.010.000,00	472.088.042,00	773.926.009,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**"tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota"**	**"tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota"**	**%**	**%**	**80**	**80**	**80**	**291.999.165,00**	**157.555.025,00**	**115.807.453,00**	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	291.999.165,00	157.555.025,00	115.807.453,00	DINAS KESEHATAN
9	**1**	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase SDM Kesehatan dengan Kompetensi sesuai Standar**	**Persentase SDM Kesehatan dengan Kompetensi sesuai Standar**	**%**	**%**	**83**	**83**	**83**	**1.824.223.761,00**	**1.336.373.398,00**	**1.336.373.398,00**	
								Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar	**Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar**	**%**	**%**	**62**	**62**	**62**				
	1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**%**	**%**	**82**	**80**	**80**	**313.354.820,00**	**74.999.942,00**	**74.999.942,00**	
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	Orang	100	100	100	99.999.820,00	74.999.942,00	74.999.942,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Dokumen	Dokumen	1			213.355.000,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**%**	**%**	**80**	**80**	**80**	**1.510.868.941,00**	**1.261.373.456,00**	**1.261.373.456,00**	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	Orang	200	200	200	1.510.868.941,00	1.261.373.456,00	1.261.373.456,00	DINAS KESEHATAN
10	**1**	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar**	**Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar**	**%**	**%**	**96**	**96**	**96**	**333.331.000,00**	**317.854.659,00**	**317.854.659,00**	
	1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase pengelolaan apotek,toko obat,toko alat kedehatan, optik dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar**	**Persentase pengelolaan apotek,toko obat,toko alat kedehatan, optik dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**63.730.000,00**	**142.214.659,00**	**142.214.659,00**	
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	63.730.000,00	142.214.659,00	142.214.659,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RENJA TAHUN 2025	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RENJA TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase industri rumah tangga sesuai standar**	**Persentase industri rumah tangga sesuai standar**	**%**	**%**	**80**	**0**	**0**	**85.387.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Dokumen	Dokumen	1			85.387.000,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar**	**Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**184.214.000,00**	**175.640.000,00**	**175.640.000,00**	
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	Unit	50	50	50	184.214.000,00	175.640.000,00	175.640.000,00	DINAS KESEHATAN
11	**1**	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat ber PHBS**	**Persentase Masyarakat ber PHBS**	**%**	**%**	**80**	**80**	**80**	**1.003.016.772,00**	**1.089.529.901,00**	**869.857.599,00**	
	1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**%**	**72**	**72**	**72**	**501.499.918,00**	**600.499.778,00**	**525.370.289,00**	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	Dokumen	1	1	1	501.499.918,00	600.499.778,00	525.370.289,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**	**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**	**%**	**%**	**80**	**80**	**80**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**69.600.000,00**	
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	Dokumen	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	69.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**	**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**	**%**	**%**	**82**	**82**	**82**	**401.516.854,00**	**389.030.123,00**	**274.887.310,00**	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	401.516.854,00	389.030.123,00	274.887.310,00	DINAS KESEHATAN

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

(PERUBAHAN)

RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	**BAB I**	**PENDAHULUAN**				
	1.1	Latar Belakang				
	1.2	Landasan Hukum				
	1.3	Maksud dan Tujuan				
	1.4	Sistematika Penulisan				
2	**BAB II**	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**				
		Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/tahun 2025				
		Formulir E.81				
3	**BAB III**	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**				
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	**BAB IV**	**PENUTUP**				

Bandar Lampung, Juli 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Bandar Lampung,

MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP.19710810 199502 1 001

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Dr. Rein Susinda Hesty, S.Sos., M.Si.**	
	Kabid Perekonomian SDA	
2	**Henny Sunlinawati, S.Sos., M.M.**	
	(Fungsional Perencana Ahli Muda)	

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.		√	Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Bandar Lampung,

MUHTADI A TEMENGGUNG, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19710810 199502 1 001

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP.19700218 199303 2 002

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Dr. Rein Susinda Hesty, S.Sos., M.Si.**	
	Kabid Perekonomian SDA	
2	**Henny Sunlinawati, S.Sos., M.M.**	
	(Fungsional Perencana Ahli Muda)	

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, Juli 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala Bappperida Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP.19700218 199303 2 002

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Dr. Rein Susinda Hesty, S.Sos., M.Si.**	
	Kabid Perekonomian SDA	
2	**Henny Sunlinawati, S.Sos., M.M.**	
	(Fungsional Perencana Ahli Muda)	

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN 20
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengembangkan potensi Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Bandar Lampung agar lebih berkualitas, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Bandar Lampung berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan, yang selanjutnya akan terintegrasi dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam perencanaan pembangunan di bidang Penanaman Modal tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar di rencanakan dengan matang, pengkajian yang akurat dan tolok ukur indikator kinerja yang tepat sehinggga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas.

Perubahan RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah,

karena Perubahan RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Perubahan RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), serta mempunyai fungsi pokok bagi pelaku pembangunan yang memuat kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Perubahan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Perubahan RENJA PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Perubahan RENJA PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan PD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : ***"BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT"***

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap

untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.

4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor : 56 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung serta Peraturan Wali kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung , Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung mempunyai Tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dalam hal Pelayanan Perizinan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota. Dengan demikian Dinas Penanaman Modal Dan PTSP menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-4 (empat) dan misi ke-6 (enam) dalam RPJMD Tahun 2021-2026;

Misi ke-4 (empat) yaitu **Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.**

Misi ke-6 (enam) yaitu ***Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Berorientasi Kemitraan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa dan Bertanggung Jawab untuk Mendukung Investasi.*** Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada Tahun Anggaran 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 108);
10. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
11. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);

12. Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025
13. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
22. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD TA 2025
23. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2025
24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Nomor : LD Nomor 11 Tahun 2024);
27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 12 Nomor Registrasi Perda Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung: 12/1578/BL/2024);
28. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025;
29. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 tentang

APBD tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Nomor : LD Nomor 11).

30. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Nomor: BD Nomor 55 Tahun 2024).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Wali Kota.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Penanaman Modal Dan PTSP dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang;
1.2 Landasan Hukum;
1.3 Maksud dan Tujuan;
1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan/Tahun 2025[

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target, dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN/TAHUN 2025

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung Tahun 2025 merupakan penjabaran dari pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu satu tahun. Adapun program dan kegiatan dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 11.938.641.591,00,- dengan 5 Program, 10 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut realisasi sampai bulan Maret Tahun 2025 sebesar Rp. 2.457.836.664,00,- dengan serapan sebesar 20,58 % Adapun Program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, program ini dimaksudkan agar tercapai ketertiban administrasi layanan perkantoran, yang mendukung terlaksananya layanan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam program ini didukung oleh 6 (Enam) kegiatan dan 15 (Lima Belas) sub kegiatan dengan anggaran Rp. 11.099.098.616,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.406.836.664,00,- atau sebesar 21,68%.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program ini didukung dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.999.408,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,00,- atau sebesar 0,0%

3. Program Promosi Penanaman Modal, Program ini didukung dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 98.709.120,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,00,- atau sebesar 0,0 %.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal, Program ini didukung dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 620.022.975,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 51.000.000,00,- atau sebesar 8,25 %.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Program ini didukung dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 115.811.472,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,00,- atau sebesar 0,0 %.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung adalah:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Program ini memiliki 6 (Enam) Kegiatan dan memiliki 1 (Satu) Sub Kegiatan dan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 10.955.495.404,00,-

   1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Kegiatan ini memiliki 1 (Satu) Sub Kegiatan dan mendapatkan anggaran sebsar Rp. 24.544.863,00,- Yaitu :

      a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dengan anggaran sebesar Rp. 24.544.863,00,-

   2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Kegiatan ini memiliki 2 (Dua) Sub Kegiatan dan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 8.390.710.391,00,- Yaitu :

      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 8.306.600.391,00,-
      b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 84.110.000,00,-

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

Kegiatan ini memiliki 6 (Enam) Sub Kegiatan dan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 260.978.689,00,- Yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 57.308.724,00,-
b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 12.872.900,00,-
c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandan dengan anggaran sebesar Rp. 39.991.776,00,-
d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.999.680,00,-
e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 26.640.000,00,-
f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 119.165.609,00,-

4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini memiliki 1 (Satu) Sub Kegiatan dan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.386.111.461,00,- Yaitu :

a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya dengan anggaran sebesar Rp. 1.386.111.461,00,-

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini memiliki 2 (Dua) Sub Kegiatan dan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 771.000.000,00,- Yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggara sebesar Rp. 171.000.000,00,-
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,00,-

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini memiliki 3 (Tiga) Sub Kegiatan dan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 122.140.000,00,- Yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 38.670.000,00,-
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 71.500.000,00,-
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya dengan anggaran sebesar Rp. 11.970.000,00,-

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini memiliki 1 (Satu) Kegiatan dan memiliki 1 (Satu) Sub Kegiatan dan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 121.089.408,00,-

1) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 121.089.408,00,-

Kegiatan ini memiliki 1 Satu) Sub Kegiatan, Yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 121.089.408,00,-

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini memiliki 1 (Satu) Kegiatan dan memiliki 1 (Satu) Sub Kegiatan dan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 98.709.120,00,-

1) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 98.709.120,00,-

Kegiatan ini memiliki 1 (Satu) Sub Kegiatan, Yaitu :

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 98.709.120,00,-

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini memiliki 1 (Satu) Kegiatan dan memiliki 2 (Dua) Sub Kegiatan dengan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 621.679.670,00,-

1) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan mendapatkan anggaran Rp. 621.679.670,00,-

Kegiatan ini memiliki 2 (Dua) Sub Kegiatan, Yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 488.329.876,00,-

b. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan anggaran sebesar Rp. 133.349.794,00,-

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini memiliki 1 (Satu) Kegiatan dan memiliki 1 (Satu) Sub Kegiatan dengan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 107.880.736,00,-

1) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 107.880.736,00,-

Kegiatan ini memiliki 1 (Satu) Sub Kegiatan, Yaitu :

a Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha dengan anggaran sebesar Rp. 107.880.736,00,-

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat melalui Tabel 3.1 (terlampir).

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Bandar Lampung adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Perubaha Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Bandar Lampung menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA

TABEL 3.1
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP									**10.825.694.191,00**	**11.938.641.591,00**	**11.904.854.338,00**	
	2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**	**persen**	**persen**	**98**	**98**	**98**	**9.736.365.455,00**	**11.099.098.616,00**	**10.955.495.404,00**	
	2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**	**persen**	**persen**	**98**	**98**	**98**	**23.000.000,00**	**24.554.863,00**	**24.554.863,00**	
	2	**18**	**01**	**2.01**	**0006**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**											
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3	3	3	23.000.000,00	24.554.863,00	24.554.863,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**persen**	**persen**	**100**	**100**	**100**	**7.821.612.191,00**	**8.406.590.391,00**	**8.390.710.391,00**	
	2	**18**	**01**	**2.02**	**0001**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**											
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang/bulan	72	72	72	7.751.452.191,00	8.306.600.391,00	8.306.600.391,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**18**	**01**	**2.02**	**0003**	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**											
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	1	70.160.000,00	99.990.000,00	84.110.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**persen**	**98**	**98**	**98**	**285.425.293,00**	**470.421.604,00**	**260.978.689,00**	
	2	**18**	**01**	**2.06**	**0002**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**											
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	65.849.764,00	60.768.712,00	57.308.724,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**18**	**01**	**2.06**	**0003**	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.991.946,00	12.872.900,00	12.872.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	**18**	**01**	**2.06**	**0005**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**											
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	58.726.826,00	49.996.800,00	39.991.776,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**18**	**01**	**2.06**	**0006**	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**											
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	4.999.891,00	4.999.680,00	4.999.680,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**18**	**01**	**2.06**	**0008**	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**											
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	12.990.000,00	35.525.000,00	26.640.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**18**	**01**	**2.06**	**0009**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**											
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	131.866.866,00	306.258.512,00	119.165.609,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**persen**	**98**	**98**	**98**	**713.000.000,00**	**1.328.391.758,00**	**1.386.111.461,00**	
	2	**18**	**01**	**2.07**	**0006**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**											
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	14	14	14	713.000.000,00	1.328.391.758,00	1.386.111.461,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**persen**	**persen**	**98**	**98**	**98**	**771.000.000,00**	**747.000.000,00**	**771.000.000,00**	
	2	**18**	**01**	**2.08**	**0002**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	171.000.000,00	171.000.000,00	171.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**18**	**01**	**2.08**	**0004**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	600.000.000,00	576.000.000,00	600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**persen**	**98**	**98**	**98**	**122.327.971,00**	**122.140.000,00**	**122.140.000,00**	
	2	**18**	**01**	**2.09**	**0001**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**											
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.527.971,00	38.670.000,00	38.670.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**18**	**01**	**2.09**	**0002**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**											
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	14	14	14	77.000.000,00	71.500.000,00	71.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	**18**	**01**	**2.09**	**0006**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**										
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	11.800.000,00	11.970.000,00	11.970.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Jumlah/Nilai Investasi PMA Jumlah/Nilai Investasi PMDN**	**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Jumlah/Nilai Investasi PMA Jumlah/Nilai Investasi PMDN**	**679294277.84 Dolar ($) 2774544.17 Juta (Rp)**	**679294277.84 Dolar ($) 2774544.17 Juta (Rp)**	**10.35 Orang/Perusahaan**	**10.35 Orang/Perusahaan**	**10.35 Orang/Perusahaan**	**150.000.000,00**	**4.999.408,00**	**121.089.408,00**	
	2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau**	**Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau**	**persen**	**persen**	**100**	**100**	**100**	**150.000.000,00**	**4.999.408,00**	**121.089.408,00**	
	2	**18**	**02**	**2.02**	**0001**	**Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**										
								Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	150.000.000,00	4.999.408,00	121.089.408,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**PERSENTASE PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**PERSENTASE PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**persen**	**persen**	**100**	**100**	**100**	**100.086.784,00**	**98.709.120,00**	**98.709.120,00**	
	2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Promosi Investasi Daerah**	**Promosi Investasi Daerah**	**persen**	**persen**	**100**	**100**	**100**	**100.086.784,00**	**98.709.120,00**	**98.709.120,00**	
	2	**18**	**03**	**2.01**	**0002**	**Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**										
								Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	100.086.784,00	98.709.120,00	98.709.120,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**IKM Bidang Perizinan**	**IKM Bidang Perizinan**	**Angka**	**Angka**	**87,2**	**87,2**	**87,2**	**450.999.952,00**	**620.022.975,00**	**621.679.670,00**	
	2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Ketepatan Waktu Pemenuhan Pelayanan Perizinan**	**Ketepatan Waktu Pemenuhan Pelayanan Perizinan**	**Hari**	**Hari**	**14**	**14**	**14**	**450.999.952,00**	**620.022.975,00**	**621.679.670,00**	
	2	**18**	**04**	**2.01**	**0006**	**Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik**	**Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik**										
								Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	15000	15000	15000	276.000.000,00	470.023.200,00	488.329.876,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**18**	**04**	**2.01**	**0008**	**Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko**	**Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko**										
								Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	70 Kegiatan Usaha	70 Kegiatan Usaha	70	70	70	174.999.952,00	149.999.775,00	133.349.794,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN**	**Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN**	**persen**	**persen**	**23,69**	**23,69**	**23,69**	**388.242.000,00**	**115.811.472,00**	**107.880.736,00**	
	2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengendalian Nilai Investasi PMDN**	**Persentase Pengendalian Nilai Investasi PMDN**	**persen**	**persen**	**100**	**100**	**100**	**388.242.000,00**	**115.811.472,00**	**107.880.736,00**	
	2	**18**	**05**	**2.01**	**0004**	**Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya**	**Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya**										
								Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	Kegiatan Usaha.	10	10	10	58.236.000,00	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	**18**	**05**	**2.01**	**0005**	**Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha**	**Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha**											
								Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	291	291	291	213.534.000,00	115.811.472,00	107.880.736,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**18**	**05**	**2.01**	**0006**	**Pengawasan Penanaman Modal**	**Pengawasan Penanaman Modal**											
								Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha	85	85	85	116.472.000,00	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Formulir E. 81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANDAR LAMPUNG
PERIODE PELAKSANAAN s.d. TRIWULAN I TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN BIDANG URUSAN		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)			(8)			(9)			(10)		(11)		(12)				(14) = (10+11+12+13)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K		RUPIAH	K		RUPIAH	K		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		K		
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												**Rp 95.972.904.622,25**					**Rp 11.938.641.591,00**	**15,00**	**Rp 2.457.836.664,00**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**	**15,00**	**Rp 2.457.836.664,00**			**56,00**	**Rp 11.795.478.968,00**	**71,43**	**12,29**	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP												**Rp 95.972.904.622,25**					**Rp 11.938.641.591,00**		**Rp 2.457.836.664,00**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp 2.457.836.664,00**			**56,00**	**Rp 11.795.478.968,00**	**71,43**	**13,12**	
	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL							**HASIL PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA OPD OLEH INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG (NILAI SAKIP)**	**Nilai**	**80,00-89,00**			**74,45**	**Nilai**		**80,00-809,99**																					**Dinas PM & PTSP**
		2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**%**	**98**	**%**	**Rp 87.705.301.212,00**	**90**	**%**	**Rp 8.630.937.664,00**	**98**	**%**	**Rp 11.099.098.616,00**	**20**	**Rp 2.406.836.664,00**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**20**	**Rp 2.406.836.664,00**	**20,41**	**21,68**	**70**	**Rp 11.037.774.328,00**	**71,43**	**12,59**	**Dinas PM & PTSP**
		2	**18**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**%**	**98**	**%**	**Rp 410.000.000,00**	**80**	**%**	**Rp 17.909.300,00**	**98**	**%**	**Rp 24.554.863,00**	**20**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**20**	**Rp -**	**20,41**	**-**	**70**	**Rp 17.909.300,00**	**71,43**	**4,37**	**Dinas PM & PTSP**
		2	18	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	Dokumen	Rp 80.000.000,00																									
		2	18	01	2.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	Dokumen RKA	Rp 60.000.000,00																									
		2	18	01	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	Dokumen Perubaha RKA	Rp 60.000.000,00																									
		2	18	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	Laporan	Rp 95.000.000,00	3	Laporan	Rp 17.909.300,00	3	Laporan	Rp 24.554.863,00	3	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	*3*	Rp -	*0*	-	6	Rp 17.909.300,00	*40*	18,85	Dinas PM & PTSP
		2	18	01	2.01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	5	25 Laporan	Rp 115.000.000,00																									
		2	**18**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD Yang Akuntabel**	**%**	**100**	**%**	**Rp 75.933.901.212,00**	**80**	**%**	**Rp 6.901.983.585,00**	**100**	**%**	**Rp 8.406.590.391,00**	**20**	**Rp 2.262.836.664,00**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**20**	**Rp 2.262.836.664,00**	**20,00**	**26,92**	**32,5**	**Rp 9.164.820.249,00**	**32,50**	**12,07**	**Dinas PM & PTSP**
		2	18	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	360	Orang/Bulan	Rp 75.096.001.212,00	66	Orang/ Bulan	Rp 6.845.953.585,00	72	Orang/ Bulan	Rp 8.306.600.391,00	63	Rp 2.262.836.664,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	63	Rp 2.262.836.664,00	87,50	27,24	63	Rp 9.108.790.249,00	17,50	12,13	Dinas PM & PTSP
		2	18	01	2.02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	Dokumen	Rp 670.400.000,00	1	Dokumen	Rp 56.030.000,00	1	Dokumen	Rp 99.990.000,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0,00	-	2,00	Rp 56.030.000,00	40,00	8,36	Dinas PM & PTSP
		2	18	01	2.02	0005	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	6,00	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 72.500.000,00																									
		2	18	01	2.02	0007	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	Rp 95.000.000,00																									
		2	**18**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**100**	**%**	**Rp 300.000.000,00**																									
		2	18	01	2.05	0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	72	Orang	Rp 300.000.000,00																									

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN BIDANG URUSAN		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)			(8)			(9)			(10)		(11)		(12)				(14) = (10+11+12+13)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)			(17) = (16/7)*100		(18)
										K		RUPIAH	K		RUPIAH	K		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		
		2	**18**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**98**	**%**	**Rp 3.508.066.677,00**	**85**	**%**	**Rp 236.183.184,00**	**98**	**%**	**Rp 470.421.604,00**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0,00**	**-**	**20,42**	**Rp 236.183.184,00**	**19,44**	**6,73**	**Dinas PM & PTSP**
		2	18	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	Paket	Rp 13.000.000,00																									
		2	18	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	Paket	Rp 1.259.999.214,00	1	Paket	Rp 66.839.570,00	1	Palet	Rp 60.768.712,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0,00	-	1,0	Rp 66.839.570,00	16,67	5,30	Dinas PM & PTSP
		2	18	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	Paket	Rp 134.567.463,00	1	Paket	Rp 8.976.650,00	1	Paket	Rp 12.872.900,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0,00	-	1	Rp 1,00	16,67	0,00	Dinas PM & PTSP
		2	18	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	Paket	Rp 71.500.000,00																									
		2	18	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	Paket	Rp 1.260.000.000,00	1	Paket	Rp 40.080.000,00	1	Paket	Rp 49.996.800,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0,00	-	1,00	Rp 40.080.000,00	16,67	3,18	Dinas PM & PTSP
		2	18	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	Paket	Rp 48.000.000,00	1	Paket	Rp 3.600.000,00	1	Dokumen	Rp 4.999.680,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0,00	-	1,00	Rp 3.600.000,00	16,67	7,50	Dinas PM & PTSP
		2	18	01	2.06	0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	Laporan	Rp 121.000.000,00	1	Laporan	Rp 3.172.500,00	1	Laporan	Rp 35.525.000,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	-	2	Rp 3.172.500,00	40,00	2,62	Dinas PM & PTSP
		2	18	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	Laporan	Rp 600.000.000,00	1	Laporan	Rp 113.514.464,00	1	Laporan	Rp 306.258.512,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	-	0,5	Rp 113.514.464,00	10,00	18,92	Dinas PM & PTSP
		2	**18**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan Inventaris**	**%**	**100**	**%**	**Rp 856.000.000,00**	**96**	**%**	**Rp 703.480.000,00**	**98**	**%**	**Rp 1.328.391.758,00**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**60**	**Rp -**	**60**	**Rp -**	**61,22**	**-**	**156**	**Rp 703.480.000,00**	**156,00**	**82,18**	**Dinas PM & PTSP**
		2	18	01	2.07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	Paket	Rp 92.500.000,00																									
		2	18	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	70	Unit	Rp 590.500.000,00	14	Unit	Rp 703.480.000,00	14	Unit	Rp 1.328.391.758,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	69	Rp -	69	Rp -	492,86	-	14	Rp 703.480.000,00	20,00	119,13	Dinas PM & PTSP
		2	18	01	2.07	0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	Unit	Rp 83.000.000,00																									
		2	18	01	2.07	0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	Unit	Rp 90.000.000,00																									
		2	**18**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang kebutuhan OPD**	**%**	**98**	**%**	**Rp 4.936.250.000,00**	**90**	**%**	**Rp 721.700.000,00**	**98**	**%**	**Rp 747.000.000,00**	**20**	**Rp 144.000.000,00**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**25**	**Rp -**	**45**	**Rp 144.000.000,00**	**45,92**	**19,28**	**87,5**	**Rp 865.700.000,00**	**89,29**	**17,54**	**Dinas PM & PTSP**
		2	18	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	Laporan	Rp 1.170.000.000,00	1	Laporan	Rp 159.700.000,00	1	Laporan	Rp 171.000.000,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp -	1	Rp -	100	-	2	Rp 159.700.000,00	40,00	13,65	Dinas PM & PTSP
		2	18	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	Laporan	Rp 3.766.250.000,00	1	Laporan	Rp 562.000.000,00	1	Laporan	Rp 576.000.000,00	0	Rp 144.000.000,00	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp -	1	Rp 144.000.000,00	100	25,00	2	Rp 706.000.000,00	40,00	18,75	Dinas PM & PTSP
		2	**18**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98**	**%**	**Rp 1.761.083.323,00**	**80**	**%**	**Rp 49.681.595,00**	**98**	**%**	**Rp 122.140.000,00**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**30**	**Rp -**	**30**	**Rp -**	**30,61**	**-**	**90,00**	**Rp 49.681.595,00**	**91,84**	**2,82**	**Dinas PM & PTSP**
		2	18	01	2.09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit/Tahun	25	Unit/Tahun	Rp 253.532.088,00	1	nit/Tahun	Rp 21.450.000,00	1	Unit/Tahun	Rp 38.670.000,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	-	1	Rp 21.450.000,00	4,00	8,46	Dinas PM & PTSP
		2	18	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit/Tahun	14	Unit/Tahun	Rp 1.154.701.235,00	14	nit/Tahun	Rp 28.231.595,00	14	Unit (3 Unit Mobil 11 Unit Motor)	Rp 71.500.000,00	0	Rp -	0	Rp -	7	Rp -	7	Rp -	14	Rp -	100,00	-	21	Rp 28.231.595,00	150,00	2,44	Dinas PM & PTSP
		2	18	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	Unit	Rp 217.850.000,00	5	Paket	Rp -	5	Unit	Rp 11.970.000,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	-	5	Rp -	83,33	-	Dinas PM & PTSP
		2	18	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	Unit	Rp 135.000.000,00																									

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN BIDANG URUSAN		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)			(8)			(9)			(10)		(11)		(12)				(14) = (10+11+12+13)			(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)			(17) = (16/7)*100		(18)
										K		RUPIAH	K		RUPIAH	K		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH	K		K		RUPIAH	K		
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																																					
	MENINGKATNYA PENANAMAN MODAL							PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI (PMDN)			%		21,26%	%		17,49	%																				
								PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI (PMA)			%		3,32%	%		6,55	%																				
		2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah/Nilai Investasi PMA	Dolar ($)	$ 689.294.277,84	($)		$ 31.896.415,00	($)		$ 679.294.277,84	($)		$ -	Rp -	$ -	Rp -	$ -	Rp -	$ -	Rp -	$ -	Rp -	0	0	$ 31.896.415,00	Rp -	4,63	-	Dinas PM & PTSP
								Jumlah/Nilai Investasi PMDN	Juta Rupiah (Rp)	2.445.964.76	(Rp)	Rp 580.000.000,00	Rp 1.584.948.015.940,00	(Rp)	Rp -	Rp 2.774.544,17	Rp	Rp 4.999.408,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0		Rp 1.584.948.015.940,00	Rp -	#VALUE!		Dinas PM & PTSP
								Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang/ Perusahaan	10,35	rang/Perusahaan		9,35	Orang/ Perusahaan		10,35	%																				
		2	18	02	2.02		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau	%	100	%	Rp 580.000.000,00	0,00%	%	Rp -	100	%	Rp 4.999.408,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	-	60	Rp -	60,00	-	Dinas PM & PTSP
		2	18	02	2.02	0004	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Dokumen	Rp 580.000.000,00	0	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp 4.999.408,00	0	Rp -	0	Rp -	0		0	Rp -	0	Rp -	-	-	0	Rp -	-	-	Dinas PM & PTSP
		2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal	%	100	%	Rp 834.350.000,00	100	%	Rp 44.536.300,00	100	%	Rp 98.709.120,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	-	100	Rp 44.536.300,00	100	5,34	Dinas PM & PTSP
		2	18	03	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Promosi Investasi Daerah	%	100	%	Rp 834.350.000,00	100	%	Rp 44.536.300,00	100	%	Rp 98.709.120,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	-	100	Rp 44.536.300,00	100	5,34	Dinas PM & PTSP
		2	18	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	5	Dokumen	Rp 834.350.000,00	1	Dokumen	Rp 44.536.300,00	1	Dokumen	Rp 98.709.120,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	-	1	Rp 44.536.300,00	20	5,34	Dinas PM & PTSP
	Meningkatnya Pelayanan Investasi dan Perizinan yang Cepat, Tepat dan Transparan							IKM Bidang Perizinan		%			94,00%	%		87,20%	%																				
								Persentase Retribusi Perizinan Terhadap PAD		%																												
		2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM BIDANG PERIZINAN	Angka	87,2	Angka	Rp 4.000.000.000,00	94,00	Angka	Rp 373.774.340,00	87,20	Angka	Rp 620.022.975,00	0	Rp 51.000.000,00	0	Rp -		Rp -	0	Rp -	0	Rp 51.000.000,00	0,00	8,23	47	Rp 424.774.340,00	53,90	10,62	Dinas PM & PTSP
		2	18	04	2.01		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ketepatan Waktu Pemenuhan Pelayanan Perizinan	Hari	14	Hari	Rp 4.000.000.000,00	14	Hari	Rp 373.774.340,00	14	Hari	Rp 620.022.975,00	14	Rp 51.000.000,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	14	Rp 51.000.000,00	100	8,23	14	Rp 424.774.340,00	100	10,62	Dinas PM & PTSP
		2	18	04	2.01	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	2500	Pelaku Usaha	Rp 1.700.000.000,00	28,703	Pelaku Usaha	Rp 208.128.500,00	16500	Pelaku Usaha	Rp 470.023.200,00	0	Rp 51.000.000,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp 51.000.000,00	-	10,85	28,703	Rp 259.128.500,00	1,15	15,24	Dinas PM & PTSP
		2	18	04	2.01	0008	Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	2500	Kegiatan Usaha	Rp 2.300.000.000,00	77	Kegiatan Usaha	Rp 165.645.840,00	75	Kegiatan Usaha	Rp 149.999.775,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	28	Rp -	28	Rp -	37,3333333	-	105	Rp 165.645.840,00	4	7,20	Dinas PM & PTSP
		2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	KENAIKAN/PENURUNAN NILAI REALISASI PMDN	%	23,69	%	Rp 2.218.253.410,25	33,74%	%	Rp 288.394.000,00	21,95%	%	Rp 115.811.472,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0,00%	Rp -	0	-	48,67	Rp 288.394.000,00	49	13,00	Dinas PM & PTSP
		2	18	05	2.01		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Nilai Investasi PMDN	%	100	%	Rp 2.218.253.410,25	80	%	Rp 288.394.000,00	100	%	Rp 115.811.472,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	-	48,67	Rp 288.394.000,00	48,67	13,00	Dinas PM & PTSP
		2	18	05	2.01	0004	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	2500	Kegiatan Usaha	Rp 328.532.388,85	0	Kegiatan Usaha	Rp -																				
		2	18	05	2.01	0005	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	2500	Pelaku Usaha	Rp 1.232.656.243,71	292	Pelaku Usaha	Rp 210.944.000,00	295	Pelaku Usaha	Rp 115.811.472,00	0	Rp -		Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	-	146	Rp 210.944.000,00	5,84	17,11	Dinas PM & PTSP

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024) (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN BIDANG URUSAN		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN											I		II		III		IV									
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)			(8)			(9)			(10)		(11)		(12)			(14) = (10+11+12+13)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K		RUPIAH	K		RUPIAH	K		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		
		2	18	05	2.01	0006	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	2500	Kegiatan Usaha	Rp 657.064.777,69	30	Kegiatan Usaha	Rp 77.450.000,00																				
		2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DATA Dan SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penyajian Data Penanaman Modal**	**%**	**85**	**%**	**Rp 635.000.000,00**																						
		2	**18**	**06**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Secara Terpadu**	**%**	**85**	**%**	**Rp 635.000.000,00**																						
		2	18	06	2.01	0002	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	5	Dokumen	Rp 635.000.000,00																						
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					**Rp 95.972.904.622,25**			**Rp 9.337.642.304,00**			**Rp 11.938.641.591,00**		**Rp 2.457.836.664,00**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp 2.457.836.664,00**					**Rp 11.795.478.968,00**			
							TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					**8,08**	**13,65**			**61,30**	**32,10**		
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					**SR**	**SR**			**R**	**SR**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

Bandar Lampung, Maret 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Bandar Lampung

MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.Si
NIP. 19710810 199502 1 001

Catatan :

*) Nama OPD

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kalimat Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 < 100	Sangat Tinggi (ST)
2	76 < 90	Tinggi (T)
3	66 < 75	Cukup (C)
4	51 < 65	Rendah (R)
5	< 50	Sangat Rendah (SR)

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA
PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA
PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI
NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	**BAB I**	**PENDAHULUAN**	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	**BAB II**	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**	√			
	2.1	Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/tahun 2024				
		Formulir E.81	√			
3	**BAB III**	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024				
4	**BAB IV**	**PENUTUP**	√			

Bandar Lampung, 2025
Plt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Bandar Lampung,

ANDY, S.Sos
Pembina TK. I (IV/b)
NIP 19740204 199703 1 004

Diverifikasi oleh : 2025		**Tanda Tangan**
1	**Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.**	
	Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappperida Kota Bandar Lampung	
2	**INDAH WULAN SARI, S.Ap.,MM**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui;
Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung,

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI
TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA
PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025
Plt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Bandar Lampung,

ANDY, S.Sos
Pembina TK. I (IV/b)
NIP 19740204 199703 1 004

Mengetahui;
Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung,

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19700218 199303 2 002

Diverifikasi oleh : 2025		Tanda Tangan
1	**Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.**	
	Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappperida Kota Bandar Lampung	
2	**INDAH WULAN SARI, S.Ap.,MM**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, 2025

Mengetahui;
Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung,

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19700218 199303 2 002

Diverifikasi oleh : 2025		**Tanda Tangan**
1	**Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.**	
	Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappperida Kota Bandar Lampung	
2	**INDAH WULAN SARI, S.Ap.,MM**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1.Latar Belakang 1
1.2.Landasan Hukum 6
1.3.Maksud dan Tujuan 10
1.4.Sistematika Penulisan 10

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 12

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 19

BAB IV PENUTUP 28

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Belanja Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 13
Tabel 2.2 Rincian Belanja Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 14
Tabel 2.3 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 16
Tabel 2.4 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Dispora dan Renstra Dispora sampai dengan Tahun 2024 20
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung 38
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 47

LAMPIRAN 20
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616/IV.01/HK/2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka

waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota bandar lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Visi pembangunan Kota Bandar Lampung untuk periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

"BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT"

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Penjelasan masing-masing Misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut:

MISI PERTAMA : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.

MISI KEDUA : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesame masyarakat.

MISI KETIGA : Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui layanan infrastruktur yang berkualitas dan berintegrasi satu sama lain, serta mampu mendukung aktifitas social dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.

MISI KEEMPAT : Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan social masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan

iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi masyarakat yang kreatif.

MISI KELIMA : Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religious. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat religious yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban didalam bermasyarakat dan bernegara dengan berazaskan kearifan local serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.

MISI KEENAM : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata Kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang professional dengan system berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

MISI KETUJUH : Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan

perkotaan. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tamping

Visi dan Misi jangka menengah daerah menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan tahunan. Rencana pembangunan tahunan daerah disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi. Fokus dan arah kebijakan Tahun 2025 yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah ***"Akselerasi Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah melalui Pembangunan di Segala Bidang"***. Oleh karena itu, Tema Pembangunan Tahun 2025 yang tertuang dalam Renja Perubahan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah ***"Percepatan Pemulihan Ekonomi, Sosial dan Budaya Daerah melalui Pembangunan Berkelanjutan"***.

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung menentukan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 sebagai landasan penyusunan RKPD dan Renja OPD di lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mengarah kepada pencapaian Visi, Misi dan sasaran daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Kota Bandar Lampung yang dimuat dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi;
2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas;
3. Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan;
4. Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal;
5. Meingkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan

memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah;

6. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga. Dengan demikian Dinas Kepemudaan dan Olahraga menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-2 (dua) dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu ***Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat.*** Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, pada Tahun 2021 Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyusun Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PTR/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penysuunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provnisi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 19);
28. Surat Edaran Wali Kota Bandar Lampung Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Wali Kota.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025.
3. Sebagai acuan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rancangan awal Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERKENAAN

Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan/ Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun Berkenaan/ Tahun 2025 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rancangan awal Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang perubahan rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dispora Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dispora Kota Bandar Lampung

Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 Dispora Kota Bandar Lampung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) Dispora tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut perubahan Renja Dispora Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dispora Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan/ Tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat

berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Perkiraan Pencapaian Triwulan II Tahun Anggaran 2025

Tahun berjalan yaitu anggaran tahun 2025 dengan total anggaran Rp 12.400.628.791 dan dirinci anggaran belanja operasi sebesar Rp 12.316.292.497 dan belanja modal sebesar Rp 84.336.294 melalui pelaksanaan 4 program, 11 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan. Berikut ini adalah data menunjukkan rincian belanja daerah pada Dinas Kepemudaan dan olahraga sampai dengan triwulan II tahun 2025:

Tabel 2.1. Belanja Daerah Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		RP	%	
Belanja Operasi	12.316.292.497	2.800.048.104	22,58	9.600.580.687
Belanja Modal	84.336.294	0	0	84.336.294
Jumlah	12.400.628.791	2.800.048.104	22,58	9.600.580.687

Adapun secara rinci besaran alokasi dana dan realisasinya untuk masing-masing program, kegiatan, sub kegiatan diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Rincian Belanja Daerah Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			RUPIAH	PERSEN	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4,524,103,744**	**1,427,518,104**	**31.55%**	**3,096,585,640.00**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**71,572,034**	**23,796,000**	**33.25%**	**47,776,034.00**
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**71,572,034**	23,796,000	33.25%	47,776,034.00
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3,528,348,690**	**1,149,722,104**	**32.59%**	**2,378,626,586.00**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,428,003,230	1,136,372,104	33.15%	2,291,631,126.00
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,345,460.00	13,350,000	13.30%	86,995,460.00
1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**173,974,006**	-	**0.00%**	**173,974,006.00**
1.3.1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59,982,786.00	-	0.00%	59,982,786.00
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,000,000.00	-	0.00%	30,000,000.00
1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9,947,434.00	-	0.00%	9,947,434.00
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4,500,000.00	-	0.00%	4,500,000.00
1.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19,240,000.00	-	0.00%	19,240,000.00
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,303,786	-		50,303,786.00
1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**205,539,014**	-	**0.00%**	**205,539,014.00**
1.4.1	Pengadaan mebel	43,151,923	-	0.00%	43,151,923.00
1.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	162,387,091.00	-	0.00%	162,387,091.00
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**504,000,000**	**254,000,000**	**50.40%**	**250,000,000.00**
1.5.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	504,000,000.00	254,000,000.00	50.40%	250,000,000.00
1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**40,670,000**	-	**0.00%**	**40,670,000.00**
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	38,670,000.00	-	0.00%	38,670,000.00
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,000,000	-	0.00%	2,000,000.00
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**529,465,020**	-	**0.00%**	**529,465,020.00**
2.1	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**248,228,687**	-	**0.00%**	**248,228,687.00**
2.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	218,075,130	-	0.00%	218,075,130.00
2.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	30,153,557.00	-		30,153,557.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			RUPIAH	PERSEN	
2.2	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**281,236,333**	-	0.00%	281,236,333.00
2.2.1	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	281,236,333.00	-	0.00%	281,236,333.00
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**6,347,060,027**	**1,022,530,000**	**16.11%**	**5,324,530,027.00**
3.2	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**319,776,734**	-		**319,776,734.00**
3.2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	319,776,734			319,776,734.00
3.3	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**4,850,000,000**	**775,000,000**	**15.98%**	**4,075,000,000.00**
3.3.1	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	4,850,000,000	775,000,000	15.98%	4,075,000,000.00
3.4	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**1,177,283,293**	**247,530,000**	**21.03%**	**929,753,293.00**
3.4.1	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	1,040,616,837	247,530,000	23.79%	793,086,837.00
3.4.2	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	136,666,456.00	-	0.00%	136,666,456.00
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**1,000,000,000**	**350,000,000**	**35.00%**	**650,000,000.00**
4.1	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**1,000,000,000**	**350,000,000**	**35.00%**	**650,000,000.00**
4.1.1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1,000,000,000.00	350,000,000	35.00%	650,000,000.00
TOTAL		**12,400,628,791**	**2,800,048,104**	**22.58%**	**9,600,580,687.00**

Selanjutnya, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Kepemudaan dan olahraga dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disajikan pada table 2.3 berikut:

Formulir E. 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BANDAR LAMPUNG
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung, dengan Target Kinerja : 70,72 pada Tahun 2026

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2021 S/D 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) s.d TRIWULAN IV		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN IV TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	I		II		III		IV										
																K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (8/7)*100		16 = (8+6)		17 = (10/5)*100		18
		2	**19**				**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**72,811,624,778.00**		**38,942,112,702.00**		**12,550,628,791.00**		**807,613,938.00**		**1,992,434,166.00**		-		-		**2,800,048,104.00**		**22.31**		**41,742,160,806.00**		**57.33**		
		2	**19**				**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**				**72,811,624,778.00**		**38,942,112,702.00**		**12,550,628,791.00**		**807,613,938.00**		**1,992,434,166.00**		-		-		**2,800,048,104.00**		**22.31**		**41,742,160,806.00**		**57.33**		
1	**Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga**	**2**	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**PERSEN**	**98.00**	**27,140,363,417.00**	**98.00**	**13,884,265,621.00**	**98.00**	**4,662,103,744.00**	**25.00**	**759,783,938.00**	**25.00**	**667,734,166.00**		-		-	**50.00**	**1,427,518,104.00**	**51.02**	**30.62**	**50.00**	**15,311,783,725.00**	**51.02**	**56.42**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
		2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**206,300,000.00**	**100.00**	**113,238,500.00**	**100.00**	**71,572,034.00**		-		**23,796,000.00**		-		-	**-**	**23,796,000.00**	**-**	**33.25**	**-**	**137,034,500.00**	**-**	**66.42**	
		2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dispora	Jumlah	3.00	206,300,000.00	3.00	113,238,500.00		71,572,034.00				23,796,000						23,796,000.00		33.25	3.00	137,034,500.00	100.00	66.42	
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	45.00		7.00		7.00				4.00				4.00		57.14		11.00		24.44		
		2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**21,754,546,692.00**	**100.00**	**11,188,366,140.00**	**100.00**	**3,528,348,690.00**	**25.00**	**631,783,938.00**	**25.00**	**517,938,166.00**	**25.00**	-	**25.00**	-	**100.00**	**1,149,722,104.00**	**100.00**	**32.59**	**100.00**	**12,338,088,244.00**	**100.00**	**56.71**	
		2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dispora yang Tersedia	Kali	14.00	21,309,246,692.00	14.00	10,855,065,590.00		3,428,003,230		631,783,938.00		504,588,166						1,136,372,104.00		33.15	14.00	11,991,437,694.00	100.00	56.27	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	28.00		28.00		28.00		28.00		28.00				28.00		100.00		28.00		100.00		
		2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dispora yang Terlaksana	Bulan	12.00	445,300,000.00	12.00	333,300,550.00		100,345,460.00				13,350,000						13,350,000.00		13.30	12.00	346,650,550.00	100.00	77.85	
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60.00		24.00		12.00				3.00				3.00		25.00		27.00		45.00		
		2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**80.00**	**163,500,000.00**												-		-		-		-		
		2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4.00	129,000,000.00																			
		2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	28.00	34,500,000.00																			
		2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**804,866,725.00**	**98.00**	**256,538,841.00**	**98.00**	**173,974,006.00**		-		-		-		-	-	-	-	-	-	**256,538,841.00**	-	**31.87**	
		2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1.00	130,000,000.00	1.00	85,618,891.00		59,982,786.00									-		-		1.00	85,618,891.00	100.00	65.86	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00		-						-		-		1.00		20.00		
		2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	Paket	1.00	77,379,172.00	1.00	18,130,950.00											-		-		1.00	18,130,950.00	100.00	23.43	
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5.00		1.00										-		-		1.00		20.00		
		2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	82.00	54,500,000.00	82.00	30,435,000.00		30,000,000.00									-		-		82.00	30,435,000.00	100.00	55.84	
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00								-		-		1.00		20.00		
		2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakkan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1.00	70,987,553.00	1.00	18,587,000.00		9,947,434.00									-		-		1.00	18,587,000.00	100.00	26.18	
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00								-		-		1.00		20.00		
		2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumah Bahan Bacaan Kantor dan Peralatab Perundang - undangan yang Tersedia	Paket	1.00	42,500,000.00	1.00	21,750,000.00		4,500,000.00									-		-		1.00	21,750,000.00	100.00	51.18	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5.00		1.00		1.00								-		-		1.00		20.00		
		2	19	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100.00	64,500,000.00	83.00	32,785,000.00		19,240,000.00									-		-		83.00	32,785,000.00	83.00	50.83	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5.00		1.00		1.00								-		-		1.00		20.00		
		2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Peralatan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100.00	365,000,000.00	-	49,232,000.00		50,303,786.00									-		-		-	49,232,000.00	-	13.49	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5.00		-		-								-		-		-		-		
		2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kabutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**338,500,000.00**	**70.00**	**85,480,000.00**	**98.00**	**205,539,014.00**	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	**85,480,000.00**	-	**25.25**	
		2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor	Paket	1.00	248,500,000.00	1.00	41,520,000.00		43,151,923.00									-		-		1.00	41,520,000.00	100.00	16.71	
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5.00		1.00										-		-		1.00		20.00		
		2	19	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	1.00		1.00																	-	-	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5.00		-															-	-	
		2	19	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	1.00	90,000,000.00	1.00	43,960,000.00		162,387,091.00									-		-		1.00	43,960,000.00	100.00	48.84	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5.00		-		1.00								-		-		-		-		

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2021 S/D 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) s.d TRIWULAN IV		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN IV TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (8/7)*100		16 = (8÷6)		17 = (10/5)*100		18	
		2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100.00**	**3,235,250,000.00**	**100.00**	**1,990,247,850.00**	**100.00**	**504,000,000.00**	**25.00**	**128,000,000.00**		**126,000,000.00**	-	-	-	-	**25.00**	**254,000,000.00**	**25.00**	**50.40**	**25.00**	**2,244,247,850.00**	**25.00**	**69.37**	
		2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12.00	3,235,250,000.00	12.00	1,990,247,850.00		504,000,000.00		128,000,000.00		126,000,000.00						254,000,000.00		50.40	12.00	2,244,247,850.00	100.00	69.37	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5.00		1.00		1.00		0.25		0.25				0.50		50.00		1.50		30.00		
		2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**637,400,000.00**	**98.00**	**250,394,290.00**	**98.00**	**178,670,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**250,394,290.00**	-	**39.28**	
		2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1.00	216,000,000.00	1.00	111,148,150.00		176,670,000.00		-		-		-		-		-		-	1.00	111,148,150.00	100.00	51.46	
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6.00		1.00		1.00		-		-				-		-		1.00		16.67		
		2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	1.00	12,000,000.00	-	2,008,140.00		2,000,000.00										-		-	-	2,008,140.00	-	16.73	
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5.00		1.00		1.00		-		-				-		-		1.00		20.00		
		2	19	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit	1.00	409,400,000.00	1.00	137,238,000.00														1.00	137,238,000.00	100.00	33.52	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang	Unit	24.00		1.00														1.00		4.17		
																														Rata-Rata Capaian Kinerja		**51.02**	**30.62**			**51.02**	**56.42**	
																														Predikat Kinerja		**R**	**SR**			**R**	**R**	
		2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**PERSENTASE ORGANISASI PEMUDA YANG AKTIF**	**PERSEN**	**100.00**	**4,619,631,227.00**	**73.00**	**2,066,445,632.00**	**100.00**	**391,465,020.00**	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	**2,066,445,632.00**	-	**44.73**	
								TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI	**PERSEN**	**3.99**		**3.54**		**3.77**	-		-					-		-		-	-	-	-				
		2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**PERSEN**	**100.00**	**1,540,000,000.00**	**75.00**	**434,563,500.00**	**100.00**	**110,228,687.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**434,563,500.00**	-	**28.22**	
		2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Pembinaan dan Seleksi Pemuda Pelopor, Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan Negara	Orang	20.00	225,000,000.00	20.00	434,563,500.00		80,075,130		-		-		-		-		-		-	20.00	434,563,500.00	100.00	193.14	
								Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	100.00		20.00		20.00								-		-		20.00		20.00		
		2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kompetensi Kerja dan Berwirausaha Pemuda Kota Bandar Lampung	Orang	40.00	165,000,000.00	-	-		30,153,557.00		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	
								Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	150.00				-								-		-		-		-		
		2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	150.00	500,000,000.00																					
		2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	300.00	650,000,000.00																					
		2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100.00**	**3,079,631,227.00**	**100.00**	**1,631,882,132.00**	**100.00**	**281,236,333.00**	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	**1,631,882,132.00**	-	**52.99**	
		2	19	02	2.02	02	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Pembinaan dan Seleksi Calon Paskibra Tingkat Kecamatan dan Kota Bandar Lampung	Orang	80.00	3,079,631,227.00	80.00	1,631,882,132.00		281,236,333.00		-		-		-		-		-		-	80.00	1,631,882,132.00	100.00	52.99	
								Mental dan Motivasi di Kalangan Atlit Kota Bandar Lampung yang Terbina	Orang	240.00		-																-		-	
								Mental dan Motivasi di Kalangan Pelatih Kota Bandar Lampung yang Terbina	Orang	120.00		-																-		-	
								Keimanan dan Ketaqwaan untuk Atlit dalam Aspek Religius	Orang	250.00		-																-		-	
								Keimanan dan Ketaqwaan untuk Pelatih dalam Aspek Religius	Orang	120.00		-																-		-	
								Pendataan Kewirausahaan Muda di 20 Kecamatan Kota Bandar Lampung	Orang/ Kecamatan	120.00		-																-		-	
								Pendataan Organisasi Pemuda di 20 Kecamatan Kota Bandar Lampung	Kecamatan	120.00		-																-		-	
								Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	5.00		1.00		1.00		-						-		-		1.00		20.00		
																														Rata-Rata Capaian Kinerja		-	-			-	**44.73**	
																														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
		2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**CAKUPAN PEMBINAAN OLAH RAGA**	**PERSEN**	**100.00**	**35,360,231,134.00**	**100.00**	**20,423,901,449.00**	**100.00**	**6,497,060,027.00**		**47,830,000.00**	**25.00**	**974,700,000.00**		-		-	**25.00**	**1,022,530,000.00**	**25.00**	**15.74**	**25.00**	**21,446,431,449.00**	**25.00**	**60.65**	
								PENINGKATAN PELATIH YANG BERSERTIFIKASI	**PERSEN**	**100.00**		-		**87.03**		-	-					-		-		-	-	-	-				
								SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA YANG TERPELIHARA	**PERSEN**	**100.00**		**50.00**		**66.67**		-						-		-		-	-	-	-				
								PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	**JUMLAH**	**50.00**		**30.00**		**10.00**		**2.00**						**2.00**		**20.00**		**2.00**		**4.00**		

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2021 S/D 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) s.d TRIWULAN IV		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN IV TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (8/7)*100		16 = (8+6)		17 = (10/5)*100		18
		2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100.00**	**155,000,000.00**	**33.00**	**5,800,000.00**		-													**33.00**	**5,800,000.00**	**33.00**	**3.74**	
		2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Orang	100.00	155,000,000.00	10.00	5,800,000.00		-													10.00	5,800,000.00	10.00	3.74	
		2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100.00**	**4,958,960,600.00**	**33.00**	**707,369,000.00**	**100.00**	**319,776,734.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**707,369,000.00**	-	**14.26**	
		2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Olahraga dan Kompetisi Olahraga (PERWOSI)	Orang	1,000.00	2,718,960,600.00	1,000.00	707,369,000.00		319,776,734.00										-				707,369,000.00	-	26.02	
								Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	5.00		1.00				-		-		-						#DIV/0!				-		-	
		2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Open Tournament Bola Voly Walikota Bandar Lampung	Grup	1,000.00	2,240,000,000.00	-	-															-	-	-	-	
								Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Cabang Olahraga	Persen	100.00		-																-		-		
								Penyelenggaraan Kejuaraan Cabang Olahraga Tenis Lapangan	Persen	100.00		-																-		-		
								Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	5.00		-																-		-		
		2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Persen**	**98.00**	**3,600,000,000.00**																					
		2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	200.00	3,200,000,000.00																					
		2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	5.00	400,000,000.00																					
		2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan**	**Persen**	**100.00**	**21,009,902,800.00**	**100.00**	**17,875,811,000.00**	**100.00**	**5,000,000,000.00**	-	-	-	**775,000,000.00**	-	-	-	-	-	**775,000,000.00**	-	**15.50**	**100.00**	**18,650,811,000.00**	**100.00**	**88.77**	
		2	19	03	2.04	02	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	5.00	21,009,902,800.00	1.00	17,875,811,000.00	1.00	5,000,000,000			0.50	775,000,000					0.50	775,000,000.00	50.00	15.50	1.50	18,650,811,000.00	30.00	88.77	
		2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persen**	**100.00**	**5,636,367,734.00**	**80.00**	**1,834,921,449.00**	**100.00**	**1,177,283,293.00**	**25.00**	**47,830,000.00**	**25.00**	**199,700,000.00**				-	50.00	**247,530,000.00**	**50.00**	**21.03**	**50.00**	**2,082,451,449.00**	**50.00**	**36.95**	
		2	19	03	2.05	01	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Penyelenggaraan Car Free Day	Orang	1,000.00	4,855,953,684.00	-	1,585,265,250.00		1,040,616,837		47,830,000.00		199,700,000.00						247,530,000.00		23.79	-	1,832,795,250.00	-	37.74	
								Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rekreasi di Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung	Persen	100.00		-																-		-		
								Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Dalam Rangka HUT Kota Bandar Lampung	Persen	100.00		-																-		-		
								Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Dalam Rangka HUT HAORNAS	Persen	100.00		-																-		-		
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	5.00		1.00		1.00		0.25		0.25						0.50		50.00		1.50		30.00		
		2	19	03	2.05	03	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Layak dan memadai yang Tersedia	Paket	1.00	780,414,050.00	1.00	249,656,199.00		136,666,456.00									-		-		1.00	249,656,199.00	100.00	31.99	
								Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit	5.00		1.00		1.00										-		-		1.00		20.00		
																								Rata-Rata Capaian Kinerja		**11.25**	**15.74**			**7.25**	**60.65**	
																								Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**R**	
		2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**PERSENTASE PEMBINAAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN**	**PERSEN**	**100.00**	**5,691,399,000.00**	**100.00**	**2,567,500,000.00**	**100.00**	**1,000,000,000.00**	-	-	**50.00**	**350,000,000.00**		-	-	-	**50.00**	**350,000,000.00**	**50.00**	**35.00**	**75.00**	**2,917,500,000.00**	**75.00**	51.26	
		2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persen**	**100.00**	**5,691,399,000.00**	**100.00**	**2,567,500,000.00**	**100.00**	**1,000,000,000.00**	-	-	**50.00**	**350,000,000.00**		-	-	-	**50.00**	**350,000,000.00**	50.00	**35.00**	**75.00**	**2,917,500,000.00**	**75.00**	51.26	
		2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	5.00	5,691,399,000.00	2.00	2,567,500,000.00	1.00	1,000,000,000.00	-		0.50	350,000,000					**0.50**	350,000,000.00	50.00	35.00	2.50	2,917,500,000.00	50.00	51.26	
																								Rata-Rata Capaian Kinerja		**50.00**	**35.00**			**75.00**	**51.26**	
																								Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**S**	-	

BAB III
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksaaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program da kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendaaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Bandar Lampung dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Rp 4.548.103.744**
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Rp 71.572.034**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 71.572.034
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Rp 3.528.348.690**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.428.003.230
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 100.345.460
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Rp 173.974.006**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 59.982.786
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 30.000.000
Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan	Rp 9.947.343
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Rp 4.500.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 19.240.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 50.303.786
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp 205.539.014**
Pengadaan Mebel	Rp 43.151.923
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 162.387.091
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp 528.000.000**
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 528.000.000

Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp 40.670.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 38.670.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 2.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Rp 529.465.020**
Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Rp 248.228.687**
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Rp 30.153.557
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Wira Usaha Pemula	Rp 218.075.130
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Rp 281.236.333**
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Rp 281.236.333
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Rp 6.347.060.027**
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Rp 319.776.734**
Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 319.776.734
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	**Rp 4.850.000.000**
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Rp 4.850.000.000

Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Rp 1.177.283.293**
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Rp 1.040.616.837
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Rp 136.666.456
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**Rp 1.000.000.000**
Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Rp 1.000.000.000**
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp 1.000.000.000
JUMLAH	**Rp 12.424.628.791**

Tabel 3.1 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									11,711,541,639.00	12,550,628,791.00	12,424,628,791.00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									11,711,541,639.00	12,550,628,791.00	12,424,628,791.00	
	2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									**11,711,541,639.00**	**12,550,628,791.00**	**12,424,628,791.00**	
93	**2**	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persen**	**Persen**	**98**	**98**	**98**	**4,443,799,711.00**	**4,701,871,744.00**	**4,548,103,744.00**	
	2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**43,000,000.00**	**71,572,034.00**	**71,572,034.00**	
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	dokumen	7	7	7	43,000,000.00	71,572,034.00	71,572,034.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**3,528,986,330.00**	**3,528,348,690.00**	**3,528,348,690.00**	
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang/bulan	28	28	28	3,403,986,330.00	3,428,003,230.00	3,428,003,230.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	125,000,000.00	100,345,460.00	100,345,460.00	
	2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**-**	**-**	**-**	**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	
	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	-	-	-	15,000,000.00	0.00	0.00	
	2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98**	**98**	**98**	**129,500,000.00**	**213,742,006.00**	**173,974,006.00**	
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	40,000,000.00	59,982,786.00	59,982,786.00	
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5,000,000.00	9,947,434.00	9,947,434.00	
	2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	dokumen	1	1	1	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	
	2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	10,000,000.00	19,240,000.00	19,240,000.00	
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	-	-	-	50,000,000.00	90,071,786.00	50,303,786.00	
	2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kabutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kabutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98**	**98**	**98**	**141,883,381.00**	**205,539,014.00**	**205,539,014.00**	
	2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	80,000,000.00	43,151,923.00	43,151,923.00	
	2	19	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	61,883,381.00	162,387,091.00	162,387,091.00	
	2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**1**	**1**	**1**	**456,000,000.00**	**504,000,000.00**	**528,000,000.00**	
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	456,000,000.00	504,000,000.00	528,000,000.00	
	2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98**	**98**	**98**	**129,430,000.00**	**178,670,000.00**	**40,670,000.00**	
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	42,430,000.00	176,670,000.00	38,670,000.00	
	2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1	1	1	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
	2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	85,000,000.00	0.00	0.00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	2	19	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	**Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif** Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	**Persen** Persen	**Persen** Persen	**100** 3.88	**100** 3.88	**100** 3.88	**292,002,499.00**	**391,465,020.00**	**529,465,020.00**	
	2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**57,111,151.00**	**110,228,687.00**	**248,228,687.00**	
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	Orang	20	20	20	26,956,992.00	80,075,130.00	218,075,130.00	
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Orang	Orang	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang	Orang	-	-	-	30,154,159.00	30,153,557.00	30,153,557.00	
	2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**234,891,348.00**	**281,236,333.00**	**281,236,333.00**	
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	Orang	1	1	1	234,891,348.00	281,236,333.00	281,236,333.00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	2	19	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi Peningkatan Prestasi Olahraga Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara	**Cakupan Pembinaan Olahraga**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**5,975,739,429.00**	**6,457,292,027.00**	**6,347,060,027.00**	
									Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi	Persen	Persen	100	100	100				
									Sarana dan Prasarana Olah Raga yang Terpelihara	Persen	Persen	83.33	83.33	83.33				
									Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persen	Persen	100	100	100				
	2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**300,000,000.00**	**299,998,734.00**	**319,776,734.00**	
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	-	-	-	300,000,000.00	299,998,734.00	319,776,734.00	
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	-	-	-	-	-	0.00			
	2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Persen**	**Persen**	**-**	**-**	**-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	Orang	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
	2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan organisasi keolahragaan**	**Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan organisasi keolahragaan**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**5,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**4,850,000,000.00**	
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	dokumen	dokumen	1	1	1	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	4,850,000,000.00	
	2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**675,739,429.00**	**1,157,293,293.00**	**1,177,283,293.00**	
	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	Unit	1	1	1	136,667,221.00	136,666,456.00	136,666,456.00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	dokumen	dokumen	1	1	1	539,072,208.00	1,020,626,837.00	1,040,616,837.00	
96	**2**	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**1,000,000,000.00**	**1,000,000,000.00**	**1,000,000,000.00**	
	2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**1,000,000,000.00**	**1,000,000,000.00**	**1,000,000,000.00**	
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	Organisasi	1	1	1	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	**BAB I**	**PENDAHULUAN**	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	**BAB II**	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN**				
		Formulir E.81	√			
3	**BAB III**	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	√			
4	**BAB IV**	**PENUTUP**	√			

Bandar Lampung, 19 September 2025
Kepala Dinas Perpustkaan dan Kearsipan
Kota Bandar Lampung,

HIDAYAT ISMET,SE.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770802 199703 1 004

Diverifikasi : September 2025		Tanda Tangan
1	**Dra. Rr. Diah Sulistiorini, M.Si**	
	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	**Puspita Dewi, SE.MM**	
	Perencana Ahli Muda Bapperida Bandar Lampung	

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida,

Dini Purnamawaty,S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 197002181993032002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan.	√			
4.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masingPerangkat Daerah sesuai surat edaranwalikota.	√			
5.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah	√			
6.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.		√	Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 19 September 2025
Kepala Dinas Perpustkaan dan Kearsipan
Kota Bandar Lampung,

HIDAYAT ISMET,SE.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770802 199703 1 004

Diverifikasi : September 2025		Tanda Tangan
1	**Dra. Rr. Diah Sulistiorini, M.Si**	
	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	**Puspita Dewi, SE.MM**	
	Perencana Ahli Muda Bapperida Bandar Lampung	

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida,

Dini Purnamawaty,S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19700218199303200 2

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi RenjaPerangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, September 2025

Mengetahui,

Plt. Kepala Bapperida,

Dwi Yurnamawaty,S.E., M.Si.
Pembina TK I (IV/b)
NIP 19700218199303200 2

Diverifikasi : September 2025		Tanda Tangan
1	**Dra. Rr. Diah Sulistiorini, M.Si**	
	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	**Puspita Dewi, SE.,MM**	
	Perencana Ahli Muda Bapperida Bandar Lampung	

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN BULAN MEI TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi terhadap hasil Renja perangkat daerah sampai dengan bulan Mei Tahun berkenaan/2025 7

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, sub kegiatan, Target dan pagu pada perubahan rencana kerja persangkat daerah tahun 2025 14

BAB IV Penutup 28

LAMPIRAN 22
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616/IV.01/HK/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;
b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampug Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebaigaimana telah beberapa kali diubah teralhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 12);

22. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung
23. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

I.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Bulan Mei Tahun 2025

Didalam setiap kegiatan membutuhkan suatu evaluasi dimana evaluasi itu dapat menilai semua kekurangan dan kelebihan dalam suatu organisasi menjalankan kegiatan tersebut, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga perlu membuat sebuah evaluasi Renja untuk dapat menilai seberapa jauh kegiatan yang sudah berjalan serta dapat membuat perencanaan kerja terbaik untuk tahun yang akan datang, Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban dalam bentuk angka yang dilaksanakan secara periodik.

Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi SKPD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi SKPD saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja OPD Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Disusun berdasarkan kegiatan yang ada dan terealisasi pada OPD tahun anggaran 2025

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

   Kegiatan

   1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan

   a. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD,- Rp10.000.000
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,- Rp 45.000.000

   1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,- Rp 4.929.216.748
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD,- Rp 95.521.118

   1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan

   a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya ,- Rp 0

   1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan

   b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ,- Rp 9.998.537
   c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,- Rp 29.999.803
   d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,- Rp 13.999.230
   e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.- Rp 14.990.000
   f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,- Rp 10.999.800
   g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan,- Rp 10.800.000
   h. Fasilitasi Kunjungan Tamu.- Rp 10.000.000

i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,- Rp 30.000.000

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,- Rp 15.000.000
b. Pengadaan Sarana dan Prasaran Gedung Lainnya Rp 150.000.000

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik,- Rp 100.000.000
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,- Rp 240.000.000

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan.,- Rp 42.430.000
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.,- Rp 129.550.000
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.- Rp 14.620.000
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,- Rp 0

2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Kegiatan

2.1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

a. Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan ,- Rp 25.000.000
b. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,- Rp. 36.882.309
c. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,- Rp 21.970.000
d. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan,- Rp 71.932.264
e. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan,- Rp 144.999.798
f. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota,- Rp 26.243.792
g. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik ,- Rp 104.999.923

2.2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial,- Rp 34.997.756
b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di Tempat-tempat umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota,- Rp 3.431.954.350
c. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca,- Rp 121.291.052
d. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat,- Rp 301.508.770

3. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Kegiatan

3.1 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nudantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan

a. Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara,- Rp 20.930.513

4. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Kegiatan

4.1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

a. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis,- Rp 55.999.895
b. Pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis,- Rp 14.998.729

4.2 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengumpulan dan Penyampaian salinan otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI,- Rp 0
b. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis, Rp. 19.999.957

4.3 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyediaan Informasi Akses dan Layanan kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten//Kota,- Rp 29.999.927
b. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Rp 9.143.380

5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Kegiatan

5.1 Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

a. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi dibawah 10 tahun Rp 19.999.989

Realisasi

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Rp.5.902.125.236. , sampai dengan bulan Mei 2025 Terelisasi - Rp.1.981.763.466,-(33,58%)
2. Program Pembinaan Perpustakaan ,-
   Rp 4.321.780.014, sampai dengan bulan Mei 2025 Terealisasi Rp 3.431.954.350
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.
   Rp 20.930.513 sampai dengan bulan Mei 2025 Terealisasi Rp 0 ,- (0 %)
4. Program Pengolahan Arsip ,
   Rp 130.141.888 Sampai dengan bulan Mei 2025 Terelisasi Rp0 (0 %)
5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
   Rp. 19.999.989 bulan Mei 2025 Terealisasi Rp 0 (0%)

Rincian lebih lanjut tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dalam Formulir E-81 (Dengan Indikator Sesuai Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021) sebagai berikut:

Formulir E. 81

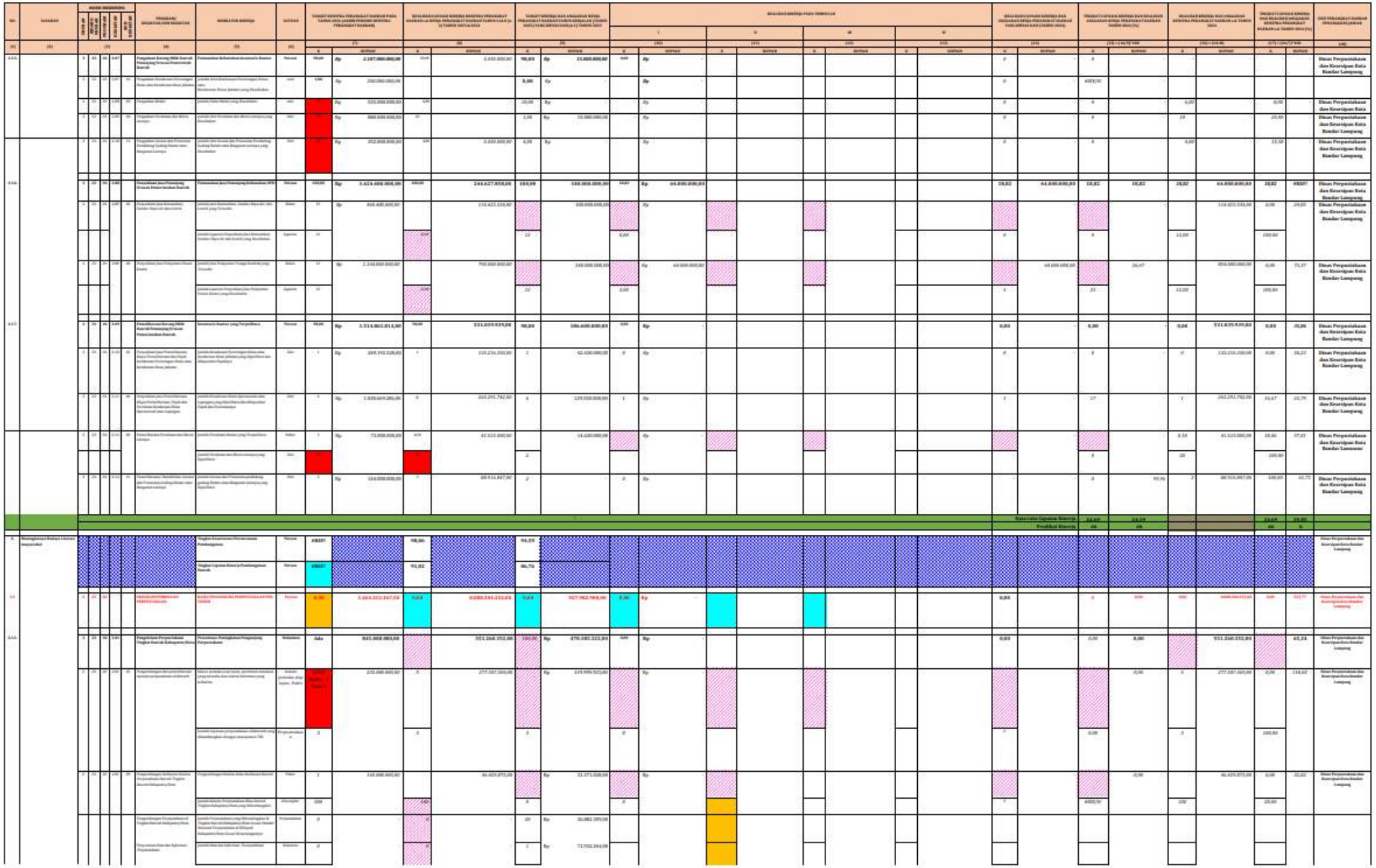
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANDAR LAMPUNG

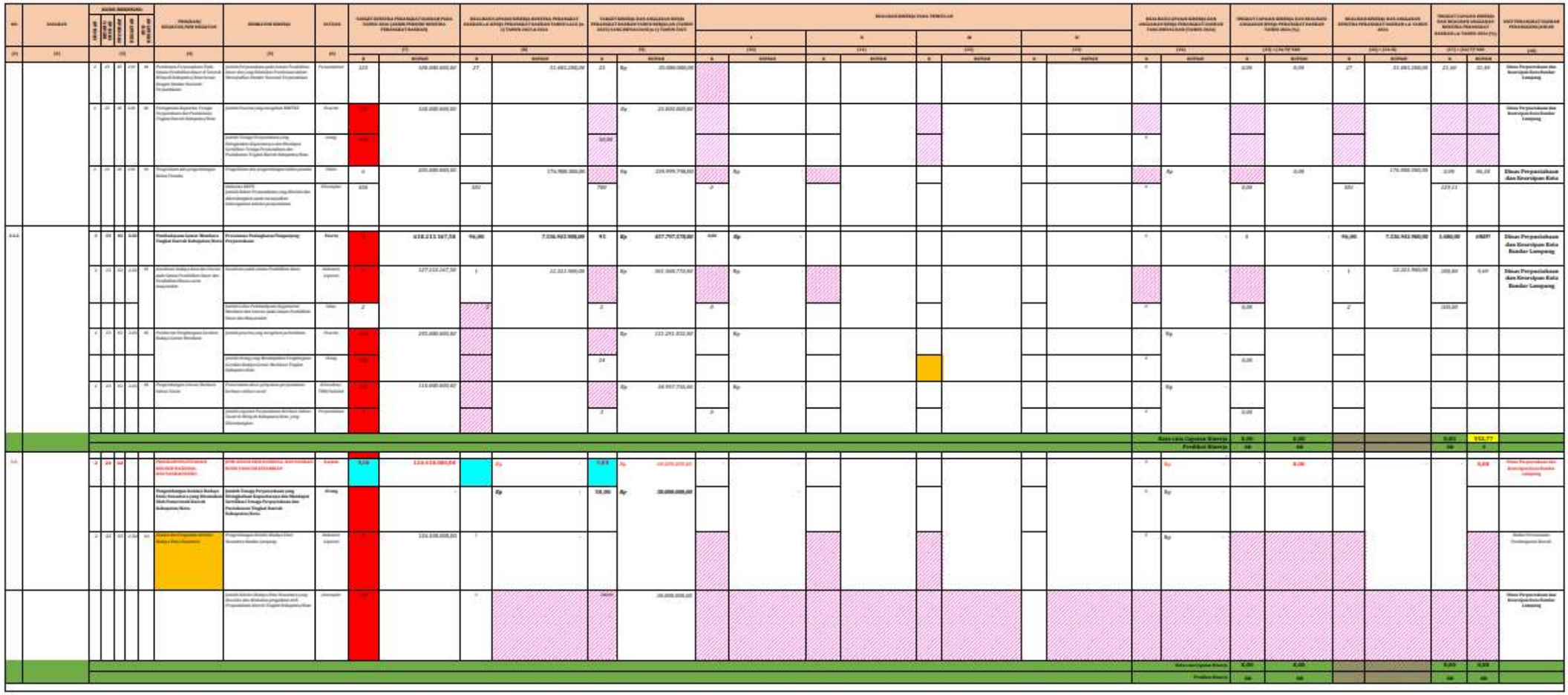
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025

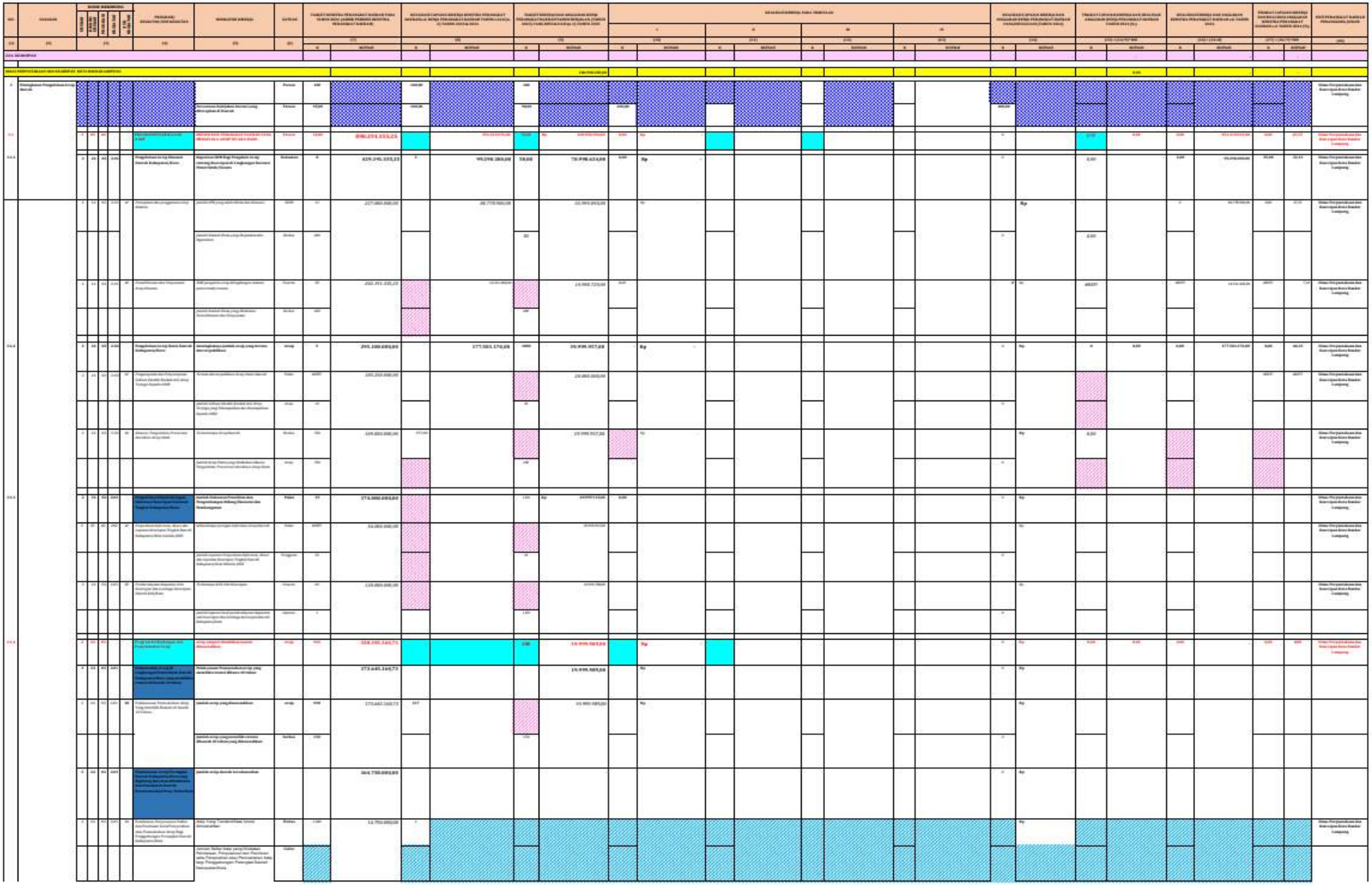
Indikator dan target kinerja Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung dengan Target Kinerja : 84,03 pada Tahun 2026

No	Uraian	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (awal) sesuai Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Perangkat Daerah s.d. Bulan/Triwulan/Semester ini Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun ini) sesuai Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah s.d. Triwulan ini Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja Perangkat Daerah s.d. Triwulan ini Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/7*100)		(16) = (14/9)		(17) = (14/7*100)	(18)
						Target	Rp/Biaya	Target	Rp/Biaya	Target	Rp/Biaya	Target	Rp/Biaya	Target	Rp/Biaya	Target	Rp/Biaya	Target	Rp/Biaya	Target	Rp/Biaya	Target	Rp/Biaya	Target	Rp/Biaya	Target	
							13.934.484.768,75		13.785.864.614,00		4.144.614.768,00		1.483.600.170,00							1.483.600.170,00		36,00		13.785.864.614,00		99,89	75,84	
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran																										Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
1.1.		1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	LAYANAN PERKANTORAN DAERAH YANG TERSEDIA	Persen	90,00		13.138.193.075,22	90,00	17.224.188.229,00	90,00	5.805.682.561,00	24,19	Rp 1.483.600.170,00					24,19	1.483.600.170,00	26,89	26,89	24,19	10.429.980.807,00	26,89	59,81	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
1.1.1.		1	03	01	0,01		Perumusan, Pengorganisasian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perumusan Kerangka Kerja Perumusan Indikator Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Nilai	100,00	Rp	230.083.000,00	100,00	122.916.497,00	100,00	Rp 55.000.000,00	0,00	Rp					0,00		0,00	0,00	0,00	122.916.497,00	0,00	53,44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
		1	03	01	0,01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang	Dokumen	7	Rp	100.000.000,00	7	106.470.897,00	7	Rp 55.000.000,00		Rp -					2	106.470.897,00	28,60	59,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKIP) dan Laporan Hasil Assessment, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKIP)	Laporan	1			1		1						0		0		0		100,00		
1.1.2.		1	03	01	2,01	02	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah Dokumen LKIP dan Laporan Hasil Assessment Penyusunan Indikator Kinerja (IKU)	Dok	1	Rp	50.000.000,00	0,00	16.446.400,00	1	Rp 55.000.000,00		Rp -					0	Rp -	0		1,00	16.446.400,00	100,00	32,89	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
1.1.3.		1	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pembayaran/administrasi keuangan dan kelengkapannya	Persen	100,00	Rp	24.327.174.916,41	100,00	6.339.623.810,00	100,00	Rp 1.024.727.864,00	26,06	Rp 1.339.600.170,00					26,06	1.339.600.170,00	26,06	26,06	26,06	1.339.600.170,00	26,06	69,03	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
		1	03	01	2,02	01	Penyediaan jasa dan Penggunaan alat	Jumlah Orang dan Tenaganya yang akan Pengoperasikan dan Memelihara yang Perlu Dilatih	Dok	11	Rp	23.932.174.916,41		12.812.812.233,82		Rp 6.829.216.798,00		Rp 1.339.600.170,00						1.339.600.170,00		27,18		23.150.051.828,00	0,00	62,15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
								Jumlah Orang yang Memerlukan Jasa dan Tenaganya ASN	Orang/Kelo	10			10		10						10		100		10				
		1	03	01	2,02	03	Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Perkantoran	Administrasi Keuangan Perkantoran	Bulan	12	Rp	615.200.000,00		837.963.000,00		Rp 93.321.218,00		Rp								0,00		837.963.000,00	0,00	71,42	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
								Jumlah Barang-barang Pemeliharaan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung ASN	Kelompok	12			12		8,00						0		0		12		100,00		
1.1.4.		1	03	01	2,03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kepastian Status Kepegawaian	Persen	90,00	Rp	150.000.000,00		-	90,00	Rp -	0,00	Rp -					0		0					69,03	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
		1	03	01	2,03	05	Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan dan Mesin dan Alat Angkut	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pemeliharaan dan Perbaikan	Orang	0	Rp	150.000.000,00		-	0	Rp -		Rp -					0		0						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
1.1.5.		1	03	01	2,05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kelengkapan dasar operasional OPD	Persen	90,00	Rp	994.318.184,83	90,00	727.830.942,00	90,00	Rp 180.344.697,83	0,00	Rp -					0		0	0,00	0,00	727.830.942,00	0,00	73,21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
		1	03	01	2,05	01	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp	35.000.000,00	1	28.331.100,00	1	Rp 9.990.537,00		Rp -					0		0		1	28.331.100,00	80,95	94,44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
		1	03	01	2,05	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp	164.000.000,00	1	162.561.500,00	1	Rp 29.999.883,00		Rp -					0		0		1	162.561.500,00	99,12	99,12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
		1	03	01	2,05	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	40,00	Rp	68.710.000,00	1	70.117.212,00	2	Rp 13.999.230,00		Rp -					0		0		1	70.117.212,00	102,05	102,05	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
		1	03	01	2,05	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp	72.600.000,00	1	103.141.000,00	2	Rp 14.990.000,00		Rp -					0		0		1	103.141.000,00	142,01	142,01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
		1	03	01	2,05	05	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Rp	69.588.304,83	1	78.782.600,00	1	Rp 10.999.600,00	0,00	Rp -					1		0		0	78.782.600,00	113,22	113,22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
		1	03	01	2,05	06	Penyediaan Jasa Jasa Lainnya	Jumlah Dokumen Barang Jasa Penunjang Operasional perangkat daerah	Paket	1	Rp	231.000.000,00	1	16.000.000,00		Rp 10.000.000,00		Rp -					0		0		1	16.000.000,00	100,00	13,32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Penunjang Operasional perangkat daerah	Dokumen	1			1								0		0						
		1	03	01	2,05	08	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Laporan Bulanan dan Triwulan Dinas	Dokumen	16	Rp	20.200.000,00		8.948.000,00		Rp 11.000.000,00		Rp -										8.948.000,00	0,00	44,31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
								Jumlah Laporan Berkala Kendaraan Dinas	Laporan	12			12								0		0		12				
		1	03	01	2,05	09	Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah	Persentase Pemberkasan Pencatatan Arsip Aktif	Persen	100,00	Rp	229.600.000,00		229.822.330,00		Rp 38.477.319,00		Rp -								0,00		229.822.330,00	0,00	72,09	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
								Jumlah Laporan Pengelolaan Kearsipan Aktif dan Inaktif	Laporan	12			3		1,00						3		50		3		25,00		







| | | |

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung pada Tahun 2025 meliputi program dan indikator program , kegiatan dan indikator kegiatan, sub kegiatan dan indikator sub kegiatan, serta target yang ingin di capai pada Tahun 2025. Program yang terdapat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung dalam perubahan Anggaran Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pembinaan Perpustakaan
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
4. Program Pengelolaan Arsip
5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Pendanaan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut diatas bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dan DAK NF tahun 2025

Secara rinci rencana program dan kegiatan besaran target kinerja dalam Perubahan Renja Tahun 2025 disajikan dalam tabel 3.1

TABEL 3.1
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			-		-			16.719.334.948	6.940.663.748	10.418.977.640	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-		-			16.719.334.948	6.940.663.748	10.418.977.640	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								16.509.334.948	6.759.665.463	10.268.835.763	
#	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang perpustakaan dan kearsipan	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang perpustakaan dan kearsipan		%		98	98	5.619.838.322	5.801.682.563	5.926.125.236	

	2	2 3	0 1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja		Laporan		6	6	55.000.000	55.000.000	55.000.000	
	2	2 3	0 1	2. 01	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 3	0 1	2. 01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	5	5	5	45.000.000	45.000.000	45.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 3	0 1	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presntase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keiangan OPD yang Akuntabel	Presntase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keiangan OPD yang Akuntabel	%	%	100	100	100	4.867.395.022	5.024.737.866	5.024.737.866	
	2	2 3	0 1	2. 02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	39	39	39	4.727.334.948	4.929.216.748	4.929.216.748	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	140.060.074	95.521.118	95.521.118	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%		80		80,00	0			
	2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		4			0			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	%	%	95	100	73	161.175.478	180.344.697	130.787.370	
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.000.000	9.998.537	9.998.537	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	34.999.745	29.999.803	29.999.803	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	14.999.359	13.999.230	13.999.230	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.000.000	14.990.000	14.990.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.096.000	10.999.808	10.999.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	7	7	7	10.800.000	10.800.000	10.800.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	12	12	12	5.000.000	31.080.000	10.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	5	5	5	54.280.374	58.477.319	30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	-	%	-	100	100	45.000.000	15.000.000	165.000.000	
	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		Unit		0,00	25.000.000		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	1	1	20.000.000	15.000.000	15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		20		20	0		150.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan JAsa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan JAsa Penunjang Kebutuhan OPD	-	%	-	98	98	289.667.822	340.000.000	364.000.000	
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	97.667.822	100.000.000	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	192.000.000	240.000.000	264.000.000	
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	inventaris kantor yang terpelihra	inventaris kantor yang terpelihra	%	%	%	100	100	201.600.000	186.600.000	186.600.000	
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						TAMBAHAN					
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	42.430.000	42.430.000	42.430.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	6	6	6	129.550.000	129.550.000	129.550.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	44	30	30	14.620.000	14.620.000	14.620.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2		0,00	15.000.000		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
#	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Pengunjung Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan	Angka	Angka		0,7	0,7	10.864.496.626	927.982.900	4.321.780.014	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan		%		50	46	239.999.674	470.185.322	432.028.086	
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan											

								Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	perpustakaan	25	25	25	25.000.000	25.000.000	25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0011		Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah Kab/Kota											
									Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya		perpustakaan		20	20		36.882.309	36.882.309	
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
								Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Orang	50	50	50	25.000.000	25.000.000	21.970.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0017		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan											
									Jumlah Data dan informasi Perpustakaan		Dokumen		1	1		71.932.264	71.932.264	

	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan											
								Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksmplar	Eksemplar	100	302	302	125.000.000	159.999.798	144.999.798	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota											
								Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksmplar	Eksemplar	100	100	100	35.000.000	31.371.028	26.243.792	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik											
								Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Layanan	perpustakaan	3	3	3	29.999.674	119.999.923	104.999.923	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan		Peserta dan Perpustakaan		455	455	10.624.496.952	457.797.578	3.889.751.928	
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial											
								Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan	Perpustakaan	3	3	3	34.998.898	34.997.756	34.997.756	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
								Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						10.499.999.784		3.431.954.350	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca											
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	Orang	50	50	50	70.000.000	121.291.052	121.291.052	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat											
								Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus	Lokus	2	2	2	19.498.270	301.508.770	301.508.770	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
#	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	0	Eksemplar	0	75	70	25.000.000	30.000.000	20.930.513	

	2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koleksi Budaya Etnis Nusantara di Kota Bandar Lampung	Koleksi Budaya Etnis Nusantara di Kota Bandar Lampung	0	Naskah	0	9	7	25.000.000	30.000.000	20.930.513	
	2	23	03	2.02	0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara											
								Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Eksmplar	Eksemplar	75	75	54	25.000.000	30.000.000	20.930.513	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								210.000.000	180.998.285	150.141.877	
#	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku		Persen		24	20	190.000.000	160.998.296	130.141.888	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas SDM Bagi Pengelola Arsip tentang Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Kapasitas SDM Bagi Pengelola Arsip tentang Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta		Berkas		50	50	75.000.000	70.998.624	70.998.624	
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis											
								Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	Berkas	50	50	50	60.000.000	55.999.895	55.999.895	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis											
								Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	Berkas	120	120	120	15.000.000	14.998.729	14.998.729	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Tertatanya Arsip Daerahh	Tertatanya Arsip Daerahh		Berkas		700	350	60.000.000	39.999.957	19.999.957	
	2	24	02	2.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI											
								Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI		Arsip		100	0,00	40.000.000	20.000.000	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis											
								Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	Arsip	140	150	150	20.000.000	19.999.957	19.999.957	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pembinaan Secara Teknis Terhadap ASN dan Pegawai Swasta	Pelaksanaan Pembinaan Secara Teknis Terhadap ASN dan Pegawai Swasta	Paket	Paket	1	1	1	55.000.000	49.999.715	39.143.307	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN											
								Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	Pengguna	54	54	54	35.000.000	29.999.927	29.999.927	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	2 4	0 2	2. 03	00 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota											
								Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1	1	1	20.000.000	19.999.788	9.143.380	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
#	2	2 4	0 3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Arsip yang Teridentifikasi untuk Dimusnahkan	Arsip yang Teridentifikasi untuk Dimusnahkan		Jumlah		200	200	20.000.000	19.999.989	19.999.989	
	2	2 4	0 3	2. 01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Resensi dibawah 10 Tahun	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Resensi dibawah 10 Tahun		Arsip		200	200	20.000.000	19.999.989	19.999.989	
	2	2 4	0 3	2. 01	00 03	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun											
								Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	Berkas	150	150	150	20.000.000	19.999.989	19.999.989	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 4	0 3	2. 03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip Daerah Terselamatkan	Jumlah Arsip Daerah Terselamatkan						0			

	2	24	03	2.03	0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan											
								Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Arsip		0			0			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Sesuai
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	**BAB I**	**PENDAHULUAN**	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	**BAB II**	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**	√			
		Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah smpai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan/Tahun 2025	√			
		Formulir E.81				
3	**BAB III**	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	**BAB IV**	**PENUTUP**	√			

Bandar Lampung, Juli 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Bandar Lampung

RICARDO, S.H., M.M.
Pembina
NIP. 19750815 200902 1 002

Diverifikasi Tanggal		Tanda Tangan
1.	**Dr. Rein Susinda Hesty, S.Sos., M.Si.** Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
2.	**SUHERMAN** Fungsional Perencana Ahli Muda	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.,M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Sesuai
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
5.	Dokumen perubahan renja perangkat daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Bandar Lampung

PIKARDO, S.H., M.M.
Pembina
NIP. 19750815 200902 1 002

Diverifikasi Tanggal		Tanda Tangan
1.	**Dr. Rein Susinda Hesty, S.Sos., M.Si.**	
	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
2.	**SUHERMAN**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.,M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan sudah sesuai berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah telah sesuai dengan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.

Bandar Lampung, Juli 2025
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.,M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19700218 199303 2 002

Diverifikasi Tanggal		Tanda Tangan
1.	**Dr. Rein Susinda Hesty, S.Sos., M.Si.** Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
2.	**SUHERMAN** Fungsional Perencana Ahli Muda	

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN I.1

1.1. Latar Belakang I.1

1.2. Landasan Hukum I.3

1.3. Maksud dan Tujuan I.4

1.4. Sistematika Penulisan I.5

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN II.1

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan/Tahun 2024 II.1

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH III.1

BAB IV. PENUTUP IV.1

Lampiran

LAMPIRAN 23
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Walikota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : ***"BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT"***

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa,

dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-4 (empat) dalam RPJMD Tahun 2021–2026 yaitu *'Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah unutk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.'* Guna mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

2. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 ;
9. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan

pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025.
3. Sebagai acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyusun pagu indikatif Tahun Anggaran 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan/Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2025.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang tabel rincian perubahan program, kegiatan, target dan pagu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan/Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran dari perencanaan tahunan, Rencana Strategis, RENJA tahun sebelumnya dan Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung. Pada dokumen Perubahan RENJA 2025 ini, selain mereviu tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan, berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung.

Laporan tersebut untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanan misi OPD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk program dan kegiatan, dengan pelaksanaan secara periodik. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung ini menyajikan hasil yang telah dicapai selama triwulan II tahun 2025.

Anggaran belanja total Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. **5.470.903.979,00**,- dengan 5 program, 14 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Program dan kegiatan itu terdiri dari 1 program rutin dengan 7 kegiatan dan 21 sub kegiatan dan program non rutin terdiri dari 4 program dengan 7 kegiatan dan 8 sub kegiatan. Realisasi belanja Program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. **1.916.916.514,00** atau pencapaian kinerja keuangan sebesar **35,04%**. Adapun program dan kegiatan serta capaian persentasenya sampai dengan triwulan II

tahun 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung disajikan pada tabel E-81 (terlampir).

Berikut ini program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 yang teralisasi beserta capaian kinerjanya :

1. **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** dengan anggaran sebesar Rp. **246.111.374,00** dan terealisasi sebesar Rp. **0,00** atau masih **0%.** Capaian kinerja dari Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ini adalah produksi perikanan tangkap sebesar **1.475,820 ton**, cakupan bina kelompok nelayan masih 0%, Produksi perikanan kelompok nelayan sebesar 63,69% dan Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman masih 0%, dan program ini didukung dengan 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. **Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 58.079.996,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0%.

      a.1. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha** dengan anggaran sebesar Rp. 58.079.996,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau masih 0%.

   b. **Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)** dengan anggaran sebesar Rp. 188.031.378,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau masih 0%.

      b.1. **Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)** dengan anggaran sebesar Rp. 188.031.378,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00, atau masih 0%.

2. **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** dengan anggaran sebesar Rp. **82.968980,00** dan terealisasi sebesar Rp. **55.083.017,00** atau masih **66,39%**. Capaian kinerja dari program ini adalah produksi perikanan budidaya sebesar **68,940 Ton** dari target yang ditentukan sebesar **140,69 Ton**. Program ini didukung dengan 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu :

   a. **Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** dengan anggaran sebesar Rp. 33.030.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 28.500.000,00 atau masih 86,29%.

      a.1. **Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil** dengan anggaran sebesar Rp. 33.030.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 28.500.000,00 atau mencapai 86,29%. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebesar 86,29%.

   b. **Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** dengan anggaran sebesar Rp. 49.938.980,00 dan terealisasi sebesar Rp. 26.583.017,00 atau masih 53,23%.

      b.1. **Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 49.938.980,00 dan terealisasi sebesar Rp. 26.583.017,00 atau masih 53,23%. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebesar 53,23%.

3. **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** dengan anggaran sebesar Rp. **51.534.342,00** dan terealisasi sebesar Rp. **0,00** atau masih **0%**. Capaian kinerja dari program ini adalah Compliance (Persentase Kepatuhan) pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan sebesar 0%, dan target yang ditentukan sebesar 9%. Program ini didukung dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

a. **Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 51.534.342,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau masih 0%.

a.1. **Sub Kegiatan Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota** dengan anggaran sebesar Rp. 51.534.342,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau masih 0%, dan realisasi kinerjanya dari kegiatan ini sebesar 0%.

4. **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** dengan anggaran sebesar Rp. **115.160.125,00** dan terealisasi sebesar Rp. **0,00** atau masih **0%**. Capaian kinerja dari program ini adalah berupa angka konsumsi makan ikan di Kota Bandar Lampung sebesar 45,21 Kg/kap/tahun dimana target tahun 2025 adalah 43,14 Kg/kap/tahun yang didukung dengan 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu:

a. **Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil** dengan anggaran sebesar **Rp. 31.030.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 0,00** atau masih **0%**.

a.1. Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko dengan anggaran sebesar **Rp. 31.030.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 0,00** atau masih **0%**.

b. **Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**

dengan anggaran sebesar **Rp. 84.130.125,00** dan terealisasi sebesar Rp. **Rp. 0,00** atau masih **0%**.

b.1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp. 32.121.551,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 0,00** atau masih **0%**. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebesar **0%**.

b.2. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp. 52.008.574,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 0,00** atau masih **0%**. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebesar **0%**.

Berikut ini adalah ringkasan realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Realisasi Anggaran Belanja

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN		SISA ANGGARAN	%
		ANGGARAN	REALISASI		
		Rp.	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.975.129.158,00**	**1.861.833.497,00**	**3.113.295.661,00**	**37,42**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17.050.396,00**	**0,00**	**17.050.396,00**	**0,00**
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.050.396,00	0,00	17.050.396,00	0,00
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.730.732.729,00**	**1.404.063.537,00**	**2.326.669.192,00**	**37,64**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.576.903.979,00	1.404.063.537,00	2.172.840.442,00	**39,25**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN		SISA ANGGARAN	%
		ANGGARAN	REALISASI		
		Rp.	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	153.828.750,00	0,00	153.828.750,00	**0,00**
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**15.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	**0,00**
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**175.218.968,00**	**0,00**	**175.218.968,00**	**0,00**
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.276.990,00	0,00	9.276.990,00	0,00
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.053.561,00	0,00	40.053.561,00	0,00
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.643.222,00	0,00	9.643.222,00	0,00
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.960.000,00	0,00	24.960.000,00	0,00
1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.845.195,00	0,00	17.845.195,00	0,00
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00
1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.040.000,00	0,00	55.040.000,00	0,00
1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**59.147.065,00**	**0,00**	**59.147.065,00**	**0,00**
1.5.1	Pengadaan Mebel	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	**0,00**
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.147.065,00	0,00	34.147.065,00	**0,00**
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**790.200.000,00**	**382.000.000,00**	**408.200.000,00**	**48,34**
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	46.200.000,00	0,00	46.200.000,00	0,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	744.000.000,00	382.000.000,00	362.000.000,00	51,34
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**187.780.000,00**	**75.769.960,00**	**112.010.040,00**	**40,35**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN		SISA ANGGARAN	%
		ANGGARAN	REALISASI		
		Rp.	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.670.000,00	0,00	38.670.000,00	0,00
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.170.000,00	25.380.960,00	78.789.040,00	24,36
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	0,00
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.000.000,00	50.389.000,00	-12.389.000,00	132,60
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**246.111.374,00**	**0,00**	**246.111.374,00**	**0,00**
2.1	**Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**58.079.996,00**	**0,00**	**58.079.996,00**	**0,00**
2.1.1	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	58.079.996,00	0,00	58.079.996,00	0,00
2.2	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**188.031.378,00**	**0,00**	**188.031.378,00**	**0,00**
2.2.1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	188.031.378,00	0,00	188.031.378,00	0,00
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**82.968.980,00**	**55.083.017,00**	**27.885.963,00**	**66,39**
3.1	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**33.030.000,00**	**28.500.000,00**	**4.530.000,00**	**86,29**
3.1.1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	33.030.000,00	28.500.000,00	4.530.000,00	86,29
3.2	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**49.938.980,00**	**26.583.017,00**	**23.355.963,00**	**53,23**
3.2.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.938.980,00	26.583.017,00	23.355.963,00	53,23
4	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**51.534.342,00**	**0,00**	**51.534.342,00**	**0,00**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN		SISA ANGGARAN	%
		ANGGARAN	REALISASI		
		Rp.	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4.1	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**51.534.342,00**	**0,00**	**51.534.342,00**	**0,00**
4.1.1	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	51.534.342,00	0,00	0,00	0,00
5	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**115.160.125,00**	**0,00**	**3.689.034.613,00**	**0,00**
5.1	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**31.030.000,00**	**0,00**	**31.030.000,00**	**0,00**
5.11	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	31.030.000,00	0,00	31.030.000,00	0,00
5.2	**Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**84.130.125,00**	**0,00**	**3.658.004.613,00**	**35,04**
5.2.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.121.551,00	0,00	3.605.996.039,00	35,04
5.2.2	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	52.008.574,00	0,00	**52.008.574,00**	**0,00**
	JUMLAH	**5.470.903.979,00**	**1.916.916.514,00**	**3.553.987.465,00**	**35,04**

Pada keseluruhan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 baik yang terlaksana maupun belum terlaksana secara maksimal, memiliki implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD, di antaranya berdampak pada pencapaian target pada program kerja RENSTRA OPD dan Kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai target capaian Renstra.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, untuk menghindari ketidak terlaksananya kegiatan di tahun berikutnya, DKP Kota Bandar Lampung akan mengambil strategi dan kebijakan seperti melakukan perencanaan dan penganggaran yang lebih terukur dan *reliable*, serta mengupayakan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa setiap awal tahun anggaran.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
					SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**4,987,841,179.00**	**5,470,903,979.00**	**5,825,837,589.00**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**	**98%**	**98%**	**98%**	**4,657,500,342.00**	**4,975,129,158.00**	**5,092,039,158.00**	
3	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**100%**	**100%**	**100%**	**25,999,766.00**	**17,050,396.00**	**22,594,886.00**	
3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25,999,766.00	17,050,396.00	22,594,886.00	
3	**25**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100%**	**100%**	**100%**	**3,463,841,179.00**	**3,730,732,729.00**	**3,716,140,279.00**	
3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	33 Orang/Bulan	33 Orang/Bulan	3,339,841,179.00	3,576,903,979.00	3,576,903,979.00	
3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	124,000,000.00	153,828,750.00	139,236,300.00	
3	**25**	**01**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**	**100%**	**100%**	**20,000,000.00**	**15,000,000.00**	**7,500,000.00**	
3	25	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	3 Orang	20,000,000.00	15,000,000.00	7,500,000.00	
3	**25**	**01**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98%**	**98%**	**98%**	**190,309,958.00**	**175,218,968.00**	**134,631,163.00**	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9,896,824.00	9,276,990.00	12,726,200.00	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	44,998,504.00	40,053,561.00	26,392,481.00	
3	25	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	14,997,791.00	9,643,222.00	7,599,402.00	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	35,000,000.00	24,960,000.00	32,500,000.00	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	24,999,839.00	17,845,195.00	12,623,080.00	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5,400,000.00	5,400,000.00	4,000,000.00	
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000.00	13,000,000.00	10,750,000.00	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50,017,000.00	55,040,000.00	28,040,000.00	
3	**25**	**01**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**98%**	**98%**	**98%**	**60,000,000.00**	**59,147,065.00**	**109,152,870.00**	
3	25	01	07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	15 Unit	25,000,000.00	25,000,000.00	52,000,000.00	
3	25	01	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	35,000,000.00	34,147,065.00	57,152,870.00	
3	25	01	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	**25**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**98%**	**98%**	**98%**	**694,200,000**	**790,200,000**	**801,980,000.00**	
3	25	01	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	46,200,000.00	46,200,000.00	35,980,000.00	
3	25	01	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	648,000,000.00	744,000,000.00	766,000,000.00	
3	**25**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98%**	**98%**	**98%**	**203,149,439.00**	**187,780,000.00**	**300,039,960.00**	
3	25	01	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	42,430,000.00	38,670,000.00	38,670,000.00	
3	25	01	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	122,320,000.00	104,170,000.00	126,550,960.00	
3	25	01	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.	16 unit	16 unit	16 unit	9,740,000.00	6,940,000.00	10,930,000.00	
3	25	01	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	28,659,439.00	38,000,000.00	123,889,000.00	
3	25	01	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
					SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman**	**Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman**	**0.032%**	**0.032%**	**0.032%**	**103,998,703.00**	**246,111,374.00**	**222,213,188.00**	
							Cakupan bina kelompok nelayan	**Cakupan bina kelompok nelayan**	**38%**	**38%**	**38%**				
							Produksi perikanan kelompok nelayan	**Produksi perikanan kelompok nelayan**	**58.47%**	**58.47%**	**58.47%**				
							Produksi perikanan tangkap	**Produksi perikanan tangkap**	**3244,23 Ton**	**3244,23 Ton**	**3244,23 Ton**				
3	**25**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya Yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya Yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**24%**	**24%**	**24%**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
3	25	03	1.02	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	25	03	1.02	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya peranan nelayan kecil di bidang perikanan tangkap**	**Meningkatnya peranan nelayan kecil di bidang perikanan tangkap**	**2%**	**2%**	**2%**	**43,999,859.00**	**58,079,996.00**	**35,149,540.00**	
3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	43,999,859.00	58,079,996.00	35,149,540.00	
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik**	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik**	**100%**	**100%**	**100%**	**59,998,844.00**	**188,031,378.00**	**187,063,648.00**	
3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	59,998,844.00	188,031,378.00	187,063,648.00	
3	**25**	**03**	**2.06**		**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen pendaftaran kapal berukuran sampai dengan 10 GT**	**Dokumen pendaftaran kapal berukuran sampai dengan 10 GT**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
3	25	03	2.06	0002	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi buku Kapal perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi buku Kapal perikanan (BKP) yang Diterbitkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
					SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi Perikanan Budidaya**	**Produksi Perikanan Budidaya**	**140,69 Ton**	**140,69 Ton**	**140,69 Ton**	**82,340,404.00**	**82,968,980.00**	**386,375,763.00**	
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan**	**Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan**	**2%**	**2%**	**2%**	**35,000,000.00**	**33,030,000.00**	**45,020,000.00**	
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kolompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Jumlah Kolompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		7 Kelompok	7 Kelompok	0.00	33,030,000.00	45,020,000.00	
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya**	**Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya**	**2%**	**2%**	**2%**	**47,340,404.00**	**49,938,980.00**	**341,355,763.00**	
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	4 Unit	4 Unit	4 Unit	47,340,404.00	49,938,980.00	341,355,763.00	
3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	25	04	2.04	0007	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
					SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Compliance (Persentase Kepatuhan) pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan**	**Compliance (Persentase Kepatuhan) pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan**	**5%**	**5%**	**5%**	**44,999,921.00**	**51,534,342.00**	**38,774,342.00**	
3	**25**	**05**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan kawasan yang dipantau dari kegiatan ilegal fishing dan RZWP3K**	**Persentase cakupan kawasan yang dipantau dari kegiatan ilegal fishing dan RZWP3K**	**4%**	**4%**	**4%**	**44,999,921.00**	**51,534,342.00**	**38,774,342.00**	
3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0.00	0.00	44,999,921.00	0.00	0.00	
3	25	05	2.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	25	05	2.01	0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	0.00	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	51,534,342.00	38,774,342.00	
3	**25**	**06**		**06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Angka Konsumsi Ikan (AKI)**	**Angka Konsumsi Ikan (AKI)**	**40,22 Kg/Kap/Thn**	**40,22 Kg/Kap/Thn**	**40,22 Kg/Kap/Thn**	**99,001,809.00**	**115,160,125.00**	**86,435,138.00**	
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Terbitnya ijin usaha perikanan**	**Terbitnya ijin usaha perikanan**	**15 Dok**	**15 Dok**	**15 Dok**	**31,970,000.00**	**0.00**	**0.00**	
3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	0.00	0.00	31,970,000.00	0.00	0.00	
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Terbitnya ijin edar dan halal produk**	**Terbitnya ijin edar dan halal produk**	**5 Dok**	**5 Dok**	**5 Dok**	**0.00**	**31,030,000.00**	**18,030,000.00**	
3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	0.00	7 Unit Usaha	7 Unit Usaha	0.00	31,030,000.00	18,030,000.00	
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Nilai ekspor hasil perikanan**	**Nilai ekspor hasil perikanan**	**110.000 USD**	**110.000 USD**	**110.000 USD**	**67,031,809.00**	**84,130,125.00**	**68,405,138.00**	
3	25	06		0001	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	0.00	3 ton	3 ton	0.00	32,121,551.00	27,438,051.00	
3	25	06		0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota yang terfasilitasi	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	67,031,809.00	52,008,574.00	40,967,087.00	
JUMLAH TOTAL												**4,987,841,179.00**	**5,470,903,979.00**	**5,825,837,589.00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tabel E. 81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BANDAR LAMPUNG
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW II (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)	
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV									
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10+11+12+13		15 = 14/9 x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																															
3.25 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											**37,283,308,725.31**	**50.72**	**18,910,313,140.00**	**14.67**	**5,470,903,979.00**	**14.99**	**819,899,180.00**	**20.05**	**1,097,017,334.00**	**0.00**	**-**		**-**	**20.05**	**1,916,916,514.00**	**136.6500365**	**35.04**	**70.77**	**20,827,229,654.00**		**55.86**
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan							**Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)**	**Nilai**	**85.00**		**74.63**	**18,910,313,140.00**	**85 (A)**																			
		3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**	**%**	**98.00**	**31,328,574,153.61**	**93.11**	**16,978,513,390.00**	**98.00**	**4,975,129,158.00**	**16.48**	**819,899,180.00**	**20.94**	**1,041,934,317.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37.42**	**1,861,833,497.00**	**38.19**	**37.42**	**98.00**	**18,840,346,887.00**	**100.00**	**60.14**
		3	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**%**	**100.00**	**159,907,500.00**	**100.00**	**99,978,701.00**	**100.00**	**17,050,396.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**99,978,701.00**	**100.00**	**62.52**
		3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	24.00	159,907,500.00	16.00	99,978,701.00		17,050,396.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00	16.00	99,978,701.00	66.67	62.52
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24.00		16.00		12.00									0.00		0.00	16.00		66.67	
		3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**%**	**100.00**	**23,243,909,399.41**	**100.00**	**12,926,056,277.00**	**100.00**	**3,730,732,729.00**	**16.88**	**629,899,180.00**	**20.75**	**774,164,357.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37.64**	**1,404,063,537.00**	**37.64**	**37.64**	**100.00**	**14,330,119,814.00**	**100.00**	**61.65**
		3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kali	84.00	22,402,529,399.41	56.00	12,475,916,277.00		3,576,903,979.00		629,899,180.00		774,164,357.00						1,404,063,537.00		39.25	56.00	13,879,979,814.00	66.67	61.96
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	33.00		24		33.00								0.00		0.00	28.00		84.85	
		3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Layanan Administrasi Keuangan	Bulan	72.00	841,380,000.00	48.00	450,140,000.00		153,828,750.00									0.00		0.00	48.00	450,140,000.00	66.67	53.50
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	60.00		48.00		12.00								0.00		0.00	48.00		80.00	
		3	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**100.00**	**149,000,000.00**	**0.25**	**375,000.00**	**100.00**	**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.25	375,000.00	**0.25**	**0.25**
		3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Paket	2.00	62,000,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00						0.00		-	0.00	0.00	0.00	0.00
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2.00												0.00		-				
		3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	%	80.00	87,000,000.00	0.00	375,000.00		15,000,000.00									0.00		0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.43
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10.00				4.00								0.00		0.00	0.00		0.00	
		3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**98.00**	**1,288,164,500.00**	**98.00**	**563,903,180.00**	**98.00**	**175,218,968.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**98.00**	**563,903,180.00**	**100.00**	**43.78**
		3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Paket	6.00	85,000,000.00	4.00	37,522,400.00		9,276,990.00									0.00		0.00	4.00	37,522,400.00	66.67	44.14
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		4.00		1.00								0.00		0.00	4.00		80.00	

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW II (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)	
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN											I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10+11+12+13		15 = 14/9 x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	6.00	254,984,500.00	4.00	144,860,600.00		40,053,561.00													4.00	144,860,600.00	66.67	56.81
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		4.00		1.00									0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		80.00	
		3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Adanya peralatan rumah tangga	Paket	6.00	137,000,000.00	4.00	55,527,840.00		9,643,222.00													4.00	55,527,840.00	66.67	40.53
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5.00		4.00		1.00									0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		80.00	
		3	25	01	2.06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Adanya makanan dan minuman rapat	%	100.00	185,000,000.00	100.00	103,316,500.00		24,960,000.00													100.00	103,316,500.00	100.00	55.85
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		4.00		1.00									0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		80.00	
		3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Adanya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	6.00	177,000,000.00	4.00	78,397,500.00		17,845,195.00													4.00	78,397,500.00	66.67	44.29
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5.00		4.00		1.00									0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		80.00	
		3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Adanya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	72.00	31,680,000.00	48.00	17,400,000.00		5,400,000.00													48.00	17,400,000.00	66.67	54.92
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	60.00		48.00		12.00									0.00	0.00	0.00	0.00	48.00		80.00	
		3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Layanan makanan dan minuman tamu	%	100.00	57,500,000.00	100.00	12,267,500.00		13,000,000.00		0.00											100.00	12,267,500.00	100.00	21.33
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	Laporan	5.00		4.00		1.00									0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		80.00	
		3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase partisipasi Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	%	100.00	360,000,000.00	100.00	114,610,840.00		55,040,000.00													100.00	114,610,840.00	100.00	31.84
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5.00		4.00		1.00									0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		80.00	
		3	**25**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98.00**	**555,000,000.00**	**98.00**	**151,900,000.00**	**98.00**	**59,147,065.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**98.00**	**151,900,000.00**	**100.00**	**27.37**
		3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	5.00	165,000,000.00	3.00	65,450,000.00		25,000,000.00		0.00		0.00									3.00	65,450,000.00	60.00	39.67
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5.00		3.00		1.00									0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		60.00	
		3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin penunjang	Paket	6.00	215,000,000.00	3.00	64,350,000.00		34,147,065.00		0.00		0.00									3.00	64,350,000.00	50.00	29.93
								Jumlah peralatan dan mesin penunjang	Paket	6.00		3.00		1.00									0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		50.00	
		3	25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	5.00	175,000,000.00	2.00	22,100,000.00		0.00		0.00		0.00									2.00	22,100,000.00	40.00	12.63
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4.00		2.00											0.00	0.00	-	-	2.00		50.00	
		3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**4,284,790,754.20**	**98.00**	**2,687,057,092.00**	**98.00**	**790,200,000.00**	**24.04**	**190,000,000.00**	**24.30**	**192,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48.34**	**382,000,000.00**	**48.34**	**48.34**	**98.00**	**3,069,057,092.00**	**100.00**	**71.63**
		3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan Internet	Bulan	72.00	356,290,754.20	48.00	121,057,092.00		46,200,000.00													48.00	121,057,092.00	66.67	33.98
								Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60.00		4.00		12.00									0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		6.67	
		3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Jasa pelayanan umum kantor	Bulan	72.00	3,928,500,000.00	46.00	2,566,000,000.00		744,000,000.00		190,000,000.00		192,000,000.00									46.00	2,948,000,000.00	63.89	75.04
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5.00		4.00		1.00									0.00	382,000,000.00	0.00	51.34	4.00		80.00	

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW II (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)	
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV									
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10+11+12+13		15 = 14/9 x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		3	25	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**1,647,802,000.00**	**98.00**	**549,243,140.00**	**98.00**	**187,780,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40.35**	**75,769,960.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40.35**	**75,769,960.00**	**40.35**	**40.35**	**98.00**	**625,013,100.00**	**100.00**	**37.93**
		3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas Jabatan	Bulan	72.00	210,180,000.00	48.00	121,472,860.00		38,670,000.00										0.00		0.00	48.00	121,472,860.00	66.67	57.79
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1.00		1.00		1.00								0.00		0.00		1.00		100.00	
		3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Bulan	72.00	821,872,000.00	48.00	407,765,280.00		104,170,000.00										25,380,960.00		24.36	48.00	433,146,240.00	66.67	52.70
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16.00		16.00		16.00								0.00		0.00		16.00		100.00	
		3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Layanan pemeliharaan peralatan dan mesin gedung kantor	Paket	6.00	89,500,000.00	8.00	16,180,000.00		6,940,000.00										0.00		0.00	8.00	16,180,000.00	133.33	18.08
								Layanan pemeliharaan peralatan dan mesin gedung kantor	Unit	25.00		8.00		25.00								0.00		0.00		8.00		32.00	
		3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Layanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	5.00	354,000,000.00	0.00			38,000,000.00				50,389,000.00					50,389,000.00		132.60	0.00	50,389,000.00	0.00	14.23
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5.00		1.00		1.00								0.00		0.00		1.00		20.00	
		3	25	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Layanan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Perlengkapannya	Paket	6.00	172,250,000.00	1.00	3,825,000.00		0.00										0.00		-	1.00	3,825,000.00	16.67	2.22
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4.00		1.00										0.00		-		1.00		25.00	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																								**38.19**	**37.42**			**100.00**	**60.14**
		Predikat Kinerja																								**SR**	**SR**			**ST**	**R**
	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing							**Produksi perikanan tangkap**	**Ton**	**3,309.11**		**10,099.19**	**103,998,703.00**	**3309.11**	**246,111,374.00**	**795.000**		**680.820**						**1,475.820**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,575.01**	**103,998,703.00**	**349.79**	**-**
								Produksi perikanan budidaya	**Ton**	**143.50**		**612.89**	**82,340,404.00**	**143.50**	**82,968,980.00**	**37.01**		**31.93**						**68.940**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**681.83**	**82,340,404.00**	**475.14**	**-**
								Persentase retribusi tempat pelelangan ikan dan jasa pelayanan tempat pelelangan ikan terhadap PAD	**%**	**0.06**		**0.13**	**311,657,131.00**	**0.064**	**355,500,000.00**	**0.00092**	**36,781,080.00**	**0.0030**	**120,141,911.00**					**156,922,991.00**		**44.14**	**44.14**	**0.13**	**468,580,122.00**	**207.81**	**-**
		3	25	03			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman**	**%**	**0.033**		**0.03**		**0.033**								**0.000**		**0.00**		0.00		**0.00**		**12.53**
								Cakupan bina kelompok nelayan	**%**	**40.00**	**2,918,534,253.13**	**18.92**	**365,562,550.00**	**40.00**	**246,111,374.00**		**0.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**365,562,550.00**	**0.00**	
								Produksi perikanan kelompok nelayan	**%**	**58.48**		**79.56**		**58.48**		**95.55**		**95.52**		**0.00**		**0.00**		**63.69**		**108.91**		63.69		**108.91**	
								Produksi perikanan tangkap	**Ton**	**3,309.11**		**223.39**		**3,309.11**		**795.00**		**680.820**						**1,475.820**		**44.60**		1,475.82		**44.60**	
		3	25	03	2.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**27.00**	**2,144,583,407.81**	**0.00**	**0.00**	**26**	**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	0.00	0.00	0.00	0.00

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW II (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)	
																	I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10+11+12+13		15 = 14/9 x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya data statistik perikanan tangkap	Dok	1.00	20,000,000.00	0.00	0.00											0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
								Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dok	1.00												0.00							
		3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap	Paket	6.00	2,124,583,407.81	0.00	0.00												0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
								Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	5.00				1								0.00		0.00					
		3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya peranan nelayan kecil di bidang perikanan tangkap**	**%**	**10.00**	**377,000,000.00**		**123,086,900.00**	**2**	**58,079,996.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**123,086,900.00**	**0.00**	**32.65**
		3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah nelayan yang dibantu untuk pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha	Nelayan	1,100.00	377,000,000.00	0.00	123,086,900.00		58,079,996.00		0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,086,900.00	0.00	32.65
								Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	64.00		46.00		15								0.00		0.00		46.00		71.88	
		3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik**	**%**	**100.00**	**326,950,845.32**	**100.00**	**242,475,650.00**	**100.00**	**188,031,378.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**242,475,650.00**	**100.00**	**74.16**
		3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan proses pelelangan berjalan dengan baik	Bulan	12.00	326,950,845.32	10.00	242,475,650.00		188,031,378.00								0.00	0.00	0.00	10.00	242,475,650.00	83.33	74.16
								Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	1.00		1.00		1.00								0.00		0.00		0.00		0.00	
		3	**25**	**03**	**2.06**		**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen pendaftaran kapal berukuran sampai dengan 10 GT**	**Dok**	**4.00**	**70,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		3	25	03	2.06	02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Layanan proses penerbitan pendaftaran kapal perikanan ukuran sampai dengan 10 GT	%	100.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
								Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	130.00				30								0.00		0.00					
Rata-Rata Capaian Kinerja																										**38.38**	**0.00**			**38.38**	**12.53**
Predikat Kinerja																										**SR**	**SR**			**SR**	**SR**

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW II (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)	
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN											I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10+11+12+13		15 = 14/9 x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		3	25	04			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan budidaya**	**Ton**	**143.50**	**900,498,665.63**	**319.49**	**526,522,461.00**	**140.69**	**82,968,980.00**	**37.010**	**0.00**	**31.93**	**55,083,017.00**		**0.00**		**0.00**	**68.940**	**55,083,017.00**	**49.00**	**66.39**	**68.94**	**581,605,478.00**	**48.04**	**64.59**
		3	25	04	2.02		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan**	**%**	**10.00**	**160,000,000.00**	**0.02**	**147,727,890.00**	**2.00**	**33,030,000.00**	**0.00**	**0.00**	**86.29**	**28,500,000.00**		**0.00**		**0.00**	**86.29**	**28,500,000.00**	**4,314.26**	**86.29**	86.31	**176,227,890.00**	**863.05**	**110.14**
		3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan yang berkembang	Pokdakan	17.00	20,000,000.00		0.00		33,030,000.00				28,500,000.00						28,500,000.00		86.29				-
								Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	17.00														0.00		-					-
		3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan pendampingan kepada Pembudidayaan Ikan	%	100.00	140,000,000.00	**0.00**	147,727,890.00															**0.00**		0.00	
								Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	35.00		20.00		10.00						0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	147,727,890.00	57.14	105.52
		3	25	04	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya**	**%**	**12.00**	**740,498,665.63**	**3.00**	**378,794,571.00**	**2.00**	**49,938,980.00**		**0.00**	**53.23**	**26,583,017.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53.23**	**26,583,017.00**	**2,661.55**	**53.23**	**56.23**	**405,377,588.00**	**468.59**	**54.74**
		3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data statistik perikanan budidaya	Dok	1.00	10,000,000.00	0.00													0.00		-				-
								Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dok	1.00														0.00		-					-
		3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan	Paket	12.00	660,498,665.63	9.00	378,794,571.00		49,938,980.00				26,583,017.00						26,583,017.00		53.23	9.00	405,377,588.00	75.00	61.37
								Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Unit	2.00		2.00		2.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BBI yang beroperasi	Unit	2.00	5,000,000.00	0.00	0.00												0.00		-				-
								Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2.00				2.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	UPR yang tersertifikasi CPIB dan CBIB	Unit	4.00	20,000,000.00	**0.00**	0.00												0.00		-				-
								Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dok	4.00				1.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Lokasi budidaya yang dimonitoring	%	4.00	20,000,000.00	**0.00**	0.00												0.00		-				-
								Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	20.00				1.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW II (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)	
																	I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10+11+12+13		15 = 14/9 x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp
		3	25	04	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah dokumen feasibility study perairan darat yang diterbitkan	Dok	1.00	25,000,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			-				-	
								Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	20.00												0.00		-						
Rata-Rata Capaian Kinerja																										**49.00**	**66.39**			**48.04**	**64.59**
Predikat Kinerja																										**SR**	**S**			**SR**	**R**
		3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Compliance (Persentase Kepatuhan) pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan**	**%**	**9.00**	**392,703,129.51**	**4.00**	**115,876,365.00**	**9.00**	**51,534,342.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.00**	**115,876,365.00**	**44.44**	**29.51**
		3	**25**	**05**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan kawasan yang dipantau dari kegiatan ilegal fishing dan RZKAW**	**%**	**5.00**	**392,703,129.51**	**2.67**	**115,876,365.00**	**5.00**	**51,534,342.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.67**	**115,876,365.00**	**53.33**	**29.51**
		3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Compliance (Persentase Kepatuhan)Usaha Bidang Perikanan Tangkap	%	9.00	143,455,784.06	0.00	20,714,600.00										0.00	0.00						-	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dok	2.00				1.00						0.00		0.00		-						-
		3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Compliance (Persentase Kepatuhan)Usaha Bidang Perikanan Budidaya	%	9.00	249,247,345.45	5.50	95,161,765.00										0.00	0.00			5.50	95,161,765.00	61.11	38.18
								Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dok	3.00		3.00		0.00						0.00		#DIV/0!		3.00		100.00	
		3	25	05	2.01	0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi																							
								Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha						51,534,342.00	3.00															
Rata-Rata Capaian Kinerja																										**0.00**	**0.00**			**44.44**	**29.51**
Predikat Kinerja																										**SR**	**SR**			**SR**	**SR**

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW II (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)	
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV									
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10+11+12+13		15 = 14/9 x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		3	25	06			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Angka Konsumsi Ikan**	**Kg/Kap/Tahun**	**43.14**	**1,742,998,523.43**	**45.11**	**923,838,374.00**	**43.14**	**115,160,125.00**		**0.00**	**45.21**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**45.21**	**0.00**	**104.80**	**0.00**	**45.21**	**923,838,374.00**	**104.80**	**53.00**
		3	25	06	2.01		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Terbitnya surat ijin usaha perikanan**	**Dok**	**62.00**	**157,710,409.37**	**5.00**	**31,730,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**-**	**5.00**	**31,730,000.00**	**8.06**	**20.12**
		3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data pelaku usaha perikanan yang tercatat	%	39.00	157,710,409.37	1.00	31,730,000.00			0.00	0.00								0.00			1.00	31,730,000.00	2.56	20.12
								Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dok	5.00		3.00									0.00		-	-	3.00		60.00	
		3	25	06	2.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Terbitnya ijin edar dan halal produk**	**Dok**	**19.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2.00**	**31,030,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**-**			**-**	**-**
		3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	UPI yang memiliki dokumen SKP (GNP dan SSOP)	UPI	29.00	200,000,000.00	0.00	0.00																	-	
								Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	29.00											0.00		-	-				.
		3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																								
								Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Pelaku Usaha						31,030,000.00	2.00															
		3	25	06	2.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Nilai ekspor hasil perikanan**	**USD**	**127,000.00**	**1,385,288,114.06**	**110,000.00**	**892,108,374.00**	**110,000**	**84,130,125.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**892,108,374.00**	**0.00**	**64.40**
		3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume hasil produksi perikanan	Ton	4.00	100,000,000.00	0.00	0.00		32,121,551.00	0.00	0.00								0.00					-	
								Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	7.00									0.00		-	0.00				.
		3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	UPI yang terbangun berstandar HACCP	Unit	8.00	1,285,288,114.06	4.00	892,108,374.00		52,008,574.00	0.00	0.00								0.00			4.00	892,108,374.00	50.00	69.41
								Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	8.00		4.00									0.00	0.00		4.00		50.00	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																						**105**	**0.00**			**105**	**53**
		Predikat Kinerja																						**ST**	**SR**			**ST**	**R**
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												5,470,903,979		819,899,180		1,097,017,334		-		-		1,916,916,514	**0**	**0**		20,827,229,654	35	0
		TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																						**46**	**21**			**67**	**44**
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																						**SR**	**SR**			**S**	**SR**

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Bandar Lampung, Juli 2025
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI LAMPUNG

RICARDO, S.H, M.M.
NIP. 19750815 200902 1 002

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS PARIWISATA KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	**BAB I**	**PENDAHULUAN**				
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	**BAB II**	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN**				
		Formulir E.81	√			
3	**BAB III**	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**				
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	√			
4	**BAB IV**	**PENUTUP**				

Bandar Lampung, Juli 2025

Kepala Dinas Pariwisata
Kota Bandar Lampung

ADIANSYAH, S.E., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19741008 199503 1 003

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Dr. Rein Susinda Hesty, S.Sos., M.Si.**	
	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida	
2	**Henny Sunlinawati, S.Sos., M.M.**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida	

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida,

Dini Purnamawaty,S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP197002181993032002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan.	√			
4.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masingPerangkat Daerah sesuai surat edaranwalikota.				
5.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah				
6.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.		√	Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025

Kepala Dinas Pariwisata
Kota Bandar Lampung

ADIANSYAH, S.E., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19741008 199503 1 003

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Dr. Rein Susinda Hesty, S.Sos., M.Si.**	
	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida	
2	**Henny Sunlinawati, S.Sos., M.M.**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida	

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida,

Dini Purnamawaty,S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP197002181993032002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi RenjaPerangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, Juli 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida,

Dini Purnamawaty,S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP19790218199303200 2

Diverifikasi : Juli 2025		**Tanda Tangan**
1	**Dr. Rein Susinda Hesty, S.Sos., M.Si.**	
	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida	
2	**Henny Sunlinawati, S.Sos., M.M.**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida	

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN 24
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Dinas Pariwisata yang mengacu pada Peraturan Wali kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan

indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru. Dalam pelaksanaan, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas Pariwisata Tahun 2025, yaitu:

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;
b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusun Renja Perubahan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57)

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2022 Nomor 108);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
8. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173)

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:

15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2022-2025;
19. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025;
20. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan bagi Dinas Pariwisata dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025

2. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
3. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
4. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (BULAN JANUARI s/d MARET) TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pada bulan Januari s/d Maret tahun 2025 Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya, dengan anggaran sebesar Rp. 8.938.334.386,00 terealisasi sebesar Rp. 1.324.775.321,00 atau 14,82% dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN REALISASI PROGRAM/KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Program ini yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.324.639.851,00 sampai dengan bulan Maret 2025 terealisasi sebesar Rp. 1.279.703.821,00 atau 24,03% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 83.439.477,00 terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar Rp. 13.459.700,00 atau 16,13%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 3.775.355.830,00 terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar Rp. 1.076.497.346,00 atau 28,51%.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 7.000.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar Rp. 0,00 atau 0%.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 154.595.042,00 terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar Rp. 18.367.300,00 atau 11,88%.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 396.707.502,00 terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar Rp. 0,00 atau 0%.

6. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

   Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 644.000.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar Rp. 149.119.475,00 atau 23,16%.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 263.542.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar Rp. 22.260.000,00 atau 8,45%.

B. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan yang terakomodir dalam Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata diperuntukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 706.000.000,00 s/d bulan Maret 2025 terealisasi

Rp. 25.500.000,00 atau 3,61%. Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 706.000.000,00,00 terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar Rp. 25.500.000,00 atau 3,61%. Output dari kegiatan ini adalah 1 (satu) Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola

C. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan yang terakomodir dalam Program Pemasaran Pariwisata diperuntukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemasaran dalam urusan kepariwisataan di Kota Bandar Lampung. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 650.694.535,00 s/d bulan Maret 2025 terealisasi Rp. 6.445.000,00 atau 0,99%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
   Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp 650.694.535,00 s/d bulan Maret 2025 terealisasi Rp. 6.445.000,00 atau 0,99%. Output dari kegiatan ini adalah 1 (satu) Laporan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata

D. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan yang terakomodir dalam Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif diperuntukan untuk mengembangkan segala sumber daya yang dimiliki oleh pelaku usaha wisata maupun ekonomi kreatif yang ada di Kota Bandar Lampung. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.257.000.000,00 s/d bulan Maret 2025 terealisasi Rp. 13.126.500,00 atau 0,58%. Program ini terdiri dari 1 (satu)

kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

   Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp 2.257.000.000,00 s/d bulan Maret 2025 terealisasi Rp. 13.126.500,00 atau 0,58%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah SDM Pariwisata yang profesional.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah mencakup program, Kegiatan, indikator kinerja, Total pagu pendanaan perubahan semula Rp. 8.938.334.386,00 menjadi Rp. 8.907.091.908,00 berkurang Rp. 31.242.492,00 kegiatan yang mengalami perubahan sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERUBAH ADALAH :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semula Rp. 5.324.639.865,00 berubah menjadi Rp.5.327.804.231,00. Bertambah Rp.3.164.366,00 yang berubah dari kegiatan :
   1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah semula Rp.83.439.601,00 berubah menjadi Rp.96.899.177,00. Bertambah Rp. 13.459.576,00.
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah semula Rp.3.775.255.830,00 berubah menjadi 3.792.219.830,00. Bertambah Rp. 16.864.000,00.
   3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah semula Rp. 7.000.000,00 berubah menjadi Rp. 3.500.000,00. Berkurang Rp. 3.500.000,00.
   4. Administrasi Umum Perangkat Daerah semula Rp.154.594.932,00 berubah menjadi Rp. 130.935.722,00. Berkurang Rp. 23.659.210,00.
   5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD semula Rp. 47.127.790,00 berubah menjadi Rp.23.468.580,00. Berkurang Rp. 23.659.210,00.

B. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata semula Rp.706.000.000,00 berubah menjadi Rp.717.129.789,00. Bertambah Rp.11.129.789,00 yang berubah dari kegiatan :

1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota semula Rp. 706.000.000,00 berubah menjadi Rp.717.129.789,00. Bertambah Rp. 11.129.789,00.

C. Program Pemasaran Pariwisata semula Rp. 650.694.535,00 berubah menjadi Rp.595.694.535,00. Berkurang Rp.55.000.000,00 yang berubah dari kegiatan :

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota semula Rp. 650.694.535,00 berubah menjadi Rp.595.694.535,00. Berkurang Rp. 55.000.000,00.

D. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif semula Rp. 2.257.000.000,00 berubah menjadi Rp. 2.266.463.353,00. Bertambah Rp. 9.463.353,00 yang berubah dari kegiatan :

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar semula Rp.2.257.000.000,00 berubah menjadi Rp. 2.266.463.353,00. Bertambah Rp. 9.463.353,00.

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Perubahan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

TABEL 4.1

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Kode Rekening	Uraian	Indikator	Satuan	Sebelum Perubahan		Sesudah perubahan		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
3.26.01	**SUB BIDANG URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penujang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**	**%**	**98,00**	**5.324.639.865,00**	**98,00**	**5.327.804.231,00**	
3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**%**	**100,00**	**83.439.601,00**	**100,00**	**96.899.177,00**	
3.26.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3,00	83.439.601,00	3,00	96.899.177,00	
3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**%**	**100,00**	**3.775.355.830,00**	**100,00**	**3.792.219.830,00**	
3.26.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	35,00	3.670.234.386,00	35,00	3.670.234.386,00	
3.26.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00	105.121.444,00	1,00	121.985.444,00	
3.26.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**100,00**	**7.000.000,00**	**100,00**	**3.500.000,00**	
3.26.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	orang	2,00	7.000.000,00	2,00	3.500.000,00	
3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**98,00**	**154.594.932,00**	**98,00**	**130.935.722,00**	
3.26.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	8.844.365,00	1,00	8.844.365,00	
3.26.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	39.984.245,00	1,00	39.984.245,00	
3.26.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,00	7.487.968,00	1,00	7.487.968,00	
3.26.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	8.985.000,00	1,00	8.985.000,00	
3.26.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	25.165.564,00	1,00	25.165.564,00	
3.26.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1,00	7.000.000,00	1,00	7.000.000,00	
3.26.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	
3.26.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	47.127.790,00	1,00	23.468.580,00	

				Sebelum Perubahan		Sesudah perubahan		
3.26.01.2.07	**Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98,00**	**396.707.502,00**	**98,00**	**396.707.502,00**	
3.26.01.2.07.001	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang disediakan	Unit	1,00	160.500.000,00	1,00	160.500.000,00	
3.26.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1,00	108.500.000,00	1,00	108.500.000,00	
3.26.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	127.707.502,00	1,00	127.707.502,00	
3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98,00**	**644.000.000,00**	**98,00**	**644.000.000,00**	
3.26.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	92.000.000,00	1,00	92.000.000,00	
3.26.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	1,00	552.000.000,00	1,00	552.000.000,00	
3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98,00**	**263.542.000,00**	**98,00**	**263.542.000,00**	
3.26.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00	40.806.000,00	1,00	40.806.000,00	
3.26.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2,00	41.916.000,00	2,00	41.916.000,00	
3.26.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	
3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	163.500.000,00	1,00	163.500.000,00	
3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	7.320.000,00	1,00	7.320.000,00	
3.26.02	**SUB BIDANG URUSAN PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Kunjungan wisata**	**%**	**3,00**	**706.000.000,00**	**3,00**	**717.129.789,00**	
3.26.02.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola**	**Laporan**	**1,00**	**706.000.000,00**	**1,00**	**717.129.789,00**	
3.26.02.03.003	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	2,00	460.950.000,00	2,00	460.950.000,00	
3.26.02.03.006	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	1,00	245.050.000,00	1,00	256.179.789,00	
3.26.03	**SUB BIDANG URUSAN PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata**	**%**	**3,00**	**650.694.535,00**	**3,00**	**595.694.535,00**	
3.26.03.01	**Program Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata**	**Laporan**	**1,00**	**650.694.535,00**	**1,00**	**595.694.535,00**	
3.26.03.01.006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	1,00	458.460.000,00	1,00	403.460.000,00	
3.26.03.01.007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	1,00	192.234.535,00	1,00	192.234.535,00	

				Sebelum Perubahan		Sesudah perubahan		
3.26.05	**SUB BIDANG URUSAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervaliadasi**	**%**	**22,00**	**2.257.000.000,00**	**22,00**	**2.266.463.353,00**	
3.26.05.01	**Program Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah SDM Pariwisata yang profesional**	**Orang**	**50,00**	**2.257.000.000,00**	**50,00**	**2.266.463.353,00**	
3.26.05.01.005	Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi. Produksi. Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	1,00	1.015.000.000,00	1,00	859.411.729,00	
3.26.05.01.006	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	50,00	60.000.000,00	50,00	60.000.000,00	
3.26.05.01.008	Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Parwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang	30,00	487.000.000,00	30,00	469.551.624,00	
3.26.05.01.009	Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	300,00	635.000.000,00	300,00	817.500.000,00	
3.26.05.01.0010	Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	50,00	60.000.000,00	50,00	60.000.000,00	
	TOTAL				**8.938.334.400,00**		**8.907.091.908,00**	

Tabel TC 33

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dan Prakiraan Maju 2026

Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
												1+2+3+4								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
												-								
3	26				PARIWISATA							8.907.091.908,00							9.912.642.006	
												-							-	
					DINAS PARIWISATA							8.907.091.908,00							9.912.642.006	
3	26	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penujang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	5.327.804.231,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui pemanfaatan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	5.582.828.867,46	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	96.892.529,00						100,00	97.759.455,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				1		Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	39.700.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	60		12	3	96.892.529,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	3	40.759.455,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan				1		Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	17.300.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	100,00	100,00	89,26	3.792.219.830,00						100,00	4.053.416.883,61	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	175		35	35	3.670.234.386,00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pariwisata	35	3.943.402.100,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5		1	1	121.985.444,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	110.014.783,61	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100	100	3.500.000,00						100	10.500.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10		2	2	3.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			ASN Dinas Pariwisata	2	10.500.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	130.941.370,00						98,00	170.739.822,35	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5		1	1	8.844.365,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	10.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5		1	1	39.984.245,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	39.984.245,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5		1	1	7.487.968,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	10.203.945,15	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5		1	1	8.985.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	10.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5		1	1	25.165.564,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	26.423.842,20	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5		1	1	7.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	7.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5		1	1	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	10.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5		1	1	23.474.228,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	57.127.790,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	98,00	98,00	98,00	410.207.502,00						98,00	351.207.502,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	0	1	1	160.500.000,00						1	165.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5		1	1	108.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	58.500.000,00	Dinas Pariwisata

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIAATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5		1	1	141.207.502,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	127.707.502,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**644.000.000,00**	Bandar Lampung	APBD				**98,00**	**644.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5		1	1	92.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	92.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5		1	1	552.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kontrak Dinas Pariwisata	1	552.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**250.043.000,00**						**98,00**	**255.205.204,50**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1		1	1	44.077.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan Dinas Pariwisata	1	43.710.300,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2		2	2	38.646.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional Dinas Pariwisata	2	41.916.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5		1	1	10.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan Kantor Dinas Pariwisata	1	10.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	150.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata	1	152.258.904,50	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	7.320.000,00	Bandar Lampung	APBD			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dinas Pariwisata	1	7.320.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**			**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan**	**%**	**15,00**	**15,1**	**5,00**	**5,00**	**717.129.789,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi**	**Memulihkan Perekonomian Daerah**		**5,00**	**862.678.748,00**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Daya Tarik Wisata**	**Laporan**	**5,00**	**1**	**1,00**	**1**	**-**						**1**	**135.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan		0				Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	35.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	1	0	-	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	0	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola**	**Laporan**	**5**	**1**	**1**	**1**	**717.129.789,00**						**1**	**727.678.748,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	02	2.03	03	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	2	2	2	2	460.950.000,00	Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	2	227.678.748,00	Dinas Pariwisata
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	2	2	1	1	256.179.789,00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Pelaku Pariwisata	1	-	Dinas Pariwisata
3	26	02	2.03	0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	Dokumen						Bandar Lampung	APBD			Dinas Pariwisata	1	500.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**03**			**Program Pemasaran Pariwisata**	**Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata**	**%**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,0**	**595.694.535,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi**	**Memulihkan Perekonomian Daerah**		**3,00**	**661.960.462,00**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata**	**Laporan**	**5,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**595.694.535,00**						**1,00**	**661.960.462,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	5	1	1	1	403.460.000,00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	173.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	5	1	1	1	192.234.535,00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	453.960.462,00	Dinas Pariwisata
3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen						Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	35.000.000,00	Dinas Pariwisata

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN/ BIDANG	URUSAN/ PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual**	**%**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**-**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Sektor-Sektor Stategis Daerah**		**22,00**	**103.757.000,00**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**04**			**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif**	**%**	**2,37**	**2,37**	**2,00**	**2,00**	**-**						**2,40**	**103.757.000,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	04	2.02	0002	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	5	1	1	1	-	Bandar Lampung	APBD			Pelaku Ekonomi Kreatif	1	68.757.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laporan	5		1			Bandar Lampung	APBD			Pelaku Ekonomi Kreatif	1	35.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervaliadasi**	**%**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**2.266.463.353,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Sektor-Sektor Stategis Daerah**		**22,00**	**2.701.416.929,00**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah SDM Pariwisata yang profesional**	**Orang**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**2.266.463.353,00**						**50,00**	**2.666.416.929,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	5	1	24	1	859.411.729,00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	1.051.850.342,00	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	250	50	300	50	60.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	50	63.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Parwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang	150	30	50	30	469.551.624,00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	30	537.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	1.500	300	50	300	817.500.000,00	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	300	951.566.587,00	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	250	50	1	50	60.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	50	63.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**05**	**2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku**	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang kapasitasnya dikembangkan**	**Orang**	**50,00**				**-**	**Bandar Lampung**	**APBD**					**35.000.000,00**	
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	0				-	Bandar Lampung	APBD			Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	20	35.000.000,00	Dinas Pariwisata

Bandar Lampung, Juli 2025
KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA BANDAR LAMPUNG

ADIANSYAH, SE., MH
NIP. 19741008 199503 1 003



PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	√			
		Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/tahun 2024				
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, Juli 2025

Kepala Dinas Pertanian

E R W I N, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19720413 199703 1 003

Diverifikasi :		Tanda Tangan
1	Dr. REIN SUSINDA HESTY, S.Sos., M.Si	
	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	
2	SUHERMAN	
	Fungsional Perencana Muda	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan,Riset dan Inovasi Daerah
Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700218 199303 2 002

Dipindai dengan CamScanner

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu inidkatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
5.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025

Kepala Dinas Pertanian

E R W I N, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19720413 199703 1 003

Diverifikasi :		Tanda Tangan
1	**Dr. REIN SUSINDA HESTY, S.Sos., M.Si**	
	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	
2	**SUHERMAN**	
	Fungsional Perencana Muda	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,Riset dan Inovasi Daerah
Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700218 199303 2 002

Dipindai dengan CamScanner

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, Juli 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700218 199303 2 002

Diverifikasi :		Tanda Tangan
1	Dr. REIN SUSINDA HESTY, S.Sos., M.Si Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	
2	SUHERMAN Fungsional Perencana Muda	

Dipindai dengan CamScanner

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

BAB I. PENDAHULUAN **I-1**

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-3
1.3. Maksud dan Tujuan I-6
1.4. Sistematika Penulisan I-6

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN **II-1**

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **III-1**

BAB IV PENUTUP **IV-1**

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 25
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Daerah.Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Dinas Pertanian Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan Dinas Pertanian yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Wali Kota BandarLampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : ***"BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT".***

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

Dipindai dengan CamScanner

7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung. Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pertanian. Dengan demikian Dinas Pertanian menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-4 (empat) dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu ***'Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.'*** Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, Dinas Pertanian menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada Tahun Anggaran 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Pertanian Tahun adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Dipindai dengan CamScanner

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);

Dipindai dengan CamScanner

10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024;
12. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.
Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan bagi Dinas Pertanian dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025;
2. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025
3. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
4. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan/Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2025.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang tabel rincian perubahan program, kegiatan, target dan pagu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Tahun berjalan yaitu Anggaran Tahun 2025 dengan anggaran total belanja Rp 10.472.377.312,00. Dari rincian belanja langsung sampai dengan Triwulan II Tahun 2054 telah terealisasi sebesar Rp 4.181.043.137,00 atau sebesar 40,74%. Program atau kegiatan-kegiatan yang terlah terealisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp 9.325.042.553,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.123.695.137,00 atau sebesar 44,22% yang dijabarkan dalam beberapa subkegiatan berupa :

(1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 31.553.986,00 dan belum terealisasi.

(2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp 6.840.939.934,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.159.515.643,00 atau 46,00% tersedianya gaji dan tunjangan ASN.

(3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp 112.380.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 39.600.000,00 atau 35,24% tersedianya administrasi keuangan.

Dipindai dengan CamScanner

(4) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 5.998.793,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.398.000,00 atau 23,30% dengan tersedianya sarana listrik dan penerangan kantor pendukung tugas dan fungsi pegawai.

(5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 55.809.556,00 dengan realisasi sebesar dengan realisasi sebesar Rp 9.425.600,00 atau 16,89% tersedianya alat tulis kantor.

(6) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp 11.996.706,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.751.000,00 atau 22,93% dengan tersedianya peralatan rumah tangga.

(7) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp 9.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 735.000,00 atau 8,17% dengan tersedianya makan dan minum rapat-rapat dan tamu.

(8) Penyediaan Barang Catatan dan Penggandaan dengan pagu sebesar Rp 40.849.653,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.362.000,00 atau 22,92% tersedianya barang cetak pengadaan.

(9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp 4.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 855.000,00 atau 21,38% dengan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

(10) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 22.202.525,00 dan belum terealisasi.

(11) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 150.000.000,00.

Dipindai dengan CamScanner

(12) Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 11.902.0000,00 dan belum terealisasi.

(13) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp 125.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 76.774.894,00 atau sebesar 61,42% tersedianya ajsa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

(14) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp 1.368.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 558.000.000,00 atau sebesar 41,00% tersedianya pelayanan adminitrasi perkantoran.

(15) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 42.430.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 8.724.000,00 atau 20,56% dengan terlaksananya pemeliharaan kendaraan mobil dan jabatan.

(16) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp 384.210.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 102.284.000,00 atau sebesar 26,62% tersedianya kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional.

(17) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 dan belum terealisasi.

(18) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 8.769.600,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.270.000,00 atau 48,69%.

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp 957.064.759,00

Dipindai dengan CamScanner

dengan realisasi sebesar Rp 6.048.000,00 dengan persentase sebesar 0,63%. dan dijabarkan dalam tiga sub kegiatan berupa :

(1) Pengawsan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi dengan anggaran sebesar Rp 170.000.000,00 dan belum terealisasi.

(2) Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian dengan anggaran sebesar Rp 37.280.000,00 dan belum terealisasi.

(3) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman dengan anggaran sebesar Rp 56.578.123,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.048.000,00 atau 10,69%.

(4) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman dengan anggaran sebesar Rp 693.206.636,00 dan belum terealisasi.

3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner pada Tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp 25.000.000,00 dan belum terealisasi yang dijabarkan dalam dua kegiatan berupa :

(1) Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) dengan anggaran sebesar Rp 11.000.000,00 dan belum terealisasi.

(2) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan anggaran sebesar Rp 14.000.000,00 dan belum terealisasi.

4) Program Penyuluhan Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian pada Tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp 165.270.000,00 dan belum terealisasi yang dijabarkan dalam dua kegiatan berupa :

Dipindai dengan CamScanner

(1) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dengan anggaran sebesar Rp 42.150.000,00 dan belum terealisasi.

(2) Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 123.120.000,00 dan belum terealisasi.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Terdapat perubahan anggaran pada beberapa kegiatan di Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung Tahun 2025. Berikut rincian perubahan anggaran di beberapa sub kegiatan :

1. Perubahan anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD berkurang sebesar Rp 6.000.000,00 dari jumlah awal sebesar Rp 118.380.000,00 menjadi sebesar Rp 112.380.000,00
2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ditiadakan.
3. Perubahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berkurang sebesar Rp 4.984.593,00,00 dari jumlah awal anggaran Rp 60.794.149,00 menjadi sebesar Rp 55.809.556,00.
4. Perubahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berkurang sebesar Rp 2.150.190,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp 42.999.843,00 menjadi sebesar Rp 40.849.653,00.
5. Perubahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor berkurang sebesar Rp 27.797.475,00 dari jumlah awal sebesar Rp 50.000.000,00 menjadi sebesar Rp 22.202.525,00.
6. Perubahan anggaran pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya berkurang sebesar Rp 11.500.000,00 dari jumlah awal sebesar Rp 23.402.000,00 menjadi sebesar Rp 11.902.000,00.
7. Perubahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan bertambah

Dipindai dengan CamScanner

sebesar Rp 22.480.000,00 dari jumlah awal sebesar Rp 42.430.000,00 menjadi sebesar Rp 64.910.000,00.

8. Perubahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan bertambah sebesar Rp 22.480.000,00 dari jumlah awal sebesar Rp 361.730.000,00 menjadi sebesar Rp 384.210.000,00.
9. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi bertambah sebesar Rp 170.000.000,00.
10. Perubahan anggaran pada Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian berkurang sebesar Rp 2.720.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 menjadi sebesar Rp 37.280.000,00.
11. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman bertambah sebesar Rp 571.938.500,00.
12. Perubahan anggaran pada Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) berkurang sebesar Rp 7.000.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp 18.000.000,00 menjadi sebesar Rp 11.000.000,00.
13. Perubahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner berkurang sebesar Rp 1.000.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp 15.000.000,00 menjadi sebesar Rp 14.000.000,00.
14. Perubahan anggaran pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa berkurang sebesar Rp 17.850.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp 60.000.000,00 menjadi sebesar Rp 42.150.000,00.

Dipindai dengan CamScanner

15. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian bertambah sebesar Rp 123.120.000,00.

Dipindai dengan CamScanner

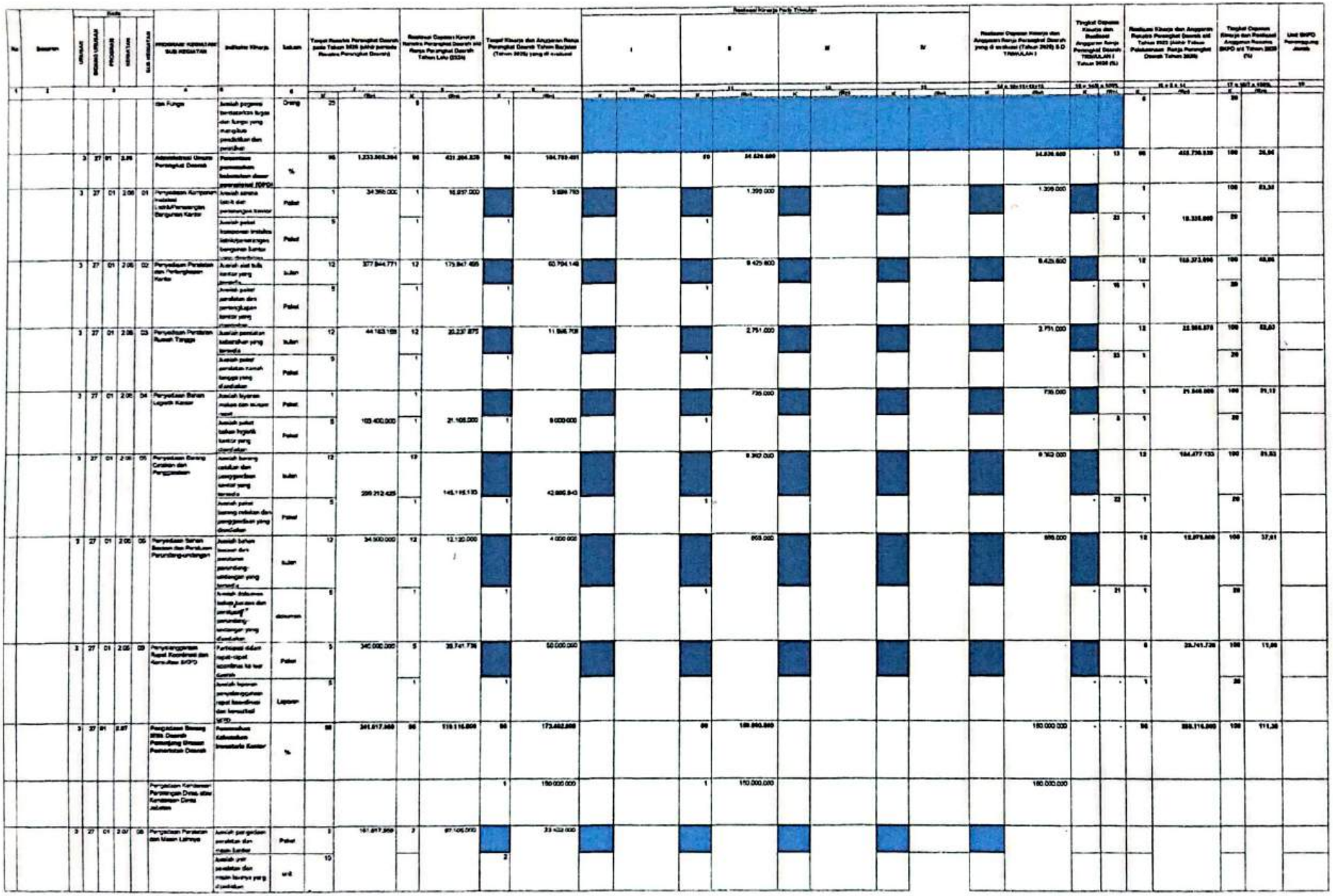
TABEL 4
Formulir E. 01
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG
Provinsi Lampung
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KOTA BANDAR LAMPUNG
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN II TAHUN 2025

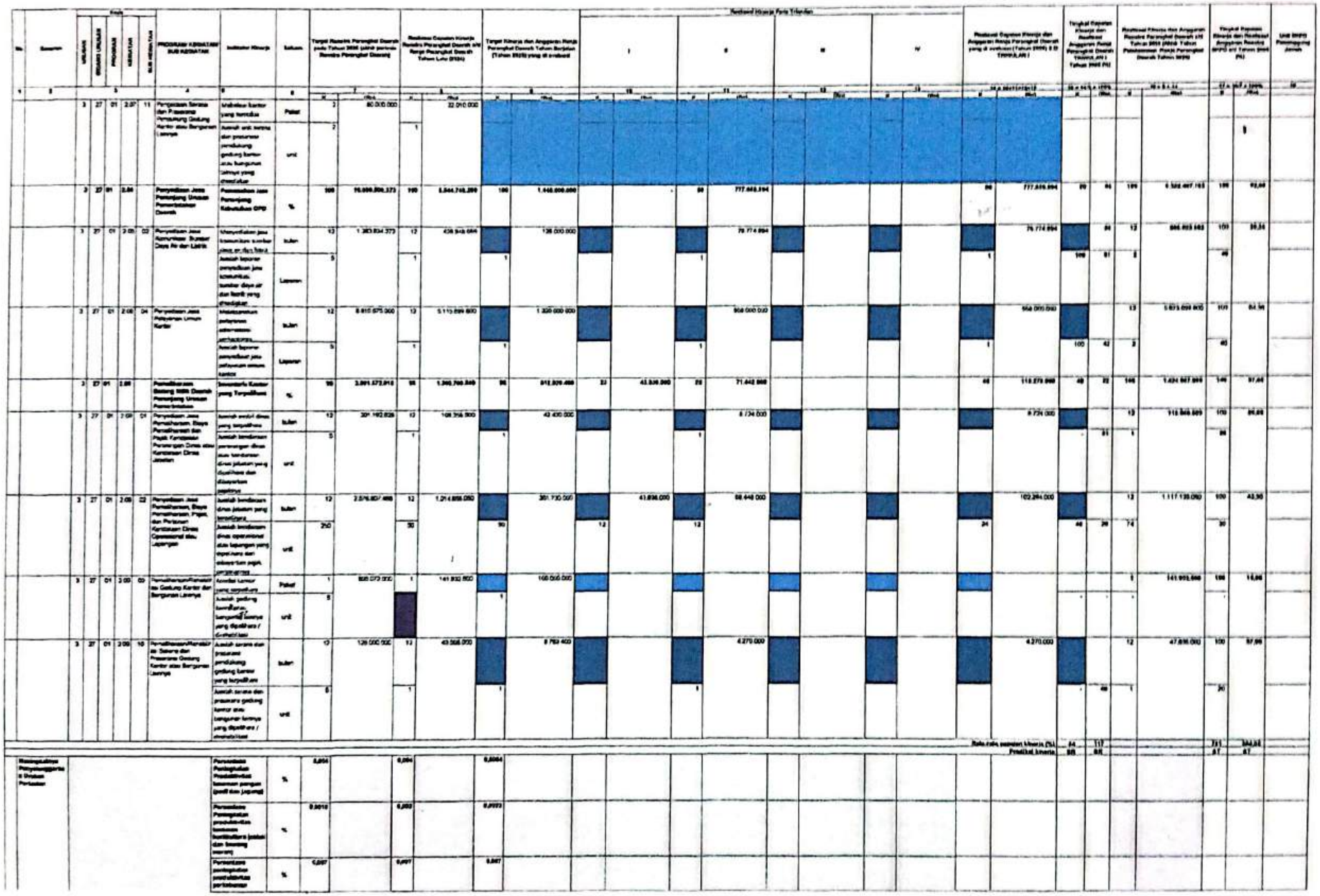
Indikator dan target kinerja Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran R

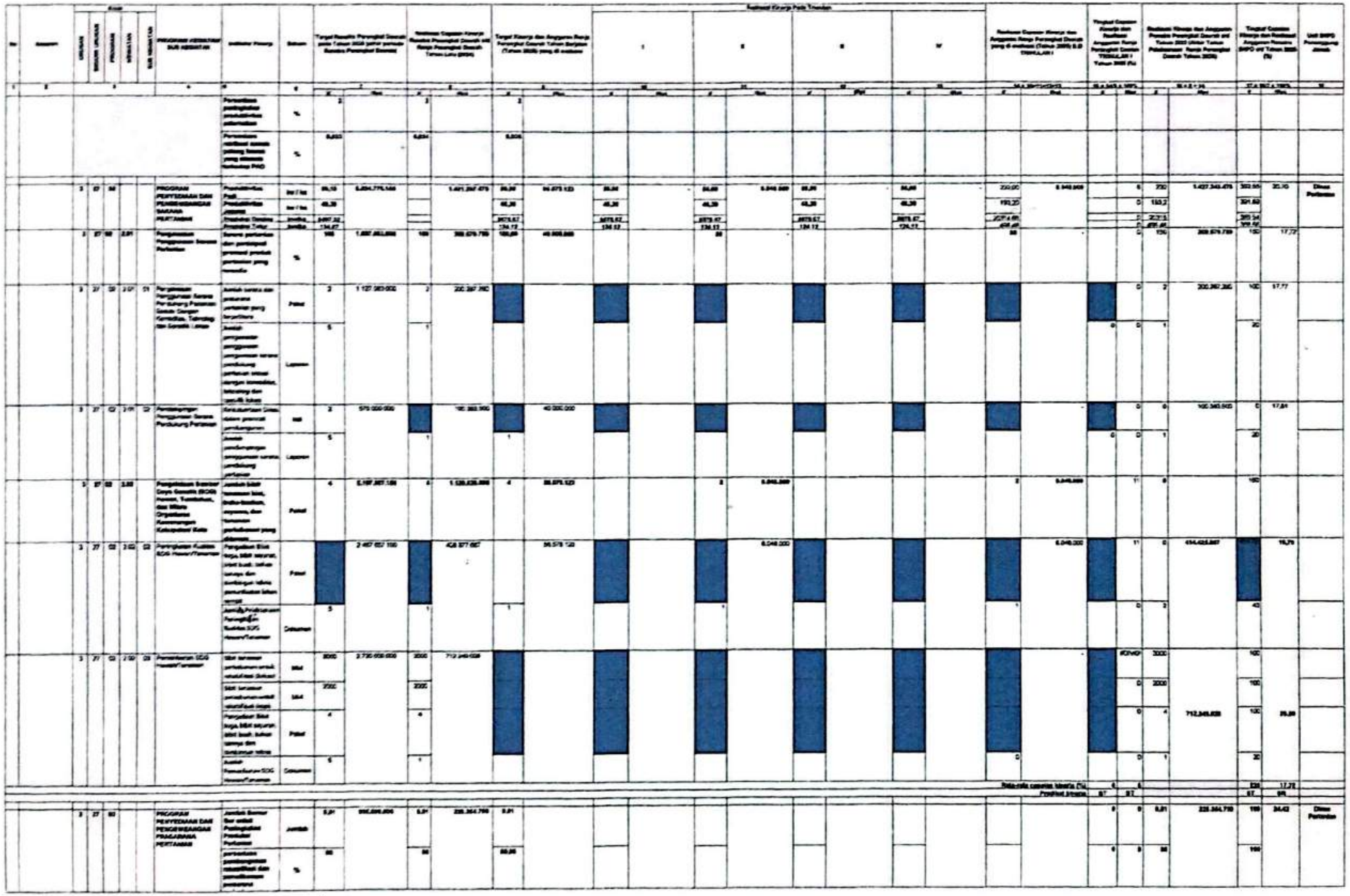
1	Meningkatkan Pemanfaatan Lahan Pertanian	80,01 (A)
2	Meningkatnya Produktivitas Pertanian	0,01
		0
		0
		2
3	Terlaksanakannya pengobatan/vaksinasi OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	0,54
		85
		0,8

No	Sasaran	Kode					Program (Nama/ Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Tahun 2025) S.D TRIWULAN I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah TRIWULAN I Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit di/SKPD Penanggung Jawab
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan										I		II		III		IV									
										K	Rp(a)	K	Rp(a)	K	Rp(a)	K	Rp(a)	K	Rp(a)	K	Rp(a)	K	Rp(a)							
1	2						A	B	E	7		9		10		11		12		13		14		15 = 14/8 x 100%		16 = 9 x 14		17 = 9/7 x 100%		18
										K	Rp(a)	K	Rp(a)	K	Rp(a)	K	Rp(a)	K	Rp(a)	K	Rp(a)	K	Rp(a)	K	Rp(a)	K	Rp(a)	K	Rp(a)	
URUSAN PILIHAN																														
BIDANG PILIH TANAMAN											11.644.737.736		2.991.295.135		788.979.113		0													
DINAS PERTANIAN											13.710.967.473		31.971.209.493		3.462.978.254								4.284.979.137		49		22.648.952.497		28,49	
	Meningkatkan Pemanfaatan Lahan Pertanian							Hasil Pendataan Administrasi Kawasan Dinas Pertanian oleh Kepala Bidang Kabupaten Kota Bandar Lampung (Bidan SAKIP OPD)	Nihil	75 (SS)		80 (A)		51,25 (A)																	
		3	01				PROGRAM PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan Administrasi Operasional Sarana, Pemeliharaan Kendaraan SDM, ADK dll	%	50	68.863.838.734	80	36.391.665.388	80	9.277.646.161	23	2.838.949.701	20	2.836.833.436					40	4.284.979.137	49	46	40	22.648.952.497	49	28,49	Dinas Pertanian
		3	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	%	100	534.795.000	100	111.334.000	100	31.863.396											-	-	100	111.334.000	100	29,82	
		3	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar OPD	dokumen	4	534.795.000	4	111.334.000	1	31.863.396													4		100		
								Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi renstra SKPD dan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan	Laporan	1		1													-	-	1	111.334.000	100	29,82	
		3	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Pembayaran Dokumen penggunaan anggaran OPD yang diverifikasi	%	100	55.634.844.262	100	20.502.629.362	100	6.910.966.264	20	1.994.999.701	20	1.994.996.942					80	3.159.515.643	80	46	100	64.941.942.496	150	36,10	
		3	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	55.503.942.962	12	20.473.323.962	14	6.901.556.264	3	1.994.999.701	3	1.155.305.943					8	3.159.515.643	63	46	18	23.814.829.486	100	36,30	
								Jumlah orang yang menerima gaji dan	Orang / Bulan	54		12																	33		
		3	01	01	2.02	03	Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Sarana Keunggan SKPD	Administrasi kendaraan dinas, perlatan yang terdaftar	bulan	12	1.440.900.000	12	397.800.000	1	115.360.000			1	39.600.000						36.600.000		33	12	427.460.000	100	27,67	
								Jumlah dokumen perlatan/ aset dan pengguna/sertifikat kendaraan SKPD	Bulan	5		5													-	33	5		100		
		3	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan pengelolaan data dan pemberian dana operasional	%	100	130.000.000	100	12.954.000	100	10.000.000													100	12.954.000	100	10,03	
		3	01	01	2.05	03	Pemberian dan Pelaporan Pegawai Berdasarkan Tugas	Pemberian dan Pelaporan Data Pegawai	Paket	1	130.000.000	1	12.954.000		10.000.000													1	12.954.000	100	10,03	

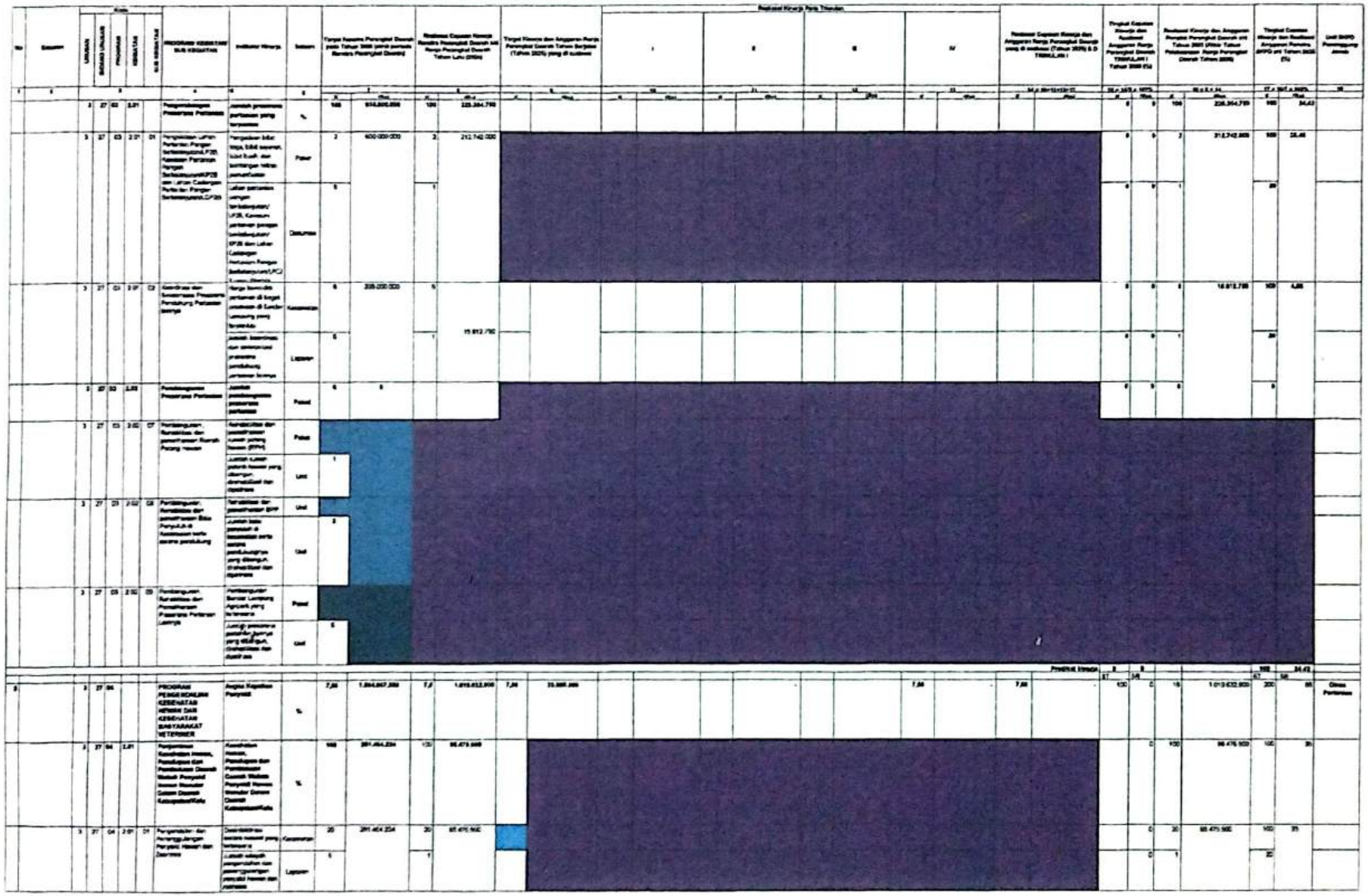
Dipindai dengan CamScanner



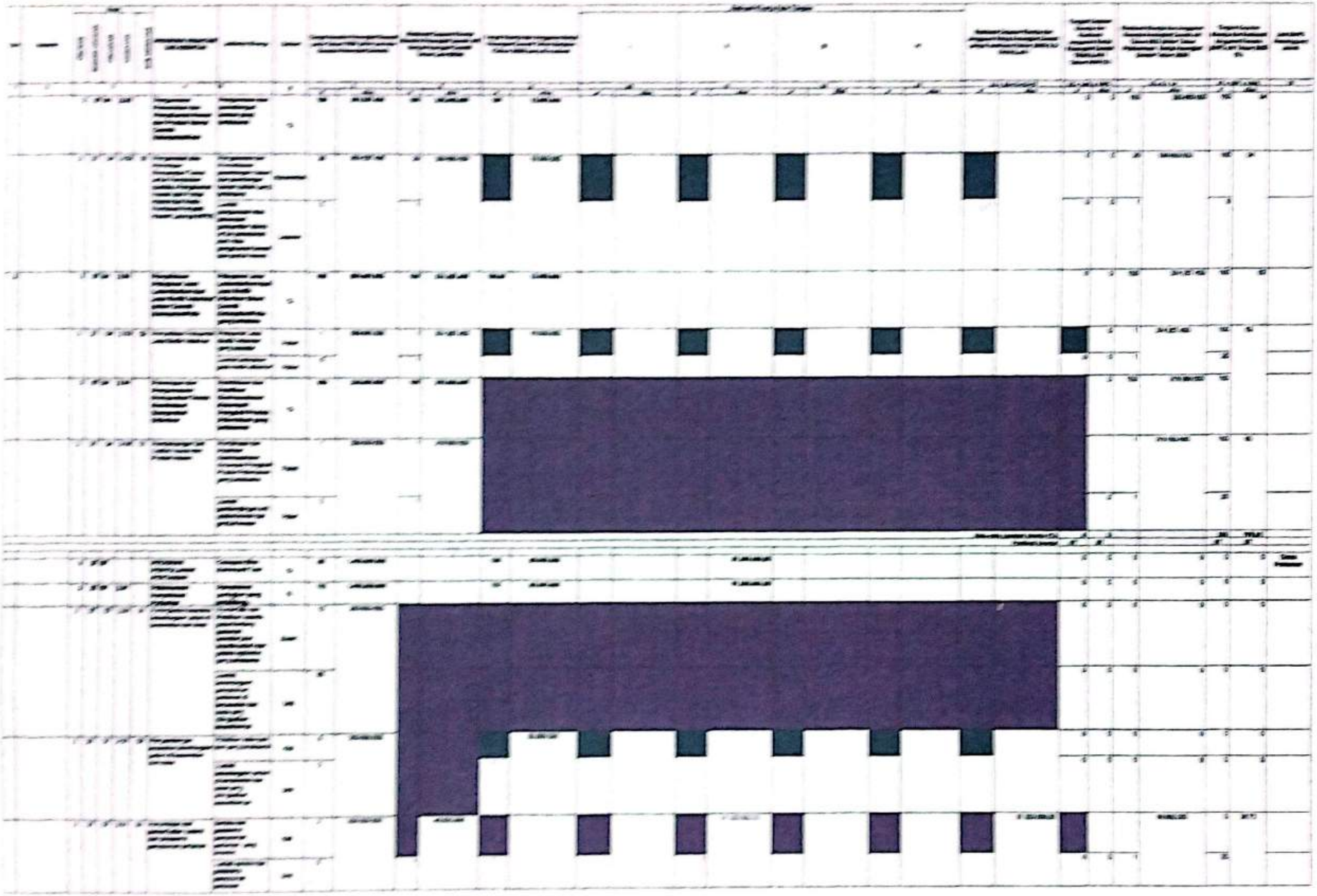




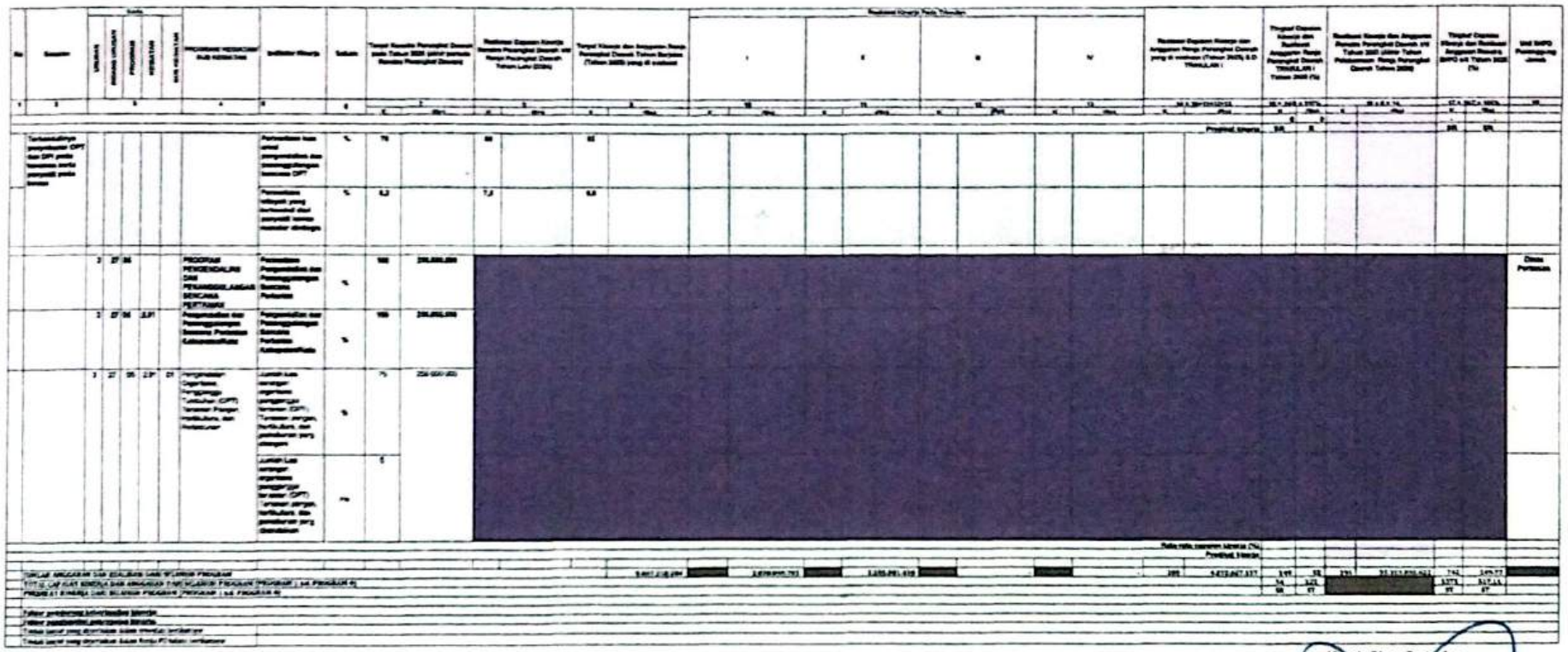
Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



Kepala Dinas Pertanian
Kota Bandar Lampung

ERWIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720413 199703 1 003

Dipindai dengan CamScanner

Tabel T-C.29.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN 2023 KOTA BANDAR LAMPUNG

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (2023)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)*100
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**	**%**	**98**		**98**	**98**	**100**	**98**	**196**	**200**
3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**%**	**100**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6		1	2	200	1	3	50,00
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokume pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**100**		**100**	**100,00**	**100,0**	**100**	**200**	**200**
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	80		12	24	200	14	38	47,50
3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi	Dok	6		1	2	200	12	14	233,33
3.25.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**%**	**100**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
3.25.01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti	Orang	25					5	5	20

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (2023)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)*100
3.25.01.2.05.09	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional (OPD)**	**%**	**100**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
3.25.01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan	Paket	6		1	2	200	1	3	50
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	6		1	2	200	1	3	50,00
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	6		1	2	200	1	3	50,00
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	6		1	2	200	1	3	50,00
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	6		1	2	200	1	3	50
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	Dok	6		1	2	200	1	3	50,00
3.25.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan	6		1	2	200,0	1	3	50,00
3.25.01.2.06.08	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98**		**98**	**98**	**100**	**98**	**196**	**200**
3.25.01.2.06.09	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	1					1		
3.25.01.2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	12		2	2	100		2	17
3.25.01.2.07.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	Unit	48		8				-	-
3.25.01.2.07.06	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**100**		**100**	**100**	**100,0**	**100**	**200**	**200,00**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (2023)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)*100
3.25.01.2.07.10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang	Laporan	6		1	2	200	1	3	50
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	6		1	2	200	1	3	50
3.25.01.2.08.02	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98**		**98**	**98**	**100**	**98**	**196**	**200,00**
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	6		1	2	200	1	3	50,00
3.25.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan	Unit	300		50	100,00	200	50	150	50
3.25.01.2.09.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehabilitasi	Unit	6		1	2	200,0	1	3	50,00
3.25.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	6		12	2	17	1	3	50,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Produktivitas Padi**	**kw/ha**	**58,75**		**57,70**	**57,70**	**100**	**58,75**	**116**	**198,21**
		Produktivitas Jagung	**kw/ha**	**48,87**		**48,13**	**48,13**	**100**	**48,87**	**97**	**198**
		Produksi Daging	**ton/tahun**	**5.283,40**		**5078,67**	**5078,67**	**100**	**5.283,40**	**10.362**	**196,13**
		Produksi Telur	**ton/tahun**	**129,43**		**124,12**	**124,12**	**100**	**129,43**	**254**	**195,90**
3.25.03	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Sarana pertanian dan partisipasi promosi produk pertanian yang**	**Paket**	**4**		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**50,00**
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik	Jumlah pengawasan penggunaan pengawasan sarana pendukung	Laporan	6		1	2	200	1	3	50,00
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	6		1	1		1	2	33,33
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	**Jumlah bibit tanaman hias, buah-buahan, sayuran, dan tanaman**	**Paket**	**4**		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**50**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (2023)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)*100
3.25.03.2.01	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dok	5		1	2	200	1	3	60
3.25.03.2.01.01	Pemanfaatan SDG Hewan//Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dok	6		1	2	200	1	3	50
3.25.03.2.01.02	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah**	**Jumlah Paket Bibit Ternak Kelinci yang tersedia**	**Paket**	**6**					**1**	**1**	**17**
3.25.03.2.02	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota	Ekor	250					250	250	100
3.25.03.2.02.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah Sumur Bor untuk Peningkatan Produksi Pertanian**	**Jumlah**	**120**		**20**	**20**	**100**	**20**	**40**	**33**
3.25.03.2.03		**persentase pembangunan rehabilitasi dan**	**%**	**80**		**80**	**80**	**100**	**80**	**160**	**200**
3.25.03.2.03.02	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah prasarana pertanian yang terpantau**	**%**	**100**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
3.25.03.2.06	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan	Lahan pertanian pangan berkelanjutan/ LP2B, Kawasan pertanian pangan	Dok	6		1	1	100	1	2	33
3.25.03.2.06.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Laporan	6		1	1	100	1	2	33
	Pembangunan Prasarana Pertanian	**Jumlah pembangunan prasarana pertanian**	**Paket**	**6**		1	1	100	1	2	33
3.25.04	Pembangunan , Rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukung	Jumlah balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang	Unit	5					1		
3.25.04.2.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	6		1			1	1	17
3.25.04.2.02.01	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka kejadian penyakit**	**%**	**6,10**		**7,50**	**7,50**	**100**	**6,10**	**14**	**223**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (2023)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)*100
3.25.04.2.02.04	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota**	**%**	**100**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
3.25.04.2.04	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit	Laporan	6		1	2	200	1	3	50,00
3.25.04.2.04.01	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengawasan dan Pemotongan hewan yang terlaksana**	**%**	**100**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
3.25.04.2.04.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran	Jumlah Pengawasan atas penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan	Laporan	6		1	2	200	1	3	50,00
3.25.04.2.04.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah**	**Pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam**	**%**	**100**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
3.25.04.2.04.04	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	6		1	1	100	1	2	33
3.25.04.2.04.05	**Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan kelompok pengolah**	**%**	**100**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
3.25.04.2.04.07	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Dok	6		1	2	200	1	3	50
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Sarana Pertanian**	**%**	**100**					**100**	**100**	**100**
3.25.05	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**%**	**100**					**100,0**	**100**	**100,00**
3.25.05.2.01	Pengendalian Organisme, Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme penganggu tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang ditangani	Ha	6					1	1	16,67

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (2023)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)*100
3.25.05.2.01.01	**PROGRAM PENYULUH PERTANIAN**	**Cakupan Bina Kelompok Petani**	**%**	**75**					**75**	**75**	**100**
3.25.05.2.01.02	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Penyuluhan Pertanian yang terlaksana**	**%**	**100**					**100**	**100**	**100**
	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	5					1	1	20
3.25.06	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan	Unit	5					1	1	20
3.25.06.2.01	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan pertanian	Unit	5					1	1	20

Bandar Lampung, Januari 2024
KEPALA DINAS PERTANIAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

ERWIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720413 199703 1 003

Dipindai dengan CamScanner

T-C 33

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NAMA OPD : DINAS PERTANIAN

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	ANGGARAN TAHUN 2025			RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 *)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1					2	3	4	12	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				9.467.218.284,00			10.494.857.312,00				10.976.222.166,00
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		98 Persen	9.277.640.161,00		98 Persen	9.347.522.553,00			98 Persen	9.741.522.169,05
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		100 Persen	31.553.986,00		100 Persen	31.553.986,00			100 Persen	33.131.685,30
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan OPD (buah)	Bandar Lampung	1 Laporan	31.553.986,00	Bandar Lampung	1 Laporan	31.553.986,00	APBD		1 Laporan	33.131.685,30
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		100 Persen	6.919.965.284,00		100 Persen	6.953.319.934,00			100 Persen	7.265.963.648,20
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	Bandar Lampung	14 Bulan	6.801.585.284,00	Bandar Lampung	14 Bulan	6.840.939.934,00	APBD		14 Bulan	7.141.664.548,20
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi keuangan Dinas Pertanian yang terlaksana	Bandar Lampung	1 Dokumen	118.380.000,00	Bandar Lampung	1 Dokumen	112.380.000,00	APBD		1 Dokumen	124.299.000,00
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 Persen	10.000.000,00						100 Persen	10.500.000,00
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bandar Lampung	5 Orang	10.000.000,00	Bandar Lampung			APBD		5 Orang	10.500.000,00
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)		100 Persen	184.789.491,00		100 Persen	149.857.233,00			100 Persen	194.028.965,55
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	Bandar Lampung	1 Paket	5.998.793,00	Bandar Lampung	1 Paket	5.998.793,00	APBD		1 Paket	6.298.732,65

Dipindai dengan CamScanner

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	ANGGARAN TAHUN 2025			RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 *)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1					2	3	4	12	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Bandar Lampung	1 Paket	60.794.149,00	Bandar Lampung	1 Paket	55.809.556,00	APBD		1 Paket	63.833.856,45
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan keberalhan yang tersedia	Bandar Lampung	1 Paket	11.996.706,00	Bandar Lampung	1 Paket	11.996.706,00	APBD		1 Paket	12.596.541,30
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makan dan Minum Rapat	Bandar Lampung	1 Paket	9.000.000,00	Bandar Lampung	1 Paket	9.000.000,00	APBD		1 Paket	9.450.000,00
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia	Bandar Lampung	1 Paket	42.999.843,00	Bandar Lampung	1 Paket	40.849.653,00	APBD		1 Paket	45.149.835,15
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Bandar Lampung	1 Dokumen	4.000.000,00	Bandar Lampung	1 Dokumen	4.000.000,00	APBD		1 Dokumen	4.200.000,00
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Partisipasi dalam Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah	Bandar Lampung	1 Laporan	50.000.000,00	Bandar Lampung	1 Laporan	22.202.525,00	APBD		1 Laporan	52.500.000,00
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Investaris Kantor**		**98 Persen**	**173.402.000,00**		**96 Persen**	**161.902.000,00**			**98 Persen**	**182.072.100,00**
3	27	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Bandar Lampung	1 Unit	150.000.000,00	Bandar Lampung	1 Unit	150.000.000,00	APBD		1 Unit	157.500.000,00
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	Bandar Lampung	2 Unit	23.402.000,00	Bandar Lampung	2 Unit	11.902.000,00	APBD		2 Unit	24.572.100,00
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**		**100 Persen**	**1.448.000.000,00**		**100 Persen**	**1.493.000.000,00**			**100 Persen**	**1.517.250.000,00**
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyediakan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bandar Lampung	1 Laporan	125.000.000,00	Bandar Lampung	1 Laporan	125.000.000,00	APBD		1 Laporan	131.250.000,00
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran	Bandar Lampung	1 Laporan	1.320.000.000,00	Bandar Lampung	1 Laporan	1.368.000.000,00	APBD		1 Laporan	1.386.000.000,00
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Investaris Kantor Yang Terpelihara**		**98 Persen**	**512.929.400,00**		**98 Persen**	**557.889.400,00**			**98 Persen**	**535.575.870,00**

Dipindai dengan CamScanner

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	ANGGARAN TAHUN 2025			RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 *)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1					2	3	4	12	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara	Bandar Lampung	1 Unit	42.430.000,00	Bandar Lampung	1 Unit	64.910.000,00	APBD		1 Unit	44.551.500,00
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Terpelihara	Bandar Lampung	50 Unit	361.730.000,00	Bandar Lampung	50 Unit	384.210.000,00	APBD		50 Unit	379.816.500,00
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kondisi Kantor yang terpelihara	Bandar Lampung	1 Unit	100.000.000,00	Bandar Lampung	1 Unit	100.000.000,00	APBD		1 Unit	105.000.000,00
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang terpelihara	Bandar Lampung	1 Unit	8.769.400,00	Bandar Lampung	1 Unit	8.769.400,00	APBD		1 Unit	9.207.870,00
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**PRODUKTIVITAS PADI**		**58,75 Kw/Ha**	**96.578.123,00**		**58,75 Kw/Ha**	**957.064.759,00**			**58,95 Kw/Ha**	**1.007.773.996,95**
						PRODUKTIVITAS JAGUNG		**48,87 Kw/Ha**			**48,87 Kw/Ha**				**49,15 Kw/Ha**	
						PRODUKSI DAGING		**6283,4 Ton/Ha**			**6283,4 Ton/Ha**				**6389,52 Ton/Ha**	
						PRODUKSI TELUR		**123,43 Ton/ Ha**			**123,43 Ton/ Ha**				**132,03 Ton/ Ha**	
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Sarana pertanian dan partisipasi promosi produk pertanian yang tersedia**		**4 Paket**	**40.000.000,00**		**4 Paket**	**207.280.000,00**			**4 Paket**	**220.500.000,00**
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang terpelihara				Bandar Lampung	1 Laporan	170.000.000,00	APBD		1 Laporan	178.500.000,00
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kelcutsertaan Dinas Dalam Promosi Pembangunan	Bandar Lampung	1 Laporan	40.000.000,00	Bandar Lampung	1 Laporan	37.280.000,00	APBD		1 Laporan	42.000.000,00
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Bibit tanaman hias, buah-buahan, sayuran, dan tanaman perkebunan yang ditanam**		**4 Paket**	**56.578.123,00**		**4 Paket**	**749.784.759,00**			**4 Paket**	**787.273.996,95**
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Bibit Tanaman Perkebunan untuk Rehabilitasi (Kakao)	Bandar Lampung	1 Dokumen	56.578.123,00	Bandar Lampung	1 Dokumen	56.578.123,00	APBD		1 Dokumen	59.407.029,15

Dipindai dengan CamScanner

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	ANGGARAN TAHUN 2025			RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 *)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1					2	3	4	12	6	7	8	9	10	11	12	13
						Bibit Tanaman Perkebunan untuk Rehabilitasi (Kopi)										
						Pengadaan Bibit Toga, Bibit Sayuran, Bibit Buah, dan Bimbingan Teknis Pemanfaatan										
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Bibit Tanaman Perkebunan untuk Rehabilitasi (Kakao)	Bandar Lampung			Bandar Lampung	1 Dokumen	693.266.636,00	APBD		1 Dokumen	727.866.967,80
						Bibit Tanaman Perkebunan untuk Rehabilitasi (Kopi)										
						Pengadaan Bibit Toga, Bibit Sayuran, Bibit Buah, dan Bimbingan Teknis Pemanfaatan										
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**ANGKA KEJADIAN PENYAKIT**		**6,10 Persen**	**33.000.000,00**		**6,10 Persen**	**25.000.000,00**			**6,10 Persen**	**34.650.000,00**
3	**27**	**04**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana**		**100 Persen**	**18.000.000,00**		**100 Persen**	**11.000.000,00**			**100 Persen**	**18.900.000,00**
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Pengawasan dan Pemeriksaan Pemotongan Hewan dan Pemotongan Hewan Qurban yang terlaksana	Bandar Lampung	1 Laporan	18.000.000,00	Bandar Lampung	1 Laporan	11.000.000,00	APBD		1 Laporan	18.900.000,00
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola**		**100 Persen**	**15.000.000,00**		**100 Persen**	**14.000.000,00**			**100 Persen**	**15.750.000,00**
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang tersedia	Bandar Lampung	1 Laporan	15.000.000,00	Bandar Lampung	1 Laporan	14.000.000,00	APBD		1 Laporan	15.750.000,00
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**CAKUPAN BINA KELOMPOK PETANI**		**75 Persen**	**60.000.000,00**		**75 Persen**	**165.270.000,00**			**75 Persen**	**192.276.000,00**
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Penyuluhan pertanian yang terlaksana**		**100 Persen**	**60.000.000,00**		**100 Persen**	**165.270.000,00**			**100 Persen**	**192.276.000,00**

Dipindai dengan CamScanner

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	ANGGARAN TAHUN 2025			RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 *)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1					2	3	4	12	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pelatihan kelompok tani yang terlaksana	Bandar Lampung	2 Unit	60.000.000,00	Bandar Lampung	2 Unit	42.150.000,00	APBD		2 Unit	63.000.000,00
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang tersedia	Bandar Lampung			Bandar Lampung	3 Unit	123.120.000,00	APBD		3 Unit	129.276.000,00
JUMLAH TOTAL									9.467.218.284,00			10.494.857.312,00				10.976.222.166,00

Kepala Dinas Pertanian
Kota Bandar Lampung

ERWIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720413 199703 1 003

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Dinas Pertanian selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Dinas Pertanian juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pertanian dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Dipindai dengan CamScanner



PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	√			
		Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan/tahun 2025	√			
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	√			
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, Juli 2025
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Bandar Lampung,

WILSON FAISOL, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700323 198903 1 001

Diverifikasi: Tanggal		Tanda Tangan
1	Dr. REIN SUSINDA HESTY, S.Sos., M.SI Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	
2	HARI SUBAGIO, ST., M.SI	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah,

DINI PURNAMAWATY, SE., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerahyang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Bandar Lampung,

WILSON FAISOL, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700323 198903 1 001

Diverifikasi: Tanggal		Tanda Tangan
1	Dr. REIN SUSINDA HESTY, S.Sos., M.SI Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	
2	HARI SUBAGIO, ST., M.SI	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah,

DINI PURNAMAWATY, SE., M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan dengan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Diverifikasi: Tanggal		Tanda Tangan
1	Dr. REIN SUSINDA HESTY, S.Sos., M.SI	
	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	
2	HARI SUBAGIO, ST., M.SI	

Bandar Lampung, Juli 2025
Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah,

DINI PURNAMAWATY, SE., M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		**i**
DAFTAR TABEL		**ii**
BAB I.	**PENDAHULUAN**	**I-1**
	1.1. Latar Belakang	**I-1**
	1.2. Landasan Hukum	**I-2**
	1.3. Maksud dan Tujuan	**I-5**
	1.4. Sistematika Penulisan	**I-5**
BAB II	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN**	**II-1**
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**	**III-1**
BAB IV	**PENUTUP**	**IV-1**

DAFTAR TABEL

Tabel E.81	Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Bandar Lampung Renja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun 2025	I-8
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Perubahan Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Bandar Lampung	III-8

LAMPIRAN 26
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;
b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 01);
14. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2025
adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang
I.2 Landasan Hukum
I.3 Maksud dan Tujuan
I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Bab III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung merupakan perubahan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan capaian Kinerja.

Pada tahun anggaran 2025, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Perdagangan. Dalam melaksanakan urusan tersebut, Dinas Perdagangan melaksanakan 6 (enam) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan.

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sampai dengan 30 Maret 2025 pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 2.401.418.323,00 dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp. 8.784.328.699,00. Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 905.541.447,00 dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sebesar Rp. 7.495.818.363,00.

Evaluasi kinerja dan keuangan Renja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.1. Selanjutnya evaluasi program secara umum berdasarkan urusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN

Fungsi Penunjang Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Urusan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien di Kota Bandar Lampung.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung melaksanakan fungsi penunjang urusan pilihan perdagangan dengan beberapa program strategis dengan capaian realisasi kinerja program hingga Triwulan I adalah sebagai berikut :

1) **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan :**

   Program ini dilaksanakan dengan indikator Persentase Jumlah Pasar yang Ditata dan didukung 2 kegiatan dengan 3 Sub Kegiatan yaitu :

   Kegiatan Pembangunan dan Pengelolahan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dan didukung oleh dana sebesar Rp. 250.000.000,-.

   - Sub Kegiatan 1 yaitu Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dan didukung oleh dana sebesar Rp. 250.000.000,-

   Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan indikator Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dan didukung oleh dana sebesar Rp. 186.306.112,-.

- Sub Kegiatan 1 yaitu Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dan didukung oleh dana sebesar Rp. 76.806.112,-
- Sub Kegiatan 2 yaitu Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, dan didukung Rp. 109.500.000,-

2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting :

Program ini dilaksanakan dengan indikator Persentase Stabilitas Harga Barang Pokok dan Bahan Penting dengan target 95% dan didukung 1 kegiatan dengan 2 Sub Kegiatan yaitu :

Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan indikator Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional dan didukung oleh dana sebesar Rp. 1.149.521.086,-.

- Sub Kegiatan 1 yaitu Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan indikator Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan, mempunyai target capaian kinerja 1 Laporan dan didukung oleh dana sebesar Rp. 154.521.086,-

- Sub Kegiatan 2 yaitu Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, mempunyai target capaian kinerja 1 Laporan dan didukung oleh dana sebesar Rp. 995.000.000,-.

3) Program Pengembangan Ekspor

Program ini dilaksanakan dengan indikator Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan.

Didukung dengan 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu :

Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional yang Diikuti dengan target 100% dengan dana Rp. 1.816.888.508,-.

Sub Kegiatannya yaitu Pameran Dagang Nasional dengan indikator Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang dengan target 5 Pelaku Usaha dengan dana Rp. 1.816.888.508,-.

4) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini dilaksanakan dengan indikator Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen dengan target 87,00%, didukung dengan 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan :

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan dengan indikator Jumlah UTTP yang di Tera Ulang, Jumlah UTTP BDKT dan SN yang Sudah Diawasi dan didukung oleh dana sebesar Rp. 250.000.000,-.

- Sub Kegiatan 1 yaitu Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan indikator Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan di Tera Ulang mempunyai target capaian kinerja 2.100 Unit dan didukung oleh dana sebesar Rp. 125.538.317,-

- Sub Kegiatan 2 yaitu Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal dengan indikator Jumlah Pelaku Usaha Dibidang Metrologi Legal, mempunyai target capaian kinerja 210 Orang dan didukung oleh dana sebesar Rp. 124.461.683,-.

5) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini dilaksanakan dengan indikator Persentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah dan didukung 1 Kegiatan dengan 1 Sub Kegiatan yaitu :

Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan didukung oleh dana sebesar Rp. 141.644.357,-

- Sub Kegiatan yaitu Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dan didukung dana sebesar Rp. 141.644.357,-

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung meliputi :

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perdagangan, Pengelolaan Pasar dan Metrologi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

F u n g s i

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi;

1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Perlunya meningkatkan pemberdayaan konsumen, standarisasi tertib ukur, serta pengawasan dan pengendalian mutu barang dan jasa dalam melindungi konsumen;
2. Semakin meningkatnya animo masyarakat untuk berprofesi sebagai pedagang dalam sektor formal;
3. Belum terbangunnya kesadaran Pedagang Kaki Lima tentang ketertiban dan kebersihan di lingkungan pasar;

4. Terkelolanya PAD dari sektor retribusi pasar yang semakin meningkat;
5. Terlaksananya penataan dan penertiban pedagang kaki lima dibeberapa pasar di Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan secara rutin oleh Tim Terpadu Kota Bandar Lampung maupun oleh Tim Dinas Perdagangan sebagai wujud tugas dan tanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan untuk terciptanya pasar yang tertib, aman dan nyaman;
6. Belum adanya kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan dari pemda.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran Kinerja sasaran melalui tahapan Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.

2. Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus dan pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

3. Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan Sistem Teknologi Informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya, guna mendukung manejemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan.
4. Optimalisasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka perwujudan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Dalam kaitan dengan hal tersebut diatas, Dinas Perdagangan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan 2025-2029 yang memuat visi, misi, nilai-nilai, penilaian dan kajian lingkungan eksternal dan internal, tujuan, sasaran dan faktor kunci keberhasilan, serta strategi keberhasilan dari Tahun 2025 sampai dengan 2029 sebagai upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran di bidang perdagangan.

Perubahan Renja ini disusun untuk lebih mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

Dengan berpedoman dengan Perubahan Renja ini, satuan kerja di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana kerja yang telah ditetapkan ini dapat dengan mudah diukur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan

Dalam rangka mengantisipasi tantangan kondisi yang diharapkan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tidak tertinggal dari kota/kabupaten lainnya. Meningkatnya persaingan tantangan dan tuntutan masyarakat akan sejahtera, adil dan demokrasi tidak akan bisa dihindari. Untuk itu Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mempersiapkan visinya yang dapat dijembatani oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan di Kota Bandar Lampung.

Visi Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

"Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat".

Dinas Perdagangan mengemban Misi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang ke 3 yaitu : ***"Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat"***

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berhubungan dengan Perdagangan, perpasaran, dan kemetrologian akan berupaya seoptimal mungkin guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara professional dengan didukung oleh keinginan segenap Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk selalu melakukan perubahan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Sedangkan **Misi Dinas Perdagangan yaitu :**

1. Meningkatkan dan memperkuat sektor Perdagangan Kota Bandar Lampung;
2. Meningkatkan daya dukung insfrastruktur pembangunan pasar;
3. Meningkatkan pengawasan tertib ukur.

T u j u a n

Sebagai penjabaran dari Misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, yaitu :

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, struktur perekonomian yang kokoh, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat;
2. Mewujudkan kenyamanan bagi pedagang, pembeli pengunjung dan pengguna pasar;
3. Mewujudkan peningkatan dan pengembangan tertib ukur.

S a s a r a n

Sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai pada jangka pendek dengan ditetapkannya sasaran, diiharapkan Tujuan dapat tercapai.

Sasaran Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, sebagai alat ukur tercapainya kinerja Kebijakan dan Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian daerah;
2. Terciptanya pasar tradisional modern yang tertib, bersih dan indah;
3. Terlaksananya Tertib ukur.

S t r a t e g i

Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sektor unggulan dan strategis daerah secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

K e b i j a k a n

Penetapan **Kebijakan** oleh **Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung**, yaitu:

1. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
2. Stabilitas harga pasar;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdagangan;
4. Peningkatan pengawasan barang beredar di pasar;
5. Peningkatan Perdagangan Luar Negeri;
6. Peningkatan perlindungan konsumen;
7. Melaksanakan penataan dan penertiban pedagang di lingkungan pasar;
8. Mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan pasar;
9. Meningkatkan disiplin pedagang kaki lima;
10. Mengadakan Pendataan potensi UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan

masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Wali Kota Bandar Lampung dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang

Perdagangan dituntut untuk menghasilkan kontribusi sub kategori perdagangan.

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kota Bandar Lampung, pada dasarnya kegiatan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung adalah sebagai *"pengarah"* setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya.

Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung pada perubahan anggaran tahun 2025 terdiri dari :

Program Utama

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
3. Program Pengembangan Ekspor
4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUT PUT)	LOKASI	DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
	URUSAN PILIHAN			
	BIDANG URUSAN PERDAGANGAN			
1	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**		
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Bandar Lampung	100.000.000,00
2	Fasilitasi Pengelolahan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolahan Sarana Distribusi Perdagangan	Bandar Lampung	176.250.000,00
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**		
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Disribusi Perdagangan	Bandar Lampung	56.032.915,00
2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Disribusi Perdagangan	Bandar Lampung	81.698.843,00

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUT PUT)	LOKASI	DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
2	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			
	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional**		
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok da Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Bandar Lampung	116.171.086,00
2	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	995.000.000,00
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan**		
	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Promosi Dagang Tingkat Nasional yang di Ikuti**		
1	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang	Bandar Lampung	1.816.888.508,00

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUT PUT)	LOKASI	DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
4	**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang** **Persentase Jumlah UTTP yang Diawasi**		
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	**Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang** **Jumlah UTTP BDKT dan SN yang sudah di awasi** **Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi**		
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan di Tera Ulang	Bandar Lampung	125.538.317,00
2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha Dibidang Metrologi Legal yang Dibina	Bandar Lampung	124.461.683,00
5	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Presentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah**		
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online**		
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Bandar Lampung	106.998.905,00
	JUMLAH ……			**3.699.040.257,00**

Pada Perubahan Renja Tahun 2025 ini, tidak ada kegiatan yang dihilangkan, disamping kegiatan lainnya yang mengalami pergeseran anggaran dikarenakan efisiensi.

Berikut disampaikan Tabel 3.2 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perdagangan dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

EVA DWIANA

LAMPIRAN

Formulir E. 81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d RENJA PERNGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) s.d TRIWULAN I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 s.d TRIWULAN I (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100%		(16) = (14+8)		(17)=(16/7)*100%		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	Sat	RUPIAH	K	RUPIAH
	3. Urusan																													
	3.31 Bidang Perdagangan																													
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan							**Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai Sakip OPD)**																						
		3	**30**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN**																							
		3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**	**Absolut**	**98**	**80,364,871,421.44**	**98**	**10,349,118,941.00**	**98**	**12,485,786,999.00**	**98**	**2,963,371,800.00**	**98**	**-**	**98**	**-**	**98**	**-**	**392**	**2,963,371,800.00**	**400.00**	**23.73**	**490**	**13,312,490,741.00**	**5.00**	**16.57**	**Dinas Perdagangan**
							Kegiatan																							
		3	**30**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas**	**Absolut**	**100**	**171,000,000.00**	**100**	**120,856,949.00**	**100**	**119,136,000.00**	**100**	**29,784,000.00**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**400**	**29,784,000.00**	**400.00**	**25.00**	**500**	**150,640,949.00**	**5.00**	**88.09**	**Dinas Perdagangan**
							Sub Kegiatan																							
		3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Absolut	100	171,000,000.00	12	120,856,949.00	12	119,136,000.00	12	29,784,000.00	12		12		12		**48**	29,784,000.00	400.00	25.00	60	150,640,949.00	0.60	88.09	
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																						
							Kegiatan																							
		3	**30**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntable**	**Absolut**	**100**	**62,913,395,118.92**	**100**	**7,462,357,320.00**	**100**	**8,939,683,699.00**	**100**	**2,435,708,323.00**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**400**	**2,435,708,323.00**	**400.00**	**27.25**	**500**	**9,898,065,643.00**	**5.00**	**15.73**	**Dinas Perdagangan**
							Sub Kegiatan																							
		3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	Absolut	72	62,218,235,118.92	14	7,334,447,320.00	14	8,784,328,699.00	14	2,401,418,323.00	14		14		14		**56**	2,401,418,323.00	400.00	27.34	70	9,735,865,643.00	0.97	15.65	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN																						
		3	30	01	2.02	0003	Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang terfaksana	Absolut	72	695,160,000.00	12	127,910,000.00	12	155,355,000.00	12	34,290,000.00	12		12		12		**48**	34,290,000.00	400.00	22.07	60	162,200,000.00	0.83	23.33	
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																						
							Kegiatan																							
		3	**30**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Absolut**	**100**	**70,000,000.00**	**80**	**13,878,000.00**	**100**	**40,000,000.00**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**400**	**-**	**400.00**	**-**	**480**	**13,878,000.00**	**4.80**	**19.83**	
							Sub Kegiatan																							
		3	30	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Absolut	72	70,000,000.00	4	13,878,000.00	4	40,000,000.00	4	-	4		4		4		4	-	-	-	-	13,878,000.00	-	19.83	
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan																						
							Kegiatan																							
		3	**30**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	**Absolut**	**98**	**1,557,937,651.54**	**98**	**256,905,260.00**	**98**	**368,331,846.00**	**98**	**5,311,780.00**	**98**	**-**	**98**	**-**	**98**	**-**	**392**	**5,311,780.00**	**400.00**	**1.44**	**490**	**262,217,040.00**	**5.00**	**16.83**	**Dinas Perdagangan**
							Sub Kegiatan																							
		3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	Absolut	72	33,055,240.00	12	9,215,000.00	12	9,250,535.00	12	-	12	-	12	-	12		**48**	-	400.00	-	60	9,215,000.00	0.83	27.88	
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																						
		3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Absolut	72	270,172,869.40	12	46,193,550.00	12	54,223,706.00	12	-	12		12		12		**48**	-	400.00	-	60	46,193,550.00	0.83	17.10	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan																						
		3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia	Absolut	72	36,500,000.00	12	17,675,000.00	12	14,305,500.00	12	-	12	-	12	-	12		**48**	-	400.00	-	60	17,675,000.00	0.83	48.42	
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan																						
		3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makan dan Minum Rapat	Absolut	72	148,500,000.00	12	38,000,000.00	12	33,000,000.00	12	-	12		12		12		**48**	-	400.00	-	60	38,000,000.00	0.83	25.59	
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan																						
		3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang tersedia	Absolut	72	732,709,542.14	12	69,007,700.00	12	100,952,105.00	12	-	12		12		12		**48**	-	400.00	-	60	69,007,700.00	0.83	9.42	
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan																						

NO	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d RENJA PERNGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) s.d TRIWULAN I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 s.d TRIWULAN I (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100%		(16) = (14+8)			(17)=(16/7)*100%		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	Sat	RUPIAH	K	RUPIAH
		3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Absolut	72	27,000,000.00	12	4,500,000.00	12	6,600,000.00	12	-	12		12		12		**48**	-	400.00	-	60	4,500,000.00	0.83	16.67	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan																								
		3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Absolut	72	310,000,000.00	1	72,314,010.00	12	150,000,000.00	12	5,311,780.00	12		12		12		**48**	5,311,780.00	400.00	3.54	49	77,625,790.00	0.68	25.04	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordionasi dan Konsultasi SKPD																								
							Kegiatan																								
		3	**30**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Absolut**	**98**	**2,411,765,851.36**	**98**	**325,780,000.00**	**98**	**674,600,000.00**	**98**	**-**	**98**	**-**	**98**	**-**	**98**	**-**	**392**	**-**	**400.00**	**-**		**325,780,000.00**	**0.00**	**13.51**	**Dinas Perdagangan**
							Sub Kegiatan																								
		3	30	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Absolut			5	61,780,000.00	3	230,000,000.00	3	-	3	-	3	-	3										
		3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeulair Kantor	Absolut	72	750,901,735.30	70	81,800,000.00	50	51,200,000.00	50	-	50	-	50	-	50		**0**	-	-	0	70	81,800,000.00	0.97	10.89	
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan																								
		3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Absolut	72	898,887,150.00	3	134,200,000.00	10	297,000,000.00	10	-	10	-	10	-	10			-	-	-	3	134,200,000.00	0.04	14.93	
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan																								
		3	30	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Absolut	72	761,976,966.06	10	48,000,000.00	10	96,400,000.00	10	-	10	-	10	-	10			-	-	-	10	48,000,000.00	0.14	6.30	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																								
							Kegiatan																								
		3	**30**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Absolut**	**98**	**11,674,040,845.81**	**100**	**1,746,976,775.00**	**98**	**1,892,855,454.00**	**98**	**469,027,602.00**	**98**	**-**	**98**	**-**	**98**	**-**	**392**	**469,027,602.00**	**400.00**	**24.78**	**492**	**2,216,004,377.00**	**5.02**	**18.98**	**Dinas Perdagangan**
							Sub Kegiatan																								
		3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Absolut	72	641,665,845.81	12	94,976,775.00	12	164,855,454.00	12	37,027,602.00	12		12		12		**48**	37,027,602.00	400.00	22.46	60	132,004,377.00	0.83	20.57	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																								
		3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak Yang Tersedia	Absolut	72	11,032,375,000.00	12	1,652,000,000.00	12	1,728,000,000.00	12	432,000,000.00	12		12		12		**48**	432,000,000.00	400.00	25.00	60	2,084,000,000.00	0.83	18.89	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan																								
							Kegiatan																								
		3	**30**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Absolut**	**98**	**1,566,731,953.81**	**98**	**422,364,637.00**	**98**	**451,180,000.00**	**98**	**23,540,095.00**	**98**	**-**	**98**	**-**	**98**	**-**	**392**	**23,540,095.00**	**400.00**	**5.22**	**490**	**445,904,732.00**	**5.00**	**28.46**	**Dinas Perdagangan**
							Sub Kegiatan																								
		3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terpelihara	Absolut	72	301,903,406.53	1	57,694,655.00	1	40,670,000.00	1	4,826,800.00	1		1		1		**4**	4,826,800.00	400.00	11.87	5	62,521,455.00	0.07	20.71	
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																								
		3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional Yang Terpelihara	Absolut	72	1,193,884,872.28	11	190,667,482.00	15	284,320,000.00	15	18,713,295.00	15		15		15			18,713,295.00	-	6.58	11	209,380,777.00	0.15	17.54	
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																								
		3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Absolut	72	37,409,875.00	14	14,075,000.00	15	17,040,000.00	15	-	15	-	15		15		**60**	-			74	14,075,000.00	1.03	37.62	
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara																								
		3	30	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Absolut	72	33,533,800.00	16	159,927,500.00	15	109,150,000.00	15	-	15	-	15		15		**60**	-	400.00	-	76	159,927,500.00	1.06	476.91	
																									Rata-Rata Capaian Kinerja	336.00	9.89			2	42	
																									Predikat Kinerja	ST	SR			SR	SR	
Meningkatnya Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting								**Persentase Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha Pasar Tradisional**																-	-	-	0	-		-	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara																-	-	-	0	-		-	

NO	SASARAN	KODE REKENING (URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d RENJA PERNGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) s.d TRIWULAN I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 s.d TRIWULAN I (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												I		II		III		IV												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100%		(16) = (14+8)			(17)=(16/7)*100%		(18)
						K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	Sat	RUPIAH	K	RUPIAH
		3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Jumlah Pasar Yang Ditata	Absolut	80	1,103,375,000.00	20	588,121,162.00	20	436,306,112.00		-		-		-		-	0	-	-	-	20	588,121,162.00		53.30	Dinas Perdagangan
			Kegiatan																	0	-			0	-			
		3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Dsitribusi Perdagangan	Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Absolut	80	863,375,000.00		442,163,162.00		250,000,000.00		-		-		-		-	0	-	-	-	0	442,163,162.00	0.00	-	
			Sub Kegiatan																										
		3 30 03 2.01 0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Yang Ditata	Kumulatif	2	653,375,000.00	1	-	2		2	-	2	-	2	-	2	-	8	-	400.00	-	9	-	4.50	-	
		3 30 03 2.01 0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terdata dan Terfasilitasinya Pengelolaan Saarana Distrbusi Perdagangan di Lingkingan UPT Pasar	Kumulatif	7	210,000,000.00	1	442,163,162.00	3	250,000,000.00	3	-	3		3		3		12	-	400.00	-	13	442,163,162.00	1.86	-	
				Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																								
			Kegiatan																									
		3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Meningkatnya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kumulatif	20	240,000,000.00	3	145,958,000.00	3	186,306,112.00	3	-	3	-	3	-	3	-									
			Sub Kegiatan																										
		3 30 03 2.02 0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Toko/Pasar Modern dan Gudang Bahan Pokok Sebagai Sarana Distribusi Perdagangan	Kumulatif	20	240,000,000.00	1	43,466,500.00	1	76,806,112.00	1	-	1		1		1		4	-	400.00	-	5	43,466,500.00	0.25	-	
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																								
		3 30 03 2.02 0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kumulatif		-	1	102,491,500.00	1	109,500,000.00	10	-	10	-	10		10		40	-	4,000.00	-	41	102,491,500.00	0.00	-	
																					Rata-Rata Capaian Kinerja	240.00	-			1.65	10.66	
																					Predikat Kinerja	ST	SR			SR	SR	
		3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting	Absolut	16	2,683,694,700.17	17	710,638,500.00	16	1,149,521,086.00	16	334,928,000.00	16	-	16	-	16	-		334,928,000.00	-	29.14	17	1,045,566,500.00	1.06	38.96	Dinas Perdagangan
			Kegiatan								-										-			0	-			
		3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisonal	Kumulatif	9	2,683,694,700.17	9	710,638,500.00	9	1,149,521,086.00	9	334,928,000.00	9	-	9	-	9	-		334,928,000.00	-	29.14	9	1,045,566,500.00	1.00	38.96	
			Sub Kegiatan								-																		
		3 30 04 2.02 0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintergrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Publikasi Perkembangan Harga Pasar	Kumulatif	9	480,000,000.00	1	146,363,300.00	1	154,521,086.00	1	2,420,000.00	1		1		1			2,420,000.00	-	157	1	148,783,300.00	0.11	31.00	
				Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegritasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																								
		3 30 04 2.02 0003	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	Kumulatif	3	2,203,694,700.17	1	564,275,200.00	1	995,000,000.00	1	332,508,000.00	1		1		1			332,508,000.00	-	33.42	1	896,783,200.00	0.33	40.69	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																								
			Kegiatan																									
		3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Laporan Realisasi Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																								
			Sub Kegiatan																									
		3 30 04 2.03 0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Tersedianya Laporan Realisasi Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi					-				-															
																					Rata-Rata Capaian Kinerja	-	23.31			0.63	37.40	
																					Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
		3 30 06	PROGRAM STANDARISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/ Tera Ulang	Absolut	87.3	884,248,665.63	86.8	127,123,908.00	87	250,000,000.00	87	4,840,000.00	87	-	87	-	87	-		4,840,000.00	-	1.94	86.8	131,963,908.00	0.99	14.92	Dinas Perdagangan
				Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi	Absolut	87.3		86.8		87		87		87		87		87										
			Kegiatan																									
		3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang	Absolut	87.3	884,248,665.63	2100	127,123,908.00	2100	250,000,000.00	2100	4,840,000.00	2100	-	2100	-	2100	-		4,840,000.00	-	1.94	2100	131,963,908.00	24.05	14.92	Dinas Perdagangan
				Jumlah UTTP BDKT dan SN yang sudah di awasi	Absolut	87.3		1100		1100		1100		1100	-	1100	-	1100	-									
				Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi	Kumulatif	16		3		4		4		4		4		4										
			Sub Kegiatan																									
		3 30 06 2.01 0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang	Kumulatif	87.3	502,949,915.63	2100	73,040,908.00	2100	125,538,317.00	2100	2,420,000.00	2100		2100		2100			2,420,000.00	-	1.93	2100	75,460,908.00	24.05	15.00	

NO	SASARAN	KODE REKENING (URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d RENJA PERNGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) s.d TRIWULAN I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 s.d TRIWULAN I (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100%		(16) = (14+8)			(17)=(16/7)*100%		(18)
						K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	Sat	RUPIAH	K	RUPIAH
				Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang																									
		3 30 06 2.01 0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang DI awasi	Kumulatif	87.3	381,298,750.00	190	54,083,000	210	124,461,683.00	210	2,420,000	210		210		210			2,420,000.00	-	1.94	190	56,503,000.00	2.18	14.82	
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina																									
		3 30 06 2.01 0003	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi	Kumulatif	16	-		-				-																
																				Rata-Rata Capaian Kinerja		-	1.94			16.76	14.92	
																				Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
		3 30 05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan**	**Absolut**	**100**	**3,740,031,759.95**	**80**	**431,081,962.00**	**100**	**1,816,888,508.00**	**100**	**3,820,000.00**	**100**	-	**100**	-	**100**	-		**3,820,000.00**	**-**	**0.21**	**80**	**434,901,962.00**	**0.80**	**11.63**	**Dinas Perdagangan**
			Kegiatan																										
		3 30 05 2.01	**Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti**	**Kumulatif**	**5**	**3,740,031,759.95**	**5**	**431,081,962.00**	**5**	**1,816,888,508.00**	**5**	**3,820,000.00**	**5**	-	**5**	-	**5**	-		**3,820,000.00**	**-**	**0.21**	**5**	**434,901,962.00**	**1.00**	**11.63**	**Dinas Perdagangan**
			Sub Kegiatan																										
		3 30 05 2.01 0001	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Terciptanya Produk Unggulan Sap Ekspor	Kumulatif	5			-				-								-	-	-	**0**	-	**0.00**	-	
		3 30 05 2.01 0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Kegiatan Promosi Dagang/Tingkat Nasional Yang di ikuti	Kumulatif	5	3,740,031,759.95	**5**	431,081,962	5	1,816,888,508.00	5	3,820,000	5		5		5			3,820,000.00	-	0.21	5	434,901,962.00	1.00	11.63	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang																									
		3 30 07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah**	**Absolut**	**85**	**450,000,000.00**	**65**	**118,251,000.00**	**70**	**141,644,357.00**	**70**	**-**	**70**	-	**70**	-	**70**	-		**-**	-	-		**118,251,000.00**	0.00	26.28	
			Kegiatan																										
		3 30 07 2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online**	Kumulatif		**450,000,000.00**	**20**	**118,251,000.00**	**20**	**141,644,357.00**		**-**		-		-		-		**-**	-	-		**118,251,000.00**	0.00	26.28	
			Sub Kegiatan																										
		3 30 07 2.01 0003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sisyem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Absolut		472,875,000.00			1		**1**		**1**		**1**		**1**										
		3 30 07 2.01 0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pangsa Psar Produk UMKM	Absolut	72	450,000,000.00	20	118,251,000.00	20	141,644,357.00	20	-	20		20		20			-	-	-		118,251,000.00	0.00	26.28	
				Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi																									
																				Rata-Rata Capaian Kinerja		-	7.46			4.35	22.08	
																				Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							16,280,147,062.00		3,306,959,800.00		-		-		-										
				TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM.....)																		324	9.94				6.42	43.32	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM.....)																		ST	SR				SR	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:	

Bandar Lampung, Juli 2025
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG



WILSON FAISOL, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700323 198903 1 001

TABEL 3.2

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	**30**				**PERDAGANGAN**									**15,316,503,624.00**	**16,607,303,174.00**	**16,090,551,668.00**	
					DINAS PERDAGANGAN									**15,316,503,624.00**	**16,607,303,174.00**	**16,090,551,668.00**	
3	**30**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**	**Persen**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**12,895,689,069.00**	**12,812,943,111.00**	**12,391,511,411.00**	**Dinas Perdagangan**
3	**30**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**103,944,000.00**	**119,136,000.00**	**119,136,000.00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	103,944,000.00	119,136,000.00	119,136,000.00	Dinas Perdagangan
3	**30**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**9,622,645,092.00**	**8,939,683,699.00**	**8,939,683,699.00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	95 Orang/Bulan	95 Orang/Bulan	95 Orang/Bulan	9,441,025,092.00	8,784,328,699.00	8,784,328,699.00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	181,620,000.00	155,355,000.00	155,355,000.00	Dinas Perdagangan
3	**30**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**20,000,000.00**	**40,000,000.00**	**20,000,000.00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.95	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	4	4	4	20,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00	Dinas Perdagangan
3	**30**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**329,137,897.00**	**368,331,846.00**	**333,331,846.00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9,495,968.00	9,250,535.00	9,250,535.00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	40,205,375.00	54,223,706.00	49,223,706.00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12,680,915.00	14,305,500.00	14,305,500.00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	102,366,256.00	100,952,105.00	100,952,105.00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	4,500,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	126,889,383.00	150,000,000.00	120,000,000.00	Dinas Perdagangan
3	**30**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**400,720,000.00**	**674,600,000.00**	**601,600,000.00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	-	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	63,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	70 Unit	70 Unit	70 Unit	88,000,000.00	51,200,000.00	51,200,000.00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	142,000,000.00	297,000,000.00	224,000,000.00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	107,720,000.00	96,400,000.00	96,400,000.00	Dinas Perdagangan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	30	01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**1,879,643,279.00**	**1,892,855,454.00**	**1,964,855,454.00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	103,643,279.00	164,855,454.00	164,855,454.00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,776,000,000.00	1,728,000,000.00	1,800,000,000.00	Dinas Perdagangan
3	**30**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**539,598,801.00**	**778,336,112.00**	**412,904,412.00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	74,430,000.00	40,670,000.00	40,670,000.00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	272,130,000.00	284,320,000.00	284,320,000.00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	15 Unit	14 Unit	14 Unit	17,040,000.00	17,040,000.00	17,040,000.00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	15 Unit	16 Unit	16 Unit	175,998,801.00	436,306,112.00	70,874,412.00	Dinas Perdagangan
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PENTING**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PENTING**	**Presentase Jumlah Pasar Yang Ditata**	**Presentase Jumlah Pasar Yang Ditata**	**Persen**	**Persen**	**20**	**20**	**20**	**430,409,943.00**	**436,306,112.00**	**413,981,758.00**	**Dinas Perdagangan**
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persen**	**Persen**	**1 Pasar**	**1 Pasar**	**1 Pasar**	**250,000,000.00**	**250,000,000.00**	**276,250,000.00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	Unit	1 Unit	-	-	-	-	100,000,000.00	Dinas Perdagangan
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	250,000,000.00	250,000,000.00	176,250,000.00	Dinas Perdagangan
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**	**Kelompok Pelaku Usaha**	**Kelompok Pelaku Usaha**	**3 Pelaku Usaha**	**3 Pelaku Usaha**	**3 Pelaku Usaha**	**180,409,943.00**	**186,306,112.00**	**137,731,758.00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	04	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	70,909,943.00	76,806,112.00	56,032,915.00	Dinas Perdagangan
3	30	04	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	109,500,000.00	109,500,000.00	81,698,843.00	Dinas Perdagangan
3	**30**	**04**			**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting**	**Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting**	**Persen**	**Persen**	**16.00**	**16.00**	**16.00**	**1,154,537,726.00**	**1,149,521,086.00**	**1,111,171,086.00**	**Dinas Perdagangan**
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional**	**Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional**	**Pasar**	**Pasar**	**9 Pasar**	**9 Pasar**	**9 Pasar**	**1,154,537,726.00**	**1,149,521,086.00**	**1,111,171,086.00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintergrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintergrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	154,537,726.00	154,521,086.00	116,171,086.00	Dinas Perdagangan
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,000,000,000.00	995,000,000.00	995,000,000.00	Dinas Perdagangan
3	**30**	**05**			**Program Pengembangan Ekspor**	**Program Pengembangan Ekspor**	**Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan**	**Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan**	**Persen**	**Persen**	**60.00**	**60.00**	**60.00**	**494,207,797.00**	**1,816,888,508.00**	**1,816,888,508.00**	**Dinas Perdagangan**
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti**	**Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti**	**Kali**	**Kali**	**5 Kali**	**5 Kali**	**5 Kali**	**494,207,797.00**	**1,816,888,508.00**	**1,816,888,508.00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	494,207,797.00	1,816,888,508.00	1,816,888,508.00	Dinas Perdagangan
3	**30**	**06**			**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang**	**Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang**	**Persen**	**Persen**	**87.00**	**87.00**	**87.00**				**Dinas Perdagangan**
							Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi	**Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi**	**Persen**	**Persen**	**87.00**	**87.00**	**87.00**	**200,014,492.00**	**250,000,000.00**	**250,000,000.00**	
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang**	**Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang**	**UTTP**	**UTTP**	**2100 UTTP**	**2100 UTTP**	**2100 UTTP**	**200,014,492.00**	**250,000,000.00**	**250,000,000.00**	**Dinas Perdagangan**
							Jumlah UTTP BDKT dan SN yang sudah diawasi	**Jumlah UTTP BDKT dan SN yang sudah diawasi**	**UTTP**	**UTTP**	**1100 UTTP**	**1100 UTTP**	**1100 UTTP**				
							Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi	**Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi**	**Kasus**	**Kasus**	**3 Kasus**	**3 Kasus**	**3 Kasus**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	Unit	2100 Unit	2100 Unit	2100 Unit	100,000,000.00	125,538,317.00	125,538,317.00	Dinas Perdagangan
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	Orang	190 Orang	190 Orang	190 Orang	100,014,492.00	124,461,683.00	124,461,683.00	Dinas Perdagangan
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah**	**Persentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah**	**Persen**	**Persen**	**65.00**	**65.00**	**65.00**	**141,644,597.00**	**141,644,357.00**	**106,998,905.00**	**Dinas Perdagangan**
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online**	**Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online**	**UMKM**	**UMKM**	**20 UMKM**	**20 UMKM**	**20 UMKM**	**141,644,597.00**	**141,644,357.00**	**106,998,905.00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	UMKM	20 UMKM	20 UMKM	20 UMKM	141,644,597.00	141,644,357.00	106,998,905.00	Dinas Perdagangan
3	30	07	2.01	0003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	Dinas Perdagangan

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,

WILSON FAISOL, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700323 198903 1 001

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025
Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 (APBD KOTA)
Kota Bandar Lampung

DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						NON URUSAN								
3	**30**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan***		**98%**	**12,391,511,411.00**			**98%**	**13,142,208,614.52**
3	**30**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas***		**100%**	**119,136,000.00**			**100%**	**369,136,000.00**
						Sub Kegiatan :								
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	4 Dokumen	-	APBD Kota	-	4 Dokumen	50,000,000.00
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bandar Lampung	1 Dokumen	-	APBD Kota	-	1 Dokumen	50,000,000.00
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bandar Lampung	1 Dokumen	-	APBD Kota	-	1 Dokumen	50,000,000.00
					04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bandar Lampung	1 Dokumen	-	APBD Kota	-	1 Dokumen	50,000,000.00
					05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bandar Lampung	1 Dokumen	-	APBD Kota	-	1 Dokumen	50,000,000.00
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bandar Lampung	9 Laporan	119,136,000.00	APBD Kota	-	9 Laporan	119,136,000.00
3	**30**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel***		**100%**	**8,939,683,699.00**			**100%**	**9,226,789,100.00**
						Sub Kegiatan :								
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bandar Lampung	95 Orang/Bulan	8,784,328,699.00	APBD Kota		95 Orang/Bulan	9,066,434,100.00
					03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bandar Lampung	12 Dokumen	155,355,000.00	APBD Kota	-	12 Dokumen	160,355,000.00
3	**30**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***		**100%**	**20,000,000.00**		-	**100%**	**45,000,000.00**
						Sub Kegiatan :								
					09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bandar Lampung	5 Orang	20,000,000.00	APBD Kota	-	5 Orang	45,000,000.00
3	**30**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD***		**98%**	**333,331,846.00**			**98%**	**379,998,060.52**
						Sub Kegiatan :								
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bandar Lampung	1 Paket	9,250,535.00	APBD Kota	-	1 Paket	9,250,535.00
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bandar Lampung	1 Paket	49,223,706.00	APBD Kota	-	1 Paket	63,889,920.52

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
					03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bandar Lampung	1 Paket	14,305,500.00	APBD Kota	-	1 Paket	14,305,500.00
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bandar Lampung	1 Paket	33,000,000.00	APBD Kota	-	1 Paket	33,000,000.00
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	Bandar Lampung	1 Paket	100,952,105.00	APBD Kota	-	1 Paket	100,952,105.00
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Bandar Lampung	1 Dokumen	6,600,000.00	APBD Kota	-	1 Dokumen	6,600,000.00
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordionasi dan Konsultasi SKPD	Bandar Lampung	1 Laporan	120,000,000.00	APBD Kota	-	1 Laporan	152,000,000.00
3	**30**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor***		**98%**	**601,600,000.00**			**98%**	**684,400,000.00**
						Sub Kegiatan :								
					01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Bandar Lampung	1 Unit	-	APBD Kota	-	-	-
					02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bandar Lampung	1 Unit	230,000,000.00	APBD Kota	-	1 Unit	235,000,000.00
					05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bandar Lampung	1 Paket	51,200,000.00	APBD Kota	-	1 Paket	51,200,000.00
					06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bandar Lampung	10 Unit	224,000,000.00	APBD Kota	-	10 Unit	300,000,000.00
					11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bandar Lampung	10 Unit	96,400,000.00	APBD Kota	-	10 Unit	98,200,000.00
3	**30**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD***		**98%**	**1,964,855,454.00**			**98%**	**1,964,855,454.00**
						Sub Kegiatan :								
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bandar Lampung	12 Laporan	164,855,454.00	APBD Kota	-	12 Laporan	164,855,454.00
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bandar Lampung	12 Laporan	1,800,000,000.00	APBD Kota	-	12 Laporan	1,800,000,000.00
3	**30**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Inventaris Kantor yang Terpelihara***		**98%**	**412,904,412.00**			**98%**	**472,030,000.00**
						Sub Kegiatan :								
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bandar Lampung	1 Unit	40,670,000.00	APBD Kota	-	1 Unit	40,670,000.00
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bandar Lampung	25 Unit	284,320,000.00	APBD Kota	-	25 Unit	284,320,000.00
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bandar Lampung	5 Unit	17,040,000.00	APBD Kota	-	5 Unit	17,040,000.00
					11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Bandar Lampung	1 Unit	70,874,412.00	APBD Kota	-	1 Unit	130,000,000.00
							JUMLAH NON URUSAN			**12,391,511,411.00**				**13,142,208,614.52**
						URUSAN PILIHAN								
						BIDANG PERDAGANGAN								
3	**30**	**3**				**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Presentase Sarana Perdagangan yang di Tingkatkan Kualitasnya***		**95%**	**413,981,758.00**			**95%**	**452,698,132.63**

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**30**	**3**	**2**	**1**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	***Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan***		**2 Unit**	**276,250,000.00**			**2 Unit**	**250,000,000.00**
						Sub Kegiatan :								
					01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Bandar Lampung	1 Unit	100,000,000.00	APBD Kota	-	1 Unit	-
					02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Bandar Lampung	1 Unit	176,250,000.00	APBD Kota	-	1 Unit	250,000,000.00
3	**30**	**04**	**2**	**02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	***Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan***		**3 Pelaku Usaha**	**137,731,758.00**			**3 Pelaku Usaha**	**202,698,132.63**
						Sub Kegiatan :								
					01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Bandar Lampung	1 Dokumen	56,032,915.00	APBD Kota	-	1 Dokumen	93,198,132.63
					02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Bandar Lampung	1 Dokumen	81,698,843.00	APBD Kota	-	1 Dokumen	109,500,000.00
3	**30**	**04**				**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase Stabilitas Harga Barang Pokok dan Bahan Penting***		**95%**	**1,111,171,086.00**			**95%**	**1,192,708,593.21**
3	**30**	**04**	**2**	**02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	***Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional***		**9 Pasar**	**1,111,171,086.00**			**9 Pasar**	**1,192,708,593.21**
						Sub Kegiatan :								
					02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegritasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Bandar Lampung	1 Laporan	116,171,086.00	APBD Kota	-	1 Laporan	192,708,593.21
					03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	1 Laporan	995,000,000.00	APBD Kota	-	1 Laporan	1,000,000,000.00
3	**30**	**05**				**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan***		**2 Unit Usaha**	**1,816,888,508.00**			**100%**	**3,623,008,134.25**
3	**30**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Promosi Dagang Tingkat Nasional yang diikuti***		**5 Kali**	**1,816,888,508.00**			**5 Kali**	**3,623,008,134.25**
						Sub Kegiatan :								
					02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Bandar Lampung	5 Pelaku Usaha	1,816,888,508.00	APBD Kota	-	5 Pelaku Usaha	3,623,008,134.25
3	**30**	**06**				**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen***		**87%**	**250,000,000.00**			**87.0%**	**259,392,500.00**
3	**30**	**06**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	***Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang***		**2100 UTTP**	**250,000,000.00**			**2100 UTTP**	**259,392,500.00**
							Jumlah UTTP BDKT dan SN yang Sudah Diawasi		**1100 UTTP**				**1100 UTTP**	
						Sub Kegiatan :								
					01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Bandar Lampung	2100 UTTP	125,538,317.00	APBD Kota	-	2100 UTTP	100,000,000.00

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
					02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Bandar Lampung	210 Orang	124,461,683.00	APBD Kota	-	210 Orang	100,000,000.00
					03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Bandar Lampung			APBD Kota		3 Unit	59,392,500.00
3	**30**	**07**				**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Persentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah***		**70%**	**106,998,905.00**			**70%**	**146,965,935.49**
3	**30**	**07**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	***Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online***		**20 UMKM**	**106,998,905.00**			**20 UMKM**	**146,965,935.49**
						Sub Kegiatan :								
					06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Bandar Lampung	20 UMKM	106,998,905.00	APBD Kota	-	20 UMKM	146,965,935.49
JUMLAH URUSAN PERDAGANGAN										**3,699,040,257.00**	**-**	**-**		**5,674,773,295.58**
JUMLAH TOTAL NON URUSAN + URUSAN PERDAGANGAN										**16,090,551,668.00**	**-**	**-**		**18,816,981,910.10**

Bandar Lampung, Juli 2025

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,

WIWIN FARIDIS, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700218 199303 2 002



RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS PERINDUSTRIAN TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN				
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN				
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH				
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	√			
4	BAB IV	PENUTUP				

Bandar Lampung, Juli 2025

Kepala Dinas Perindustrian
Kota Bandar Lampung

Dra. Dedeh Ernawati Fauzie., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690521 199304 2 001

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	Dr. Rein Susinda Hesty, S.Sos., M.Si	
	Kepala Bidang Ekonomi dan SDA	
2	Hari Subagiyo, S.T., M.Si	

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida,

Dini Purnamawaty,S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP197002181993032002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan.	√			
4.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masingPerangkat Daerah sesuai surat edaranwalikota.	√			
5.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah	√			
6.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.		√	Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025

Kepala Dinas Perindustrian
Kota Bandar Lampung

Dra. Dedeh Ernawati Fauzie., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690521 199304 2 001

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	Dr. Rein Susinda Hesty, S.Sos., M.Si	
	Kepala Bidang Ekonomi dan SDA	
2	Hari Subagiyo, S.T., M.Si	

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida,

Dini Purnamawaty, S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP197002181993032002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi RenjaPerangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, Juli 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida,

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	Dr. Rein Susinda Hesty, S.Sos., M.Si	
	Kepala Bidang Ekonomi dan SDA	
2	Hari Subagiyo, S.T., M.Si	

Dini Purnamawaty,S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP197002181993032002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR		.....	i
DAFTAR ISI		.....	ii
BAB I	**PENDAHULUAN**	.....	1
	1.1 Latar Belakang	.....	1
	1.2 Landasan Hukum	.....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	.....	5
	1.4 Sistematika Penulisan	.....	6
BAB II	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN**.....		7
	2.1 Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan / Tahun 2025.....		7
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....**		10
BAB IV	**PENUTUP**.....		12

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Dinas Perindustrian yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;
b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusun Renja Dinas Perindustrian Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041;
11. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
12. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor /IV.01/HK/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi terhadap Renja Perangkat Derah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan / Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan. Pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan Realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan

URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

Urusan pilihan yang dilaksanakan yaitu: ***BidangPerindustrian***

2.1.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Program dan kegiatan di Dinas Perindustrian Tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) Program 9 (Sembilan) Kegiatan serta 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan total anggaran *Rp. 6.044.542.883,00* dengan.rincian :

Program pendukung sebanyak 1 (satu) program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan 20 (dua puluh) sub kegiatan anggaran Rp.3.752.844.487,00

Program pokok sebanyak 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) sub kegiatan anggaran Rp. 2.291.698.396,00

Target dan Perkiraan Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian Target Kinerja 98 % dengan Anggaran Rp. 3.752.844.487,00

2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator :

1. Pertumbuhan IKM Target 3.75 %
2. Cakupan IKM yang mendapatkan pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (incremental) target 12,91 %
3. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin target 27.27 %

Kegiatan :

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja adalah Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Pembangunan Industri

Target Kinerja 91 % dengan Anggaran Rp. 2.172.134.933,00

Sub Kegiatan :

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat indikator sub kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan Anggaran Rp. 2.172.134.933,00 target 1 (satu) Dokumen dengan Realisasi Kinerja 1 (satu) Dokumen.

3. **Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**

Indikator Kinerja adalah Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Manengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait. Target Kinerja 3,75 % dengan Anggaran Rp. 119.563.463,00

Kegiatan :

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Kegiatan adalah Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) Kecil dan IUI menegah yang diterbitkan Target Indikator 2024: 3,75% dengan Anggaran Rp.119.563.463,00

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota indikator sub kegiatan Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri, dalam lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp.119.563.463,00 target 1 (satu) Dokumen dengan Realisasi Kinerja 1 (satu) Dokumen.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Tahun berjalan (Tahun 2025) Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB III

RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Prioritas Tahun 2025 adalah Sebagai Berikut :

1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
	Kegiatan
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
	Kegiatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4	Pelaksanaan Panata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD
	Kegiatan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Kegiatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	Kegiatan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan
14	Pengadaan Mebel
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Kegiatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**
	Kegiatan
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan
21	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
3	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**
	Kegiatan
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

(Rincian lebih jelas dapat dilihat pada matrik Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :)

TABEL 5.1

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						DINAS PERINDUSTRIAN									**5.349.278.183,00**	**6.044.542.883,00**	**5.816.448.820,00**	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								**5.349.278.183,00**	**6.044.542.883,00**	**5.816.448.820,00**	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								**5.349.278.183,00**	**6.044.542.883,00**	**5.816.448.820,00**	
123	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	persen	persen	98	98	98	3.784.278.183,00	3.752.844.487,00	3.706.328.657,00	
	3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasikinerja perangkat daerah yang berkualiatas	persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasikinerja perangkat daerah yang berkualiatas	-	-	-			33.943.283,00	33.951.223,00	33.951.223,00	
	3	31	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	8.412.758,00	8.591.412,00	8.591.412,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3	3	3	25.530.525,00	25.359.811,00	25.359.811,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntable	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntable	-	-	-			2.711.506.108,00	2.693.156.915,00	2.676.106.915,00	
	3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang/bulan	20	20	20	2.585.278.183,00	2.534.542.883,00	2.534.542.883,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	118.700.000,00	151.004.550,00	133.954.550,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	12	12	12	7.527.925,00	7.609.482,00	7.609.482,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-			8.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
	3	31	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	2	2	2	8.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional (OPD)	persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional (OPD)	-	-	-			192.130.104,00	209.355.121,00	203.690.555,00	
	3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.209.296,00	19.947.737,00	19.947.737,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	33.247.151,00	41.870.676,00	38.227.213,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.660.736,00	5.790.690,00	5.790.690,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

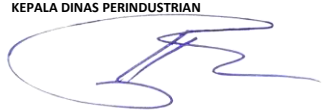
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	35.972.890,00	38.838.068,00	33.058.456,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	97.640.031,00	87.507.950,00	93.766.459,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	-	-	-			289.318.688,00	159.831.228,00	129.359.964,00	
	3	31	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	3	0	0	170.000.000,00	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	paket	6	6	6	64.318.688,00	16.882.400,00	16.882.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	paket	paket	5	5	5	55.000.000,00	142.948.828,00	112.477.564,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemenuhan jasa penujnjang kebutuhan OPD	pemenuhan jasa penujnjang kebutuhan OPD	persen	persen	100	100	100	478.000.000,00	576.000.000,00	554.000.000,00	
	3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	bulan	12	12	12	82.000.000,00	84.000.000,00	62.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
					4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	bulan	bulan	12	12	12	396.000.000,00	492.000.000,00	492.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	inventaris kantor yang terpelihara	inventaris kantor yang terpelihara	persen	persen	98	98	98	71.380.000,00	70.550.000,00	104.220.000,00	
	3	31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	3	3	3	54.770.000,00	48.370.000,00	82.040.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	8	8	8	4.950.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	11.660.000,00	13.660.000,00	13.660.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
124	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	persen	persen	2,77	2,77	2,77	1.436.000.000,00	2.172.134.933,00	2.000.806.700,00	
								Cakupan IKM yang mendapatkan Pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (incremental)	Cakupan IKM yang mendapatkan Pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (incremental)	persen	persen	12,91	12,91	12,91				
								Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	persen	persen	27,27	27,27	27,27				
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Pembangunan Industri	persen	persen	91	91	91	1.436.000.000,00	2.172.134.933,00	2.000.806.700,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat											
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.436.000.000,00	2.172.134.933,00	2.000.806.700,00	DINAS PERINDUSTRIAN
125	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait Persentase jumlah hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang di keluarkan oleh Instansi Terkait	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait Persentase jumlah hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang di keluarkan oleh Instansi Terkait	persen	persen	66,67	66,67	66,67	129.000.000,00	119.563.463,00	109.313.463,00	
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) Kecil dan IUI menegah yang diterbitkan	Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) Kecil dan IUI menegah yang diterbitkan	persen	persen	80,95	80,95	80,95	129.000.000,00	119.563.463,00	109.313.463,00	
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	Dokumen	1	1	1	129.000.000,00	119.563.463,00	109.313.463,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	J U M L A H													

Bandar Lampung, 2025
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN



Dra. Dedeh Ernawati Fauzie., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690521 199304 2 001

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Perubahan Renja Dinas Perindustrian adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian.

Perubahan Renja Dinas Perindustrian menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

PERUBAHAN RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA TA.2025 PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN				
	1.1	Latar Belakang				
	1.2	Landasan Hukum				
	1.3	Maksud dan Tujuan				
	1.4	Sistematika Penulisan				
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN				
		Formulir E.81				
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH				
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	BAB IV	PENUTUP				

Bandar Lampung, Juli 2025

Sekretaris Daerah
Kota Bandar Lampung,

IWAN GUNAWAN, SP.MA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680623 199703 1 00 3.

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda	
	Dra. Rr. Diah Sulistiorin,M.Si. NIP. 19690801 199303 2 009	
2	JF Perencana Ahli Muda Bappeda	
	DIONA MARTINALOVA, S.Pi., MM. NIP. 19820322 200604 2 008	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,SE., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA TA.2025 PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan.				
4.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masingPerangkat Daerah sesuai surat edaranwalikota.				
5.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah				
6.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.		√	Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025

Sekretaris Daerah
Kota Bandar Lampung,

IWAN GUNAWAN, SP.MA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680623 199703 1 00 3.

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda	
	Dra. Rr. Diah Sulistiorin,M.Si. NIP. 19690801 199303 2 009	
2	JF Perencana Ahli Muda Bappeda	
	DIONA MARTINALOVA, S.Pi., MM. NIP. 19820322 200604 2 008	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,SE., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA TA.2025 PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi RenjaPerangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda	
	Dra. Rr. Diah Sulistiorin,M.Si. NIP. 19690801 199303 2 009	
2	JF Perencana Ahli Muda Bappeda	
	DIONA MARTINALOVA, S.Pi., MM. NIP. 19820322 200604 2 008	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,SE., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR VERIFIKASI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN **I**

1. Latar Belakang 1
2. Landasan Hukum 4
3. Maksud dan Tujuan 7
4. Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I **II**

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH III

BAB IV PENUTUP **IV**

LAMPIRAN 28
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616/IV.01/HK/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Walikota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : ***"BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT"***

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah dalam hal pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah,pengoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah,serta pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah. Dengan demikian Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-6 (enam) dalam RPJMD Tahun 2021–2026 yaitu ***Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Berorientasi Kemitraan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa dan Bertanggung Jawab untuk Mendukung Investasi.*** Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, pada Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor xx Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor.vv);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024);
17. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota.
2. Sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025.
3. Sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2025.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan Rencana Strategis Sekretariat tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggunjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung selama Tahun 2025

Untuk hasil Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, meliputi 3 (tiga) program yang terdiri dari :

a. Program Administrasi Umum :
   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kota tahun 2025 target anggaran Murni sebesar Rp. 122.993.116.778,- pada triwulan I 2025 ini baru terealisasi sebesar Rp. 42.738.924.561,- atau 34,75%.
b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :
   Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2025 target anggaranya sebesar Rp. 40.024.733.548,- dan pada triwulan I tahun 2025 sudah terealisasi sebesar Rp.

24.878.670.075,- atau 62,16%.

c. Program Perekonomian dan Pembangunan.

Program Perekonomian dan Pembangunan Pada tahun anggaran 2025 target anggaran sebesar Rp. 2.747.986.754,- dan pada triwulan ke I tahun 2025 sudah terealisasi sebesar Rp.505.089.500,- atau 18,38%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel TC. E81 mengenai Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

FORMULIR E. 81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG
RENJA SEKRETARIAT KOTA BANDAR LAMPUNG
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025(%)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Lokasi
												I		II		III		IV												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)= 10+11+12+13				(16)=(14+8)		(17) = (16/7)*100%		(18)	(18)
						K	RUPIAH	K	Rp	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
		4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH																										
		4 01	SEKRETARIAT DAERAH				562.934.477.193,29		221.452.904.855,00		165.765.837.080,00		42.738.924.561,00		-		-		-		42.738.924.561,00		-		-				
2		4 01 03	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum	Persen	100		100		100		25		25		25		25		100		100		200		200			
				Presentase Penyusunan DOKUMEN Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tepat Waktu	Persen	100		100		100		25		25		25		25		100		100		200		200			
				Presentase OPD Yang Mengumpulkan Laporan Kinerja (LAKIP) Secara Tepat Waktu dan Lengkap	Persen	100	501.174.730.691,98	100	136.551.618.831,00	100	122.993.116.778,00	25	17.355.164.986,00	25	-	25	-	25		100	68.122.684.136,00	100	55,39	200	274.575.809.804,05	200	54,79		
				Presentase Perangkat Daerah Yang Bekinerja Baik	Persen	80		90		95		25		25		25		25		100		105,263158		190		238			
				Presentase Peningkatan Kualitas Pelavanan Terhadap	Persen	80		80		95		25		25		25		25		100		105,263158		180		225			
				Presentase Kebijakan Pemerintah Daerah Yang Terpublikasi	Persen	100		100		100		25		25		25		25		100		100		200		200			
3		4 01 02.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu	Persen	100	3.231.867.601,32	100	566.477.351	100	354.165.943,00	70,00	8.910.000,00	70,00	-	80	-	80		80,00	8.910.000,00	80	2,52	80	213.737.310,00	80	6,61		
		4 01 02.0 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, DPA dan RKA Sekretariat Daerah tepat waktu	Dokumen	5	1.195.000.000,00	5	152.925.695																	Perencanaan dan Keuangan	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30		5	97.744.440	5	150.000.000,00	0		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	5	97.744.440,00	17	8,18		
		4 01 02.0 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LPJ, LKIP, LPPD, Laporan Terpa, Laporan Rewalisasi Fisik Keuangan Sekretariat	Dokumen	5	1.036.867.601,32	5	102.153.134,00																	Perencanaan dan Keuangan	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	20		5	95.249.970	4	135.000.000,00	0	8.910.000,00	-	-	0	-	0	-	-	8.910.000,00	-	6,60	5	104.159.970,00	25	10,05		
		4 01 02.0 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi, Tersusunnya Evaluasi Capaian Renja berkala dan Tahuna, Realisasi Fisik Keuangan Berkala serta Laporan Monitoring dan Evahasi	Dokumen	3	1.000.000.000,00	3	106.571.212,00																	Perencanaan dan Keuangan	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12		3	11.832.900	3	69.165.943,00	-		-	-	0		0	-	0	-	0	-	3	11.832.900,00	25	1,18		
4		4 01 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Meningkatkan administrasi keuangan perangkat daerah dan kinerja aparatur yang baik	Persentase	100	213.453.275.912,89	100	36.883.204.368	100	71.482.678.120,00	100	5.144.170.152,00	100	-	100	-	100,00	-	100	5.144.170.152,00	100	7,20	100	22.700.267.688,00	100	10,63		
		4 01 02.0 03	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	70	206.911.244.006,50	14	18.599.662.895,00																	Perencanaan dan Keuangan	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	437		435	16.794.140.348	437	70.328.808.680,00	0	4.998.826.152,00	0	-	0	-	0	-	0	4.998.826.152,00	0,0	7,11	435	21.792.966.500,00	100	10,53		
		4 01 02.0 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase tersedianya jasa admintrasi pelaksanaan tugas ASN yang sesuai dengan	Persentase	400	2.566.800.000	100	254.250.000,00																	Umum	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	32		8	270.042.000	8	420.620.000,00	0	90.218.000,00	0	-	0		0	-	0	90.218.000,00	0,0	21,45	8	360.260.000,00	25	14,04		
		4 01 02.0 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Kebutuhan jasa administrasi Keuangan yang Terpenuhi	Bulan	60	1.670.271.191,20	12	370.392.666								-									Perencanaan dan Keuangan	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4		1	440.905.780	1	477.819.266,00	0	46.479.000,00	0	-	0	-	0	-	0	46.479.000,00	0,0	9,73	1	487.384.780,00	25	29,18		
		4 01 02.0 05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun yang Tersedia	Bulan	50	1.484.250.976,60	12	26.553.000																	Perencanaan dan Keuangan	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6		1	59.656.408	1	122.550.000,00	0	-	0		0	-	0	-	0	-	0,0	-	1	59.656.408,00	17	4,02		
		4 01 02.0 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeseteran SKPD yang Tersedia	Laporan	10	820.709.738,59	2	50.568.907																	Perencanaan dan Keuangan	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	Laporan	16		4	17.032.364	4	132.880.174,00	0	8.647.000,00	0	-	0		0		0	8.647.000,00	0,0	6,51	4	25.679.364,00	25	3,13		
5		4 01 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas SDM ASN dan meningkatkan disiplin aparatur pemerintah	Persentse	80	2.928.214.529	92	237.820.000	80	487.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	92	237.820.000,00	115	8,12		
		4 01 02.0 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Stel	420	1.685.000.000	84	160.350.000																	Umum	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanaya	Paket	28		2	77.470.000	7	386.300.000,00			-	-	-		-	-	-	-	0	-	2	77.470.000,00	7	4,60		
		4 01 02.0 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Upacara Pemakaman yang Khidmat sebagai penghormatan terakhir bagi mantan Pejabat negara	kali	12	393.214.529	-	-																	Protokol	
				Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan tugas	Laporan	8				2	26.500.000,00									-	-	0	-	-	-	-	-		

No	Sasaran	Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025(%)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Lokasi
												I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)= 10+11+12+13				(16)=(14+8)		(17) = (16/7)*100%		(18)	(18)
		4 01 02 2.05 #	Bimbinan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Meningkatkan kinerja dan pengetahuan disiplin PNS	Perseritse	500	850.000.000	100	-																			*Umum*	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200		0		50	75.000.000,00									-	-	0	-	-	-	-	-		
6		**4 01 02 2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daera**	**Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	Persen	**98**	**51.257.547.898**	**100**	**21.500.045.614**	**98,00**	**8.984.233.614,00**	**50**	**1.762.235.751,00**	**70**	**-**	**70**	**-**	**90,00**	**-**	90	**1.762.235.751,00**	**91,8367347**	**19,61**	**90**	**23.262.281.365,00**	**92**	**45,38**		
		4 01 02 2.06 03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	60	1.040.305.000	12	58.607.100,00																			*Umum*	
				Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6		75	68.806.000	1	66.087.385,00	0	21.254.000	0	-	0	-	0	-	-	21.254.000,00	0	32,16	75	90.060.000,00	1.250	8,66		
		4 01 02 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia dan kelengkapan komputer unit	Bulan	60	2.020.000.000	12	505.765.520,00																			*Umum*	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6		1	436.671.200	1	339.363.505,00	0	78.062.500,00	0	-	0	-	0	-	-	78.062.500,00	0	23,00	1	514.733.700,00	17	25,48		
		4 01 02 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	60	3.064.210.000	12	470.916.400,00																			*Umum*	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6		1	409.088.950	1	307.083.665,00	0	48.110.000,00	0	-	0	-	0	-	-	48.110.000,00	0	15,67	1	457.198.950,00	17	14,92		
		4 01 02 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman	Bulan	60	9.494.894.067	12	1.312.068.620																			*Umum*	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4		1	1.218.184.000	1	1.227.000.000,00	0	217.180.000,00	0	-	0	-	0	-	-	217.180.000,00	0	17,70	1	1.435.364.000,00	25	15,12		
		4 01 02 2.06 05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	60	2.125.270.505	12	483.999.225,00																			*Umum*	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	6		1	357.879.000	1	380.205.064,00	0	10.050.000,00	0	-	0	-	0	-	-	10.050.000,00	0	2,64	1	367.929.000,00	17	17,31		
		4 01 02 2.06 06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Adanya Bahan Bacaan Dikantor	Bulan	60	9.156.963.826	12	1.497.373.000																			*Protokol*	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6		1	1.385.734.100	1	1.594.493.995,00	0	383.459.250,00	0	-	0	-	0	-	-	383.459.250,00	0	24,05	1	1.769.193.350,00	17	19,32		
		4 01 02 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Dokumen	60	20.520.000.000	12	5.744.139.700																			*Umum*	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4		1	5.605.610.990	1	4.020.000.000,00	0	833.270.930,00	0	-	0	-	0	-	-	833.270.930,00	0	20,73	1	6.438.881.920,00	25	31,38		
		4 01 02 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	60	3.835.904.500	12	1.318.713.126																			*Umum*	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Laporan	4		1	626.488.683	1	1.050.000.000,00	0	170.849.071,00	0	-	0	-	0	-	-	170.849.071,00	0	16,27	1	797.337.754,00	25	20,79		
7		**4 01 02 2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Persen**	**98**	**51.073.993.217**	**85**	**19.464.834.000**	**98**	**8.246.630.338,00**	**60,00**	**2.755.000.000,00**	**70**	**-**	**70**	**-**	**70,00**	**-**	70	**2.755.000.000,00**	**71,4285714**	**33,41**	**80**	**22.219.834.000,00**	**82**	**43,51**		
		4 01 02 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah alat transportasi keperluan dinas/jabatan	Unit	15	21.900.000.000	0	1.248.564.000																			*Umum*	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Paket	4		1	5.850.190.000	1	3.451.600.000,00	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	1	5.850.190.000,00	25	26,71		
		4 01 02 2.07 02	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah alat transportasi keperluan dinas operasional/lapangan	Unit	20	17.215.193.217	5	4.447.120.000																			*Umum*	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	32		3	2.275.008.000	8	3.279.000.000,00		-	0					-	-	-	0	-	3	2.275.008.000,00	9	13,22		
		4 01 02 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Unit	750	2.572.700.000	111	1.129.285.000																			*Umum*	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	600		70	544.985.000	150	269.204.325,00	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	70	544.985.000,00	12	21,18		
		4 01 02 2.07 #	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Bulan	60	9.386.100.000	12	2.517.762.000																			*Umum*	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	50		15	1.451.920.000	15	1.246.826.013,00	0	2.755.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	2.755.000.000,00	0	220,96	15	4.206.920.000,00	30	44,82		
8		**4 01 02 2.08**	**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	Persen	**100**	**91.531.260.844**	**100**	**30.708.990.014**	**100**	**18.308.000.000,00**	**80**	**4.214.245.267,00**	**80**	**-**	**90**	**-**	**70,00**	**-**	80	**4.214.245.267,00**	**80**	**23,02**	**180**	**34.923.235.281,00**	**180**	**38,15**		
		4 01 02 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	60	29.791.760.844	12	6.110.567.339,00																			*Umum*	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4		1	4.242.830.375,00	1	6.647.000.000,00	-	1.251.995.267,00	0	-	-	-	-	-	-	1.251.995.267,00	0	18,84	1	5.494.825.642,00	25	18,44		
		4 01 02 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa penggunaan barang oleh sekretariat daerah	Bulan	60	3.610.000.000	12	290.519.300,00																			*Umum*	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	4		1	285.573.000,00	1	345.000.000,00	-	62.250.000,00	0	-	-	-	0	-	-	62.250.000,00	0	18,04	1	347.823.000,00	25	9,63		
		4 01 02 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	60	58.129.500.000	12	9.557.000.000,00																			*Umum*	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4		1	10.222.500.000,00	1	11.316.000.000,00	-	2.900.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	2.900.000.000,00	0	25,63	1	13.122.500.000,00	25	22,57		
9		**4 01 02 2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah terpelihara dengan baik**	Persen	**100**	**62.555.549.738**	**100**	**14.527.648.246**	**98**	**8.426.239.500,00**	**50**	**1.955.723.300**	**50**	**-**	**70**	**-**	**70,00**	**-**	**80,00**	**1.955.723.300,00**	**81,6326531**	**23,21**	**80**	**16.483.371.546,00**	**80**	**26,35**		
		4 01 02 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	60	21.537.899.216	12	3.063.956.000,00																			*Umum*	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	101		101	2.337.715.300,00	101	3.096.260.000,00	0	560.436.900,00	0	-	0	-	0	-	0	560.436.900,00	0	18,11	101	2.898.152.200,00	100	13,46		

No	Sasaran	Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025(%)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Lokasi
												I		II		III		IV												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)= 10+11+12+13				(16)=(14+8)		(17) = (16/7)*100%		(18)	(18)
		4 01 02 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	60	2.000.000.000	12	139.795.072,00																			*Umum*	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	101		75	167.056.911,00	101	185.060.000,00	0	-		-			-	0	-	0	-	75	167.056.911,00	74	8,35		
		4 01 02 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	60	2.366.650.522	12	429.670.000,00																			*Umum*	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	120		120	158.937.000,00	120	215.050.000,00	0	48.040.000,00	0	-	0		0	-	0	48.040.000,00	0	22,34	120	206.977.000,00	100	8,75		
		4 01 02 2.09 05	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	60	7.366.000.000	12	455.525.800,00																			*Umum*	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7		5	494.026.100,00	7	525.750.000,00	-	67.600.000,00	0	-	0	-	0	-	0	67.600.000,00	0	12,86	5	561.626.100,00	71	7,62		
		4 01 02 2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	60	29.285.000.000	12	3.417.177.163,00																			*Umum*	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	7		7	3.863.788.900,00	7	4.405.119.500,00	-	1.279.646.400,00	0	-	0	-	0	-	0	1.279.646.400,00	0	29,05	7	5.143.435.300,00	100	17,56		
10		**4 01 02 2.11**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**Persen**	**100**	**8.583.022.944**	**100**	**2.379.931.080**	**100**	**1.500.859.824,00**	**70**	**309.272.516,00**	**70,00**	**-**	**70**	**-**	**80,00**	**-**	98,00	**309.272.516,00**	**98**	**20,60635584**	**80**	**2.689.203.596,00**	**80**	**31,33**		
		4 01 02 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	bulan	70	8.583.022.944,00	**14**	1.165.965.540,00																			*Perencanaan dan Keuangan*	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang / Bulan	2		2	1.213.965.540	2	1.500.859.824,00	0	309.272.516,00	-	-	0	-	0	-	0	309.272.516,00	0	20,61	2	1.523.238.056,00	100	17,75		
11		**4 01 02 2.12**	**Penataan Organisasi**	**Persentase adanya Dokumen ABK OPD dibagi jumlah OPD**	**Persentse**	**100**	**3.465.711.636,52**	**90**	**576.369.975,00**	**100**	**479.366.813,00**		**8.420.000,00**		**-**		**-**				**8.420.000,00**		**1,76**		**584.789.975,00**	-			
				Persentase adanya dokumen anjab OPD dibagi jumlah OPD	**Persentse**	**100**		**100**		**100**																		
				Persentase pengaduan pelayanan publik yang ditanganai	**Persentse**	**100**		**100**		**100**				**90**		**90**		**90**	**-**	**90,00**		98		**90**				
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	**B**	**B**		**C**		**B**																		
				Persentase OPD yang melakukan surve IKM dibanding OPD yang seharusnya melakukan	**Persentse**	**100**		**100,00**		**100,00**																		
		4 01 02 2.1 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Adanya Laporan Pertanggungawaban Sekretariat Kota, Adanya Data Evaluasi Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah, telah disusunnya Data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS dan Nomenklatur/Bobot Peringkat serta	OPD	375	1.461.739.626	20	133.281.600,00																			*Organisasi*	
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	4		1	140.244.622,00	1	198.477.611,00	0	8.420.000,00	0	-	0	-	0	-	0	8.420.000,00	0	4,24	1	148.664.622,00	25	10,17		
		4 01 02 2.1 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Adanya Dokumen Penetapan Kinerja Walikota, Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik, Adanya Buku Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan Publik yang diberikan oleh	OPD	390	1.036.913.495	30	73.896.400,00																			*Organisasi*	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	4		1	82.734.949,00	1	129.507.192,00	0	-	0	-	0		0	-	0	-	0	-	1	82.734.949,00	25	7,98		
		4 01 02 2.1 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Adanya Birokrasi Pemerintah yang Profesional, Tersusunnya Kembali (Penyempurnaan) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi	Buku	450	967.058.515	10	103.393.920,00																			*Organisasi*	
				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	4		1	42.818.484,00	1	151.382.010,00	0	-	0	-	0		0	-	0	-	0	-	1	42.818.484,00	25	4,43		
12		**4 01 02 2.14**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Tugas Pimpinan yang disusun**	Persen	**100**	**13.094.286.371**	**100**	**9.706.298.183**	**100**	**4.723.142.626**	**60**	**1.197.188.000**	**60**	**-**	**70**	**-**	**80**	**-**	80	**1.197.188.000,00**	**80**	**25,35**	**80**	**10.903.486.183,00**	**80**	**83,27**		
		4 01 02 2.1 01	Fasilitasi Keprotokolan	Sistem Administrasi Penatausahaan Protokol KDH/WKDH	Bulan	60	1.786.365.467	12	1.410.856.163,00																			*Protokol*	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	4		1	1.235.885.300,00	1	1.519.013.750,00	0	354.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	354.000.000,00	0	23,30	1	1.589.885.300,00	25	89,00		
		4 01 02 2.1 02	fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Buku Agenda Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan Data Informasi Melalui Buku Selayang Pandang	Bulan	60	2.238.728.904,25	12	392.685.700,00																			*Protokol*	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	4		1	446.545.120,00	1	771.342.470,00	0	80.718.000,00	0	-	0	-	0	-	0	80.718.000,00	0	10,46	1	527.263.120,00	25	23,55		
		4 01 02 2.1 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Informasi Kepada Masyarakat Melalui Media cetak dan Elektronik, Spanduk, Baliho dan Banner, Dokumentasi Foto dan Video, Visualisasi Dinamika Pembangunan Pemerintah Kota Bandar	Bulan	60	9.069.192.000	12	1.626.991.800,00																			*Protokol*	
				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	4		1	4.593.334.100,00	1	2.432.786.406,00	0	762.470.000,00	0	-	0	-	0	-	0	762.470.000,00	0	31,34	1	5.355.804.100,00	25	59,05		
																										66	17		
																										ST	**SR**		

No	Sasaran	Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025(%)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Lokasi
												I		II		III		IV												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)= 10+11+12+13				(16)=(14+8)		(17) = (16/7)*100%		(18)	(18)
13	\	4 01 02	**PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Presentase Kerjasama antar Wilayah dan *Stakeholder* yang terlaksana dengan baik**	Persentse	**85%**		**60**		**65**		**10**		**20**		**30**		**5,00**		65,00		100								
				Presentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyaraakatan yang Terfasilitasi	Persentse	**100**		**90**		**100**		2500,00%		25,00		25		**25**		10000,00%		100		190		190				
				Presentase Penigkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah.	Persentse	**100**		**100**		**100**		**25**		**25**		**25**		**25**		**100**		100		200						
				Presentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan	Persentse	**100**		**100**		**100**		**25**		**25**		**25**		**25**		**100**		100		200						
				Presentase Penanganan Konflik Perusahaan	Persentse	**70**	**39.628.846.707**		**79.175.015.130**	**60**	**40.024.733.548,00**	**10,00**	**24.878.670.075,00**	**10**	-	**20**	-	**20**	-	60	**24.878.670.075,00**	100		**60**	**18.419.854.771,00**					
				Presentase Luas Lahan Bersertifikat	Persentse	**100**		**100**		**100**		**25**		**25**		**25**		**25**		**100**		100		200						
				Presentase Kebijakan Daerah yang telah di Sahkan, Diputuskan dan Didokumentasikan.	Persentse	**100**		**100**		**100**		**25**		**25**		**25**		**25**		**100**		100		200		200				
				Presentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah Yang Berkualitas.	Persentse	**100**		**100**		**100**		**2500%**		**25**		**25**		**25**		10000%		100		200		200				
				Presentase Permasalahan Hukum yang ditandatangani dapat diselesaikan.	Persentse	**100**		**100**		**100**		**2500%**		**25%**		**25%**		**25%**		25,75		25,75		126		126				
14		4 01 02.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Meningkatnya Pengelolaan Tata Pemerintahan**	persen	**100**	**7.916.425.612**	**100**	**494.531.625**	**100**	**1.483.147.691,00**	**60,00**	-	**70**	-	**70**	-	**80,00**	-	95,00	-	**95**	-	**95**	**494.531.625,00**	**95**	**6,25**			
		4 01 02.01 03	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah	persen	500	571.996.733,16	100	22.267.900,00																			*Tata Pemerintahan*	
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	8		2	18.712.500,00	2	78.278.882,00	0		0	-	0	-	0		0	-	0	-	2	18.712.500,00	25	3,27			
		4 01 02.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Sertifikat yang Diterbitkan dan Diserahkan kepada Masyarakat dibandingkan Jumlah Bidang Tanah yang Dibantu Pengurusan Sertifikatnya, Cakupan Keluruhan yang Dimonitoring Dibanding seluruh	persen	500	4.051.753.278,52	100	33.180.000,00																			*Tata Pemerintahan*	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	12		3	110.466.500,00	3	750.406.502,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3	110.466.500,00	25	2,73			
		4 01 02.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Rapat Kerja Koordinasi Walikota dengan OPD yang Terfasilitasi dibandingkan Target Raker/Rakor (1x per bulan), tingkat Partisipasi Pemkot dalam Kegiatan APEKSI dibandingkan Jumlah Kegiatan APEKSI, Nilai EKPPD Tinggi(3)	persen	500	3.292.675.600,61	100	309.904.725,00	3	654.462.307,00	-		-	-	-	-	0	-	-	-					*Tata Pemerintahan*	
15		4 01 02.02	**Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Meningkatnya Implementasi Kebijakan untuk meningkatkan**	Persen	**100**	**25.632.948.917**	**10**	**75.443.141.150**	**75**	**35.848.559.901**	**75**	**24.581.534.072**	**75**	-	**75**	-	**75**	-	75	**24.581.534.072,00**	**100**	**68,57**	**85**	**100.024.675.222,00**	**85**	**390,22**			
		4 01 02.01 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental spiritual	Jumlah Kecamatan, Cabang Lomba,Jumlah Peserta Trainning Center Qori dan Qoriah, Jumlah Kafilah MTQ Tingkat Provinsi, Jumlah Petugas TPHD, Jumlah Peserta Festival Anak Sholeh,	orang	4970	20.254.914.701,71	690	30.434.709.069,00																			*Kesejahteraan Rakyat*	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Doku,en	24		6	44.538.066.081,00	6	33.848.239.901,00	0	24.029.534.072	0	-	0	-	0	-	0	24.029.534.072,00	0	70,99	6	68.567.600.153,00	25	338,52			
		4 01 02.01 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kecamatan dan Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan	orang	6000	3.396.350.000	100	-																			*Kesejahteraan Rakyat*	
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,	Dokumen	6000		0	470.366.000,00	1	100.000.000,00	0		0		###	-	Rp -	0,00	-	-	0	-	-	470.366.000,00	-	13,85			
		4 01 02.01 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kecamatan dan Kelembagaan	orang	1500	1.981.684.215,47	0																			*Kesejahteraan Rakyat*	
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,	Dokumen	4		0		1	1.900.320.000,00	0	552.000.000	0		0		Rp -		-	-	552.000.000,00	0	29,05	-	552.000.000,00	-	27,86			

No	Sasaran	Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025(%)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Lokasi
												I		II		III		IV												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)= 10+11+12+13				(16)=(14+8)		(17) = (16/7)*100%		(18)	(18)
16		4 01 02.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Kebijakan Daerah yang telah disahkan,diputuskan dan didokumentasikan**	**Persen**	**100**	**3.667.215.290**	**100**	**2.137.400.285**	**100**	**1.838.382.293**	**60**	**285.296.003**	**80**	**-**	**80**	**-**	**80**	**-**	90	**285.296.003**	**90**	**15,52**	**90**	**2.422.696.288,00**	**90**	**66,06**		
		4 01 02.0 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang disahkan	Produk Hukum	3723	1.044.401.500	23	160.233.958,00																			*Hukum*	
				Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	2800		700	158.205.498,00	700	357.275.000,00	0	11.160.685,00	0	-	0	-	0	-	0	11.160.685,00	0,00	3,12	700	169.366.183,00	25	16,22		
		4 01 02.0 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara yang diputuskan dan Jumlah kelompok kadarkum yang mewakili di Tingkat	Perkara	2800	1.283.037.009,00	1	565.631.814,00																			*Hukum*	
				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi	Kasus	8		1	621.276.224,00	3	943.977.293,00	0	184.521.405,00	0	-	0	-	0	-	0	184.521.405,00	0	19,55	1	805.797.629,00	13	62,80		
		4 01 02.0 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pengembangan 1 buah	1 Web		1.339.776.781,00																						
				Buku himpunan produk hukum daerah	132 Bk				360.571.591,00												-									
				Terlaksananya penyuluhan hukum	4 x penuluhan	832		132		-	-						-			-	-	0	-					*Hukum*	
				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	2800		700	271.481.200,00	700	537.130.000,00	-	89.613.913,00	0	-	0	-	0	-	0	89.613.913,00	0,00	16,68	700	361.095.113,00	25	26,951886		
17		4 01 02.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase KSD yang Terfasilitasi (Terbit MoU) dibandingkan dengan usulan KSD**	**Persen**	**70**	**2.412.256.887**	**60**	**1.099.942.070**	**70**	**854.643.663**	**70**	**11.840.000**	**70**	**-**	**70**	**-**	**70**	**-**	70	**11.840.000,00**	**100**	**1,39**	**70**	**1.111.782.070,00**	**100**	**46,09**		
		4 01 02.0 01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Program Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dalam menyiapkan Perumusan Kebijakan Daerah dan Pengordinasian Perumusan Kebijakan Daerah serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang	**Persen**	85	839.739.010	59	247.091.910,00																		*Kerjasama*	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	**Dokumen**	4		1	287.570.286,00	1	314.443.887,00	0,00	7.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	7.000.000,00	0	2,23	1	294.570.286,00	25	35,08		
		4 01 02.0 02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Program Fasilitasi Kerja sama luar negeri dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang fasilitasi kerja sama luar negeri	**Persen**	85	729.093.600	50	117.528.256,00																		*Kerjasama*	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	**Dokumen**	4		1	181.985.437,00	1	258.320.147,00	0,00	2.420.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	2.420.000,00	0	0,94	1	184.405.437,00	25	25,29		
		4 01 02.0 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah program kerjasama dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah dan pengordinasian perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang evaluasi	**Persen**	85	843.424.277	69	136.636.081,00																		*Kerjasama*	
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	**Laporan**	4		1	129.130.100,00	1	281.879.629,00	0	2.420.000,00	0	-	0	-	0	-	0	2.420.000,00	0	0,86	1	131.550.100,00	25	15,60		
																										24	58		
																										ST	**SR**		
		4 01 03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjutu dan digunakan untuk Analisa Kebijakan**	**Persen**	**100**		**70**		**80**		**10**		**20**		**40**		**10**		80		100		150		150			
18				**BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik**	Angka	**5**		**5**		**5**		**-**		**1**		**1**		**3**		5		100		10		200			
				Presentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang	**Persen**	**100**		**100**		**100**		**25**		**25**		**25**		**25**		100		100		200		200			
				Presentase OPD yang melaporkan kegiatan secara Online melalui TEPRA tepat waktu	**Persen**	**100**	**22.130.899.794,56**	**100**	**5.726.270.894,00**	**100**	**2.747.986.754,00**	**25**	**505.089.500,00**	**25**	**-**	**25**	**-**	**25**	**-**	100	**505.089.500,00**	100	-	200	**3.266.871.307,00**	200			
				Tingkat Partisipasi OPD,Swasta dan LSM dalam pelaksanaan Evaluasi Program Pembangunan	**Persen**	**100**		**100**		**100**		**0**		**0,5**		**0,5**		**25**		100		100		200		200			
				Presentase Paket Pengadaan yang dilakukan dengan Metode yang Kompetitif	**Persen**	**100**		**100**		**100**		**5**		**40**		**30**		**25**		100		100		200		200			
				Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan PBJ.	**Persen**	**80**		**80**		**90**		**25**		**20**		**35**		**10**		90		100		170		213			
19		4 01 02.02	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**	**Persen**	**100**	**2.413.760.790,00**	**100**	**963.629.476,00**	**100**	**963.895.504,00**	**0**	**-**	**89**	**-**	**90**	**-**	**90,00**	**-**	90,00	**-**	90,00	-	90,00	**509.332.367,00**	90			
		4 01 02.0 01	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan monev kebijakan tata kelolanya	BUMD	30	709.985.799,00	5	156.298.625,00												-							*Perekonomian*	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	20		5	143.753.448,00	3	562.781.626,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5	143.753.448,00	25	20,25		
		4 01 02.0 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian	Kegiatan	18	1.118.170.060,00	3	200.398.484,00																			*Perekonomian*	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	12		3	267.099.675,00	3	280.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3	267.099.675,00	25	23,89		
		4 01 02.0 03	Perencanaan dan Pengawasan Mikro Kec	Pelaksanaan koordinasi Sekretariat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan	Kegiatan	6	585.604.931,00	1	97.600.000,00																			*Perekonomian*	
				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	4		1	98.479.244,00	1	121.113.878,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	98.479.244,00	25	16,82		

No	Sasaran	Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025(%)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Lokasi
												I		II		III		IV												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)= 10+11+12+13				(16)=(14+8)		(17) = (16/7)*100%		(18)	(18)
20		4 01 02 2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangu**	**Persentase Laporan Penyusunan Program, Pengendalian Program Pembangunan dan Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**	**Persen**	**100**	**11.149.423.406**	**96**	**2.494.799.050**	**100**	**482.896.950,00**	**50**	**2.420.000,00**	**90,00**	**-**	**###**	**-**	**90,00**	**-**	100,00	**2.420.000,00**	**100**	**0,50**	90,00	**1.176.242.450,00**	**90**	**10,55**		
		4 01 02 2.01 01	fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen yang tersedia	Buku	375	1.576.666.085,00	75	17.275.000,00																		*Adm. Pembangunan*	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	4		1	19.940.800,00	1	113.675.000,00	0	2.420.000	0	-	0	-	-	-	0	2.420.000,00	0	2,13	1	22.360.800,00	25	1,42		
		4 01 02 2.01 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Event yang dilaksanakan	Event	10	6.951.360.000,00	0	1.026.605.600,00																		*Adm. Pembangunan*	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program	Laporan	4		1	1.084.564.650,00	-	-	0		-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	1	1.084.564.650,00	25	15,60		
		4 01 02 2.01 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan yang dilaksanakan	Bulan	60	2.621.397.320,74	12	277.096.000,00																		*Adm. Pembangunan*	
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	Laporan	4		1	69.317.000,00	1	369.221.950,00	0		-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	1	69.317.000,00	25	2,64		
21		**4 01 02 2.03**	**Pengelolaan Pengadaan Barang**	- Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0,5		0,42		100																			
				- Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	7.50	**8.567.715.598,82**	7,43	**2.267.842.368,00**	4	**1.301.194.300,00**	100	**502.669.500,00**	100	-	**100**	-	**100,00**	-	**100**	**502.669.500,00**	**100,00**	**38,63**	**90**	**1.581.296.490,00**	**90**	**22,38**		
				- Rasio nilai Belanja yang dilakukan melalui	Persen	30		44,10		15																			
		4 01 02 2.01 01	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	- Penghematan Biaya	Persen	3,25		2,5	387.421.850,00																		*BPBJ*	
				- persentase kesesuaian RUP	Persen	100		100																					
				- Jadwal proses seleksi/pemilihan/tender yang direncanakan memenuhi standar minimum	Persen	100		100																					
				- rata rata partisipasi penyedia barang/jasa dalam tender/seleksi	Persen	185		120,83																					
				- Persentase partisipasi penyedia barang/jasa yang sesuai dengan persyaratan tender/seleksi	Persen	100		100																					
				- Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	10		4,8																					
				- Rasio nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	55		44,1																					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	1.634.561.450,00	1	319.120.351,00	1	422.879.432,00	0	3.456.500,00	0	-	-	-	-	-	-	3.456.500,00	0	0,82	1	322.576.851,00	25	19,73		
		4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Proses pengadaan selesai tepat waktu	Persen	100		100	596.493.050,00																		*BPBJ*	
				- kesesuaian dangan persyaratan kontrak	Persen	100		100																					
				- Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0,5		0,42					-		-													
				- kepuasan pelanggan	Persen	85		60																					
				- kepuasan penyedia	Persen	90		75																					
				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	4	6.260.587.050,00	1	544.423.700,00	1	655.890.270,00	-	488.111.000,00	0	-	0	-	-	-	0	488.111.000,00	0	74,42	1	1.032.534.700,00	25	16,49		
		4 01 02 2.01 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan	Persen	Level 4 4/9	672.567.098,82	3 7/9	205.300.478,00																		*BPBJ*	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	20		5	215.082.939,00	5	222.424.598,00	0	11.102.000	0	-	0	-	0	-	0	11.102.000,00	0	4,99	5	226.184.939,00	25	33,63		
																										25,00	16,72		
																										SR	**SR**		

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

Program merupakan kompulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang di laksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik dalam menunjang Kinerja Kepala Daerah dalam rangka mewujutkan Masyarakat Kota Bandar Lampung yang aman, nyaman serta sejahtera, maju dan modern membantu Walikota Bandar lampung dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pembangunan daerah dan Tata Pemerintahan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah Pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Bandar Lampung, pada dasarnya kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung adalah sebagai "*penunjang*" setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Program dan kegiatan OPD Sekretariat Daerah Kota Bandar lampung terdiri dari 3 (tiga) program dengan Anggaran Perubahan pada masing-masing Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub

Kegiatan dengan Anggaran Murni Sebesar Rp. 122.993.116.778,- pada Perubahan Rp. 111.719.021.659;

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

Terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan dengan Anggaran Murni sebesar Rp. 40.024.733.548,- pada Perubahan Rp. 94.200.366.563;

3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan Anggaran Murni sebesar Rp. 2.747.986.754 pada Perubahan Rp. 2.405.701.421.

Tabel secara lengkap dan tepat dapat dilihat pada Tabel TC.33

REKAP ANGGARAN PERBAGIAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
Tahun Anggaran 2025

Program :	Murni 2025	Efisiensi 2025	Perubahan 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (Perubahan-Murni)
1. Bagian Pemerintahan				
Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				
Kegiatan Adm. Tata Pemerintahan	**Rp 1.483.147.691,00**	**Rp 781.817.091,00**	**Rp 985.568.078,00**	**-Rp 497.579.613,00**
- Subkegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp 78.278.882,00	Rp 31.753.998,00	Rp 46.753.998,00	-Rp 31.524.884,00
- SubKegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp 750.406.502,00	Rp 338.746.401,00	Rp 338.746.401,00	-Rp 411.660.101,00
- SubKegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp 654.462.307,00	Rp 411.316.692,00	Rp 600.067.679,00	-Rp 54.394.628,00

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat	Murni 2025	Efisiensi 2025	Perubahan 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (Perubahan-Murni)
Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				
Kegiatan Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Rp 35.848.559.901,00**	**Rp 61.848.460.128,00**	**Rp 90.597.697.730,00**	**Rp 54.749.137.829,00**
- SubKegiatan Fasilitasi Bina Mental dan Spiritual	Rp 33.848.239.901,00	Rp 60.110.400.280,00	Rp 88.859.637.882,00	Rp 55.011.397.981,00
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahtera	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -
- SubKegiatan Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp 1.900.320.000,00	Rp 1.638.059.848,00	Rp 1.638.059.848,00	-Rp 262.260.152,00

3. Bagian Hukum	Murni 2025	Efisiensi 2025	Perubahan 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (Perubahan-Murni)
Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat				
Keg. Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	**Rp 1.838.382.293,00**	**Rp 1.693.240.918,00**	**Rp 1.963.303.981,00**	**Rp 124.921.688,00**
- SubKegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp 357.275.000,00	Rp 292.042.668,45	Rp 303.203.353,45	-Rp 54.071.646,55
- SubKegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp 943.977.293,00	Rp 962.192.528,55	Rp 1.160.394.906,55	Rp 216.417.613,55
- SubKegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Inforr	Rp 537.130.000,00	Rp 439.005.721,00	Rp 499.705.721,00	-Rp 37.424.279,00

4. Bagian Kerjasama Daerah	Murni 2025	Efisiensi 2025	Perubahan 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (Perubahan-Murni)
Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				
Keg. Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Rp 854.643.663,00**	**Rp 653.796.774,00**	**Rp 653.796.774,00**	**-Rp 200.846.889,00**
- SubKegiatan Fasilitasi Kerjasama dalam Negeri	Rp 314.443.887,00	Rp 254.053.426,00	Rp 254.053.426,00	-Rp 60.390.461,00
- SubKegiatan Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Rp 258.320.147,00	Rp 190.998.008,00	Rp 190.998.008,00	-Rp 67.322.139,00
- SubKegiatan Evaluasi pelaksanaan Kerjasama	Rp 281.879.629,00	Rp 208.745.340,00	Rp 208.745.340,00	-Rp 73.134.289,00

5. Bagian Perekonomian	Murni 2025	Efisiensi 2025	Perubahan 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (Perubahan-Murni)
Program Perekonomian dan Pembangunan				
Keg. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Rp 963.895.504,00**	**Rp 794.422.866,00**	**Rp 859.422.866,00**	**-Rp 104.472.638,00**
- SubKegiatan Kordinasi, Sinkronisasi, Monitoring,dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD & BUJD	Rp 562.781.626,00	Rp 481.734.083,00	Rp 546.734.083,00	-Rp 16.047.543,00
- SubKegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp 280.000.000,00	Rp 231.462.986,00	Rp 231.462.986,00	-Rp 48.537.014,00
- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp 121.113.878,00	Rp 81.225.797,00	Rp 81.225.797,00	-Rp 39.888.081,00

6. Bagian Administrasi Pembangunan	Murni 2025	Efisiensi 2025	Perubahan 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (Perubahan-Murni)
Program Perekonomian dan Pembangunan				
Keg. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Rp 482.896.950,00**	**Rp 421.013.984,00**	**Rp 421.013.984,00**	**-Rp 61.882.966,00**
- SubKegiatan Fasilitasi penyusunan Program Pembangunan	Rp 113.675.000,00	Rp 101.194.819,50	Rp 101.194.819,50	-Rp 12.480.180,50
- SubKegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Rp -		
- SubKegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembang	Rp 369.221.950,00	Rp 319.819.164,50	Rp 319.819.164,50	-Rp 49.402.785,50

7. Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa	Murni 2025	Efisiensi 2025	Perubahan 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (Perubahan-Murni)
Program Perekonomian dan Pembangunan				
Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang	**Rp 1.301.194.300,00**	**Rp 1.125.264.571,00**	**Rp 1.125.264.571,00**	**-Rp 175.929.729,00**
- SubKegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 422.879.432,00	Rp 312.055.772,00	Rp 312.055.772,00	-Rp 110.823.660,00
- SubKegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp 655.890.270,00	Rp 655.890.270,00	Rp 655.890.270,00	Rp -
- SubKegiatan Pembinaan dan Advokasi Barang dan Jasa	Rp 222.424.598,00	Rp 157.318.529,00	Rp 157.318.529,00	-Rp 65.106.069,00

8. Bagian Umum dan Perlengkapan	Murni 2025	Efisiensi 2025	Perubahan 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (Perubahan-Murni)
Program Administrasi Umum	**Rp 43.279.029.457,00**	**Rp 46.494.120.972,00**	**Rp 59.125.159.340,00**	**Rp 15.846.129.883,00**
Keg. Adm. Keuangan Perangat Daerah	**Rp 420.620.000,00**	**Rp 462.670.000,00**	**Rp 508.687.000,00**	**Rp 88.067.000,00**
- SubKegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 420.620.000,00	Rp 462.670.000,00	Rp 508.687.000,00	Rp 88.067.000,00
Keg. Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah	**Rp 487.800.000,00**	**Rp 487.800.000,00**	**Rp 5.387.800.000,00**	**Rp 4.900.000.000,00**
- SubKegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 386.300.000,00	Rp 386.300.000,00	Rp 5.286.300.000,00	Rp 4.900.000.000,00
- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Rp 26.500.000,00	Rp 26.500.000,00	Rp 26.500.000,00	Rp -
- SubKegiatan Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp -
Keg. Adm. Umum Perangkat Daerah	**Rp 7.389.739.619,00**	**Rp 7.738.950.594,00**	**Rp 8.067.808.162,00**	**Rp 678.068.543,00**
- SubKegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 66.087.385,00	Rp 66.087.385,00	Rp 66.087.385,00	Rp -
- SubKegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 339.363.505,00	Rp 426.292.390,00	Rp 489.702.390,00	Rp 150.338.885,00
- SubKegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 307.083.665,00	Rp 338.959.255,00	Rp 351.559.255,00	Rp 44.475.590,00
- SubKegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 1.227.000.000,00	Rp 1.310.770.500,00	Rp 1.394.541.000,00	Rp 167.541.000,00
- SubKegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 380.205.064,00	Rp 380.205.064,00	Rp 380.205.064,00	Rp -
- SubKegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 4.020.000.000,00	Rp 4.166.636.000,00	Rp 4.313.272.000,00	Rp 293.272.000,00
- SubKegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.050.000.000,00	Rp 1.050.000.000,00	Rp 1.072.441.068,00	Rp 22.441.068,00
Keg. Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintal	**Rp 8.246.630.338,00**	**Rp 10.456.370.810,00**	**Rp 15.311.370.810,00**	**Rp 7.064.740.472,00**
- SubKegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau	Rp 3.451.600.000,00	Rp 1.869.600.000,00	Rp 1.869.600.000,00	-Rp 1.582.000.000,00
- SubKegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Rp 3.279.000.000,00	Rp 3.781.000.000,00	Rp 4.681.000.000,00	Rp 1.402.000.000,00
- SubKegiatan Pengadaan Meubel	Rp 269.204.325,00	Rp 278.580.675,00	Rp 1.278.580.675,00	Rp 1.009.376.350,00
-SubKegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 1.246.826.013,00	Rp 4.527.190.135,00	Rp 7.482.190.135,00	Rp 6.235.364.122,00
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	**Rp 18.308.000.000,00**	**Rp 18.341.873.650,00**	**Rp 20.404.123.650,00**	**Rp 2.096.123.650,00**
- SubKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 6.647.000.000,00	Rp 6.608.623.650,00	Rp 8.608.623.650,00	Rp 1.961.623.650,00
- SubKegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 345.000.000,00	Rp 417.250.000,00	Rp 479.500.000,00	Rp 134.500.000,00
- SubKegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 11.316.000.000,00	Rp 11.316.000.000,00	Rp 11.316.000.000,00	Rp -
Keg. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerir	**Rp 8.426.239.500,00**	**Rp 9.006.455.918,00**	**Rp 9.445.369.718,00**	**Rp 1.019.130.218,00**
- SubKegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 3.095.260.000,00	Rp 2.995.610.268,00	Rp 3.129.097.668,00	Rp 33.837.668,00
- SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaa, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 185.060.000,00	Rp 185.060.000,00	Rp 185.060.000,00	Rp -
- SubKegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 215.050.000,00	Rp 263.090.000,00	Rp 311.130.000,00	Rp 96.080.000,00
- SubKegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan L	Rp 525.750.000,00	Rp 725.750.000,00	Rp 768.870.000,00	Rp 243.120.000,00
- SubKegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 4.405.119.500,00	Rp 4.836.945.650,00	Rp 5.051.212.050,00	Rp 646.092.550,00

9. Bagian Organisasi	Murni 2025	Efisiensi 2025	Perubahan 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (Perubahan-Murni)
Program Administrasi Umum	**Rp 479.366.813,00**	**Rp 394.112.218,00**	**Rp 394.112.218,00**	**-Rp 85.254.595,00**
- SubKegiatan Organisasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp 198.477.611,00	Rp 164.302.418,00	Rp 164.302.418,00	-Rp 34.175.193,00
- SubKegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp 129.507.192,00	Rp 103.664.932,00	Rp 103.664.932,00	-Rp 25.842.260,00
- SubKegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp 151.382.010,00	Rp 126.144.868,00	Rp 126.144.868,00	-Rp 25.237.142,00

10. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Murni 2025	Efisiensi 2025	Perubahan 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (Perubahan-Murni)
Program Administrasi Umum	**Rp 6.317.636.621,00**	**Rp 5.842.401.508,00**	**Rp 8.082.721.508,00**	**Rp 1.765.084.887,00**
Keg. Adm. Umum Perangkat Daerah	**Rp 1.594.493.995,00**	**Rp 1.594.262.413,00**	**Rp 2.094.762.413,00**	**Rp 500.268.418,00**
- SubKegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda	Rp 1.594.493.995,00	Rp 1.594.262.413,00	Rp 2.094.762.413,00	Rp 500.268.418,00
Keg. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Rp 4.723.142.626,00**	**Rp 4.248.139.095,00**	**Rp 5.987.959.095,00**	**Rp 1.264.816.469,00**
- SubKegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Rp 1.519.013.750,00	Rp 1.263.641.588,00	Rp 1.503.461.588,00	-Rp 15.552.162,00
- SubKegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp 771.342.470,00	Rp 622.710.763,00	Rp 622.710.763,00	-Rp 148.631.707,00
- SubKegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp 2.432.786.406,00	Rp 2.361.786.744,00	Rp 3.861.786.744,00	Rp 1.429.000.338,00

11. Bagian Perencanaan dan Keuangan	Murni 2025	Efisiensi 2025	Perubahan 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (Perubahan-Murni)
Program Administrasi Umum	**Rp 72.917.083.887,00**	**Rp 46.117.028.593,00**	**Rp 44.117.028.593,00**	**-Rp 28.800.055.294,00**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat D	**Rp 354.165.943,00**	**Rp 271.571.376,00**	**Rp 271.571.376,00**	-Rp 82.594.567,00
- SubKegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 150.000.000,00	Rp 98.373.073,00	Rp 98.373.073,00	-Rp 51.626.927,00
- SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 135.000.000,00	Rp 110.280.330,00	Rp 110.280.330,00	-Rp 24.719.670,00
- SubKegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 69.165.943,00	Rp 62.917.973,00	Rp 62.917.973,00	-Rp 6.247.970,00
Kegiatan Adm. Keuangan Perangkat Daerah	**Rp 71.062.058.120,00**	**Rp 44.344.597.393,00**	**Rp 42.344.597.393,00**	**-Rp 28.717.460.727,00**
- SubKegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Rp 70.328.808.680,00	Rp 43.668.808.680,00	Rp 41.668.808.680,00	-Rp 28.660.000.000,00
- SubKegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keu	Rp 477.819.266,00	Rp 443.901.890,00	Rp 443.901.890,00	-Rp 33.917.376,00
- SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahu	Rp 122.550.000,00	Rp 104.003.245,00	Rp 104.003.245,00	-Rp 18.546.755,00
- SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Rp 132.880.174,00	Rp 127.883.578,00	Rp 127.883.578,00	-Rp 4.996.596,00
Kegiatan Adm. Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Ke	**Rp 1.500.859.824,00**	**Rp 1.500.859.824,00**	**Rp 1.500.859.824,00**	**Rp -**
- SubKegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 1.500.859.824,00	Rp 1.500.859.824,00	Rp 1.500.859.824,00	**Rp -**
JUMLAH :	***Rp 165.765.837.080,00***	***Rp 166.165.679.623,00***	***Rp 208.325.089.643,00***	**-Rp 42.159.410.020,00**

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain :

1. kecermatan dalam pelaksanaan
2. kemampuan keuangan
3. situasi yang mendukung.

Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar lampung Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2025.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

PERUBAHAN R ENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	√			
	2.1	Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan/tahun 2025				
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 2025
Sekretaris DPRD Kota Bandar Lampung

TRI PARYONO, S.Sos. MM
Pembina Tk.I
NIP. 19710615 199303 1 004

Diverifikasi oleh : 2025		Tanda Tangan
1	**Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.**	
	Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappperida Kota Bandar Lampung	
2	**Puspita Dewi, SE.,MM**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui;
Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung,

DINI DESMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025
Sekretaris DPRD Kota Bandar Lampung

TRI PARYONO, S.Sos. MM
Pembina Tk.I
NIP. 19710615 199303 1 004

Diverifikasi oleh : 2025		Tanda Tangan
1	**Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.**	
	Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappperida Kota Bandar Lampung	
2	**Puspita Dewi, SE.,MM**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui;
Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung,

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, 2025
Sekretaris DPRD Kota Bandar Lampung

TRI PARYONO, S.Sos. MM
Pembina Tk.I
NIP. 19710615 199303 1 004

Diverifikasi oleh : 2025		Tanda Tangan
1	**Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.**	
	Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappperida Kota Bandar Lampung	
2	**Puspita Dewi, SE.,MM**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui;
Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung,

DINI RUSLAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN 29
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616/IV.01/HK/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar

pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;
b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invetarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor);

17. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor);
18. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandar Lampung Nomor 39 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

I.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampungdalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan/Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SETWAN. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini menyajikan Dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung selama tahun 2025, Serta perkiraan target tahun 2025. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2025

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (1 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025) pada SETWAN Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 1.415.121.771,00 atau 23,19% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp. 6.101.933.926,00,- dengan rincian sebagai berikut :

BELANJA DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		LEBIH/ (KURANG) Rp
		Rp	%	
Belanja Pegawai	6.101.933.926,00	1.415.121.771,00	23,19	4.686.812.155,00
➢ Gaji dan Tunjangan	4.251.283.726,00	1.040.720.942,00	24,48	3.210.562.784,00
➢ Tambahan Penghasilan PNS	1.850.650.200,00	374.400.829,00	20,23	1.476.249.371,00
Total Belanja Tidak Langsung	6.101.933.926,00	1.415.121.771,00	23,19	4.686.812.155,00

Sedangkan Realisasi Anggaran Belanja Langsung (1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025) sebesar Rp. 30.279.645.303,00 atau 25,23% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp. 119.992.984.841,00 melalui pelaksanaan 2 Program ,16 Kegiatan dan 71 Sub Kegiatan. Secara rinci, besaran alokasi dana dan realisasinya untuk masing-masing program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut:

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
			TOTAL		
			ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	5	6	7	8
	SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**63.975.109.444,00**	**16.107.859.019,00**	25,18
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**473.235.344,00**	18.672.750,00	3,95
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	143.434.759,00	18.672.750,00	13,02
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	53.000.795,00		0,00
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	53.000.687,00		0,00
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	126.998.363,00		0,00
5		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.800.740,00		0,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.909.675.169,00	1.782.235.976,00	25,79
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.101.933.926,00	1.677.591.976,00	27,49
2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	405.495.715,00	47.640.000,00	11,75
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	78.013.376,00		0,00
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	288.874.319,00	**57.004.000,00**	19,73
5		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	35.357.833,00		0,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	583.994.762,00		0,00

1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	79.000.000,00		0,00
2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	504.994.762,00		0,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.853.042.217,00	**704.567.453,00**	24,70
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangun Kantor	51.548.399,00	9.786.000,00	18,98
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223.781.447,00	28.767.000,00	12,85
3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	111.372.512,00	8.943.000,00	8,03
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	876.500.000,00	96.836.000,00	11,05
5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	177.291.054,00	64.440.000,00	36,35
6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	478.299.793,00	134.792.000,00	28,18
7		Fasilitas Kunjungan Tamu	215.000.000,00	61.120.000,00	28,43
8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	719.249.012,00	299.883.453,00	41,69
		Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.172.220.690,00	528.500.000,00	16,66
1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	470.004.000,00	-	00.00
2		Pengandaan Mebel	906.874.000,00	162.500.000,00	17,92
3		Pengandaan Peralatan dan Mesin Lainnya	492.656.597,00	292.500.000,00	59,37
4		Pengandaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.302.686.093,00	73.500.000,00	5,64
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.157.000.000,00	1.173.510.769,00	22,76
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.000.000,00		0,00
2		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	693.000.000,00	67.510.769,00	9,74
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.440.000.000,00	1.106.000.000,00	24,91
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.919.510.412,00	273.371.425,00	9,36
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya,Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.130.000,00	6.336.500,00	14,04

2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Biaya Perizinan,Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan	384.000.000,00	54.281.200,00	14,14
3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	286.976.360,00	9.000.000,00	3,14
4		Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.395.106.808,00	203.753.725,00	14,60
5		Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	808.297.244,00		
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	39.109.411.715,00	11.434.094.446,00	29,24
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	37.925.911.715,00	11.431.919.923,00	30,14
1		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.033.500.000,00		0,00
2		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000,00	2.174.523,00	1,45
		Layanan Administrasi DPRD	2.797.019.135,00	192.906.200,00	6,90
1		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	800.999.946,00		
2		Fasilitasi Fraksi DPRD	48.997.689,00	12.388.200,00	25,28
3		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	867.808.404,00	65.698.000,00	7,57
4		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.079.213.096,00	114.820.000,00	10,64
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	**56.017.875.397,00**	**14.171.786.284,00**	25,30
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	6.349.475.488,00	261.490.556,00	4,12
1		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.273.768.012,00	261.490.556,00	20,53
2		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.275.707.476,00		
3		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	300.000.000,00		
4		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	450.000.000,00		
5		Penyusunan Tata Tertib DPRD	50.000.000,00		
		Pembahasan Kabijakan Anggaran	4.070.292.362,00	71.656.000,00	4,11
1		Pembahasan KUA dan PPAS	815.000.884,00		0,00
2		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	814.172.435,00		0,00
3		Pembahasan APBD	810.655.890,00	50.671.000,00	22,89

4		Pembahasan APBD Perubahan	814.460.522,00	20.985.000,00	4,54
5		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	816.002.631,00		0,00
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.875.941.671,00	999.758.365,00	17,01
1		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	895.926.683,00	173.811.980,00	19,40
2		Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur	805.011.232,00	166.990.690,00	20,74
3		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	942.429.475,00	177.924.959,00	18,88
4		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	849.397.308,00	193.808.520,00	22,82
5		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Leuangan Oeh Badan Pemeriksa Keuangan	1.705.250.419,00	287.222.216,00	16,84
6		Pengawasan Penggunaan Anggaran	17.021.689,00		0,00
7		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	660.904.865,00		
		Peningkatan Kapasitas DPRD	30.844.534.934,00	10.768.918.815,00	34,91
1		Orientasi DPRD	50.000.103,00		0,00
2		Pendalaman Tugas DPRD	4.050.997.423,00	637.066.015,00	15,73
3		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.459.714.316,00	854.789.800,00	58,56
4		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.728.000.000,00	288.000.000,00	16,67
5		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	384.000.000,00	160.000.000,00	41,67
6		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	23.071.823.092,00	8.829.063.000,00	38,27
7		Penyusunan Program Kerja DPRD	100.000.000,00		0,00
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	415.801.242,00	73.495.000,00	17,68
1		Kunjungan Kerja dalam Daerah	100.000.000,00		
2		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	99.989.580,00		0,00
3		Pelaksanaan Reses	215.801.439,00	73.495.000,00	34,06
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1.280.746.908,00		
1		Penyusunan Kode Etik DPRD	400.000.000,00		

2		Pengawasan Kode Etik DPRD	880.746.908,00		
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	7.181.082.792,00	1.996.467.548,00	27,80
1		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.864.384.221,00	1.737.446.572,00	35,72
2		Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	50.735.179,00		0,00
3		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2.265.963.392,00	259.020.976,00	11,43

PERKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN ANGGARAN 2025

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung di tahun 2025 memiliki anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 119.992.984.841,00 yang dialokasikan pada **2 Program serta 16 Kegiatan dan 71 Sub.Kegiatan.**

Berdasarkan hasil penilaian kinerja terhadap Program maupun Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025, serta perkiraan capaian Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, maka hasil penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun, 2020, 2021, 2022, 2023 , 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

a. Belum optimalnya koordinasi dalam Pelaksanaan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung yang menyebabkan tujuan kegiatan yang ingin dicapai belum tercapai dengan optimal.
b. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
c. Belum optimalnya kemampuan dan motivasi sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dalam mejalankan Tupoksinya.

Menyikapi masalah tersebut diatas maka strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan mempertegas peran dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
2. Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur dalam pelaksanaan tugas– tugasnya.
   a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishment), dan kesejahteraan pegawai.
   b. Peningkatan kemampuan teknis aparat.
   c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
   d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
3. Memfungsikan keberadaan operasional mobilitas kantor dalam peningkatan kinerja dan sinergisitas pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih efektif sehingga proses pelaksanaan Kegiatan menjadi lebihlancar.

Tabel TC. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung
KOTA BANDAR LAMPUNG

N0	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SPM/Standar Nasional	Target IKK		Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah								Realisasi Capaian				Proyeksi				Catatan Analisis
						Tahun n-2		Tahun n-1		Tahun-n		Tahun n +1		Tahun n-2		Tahun n-1		Tahun-4		Tahun-5		
						2024		2024		2025		2025		2024		2025		target		target		
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(5)		(6)		(7)		('8)		(9)		(10)		(11)		('12)		(13)
1	Persentase Raperda yang di bahas DPRD		80	%		80	%	80	%	80	%	80	%	94	%	80	%	80	%	80	%	
2	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD		80	%		80	%	80	%	80	%	80	%	112.63	%	80	%	80	%	80	%	
3	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD		80	%		80	%	80	%	80	%	80	%	71.89	%	80	%	80	%	80	%	

Sekretariat DPRD dalam menyusun Perubahan Renja 2025 tetap mendasarkan usulan dari semua unsur Alat Kelengkapan DPRD dan masing-masing bagian pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung yang nantinya tertuang dalam Rencana Kerja DPRD, disamping tetap memperhatikan realisasi tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi.
Beberapa alasan yang dapat dikemukakan diantaranya adalah:

1. Study Banding, Bimtek serta Pelatihan-pelatihan didaerah lain, ditahun anggaran 2025 akan tetap dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, pengetahuan serta menunjang kegiatan DPRD Kota Bandar Lampung.
2. Beberapa kegiatan tahun 2025 mengalami penyesuaian jumlah anggaran setelah melalui analisis kebutuhan terhadap rancangan awal RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

Formulir E.81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG

RENJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG

PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) (TAHUN 2025)	0								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN n-1) (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (Persen)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025(Persen)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			I		II		III		IV											
								RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	9	10		11		12		13		14		15 = (12/7)*100		16 = (12+6)		17 = (14/5)*100		18	
		4	02				SEKRETARIAT DPRD																			
	Meningkatnya Penyelenggaraan Sekretariat DPRD																									
		4	02	01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	63.975.109.444,00		16.107.859.019,00		-		-		-	-	16.107.859.019,00	100	25,18		225.516.509.692,00	100,00	53,92	Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

		4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**473.235.344,00**	**0 ,13**	**18.6 72.750,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100, 00**	**18.672. 750,00**	**200,0 0**	**3,9 5**		**85 2.807.610,0 0**	**-**	**2 5,98**	
		4	02	01	2.01	01	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**																				
								143.434.759,00	**0,1 3**	**18.672.7 50,00**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**4,0 0**	**18.672. 750,00**	**100,0 0**	**13, 02**	**8, 00**	**25 8.286.885,0 0**	**80, 00**	**2 4,92**	
		4	02	01	2.01	02	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**																				
								53.000.795,00	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**1, 00**	**-**	**100,0 0**	**-**	**2, 00**	**13 4.392.900,0 0**	**40, 00**	**4 3,97**	
		4	02	01	2.01	03	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**																				
								53.000.687,00	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**1, 00**	**-**	**100,0 0**	**-**	**2, 00**	**16 3.179.400,0 0**	**40, 00**	**5 3,39**	
		4	02	01	2.01	06	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**																				
								126.998.363,00	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,0 0**	**-**	**100,0 0**	**-**	**8, 00**	**6 1.309.525,0 0**	**40, 00**	**1 6,14**	
		4	02	01	2.01	07	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																				
								96.800.740,00	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,0 0**	**-**	**100,0 0**	**-**	**4, 00**	**23 5.638.900,0 0**	**40, 00**	**1 8,79**	
		4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.909.675.169,00**	**0, 59**	**1.782. 235.976,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80,0 0**	**1. 782.235 .976,00**	**100,0 0**	**25, 79**	**####**	**24.31 5.915.298,0 0**	**200 ,00**	**4 6,99**	
		4	02	01	2.02	01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**																				
								6.101.933.926,00	**0,2 7**	**1.677. 591.976,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1. 677.591 .976,00**	**#VALUE !**	**27, 49**	**-**	**21.23 2.356.172,0 0**	**-**	**5 0,39**	

		4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
								405.495.715,00	0,12	47.640.000,00	-	-	-	-	-	-	12,00	47.640.000,00	100,00	11,75	24,00	1.892.483.626,00	40,00	25,55	
		4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
								78.013.376,00	-	-	-		-		-	-	1,00	-	100,00	-	2,00	243.125.500,00	40,00	49,18	
		4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																		
								288.874.319,00	0,20	57.004.000,00	-	-	-	-	-	-	16,00	57.004.000,00	100,00	19,73	32,00	821.986.960,00	53,33	55,35	
		4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
								35.357.833,00	-		-		-	-	-	-	2,00	-	100,00	-	4,00	125.963.040,00	40,00	56,58	
		4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**583.994.762,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**80,00**	-	**100,00**	-	**#####**	**241.749.592,00**	**200,00**	**6,71**	
		4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
								79.000.000,00	-		-		-		-	-	2,00	-	100,00	-	4,00	43.750.000,00	80,00	14,85	
		4	02	01	2.05	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
								504.994.762,00	-		-	-	-	-	-	-	50,00	-	100,00	-	#####	197.999.592,00	250,00	5,99	

		4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.853.042.217,00**	**1 ,86**	**704.5 67.453,00**	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**80,0 0**	**704.567 .453,00**	**100,0 0**	**24, 70**	**#### #**	**8.91 8.458.966,0 0**	**200 ,00**	**3 1,34**	
		4	02	01	2.06	01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**																				
								51.548.399,00	0,1 9	9.7 86.000,00	-		-	-	-	-	1, 00	9.786.0 00,00	100,0 0	18, 98	2, 00	15 2.523.805,0 0	40, 00	4 5,19	
		4	02	01	2.06	02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**																				
								223.781.447,00	0,1 3	28.7 67.000,00	-	-	-	-	-	-	1, 00	28.767. 000,00	100,0 0	12, 85	2, 00	51 3.381.638,0 0	40, 00	5 2,27	
		4	02	01	2.06	03	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**																				
								111.372.512,00	0,0 8	8.9 43.000,00	-	-	-	-	-	-	1, 00	8.943.0 00,00	100,0 0	8,0 3	2, 00	33 6.432.420,0 0	40, 00	4 6,13	
		4	02	01	2.06	04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**																				
								876.500.000,00	0,1 1	96.8 36.000,00	-	-	-	-	-	-	1, 00	96.836. 000,00	100,0 0	11, 05	2, 00	1.73 4.080.500,0 0	40, 00	4 4,40	
		4	02	01	2.06	05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**																				
								177.291.054,00	0,3 6	64.4 40.000,00	-	-	-	-	-	-	1, 00	64.440. 000,00	100,0 0	36, 35	2, 00	64 2.572.540,0 0	40, 00	6 6,31	
		4	02	01	2.06	06	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**																				
								478.299.793,00	0,2 8	134.7 92.000,00	-	-	-	-	-	-	1, 00	134.792 .000,00	100,0 0	28, 18	2, 00	1.27 9.466.000,0 0	40, 00	1 9,85	
		4	02	01	2.06	08	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**																				
								215.000.000,00	0,2 8	61. 120.000,00	-	-	-	-	-	-	1, 00	61.120. 000,00	100,0 0	28, 43	2, 00	31 6.020.500,0 0	40, 00	2 9,25	

		4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
								719.249.012,00	0,42	299.883.453,00	-	-	-	-	-	-	1,00	299.883.453,00	100,00	41,69	2,00	3.943.981.563,00	40,00	28,15	
		4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.172.220.690,00**	**0,83**	**528.500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80,00**	**528.500.000,00**	**100,00**	**16,66**	**#####**	**7.076.760.500,00**	**200,00**	**45,26**	
		4	**02**	**01**	**2.07**	**02**	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**																		
								470.004.000,00	-	-	-		-		-	-	5,00	-	100,00	-	10,00	534.164.000,00	50,00	101,98	
		4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel																		
								906.874.000,00	0,18	162.500.000,00	-		-		-	-	79,00	162.500.000,00	100,00	17,92	#####	833.520.000,00	790,00	21,44	
		4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
								492.656.597,00	0,59	292.500.000,00	-	-	-		-	-	56,00	292.500.000,00	100,00	59,37	112,00	1.208.400.000,00	746,67	47,02	
		4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
								1.302.686.093,00	0,06	73.500.000,00	-	-	-	-	-	-	452,00	73.500.000,00	100,00	5,64	#####	4.500.676.500,00	2.008,89	52,01	
		4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.157.000.000,00**	**0,35**	**1.173.510.769,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80,00**	**1.173.510.769,00**	**100,00**	**22,76**	**#####**	**22.006.078.890,00**	**200,00**	**53,56**	
		4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
								24.000.000,00	-		-		-		-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	69.357.250,00	-	19,95	
		4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

								693.000.000,00	0,10	67.510.769,00	-	-	-	-	-	-	1,00	67.510.769,00	100,00	9,74	2,00	1.964.146.640,00	3,33	58,13	
		4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
								4.440.000.000,00	0,25	1.106.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.106.000.000,00	100,00	24,91	2,00	19.972.575.000,00	3,33	53,46	
		4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.919.510.412,00**	**0,46**	**273.371.425,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80,00**	**273.371.425,00**	**100,00**	**9,36**	**####**	**3.450.220.685,00**	**200,00**	**28,29**	
		4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
								45.130.000,00	0,14	6.336.500,00	-		-	-	-	-	1,00	6.336.500,00	100,00	14,04	2,00	129.317.000,00	40,00	41,43	
		4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
								384.000.000,00	0,14	54.281.200,00	-	-	-	-	-	-	20,00	54.281.200,00	100,00	14,14	40,00	1.177.631.710,00	800,00	30,83	
		4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
								286.976.360,00	0,03	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	224,00	9.000.000,00	100,00	3,14	####	712.264.000,00	8.960,00	59,61	
		4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
								1.395.106.808,00	0,15	203.753.725,00	-	-	-	-	-	-	1,00	203.753.725,00	100,00	14,60	2,00	1.431.007.975,00	40,00	35,16	

						11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	808.297.244,00	-	-	-		-		-									
		4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**39.109.411.715,00**	**0,32**	**11.434.094.446,00**	-	-	-	-	-	-	**80,00**	**11.434.094.446,00**	**100,00**	**29,24**	**####**	**152.987.082.527,00**	**200,00**	**61,64**	
		4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																			
								37.925.911.715,00	**0,30**	**11.431.919.923,00**	-	-	-	-	-	-	**50,00**	**11.431.919.923,00**	**100,00**	**30,14**	**####**	**150.613.117.482,00**	**200,00**	**62,24**	
		4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																			
								1.033.500.000,00	-		-		-	-	-	-	**6,00**	-	**100,00**	-	**12,00**	**2.279.750.000,00**	**60,00**	**43,71**	
		4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																			
								150.000.000,00	**0,01**	**2.174.523,00**	-	-	-	-	-	-	**50,00**	**2.174.523,00**	**100,00**	**1,45**	**####**	**94.215.045,00**	**2.000,00**	**9,59**	
		4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**2.797.019.135,00**	**0,43**	**192.906.200,00**	-	-	-	-	-	-	**80,00**	**192.906.200,00**	**100,00**	**6,90**	**####**	**5.667.435.624,00**	**200,00**	**40,22**	
		4	**02**	**01**	**2.16**	**01**	**Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD**																			
								800.999.946,00	-		-	-	-	-	-	-	**1,00**	-	**100,00**	-	**2,00**	**278.159.343,00**	**2,50**	**11,49**	
		4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD																			
								48.997.689,00	**0,25**	**12.388.200,00**	-		-	-	-	-	**1,00**	**12.388.200,00**	**100,00**	**25,28**	**2,00**	**169.477.384,00**	**40,00**	**52,82**	

		4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																			
								867.808.404,00	0,08	65.698.000,00	-	-	-	-	-	-	3,00	65.698.000,00	100,00	7,57	6,00	2.806.058.800,00	120,00	67,66	
		4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																			
								1.079.213.096,00	0,11	114.820.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	114.820.000,00	100,00	10,64	2,00	2.413.740.097,00	40,00	33,51	
																	Rata-Rata Capaian Kerja		100,00	25,18	-	-	100,00	53,92	
																	Predikat Kinerja		ST	SR			T	R	
		4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	56.017.875.397,00		14.171.786.284,00		-		-				14.171.786.284,00	100,00	25,30	-	111.668.619.944,00	100,00	41,95	
		4	02	02	2.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	6.349.475.488,00	0,21	261.490.556,00	-	-	-	-	-	-	80,00	261.490.556,00	100,00	4,12	#####	12.155.971.436,00	200,00	23,74	
		4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																			
								1.273.768.012,00	0,21	261.490.556,00	-	-	-	-	-	-	1,00	261.490.556,00	100,00	20,53	2,00	2.670.487.823,00	5,71	18,77	
		4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																			
								4.275.707.476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	-	100,00	-	16,00	7.523.181.276,00	32,00	23,40	
		4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																			
								300.000.000,00	-		-	-	-	-	-	-	4,00	-	100,00	-	8,00	219.276.315,00	160,00	17,42	
		4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik																			

							450.000.000,00	-		-		-	-	-	-	6,00	-	100,00	-	12,00	1.707.497.865,00	40,00	58,28	
		4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
							50.000.000,00							-	-	1,00	-	100,00	-	2,00	3 5.528.157,00	40,00	5,46	
		4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**4.070.292.362,00**	**0,09**	**71.656.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**71.656.000,00**	**100,00**	**1,76**	**#####**	**6.98 2.190.217,00**	**200,00**	**3 0,64**	
		4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS																		
							815.000.884,00	-		-	-	-	-	-	-	1,00	-	100,00	-	2,00	1.227.888.724,00	40,00	26,94	
		4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
							814.172.435,00	-		-	-	-	-	-	-	1,00	-	100,00	-	2,00	1.454.999.547,00	40,00	31,93	
		4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD																		
							810.655.890,00	0,06	50.671.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	50.671.000,00	100,00	6,25	2,00	1.408.197.141,00	40,00	30,90	
		4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan																		
							814.460.522,00	0,03	20.985.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	20.985.000,00	100,00	2,58	2,00	1.425.875.322,00	40,00	31,29	
		4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
							816.002.631,00	-		-	-	-	-	-	-	1,00	-	100,00	-	2,00	1.465.229.483,00	40,00	32,15	

		4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**5.875.941.671,00**	**0,99**	**999.758.365,00**	-	-	-	-	-	-	-	**80,00**	**999.758.365,00**	**100,00**	**17,01**	**####**	**14.463.327.811,00**	**200,00**	**3 3,99**	
		4	02	02	2.03	01	**Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum**																				
								895.926.683,00	**0,19**	**173.811.980,00**	-	-	-	-	-	-	-	**3,00**	**173.811.980,00**	**100,00**	**19,40**	**6,00**	**2.506.727.813,00**	**60,00**	**3 6,32**	
		4	02	02	2.03	02	**Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur**																				
								805.011.232,00	**0,21**	**166.990.690,00**	-	-	-	-	-	-	-	**3,00**	**166.990.690,00**	**100,00**	**20,74**	**6,00**	**2.484.937.978,00**	**60,00**	**3 5,18**	
		4	02	02	2.03	03	**Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat**																				
								942.429.475,00	**0,19**	**177.924.959,00**	-	-	-	-	-	-	-	**3,00**	**177.924.959,00**	**100,00**	**18,88**	**6,00**	**3.474.250.607,00**	**60,00**	**5 0,58**	
		4	02	02	2.03	04	**Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian**																				
								849.397.308,00	**0,23**	**193.808.520,00**	-	-	-	-	-	-	-	**3,00**	**193.808.520,00**	**100,00**	**22,82**	**6,00**	**3.065.567.947,00**	**60,00**	**4 4,21**	
		4	02	02	2.03	06	**Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan**																				
								1.705.250.419,00	**0,17**	**287.222.216,00**	-	-	-	-	-	-	-	**3,00**	**287.222.216,00**	**100,00**	**16,84**	**6,00**	**2.183.993.217,00**	**120,00**	**3 2,46**	
		4	02	02	2.03	07	**Pengawasan Penggunaan Anggaran**																				
								17.021.689,00	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**1,00**	**-**	**100,00**	**-**	**2,00**	**-**	**40,00**	**-**	
		4	02	02	2.03	08	**Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah**																				
								660.904.865,00	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**1,00**	**-**	**100,00**	**-**	**2,00**	**747.850.249,00**	**40,00**	**2 2,48**	
		4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**30.844.534.934,00**	**1,71**	**10.768.918.815,00**	-	-	-	-	-	-	-	**80,00**	**10.768.918.815,00**	**100,00**	**34,91**	**####**	**63.472.445.660,00**	**200,00**	**8 3,19**	

		4	**02**	**02**	**2.04**	**01**	**Orientasi DPRD**																						
								50.000.103,00								-	-	-	-	**1,00**	-	**100,00**	-	**2,00**	**47 8.829.190,00**	**40,00**	**24,52**	
		4	02	02	2.04	02	**Pendalaman Tugas DPRD**																						
								4.050.997.423,00	**0,16**	**637.066.015,00**	-	-	-	-	-	-	-	**6,00**	**637.066.015,00**	**100,00**	**15,73**	**12,00**	**8.270.408.457,00**	**40,00**	**35,91**	
		4	02	02	2.04	08	**Publikasi dan Dokumentasi Dewan**																						
								1.459.714.316,00	**0,59**	**854.789.800,00**	-	-	-	-	-	-	-	**4,00**	**854.789.800,00**	**100,00**	**58,56**	**8,00**	**11.226.685.713,00**	**160,00**	**34,99**	
		4	02	02	2.04	04	**Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli**																						
								1.728.000.000,00	**0,17**	**288.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	**36,00**	**288.000.000,00**	**100,00**	**16,67**	**72,00**	**6.912.000.000,00**	**120,00**	**58,37**	
		4	02	02	2.04	05	**Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi**																						
								384.000.000,00	**0,42**	**160.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	**8,00**	**160.000.000,00**	**100,00**	**41,67**	**16,00**	**1.568.000.000,00**	**26,67**	**62,72**	
		4	02	02	2.04	06	**Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat**																						
								23.071.823.092,00	**0,38**	**8.829.063.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	**4,00**	**8.829.063.000,00**	**100,00**	**38,27**	**8,00**	**35.002.822.300,00**	**80,00**	**2.150,58**	
		4	02	02	2.04	07	**Penyusunan Program Kerja DPRD**																						
								100.000.000,00	-		-		-		-		-	**1,00**	-	**100,00**	-	**2,00**	**13.700.000,00**	**40,00**	**0,42**	

		4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**415.801.242,00**	**0,34**	**73.495.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	**80,00**	**73.495.000,00**	**100,00**	**17,68**	**####**	**1.479.471.059,00**	**200,00**	**3,01**	
		4	**02**	**02**	**2.05**	**01**	**Kunjungan Kerja dalam Daerah**																				
								100.000.000,00	-		-		-	-	-		**1,00**	-	**100,00**	-	**2,00**	-	**20,00**	-	
		4	02	02	2.05	02	**Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD**																			
								99.999.803,00	-		-		-	-	-	-	**1,00**	-	**100,00**	-	**2,00**	**45.610.659,00**	**40,00**	**4,67**	
		4	02	02	2.05	03	**Pelaksanaan Reses**																			
								215.801.439,00	**0,34**	**73.495.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3,00**	**73.495.000,00**	**100,00**	**34,06**	**6,00**	**1.433.860.400,00**	**40,00**	**5,76**	
		4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**1.280.746.908,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**80,00**	-	**100,00**	-	**####**	**1.033.383.675,00**	**200,00**	**13,23**	
		4	**02**	**02**	**2.06**	**01**	**Penyusunan Kode Etik DPRD**																			
								400.000.000,00		-						-	**1,00**	-	**100,00**	-	**2,00**	**423.951.415,00**	**40,00**	**11,84**	
		4	02	02	2.06	02	**Pengawasan Kode Etik DPRD**																			

								880.746.908,00	-		-	-	-		-	-	3,00	-	100,00	-	6,00	60 9.432.260,00	120,00	1 4,40	
		4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	7.181.082.792,00	0,47	1.996. 467.548,00	-	-	-	-	-	-	80,00	1. 996.467 .548,00	100,00	27,80	#####	12.08 1.830.086,00	200,00	7 3,99	
		4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
								4.864.384.221,00	0,36	1.737. 446.572,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1. 737.446 .572,00	100,00	35,72	2,00	8.85 5.005.142,00	40,00	9 0,06	
		4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
								50.735.179,00	-		-	-	-		-	-	1,00	-	100,00	-	2,00	8.413.100,00	40,00	1,72	
		4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
								2.265.963.392,00	0,11	259.0 20.976,00	-	-	-	-	-	-	3,00	259.020 .976,00	100,00	11,43	6,00	3.21 8.411.844,00	120,00	5 3,57	
																	Rata-Rata Capaian Kerja		100,00	25,30	-	-	100,00	41,95	
																	Predikat Kinerja		ST	SR			ST	SR	
								119.992.984.841,00		30.279. 645.303,00		-		-		-		30. 279.645 .303,00				337.18 5.129.636,00			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung pada Tahun 2025 meliputi tujuan dan indikator tujuan; sasaran dan indikator sasaran; program dan indikator program; kegiatan dan indikator kegiatan; dan target yang ingin dicapai pada Tahun 2025. Program yang dirancang Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung dalam Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 terdiri dari :

Program Utama

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program Penunjang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun pendanaan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut diatas bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

Secara Rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dalam Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2025 disajikan dalam Tabel 3.1.

TABEL 3.1

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	PROGRAM	BIDANG URUSAN		KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD								104.228.310.141,00	119.992.984.841,00	126.823.154.216,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								104.228.310.141,00	119.992.984.841,00	126.823.154.216,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD								104.228.310.141,00	119.992.984.841,00	126.823.154.216,00	

129	**4**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**-**	**Dokumen**	**-**	**Ada**	**Ada**	**63.652.697.781,00**	**63.975.109.444,00**	**65.512.004.762,00**	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**%**	**-**	**100**	**100**	**473.235.880,00**	**473.235.344,00**	**473.235.344,00**	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											SEKRETARIAT DPRD
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	4	4	4	143.434.784,00	143.434.759,00	143.434.759,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											

								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	53.000.801,00	53.000.795,00	53.000.795,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	53.000.801,00	53.000.687,00	53.000.687,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3	4	4	126.998.562,00	126.998.363,00	126.998.363,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	2	2	2	96.800.932,00	96.800.740,00	96.800.740,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	-	**%**	-	**100**	**100**	**7.953.721.048,00**	**6.909.675.169,00**	**6.978.173.532,00**	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	Orang/ bulan	58	58	58	7.145.979.142,00	6.101.933.926,00	6.101.933.926,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12.00 Dokumen	Dokumen	12.00 Dokumen	12	12	405.495.783,00	405.495.715,00	405.495.715,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	78.013.546,00	78.013.376,00	146.511.739,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	16	16	16	288.874.441,00	288.874.319,00	288.874.319,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Dokumen	2	2	2	35.358.136,00	35.357.833,00	35.357.833,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian SETWAN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian SETWAN**	**-**	**%**	**-**	**80**	**80**	**583.994.762,00**	**583.994.762,00**	**155.169.855,00**	
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	1	2	2	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
								Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang	30	50	8	504.994.762,00	504.994.762,00	76.169.855,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**-**	**%**	**-**	**98**	**98**	**2.803.041.945,00**	**2.853.042.217,00**	**3.209.194.579,00**	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	51.548.688,00	51.548.399,00	51.548.399,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	223.781.646,00	223.781.447,00	223.781.447,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											

								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	111.377.696,00	111.372.512,00	11.372.512,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	876.500.000,00	876.500.000,00	876.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	177.291.307,00	177.291.054,00	177.291.054,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											

								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	478.299.793,00	478.299.793,00	613.091.793,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	165.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	719.242.815,00	719.249.012,00	1.040.609.374,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengadaan Barang Milik Daerah**	**-**	**%**	**-**	**98**	**98**	**2.526.833.755,00**	**3.172.220.690,00**	**3.371.940.190,00**	
	4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	4	5	5	470.004.000,00	470.004.000,00	470.004.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	8	79	79	304.330.490,00	906.874.000,00	906.874.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	4	56	56	492.656.597,00	492.656.597,00	492.656.597,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	7	452	452	1.259.842.668,00	1.302.686.093,00	1.502.405.593,00	HUTANG SEKRETARIAT DPRD TH 2023 199.719.500
	4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**-**	**%**	**-**	**100**	**100**	**5.830.000.000,00**	**5.157.000.000,00**	**5.157.000.000,00**	
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Laporan	1	1	1	25.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	693.000.000,00	693.000.000,00	693.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1 Laporan	1	1	5.112.000.000,00	4.440.000.000,00	4.440.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**-**	**%**	**-**	**98**	**98**	**2.039.217.244,00**	**2.919.510.412,00**	**3.346.860.412,00**	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	45.130.000,00	45.130.000,00	45.130.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	17	20	20	384.000.000,00	384.000.000,00	411.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	224	224	371.790.000,00	286.976.360,00	286.976.360,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	430.000.000,00	1.395.106.808,00	1.795.106.808,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	808.297.244,00	808.297.244,00	808.297.244,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**-**	**%**	**-**	**100**	**100**	**38.949.291.715,00**	**39.109.411.715,00**	**40.253.411.715,00**	

	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD										
								Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	Orang/Bulan	12	50	50	37.532.791.715,00	37.925.911.715,00	39.069.911.715,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD										
								Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	Paket	50	6	6	1.266.500.000,00	1.033.500.000,00	1.033.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD										
								Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	Orang	50	50	50	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi DPRD**	**-**	**%**	**-**	**98**	**98**	**2.493.361.432,00**	**2.797.019.135,00**	**2.567.019.135,00**	

	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD										
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	426.000.000,00	800.999.946,00	570.999.946,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD										
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	Laporan	1	1	1	48.999.680,00	48.997.689,00	48.997.689,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD										
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	Laporan	1	1	1	867.808.404,00	867.808.404,00	867.808.404,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD										

								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	1.150.553.348,00	1.079.213.096,00	1.079.213.096,00	SEKRETARIAT DPRD
1 3 0	**4**	**02**	**0 2**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**-**	**Dokumen**	**-**	**Ada**	**Ada**	**40.575.612.360,00**	**56.017.875.397,00**	**61.311.149.454,00**	
	4	**02**	**0 2**	**2. 0 1**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**-**	**%**	**-**	**80**	**80**	**6.258.791.145,00**	**6.349.475.488,00**	**4.765.031.533,00**	

	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah											
								Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	Dokumen	100	1	1	1.483.083.669,00	1.273.768.012,00	864.645.012,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah											
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	Dokumen	7	8	9	3.975.707.476,00	4.275.707.476,00	2.875.386.521,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan											
								Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	Dokumen	100	4	4	300.000.000,00	300.000.000,00	450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik											
								Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	Dokumen	6	6	6	450.000.000,00	450.000.000,00	525.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Penyusunan Tata Tertib DPRD											
								Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	1	1	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**-**	**%**	**-**	**100**	**100**	**4.582.083.610,00**	**4.070.292.362,00**	**2.330.777.362,00**	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS											

								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	Dokumen	1	1	1	914.112.383,00	815.000.884,00	441.500.884,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS											
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	Dokumen	1	1	1	913.898.430,00	814.172.435,00	440.672.435,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Pembahasan APBD											
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	912.418.585,00	810.655.890,00	810.655.890,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan											
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	909.298.585,00	814.460.522,00	461.945.522,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD											
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	932.355.627,00	816.002.631,00	176.002.631,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**-**	**%**	**-**	**100**	**100**	**6.425.174.617,00**	**5.875.941.671,00**	**1.984.223.939,00**	
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum											
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	Laporan	2	3	3	995.926.683,00	895.926.683,00	189.485.809,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur											

								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	Laporan	2	3	3	905.011.232,00	805.011.232,00	179.434.564,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat											
								Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	Laporan	2	3	3	1.042.429.475,00	942.429.475,00	195.726.684,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian											
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	Laporan	2	3	3	949.397.308,00	849.397.308,00	206.947.714,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan											
								Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	Dokumen	1	3	3	1.854.483.365,00	1.705.250.419,00	1.025.250.419,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran											
								Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	Dokumen	1	1	1	17.021.689,00	17.021.689,00	17.010.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah											

								Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	660.904.865,00	660.904.865,00	170.368.749,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**-**	**%**	**-**	**98**	**98**	**13.261.935.566,00**	**30.844.534.934,00**	**43.421.724.744,00**	
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Orientasi DPRD											
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	50.000.103,00	50.000.103,00	17.246.905,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD											
								Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	Dokumen	6	6	6	3.550.997.423,00	4.050.997.423,00	3.354.119.488,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli											

								Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	Orang	36	36	36	1.728.000.000,00	1.728.000.000,00	1.728.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi											
								Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	Orang	8	8	8	384.000.000,00	384.000.000,00	480.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat											
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	Dokumen	2	12	19	5.989.223.330,00	23.071.823.092,00	35.551.935.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD											
								Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	24.013.435,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD											

								Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	Dokumen	1	4	4	1.459.714.710,00	1.459.714.316,00	2.266.409.316,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**-**	**%**	**-**	**90**	**90**	**415.801.662,00**	**415.801.242,00**	**389.286.019,00**	
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kunjungan Kerja dalam Daerah											
								Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD											
								Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	1	1	99.999.803,00	99.999.803,00	99.989.580,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses											

								Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	Dokumen	3	3	3	215.801.859,00	215.801.439,00	289.296.439,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**-**	**%**	**-**	**100**	**100**	**1.280.746.908,00**	**1.280.746.908,00**	**1.001.141.841,00**	
	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD											
								Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	400.000.000,00	400.000.000,00	399.841.491,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD											
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	Laporan	1	3	2	880.746.908,00	880.746.908,00	601.300.350,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatas Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatas Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**-**	**%**	**-**	**100**	**100**	**8.351.078.852,00**	**7.181.082.792,00**	**7.418.964.016,00**	

	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD											
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.034.379.808,00	4.864.384.221,00	6.217.933.865,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD											
								Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	Laporan	1	1	1	50.735.652,00	50.735.179,00	50.735.179,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah											
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	Dokumen	1	3	3	2.265.963.392,00	2.265.963.392,00	1.150.294.972,00	SEKRETARIAT DPRD

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

RENCANA KERJA PERUBAHAN

RSD dr. A. DADI TJOKRODIPO KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	√			
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	√			
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, Juli 2025

Plt. Direktur
RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo
Kota Bandar Lampung,

dr. Teti Herawati, M.H.
Pembina / IVa
NIP 19710403 2002122 2 008

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.	
	Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappperida Kota Bandar Lampung	
2	RENI MARITA SUDEMI, S.H., M.H.	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui;
Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung,

Dini Purnamawaty, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.197002181993032002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan.	√			
4.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masingPerangkat Daerah sesuai surat edaranwalikota.	√			
5.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah	√			
6.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.		√	Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025

Plt. Direktur
RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo
Kota Bandar Lampung,

dr. Teti Herawati, M.H.
Pembina / IV/a
NIP 19710403 2002122 2 008

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.**	
	Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappperida Kota Bandar Lampung	
2	**RENI MARITA SUDEMI, S.H., M.H.**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui;
Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung,

Dini Purnamawaty, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19702181993032002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi RenjaPerangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Telah Sesuai
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Telah Sesuai

Bandar Lampung, Juli 2025

Mengetahui;
Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung,

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.**	
	Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappperida Kota Bandar Lampung	
2	**RENI MARITA SUDEMI, S.H., M.H.**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

Dini Purnamawaty, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19700218199303200 2

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan..... 6
1.4. Sistematika Penulisan..... 7

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 12
2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 30

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 30

3.2 Tujuan dan sasaran Renja RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung..... 30

3.3 Program dan Kegiatan..... 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 38

BAB V PENUTUP..... 40

LAMPIRAN 03
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616/IV.01/HK/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11

menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : ***"BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT"***

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.

6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata Kelola RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-2 (dua) dalam RPJMD Tahun 2016–2021 yaitu ***Mewujudkan Good Governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.*** Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, pada Tahun 2025 RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan Perubahan yang akan dilaksanakan oleh RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusun Renja RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025
18. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Wali Kota.
2. Sebagai acuan bagi RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025.

3. Sebagai acuan bagi RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas

pokok dan fungsi RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung.

3.3. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang Perubahan rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2025 berdasarkan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja dan Sasaran dengan Pagu Indikatif tahun yang direncanakan serta prakiraan maju .

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD

Rencana Kerja (Renja) RSD dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis RSD dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Perubahan Renja RSD dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini menyajikan Dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh RSD dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung selama tahun 2024, serta perkiraan target tahun 2025. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang didukung dengan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 0,-

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp.18.651.965.184,-
   - Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Rp.51.880.000,-
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp.994.274.283,-
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp.5.015.500.000,-

2). Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab./ Kota pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :
   - Pengadaan Alat Kesehatan/ Penunjang Rp. 4.975.838.374,-
   - Pengembangan Rumah Sakit (DAK) Rp. 8.637.014.962,-
   - Pengadaan Obat, Vaksin Rp. 315.410.200,-
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :
   - Operasional Pelayanan Rumah Sakit Rp.32.761.675.522,-

Evaluasi Program Tahun 2024

Total realisasi belanja RSD dr. A Dadi Tjokrodipo sumber dana APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 38.641.0883.003,00 Dan BLUD sebesar 32.761.675.522,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

1) Kinerja RSD

I. Kinerja Mutu Pelayanan

Tabel 2.1

Kinerja RSD Dr. A Dadi Tjokrodipo Tahun 2024

PAREMETER	SATUAN	STANDAR	HASIL 2024
BOR	%	60-85	77
LOS	Hari	6-9	3
TOI	Hari	1-3	4
BTO	Kali	40-50	50
NDR	^{0}/00	≤25	8
GDR	^{0}/00	≤25	18

Sumber : RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Tahun 2024

1) BED OCCUPANCY RATE (BOR)

BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit. Pada tahun 2019 sudah menunjukkan angka ideal 58%. Dan di tahun 2020 terjadi penurunan sebagai dampak dari pandemi *covid-19* yaitu 39% dan pada 2021 mencapai 36.5% di tahun 2022, 2023 dan 2024 sebesar 45%, 66% dan 77%

2) AVERAGE LENGTH OF STAY (AV LOS)

LOS adalah rata-rata lama perawatan seorang pasien. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas dan memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. Hasil pengukuran LOS pada tahun 2019 dan 2021 berada pada angka 4.29 hari dan 3,6 hari di 2022 serta 3 hari di tahun 2023. Sementara di tahun 2024 sebesar 3 hari

3) TURN OVER INTERVAL (TOI)

TOI adalah Interval penggunaan tempat tidur dari saat kosong hingga terpakai kembali sebagai gambaran tingkat effektifitas penggunaan tempat tidur. TOI pada tahun 2013 sampai 2018 yaitu 0 - 2. Sedangkan tahun 2019 dan 2020 mencapai angka 3 masih dalam batas normal seperti halnya di tahun 2021 sebesar 2.7 hari dan 3,29 hari di 2022 serta 4 hari di tahun 2023, Sementara di tahun 2024 sebesar 4 hari

4) BED TURN OVER (BTO)

BTO adalah frekwensi pemakaian tempat tidur dalam satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tingkat effektifitas pada pemakaian tempat tidur. Pada 2019 BTO sudah sesuai dengan standar yaitu 47 kali dan 40 kali pada 2020 dan 23.3 di tahun 2021 dan di tahun 2022 sebanyak 32 kali serta 56 kali di tahun 2023. Sementara di tahun 2024 sebanyak 50 kali.

5) GROSS DEATH RATE (GDR)

GDR adalah jumlah angka kematian umum bagi setiap 1000 pasien keluar. Indikator ini memberikan gambaran angka kematian total penderita keluar (hidup dan mati). Pada tahun

2019 sebanyak 10,1‰ dan tahun 2020 sebanyak 10 ‰ Sedangkan di tahun 2021 sebesar 0.11‰ dan tahun 2022 sebesar 0.029 ‰ serta di Tahun 2023 sebesar 16 ‰. Sementara di tahun 2024 sebesar 8‰

6) NET DEATH RATE (NDR)

NDR adalah jumlah angka kematian lebih dari > 48 jam setelah dirawat bagi setiap 1000 pasien keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. Pada tahun 2019 sebanyak 19,7 ‰ dan di tahun 2020 mencapai angka 19 ‰ dan di 2021 sebesar 0,022 ‰ serta 9 ‰ di Tahun 2023 Sementara di tahun 2024 sebesar 18‰

Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Pencapaian
Gawat Darurat	1. Kemampuan menangani live saving anak dan dewasa	100%	100%
	2. Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam	24 jam
	3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang masih bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%	75%
	4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim	1 tim
	5. Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat	≤ 5 menit terlayani	< 5 menit
	6. Kepuasan pelanggan	≥ 70%	90%
	7. Kematian pasien < 24 jam	< 2/1000 (pindah ke RI setelah 8 jam	$6^0/_{00}$
	8. Tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%
Rawat Jalan	1. Dokter pemberi palayanan di poliklinik spesialis	100% Dokter spesialis	100%
	2. Ketersediaan Pelayanan	a. Anak b.P.Dlam c.Kebidanan d. Bedah	100%

	3.	Jam buka pelayanan	08 s/d 13 Jum'at 08-11 WIB	100%
	4.	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	100%
	5.	Kepuasan pelanggan	≥ 90%	90,35%
	6a	Penengakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60%	100%
	b	Terlaksananya pencatatan dan pelaporan TB di RS	≤ 60%	100%
Rawat Inap	1.	Pemberi pelayanan di rawat inap	Dr Spesialis, Perawat Min D3	99,5%
	2.	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%
	3.	Ketersediaan pelayanan rawat inap	Anak, Dalam, Kebidnaan, Bedah	99.50
	4.	Jam visit dokter spesialis	08.00 -14.00 /tiap hari kerja	99.5%
	5.	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	0%
	6.	Kejadian infeksi nasokomial	≤ 1,5 %	Flebstis 5 $^{0}/_{00}$ I do 6%
	7.	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian	100%	100%
	8.	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24 %	1%
	9.	Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	0%
	10.	Kepuasan pelanggan	≥ 90%	90,35%
	11.	Rawat Inap TB a.Penegakan Diagnosa TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	>60%	100%
		b.Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	>60%	100%
	12	Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri	100%	100%
	13	Kejadian re admission pasien gangguan jiwa dalam waktu , 1 bulan	100%	100%
	14	Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa	> 6 minggu	-
Bedah Sentral (Bedah Saja)	1.	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	> 2 hari
	2.	Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %	0%

	3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%
	4. Tidka adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%
	5. Tidak adanya kejadian salah Tindakan pada operasi	100%	100%
	6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/ lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%
	7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anastesi, dan salah penempatan anastesi endotracheal tube	≤ 6%	100%
Persalinan, perinatologi (kecuali rumah sakit khusus diluar rumah sakit ibu dan anak dan KB	1. Kejadian kematian ibu karena persalinan	a.Perdarahan ≤1% b.Pra-eklam ≤30% c.Sepsis ≤ 0,2%	a.0 b.0 c.0
	2. Pemberi pelayanan persalinan normal	a.Dokter Sp.OG b.Dokter umum terlatih APN c.Bidan	100%
	3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK terlatih	1 dari 4
	4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	a. Dokter Sp.OG b.Dokter Sp.A c.Dokter Sp.An	100%
	5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100%	100%
	6. Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria non rujukan	≤ 20%	0%
	7. Keluarga berencana		
	a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr. Sp.OG, dr. Sp.B, dr.Sp.U, dr umum terlatih	100%	100%
	b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	100%	100%
	8. Kepuasan pelanggan	≥ 80%	90,35%
Intensif	1 Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	0%
	2 Pemberi pelayanan unit intensif	a.Dokter sp.Anastesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus ditangani. B.100% perawat	a.100% b. 43%

		minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara (D4)	
Radiologi	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	65,94%
	2. Pelaksanaan ekspertisi	Dokter Sp. Rad	46,70%
	3. kejadian kegagalan pelayanan rontgen	Kersakan foto <2%	0.33%
	4. Kepuasan pelanggan	≥ 80%	90,35
Lab. Patologi Klinik	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit kimia darah & darah rutin	81 menit
	2. Pelaksanaan ekspertisi	Dokter Sp.PK	97,76%
	3. Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%
	4. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	90,35%
Rahabilitasi Medik	1. Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	≤ 50%	9.62%
	2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabitisai medik	100%	100%
	3. Kepuasan pelanggan	≥ 80%	90,35
Farmasi	1. Waktu tunggu pelayanan		
	a. obat jadi	≤ 30 menit	75,33%
	b. Racikan	≤ 60 menit	87,99%
	2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	99.17%
	3. Kepuasan pelanggan	≥ 80%	90,35%
	4. Penulisan resep sesuai formularium	100%	89,51%
Gizi	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90%	96.02%
	2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20%	27.09%
	3. Tidak ada kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%
Transfusi Darah	1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100% terpenuhi	100% oleh PMI
	2. Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01%	-
Pelayanan GAKIN	1 Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100% terlayani	100%
Rekam Medik	1. kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	90%

	2. Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	95%
	3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	90%
	4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	85%
Pengelolaan Limbah	1. Baku Mutu Limbah Cair	a.BOD<30mg/l b.COD<80mg/l c.TSS<30mg/l d.PH 6-9	16 54 17 7
	2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%
Administrasi dan Manajemen	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	80%
	2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%
	3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	90%
	4. Ketepatan waktu pengusulan gaji berkala	100%	100%
	5. Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60%	9.6%
	6. Cost recovery	≥ 40%	102%
	7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%
	8. Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap	100%	100%
	9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	40%
Ambulance /mobil jenazah	1. Waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah	24 jam	24 jam
	2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance / kereta jenazah di rumah sakit	< 30 menit	92.5%
	3. Respon time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	Sesuai ketentuan daerah	Sesuai
Pemulasaraan jenazah	1. Waktu tanggap (response time) pelayanan pemularaan jenazah	< 2 jam	100%
Pelayanan pemeliharaan sarana RS	1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≤ 80%	70.42%
	2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	72.75%
	3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	0%
Pelayanan Laundri	1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%
	2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%

Pencegahan dan pengendalian Infeksi	1. Adanya anggota tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI Terlatih 75%	100%
	2. Tersedia APD di setiap instalasi/departemen	60%	90%
	3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nasokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (minimal 1 parameter	75%	100%

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2025

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, dengan alokasi anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.76.147.323.299,- diharapkan dapat lebih baik lagi dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2024 yang lalu, baik realisasi fisik maupun keuangannya. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Bandar Lampung, pada dasarnya tugas pokok RSD dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi RSD dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung adalah penyusunan perencanaan dan kebijakan teknis di bidang pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar rumah sakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja terhadap Program maupun Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 s.d 2024 serta perkiraan capaian Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, maka beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan RSD dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Belum memadainya sarana dan prasarana di RSD Dr. A dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung
b. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas pemberi pelayanan seperti perawat, bidan, dokter umum dan dokter spesialis.

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh RSD dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan urusan penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam upaya mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra RSD dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh RSD dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana RSD dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung antara lain pemenuhan fasilitas alat-alat kesehatan di ruang pelayanan.
2. Mendorong upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas pemberi pelayanan pengelolaan administrasi dan manajemen RSD :
    a. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi *(reward and punishing)*, dan kesejahteraan pegawai.
    b. Peningkatan kemampuan teknis aparat pemberi pelayanan
    c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara optimal

d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat yang menyelenggarakan urusan pelayanan, sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.

3. Memfungsikan keberadaan operasional mobilitas kantor dalam peningkatan kinerja dan sinergisitas antar sesama pemberi pelayanan mulai dari rawat jalan, rawat inap dan penunjang.
4. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan RSD.
5. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sistem informasi rumah sakit sehingga diperoleh akurasi data hasil pelayanan di masing-masing pemberi pelayanan.
6. Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada RS dr. A Dadi Tjokrodipo sehingga diperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional kepada masyarakat.
7. Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan–kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan
8. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kota Bandar Lampung dan RSD dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung.
9. Melaksanakan pelayanan yang terintegrasi antara pelayanan medis, keperawatan dan pelayanan penunjang.
10. Pemenuhan Pelayanan Rawat Inap untuk Kelas I dan II serta Penambahan Ruang Operasi.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

RSD dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bandar Lampung.

Susunan Organisasi RSD dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung terdiri dari :

a. Direktur
b. Bagian Tata Usaha membawahi :
   (1) Sub bagian Perencanaan
   (2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
   (3) Sub bagian Keuangan
c. Bidang Pelayanan Medis, membawahi :
   (1) Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Medis
   (2) Seksi Pengendalian Fasilitas Pelayanan Medis
d. Bidang Keperawatan, membawahi :
   (1) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan
   (2) Seksi Logistik Keperawatan
e. Bidang Penunjang Medis, membawahi :
   (1) Seksi Penunjang Pelayanan Medis
   (2) Seksi Penunjang Sarana Medis
f. Kelompok Jabatan Fungsional
   Komite Medis, Komite Keperawatan, Satuan Pemeriksaan Internal dan Instalasi

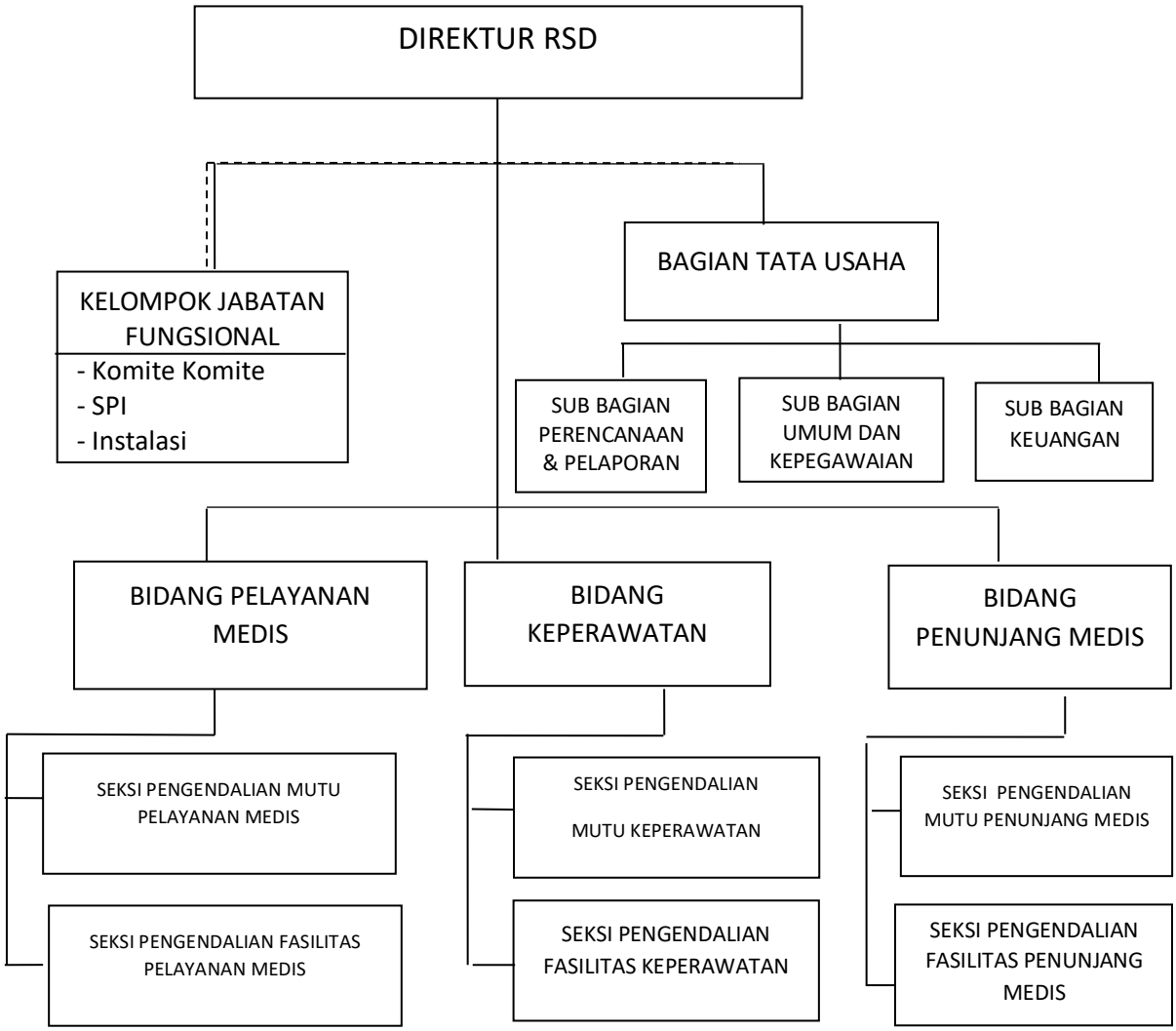
RSD mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 RSD mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan.
b. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
c. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan tingkat ketiga sesuai kebutuhan medis.
d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
e. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan dengan memeprhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
f. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengendalian, pengawasan dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan.
g. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Rumah Sakit.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH

dr. A. DADI TJOKRODIPO KOTA BANDAR LAMPUNG



BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan adanya Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, maka diperlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah. Guna menyelaraskan antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, maupunpembangunanantaradaerahtersebut, maka salah satunya dilakukan melalui penyusunan Perubahan Renja SKPD. Peubahan Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA RSD dr. A DADI TJOKRODIPO KOTA BANDAR LAMPUNG

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan *(Critical Success Factor)* yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

RSD dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan RSD dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung dan membantu Walikota Bandar Lampung dalam melaksanakan upaya

kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan dituntut untuk dapat memberi palayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya tanpa membedakan pasien. Untuk itu, disusun Visi dan Misi RSD dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Visi RSD dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung adalah :

"MENJADI RUMAH SAKIT YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PROFESIONAL, BERMUTU, NYAMAN DAN MANDIRI".

Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan persyaratan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan misi RSD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Kesehatan yang profesional untuk menunjang pelayanan kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Memberikan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau dengan berorientasi pada kepuasan pasien.
3. Menciptakan lingkungan bersih, hijau dan bebas polusi.
4. Mengelola seluruh sumber daya secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

1. Misi 1

Meyiapkan sumber daya manusia (SDM) Kesehatan yang profesional untuk menunjang pelayanan kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan.

Tujuan :

Meningkatkan kualitas sumberdaya medis, paramedis dan non medis melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, untuk peningkatan pelayanan kesehatan.

Sasaran :

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan medis, para medis dan non medis.

2. Misi 2

Memberikan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau dengan berorientasi pada kepuasan pasien

Tujuan 1 :

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan memuaskan.

Sasaran 1:

Terselenggaranya sistem pelayanan yang berazaskan pada transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, tidak diskriminatif dan adanya keseimbangan antara hal dan kewajiban.

Tujuan 2 :

Meningkatkan peran, fungsi dan kinerja kelembagaan RSD dr. A Dadi Tjokrodipo yang profesional.

Sasaran 2:

Terwujudnya pelayanan yang bermutu dengan ditunjang kelengkapan sarana dan prasarana termasuk penyediaan alat-alat kesehatan yang berkualitas, sarana teknologi informasi dan komunikasi, keamanan, tanggungjawab, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan.

3. Misi 3

Menciptakan lingkungan bersih, hijau dan bebas polusi.

Tujuan :

Melaksanakan upaya untuk senantiasa menciptakan lingkungan RSD menjadi zona bebas asap rokok, bebas sampah dan lingkungan hijau dan asri.

Sasaran :

Melaksanakan upaya penanggulangan penyakit nasokomial.

4. Misi 4

Mengelola seluruh sumber daya secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Tujuan :

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD).

Sasaran:

Pengelolaan keuangan RSD dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung dengan prinsip pengelolaan BLUD.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kota Bandar Lampung, pada dasarnya kegiatan RSD Dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung adalah sebagai *pemberi pelayanan kesehatan* kepada masyarakat Bandar Lampung agar tercipta sumber daya manusia khususnya warga Bandar Lampung yang sehat dan dapat lebih produktif.

Program dan kegiatan yang dirancang RSD Dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung tahun 2025 sesuai dengan standar pelayanan minimal terdiri dari 2 Program 5 Kegiatan 9 sub kegiatan

Berdasarkan Target dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan rencana kinerja tahun 2025 terdiri dari 22 indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Target Standar Pelayanan Minimal RSD Tahun 2025

Jenis Pelayanan	Indikator	Target
Gawat Darurat	1. Kemampuan menangani live saving anak dan dewasa	100%
	2. Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam
	3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang masih bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%
	4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim
	5. Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat	≤ 5 menit terlayani
	6. Kepuasan pelanggan	≥ 70%
	7. Kematian pasien < 24 jam	< 2/1000 (pindah ke RI setelah 8 jam
	8. Tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%
Rawat Jalan	1. Dokter pemberi palayanan di poliklinik spesialis	100% Dokter spesialis
	2. Ketersediaan Pelayanan	a. Anak b.P.Dlam c.Kebidanan d. Bedah
	3. Jam buka pelayanan	08 s/d 13 Jum'at 08-11 WIB
	4. Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit
	5. Kepuasan pelanggan	≥ 90%
	6a Penengakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60%
	b Terlaksananya pencatatan dan pelaporan TB di RS	≤ 60%

Rawat Inap	1. Pemberi pelayanan di rawat inap	Dr Spesialis, Perawat Min D3
	2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%
	3. Ketersediaan pelayanan rawat inap	Anak, Dalam, Kebidnaan, Bedah
	4. Jam visit dokter spesialis	08.00 -14.00 /tiap hari kerja
	5. Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %
	6. Kejadian infeksi nasokomial	≤ 1,5 %
	7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian	100%
	8. Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24 %
	9. Kejadian pulang paksa	≤ 5 %
	10. Kepuasan pelanggan	≥ 90%
	11. Rawat Inap TB a.Penegakan Diagnosa TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	>60%
	b.Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	>60%
	12 Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri	100%
	13 Kejadian re admission pasien gangguan jiwa dalam waktu , 1 bulan	100%
	14 Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa	> 6 minggu
Bedah Sentral (Bedah Saja)	1. Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari
	2. Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %
	3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%
	4. Tidka adanya kejadian operasi salah orang	100%
	5. Tidak adanya kejadian salah Tindakan pada operasi	100%
	6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/ lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%
	7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anastesi, dan salah penempatan anastesi endotracheal tube	≤ 6%
Persalinan, perinatologi (kecuali rumah	1. Kejadian kematian ibu karena persalinan	a.Perdarahan ≤1% b.Pra-eklam ≤30% c.Sepsis ≤ 0,2%

sakit khusus diluar rumah sakit ibu dan anak dan KB	2. Pemberi pelayanan persalinan normal	a.Dokter Sp.OG b.Dokter umum terlatih APN c.Bidan
	3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK terlatih
	4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	a. Dokter Sp.OG b.Dokter Sp.A c.Dokter Sp.An
	5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100%
	6. Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria non rujukan	≤ 20%
	7. Keluarga berencana	
	a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr. Sp.OG, dr. Sp.B, dr.Sp.U, dr umum terlatih	100%
	b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	100%
	8. Kepuasan pelanggan	≥ 80%
Intensif	1 Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %
	2 Pemberi pelayanan unit intensif	a.Dokter sp.Anastesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus ditangani. B.100% perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara (D4)
Radiologi	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam
	2. Pelaksanaan ekspertisi	Dokter Sp. Rad
	3. kejadian kegagalan pelayanan rontgen	Kersakan foto <2%
	4. Kepuasan pelanggan	≥ 80%
Lab. Patologi Klinik	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit kimia darah & darah rutin
	2. Pelaksanaan ekspertisi	Dokter Sp.PK
	3. Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%
	4. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %
Rahabilitasi Medik	1. Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	≤ 50%
	2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabitisai medik	100%
	3. Kepuasan pelanggan	≥ 80%

Farmasi	1. Waktu tunggu pelayanan a. obat jadi b. Racikan	 ≤ 30 menit ≤ 60 menit
	2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%
	3. Kepuasan pelanggan	≥ 80%
	4. Penulisan resep sesuai formularium	100%
Gizi	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90%
	2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20%
	3. Tidak ada kejadian kesalahan pemberian diet	100%
Transfusi Darah	1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100% terpenuhi
	2. Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01%
Pelayanan GAKIN	1 Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100% terlayani
Rekam Medik	1. kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%
	2. Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%
	3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit
	4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit
Pengelolaan Limbah	1. Baku Mutu Limbah Cair	a.BOD<30mg/l b.COD<80mg/l c.TSS<30mg/l d.PH 6-9
	2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%
Administrasi dan Manajemen	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%
	2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%
	3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%
	4. Ketepatan waktu pengusulan gaji berkala	100%
	5. Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60%
	6. Cost recovery	≥ 40%
	7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%
	8. Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap	100%

	9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%
Ambulance /mobil jenazah	1. Waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah	24 jam
	2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance / kereta jenazah di rumah sakit	< 30 menit
	3. Respon time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	Sesuai ketentuan daerah
Pemulasaraan jenazah	1. Waktu tanggap (response time) pelayanan pemularaan jenazah	< 2 jam
Pelayanan pemeliharaan sarana RS	1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≤ 80%
	2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%
	3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%
Pelayanan Laundri	1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%
	2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%
Pencegahan dan pengendalian Infeksi	1. Adanya anggota tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI Terlatih 75%
	2. Tersedia APD di setiap instalasi/departemen	60%
	3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nasokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (minimal 1 parameter	75%

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut :

TABEL TC 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2025
RSD DR A DADI TJOKRODIPO KOTA BANDAR LAMPUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Sasaran kegiatan	Pagu Anggaran				Ket
				Lokasi	Target	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
1.02.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**Rp 77,088,296,731**		
1.02.01.	**PROGRAM PENUNJANG**					**Rp 32,500,923,931**		
1.02.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**				**Rp 21,500,000**		
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bdl	6 Laporan	Rp 21,500,000	APBD	
1.02.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat**	**persentase pemenuhan dokumen**				**Rp 25,793,986,499**		
1.02.01.2.02.01	Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima	Tersedianya Gaji dan Tunjangan		219 orang	Rp 25,720,546,499	APBD	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bdl	12 Dokumen	Rp 73,440,000	APBD	

1.02.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang**	**Persentase pelayanan tata kelola**				**Rp 6,685,437,432**		
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bdl	12 laporan	Rp 1,275,437,432	APBD	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bdl	12 laporan	Rp 5,410,000,000	APBD	
1.02.02.2.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Pelayanan BLUD**				**Rp 44,587,372,800**		
1.02.02.2.01.	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	**Pengadaan alat kesehatan e katalog dan obat bagi pasien**				**Rp 8,440,130,000**		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		jumlah alat kesehatan / alat penunjang yang disediakan	Bdl	1 unit	Rp 2,078,659,000	DAK	
1.02.02.2.01.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Bdl	1 unit	Rp 4,342,371,000	DAK	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	jumlah obat, BHP medis, Vaksin, Makan minum di fasilitas kesehatan yang disediakan	Bdl	1 paket	Rp 2,019,100,000	APBD	
1.02.02.2.02.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**tersedianya sarpras untuk kegiatan pelayanan RSD**				**Rp 36,147,242,800**		
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Bdl	12 Dokumen	Rp 36,147,242,800	BLUD	
					JUMLAH	**Rp 77,088,296,731**		

Bandar Lampung,
Plt Direktur,

dr. TETI HERAWAT
NIP. 19710403 200

BAB IV. PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung adalah Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan sasaran.

Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Bandar Lampung, 2025

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	√		Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 bahwa Evaluasi yang disajikan sampai dengan Triwulan I	
		Tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sesuai dengan Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	√			
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, Juli 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung,

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19700218 199303 2 002

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	YUSMAN KUNANG HS., S.Sos.	
	Sekretaris Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	Eliza, S.P., M.M.	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui :

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung,

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan.	√			
4.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai Surat Edaran Wali Kota	√			
5.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah	√			
6.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung,

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19700218 199303 2 002

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	YUSMAN KUNANG HS., S.Sos.	
	Sekretaris Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	Eliza, S.P., M.M.	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui :

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung,

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi telah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Peubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Telah sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025

Bandar Lampung, Juli 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung,

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19700218 199303 2 002

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	YUSMAN KUNANG HS., S.Sos.	
	Sekretaris Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	Eliza, S.P., M.M.	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Landasan Hukum I-2

1.3. Maksud dan Tujuan I-6

1.4. Sistematika Penulisan I-6

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN II-1

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN III-1

BAB IV PENUTUP IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Periode Pelaksanaan s.d. Triwulan I Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah II-2

Tabel 3.1 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 ..... III-3

LAMPIRAN 30
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616/IV.01/HK/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (Perubahan RKA) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran dan indikator kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025, yaitu :

a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
b. Adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat OPD;
c. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang mengakibatkan adanya perubahan dan pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 559);
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 22);
20. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 33);
21. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 2);
22. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 21);
23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

I.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program/kegiatan/sub kegiatan dengan indikator dan target yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam merumuskan perubahan alokasi program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan Tahun 2025;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan perubahan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan capaian Kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan 3 Program dengan 13 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan pada Unsur Perencanaan, serta 1 Program dengan 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan pada Unsur Penelitian dan Pengembangan.

Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sampai dengan 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp2.010.716.076,00 atau 13,90 persen dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp14.466.266.767,00.-

Adapun untuk evaluasi kinerja dan keuangan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1 Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Periode Pelaksanaan s.d. Triwulan I Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Indikator dan target kinerja Bapperida Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Bapperida Kota Bandar Lampung, dengan Target Kinerja : 84,03-85,03 pada Tahun 2026

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
5.01.	**PERENCANAAN**										**83.076.134.376,99**		**37.427.551.447,00**		**13.784.593.056,00**		**2.010.716.076,00**						
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH											**83.076.134.376,99**		**37.427.551.447,00**		**13.784.593.056,00**		**2.010.716.076,00**						
1.	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**							**Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	**Skor**	**84,03-85,03 (A)**		**81,15 (A)**		**84,03-85,03 (A)**		**80,55 (A)**							
1.1.		**5**	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**	**Persen**	**98,00**	**59.464.134.376,99**	**95,43**	**29.822.180.418,00**	**98,00**	**10.445.982.985,00**	**19,25**	**2.010.716.076,00**						
1.1.1.		**5**	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100,00**	**1.785.000.000,00**	**100,00**	**654.967.739,00**	**100,00**	**151.286.419,00**	**40,38**	**-**						
		5	*01*	*01*	*2.01*	*0001*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen Renstra Bappeda*	*Dokumen*	*1*	*375.000.000,00*	*1*	*126.347.120,00*		*36.393.362,00*		*-*						
								Dokumen Renja Bappeda Tahun 2022 dan Dokumen Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2021	*Dokumen*	*2*		*2*											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Dokumen*	*11*		*6*		*3*		*25%*							

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
5.01.	**PERENCANAAN**										**83.076.134.376,99**		**2.010.716.076,00**		**14,59**		**39.438.267.523,00**		**47,47**	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH											**83.076.134.376,99**		**2.010.716.076,00**		**14,59**		**39.438.267.523,00**		**47,47**	
1.	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**							**Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	**Skor**	**84,03-85,03 (A)**		**80,55 (A)**		**95,98**		**80,55 (A)**		**95,98**		**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
1.1.		**5**	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**	**Persen**	**98,00**	**59.464.134.376,99**	**19,25**	**2.010.716.076,00**	**19,64**	**19,25**	**19,25**	**31.832.896.494,00**	**19,64**	**53,53**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
1.1.1.		**5**	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100,00**	**1.785.000.000,00**	**40,38**	**-**	**40,38**	**-**	**40,38**	**654.967.739,00**	**40,38**	**36,69**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
		5	*01*	*01*	*2.01*	*0001*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen Renstra Bappeda*	*Dokumen*	*1*	*375.000.000,00*		*-*		*-*	*1*	*126.347.120,00*	*100,00*	*33,69*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Dokumen Renja Bappeda Tahun 2022 dan Dokumen Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2021	*Dokumen*	*2*						*2*		*100,00*		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Dokumen*	*11*		*25%*		*25,00*		*6,25*		*56,82*		

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
`		*5*	*01*	*01*	*2.01*	*0002*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Dokumen*	*5*	*190.000.000,00*	*3*	*58.019.100,00*	*1*	*22.334.800,00*	-	-						
		5	*01*	*01*	*2.01*	*0003*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Dokumen*	*5*	*190.000.000,00*	*3*	*59.588.200,00*	*1*	*22.978.813,00*	*25%*	-						
		5	*01*	*01*	*2.01*	*0006*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Dokumen LPJ Bappeda, Dokumen LPPD Bappeda Dokumen LAKIP Bappeda*	*Dokumen*	*3*	*370.000.000,00*	*3*	*122.279.491,00*		*34.980.708,00*		-						
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Laporan*	*15*		*9*		*3*		*1*							
		5	*01*	*01*	*2.01*	*0007*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Dokumen Evaluasi RKPD Kota Bandar Lampung*	*Dokumen*	*1*	*660.000.000,00*	*1*	*288.733.828,00*		*34.598.736,00*		-						
								Dokumen Evaluasi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 dan Dokumen Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung 2016-2021	*Dokumen*	*2*		*2*											
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan*	*26*		*16*		*5*		*4*							
1.1.2.		**5**	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100,00**	**45.582.645.577,99**	**100,00**	**24.820.506.091,00**	**100,00**	**8.484.318.543,00**	**44,64**	**1.968.716.076,00**						

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
`		5	01	01	2.01	0002	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Dokumen*	*5*	*190.000.000,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*3*	*58.019.100,00*	*60,00*	*30,54*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
		5	*01*	*01*	*2.01*	*0003*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Dokumen*	*5*	*190.000.000,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*3*	*59.588.200,00*	*60,00*	*31,36*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
		5	*01*	*01*	*2.01*	*0006*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Dokumen LPJ Bappeda, Dokumen LPPD Bappeda Dokumen LAKIP Bappeda*	*Dokumen*	*3*	*370.000.000,00*		*-*		*-*	*3*	*122.279.491,00*	*100,00*	*33,05*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Laporan*	*15*		*1*		*33,33*		*10*		*66,67*		
		5	*01*	*01*	*2.01*	*0007*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Dokumen Evaluasi RKPD Kota Bandar Lampung*	*Dokumen*	*1*	*660.000.000,00*		*-*		*-*	*1*	*288.733.828,00*	*100,00*	*43,75*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Dokumen Evaluasi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 dan Dokumen Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung 2016-2021	*Dokumen*	*2*						*2*		*100,00*		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan*	*26*		*4*		*80,00*		*20*		*76,92*		
1.1.2.		**5**	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100,00**	**45.582.645.577,99**	**44,64**	**1.968.716.076,00**	**44,64**	**23,20**	**44,64**	**26.789.222.167,00**	**44,64**	**58,05**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
		5	01	01	2.02	0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda yang Tersedia*	*Kali*	*14*	*43.816.306.829,99*	*14*	*24.091.435.292,00*		*8.168.076.767,00*		*1.931.276.076,00*						
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Orang/ Bulan*	*70*		*53*		*60*		*48*						
		5	01	01	2.02	0003	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Administrasi Keuangan Bappeda yang Terlaksana*	*Bulan*	*12*	*1.136.338.748,00*	*12*	*500.660.000,00*		*267.675.000,00*		*37.440.000,00*						
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Dokumen*	*5*		*3*		*1*		*25%*						
		5	01	01	2.02	0005	*Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda*	*Dokumen Laporan*	*1*	*240.000.000,00*	*1*	*102.035.565,00*		*19.744.514,00*		-						
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Laporan*	*5*		*3*		*1*		*1*						
		5	01	01	2.02	0007	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda*	*Dokumen Laporan*	*12*	*390.000.000,00*	*12*	*126.375.234,00*		*28.822.262,00*		-						
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Laporan*	*60*		*36*		*12*		*3*						
1.1.3.		**5**	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**80,00**	**805.000.000,00**	**88,00**	**159.831.779,00**	**80,00**	**86.191.194,00**	**-**	**-**						
		5	01	01	2.05	0003	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Dokumen*	*4*	*200.000.000,00*	*2*	*74.994.011,00*	*1*	*36.191.194,00*	*15%*	-						

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
		5	01	01	2.02	0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda yang Tersedia*	*Kali*	*14*	*43.816.306.829,99*		*1.931.276.076,00*		*23,64*	*14*	*26.022.711.368,00*	*100,00*	*59,39*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Orang/ Bulan*	*70*		*48*		*21,43*		*48*		*21,43*		
		5	01	01	2.02	0003	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Administrasi Keuangan Bappeda yang Terlaksana*	*Bulan*	*12*	*1.136.338.748,00*		*37.440.000,00*		*13,99*	*12*	*538.100.000,00*	*100,00*	*47,35*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Dokumen*	*5*		*25%*		*25,00*		*3,25*		*65,00*		
		5	01	01	2.02	0005	*Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda*	*Dokumen Laporan*	*1*	*240.000.000,00*		-		-	*1*	*102.035.565,00*	*100,00*	*42,51*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Laporan*	*5*		*1*		*100,00*		*4*		*80,00*		
		5	01	01	2.02	0007	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda*	*Dokumen Laporan*	*12*	*390.000.000,00*		-		-	*12*	*126.375.234,00*	*100,00*	*32,40*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Laporan*	*60*		*3*		*25,00*		*39*		*65,00*		
1.1.3.		**5**	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**80,00**	**805.000.000,00**	-	-	-	-	-	*159.831.779,00*	-	*19,85*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
		5	01	01	2.05	0003	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Dokumen*	*4*	*200.000.000,00*	*15%*		*15,00*		*2,15*	*74.994.011,00*	*53,75*	*37,50*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
		5	*01*	*01*	*2.05*	*0009*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Peningkatan Kompetensi Pegawai*	*Persen*	*80,00*	*605.000.000,00*	*-*	*84.837.768,00*		*50.000.000,00*		-						
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	*Orang*	*50*		*38*		*10*		-						
1.1.4.		**5**	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**3.537.046.012,00**	***100,00***	**1.604.891.882,00**	**98,00**	**603.552.255,00**	**7,50**	**-**						
		5	*01*	*01*	*2.06*	*0001*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia*	*Paket*	*1*	*38.187.500,00*	*1*	*15.904.500,00*		*19.938.654,00*		-						
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*Paket*	*5*		*3*		*1*		-						
		5	*01*	*01*	*2.06*	*0002*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia*	*Paket*	*1*	*579.538.390,00*	*1*	*233.096.862,00*		*52.116.374,00*		-						
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Paket*	*5*		*3*		*1*		-						
		5	*01*	*01*	*2.06*	*0003*	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia*	*Paket*	*1*	*196.868.540,00*	*1*	*77.935.650,00*		*29.999.895,00*		-						
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	*Paket*	*5*		*3*		*1*		-						
		5	*01*	*01*	*2.06*	*0004*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat*	*Persen*	*100*	*245.000.000,00*	*26,00*	*95.440.000,00*		*38.500.000,00*		-						
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Paket*	*5*		*3*		*1*		-						
		5	*01*	*01*	*2.06*	*0005*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia*	*Paket*	*1*	*624.855.230,00*	*1*	*332.415.850,00*		*59.994.446,00*		-						

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
		5	01	01	2.05	0009	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Peningkatan Kompetensi Pegawai*	*Persen*	*80,00*	*605.000.000,00*		-		-	-	*84.837.768,00*	-	*14,02*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	*Orang*	*50*		-		-		*38*	*76,00*			
1.1.4.		**5**	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**3.537.046.012,00**	**7,50**	**-**	***7,65***	**-**	***7,50***	**1.604.891.882,00**	***7,65***	**49,94**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
		5	*01*	*01*	*2.06*	*0001*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia*	*Paket*	*1*	*38.187.500,00*		-		-	*1*	*15.904.500,00*	*100,00*	*41,65*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*Paket*	*5*		-		-		*3*		*60,00*		
		5	*01*	*01*	*2.06*	*0002*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia*	*Paket*	*1*	*579.538.390,00*		-		-	*1*	*233.096.862,00*	*100,00*	*40,22*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Paket*	*5*		-		-		*3*		*60,00*		
		5	*01*	*01*	*2.06*	*0003*	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia*	*Paket*	*1*	*196.868.540,00*		-		-	*1*	*77.935.650,00*	*100,00*	*39,59*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	*Paket*	*5*		-		-		*3*		*60,00*		
		5	*01*	*01*	*2.06*	*0004*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat*	*Persen*	*100*	*245.000.000,00*		-		-	*26,00*	*95.440.000,00*	*26,00*	*38,96*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Paket*	*5*		-		-		*3*		*60,00*		
		5	*01*	*01*	*2.06*	*0005*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia*	*Paket*	*1*	*624.855.230,00*		-		-	*1*	*332.415.850,00*	*100,00*	*53,20*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Paket*	*5*		*3*		*1*		-							
		5	*01*	*01*	*2.06*	*0006*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan*	*Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia*	*Paket*	*1*	*123.760.000,00*	*1*	*70.750.000,00*		*25.000.000,00*		-						
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Dokumen*	*5*		*3*		*1*		*25%*							
		5	*01*	*01*	*2.06*	*0008*	*Fasilitasi kunjungan Tamu*	*Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu*	*Persen*	*100*	*233.750.000,00*	-	*84.975.000,00*		*35.000.000,00*		-						
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Laporan*	*5*		*3*		*1*		*25%*							
		5	*01*	*01*	*2.06*	*0009*	*Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor*	*Persen*	*100,00*	*1.495.086.352,00*	*39,67*	*694.374.020,00*		*343.002.886,00*		-						
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Laporam*	*5*		*3*		*1*		*10%*							
1.1.5.		**5**	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**3.101.900.000,00**	**100,00**	**847.463.550,00**	**98,00**	**485.804.574,00**	**-**	**-**						
		5	*01*	*01*	*2.07*	*0001*	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*Unit*	*3*	*975.000.000,00*	*1*	*312.000.000,00*	*1*	*100.000.000,00*	-	-						
		5	*01*	*01*	*2.07*	*0005*	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor*	*Paket*	*1*	*346.000.000,00*	-	*65.273.550,00*										
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	*Unit*	*3*		*1*											

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Paket*	*5*		*-*		*-*		*3*		*60,00*		
		5	*01*	*01*	*2.06*	*0006*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan*	*Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia*	*Paket*	*1*	*123.760.000,00*		*-*		*-*	*1*	*70.750.000,00*	*100,00*	*57,17*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Dokumen*	*5*		*25%*		*25,00*		*3,25*		*65,00*		
		5	*01*	*01*	*2.06*	*0008*	*Fasilitasi kunjungan Tamu*	*Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu*	*Persen*	*100*	*233.750.000,00*		*-*		*-*	*-*	*84.975.000,00*	*-*	*36,35*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Laporan*	*5*		*25%*		*25,00*		*3,25*		*65,00*		
		5	*01*	*01*	*2.06*	*0009*	*Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor*	*Persen*	*100,00*	*1.495.086.352,00*		*-*		*-*	*39,67*	*694.374.020,00*	*39,67*	*46,44*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Laporam*	*5*		*10%*		*10,00*		*3,10*		*62,00*		
1.1.5.		**5**	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**3.101.900.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**847.463.550,00**	**-**	**27,32**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
		5	*01*	*01*	*2.07*	*0001*	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*Unit*	*3*	*975.000.000,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1*	*312.000.000,00*	*33,33*	*32,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
		5	*01*	*01*	*2.07*	*0005*	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor*	*Paket*	*1*	*346.000.000,00*					*-*	*65.273.550,00*	*-*	*18,87*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	*Unit*	*3*						*1*		*33*		

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
		5	*01*	*01*	*2.07*	*0006*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor*	*Paket*	*1*	*1.055.400.000,00*	*-*	*470.190.000,00*		*274.869.430,00*		*-*						
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	*Unit*	*50*		*49*		*18*		*-*							
		5	*01*	*01*	*2.07*	*0010*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	*40*	*330.000.000,00*	*-*	*-*	*8*	*110.935.144,00*	*-*	*-*						
		5	*01*	*01*	*2.07*	*0011*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor*	*Paket*	*1*	*395.500.000,00*	*-*	*-*										
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	*Unit*	*30*												
1.1.6.		**5**	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**1.870.500.000,00**	***100,00***	**941.075.702,00**	**100,00**	**248.000.000,00**	**25,00**	**42.000.000,00**						
		5	*01*	*01*	*2.08*	*0002*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia*	*Bulan*	*12*	*689.000.000,00*	*12*	*237.075.702,00*		*80.000.000,00*		*-*						
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Laporan*	*5*		*3*		*1*		*25%*						
		5	*01*	*01*	*2.08*	*0004*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia*	*Bulan*	*12*	*1.181.500.000,00*	*12*	*704.000.000,00*		*168.000.000,00*		*42.000.000,00*						
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Laporan*	*5*		*3*		*1*		*25%*						
1.1.7.		**5**	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**2.782.042.787,00**	**93,75**	**793.443.675,00**	**98,00**	**386.830.000,00**	**12,50**	**-**						

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
		5	*01*	*01*	*2.07*	*0006*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor*	*Paket*	*1*	*1.055.400.000,00*		-		-	-	*470.190.000,00*	-	*44,55*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	*Unit*	*50*		-		-		*49*		*98,00*		
		5	*01*	*01*	*2.07*	*0010*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	*40*	*330.000.000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
		5	*01*	*01*	*2.07*	*0011*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor*	*Paket*	*1*	*395.500.000,00*						-	-	-	-	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	*Unit*	*30*										
1.1.6.		**5**	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**1.870.500.000,00**	**25,00**	**42.000.000,00**	**25,00**	**16,94**	***25,00***	**983.075.702,00**	***25,00***	**54,05**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
		5	*01*	*01*	*2.08*	*0002*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia*	*Bulan*	*12*	*689.000.000,00*		-		-	*12*	*237.075.702,00*	*100,00*	*34,41*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Laporan*	*5*		*25%*		*25,00*		*3,25*		*65,00*		
		5	*01*	*01*	*2.08*	*0004*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia*	*Bulan*	*12*	*1.181.500.000,00*		*42.000.000,00*		*25,00*	*12*	*746.000.000,00*	*100,00*	*63,14*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Laporan*	*5*		*25%*		*25,00*		*3,25*		*65,00*		
1.1.7.		**5**	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**2.782.042.787,00**	**12,50**	-	**12,76**	-	**12,50**	**793.443.675,00**	**12,76**	***28,52***	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
		5	01	01	2.09	0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara*	*Unit*	*5*	*1.265.321.270,00*	*5*	*320.677.665,00*		*41.670.000,00*		-						
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	*Unit*	*8*		*1*		*1*		*1*						
		5	01	01	2.09	0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara*	*Unit*	*7*	*301.721.517,00*	*7*	*175.264.610,00*		*245.420.000,00*		-						
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*Unit*	*7*		*12*		*13*		*12*						
		5	01	01	2.09	0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara*	*Paket*	*1*	*345.000.000,00*	*18,45%*	*138.215.000,00*		*49.740.000,00*		-						
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*Unit*	*20*		*25*		*20*		-						
		5	01	01	2.09	0011	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara*	*Paket*	*1*	*870.000.000,00*	-	*159.286.400*		*50.000.000,00*		-						
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	*Unit*	*1*		*1*		*1*		-						
2.	**Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan**							**Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan**	**Persen**	**95,94**		**95,37**		**95,94**									
								Tingkat Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	**Persen**	**90,74**		**88,06**		**90,74**									

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
		5	*01*	*01*	*2.09*	*0001*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara*	*Unit*	*5*	*1.265.321.270,00*		-		-	*5*	*320.677.665,00*	*100,00*	*25,34*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	*Unit*	*8*		*1*		*25,00*		*1*		*25,00*		
		5	*01*	*01*	*2.09*	*0002*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara*	*Unit*	*7*	*301.721.517,00*		-		-	*7*	*175.264.610,00*	*100,00*	*58,09*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*Unit*	*7*		*12*		*25,00*		*12*		*25,00*		
		5	*01*	*01*	*2.09*	*0006*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara*	*Paket*	*1*	*345.000.000,00*		-		-	*18,45%*	*138.215.000,00*	*0,18*	*40,06*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*Unit*	*20*		-		-		-		-		
		5	*01*	*01*	*2.09*	*0011*	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara*	*Paket*	*1*	*870.000.000,00*		-		-	-	*159.286.400,00*	-	*18,31*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	*Unit*	*1*		-		-		-		-		
												Rata-rata Capaian Kinerja		**19,64**	**19,25**				**53,53**	
												Predikat Kinerja		**SR**	**SR**				**SR**	
2.	**Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan**							**Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan**	**Persen**	**95,94**		-		-		-		-		**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
								Tingkat Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	**Persen**	**90,74**		-		-		-		-		

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
2.1		5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100,00	13.665.000.000,00	100,00	3.703.745.332,00	100,00	1.712.061.568,00	100,00	-						
								Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00							
								Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya	Persen	90,70		89,19		90,70		-							
2.1.1.		5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	7.105.000.000,00	Ada	2.238.125.063,00		992.079.701,00								
								Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada		Ada (Teknokratik RPJMD)		Ada		-							
								Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	Ada		Ada		Ada		-							
		5	*01*	*02*	*2.01*	*0001*	*Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah*	*Pelaksanaan Koordinasi Penentuan Gambaran Umum Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strataegis Pembangunan Daerah Penyusunan RPJP, RPJMD, dan RKPD*	*Kali*	*5*	*1.147.000.000,00*	*5*	*396.561.000,00*		*49.999.838,00*		-						
								Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	*Dokumen*	*8*		*5*		*2*		*2*							

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
2.1		5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100,00	13.665.000.000,00	100,00	-	100,00	-	100,00	3.703.745.332,00	100,00	27,10	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
								Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
								Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya	Persen	90,70				-		-		-		
2.1.1.		5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	7.105.000.000,00		-		-	Ada	2.238.125.063,00	100,00	31,50	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
								Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada		-		-		Ada (Teknokratik RPJMD)		50,00		
								Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	Ada		-		-		Ada		66,67		
		5	*01*	*02*	*2.01*	*0001*	*Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah*	*Pelaksanaan Koordinasi Penentuan Gambaran Umum Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strataegis Pembangunan Daerah Penyusunan RPJP, RPJMD, dan RKPD*	*Kali*	*5*	*1.147.000.000,00*		-		-	*5*	*396.561.000,00*	*100,00*	*34,57*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	*Dokumen*	*8*		*2*		*100,00*		*7*		*87,50*		

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
		5	01	02	2.01	0003	*Pelaksanaan Konsultasi Publik*	*Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJP, RPJMD, dan RKPD*	*Kali*	*2*	*630.000.000,00*	*2*	*202.363.348,00*		*117.080.145,00*		-						
								Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	*Berita Acara*	*7*		*4*		*2*		*2*							
		5	*01*	*02*	*2.01*	*0004*	*Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD*	*Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan RPJP, RPJMD, dan RKPD*	*Kali*	*2*	*693.000.000,00*	*2*	*149.797.819,00*		*109.999.718,00*		-						
								Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	*Berita Acara*	*8*		*5*		*2*		*1*							
		5	*01*	*02*	*2.01*	*0005*	*Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota*	*Pelaksanaan Musrenbang Penyusunan RPJP, RPJMD, dan RKPD*	*Kali*	*2*	*2.030.000.000,00*	*2*	*551.161.996,00*		*300.000.000,00*		-						
								Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	*Berita Acara*	*7*		*4*		*2*		*1*							
		5	*01*	*02*	*2.01*	*0007*	*Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota*	*Dokumen RPJMD*	*Dokumen*	*1*	*2.605.000.000,00*	*1*	*938.240.900,00*		*415.000.000,00*		-						
								Dokumen RKPD	*Dokumen*	*2*		*2*											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	*Dokumen*	*12*		*7*		*3*		*20%*							
2.1.2.		**5**	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung**	**Dokumen Laporan**	**2**	**1.150.000.000,00**	**2**	**190.141.747,00**											
		5	*01*	*02*	*2.02*	*0002*	*Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD*	*Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung*	*Dokumen Laporan*	*1*	*1.150.000.000,00*	*1*	*190.141.747,00*										
								Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	*Orang*	*200*		*200*											

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
		5	*01*	*02*	*2.01*	*0003*	*Pelaksanaan Konsultasi Publik*	*Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJP, RPJMD, dan RKPD*	*Kali*	*2*	*630.000.000,00*		-		-	*2*	*202.363.348,00*	*100,00*	*32,12*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	*Berita Acara*	*7*		*2*		*100,00*		*6*		*85,71*		
		5	*01*	*02*	*2.01*	*0004*	*Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD*	*Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan RPJP, RPJMD, dan RKPD*	*Kali*	*2*	*693.000.000,00*		-		-	*2*	*149.797.819,00*	*100,00*	*21,62*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	*Berita Acara*	*8*		*1*		*50,00*		*6*		*75,00*		
		5	*01*	*02*	*2.01*	*0005*	*Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota*	*Pelaksanaan Musrenbang Penyusunan RPJP, RPJMD, dan RKPD*	*Kali*	*2*	*2.030.000.000,00*		-		-	*2*	*551.161.996,00*	*100,00*	*27,15*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	*Berita Acara*	*7*		*1*		*50,00*		*5*		*71,43*		
		5	*01*	*02*	*2.01*	*0007*	*Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota*	*Dokumen RPJMD*	*Dokumen*	*1*	*2.605.000.000,00*		-		-	*1*	*938.240.900,00*	*100,00*	*36,02*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Dokumen RKPD	*Dokumen*	*2*						*2*		*100,00*		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	*Dokumen*	*12*		*20%*		*20,00*		*7,20*		*60,00*		
2.1.2.		**5**	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung**	**Dokumen Laporan**	**2**	**1.150.000.000,00**					**2,00**	***190.141.747,00***	***100,00***	***6,56***	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
		5	*01*	*02*	*2.02*	*0002*	*Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD*	*Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung*	*Dokumen Laporan*	*1*	*1.150.000.000,00*					*1*	*190.141.747,00*	*100,00*	*16,53*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	*Orang*	*200*						*200*		*100,00*		

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
2.1.3.		**5**	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen**	**31**	**3.835.000.000,00**	**23**	**996.498.791,00**	**5**	**499.982.583,00**	**2**	**-**						
		5	*01*	*02*	*2.03*	*0001*	*Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota*	*Dokumen Pelaksanaan SDG's Kota Bandar Lampung*	*Dokumen Laporan*	1	*1.500.000.000,00*	*1*	*596.294.031,00*		*149.982.583,00*		-						
								Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	*Laporan*	*5*		*3*		*1*		*15%*						
		5	*01*	*02*	*2.03*	*0002*	*Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah*	*Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TMMD*	*Dokumen Laporan*	*1*	*110.000.000,00*	*1*	*67.370.274,00*										
								Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	*Kerja Sama*	*1*		*1*										
		5	*01*	*02*	*2.03*	*0003*	*Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah*	*Dokumen LKPJ dan Pengantar LKPJ Walikota*	*Dokumen*	*2*	*2.225.000.000,00*	*2*	*332.834.486,00*		*350.000.000,00*		-						
								Dokumen Laporan TP/ UB/ DAK	*Dokumen Laporan*	*1*		*1*										
								Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda	*Dokumen Laporan*	*1*		*1*										
								Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	*Laporan*	22		*14*		*4*		*2*						
		5	**01**	**02**	**2.04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung**	**Dokumen Laporan**	**6**	**1.575.000.000,00**	**2**	**278.979.731,00**	**1**	**219.999.284,00**	**25%**	**-**						
		5	*01*	*02*	*2.04*	*0001*	*Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*	*Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola*	*Dokumen*	4	525.000.000,00	*2*	*35.784.540,00*	*1*	*69.999.785,00*	*25%*	-						

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
2.1.3.		**5**	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen**	**31**	**3.835.000.000,00**	**2**	**-**	**21,67**	**-**	**25**	**996.498.791,00**	***80,65***	*25,10*	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
		5	*01*	*02*	*2.03*	*0001*	*Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota*	*Dokumen Pelaksanaan SDG's Kota Bandar Lampung*	*Dokumen Laporan*	1	*1.500.000.000,00*		-		-	*1*	*596.294.031,00*	*100,00*	*39,75*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	*Laporan*	*5*		*15%*		*15,00*		*3,15*		*63,00*		
		5	*01*	*02*	*2.03*	*0002*	*Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah*	*Dokumen Laporan Moniroting dan Evaluasi Kegiatan TMMD*	*Dokumen Laporan*	*1*	*110.000.000,00*					*1*	*67.370.274,00*	*100,00*	*61,25*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	*Kerja Sama*	*1*						*1*		*100,00*		
		5	*01*	*02*	*2.03*	*0003*	*Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah*	*Dokumen LKPJ dan Pengantar LKPJ Walikota*	*Dokumen*	*2*	*2.225.000.000,00*		-		-	*2*	*332.834.486,00*	*100,00*	*15,66*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Dokumen Laporan TP/ UB/ DAK	*Dokumen Laporan*	*1*						*1*		*100,00*		
								Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda	*Dokumen Laporan*	*1*						*1*		*100,00*		
								Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	*Laporan*	22		*2*		*50,00*		*16*		*72,73*		
		5	**01**	**02**	**2.04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung**	**Dokumen Laporan**	**6**	**1.575.000.000,00**	**25%**	-	**25,00**	**-**	**2,25**	**278.979.731,00**	**37,50**	**17,71**	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
		5	*01*	*02*	*2.04*	*0001*	*Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*	*Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola*	*Dokumen*	4	525.000.000,00	*25%*	-	*25,00*	-	*2,25*	*35.784.540,00*	*56,25*	*6,82*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
		5	*01*	*02*	*2.04*	*0002*	*Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*	*Dokumen*	4	1.050.000.000,00	*2*	*243.195.191,00*	*1*	*149.999.499,00*	*25%*	-						
2.2.		**5**	**01**	**03**			**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**	**Persen**	**91,89**	**9.947.000.000,00**	**91,15**	**3.901.625.697,00**	**91,89**	**1.626.548.503,00**	**-**	-						
								Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	**Persen**	**100,00**		**99,58**		**100,00**		**-**							
								Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya	**Persen**	**90,78**		**86,94**		**90,78**		**-**							
2.2.1.		**5**	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Dokumen**	**12**	**4.015.895.950,00**	**8**	**1.263.187.259,00**	**2**	**460.722.016,00**	**25%**	-						
								Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Dokumen**	**12**		***8***		**2**		**25%**							
		5	*01*	*03*	*2.01*	*0001*	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen Laporan*	1	*1.209.248.550,00*	*1*	*231.526.184,00*		*99.871.779,00*		-						

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
		5	*01*	*02*	*2.04*	*0002*	*Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*	*Dokumen*	4	1.050.000.000,00	*25%*	-	*25,00*	-	*2,25*	*243.195.191,00*	*56,25*	*23,16*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
													Rata-rata Capaian Kinerja	**32,22**	**-**				**27,10**	
													Predikat Kinerja	**SR**	**SR**				**SR**	
2.2.		**5**	**01**	**03**			**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**	**Persen**	**91,89**	**9.947.000.000,00**	-	-	-	-	-	**3.901.625.697,00**	-	**39,22**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
								Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	**Persen**	**100,00**		-		-		-		-		
								Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya	**Persen**	**90,78**		-		-		-		-		
2.2.1.		**5**	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Dokumen**	**12**	**4.015.895.950,00**	**25%**	**-**	**25,00**	**-**	**8,25**	**1.263.187.259,00**	**68,75**	**31,45**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
								Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Dokumen**	**12**		**25%**		**25,00**		***8,25***		**68,75**		
		5	*01*	*03*	*2.01*	*0001*	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen Laporan*	1	*1.209.248.550,00*		-		-	*1*	*231.526.184,00*	*100,00*	*19,15*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
								Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kota Bandar Lampung	*Dokumen*	2		*2*									
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Dokumen*	*9*		*5*		*3*		*25%*					
		5	*01*	*03*	*2.01*	*0002*	*Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*	*Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial*	*Dokumen Laporan*	1	*445.998.550,00*	*1*	*173.153.208,00*		*42.995.326,00*		-					
								Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	*Perangkat Daerah*	8		*8*									
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Laporan*	3		1		1		*25%*					
		5	*01*	*03*	*2.01*	*0003*	*Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*	*Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial*	*Dokumen Laporan*	1	*459.123.550,00*	*1*	*163.465.873,00*		*59.010.950,00*		-					

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
								Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kota Bandar Lampung	*Dokumen*	2						*2*		*100,00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Dokumen*	*9*		*25%*		*25,00*		*5,25*		*58,33*		
		5	*01*	*03*	*2.01*	*0002*	*Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*	*Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial*	*Dokumen Laporan*	1	*445.998.550,00*		-		-	*1*	*173.153.208,00*	*100,00*	*38,82*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	*Perangkat Daerah*	8						*8*		*100,00*		
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Laporan*	3		*25%*		*25,00*		*1,25*		*41,67*		
		5	*01*	*03*	*2.01*	*0003*	*Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*	*Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial*	*Dokumen Laporan*	1	*459.123.550,00*		-		-	*1*	*163.465.873,00*	*100,00*	*35,60*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksamaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Laporan*	*5*		*3*		*1*		*25%*					
		5	*01*	*03*	*2.01*	*0004*	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan*	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan*	*Laporan*	1	*99.999.198,00*	*1*	*34.400.525,00*										
		5	*01*	*03*	*2.01*	*0005*	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen Laporan*	1	*605.532.878,00*	*1*	*253.386.302,00*		*133.447.918,00*		-						
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	*Dokumen*	*5*		*4*		*2*		*25%*							
		5	*01*	*03*	*2.01*	*0006*	*Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*	*Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat*	*Dokumen Laporan*	1	*587.486.136,00*	*1*	*165.648.458,00*		*52.468.469,00*		-						

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksamaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Laporan*	*5*		*25%*		*25,00*		*3,25*		*65,00*		
		5	*01*	*03*	*2.01*	*0004*	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan*	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan*	*Laporan*	1	*99.999.198,00*					*1,00*	*34.400.525,00*	*100,00*	*34,40*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
		5	*01*	*03*	*2.01*	*0005*	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen Laporan*	1	*605.532.878,00*		-		-	*1*	*253.386.302,00*	*100,00*	*41,85*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	*Dokumen*	*5*		*25%*		*25,00*		*4,25*		*85,00*		
		5	*01*	*03*	*2.01*	*0006*	*Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*	*Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat*	*Dokumen Laporan*	1	*587.486.136,00*		-		-	*1*	*165.648.458,00*	*100,00*	*28,20*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	*Perangkat Daerah*	10		*10*									
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Laporan*	3		*1*		*1*		*25%*					
		5	*01*	*03*	*2.01*	*0007*	*Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*	*Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat*	*Dokumen Laporan*	1	*608.507.088,00*	*1*	*241.606.709,00*		*72.927.574,00*		-					
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	*Perangkat Daerah*	10		*10*									
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Laporan*	3		*1*		*1*		*25%*					

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	*Perangkat Daerah*	10						*10*		*100,00*		
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Laporan*	3		*25%*		*25,00*		*1,25*		*41,67*		
		5	*01*	*03*	*2.01*	*0007*	*Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*	*Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat*	*Dokumen Laporan*	1	*608.507.088,00*		-		-	*1*	*241.606.709,00*	*100,00*	*39,70*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	*Perangkat Daerah*	10						*10*		*100,00*		
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Laporan*	3		*25%*		*25,00*		*1,25*		*41,67*		

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
2.2.2.		5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekononomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	6	1.797.500.000,00	4	872.526.915,00	1	264.830.443,00	25%	-						
								Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	6		4		1		25%								
		5	*01*	*03*	*2.02*	*0001*	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen Laporan*	1	*384.500.000,00*	*1*	*190.875.440,00*		*54.995.964,00*		-						
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	*Dokumen*	*5*		*3*		*1*		*25%*								
		5	*01*	*03*	*2.02*	*0002*	*Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*	*Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*	*Dokumen Laporan*	1	*344.500.000,00*	*1*	*175.781.145,00*		*39.974.242,00*		-						
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	*Perangkat Daerah*	6		*6*											

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
2.2.2.		5	01	03	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekononomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Dokumen**	**6**	**1.797.500.000,00**	**25%**	**-**	**25,00**	**0,00**	**4**	**872.526.915,00**	**70,83**	**48,54**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
								Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Dokumen**	**6**		**25%**		**25,00**		**4**		**70,83**	
		5	*01*	*03*	*2.02*	*0001*	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen Laporan*	1	*384.500.000,00*		-		-	*1*	*190.875.440,00*	*100,00*	*49,64*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	*Dokumen*	*5*		*25%*		*25,00*		*3*		*65,00*	
		5	*01*	*03*	*2.02*	*0002*	*Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*	*Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*	*Dokumen Laporan*	1	*344.500.000,00*		-		-	*1*	*175.781.145,00*	*100,00*	*51,03*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	*Perangkat Daerah*	6						*6*		*100,00*	

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Laporan*	3		*1*		*1*		*25%*							
		5	*01*	*03*	*2.02*	*0003*	*Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*	*Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*	*Dokumen Laporan*	1	*349.500.000,00*	*1*	*146.718.165,00*		*49.946.472,00*		-						
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	*Perangkat Daerah*	6		*6*											
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Laporan*	3		*1*		*1*		*25%*							
		5	*01*	*03*	*2.02*	*0005*	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen*	5	*223.000.000,00*	*3*	*108.549.280,00*	*1*	*39.952.552,00*	*25%*	-						
		5	*01*	*03*	*2.02*	*0006*	*Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA*	*Perangkat Daerah*	4	*223.000.000,00*	*4*	*107.907.249,00*		*39.974.122,00*		-						

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Laporan*	3		*25%*		*25,00*		*1,25*		*41,67*		
		5	*01*	*03*	*2.02*	*0003*	*Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*	*Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*	*Dokumen Laporan*	1	*349.500.000,00*		-		-	*1*	*146.718.165,00*	*100,00*	*41,98*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	*Perangkat Daerah*	6						*6*		*100,00*		
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Laporan*	3		*25%*		*25,00*		*1,25*		*41,67*		
		5	*01*	*03*	*2.02*	*0005*	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen*	5	*223.000.000,00*	*25%*	-	*25,00*	*0,00*	*3*	*108.549.280,00*	*65,00*	*48,68*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
		5	*01*	*03*	*2.02*	*0006*	*Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA*	*Perangkat Daerah*	4	*223.000.000,00*		-		-	*4*	*107.907.249,00*	*100,00*	*48,39*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Laporan*	3		*1*		*1*		*25%*							
		5	*01*	*03*	*2.02*	*0007*	*Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasii dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA*	*Perangkat Daerah*	4	*223.000.000,00*	*4*	*106.451.136,00*		*39.987.091,00*		-						
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Laporan*	3		*1*		*1*		*25%*							
		5	*01*	*03*	*2.02*	*0008*	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA*	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA*	*Laporan*	1	*50.000.000,00*	*1*	*36.244.500,00*										
2.2.3.		**5**	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Dokumen**	**6**	**4.133.604.050,00**	**4**	**1.765.911.523,00**	**1**	**900.996.044,00**	**25%**	-						
								Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan dan Kewilayahan	**Dokumen**	**6**		**4**		**1**		**25%**							

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Laporan*	3		*25%*		*25,00*		*1,25*		*41,67*		
		5	*01*	*03*	*2.02*	*0007*	*Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasii dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA*	*Perangkat Daerah*	4	*223.000.000,00*		*-*		*-*	*4*	*106.451.136,00*	*100,00*	*47,74*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Laporan*	3		*25%*		*25,00*		*1,25*		*41,67*		
		5	*01*	*03*	*2.02*	*0008*	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA*	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA*	*Laporan*	1	*50.000.000,00*					*1*	*36.244.500,00*	*100,00*	*72,49*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
2.2.3.		**5**	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Dokumen**	**6**	**4.133.604.050,00**	**25%**	**-**	**25,00**	**-**	**4,25**	**1.765.911.523,00**	**70,83**	**42,72**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
								Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan dan Kewilayahan	**Dokumen**	**6**		**25%**		**25,00**		**4,25**		**70,83**		

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
		5	*01*	*03*	*2.03*	*0001*	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen Laporan*	1	*1.450.000.000,00*	*1*	*460.307.589,00*		*600.999.413,00*		-						
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	*Dokumen*	*7*		*8*		*7*		*30%*							
		5	*01*	*03*	*2.03*	*0002*	*Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*	*Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*	*Dokumen Laporan*	1	*382.746.336,00*	*1*	*120.561.246,00*		*39.999.513,00*		-						
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	*Perangkat Daerah*	7		*7*											
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Laporan*	3		*1*		*1*		*25%*							
		5	*01*	*03*	*2.03*	*0003*	*Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*	*Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*	*Dokumen Laporan*	1	*395.864.714,00*	*1*	*103.711.835,00*		*70.000.000,00*		-						

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
		5	*01*	*03*	*2.03*	*0001*	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen Laporan*	1	*1.450.000.000,00*		-		-	*1*	*460.307.589,00*	*100,00*	*31,75*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	*Dokumen*	*7*		*30%*		*30,00*		*8,30*		*118,57*		
		5	*01*	*03*	*2.03*	*0002*	*Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*	*Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*	*Dokumen Laporan*	1	*382.746.336,00*		-		-	*1*	*120.561.246,00*	*100,00*	*31,50*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	*Perangkat Daerah*	7						*7*		*100,00*		
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Laporan*	3		*25%*		*25,00*		*1,25*		*41,67*		
		5	*01*	*03*	*2.03*	*0003*	*Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*	*Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*	*Dokumen Laporan*	1	*395.864.714,00*		-		-	*1*	*103.711.835,00*	*100,00*	*26,20*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	*Perangkat Daerah*	7		*7*									
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Laporan*	3		*1*		*1*		*25%*					
		5	*01*	*03*	*2.03*	*0004*	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastuktur*	*Dokumen Laporan Kerja Pokja PKP Nuwo Berseri Kota Bandar Lampung*	*Dokumen Laporan*	3	*749.743.082,00*	*3*	*729.799.310,00*									
								Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	*Laporam*	*3*		*3*									
		5	*01*	*03*	*2.03*	*0005*	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen Laporan*	1	*382.749.918,00*	*1*	*125.780.788,00*		*69.997.789,00*		-						
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	*Dokumen*	*5*		*3*		*1*		*25%*					

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	*Perangkat Daerah*	7						*7*		*100,00*		
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Laporan*	3		*25%*		*25,00*		*1,25*		*41,67*		
		5	*01*	*03*	*2.03*	*0004*	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastuktur*	*Dokumen Laporan Kerja Pokja PKP Nuwo Berseri Kota Bandar Lampung*	*Dokumen Laporan*	3	*749.743.082,00*					*3*	*729.799.310,00*	*100,00*	*97,34*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	*Laporam*	*3*						*3*		*100,00*		
		5	*01*	*03*	*2.03*	*0005*	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*Dokumen Laporan*	1	*382.749.918,00*		-		-	*1*	*125.780.788,00*	*100,00*	*32,86*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	*Dokumen*	*5*		*25%*		*25,00*		*3,25*		*65,00*		

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
		5	01	03	2.03	0006	*Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*	*Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*	*Dokumen Laporan*	1	*382.750.000,00*	*1*	*113.234.405,00*		*49.999.757,00*		-						
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	*Perangkat Daerah*	20		*20*										
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Laporan*	3		*1*		*1*		*25%*						
		5	01	03	2.03	0007	*Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*	*Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*	*Dokumen Laporan*	1	*389.750.000,00*	*1*	*112.516.350,00*		*69.999.572,00*		-						
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	*Perangkat Daerah*	20		*20*										
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Laporan*	3		*1*		*1*		*25%*						

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
		5	*01*	*03*	*2.03*	*0006*	*Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*	*Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*	*Dokumen Laporan*	1	*382.750.000,00*		-		-	*1*	*113.234.405,00*	*100,00*	*29,58*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	*Perangkat Daerah*	20						*20*		*100,00*		
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Laporan*	3		*25%*		*25,00*		*1,25*		*41,67*		
		5	*01*	*03*	*2.03*	*0007*	*Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*	*Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*	*Dokumen Laporan*	1	*389.750.000,00*		-		-	*1*	*112.516.350,00*	*100,00*	*28,87*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	*Perangkat Daerah*	20						*20*		*100,00*		
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Laporan*	3		*25%*		*25,00*		*1,25*		*41,67*		
												Rata-rata Capaian Kinerja		**25,00**	**-**				**39,22**	
												Predikat Kinerja		**SR**	**SR**				**SR**	

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				I		II		III		IV							
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											**9.130.000.000,00**		**2.721.769.534,00**		**681.673.711,00**		-						
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											**9.130.000.000,00**		**2.721.769.534,00**		**681.673.711,00**		-						
3	**Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**							**Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan**	**Persen**	**100**		**100,00**		**100,00**									
								Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	**Persen**	**95,00**		**100,00**		**100,00**									
3.1		**5**	**05**	**02**			**Program Penelitian dan Pengembangan**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**	**Persen**	**100,00**	**9.130.000.000,00**	**100,00**	**2.721.769.534,00**	**100,00**	**681.673.711,00**	-	-						
								Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	**Persen**	**92,59**		**100,00**		**100,00**		-							
3.1.1		**5**	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Dokumen**	**8**	**2.200.000.000,00**	**4**	**493.205.527,00**										
		5	*05*	*02*	*2.01*	*0005*	*Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi*	*Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung*	*Dokumen*	*1*	*1.150.000.000,00*	*1*	*420.605.527,00*										
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	*Laporan*	*3*		*2*											

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											**9.130.000.000,00**		-		-		**2.721.769.534,00**		**29,81**	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											**9.130.000.000,00**		-		-		**2.721.769.534,00**		**30,48**	
3	**Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**							**Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan**	**Persen**	**100**										**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
								Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	**Persen**	**95,00**										
3.1		**5**	**05**	**02**			**Program Penelitian dan Pengembangan**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**	**Persen**	**100,00**	**9.130.000.000,00**	-	-	-	-	-	**2.721.769.534,00**	-	**29,81**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
								Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	**Persen**	**92,59**		-		-		-		-		
3.1.1		**5**	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Dokumen**	**8**	**2.200.000.000,00**					**4**	**493.205.527,00**	**50,00**	**22,42**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
		5	*05*	*02*	*2.01*	*0005*	*Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi*	*Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung*	*Dokumen*	*1*	*1.150.000.000,00*					*1*	*420.605.527,00*	*100,00*	*36,57*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	*Laporan*	*3*						*2*		*66,67*		

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
		5	*05*	*02*	*2.01*	*0012*	*Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan*	*Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik*	*Laporan*	*2*	*600.000.000,00*	*-*	*-*										
		5	*05*	*02*	*2.01*	*0013*	*Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan*	*Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan*	*Rekomendasi*	*1*	*200.000.000,00*												
		5	*05*	*02*	*2.01*	*0014*	*Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan*	*Dokumen Laporan Implementasi Sistem Data Kesehatan SIBADAKJASA Kota Bandar Lampung*	*Dokumen Laporan*	*1*	*250.000.000,00*	*1*	*72.600.000,00*										
3.1.2		**5**	**01**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Dokumen**	**9**	**3.090.000.000,00**	**5**	**1.301.020.333,00**										
		5	*01*	*02*	*2.02*	*0001*	*Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial*	*Dokumen Perencanaan Pengembangan Pembangunan Bidang Sosial*	*Dokumen*	*1*	*500.000.000,00*	*-*	*149.505.950,00*										
								Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	*Dokumen*	*1*		*1*										
		5	*01*	*02*	*2.02*	*0004*	*Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga*	*Dokumen*	*1*	*250.000.000,00*												
		5	*01*	*02*	*2.02*	*0005*	*Penelitian dan Pengembangan Pariwisata*	*Dokumen Naskah Akademik Ranperda RIPPARDA*	*Dokumen*	*1*	*2.340.000.000,00*	*1*	*1.151.514.383,00*										
								Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	*Dokumen*	*5*		*3*										

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
		5	*05*	*02*	*2.01*	*0012*	*Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan*	*Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik*	*Laporan*	*2*	*600.000.000,00*					-	-	-	-	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
		5	*05*	*02*	*2.01*	*0013*	*Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan*	*Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan*	*Rekomendasi*	*1*	*200.000.000,00*									*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
		5	*05*	*02*	*2.01*	*0014*	*Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan*	*Dokumen Laporan Implementasi Sistem Data Kesehatan SIBADAKJASA Kota Bandar Lampung*	*Dokumen Laporan*	*1*	*250.000.000,00*					*1*	*72.600.000,00*	*100,00*	*29,04*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
3.1.2		**5**	**01**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Dokumen**	**9**	**3.090.000.000,00**					**5,00**	**1.301.020.333,00**	**55,56**	**42,10**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
		5	*01*	*02*	*2.02*	*0001*	*Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial*	*Dokumen Perencanaan Pengembangan Pembangunan Bidang Sosial*	*Dokumen*	*1*	*500.000.000,00*					-	*149.505.950,00*	-	*29,90*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	*Dokumen*	*1*						*1,00*		*100,00*		
		5	*01*	*02*	*2.02*	*0004*	*Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga*	*Dokumen*	*1*	*250.000.000,00*									*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
		5	*01*	*02*	*2.02*	*0005*	*Penelitian dan Pengembangan Pariwisata*	*Dokumen Naskah Akademik Ranperda RIPPARDA*	*Dokumen*	*1*	*2.340.000.000,00*					*1*	*1.151.514.383,00*	*100,00*	*49,21*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
								Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	*Dokumen*	*5*						*3,00*		*60,00*		

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
3.1.3		**5**	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Dokumen**	**8**	**2.175.000.000,00**	**1**	**199.190.618,00**	**2**	**484.998.300,00**	**5%**	-						
		5	*05*	*02*	*2.03*	*0001*	*Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*	*Dokumen*	*2*	*625.000.000,00*			*1*	*234.998.300,00*	*5%*	-						
		5	*05*	*02*	*2.03*	*0002*	*Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan*	*Dokumen*	*1*	*350.000.000,00*	*1*	*199.190.618,00*										
		5	*05*	*02*	*2.03*	*0003*	*Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah*	*Dokumen*	*1*	*300.000.000,00*												
		5	*05*	*02*	*2.03*	*0005*	*Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan*	*Dokumen*	*1*	*250.000.000,00*			*1*	*250.000.000,00*	*5%*	-						
		5	*05*	*02*	*2.03*	*0009*	*Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum*	*Dokumen*	*2*	*450.000.000,00*												
		5	*05*	*02*	*2.03*	*0011*	*Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman*	*Dokumen*	*1*	*200.000.000,00*												
3.1.4		**5**	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah**	**Dokumen**	*8*	**1.665.000.000,00**	**7**	**728.353.056,00**	**1**	**196.675.411,00**	**10%**	-						
		5	*05*	*02*	*2.04*	*0001*	*Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi*	*Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah*	*Dokumen Laporan*	*1*	*1.665.000.000,00*	*1*	*728.353.056,00*		*196.675.411,00*		-						

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
3.1.3		**5**	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Dokumen**	**8**	**2.175.000.000,00**	**5%**	**-**	**5,00**	**-**	**1,05**	**199.190.618,00**	**13,13**	**9,16**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
		5	*05*	*02*	*2.03*	*0001*	*Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*	*Dokumen*	*2*	*625.000.000,00*	*5%*	*-*	*5,00*	*-*	*0,05*	*-*	*2,50*	*0,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
		5	*05*	*02*	*2.03*	*0002*	*Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan*	*Dokumen*	*1*	*350.000.000,00*					*1*	*199.190.618,00*	*100,00*	*56,91*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
		5	*05*	*02*	*2.03*	*0003*	*Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah*	*Dokumen*	*1*	*300.000.000,00*									*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
		5	*05*	*02*	*2.03*	*0005*	*Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan*	*Dokumen*	*1*	*250.000.000,00*	*5%*	*-*	*5,00*	*-*	*0,05*	*-*	*5,00*	*0,00*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
		5	*05*	*02*	*2.03*	*0009*	*Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum*	*Dokumen*	*2*	*450.000.000,00*									*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
		5	*05*	*02*	*2.03*	*0011*	*Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman*	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman*	*Dokumen*	*1*	*200.000.000,00*									*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
3.1.4		**5**	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah**	**Dokumen**	***8***	**1.665.000.000,00**	**10%**	**-**	**10,00**	**-**	**7,10**	**728.353.056,00**	**88,75**	**43,74**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
		5	*05*	*02*	*2.04*	*0001*	*Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi*	*Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah*	*Dokumen Laporan*	*1*	*1.665.000.000,00*		*-*		*-*	*1*	*728.353.056,00*	*100,00*	*43,74*	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2) TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
								Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	*Dokumen*	*7*		*6*		*1*		*10%*							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											**92.206.134.376,99**		**40.149.320.981,00**		**14.466.266.767,00**		**2.010.716.076,00**						
TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																							

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
								Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	*Dokumen*	*7*		*10%*		*10,00*		*6,10*		*87,14*		
													Rata-rata Capaian Kinerja	**7,50**	**-**				**29,81**	
													Predikat Kinerja	**SR**	**SR**				**SR**	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											**92.206.134.376,99**		**2.010.716.076,00**				**42.160.037.057,00**			
TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															**13,90**				**45,72**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															**SR**				**SR**	

Selanjutnya evaluasi program secara umum berdasarkan masing-masing unsur penunjang adalah sebagai berikut:

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Unsur Perencanaan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Unsur Perencanaan ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan optimalisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan memantapkan kualitas perencanaan pembangunan dan penerapan kelitbangan di Kota Bandar Lampung.

Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan dengan 3 Program, 13 Kegiatan, dan 55 Sub Kegiatan dengan capaian realisasi kinerja program sampai dengan Triwulan I adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan dengan indikator/ukuran keberhasilan yaitu Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan, yang ditunjang dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

a. Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas. Adapun dokumen yang disusun adalah :
   - ✓ Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terdiri dari Dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset

dan Inovasi Daerah Tahun 2026, Dokumen Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025, dan Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029;

- ✓ Dokumen RKA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026 dan Perubahan RKA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025;
- ✓ Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Dokumen Laporan Evaluasi Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024, Dokumen Laporan Evaluasi Renja Triwulanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025, Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025; dan
- ✓ Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Dokumen LPJ Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024, Dokumen LPPD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024, Dokumen LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024, dan Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 serta Perubahannya.

Keseluruhan dokumen yang disusun tersebut melalui tahapan dan jadwal penyusunan masing-masing. Untuk Triwulan I penyusunan Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi

Daerah Tahun 2025, Dokumen LPJ Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024, Dokumen LPPD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024, Dokumen LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024, dan Dokumen Laporan Evaluasi Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024 serta penyusunan Laporan Evaluasi Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diselesaikan tepat waktu. Adapun untuk Dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026, sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 baru pada tahap penyusunan Rancangan. Demikian pula dengan Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 yang sampai dengan Triwulan I baru pada tahap penyusunan Rancangan Awal.

b. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel. Adapun dokumen yang disusun adalah :
   - ✓ Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025;
   - ✓ Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
   - ✓ Laporan Keuangan Bulanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025.

   Pada Triwulan I, penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan

Inovasi Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 serta Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diselesaikan tepat waktu.

c. Selain itu, indikator Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juga ditunjang dengan indikator kegiatan Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD, Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD, dan Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor serta Inventaris Kantor yang Terpelihara.

Rata-rata capaian kinerja program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar 19,64 persen.

2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan indikator/ukuran keberhasilan yaitu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW, dan Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya, yang ditunjang dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA. Pada Tahun 2025 dilakukan penyusunan Dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dokumen tersebut disusun melalui tahapan yang meliputi pelaksanaan Analisis

Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah; pelaksanaan Konsultasi Publik; Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; pelaksanaan Musrenbang Kota; serta Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, penyusunan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 baru sampai dengan tahap pelaksanaan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah berupa tersusunya Rancangan Awal RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 serta pelaksanaan Konsultasi Publik.

b. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA. Dokumen yang disusun adalah Dokumen PERKADA RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025. Dokumen tersebut disusun melalui tahapan dan jadwal penyusunan masing-masing yang meliputi tahapan pelaksanaan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah; Pelaksanaan Konsultasi Publik; Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Pelaksanaan Musrenbang Kota; dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen PERKADA RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

   Capaian kinerja untuk indikator ini sampai dengan Triwulan I berupa penyelesaian tahapan pelaksanaan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah; Pelaksanaan Konsultasi Publik; Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah serta Pelaksanaan Musrenbang Kota yang dilaksanakan tepat waktu.

c. Selain itu, indikator capaian pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah juga ditunjang dengan indikator ketersediaan Dokumen Laporan Implementasi e-*Planning* Kota Bandar Lampung; dan Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Dokumen Laporan Capaian SDG's Kota Bandar Lampung, Dokumen LKPJ dan Pengantar LKPJ Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2024, Dokumen Laporan Evaluasi RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 dan Triwulanan Tahun 2025, serta Laporan Pelaksanaan DAK Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

   Capaian kinerja sampai dengan Triwulan I antara lain dengan telah disusunnya Dokumen LKPJ dan Pengantar LKPJ Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2024, dan Dokumen Laporan Evaluasi RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan ketepatan waktu penyusunan Laporan SDG's yang telah sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, Laporan Pelaksanaan DAK dan Evaluasi Triwulanan RKPD Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, serta pelaksanaan proses perencanaan di dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)/e-Planning yaitu sampai dengan pelaksanaan penginputan data terkait Rancangan Awal RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2026.

Rata-rata capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar 32,22 persen.

3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan indikator/ukuran keberhasilan yaitu Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD, dan Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya, yang ditunjang dengan indikator kegiatan berupa Himpunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Indikator penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD merupakan indikator untuk memastikan konsistensi program yang dimuat dalam RKPD dengan yang sudah ditetapkan dalam PERDA RPJMD. Adapun Indikator penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD merupakan indikator ini untuk mengukur keberhasilan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan salah satu Tupoksi nya dalam hal pengendalian dan evaluasi, terutama mengendalikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Indikator ini dapat dilihat melalui konsistensi program antara Dokumen RKPD dengan APBD Tahun 2026 dan Dokumen Perubahan RKPD dengan Perubahan APBD Tahun 2025. Sedangkan persentase indikator program OPD yang tercapai targetnya merupakan indikator untuk mengukur ketercapaian kinerja program OPD pada tahun berkenaan.

Capaian kinerja program untuk indikator tersebut sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 masih belum dapat diukur, mengingat Dokumen RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang belum ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota. Namun demikian, secara umum sampai dengan

Triwulan I Tahun 2025, tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan telah dilaksanakan tepat waktu.

Rata-rata capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar 25,00 persen.

2. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung. Unsur penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan untuk upaya optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka mewujudkan tujuan memantapkan kualitas perencanaan pembangunan dan penerapan kelitbangan di Kota Bandar Lampung.

Pada Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur penelitian dan pengembangan dengan program strategis berupa Program Penelitian dan Pengembangan yang dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan indikator/ukuran keberhasilan yaitu Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, yang ditunjang dengan indikator kegiatan berupa ketersediaan (1) Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan output berupa Dokumen Pemetaan dan Desain Strategi Pengembangan UMKM dan IKM Terpadu serta Dokumen Kaji Ulang *(Review)* Studi Pemetaan Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung dan (2) Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah dengan output berupa Dokumen Indeks Inovasi Daerah (IID.

Secara umum capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yang meliputi tahapan dan jadwal pelaksanaan penyusunan Dokumen Pemetaan dan Desain Strategi Pengembangan UMKM dan IKM Terpadu; Dokumen Kaji Ulang *(Review)* Studi Pemetaan Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung; dan Dokumen Indeks Inovasi Daerah (IID) sampai dengan Triwulan I yang direncanakan, telah dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Rata-rata capaian kinerja program penelitian dan pengembangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar 7,50 persen.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang kemudian dijabarkan ke dalam sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Wali Kota Bandar Lampung dalam hal menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan, riset/penelitian dan pengembangan inovasi daerah.

Pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah sebagai *"pengarah"* setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program yang dirancang Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah pada perubahan anggaran Tahun 2025 terdiri dari :

Unsur Perencanaan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Unsur Penelitian dan Pengembangan

1. Program Penelitian dan Pengembangan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, pada Perubahan Renja Tahun 2025 ini, terdapat sub kegiatan yang mengalami penambahan dan pengurangan anggaran dari sebesar Rp14.466.266.767,00 dalam DPA yang ditetapkan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 yang meliputi Rp13.784.593.056,00 pada Unsur Perencanaan dan Rp681.673.711,00 pada Unsur Penelitian dan Pengembangan menjadi sebesar Rp13.269.329.637,00 pada Perubahan Renja Tahun 2025 yang meliputi Rp12.623.278.644,00 pada Unsur Perencanaan dan Rp646.050.993,00 pada Unsur Penelitian dan Pengembangan. Dengan demikian, pada Perubahan Renja Tahun 2025 terjadi penurunan pagu indikatif anggaran sebesar Rp1.196.937.130,00.

Secara rinci, rencana program, kegiatan, dan sub Kegiatan beserta indikator, target kinerja dan pagu indikatif dalam Perubahan Renja Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 3.1. berikut ini:

TABEL 3.1 RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2025

NO	KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH									**14.944.035.967,00**	**14.466.266.767,00**	**13.269.329.637,00**	
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									**14.944.035.967,00**	**14.466.266.767,00**	**13.269.329.637,00**	
	5	**01**				**PERENCANAAN**									**14.179.035.967,00**	**13.784.593.056,00**	**12.623.278.644,00**	
131	**5**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**	**Persen**	**Persen**	**98**	**98**	**98**	**10.704.035.967,00**	**10.445.982.985,00**	**10.190.478.087,00**	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	Persen	100	100	100	225.000.000,00	151.286.419,00	85.854.000,00	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3	3	50.000.000,00	36.393.362,00	21.221.050,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	30.000.000,00	22.334.800,00	13.632.800,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	30.000.000,00	22.978.813,00	14.318.800,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

NO	KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3	3	3	55.000.000,00	34.980.708,00	19.485.650,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	5	5	5	60.000.000,00	34.598.736,00	17.195.700,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	Persen	100	100	100	8.918.845.967,00	8.484.318.543,00	8.463.880.807,00	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	60	60	60	8.645.845.967,00	8.168.076.767,00	8.168.076.767,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	188.000.000,00	267.675.000,00	267.675.000,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	35.000.000,00	19.744.514,00	11.421.900,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											

NO	KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	12	12	12	50.000.000,00	28.822.262,00	16.707.140,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	Persen	80	80	80	100.000.000,00	86.191.194,00	67.195.700,00	
	5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
								Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Dokumen	1	1	1	50.000.000,00	36.191.194,00	17.195.700,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	10	10	10	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	Persen	98	98	98	583.500.000,00	603.552.255,00	407.074.070,00	
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor											
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.000.000,00	19.938.654,00	19.938.654,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	100.000.000,00	52.116.374,00	52.116.374,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											

NO	KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	30.000.000,00	29.999.895,00	19.975.562,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	38.500.000,00	38.500.000,00	20.000.000,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	100.000.000,00	59.994.446,00	50.043.480,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	35.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	250.000.000,00	343.002.886,00	200.000.000,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	Persen	98	98	98	200.000.000,00	485.804.574,00	531.643.510,00	
	5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
								Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

NO	KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	5	18	24	50.000.000,00	274.869.430,00	353.005.550,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	5	8	3	50.000.000,00	110.935.144,00	78.637.960,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	Persen	100	100	100	262.000.000,00	248.000.000,00	248.000.000,00	
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	182.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	Persen	98	98	98	414.690.000,00	386.830.000,00	386.830.000,00	
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	45.430.000,00	41.670.000,00	41.670.000,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

NO	KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	13	13	13	269.260.000,00	245.420.000,00	245.420.000,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	20	20	20	50.000.000,00	49.740.000,00	49.740.000,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
132	5	01	02			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**1.935.000.000,00**	**1.712.061.568,00**	**1.304.185.332,00**	
								Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	**Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**				
								Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya	**Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya**	**Persen**	**Persen**	**90,70**	**90,70**	**90,70**				
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Dokumen	Dokumen	Ada	Ada	Ada	1.215.000.000,00	992.079.701,00	788.206.539,00	
								Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	Dokumen	Ada	Ada	Ada				
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah											
								Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	Dokumen	2	2	2	200.000.000,00	49.999.838,00	46.291.978,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*

NO	KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik											
								Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Berita Acara	2	2	2	120.000.000,00	117.080.145,00	94.080.145,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah											
								Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	Berita Acara	2	2	2	120.000.000,00	109.999.718,00	91.999.718,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota											
								Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	Berita Acara	2	2	2	350.000.000,00	300.000.000,00	160.751.478,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	Dokumen	3	3	3	425.000.000,00	415.000.000,00	395.083.220,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	Dokumen	5	5	5	500.000.000,00	499.982.583,00	338.949.478,00	
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota											
								Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Laporan	1	1	1	200.000.000,00	149.982.583,00	132.949.478,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah											

NO	KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Laporan	4	4	4	300.000.000,00	350.000.000,00	206.000.000,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Implementasi *e-Planning* Kota Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Laporan Implementasi *e-Planning* Kota Bandar Lampung	Dokumen Laporan	Dokumen Laporan	1	1	1	220.000.000,00	219.999.284,00	177.029.315,00	
	5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah											
								Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	Dokumen	1	1	1	70.000.000,00	69.999.785,00	33.618.603,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah											
								Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	150.000.000,00	149.999.499,00	143.410.712,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
133	**5**	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**	**Persen**	**Persen**	**91,89**	**91,89**	**91,89**	**1.540.000.000,00**	**1.626.548.503,00**	**1.128.615.225,00**	
								Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	**Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**				
								Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya	**Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya**	**Persen**	**Persen**	**90,78**	**90,78**	**90,78**				
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	Dokumen	2	2	2	640.000.000,00	460.722.016,00	236.866.831,00	
								Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	Dokumen	2	2	2				
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											

NO	KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	2	2	2	150.000.000,00	99.871.779,00	47.727.450,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan											
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Laporan	1	1	1	80.000.000,00	42.995.326,00	34.603.950,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan											
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Laporan	1	1	1	80.000.000,00	59.010.950,00	34.810.600,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	2	2	2	130.000.000,00	133.447.918,00	50.894.181,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia											

NO	KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	52.468.469,00	32.652.950,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	72.927.574,00	36.177.700,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekononomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekononomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	300.000.000,00	264.830.443,00	149.960.678,00	
								Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	Dokumen	1	1	1				
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	60.000.000,00	54.995.964,00	31.199.871,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian											

NO	KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Laporan	1	1	1	60.000.000,00	39.974.242,00	21.613.320,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian											
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Laporan	1	1	1	60.000.000,00	49.946.472,00	22.789.460,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	40.000.000,00	39.952.552,00	31.131.387,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA											
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	Laporan	1	1	1	40.000.000,00	39.974.122,00	21.610.250,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA											

NO	KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	Laporan	1	1	1	40.000.000,00	39.987.091,00	21.616.390,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	600.000.000,00	900.996.044,00	741.787.716,00	
								Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan dan Kewilayahan	Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan dan Kewilayahan	Dokumen	Dokumen	1	1	1				
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	3	7	6	250.000.000,00	600.999.413,00	522.116.370,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur											
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Laporan	1	1	1	70.000.000,00	39.999.513,00	25.316.000,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur											

NO	KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Laporan	1	1	1	70.000.000,00	70.000.000,00	40.536.000,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	70.000.000,00	69.997.789,00	57.699.606,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan											
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Laporan	1	1	1	70.000.000,00	49.999.757,00	36.735.550,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan											
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Laporan	1	1	1	70.000.000,00	69.999.572,00	59.384.190,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*

NO	KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	RENJA TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								**765.000.000,00**	**681.673.711,00**	**646.050.993,00**	
134	**5**	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**765.000.000,00**	**681.673.711,00**	**646.050.993,00**	
								Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	**Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**				
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	Dokumen	2	2	2	500.000.000,00	484.998.300,00	482.580.938,00	
	5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
								Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	250.000.000,00	234.998.300,00	232.580.938,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	05	02	2.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan											
								Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	265.000.000,00	196.675.411,00	163.470.055,00	
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi											
								Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	265.000.000,00	196.675.411,00	163.470.055,00	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	√			
	2.1	Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan/ Tahun 2025				
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, target, dan pagu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 2025
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Kota Bandar Lampung,

Dr. MUHAMAD NUR RAM'DHAN, M.Acc., Akt., CGAE., C
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19741007 200501 1 006

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	(Dr. Rein Susinda Hesty, S.Sos., M.Si) Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapperida	
2	(Henny Sunlinawati, S.Sos) Perencana ahli muda bapperida	

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida,

Dini Purnamawaty,S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP197002181993032002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I I Tahun berkenaan	√			
4.	Pendanaa program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif yntuk masing – masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	-

Bandar Lampung, 2025
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Kota Bandar Lampung,

Dr. MUHAMAD NUR RAM'DHAN, M.Acc., Akt., CGAE., CA.
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19741007 200501 1 006

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**(Dr.Rein Susinda Hesty, S.Sos., M.Si)**	
	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapperida	
2	**(Henny Sunlinawati, S.Sos)**	
	Perencana ahli muda bapperida	

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida,

Dini Purnamawaty,S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP197002181993032002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota telah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan berdasarka realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**(Dr. Rein Susinda Hesty, S.Sos., M.Si)**	
	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapperida	
2	**(Henny Sunlinawati, S.Sos)**	
	Perencana ahli muda bapperida	

Bandar Lampung, Juli 2025
Plt. Kepala Bapperida,

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I.1

1.2 Landasan Hukum I.3

1.3 Maksud dan Tujuan I.6

1.4 Sistematika Penulisan 1.6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun berkenaan/Tahun 2025

Formulir E.81 II.1

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target, dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 III.1

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN 31
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berkaitan dengan hal tersebut pembuatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada

RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja OPD.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD memuat program dan kegiatan baik yang sedang berjalan maupun kegiatan alternatif atau baru, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari kegiatan, dan pagu indikatif dan prakiraan maju yaitu kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan sasaran BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Keuangan;
2. Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan daerah;
3. Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK;
5. Tingkat Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang- Undangan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Rencana Kerja (BKAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara R.I Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2022;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;

19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Kota Bandar Lampung 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.
22. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Bandar Lampung Kota Bandar Lampung.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja BKAD Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Acuan BKAD Kota Bandar Lampung dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bandar Lampung.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan BKAD Kota Bandar Lampung selama Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun berkenaan/Tahun 2025
Formulir E.81

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target, dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN/TAHUN 2025.

Evaluasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan / Tahun 2025 ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review ini, didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan perkiraan pelaksanaan DPA- Perangkat Daerah (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru beberapa bulan dilaksanakan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. ***Penetapan Indikator Kinerja***

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan

yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (outputs), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja RPJMD :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK;

Indikator Kinerja Program Renstra :

1. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
2. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah;
3. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P
4. Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan;
5. Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Daerah;
6. Persentase penilaian dan penghapusan BMD sesuai dengan usulan Perangkat Daerah;

Indikator Kinerja Kegiatan Renja :

Indikator Kinerja Kegiatan Pada Program Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

1. Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas;
2. Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib;
3. Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel;
4. Persentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
5. Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

6. Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor;
8. Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan Perangkat Daerah;
9. Inventaris kantor yang tersedia.

Indikator Kinerja Kegiatan Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Persentase koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah;
2. Persentase koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah;
3. Opini BPK atas LKPD;
4. Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat;
5. Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah;

Indikator Kinerja Kegiatan Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah:

1. Tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Indikator Kinerja SubKegiatan Tahun 2025

1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD
3. Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD

4 Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD

5. Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD
6. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD;

7. Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah;

8 Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN;

9 Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;

10 Jumlah laporan keuangan bulanan /triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD;

11. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

12. Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;

13. Jumlah paket instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan;

14. Jumlah paket peralatan dan pelengkapan kantor yang disediakan;

15. Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan;

16. Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan;

17. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan;

18. Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan;

19. Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu;

20. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;

21. Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD;

22. Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan;

23. Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan;

24. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan;

25. Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor yang disediakan;

26. Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya;

28. Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan;

29. Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi;

30. Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun;

31. Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun;

32. Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;

33. Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD;

34. Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
35. Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;

36. Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
37. Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan pengelolaan kas daerah;
38. Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD;
39. Jumlah dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;

40. Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan an pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK);

41. jumlah dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;

43. Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;

43. Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan denganpenerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan;

44. Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran;

45. Jumlah laporan keuangan SKPD,BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi;
46. Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota;

47. Jumlah dokumen hasil Koordinasi,sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;

48. Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota;

49. Jumlah BLUD Kab/Kota yang dibina;

50. Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah;
51. Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah;

52. Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;

53. Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana darurat dan mendesak;

54. Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah
55. Jumlah dokumen hasil Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah;

56. Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota;

57. Jumlah standar harga yang disusun;
58. Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah ;
59. Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah;
60. Jumlah laporan hasil Pengamanan barang milik daerah;
61. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
62. Jumlah dokumen hasil Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
63. Jumlah Dokumen hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
64. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah

Tabel E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kota Bandar Lampung Renja Perangkat Daerah BKAD Kota Bandar Lampung Sampai Dengan Triwulan II Tahun berkenaan/Tahun 2025 (terlampir).

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target, dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (dengan indikator sesuai dengan kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 202 4) terlampir.

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Perubahan Renja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Badan Keuangan Dan Aset Daerah menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tabel E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kota Bandar Lampung
Renja Perangkat Daerah BKAD Kota Bandar Lampung
Periode Pelaksanaan : Triwulan II 2025

Indikator dan target kinerja BKAD Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasarn RKPD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

No	SASARAN	KODE						INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) S/D TW I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 S/D TW I (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	I		II		III		IV		K	RUPIAH			K	RUPIAH	K	RUPIAH	
																K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH								
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14+8)		17 = (16/7)*100		18
1	**Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran, laporan keuangan, dan penatausahaan keuangan daerah**	**5**	**02**				**KEUANGAN**				**916,850,629,297.28**		**514,997,959,865.20**		**277,684,107,166.00**		**41,045,233,811.00**		**8,859,071,543.00**		-		-		**49,904,305,354.00**	**17.97**				**61.61**		**Badan Keuangan dan Aset Daerah**
		5	**02**				**Badan Keuangan dan Aset Daerah**				**916,850,629,297.28**		**514,997,959,865.20**		**277,684,107,166.00**		**41,045,233,811.00**		**8,859,071,543.00**		-		-		**49,904,305,354.00**	**17.97**				**61.61**		
		5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN**	**Persen**	**98.00**	**319,994,368,884.14**	**74.30**	**237,748,671,364.20**	**100.00**	**141,491,253,066.50**	**9.22**	**13,042,964,463.00**	**2.86**	**4,040,545,503.00**	-	-	-	-	**12.07**	**17,083,509,966.00**	**12.07**	**12.07**	**79.64**	**254,832,181,330.20**	**81.26**	**79.64**	
		5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**3,073,254,533.10**	**70.46**	**2,165,487,453.00**	**100.00**	**614,129,352.00**	**16.43**	**100,905,500.00**	**2.10**	**12,875,000.00**	-	-	-	-	**18.53**	**113,780,500.00**	**18.53**	**18.53**	**74.16**	**2,279,267,953.00**	**74.16**	**74.16**	
		5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	12.00	895,682,516.93	8.00	573,233,585.00	2.00	133,108,351.00	2.00	46,751,000.00	-	-					2.00	46,751,000.00		35.12	10.00	619,984,585.00	83.33	69.22	
		5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA -SKPD dan laporan hasil koordinasi	dokumen	4.00	169,200,000.00	2.00	139,095,655.00	1.00	58,050,353.00	-	-	-	-					-	-		-	2.00	139,095,655.00	50.00	82.21	
		5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA -SKPD dan laporan hasil koordinasi	dokumen	4.00	137,265,000.00	2.00	113,386,883.00	1.00	55,639,432.00	-	-	-	-					-	-		-	2.00	113,386,883.00	50.00	82.60	
		5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasi	dokumen	4.00	171,681,619.39	2.00	156,891,798.00	1.00	66,151,925.00	-	-	-	-					-	-		-	2.00	156,891,798.00	50.00	91.39	
		5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasi	dokumen	4.00	131,155,000.00	2.00	123,343,920.00	1.00	59,869,622.00	-	-	-	-					-	-		-	2.00	123,343,920.00	50.00	94.04	
		5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Laporan	18.00	823,691,772.02	6.00	580,615,147.00	3.00	119,116,205.00	3.00	38,565,500.00							3.00	38,565,500.00		32.38	9.00	619,180,647.00	50.00	75.17	
		5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	30.00	744,578,624.76	10.00	478,920,465.00	5.00	122,193,464.00	3.00	15,589,000.00	1.00	12,875,000.00					4.00	28,464,000.00		23.29	14.00	507,384,465.00	46.67	68.14	
		5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib**	**Persen**	**100.00**	**288,141,840,987.80**	**73.72**	**212,408,110,750.65**	**100.00**	**133,571,131,085.50**	**8.73**	**11,663,366,737.00**	**2.64**	**3,522,616,022.00**	-	-	-	-	**11.37**	**15,185,982,759.00**	**11.37**	**11.37**	**78.99**	**227,594,093,509.65**	**78.99**	**78.99**	
								Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	**Persen**	**100.00**																						
		5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	762.00	284,302,994,256.84	508.00	209,108,117,818.34	127.00	132,562,740,289.50	127.00	11,464,632,737.00	127.00	3,469,687,022.00					254.00	14,934,319,759.00		11.27	508.00	224,042,437,577.34	66.67	78.80	
		5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	6,200.00	1,691,971,730.96	3,720.00	1,385,785,843.00	1,240.00	601,680,786.00	310.00	115,802,000.00	310.00	41,679,000.00					620.00	157,481,000.00		26.17	4,340.00	1,543,266,843.00	70.00	91.21	
		5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laopran keuangan Bulanan.triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan	Dokumen	78.00	2,146,875,000.00	52.00	1,914,207,089.31	13.00	406,710,010.00	4.00	82,932,000.00	4.00	11,250,000.00					8.00	94,182,000.00		23.16	60.00	2,008,389,089.31	76.92	93.55	
		5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persen**	**80.00**	**731,250,000.00**	-	**501,419,881.00**	**100.00**	**288,037,608.00**	**64.59**	**186,040,000.00**		-	-	-	-	-	**64.59**	**186,040,000.00**	**64.59**	**64.59**	**94.01**	**687,459,881.00**	**117.51**	**94.01**	
		5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	3.00	651,500,000.00	1.00	200,000,000.00	1.00	100,000,000.00	-	-		-					-	-		-	1.00	200,000,000.00	33.33	30.70	
		5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti	orang	42.00	731,250,000.00	9.00	501,419,881.00	9.00	188,037,608.00	9.00	186,040,000.00		-		-			9.00	186,040,000.00		98.94	18.00	687,459,881.00	42.86	94.01	
		5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**6,201,589,182.20**	**82.49**	**5,115,607,579.19**	**100.00**	**1,427,248,621.00**	**22.36**	**319,155,435.00**	**2.56**	**36,529,309.00**	-	-	-	-	**24.92**	**355,684,744.00**	**24.92**	**24.92**	**88.22**	**5,471,292,323.19**	**90.02**	**88.22**	
		5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlahopaket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	18.00	510,241,200.00	12.00	380,963,587.00	3.00	115,002,552.00	3.00	28,480,200.00		-					3.00	28,480,200.00		24.76	15.00	409,443,787.00	83.33	80.25	
		5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang	Paket	24.00	1,224,344,306.25	16.00	703,288,874.00	4.00	172,223,086.00	4.00	-		-					4.00	-		-	20.00	703,288,874.00	83.33	57.44	
		5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	36.00	192,494,132.59	24.00	262,679,422.00	6.00	78,305,810.00	6.00	19,173,400.00		-					6.00	19,173,400.00		24.49	30.00	281,852,822.00	83.33	146.42	
		5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	42.00	201,506,667.07	28.00	181,287,500.00	7.00	78,000,000.00	7.00	6,125,000.00		-					7.00	6,125,000.00		7.85	35.00	187,412,500.00	83.33	93.01	

No	SASARAN	KODE					INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) S/D TW I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 S/D TW I (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							I		II		III		IV											
									K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14+8)		17 = (16/7)*100		18
		5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	54.00	1,164,215,396.99	36.00	718,632,087.00	9.00	150,965,532.00	9.00	43,122,500.00		-					9.00	43,122,500.00		28.56	45.00	761,754,587.00	83.33	65.43	
		5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	36.00	170,047,820.31	24.00	125,640,000.00	6.00	38,040,000.00	6.00	9,510,000.00		3,170,000.00					6.00	12,680,000.00		33.33	30.00	138,320,000.00	83.33	81.34	
		5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	60.00	590,337,672.90	40.00	491,560,250.00	10.00	89,000,000.00	10.00	-		-					10.00	-		-	50.00	491,560,250.00	83.33	83.27	
		5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapot koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	60.00	1,094,105,500.15	40.00	1,036,170,339.19	10.00	260,303,196.00	10.00	151,557,035.00		25,109,309.00					10.00	176,666,344.00		67.87	50.00	1,212,836,683.19	83.33	110.85	
		5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah DokumenDukungan Pelaksanaan Sistem	Dokumen	48.00	1,054,296,485.94	32.00	1,215,385,520.00	8.00	445,408,445.00	8.00	61,187,300.00		8,250,000.00					8.00	69,437,300.00		15.59	40.00	1,284,822,820.00	83.33	121.87	
		5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**1,059,860,450.62**	**92.94**	**985,057,151.36**	**100.00**	**765,858,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**92.94**	**985,057,151.36**	**94.84**	**92.94**	
		5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	**Unit**	2.00	750,000,000.00	1.00	750,000,000.00	1.00	500,000,000.00	-	-		-		-		-	-	-		1.00	750,000,000.00	50.00	100.00	
		5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang	Unit	48.00	714,200,845.31	32.00	534,673,138.00	8.00	70,458,000.00	-	-		-		-		-	-	-		32.00	534,673,138.00	66.67	74.86	
		5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	Unit	30.00	345,659,605.31	20.00	450,384,013.36	5.00	195,400,000.00	-	-		-		-		-	-	-		20.00	450,384,013.36	66.67	130.30	
		5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**14,809,464,671.02**	**90.99**	**13,474,512,824.00**	**100.00**	**4,252,428,400.00**	**17.03**	**724,378,727.00**	**10.58**	**450,054,000.00**	-	-	-	-	**27.62**	**1,174,432,727.00**	**27.62**	**27.62**	**17.67**	**2,617,443,975.00**	**18.03**	**17.67**	
		5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	6.00	1,115,513,701.25	4.00	721,505,624.00	1.00	252,010,000.00	1.00	80,904,727.00	-	15,071,200.00	-		-			95,975,927.00		38.08	4.00	817,481,551.00	66.67	73.28	
		5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di	Laporan	6.00	13,693,950,969.77	4.00	12,753,007,200.00	1.00	4,000,418,400.00	1.00	643,474,000.00	-	434,982,800.00	-		-			1,078,456,800.00		26.96	4.00	1,799,962,424.00	66.67	13.14	
		5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**4,463,755,791.67**	**45.33**	**2,023,359,360.00**	**100.00**	**572,420,000.00**	**8.58**	**49,118,064.00**	**3.23**	**18,471,172.00**	-	-	-	-	**11.81**	**67,589,236.00**	**11.81**	**11.81**	**62.00**	**2,767,337,781.00**	**63.26**	**62.00**	
		5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan pperorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan	Unit	6.00	228,082,339.00	4.00	176,982,175.00	1.00	52,430,000.00	1.00	5,530,000.00	-	2,726,500.00					1.00	8,256,500.00		15.75	5.00	185,238,675.00	83.33	81.22	
		5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	108.00	2,841,228,755.80	72.00	1,134,208,685.00	18.00	313,790,000.00	4.00	34,798,064.00	4.00	15,744,672.00					8.00	50,542,736.00		16.11	80.00	1,184,751,421.00	74.07	41.70	
		5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	60.00	918,310,800.00	10.00	254,349,000.00	10.00	78,500,000.00	-	-	-	-					-	-		-	10.00	1,134,208,685.00	16.67	123.51	
		5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang	Paket	6.00	476,133,896.88	4.00	457,819,500.00	1.00	127,700,000.00	-	8,790,000.00		-		-			-	8,790,000.00		6.88	4.00	263,139,000.00	66.67	55.27	
								Persentase laporan keuangan tepat waktu	**Persen**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**					**100**		**100.00**		**100.00**		**1.00**		
		5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase laporan keuangan tepat waktu**	**Persen**	**100.00**	**583,790,026,490.44**	**100.00**	**269,403,811,205.00**	**100.00**	**132,867,045,333.50**	**20.81**	**27,648,247,800.00**	**3.58**	**4,753,069,040.00**	-	-	-	-	**24.39**	**32,401,316,840.00**	**24.39**	**24.39**	**51.70**	**301,805,128,045.00**	**51.70**	**51.70**	
		5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah**	**Persen**	**100.00**	**32,589,029,287.38**	**51.21**	**16,688,093,373.00**	**100.00**	**4,575,913,079.50**	**17.39**	**795,914,911.00**	**2.19**	**100,100,000.00**	-	-	-	-	**19.58**	**896,014,911.00**	**19.58**	**19.58**	**53.96**	**17,584,108,284.00**	**53.96**	**53.96**	
		5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen	12.00	2,904,238,560.82	8.00	2,522,202,578.00	2.00	773,133,061.00	1.00	144,650,000.00	-	12,250,000.00					1.00	156,900,000.00		20.29	9.00	2,679,102,578.00	75.00	92.25	
		5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	12.00	2,025,568,824.09	8.00	1,360,987,886.00	2.00	451,620,580.00	-	64,636,000.00	-	24,330,000.00					-	88,966,000.00		19.70	8.00	1,449,953,886.00	66.67	71.58	
		5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah perarturan derah APBD dan dokumen peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Dokumen	12.00	2,885,750,784.95	8.00	2,215,116,154.00	2.00	695,846,861.00	-	3,220,000.00	-	3,220,000.00					-	6,440,000.00		0.93	8.00	2,221,556,154.00	66.67	76.98	

No	SASARAN	KODE					INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) S/D TW I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 S/D TW I (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
									K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH			K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14+8)		17 = (16/7)*100		18
		5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah peraturan derah Perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	12.00	3,234,758,468.59	8.00	2,299,252,324.00	2.00	691,855,426.00	-	184,437,411.00	-	-					-	184,437,411.00		26.66	8.00	2,483,689,735.00	66.67	76.78	
		5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen Rwgulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	12.00	2,681,267,097.49	8.00	1,718,496,003.00	2.00	785,346,673.00	-	67,306,000.00	-	-					-	67,306,000.00		8.57	8.00	1,785,802,003.00	66.67	66.60	
		5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencananan Anggaran Pendapatan	Dokumen	18.00	16,446,113,044.12	12.00	3,995,545,259.00	3.00	418,442,967.50	1.00	203,415,500.00	1.00	60,300,000.00					2.00	263,715,500.00		63.02	14.00	4,259,260,759.00	77.78	25.90	
		5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencananan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	18.00	2,411,332,507.33	12.00	2,576,493,169.00	3.00	759,667,511.00	1.00	128,250,000.00	-	-					1.00	128,250,000.00		16.88	13.00	2,704,743,169.00	72.22	112.17	
		5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**	**Persen**	**100.00**	**27,092,722,486.91**	**89.87**	**24,347,259,646.00**	**100.00**	**6,213,687,152.00**	**15.07**	**936,661,596.00**	**2.91**	**180,634,000.00**	-	-	-	-	**17.98**	**1,117,295,596.00**	**17.98**	**17.98**	**93.99**	**25,464,555,242.00**	**93.99**	**93.99**	
		5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	72.00	11,256,606,036.50	48.00	10,543,992,110.00	12.00	1,484,557,580.00	3.00	189,130,000.00	3.00	65,750,000.00					6.00	254,880,000.00		17.17	54.00	10,798,872,110.00	75.00	95.93	
		5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	18.00	6,052,029,132.57	12.00	4,681,810,636.00	3.00	1,249,351,155.00	1.00	228,766,900.00	-	35,411,000.00					1.00	264,177,900.00		21.15	13.00	4,945,988,536.00	72.22	81.72	
		5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non	Dokumen	72.00	1,920,754,036.00	48.00	1,572,914,254.00	12.00	653,428,367.00	3.00	130,327,600.00	3.00	17,520,000.00					6.00	147,847,600.00		22.63	54.00	1,720,761,854.00	75.00	89.59	
		5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	Laporan	30.00	2,101,804,662.89	20.00	2,249,859,750.00	5.00	554,886,732.00	2.00	106,707,600.00	1.00	30,542,000.00					3.00	137,249,600.00		24.73	23.00	2,387,109,350.00	76.67	113.57	
		5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	6.00	464,757,357.61	4.00	583,736,383.00	1.00	370,385,583.00	-	33,678,000.00	-	1,610,000.00	-				-	35,288,000.00		9.53	4.00	619,024,383.00	66.67	133.19	
		5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Dokumen	384.00	3,675,243,540.42	256.00	2,986,465,500.00	54.00	973,828,375.00	13.00	196,933,000.00	13.00	19,160,000.00					26.00	216,093,000.00		22.19	282.00	3,202,558,500.00	73.44	87.14	
		5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	90.00	1,621,527,720.92	60.00	1,728,481,013.00	15.00	927,249,360.00	3.00	51,118,496.00	3.00	10,641,000.00					6.00	61,759,496.00		6.66	66.00	1,790,240,509.00	73.33	110.40	
		5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Opini BPK atas LKPD**	**Predikat**	**WTP**	**6,057,872,125.32**	**69.70**	**4,222,378,803.00**	**100.00**	**1,448,054,912.00**	**19.09**	**276,423,400.00**	**3.98**	**57,691,000.00**	-	-	-	-	**23.07**	**334,114,400.00**	-	**23.07**	**75.22**	**4,556,493,203.00**	**75.22**	**75.22**	
		5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen	84.00	1,302,263,618.47	56.00	908,213,462.00	14.00	330,374,677.00	3.00	4,830,000.00		1,610,000.00					3.00	6,440,000.00		1.95	59.00	914,653,462.00	70.24	15.10	
		5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	Dokumen	6.00	946,014,094.70	4.00	713,571,029.00	1.00	372,766,438.00	-	2,350,000.00		-					-	2,350,000.00		0.63	4.00	715,921,029.00	66.67	75.68	
		5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala	Jumlah rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	30.00	1,272,195,762.89	20.00	1,001,576,573.00	5.00	419,846,343.00	2.00	236,243,400.00	1.00	45,081,000.00					3.00	281,324,400.00		67.01	23.00	1,282,900,973.00	76.67	100.84	

No	SASARAN	KODE					INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) S/D TW I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 S/D TW I (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	I K	I RUPIAH	II K	II RUPIAH	III K	III RUPIAH	IV K	IV RUPIAH	K	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14+8)		17 = (16/7)*100		18
		5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	dokumen	6.00	503,099,229.98	4.00	146,932,458.00	1.00	54,769,500.00	-	-	-	-					-	-		-	4.00	146,932,458.00	66.67	29.21	
		5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	orang	972.00	1,675,353,977.77	648.00	1,117,217,757.00	162.00	162,512,169.00	40.00	33,000,000.00		11,000,000.00					40.00	44,000,000.00		27.07	688.00	1,161,217,757.00	70.78	69.31	
		5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota Dibina	Laporan	192.00	358,945,441.51	128.00	334,867,524.00	32.00	107,785,785.00	-	-	-	-					-	-		-	128.00	334,867,524.00	66.67	93.29	
		5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat**	**Persen**	**100.00**	**510,060,023,895.71**	**42.59**	**217,241,040,129.00**	**100.00**	**118,632,434,002.00**	**21.05**	**24,972,382,117.00**	**3.65**	**4,324,874,040.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.70**	**29,297,256,157.00**	**24.70**	**24.70**	**48.34**	**246,538,296,286.00**	**48.34**	**48.34**	
		5	02	02	2.04	0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan	Laporan	6.00	314,887,751.74	4.00	220,824,643.00	1.00	49,083,000.00	-	-	-	-					-	-		-	4.00	220,824,643.00	66.67	70.13	
		5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan	Laporan	36.00	125,835,387,031.25	24.00	51,235,938,526.00	6.00	12,675,516,689.00	2.00	1,782,733,117.00	2.00	603,472,040.00					4.00	2,386,205,157.00		18.83	28.00	53,622,143,683.00	77.78	42.61	
		5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran	Laporan	72.00	179,852,364,737.72	48.00	111,495,641,502.00	12.00	32,227,034,313.00	3.00	5,689,649,000.00	3.00	721,402,000.00					6.00	6,411,051,000.00		19.89	54.00	117,906,692,502.00	75.00	65.56	
		5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	72.00	204,057,384,375.00	48.00	54,288,635,458.00	12.00	73,680,800,000.00	3.00	17,500,000,000.00	3.00	3,000,000,000.00					6.00	20,500,000,000.00		27.82	54.00	74,788,635,458.00	75.00	36.65	
		5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**Persen**	**100.00**	**7,990,378,695.12**	**86.42**	**6,905,039,254.00**	**100.00**	**1,996,956,188.00**	**33.39**	**666,865,776.00**	**4.50**	**89,770,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37.89**	**756,635,776.00**	**37.89**	**37.89**	**95.89**	**7,661,675,030.00**	**95.89**	**95.89**	
		5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	dokumen	24.00	1,929,022,473.62	16.00	968,010,541.00	4.00	161,724,370.00	1.00	7,560,000.00	-	2,520,000.00					1.00	10,080,000.00		6.23	17.00	978,090,541.00	70.83	50.70	
		5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	dokumen	72.00	1,767,558,667.28	48.00	1,164,972,424.00	12.00	261,000,000.00	3.00	48,750,000.00	3.00	17,250,000.00					6.00	66,000,000.00		25.29	54.00	1,230,972,424.00	75.00	69.64	
		5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	180.00	4,293,797,554.22	120.00	4,772,056,289.00	30.00	1,574,231,818.00	8.00	610,555,776.00	8.00	70,000,000.00					16.00	680,555,776.00		43.23	136.00	5,452,612,065.00	75.56	126.99	
2	**Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundng-undangan**							**Persentase laporan BMD Kota Bandar Lampung yang tepat waktu**	**Persen**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**					**100**		**100.00**		**100.00**		**1.00**		
		5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase laporan BMD Kota Bandar Lampung yang tepat waktu**	**Persen**	**100.00**	**13,066,233,922.69**	**60.04**	**7,845,477,296.00**	**100.00**	**3,325,808,766.00**	**10.64**	**354,021,548.00**	**1.97**	**65,457,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.61**	**419,478,548.00**	**12.61**	**12.61**	**63.25**	**8,264,955,844.00**	**63.25**	**63.25**	
		5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase administrasi pengelolaan**	**Persen**	**100.00**	**13,066,233,922.69**	**60.04**	**7,845,477,296.00**	**100.00**	**3,325,808,766.00**	**10.64**	**354,021,548.00**	**1.97**	**65,457,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.61**	**419,478,548.00**	**12.61**	**12.61**	**63.07**	**8,240,737,844.00**	**63.07**	**63.07**	
		5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Dokumen	6.00	1,020,286,921.88	4.00	686,924,026.00	1.00	216,266,278.00	-	-	-	7,393,000.00					-	7,393,000.00		3.42	4.00	694,317,026.00	66.67	68.05	
		5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Dokumen	4.00	265,000,000.00	2.00	130,160,873.00	2.00	108,073,076.00	-	3,820,000.00	-	-					-	3,820,000.00		3.53	2.00	133,980,873.00	50.00	50.56	
		5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah	Laporan	6.00	408,136,024.73	4.00	177,937,907.00	1.00	172,503,480.00	-	26,935,000.00	-	-					-	26,935,000.00		15.61	2.00	204,872,907.00	33.33	50.20	
		5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	6.00	4,251,786,719.30	4.00	2,693,408,281.00	1.00	960,659,566.00	-	109,116,048.00	-	36,904,000.00					-	146,020,048.00		15.20	4.00	2,839,428,329.00	66.67	66.78	

No	SASARAN	KODE						INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) S/D TW I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 S/D TW I (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH			K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14+8)		17 = (16/7)*100		18
		5	02	03	2.01	0008	Penilaian barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang	Laporan	6.00	1,647,116,901.80	4.00	316,188,372.00	1.00	92,580,578.00	-	-	-	-					-	-		-	4.00	316,188,372.00	66.67	19.20	
		5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	Dokumen	120.00	2,272,463,805.12	80.00	1,391,071,548.00	20.00	390,289,273.00	5.00	57,310,500.00	-	-					5.00	57,310,500.00		14.68	85.00	1,448,382,048.00	70.83	63.74	
		5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	12.00	2,339,726,844.45	6.00	2,449,786,289.00	2.00	667,248,328.00	1.00	132,622,000.00		21,160,000.00					1.00	153,782,000.00		23.05	7.00	2,603,568,289.00	58.33	111.28	
		5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Laporan	4.00	861,716,705.41	2.00	384,866,048.00	1.00	718,188,187.00	-	24,218,000.00		-					-	24,218,000.00		3.37	2.00	p	50.00	#VALUE!	
																								Rata-Rata Capaian Kinerja		16.36				65.40	64.86	
																								Predikat Kinerja		SR				S	S	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											916,850,629,297.28		514,997,959,865.20		277,684,107,166.00		41,045,233,811.00															
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalamrenja PD tahun berikutnya :																																

TABEL 3.1
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				NASIONAL	DAERAH
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														-							
5	**02**				**KEUANGAN**																
					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									**176,764,684,323.00**	**265,297,118,960.00**	**224,526,711,919.83**					
5	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**		**Persen**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**92,417,564,808.00**	**143,011,279,734.00**	**129,569,539,596.50**				**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**		**Persen**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**592,294,627.00**	**644,163,784.00**	**614,129,352.00**					
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		dokumen	dokumen	2	2	2	121,978,983.00	136,177,791.00	133,108,351.00		Bandar Lampung	APBD		
6	02	01	2.02	0002	Koordinasi dan Penyususnan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		dokumen	dokumen	1	1	1	59,875,454.00	62,069,553.00	58,050,353.00		Bandar Lampung	APBD		
7	02	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penyususnan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen	dokumen	1	1	1	56,902,288.00	59,185,032.00	55,639,432.00		Bandar Lampung	APBD		
8	02	01	2.04	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		dokumen	dokumen	1	1	1	69,236,727.00	70,951,925.00	66,151,925.00		Bandar Lampung	APBD		
9	02	01	2.05	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		dokumen	dokumen	1	1	1	62,128,161.00	64,170,422.00	59,869,622.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		dokumen	dokumen	3	3	3	112,967,448.00	124,015,021.00	119,116,205.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		dokumen	dokumen	5	5	5	109,205,566.00	127,594,040.00	122,193,464.00		Bandar Lampung	APBD		
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib**		**Persen**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**84,783,271,583.00**	**134,866,565,557.00**	**121,449,444,815.50**					
							Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		**Persen**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**								
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan	Orang/bulan	127	127	127	84,187,714,313.00	133,849,393,701.00	120,441,054,019.50		Bandar Lampung	APBD		
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen	Dokumen	1,240	1,240	1,240	313,896,870.00	606,951,518.00	601,680,786.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan / semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteraan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Laporan	Laporan	13	13	13	281,660,400.00	410,220,338.00	406,710,010.00		Bandar Lampung	APBD		

5	**02**	**01**	**2.03**	**03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persen**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**-**	**-**	**-**					
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD		Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD		Dokumen	Dokumen	2	2	2	-	-	-		Bandar Lampung	APBD		
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**		**Persen**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**288,613,868.00**	**288,037,608.00**	**288,037,608.00**					
	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		Paket	Paket	3.00	3.00	3.00	210,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang	Orang	7	7	7	78,613,868.00	188,037,608.00	188,037,608.00		Bandar Lampung	APBD		
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**		**Persen**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**1,282,927,613.00**	**1,592,194,785.00**	**1,427,248,621.00**					
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	Paket	3	3	3	120,754,725.00	115,002,552.00	115,002,552.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	Paket	4	4	4	189,009,383.00	180,005,288.00	172,223,086.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	Paket	6	6	6	82,237,552.00	78,305,810.00	78,305,810.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	Paket	7	7	7	83,606,250.00	78,000,000.00	78,000,000.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	Paket	9	9	9	198,155,577.00	188,707,194.00	150,965,532.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	Dokumen	6	6	6	39,942,000.00	38,040,000.00	38,040,000.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	Laporan	10	10	10	169,879,448.00	89,000,000.00	89,000,000.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	Laporan	8	8	8	126,821,990.00	260,303,196.00	260,303,196.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	01	2.06	0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen	Dokumen	1	1	1	272,520,688.00	564,830,745.00	445,408,445.00		Bandar Lampung	APBD		
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**		**Persen**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**845,057,302.00**	**795,400,000.00**	**765,858,000.00**					
5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan		unit	unit	1	1	1		500,000,000.00	500,000,000.00					
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan peralatan kantor		unit	unit	8	8	8	682,500,000.00	100,000,000.00	70,458,000.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	01	2.07	0011	Pengadaaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		unit	unit	5	5	5	162,557,302.00	195,400,000.00	195,400,000.00		Bandar Lampung	APBD		
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD**		**Persen**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**3,947,867,700.00**	**4,252,498,000.00**	**4,452,401,200.00**					
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	Laporan	1	1	1	183,550,500.00	252,010,000.00	252,010,000.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	Laporan	1	1	1	3,764,317,200.00	4,000,488,000.00	4,200,391,200.00		Bandar Lampung	APBD		
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemmerintahan daerah**		**Inventaris kantor yang tersedia**		**Persen**	**Persen**	**98.00**	**98.00**	**98.00**	**677,532,115.00**	**572,420,000.00**	**572,420,000.00**					
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	Unit	1	1	1	55,615,009.00	52,430,000.00	52,430,000.00		Bandar Lampung	APBD		

5	02	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	Unit	18	18	18	411,917,106.00	313,790,000.00	313,790,000.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	Unit	10	10	10	84,000,000.00	78,500,000.00	78,500,000.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	Unit	1	1	1	126,000,000.00	127,700,000.00	127,700,000.00		Bandar Lampung	APBD		
5	**02**	**02**			**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Opini BPK atas LKPD**		**Predikat**	**Predikat**				**81,792,496,488.00**	**119,389,920,913.00**	**5.00**				**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**
							Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P		**Persen**	**Persen**											
							Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan		**Persen**	**Persen**											
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		**Persentase koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah**		**Persen**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**5,073,279,841.00**	**4,842,894,289.00**	**4,575,913,079.50**					
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		Dokumen	Dokumen	2	2	2	737,176,507.00	852,820,815.00	773,133,061.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS		Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun		Dokumen	Dokumen	2	2	2	372,153,253.00	468,343,620.00	451,620,580.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Dokumen	Dokumen	2	2	2	528,150,000.00	674,990,861.00	695,846,861.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD		Dokumen	Dokumen	2	2	2	660,324,000.00	695,999,426.00	691,855,426.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Dokumen	Dokumen	2	2	2	467,037,787.00	629,080,311.00	785,346,673.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Dokumen	Dokumen	3	3	3	1,638,604,315.00	713,273,825.00	418,442,967.50		Bandar Lampung	APBD		
5	02	02	2.01	0011	Koordiansi perencanaan anggaran belanja daerah		Jumlah Dokument Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Dokumen	Dokumen	3	3	3	669,833,979.00	808,385,401.00	759,667,511.00		Bandar Lampung	APBD		
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**Persentase koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**		**Persen**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**6,590,737,395.00**	**6,477,527,228.00**	**6,363,687,182.00**					
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah		Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Dokumen	Dokumen	12	12	12	3,349,709,691.00	1,100,000,000.00	1,484,557,580.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	02	2.02	0002	Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Dokumen	Dokumen	3	3	3	1,216,186,845.00	1,329,175,133.00	1,249,351,155.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank		Dokumen	Dokumen	12	12	12	368,311,755.00	720,000,000.00	653,428,367.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)		Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK) pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas		Laporan	Laporan	5	5	5	452,131,394.00	581,946,792.00	554,886,732.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas		Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas		Dokumen	Dokumen	12	12	12	97,993,915.00	391,689,293.00	370,385,583.00		Bandar Lampung	APBD		

5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait		Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait		Dokumen	Dokumen	54	54	54	633,491,250.00	1,005,476,010.00	973,828,375.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan denga npenerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan		Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan		Dokumen	Dokumen	15	15	15	472,912,545.00	1,349,240,000.00	1,077,249,360.00		Bandar Lampung	APBD		
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**Opini BPK atas LKPD**		**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**1,042,243,404.00**	**1,566,054,202.00**	**1,448,054,912.00**					
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran		Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bulanan, triwulanan dan semesteran		Laporan	Laporan	14	14	14	201,028,275.00	367,057,439.00	330,374,677.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah		Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi		Laporan	Laporan	1	1	1	146,034,627.00	420,316,438.00	372,766,438.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota		jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota		Dokumen	Dokumen	5	5	5	196,386,750.00	433,735,848.00	419,846,343.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah		Dokumen	Dokumen	1	1	1	77,662,594.00	74,646,523.00	54,769,500.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota		Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban pemerintah kabupaten kota		Orang	Orang	162 orang	162 orang	162 orang	365,721,345.00	162,512,169.00	162,512,169.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kab/kota		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina		Lembaga	Lembaga	32	32	32	55,409,813.00	107,785,785.00	107,785,785.00		Bandar Lampung	APBD		
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat**		**Persen**	**Persen**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**67,054,472,440.00**	**104,409,912,587.00**	**123,062,434,002.00**					
5	02	02	2.04	0003	Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Penrencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan pinjaman pemerintah daerah		Laporan	Laporan	1	1	1	45,150,000.00	57,196,935.00	49,083,000.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	02	2.04	0004	Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah		jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah		Laporan	Laporan	6	6	6	13,309,292,524.00	12,675,516,689.00	12,675,516,689.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	02	2.04	0008	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan		Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan		Laporan	Laporan	12	12	12	18,971,279,916.00	35,207,198,963.00	33,677,034,313.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan dana darurat dan mendesak		Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak		Laporan	Laporan	12	12	12	34,728,750,000.00	56,470,000,000.00	76,660,800,000.00		Bandar Lampung	APBD		
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**		**Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**		**Persen**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,031,763,408.00**	**2,093,532,637.00**	**1,996,956,188.00**					
5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah		Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah		Dokumen	Dokumen	4	4	4	295,680,000.00	187,157,370.00	161,724,370.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah		Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistim informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah		dokumen	dokumen	12	12	12	326,405,100.00	299,024,220.00	261,000,000.00		Bandar Lampung	APBD		

5	02	02	2.05	0003	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistim informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota		Orang	Orang	30	30	30	1,409,678,308.00	1,607,351,047.00	1,574,231,818.00		Bandar Lampung	APBD		
5	**02**	**03**			**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah**		**Persen**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,554,623,027.00**	**2,895,918,313.00**	**3,325,808,766.00**				**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**
							Persentase Penilaian dan Penghapusan BMD sesuai dengan Usulan OPD		**Persen**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**								
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah**		**Persen**	**Persen**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2,554,623,027.00**	**2,895,918,313.00**	**3,325,808,766.00**					
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan standar harga		Jumlah standar harga yang disusun		dokumen	dokumen	1	1	1	204,750,000.00	216,266,278.00	216,266,278.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah		Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD		dokumen	dokumen	4	4	4	163,240,219.00	108,073,076.00	108,073,076.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan barang milik daerah		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah		laporan	laporan	1	1	1	63,003,282.00	182,503,480.00	172,503,480.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan barang milik daerah		Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah		laporan	laporan	1	1	1	921,103,969.00	960,659,566.00	960,659,566.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	03	2.01	0008	Penilaian barang milik daerah		jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah		laporan	laporan	1	1	1	108,775,353.00	120,580,578.00	92,580,578.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah		Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah		dokumen	dokumen	20	20	20	278,193,617.00	425,289,273.00	390,289,273.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah		Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah		dokumen	dokumen	2	2	2	601,391,104.00	677,248,328.00	667,248,328.00		Bandar Lampung	APBD		
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah laporan barang milik daerah		dokumen	dokumen	1	1	1	214,165,483.00	205,297,734.00	718,188,187.00		Bandar Lampung	APBD		

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
19
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD

BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD

BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD

BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD

BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD



RENCANA KERJA PERUBAHAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)

TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan.				
4.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masingPerangkat Daerah sesuai surat edaranwalikota.				
5.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah				
6.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.		√	Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Bandar Lampung

DESTI MEGA PUTRI.SP.,MT
Pembina Utama Muda/IVc
NIP.19691202 199503 2 002

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	Dr.Rein Susinda Hesty S.Sos.M.Si	
	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapperida	
2	Henny Suninawati,S.Sos	
	Perencana Ahli Muda Bapperida	

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida,

Dini Purnamawaty,S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP197002181993032002

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN				
	1.1	Latar Belakang				
	1.2	Landasan Hukum				
	1.3	Maksud dan Tujuan				
	1.4	Sistematika Penulisan				
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN				
		Formulir E.81				
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH				
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	BAB IV	PENUTUP				

Bandar Lampung, Juli 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Bandar Lampung

DESTI MEGA PUTRI.SP.,MT
Pembina Utama Muda/IVc
NIP.19691202 199503 2 002

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	Dr.Rela Susinda Hesty S.Sos.M.SI	
	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapperida	
2	Henny Suninawati,S.Sos	
	Perencana Ahli Muda Bapperida	

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida,

Dini Purnamawaty,S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP197002181993032002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi RenjaPerangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, Juli 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida,

Dini Purnamawaty,S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP197002181993032002

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	Dr.Rein Susinda Hesty S.Sos.M.Si	
	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapperida	
2	Henny Suninawati,S.Sos	
	Perencana Ahli Muda Bapperida	

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN 32
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616/IV.01/HK/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD). Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah adalah dokumen Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang mengacu pada Peraturan Wali kota Bandar Lampung Nomor 616/IV.01/HK/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru. Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;

b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5889 Tentang Verifikasi, Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung
15. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja, Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung;
16. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

I.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN (BULAN JANUARI s/d MARET) TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Pada bulan Januari s/d Maret tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya, dengan anggaran sebesar Rp. 80.514.182.741 terealisasi sebesar Rp. 9.784.896.191 atau 12,15 % dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN REALISASI PROGRAM/KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Program ini yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 66.339.492.069 sampai dengan bulan Maret 2025 terealisasi sebesar Rp. 18.398.970.316 atau 27,73% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 203.222.415 sampai dengan bulan Maret 2025 terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0,00%

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 56.802.914.001,- terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar Rp. 7.849.626.089 atau 13,82%

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 68.542.809 terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar Rp. 0 atau 0,00%

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 957.491.066 terealisasi

sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar Rp. 89.315.678,- atau 9,33%

5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

   Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 1.087.240.942 belum terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025

6. **Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**

   Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 5.405.376.537,- terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar Rp. 1.178.000.000,- atau 21,79%

7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

   Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 2.020.783.548,- terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar Rp. 217.380.924 ,-atau 10,76%

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan yang terakomodir dalam program Pengelolaan Pendapatan Daerah diperuntukan sebagai upaya untuk mendukung proses pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang dikelola oleh Bapenda. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. **13.968.611.423**,- s/d bulan Maret 2025 terealisasi Rp. **450.573.500**,-atau 3,23%

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dengan dukungan anggaran sebesar **Rp.1.810.336.454,-** terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar **Rp. 206.000.000,-** atau mencapai 11,38%. **Output** yang memiliki target capaian kinerja 2 (Dua) Dokumen

2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan dukungan anggaran sebesar **Rp. 214.228.432,-** belum terealisasi sampai dengan bulan Maret

2025 **Output** dari kegiatan ini kegiatan ini yang memiliki target capaian kinerja 1 (satu) Dokumen peraturan tentang pajak

3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan dukungan anggaran sebesar **Rp. 139.377.017,-** terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar **Rp. 47.175.000** atau mencapai 33,85%. **Output** dari kegiatan ini yang memiliki target capaian kinerja 1 (satu)

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan dukungan anggaran sebesar **Rp. 1.125.467.229,-** belum terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 **Output** dari kegiatan ini adalah yang memiliki target capaian kinerja 1 (satu) Unit

5. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah dengan dukungan anggaran sebesar **Rp. 1.308.300.000** terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar **Rp. 33.270.000** atau 2,54%. **Output** dari kegiatan ini berupa yang memiliki target capaian kinerja 10 (Sepuluh) Laporan.

6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan dukungan anggaran sebesar **Rp. 401.379.329,-** terealisasi sampai dengan bulan Mei 2025 sebesar **Rp. 25.600.000** atau mencapai 6,38%. target capaian kinerja Objek Pajak.

7. Penetapan wajib Pajak Daerah dengan dukungan anggaran sebesar **Rp. 602.539.297** belum terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 **Output** target capaian kinerja 10 Dokumen.

8. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan dukungan anggaran sebesar **Rp. 137.272.685** belum terealisasi sampai

dengan bulan Maret 2025. **Output** target capaian kinerja 2 (dua) Dokumen.

9. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dukungan anggaran sebesar sebesar **Rp. 749.699.401,-** terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar **Rp. 112.004.500,-** atau mencapai 14,94% **Output** yang memiliki target capaian kinerja 2 (Dua) Dokumen

10. Penagihan Pajak Daerah dengan dukungan anggaran sebesar **Rp. 4.549.579.468,-** terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar **Rp. 0,-** atau mencapai 0,00%. **Output** kegiatan ini adalah target capaian kinerja 6 (Enam) Dokumen

11. Penyelesaian keberatan pajak daerah dukungan anggaran sebesar **Rp. 385.700.000,-** terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar **Rp. 0,-** atau mencapai 0,00%. **Output** target capaian kinerja 10 (Sepuluh) Dokumen

12. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah dukungan anggaran sebesar **Rp. 892.973.349,-** belum terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025. **Output** target capaian kinerja 10 (Sepuluh) Dokumen

13. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Anggaran yang tersedia **Rp 1.249.638.091,-** terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar **Rp. 52.124.000,-** atau sebesar 4,17%. Output memiliki target capaian kinerja 2 (Dua) laporan.

14. Elektronika transaksi Pemerintah Daerah Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Elektronika transaksi Pemerintah Daerah **Rp. 400.000.000,-** belum terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 Output yang memiliki target capaian kinerja 4 (Empat) laporan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah mencakup program, Kegiatan, indikator kinerja, Total pagu pendanaan perubahan semula Rp. **80.514.182.741,00** menjadi Rp. **77.358.402.415** berkurang Rp.**3.155.780.326** kegiatan yang mengalami perubahan sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERUBAH ADALAH :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semula Rp66.545.571.318 menjadi Rp 66.383.875.946 berkurang Rp.**161.695.372** yang berubah dari sub kegiatan :
   1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN semula 55.619.122.354 berubah 55.663.506.231 bertambah 44.383.877
   2. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Sebelum Rp.205.510.000,00 berubah menjadi Rp.185.530.000 berkurang Rp.19.980.000
   3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD sebelum Rp.278.281.647,00 menjadi Rp.230.320.835,00 berkurang Rp.47.960.812
   4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana /Semesteran SKPD sebelum Rp.700.000.000,00 berubah menjadi Rp.653.355.499,00 berkurang Rp.46.644.501,00
   5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebelum Rp.125.861.405,00 berubah menjadi Rp.34.271.404,00 berkurang Rp.91.590.001,00
   6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor semula 345.393.283 berubah 319.302.808 berkurang 26.090.475
   7. Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebelum Rp.125.861.405,00 berubah menjadi Rp.34.271.404,00 berkurang Rp.91.590.001,00
   8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebelum Rp.80.000.000,00 berubah menjadi Rp.60.000.000,00 berkurang Rp.20.000.000,

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah mencakup program, Kegiatan, indikator kinerja, Total pagu pendanaan perubahan semula Rp. **80.514.182.741,00** menjadi Rp. **77.358.402.415** berkurang Rp.**3.155.780.326** kegiatan yang mengalami perubahan sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERUBAH ADALAH :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semula Rp66.545.571.318 menjadi Rp 66.383.875.946 berkurang Rp.**161.695.372** yang berubah dari sub kegiatan :
   1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN semula 55.619.122.354 berubah 55.663.506.231 bertambah 44.383.877
   2. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Sebelum Rp.205.510.000,00 berubah menjadi Rp.185.530.000 berkurang Rp.19.980.000
   3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD sebelum Rp.278.281.647,00 menjadi Rp.230.320.835,00 berkurang Rp.47.960.812
   4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana /Semesteran SKPD sebelum Rp.700.000.000,00 berubah menjadi Rp.653.355.499,00 berkurang Rp.46.644.501,00
   5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebelum Rp.125.861.405,00 berubah menjadi Rp.34.271.404,00 berkurang Rp.91.590.001,00
   6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor semula 345.393.283 berubah 319.302.808 berkurang 26.090.475
   7. Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebelum Rp.125.861.405,00 berubah menjadi Rp.34.271.404,00 berkurang Rp.91.590.001,00
   8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebelum Rp.80.000.000,00 berubah menjadi Rp.60.000.000,00 berkurang Rp.20.000.000,

9. Fasilitas Kunjungan Tamu sebelum Rp.75.000.000,00 berubah menjadi Rp.56.100.000,00 berkurang Rp.18.900.000,00
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebelum Rp.265.342.816,00 berubah menjadi Rp.174.581.711,00 berkurang Rp.90.761.105,00
11. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebelum Rp.760.500.000,00 berubah menjadi Rp.748.000.000,00 berkurang Rp.12.500.000,00
12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebelum Rp.89.049.820,00 berubah menjadi Rp.69.829.991,00 berkurang Rp.19.219.829,00
13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebelumRp.113.691.122,00 berubah menjadi Rp.43.940.000,00 berkurang Rp.69.751.122,00
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebelum Rp.413.550.000,00 berubah menjadi Rp.520.868.596,00 bertambah Rp.107.318.596,00
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebelum Rp.1.279.344.952,00 berubah menjadi Rp.1.429.344.952,00 bertambah Rp.150.000.000,00

II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebelum Rp.13.968.611.423,00 berubah menjadi Rp.10.974.526.469,00 berkurang Rp.2.994.084.954,00

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebelum Rp.13.968.611.423,00 berubah menjadi Rp.10.974.526.469,00 berkurang Rp.2.994.084.954,00 yang berubah dari sub kegiatan :

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah sebelum Rp.1.810.336.454,00 berubah menjadi Rp.1.626.666.801,00 berkurang Rp.183.669.653,00
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah sebelum Rp.214.228.432,00 berubah menjadi Rp.201.819.172,00 berkurang Rp.12.409.260,00

3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah sebelum Rp.139.377.017,00 berubah menjadi Rp.138.761.592,00 berkurang Rp.615.425,00
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah sebelum Rp.1.125.467.229,00 berubah menjadi Rp.1.011.583.739,00 berkurang Rp.113.883.490,00
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebelum Rp.1.308.300.000,00 berubah menjadi Rp.406.110.630,00 berkurang Rp.902.189.370,00
6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebelum Rp.403.500.000,00 berubah menjadi Rp.401.379.329,00 berkurang Rp.2.120.671,00
7. Penetapan Wajib Pajak Daerah sebelum Rp.602.539.297,00 berubah menjadi Rp.1.073.239.224,00 bertambah Rp.470.699.927,00
8. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah sebelum Rp.137.272.685,00 berubah menjadi Rp.128.459.476,00 berkurang Rp.8.813.209,00
9. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah sebelum Rp.749.699.401,00 berubah menjadi Rp.681.892.825,00 berkurang Rp.67.806.576,00
10. Penagihan Pajak Daerah sebelum Rp.4.549.579.468,00 berubah menjadi Rp.2.877.857.868,00 berkurang Rp.1.671.721.600,00
11. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah sebelum Rp.385.700.000,00 berubah menjadi Rp.266.043.006,00 berkurang Rp.119.656.994,00
12. Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah sebelum Rp.892.973.349,00 berubah menjadi 813.898.263,00 berkurang Rp.79.075.086,00
13. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum Rp.13.968.611.423,00 berubah menjadi Rp.1.098.417.105,00 berkurang Rp. 12.870.194.318,00
14. Elektronik transaksi Pemerintah Daerah sebelum Rp.400.000.000,00 berubah menjadi Rp.248.397.439,00 berkurang Rp.151.602.561,00

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					BADAN PENDAPATAN DAERAH									63,885,866,160.00	80,514,182,741.00	77,358,402,415.00	
1					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									63,885,866,160.00	80,514,182,741.00	77,358,402,415.00	
1	02				KEUANGAN									63,885,866,160.00	80,514,182,741.00	77,358,402,415.00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan penerimaan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan	cakupan penerimaan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan	persen	persen	98	98	98	56,609,430,077.00	66,545,571,318.00	66,381,875,946.00	
1	02	01	201		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penerimaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Penerimaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	persen	persen	100	100	100	252,999,742.00	203,222,415.00	203,222,415.00	
1	02	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3	3	52,999,850.00	60,089,574.00	60,089,574.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	02	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3	3	3	199,999,892.00	143,132,841.00	143,132,841.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	02	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	persen	persen	100	100	100	47,756,384,589.00	56,802,914,001.00	56,732,712,565.00	
1	02	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	193	193	193	46,869,122,354.00	55,619,122,354.00	55,661,506,231.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	02	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji an/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji an/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji an/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji an/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	dokumen	260	260	260	360,763,000.00	205,510,000.00	185,530,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	02	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	220,499,235.00	278,281,647.00	230,320,835.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	11	11	11	700.000.000.00	700.000.000.00	653.355.499.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	02	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persen	persen	100	100	100	100.000.000.00	125.861.405.00	34.271.404.00	
1	02	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	8	8	8	100.000.000.00	125.861.405.00	34.271.404.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	02	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	persen	persen	98	98	98	761.427.761.00	1.007.491.066.00	851.739.486.00	
1	02	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	19.994.305.00	30.046.659.00	30.046.659.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	02	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	4	4	4	197.999.082.00	345.393.293.00	319.302.808.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	02	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	60.026.741.00	60.708.470.00	60.708.470.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	02	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	8	8	8	80.000.000.00	80.000.000.00	60.000.000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	02	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	4	4	4	145.000.000.00	144.999.818.00	144.999.818.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	02	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	4	4	4	6.000.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	02	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	4	4	4	75.000.000.00	75.000.000.00	56.100.000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	02	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	3	3	3	169.407.391.00	265.342.816.00	174.581.711.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
x	02	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	persen	persen	90	90	90	904.371.674.00	1.087.240.942.00	985.769.991.00	
x	02	01	207	0001	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Diadakan	Unit	Unit	23	23	23	215.506.200.00	124.000.000.00	124.000.000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
x	02	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit	Unit	10	10	10	476.408.386.00	760.500.000.00	748.000.000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
x	02	01	207	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	Unit	Unit	1	1	1	65.959.288.00	89.049.820.00	69.829.991.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
x	02	01	207	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	Unit	Unit	1	1	1	146.500.000.00	113.691.122.00	41.940.000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
x	02	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	persen	persen	100	100	100	4.913.376.537.00	5.405.376.537.00	5.405.376.537.00	
x	02	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadakan	Laporan	Laporan	4	4	4	217.376.537.00	605.376.537.00	605.376.537.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
x	02	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadakan	Laporan	Laporan	12	12	12	4.656.000.000.00	4.800.000.000.00	4.800.000.000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
x	02	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Inventaris Kantor yang Terpelihara	persen	persen	90	90	90	1.920.867.774.00	1.911.464.952.00	2.170.783.540.00	
x	02	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	44.530.000.00	41.170.000.00	41.170.000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
x	02	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	21	21	21	451.450.000.00	413.550.000.00	520.868.596.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	01	209	0005	Pemeliharaan Mobil	Pemeliharaan Mobil	Jumlah Mobil yang Dipelihara	Jumlah Mobil yang Dipelihara	Unit	Unit	25	25	25	15.845.774 00	50.000.000 00	50.000.000 00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	02	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	4	4	4	129.400.000 00	129.400.000 00	129.400.000 00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	02	01	209	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Unit	20	20	20	1.279.642.000 00	1.279.344.952 00	1.279.344.952 00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase pajak daerah terhadap PAD	persentase pajak daerah terhadap PAD	persen	persen	6502	6502	6502	7.276.436.083 00	13.968.611.423 00	10.974.526.669 00	
2	02	04	201		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase pajak daerah terhadap PAD	persentase pajak daerah terhadap PAD	persen	persen	6502	6502	6502	7.276.436.083 00	13.968.611.423 00	10.974.526.669 00	
3	02	04	201	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2	2	904.900.000 00	1.010.336.454 00	1.328.846.881 00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3	02	04	201	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	214.228.480 00	214.228.432 00	203.819.172 00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3	02	04	201	0003	Penyuluhan dan Pengoptimalan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Pengoptimalan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pengoptimalan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pengoptimalan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	Laporan	2	2	2	285.080.000 00	139.377.017 00	138.761.592 00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3	02	04	201	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	Unit	1	1	1	822.500.000 00	1.125.467.229 00	1.011.561.719 00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3	02	04	201	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	Laporan	10	10	10	380.500.000 00	1.300.300.000 00	406.110.610 00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3	02	04	201	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Diverifikasi NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Diverifikasi NJOP nya	Objek Pajak	Objek Pajak	7812	7812	7812	365.000.000 00	403.500.000 00	401.379.329 00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3	02	04	201	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2	2	846.000.000 00	602.539.297 00	1.073.299.224 00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3	02	04	201	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	Layanan	10	10	10	150.014.026 00	137.272.685 00	128.459.476 00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3	02	04	201	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Ditelaah Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Ditelaah Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	744.299.893 00	749.699.401 00	681.892.825 00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	04	201	0011	Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	6	6	6	550.000.000,00	4.549.379.468,00	2.877.957.868,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	02	04	201	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	231	231	231	657.500.000,00	185.700.000,00	266.041.006,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	02	04	201	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	10	10	10	953.410.000,00	892.971.349,00	821.890.261,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	02	04	201	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	Laporan	2	2	2	100.003.684,00	13.968.611.423,00	1.898.417.109,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	02	04	201	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan	3	3	3	303.000.000,00	400.000.000,00	248.397.639,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bandar Lampung,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

DESTI MEGA PUTRI, SP.,MT
NIP. 19691202 199503 2 002

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Bandar Lampung, 2025

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

RENCANA PERUBAHAN 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	**BAB I**	**PENDAHULUAN**	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	**BAB II**	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**	√			
	2.1	Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/tahun 2024				
		Formulir E.81	√			
3	**BAB III**	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024				
4	**BAB IV**	**PENUTUP**	√			

Bandar Lampung, Juli 2025
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Bandar Lampung

ZULKIPLI,SE.MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19701211 199703 1 004

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Dra. Rr. DIAH SIULISTIORINI,,M.Si**	
	Kepala Bidang Pemerintah Dan Pembangunan Bapperida	
2	**Diona Martinalova,S.Pi.,M.M**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida	

Mengetahui,
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI TURNAMAWATY, S.E., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19800218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masingPerangkat Daerah sesuai surat edaran walikota.	√			
5.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasipencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
6.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yangtelah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Bandar Lampung

ZULKIPLI,SE.MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19701211 199703 1 004

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Dra. Rr. DIAH SIULISTIORINI,,M.Si**	
	Kepala Bidang Pemerintah Dan Pembangunan Bapperida	
2	**Diona Martinalova,S.Pi.,M.M**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masingPerangkat Daerah sesuai surat edaran walikota.	√			
5.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasipencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
6.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yangtelah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Bandar Lampung

ZULKIPLI,SE.MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19701211 199703 1 004

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Dra. Rr. DIAH SIULISTIORINI,,M.Si**	
	Kepala Bidang Pemerintah Dan Pembangunan Bapperida	
2	**Diona Martinalova,S.Pi.,M.M**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19760218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, Juli 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700218 199303 2 002

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Dra. Rr. DIAH SIULISTIORINI,,M.Si**	
	Kepala Bidang Pemerintah Dan Pembangunan Bapperida	
2	**Diona Martinalova,S.Pi.,M.M**	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida	

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

BAB	**I**	**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	4
	1.3	Maksud dan Tujuan	6
	1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB	**II**	**HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAEARAH TAHUN ANGGARAN 2025 TRIWULAN II**	**9**
	2.1	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAEARAH TAHUN ANGGARAN 2025 TRIWULAN II SAMPAI DENGAN BULAN MEI 2025	9
BAB	**III**	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	**21**
BAB	**IV**	**PENUTUP**	**37**

LAMPIRAN 33
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616/IV.01/HK/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian

Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Renja Perubahan Perubahan Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perubahan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Walikota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : ***"BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT"***

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat.

5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandar Lampung, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Kepegawaian. Dengan demikian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-6 (enam) dalam RPJMD Tahun 2016–2021 yaitu ***Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Berorientasi Kemitraan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa dan Bertanggung Jawab untuk Mendukung Investasi***. Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, pada Tahun 2024 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun Rancangan Akhir Renja Perubahan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verfiikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
15. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Perubahan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandar Lampung dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota.
2. Sebagai acuan bagi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025.
3. Sebagai acuan bagi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perubahan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 TRIWULAN II

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 TRIWULAN II SAMPAI DENGAN BULAN MEI 2025

Didalam setiap kegiatan membutuhkan suatu evaluasi dimana evaluasi itu dapat menilai semua kekurangan dan kelebihan dalam suatu organisasi menjalankan kegiatan tersebut , dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga perlu membuat sebuah evaluasi Renja untuk dapat menilai seberapa jauh kegiatan yang sudah berjalan serta dapat membuat perencanaan kerja terbaik untuk tahun yang akan datang, Rencana Kerja Perubahan (Renja) merupakan penjabaran perubahan perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.1 sebagai berikut:

Formulir E. 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG

RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANDAR LAMPUNG

PERIODE PELAKSANAAN s.d. TRIWULAN I TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:

1 Meningkatnya Pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Aparatur Sipil Negara (ASN)

2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV									
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																1.246.561.641		1.681.020.501		-		-									
5.03 KEPEGAWAIAN											70.439.089.784		6.342.917.817		9.936.840.674	1.246.561.641		1.614.369.801		-		-		2.862.931.442		28,81		9.205.849.259,00		13,07	
BKPSDM KOTA BANDAR LAMPUNG											70.439.089.784		6.342.917.817		9.936.840.674	1.246.561.641		1.614.369.801		-		-		2.862.931.442,00		28,81		9.205.849.259,00		13,07	
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							Hasil Penilaian Mentalibitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah	Nilai	80	-	80	-	80										80		81		80,00	-	80,00			BKD
								Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100		100	-	100										101		100		100,00	-	100			BKD
		5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pemrosesan Proses Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	%	98	68.020.650.990	90	4.852.975.472,00	98	6.160.980.972	98	1.246.561.641		1.358.136.251		-		-		90	2.604.697.892,00	90,00	26,21	90,00	7.457.673.364,00	90,00	15,53	BKD
		5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	%	100	2.091.549.603	100	93.733.350,00	100	115.919.683	100	12.985.000		1.000.000		-		-		101	13.985.000,00	100,00	12,06	100,00	107.718.350,00	100,00	5,15	BKD
		5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BKD	Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)																							
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	6	100.032.500	4	13.321.500,00	2	21.973.033,00	0,50	1.500.000		1.000.000		-		-		0,50	2.500.000,00	25,00	11,38	4,50	15.021.500,00	75,00	4,78	BKD
		5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA BKD	Dokumen RKA																						
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	5	100.922.700	2	27.515.300,00	1	31.974.197,00		-		-		-				0,00	-	-		2,00	27.515.300,00	40,00	13,83	BKD

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
		5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RSA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RSA DED	Dokumen Perubahan RSA																								
								Jumlah Dokumen Penetapan RSA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RSA SKPD	Dokumen Perubahan RSA	5	190.922.700	2	14.574.150,00	3	20.738.214,00		-		-		-		-	0,00	-	-	-	2,00	14.574.150,00	40,00	7,33	BKD
		5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja (IKU)	Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	10																							
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan (1 Evaluasi Renja, 1 Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Realisasi Fisik dan Keuangan)	10	915.293.700	3	15.039.500,00	9	35.232.097,00	0,75	5.985.000		-		-		-	0,75	5.985.000,00	25	39,14	3,75	5.985.000,00	20,83	0,65	BKD
		5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja IKD	Dokumen (1 LPj, 1 LPPD, 1 LAKIP, 1 Penetapan Kinerja)	24																						
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan (1 LPj, 1 LPPD, 1 LAKIP, 1 Penetapan Kinerja)	24	447.376.000	8	22.402.900,00	4	25.001.263,00	1	5.500.000		-		-		-	1	5.500.000	25	24,96	9,00	27.902.900,00	45,00	6,25	BKD
		5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penerimaan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	%	100	35.760.921.029	100,00	3.068.704.453,00	100	4.709.957.337	108	1.105.608.434		1.213.906.058		-		-	100,00	2.319.624.492,00	100	48,43	100,00	6.188.328.945,00	100,00	17,30	BKD
		5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN BKD yang Terealisasi	Bulan	14		14																				
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	50	33.990.197.329	36	1.671.681.403,00	50	4.615.845.674,00		1.855.720.434		1.377.811.258		-		-	0	2.233.539.692,00	0	48,40	36,00	2.233.539.692,00	72,00	4,77	BKD
		5	03	01	2.02	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelola/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan BKD yang Terlaksana	Bulan	72		12																				
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengelolaan/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	16	1.505.180.100	4	163.319.250,00	4	214.960.045,00	1	44.160.000		28.200.000		-		-	1	72.740.000,00	25	34,00	1,00	72.740.000,00	6,25	4,59	BKD

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14÷8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
		5	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Monitoring SKPD	Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Monitoring SKPD	Rekomendasi	60																							
								Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Monitoring SKPD	Dokumen	4	298.383.948	2	-	1	4.186.208,00		-		-		-		-	0,00	0,00	0	0,00	2,00	-	50,00	-	BKD
		5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun BKD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5																							
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	298.383.948	2	25.200.800,00	1	34.371.884,00	0,25	3.500.000		3.444.802		-		-	0,25	8.944.800,00	25	26	2,25	34.153.600,00	45,00	11,45	BKD
		5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan BKD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	60																							
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan	60	298.383.948	24	0.495.600,00	12	19.764.384,00		4.941.096		-		-	0	4.400.000,00	0	22	24,00	12.895.000,00	40,00	4,32	BKD
		5	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran BKD	Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5																							
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	298.383.948	2	-	1	1.886.102,00		-		-		-	0,00	-	0	0	2,00	-	40,00	-	BKD
		5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	%	100	720.555.900	100	-	100	28.949.424	100	-		-		-	100	-	100	-	100,00	-	100,00	-	BKD
		5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pelatihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pelatihan Dinas	Paket	5																							
								Jumlah Paket Pelatihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	298.383.948	0	-	1	4.950.000,00		-		-		-	0,00	-	0	0	0,00	-	0,00	-	BKD
		5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	100																							
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100	321.432.240	7	-	60	19.999.424,00		-		-		-	0,00	-	0	0	7,00	-	2,33	-	BKD
		5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	%	100	3.158.645.230	100	216.782.740,00	100	360.063.805	100	2.564.250		12.371.154		-	100	15.935.404,00	100	4,42	100,00	252.718.154,00	100,00	7,52	BKD
		5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	6																							

NO	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (a-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14÷8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
								Jumlah Paket Pengadaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	111.168.338	1	3.225.000,00	1	6.984.903,00									0,00	-	0	-	1,00	3.225.000,00	16,67	2,89	BKD
		5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6		1																			
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	302.331.510	2	88.083.460,00	1	77.844.333,00		-		3.709.250		-		-	0,00	3.709.250	0	4,76	1,00	3.709.250,00	16,67	0,64	BKD
		5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	6		1																			
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	291.166.640	2	9.793.440,00	1	19.981.107,00		-		-		-		-	0,00	-	0	0,00	1,00	-	16,67	-	BKD
		5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	%	100		0																			
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	279.622.700	1	2.401.000,00	1	25.000.000,00		-		-		-		-	0,00	-	0	0,00	1,00	-	25,00	-	BKD
		5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	6		1																			
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	447.037.310	2	37.733.400,00	1	93.664.380,00		-		2.136.750		-		-	0,00	2.136.750	0	5,39	2,00	2.136.750,00	33,33	0,33	BKD
		5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Komputer dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	6		1																			
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	95.592.410	2	4.685.000,00	1	5.000.000,00	0,25	1.215.000		1.215.000		-		-	0,25	2.430.000	25	48,60	1,25	2.430.000,00	20,83	2,54	BKD
		5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Paket	6		1																			
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	77.239.610	1	-	1	15.000.000,00									0,00	-	0	0,00	1,00	-	25,00	-	BKD
		5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	%	100		0																			
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	4	1.294.074.800	2	90.261.460,00	1	180.986.082,00	0,25	1.349.250		8.315.196		-		-	0,25	7.659.406,00	25	4,24	2,25	97.921.094,00	56,25	7,57	BKD
		5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana/alat Inventaris Kantor**	**%**	**90**	**2.402.448.095**	**90**	**140.050.010**	**90**	**232.160.196**	**90**	-		-		-		-	**90**	-	**90**	-	**90,00**	**140.050.000**	**90,00**	**0,06**	**BKD**
		5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebeul	Jumlah Pengadaan Mebelair Kantor	Paket	6		0																			
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	81.137.922	1	-	1	70.000.000,00		-		-		-		-	0	-	0	0,00	1,00	-	16,67	-	BKD

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (14/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
		5	03	01	2.07	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	6		0																			
						10		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit	6	1.265.791.772	2	168.650.000	1	185.160.186,00									0,00	-	0	0,00	2,00	168.650.000	33,33	13,74	BKD
		5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	6		0																			
						10		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	823.318.400	1	-	1	17.000.000,00									0,00	-	0	-	1,00	-	100,00	-	BKD
		5	03	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	%	98	1.952.715.900	98	603.036.661,00	98	476.380.000	90	117.040.864		116.970.175					90	234.010.239,00	98	49,16	98,00	637.054.900,00	98,00		BKD
		5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	72		12																			
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	243.592.800	1	33.036.661,00	1	20.000.000,00	0,25	2.040.864		2.970.175					0,25	4.010.239,00	25,00	20,05	1,25	6.010.239,00	31,25	2,50	BKD
		5	03	01	2.08	06	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kebersihan yang Tersedia	Bulan	72		0																			
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	4	1.712.123.100	1	392.000.000,00	1	450.000.000,00	0,25	110.000.000		114.000.000					0,25	228.000.000,00	25,00	50,00	1,25	228.000.000,00	31,25	13,33	BKD
		5	03	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemeliharaan inventaris kantor yang terpelihara**	%	100,00	1.728.815.244,00	100,00	191.268.260,00	100	155.930.827	100	8.276.895		12.858.862					101,00	21.134.755,00	100,00	13,75	100,00	122.403.015,00	100,00	7,69	BKD
		5	03	01	2.09	01	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1		1																			
								Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	Unit	1	601.490.853	3	48.797.200,00	2	40.670.000,00	0,50	2.040.800							0,50	2.040.800,00	25	5,04	1,50	2.040.800,00	28,57	0,30	BKD
		5	03	01	2.09	02	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Alat Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	3		3																			
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perbalikannya	Unit	3	871.618.091	6	54.666.860,00	3	50.970.000,00	0,75	6.227.895		12.858.862					0,75	19.086.755,00	25	37,45	4,75	19.086.755,00	44,44	5,00	BKD
		5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	6		0																			
								Jumlah Peralatan dan Mesin- Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	214.142.301	2	5.000.000,00	1	24.870.000,00									0,00	-	0	0,00	2,00	5.000.000,00	50,00	2,68	BKD
		5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	6		0																			
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	149.191.800	1	-	1	30.000.000,00									0,00	-	0	0,00	1,00	-	100,00	-	BKD

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
																I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (15/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
		5	03	01	2.19	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	6		0																				
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	149.191.100	0	-	1	8.428.527,30								0,00	-	0		0,00	-	0,00	-	OKD
		5	03	01	2.19	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	6		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	149.000.000	0	-	1	5.000.000,00								0,00	-	0		0,00	-	0,00	-	OKD
																									Rata-rata Capaian Kinerja	%	90,00	26,23			90,00	13,51	
																									Predikat Kinerja	-	ST	SB			ST	SB	
		5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	16,91	22.410.438.706,00	4,00	1.409.942.345,00	18,32	3.084.040.472,00	0,00	-	-	258.233.550	-	-	-	460	258.233.550,00	4,08	2,69	472	1.768.175.895,00	2.791,72	19,34	OKD
								Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	76,00		63,00		82,50		0	-							113		0	0,00	177	-	63,60		OKD
								Jumlah Jabatan Pengawas Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	234		39		39		39	-							39		39	100%	78	-	33,33		OKD
								Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	Jabatan	1242		207	-	207		207	-							207		207	100%	414	-	33,33	-	OKD
								Jumlah Jabatan Perangkat Jabatan Pengawas Terbentuk pada Instansi Pemerintah	Jabatan	20910		3485	-	3485		3485	-							3485		3485	100%		-	0,00	-	OKD
		5	03	02	2.01		Pengadaan, Pendistribusian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN Pelamar Umum dan khusus, yang akan diangkat penetapan NIP, penunjukan Status ASN, dan menjadi ASN	CPNS	7000	8.257.209.611,00	1716	15.025.225,00	1400	712.930.971,10	1400	-	-	117.468.500	-	-	-	313	117.468.500,00	0,00	22,39	2.029,00	212.493.725,00	36,01	-	OKD
								Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang diterbitkan BKN	SK Pensiun	2910	512.453.850,00	1129	10.500.000,00	490	79.074.664,10	0	-	-	18.236.850	-	-	-	450	18.236.850,00	0,00	12,80	1.579,00	28.736.850,00	54,26	4,85	OKD
								Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Lembaga	1	2.816.104.603,00	1	-	1	282.035.232,10	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	1,00	-	100,00	-	OKD
								Jumlah data sistem informasi kepegawaian ASN yang terevaluasi	Data ASN	61500	485.277.900,00	7642	87.967.500,00	10500	119.964.288,10	0	-	-	32.000.000	-	-	-	8533	32.000.000,00	0,00	26,67	16.175,00	119.967.500,00	26,30	24,72	OKD
								Jumlah updating data kepegawaian yang akurat	Data ASN	61500	485.277.900,00	7642	-	10500	18.000.609,10	0	-	-	-	-	-	-	8533	-	0,00	0,00	16.175,00	-	26,30	-	OKD
								Jumlah penyelesaian data kepegawaian Karpeg, Karis, Karsu yang di terbitkan BKN dan surat cuti ASN yang diterbitkan BKD	Kartu Karpeg, Karis, Karsu dan Surat Cuti ASN	10280	517.629.900,00	1065	13.520.550,00	1000	25.081.225,10	0	-	-	-	-	-	-	1295	-	0,00	0,00	2.360,00	13.520.550,00	23,12	2,61	OKD
		5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah ketentuan dan jenis Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Formasi	7.000		0																				
								Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	4	246.915.100	2	21.204.414,00	1	26.217.811,00								0,00	-	0	0,00	2,00	21.204.414,00	50,00	8,54	OKD

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (s-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (14/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
		5	03	02	2.03	03	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Peserta yang Ikuti Seleksi PPPK Pelamar Umum dan Honorer yang akan di lantik penetapan NIP PPPK	PPPK	7.000		0																					
								Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	4	1.491.920.869	2	16.085.031,10	1	180.794.391,00		181.241.000					0,00	181.241.000,00	0	86,70	2,00	169.926.811,00	50,00	11,39	DKD
		5	03	02	2.03	04	Usulan Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Peserta yang Ikuti Seleksi ASN Pelamar Umum dan khusus yang akan di lantik penetapan NIP ASN, peningkatan Status ASN dan sumpah	CPNS	7.000		1716																					
								Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	4	6.510.354.811	1	17.255.000,10	1	70.561.205,00		4.227.500					0,00	4.227.500	0,00	0,03	1	4.227.500,00	25,00	0,06	DKD
		5	03	02	2.03	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah berit Kepatusan Pensiun ASN yang ditetapkan BKN	56 Persons	2.910		1129																					
								Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	4	512.953.509	1	10.500.000,10	1	79.974.664,00		10.236.850					0,00	10.236.850	0,00	12,80	1,00	10.236.850,00	25,00	2,00	DKD
		5	03	02	2.03	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1		1																					
								Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	2.856.166.610	2	-	1	202.851.232,00								0,00	-	0,00	0,00	2,00	-	200,00	-	DKD
		5	03	02	2.03	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data sistem informasi kepegawaian ASN yang telah terevaluasi	Data ASN	61.500		7642																					
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	403.277.930	1	87.967.500,10	1	159.961.288,00		32.000.000					0,00	32.000.000,00	0,00	26,67	1,00	32.000.000,00	25,00	6,59	DKD
		5	03	02	2.03	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang diarsir dan terhasilkan	Data ASN	61.500		7642																					
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	4	403.277.930	1	-	1	10.000.000,00								0,00	-	0,00	0,00	1,00	-	25,00	-	DKD
		5	03	02	2.03	12	Usulan Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah penyerahan kartu karpeg, karis, karsu dan surat cuti ASN	Kartu Karpeg, Kartu Karsu (ini Surat Cuti) ASN	10.200		1063																					
								Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	4	517.629.909	1	13.526.550,10	1	25.001.223,00							0,00	-	0,00	0,00	1,00	-	25,00	-	DKD
		5	03	02	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah contoni persetujuan ASN sesuai dengan analisis jabatan**	**ASN**	**1050**	**1.293.940.100,00**	**222**	**56.073.630,10**	**150**	**295.726.348,00**	134	-		30.003.000				0	30.003.100,00	0,00	10,20	222,00	86.076.630,00	21,14	6,71	DKD
								Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	**Jabatan**	**275**		**78**	-	**39**		39	-		-		-		-	39		100,00	0,00	117,00	-	42,86	-	DKD
								Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	**Jabatan**	**1449**		**414**	-	**207**		207	-		-		-		-	207		100,00	0,00	621,00	-	42,86	-	DKD

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
								Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah	Jabatan	20910		6670		3485		3485								3485		0,00		10.455,00		50,00		OKD
								Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober dan kenaikan gaji berkala	SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala ASN	40250	1.294.074.000,00	4633	58.143.000,00	6800	92.244.141,00	1169			23.235.000					4542	23.235.000,00	75,70	25,19	9.175,00	81.378.000,00	22,80	4,12	OKD
								Jumlah ASN yang lulus promosi ujian penyesuaian dan ujian dinas	ASN	2500	517.629.900,00	99	71.661.350,00	600	90.044.208,00	600								93		15,50	0,00	192,00	71.661.350,00	5,49	13,84	OKD
		3	03	02	2,03	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan	ASN	900																				
								Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung	Jabatan	234		49		39		39								39		100,00	0,00	88,00		37,61		OKD
								Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang lelang	Jabatan	1.242		269		207		207								287		100,00	0,00	476,00		38,33		OKD
								Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang lelang	Jabatan	20.910		136		3485		3485								3485		100,00	0,00	3.621,00		17,32		OKD
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Instansi	Dokumen	10	1.293.940.100	4	56.073.630,00	2	137.437.319,00				30.803.000					0	30.803.000,00	0,00	26,23	4,00	30.803.000,00	40,00	2,30	OKD
		5	03	02	2,02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober dan kenaikan gaji berkala tepat waktu	SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala ASN	85.250		4542																				
								Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	4	1.294.074.000	2	58.143.000,00	3	92.244.141,00				23.235.000					0,00	23.235.000,00	0,00	25,19	2,00	23.235.000,00	50,00	1,80	OKD
		5	03	02	2,02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang lulus promosi tepat penyesuaian dan ujian dinas	ASN	3.300		93																				
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	4	517.629.900	2	71.661.350,00	3	90.044.208,00									0,00		0,00	0,00	2,00		50,00		OKD
		5	03	02	2,03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/kembang an teknis sesuai dengan kebutuhan**	ASN	1.600	4.820.156.475	140	1.124.037.490	300	1.915.945.823	0								110,00		36,67	0,00	250,00	1.124.037.490,00	15,63	23,32	OKD
								Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pejabat	7.686		0		1349		0								660				660,00		6,09		OKD
								Jumlah ASN yang mendapatkan ijin belajar, tugas belajar, beasiswa dan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	ASN	600		226		100		0								0				226,00		37,67		OKD
								Jumlah ASN fungsional yang mengalami penetapan angka kredit (PAK)	ASN	1.700		102		300		0								0				102,00		17,76		OKD

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
								Jumlah ASN yang menerima Satya Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	ASN	6.000	258.014.000	365	-	1000		0								235		0,00		600,00		10,00		BKD
								Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	ASN	100	400.096.000	20	-	100		0								17		0,00		37,00		6,17		BKD
								Jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	Kasus	315	226.462.000	26	-	40		0								14		0,00		40,00		12,70		BKD
		5	03	02	2,04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah SKP ASN yang mendapatkan nilai baik dalam aplikasi e-kinerja ASN Kota Bandar Lampung	SKP ASN	51.000		7642																				
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	485.277.900	1	2.671.300,00	1	10.682.458,00									0,00		0,00	0,00	1		25,00		BKD
		5	03	02	2,04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah ASN yang menerima lancih Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	ASN	6.000		365																				
								Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	4	258.014.000	1	9.129.750,00	1	36.068.004,00									0,00		0,00	0,00	1,00		25,00		BKD
		5	03	02	2,04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN di Kota Bandar Lampung	ASN	600		20																				
								Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	250	258.014.000	20	16.387.736,00	40	30.253.264,00									0		0,00	0,00	20,00	16.387.736,00	0,00	6,33	BKD
		5	03	02	2,04	08	Pengelolaan Pemeliharaan Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang ditemberikan	Kasus	315																						
								Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	4	226.462.800	1	8.755.400,00	1	40.007.338,00		4.490.200							0,00	4.490.200,00	0,00	11,22	1,00	4.490.200,00	25,00	1,98	BKD
		5	03	02	2,04	09	Pelayanan Proses Izin Pensiunan Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan Izin Proses Pensiunan Pegawai	ASN	300																						
								Jumlah Dokumen Proses Izin Pensiunan Pegawai yang Diterpost	Dokumen	4	193.191.800	1	4.269.400,00	1	15.127.804,00									0,00		0		1,00	4.269.400,00	25,00	0,83	BKD
																										Rata-rata Capaian Kinerja *)		00,02	2,60			560,37	19,34	
																										Predikat Kinerja *)		T	SB			ST	SB	
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											14.204.016.906		2.694.461.031		691.811.230				64.650.700						64.650.700		9,35		2.759.110.731,00		39,32	
1	Meningkatnya Pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Aparatur Sipil Negara (ASN)							Persentase Pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Aparatur Sipil Negara (ASN)	%	61,78				45,99												0		0,00		BKD
		5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Ikut pelatihan dasar formasi umum	%	100	14.204.016.906	0,00	2.694.461.031	100	691.811.230				64.650.700						0	64650700,00	0,00	9,35	0,00	2.759.110.731,00	0,00	39,53	BKD
		5	04	02	2,02		Sertifikasi,Kelembaga a,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pungsional	Persentase ASN yang Ikut pelatihan dasar formasi umum	%	100	12.909.748.591	0,00	2.590.054.519	100	200.909.748										0	0,00	0,00		0,00	2.390.054.519,00	0,00	18,51	BKD

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
																I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (10/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
								Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	ASN	6.000	258.814.000	265	-	1000		0	-							235		0,00		600,00		10,00		BKD
								Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	ASN	680	408.806.600	20	-	100		0	-							17		0,00		17,00		4,17		BKD
								Jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	Kasus	515	226.462.800	26	-	40		0	-							14		0,00		40,00		12,70		BKD
		5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah SKP ASN yang mendapatkan nilai baik dalam aplikasi e-Kinerja ASN Kota Bandar Lampung	SKP ASN	51.660		7642																				
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	487.277.900	1	2.471.380,00	1	50.403.054,00									0,00		0,00	0,00	1		25,00		BKD
		5	03	02	2.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	ASN	6.000		365																				
								Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	4	258.814.000	1	9.129.756,00	1	54.068.004,00									0,00		0,00	0,00	1,00		25,00		BKD
		5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN di Kota Bandar Lampung	ASN	680		20																				
								Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	258	258.814.000	20	10.387.730,00	60	35.253.250,00									0		0,00	0,00	20,00	10.387.730,00	8,00	6,33	BKD
		5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang terselesaikan	Kasus	215																						
								Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	4	226.462.800	1	8.755.460,00	1	50.067.958,00		6.490.200							0,00	6.490.200,00	0,00	11,22	1,00	6.490.200,00	25,00	1,98	BKD
		5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Isin Penerimaan Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan Isin Proses Penerimaan Pegawai	ASN	515																						
								Jumlah Dokumen Proses Isin Penerimaan Pegawai yang Dilayani	Dokumen	4	144.191.000	1	4.269.460,00	1	15.127.004,00									0,00		0		1,00	4.269.460,00	25,00	0,03	BKD
																										Rata-rata Capaian Kinerja *)		80,82	2,40			580,27	19,34	
																										Predikat Kinerja *)		T	SR			ST	SR	
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											34.284.816.906		2.094.460.031		691.811.230				64.650.700						64.650.700		9,35		2.759.110.731,00		19,32	
2	Meningkatnya Pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Aparatur Sipil Negara (ASN)							Persentase Pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Aparatur Sipil Negara (ASN)	%	61,78				45,99																		
		5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum	%	100	34.284.816.906	0,00	2.094.460.031	100	691.811.230				64.650.700					0	64650700,00	0,00	9,35	0,00	2.759.110.731,00	0,00	10,53	BKD
																													-				
		5	04	02	2.02		Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum	%	100	32.989.741.591	0,00	2.391.054.519	100	299.999.748									0	0,00	0,00		0,00	2.391.054.519,00	0,00	10,53	BKD

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)=(14/9)*100		(16)=(14+8)		(17)=(16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
								Jumlah ASN yang telah selesai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik	**Pejabat**	**60**	**1.374.260.335**	**0,00**	**304.405.512**	**10**	**391.811.402**									**0**	**64650700,00**	**0,00**	**16,50**	**0,00**	**369.056.212,00**	**0,00**	**26,85**	**BKD**
		5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Aparatur dan Pejabat	Persentase ASN yang telah pelatihan dasar fungsional umum	%	100		**100,00**	**1.161.125.424,00**																			
								Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional	Laporan	4	12.919.748.591	**2,00**	**1.228.929.095,00**	1	230.809.768,00									**1,00**		0,00		2,00	1.228.929.095,00	50,00	9,52	BKD
		5	04	02	2.03	08	Pendidikan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kearsipan, Serta	Jumlah ASN yang telah selesai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik	Pejabat	60		**0,00**	-																	
								Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	4	1.374.260.335	**2,00**	**304.405.512,00**	1	391.811.402,00				64.650.700					**1,00**	64.650.700,00	0,00	16,50	2,00	369.056.212,00	50,00	26,85	BKD
																								Rata-rata Capaian Kinerja	%	-	9,35			100,00	30,53	
																								Predikat Kinerja	%	SR	SR			ST	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				**84.723.106.690**		**9.037.377.848**		**3.936.840.674**		**1.246.561.641**		**1.681.810.501**		-		-		**2.927.582.142,00**				**11.964.959.990**			
							TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			**59,61**	**38,16**			**259,46**	**66,40**	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			**B**	**SR**			**ST**	**B**	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:																															

Bandar Lampung, Juni 2025

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANDAR LAMPUNG

ZULKIPLI, S.E., M.M.
NIP. 19701211 199703 1 004

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan Kondisi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandar Lampung serta Program Pemerintah Kota Bandar Lampung maka Perubahan pada Program dan Kegiatan yang dirancang Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandar Lampung pada perubahan anggaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 21.973.022,- berkurang Rp. 1.682.219,- menjadi Rp. 20.290.803,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
2. Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 32.974.197,- berkurang Rp. 2.822.127,- menjadi Rp. 30.152.070,- Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
3. Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 20.718.214,- berkurang Rp. 1.808.381,- menjadi Rp. 18.909.833,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
4. Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 15.212.897,- berkurang Rp. 2.980.303,- menjadi Rp. 12.232.594,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.

5. Sub-Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Anggaran sebesar Rp. 25.041.353,- berkurang Rp. 2.253.093,- menjadi Rp. 22.788.260,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
6. Sub-Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan dengan Anggaran sebesar Rp. 4.515.840.674,-. Tidak ada perubahan Anggaran pada sub-kegiatan ini
7. Sub-Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 213.958.045,- berkurang Rp. 21.439.431 menjadi Rp. 192.518.614,- Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
8. Sub-Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 4.186.208,- berkurang Rp. 4.186.208 menjadi Rp. 0,-. Hal ini dikarenakan sub kegiatan dihapuskan.
9. Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 34.371.884 berkurang Rp. 2.900.776,- menjadi Rp. 31.471.108,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
10. Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 19.764.384,- berkurang Rp. 1.719.722,- menjadi Rp. 18.044.662,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
11. Sub-Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan Anggaran sebesar Rp. 1.836.142,- berkurang Rp. 1.836.142,- menjadi Rp. 0,-. Hal ini dikarenakan sub-kegiatan dihapuskan.

12. Sub-Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan dengan Anggaran sebesar Rp. 4.950.000,-. Tidak ada perubahan Anggaran pada Sub-Kegiatan ini.
13. Sub-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan Anggaran sebesar Rp. 19.999.424,- berkurang Rp. 9.010.206,- menjadi Rp. 10.989.218,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
14. Sub-Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bagunan Knator dengan Anggaran sebesar Rp. 4.984.903,-. Tidak ada perubahan Anggaran pada Sub-Kegiatan ini.
15. Sub-Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Anggaran sebesar Rp. 77.844.323,- berkurang Rp. 11.676.764,- menjadi Rp. 66.167.559,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
16. Sub-Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan Anggaran sebesar Rp. 19.982.107,-. Tidak ada perubahan Anggaran pada Sub-Kegiatan ini.
17. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- berkurang Rp. 6.225.000,- menjadi Rp. 18.775.000,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
18. Sub-Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Anggaran sebesar Rp. 39.666.380,- berkurang Rp. 7.933.290,- menjadi Rp 31.733.090,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
19. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-. Tidak ada perubahan Anggaran pada Sub-Kegiatan ini.

20. Sub-Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan Anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- berkurang Rp. 3.750.000,- menjadi Rp. 11.250.000,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
21. Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 186.131.564,- berkurang Rp. 91.139.561,- menjadi Rp. 94.992.003,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
22. Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Anggaran Rp.50.000.000,- Subkegiatan ini merupakan subkegiatan baru, guna mengakomodir Belanja sewa kendaraan dinas Jabatan Kepala BKPSDM Kota Bandar Lampung.
23. Sub-Kegiatan Pengadaan Mebeul dengan Anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- berkurang Rp. 45.000.000,- menjadi Rp. 25.000.000,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
24. Sub-Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 145.160.196 berkurang Rp. 43.000.000,- menjadi Rp. 102.160.196,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
25. Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 17.000.000,- berkurang Rp. 750.000,- sebesar Rp. 16.250.000,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
26. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-. Tidak ada perubahan Anggaran pada Sub-Kegiatan ini.

27. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Anggaran sebesar Rp. 456.000.000,-. Tidak ada perubahan Anggaran pada Sub-Kegiatan ini.
28. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Anggaran sebesar Rp. 40.670.000,-. Tidak ada perubahan Anggaran pada Sub-Kegiatan ini.
29. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Anggaran sebesar Rp. 50.970.000,-. Tidak ada perubahan Anggaran pada Sub-Kegiatan ini.
30. Sub-Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 24.870.000,-. Tidak ada perubahan Anggaran pada Sub-Kegiatan ini.
31. Sub-Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-. Tidak ada perubahan Anggaran pada Sub-Kegiatan ini.
32. Sub-Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 4.428.527,-. Tidak ada perubahan Anggaran pada Sub-Kegiatan ini.
33. Sub-Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 4.428.527,-. Tidak ada perubahan Anggaran pada Sub-Kegiatan ini.
34. Sub-Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dengan Anggaran sebesar Rp. 24.217.819,- berkurang Rp. 7.570.079,- menjadi Rp. 16.647.740,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.

35. Sub-Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan Anggaran sebesar Rp. 180.754.391,- bertambah Rp. 104.995.756,- menjadi Rp. 285.750.147,-. Hal ini dikarenakan adanya penambahan kebutuhan anggaran pada Sub Kegiatan tersebut guna mengoptimalkan target kinerja.
36. Sub-Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN dengan Anggaran sebesar Rp. 70.163.285,- berkurang Rp. 27.086.189,- menjadi Rp. 43.077.096,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
37. Sub-Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan Anggaran sebesar Rp. 79.974.664,- berkurang Rp. 17.210.906,- menjadi Rp. 62.763.758,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
38. Sub-Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN dengan Anggaran sebesar Rp. 202.855.232,- bertambah Rp. 810.570.862,- menjadi Rp. 1.013.426.094,-. Hal ini dikarenakan adanya penambahan kebutuhan anggaran ATPD atas usulan proposal.
39. Sub-Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan Anggaran sebesar Rp. 119.964.288,- bertambah Rp. 469.485.707,- menjadi Rp. 589.449.995,-. Hal ini dikarenakan adanya penambahan kebutuhan anggaran pada sub kegiatan tersebut guna mengoptimalkan target kinerja.
40. Sub-Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian dengan Anggaran sebesar Rp. 10.000.069,- berkurang Rp. 2.498.820,- menjadi Rp. 7.570.249,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
41. Sub-Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian dengan Anggaran sebesar Rp. 25.001.223,- berkurang Rp. 6.596.532,- menjadi Rp. 18.404.691,-. Hal ini dikarenakan

adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.

42. Sub-Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN dengan Anggaran sebesar Rp. 117.437.919,- berkurang Rp. 12.700.049,- menjadi Rp. 104.737.510,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
43. Sub-Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan Anggaran sebesar Rp. 92.244.141,- berkurang Rp. 15.803.254,- menjadi Rp. 76.440.887,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
44. Sub-Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN dengan Anggaran sebesar Rp. 90.044.288 berkurang Rp. 11.239.545,- menjadi Rp. 78.804.743,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
45. Sub-Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN dengan Anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- berkurang Rp. 221.058.600 menjadi Rp. 53.941.400,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
46. Sub-Kegiatan Pengelolaan Assessment Center dengan Anggaran sebesar Rp. 279.998.385,- berkurang Rp. 76.783.097,- menjadi Rp. 203.215.288,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
47. Sub-Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN dengan Anggaran sebesar Rp. 361.884.669,- berkurang Rp. 176.039.376,- menjadi Rp. 185.845.293,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
48. Sub-Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan Anggaran sebesar Rp. 900.000.000,- berkurang Rp. 11.010.352,- menjadi Rp. 888.989.648,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi

anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.

49. Sub-Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional dengan Anggaran sebesar Rp. 46.075.718,- berkurang Rp. 21.380.011 menjadi Rp. 24.695.707,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
50. Sub-Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional dengan Anggaran sebesar Rp. 14.999.882,- berkurang Rp. 2.858.708,- menjadi Rp. 12.141.174,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
51. Sub-Kegiatan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional dengan Anggaran sebesar Rp. 37.985.169,- berkurang Rp. 21.932.451,- menjadi Rp. 16.052.178,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
52. Sub-Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan Anggaran sebesar Rp. 30.982.458,- berkurang Rp. 10.134.726,- menjadi Rp. 20.847.732,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
53. Sub-Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur dengan Anggaran sebesar Rp. 34.068.004,- berkurang Rp. 9.542.588,- menjadi Rp. 24.525.416,-Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
54. Sub-Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN dengan Anggaran sebesar Rp. 35.253.256,- berkurang Rp. 21.331.209,- menjadi Rp. 13.922.047,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.

55. Sub-Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dengan Anggaran sebesar Rp. 40.007.708,- berkurang Rp. 8.146.317,- menjadi Rp. 31.861.391,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
56. Sub-Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 15.127.904,- berkurang Rp. 4.650.065 menjadi Rp. 10.477.839,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
57. Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan dengan Anggaran sebesar Rp. 299.999.748,- berkurang Rp. 143.332.233 menjadi Rp. 156.667.515,-. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 343 Tahun 2025.
58. Sub-Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikas Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan dengan Anggaran sebesar Rp. 391.811.482,- bertambah Rp. 24.001.387,- menjadi Rp. 415.812.869,-. Hal ini dikarenakan adanya penambahan kebutuhan pada Sub Kegiatan tersebut guna mengoptimalkan target kinerja.

Total perubahan (Penambahan) anggaran pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 323.649.494,-. Rincian rencana program dan kegiatan beserta target kinerja dalam perubahan Renja Tahun 2025 disajikan dalam tabel-3.1.

Usulan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bandar Lampung

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Penjabaran APBD			Rancangan Perubahan RKPD			Selisih
			Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	BKPSDM KOTA BANDAR LAMPUNG				**Rp 9.936.840.674,00**			**Rp 10.260.490.168,00**	**-Rp 323.649.494**
	KEPEGAWAIAN				**Rp 9.245.029.444,00**			**Rp 9.688.009.784,00**	**-Rp 442.980.340**
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	**98**	**%**	**Rp 6.160.988.972,00**	**98**	**%**	**Rp 5.954.421.221,00**	**Rp 206.567.751**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1 Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**100**	**%**	**Rp 115.919.683,00**	**100**	**%**	**Rp 104.373.560,00**	**Rp 11.546.123**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2	Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	Rp 21.973.022		Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	Rp 20.290.803	Rp 1.682.219
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen RKA	Rp 32.974.197		Dokumen RKA	Rp 30.152.070	Rp 2.822.127
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen Perubahan RKA	Rp 20.718.214		Dokumen Perubahan RKA	Rp 18.909.833	Rp 1.808.381
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	*Dokumen (1 Evaluasi Renja, 1 Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Realisasi Fisik dan Keuangan)*	Rp 15.212.897		*Dokumen (1 Evaluasi Renja, 1 Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Realisasi Fisik dan Keuangan)*	Rp 12.232.594	Rp 2.980.303
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	*Laporan (1 LPJ, 1 LPPD, 1 LAKIP, 1 Penetapan Kinerja)*	Rp 25.041.353		*Laporan (1 LPJ, 1 LPPD, 1 LAKIP, 1 Penetapan Kinerja)*	Rp 22.788.260	Rp 2.253.093

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Penjabaran APBD				Rancangan Perubahan RKPD				Selisih	
			Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100**	**%**	**Rp**	**4.789.957.337,00**	**100**	**%**	**Rp**	**4.757.875.058,00**	**Rp**	**32.082.279**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	Orang	Rp	4.515.840.674,00	50	bulan	Rp	4.515.840.674,00	Rp	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen	Rp	213.958.045	4	Dokumen	Rp	192.518.614	Rp	21.439.431
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	Rp	4.186.208	1	Dokumen	Rp	-	Rp	4.186.208
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	Rp	34.371.884	1	Laporan	Rp	31.471.108	Rp	2.900.776
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	Rp	19.764.384	12	Laporan	Rp	18.044.662	Rp	1.719.722
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	1.836.142	1	Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	-	Rp	1.836.142
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	100	%	**Rp**	**24.949.424,00**	**100**	**%**	**Rp**	**15.939.218,00**	**Rp**	**9.010.206**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	Rp	4.950.000	1	Paket	Rp	4.950.000	Rp	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60	**Orang**	Rp	19.999.424	60	**Orang**	Rp	10.989.218	Rp	9.010.206
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuha Dasar Operasional OPD**	**100**	**%**	**Rp**	**368.063.805,00**	**100**	**%**	**Rp**	**252.884.662,00**	**Rp**	**115.179.143**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp	4.984.903		Paket	Rp	4.984.903	Rp	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Penjabaran APBD				Rancangan Perubahan RKPD				Selisih
			Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 77.844.323		Paket	Rp 66.167.559		Rp 11.676.764	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	Rp 19.982.107		Paket	Rp 19.982.107		Rp -	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 25.000.000		Paket	Rp 18.775.000		Rp 6.225.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Rp 39.666.380		Paket	Rp 31.733.090		Rp 7.933.290	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	Rp 5.000.000		Dokumen	Rp 5.000.000		Rp -	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	Rp 15.000.000		Laporan	Rp 11.250.000		Rp 3.750.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Dokumen	Rp 180.586.092		Dokumen	Rp 94.992.003		Rp 85.594.089	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**98**	**%**	**Rp 232.160.196,00**		**98**	**%**	**Rp 193.410.196,00**	**Rp 38.750.000**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	Rp -		Unit	Rp 50.000.000		-Rp 50.000.000	
	Pengadaan Mebeul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	Rp 70.000.000		Unit	Rp 25.000.000		Rp 45.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	Rp 145.160.196		Unit	Rp 102.160.196,00		Rp 43.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	Rp 17.000.000		Unit	Rp 16.250.000		Rp 750.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**98**	**%**	**Rp 476.000.000,00**		**98**	**%**	**Rp 476.000.000,00**	**Rp -**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	Rp 20.000.000		Laporan	Rp 20.000.000		Rp -	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Penjabaran APBD				Rancangan Perubahan RKPD				Selisih
			Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Rp 456.000.000			Laporan	Rp 456.000.000		Rp -
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan inventaris kantor yang terpelihara**	**100**	**%**	**Rp 153.938.527,00**		**100**	**%**	**Rp 153.938.527,00**		**Rp -**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	Rp 40.670.000			Unit	Rp 40.670.000		Rp -
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	Rp 50.970.000			Unit	Rp 50.970.000		Rp -
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	Rp 24.870.000			Unit	Rp 24.870.000		Rp -
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Rp 30.000.000			Unit	Rp 30.000.000		Rp -
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Rp 4.428.527			Unit	Rp 4.428.527		Rp -
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Rp 3.000.000			Unit	Rp 3.000.000		Rp -
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**- Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal**	**16,66**	**%**	**Rp 3.084.040.472,00**		**16,66**	**%**	**Rp 3.733.588.563,00**		**-Rp 601.718.571**
		- Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	**75,97**	**%**			**75,97**	**%**			
		- Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	**39**	**Jabatan**			**39**	**Jabatan**			
		- Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	**207**	**Jabatan**			**207**	**Jabatan**			
		- Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	**3485**	**Jabatan**			**3485**	**Jabatan**			

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Penjabaran APBD			Rancangan Perubahan RKPD			Selisih
			Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**- Jumlah CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN Pelamar Umum dan khusus, yang akan dilakukan penetapan NIP, peningkatan Status ASN, dan sumpah ASN**	**1200**	**Laporan**	**Rp 712.930.971,00**	**1200**	**Laporan**	**Rp 1.987.089.770,00**	**-Rp 1.274.158.799**
		- Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang diterbitkan BKN	**480**	**Dokumen**		**480**	**Dokumen**		
		- Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	**1**	**Lebaga**		**1**	**Lebaga**		
		- Jumlah data sistem informasi kepegawaian ASN yang tervalidasi	**9500**	**Dokumen**		**9500**	**Dokumen**		
		- Jumlah updating data kepegawaian yang akurat	**9500**	**Dokumen**		**9500**	**Dokumen**		
		- Jumlah penyelesaian data kepegawaian karpeg, karis, karsu yang di terbitkan BKN dan surat cuti ASN yang diterbitkan BKD	**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	Rp 24.217.819	1	Dokumen	Rp 16.647.740	Rp 7.570.079
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	Rp 180.754.391	1	Dokumen	Rp 285.750.147	-Rp 104.995.756
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1	Laporan	Rp 70.163.285,00	1	Laporan	Rp 43.077.096,00	Rp 27.086.189
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	Dokumen	Rp 79.974.664	480	Dokumen	Rp 62.763.758	Rp 17.210.906
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	Rp 202.855.232	1	Lembaga	Rp 1.013.426.094	-Rp 810.570.862
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	Rp 119.964.288	1	Dokumen	Rp 539.449.995	-Rp 419.485.707
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	Dokumen	Rp 10.000.069	1	Dokumen	Rp 7.570.249	Rp 2.429.820

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Penjabaran APBD			Rancangan Perubahan RKPD			Selisih
			Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan	Rp 25.001.223	1	Laporan	Rp 18.404.691	Rp 6.596.532
	Mutasi dan Promosi ASN	**- Jumlah mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan**	**150**	**ASN**	**Rp 299.726.348,00**	**150**	**ASN**	**Rp 259.983.140,00**	**Rp 39.743.208**
		Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung	**39**	**Jabatan**		**39**	**Jabatan**		
		Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung	**207**	**Jabatan**		**207**	**Jabatan**		
		Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung	**4741**	**Jabatan**		**4741**	**Jabatan**		
		- Jumlah SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala ASN	**5750**	**Dokumen**		**5750**	**ASN**		
		- Jumlah ASN yang lulus promosi ujian penyesuaian dan ujian	**500**	**Dokumen**		**500**	**ASN**		
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana	2	Dokumen	Rp 117.437.919	2	Dokumen	Rp 104.737.510	Rp 12.700.409
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	Dokumen	Rp 92.244.141	1	Dokumen	Rp 76.440.887	Rp 15.803.254
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	Dokumen	Rp 90.044.288	1	Dokumen	Rp 78.804.743	Rp 11.239.545
	Pengembangan Kompetensi ASN	**- Jumlah ASN yang mengikuti pendidkan dan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan**	**250**	**Orang**	**Rp 1.915.943.823,00**	**250**		**Rp 1.384.881.228,00**	**Rp 531.062.595**
		- Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi ASN	**1249**	**Dokumen**		**1249**	**Dokumen**		
		- Jumlah ASN yang mendapatkan izin belajar, tugas belajar, beasiswa dan bantuan tugas	**100**	**Orang**		**100**	**Orang**		
		- Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK)	**250**	**Orang**		**250**	**Orang**		
		- Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota Bandar Lampung	**12**	**Dokumen**		**12**	**Dokumen**		
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	90	Orang	Rp 275.000.000	90	Orang	Rp 53.941.400	Rp 221.058.600

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Penjabaran APBD				Rancangan Perubahan RKPD				Selisih	
			Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	Dokumen	Rp	279.998.385	1	Dokumen	Rp	203.215.288	Rp	76.783.097
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasim Diklat dan Sertifikasi ASN	1	Dokumen	Rp	361.884.669	1	Dokumen	Rp	185.845.293	Rp	176.039.376
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100	Orang	Rp	900.000.000	100	Orang	Rp	888.989.648	Rp	11.010.352
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	90	Orang	Rp	46.075.718	90	Orang	Rp	24.695.707	Rp	21.380.011
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	250	Orang	Rp	14.999.882	250	Orang	Rp	12.141.174	Rp	2.858.708
	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	12	Dokumen	Rp	37.985.169	12	Dokumen	Rp	16.052.718	Rp	21.932.451
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	- **Jumlah SKP ASN Kota Bandar Lampung yang mendapatkan nilai baik pada aplikasi e-kinerja**	**8500**	**Dokumen**	**Rp**	**155.439.330,00**	**8500**	**Dokumen**	**Rp**	**101.634.425,00**	**Rp**	**101.634.425**
		- **Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya**	**400**	**Dokumen**			**400**	**Dokumen**				
		- **Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN**	**100**	**Orang**			**100**	**Orang**				
		- **Jumlah penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN**	**60**	**laporan**			**60**	**laporan**				
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	Rp	30.982.458	1	Dokumen	Rp	20.847.732	Rp	10.134.726
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	1	Dokumen	Rp	34.068.004	1	Dokumen	Rp	24.525.416	Rp	9.542.588
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	60	Orang	Rp	35.253.256	60	Orang	Rp	13.922.047	Rp	21.331.209
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	laporan	Rp	40.007.708	1	laporan	Rp	31.861.391	Rp	8.146.317

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Penjabaran APBD				Rancangan Perubahan RKPD				Selisih
			Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1	Dokumen	Rp 15.127.904		1	Dokumen	Rp 10.477.839		Rp 4.650.065
	PEDIDIKAN DAN PELATIHAN				**Rp 691.811.230,00**				**Rp 572.480.384,00**		**Rp 119.330.846**
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	100	%	**Rp 691.811.230,00**		**100**	**%**	**Rp 572.480.384,00**		**Rp 119.330.846**
	Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**1** Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	**1**	Laporan	Rp 691.811.230,00		**1**	Laporan	Rp 572.480.384,00		Rp 119.330.846
		2 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi,	**40**	Dokumen			**40**	Dokumen			
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	**1** Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	1	Laporan	Rp 299.999.748,00		1	Laporan	Rp 156.667.515,00		Rp 143.332.233
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikas Pengelolaan Kelembagaan danTenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi ,Kepemimpinan dan Prajabatan	**2** Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1	Dokumen	Rp 391.811.482		1	Dokumen	Rp 415.812.869		-Rp 24.001.387

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANDAR LAMPUNG

ZULKIPLI, S.E., M.M.
NIP. 19701211 199703 1 004

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *community based development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandar Lampung. Selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandar Lampung dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

NO	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Laniut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	√			
	2.1	Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/tahun 2025				
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 2025
INSPEKTUR KOTA BANDAR LAMPUNG

ROBI SULISKA SOBRI, S.IP.,M.IP.,QCRO
Pembina Utama Muda
NIP. 19850923 200312 1 003

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	**(Dra. Rr. Diah Sulistiorini, M.Si)** Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)	
2	**(Indah Wulan Sari, S.Ap., MM)** (Funsional Perencana Ahli Muda)	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025

INSPEKTUR KOTA BANDAR LAMPUNG

ROBI SULISKA SOBRI, S.IP.,M.IP.,QCRO
Pembina Utama Muda
NIP. 19850923 200312 1 003

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	**(Dra. Rr. Diah Sulistiorini, M.Si)** Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)	
2	**(Indah Wulan Sari, S.Ap., MM)** (Funsional Perencana Ahli Muda)	

Mengetahui,
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, 2025
INSPEKTUR KOTA BANDAR LAMPUNG

ROBI SULISKA SOBRI, S.IP.,M.IP.,QCRO
Pembina Utama Muda
NIP. 19850923 200312 1 003

Mengetahui,
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700218 199303 2 002

Diverifikasi :	2025	Tanda Tangan
1	**(Dra. Rr. Diah Sulistiorini, M.Si)** Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)	
2	**(Indah Wulan Sari, S.Ap., MM)** (Funsional Perencana Ahli Muda)	

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	**PENDAHULUAN**	**I-1**
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Landasan Hukum	I-2
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
	1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**	**II-1**
	2.1 Evaluasi terhadap hasil Renja Inspektorat sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	II-1
	Formulir E.81	II-6
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	**III-1**
	3.1 Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	III-1
BAB IV	**PENUTUP**	**IV-1**
	LAMPIRAN	**V-2**

LAMPIRAN 34
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616/IV.01/HK/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, serta Perubahan Renca Kerja

untuk melengkapi terjadinya perubahan Anggaran Kegiatan pada Rencana Kerja.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya guna mendukung tercapainya visi Kota Bandar Lampung yang diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan dan pencapaian visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Untuk menjaga kesinambungan Program Kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung, Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dalam Kerangka Pembangunan Jangka Menengah dengan mencermati keberhasilan Tahun 2024, perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada Tahun 2025, mempertimbangkan permasalahan dan tantangan tahun 2024. Perubahan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode (1) satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja OPD merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021)

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);

17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 4);

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Bandar Lampung tahun 2025, dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 adalah :

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
2. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
3. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Pada tahun 2025 dalam Penetapan Kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung terdapat 3 program dan 10 kegiatan yang tercantum dalam APBD 2025 antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi
b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Fasilitasi Kunjungan Tamu

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Mebel

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

c. Reviu Laporan Kinerja

d. Reviu Laporan Keuangan

e. Kerjasama Pengawasan Internal

f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASITENSI

3.1 Pendampingan dan Asistensi

a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantaasan Korupsi

d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Adapun semua kegiatan tersebut diatas dilaksanakan di wilayah Bandar Lampung, dan rincian kebutuhan dana/pagu indikatif dari masing-masing kegiatan tercantum pada Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025. Pemerintah Kota Bandar Lampung.

2.1.1 REALISASI KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA

2.1 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan Inspektorat Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	%
1	2	4	5	6	7	8	9
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Inspektorat**	**98%**	**44,38%**	**Rp18.614.477.056,00**	**8.260.719.558,00**	***45%***
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen dan Laporan Kinerja Inspektorat**	**100%**	**75%**	**Rp117.690.000,00**	**21.375.000,00**	**75%**
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Inspektorat	*6 Dokumen*	*5 Dokumen*	Rp93.182.000,00	14.705.000,00	83,33
b	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*6 Laporan*	*4 Laporan*	*24.508.000,00*	*6.670.000,00*	66,67
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100%**	**56%**	**Rp16.050.542.744,00**	**7.784.015.047,00**	**56%**
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat yang Tersedia	79 orang / 14 bulan	79 orang /6 bulan	Rp15.887.070.744,00	7.714.815.047,00	42,86%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	%
1	2	4	5	6	7	8	9
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	*5 Dokumen*	*4 Dokumen*	Rp120.720.000,00	57.540.000,00	80,00
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*6 Laporan*	*4 Laporan*	Rp42.752.000,00	11.660.000,00	66,67
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**	**10%**	**Rp562.188.812,00**	**59.871.000,00**	**10%**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	Rp54.000.000,00	-	-
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	*83 APIP*	-	Rp235.196.000,00	-	*0%*
b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*83 APIP*	*17 APIP*	*272.992.812,00*	*59.871.000,00*	*20,48%*
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98%**	**47%**	**Rp1.038.795.500,00**	**163.936.759,00**	***47%***
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*1 Paket*	*0,50 Paket*	Rp16.793.730,00	*0*	*50%*
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*1 Paket*	*1/4 Paket*	*169.292.350,00*	*19.236.070,00*	*11,41%*
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*1 Paket*	*1/4 Paket*	*72..000.000,00*	*11.400.000,00*	*15,83%*
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*1 Paket*	-	*113.321.469,00*	*9.753.750,00*	*0%*
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*12 Dokumen*	*6 Dokumen*	*22.680.000,00*	*9.900.000,00*	*50%*
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	*4 Laporan*	*1 Laporan*	*76.000.000,00*	*2.500.000,00*	*25%*
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*10 Laporan*	*6 Laporan*	*568.707.951,00*	*111.146.939,00*	*60%*
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**98%**	**0%**	***100.500.000,00***	***0***	***0%***
a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	*1 paket*	*0 paket*	*10.000.000,00*	*0*	*0%*
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	*2 unit*	*0 unit*	*90.500.000,00*	*0,00*	*0%*

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	%
1	2	4	5	6	7	8	9
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**98%**	**41,91%**	***314.250.000,00***	***131.723.696,00***	***41,91%***
a	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*12 Laporan*	*6 Laporan*	*26.250.000,00*	*1.723.696,00*	*50%*
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*12 Laporan*	*7 Laporan*	*288.000.000,00*	*130.000.000,00*	*58,33%*
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98%**	**20%**	***430.510.000,00***	***99.798.056,00***	***20%***
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	*1 Unit*	*0,50 Unit*	*41.670.000,00*	*12.850.000,00*	*50%*
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*7 unit*	*7 unit*	*213.220.000,00*	*69.438.056,00*	*50%*
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*72 unit*	*12 unit*	*44.820.000,00*	*17.510.000,00*	*16,67%*
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara	*1 unit*	*1 unit*	*130.800.000,00*	*99.437.100,00*	*99,44%*
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD**	**85%**	**36,61%**	***2.333.542.053,00***	***599.422.149,00***	***25,68%***
		Presentase Tindak Lanjut Temuan	**100%**	***66,67%***			
		Presentase Penangan Kasus Pengaduan	**90%**	**32,42%**			
1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Penyelenggaraan Pengawasan pada obrik**	**85%**	**24,35%**	***1.948.172.804,00***	***474.288.274,00***	***24,35%***
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*80 Laporan*	*27 Laporan*	*946.530.187,00*	*226.202.503,00*	*23,9%*
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*13 Laporan*	*3 Laporan*	*267.499.295,00*	*92.795.759,00*	*34,69%*
c	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviu Kinerja	*11 Laporan*	*6 Laporan*	*305.251.895,00*	*41.033.512,00*	*13,44%*
d	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu Keuangan	*4 Laporan*	*6 Laporan*	*126.199.798,00*	*74.133.000,00*	*58,74%*
e	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	*1*	*0,00%*	*19.798.983*	*0*	*0,00%*
f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	3 Dokumen	2 Dokumen	*282.892.646,00*	*40.123.500,00*	*14,18%*

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	%
1	2	4	5	6	7	8	9
2	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Presentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**85%**	**40%**	***385.369.249,00***	***125.133.875,00***	***32%***
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang ditangani	*5 Laporan*	*0 Laporan*	*30.785.873,00*	*0*	*0%*
b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	*35 Laporan*	*16 Laporan*	*354.583.376,00*	*125.133.875,00*	*35,29%*
III	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASITENSI**	**Pelaksanakan pendampingan, asistensi, fasilitasi dan penilaian**	**80%**	**11,68%**	***2.107.051.635,00***	***246.310.138,00***	***11,68%***
1	**Pendampingan dan Asistensi**	**Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP**	**80%**	**11,68%**	***2.107.051.635,00***	***246.310.138,00***	***11,68%***
a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	33 Perangkat Daerah	*12 Perangkat Daerah*	*182.499.793,00*	*99.412.500,00*	*54,47%*
b	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dilakukan Penilaian Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	*5 Perangkat Daerah*	*2 Perangkat Daerah*	*45.999.964,00*	*19.085.000,00*	*41,49%*
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantaasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantaasan Korupsi	*6 Kegiatan*	*0 Kegiatan*	*1.816.448.568,00*	*186.552.500,00*	*10,27%*
d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	*52 Perangkat Daerah*	*17 Perangkat Daerah*	*64.678.543,00*	*18.187.638,00*	*28,12%*
JUMLAH PAGU					**23.055.070.744,00**	**9.106.451.845,00**	***39,50%***

Realisasi keuangan Inspektorat Kota Bandar Lampung Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 mencapai 39,50%.

Formulir E. 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG

RENJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG

PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2021 S/D 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) s.d TRIWULAN II		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2021 S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV									
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (K-14)		17 = (16/7)*100		18
		x	01				**INSPEKTORAT DAERAH**				**141.911.709.828,77**		**67.173.079.183,00**		**Rp23.088.070.744,00**	25%	**Rp3.029.823.443,00**	41%	**8.076.628.402,00**	0%	-	0%	-	**9.106.451.845,00**			**76.279.531.028,00**		**53,75**	
		x	01				**Inspektorat**				**141.911.709.828,77**		**67.173.079.183,00**		**Rp23.088.070.744,00**	25%	**Rp3.029.823.443,00**	41%	**8.076.628.402,00**	0%	-	0%	-	**9.106.451.845,00**			**76.279.531.028,00**		**53,75**	
1	**Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan**	x	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INSPEKTORAT**	%	98,00	100,961.139.100,98	2%	51.996.371.857,00	98%	Rp 18.414.477.086,00	18,09%	Rp3.029.823.443,00	19,84%	8.230.896.119,00	0,00%	-	0,00%	-	44,38%	8.260.719.538,00	43%	44%	44%	60.257.091.405,00	48%	60%	**Inspektorat**
		x	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	%	100,00	488.321.953,78	57%	344.678.040,00	100%	Rp117.690.000,00	30%	Rp	30%	31.373.000,00	0%	-	0%	-	73%	21.378.000,00	73%	13,16	73%	366.081.040,00	73%	73%	
		x	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30,00	242.918.447,51	18,00	126.043.100,00	6	Rp93.182.000,00	3	Rp	2	14.703.000,00	-	-	-	-	5,00	14.703.000,00	83,33	15,78	23,00	140.748.100,00	76,67	57,94	
		x	01	01	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30,00	243.403.506,23	16,00	218.632.940,00	6	Rp24.508.000,00	3	Rp	1	6.670.000,00	-	-	-	-	4,00	6.670.000,00	66,67	27,22	20,00	225.302.940,00	66,67	91,87	
		x	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	%	100,00	79.083.929.361,20	62%	48.748.094.866,00	100%	Rp 16.090.842.744,00	24%	Rp3.886.907.319,00	30,81%	4.897.107.732,00	0,00%	-	0,00%	-	58%	7.784.015.047,00	58%	48,50	58%	53.832.109.913,00	58%	67,69	
		x	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bul an	393,00	77.998.585.884,33	238,00	45.252.608.236,00	14	Rp15.887.070.744,00	3	Rp2.886.907.319,00	3	4.827.907.732,00	-	-	-	-	6,00	7.714.815.047,00	42,86	48,56	244,00	52.967.423.283,00	61,77	67,91	
		x	01	01	2.02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	21,00	772.173.248,69	20,00	348.075.038,00	8	Rp1.20.720.000,00	2	Rp	2	57.340.000,00	-	-	-	-	4,00	57.340.000,00	80,00	47,66	24,00	405.615.088,00	114,29	52,53	
		x	01	01	2.02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	30,00	313.168.228,18	20,00	147.411.342,00	6	Rp42.752.000,00	1	Rp	3	11.660.000,00	-	-	-	-	4,00	11.660.000,00	66,67	27,27	24,00	159.071.342,00	80,00	30,79	
		x	01	01	2.03		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kegasitan Sumber Daya Aparatur**	%	100,00	6.393.724.210,94	43%	1.122.497.960,00	100%	Rp362.188.812,00	4%	Rp	10,65%	59.871.000,00	0,00%	-	0,00%	-	10%	59.871.000,00	1024%	10,68	10%	1.182.368.960,00	10%	18,49	
		x	01	01	2.03	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6,00	442.030.300,00	1,00	79.093.000,00	-	Rp84.000.000,00														1,00	79.063.000,00	16,67	17,89	
		x	01	01	2.03	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berkelanjutan Tugas dan Fungsi Pengelola Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	413,00	1.870.326.023,44	262,00	466.193.831,00	83	Rp23.196.000,00		Rp											262,00	466.193.831,00	63,13	24,92	
		x	01	01	2.03		Pengadaan Teknis Penyelenggara Pemilihan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	413,00	4.081.147.887,80	98,00	577.221.129,00	83	Rp27.792.812,00	6,00	Rp	11,00	59.871.000,00	-	-	-	-	17,00	59.871.000,00	20,48	21,93	113,00	637.092.129,00	27,71	15,61	
		x	01	01	2.04		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	%	98,00	4.823.638.135,46	60%	2.191.913.300,00	98%	Rp1.038.798.300,00	10%	Rp41.916.128,00	11,78%	122.020.631,00	0,00%	-	0,00%	-	47%	163.936.759,00	48%	13,78	47%	2.388.880.089,00	48%	81,96	
		x	01	01	2.04	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	27.500.133,50	2,00	29.317.670,00	1	Rp16.793.730,00	1/4	Rp	1/4	-	-	-	-	-	0,50	-	50,00	-	2,50	29.317.670,00	50,00	107,34	
		x	01	01	2.04	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	330.879.072,53	3,00	241.705.633,00	1	Rp169.292.330,00	1/4	Rp	1/4	19.236.070,00	-	-	-	-	0,50	19.236.070,00	50,00	11,36	3,50	260.941.703,00	70,00	78,91	
		x	01	01	2.04	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00	27.019.918,46	2,00	8.120.860,00	-	Rp													2,00	8.120.860,00	40,00	30,06	
		x	01	01	2.04	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	99.477.974,88	3,00	123.998.850,00	1	Rp72.000.000,00	1/4	Rp	1/4	11.400.000,00	-	-	-	-	-	11.400.000,00	-	15,83	3,00	137.398.850,00	60,00	138,12	
		x	01	01	2.04	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00	317.438.879,79	3,00	180.202.106,00	1	Rp13.321.469,00	1/4	Rp	1/4	9.733.750,00	-	-	-	-	-	9.733.750,00	-	8,61	3,00	189.935.856,00	60,00	59,84	
		x	01	01	2.04	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5,00	270.716.129,94	3,00	77.600.000,00	12	Rp22.680.000,00		Rp	6	9.900.000,00	-	-	-	-	6,00	9.900.000,00	50,00	43,65	9,00	87.500.000,00	180,00	32,32	
		x	01	01	2.04	07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5,00	99.829.623,10	3,00	39.443.500,00	4	Rp76.000.000,00		Rp	1	2.500.000,00	-	-	-	-	1,00	2.500.000,00	25,00	3,29	4,00	42.143.500,00	80,00	70,44	
		x	01	01	2.04	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00	3.400.936.406,25	5,00	1.489.123.179,00	10	Rp568.707.951,00	2,00	Rp1.916.128,00	4	69.230.811,00	-	-	-	-	6,00	111.146.939,00	60,00	19,54	11,00	1.600.270.118,00	220,00	47,05	
		x	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Investasi Kantor**	Persen	98,00	7.249.628.200,00	529%	1.018.088.300,00	98%	Rp 100.800.000,00	0%	Rp -	0%	Rp -	-	Rp -	0,00%	Rp -	0%	-	0%	-	0%	1.018.088.300,00	0%	14,00	
		x	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6,00	4.144.223.437,80	-	-	-	Rp-																	
		x	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6,00	1.381.407.812,50	50,00	328.180.000,00	100	Rp10.000.000,00		Rp											50,00	328.180.000,00	833,33	23,76	
		x	01	01	2.08		**Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	Persen	100,00	676.110.133,56	39%	677.900.294,00	98%	Rp314.350.000,00	29%	Rp 66.000.000,00	20,91%	65.723.696,00	0,00%	-	0,00%	-	186%	131.723.696,00	190%	41,92	186%	809.623.990,00	186%	119,78	
		x	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Layanan	72,00	16.324.590,78	26,00	13.900.294,00	12	Rp26.250.000,00	3	Rp	3	1.723.696,00	-	-	-	-	6,00	1.723.696,00	50,00	6,57	32,00	15.623.990,00	44,44	93,71	
		x	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Layanan	72,00	659.785.542,81	30,00	664.000.000,00	12	Rp288.000.000,00	4	Rp86.000.000,00	3	64.000.000,00	-	-	-	-	7,00	130.000.000,00	58,33	45,14	37,00	794.000.000,00	51,39	120,34	
		x	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	Persen	98,00	2.333.787.106,06	282%	896.201.087,00	98%	Rp430.810.000,00	10%	Rp35.000.000,00	18%	64.798.086,00	0%	-	0%	-	20%	99.798.086,00	20%	23,18	20%	993.999.143,00	20%	39,28	
		x	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6,00	240.447.617,92	3,00	134.938.607,00	1	Rp41.670.000,00	1/4	Rp	1/4	12.850.000,00	-	-	-	-	0,50	12.850.000,00	50,00	30,84	3,50	147.738.607,00	58,33	61,43	
		x	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	42,00	1.613.148.206,89	21,00	380.812.380,00	7	Rp13.220.000,00	1 3/4	Rp35.000.000,00	1 3/4	34.438.086,00	-	-	-	-	3,50	69.438.086,00	50,00	32,87	24,50	650.230.436,00	58,33	40,28	
		x	01	01	2.09	03	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6,00	340.093.440,63	144,00	70.733.000,00	72	Rp44.820.000,00	6,00	Rp	6,00	17.310.000,00	-	-	-	-	12,00	17.310.000,00	16,67	39,07	186,00	88.243.000,00	2.600,00	28,99	
		x	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6,00	340.093.440,63	1,00	109.747.100,00	1	Rp130.800.000,00	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	1,00	109.747.100,00	16,67	32,27	
																							Rata-Rata Capaian Kinerja					43%	0,44		43%	60%	
																							Predikat Kinerja					BR	BR		BR	BR	
2	**Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Kota B. Lampung**	x	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**PERSENTASE LAPORAN HASIL PEMERIKSAN DAN PENGAWASAN OPD**	PERSEN	90,00	26.410.147.290,33	88,23	9.681.608.127,00	83%	Rp2.333.842.083,00	0,89%	Rp	24,38%	899.422.149,00	0,00%	-	0,00%	-	38,61%	899.422.149,00	43%	26%	88,62	10.281.030.276,00	62%	39%	
								PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN	PERSEN	100,00				100%		33,33%			33,33%		0,00%		0,00%		66,67%		67%		0%		-		
								PERSENTASE PERAGIAAN KASUS PENGADUAN	PERSEN	90,00				90%		17,80%			32,47%		0,00%		0,00%		32,47%		36%		0%		-		
		x	01	02	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Laporan Hasil Pemblasan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD**	Persen	90,00	22.328.999.602,83	91%	8.188.699.039,00	85%	Rp1.948.172.804,00	1%	Rp	24,38%	474.288.274,00	0,00%	-	0,00%	-	37%	474.288.274,00	42%	24,33	1,28	8.622.987.303,00	1,42	38,60	
		x	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	90,00	13.603.828.623,00	187,00	4.789.100.704,00	80	Rp96.630.187,00		Rp	27	226.202.803,00	-	-	-	-	27,00	226.202.803,00	33,75	23,90	214,00	5.015.303.207,00	237,78	36,87	
		x	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	80,00	2.122.541.250,00	96,00	830.751.574,00	13	Rp267.999.295,00		Rp	3	92.793.759,00	-	-	-	-	3,00	92.793.759,00	23,08	34,63	99,00	923.547.333,00	123,75	43,52	
							Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	66,00	2.720.765.125,00	32,00	1.138.990.687,00	11	Rp50.251.899,00		Rp	6	41.033.512,00	-	-	-	-	6,00	41.033.512,00	54,55	13,44	38,00	1.200.024.199,00	57,58	44,11	
							Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	24,00	1.330.430.382,81	11,00	341.948.290,00	3	Rp126.199.799,00		Rp	3	74.133.000,00	-	-	-	-	3,00	74.133.000,00	73,00	58,74	14,00	616.081.290,00	58,33	40,26	
							Kerjasama Pengawasan	Jumlah Kerjasabatan Pengawasan yang Dilaksanakan	Kesepakata n	6,00	136.038.256,25	-	-	1	Rp19.798.993,00		Rp																	
							Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	100,00	2.215.898.963,76	7,00	837.907.774,00	3	Rp82.892.844,00	1	Rp	1	40.123.500,00	-	-	-	-	2,00	40.123.500,00	66,67	14,18	9,00	878.031.274,00	9,00	39,63	
		x	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Persen	90,00	4.081.147.687,50	74%	1.822.909.098,00	85%	Rp385.369.249,00	18%	Rp	32,47%	123.133.873,00	0,00%	-	0,00%	-	40%	123.133.873,00	47%	32%	40%	1.648.042.973,00	44%	40,38	
							Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang ditangani	Laporan	120,00	340.093.440,63	22,00	93.542.733,00	3	Rp30.783.873,00		Rp												22,00	93.542.733,00	18,33	28,09	
							Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	60,00	3.741.032.046,88	111,00	1.427.366.365,00	33	Rp354.583.376,00	7,00	Rp	9,00	123.133.873,00	-	-	-	-	16,00	123.133.873,00	43,71	33,29	127,00	1.552.500.240,00	211,67	41,50	
																							Rata-Rata Capaian Kinerja					49%	26%			21%	39%	
																							Predikat Kinerja					BR	BR			BR	BR	
		x	01	03			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI APIP**	PERSEN	88,00	15.590.523.637,50	133,00	5.499.099.309,00	80%	Rp2.107.081.635,00	6,25%	Rp	11,69%	246.310.138,00	0,00%	-	0,00%	-	32,29%	246.310.128,00	40%	12%	33%	5.741.409.347,00	38%	39,49	
		x	01	03			**Pendampingan dan Asistensi APIP**	**Persentase Pendampingan dan Asistensi APIP**	Persen	88,00	15.590.523.637,50	69%	5.499.099.309,00	80%	Rp2.107.081.635,00	6%	Rp	11,69%	246.310.138,00	0,00%	-	0,00%	-	32%	246.310.128,00	40%	12%	33%	5.741.409.347,00	38%	39,49	
		x	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	30,00	936.597.812,50	132,00	483.188.759,00	33	Rp177.624.559,00	6,00	Rp	6,00	33.100.000,00	-	-	-	-	12,00	33.100.000,00	36,36	19,63	144,00	486.288.759,00	480,00	51,92	
							Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	30,00	340.093.440,63	20,00	74.491.000,00	3	Rp48.299.963,00		Rp	2,00	8.470.000,00	-	-	-	-	2,00	8.470.000,00	40,00	17,31	22,00	82.961.000,00	73,33	24,39	
							Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	312,00	13.177.481.729,91	58,00	4.967.419.480,00	6	Rp1.816.448.568,00		Rp	-	186.552.500,00	-	-	-	-	-	186.552.500,00	-	10,27	58,00	5.153.971.950,00	18,59	39,11	
							Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peregahan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peregahan Integritas	Perangkat Daerah	6,00	86.248.234,46	52,00	-	92	Rp64.678.543,00		Rp	17,00	18.187.638,00	-	-	-	-	17,00	18.187.638,00	32,69	28,12	69,00	18.187.638,00	1.150,00	21,09	
																							Rata-Rata Capaian Kinerja					43%	27%			28%	39%	
																							Predikat Kinerja					BR	BR			BR	BR	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan,Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah disusun maka Rancangan Kerja Inspektorat pada Tahun 2025 tercantum dalam 3 program dan 10 kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan usulan anggaran sebesar Rp71.119.250,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Dokumen Perencanaan Inspektorat sebanyak 6 Dokumen .

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan usulan anggaran sebesar Rp20.570.000,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 6 Laporan.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan usulan anggaran sebesar Rp15.887.070.744,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat yang Tersedia untuk 79 pegawai.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD, dengan usulan anggaran sebesar Rp126.542.000,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD untuk 5 Dokumen.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran, dengan usulan anggaran sebesar Rp34.800.000,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 6 Laporan.

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya dengan usulan anggaran sebesar Rp54.000.000,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan pegawai sebanyak 83 pegawai.

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan usulan anggaran sebesar Rp54.805.695,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 83 APIP.

c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan usulan anggaran sebesar Rp463.455.596,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 83 APIP.

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp16.793.730,00 dengan indikator kinerja jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan usulan anggaran sebesar Rp154.695.945,00 dengan indikator

kinerjanya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 Paket.

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan usulan anggaran sebesar Rp23.999.808,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 1 Paket.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan usulan anggaran sebesar Rp90.649.076,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 1 Paket.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan usulan anggaran sebesar Rp22.680.000,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 12 Dokumen.

f. Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan usulan anggaran sebesar Rp37.000.000,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan 4 Laporan.

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan usulan anggaran sebesar Rp357.885.376,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan sebanyak 10 Laporan.

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan sebesar Rp150.000.000,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebanyak 1 Unit/Tahun.

b. Pengadaan Mebel, usulan anggaran sebesar Rp65.000.000,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dengan sebanyak 2 unit.

c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, usulan anggaran sebesar Rp106.235.000,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan sebanyak 6 unit.

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, usulan anggaran sebesar Rp6.250.000,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan 12 Laporan.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, usulan anggaran sebesar Rp288.000.000,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan dengan 12 Laporan.

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan, usulan anggaran sebesar Rp41.670.000,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebanyak 1 Unit/Tahun.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, usulan anggaran sebesar Rp236.570.000,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

sebanyak 7 Unit/Tahun.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, usulan anggaran sebesar Rp58.960.000,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara sebanyak 72 Unit/Tahun.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, usulan anggaran sebesar Rp205.800.000,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 paket.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

2.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan usulan anggaran sebesar Rp710.596.663,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 80 Laporan.
b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan usulan anggaran sebesar Rp273.989.141,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 13 Laporan.
c. Reviu Laporan Kinerja, dengan usulan anggaran sebesar Rp236.058.997,00 dengan indikator kinerjanya Laporan Hasil Reviu Kinerja sebanyak 11 Laporan.
d. Reviu Laporan Keuangan, dengan usulan anggaran sebesar Rp168.362.235,00 dengan indikator kinerjanya Laporan Hasil Reviu Keuangan sebanyak 4 Laporan.

e. Kerjasama Pengawasan Internal, dengan usulan anggaran sebesar Rp9.899.491,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk sebanyak 1 kesepakatan.

f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp222.103.653,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP sebanyak 3 dokumen.

2.2. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah, dengan usulan anggaran sebesar Rp23.421.221,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang ditangani sebanyak 5 Laporan.

b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, dengan usulan anggaran sebesar Rp255.378.814,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu sebanyak 35 Laporan.

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

3.1. Pendampingan dan Asistensi

a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan usulan anggaran sebesar Rp135.654.261,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 10 Perangkat Daerah.

b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan usulan anggaran sebesar Rp36.986.347,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah OPD yang dilakukan Penilaian Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi sebanyak 5 Perangkat Daerah.

c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantaasan Korupsi, dengan usulan anggaran sebesar Rp1.412.869.650,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantaasan Korupsi sebanyak 6 Kegiatan.

d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, dengan usulan anggaran sebesar Rp93.878.149,00 dengan indikator kinerjanya Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas sebanyak 52 Perangkat Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2025 merupakan agenda tahunan Inspektorat Kota Bandar Lampung yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dalam kerangka RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Renja Perubahan ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Inspektorat Kota Bandar Lampung.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kota Bandar Lampung, selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung bagi seluruh jajaran Inspektorat Kota Bandar Lampung dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Inspektorat Kota Bandar Lampung. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA



KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT

KOTA BANDAR LAMPUNG

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	LandasanHukum	√			
	1.3	MaksuddanTujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN				
		Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/ Tahun 2025	√			
		Formulir E.81				
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 2025

Plt. CAMAT TANJUNGKARANG PUSAT

Dra. MARYAMAH, MM
NIP. 19670620 199303 2 005

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	FITRIYANTI, ST, M.Si	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025

Plt. CAMAT TANJUNGKARANG PUSAT

Dra. MARYAMAH, MM
NIP. 19670620 199303 2 005

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	**FITRIYANTI, ST, M.Si**	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	**ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M**	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan ii tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkatdaerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerahserta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, 2025

Plt. CAMAT TANJUNGKARANG PUSAT

Dra. MARYAMAH, MM
NIP. 19670620 199303 2 005

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	**FITRIYANTI, ST, M.Si**	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	**ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M**	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR VERIFIKASI

KATA PENGANTAR..... **i**

DAFTAR ISI..... **ii**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... **1**

1.2 Landasan Hukum..... **4**

1.3 Maksud dan Tujuan..... **6**

1.4 Sistematika Penulisan..... **7**

BAB II EVALUASI PERUBAHAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan (E.81)..... **10**

2.2 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah **11**

BAB III RENCANA DALAM KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Tabel. T-C.3.1..... **20**

BAB IV PENUTUP..... **30**

LAMPIRAN 35
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR / /HK/2025
TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Kecamatan Tanjungkarang Pusat adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Tanjungkarang Pusat yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Tanjungkarang Pusat Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;
b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Tanjungkarang Pusat yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Kecamatan Tanjungkarang Pusat Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusun Renja Kecamatan Tanjungkarang Pusat Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan

Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 108);
10. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
11. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173)
12. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2019 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 tentang APBD tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 10);
31. Peraturan Wali Kota Kota Bandar Lampung Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Bandar Lampung;
32. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 20);
33. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 54).
34. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2025 tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Kecamatan Tanjungkarang Pusat dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Tanjungkarang Pusat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Kecamatan Tanjungkarang Pusat Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota.
2. Sebagai acuan bagi Kecamatan Tanjungkarang Pusat dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025.
3. Sebagai acuan bagi Kecamatan Tanjungkarang Pusat dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Tanjungkarang Pusat Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi :

1.1 Latar belakang.
1.2 Landasan hukum.
1.3 Maksud dan tujuan.
1.4 Sistematika penulisan.

BAB II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

BAB III. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Tanjungkarang Pusat. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan capaian Kinerja. Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, yang dijabarkan dalam 6 Program, 13 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Realisasi Anggaran Belanja Operasi sampai dengan 28 Juni 2025 pada Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp.5.117.248.963,- atau 38,90 % dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp.13.153.768.139,00. Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.25.674.300,- atau 96,11% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sebesar Rp. 26.707.580 sedangkan realisasi kinerja rata-rata mencapai 39,11%. Evaluasi kinerja dan keuangan Renja Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.1.

2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tanjungkarang Pusat, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota Bandar Lampung kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Bandar Lampung;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara

normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

BAB III

RENCANA DALAM KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2025 ini rencana Kerja OPD Kecamatan Tanjungkarang Pusat mengalami perubahan anggaran dari sebelumnya secara keseluruhan pada rencana kerja OPD Kecamatan Tanjungkarang Pusat yang terdiri dari 6 (Enam) Program, 13 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah

b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

d) Penyediaan Bahan Logistik

e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Pengadaan Mebel

b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c) Pemeliharaan Mebel

d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a) Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan pelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

a) Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan :

a) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.
b) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat.
c) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.
d) Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri.

e) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah.
f) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
g) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
h) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya.
i) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup.
j) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4. Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

b) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a) fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional

b) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah

a) fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan

b) fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan

Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung tertuang dalam Tabel 3.1

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Kecamatan Tanjungkarang Pusat selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 bagi seluruh jajaran Kecamatan Tanjungkarang Pusat juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Tanjungkarang Pusat dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT KOTA BANDAR LAMPUNG
TRIWULAN I DAN II TAHUN 2025

Tujuan	Sasaran	Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun n-1 (2025		Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada triwulan I dan II						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran OPDpada Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran Renja OPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2025 (Akhir Periode Pelaksanaan Renja Pada Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2025	
												I		II		III		IV							
					K	Sat	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7 01	KECAMATAN																								
			KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT				75.374.960.603		12.774.960.119		13.110.308.162,00		2.434.987.248,00		2.316.942.580		-		-	40	10.675.320.914		81	30			43
Terwujudnya Tata kelola pemerintah yang efektif efisien akuntabel transparan dan inovatif		7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan	98	%	45.879.944.734,36	98	6.378.058.947	98	7.176.371.786,00	20	1.380.987.248,00	20	1.262.942.580,00		-		-	40	4.532.441.958,00		63	30			43,2
		7 01 01 2 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98		56.201.189,92	98	19.321.849,00	98	17.108.244,00	20		20	6.030.000		-		-	40	11.078.244,00		65	30			43,7
		7 1 1 2 1 1	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	Tahun	1	18.733.729,97	1	6.603.727,00	1	5.292.748,00	0,25		0,3						0,5	5.292.748,00		100	1,5			43,2
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5																					
		7 1 1 2 1 6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	18.733.729,97	1	6.277.782,00	1	6.522.748,00	0,25		0,3	6.030.000					0,5	492.748,00		8	1,5			43,2
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	5																					
		7 1 1 2 1 7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	18.733.729,97	1	6.440.340,00	1	5.292.748,00	0,25		0,3						0,5	5.292.748,00		100	1,5			43,2
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5																					
		7 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib	98	persen	36.346.046.484,04	98	5.131.960.119,00	98	5.879.525.219,00	20	1.172.442.348,00	20	982.617.912		-		-	40	3.724.462.458			30			43,1
		7 01 01 2 02 01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	35.644.089.091,79	49	5.030.810.119,00	49	5.770.525.219,00	49	1.172.442.348,00	49	958.467.912					49	3.699.914.959,00		63	08			43,2

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

TABEL 5.1

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
						KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT									**12.176.960.119,00**	**13.192.975.719,00**	**14.744.429.862,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									**12.176.960.119,00**	**13.192.975.719,00**	**14.744.429.862,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN**									**12.176.960.119,00**	**13.192.975.719,00**	**14.744.429.862,00**	
236	**7**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**6.728.058.947,00**	**7.215.579.366,00**	**7.279.533.909,00**	
	7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**19.321.849,00**	**17.108.244,00**	**17.108.244,00**	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.603.727,00	5.292.748,00	5.292.748,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.277.782,00	6.522.748,00	6.522.748,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.440.340,00	5.292.748,00	5.292.748,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**5.481.560.119,00**	**5.879.523.219,00**	**5.879.523.219,00**	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	5.380.810.119,00	5.770.825.719,00	5.770.825.719,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.750.000,00	108.697.500,00	108.697.500,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**62.363.965,00**	**51.596.682,00**	**50.129.125,00**	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.356.115,00	4.244.090,00	4.244.090,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	19.383.593,00	15.705.477,00	15.705.477,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.624.257,00	10.604.863,00	10.604.863,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	6.042.252,00	4.574.695,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00	0,00	0,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**0,00**	**39.207.580,00**	**26.707.580,00**	
	7	01	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	23.372.080,00	15.372.080,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	6.835.500,00	6.835.500,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	2.07	0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	9.000.000,00	4.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**1.019.270.926,00**	**1.106.400.000,00**	**1.184.322.100,00**	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	38.620.926,00	38.400.000,00	39.521.700,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	980.650.000,00	1.068.000.000,00	1.144.800.400,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**145.542.088,00**	**121.743.641,00**	**121.743.641,00**	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	35.670.000,00	35.670.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	106.692.088,00	82.133.641,00	82.133.641,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara						0,00	0,00	0,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1.830.000,00	3.940.000,00	3.940.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						0,00	0,00	0,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						0,00	0,00	0,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
237	**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.904.031.467,00**	**2.903.541.940,00**	**3.764.541.940,00**	
	7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**33.395.018,00**	**33.116.756,00**	**33.116.756,00**	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	33.395.018,00	33.116.756,00	33.116.756,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**2.870.636.449,00**	**2.870.425.184,00**	**3.731.425.184,00**	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.870.636.449,00	2.870.425.184,00	3.731.425.184,00	Ada Tambahan Utang 287.000.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
238	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**649.495.558,00**	**649.590.040,00**	**609.089.640,00**	
	7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**579.495.558,00**	**646.590.040,00**	**606.089.640,00**	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	579.495.558,00	646.590.040,00	606.089.640,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**1 Keluarga**	**1 Keluarga**	**1 Keluarga**	**1 Keluarga**	**1 Keluarga**	**70.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	7.000.000,00	300.000,00	300.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	7.000.000,00	300.000,00	300.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	7.000.000,00	300.000,00	300.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	7.000.000,00	300.000,00	300.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	7.000.000,00	300.000,00	300.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	7.000.000,00	300.000,00	300.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	7.000.000,00	300.000,00	300.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	7.000.000,00	300.000,00	300.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	7.000.000,00	300.000,00	300.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	7.000.000,00	300.000,00	300.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
239	**7**	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**100Persen**	**100Persen**	**100Persen**	**100Persen**	**100Persen**	**1.893.391.047,00**	**2.422.949.789,00**	**3.089.949.789,00**	
	7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**100 Persern**	**100 Persern**	**100 Persern**	**100 Persern**	**100 Persern**	**1.893.391.047,00**	**2.422.949.789,00**	**3.089.949.789,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.870.394.856,00	2.400.328.348,00	3.067.328.348,00	Ada Tambahan Utang 187.000.000
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.996.191,00	22.621.441,00	22.621.441,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
240	**7**	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**991.550,00**	**657.292,00**	**657.292,00**	
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**991.550,00**	**657.292,00**	**657.292,00**	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	495.775,00	328.646,00	328.646,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	495.775,00	328.646,00	328.646,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
241	**7**	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa** **Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa** **Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100 %** **100 %**	**100 %** **100 %**	**100 %** **100 %**	**100 %** **100 %**	**100 %** **100 %**	**991.550,00**	**657.292,00**	**657.292,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	991.550,00	657.292,00	657.292,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	495.775,00	328.646,00	328.646,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	495.775,00	328.646,00	328.646,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	JUMLAH														12.176.960.119,00	13.192.975.719,00	14.744.429.862,00	

Bandar Lampung, 2025

SEKRETARIS CAMAT TANJUNG KARANG PUSAT

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DEDI SAPUTRA, S.IP, M.IP

NIP. 198611272009021002

RENCANA KERJA PERUBAHAN

KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	**BAB I**	**PENDAHULUAN**	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	**BAB II**	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**	√			
	2.1	Evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan / tahun 2023.				
		Formulir E.81	√			
3	**BAB III**	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022				
4	**BAB IV**	**PENUTUP**	√			

Bandar Lampung, [illegible] 2025

Plt. CAMAT TANJUNG KARANG BARAT

RIANA APRIANA, AP., MM
NIP. 19750427 199311 2 001

Diverifikasi : Juni 2025		**Tanda Tangan**
1.	**FITRI YANTI, S.T.,M.Si**	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayah Bappeda	
2	**Zeldayati Ningsih, S.H., M.M**	
	Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.			Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juni 2025

Plt. CAMAT TANJUNG KARANG BARAT

RIANA APRIANA, AP., MM
NIP. 19750427 199311 2 001

Diverifikasi : Juni 2025		Tanda Tangan
1.	**FITRI YANTI, S.T.,M.Si**	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayah Bappeda	
2	**Zeldayati Ningsih, S.H., M.M**	
	Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi RenjaPerangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, ... 2025

Diverifikasi : Juni 2025		Tanda Tangan
1.	**FITRI YANTI, S.T.,M.Si**	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayah Bappeda	
2	**Zeldayati Ningsih, S.H., M.M**	
	Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP.19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN ..... I – 1

1.1. LATAR BELAKANG ..... I – 1

1.2. LANDASAN HUKUM ..... I – 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ..... I – 6

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ..... I – 6

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN ..... II – 1

2.1. EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN / TAHUN 2024 ..... II – 1

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD ..... II – 2

2.3. ISU-ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD ..... II – 3

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ..... II – 5

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..... III – 1

3.1. RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..... III – 1

BAB IV PENUTUP ..... IV – 1

LAMPIRAN 36
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 2025, TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Tanjung Karang Barat yang mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Tanjung Karang Barat Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;

b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Tanjung Karang Barat yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Karang Barat Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Karang Barat Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 108);
9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
10. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173)
11. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2019 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
22. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024, tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2024, tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Tahun 2025;

29. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
30. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Karang Barat Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Tanjung Karang Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Karang Barat Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Kecamatan Tanjung Karang Barat dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Karang Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

Bab III. Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

II.1. EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN / TAHUN 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Bidang Urusan Kecamatan yang dijabarkan dalam 6 Program, 13 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan. Realisasi Anggaran Belanja pada Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sampai dengan 30 Juni 2024 sebagai berikut, realisasi Belanja Operasi sebesar **Rp. 5,598,962,502.00** atau **44.88%** dari anggaran dana yang tersedia dalam DPA sebesar **Rp 12,476,207,365.00.** Sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar **Rp. 53,050,000.00** atau **100,00 %** dari anggaran dana yang tersedia dalam DPA yaitu sebesar **Rp. 53,050,000.00.** Sedangkan realisasi kinerja rata-rata **Rp. 5,652,012,502.00** atau **45.11%** dari anggaran dana yang tersedia dalam DPA yaitu sebesar **Rp. 12,529,257,365.00.**

Evaluasi kinerja dan keuangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sampai dengan triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel. 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG

RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT KOTA BANDAR LAMPUNG

PERIODE PELAKSANAAN s.d. TRIWULAN II TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja .....[7] Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. .....

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
Unsur Kewilayahan																																	
Kecamatan										**98,00**	**91.758.589.121,96**		**38.600.191.656,00**	**98,00**	**12.529.257.365,00**	**0,93**	**2.588.815.989,00**	**1,18**	**3.063.196.513**	-	-	-	-	**2,12**	**5.652.012.502**	**2,15**	**24,39**	**23,78**	**44.252.204.158**	**23,99**	**29,33**		
Kecamatan Tanjung Karang Barat										**98,00**	**91.758.589.121,96**		**38.600.191.656,00**	**98,00**	**12.529.257.365,00**	**0,93**	**2.588.815.989,00**	**1,18**	**3.063.196.513**	-	-	-	-	**2,12**	**5.652.012.502**	**2,15**	**24,39**	**23,78**	**44.252.204.158**	**23,99**	**29,33**		
1	**Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan**							**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Persen**	**98,00**				**98,00**																		**Kec. TKB**	**B.Lampung**
		7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98,00**	**43.418.649.568,00**	**50,00**	**18.994.321.956,00**	**98,00**	**6.744.754.131,00**	**4,35**	**1.595.315.989,00**	**5,85**	**1.546.946.513**	**0,00**	-	**0,00**	-	**10,21**	**3.142.262.502**	**10,42**	**46,59**	**60,21**	**22.136.584.458**	**61,44**	**50,98**	**Kec. TKB**	**B.Lampung**
		7	**01**	**01**	**2**	**02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98,00**	**36.387.330.275,50**	50	**16.308.141.572,00**	**98,00**	**5.676.897.335,00**	**25,13**	**1.462.865.469,00**	**25,13**	**1.171.061.229**	**0,00**	-	**0,00**	-	**50,25**	**2.633.926.698**	**51,28**	**46,40**	**100,25**	**18.942.068.270**	**102,30**	**52,06**	**Kec. TKB**	**B.Lampung**
		7	01	01	2	02	0001	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	50	35.646.540.616,00	50	15.965.919.572,00	50	5.584.452.942,00	50	1.462.865.469,00	50	1.149.301.229	0	-	0	-	50,00	2.612.166.698	100,00	46,78	50,00	18.578.086.270	100,00	52,12	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	72																							
		7	01	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Dokumen	5	740.789.659,50	2	342.222.000,00	1	92.444.393,00	0,25	-	0,25	21.760.000	0,00	-	0,00	-	0,50	21.760.000	50,00	23,54	2,50	363.982.000	50,00	49,13	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	72																							
		7	**01**	**01**	**2**	**01**	**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**%**	**98,00**	**154.717.675,00**	**20**	**18.646.798,00**	**98,00**	**4.978.314,00**	**0,25**	-	**0,25**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,50**	-	**0,51**	**0,00**	**20,50**	**18.646.798**	**20,92**	**12,05**	**Kec. TKB**	**B.Lampung**
		7	01	01	2	01	0001	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Dokumen	7	55.256.312,50	2	6.429.066,00	1	1.659.438,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	50,00	0,00	2,50	6.429.066	35,71	11,63	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	72																							
		7	01	01	2	01	0006	Kooedinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Laporan	5	55.256.312,50	2	5.978.066,00	1	1.659.438,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	50,00	0,00	2,50	5.978.066	50,00	10,82	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	bulan	72																							
		7	01	01	2	01	0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	44.205.050,00	2	6.239.666,00	1	1.659.438,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	50,00	0,00	2,50	6.239.666	50,00	14,12	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	72																							
		7	**01**	**01**	**2**	**06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98,00**	**382.797.207,04**	**20**	**222.050.377,00**	**98,00**	**28.715.322,00**	**0,25**	-	**0,25**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,50**	-	**0,51**	**0,00**	**20,50**	**222.050.377**	**20,92**	**58,01**	**Kec. TKB**	**B.Lampung**
		7	01	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	5	20.030.544,93	2	19.924.050,00	1	3.054.989,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	50,00	0,00	2,50	19.924.050	50,00	99,47	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan	72																							
		7	01	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	5	110.329.641,59	2	86.809.682,00	1	15.015.025,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	50,00	0,00	2,50	86.809.682	50,00	78,68	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan	72																							
		7	01	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	5	47.073.317,81	2	48.124.345,00	1	7.189.513,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	50,00	0,00	2,50	48.124.345	50,00	102,23	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	bulan	72																							
		7	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Paket	5	122.355.585,94	2	51.090.000,00	1	-	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	50,00	0,00	2,50	51.090.000	50,00	41,76	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan	72																							
		7	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	5	27.751.804,28	2	16.102.300,00	1	3.455.795,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	50,00	0,00	2,50	16.102.300	50,00	58,02	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bulan	72																							
		7	01	01	2	06	0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Paket	5	55.256.312,50	2	-	1	-	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	50,00	0,00	2,50	-	50,00	0,00	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	72																							
		7	**01**	**01**	**2**	**07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98,00**	**138.140.781,25**		-	**98,00**	**53.050.000,00**	**0,00**	-	**9,00**	**53.050.000**	**0,00**	-	**0,00**	-	**9,00**	**53.050.000**	**9,18**	**100,00**	**9,00**	**53.050.000**	**9,18**	**38,40**	**Kec. TKB**	**B.Lampung**
		7	01	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Unit	6	41.442.234,38		-	16	39.450.000,00	0	-	16	39.450.000	0	-	0	-	16,00	39.450.000	100,00	100,00	16,00	39.450.000	266,67	95,19	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	bulan	72																							
		7	01	01	2	07	0006	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit	2	55.256.312,50		-	2	13.600.000,00	0	-	2	13.600.000,00	0	-	0	-	2,00	13.600.000	100,00	0,00	2,00	13.600.000	100,00	24,61	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	bulan	72																							
		7	01	01	2	07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit	10	41.442.234,38		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	bulan	72																							
		7	**01**	**01**	**2**	**08**	**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98,00**	**4.819.469.075,94**	**20**	**1.895.823.893,00**	**98,00**	**777.750.000,00**	**0,25**	**131.040.520,00**	**0,25**	**289.912.500**	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,50**	**420.953.020**	**0,51**	**54,12**	**20,50**	**2.316.776.913**	**20,92**	**48,07**	**Kec. TKB**	**B.Lampung**
		7	01	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Laporan	5	279.839.328,13	2	62.102.893,00	1	32.000.000,00	0,25	2.570.520,00	0,25	-	0	-	0	-	0,50	2.570.520	50,00	8,03	2,50	64.673.413	50,00	23,11	Kec. TKB	B.Lampung

Indikator dan target kinerja .....[*] Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. .....

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				(7)	
										K	RUPIAH
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)		
Unsur Kewilayahan											
Kecamatan										**98,00**	**91.758.589.121,96**
Kecamatan Tanjung Karang Barat										**98,00**	**91.758.589.121,96**
1	**Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan**							**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Persen**	**98,00**	
		7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98,00**	**43.418.649.568,00**
		7	**01**	**01**	**2**	**02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98,00**	**36.387.330.275,50**
		7	01	01	2	02	0001 Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	50	35.646.540.616,00
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	72	
		7	01	01	2	02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Dokumen	5	740.789.659,50
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	72	
		7	**01**	**01**	**2**	**01**	**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**%**	**98,00**	**154.717.675,00**
		7	01	01	2	01	0001 Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Dokumen	7	55.256.312,50
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	72	
		7	01	01	2	01	0006 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Laporan	5	55.256.312,50
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	bulan	72	
		7	01	01	2	01	0007 Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	44.205.050,00
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	72	
		7	**01**	**01**	**2**	**06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98,00**	**382.797.207,04**
		7	01	01	2	06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	5	20.030.544,93
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan	72	
		7	01	01	2	06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	5	110.329.641,59
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan	72	
		7	01	01	2	06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	5	47.073.317,81
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	bulan	72	
		7	01	01	2	06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Paket	5	122.355.585,94
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan	72	
		7	01	01	2	06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	5	27.751.804,28
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bulan	72	
		7	01	01	2	06	0006 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Paket	5	55.256.312,50
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	72	
		7	**01**	**01**	**2**	**07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98,00**	**138.140.781,25**
		7	01	01	2	07	0005 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Unit	6	41.442.234,38
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	bulan	72	
		7	01	01	2	07	0006 Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit	2	55.256.312,50
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	bulan	72	
		7	01	01	2	07	0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit	10	41.442.234,38
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	bulan	72	
		7	**01**	**01**	**2**	**08**	**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98,00**	**4.819.469.075,94**
		7	01	01	2	08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Laporan	5	279.839.328,13

NO.	SASARAN	KODE REKENING						PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
											K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	72																									
		7	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Laporan	5	4.539.629.747,81	2	1.833.721.000,00	1	745.750.000,00	0,25	128.470.000,00	0,25	289.912.500	0	-	0	-	0,50	418.382.500	50,00	56,10	2,50	2.252.103.500	50,00	49,61	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	bulan	72																									
		7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98,00**	**1.536.194.553,27**	**20**	**549.659.316,00**	**98,00**	**203.363.160,00**	**0,25**	**1.410.000,00**	**0,25**	**32.922.784**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,50**	**34.332.784**	**0,51**	**16,88**	**20,50**	**583.992.100**	**20,92**	**38,02**	**Kec. TKB**	**B.Lampung**
		7	01	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1	231.869.303,83	2	93.775.400,00	1	42.448.692,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	50,00	0,00	2,50	93.775.400	250,00	40,44	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	bulan	72																											
		7	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	7	673.519.602,45	2	179.519.730,00	1	71.048.692,00	0,25	-	0,25	13.892.784	0	-	0	-	0,50	13.092.784	50,00	19,55	2,50	193.412.514	35,71	28,72	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	bulan	72																											
		7	01	01	2	09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Unit	10	6.801.912,81	2	3.500.000,00	1	1.000.000,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	50,00	0,00	2,50	3.500.000	25,00	51,46	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Mebel yang Dipelihara	bulan	72																									
		7	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Unit	2	34.009.564,06	2	18.000.000,00	1	5.640.000,00	0,25	1.410.000,00	0,25	-	0	-	0	-	0,50	1.410.000	50,00	25,00	2,50	19.410.000	125,00	57,07	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	bulan	72																									
		7	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit	1	414.912.934,32	2	235.712.020,00	1	68.955.776,00	0,25	-	0,25	19.030.000	0	-	0	-	0,50	19.030.000	50,00	27,60	2,50	254.742.020	250,00	61,40	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan	72																											
		7	01	01	2	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Unit	7	175.081.235,79	2	19.152.166,00	1	14.270.000,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	50,00	0,00	2,50	19.152.166	35,71	10,94	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan	72																											
																									Rata-Rata Capaian Kinerja		**54,55**	**16,14**			**86,22**	**48,63**		
																									Predikat Kinerja		**T**	**R**			**T**	**SR**		
		7	**01**	**05**				**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100,00**	**290.095.640,63**	**20**	**5.396.850,00**	**100,00**	**2.688.260,00**	**0,25**	**-**	**0,25**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,50**	**-**	**0,50**	**0,00**	**20,50**	**5.396.850**	**20,50**	**1,86**	**Kec. TKB**	**B.Lampung**
		7	**01**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**290.095.640,63**	**20**	**5.396.850,00**	**100,00**	**2.688.260,00**	**0,25**	**-**	**0,25**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,50**	**-**	**0,50**	**0,00**	**20,50**	**5.396.850**	**20,50**	**1,86**	**Kec. TKB**	**B.Lampung**
		7	01	05	2	01	0002	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Orang	100	124.326.703,13	20,5	-	100	1.644.130,00	0,25	-	0,25	-	0,00	-	0,00	-	0,50	-	0,50	0,00	21,00	-	21,00	0,00	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	bulan	72																									
		7	01	05	2	01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh bahinsa dan bhabinkamtibmas	dokumen	5	165.768.937,50	2	5.396.850,00	1	1.044.130,00	0,25	-	0,25	-	0,00	-	0,00	-	0,50	-	0,50	0,00	2,00	5.396.850	40,00	3,26	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	bulan	72																											
																									Rata-Rata Capaian Kinerja		**0,50**	**0,00**			**30,50**	**1,63**		
																									Predikat Kinerja		**R**	**SR**			**SR**	**SR**		
		7	**01**	**06**				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**%**	**100,00**	**290.095.640,63**		**-**	**100,00**	**2.088.260,00**	**0,25**	**-**	**0,25**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,50**	**-**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**-**	**0,50**	**0,00**	**Kec. TKB**	**B.Lampung**
		7	**01**	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100,00**	**290.095.640,63**		**-**	**100,00**	**2.088.260,00**	**0,25**	**-**	**0,25**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,50**	**-**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**-**	**0,50**	**0,00**	**Kec. TKB**	**B.Lampung**
		7	01	06	2	01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	5	165.768.937,50		-	1	1.044.130,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	50,00	0,00	0,50	-	10,00	0,00	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	72																											
		7	01	06	2	01	0009	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	5	124.326.703,13		-	1	1.044.130,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50		50,00	0,00	0,50	-	10,00	0,00	Kec. TKB	B.Lampung
									Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	72																											
																									Rata-Rata Capaian Kinerja		**50,00**	**0,00**			**10,00**	**0,00**		
																									Predikat Kinerja		**T**	**SR**			**SR**	**SR**		
2	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta Toleransi umat beragama**								**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100,00**				**100,00**										**90,00**		**90,00**		**90,00**		**90,00**			
		7	**01**	**02**				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100,00**	**22.292.424.416,30**	**20,00**	**10.928.260.550,00**	**100,00**	**2.713.682.462,00**	**0,25**	**535.500.000,00**	**0,25**	**829.250.000**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,50**	**1.364.750.000**	**0,50**	**50,29**	**20,50**	**12.293.010.550,00**	**20,50**	**55,14**	**Kec. TKB**	**B.Lampung**
		7	**01**	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat**	**%**	**100,00**	**272.076.512,50**	**20,00**	**56.091.775,00**	**100,00**	**34.591.231,00**	**0,25**	**-**	**0,25**	**33.000.000**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,50**	**33.000.000**	**0,50**	**95,40**	**20,50**	**89.091.775,00**	**20,50**	**32,75**	**Kec. TKB**	**B.Lampung**
		7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	5	272.076.512,50	2	56.091.775,00	1	34.591.231,00	0,25	-	0,25	33.000.000	0	-	0	-	0,50	33.000.000	50,00	95,40	2,50	89.091.775,00	50,00	32,75	Kec. TKB	B.Lampung

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				(7)	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	K	RUPIAH
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	72	
		7	01	01	2	08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Laporan	5	4.539.629.747,81
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	bulan	72	
		7	**01**	**01**	**2**	**09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98,00**	**1.536.194.553,27**
		7	01	01	2	09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1	231.869.303,83
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	bulan	72	
		7	01	01	2	09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	7	673.519.602,45
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	bulan	72	
		7	01	01	2	09	0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Unit	10	6.801.912,81
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	bulan	72	
		7	01	01	2	09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Unit	2	34.009.564,06
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	bulan	72	
		7	01	01	2	09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit	1	414.912.934,32
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan	72	
		7	01	01	2	09	0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Unit	7	175.081.235,79
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan	72	
		7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100,00**	**290.095.640,63**
		7	**01**	**05**	**2**	**01**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**290.095.640,63**
		7	01	05	2	01	0002 Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Orang	100	124.326.703,13
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	bulan	72	
		7	01	05	2	01	0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	dokumen	5	165.768.937,50
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	bulan	72	
		7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**%**	**100,00**	**290.095.640,63**
		7	**01**	**06**	**2**	**01**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100,00**	**290.095.640,63**
		7	01	06	2	01	0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	5	165.768.937,50
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	72	
		7	01	06	2	01	0009 Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	5	124.326.703,13
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	72	
2	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta Toleransi umat beragama**							**Tingkat capaian penyelengggaraan pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100,00**	
		7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100,00**	**22.292.424.416,30**
		7	**01**	**02**	**2**	**01**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat**	**%**	**100,00**	**272.076.512,50**
		7	01	02	2	01	01 Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	5	272.076.512,50

NO.	SASARAN	KODE REKENING						PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
											K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
									Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	72																									
7	01	02	2	02			**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**22.020.347.903,80**	**20,00**	**10.872.168.775,00**	**100,00**	**2.679.091.231,00**	**0,25**	**535.500.000,00**	**0,25**	**796.250.000**	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,50**	**1.331.750.000**	**0,50**	**49,71**	**20,50**	**12.203.918.775,00**	**20,50**	**55,42**	**Kec. TKB**	**B.Lampung**
7	01	02	2	02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	5	22.020.347.903,80	2	10.872.168.775,00	1	2.679.091.231,00	0,25	535.500.000,00	0,25	796.250.000	0	-	0	-	0,50	1.331.750.000	50,00	49,71	2,50	12.203.918.775,00	50,00	55,42	Kec. TKB	B.Lampung
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	72																									
																									Rata-Rata Capaian Kinerja		**50,00**	**72,55**			**50,00**	**44,08**		
																									Predikat Kinerja		**ST**	**ST**			**R**	**SR**		
7	**01**	**03**					**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**100,00**	**9.824.386.687,50**	**20,00**	**1.375.043.525,00**	**100,00**	**751.091.231,00**	**0,25**	-	**0,25**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,50**	-	**0,50**	**0,00**	**20,50**	**1.375.043.525,00**	**20,50**	**14,00**	**Kec. TKB**	**B.Lampung**
7	**01**	**03**	**2**	**01**			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**100,00**	**9.522.677.937,50**	**20,00**	**1.375.043.525,00**	**100,00**	**744.091.231,00**	**0,25**	-	**0,25**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,50**	-	**0,50**	**0,00**	**20,50**	**1.375.043.525,00**	**20,50**	**14,44**	**Kec. TKB**	**B.Lampung**
7	01	03	2	01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	5	9.522.677.937,50	2	1.375.043.525,00	1	744.091.231,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	50,00	0,00	2,50	1.375.043.525,00	50,00	14,44	Kec. TKB	B.Lampung
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	72																									
							Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Presentase pemberdayaan kelurahan**																									
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun																									
7	**01**	**03**	**2**	**06**			**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan keluraban**	**%**	**100,00**	**301.708.750,00**		-	**100,00**	**7.000.000,00**	**0,25**	-	**0,25**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,50**	-	**0,50**	**0,00**	**0,50**	-	**0,50**	**0,00**	**Kec. TKB**	**B.Lampung**
7	01	03	2	06	01		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	1750	30.170.875,00		-	1750	700.000,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	0,03	0,00	0,50	-	0,03	0,00	Kec. TKB	B.Lampung
7	01	03	2	06	02		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	1750	30.170.875,00		-	1750	700.000,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	0,03	0,00	0,50	-	0,03	0,00	Kec. TKB	B.Lampung
7	01	03	2	06	03		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	1750	30.170.875,00		-	1750	700.000,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	0,03	0,00	0,50	-	0,03	0,00	Kec. TKB	B.Lampung
7	01	03	2	06	04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	1750	30.170.875,00		-	1750	700.000,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	0,03	0,00	0,50	-	0,03	0,00	Kec. TKB	B.Lampung
7	01	03	2	06	05		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	1750	30.170.875,00		-	1750	700.000,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	0,03	0,00	0,50	-	0,03	0,00	Kec. TKB	B.Lampung
7	01	03	2	06	06		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	1750	30.170.875,00		-	1750	700.000,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	0,03	0,00	0,50	-	0,03	0,00	Kec. TKB	B.Lampung
7	01	03	2	06	07		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	1750	30.170.875,00		-	1750	700.000,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	0,03	0,00	0,50	-	0,03	0,00	Kec. TKB	B.Lampung
7	01	03	2	06	08		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	1750	30.170.875,00		-	1750	700.000,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	0,03	0,00	0,50	-	0,03	0,00	Kec. TKB	B.Lampung
7	01	03	2	06	09		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	1750	30.170.875,00		-	1750	700.000,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	0,03	0,00	0,50	-	0,03	0,00	Kec. TKB	B.Lampung
7	01	03	2	06	12		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	1750	30.170.875,00		-	1750	700.000,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	0,03	0,00	0,50	-	0,03	0,00	Kec. TKB	B.Lampung
																									Rata-Rata Capaian Kinerja		**4,57**	**0,00**			**4,57**	**1,31**		
																									Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				(7)	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	K	RUPIAH
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	72	
		7	**01**	**02**	**2**	**02**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**22.020.347.903,80**
		7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	5	22.020.347.903,80
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	72	
		7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**100,00**	**9.824.386.687,50**
		7	**01**	**03**	**2**	**01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**100,00**	**9.522.677.937,50**
		7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	5	9.522.677.937,50
									Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	72	
							Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Presentase pemberdayaan kelurahan**			
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun			
		7	**01**	**03**	**2**	**06**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100,00**	**301.708.750,00**
		7	01	03	2	06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	1750	30.170.875,00
		7	01	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	1750	30.170.875,00
		7	01	03	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	1750	30.170.875,00
		7	01	03	2	06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	1750	30.170.875,00
		7	01	03	2	06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	1750	30.170.875,00
		7	01	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	1750	30.170.875,00
		7	01	03	2	06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	1750	30.170.875,00
		7	01	03	2	06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	1750	30.170.875,00
		7	01	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	1750	30.170.875,00
		7	01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	1750	30.170.875,00

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
		7	01	04			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan pencegahan tindak kriminal**	**%**	**100,00**	**15.642.937.168,91**	**20,00**	**7.297.168.775,00**	**100,00**	**2.314.953.021,00**	**0,25**	**458.000.000,00**	**0,25**	**687.000.000**	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,50**	**1.145.000.000**	**0,50**	**49,46**	**20,50**	**8.442.168.775,00**	**20,50**	**53,97**	**Kec. TKB**	**B.Lampung**
		7	01	04	2	01		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100,00**	**15.642.937.168,91**	**20,00**	**7.297.168.775,00**	**100,00**	**2.314.953.021,00**	**0,25**	**458.000.000,00**	**0,25**	**687.000.000**	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,50**	**1.145.000.000**	**0,50**	**49,46**	**20,50**	**8.442.168.775,00**	**20,50**	**53,97**	**Kec. TKB**	**B.Lampung**
		7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	5	15.511.762.168,91	2	7.240.318.775,00	1	2.291.408.891,00	0,25	458.000.000,00	0,25	687.000.000	0	-	0	-	0,50	1.145.000.000	50,00	49,97	2,50	8.385.318.775,00	50,00	54,06	Kec. TKB	B.Lampung
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	72																									
		7	01	04	2	01	01	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	5	131.175.000,00	2	56.850.000,00	1	23.544.130,00	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,50	-	50,00	0,00	2,50	56.850.000,00	50,00	43,34	Kec. TKB	B.Lampung
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	72																									
																								Rata-Rata Capaian Kinerja		**50,00**	**0,00**			**50,00**	**43,34**		
																								Predikat Kinerja		**ST**	**ST**			**R**	**SR**		
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM			**91.758.589.121,96**				**12.529.257.365**		**2.588.815.989**		**3.063.196.513**		-		-		**5.652.012.502**				**44.252.204.158**				
								TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		**2,15**	**24,39**			**23,99**	**29,33**		
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		**ST**	**R**			**ST**	**SR**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

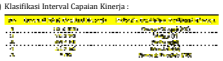
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

Catatan :

*) Nama OPD

**) Klasifikasi Interval Capaian Kinerja :



Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Bandar Lampung, Juni 2025

Plt. CAMAT TANJUNGKARANG BARAT

KOTA BANDAR LAMPUNG

RIANA APRIANA, AP., M.M.

NIP. 19750427 199311 2 001

NO.	SASARAN	KODE REKENING						PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					(7)	
											K	RUPIAH
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)		
		7	**01**	**04**				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan pencegahan tindak krimimal**	**%**	**100,00**	**15.642.937.168,91**
		7	**01**	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketenstraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100,00**	**15.642.937.168,91**
		7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	5	15.511.762.168,91
									Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	72	
		7	01	04	2	01	01	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	5	131.175.000,00
									Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	72	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												**91.758.589.121,96**
TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

Catatan :

*) Nama OPD

**) Klasifikasi Interval Capaian Kinerja :



Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tanjung Karang Barat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tanjung Karang Barat dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

1. Meningkat nya pelayanan administrasi perkantoran,
2. Meningkat nya sarana dan prasarana aparatur,
3. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan,
4. Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah,
5. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kelurahan,
6. Meningkatnya sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah,
7. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah.

Kecamatan Tanjung Karang Barat memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Kinerja Pelayanan di bidang Ketentraman dan Ketertiban.
   a). Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat kelurahan atau lingkungan sampai pada tingkat RT,
   b). Mengadakan pembinaan kepada pemerintah Kelurahan,
   c). Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas seatap dan para staf kelurahan.
2. Kinerja Pelayanan di bidang Pemerintahan.
   a). Mengadakan sosialisasi dan monitoring pembayaran PBB,
   b). Pembinaan secara rutin ke kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
3. PelayananUmum.
   a). Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan,

b). Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Sukabumi,

c). Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat Kelurahan secara rutin.

4. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan.

a). Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumberdana lainnya),

b). Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi,

c). Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan.

5. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakatan

a). Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu,

b). Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera,

c). Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin),

d). Monitoring penyaluran Jamkesda,

e). Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga– lembaga keagamaan,

f). Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah,

g). Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan,

h). Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

II.3. ISU-ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tanjung Karang Barat, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Wali Kota Bandar Lampung kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Wali Kota

kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Bandar Lampung;

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normative harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika nativitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

II.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Karang Barat Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Tanjung Karang Barat dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Tanjung Karang Barat pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Wali Kota dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan urusan kewilayahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan inovatif**

   Sasaran :

   a. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan;
   b. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Umat Beragama.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2025 ini rencana Kerja OPD Kecamatan Tanjung Karang Barat mengalami perubahan anggaran dari sebelumnya secara keseluruhan pada rencana kerja OPD Kecamatan Tanjung Karang Barat yang terdiri 6 Program, 13 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Adapun rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan meliputi

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

1. **Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**
   a. Sub. Kegiatan Penyusunan dokumen perangkat daerah,
   b. Sub. Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd,
   c. Sub. Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah.
2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**
   a. Sub. Kegiatan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN,
   b. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
2. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.**
   a. Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
   b. Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
   c. Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,
   d. Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor,
   e. Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,
   f. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
3. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**
   a. Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel,

b. Sub. Kegiatan Peralatan dan Mesin

4. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**
   a. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
   b. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
5. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**
   a. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,
   b. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
   c. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebel,
   d. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
   e. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,
   f. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik,

1. **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.**
   a. Sub. Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
2. **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.**
   a. Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan,

1. **Kegiatan Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa.**

a. Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

a. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat;
c. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga;
d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;
e. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
f. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
g. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
h. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
i. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;
j. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum,

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

a. Sub. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.
b. Sub. Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

a. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan,
b. Sub. Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

a. Sub. Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di Kelurahan,
b. Sub. Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Kelurahan.

Dengan terbitnya peraturan baru yaitu Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025, tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru, selanjutnya rencana kerja Tanjung Karang Barat juga mengalami Perubahan. Format Perubahan untuk Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung yang telah disesuaikan dengan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025, tertuang dalam Tabel 3.1.

TABEL 3.1

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT KOTA BANDAR LAMPUNG

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				NASIONAL	DAERAH	
					KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT									**11.856.174.142,00**	**12.615.602.942,00**	**14.166.337.365,00**						
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.482.819.752,00**	**6.752.825.628,00**	**6.945.834.131,00**		**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.771.523,00**	**4.978.314,00**	**4.978.314,00**		**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.923.841,00	1.659.438,00	1.659.438,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.923.841,00	1.659.438,00	1.659.438,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.923.841,00	1.659.438,00	1.659.438,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.537.768.452,00**	**5.676.897.335,00**	**5.676.897.335,00**		**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	50	50	50	5.447.524.142,00	5.584.452.942,00	5.584.452.942,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	90.244.310,00	92.444.393,00	92.444.393,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**50.229.212,00**	**49.340.322,00**	**28.715.322,00**		**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.202.880,00	3.054.989,00	3.054.989,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.385.209,00	15.015.025,00	15.015.025,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.523.739,00	7.189.513,00	7.189.513,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.375.000,00	10.375.000,00	-		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.492.384,00	3.455.795,00	3.455.795,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	10.250.000,00	10.250.000,00	-		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat

7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**11.547.753,00**	**11.538.000,00**	**106.100.000,00**		**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	11.547.753,00	6.538.000,00	78.900.000,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1		5.000.000,00	27.200.000,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	-	-	-	-	-		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**674.050.000,00**	**812.200.000,00**	**906.750.000,00**		**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	32.500.000,00	34.500.000,00	32.000.000,00	319750000	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	641.550.000,00	777.700.000,00	874.750.000,00	555.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**203.452.812,00**	**197.871.657,00**	**222.393.160,00**		**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	40.798.692,00	42.448.692,00	42.448.692,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	7	7	7	79.438.692,00	71.048.692,00	71.048.692,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	10	10	10	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	2	2	2	5.500.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	45.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	62.145.428,00	63.464.273,00	87.985.776,00	42.985.776,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	Unit	7	7	7	14.570.000,00	14.270.000,00	14.270.000,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.715.666.247,00**	**2.713.682.462,00**	**3.515.182.462,00**		**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**35.637.095,00**	**34.591.231,00**	**34.591.231,00**		**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Barat**

7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	35.637.095,00	34.591.231,00	34.591.231,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.680.029.152,00**	**2.679.091.231,00**	**3.480.591.231,00**		**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.680.029.152,00	2.679.091.231,00	3.480.591.231,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**835.137.095,00**	**829.365.311,00**	**751.091.231,00**		**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**%**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**802.137.095,00**	**807.091.231,00**	**744.091.231,00**		**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	802.137.095,00	807.091.231,00	744.091.231,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**33.000.000,00**	**22.274.080,00**	**7.000.000,00**		**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	3.300.000,00	2.227.408,00	700.000,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	3.300.000,00	2.227.408,00	700.000,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	3.300.000,00	2.227.408,00	700.000,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	3.300.000,00	2.227.408,00	700.000,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat

7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	3.300.000,00	2.227.408,00	700.000,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	3.300.000,00	2.227.408,00	700.000,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	3.300.000,00	2.227.408,00	700.000,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	3.300.000,00	2.227.408,00	700.000,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	3.300.000,00	2.227.408,00	700.000,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	3.300.000,00	2.227.408,00	700.000,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak krimimal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak krimimal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.812.858.304,00**	**2.314.953.021,00**	**2.949.453.021,00**		**Bandar Lampung**	**APBD**	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.812.858.304,00**	**2.314.953.021,00**	**2.949.453.021,00**		**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.789.029.152,00	2.291.408.891,00	2.925.908.891,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	23.829.152,00	23.544.130,00	23.544.130,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat

7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.096.372,00**	**2.688.260,00**	**2.688.260,00**		**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.096.372,00**	**2.688.260,00**	**2.688.260,00**		**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.798.186,00	1.644.130,00	1.644.130,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	2.298.186,00	1.044.130,00	1.044.130,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**4.596.372,00**	**2.088.260,00**	**2.088.260,00**		**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**4.596.372,00**	**2.088.260,00**	**2.088.260,00**		**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.298.186,00	1.044.130,00	1.044.130,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.298.186,00	1.044.130,00	1.044.130,00		Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Tanjung Karang Barat

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*)sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Karang Barat selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Kecamatan Tanjung Karang Barat juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Tanjung Karang Barat dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

PERUBAHAN RENCANA KERJA

KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR

TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN ..... I – 1
1.1. Latar Belakang ..... I – 1
1.2. Landasan Hukum ..... I – 2
1.3. Maksud dan Tujuan ..... I – 7
1.4. Sistematika Penulisan ..... I – 7

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN..... II – 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan. II – 1
E-81 .....

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... III – 1

BAB IV PENUTUP ..... IV – 1

LAMPIRAN 37
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Karang Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Tanjung Karang Timur yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar

pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Tanjung Karang Timur Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;
b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Tanjung Karang Timur yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Karang Timur Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Karang Timur Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 108);
10. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
11. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173)
12. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2019 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);

24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 tentang APBD tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);
31. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 20);

32. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 47).

I.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Karang Timur Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Tanjung Karang Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Karang Timur Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Kecamatan Tanjung Karang Timur dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Karang Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang
I.2 Landasan Hukum
I.3 Maksud dan Tujuan
I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Karang Timur. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan capaian Kinerja. Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, yang dijabarkan dalam 6 Program, 13 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sampai dengan 31 Juni 2025 pada Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 1.095.523.542,- atau 47.57 % dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp 4.462.393.542 Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.045.463.362,- atau 39.35 % dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sebesar Rp. 5.481.688.294,- sedangkan realisasi kinerja rata-rata mencapai 40,82%. Evaluasi kinerja dan keuangan Renja Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung sampai dengan triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.1.

II.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tanjung Karang Timur, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota Bandar Lampung kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Bandar Lampung;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam

rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Formulir E. 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG
PERIODE PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:
1. Kecamatan Tanjungkarang Timur

NO.	SASARAN	KODE REKENING: URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2025 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)	(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN			K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN	
unsur kewilayahan																															
kecamatan																															
Kecamatan tanjung karang timur																															
x	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan							Indeks kepuasan masyarakat	persen	98,00	76.293.415.250,90		8.674.782.469,00	98,00	10.235.318.242,00	20,00	1.978.981.004,00		1.849.218.750,00		-		-	20	3.828.199.754,00	20,41		20,00	12.355.174.121,00	20,41		Kecamtan tanjung karang timur
xx		7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan	persen	98,00	33.585.901.393,45	25,00	4.186.649.367,00	98,00	5.722.419.107,00	20	1.186.981.004,00	-	265.218.750,00		-	-	-	20	1.452.199.754,00	20,41	25,38	45,00	5.638.849.121,00	45,92	16,79	kecamatan tanjungkarang timur
xxx		7	01	01	2	01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	98,00	208.073.170,35	25,00	4.245.000	98,00	5.836.607	20	-		-		-		-	20	-				4.245.000,00		2,04	kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	01	2	01	01 Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	69.357.723,45	1	1.398.400,00	1	1.829.531,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-	25,00	-	1,25	1.398.400,00	125,00	2,02	kecamatan tanjungkarang timur
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5																					
		7	01	01	2	01	06 Kooedinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	69.357.723,45	1	1.448.200,00	1	2.127.965,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-	25,00	-	1,25	1.448.200,00	125,00	2,09	kecamatan tanjungkarang timur
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5																					
		7	01	01	2	01	07 Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	69.357.723,45	1	1.398.400,00	1	1.878.711,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-	25,00	-	1,25	1.398.400,00	125,00	2,02	kecamatan tanjungkarang timur
								Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5																			
xxx		7	01	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib	persen	98,00	23.900.268.329,39	20	3.278.628.667,00	98,00	4.623.936.542,00	25	1.029.741.004		-		-		-	25	1.029.741.004,00	25,51	22,27	45,00	4.308.369.671,00	45,92	18,03	kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	01	2	02	01 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	23.343.235.522,35	1	3.222.628.667,00	1	4.532.169.242,00	25	1.029.741.004		-		-		-	25	1.029.741.004,00	2500,00	22,72	25,00	4.252.369.671,00	25,00	18,22	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	25																			
		7	01	01	2	02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	557.032.807,04	1	56.000.000,00	1	91.767.300,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-	25,00	-	1,25	56.000.000,00	25,00	10,05	kecamatan tanjungkarang timur
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5																			
		7	01	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	persen	98,00	651.814.108,87	20	27.935.700,00	98,00	60.436.442,00	20	-		-		-		-	20	-	20,41	-	40,00	27.935.700,00	40,82	4,29	kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	01	2	06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	160.749.042,16	1	4.791.800,00	1	4.120.298,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-	25,00	-	1,25	4.791.800,00	25,00	2,98	kecamatan tanjungkarang timur
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5																			
		7	01	01	2	06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	91.596.566,65	1	10.307.400,00	1	18.655.376,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-	25,00	-	1,25	10.307.400,00	25,00	11,25	kecamatan tanjungkarang timur
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5																			
		7	01	01	2	06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	94.467.327,75	1	6.842.300,00	1	5.433.025,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-	25,00	-	1,25	6.842.300,00	25,00	7,24	kecamatan tanjungkarang timur
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5																			
		7	01	01	2	06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	73.405.922,31	1	0,00	1	15.000.000,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-	25,00	-	1,25	-	25,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
								Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5																			
		7	01	01	2	06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	121.082.625,00	1	5.994.200,00	1	6.727.743,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-	25,00	-	1,25	5.994.200,00	25,00	4,95	kecamatan tanjungkarang timur
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5																			
		7	01	01	2	06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	110.512.625,00		0,00	1	10.500.000,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-	25,00	-	0,25	-	5,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5																			
		7	01	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	410.435.440,51	20	-	98	39.500.000,00	20,00	-		-		-		-	20	-	20,41	-	40,00	-	40,82	-	kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	01	2	07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	130.038.256,25		0,00	1	10.000.000,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-	25,00	-	0,25	-	1,67	-	kecamatan tanjungkarang
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15																			

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2025 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
																	I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14)/*100		(16) = (14-6)		(17) = (16/7)*100		(18)
											K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN			K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN	
		7	01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	179.118.492,08	20	0,00	1	28.500.000,00	1	-		-		-		-	1	-	30,00	-	21,00	-	30,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
									Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10																						
		7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	101.278.692,18		0,00	1	1.000.000,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-	25,00	-	0,25	-	25,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
									Jumlah unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1																						
		7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**6.675.953.793,34**	20	**751.190.000,00**	**98,00**	**822.970.000,00**	**20,00**	**157.240.000**		**213.860.000**		-		-	**20**	**371.100.000,00**	**20,41**	**45,09**	**40,00**	**1.122.290.000,00**	**40,82**	**16,81**	kecamatan tanjungkarang timur
																-																
		7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	141.790.169,06	20	7.750.000,00	1	23.600.000,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-	25,00	-	20,25	**7.750.000,00**	30,00	5,47	kecamatan tanjungkarang timur
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5																						
		7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	6.534.163.624,28	1	743.440.000,00	1	799.370.000,00	0,25	157.240.000		213.860.000,00		-		-	0,25	**371.100.000,00**	25,00	46,42	1,25	**1.114.540.000,00**	30,00	17,06	kecamatan tanjungkarang timur
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5																						
		7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**1.739.356.550,99**	20	**124.650.000,00**	**98**	**169.739.516,00**	**20**	**-**		**51.358.750**		-		-	**20**	**51.358.750,00**	**20,41**	**30,26**	**40,00**	**176.008.750,00**	**30,00**	**10,12**	kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	01	2	09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	226.405.734,57	1	33.350.000,00	1	33.670.000,00	0,25	-		11.900.000		-		-	0,25	**11.500.000,00**	25,00	34,16	1,25	**44.850.000,00**	30,00	19,81	kecamatan tanjungkarang timur
									Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Unit	1																						
		7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1.076.295.136,89		68.520.000,00	1	104.788.860,00	0,25	-		39.858.750,00		-		-	0,25	**39.858.750,00**	25,00	38,04	0,25	**108.378.750,00**	25,00	10,07	kecamatan tanjungkarang timur
									Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10																						
		7	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	82.884.468,75		0,00	1	1.000.000,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-	25,00	-	0,25	-	30,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
									Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3																						
		7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	82.884.468,75		700.000,00	1	3.290.000,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-	25,00	-	0,25	**700.000,00**	30,00	0,84	kecamatan tanjungkarang timur
									Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	3																						
		7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	202.557.384,37		0,00	1	1.000.000,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-	25,00	-	0,25	-	30,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
									Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3																						
		7	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	68.329.357,66		22.080.000,00	1	25.990.656,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-	25,00	-	0,25	**22.080.000,00**	30,00	32,31	kecamatan tanjungkarang timur
									Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																						
		7	**01**	**05**				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100**	**290.095.640,63**		**0,00**	**100**	**2.295.348,00**	**10,00**	-	**3**	-		**3**		**16**	-			-	**0,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
		7	**01**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290.095.640,63**		**0,00**	**100**	**2.295.348**	**10,00**	-	**3**	-		**3**		**16**	-			-	**0,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124.326.703,13		**0,00**		1.184.800,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-		-	0,25	-	30,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
									Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5																						
		7	01	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165.768.937,50		**0,00**		1.110.548,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-		-	0,25	-	30,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
									Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100																						
		7	**01**	**06**				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290.095.604,63**		**0,00**	**100**	**2.295.348,00**	**10**	-		-		-		-	**10**	-		-		-	0,00	-	kecamatan tanjungkarang timur

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2025 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
																I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14)*100		(16) = (14-6)		(17) = (16)*100		(18)
											K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN			K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN	
		7	01	06	2	01		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	%	100	290.095.604,63		0,00	100	2.295.348	10	-		-		-		-	10	-		-		-	0,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165.768.937,50		0,00	1	1.110.648,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-		-	0,25	-	30,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
									Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5																					
		7	01	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124.326.667,13		0,00	1	1.184.800,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-		-	0,25	-	30,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
									Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5																					
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta Toleransi umat beragama	7	01						Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan																-	-							kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100	18.848.192.041,82		2.541.500.000,00	100	2.127.553.240,00	25,00	420.000.000		840.000.000		-		-	25	1.260.000.000,00	25,00	59,22	25,00	3.801.500.000,00	25,00	20,17	kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100	203.030.018,26		12.500.000	100	26.235.910	25,00	-		-		-		-	25	-	25,00	-	25,00	12.500.000,00	25,00	6,16	kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	203.030.018,26		12.500.000,00	1	26.235.910,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-		-	0,25	12.500.000,00	30,00	6,16	kecamatan tanjungkarang timur
									Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5																					
		7	01	02	2	02		Penyelenggaraaan Unsur Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan unsur pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100	18.645.162.023,56	100	2.529.000.000	100	2.101.317.330	25	420.000.000		840.000.000		-		-	25	1.260.000.000,00	25,00	59,96	125,00		125,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	18.645.162.023,56	1	2.529.000.000,00	1	2.101.317.330,00	0,25	420.000.000,00		840.000.000,00		-		-	0,25	1.260.000.000,00	25,00	59,96	1,25	3.780.000.000,00	30,00	20,32	kecamatan tanjungkarang timur
									Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5																					
		7	01	03				Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	100	7.892.122.172,95	100	29.875.000	100	495.560.808	25	-		-		-		-	25	-	25,00	-	125,00	29.875.000,00	125,00	0,38	kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persantase koordinasi pemberdayaan masyarakat	%	100	7.633.514.672,95	100	29.875.000	100	474.340.559	25	-		-		-		-	25	-	25,00	-	125,00	29.875.000,00	125,00	0,39	kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana kesgimaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	7.633.514.672,95	1	29.875.000,00	1	474.340.559	0,25	-		-		-		-	0,25	-	25,00	-	1,25	29.875.000,00	30,00	0,39	kecamatan tanjungkarang timur
									Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																					
		7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	Keluarga	5.000.000	258.607.500,00		0,00	100	21.220.259	10	-		-		-		-	10	-	10,00	-	10,00	-	30,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	03	2	06	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Keluarga	5.000.000	25.860.750,00		0,00	f500	2.122.025	0,25	-		-		-		-	0,25	-	0,02	-	0,25	-	30,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan	Keluarga	5.000.000	25.860.750,00		0,00	f500	2.122.025	0,25	-		-		-		-	0,25	-	0,02	-	0,25	-	30,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	03	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5.000.000	25.860.750,00		0,00	f500	2.122.025	0,25	-		-		-		-	0,25	-	0,02	-	0,25	-	30,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	03	2	06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5.000.000	25.860.750,00		0,00	f500	2.122.025	0,25	-		-		-		-	0,25	-	0,02	-	0,25	-	30,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	03	2	06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	5.000.000	25.860.750,00		0,00	f500	2.122.025	0,25	-		-		-		-	0,25	-	0,02	-	0,25	-	30,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan	Keluarga	5.000.000	25.860.750,00		0,00	f500	2.122.025	0,25	-		-		-		-	0,25	-	0,02	-	0,25	-	30,00	-	kecamatan tanjungkarang timur

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RP.JMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW1 (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RP.JMD S/D TAHUN 2026 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
																I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14)*100		(16) = (14-6)		(17) = (16)*100		(18)
											K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN			K	RUPIAN	K	RUPIAN	K	RUPIAN	
		7	01	03	2	06	07	Penurunan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan	Jumlah keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat	Keluarga	5.000.000	25.860.750,00		0,00	f500	2.122.025	0,25	-		-		-		-	0,25	-	0,02	-	0,25	-	30,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	03	2	06	08	Penurunan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Jumlah keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup	Keluarga	5.000.000	25.860.750,00		0,00	f500	2.122.025	0,25	-		-		-		-	0,25	-	0,02	-	0,25	-	30,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas	Keluarga	5.000.000	25.860.750,00		0,00	f500	2.122.025	0,25	-		-		-		-	0,25	-	0,02	-	0,25	-	30,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keteribatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keteribatan Perencanaan Kehidupan	Keluarga	5.000.000	25.860.750,00		0,00	f500	2.122.025	0,25	-		-		-		-	0,25	-	0,02	-	0,25	-	30,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
		7	**01**	**04**				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	**%**	**100**	**15.387.008.397,42**	**100**	**1.768.950.000,00**	**100**	**1.885.194.391,00**	**25**	**372.000.000**		**744.000.000**		-		-	**25**	**1.116.000.000,00**	**25,00**	**59,20**	**125,00**	**2.884.950.000,00**	**125,00**	**18,75**	kecamatan tanjungkarang timur
		7	**01**	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100**	**15.387.008.397,42**	**100**	**1.768.950.000**	**100**	**1.885.194.391**	**25**	**372.000.000**		**744.000.000**		-		-	**25**	**1.116.000.000,00**	**25,00**	**59,20**	**125,00**	**2.884.950.000,00**	**125,00**	**18,75**	kecamatan tanjungkarang timur
		7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	15.255.833.397,42	1	1.746.450.000,00	1	1.861.439.036,00	0,25	372.000.000,00		744.000.000,00		-		-	0,25	**1.116.000.000,00**	**25,00**	**59,95**	**1,25**	**2.862.450.000,00**	**30,00**	**18,76**	kecamatan tanjungkarang timur
									Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																						
		7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	131.175.000,00	1	22.500.000,00	1	23.755.355,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-	**25,00**	-	**1,25**	**22.500.000,00**	**30,00**	**17,15**	kecamatan tanjungkarang timur
									Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5																						
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				**76.293.415.250,90**		**8.674.782.469,00**		**10.235.318.242,00**		**1.978.981.004,00**		**1.849.218.750,00**		-		-		**3.828.199.754,00**						**56,09**	
								TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		**xxx**	**37,40**			**xxx**	**xxx**	
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		**xxx**	**xxx**			**xxx**	**xxx**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2025 ini rencana Kerja OPD Kecamatan Tanjung Karang Timur mengalami perubahan anggaran dari sebelumnya secara keseluruhan pada rencana kerja OPD Kecamatan Tanjung Karang Timur yang terdiri dari 6 (Enam) Program, 13 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a) Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
      b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
   1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      d) Penyediaan Bahan Logistik
      e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   1.4. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a) Pengadaan Mebel
      b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c) Pemeliharaan Mebel

d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a) Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan pelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

a) Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

a) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

b) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

c. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

d) Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri

d) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

e) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

f) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

g) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

h) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

i) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4. Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum
   4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
      a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
      b) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
      a) fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional
      b) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah
   6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
      a) fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan
      b) fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan

Dengan terbitnya peraturan baru yaitu Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru, selanjutnya rencana kerja Kecamatan Tanjung Karang Timur juga mengalami Perubahan. Format Perubahan untuk Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung yang telah disesuaikan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2025 tertuang dalam Tabel 3.1.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR						10.762.740.052,83							10.329.819.238,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						10.762.740.052,83							10.329.819.238,00	
	7	01				KECAMATAN						10.762.740.052,83							10.329.819.238,00	
174	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	98%	80%	98%	98 %	5.834.613.165,00						98 %	5.816.919.105,00	
	7	01	01	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	80%	98%	100 %	5.836.607,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	100 %	5.836.607,00	
	7	01	01	2. 01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.829.931,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Dokumen	1.829.931,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2. 01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.127.965,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Laporan	2.127.965,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2. 01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.878.711,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Laporan	1.878.711,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	72 Orang/ bulan		72 Orang/ bulan	98 %	4.610.130.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	98 %	4.623.936.542,00	
	7	01	01	2. 02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/ bulan		72 Orang/ bulan	72 Orang/bulan	4.518.363.300,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	72 Orang/bulan	4.532.169.242,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2. 02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	91.767.300,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Dokumen	91.767.300,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 Persen		98 Persen	98 %	60.436.442,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	98 Persen	60.436.440,00	
	7	01	01	2. 06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	4.120.298,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Paket	4.120.296,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2. 06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	18.655.376,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Paket	18.655.376,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2. 06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.433.025,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Paket	5.433.025,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2. 06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2. 06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	6.727.743,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Paket	6.727.743,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2. 06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.500.000,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Laporan	10.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 Persen		98 Persen	98 %	129.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	-	134.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	1 Unit	94.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	12 Unit	28.500.000,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Unit	28.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	12 Unit	1.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Unit	1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98 Persen		98 Persen	98 %	858.970.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	98 Persen	822.970.000,00	
	7	01	01	2. 08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	23.600.000,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Laporan	23.600.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2. 08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	835.370.000,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Laporan	799.370.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 Persen		98 Persen	98 %	169.739.516,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	-	169.739.516,00	
	7	01	01	2. 09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	33.670.000,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Unit	33.670.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2. 09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	104.788.860,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Unit	104.788.860,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2. 09	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	1.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Unit	1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2. 09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	3.290.000,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Unit	3.290.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2. 09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		12 Unit	12 Unit	1.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Unit	1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR

	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		12 Unit	12 Unit	25.990.656,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Unit	25.990.656,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
175	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	100%		100 %	100 %	2.642.779.992,83						100 %	2.127.553.240,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja,	100%		100 %	100 %	26.235.910,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	-	100 %	26.235.910,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	26.235.910,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	-	12 Laporan	26.235.910,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	100%		100%	-	2.616.544.082,83			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	masyarakat kota bandar lampung	100%	2.101.317.330,00	

	7	01	02	2. 02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.616.544.082,83	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	masyarakat kota bandar lampung	12 Laporan	2.101.317.330,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
176	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	100%		100%	80 Persen	495.561.808,00						100 %	495.561.806,00	
	7	01	03	2. 01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100%		100%	-	474.341.558,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	masyarakat kota bandar lampung	100%	474.341.556,00	
	7	01	03	2. 01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	474.341.558,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	masyarakat kota bandar lampung	12 Laporan	474.341.556,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	03	2. 06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan	1		1	100 PERSEN	21.220.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	masyarakat kota bandar lampung	100 PERSEN	21.220.250,00	

	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara													
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1750 Keluarga		1750 Keluarga	1750 Keluarga	2.122.025,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	masyarakat kota bandar lampung	1750 Keluarga	2.122.025,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat													
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1750 Keluarga		1750 Keluarga	1750 Keluarga	2.122.025,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	masyarakat kota bandar lampung	1750 Keluarga	2.122.025,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga													
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1750 Keluarga		1750 Keluarga	1750 Keluarga	2.122.025,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	masyarakat kota bandar lampung	1750 Keluarga	2.122.025,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri													

							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1750 Keluarga		1750 Keluarga	1750 Keluarga	2.122.025,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	masyarakat kota bandar lampung	1750 Keluarga	2.122.025,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	03	2. 06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1750 Keluarga		1750 Keluarga	1750 Keluarga	2.122.025,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	masyarakat kota bandar lampung	1750 Keluarga	2.122.025,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	03	2. 06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1750 Keluarga		1750 Keluarga	1750 Keluarga	2.122.025,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	masyarakat kota bandar lampung	1750 Keluarga	2.122.025,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	03	2. 06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1750 Keluarga		1750 Keluarga	1750 Keluarga	2.122.025,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	masyarakat kota bandar lampung	1750 Keluarga	2.122.025,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR

	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1750 Keluarga		1750 Keluarga	1750 Keluarga	2.122.025,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	masyarakat kota bandar lampung	1750 Keluarga	2.122.025,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1750 Keluarga		1750 Keluarga	1750 Keluarga	2.122.025,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	masyarakat kota bandar lampung	1750 Keluarga	2.122.025,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1750 Keluarga		1750 Keluarga	1750 Keluarga	2.122.025,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	masyarakat kota bandar lampung	1750 Keluarga	2.122.025,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
177	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal	100 %	100 %	100 %	100 %	1.785.194.391,00						100 %	1.885.194.391,00	

	7	01	04	2. 01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 Persen	1.785.194.391,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	masyarakat kota bandar lampung	100 %	1.885.194.391,00	
	7	01	04	2. 01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	1.753.939.036,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	masyarakat kota bandar lampung	12 Laporan	1.861.439.036,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	04	2. 01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan			12 Laporan	31.255.355,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	masyarakat kota bandar lampung	12 Laporan	23.755.355,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
178	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan	100 %			100 %	2.295.348,00						100 %	2.295.348,00	
	7	01	05	2. 01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %			100 %	2.295.348,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	100 %	2.295.348,00	
	7	01	05	2. 01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang			100 Orang	1.110.548,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	100 Orang	1.110.548,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	05	2. 01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen			12 Dokumen	1.184.800,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Dokumen	1.184.800,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
179	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	100 %		90%	95%	2.295.348,00						100 %	2.295.348,00	
	7	01	06	2. 01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100 %		90%	100 %	2.295.348,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	100 %	2.295.348,00	
	7	01	06	2. 01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen			12 Dokumen	1.110.548,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Dokumen	1.110.548,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	06	2. 01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen			12 Dokumen	1.184.800,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN	12 Dokumen	1.184.800,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR

BAB V

PENUTUP

Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Renstra Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Renja Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksanaan. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	LandasanHukum	√			
	1.3	MaksuddanTujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN				
		Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/ Tahun 2025	√			
		Formulir E.81				
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 2025

CAMAT TANJUNG KARANG TIMUR

M. EPPRIELIATAS KESUMAYUDA, SH

NIP. 19840409 201001 1 013

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	FITRIYANTI, ST, M.Si	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan ii tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkatdaerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerahserta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, 2025

CAMAT TANJUNG KARANG TIMUR

M. EPPRIELIATAS KESUMAYUDA, SH

NIP. 19840409 201001 1 013

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	FITRIYANTI, ST, M.Si	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.SI.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025

CAMAT TANJUNG KARANG TIMUR

M. EPPRIELIATAS KESUMAYUDA, SH

NIP. 19840409 201001 1 013

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	**FITRIYANTI, ST, M.Si**	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	**ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M**	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

RENCANA KERJA PERUBAHAN

KECAMATAN TELUKBETUNG UTARA

TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

LAMPIRAN 38

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN TELUKBETUNG UTARA TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN ..... I – 1
1.1. Latar Belakang ..... I – 1
1.2. Landasan Hukum ..... I – 3
1.3. Maksud dan Tujuan ..... I – 6
1.4. Sistematika Penulisan ..... I – 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... II – 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... II – 1
II – 3
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .. II – 5
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ... III – 1
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ..... III – 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah . III – 5
III – 6
3.3. Program dan Kegiatan .....

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..... IV – 1

BAB V PENUTUP ..... V – 1

LAMPIRAN 38
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Pasal 84 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, ***mengamanatkan bahwa*** Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah.

Renja Perubahan Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : ***"BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT"***

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung. Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah.

Dengan demikian Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-4 (empat), 5(lima) dan 6 (enam) dalam RPJMD Tahun 2016–

2021 yaitu :

1. ***"Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat"***,
2. ***"Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religious"***
3. ***"Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Berorientasi Kemitraan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa dan Bertanggung Jawab untuk Mendukung Investasi".***

Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, pada Tahun 2025 Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung menyusun Renja Perubahan Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung Tahun 2025 berdasarkan Renstra Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2025.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusun Renja Perubahan Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera

Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;

15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Perubahan Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Wali Kota.
2. Sebagai acuan bagi Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025.
3. Sebagai acuan bagi Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Perubahan Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang rencana kerja Perubahan dan Pendanaan Tahun 2025.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes),

manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing - masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pada Tahun 2025 Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung merumuskan 6 (Empat) Program Pendukung, adapun tingkat capaian kinerja nya di Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan urusan kewilayahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan inovatif**	**Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**	**Indeks Kepuasan masyarakat**	**98 %**	**95%**	**95 % %**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan	98 %	95 %	95 %
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan	**100**	**90 %**	**90 %**

			Kegiatan Pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan			
		Meningkatnya Urusan Kewilayahan	**Tingkat capaian penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan**	**100 %**	**70 %**	**70 %**
		Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**100**	**70 %**	**70 %**
2	**Kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang aman, tentram dan damai berdasarkan nilai-nilai budaya**	**Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum Serta Toleransi Antar Umat Neragama**	**Tingkat capaian keamanan dan ketertiban umum serta toleransi antar umat beragama**	**100 %**	**95 %**	**95 %**
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	100 %	95 %	95 %
3.	**Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan**	**Meningkatnya kesejahteraan rakyat**	Presentase Masyarakat yang Sejahtera	80 %	80 %	100 %

		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan organisasi Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di lekurahan dan kecamatan	80 %	80 %	100%

Pada Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, yang dijabarkan dalam 6 Program, 13 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Realisasi Anggaran Belanja pada Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut, Realisasi Belanja sebesar **Rp. 10.357.804.341,-** atau **85,72 %** dari anggaran dana yang tersedia dalam DPA sebesar **Rp. 12.047.888.245,-** Sedangkan Capaian kinerja sebesar **85,72 %.**

Evaluasi kinerja dan keuangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.2. dan Tabel 2.3.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja

Pelayanan di Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

1. Meningkat nya pelayanan administrasi perkantoran,
2. Meningkat nya sarana dan prasarana aparatur,
3. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan,
4. Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah,
5. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kelurahan,
6. Meningkatnya sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah,
7. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah.

Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Kinerja Pelayanan di bidang Ketentraman dan Ketertiban.
   a). Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat kelurahan atau lingkungan sampai pada tingkat RT,
   b). Mengadakan pembinaan kepada pemerintah Kelurahan,
   c). Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas seatap dan para staf kelurahan.
2. Kinerja Pelayanan di bidang Pemerintahan.
   a). Mengadakan sosialisasi dan monitoring pembayaran PBB,
   b). Pembinaan secara rutin ke kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
3. PelayananUmum.
   a). Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan,
   b). Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Way Halim,

c). Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat Kelurahan secara rutin.

4. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan.
   a). Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat,
   b). Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi,
   c). Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan.
5. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakatan
   a). Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu,
   b). Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera,
   c). Monitoring penyaluran Beras rumahtangga miskin (Raskin),
   d). Monitoring penyaluran Jamkesda,
   e). Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga– lembaga keagamaan,
   f). Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah,
   g). Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan,
   h). Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung, ditentukan isu-isu penting tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik apalagi dengan adanya perubahan sistem manajemen kepegawaian;
3. Modernisasi penyelenggaraan pemerintahan didukung aparatur profesional, inovatif dan amanah khususnya dalam perubahan sistem manajemen keuangan;
4. Adanya keterbukaaan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan;
5. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan;
6. Peningkatan Pengamanan gangguan keamanan;
7. Perkembangan perdagangan dan jasa serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
8. Pengembangan Agro Wisata;
9. Program Nasional Pembangunan Berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Berdasarkan Rancangan pada Rencana Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : ***"BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT".*** Penjabaran Visi tersebut diatas meliputi :

1. **BANDAR LAMPUNG** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas –batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang;
2. **SEHAT** : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah;
3. **CERDAS** : Sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efesien dan membrikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya;
4. **BERIMAN** : Sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia;
5. **BERBUDAYA** : Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor;

6. **NYAMAN** : Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Parisipasi Masyarakat;
7. **UNGGUL** : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
8. **BERDAYA SAING** : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
9. **EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN** : Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Adapun misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan tersebut diatas meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat

dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Prioritas pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 berpedoman terhadap apa yang diamanatkan RPJPD Kota Bandar Lampung, dan diarahkan pada aspek yang menonjol dari isu strategis. Telaah terhadap kebijakan Kota Bandar Lampung, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kota Bandar Lampung, dimana secara teknokratis prioritas Kota Bandar Lampung telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Lampung, dimana kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung. Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Telukbetung Utara Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan

secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun Provinsi.

Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Strategi dan Kebijakan Tahun 2025
Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung

MISI	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.	Menurun nya kemiskinan	Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaaan program program unggulan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan mendorong peranpartisispasi Lembaga dan organisasi masyarakat di kelurahan dan kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama dalam menumbuh kembangkan semangat gotong royong dalam masyrakat
Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religious	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta toleransi antar umat beragana	Mengendalikan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah	Meningkatkan sinergitas, toleransi dan peranserta stake holders bersama sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam menjaga keamanan, ketertiban dan pencegahan tindak kriminal;
Mewujudkan	Meningkat	Meningkatnya	Meningkatkan

Pembangunan yang Berkelanjutan, Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Berorientasi Kemitraan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa dan Bertanggung Jawab untuk Mendukung Investasi	nya penerapan kebijakan reformasi birokrasi di pemerintaha n kota bandar lampung	pencapaian delapan area perubahan reformasi birokrasi pemerintah daerah	kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan satu pintu, termasuk pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan.
	Meningkatka n penyelenggar aurusan pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan demokratis	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara komprehensif;

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung tahun 2025 adalah "**Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan yang Prima"** sedangkan sasaran yang akan dicapai dalam tujuan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Telukbteung Utara Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah ***"Terwujudnya tata kelola pemerintahan urusan kewilayahan yang efektif, efisien, akuntabei, transparan dan inovatif***". Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung Tahun 2025 beserta Indikator sasaran dan target kinerja di jelaskan dalam table berikut :

Tabel III.2. Indikator Sasaran dan Target Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (%)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan urusan kewilayahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan inovatif	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	98 %
	Meningkatnya Urusan Kewilayahan	Tingkat capaian penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan	100%
Kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang aman, tentram dan damai berdasarkan nilai-nilai budaya	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum Serta Toleransi Antar Umat Beragama	Tingkat capaian keamanan dan ketertiban umum serta toleransi antar umat beragama	100%
Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan	Meningkatnya kesejahteraan rakyat	Persentase Masyarakat yang Sejahtera	100 %

III.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan

yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan kegiatan. Adapun Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja atau kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Adapun rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan meliputi :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota,

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

a. Sub. Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah,
b. Sub. Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd,
c. Sub. Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

a. Sub. Kegiatan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN,
b. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

a. Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor,
b. Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
c. Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,
d. Sub. KegiatanPenyediaan Bahan Logistik Kantor,

e. Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,
f. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Sub. Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Mebel,
b. Sub. Kegiatan Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya,
c. Sub. Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
b. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,
b. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
c. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebel,
d. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
e. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,
f. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik,

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

a. Sub. Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.

a. Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan,

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

a. Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

a. Sub. Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

b. Sub. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

c. Sub. Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

d. Sub. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
e. Sub. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
f. Sub. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
g. Sub. Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
h. Sub. Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
i. Sub. Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
j. Sub. Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum,

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

a. Sub. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.
b. Sub. Kegiatan Harmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh masyarakat

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

a. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan,

b. Sub. Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

a. Sub. Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di Kelurahan,

b. Sub. Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Kelurahan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung terdiri dari 6 Program, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik,
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,

Tabel 4.1, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Program Tahun 2025 Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung

No	Nama Program	Target Kinerja	Anggaran
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	98,00 %	Rp. 5.979.483.720,00
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100.00 %	Rp. 3.078.307.462,00
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100.00 %	Rp. 658.817.731,00
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100.00 %	Rp. 2.365.328.021,00
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100.00 %	Rp. 2.838.260,00
6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100.00 %	Rp. 2.838.260,00

Formulir E. 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TELUKBETUNG UTARA KOTA BANDAR LAMPUNG
PERIODE PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Kecamatan Telukbetung Utara

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN										I		II		III		IV									
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
											K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
unsur kewilayahan																																	
kecamatan												xxx				xxx		xxx		xxx		xxx		xxx		xxx		xxx		xxx		
kecamatan Telukbetung Timur												xxx				xxx		xxx		xxx		xxx		xxx		xxx		xxx		xxx		
x	**Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan**	**7**	**01**						**Indeks kepuasan masyarakat**	**persen**	**98.00**				**98.00**										**-**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**Kecamtan Tbu**
xx		**7**	**01**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98.00**	**34,672,791,303**	**98.00**	**3,568,372,179.00**	**98.00**	**5,979,483,720.00**	**20**	**1,565,210,273.00**	**20**	**1,270,302,663.00**	**20**	**-**	**20**	**1,000,000.00**	**80**	**2,836,512,936.00**	**81.63**	**47.44**	**98.00**	**6,404,885,115.00**	**100.00**	**18.47**	**Kecamtan Tbu**
xxx		**7**	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98.00**	**417,569,191**	**98.00**	**24,368,850.00**	**98.00**	**4,240,998.00**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	**1,000,000**	**80**	**1,000,000.00**	**81.63**	**23.58**	**98.00**	**25,368,850.00**	**100.00**	**6.08**	**Kecamtan Tbu**
xxx		7	01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	131,822,222	1	6,002,500.00	1	1,413,666.00	0.25	-	0.25	-	0	-	0	**1,000,000**	1	1,000,000.00	100.00	70.74	2.00	7,002,500.00	0.40	5.31	
									Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5																						Kecamtan Tbu
		7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	153,924,747	1	11,470,850.00	1	1,413,666.00	0.25	-	0.25	-	0	-	0	-	1	-	100.00	-	2.00	11,470,850.00	0.40	**7.45**	Kecamtan Tbu
									Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5																								
		7	01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	131,822,222	1	6,895,500.00	1	1,413,666.00	0.25	-	0.25	-	0		0		1	-	100.00	-	2.00	**6,895,500.00**	0.40	**5.23**	Kecamtan Tbu
									Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5																								
		7	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**98.00**	**23,294,136,499**	**98.00**	2,447,578,126.00	**98.00**	**5,019,849,345.00**	25	**1,322,745,373.00**	25	**1,062,948,159.00**	**25**	**-**	**25**	**-**	**100**	**2,385,693,532.00**	**102.04**	**47.53**	**98.00**	**4,833,271,658.00**	**100.00**	**20.75**	Kecamtan Tbu
		7	01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	22,665,639,755	25	4,687,926,335.00	25	4,906,831,845.00	25	1,310,025,373.00	25	1,034,788,159.00	25	-	25	-	**25**	2,344,813,532.00	**100.00**	47.79	50.00	**7,032,739,867.00**	2.00	**31.03**	
									Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	25																								
		7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	628,496,744	1	166,750,000.00	1	113,017,500.00	0.25	12,720,000.00	0.25	28,160,000.00	0.25	-	0.25	-	1	40,880,000.00	**100.00**	36.17	2.00	**207,630,000.00**	0.40	**33.04**	Kecamtan Tbu
									Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5																								
		7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**585,850,293**		81,291,053.00	**98.00**	**45,450,631.00**	**20**	**-**	**20**	**30,016,404.00**	**20**	**-**	**20**	**-**	**80**	**30,016,404.00**	**81.63**	**66.04**	**98.00**	**111,307,457.00**	**100.00**	**19.00**	Kecamtan Tbu
		7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	27,330,086	1	25,175,250.00	1	3,430,832.00	0.25	-	0.25	3,355,530.00	0	-	0	-	1	3,355,530.00	**100.00**	97.81	2.00	**28,530,780.00**	0.40	**104.39**	Kecamtan Tbu

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
																I		II		III		IV									
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
											K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		RUPIAH	K		K	RUPIAH	K	RUPIAH	
									Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5																					
		7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	136,038,256	1	35,791,650.00	1	13,016,057.00	0.25	-	0.25	12,599,832.00	0	-	0	-	1	12,599,832.00	**100.00**	96.80	2.00	**48,391,482.00**	0.40	**35.57**	Kecamtan Tbu
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5																					
		7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	114,295,942	1	28,800,410.00	1	10,265,490.00	0.25	-	0.25	9,615,042.00	0		0	-	1	9,615,042.00	**100.00**	93.66	2.00	**38,415,452.00**	0.40	**33.61**	Kecamtan Tbu
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5																					
		7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	102,028,692	1	27,974,000.00	1	15,000,000.00	0.25	-	0.25	4,446,000.00	0	-	0	-	1	4,446,000.00	**100.00**	29.64	2.00	**32,420,000.00**	0.40	**31.78**	Kecamtan Tbu
									Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5																					
		7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	108,272,848	1	27,064,073.00	1	3,738,252.00	0.25	-	0.25	-	0	-	0	-	1	-	**100.00**	-	2.00	**27,064,073.00**	0.40	**25.00**	Kecamtan Tbu
									Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5																					
		7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	97,884,469	1	**0.00**	1	-	0.25	-	0.25	-	0	-	0	-	1	-	**100.00**	#DIV/0!	2.00	**-**	0.40	**-**	Kecamtan Tbu
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5																					
		7	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**771,435,601**	**98.00**		**98**	**51,379,266.00**	**20.00**	**-**	**20.00**	**27,206,100.00**	**20.00**	**-**	**20**	**-**	**80**	**27,206,100.00**	**81.63**	**52.95**	**178.00**	**27,206,100.00**	**181.63**	**3.53**	Kecamtan Tbu
		7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	511,843,939			1	12,504,294.00	1.00	-	1.00	12,221,100.00			1.00	-	**3**	**12,221,100.00**	**300.00**	97.74	3.00	**12,221,100.00**	0.20	**2.39**	Kecamtan Tbu
									Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15																					
		7	01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	109,949,580			1	23,527,666.00	1.00	-	0.00	-			1.00		**2**	**-**	**200.00**	-	2.00	**-**	0.20	**-**	Kecamtan Tbu
									Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10																					
		7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	149,642,082			1	15,347,306.00	1.00	-	0.00	14,985,000.00		-	1.00	-	**2**	**14,985,000.00**	**200.00**	97.64	2.00	**14,985,000.00**	2.00	**10.01**	Kecamtan Tbu
									Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1																					
		7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**7,651,471,723**		852,474,150.00	**98.00**	**744,920,000.00**	**20.00**	**214,560,000.00**	**20.00**	**126,840,000.00**	**20.00**	**-**	**20**	**-**	**80**	**341,400,000.00**	**81.63**	**45.83**	**80.00**	**1,193,874,150.00**	**81.63**	**15.60**	Kecamtan Tbu
		7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	512,184,035	1	21,029,550.00	1	29,000,000.00	0.25	-	0.00	-	0	-	0	-	0.75	-	**75.00**	-	1.75	**21,029,550.00**	0.35	**4.11**	Kecamtan Tbu
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5																					
		7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	7,139,287,688	1	1,790,475,000.00	1	715,920,000.00	0.25	214,560,000	0.00	126,840,000.00	0	-	0	-	0.75	341,400,000.00	**75.00**	47.69	1.75	**2,131,875,000.00**	0.35	**29.86**	Kecamtan Tbu
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5																					

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN										I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
											K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH			K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
		7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**1,952,327,997**		**162,660,000.00**	**98**	**113,643,480.00**	**20**	**27,904,900.00**	**20**	**23,292,000.00**	**20**	**-**	**20**	**-**	**80**	**51,196,900.00**	**81.63**	**45.05**	**80.00**	**213,856,900.00**	**81.63**	**10.95**	Kecamtan Tbu
		7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	228,082,339	1	53,214,800.00	1	45,264,500.00	1.00	10,594,500.00	1.00	11,124,800.00		-		-	**2**	21,719,300.00	**200.00**	47.98	3.00	**74,934,100.00**	3.00	**32.85**	Kecamtan Tbu
									Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1																							
		7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1,234,575,954	1	175,088,400.00	1	59,860,400.00	1.00	17,310,400.00	1.00	12,167,200.00		-		-	**2**	29,477,600.00	**200.00**	49.24	3.00	**204,566,000.00**	0.30	**16.57**	Kecamtan Tbu
									Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10																							
		7	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	20,405,738			1	1,000,000.00	1.00	-	1.00	-		-		-	**2**	-	**200.00**	-	2.00	**-**	0.67	**-**	Kecamtan Tbu
									Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3																							
		7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	22,106,217			1	6,620,000.00	1.00	-	1.00	-		-		-	**2**	-	**200.00**	-	2.00	**-**	0.67	**-**	Kecamtan Tbu
									Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3																							
		7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	306,086,077	1	60,000,000.00	1	398,580.00	1.00	-	1.00	-		-		-	**2**	-	**200.00**	-	3.00	**60,000,000.00**	3.00	**19.60**	Kecamtan Tbu
									Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																							
		7	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	141,071,672	1	31,919,000.00	1	500,000.00	1.00	-	1.00	-		-		-	**2**	-	**200.00**	-	3.00	**31,919,000.00**	3.00	**22.63**	Kecamtan Tbu
									Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																							
		7	**01**	**05**				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100**	**290,095,605**			**100**	**2,838,260.00**	**20.00**	**-**	**20.00**	**-**	**20.00**		**20**		**80**	**-**	**80.00**	**-**	**80.00**	**-**	**80.00**	**-**	Kecamtan Tbu
		7	**01**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290,095,605**			**100**	**2,838,260.00**	**20.00**	**-**	**20.00**	**-**	**20.00**		**20**		**80**	**-**	**80.00**	**-**	**80.00**	**-**	**80.00**	**-**	Kecamtan Tbu
		7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124,326,667			1	1,419,130.00	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0		1	-	**100.00**	-	1.00	-	0.20	**-**	Kecamtan Tbu
									Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5																							
		7	01	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165,768,938			1	1,419,130.00	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0		1	-	**100.00**	-	1.00	-	0.01	**-**	Kecamtan Tbu

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN										I		II		III		IV									
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
											K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH			K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
									Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100																								
		7	**01**	**06**				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290,095,605**			**100**	**2,838,260.00**	**20.00**	**-**	**20.00**	**-**	**20.00**		**20**		**80**	**-**	**80.00**	**-**	**80.00**	**-**	**80.00**	**-**	Kecamtan Tbu
		7	**01**	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100**	**290,095,605**			**100**	**2,838,260.00**	**20.00**	**-**	**20.00**	**-**	**20.00**		**20**		**80**	**-**	**80.00**	**-**	**80.00**	**-**	**80.00**	**-**	Kecamtan Tbu
		7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165,768,938			1	1,419,130.00	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0		1	-	**100.00**	-	1.00	-	0.20	-	Kecamtan Tbu
									Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5																								
		7	01	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124,326,667			1	1,419,130.00	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0		1	-	**100.00**	-	1.00	-	0.20	-	Kecamtan Tbu
									Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5																								
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta Toleransi umat beragama	**7**	**01**						**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**																**-**	**-**							Kecamtan Tbu
		7	**01**	**02**				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100**	**17,240,976,243**	**100**	**2,221,973,700.00**	**100**	**3,078,307,462.00**	**25.00**	**570,500,000.00**	**25.00**	**599,500,000.00**	**25.00**	**-**	**25**	**-**	**100**	**1,170,000,000.00**	**100.00**	**38.01**	**200.00**	**3,391,973,700.00**	**200.00**	**19.67**	Kecamtan Tbu
		7	**01**	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**244,548,031**	**100**	**14,500,000**	**100**	**30,966,231.00**	**25.00**	**-**	**25.00**	**29,000,000.00**	**25.00**	**-**	**25.00**	**-**	**100**	**29,000,000.00**	**100.00**	**93.65**	**200.00**	**43,500,000.00**	**200.00**	**17.79**	Kecamtan Tbu
		7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	244,548,031	1	14,500,000.00	1	30,966,231.00	0.00	-	0.00	29,000,000.00	-	-	0		0.25	29,000,000.00	**25.00**	93.65	1.25	**43,500,000.00**	0.25	**17.79**	Kecamtan Tbu
									Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5																								
		7	**01**	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**16,996,428,212**		**4,649,632,200**	**100**	**3,047,341,231.00**	**25**	**570,500,000.00**	**25**	**570,500,000.00**	**25**	**-**	**25**	**-**	**100**	**1,141,000,000.00**	**100.00**	**37.44**	**100.00**	**5,790,632,200.00**	**100.00**	**34.07**	Kecamtan Tbu
		7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	16,996,428,212	1	4,649,632,200.00	1	3,047,341,231.00	0.25	570,500,000.00		570,500,000.00		-		-	0.25	1,141,000,000.00	**25.00**	37.44	1.25	**5,790,632,200.00**	0.25	**34.07**	Kecamtan Tbu
									Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5																								

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN										I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
											K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
		7	**01**	**03**				**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**100**	**8,117,141,506**		**209,119,000**	**100**	**658,817,731.00**	**25**	**-**	**25**	**-**	**25**	**-**	**25**	**-**	**100**	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**	**209,119,000.00**	**100.00**	**2.58**	Kecamtan Tbu
		7	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**100**	**7,163,264,431**		**209,119,000**	**100**	**647,591,231.00**	**25**	**-**	**25**	**-**	**25**	**-**	**25**	**-**	**100**	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**	**209,119,000.00**	**100.00**	**2.92**	Kecamtan Tbu
		7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	7,163,264,431	1	209,119,000.00	1	647,591,231.00	0.25	-		-		-		-	0.25	-	**25.00**	-	1.25	**209,119,000.00**	**125.00**	**2.92**	Kecamtan Tbu

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14÷8)		(17) = (16/7)*100		(18)
											K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH			K		K	RUPIAH	K	RUPIAH	
									Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																									
		7	**01**	**03**	**2**	**02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**100**	**695,269,575**			**100**	**-**	**25**	**-**	**25**	**-**	**25**	**-**	**25**	**-**	**100**	**-**	**100.00**	**#DIV/0!**	**100.00**	**-**	**100.00**	**-**	Kecamtan Tbu
		7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan PrasaranaKelurahan	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasrana di Kelurahan	Tahun	1	695,269,575	1		1	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	1	-	**100.00**	#DIV/0!	2.00	-	**200.00**	-	Kecamtan Tbu
		7	**01**	**03**	**2**	**06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100**	**258,607,500**			**100**	**11,226,500.00**	**25**	**-**	**25**	**-**	25	-	25	-	100	-	**100.00**	**-**	**100.00**	-	**100.00**	-	Kecamtan Tbu
		7	01	**03**	2	06	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluarga	5,000	25,860,750			1,250	1,122,650.00	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	1	-	**0.08**	-	1.00	-	0.00	-	Kecamtan Tbu
		7	01	**03**	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5,000	25,860,750			1,250	1,122,650.00	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	1	-	**0.08**	-	1.00	-	0.00	-	Kecamtan Tbu
		7	01	**03**	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5,000	25,860,750			1,250	1,122,650.00	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	1	-	**0.08**	-	1.00	-	0.00	-	Kecamtan Tbu
		7	01	**03**	2	06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5,000	25,860,750			1,250	1,122,650.00	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	1	-	**0.08**	-	1.00	-	0.00	-	Kecamtan Tbu
		7	01	**03**	2	06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	5,000	25,860,750			1,250	1,122,650.00	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	1	-	**0.08**	-	1.00	-	0.00	-	Kecamtan Tbu
		7	01	**03**	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5,000	25,860,750			1,250	1,122,650.00	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	1	-	**0.08**	-	1.00	-	0.00	-	Kecamtan Tbu
		7	01	**03**	2	06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5,000	25,860,750			1,250	1,122,650.00	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	1	-	**0.08**	-	1.00	-	0.00	-	Kecamtan Tbu
		7	01	**03**	2	06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5,000	25,860,750			1,250	1,122,650.00	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	1	-	**0.08**	-	1.00	-	0.00	-	Kecamtan Tbu
		7	01	**03**	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5,000	25,860,750			1,250	1,122,650.00	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	1	-	**0.08**	-	1.00	-	0.00	-	Kecamtan Tbu
		7	01	**03**	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5,000	25,860,750			1,250	1,122,650.00	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	1	-	**0.08**	-	1.00	-	0.01	-	Kecamtan Tbu

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
																	I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
											K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
		7	**01**	**04**				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**%**	**100**	**12,688,686,083**	**100**	**3,398,849,120**	**100**	**2,365,328,021.00**	**25**	**468,000,000.00**	**25**	**468,000,000.00**	**25**	**-**	**25**	**-**	**100**	**936,000,000.00**	**100.00**	**39.57**	**200.00**	**4,334,849,120.00**	**200.00**	**34.16**	Kecamtan Tbu
		7	**01**	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100**	**12,688,686,083**	**100**	**3,398,849,120**	**100**	**2,365,328,021.00**	**25**	**468,000,000.00**	**25**	**468,000,000.00**	**25**	**-**	**25**	**-**	**100**	**936,000,000.00**	**100.00**	**39.57**	**200.00**	**4,334,849,120.00**	**200.00**	**34.16**	Kecamtan Tbu
		7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	12,675,568,583	1	3,365,099,120.00	1	2,341,783,891.00	0.25	468,000,000.00		468,000,000.00	0	-	0	-	0.25	936,000,000.00	**25.00**	39.97	1.25	**4,301,099,120.00**	0.25	**33.93**	Kecamtan Tbu
									Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																										
		7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	13,117,500	1	33,750,000.00	1	23,544,130.00	0.00	-	0.00	-	0		0	-	0	-	**0.00**	-	1.00	**33,750,000.00**	0.20	**257.29**	Kecamtan Tbu
									Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5																										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												**73,299,786,344.45**				**12,087,613,454.00**		**2,603,710,273.00**		**2,337,802,663.00**		**-**		**1,000,000.00**		**4,942,512,936.00**						**74.89**	
TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																											**xxx**	**40.89**			**xxx**	**xxx**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																											**xxx**	**xxx**			**xxx**	**xxx**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

Bandar Lampung, 01 Juli 2025

PENGGUNA ANGGARAN
KECAMATAN TELUKBETUNG UTARA

ITA SURYANI, S.Sos, MM
NIP. 19680908 199203 2 003

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN TELUK BETUNG UTARAKOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA						12.174.981.845,00							14.867.356.101,42	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						12.174.981.845,00							14.867.356.101,42	
	7	01				KECAMATAN						12.174.981.845,00							14.867.356.101,42	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	-			98 %	6.041.852.111,00						-	8.228.524.223,88	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	-			98 %	4.240.998,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA	-	156.261.425,36	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.413.666,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA		1.532.726,52	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.413.666,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA		153.272.652,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.413.666,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA		1.456.046,84	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			1 Dokumen	5.025.849.345,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA	-	5.578.173.239,50	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	4.906.831.845,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA		5.449.131.953,59	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	119.017.500,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA		129.041.285,91	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	-			98 %	52.113.373,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA	-	1.453.618.511,34	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.430.832,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA		3.719.780,48	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.016.057,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA		1.411.228.376,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.265.490,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA		11.130.060,96	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA		22.768.643,30	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.738.252,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA		4.053.091,73	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	662.742,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA		718.558,87	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	-			98 %	68.682.152,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA	-	74.466.639,06	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	12.504.294,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA		13.557.419,52	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	40.830.552,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA		44.269.346,40	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	15.347.306,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA		16.639.873,14	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	-			98 %	805.320.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA	-	873.144.944,00	

	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	29.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA		31.442.412,18	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	776.320.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA		841.702.531,82	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	85.646.243,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA	-	92.859.464,62	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	34.670.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA		37.589.945,87	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	42.550.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA		46.133.608,21	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel															
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	1.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA		1.084.221,11	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	6.620.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA		7.177.543,75	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	306.243,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA		332.035,13	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	500.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	ASN KEC TELUKBETUNG UTARA		542.110,55	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	-			100 %	3.078.307.462,00						-	3.393.833.976,86	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	-			100 %	30.966.231,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara	-	34.140.269,68	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															

							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	30.966.231,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara		34.140.269,68	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	-			100 %	3.047.341.231,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara	-	3.359.693.707,18	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	3.047.341.231,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara		3.359.693.707,18	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan undefined	100%			80 % undefined undefined	683.817.731,00						85%	753.909.048,48	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90%			80 %	672.591.231,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara	80%	741.531.832,18	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan			1 Laporan	672.591.231,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara	1 Laporan	741.531.832,18	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	90%			-	11.226.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara	80%	12.377.216,30	
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Keluarga			1 Keluarga	1.122.650,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara	1 Keluarga	1.237.721,63	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1 Keluarga			1 Keluarga	1.122.650,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara	1 Keluarga	1.237.721,63	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga			2 Keluarga	1.122.650,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara	2 Keluarga	1.237.721,63	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	10 Keluarga			2 Keluarga	1.122.650,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara	2 Keluarga	1.237.721,63	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														

							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	10 Keluarga			2 Keluarga	1.122.650,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara	2 Keluarga	1.237.721,63	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga			2 Keluarga	1.122.650,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara	2 Keluarga	1.237.721,63	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10 Keluarga			2 Keluarga	1.122.650,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara	2 Keluarga	1.237.721,63	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 Keluarga			2 Keluarga	1.122.650,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara	2 Keluarga	1.237.721,63	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10 Keluarga			2 Keluarga	1.122.650,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara	2 Keluarga	1.237.721,63	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10 Keluarga			2 Keluarga	1.122.650,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara	2 Keluarga	1.237.721,63	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal	100 %			100 %	2.365.328.021,00							100 %	2.484.830.488,88	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100%			100 %	2.365.328.021,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara	100%	2.484.830.488,88	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			1 Laporan	2.341.783.891,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara	1 Laporan	2.458.873.085,55	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat															
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan			1 Laporan	23.544.130,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara	1 Laporan	25.957.403,33	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan	100 %			100 %	2.838.260,00							100 %	3.129.181,66	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan	100%			100 %	2.838.260,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara	100%	3.129.181,66	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional															

							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10 Orang			10 Orang	1.419.130,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara	10 Orang	1.564.590,83	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 Dokumen			10 Dokumen	1.419.130,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara	10 Dokumen	1.564.590,83	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	100 %			100 %	2.838.260,00						100 %	3.129.181,66	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	-			100 %	2.838.260,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara	-	3.129.181,66	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1.419.130,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara		1.564.590,83	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1.419.130,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Masyarakat Kecamatan Telukbetung Utara		1.564.590,83	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
											J U M L A H	**12.174.981.845,00**							**14.867.356.101,42**	

PENGGUNA ANGGARAN
KECAMATAN TELUKBETUNG UTARA

RITA SURYANI, S.Sos, MM
NIP. 19680908 199203 2 003

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030					
							TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD		
terwujud nya tata kelola pemerintahan urusan kewilayahan yang efektif,efisien,akuntabei,transparan dan inovatif				**Presentase tata kelola pemerintahan urusan kewilayahan**	**%**	**98.00**	**98.00**		**98.00**		**98.00**		**98.00**		**98.00**		**98.00**		**98.00**			
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan			**Indeks Kepuasan masyarakat**	**%**	**98.00**	**98.00**		**98.00**		**98.00**		**98.00**		**98.00**		**98.00**		**98.00**			
		7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98.00**	**98.00**	**6,041,852,111.00**	**98.00**	**6,222,983,121.09**	**98.00**	**6,550,703,599.91**	**98.00**	**6,778,394,253.26**	**98.00**	**6,861,147,613.37**	**98.00**	**7,047,064,932.90**	**98.00**	**33,279,162,510.45**	**Kecamatan Telukbetung Utara**	**Bandar Lampung**
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**%**	**98.00**	**98.00**	**4,240,998.00**	**98.00**	**4,368,140.51**	**98.00**	**4,598,179.56**	**98.00**	**4,758,003.99**	**98.00**	**4,816,091.62**	**98.00**	**4,946,593.82**	**98.00**	**23,359,866.98**	**Kecamatan Telukbetung Utara**	**Bandar Lampung**
		7.01.01.2.01.0001	*Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen*	*5*	*1*	*1,413,666.00*	*1*	*1,456,046.84*	*1*	*1,532,726.52*	*1*	*1,586,001.33*	*1*	*1,605,363.87*	*1*	*1,648,864.61*	*5*	*7,786,622.33*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.01.2.01.0006	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Laporan*	*5*	*1*	*1,413,666.00*	*1*	*1,456,046.84*	*1*	*1,532,726.52*	*1*	*1,586,001.33*	*1*	*1,605,363.87*	*1*	*1,648,864.61*	*5*	*7,786,622.33*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.01.2.01.0007	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Laporan*	*5*	*1*	*1,413,666.00*	*1*	*1,456,046.84*	*1*	*1,532,726.52*	*1*	*1,586,001.33*	*1*	*1,605,363.87*	*1*	*1,648,864.61*	*5*	*7,786,622.33*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98.00**	**98.00**	**5,025,849,345.00**	**98.00**	**5,176,521,217.09**	**98.00**	**5,449,131,953.59**	**98.00**	**5,638,533,961.45**	**98.00**	**5,707,371,449.20**	**98.00**	**5,862,024,761.04**	**98.00**	**27,682,911,470.27**	**Kecamatan Telukbetung Utara**	**Bandar Lampung**
		7.01.01.2.02.0001	*Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang/ Bulan*	*27.00*	*30.00*	*4,906,831,845.00*	*30.00*	*5,053,935,645.64*	*30.00*	*5,320,090,667.67*	*30.00*	*5,505,007,432.96*	*30.00*	*5,572,214,775.21*	*30.00*	*5,723,205,730.84*	*30.00*	*27,027,350,451.67*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.01.2.02.0003	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Dokumen*	*6.00*	*1*	*119,017,500.00*	*1*	*122,585,571.45*	*1*	*129,041,285.91*	*1*	*133,526,528.49*	*1*	*135,156,673.99*	*1*	*138,819,030.20*	*5.00*	*655,561,018.59*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**52,113,373.00**	**98.00**	**53,675,699.87**	**98.00**	**56,502,419.10**	**98.00**	**58,466,341.38**	**98.00**	**59,180,121.96**	**98.00**	**60,783,732.65**	**98.00**	**287,045,988.08**	**Kecamatan Telukbetung Utara**	**Bandar Lampung**
		7.01.01.2.06.0001	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	*5*	*1*	*3,430,832.00*	*1*	*3,533,686.23*	*1*	*3,719,780.48*	*1*	*3,849,073.34*	*1*	*3,896,064.38*	*1*	*4,001,636.49*	*5.00*	*18,897,386.69*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	*5*	*1*	*13,016,057.00*	*1*	*13,406,270.38*	*1*	*14,112,283.76*	*1*	*14,602,801.32*	*1*	*14,781,078.18*	*1*	*15,181,602.79*	*5.00*	*71,693,823.05*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030					
							TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD		
		7.01.01.2.06.0003	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*Paket*	*5*	*1*	*10,265,490.00*	*1*	*10,573,243.08*	*1*	*11,130,060.96*	*1*	*11,516,921.82*	*1*	*11,657,525.03*	*1*	*11,973,410.35*	*5.00*	*56,543,408.16*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.01.2.06.0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*Paket*	*5*	*1*	*21,000,000.00*	*1*	*21,629,567.08*	*1*	*22,768,643.30*	*1*	*23,560,040.32*	*1*	*23,847,670.75*	*1*	*24,493,873.88*	*5.00*	*115,670,228.25*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Paket*	*5*	*1*	*3,738,252.00*	*1*	*3,850,322.50*	*1*	*4,053,091.73*	*1*	*4,193,969.90*	*1*	*4,245,171.57*	*1*	*4,360,203.48*	*5.00*	*20,590,688.67*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.01.2.06.0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	*3*	*1*	*662,742.00*	*1*	*682,610.60*	*1*	*718,558.87*	*1*	*743,534.68*	*1*	*752,612.05*	*1*	*773,005.66*	*5.00*	*3,650,453.26*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98.00**	**98.00**	**68,682,152.00**	**98.00**	**70,741,200.67**	**98.00**	**74,466,639.05**	**98.00**	**77,054,965.24**	**98.00**	**77,995,683.21**	**98.00**	**80,109,141.37**	**98.00**	**378,308,580.88**	**Kecamatan Telukbetung Utara**	**Bandar Lampung**
		7.01.01.2.07.0005	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*Unit*	*10*	*3*	*12,504,294.00*	*3*	*12,879,165.04*	*3*	*13,557,419.52*	*3*	*14,028,650.99*	*3*	*14,199,918.40*	*3*	*14,584,695.25*	*15.00*	*68,874,978.15*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.01.2.07.0006	*Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	*5*	*2*	*40,830,552.00*	*2*	*42,054,626.84*	*2*	*44,269,346.40*	*2*	*45,808,069.11*	*2*	*46,367,312.42*	*2*	*47,623,732.91*	*10.00*	*224,899,012.83*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.01.2.07.0011	*Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	*5*	*1*	*15,347,306.00*	*1*	*15,807,408.79*	*1*	*16,639,873.14*	*1*	*17,218,245.15*	*1*	*17,428,452.40*	*1*	*17,900,713.22*	*5.00*	*84,534,589.91*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**98.00**	**805,320,000.00**	**98.00**	**829,462,998.27**	**98.00**	**873,144,943.99**	**98.00**	**903,493,888.92**	**98.00**	**914,524,105.27**	**98.00**	**939,305,071.94**	**98.00**	**4,435,788,010.12**	**Kecamatan Telukbetung Utara**	**Bandar Lampung**
		7.01.01.2.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Laporan*	*5*	*1*	*29,000,000.00*	*1*	*29,869,402.16*	*1*	*31,442,412.18*	*1*	*32,535,293.77*	*1*	*32,932,497.71*	*1*	*33,824,873.45*	*5.00*	*159,735,077.10*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.01.2.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*Laporan*	*5*	*1*	*776,320,000.00*	*1*	*799,593,596.10*	*1*	*841,702,531.82*	*1*	*870,958,595.15*	*1*	*881,591,607.57*	*1*	*905,480,198.49*	*5.00*	*4,276,052,933.02*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**98.00**	**85,646,243.00**	**98.00**	**88,213,864.69**	**98.00**	**92,859,464.62**	**98.00**	**96,087,092.29**	**98.00**	**97,260,162.11**	**98.00**	**99,895,632.10**	**98.00**	**471,748,594.11**	**Kecamatan Telukbetung Utara**	**Bandar Lampung**
		7.01.01.2.09.0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*Unit*	*1*	*2*	*34,670,000.00*	*2*	*35,709,385.28*	*2*	*37,589,945.87*	*2*	*38,896,504.66*	*2*	*39,371,368.81*	*2*	*40,438,219.40*	*10.00*	*190,966,038.73*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.01.2.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*Unit*	*10*	*10*	*42,550,000.00*	*10*	*43,825,622.83*	*10*	*46,133,608.21*	*10*	*47,737,129.31*	*10*	*48,319,923.36*	*10*	*49,629,253.97*	*50*	*234,369,914.85*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030					
							TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD		
		7.01.01.2.09.0005	*Pemeliharaan Mebel*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*Unit*	*6*	*3*	*1,000,000.00*	*3*	*1,029,979.38*	*3*	*1,084,221.11*	*3*	*1,121,906.68*	*3*	*1,135,603.37*	*3*	*1,166,374.95*	*15*	*5,508,106.11*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.01.2.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Unit*	*6*	*2*	*6,620,000.00*	*2*	*6,818,463.53*	*2*	*7,177,543.75*	*2*	*7,427,022.23*	*2*	*7,517,694.30*	*2*	*7,721,402.15*	*10*	*36,463,662.43*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.01.2.09.0009	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	*1*	*1*	*306,243.00*	*1*	*315,423.98*	*1*	*332,035.13*	*1*	*343,576.07*	*1*	*347,770.58*	*1*	*357,194.16*	*5.00*	*1,686,818.94*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.01.2.09.0011	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	*0*	*0*	*500,000.00*	*0*	*514,989.69*	*0*	*542,110.55*	*0*	*560,953.34*	*0*	*567,801.68*	*0*	*583,187.47*	*0.00*	*2,754,053.05*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100.00**		**2,838,260.00**		**3,092,138.10**	**100.00**	**3,129,181.65**	**100.00**	**3,198,899.82**	**100.00**	**3,238,097.51**	**100.00**	**3,326,105.04**	**100.00**	**15,730,544.02**	**Kecamatan Telukbetung Utara**	**Bandar Lampung**
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**		**2,838,260.00**		**3,092,138.10**	**100.00**	**3,129,181.65**	**100.00**	**3,198,899.82**	**100.00**	**3,238,097.51**	**100.00**	**3,326,105.04**	**100.00**	**15,730,544.02**	**Kecamatan Telukbetung Utara**	**Bandar Lampung**
		7.01.05.2.01.02	*Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	*Orang*	*10*	*10*	*1,419,130.00*	*10*	*1,546,069.05*	*10*	*1,564,590.83*	*10*	*1,599,449.91*	*10*	*1,619,048.76*	*10*	*1,663,052.52*	*50.00*	*7,865,272.01*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.05.2.01.08	*Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	*Orang*	*10*	*10*	*1,419,130.00*	*10*	*1,546,069.05*	*10*	*1,564,590.83*	*10*	*1,599,449.91*	*10*	*1,619,048.76*	*10*	*1,663,052.52*	*50.00*	*7,865,272.01*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**%**			**2,838,260.00**		**3,092,138.10**	**90.00**	**3,129,181.65**	**95.00**	**3,198,899.82**	**100.00**	**3,238,097.51**	**100.00**	**3,326,105.04**	**100.00**	**15,730,544.02**	**Kecamatan Telukbetung Utara**	**Bandar Lampung**
		7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**			**2,838,260.00**		**3,092,138.10**	**90.00**	**3,129,181.65**	**95.00**	**3,198,899.82**	**100.00**	**3,238,097.51**	**100.00**	**3,326,105.04**	**100.00**	**15,730,544.02**	**Kecamatan Telukbetung Utara**	**Bandar Lampung**
		7.01.06.2.01.02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan*	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	*Dokumen*	*2*	*1*	*1,419,130.00*	*1*	*1,546,069.05*	*1*	*1,564,590.83*	*1*	*1,599,449.91*	*1*	*1,619,048.76*	*1*	*1,663,052.52*	*5.00*	*7,865,272.01*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.06.2.01.09	*Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa / Kelurahan*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	*Dokumen*	*2*	*1*	*1,419,130.00*	*1*	*1,546,069.05*	*1*	*1,564,590.83*	*1*	*1,599,449.91*	*1*	*1,619,048.76*	*1*	*1,663,052.52*	*5.00*	*7,865,272.01*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
	Meningkatnya penerapan kebijakan reformasi birokrasi di			**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**	**%**	**100.00**	**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**				**Kecamatan Telukbetung Utara**	**Bandar Lampung**

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030					
							TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD		
	pemerintahan kota Bandar Lampung	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100.00	100.00	3,078,307,462.00	100.00	3,353,657,447.01	100.00	3,393,833,976.86	100.00	3,469,448,597.86	100.00	3,511,961,459.17	100.00	3,607,412,276.16	100.00	17,060,963,772.04	Kecamatan Telukbetung Utara	Bandar Lampung
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100.00	100.00	30,966,231.00	100.00	33,736,113.91	100.00	34,140,269.68	100.00	34,900,914.89	100.00	35,328,572.97	100.00	36,288,760.38	100.00	171,624,748.91	Kecamatan Telukbetung Utara	Bandar Lampung
		7.01.02.2.01.01	*Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait*	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	*Laporan*	*5*	*1*	*30,966,231.00*	*1*	*33,736,113.91*	*1*	*34,140,269.68*	*1*	*34,900,914.89*	*1*	*35,328,572.97*	*1*	*36,288,760.38*	*5.00*	*171,624,748.91*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraaan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan olehunit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100.00	100.00	3,047,341,231.00	100.00	3,319,921,333.10	100.00	3,359,693,707.18	100.00	3,434,547,682.97	100.00	3,476,632,886.20	100.00	3,571,123,515.78	100.00	16,889,339,023.13	Kecamatan Telukbetung Utara	Bandar Lampung
		7.01.02.2.02.03	*Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan*	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Laporan*	*5*	*1*	*3,047,341,231.00*	*1*	*3,319,921,333.10*	*1*	*3,359,693,707.18*	*1*	*3,434,547,682.97*	*1*	*3,476,632,886.20*	*1*	*3,571,123,515.78*	*5.00*	*16,889,339,023.13*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang aman,tentram dan damai berdasarkan nilai nilai budaya	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum Serta Toleransi Antar Umat beragama			Tingkat Capaian keamanan dan ketertiban umum serta toleransi antar umat beragama	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				Kecamatan Telukbetung Utara	Bandar Lampung
		7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban, dan pencegahan tindak krimimal	%	100.00	100.00	2,365,328,021.00	100.00	2,576,903,064.49	100.00	2,607,774,143.15	100.00	2,665,875,351.06	100.00	2,698,541,633.87	100.00	2,771,884,694.89	100.00	13,109,403,843.97	Kecamatan Telukbetung Utara	Bandar Lampung
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	%	100.00	100.00	2,365,328,021.00	100.00	2,576,903,064.49	100.00	2,607,774,143.15	100.00	2,665,875,351.06	100.00	2,698,541,633.87	100.00	2,771,884,694.89	100.00	13,109,403,843.97	Kecamatan Telukbetung Utara	Bandar Lampung
		7.01.04.2.01.01	*Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	*Laporan*	*5*	*1*	*2,341,783,891.00*	*1*	*2,551,252,947.37*	*1*	*2,581,816,739.83*	*1*	*2,639,339,616.79*	*1*	*2,671,680,744.18*	*1*	*2,744,293,759.08*	*5.00*	*12,978,914,750.88*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030					
							TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD		
		7.01.04.2.01.02	*Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*Laporan*	*5*	*1*	*23,544,130.00*	*1*	*25,650,117.11*	*1*	*25,957,403.33*	*1.00*	*26,535,734.27*	*1*	*26,860,889.68*	*1*	*27,590,935.81*	*5.00*	*130,489,093.09*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi melalui Ekonomi Kerakyatan	**Meningkatnya kesejahteraan rakyat**			**Persentase Masyarakat yang Sejahtera**	**%**	**100.00**															**Kecamatan Telukbetung Utara**	**Bandar Lampung**
		7.01.03	**Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluraham**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80.00**	**80.00**	**683,817,731.00**	**80.00**	**744,984,201.31**	**80.00**	**753,909,048.43**	**80.00**	**770,706,142.03**	**85.00**	**780,149,983.72**	**90.00**	**801,353,506.08**	**100.00**	**3,789,936,411.25**	**Kecamatan Telukbetung Utara**	**Bandar Lampung**
		7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**80.00**	**80.00**	**672,591,231.00**	**80.00**	**732,753,507.73**	**80.00**	**741,531,832.18**	**80.00**	**758,053,161.40**	**85.00**	**767,341,959.89**	**90.00**	**788,197,375.83**	**100.00**	**3,727,715,560.30**	**Kecamatan Telukbetung Utara**	**Bandar Lampung**
		7.01.03.2.01.03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Laporan*	*4*	*1*	*672,591,231.00*	*1*	*732,753,507.73*	*1*	*741,531,832.18*	*1*	*758,053,161.40*	*1*	*767,341,959.89*	*1*	*788,197,375.83*	*5.00*	*3,727,715,560.30*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80.00**	**80.00**	**11,226,500.00**	**80.00**	**12,230,693.59**		**12,377,216.25**	**80**	**12,652,980.63**	**1**	**12,808,023.83**	**1**	**13,156,130.25**	**1.00**	**62,220,850.96**	**Kecamatan Telukbetung Utara**	**Bandar Lampung**
		7.01.03.2.06.01	*Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*	*Keluarga*	*2*	*1*	*1,122,650.00*	*1*	*1,223,069.36*		*1,237,721.63*	*1500*	*1,265,298.06*	*1*	*1,280,802.38*	*1*	*1,315,613.02*	*1.00*	*6,222,085.10*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.03.2.06.02	*Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*	*Keluarga*	*2*	*1*	*1,122,650.00*	*1*	*1,223,069.36*		*1,237,721.63*	*1500*	*1,265,298.06*	*1*	*1,280,802.38*	*1*	*1,315,613.02*	*1.00*	*6,222,085.10*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.03.2.06.03	*Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga*	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga*	*Keluarga*	*10*	*2*	*1,122,650.00*	*2*	*1,223,069.36*	*2*	*1,237,721.63*	*2*	*1,265,298.06*	*2*	*1,280,802.38*	*2*	*1,315,613.02*	*10.00*	*6,222,085.10*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.03.2.06.04	*Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri*	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri*	*Keluarga*	*10*	*2*	*1,122,650.00*	*2*	*1,223,069.36*	*2*	*1,237,721.63*	*2*	*1,265,298.06*	*2*	*1,280,802.38*	*2*	*1,315,613.02*	*10.00*	*6,222,085.10*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030					
							TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD		
		7.01.03.2.06.05	*Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah*	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah*	*Keluarga*	*10*	*2*	*1,122,650.00*	*2*	*1,223,069.36*	*2*	*1,237,721.63*	*2*	*1,265,298.06*	*2*	*1,280,802.38*	*2*	*1,315,613.02*	*10.00*	*6,222,085.10*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.03.2.06.06	*Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing*	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing*	*Keluarga*	*10*	*2*	*1,122,650.00*	*2*	*1,223,069.36*	*2*	*1,237,721.63*	*2*	*1,265,298.06*	*2*	*1,280,802.38*	*2*	*1,315,613.02*	*10.00*	*6,222,085.10*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.03.2.06.07	*Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*	*Keluarga*	*10*	*2*	*1,122,650.00*	*2*	*1,223,069.36*	*2*	*1,237,721.63*	*2*	*1,265,298.06*	*2*	*1,280,802.38*	*2*	*1,315,613.02*	*10.00*	*6,222,085.10*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.03.2.06.08	*Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya*	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya*	*Keluarga*	*10*	*2*	*1,122,650.00*	*2*	*1,223,069.36*	*2*	*1,237,721.63*	*2*	*1,265,298.06*	*2*	*1,280,802.38*	*2*	*1,315,613.02*	*10.00*	*6,222,085.10*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.03.2.06.09	*Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup*	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup*	*Keluarga*	*10*	*2*	*1,122,650.00*	*2*	*1,223,069.36*	*2*	*1,237,721.63*	*2*	*1,265,298.06*	*2*	*1,280,802.38*	*2*	*1,315,613.02*	*10.00*	*6,222,085.10*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
		7.01.03.2.06.12	*Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas*	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas*	*Keluarga*	*10*	*2*	*1,122,650.00*	*2*	*1,223,069.36*	*2*	*1,237,721.63*	*2*	*1,265,298.06*	*2*	*1,280,802.38*	*2*	*1,315,613.02*	*10.00*	*6,222,085.10*	*Kecamatan Telukbetung Utara*	*Bandar Lampung*
JUMLAH								**12,174,981,845.00**		**12,904,712,110.10**	*1*	**13,312,479,131.64**	*1*	**13,690,822,143.84**	*1*	**13,858,276,885.15**	*1*	**14,234,367,620.12**		**67,270,927,625.75**		
											1		*1*		*1*		*1*					

Bandar Lampung, Januari 2025

CAMAT TELUKBETUNG UTARA

KOTA BANDAR LAMPUNG

RITA SURYANI, S.Sos, MM

NIP. 19680908 199203 2 003

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	√			
		Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/tahun 2025				
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

CAMAT TELUKBETUNG UTARA
KOTA BANDAR LAMPUNG

RITA SURYANI, S.Sos, MM
NIP. 19680908 199203 2 003

Diverifikasi :	2025	Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST., M.Si	
	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengemnbangan Wilayah Bappeda	
2	Zeldayati Ningsih, S.H., M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

CAMAT TELUKBETUNG UTARA
KOTA BANDAR LAMPUNG

RITA SURYANI, S.Sos, MM
NIP. 19680908 199203 2 003

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST., M.Si	
	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengemnbangan Wilayah Bappeda	
2	Zeldayati Ningsih, S.H., M.M	
	Pungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST., M.SI	
	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda	
2	Zeldayati Ningsih, S.H., M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Bandar Lampung, 2025

Mengetahui,

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP.19700218 199303 2 002

BAB V

PENUTUP

Renja Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Renstra Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Renja Perubahan Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksanaan. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN TELUKBETUNG BARAT
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2022

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR VERIFIKASI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan/Tahun 2025.....1 Formulir E.81

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 12

BAB IV PENUTUP..... 1

LAMPIRAN 39
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Kecamatan Telukbetung Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Telukbetung Barat yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Telukbetung Barat Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;

b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Telukbetung Barat yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Kecamatan Telukbetung Barat Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Telukbetung Barat Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 108);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
8. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173)
9. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 tentang APBD tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 10);

25. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 20);
26. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 47).
27. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

I.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kecamatan Telukbetung Barat Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Telukbetung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Telukbetung Barat Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Kecamatan Telukbetung Barat dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Telukbetung Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung merupakan perubahan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Telukbetung Barat. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan capaian Kinerja.

Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, yang dijabarkan dalam 6 Program dan 13 Kegiatan dan 41 Sub kegiatan. Realisasi Anggaran Belanja pada Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung sampai dengan 23 Juni 2025 sebagai berikut, realisasi Belanja sebesar **Rp. 4.033.873.936,-** atau **41.73%** dari anggaran dana yang tersedia dalam DPA sebesar **Rp 9.665.206.813,-.** Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Modal sebesar **Rp. 0** atau **0%** dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sebesar **Rp. 14.606.346,00,** sedangkan realisasi kinerja rata-rata mencapai **50%**. Evaluasi Kinerja dan Keuangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung sampai dengan triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.1.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan Kecamatan Telukbetung Barat.

Program/kegiatan yang direncanakan dibiayai tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Rencana Kerja Kecamatan Telukbetung Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian misi Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.

Kecamatan Telukbetung Barat memiliki 6 Program, 13 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 11.174.709.313,-.

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	√			
		Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/tahun 2024				
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 2025
Camat Telukbetung Barat
Kota Bandar Lampung,

IDHAM BASYAR SYAPUTRA, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19710723 200003 1 004

Diverifikasi : Tanggal		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST,,M.Si	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
2	ZELDAYATI NINGSIH, S.H., M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tingkat.I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025
Camat Teluk Betung Barat
Kota Bandar Lampung,

IDHAM BASYAR SYAPUTRA, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19710723 200003 1 004

Diverifikasi : Tanggal		Tanda Tangan
1	**FITRI YANTI, ST,,M.Si**	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
2	**ZELDAYATI NINGSIH, S.H., M.M**	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tingkat.I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Diverifikasi : Tanggal		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST,,M.Si	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
2	ZELDAYATI NINGSIH, S.H., M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Bandar Lampung, 2025
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tingkat.I
NIP.19700218 199303 2 002

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Perubahan Renja Kecamatan Telukbetung Barat adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Renstra Kecamatan Telukbetung Barat Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Telukbetung Barat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Formulir E. 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG

RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TELUKBETUNG BARAT KOTA BANDAR LAMPUNG

PERIODE PELAKSANAAN s.d. TRIWULAN I TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2023)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2022 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	**01**				**Kecamatan Telukbetung Barat**			**98,00**	**66.043.836.709,57**	**50,00**	**14.475.386.966,00**		**9.764.290.632,00**	**25,00**	**2.237.795.900,00**	**25,00**	**2.168.078.036,00**		-		-	**50,00**	**4.405.873.936,00**	**51,02**	**45,12**	**50,00**	**18.881.260.902,00**	**51,02**	**28,59**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN**	**PERSEN**	**98,00**	**34.892.437.922,98**	**50,00**	**6.615.369.366,00**	**98,00**	**5.303.174.316,00**	**25,00**	**1.160.795.900,00**	**25,00**	**1.027.078.036,00**		-		-	**50,00**	**2.187.873.936,00**	**51,02**	**41,26**	**50,00**	**8.803.243.302,00**	**51,02**	**25,23**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
											3.027.322.395,00		**3.777.286.483,00**																
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100,00**	**67.239.196,43**	**50,00**	**14.829.800,00**	**100,00**	**14.012.428,00**	25,00	-	-	-	-	-	-	-	25,00	-	**25,00**	-	**50,00**	**14.829.800,00**	**50,00**	**22,06**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	22.413.065,48	1	4.916.300,00	1,00	4.533.727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	4.916.300,00	20,00	21,93	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5							-	-	-	-	-	-	-								
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	22.413.065,48	1	4.949.000,00	1,00	4.609.759,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	4.949.000,00	20,00	22,08	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	5							-	-	-	-	-	-	-								
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	22.413.065,48	1	4.964.500,00	1,00	4.868.942,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	4.964.500,00	20,00	22,15	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5																						
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100,00**	**29.419.757.649,03**	**50,00**	**5.871.613.934,00**	**100,00**	**4.297.936.224,00**	**25,00**	**1.052.795.900,00**	**25,00**	**848.563.036,00**		-		-	50,00	**1.901.358.936,00**	**50,00**	**44,24**	**50,00**	**7.772.972.870,00**	**50,00**	**26,42**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	28.836.348.112,01	29	5.723.713.934,00	29,00	4.242.301.224,00	7,25	1.052.795.900,00	7,25	837.883.036,00	-	-	-	-	-	1.890.678.936,00	-	44,57	29,00	7.614.392.870,00	29,00	26,41	

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	30																						
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	583.409.537,02	1	147.900.000,00	1,00	55.635.000,00	-	-	-	10.680.000,00	-	-	-	-	-	10.680.000,00	-	19,20	-	158.580.000,00	-	27,18	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5																							
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**469.682.291,01**	**50,00**	**96.882.882,00**	**98,00**	**71.229.595,00**	**25,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	25,00	**-**	**25,51**	**-**	**80,00**	**96.882.882,00**	**81,63**	**20,63**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	61.887.070,00	1	19.302.455,00	1,00	7.183.714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.302.455,00	-	31,19	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5																							
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	101.671.615,00	1	38.197.310,00	1,00	18.503.727,00	-	-	-		0,50		0,50	-	1,00	-	100,00	-	1,00	38.197.310,00	100,00	37,57	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5																							
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	39.985.168,51	1	6.685.571,00	1,00	6.382.391,00	-	-	-		0,50		0,50	-	1,00	-	100,00	-	1,00	6.685.571,00	100,00	16,72	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5																							
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	82.003.683,13	1	21.900.000,00	1,00	13.250.000,00	-	-	-				0,45	-	0,45	-	45,00	-	0,45	21.900.000,00	45,00	26,71	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5																							
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	62.294.585,30	1	10.797.546,00	1,00	11.303.417,00	-	-	-		0,50		0,50	-	1,00	-	100,00	-	1,00	10.797.546,00	100,00	17,33	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5																							
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	121.840.169,06	-	-	1,00	14.606.346,00	-	-	-															
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5		-	-																				
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**222.821.080,16**	**-**	**-**	**98,00**	**44.559.878,00**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,00**	**-**	**51,02**	**-**	**50,00**	**-**	**51,02**	**-**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	60.781.943,75	-	-	2,00	12.147.805,00	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10														-								

7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	60.781.943,75	-	-	2,00	9.614.421,00	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10						-	-	-						-								
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	101.257.192,66	-	-	1,00	22.797.652,00	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10																								
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**3.531.798.386,35**	**50,00**	**479.620.000,00**	**100,00**	**701.432.000,00**	**25,00**	**108.000.000,00**	**25,00**	**148.965.000,00**		**-**		**-**	**25,00**	**256.965.000,00**	**25,00**	**36,63**	**50,00**	**736.585.000,00**	**50,00**	**20,86**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	139.245.907,50	1	-	1,00	20.000.000,00	0,32	-	-			-	0,22	-	0,54	-	54,00	-	0,54	-	54,00	-	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5																							
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	3.392.552.478,85	1	479.620.000,00	1,00	681.432.000,00	0,25	108.000.000,00	0,25	148.965.000,00	0,25	-	0,25	-	1,00	256.965.000,00	100,00	37,71	1,00	736.585.000,00	100,00	21,71	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5																							
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**1.181.139.320,01**	**50,00**	**152.422.750,00**	**98,00**	**174.004.191,00**	**25,00**	**-**	**25,00**	**29.550.000,00**		**-**		**-**	**25,00**	**29.550.000,00**	**25,51**	**16,98**	**50,00**	**181.972.750,00**	**51,02**	**15,41**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	206.141.962,23	1	35.494.400,00	1,00	-	0,25		0,25	-			0,25	-	0,75	-	75,00	#DIV/0!	0,75	35.494.400,00	75,00	17,22	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1																							
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	723.423.102,85	1	115.178.350,00	10,00	143.890.000,00	11,50		18,70	29.550.000,00	18,70	-	3,04	-	51,94	29.550.000,00	519,40	20,54	51,94	144.728.350,00	5.194,00	20,01	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10																							

7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	58.098.144,65	1	-	1	7.324.191,00	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5																										
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	58.098.144,65	1	1.750.000,00	3,00	10.790.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750.000,00	-	3,01	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3																										
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	69.070.390,63	1	-	1,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																												
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	66.307.575,00	1	-	1,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																												
																							Rata-Rata Capaian Kinerja		**51,02**	**41,26**			**51,02**	**25,23**	
																							Predikat Kinerja		**R**	**SR**			**R**	**SR**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN**	**PERSEN**	**100,00**	**13.917.164.301,60**	**50,00**	**4.476.196.600,00**	**100,00**	**1.990.137.504,00**	**48,00**	**588.000.000,00**	**-**	**613.000.000,00**	**3,00**	**-**		**-**	**51,00**	**1.201.000.000,00**	**51,00**	**60,35**	**51,00**	**5.677.196.600,00**	**51,00**	**40,79**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persen**	**100,00**	**152.329.220,89**	**50,00**	**1.685.600,00**	**100,00**	**26.492.385,00**	**48,00**	**-**	**-**	**25.000.000,00**	**3,00**	**-**		**-**	**51,00**	**25.000.000,00**	**51,00**	**94,37**	**51,00**	**26.685.600,00**	**51,00**	**17,52**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	152.329.220,89	1	1.685.600,00	1,00	26.492.385,00	48,00		-	25.000.000,00	3,00	-			51,00	25.000.000,00	5.100,00	94,37	51,00	26.685.600,00	5.100,00	17,52	

						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5																					
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persen**	**100,00**	**13.764.835.080,71**	**50,00**	**4.474.511.000,00**	**100,00**	**1.963.645.119,00**	**14,00**	**588.000.000,00**	**21,00**	**588.000.000,00**	**14,00**	**-**	**35,00**	**-**	**84,00**	**1.176.000.000,00**	**84,00**	**59,89**	**84,00**	**5.650.511.000,00**	**84,00**	**41,05**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	13.764.835.080,71	1	4.474.511.000,00	1,00	1.963.645.119,00	14,00	588.000.000,00	21,00	588.000.000,00	14,00	-	35,00	-	84,00	1.176.000.000,00	8.400,00	59,89	84,00	5.650.511.000,00	8.400,00	41,05	
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5																					
																						Rata-Rata Capaian Kinerja	**51,00**	**60,35**			**51,00**	**40,79**	
																						Predikat Kinerja	**R**	**R**			**R**	**SR**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN**	**PERSEN**	**90,00**	**6.404.100.182,22**	**50,00**	**211.821.000,00**	**80,00**	**659.557.368,00**	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**					**40,00**	**-**	**50,00**	**-**	**50,00**	**211.821.000,00**	**55,56**	**3,31**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persen**	**90,00**	**6.114.693.932,22**	**50,00**	**211.821.000,00**	**80,00**	**644.057.368,00**	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**					**40,00**	**-**	**50,00**	**-**	**50,00**	**211.821.000,00**	**55,56**	**3,46**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah ..	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	6.114.693.932,22	1	211.821.000,00	1,00	644.057.368,00	0,25	-	0,25	-					0,50	-	50,00	-	0,50	211.821.000,00	50,00	3,46	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																					
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan KeluargaTingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persen**	**90,00**	**289.406.250,00**			**80,00**	15.500.000,00																

7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5.000	28.940.625,00			-	1.250	1.550.000,00	-		-							-		-		-		-						
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok	Keluarga	5.000	28.940.625,00			-	1.250	1.550.000,00	-		-							-		-		-		-						
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	Keluarga	5.000	28.940.625,00			-	1.250	1.550.000,00	-		-							-		-		-		-						
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	Keluarga	5.000	28.940.625,00			-	1.250	1.550.000,00	-		-							-		-		-		-						
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan	Keluarga	5.000	28.940.625,00			-	1.250	1.550.000,00	-		-							-		-		-		-						
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya	Keluarga	5.000	28.940.625,00			-	1.250	1.550.000,00	-		-							-		-		-		-						
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih	Keluarga	5.000	28.940.625,00			-	1.250	1.550.000,00	-		-							-		-		-		-						

7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi	Keluarga	5.000	28.940.625,00		-	1.250	1.550.000,00	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Keluarga	5.000	28.940.625,00		-	1.250	1.550.000,00	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga	Keluarga	5.000	28.940.625,00		-	1.250	1.550.000,00	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	
																						Rata-Rata Capaian Kinerja						**50,00**	-			**55,56**	**3,31**	
																						Predikat Kinerja						**SR**	**SR**			**R**	**SR**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL**	**PERSEN**	**100,00**	**10.249.943.021,51**	**50,00**	**3.172.000.000,00**	**100,00**	**1.786.304.326,00**	**15,00**	**489.000.000,00**	**15,00**	**528.000.000,00**			-		-	**30,00**	**1.017.000.000,00**	**30,00**	**56,93**	**50,00**	**4.189.000.000,00**	**50,00**	**40,87**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**Persen**	**100,00**	**10.249.943.021,51**	**50,00**	**3.172.000.000,00**	**100,00**	**1.786.304.326,00**	**15,00**	**489.000.000,00**	**15,00**	**528.000.000,00**			-		-	**30,00**	**1.017.000.000,00**	**30,00**	**56,93**	**50,00**	**4.189.000.000,00**	**50,00**	**40,87**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	10.118.768.021,51	1	3.151.000.000,00	1,00	1.761.350.772,00	0,25	489.000.000,00	0,25	528.000.000,00	0,25	-	0,25	-	1,00	1.017.000.000,00	100,00	57,74	1,00	4.168.000.000,00	100,00	41,19	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Laporan	5												-										
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	131.175.000,00	1	21.000.000,00	1,00	24.953.554,00	-	-	-	-			1,00	-	1,00	-	100,00	-	1,00	21.000.000,00	100,00	16,01	

						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5																									

7	01	06	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124.326.703,13	1		1,00	5.793.780,00	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5																							
Rata-Rata Capaian Kinerja																									-	-			-	-	
Predikat Kinerja																									**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**66.043.836.709,57**		-		###############		**2.237.795.900,00**		###############		-		-		**4.405.873.936,00**	#DIV/0!	**45,12**				##########	
TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																														
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																														

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

Bandar Lampung, 2024

CAMAT TELUKBETUNG BARAT

Catatan :

*) Nama

**) Klasifikasi Interval Capaian Kinerja :

IDHAM BASYAR SYAHPUTRA, SH

NIP. 19710723 20003 1 004

TABEL 5.1
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									1.414.053.711.342,73	1.614.767.345.575,00	1.828.505.325.502,00	
1	01				PENDIDIKAN									649.023.517.494,00	718.176.019.842,00	691.976.919.842,00	
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									649.023.517.494,00	718.176.019.842,00	691.976.919.842,00	
1	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	Persen	98,00	98,00	98,00	466.160.756.561,00	481.651.254.817,00	438.952.154.817,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	Persen	100,00	100,00	100,00	90.000.000,00	89.999.936,00	89.999.936,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3	3	30.000.000,00	30.000.150,00	30.000.150,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen RKA Dinas Pendidikan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	30.000.000,00	29.999.845,00	29.999.845,00	
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	3	3	3	30.000.000,00	29.999.941,00	29.999.941,00	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	Persen	100,00	100,00	100,00	462.213.883.494,00	477.163.473.250,00	434.464.373.250,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	3.377	3.377	3.377	461.628.433.494,00	476.578.023.250,00	433.878.923.250,00	
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	585.450.000,00	585.450.000,00	585.450.000,00	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	Persen	98,00	98,00	98,00	287.724.317,00	446.751.631,00	446.751.631,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.000.000,00	10.999.043,00	10.999.043,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	45.762.087,00	158.000.000,00	158.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.000.000,00	10.991.467,00	10.991.467,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	28.712.230,00	51.669.000,00	51.669.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	153.842.121,00	153.842.121,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**95.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	01	2.07	0006	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	15	15	15	95.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**2.260.000.000,00**	**2.484.000.000,00**	**2.484.000.000,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.160.000.000,00	2.184.000.000,00	2.184.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.244.148.750,00**	**1.267.030.000,00**	**1.267.030.000,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	4	4	4	170.000.000,00	44.930.000,00	44.930.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	60.000.000,00	210.280.000,00	210.280.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	Paket	4	4	4	11.550.000,00	11.820.000,00	11.820.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	Paket	1	1	1	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	-	Paket	Paket	1	-	-	2.598.750,00	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**			**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**APK PAUD**	**APK PAUD**	**Angka**	**Angka**	**72,27**	**72,27**	**72,27**	**177.074.703.433,00**	**229.536.707.924,00**	**246.036.707.924,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
							APK SD	**APK SD**	**Angka**	**Angka**	**126,37**	**126,37**	**126,37**				
							APM SD	**APM SD**	**Angka**	**Angka**	**99,63**	**99,63**	**99,63**				
							APK SMP	**APK SMP**	**Angka**	**Angka**	**112,74**	**112,74**	**112,74**				
							APM SMP	**APM SMP**	**Angka**	**Angka**	**88,49**	**88,49**	**88,49**				
							Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini	**Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini**	**Persen**	**Persen**	**99,72**	**99,72**	**99,72**				
							Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar	**Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar**	**Persen**	**Persen**	**98,96**	**98,96**	**98,96**				
							Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan	**Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Meningkatkan APK SD**	**Meningkatkan APK SD**	**Angka**	**Angka**	**126,37**	**126,37**	**126,37**	**86.377.284.000,00**	**99.138.704.538,00**	**100.549.685.561,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
							Meningkatkan APM SD	**Meningkatkan APM SD**	**Angka**	**Angka**	**99,63**	**99,63**	**99,63**				
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	Paket	5	5	5	500.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	Peserta Didik	360	360	360	300.000.000,00	298.658.559,00	298.658.559,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	Orang	100	100	100	125.000.000,00	1.342.299.812,00	1.342.299.812,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	168	168	168	150.000.000,00	147.173.944,00	1.647.173.944,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan dana Bos Sekolah Dasar	Pengelolaan dana Bos Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	182	182	182	76.770.900.000,00	77.774.499.821,00	77.774.499.821,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Siswa	Siswa	13.275	13.275	13.275	2.500.000.000,00	8.674.999.856,00	8.674.999.856,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Ruang	17	17	17	6.031.384.000,00	9.651.072.546,00	9.562.053.569,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pendidikan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama**	**Pendidikan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama**	**Meningkatkan APK SMP**	**Meningkatkan APK SMP**	**Angka**	**Angka**	**113**	**113**	**113**	**70.606.319.433,00**	**109.647.965.860,00**	**119.736.984.837,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
							Meningkatkan APM SMP	**Meningkatkan APM SMP**	**Angka**	**Angka**	**88**	**88**	**88**				
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	Unit	23	23	23	271.589.683,00	3.946.849.000,00	3.772.373.327,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	Paket	5	5	5	1.500.000.000,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	Unit	3	3	3	2.101.863.000,00	-	263.494.650,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	Peserta Didik	243	243	243	400.000.000,00	400.022.000,00	400.022.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	Orang	Orang	200	200	200	125.000.000,00	122.299.812,00	122.299.812,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	45	45	45	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	138	138	138	50.441.100.000,00	49.338.499.821	49.338.499.821,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0058	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	Peserta Didik	99.339	99.339	99.339	8.540.166.750,00	8.521.579.783,00	18.521.579.783,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0059	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	Ruang	9	9	9	4.526.600.000,00	38.229.245.444,00	38.229.245.444,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket	Paket	7.250	7.250	7.250	2.500.000.000,00	7.039.470.000,00	7.039.470.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Meningkatkan APK PAUD**	**Meningkatkan APK PAUD**	**Angka**	**Angka**	**72**	**72**	**72**	**13.757.000.000,00**	**13.438.537.526,00**	**13.438.537.526,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	02	2.03	0012	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	-	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	-	Paket	0	1	1	0	264.942.000,00	264.942.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Paud	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Paud	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	5	5	5	350.000.000,00	349.999.975,00	349.999.975,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan dana BOP PAUD	Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	600	600	600	13.407.000.000,00	12.823.595.551,00	12.823.595.551,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Disalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal**	**Disalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal**	**Lembaga Non Formal**	**Lembaga Non Formal**	**21**	**21**	**21**	**6.334.100.000,00**	**7.311.500.000,00**	**12.311.500.000,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan dana Bop Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan dana Bop Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	60	60	60	5.234.100.000,00	6.211.500.000	6.211.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	Peserta Didik	14.165	14.165	14.165	1.100.000.000,00	1.100.000.000	6.100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**04**			**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Kualifikasi Guru S1/D.IV**	**Kualifikasi Guru S1/D.IV**	**Persen**	**Persen**	**88,06**	**88,06**	**88,06**	**5.788.057.500,00**	**6.988.057.101,00**	**6.988.057.101,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Dilaksanakannya Pengelolaan Manajemen Pendataan Sertifikasi**	**Dilaksanakannya Pengelolaan Manajemen Pendataan Sertifikasi**	**Bulan**	**Bulan**	**88**	**88**	**88**	**5.788.057.500,00**	**6.988.057.101,00**	**6.988.057.101,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Buku	Buku	1	1	1	200.000.000,00	1.399.999.916,00	1.399.999.916,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan*	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan*	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	Laporan	5	5	5	5.588.057.500,00	5.588.057.185,00	5.588.057.185,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**02**				**KESEHATAN**									**341.959.735.536,73**	**430.229.951.160,00**	**482.515.065.874,00**	
					DINAS KESEHATAN									**256.711.967.599,73**	**355.131.167.097,00**	**407.512.385.123,00**	
1	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Kesehatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Kesehatan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**166.492.518.822**	**212.928.141.709**	**225.755.280.759**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**25.000.000,00**	**24.999.748,00**	**24.999.748,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)		25.000.000,00	24.999.748,00	24.999.748,00	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**77.754.723.222,00**	**112.110.092.619,00**	**110.810.092.619,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	1.194	1.194		77.538.723.222	111.907.198.719	110.607.198.719	
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		216.000.000	202.893.900	202.893.900	
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	10	10		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**282.560.763,00**	**437.555.518,00**	**437.555.518,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		20.000.000	29.994.779	29.994.779	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		50.000.000	75.000.000	75.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		12.060.763	17.060.763	17.060.763	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0004	Peneyediaan bahan logistik kantor	Peneyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		30.000.000	50.000.000	50.000.000	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		50.000.000	77.499.976	77.499.976	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	10	10		7.500.000	10.000.000	10.000.000	
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	12	12		8.000.000	28.000.000	28.000.000	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	12	12		75.000.000	150.000.000	150.000.000	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**848.018.926,73**	**676.018.927,00**	**676.018.927,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		450.000.000	550.000.000	550.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit		1			220.000.000			Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit		1			100.000.000			Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		78.018.927	126.018.927	126.018.927	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**20.169.500.000,00**	**20.185.000.000,00**	**20.262.100.000,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		170.000.000	186.000.000	204.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		19.999.500.000	19.999.000.000	20.058.100.000	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**		**695.869.910,00**	**747.628.897,00**	**862.708.147,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1		30.000.000	47.430.000	47.430.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	8 unit mobil. 38 unit motor	8 unit mobil. 38 unit motor		455.869.910	478.557.552	497.336.802	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Direlihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Direlihara	Unit	Unit	1	1		10.000.000	20.000.000	20.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1		150.000.000	151.753.745	248.053.745	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	Unit	1	1		50.000.000	49.887.600	49.887.600	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan pelayanan BLUD**	**Peningkatan pelayanan BLUD**	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**	**Unit**	**Unit**	**31**	**31**		**66.696.846.000,00**	**78.696.846.000,00**	**92.631.805.800,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	Unit	31	31		66.696.846.000	78.696.846.000	92.631.805.800	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup**	**Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup**	**Angka**	**Angka**	**2**	**2**		**88.369.448.778,00**	**139.042.453.855,00**	**178.479.700.831,00**	**Dinas Kesehatan**
							Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	**Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup**	**Kasus**	**Kasus**	**10**	**10**					
							Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	**Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)**	**Persen**	**Persen**	**6,30**	**6,30**					
							Tingkat Prevalensi Tubercolosis per 100.000 Penduduk	**Tingkat Prevalensi Tubercolosis per 100.000 Penduduk**	**Kasus**	**Kasus**	**384**	**384**					
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persen**	**Persen**	**82,00**	**82,00**		**13.833.613.000,00**	**18.465.841.795,00**	**19.118.313.622,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	02	2.01	0007		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Unit		1			179.535.500	1.333.113.500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		Unit		3			6.000.000.000			Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		Unit		1			150.000.000			Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		3.500.000.000	8.279.685.000	8.279.685.000	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Vaksin	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang	Paket	Paket	1	10		3.000.000.000	9.666.835.659	9.165.729.486	
1	02	02	2.01	0026	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Jumlah Obat, vaksin, Bahan Medis Habis Paka (BMHP Makanan dan Minuman serta	Paket	Paket	1	10		1.000.000.000	159.999.436	159.999.436	
1	02	02	2.01	0020	Pemelihraan rutin dan berkala alat kesehatan/Alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan	Pemelihraan rutin dan berkala alat kesehatan/Alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/Ala penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/Ala penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan	Unit	Unit	1	1		183.613.000	179.786.200	179.786.200	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persen**	**Persen**	**82,00**	**82,00**		**74.385.835.778,00**	**120.284.612.895,00**	**159.069.388.044,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	19592	19592		500.000.000	1.038.870.000	1.038.870.000	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	18702	18702		300.000.000	991.300.000	991.300.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	Orang	17.811	17.811		250.000.000	372.000.000	372.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	86.512	86.512		250.000.000	142.499.863	142.499.863	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	155442	155442		300.000.000	1.064.500.000	1.064.500.000	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	754465	754465		350.000.000	149.999.746	183.279.746	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	92994	92994		250.000.000	150.000.000	150.000.000	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	200001	200001		300.000.000	99.999.887	99.999.887	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	18644	18644		300.000.000	1.812.506.060	1.812.506.060	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Orang	1882	1882		250.000.000	149.999.584	149.999.584	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Orang	23474	23474		500.000.000	3.502.760.000	3.502.760.000	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Orang	28060	28060		300.000.000	407.300.000	407.300.000	
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana danatau Berpotensi Bencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana danatau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	Dokumen	1	1		750.000.000	952.286.000	963.018.500	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Dokumen	1	1		500.000.000	7.966.517.000	7.966.517.000	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Dokumen	1	1		200.000.000	99.999.707	99.999.707	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	Dokumen	1	1		200.000.000	908.475.000	908.475.000	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Dokumen	1	1		500.000.000	823.644.600	823.644.600	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Dokumen	1	1		200.000.000	1.552.379.097	1.552.379.097	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	Orang	1.851	1.851		200.000.000	99.999.957	132.639.957	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	Orang	1.851	1.851		200.000.000	40.500.000	68.660.000	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	Dokumen	1	1		200.000.000	7.104.464.036	7.774.306.209	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Dokumen	1	1		32.369.821.778	49.310.091.378	87.023.349.604	
1	02	02	2.02	0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke LaboratoriumRujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusika		Paket		1			90.200.000	90.200.000	
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	Dokumen	1	1		200.000.000	99.999.835	99.999.835	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Dokumen	1	1		18.242.514.000	6.011.467.000	6.011.467.000	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	Dokumen	1	1		14.573.500.000	31.075.532.900	31.091.937.650	
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	Unit	12	12		1.150.000.000	74.998.419	91.018.419	
1	02	02	2.02	0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal		Laporan		1			116.900.000	116.900.000	
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	Dokumen	1	1		300.000.000	124.999.802	308.797.302	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah Orang dengan tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	orang	80	80		250.000.000	384.300.000	464.940.000	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan HIV (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	orang	70	70		250.000.000	195.700.000	195.700.000	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah Orang dmenderita malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang dmenderita malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	orang	30	30		250.000.000	84.913.024	84.913.024	
1	02	02	2.02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		Dokumen		1			951.500.000	951.500.000	
1	02	02	2.02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		Dokumen		1			2.334.010.000	2.334.010.000	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**150.000.000,00**	**291.999.165,00**	**291.999.165,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	02	2.03	0001	Pengelolaan Data dan informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Dokumen		1			100.000.000		192.000.000	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	Dokumen	1	1		50.000.000	291.999.165	99.999.165	
1	**02**	**03**			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase SDM Kesehatan dengan Kompetensi sesuai Standar**	**Persentase SDM Kesehatan dengan Kompetensi sesuai Standar**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**450.000.000,00**	**1.824.223.761,00**	**1.847.623.761,00**	**Dinas Kesehatan**
									Persen	**Persen**							
							Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar	**Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar**	**Persen**	**Persen**	**60,00**	**60,00**					
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**persen**	**persen**	**82,00**	**82,00**		**300.000.000,00**	**313.354.820,00**	**336.754.820,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Orang	Orang	50	50		150.000.000	99.999.820	99.999.820	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	dokumen	1	1		150.000.000	213.355.000	236.755.000	
1	02	03	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	persen	persen	**82**	**82**		**150.000.000,00**	**1.510.868.941,00**	**1.510.868.941,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan	orang	orang	200	200		150.000.000	1.510.868.941	1.510.868.941	
1	**02**	**04**			**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar**	**Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**		**500.000.000,00**	**333.331.000,00**	**351.763.000,00**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase pengelolaan apotek,toko obat,toko alat kedehatan, optik dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar**	**Persentase pengelolaan apotek,toko obat,toko alat kedehatan, optik dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar**	**persen**	**persen**	**100**	**100**		**150.000.000,00**	**63.730.000,00**	**63.730.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.01**	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat	**dokumen**	**dokumen**	**1**	**1**		150.000.000	63.730.000	63.730.000	
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase industri rumah tangga sesuai standar**	**Persentase industri rumah tangga sesuai standar**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**200.000.000,00**	**85.387.000,00**	**103.819.000,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	Dokumen	1	1		200.000.000	85.387.000	103.819.000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindaak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga**	**Pemeriksaan dan Tindaak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar**	**Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**150.000.000,00**	**184.214.000,00**	**184.214.000,00**	**Dinas Kesehatan**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka	Unit	Unit	50	50		150.000.000	184.214.000	184.214.000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Persentase Masyarakat ber PHBS**	**Persentase Masyarakat ber PHBS**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**75,00**		**900.000.000,00**	**1.003.016.772,00**	**1.078.016.772,00**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persen**	**persen**	**74,00**	**74,00**		**500.000.000,00**	**501.499.918,00**	**576.499.918,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan		Dokumen		1		500.000.000,00	501.499.918	576.499.918	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	**2.02**			**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**		**persen**		**82,00**		**250.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Dokumen		1		250.000.000	100.000.000	100.000.000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	**2.03**			**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**		**persen**		**82,00**		**150.000.000,00**	**401.516.854,00**	**401.516.854,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan		Dokumen		1		150.000.000	401.516.854	401.516.854	Dinas Kesehatan
					RSUD A. DADI TJOKRODIPO									**85.247.767.937,00**	**75.098.784.063,00**	**75.002.680.751,00**	
1	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**22.818.896.437,00**	**26.474.351.535,00**	**26.378.248.223,00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**6,00**	**6,00**		**56.895.300,00**	**6.007.272,00**	**6.007.272,00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	01.	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Laporan	6	6		56.895.300,00	6.007.272,00	6.007.272,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**24,00**	**24,00**		**15.046.031.137,00**	**19.604.344.263,00**	**19.508.240.951,00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	241	241		15.008.831.137,00	19.530.904.263,00	19.434.800.951,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12		37.200.000,00	73.440.000,00	73.440.000,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Persen**		**100.00**			**911.970.000,00**			**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang		Paket		12			911.970.000,00			RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**		**6.804.000.000,00**	**6.864.000.000,00**	**6.864.000.000,00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		924.000.000,00	984.000.000,00	984.000.000,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		5.880.000.000,00	5.880.000.000,00	5.880.000.000,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	**02**	**02**	**2**		**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**62.428.871.500,00**	**48.624.432.528,00**	**48.624.432.528,00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
							Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk	**Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk**	**Perbandingan**	**Perbandingan**	**1:6042**	**1:6042**					
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengadaan Alat Kesehatan E-Catalog dan Obat Bagi Pasien**	**Pengadaan Alat Kesehatan E-Catalog dan Obat Bagi Pasien**	**Paket**	**Paket**	**2**	**2**		**29.290.065.640,00**	**11.957.695.728,00**	**11.957.695.728,00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	Unit	1	1		26.312.200.000,00	11.641.103.000,00	11.641.103.000,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Vaksin	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		2.977.865.640,00	316.592.728,00	316.592.728,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tk.Daerah Kab/Kota**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tk.Daerah Kab/Kota**	**Sarana dan Prasarana Pelayanan RSUD yang Tersedia**	**Sarana dan Prasarana Pelayanan RSUD yang Tersedia**	**Bulan**	**Bulan**	**12**	**12**		**33.138.805.860,00**	**36.666.736.800,00**	**36.666.736.800,00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Disediakan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Disediakan	Dokumen	Dokumen	12	12		33.138.805.860,00	36.666.736.800,00	36.666.736.800,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	**03**				**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									**341.916.611.613,00**	**351.223.166.874,00**	**532.027.982.117,00**	
					DINAS PEKERJAAN UMUM									**339.614.451.613,00**	**348.996.828.249,00**	**529.722.116.402,00**	
1	**03**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**87.381.468.736,00**	**89.359.396.252,00**	**105.504.053.422,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**190.000.000,00**	**168.000.000,00**	**265.545.701,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	4 Laporan (1 Laporan Evaluasi Renja, 1 Laporan Evaluasi LPJ, 1 Laporan LKIP, Laporan Realisasi Fisik dan	4 Laporan (1 Laporan Evaluasi Renja, 1 Laporan Evaluasi LPJ, 1 Laporan LKIP, Laporan Realisasi Fisik dan	4 Laporan (1 Laporan Evaluasi Renja, 1 Laporan Evaluasi LPJ, 1 Laporan LKIP, Laporan Realisasi Fisik dan	190.000.000,00	168.000.000,00	265.545.701,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.836.211.613,00**	**8.815.275.249,00**	**8.165.275.249,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	Orang / Bulan	90	90	90	6.518.451.613,00	8.240.835.249,00	7.590.835.249,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	251.760.000,00	526.440.000,00	526.440.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	66.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000,00**	**277.882.464,00**	**123.303.664,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	Orang	10	10	10	50.000.000,00	277.882.464,00	123.303.664,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**698.301.773,00**	**684.490.400,00**	**737.833.115,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	273.763.806,00	348.333.973,00	353.227.065,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	150.137.967,00	58.691.892,00	78.691.892,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	56.300.000,00	59.364.535,00	59.364.535,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	12	12	12	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	150.000.000,00	150.000.000,00	178.449.623,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**20.000.000,00**	**42.226.275,00**	**42.226.275,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	25	25	25	20.000.000,00	42.226.275,00	42.226.275,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**77.670.350.000,00**	**77.635.600.000,00**	**94.635.600.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	74.020.000.000,00	74.020.000.000,00	91.020.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disebikan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disebikan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.650.350.000,00	3.615.600.000,00	3.615.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.916.605.350,00**	**1.735.921.864,00**	**1.534.269.418,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	2	2	2	67.100.000,00	42.430.000,00	42.430.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	27	27	27	1.811.005.350,00	1.639.011.864,00	1.437.359.418,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	38.500.000,00	54.480.000,00	54.480.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**02**			**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenagan Kota**	**Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenagan Kota**	**Persen**	**Persen**	**8,576**	**8,576**	**8,576**	**8.200.000.000,00**	**5.808.000.000,00**	**6.923.622.100,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenagan Kab/Kota**	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenagan Kab/Kota**	**Ha**	**Ha**	**17,15**	**17,15**	**17,15**	**8.200.000.000,00**	**5.808.000.000,00**	**6.923.622.100,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	02	2.01	0014	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	Unit	3	4	4	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km	Km	15	15	15	8.000.000.000,00	5.608.000.000,00	6.723.622.100,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**03**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum**	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum**	**Persen**	**Persen**	**46,82**	**46,82**	**46,82**	**5.000.000.000,00**	**20.008.000.000,00**	**20.727.470.610,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
							Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan	**Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan**	**Persen**	**Persen**	**63,80**	**63,80**	**63,80**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penduduk berakses air minum**	**Persentase penduduk berakses air minum**	**Persen**	**Persen**	**46,32**	**46,32**	**46,32**	**5.000.000.000,00**	**20.008.000.000,00**	**20.727.470.610,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
							Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	**Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan**	**Persen**	**Persen**	**63,30**	**63,30**	**63,30**				
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	liter/ detik	liter/ detik	630,00	1.157,10	1.157,10	5.000.000.000,00	20.008.000.000,00	20.727.470.610,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**05**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**	**Persen**	**Persen**	**62,00**	**62,00**	**62,00**	**2.700.000.000,00**	**668.000.000,00**	**2.231.935.254,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase rumah Tinggal Bersanitasi**	**Persentase rumah Tinggal Bersanitasi**	**Persen**	**Persen**	**61,50**	**61,50**	**61,50**	**2.700.000.000,00**	**668.000.000,00**	**2.231.935.254,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Rumah Tangga	M3/hari	250	200	200	2.500.000.000,00	668.000.000,00	2.231.935.254,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	05	2.01	0016	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT		Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	-	M3/hari	-	2	-	-	200.000.000,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**06**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**Persen**	**Persen**	**69,47**	**69,47**	**69,47**	**15.500.000.000,00**	**16.435.047.835,00**	**21.140.443.659,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**Persen**	**Persen**	**68,47**	**68,47**	**68,47**	**15.500.000.000,00**	**16.435.047.835,00**	**21.140.443.659,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	M	Sistem Drainase Perkotaan	25.772,5	3	3	10.000.000.000,00	9.514.974.835,00	13.385.751.209,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	M	Sistem Drainase Perkotaan	1.990	3	3	5.500.000.000,00	6.920.073.000,00	7.754.692.450,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**07**			**Program Pengembangan Permukiman**	-	**Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantab**	-	**Persen**	-	**87,09**	-	-	**77.283.249.313,00**	-	-	**Dinas Pekerjaan Umum**
							Rasio Jumlah Lampu PJU terhadap Panjang Jalan Kota	-	**Angka**	-	**22,20**	-	-				
1	**03**	**07**	**2.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	-	**Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi mantab**	-	**Persen**	-	**86,59**	-	-	**77.283.249.313,00**	-	-	**Dinas Pekerjaan Umum**
							Rasio jumlah lampu PJU terhadap panjang jalan kota	-	**Titik Lampu /Km**	-	**21,70**	-	-				
1	03	07	2.01	0001	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	Sistem Jaringan	-	7	-	-	77.283.249.313,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**08**			**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Persentase Pemenuhan Gedung Kantor Pemerintah**	**Persentase Pemenuhan Gedung Kantor Pemerintah**	**Persen**	**Persen**	**79,00**	**79,00**	**79,00**	**99.346.923.766,00**	**68.952.746.684,00**	**141.295.337.394,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri**	**Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri**	**Persen**	**Persen**	**79,00**	**79,00**	**79,00**	**99.346.923.766,00**	**68.952.746.684,00**	**141.295.337.394,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	08	2.01	0021	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	60	60	60	99.346.923.766,00	68.952.746.684,00	141.295.337.394,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**10**			**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap**	**Persen**	**Persen**	**89,64**	**89,64**	**86,81**	**42.702.809.798,00**	**146.265.637.478,00**	**230.793.824.963,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
								Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantap	-	**Persen**	-	**87,09**	**87,09**				
							Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	**Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk**	**Angka**	**Angka**	**1,46**	**1,46**	**1,46**				
								Rasio Jumlah Lampu PJU terhadap Panjang Jalan Kota	-	**Angka**	-	**22,20**	**22,20**				
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**	**Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**42.702.809.798,00**	**146.265.637.478,00**	**230.793.824.963,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
								Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantap	-	**Persen**		**87,09**	**87,09**				
							Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	**Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk**	**Angka**	**Angka**	**1,47**	**1,46**	**1,46**				
								Rasio Jumlah Lampu PJU terhadap Panjang Jalan Kota	-	**Angka**		**22,20**	**22,20**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	KM	20,81	20,81	20,81	11.639.344.308,00	115.639.435.514,00	179.041.174.679,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	KM	13,45	15,45	15,45	15.000.000.000,00	15.500.000.000,00	22.210.885.150,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Jumlah Jembatan yang Dibangun	M	Jembatan	116,98	5,00	5,00	13.063.465.490,00	12.626.201.964,00	24.712.215.614,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	M	Jembatan	3.021,98	5,00	5,00	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	4.829.549.520,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**11**			**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi**	**Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi**	**Angka**	**Angka**	**55,00**	**55,00**	**55,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.105.429.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
							Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi	**Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi**	**Angka**	**Persen**	**45,00**	**45,00**	**45,00**				
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Rasio tenaga operator/teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Rasio tenaga operator/teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Angka**	**Angka**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**777.000.000,00**	**650.000.000,00**	**583.897.625,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
							Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi	**Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi**	**Persen**	**Persen**	**35,00**	**35,00**	**35,00**				
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	Orang	50,00	55,00	55,00	777.000.000,00	650.000.000,00	583.897.625,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**11**	**2.02**		**-**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	-	**Ketersediaanya Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kota Bandar Lampung**	-		**-**	**100,00**	**100,00**	**-**	**250.000.000,00**	**108.412.897,00**	
1	03	11	2.02	0012	-	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	-	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	-	Perangkat Pendukung	-	1,00	1,00	-	200.000.000,00	78.412.897,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	11	2.02	0014	-	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	-	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	Orang	-	2,00	2,00	-	50.000.000,00	30.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Rasio tenaga operator/teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Rasio tenaga operator/teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Orang**	**Orang**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**723.000.000,00**	**600.000.000,00**	**413.118.478,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
							Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi	**Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi**	**Persen**	**Persen**	**35,00**	**35,00**	**35,00**				
1	03	11	2.04	0006	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Orang	Lembaga	50	55	55	350.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Laporan	Badan Usaha	5	5	5	373.000.000,00	300.000.000,00	213.118.478,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**				**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**									**2.302.160.000,00**	**2.226.338.625,00**	**2.305.835.715,00**	
1	**03**	**08**			**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Persentase SLF yang Diterbitkan**	**Persentase SLF yang Diterbitkan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**442.160.000,00**	**440.213.312,00**	**440.213.312,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
							Persentase KRK yang Terbit	**Persentase KRK yang Terbit**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**		**Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan**		**Persen**		**100,00**			**442.160.000,00**	**440.213.312,00**	**440.213.312,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	03	08	2.01	0001	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Dokumen		20			442.160.000,00			
				0023		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim		Dokumen		25	25		440.213.312,00	440.213.312	
1	**03**	**09**			**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda**	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**160.000.000,00**	**151.000.022,00**	**151.000.022,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda**		**Persen**		**100,00**			**160.000.000,00**	**151.000.022,00**	**151.000.022,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	03	09	2.01	0006	Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Dokumen		**1,00**			160.000.000,00			
1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan		Dokumen		1	1		151.000.022,00	151.000.022	
1	**03**	**12**			**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**	**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**	**Persen**	**Persen**	**55,65**	**55,65**	**55,65**	**1.700.000.000,00**	**1.635.125.291,00**	**1.714.622.381,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
							Luasan RTH Publik sebesar 20Persen dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan	**Luasan RTH Publik sebesar 20Persen dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan**	**Persen**	**Persen**	**4,70**	**4,70**	**4,70**			**79.497.090,00**	
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**		**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**		**Persen**		**55,15**			**1.450.000.000,00**	**1.436.763.390,00**	**1.516.260.480,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
							Luasan RTH Publik sebesar 20Persen dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan		**Persen**		**4,80**						
1	03	12	2.01	0001	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		Dokumen		1			1.400.000.000,00			
1	03	12	2.01	0006		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kot	Dokumen			1			1.327.536.856,00	1.327.536.856	
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		Dokumen		1						
1	03	12	2.01	0003		Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen			1	1	50.000.000,00	109.226.534,00	188.723.624	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah**		**Dokumen**		**12**			**250.000.000,00**	**198.361.901,00**	**198.361.901,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	03	12	2.03	0002	Sistem Informasi Penataan Ruang		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang		Dokumen		1			250.000.000,00			Dinas Perumahan dan Permukiman
1	03	12	2.03	0006		Sistem Informasi Penataan Ruang		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen		1	1			198.361.901,00	198.361.901	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**				**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									**4.943.017.285,00**	**6.077.990.910,00**	**6.013.493.820,00**	
					DINAS PEKERJAAN UMUM									**360.000.000,00**	**500.000.000,00**	**515.000.000,00**	
1	**04**	**02**			**Program Pengembangan Perumahan**	**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase Rusunawa yang Terpelihara**	**Persentase Rusunawa yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**360.000.000,00**	**500.000.000,00**	**515.000.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Persentase luas kawasan kumuh di kota Bandar Lampung**	**Persentase luas kawasan kumuh di kota Bandar Lampung**	**Persen**	**Persen**	**3,84**	**3,84**	**3,84**	**360.000.000,00**	**500.000.000,00**	**515.000.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	Dokumen	247	257	257	360.000.000,00	500.000.000,00	515.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
					DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN									**4.583.017.285,00**	**5.577.990.910,00**	**5.498.493.820,00**	
														-	79.497.090,00	**79.497.090,00**	
1	**04**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**	**persen**	**persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.283.017.285,00**	**5.306.254.541,00**	**5.226.757.451,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**		**Persen**		**100,00**			**25.000.000,00**	**30.488.893,00**	**30.488.893,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	25.000.000,00	30.488.893,00	30.488.893	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**		**Persen**		**100,00**			**3.497.217.285,00**	**4.474.969.535,00**	**4.421.669.535,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	55	12	12	3.325.177.285,00	4.220.329.535,00	4.220.329.535	
1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	172.040.000,00	254.640.000,00	201.340.000	
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persen**		**100,00**			**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	20	20	20	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000	
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**		**Persen**		**98,00**			**255.800.000,00**	**216.806.113,00**	**215.609.023,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1,00	1,00	1,00	10.000.000,00	9.997.128,00	9.997.128	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	40.000.000,00	39.986.466,00	39.986.466	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.000.000,00	10.001.786,00	10.001.786	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	25.000.000,00	20.750.000,00	20.750.000	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	25.000.000,00	24.799.000,00	24.799.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000	
1	04	01	2.06	0009	Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	6	6	6	135.000.000,00	100.471.733,00	99.274.643	
1	04	01	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**		Persen		98	98		**60.500.000,00**	**35.500.000,00**	
1	04	01	2.07	0005		Penyadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit		10	10		28.500.000,00	28.500.000	
1	04	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		10	10		32.000.000,00	7.000.000	
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**		**Persen**		**98,00**			**410.000.000,00**	**419.000.000,00**	**419.000.000,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	50.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000	
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	360.000.000,00	384.000.000,00	384.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**		**98,00**			**85.000.000,00**	**94.490.000,00**	**94.490.000,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	35.000.000,00	44.430.000,00	44.430.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	3	3	3	50.000.000,00	50.060.000,00	50.060.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**	**02**			**Program Pengembangan Perumahan**	**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**200.000.000,00**	**139.722.614,00**	**139.722.614,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**				**persen**		**100,00**			**100.000.000,00**	**89.722.614,00**	**89.722.614,00**	
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	dokumen	dokumen	1,00	1,00	1,00	100.000.000,00	89.722.614,00	89.722.614	
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten/kota**				**Persen**		**100,00**			**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/kota yang terehabilitasi	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/kota yang terehabilitasi	Unit Rumah	Unit Rumah	2,00	1,00	1,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000	
1	**04**	**03**			**Program Kawasan Permukiman**	**Program Kawasan Permukiman**	**Persentase RTLH Yang Tertangani**	**Persentase RTLH Yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**64.14**	**64.14**	**64.14**	**100.000.000,00**	**132.013.755,00**	**132.013.755,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase RTLH yang Tertangani**	**Persentase RTLH yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**43,89**	**43,89**	**43,89**	**100.000.000,00**	**132.013.755,00**	**132.013.755,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	Laporan	2	2	2	100.000.000,00	**132.013.755,00**	132.013.755	
1	**05**				**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									**58.680.652.430,00**	**69.954.287.593,00**	**72.284.144.993,00**	
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									**37.502.444.808,00**	**38.817.040.664,00**	**40.072.120.664,00**	
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**36.967.444.808,00**	**38.599.184.780,00**	**39.854.264.780,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**20.000.000,00**	**29.411.798,00**	**29.411.798,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Dokumen	Dokumen	3	3		20.000.000,00	29.411.798,00	29.411.798,00	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**6.614.444.808,00**	**7.771.600.664,00**	**6.871.600.664,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	88	88		6.484.444.808,00	7.539.040.664,00	6.639.040.664,00	
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	5	5		130.000.000,00	232.560.000,00	232.560.000,00	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**100.000.000,00**	**1.050.000.000,00**	**2.002.704.000,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket		4			1.000.000.000,00	1.952.704.000,00	
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	Orang	10	10		100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**112.000.000,00**	**125.542.318,00**	**127.135.318,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		1.500.000,00	4.153.187,00	4.153.187,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		37.000.000,00	24.570.445,00	24.570.445,00	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		2.000.000,00	2.876.327,00	2.876.327,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		10.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		20.000.000,00	17.491.974,00	17.491.974,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1		10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		30.000.000,00	47.550.385,00	49.143.385,00	
1	**05**	**01**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**248.000.000,00**	**150.000.000,00**	**319.703.000,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit		1			150.000.000,00	150.000.000,00	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		100.000.000,00		63.753.000,00	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		100.000.000,00		105.950.000,00	
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Unit		1	1		48.000.000,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**29.010.000.000,00**	**28.956.000.000,00**	**29.987.080.000,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		29.000.000.000,00	28.950.000.000,00	29.981.080.000,00	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**863.000.000,00**	**516.630.000,00**	**516.630.000,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1		33.000.000,00	44.430.000,00	44.430.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	20	20		800.000.000,00	472.200.000,00	472.200.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Direlihara		Unit	Unit	1	1		20.000.000,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		Unit	Unit	1	1		10.000.000,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**			**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**535.000.000,00**	**217.855.884,00**	**217.855.884,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
							Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3	**Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3**	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**335.000.000,00**	**153.158.548,00**	**153.158.548,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	02	2.01	0016	Penindakkan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penindakkan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus gangguan ketntraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertibandan penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Jumlah kasus gangguan ketntraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertibandan penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Kasus	Kasus	50	50		100.000.000,00	50.224.963,00	50.224.963,00	
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentrama, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentrama, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Dokumen	Dokumen	1	1		30.000.000,00	22.848.844,00	22.848.844,00	
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	Dokumen	1	1		100.000.000,00	34.949.888,00	34.949.888,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Orang	150	150		100.000.000,00	40.134.853,00	40.134.853,00	
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	Laporan	1	1		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**200.000.000,00**	**64.697.336,00**	**64.697.336,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Laporan	Laporan	12	12		100.000.000,00	31.064.819,00	31.064.819,00	
1	05	02	2.02	0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Bupati/Walikota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota yang dapat ditangani sesuai SOP	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota yang dapat ditangani sesuai SOP	Laporan	Laporan	6	6		100.000.000,00	33.632.517,00	33.632.517,00	
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									**11.483.274.990,00**	**13.928.899.250,00**	**13.263.024.250,00**	
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**10.353.274.990,00**	**12.798.906.503,00**	**12.126.777.619,00**	**BPBD**
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.410.514.990,00**	**5.723.339.250,00**	**4.423.339.250,00**	**BPBD**
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	14	14	14	4.107.674.990,00	5.420.499.250,00	4.120.499.250,00	BPBD
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	302.840.000,00	302.840.000,00	302.840.000,00	BPBD
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**221.000.000,00**	**221.000.000,00**	**231.000.000,00**	**BPBD**
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	80	80	80	201.000.000,00	201.000.000,00	201.000.000,00	BPBD
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	80	80	80	20.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	BPBD
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**359.410.000,00**	**362.137.484,00**	**362.137.484,00**	**BPBD**
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	30.000.000,00	29.999.746,00	29.999.746,00	BPBD
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	35.309.516,00	35.309.363,00	35.309.363,00	BPBD
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.178.357,00	8.678.357,00	8.678.357,00	BPBD
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	100	100	100	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	BPBD
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	Bulan	1	1	1	14.322.127,00	14.322.000,00	14.322.000,00	BPBD
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	BPBD
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	120.000.000,00	120.228.018,00	120.228.018,00	BPBD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**342.000.000,00**	**941.789.226,00**	**941.789.226,00**	**BPBD**
1	05	01	2.07	0002	.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	Unit	-	1	1	-	600.000.000,00	600.000.000,00	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	117.000.000,00	116.789.226,00	116.789.226,00	BPBD
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	BPBD
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.039.600.000,00**	**4.569.900.000,00**	**5.187.771.116,00**	**BPBD**
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	148.000.000,00	148.000.000,00	131.746.116,00	BPBD
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	3.891.600.000,00	4.421.900.000,00	5.056.025.000,00	BPBD
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**980.750.000,00**	**980.740.543,00**	**980.740.543,00**	**BPBD**
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	5	5	5	38.000.000,00	37.992.750,00	37.992.750,00	BPBD
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	7	7	7	750.000.000,00	749.997.793,00	749.997.793,00	BPBD
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	42.750.000,00	42.750.000,00	42.750.000,00	BPBD
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	BPBD
1	**05**	**03**			**Program Penanggulangan Bencana**	**Program Penanggulangan Bencana**	**Cakupan Pelayanan Bencana Daerah**	**Cakupan Pelayanan Bencana Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.130.000.000,00**	**1.129.992.747,00**	**1.136.246.631,00**	**BPBD**
							Kelurahan Siaga Bencana	**Kelurahan Siaga Bencana**	**Angka**	**Angka**	**10**	**10**	**10**				
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi**	**Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**500.000.000,00**	**499.997.897,00**	**487.847.897,00**	**BPBD**
1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	400.000.000,00	400.000.000,00	387.850.000,00	BPBD
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di	Orang	Orang	100	100	100	100.000.000,00	99.997.897,00	99.997.897,00	BPBD
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**330.000.000,00**	**329.994.850,00**	**371.464.850,00**	**BPBD**
1	05	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	-	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	BPBD
1	05	03	2.02	0002	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	Orang	-	0	-	-	-	-	-	BPBD
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	Unit	1	1	1	100.000.000,00	99.996.762,00	99.996.762,00	BPBD
1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	Kawasan	5	5	5	100.000.000,00	99.999.901,00	129.469.901,00	BPBD
1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	Orang	100	100	100	130.000.000,00	129.998.187,00	141.998.187,00	BPBD
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan**	**Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan**	**Orang**	**Orang**	**100**	**100**	**100**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**276.933.884,00**	**BPBD**
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	-	Laporan		100						BPBD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK PDB yang dietapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK PDB yang dietapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	dokumen	dokumen	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-	Orang	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	Orang	100	100	100	200.000.000,00	200.000.000,00	176.933.884,00	BPBD
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	-	**Jumlah Dok Rencana Penanggulangan Bencana dan Jumlah Raperda Penanggulangan Bencana yang tersusun**	-	-	-	-	-	-				**BPBD**
1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	-	Laporan	-	-	-	-				BPBD
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	-	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	-	Desa / Kelurahan	-	1	-	-				BPBD
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	Laporan	-	1	-	-				BPBD
					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN									**9.694.932.632,00**	**17.208.347.679,00**	**18.949.000.079,00**	
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Persen**	**Persen**	**98**	**98**	**98**	**9.542.377.632,00**	**17.013.001.919,00**	**18.753.654.319,00**	**Dinas Damkar dan Penyelamatan**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	-	**Persen**	**-**	**100**	**-**	**-**	-	-	-	**Dinas Damkar dan Penyelamatan**
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.930.377.632,00**	**3.642.747.679,00**	**4.442.747.679,00**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	38	38	38	2.744.932.632	3.440.747.679	4.240.747.679	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	185.445.000	202.000.000	202.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Laporan	-	12	-	-	-	-	-	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**-**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	Paket	-	250	-	-	-			Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	30	30	30	-	20.000.000	20.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**160.000.000,00**	**247.104.240,00**	**247.104.240,00**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	12	12	12	-	4.981.312	4.981.312	Dinas Damkar dan Penyelamatan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	60.000.000	58.531.959	58.531.959	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	-	7.562.252	7.562.252	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	-	54.250.000	54.250.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	50.000.000	32.417.600	32.417.600	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	12	12	12	-	10.000.000	10.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	12	12	12	50.000.000	79.361.117	79.361.117	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**255.000.000,00**	**2.449.610.000,00**	**2.449.610.000,00**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	150.000.000	2.150.000.000	2.150.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	25.000.000	14.000.000	14.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	80.000.000	285.610.000	285.610.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.132.000.000,00**	**9.504.500.000,00**	**10.373.900.000,00**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	82.000.000	135.000.000	141.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	5.050.000.000	9.369.500.000	10.232.900.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.065.000.000,00**	**1.149.040.000,00**	**1.220.292.400,00**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	2	2	2	60.000.000	43.430.000	43.430.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	27	27	27	1.000.000.000	1.055.550.000	1.126.802.400	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	20	20	20	5.000.000	15.060.000	15.060.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	Unit	2	2	2	-	35.000.000	35.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**TINGKAT WAKTU TANGGAP (RESPONSE TIME RATE) DAERAH LAYANAN WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WMK)**	**TINGKAT WAKTU TANGGAP (RESPONSE TIME RATE) DAERAH LAYANAN WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WMK)**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**152.555.000**	**195.345.760**	**195.345.760**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**152.555.000**	**195.345.760**	**195.345.760**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	-	Dokumen	-	2	-	-	15.000.000	-	-	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	2	2	2	85.000.000	5.845.760	5.845.760	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non-Kebakaran	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan penyelamatan/evakuasi saat	-	Dokumen	-	2	-	-	15.000.000	-	-	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Dokumen	-	5	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Unit	Unit	1	1	1	37.555.000	189.500.000	189.500.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	-	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memiliki Sertifikasi Ketermpilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	-	Orang	-	5	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	-	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan	-	Desa / Kelurahan	-	2	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran**	-	**Jumlah Warga Masyarakat dan relawan yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dalam rangka sistem ketahanan kebakaran lingkungan**	-	**Orang**	-	**252**	-	-	-	-	-	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	-	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-	Orang	-	200	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	-	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan	-	Desa/Kelurahan	-	50	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**04**	**2.05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	-	**Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia**	-	**Laporan**	-	**14**	-	-	-	-	-	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	-	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	-	Laporan	-	2	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	-	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	-	Dokumen	-	2	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.05	0003	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	-	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	-	Unit	-	6	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	-	Laporan	-	2	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**06**				**SOSIAL**									**17.530.176.984,00**	**39.105.929.196,00**	**43.687.748.856,00**	
					DINAS SOSIAL									**17.530.176.984,00**	**39.105.929.196,00**	**43.687.748.856,00**	
1	**06**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**3.808.980.259,00**	**6.060.156.667,00**	**5.960.156.667,00**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**18.762.558,00**	**42.579.680,00**	**42.579.680,00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3		18.762.558,00	**42.579.680,00**	**42.579.680,00**	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**2.991.076.858,00**	**3.694.234.311,00**	**3.594.234.311,00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	33	33		2.896.876.858,00	3.586.114.311,00	3.486.114.311,00	
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	4	4		94.200.000,00	108.120.000,00	108.120.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	5	5		5.000.000,00	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**151.600.000,00**	**270.281.890,00**	**270.281.890,00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		9.000.000,00	8.999.777,00	8.999.777,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0002	Penyediaaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		41.400.000,00	41.393.261,00	41.393.261,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		10.000.000,00	9.998.617,00	9.998.617,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		6.025.000,00	24.120.000,00	24.120.000,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		11.200.000,00	13.863.864,00	13.863.864,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1		3.975.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		65.000.000,00	144.906.371,00	144.906.371,00	
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**50.000.000,00**	**1.288.874.120,00**	**1.288.874.120,00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.07	0001	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		unit		1,00			500.000.000,00	500.000.000,00	
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan							400.000.000,00	400.000.000,00	
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mabel	Pengadaan Mabel	Pengadaan Mabel	jumlah paket mebel yang disediakan		unit		1,00			140.173.592,00	140.173.592,00	
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Di Sediakan	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Di Sediakan	Unit	Unit	1	1		50.000.000,00	248.700.528,00	248.700.528,00	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**354.576.666,00**	**402.576.666,00**	**402.576.666,00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		90.576.666,00	90.576.666,00	90.576.666,00	
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		264.000.000,00	312.000.000,00	312.000.000,00	
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**237.964.177,00**	**356.610.000,00**	**356.610.000,00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1		35.032.089,00	44.430.000,00	44.430.000,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1	1		30.932.088,00	148.180.000,00	148.180.000,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	15	15		22.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	3	3		150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Dinas Sosial
1	**06**	**02**			**Program Pemberdayaan Sosial**	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial**	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial**	**Persen**	**Persen**	**84,00**	**84,00**		**6.665.000.000,00**	**23.604.206.871,00**	**27.203.776.531,00**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase pelayanan pengelolaan kelembagaan sosial**	**Presentase pelayanan pengelolaan kelembagaan sosial**	**Persen**	**Persen**	**81,00**	**81,00**		**6.665.000.000,00**	**23.604.206.871,00**	**27.203.776.531,00**	**Dinas Sosial**
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		Orang		198,00			99.999.815,00	99.999.815,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		Keluarga		55.948,00			1.217.066.820,00	1.595.066.820,00		
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	Keluarga	100	100		80.000.000,00	122.735.440,00	122.735.440,00	
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	Lembaga	250	250		6.285.000.000,00	21.914.404.907,00	25.135.974.567,00	
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	Sertifikat	15	15		300.000.000,00	249.999.889,00	249.999.889,00	
1	**06**	**04**			**Program Rehabilitasi Sosial**	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial**	**Persen**	**Persen**	**84,00**	**84,00**		**448.812.114,00**	**804.469.738,00**	**804.469.738,00**	**Dinas Sosial**
							Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	**Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					**Dinas Sosial**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial**	**Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial**	**Presentase pelayanan Rehabilitasi lansia, penyandang cacat dan orang terlantar yang tertangani**	**Presentase pelayanan Rehabilitasi lansia, penyandang cacat dan orang terlantar yang tertangani**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**		**334.812.114,00**	**559.647.341,00**	**559.647.341,00**	**Dinas Sosial**
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan permakanan	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	50	50		60.650.126,00	69.999.808,00	69.999.808,00	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan sandang	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	134	134		60.000.000,00	90.998.652,00	90.998.652,00	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	Orang	Orang	50	50		214.161.988,00	398.648.881,00	398.648.881,00	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA diluar panti sosial**	**Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA diluar panti sosial**	**Presentase pelayanan pengelolaan rehabilitasi sosial**	**Presentase pelayanan pengelolaan rehabilitasi sosial**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**		**114.000.000,00**	**244.822.397,00**	**244.822.397,00**	**Dinas Sosial**
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	110	110		20.000.000,00	24.999.927,00	24.999.927,00	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	0014	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kot	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kot	Dokumen	Dokumen	1	1		94.000.000,00	219.822.470,00	219.822.470,00	
1	**06**	**05**			**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial**	**Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial**	**Persen**	**Persen**	**23,00**	**23,00**		**6.380.000.000,00**	**8.409.721.760,00**	**8.491.971.760,00**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota**	**Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota**	**Terlaksananya Tugas Pendamping Dalam Pencairan Bantuan**	**Terlaksananya Tugas Pendamping Dalam Pencairan Bantuan**	**Persen**	**Persen**	**23**	**23**		**6.380.000.000,00**	**8.409.721.760,00**	**8.491.971.760,00**	**Dinas Sosial**
1	06	05	2.02	0001	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	Orang	198	198		450.000.000,00	241.131.823,00	241.131.823,00	
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	Keluarga	Keluarga	55948	55948		1.080.000.000,00	2.821.082.218,00	2.903.332.218,00	
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	Keluarga	71.590	71.590		4.850.000.000,00	5.347.507.719,00	5.347.507.719,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**06**	**06**			**Program Penanganan Bencana**	**Program Penanganan Bencana**	**Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat**	**Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**227.384.611,00**	**227.374.160,00**	**1.227.374.160,00**	**Dinas Sosial**
							Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Mengunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	**Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Mengunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Pengelolaan, Pendamping PKH dan data PMKS dan PSKS**	**Pelayanan Pengelolaan, Pendamping PKH dan data PMKS dan PSKS**	**Petugas**	**Petugas**	**169**	**169**		**227.384.611,00**	**227.374.160,00**	**1.227.374.160,00**	**Dinas Sosial**
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan makanan	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	1.800	1.800		150.000.000,00	150.000.000,00	1.150.000.000,00	
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan sandang	Penyediaan sandang	Jumlah orang yg mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yg tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenagan kab/kota.	Jumlah orang yg mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yg tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenagan kab/kota.	Orang	Orang	2.250	2.250		27.718.438,00	27.707.988,00	27.707.988,00	Dinas Sosial
1	06	06	201	0003	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi kewenangan kab/kota	Jumlah tempat penampungan pengungsi kewenangan kab/kota	Unit	Unit	20	20		31.396.418,00	31.396.417,00	31.396.417,00	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan dukungan psikososial	Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yg mendapatkan pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yg mendapatkan pelayanan dukungan psikososial	Orang	Orang	200	200		18.269.755,00	18.269.755,00	18.269.755,00	Dinas Sosial
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									**187.413.612.899,00**	**227.380.170.512,00**	**233.392.433.777,00**	
2	**07**				**TENAGA KERJA**									**5.517.278.944,00**	**5.095.097.723,00**	**4.745.097.723,00**	
					DINAS TENAGA KERJA									**5.517.278.944,00**	**5.095.097.723,00**	**4.745.097.723,00**	
2	**07**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**4.481.054.360,00**	**4.681.209.784,00**	**4.553.840.290,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**27.000.000,00**	**77.399.961,00**	**91.172.161,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	dokumen	2	2		27.000.000,00	77.399.961,00	91.172.161,00	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**3.211.848.375,00**	**3.848.443.972,00**	**3.527.212.708,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	36	36		3.053.053.555,00	3.759.097.723,00	3.409.097.723,00	
2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		124.794.820,00	66.480.000,00	66.480.000,00	
2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1		34.000.000,00	22.866.249,00	51.634.985,00	
2	**07**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Pendapatan Daerah**		dokumen		1			**175.000.000,00**			
2	07	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		dokumen		1			175.000.000,00			
2	**07**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**persen**					**65.000.000,00**			
2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		orang					65.000.000,00			
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**227.414.575,00**	**261.769.651,00**	**274.514.221,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		7.101.400,00	9.998.934,00	9.998.934,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		48.238.132,00	58.499.365,00	58.499.365,00	Dinas Tenaga Kerja

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	07	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		9.992.401,00	12.998.414,00	12.998.414,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		11.550.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		56.714.338,00	57.999.942,00	57.999.942,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1		15.958.304,00	19.000.000,00	19.000.000,00	
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		73.000.000,00	80.412.996,00	93.157.566,00	
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**280.541.410,00**	**10.966.200,00**	**178.311.200,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.07	0005	Pengadan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit		47			98.707.658,00		98.445.000,00	
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		9			171.833.752,00		68.900.000,00	
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	123	123		10.000.000,00	10.966.200,00	10.966.200,00	
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**366.600.000,00**	**356.040.000,00**	**356.040.000,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.08	0002	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		30.600.000,00	20.040.000,00	20.040.000,00	
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		336.000.000,00	336.000.000,00	336.000.000,00	
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**127.650.000,00**	**126.590.000,00**	**126.590.000,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1		30.600.000,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	7	7		86.050.000,00	73.190.000,00	73.190.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	27	27		11.000.000,00	16.380.000,00	16.380.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi Dipelihara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi Dipelihara	unit	unit							
2	**07**	**02**			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**		**Persentase Informasi Data Ketenagakerjaan yang Disusun Berbasis Sistem Informasi**		**Persen**		**100,00**			**80.000.000,00**		**0,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		**Penyediaan informasi ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung**		**Persen**		**100,00**			**80.000.000,00**		**0,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro		**Dokumen**		**1,00**			-		**0,00**	
2	07	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro		Perusahaan		20			80.000.000,00		0,00	
2	**07**	**03**			**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja**	**Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja**	**Persen**	**Persen**	**31,25**	**31,25**		**373.658.034,00**	**141.129.814,00**	**0,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
							Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi	**Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**75,00**				**0,00**	
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri**	**Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri**	**Orang**	**Orang**	**40**	**40**		**297.420.000,00**	**99.930.188,00**	**0,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	Orang	40	40		187.420.000,00	74.932.399,00	0,00	Dinas Tenaga Kerja

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	07	04	2.01	0002	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun	Lembaga	Lembaga	10	10		110.000.000,00	24.997.789,00	0,00	
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Meningkatnya Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina**	**Meningkatnya Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina**	**LPK**	**LPK**	50	50		**36.238.034,00**	**16.199.964,00**	**0,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	Lembaga	50	50		36.238.034,00	16.199.964,00	0,00	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya**	**Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya**	**perusahaan**	**perusahaan**	**20**	**20**		**40.000.000,00**	**24.999.662,00**	**0,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	Perusahaan	20	20		40.000.000,00	24.999.662,00	0,00	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Rasio penduduk yang bekerja**	**Rasio penduduk yang bekerja**	**Persen**	**Persen**	**94,81**	**94,81**		**215.000.000,00**	**81.500.692,00**	**0,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
							Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	**Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas**	**Persen**	**Persen**	**93,97**	**93,97**					
							Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	**Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**Persen**	**Persen**	**4,79**	**4,79**					
							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**	**Persen**	**Persen**	**76,62**	**76,62**					
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar kerja di daerah kabupaten/kota**		**Meningkatnya Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kota Bandar Lampung**		**Persen**	**Persen**	100,00	100,00		**140.000.000,00**	**51.500.962,00**	**0,00**	
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		orang		100,00			75.000.000,00		0,00	
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan	orang	orang	35,00	35,00		65.000.000,00	51.500.962,00	0,00	
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		**Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri**		orang					-		0,00	
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja		orang		7,00					0,00	
2	**07**	**04**	**2.04**		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Menigkatnya perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan Di Kota Bnadar Lmapung**	**Menigkatnya perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan Di Kota Bnadar Lmapung**	**Persen**	**Persen**	100,00	100,00		**75.000.000,00**	**29.999.730,00**	**0,00**	
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Diberdayakan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Diberdayakan	orang	orang	7,00	7,00		75.000.000,00	29.999.730,00	0,00	
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun**	**Persentase Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun**	**Persen**	**Persen**	**52,32**	**52,32**		**367.566.550,00**	**191.257.433,00**	**191.257.433,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
							Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	**Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**	**Persen**	**Persen**	**52,63**	**52,63**					
							Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan**	**Persen**	**Persen**	**79,00**	**79,00**					
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan penetapan UMK dan sosialisasi KHL Kota Bandar Lampung.**	**Pelaksanaan penetapan UMK dan sosialisasi KHL Kota Bandar Lampung.**	**SK**	**SK**	**1**	**1**		**367.566.550,00**	**191.257.433,00**	**191.257.433,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	Laporan	12	12		367.566.550,00	191.257.433,00	191.257.433,00	
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan**		**Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota**		Persen		100			-			
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di Lawan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		perkara		36						
2	**07**	**06**			**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**		**Cakupan Masyarakat di Wilayah Kumuh yang Mendapatkan Pemahaman Transmigrasi Dibandingkan Total Wilayah Kumuh**		**Persen**		**12**			-			**Dinas Tenaga Kerja**
2	**07**	**06**	**2.01**		**Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian**		**Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman**		**Persen**		**85**			-			
2	07	06	2.01	0001	Penguatan SDM Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina		kepala keluarga		40						

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	08				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									4.963.604.183,00	9.750.984.913,00	9.400.984.913,00	
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									4.963.604.183,00	9.750.984.913,00	9.400.984.913,00	
2	08	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	Persen	Persen	98,00	98,00		3.639.804.183,00	4.301.022.208,00	3.951.022.208,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	Persen	100,00	100,00		48.125.000,00	61.624.902,00	61.624.902,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	5 Dokumen (Renja, LKIP, LPPD, LPJ dan PKA)	5 Dokumen (Renja, LKIP, LPPD, LPJ dan PKA)		48.125.000,00	61.624.902,00	61.624.902,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	Persen	100,00	100,00		3.101.668.788,00	3.714.678.528,00	3.364.678.528,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.02	0001	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	32	32		2.904.804.183,00	3.600.984.913,00	3.250.984.913,00	
2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		168.199.605,00	84.313.406,00	84.313.406,00	
2	08	01	2.02	0005	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		28.665.000,00	29.380.209,00	29.380.209,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	Persen	Persen	80,00	80,00		30.000.000,00	24.570.000,00	24.570.000,00	
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	Orang	15,00	15,00		30.000.000,00	24.570.000,00	24.570.000,00	
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	Persen	98,00	98,00		126.241.360,00	168.413.307,00	168.413.307,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		3.656.800,00	3.655.091,00	3.655.091,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		23.465.000,00	25.398.733,00	25.398.733,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		6.955.560,00	6.941.432,00	6.941.432,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		22.289.000,00	23.297.426,00	23.297.426,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		50.000.000,00	89.245.625,00	89.245.625,00	
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	Persen	98,00	98,00		73.246.227,00	62.643.383,00	62.643.383,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor		Unit		1			29.618.383,00	29.618.383,00	
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		33.025.000,00	33.025.000,00	33.025.000,00	
2	08	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			1		40.221.227,00			
2	08	01	2.08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	Persen	98,00	98,00		158.700.000,00	169.500.000,00	169.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		145.200.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BID AKU URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**101.822.808,00**	**99.592.088,00**	**99.592.088,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1		36.674.662,00	44.430.000,00	44.430.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	Unit	Unit	2	2		49.256.000,00	39.270.000,00	39.270.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang	Unit	Unit	1	1		15.892.146,00	15.892.088,00	15.892.088,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**02**			**Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Peremouan**	**Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Peremouan**	**IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)**	**IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)**	**Angka**	**Angka**	**73,50**	**73,50**		**390.000.000,00**	**1.534.999.884,00**	**1.534.999.884,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
							Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	**Persentase ARG pada belanja Langsung APBD**	**Lembaga**	**Lembaga**	**93**	**93**					
							Presentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	**Presentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan**	**Persen**	**Persen**	**90,63**	**90,63**					
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi**	**Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**60.000.000,00**	**59.999.905,00**	**59.999.905,00**	
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan	Dokumen	Dokumen	1	1		60.000.000,00	59.999.905,00	59.999.905,00	
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga**	**Orang**	**Orang**	**1.500**	**1.500**		**330.000.000,00**	**1.474.999.979,00**	**1.474.999.979,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang	Orang	Orang	1.500	1.500		330.000.000,00	1.474.999.979,00	1.474.999.979,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**			**Program Perlindungan Perempuan**	**Program Perlindungan Perempuan**	**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan**	**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**294.454.000,00**	**294.256.956,00**	**294.256.956,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
							Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah**	**Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**		**109.700.000,00**	**101.500.000,00**	**101.500.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan , Program & Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan , Program & Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1		109.700.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00	
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota**	**Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**	**Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**	**Layanan**	**Layanan**	**20,00**	**20,00**		**109.754.000,00**	**117.757.000,00**	**117.757.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Layanan	Layanan	20	20		109.754.000,00	117.757.000,00	117.757.000,00	
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkataan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**75.000.000,00**	**74.999.956,00**	**74.999.956,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	2	2		75.000.000,00	74.999.956,00	74.999.956,00	
2	**08**	**04**			**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Presentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Presentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Persen**	**Persen**	**67,78**	**67,78**		**190.000.000,00**	**3.158.999.722,00**	**3.158.999.722,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Persen**	**Persen**	**52,00**	**52,00**		**190.000.000,00**	**3.158.999.722,00**	**3.158.999.722,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kg dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kg dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	Dokumen	1	1		35.000.000,00	34.999.959,00	34.999.959,00	
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	Laporan	Laporan	1	1		155.000.000,00	3.123.999.763,00	3.123.999.763,00	
2	**08**	**05**			**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persen**	**Persen**	**3,29**	**3,29**		**40.000.000,00**	**34.998.048,00**	**34.998.048,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
							Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	**Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta**	**Persen**	**Persen**	**63,37**	**63,37**					
							Rasio KDRT yang Tertangani	**Rasio KDRT yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**1,28**	**1,28**					
							Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**Persen**	**Persen**	**56,06**	**56,06**					
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persen**	**Persen**	**3,29**	**3,29**		**40.000.000,00**	**34.998.048,00**	**34.998.048,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
							Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	**Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta**	**Persen**	**Persen**	**63,37**	**63,37**					
							Rasio KDRT yang Tertangani	**Rasio KDRT yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**1,28**	**1,28**					
							Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**Persen**	**Persen**	**56,06**	**56,06**					
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	Dokumen	1	1		40.000.000,00	34.998.048,00	34.998.048,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**06**			**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Tingkat Capaian**	**Tingkat Capaian**	**Nindya**	**Nindya**		**85.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
							Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	**Persen**	**Persen**	**71,70**	**71,70**					
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Tingkat Capaian**	**Tingkat Capaian**	**Nindya**	**Nindya**		**85.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
							Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	**Persen**	**Persen**	**71,70**	**71,70**					
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah , Non Pemerintah, Media & Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah , Non Pemerintah, Media & Dunia Usaha	Organisasi	Organisasi	37	37		85.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2	**08**	**07**			**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan**	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**324.346.000,00**	**326.708.095,00**	**326.708.095,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
							Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	**Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat**	**Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**249.750.000,00**	**257.688.095,00**	**257.688.095,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	07	2.02	0005		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah		Jumlah AMPK yang Mendapatkan layanan		Orang		5			139.965.095,00	139.965.095,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.02	0006		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK (DAK)		Jumlah AMPK yang Mendapatkan layanan		Layanan		1			117.723.000,00	117.723.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota (DAK)		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Layanan		30			144.750.000,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan		Dokumen		1			105.000.000,00			
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemenuhan Hak-hak Anak**	**Pemenuhan Hak-hak Anak**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**		**74.596.000,00**	**69.020.000,00**	**69.020.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	07	2.02	0006		Peningkatan Kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah		Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		Orang		1			69.020.000,00	69.020.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (DAK)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan		Dokumen		1			74.596.000,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**09**				**PANGAN**									**6.229.246.688,00**	**8.412.151.345,00**	**7.712.151.345,00**	**700.000.000,00**
					DINAS PANGAN									**6.229.246.688,00**	**8.412.151.345,00**	**7.712.151.345,00**	
2	**09**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.246.246.688,00**	**6.185.245.899,00**	**5.485.245.899,00**	**Dinas Pangan**
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**60.000.000,00**	**309.999.767,00**	**309.999.767,00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	6 dokumen (RKA, Renstra, RENJA, LKIP, LPJ, LPPD)	6 dokumen (RKA, Renstra, RENJA, LKIP, LPJ, LPPD)	6 dokumen (RKA, Renstra, RENJA, LKIP, LPJ, LPPD)	60.000.000,00	309.999.767,00	309.999.767,00	Dinas Pangan
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.549.558.259,00**	**4.406.299.487,00**	**3.706.299.487,00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	32	32	32	3.436.038.259,00	4.313.734.487,00	3.613.734.487,00	
2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	98.520.000,00	66.360.000,00	66.360.000,00	
2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan						15.000.000,00	26.205.000,00	26.205.000,00	
2	**09**	**01**	**2.05**		**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**45.030.446,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Dokumen	1	1	1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	2	2	2	30.030.446,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dinas Pangan
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**117.832.150,00**	**187.561.144,00**	**187.561.144,00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	paket	1	1	1	5.000.000,00	14.999.816,00	14.999.816,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	paket	1	1	1	25.000.000,00	59.999.604,00	59.999.604,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	paket	1	1	1	22.332.150,00	24.999.937,00	24.999.937,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	13.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	35.000.000,00	45.061.787,00	45.061.787,00	
2	09	01	2.06	0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Laporan Penata Usahaan arsip dinasmis pada SKPD		Laporan		1			10.000.000,00	10.000.000,00	
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**25.000.000,00**	**763.586.373,00**	**763.586.373,00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Persen		1			477.980.000,00	477.980.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	25.000.000,00	44.980.732,00	44.980.732,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		1		-	129.000.000,00	129.000.000,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.07	0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit		1			111.625.641,00	111.625.641,00	
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**300.000.000,00**	**330.000.000,00**	**330.000.000,00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.08	0002	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Kpmunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Unit		1			30.000.000,00	30.000.000,00	
2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	288.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00	
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**148.825.833,00**	**157.799.128,00**	**157.799.128,00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.456.705,00	42.430.000,00	42.430.000,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	16	16	16	115.369.128,00	115.369.128,00	115.369.128,00	Dinas Pangan
2	**09**	**03**			**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**Persen**	**Persen**	**105,00**	**105,00**	**105,00**	**1.703.000.000,00**	**1.839.098.780,00**	**1.839.098.780,00**	**Dinas Pangan**
							Ketersediaan Energi per kapita	**Ketersediaan Energi per kapita**	**(kkal/kap hari)**	**(kkal/kap hari)**	**2.530,00**	**2.530,00**	**2.530,00**				
							Ketersediaan Protein per Kapita	**Ketersediaan Protein per Kapita**	**(gr/kap/hari)**	**(gr/kap/hari)**	**72,20**	**72,20**	**72,20**				
							Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	**Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah**	**Persen**	**Persen**	**50,00**	**50,00**	**50,00**				
							Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	**Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)**	**skor**	**skor**	**86,75**	**86,75**	**86,75**				
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**Persen**	**Persen**	**102,00**	**102,00**	**102,00**	**273.000.000,00**	**409.098.780,00**	**409.098.780,00**	**Dinas Pangan**
2	09	03	2.01	0001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	Laporan				48.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Pangan
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya	Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	Laporan				50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dinas Pangan
2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Laporan	Laporan				75.000.000,00	211.100.000,00	211.100.000,00	Dinas Pangan
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan pangan keluarga	Peningkatan Ketahanan pangan keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti ketahanan pangan keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti ketahanan pangan keluarga	Keluarga	Keluarga	30	30	30	100.000.000,00	47.998.780,00	47.998.780,00	
2	**09**	**03**	**2.02.**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/kota**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/kota**	**Penguatan cadangan pangan pemerintah**	**Penguatan cadangan pangan pemerintah**	**Persen**	**Persen**				**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**Dinas Pangan**
2	09	03	2.02.	0003	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton	ton	10,00	10,00	10,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Dinas Pangan
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**PPH konsumsi**	**PPH konsumsi**	**skor**	**skor**	**86,50**	**86,50**	**86,50**	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**	**Dinas Pangan**
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	dokumen	dokumen	1	1	1	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Pangan
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	Laporan	1	1	1	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	
2	**09**	**04**			**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Persentase Daerah Rawan Pangan**	**Persentase Daerah Rawan Pangan**	**Persen**	**Persen**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**150.000.000,00**	**187.815.284,00**	**187.815.284,00**	**Dinas Pangan**
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Dihasilkan**	**Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Dihasilkan**	**Dokumen**	**Dokumen**	**2**	**2**	**2**	**50.000.000,00**	**79.815.864,00**	**79.815.864,00**	**Dinas Pangan**
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan,	Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan,	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	Dokumen	Dokumen	2	2	2	50.000.000,00	79.815.864,00	79.815.864,00	Dinas Pangan
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan kerawanan pangan kewenangan kab/kota**	**Penanganan kerawanan pangan kewenangan kab/kota**	**Jumlah Lokasi Tertangani**	**Jumlah Lokasi Tertangani**	**Kelurahan/ Kecamatan**	**Kelurahan/ Kecamatan**				**100.000.000,00**	**107.999.420,00**	**107.999.420,00**	
2	09	04	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	107.999.420,00	107.999.420,00	
2	**09**	**05**			**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**	**Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**	**Persen**	**Persen**	**87,50**	**87,50**	**87,50**	**130.000.000,00**	**199.991.382,00**	**199.991.382,00**	**Dinas Pangan**
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern**	**Persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern**	**Persen**	**Persen**	**87,50**	**87,50**	**87,50**	**130.000.000,00**	**199.991.382,00**	**199.991.382,00**	**Dinas Pangan**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	09	05	2.01	0009	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	Dokumen	1	1	1	50.000.000,00	79.992.164,00	79.992.164,00	
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	80.000.000,00	119.999.218,00	119.999.218,00	
2	**11**				**LINGKUNGAN HIDUP**									**65.936.169.557,00**	**66.345.099.170,00**	**67.101.725.095,00**	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP									**65.936.169.557,00**	**66.345.099.170,00**	**67.101.725.095,00**	
2	**11**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**51.015.560.171,00**	**62.781.136.850,00**	**56.909.532.775,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**150.000.000,00**	**57.999.114,00**	**57.999.114,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	2	3	3	75.000.000,00	27.999.925	27.999.925	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3	2	2	75.000.000,00	29.999.189	29.999.189	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**17.259.369.557,00**	**20.468.099.170,00**	**19.268.099.170,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	246	246/14	246/14	17.014.169.557,00	20.227.099.170	19.027.099.170	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	220.200.000,00	241.000.000	241.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	Dokumen	1	0	0	25.000.000,00			Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persen**		**90,00**			**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang	5,00	5,00	5,00	75.000.000,00	75.000.000	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**tahun**	**tahun**	**1 tahun**	**1 tahun**	**1 tahun**	**555.510.000,00**	**645.523.961,00**	**645.523.961,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.010.000,00	20.009.901	20.009.901	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	100.000.000,00	189.999.554	189.999.554	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	50.000.000,00	49.990.351	49.990.351	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	142.500.000,00	142.495.000	142.495.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tahun	Tahun	1	1	1	110.000.000,00	109.999.770	109.999.770	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	12	1	1	18.000.000,00	18.000.000	18.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	15.000.000,00	15.000.000	15.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	100.029.385	100.029.385	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**331.846.814,00**	**9.014.330.805,00**	**2.542.100.805,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	5	1	1	0	8.600.000.000,00	2.127.770.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	201.846.814,00	201.839.680	201.839.680	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	130.000.000,00	212.491.125	212.491.125	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**23.001.700.000,00**	**22.752.100.000,00**	**23.272.725.925,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		384.100.000,00	384.100.000	388.725.925	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		22.617.600.000,00	22.368.000.000	22.884.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**9.642.133.800,00**	**9.768.083.800,00**	**11.048.083.800,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1			48.400.000,00	42.430.000	42.430.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	211	211	211	8.896.450.000,00	9.028.370.000	10.308.370.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	09	0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dirselihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dirselihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	155	155	155	697.283.800,00	697.283.800	697.283.800	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**02**			**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**RPPLH Kabupaten/Kota**	**RPPLH Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**Dokumen**				**1.000.000.000,00**	**999.999.877,00**	**999.999.877,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
							RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	**RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**				
							KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota	**KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**				
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota**	**RPPLH Kota Bandar Lampung**	**RPPLH Kota Bandar Lampung**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	-	**249.999.959,00**	**17.999.959,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	02	2.01	0006		PenyusunanRPPLH Kab/Kota		Jumlah Dokumen RPPLH Kab/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kab/kota dan Mengakomodir arahan RPPLH Provinsi		dokumen	0	1	1	0	249.999.959,00	**17.999.959**	
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota**	**Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota**	**KLHS Kota Bandar Lampung**	**KLHS Kota Bandar Lampung**	**dokumen**	**dokumen**	**1**	**1**	**1**	**1.000.000.000,00**	**749.999.918,00**	**981.999.918,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	1	1	300.000.000,00	499.999.959,00	549.999.959	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	2.02	0005	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	dokumen	dokumen	2	1	1	700.000.000,00	249.999.959,00	431.999.959	
2	**11**	**03**			**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Hasil pengukuran Indeks Kualitas air**	**Hasil pengukuran Indeks Kualitas air**	**indeks**	**indeks**	**58,60**	**58,60**	**58,60**	**650.000.000,00**		**969.999.683,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
							Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara**	**indeks**	**indeks**	**81,40**	**81,40**	**81,40**		**969.999.683,00**		
							Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan**	**indeks**	**indeks**	**34,13**	**34,13**	**34,13**				
							Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	**Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca**	**Persen**	**Persen**	**8,00**	**8,00**	**8,00**				
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Pencegahan, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium**	**DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**550.000.000,00**	**269.999.759,00**	**160.010.839,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	dokumen	1	0	0	300.000.000,00	0		Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	-	119.999.759,00	10.010.839	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang	Dokumen	Dokumen	1	1		250.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota**	**Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota**	**DIKPLHD Kota Bandar Lampung**	**DIKPLHD Kota Bandar Lampung**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**			**100.000.000,00**	**115.000.000,00**	**106.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	03	2.02	0001	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	Laporan	1			100.000.000,00	115.000.000,00	106.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota**	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota**	**Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara**	**Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara**	**lokasi**	**lokasi**	**lokasi**			-	**584.999.924,00**	**703.988.844,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	03	2.03	0008		Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanaka		Kegiatan	**0**	**1,00**	**1,00**	**0**	100.000.000,00	100.000.000	
2	11	03	2.03	0013		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dolumen	Kegiatan	1			-	484.999.924,00	603.988.844	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**04**			**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**Dokumen**	**Dokumen**				**506.125.000,00**		**471.999.760,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
							Master Plan Ruang Terbuka Hijau	**Master Plan Ruang Terbuka Hijau**	**Dokumen**	**Dokumen**					**375.999.760,00**		
							Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau	**Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau**	**Persen**	**Persen**	**4,70**	**4,70**	**4,70**				
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH**	**Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH**	**paket**	**paket**	**paket**	**1,00**	**1,00**	**506.125.000,00**	**375.999.760,00**	**471.999.760,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		Dokumen				1	125.000.000,00			
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/kota	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/kota	Ha	Ha	469,58	439,60	439,60	381.125.000,00	375.999.760,00	471.999.760	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persen**		**63,00**			**100.000.000,00**	**174.999.753,00**	**174.999.753,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan**	**Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan**	**Persen**	**Persen**	**63,00**	**63,00**	**63,00**	**100.000.000,00**	**174.999.753,00**	**174.999.753,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	06	2.01	0003	Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pengawasan IL dan IPPLH)		Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Laporan		1			100.000.000,00			Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	0005		Pengawasan PerizinanBerusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yangditerbitkanolehPemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		Badan Usaha	1	1	1		174.999.753,00	174.999.753	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**09**			**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**sekolah**	**sekolah**	**3**	**3**	**3**	**100.000.000,00**	**79.999.929,00**	**79.999.929,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**sekolah**	**sekolah**	**3**	**3**	**3**	**100.000.000,00**	**79.999.929,00**	**79.999.929,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/DuniaUsaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	sekolah	Entitas	3	3	3	100.000.000,00	79.999.929,00	79.999.929	Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**11**	**10**			**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**		**Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota**		**Persen**		**100,00**			**50.000.000,00**	**99.999.756,00**	**99.999.756,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH**		**Persen**		**100,00**			**50.000.000,00**	**99.999.756,00**	**99.999.756,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota (Pengelolaan Pengaduan)	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Jumlahpengaduanpermasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangan	Dokumen	Pengaduan	1	1	1	50.000.000,00	99.999.756,00	99.999.756	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**11**			**Program Pengelolaan Persampahan**	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Timbulan Sampah yang Ditangani**	**Timbulan Sampah yang Ditangani**	**Persen**	**Persen**	**82,00**	**82,00**	**82,00**	**12.514.484.386,00**	**862.963.562,00**	**7.395.193.562,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
							Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	**Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R**	**Persen**	**Persen**	**18,00**	**18,00**	**18,00**				
							Persentase Cakupan Area Pelayanan	**Persentase Cakupan Area Pelayanan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	**Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Pengelolaan Sampah**	**Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung**	**Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.514.484.386,00**	**862.963.562,00**	**7.395.193.562,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	11	2.01	0002	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Laporan		1			200.000.000,00			Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA /TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Ton		266,450			100.000.000,00		-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	0004		Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis		kelompok		7	7	282.996.950,00	282.963.826,00	282.963.826	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		Dokumen		1	1	11.931.487.436,00	300.000.000,00	6.772.230.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	0019		Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah		Jumlah sampah yang terdaur ulang		TON	0	1			179.999.865,00	179.999.865	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	0020		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		jumlah sampah yang tertangani melalui pemerosesan akhir sampah di TPA/TPST kab/kota ata TPA/TPST regional		TON			266,450	-	99.999.871,00	159.999.871	
2	**12**				**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									**9.181.417.299,00**	**10.540.485.119,00**	**11.357.179.189,00**	
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									**9.181.417.299,00**	**10.540.485.119,00**	**11.357.179.189,00**	
2	**12**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**7.682.014.969,00**	**9.123.513.499,00**	**9.181.082.899,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**60,00**	**60,00**		**31.000.000,00**	**31.664.805,00**	**31.664.805,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BID AKU URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2021, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2021, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun		31.000.000,00	31.664.805,00	31.664.805,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**4.812.812.299,00**	**6.197.143.119,00**	**6.028.012.519,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tersedia	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kali	Orang/Bulan					6.040.485.119,00	5.871.354.519,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan		53	53		4.633.417.299,00			
2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terlaksana	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	Dokumen				179.395.000,00	156.658.000,00	156.658.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		5	5					
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**653.393.770,00**	**661.928.910,00**	**661.928.910,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		14.700.000,00	14.654.535,00	14.654.535,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		189.929.746,00	183.765.880,00	183.765.880,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		23.000.000,00	22.225.279,00	22.225.279,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		4.005.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		195.763.024,00	194.549.400,00	194.549.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	12	12		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	12	12		16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	12	12		173.055.000,00	190.924.221,00	190.924.221,00	
2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		30.941.000,00	29.804.595,00	29.804.595,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**339.750.000,00**	**565.796.665,00**	**792.496.665,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		51.750.000,00	139.369.572,00	139.369.572,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	7	7		262.000.000,00	396.100.621,00	622.800.621,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	8	8		26.000.000,00	30.326.472,00	30.326.472,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**12 BULAN**	**12 BULAN**		**1.630.800.000,00**	**1.432.800.000,00**	**1.432.800.000,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		1.602.000.000,00	1.404.000.000,00	1.404.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BID AND URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**214.258.900,00**	**234.180.000,00**	**234.180.000,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00		40.052.950,00	44.430.000,00	44.430.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	3,00	3,00		67.005.950,00	49.360.000,00	49.360.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	8,00	8,00		79.200.000,00	97.390.000,00	97.390.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	Unit	2,00	2,00		28.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**			**Program Pendaftaran Penduduk**	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**	**Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**793.792.705,00**	**498.908.458,00**	**1.258.033.128,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
							Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	**Sudah**	**Sudah**	**Sudah**	**Sudah**					
							IKM Pelayanan	**IKM Pelayanan**	**Persen**	**Persen**	**86,62**	**86,62**					
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Penerapan KTP Berbasis NIK**	**Penerapan KTP Berbasis NIK**	**Kecamatan**	**Kecamatan**	**20**	**20**		**673.792.705,00**	**395.099.632,00**	**1.196.624.302,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	Dokumen	250.000	250.000		673.792.705,00	395.099.632,00	1.196.624.302,00	
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**	**Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**	**Kecamatan**	**Kecamatan**	**20,00**	**20,00**		**120.000.000,00**	**103.808.826,00**	**61.408.826,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	02	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	Laporan	12	12		120.000.000,00	103.808.826,00	61.408.826,00	
2	**12**	**03**			**Program Pencatatan Sipil**	**Program Pencatatan Sipil**	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**107.600.000,00**	**228.555.325,00**	**228.555.325,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
							Cakupan Penerbitan Akta Nikah	**Cakupan Penerbitan Akta Nikah**	**Persen**	**Persen**	**60,00**	**60,00**					
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah Akta Kelahiran yang terbit**	**Jumlah Akta Kelahiran yang terbit**	**Persen**	**Persen**	**20,00**	**20,00**		**107.600.000,00**	**228.555.325,00**	**228.555.325,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	Laporan	1	1		107.600.000,00	228.555.325,00	228.555.325,00	
2	**12**	**04**			**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update**	**Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update**	**Persen**	**Persen**	**97,00**	**97,00**		**598.009.625,00**	**689.507.837,00**	**689.507.837,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	**Persen**	**Persen**	**44,00**	**44,00**		**598.009.625,00**	**689.507.837,00**	**689.507.837,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Laporan	12	12		150.000.000,00	231.034.070,00	231.034.070,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	Dokumen	12	12		79.000.000,00	80.187.138,00	80.187.138,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Laporan	20	20		369.009.625,00	378.286.629,00	378.286.629,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**				**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									**3.719.723.875,00**	**4.293.397.694,00**	**4.193.397.694,00**	
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									**3.719.723.875,00**	**4.293.397.694,00**	**4.193.397.694,00**	- **100.000.000,00**
329	**13**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**2.609.359.204,00**	**3.294.576.091,00**	**3.194.576.091,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**18.783.740,00**	**3.599.700,00**	**3.599.700,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen			4.848.990,00	899.925,00	899.925,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen			13.934.750,00	2.699.775,00	2.699.775,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100,00**	**100,00**	**98,00**			**2.243.877.125,00**	**2.876.197.544,00**	**2.776.197.544,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Orang/Bulan	Orang/Bulan	21			2.147.723.875,00	2.721.397.694,00	2.621.397.694,00	
2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1			91.080.000,00	153.000.000,00	153.000.000,00	
2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	2			5.073.250,00	1.799.850,00	1.799.850,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**10.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0rang	0rang	3			10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**87.432.019,48**	**149.007.709,00**	**149.007.709,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1			28.953.344,00	64.755.182,00	64.755.182,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1			21.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1			14.891.570,00	17.890.000,00	17.890.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1			3.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1			19.587.105,48	47.762.527,00	47.762.527,00	
2	**13**	**01**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**46.750.000,00**	**76.311.138,00**	**76.311.138,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2			16.750.000,00	25.921.614,00	25.921.614,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2			30.000.000,00	50.389.524,00	50.389.524,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**72.000.000,00**	**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1			72.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	
2	**13**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**130.516.319,52**	**96.460.000,00**	**96.460.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1			47.389.319,52	44.430.000,00	44.430.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	8			71.117.000,00	41.360.000,00	41.360.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	13	01	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	15			12.010.000,00	10.670.000,00	10.670.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**04**			**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL Milik Kemendagri**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL Milik Kemendagri**	**Persen**	**Persen**	**75,00**			**215.766.256,00**	**378.355.945,00**	**378.355.945,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri**	**Persen**	**Persen**	**100,00**			**215.766.256,00**	**378.355.945,00**	**378.355.945,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	Dokumen	1			104.189.818,00	246.824.250,00	246.824.250,00	
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	Dokumen	1			111.576.438,00	131.531.695,00	131.531.695,00	
2	**13**	**05**			**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**	**Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**	**Persen**	**Persen**	**95,00**			**894.598.415,00**	**620.465.658,00**	**620.465.658,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
							Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	**Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persen**	**Persen**	**95,00**						
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga , Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga , Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)**	**Persen**	**Persen**	**80,00**			**894.598.415,00**	**620.465.658,00**	**620.465.658,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	Dokumen	1			129.531.386,00	121.599.224,00	121.599.224,00	
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	Laporan	1			62.429.616,00	93.061.550,00	93.061.550,00	
2	13	05	2.02	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Laporan		1			47.492.013,00			
2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Dokumen	Dokumen	1			301.252.925,00	260.022.574,00	260.022.574,00	
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	Dokumen	1			353.892.475,00	145.782.310,00	145.782.310,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**14**				**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									**25.996.810.527,00**	**37.618.936.144,00**	**41.951.463.144,00**	
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									**25.996.810.527,00**	**37.618.936.144,00**	**41.951.463.144,00**	
2	**14**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**4.591.607.329,00**	**5.592.607.060,00**	**5.847.769.593,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	**14**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**37.500.000,00**	**14.996.639,00**	**14.996.639,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BID AKU URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	4	4		37.500.000,00	14.996.639,00	14.996.639,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**2.792.130.225,00**	**3.546.596.337,00**	**3.746.596.337,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	29	29		2.601.729.527,00	3.356.197.272,00	3.556.197.272,00	
2	14	1	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		182.951.000,00	182.950.872,00	182.950.872,00	
2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1		7.449.698,00	7.448.193,00	7.448.193,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**25.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	29	29		25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**384.476.604,00**	**232.917.380,00**	**232.917.380,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		4.880.000,00	4.878.514,00	4.878.514,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		54.476.000,00	54.474.722,00	54.474.722,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		5.000.000,00	4.996.629,00	4.996.629,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		195.170.000,00	39.960.538,00	39.960.538,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.07	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		96.350.604,00	100.006.977,00	100.006.977,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Invetaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Invetaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**179.700.500,00**	**593.500.000,00**	**593.500.000,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.07	0001	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit		5			550.000.000,00	550.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.07	0005	Pengadaan mebel	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	5	5		106.700.500,00	43.500.000,00	43.500.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit		1			73.000.000,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**762.000.000,00**	**787.100.000,00**	**787.100.000,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		186.000.000,00	211.100.000,00	211.100.000,00	
2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		576.000.000,00	576.000.000,00	576.000.000,00	
2	**14**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**410.800.000,00**	**402.496.704,00**	**457.659.237,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1		30.000.000,00	66.829.450,00	47.430.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	3	3		123.150.000,00	101.018.017,00	175.580.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5		12.650.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.09	0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1		245.000.000,00	221.999.237,00	221.999.237,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**02**			**Program Pengendalian Penduduk**	**Program Pengendalian Penduduk**	**Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun**	**Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**170.000.000,00**	**317.599.059,00**	**317.599.059,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**170.000.000,00**	**317.599.059,00**	**317.599.059,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	02	2.02	0019	Pemetaan Kependudukan	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	Dokumen	1	1		45.000.000,00	29.999.922,00	29.999.922,00	
2	14	02	2.02	0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	Dokumen	1	1		50.000.000,00	29.999.748,00	29.999.748,00	
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	Dokumen	1	1		75.000.000,00	257.599.389,00	257.599.389,00	
2	**14**	**03**			**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Total Fertility Rate (TFR)**	**Total Fertility Rate (TFR)**	**Persen**	**Persen**	**2,20**	**2,20**		**15.420.823.698,00**	**15.597.928.672,00**	**14.382.528.672,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
							Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	**Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun**	**Persen**	**Persen**	**0,26**	**0,26**					
							Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	**Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif**	**Persen**	**Persen**	**67,55**	**67,55**					
							Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)**	**Persen**	**Persen**	**18,08**	**18,08**					
							Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	**Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)**	**Persen**	**Persen**	**64,90**	**64,90**					
							Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	**Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**	**Persen**	**Persen**	**67,15**	**67,15**					
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**102.880.698,00**	**92.279.600,00**	**92.279.600,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya	Dokumen	Dokumen	1	1		82.880.698,00	72.279.807,00	72.279.807,00	
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	Laporan	12	12		20.000.000,00	19.999.793,00	19.999.793,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**7.144.911.500,00**	**13.600.982.360,00**	**12.385.582.360,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	Unit	1	1		248.929.000,00	200.000.000,00	212.000.000,00	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	Orang	2.900	2.900		6.895.982.500,00	13.400.982.360,00	12.173.582.360,00	
2	**14**	**03**	**203**		**Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsiili serta pelaksanaan Pellayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsiili serta pelaksanaan Pellayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan**	**Laporan**	1	1		**7.918.031.500,00**	**906.939.488,00**	**906.939.488,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	03	203	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Dokumen		1			50.000.000,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	14	03	203	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	Unit	1	1		300.000.000,00	135.999.679,00	135.999.679,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	203	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Laporan	12	12		43.879.500,00	672.339.809,00	672.339.809,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	203	0009	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Repsroduksi Di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatann		Orang		2.900			7.410.152.000,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	203	0011	Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	Laporan	12	12		114.000.000,00	98.600.000,00	98.600.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**3**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**255.000.000,00**	**997.727.224,00**	**997.727.224,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	3	2.04	0001	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	Organisasi	1	1		45.000.000,00	445.998.499,00	445.998.499,00	
2	14	3	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Dokumen		1			85.000.000,00			
2	14	3	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Dokumen	Dokumen	1	1		125.000.000,00	551.728.725,00	551.728.725,00	
2	**14**	**04**			**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB**	**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB**	**Persen**	**Persen**	**94,00**	**94,00**		**5.814.379.500,00**	**16.110.801.353,00**	**21.403.565.820,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persen**	**Persen**	**94,00**	**94,00**		**5.759.379.500,00**	**16.023.551.847,00**	**17.955.662.314,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok	Kelompok	134	134		5.644.379.500,00	9.648.752.393,00	9.218.062.860,00	
2	14	04	2.01	0026	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB BKR BKL PPKS PIK R dan usaha peningkatan keluarga akseptor UPPKA	Jumlah Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya	Kelompok	Kelompok	134	134		100.000.000,00	6.354.799.957,00	8.717.599.957,00	
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	Laporan	1	1		15.000.000,00	19.999.497,00	19.999.497,00	
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**55.000.000,00**	**87.249.506,00**	**3.447.903.506,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKRBKL,	Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKRBKL,	Jumlah Poktan yang dibina Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ((BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R)	Jumlah Poktan yang dibina Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ((BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R)	Laporan	Laporan	1	1		20.000.000,00	52.249.654,00	52.249.654,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		35.000.000,00	34.999.852,00	1.984.999.852,00	
2	14	04	2.02	0004		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejateraan Keluarga bagi Mitra Kerja		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesej		Laporan		1				1.410.654.000,00	
2	**15**				**PERHUBUNGAN**									**23.354.774.956,00**	**25.371.512.049,00**	**24.410.362.049,00**	
					DINAS PERHUBUNGAN									**23.354.774.956,00**	**25.371.512.049,00**	**24.410.362.049,00**	**961.150.000,00**
2	**15**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**20.327.559.856,00**	**22.391.512.049,00**	**21.140.912.049,00**	**Dinas Perhubungan**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**24.000.500,00**	**37.108.639,00**	**37.108.639,00**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	6	6	6	24.000.500,00	37.108.639,00	37.108.639	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**11.651.184.956,00**	**13.803.312.049,00**	**12.528.712.049,00**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	165	165	165	11.352.774.956,00	13.585.512.049,00	12.339.412.049,00	
2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	298.410.000,00	217.800.000,00	189.300.000,00	
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**			-	-	-	**Dinas Perhubungan**
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**41.999.500,00**	**158.808.165,00**	**182.808.165,00**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		36.000.000,00	11.630.116,00	11.630.116,00	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket						24.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.999.500,00	60.149.750,00	60.149.750	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	-	87.028.299,00	87.028.299	
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**		**Persen**		**98,00**			**150.000.000,00**	-	-	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit		2			150.000.000,00			Dinas Perhubungan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**8.107.800.000,00**	**8.107.800.000,00**	**8.107.800.000,00**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	355.800.000,00	355.800.000,00	355.800.000	
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	7.752.000.000,00	7.752.000.000,00	7.752.000.000	
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**352.574.900,00**	**284.483.196,00**	**284.483.196,00**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	52.000.000,00	43.930.000,00	43.930.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	22	22	22	300.574.900,00	221.258.760,00	221.258.760	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	-	19.294.436,00	19.294.436	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Persentase Pelayanan Angkutan Darat**	**Persentase Pelayanan Angkutan Darat**	**Persen**	**Persen**	**0,0925**	**0,0925**	**0,0925**	**2.792.015.100,00**	**2.743.000.000,00**	**3.032.450.000,00**	**Dinas Perhubungan**
							Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar dalam Kondisi Baik	**Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar dalam Kondisi Baik**	**Persen**	**Persen**	**97,00**	**97,00**	**97,00**				
							Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Kependudukan	**Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Kependudukan**	**Kejadian**	**Kejadian**	**185,00**	**185,00**	**185,00**				
2	**15**	**02**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Tingkat Pelayanan Pada Jalan Arteri**	**Tingkat Pelayanan Pada Jalan Arteri**	**tingkat pelayanan**	**tingkat pelayanan**	**C**	**C**	**C**	**1.600.000.000,00**	**1.600.000.000,00**	**1.889.450.000,00**	**Dinas Perhubungan**
							Tingkat Pelayanan Pada Jalan Kolektor	**Tingkat Pelayanan Pada Jalan Kolektor**	**tingkat pelayanan**	**tingkat pelayanan**	**C**	**C**	**C**				
							Rasio volume lalu lintas pada jalan arteri	**Rasio volume lalu lintas pada jalan arteri**	**rasio**	**rasio**	**0,45**	**0,45**	**0,45**				
							Rasio volume lalu lintas pada jalan kolektor	**Rasio volume lalu lintas pada jalan kolektor**	**rasio**	**rasio**	**0,45**	**0,45**	**0,45**				
							Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali	**Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali**	**rasio**	**rasio**	**75,00**	**75,00**	**75,00**				
							Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi**	**rasio**	**rasio**	**0,72**	**0,72**	**0,72**				
							Rasio Konektivitas Nasional	**Rasio Konektivitas Nasional**	**rasio**	**rasio**	**29,15**	**29,15**	**29,15**				
2	15	02	2.01	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Laporan		1			1.600.000.000,00		289.450.000,00	
2	15	02	2.01	0007		Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Laporan	0	1	1		1.600.000.000,00	1.600.000.000	
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**0,92**	**0,92**	**0,92**	**819.015.100,00**	**530.000.000,00**	**530.000.000,00**	**Dinas Perhubungan**
							Persentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,guardril) pada jalan kota dalam kondisi baik		**Persen**	**Persen**	**0,80**	**0,80**	**0,80**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Paket	Unit	2 paket	95,00	95,00	819.015.100,00	400.000.000,00	**400.000.000**	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Paket	Unit	4 paket	1.514		-	130.000.000,00	130.000.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) lokasi perparkiran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**	**Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) lokasi perparkiran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**	**Persen**	**Persen**		**0,18**		**-**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	2.04	0001	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Dokumen		1		-	20.000.000,00	20.000.000	
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**	**Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**	**Persen**	**Persen**	**1,00**			**373.000.000,00**	**543.000.000,00**	**543.000.000,00**	**Dinas Perhubungan**
							Jumlah Uji KIR angkutan umum	**Jumlah Uji KIR angkutan umum**	**uji**	**uji**	**13.700**						
							Tersediannya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	**Tersediannya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji**	**unit**	**unit**	**1**						
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	Unit	2	1		-	170.000.000,00	**170.000.000**	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	Dokumen	1	1		350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	Unit	1	7		23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**2.11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum**	**Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum**	**orang/ barang**	**orang/ barang**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**-**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Dinas Perhubungan**
							Meningkatnya Load Faktor angkutan umum	**Meningkatnya Load Faktor angkutan umum**	**Persen**	**Persen**	**60,37**	**60,37**	**60,37**				
							Jumlah Arus penumpang angkutan umum	**Jumlah Arus penumpang angkutan umum**	**orang**	**orang**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**				
							Rasio Ijin Trayek	**Rasio Ijin Trayek**	**rasio**	**rasio**	**0,02**	**0,02**	**0,02**				
2	15	02	2.11	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana UmumJaringan Trayek Perkotaandalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen		1	1	-	50.000.000,00	50.000.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**05**			**Program Pengelolaan Perkeretaapian**	**Program Pengelolaan Perkeretaapian**	**Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Yang dijaga**	**Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Yang dijaga**	**Kejadian**	**Kejadian**	**1**	**1**	**1**	**235.200.000,00**	**237.000.000,00**	**237.000.000,00**	**Dinas Perhubungan**
2	**15**	**05**	**2.03**		**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat pertumbuhan Perlintasan Sebidang Kereta Api Dengan Jalan Raya**	**Tingkat pertumbuhan Perlintasan Sebidang Kereta Api Dengan Jalan Raya**	**Persen**	**Persen**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**-**	**-**		**Dinas Perhubungan**
2	**15**	**05**	**2.05**		**Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Kecelakaan di pintu Perlintasan Kereta Api Yang dijaga**	**Tingkat Kecelakaan di pintu Perlintasan Kereta Api Yang dijaga**	**Kejadian**	**Kejadian**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**235.200.000,00**	**237.000.000,00**	**237.000.000,00**	**Dinas Perhubungan**
							Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Bandar Lampung	**Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Bandar Lampung**	**Kejadian**	**Kejadian**	**7,00**	**7,00**	**7,00**				
2	15	05	2.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi	Laporan	Laporan	1	1	1	235.200.000,00	237.000.000,00	**237.000.000,00**	
2	**16**				**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									**9.120.019.593,00**	**10.512.137.428,00**	**14.010.738.698,00**	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									**9.120.019.593,00**	**10.512.137.428,00**	**14.010.738.698,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**16**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.486.141.604,00**	**5.825.431.354,00**	**5.323.621.323,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**22.000.000,00**	**60.000.000,00**	**24.000.000,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	11.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	Laporan	1	1	1	11.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.596.174.593,00**	**4.424.583.337,00**	**3.815.483.337,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	45	45	45	3.475.174.593,00	4.167.784.298,00	3.567.784.298,00	
2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	111.000.000,00	226.800.000,00	226.800.000,00	
2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	10.000.000,00	29.999.039,00	20.899.039,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan**	**Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**10.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	20	20	20	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**110.467.011,00**	**117.798.017,00**	**183.898.386,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persen	Persen	1,00	1,00	1,00	15.000.000,00	29.998.479,00	38.503.178,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persen	Persen	1,00	1,00	1,00	10.000.000,00	14.990.045,00	22.265.715,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.467.011,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persen	Persen	1,00	1,00	1,00	9.000.000,00	9.999.954,00	15.219.954,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1,00	1,00	1,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	50.000.000,00	21.809.539,00	66.909.539,00	
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	-	-	**75.189.600,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit				-	-		
2	16	01	2.07	0011	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung								-		75.189.600,00	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**	**698.000.000,00**	**768.000.000,00**	**768.000.000,00**	
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	696.000.000,00	744.000.000,00	744.000.000,00	gak masuk dalam rincian
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**49.500.000,00**	**440.050.000,00**	**442.050.000,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	29.400.000,00	42.430.000,00	42.430.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1	1	1	17.600.000,00	41.620.000,00	41.620.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	2.500.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan gedung kantor	jumlah pemeliharaan gedung kantor	Unit	Unit	1	1	1	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	-	300.000.000,00	302.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**02**			**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentase Infrastruktur IT yang berfungsi baik**	**Persentase Infrastruktur IT yang berfungsi baik**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**2.848.845.000,00**	**2.957.319.174,00**	**6.509.730.475,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**1. Tersusunnya Informasi Layak Anak (ILA) Kota Bandar Lampung 2. Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Media Center dan Pelayanan PPID 4. Tersedianya Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah**	**1. Tersusunnya Informasi Layak Anak (ILA) Kota Bandar Lampung 2. Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Media Center dan Pelayanan PPID 4. Tersedianya Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**2.848.845.000,00**	**2.957.319.174,00**	**6.509.730.475,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi publik	Pengelolaan Media Komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	Dokumen	1	1	1	-	-		
2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.248.500.000,00	1.248.500.000,00	2.713.911.301,00	
2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	Orang	20	20	20	15.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	
2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.585.345.000,00	1.661.819.174,00	3.748.819.174,00	
2	**16**	**03**			**Program Aplikasi Informatika**	**Program Aplikasi Informatika**	**Presentase aplikasi IT dan aplikasi e-government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik**	**Presentase aplikasi IT dan aplikasi e-government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**1.785.032.989,00**	**1.729.386.900,00**	**2.177.386.900,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
									Persen	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**				
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik**	**Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**1.525.032.989,00**	**1.537.534.708,00**	**1.837.534.708,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	Unit	1	1	1	1.525.032.989,00	1.537.534.708,00	1.837.534.708,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**1. Tersedianya Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTEL) 2. Terbentuknya Pengembangan dan Pengelolaan Data Center 3. Tersedianya Pengkajian dan**	**1. Tersedianya Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTEL) 2. Terbentuknya Pengembangan dan Pengelolaan Data Center 3. Tersedianya Pengkajian dan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**260.000.000,00**	**191.852.192,00**	**339.852.192,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan e government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penatalaksanaan dan Pengawasan e government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	160.000.000,00	109.996.900,00	157.996.900,00	
2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	Unit	1	1	1	100.000.000,00	81.855.292,00	181.855.292,00	
2	**17**				**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									**5.213.045.961,00**	**5.442.935.330,00**	**5.292.935.330,00**	
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								**5.213.045.961,00**	**5.442.935.330,00**	**5.292.935.330,00**	**150.000.000,00**
2	**17**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan menengah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan menengah**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.168.972.211,00**	**3.826.952.282,00**	**3.526.952.282,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**66.000.000,00**	**79.560.971,00**	**79.560.971,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	5	5	5	66.000.000,00	79.560.971,00	79.560.971,00	
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.390.875.961,00**	**2.975.715.330,00**	**2.675.715.330,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	26	26	26	2.291.875.961,00	2.931.935.330,00	2.631.935.330,00	
2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	99.000.000,00	43.780.000,00	43.780.000,00	
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	5	5	5	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**172.036.928,00**	**186.979.433,00**	**186.979.433,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	25.636.928,00	25.583.814,00	25.583.814,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.000.000,00	2.996.700,00	2.996.700,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	**1**	**1**	**1**	11.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	27.000.000,00	26.998.919,00	26.998.919,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
2	17	01	2.06	0009	Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**50.000.000,00**	**43.086.548,00**	**43.086.548,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.07	0002	Jumlah pengadaan kendaraan dinas bermotor	-	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	-	Unit	Unit				-	-	-	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	Unit	15	15	15	50.000.000,00	43.086.548,00	43.086.548,00	
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	Unit	Unit				-	-	-	
2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	Unit	Unit				-	-	-	
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**362.000.000,00**	**414.000.000,00**	**414.000.000,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	26.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	336.000.000,00	348.000.000,00	348.000.000,00	
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**78.059.322,00**	**77.610.000,00**	**77.610.000,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.088,00	42.430.000,00	42.430.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinmnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	6	6	6	39.527.234,00	27.350.000,00	27.350.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	5.000.000,00	7.830.000,00	7.830.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	**17**	**04**			**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Persentase koperasi aktif**	**Persentase koperasi aktif**	**Persen**	**Persen**	**47,21**	**47,21**	**47,21**	**75.000.000,00**	**75.009.081,00**	**75.009.081,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dama 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dama 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi**	**Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi**			**35.18**	**35.18**	**35.18**	**75.000.000,00**	**75.009.081,00**	**75.009.081,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	Unit Usaha	80	80	80	75.000.000,00	75.009.081,00	75.009.081,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	**17**	**05**			**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	-	**Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi**	-	**Persen**	**Persen**	**0,43**	**0,43**	**0,43**	**410.170.000,00**	-	-	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi**	-			**48,80**	**48,80**	**48,80**	**410.170.000,00**	-	-	**Dinas Koperasi dan UKM**
						-	**Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian**	-			**0,12**	**0,12**	**0,12**				
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	-	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	Orang	Orang	150	150	150	410.170.000,00			Dinas Koperasi dan UKM
2	**17**	**06**			**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	**Persen**	**Persen**	**4,87**	**4,87**	**4,87**	**729.903.750,00**	**575.000.129,00**	**575.000.129,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
							Persentase fasilitasi penerbitan Sertifikat Nomor induk Koperasi (NIK)	**Persentase fasilitasi penerbitan Sertifikat Nomor induk Koperasi (NIK)**	**Persen**	**Persen**	**27,12**	**27,12**	**27,12**				
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi**	**Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi**			**1,01**	**1,01**	**1,01**	**729.903.750,00**	**575.000.129,00**	**575.000.129,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	06	2.01	0001	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	Orang	50	50	50	729.903.750,00			Dinas Koperasi dan UKM
2	17	06	2.01	0009		pemberdayaan koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota								-	575.000.129,00	575.000.129,00	
2	**17**	**07**			**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro**	**Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro**	**Persen**	**Persen**	**23,60**	**23,60**	**23,60**	**170.000.000,00**	**312.784.742,00**	**462.784.742,00**	
							Persentase UKM Non BPR LKM Aktif	**Persentase UKM Non BPR LKM Aktif**	**Persen**	**Persen**	**40,50**	**40,50**	**40,50**				
							Persentase BPR/LKM Aktif	**Persentase BPR/LKM Aktif**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				**Dinas Koperasi dan UKM**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk**			**3,90**	**3,90**	**3,90**	**170.000.000,00**	**312.784.742,00**	**462.784.742,00**	
							Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	**Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan**			**7,50**	**7,50**	**7,50**				Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	0001	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Unit Usaha	Unit Usaha	30	30	30	50.000.000,00			Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	Unit Usaha				-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	0003	Fasiiitasi Kemudahan perizinan Usaha Mikro	Fasiiitasi Kemudahan perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	Unit Usaha	30	30	30	120.000.000,00	312.784.742,00	462.784.742,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam	Orang	Orang	-	-	-	-	-	-	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	**17**	**08**			**Program Pengembangan UMKM**	**Potensi dan Pengembangan Usaha**	**Persentase Usaha Mikro dan Kecil**	**Persentase Usaha Mikro dan Kecil**	**Persen**	**Persen**	**67,30**	**67,30**	**67,30**	**659.000.000,00**	**653.189.096,00**	**653.189.096,00**	
						Mikro	**Pertumbuhan Produktivitas UMKM**	**Pertumbuhan Produktivitas UMKM**	**Persen**	**Persen**	**5,40**	**5,40**	**5,40**				**Dinas Koperasi dan UKM**
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran**	**Persen**	**Persen**	**2,40**	**2,40**	**2,40**	**659.000.000,00**	**653.189.096,00**	**653.189.096,00**	
2	17	08	2.01	0001	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,	Unit Usaha	Unit Usaha	30,00	30,00	30,00	659.000.000,00	-	-	
2	17	08	2.02	0006		Produksi dan Penghołahan, pdemasaran Sumber daya manusia, serta desain dan tehnologi		...							653.189.096,00	653.189.096,00	
2	**18**				**PENANAMAN MODAL**									**8.595.677.489,00**	**10.879.194.191,00**	**10.629.194.191,00**	
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									**8.595.677.489,00**	**10.879.194.191,00**	**10.629.194.191,00**	
2	**18**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**7.574.077.489,00**	**9.869.865.455,00**	**9.619.865.455,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**23.250.000,00**	**23.248.884,00**	**23.248.884,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	3	3	3	23.250.000,00	23.248.884,00	23.248.884,00	
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.183.477.486,00**	**7.821.612.191,00**	**7.571.612.191,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	72	72	72	6.083.077.486,00	7.751.452.191,00	7.501.452.191,00	
2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	100.400.000,00	70.160.000,00	70.160.000,00	
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	-	-	-	-			**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	-	-	-	-			Dinas Penanaman Modal dan PTSP

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**284.467.915,00**	**391.676.409,00**	**391.676.409,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	100.900.449,00	85.849.764,00	85.849.764,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	16.567.466,00	14.991.946,00	14.991.946,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	95.000.000,00	85.726.826,00	85.726.826,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	7.000.000,00	4.999.891,00	4.999.891,00	
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	20.000.000,00	19.990.000,00	19.990.000,00	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	45.000.000,00	180.117.982,00	180.117.982,00	
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**139.500.000,00**	**713.000.000,00**	**713.000.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	139.500.000,00	713.000.000,00	713.000.000,00	
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**790.500.000,00**	**771.000.000,00**	**771.000.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	190.500.000,00	171.000.000,00	171.000.000,00	
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**152.882.088,00**	**149.327.971,00**	**149.327.971,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	5	5	5	33.532.088,00	33.527.971,00	33.527.971,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	14 Unit (3 Unit Mobil, 11 Unit Motor)	14 Unit (3 Unit Mobil, 11 Unit Motor)	14 Unit (3 Unit Mobil, 11 Unit Motor)	99.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	20.350.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**02**			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Jumlah/Nilai Investasi PMA**	**Jumlah/Nilai Investasi PMA**	**Dolar ($)**	**Dolar ($)**	**669.294.277,84**	**669.294.277,84**	**669.294.277,84**	**55.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
							Jumlah/Nilai Investasi PMDN	**Jumlah/Nilai Investasi PMDN**	**Juta Rupiah (Rp)**	**Juta Rupiah (Rp)**	**2.345.964,76**	**2.345.964,76**	**2.345.964,76**				
							Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja**	**Orang/ Perusahaan**	**Orang/ Perusahaan**	**9,85**	**9,85**	**9,85**				
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau**	**Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau**	**persentase**	**persentase**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	02	2.02	0002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Dokumen		1			55.000.000,00			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	02	2.02	0004		Penyusunan Peta Potensi		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Dokumen		1	1		70.000.000,00	70.000.000,00	
2	**18**	**03**			**Program Promosi Penanaman Modal**	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Persentase Promosi Penanaman Modal**	**Persentase Promosi Penanaman Modal**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000,00**	**100.086.784,00**	**100.086.784,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Promosi Investasi Daerah**	**Promosi Investasi Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000,00**	**100.086.784,00**	**100.086.784,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	50.000.000,00	100.086.784,00	100.086.784,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**04**			**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**IKM Bidang Perizinan**	**IKM Bidang Perizinan**	**Angka**	**Angka**	**86,70**	**86,70**	**86,70**	**614.000.000,00**	**450.999.952,00**	**450.999.952,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Ketepatan Waktu Pemenuhan Pelayanan Perizinan**	**Ketepatan Waktu Pemenuhan Pelayanan Perizinan**	**hari**	**hari**	**14**	**14**	**14**	**614.000.000,00**	**450.999.952,00**	**450.999.952,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	04	2.01	0001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Pelaku Usaha		500			354.000.000,00			
2	18	04	2.01	0002	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal		Kegiatan Usaha		500			260.000.000,00			
2	18	04	2.01	0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melaluiSistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Pelaku Usaha		15.000	15.000		276.000.000,00	276.000.000,00	
2	18	04	2.01	0008		Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha		Kegiatan Usaha		70	70		174.999.952,00	174.999.952,00	
2	**18**	**05**			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN**	**Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN**	**Persen**	**Persen**	**21,95**	**21,95**	**21,95**	**302.600.000,00**	**388.242.000,00**	**388.242.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengendalian Nilai Investasi PMDN**	**Persentase Pengendalian Nilai Investasi PMDN**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**302.600.000,00**	**388.242.000,00**	**388.242.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sikronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Pelaku Usaha		500			287.240.000,00			
2	18	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		Kegiatan Usaha		500			15.360.000,00			
2	18	05	2.02	0004		Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		Kegiatan Usaha		10	10		58.236.000,00	58.236.000,00	
2	18	05	2.03	0005		Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha		Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha		Pelaku Usaha		291	291		213.534.000,00	213.534.000,00	
2	18	05	2.04	0006		Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inpeksi lapangan serta dilakukan		Kegiatan Usaha		85	85		116.472.000,00	116.472.000,00	
2	**18**	**06**			**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase Penyajian Data Penanaman Modal**	**Persentase Penyajian Data Penanaman Modal**	**PERSEN**	**PERSEN**							**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan secara Terpadu**	**Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan secara Terpadu**	**PERSEN**	**PERSEN**							**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	06	2.01	0001	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Beusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Beusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	Dokumen							

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**19**				**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									**12.335.453.946,00**	**13.900.773.180,00**	**13.600.773.180,00**	
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									**12.335.453.946,00**	**13.900.773.180,00**	**13.600.773.180,00**	
2	**19**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.498.051.725,00**	**4.277.696.804,00**	**4.037.135.804,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**38.991.974,00**	**38.991.295,00**	**38.991.295,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	7	7	7	38.991.974,00	38.991.295,00	38.991.295,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.752.327.870,00**	**3.514.171.378,00**	**3.214.171.378,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	28	28	28	2.638.078.096,00	3.403.986.330,00	3.103.986.330,00	
2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	114.249.774,00	110.185.048,00	110.185.048,00	
2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	-	-	-	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	Paket	-	59	0	0	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Orang	-	2	0	0	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**104.018.962,00**	**120.790.166,00**	**120.790.166,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	14.795.479,00	28.513.994,00	43.695.935,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Paket	-	1	0	0	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.285.983,00	4.285.881,00	4.285.881,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	19.937.500,00	19.250.000,00	4.068.059,00	
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	50.000.000,00	53.740.291,00	53.740.291,00	
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kabutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kabutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**35.000.000,00**	**38.093.965,00**	**61.053.965,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Unit	-	0	0	0	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	35.000.000,00	38.093.965,00	38.093.965,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	0	0	1	-	-	22.960.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**456.000.000,00**	**456.000.000,00**	**456.000.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	456.000.000,00	456.000.000,00	456.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**Persen**	**111.712.919,00**	**109.650.000,00**	**146.129.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	36.000.000,00	42.430.000,00	42.430.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1	1	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	4	4	4	73.712.919,00	65.220.000,00	101.699.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**02**			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif**	**Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**249.112.169,00**	**249.111.151,00**	**249.111.151,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
							Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	**Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**	**Persen**	**Persen**	**3,88**	**3,88**	**3,88**				
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**49.112.169,00**	**49.111.151,00**	**49.111.151,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	Orang	20,00	20,00	20,00	27.155.140,00	27.154.159,00	27.154.159,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Wira Usaha Pemula	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemula Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Wirausaha Pemula Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	Orang	30,00	30,00	30,00	21.957.029,00	21.956.992,00	21.956.992,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-	Orang	-	30,00	0,00	0,00	-	-		Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi Perlindungan Pemuda, Advokasi Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	-	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan	-	Orang	-	60,00	0,00	0,00	-			Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
2	**19**	**03**			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Cakupan Pembinaan Olahraga**	**Cakupan Pembinaan Olahraga**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**7.588.290.052,00**	**8.292.465.225,00**	**8.233.026.225,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
							Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi	**Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara	**Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**83,33**	**83,33**	**83,33**				
							Peningkatan Prestasi Olahraga	**Peningkatan Prestasi Olahraga**	**Jumlah**	**Jumlah**	**10,00**	**10,00**	**10,00**				
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	**Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	**Persen**	**-**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	-	-		**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	-	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	-	Orang	-	20,00	0,00	0,00	-	-		Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah kabupaten/Kota**	-	**Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	**Persen**	**0**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**453.160.000,00**	-	-	**Dinas Pemuda dan Olahraga**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-	Dokumen	0	1	0	0	453.160.000,00	-	-	
2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	-	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	-	Dokumen	0	1	0	0	-	-	-	
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**-**	**Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**-**	**Persen**		**98,00**		**0,00**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	03	2.03	0001	Seleksi Atlit Daerah	-	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-	Orang		100		0	-	-	-	
2	19	03	2.03	0005	Koordinas dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	-	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	-	Dokumen		1		0	-	-	-	
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan**	**Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelolahragaan**	**Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelolahragaan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.529.951.400,00**	**7.407.731.541,00**	**7.407.731.541,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Pembinaan Organisasi Keolahragaan		Organisasi		1	1		6.529.951.400,00	7.407.731.541,00	7.407.731.541,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**605.178.652,00**	**884.733.684,00**	**825.294.684,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	468.511.154,00	748.066.463,00	688.627.463,00	
2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Dokumen	Dokumen	1	1	1	136.667.498,00	136.667.221,00	136.667.221,00	
2	**19**	**04**			**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.000.000.000,00**	**1.081.500.000,00**	**1.081.500.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.000.000.000,00**	**1.081.500.000,00**	**1.081.500.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat	Organisasi	Organisasi	1	1	1	1.000.000.000,00	1.081.500.000,00	1.081.500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**20**				**STATISTIK**									**115.000.000,00**	**181.598.645,00**	**205.363.645,00**	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									**115.000.000,00**	**181.598.645,00**	**205.363.645,00**	
2	**20**	**02**			**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi**	**Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi**	**Ada/Tidak**	**Ada/Tidak**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**115.000.000,00**	**181.598.645,00**	**205.363.645,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**1. Terevaluasinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Bandar Lampung 2. Terbentuknya Operasional Literasi Data dan Informasi 3. Tersedianya Penyusunan Data Sektoral 4. Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Data Elektronik**	**1. Terevaluasinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Bandar Lampung 2. Terbentuknya Operasional Literasi Data dan Informasi 3. Tersedianya Penyusunan Data Sektoral 4. Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Data Elektronik**	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	**115.000.000,00**	**181.598.645,00**	**205.363.645,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	Dokumen	1	1	1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	20	02	2.01	0002	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	Orang	20	20	20	15.000.000,00			
2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	Dokumen	1	1	1	75.000.000,00	106.598.645,00	106.598.645,00	
2	20	02	2.01	0005	Pengembangan Infrastruktur	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	Unit	1	1	1	10.000.000,00	60.000.000,00	83.765.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
					PERSANDIAN									**45.000.000,00**	**167.633.225,00**	**162.833.225,00**	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									**45.000.000,00**	**167.633.225,00**	**162.833.225,00**	
2	**21**	**02**			**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik**	**Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**45.000.000,00**	**167.633.225,00**	**162.833.225,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1. Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Postelsus dan Penyiaran 2. Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bandar Lampung 3. Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Persandian**	**1. Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Postelsus dan Penyiaran 2. Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bandar Lampung 3. Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Persandian**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**45.000.000,00**	**167.633.225,00**	**162.833.225,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	15.000.000,00	69.996.679,00	69.996.679,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	Laporan	1	1	1	15.000.000,00	37.641.601,00	32.841.601,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	20	20	20	15.000.000,00	59.994.945,00	59.994.945,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**22**				**KEBUDAYAAN**									**1.898.900.000,00**	**1.898.899.408,00**	**1.898.899.408,00**	
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									**1.898.900.000,00**	**1.898.899.408,00**	**1.898.899.408,00**	
2	**22**	**02**			**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi**	**Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi**	**Jumlah**	**Jumlah**	**92**	**92**	**92**	**700.000.000,00**	**699.999.256,00**	**699.999.256,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dilaksanakannya Pentas Seni Pengembangan dan Pembinaan Budaya**	**Dilaksanakannya Pentas Seni Pengembangan dan Pembinaan Budaya**	**Kegiatan**	**Kegiatan**	**5**	**5**	**5**	**700.000.000,00**	**699.999.256,00**	**699.999.256,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	Objek	4	4	4	700.000.000,00	699.999.256,00	699.999.256,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**03**			**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan**	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Jumlah**	**Jumlah**	**5**	**5**	**5**	**1.123.900.000,00**	**1.123.900.243,00**	**1.123.900.243,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan**	**Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan**	**Keg**	**Keg**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1.123.900.000,00**	**1.123.900.243,00**	**1.123.900.243,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
							Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/ Pendukung Pertunjukan Seni	**Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/ Pendukung Pertunjukan Seni**	**Persen**	**Persen**	**0,93**	**0,93**	**0,93**				
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional*	Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional*	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	Orang	5,00	5,00	5,00	75.000.000,00	75.000.243,00	75.000.243,00	
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan	Lembaga	Lembaga	1	1	1	1.048.900.000,00	1.048.900.000,00	1.048.900.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**04**			**Program Pembinaan Sejarah**	**Program Pembinaan Sejarah**	**Jumlah Sejarah yang Dilakukan Pembinaan**	**Jumlah Sejarah yang Dilakukan Pembinaan**	**Kegiatan**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**1**	**75.000.000,00**	**74.999.909,00**	**74.999.909,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cagar Budaya Yang Di Lestarikan**	**Jumlah Cagar Budaya Yang Di Lestarikan**	**Keg**	**Keg**	**1**	**1**	**1**	**75.000.000,00**	**74.999.909,00**	**74.999.909,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
							Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Yang Dilindungi	**Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Yang Dilindungi**	**Unit**	**Unit**	**5**	**5**	**5**				
							Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan	**Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan**	**Unit**	**Unit**	**8**	**8**	**8**				
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data Dan Informasi Sejarah*	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data Dan Informasi Sejarah*	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Buku	Buku	1	1	1	75.000.000,00	74.999.909,00	74.999.909,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**23**				**PERPUSTAKAAN**									**5.002.008.881,00**	**16.754.334.948,00**	**16.504.334.948,00**	
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									**5.002.008.881,00**	**16.754.334.948,00**	**16.504.334.948,00**	
2	**23**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.706.961.881,00**	**5.614.338.322,00**	**5.364.338.322,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**50.000.000,00**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Laporan	5	5	5	40.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.846.083.312,10**	**4.887.750.222,00**	**4.637.750.222,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	39	39	39	3.721.083.312,10	4.727.334.948,00	4.477.334.948,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasin Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasin Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	125.000.000,00	160.415.274,00	160.415.274,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**35.000.000,00**	-	-	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	4	4	4	35.000.000,00	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**185.001.599,90**	**172.488.100,00**	**192.495.500,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	35.000.000,00	34.999.745,00	34.999.745,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.000.000,00	14.999.359,00	14.999.359,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.000.000,00	20.000.000,00	40.007.400,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	18.501.599,90	22.408.622,00	22.408.622,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	7	7	7	24.000.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	12	12	12	5.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	5	5	5	57.000.000,00	54.280.374,00	54.280.374,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barak Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barak Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	-	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	unit	0	0	0	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	unit	0	0	0	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	unit	0	1	1	-	5.500.000,00	5.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**272.400.000,00**	**292.000.000,00**	**271.992.600,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	78.400.000,00	100.000.000,00	79.992.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	194.000.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**318.476.969,00**	**201.600.000**	**201.600.000**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	23	01	2.09	0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	45.532.088,00	42.430.000	42.430.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	6	6	6	180.944.881,00	129.550.000	129.550.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaaan peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	26	26	26	15.000.000,00	14.620.000	14.620.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	0011	Pemeliharaan/rehabitilasi sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabitilasi sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	2	2	2	77.000.000,00	15.000.000	15.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**			**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun**	**Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun**	**Angka**	**Angka**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**270.047.000,00**	**11.114.996.626,00**	**11.114.996.626,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Persen**	**Persen**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**140.000.000,00**	**139.999.674**	**139.999.674**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen TIK berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen TIK berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	Layanan	Layanan	3	3	3	30.000.000,00	29.999.674	29.999.674	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksemplar	Eksemplar	100	0	0	25.000.000,00	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	Perpustakaan	25	25	25	20.000.000,00	25.000.000	25.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Orang	50	50	50	30.000.000,00	25.000.000	25.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	Eksemplar	100	100	100	35.000.000,00	60.000.000	60.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Persen, Peserta, Perpustakaan, TBM, Kelurahan, Sekolah**	**Persen, Peserta, Perpustakaan, TBM, Kelurahan, Sekolah**	**450 Peserta dan 5 Perpustakaan**	**450 Peserta dan 5 Perpustakaan**	**450 Peserta dan 5 Perpustakaan**	**130.047.000,00**	**10.974.996.952**	**10.974.996.952**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	02	2.02	0001	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	Lokus	2	2	2	30.047.000,00	19.998.270	19.998.270	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	0002	Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di Tempat-tempat umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di Tempat-tempat umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	Perpustakaan	5	5	5	20.000.000,00	10.849.999.784	10.849.999.784	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Baca Membaca	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Baca Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	Orang	50	50	50	50.000.000,00	70.000.000	70.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	Perpustakaan	8	8	8	30.000.000,00	34.998.898	34.998.898	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**03**			**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan**	**Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan**	**Jumlah**	**Jumlah**	**7**	**7**	**7**	**25.000.000,00**	**25.000.000**	**25.000.000**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**23**	**03**	**2.02**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Koleksi Budaya Etnis Nusantara di Kota Bandar Lampung**	**Koleksi Budaya Etnis Nusantara di Kota Bandar Lampung**	**Naskah**	**Naskah**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	03	2.02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Eksemplar	Eksemplar	75,00	75,00	75,00	25.000.000,00	25.000.000	25.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**24**				**KEARSIPAN**									**189.481.000,00**	**215.000.000,00**	**215.000.000,00**	
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									**189.481.000,00**	**215.000.000,00**	**215.000.000,00**	
2	**24**	**02**			**Program Pengelolaan Arsip**	**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku**	**Persen**	**Persen**	**22,20**	**22,20**	**22,20**	**169.481.000,00**	**215.000.000,00**	**215.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kapasitas SDM Bagi Pengelola Arsip tentang Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta**	**Kapasitas SDM Bagi Pengelola Arsip tentang Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta**	**Persen**	**Persen**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**80.000.000,00**	**105.000.000,00**	**105.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	Berkas	50	50	50	30.000.000,00	90.000.000	90.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	Berkas	100	100	100	50.000.000,00	15.000.000	15.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Jumlah Arsip yang tertata dan terpublikasi**	**Meningkatnya Jumlah Arsip yang tertata dan terpublikasi**	**Persen**	**Persen**	**1000 Berkas**	**1000 Berkas**	**1000 Berkas**	**30.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	02	2.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip	Arsip		50	50		50.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	Arsip	140	140	140	30.000.000,00	20.000.000	20.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Pembinaan Secara Teknis Terhadap ASN dan Pegawai Swasta**	**Pelaksanaan Pembinaan Secara Teknis Terhadap ASN dan Pegawai Swasta**	**Paket**	**Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**59.481.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	Pengguna	54	54	54	29.481.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Terbinanya ASN Unit Kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1	0	0	**30.000.000,00**	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**			**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Jumlah Arsip yang dimusnahkan**	**Jumlah Arsip yang dimusnahkan**	**Jumlah**	**Jumlah**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	-	-	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun**	**Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliikin retensi di bawah 10 tahun**	**Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Mmeiliiki retensi di Bawah 10 Tahun**	**Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Mmeiliiki retensi di Bawah 10 Tahun**	**Arsip**	**Arsip**	**150 Arsip**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	-	-	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	03	2.01	0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	Berkas	180	0	0	20.000.000,00	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**	**2.03**		**Peyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Peyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Jumlah Arsip Daerah Terselamatkan**	**Jumlah Arsip Daerah Terselamatkan**	**Berkas, Paket**	**Berkas, Paket**	**1 Paket**	**0,00**	**0,00**				**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	03	2.03	0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Arsip	Arsip							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									**41.468.810.255,49**	**48.621.032.356,00**	**41.541.137.046,00**	
3	**25**				**KELAUTAN DAN PERIKANAN**									**4.340.389.932,00**	**4.987.841.179,00**	**4.737.841.179,00**	
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									**4.340.389.932,00**	**4.987.841.179,00**	**4.737.841.179,00**	
3	**25**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.994.516.557,00**	**4.657.500.342,00**	**4.407.500.342,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**26.000.000,00**	**25.999.766,00**	**25.999.766,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	4	4	4	26.000.000,00	25.999.766,00	25.999.766,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.816.389.932,00**	**3.463.841.179,00**	**3.213.841.179,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	33	33	33	2.692.389.932,00	3.339.841.179,00	3.089.841.179,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	124.000.000	124.000.000	124.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	1	1	1				Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	3	3	3	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**198.400.000,00**	**190.309.958,00**	**190.309.958,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.000.000	9.896.824	9.896.824	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	45.000.000	44.998.504	44.998.504	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.000.000	14.997.791	14.997.791	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	25.000.000	24.999.839	24.999.839	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	12	12	12	5.400.000	5.400.000	5.400.000	
3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	58.000.000	50.017.000	50.017.000	
3	**25**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	15	15	15	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
3	25	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1				
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**694.200.000,00**	**694.200.000,00**	**694.200.000,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	46.200.000,00	46.200.000,00	46.200.000,00	
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	648.000.000,00	648.000.000,00	648.000.000,00	
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**179.526.625,00**	**203.149.439,00**	**203.149.439,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.530.000	42.430.000	42.430.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	16	16	16	136.496.625	122.320.000	122.320.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	Unit	16	16	16	9.500.000	9.740.000	9.740.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1		28.659.439,00	28.659.439,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	10	10	10				Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman**	**Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman**	**Persen**	**Persen**	**0,032**	**0,032**	**0,032**	**60.000.000,00**	**103.998.703,00**	**103.998.703,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
							Cakupan Bina Kelompok Nelayan	**Cakupan Bina Kelompok Nelayan**	**Persen**	**Persen**	**38,00**	**38,00**	**38,00**				
							Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	**Produksi Perikanan Kelompok Nelayan**	**Persen**	**Persen**	**58,47**	**58,47**	**58,47**				
							Produksi Perikanan Tangkap	**Produksi Perikanan Tangkap**	**Ton**	**Ton**	**3.244,23**	**3.244,23**	**3.244,23**				
3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**24,00**	**24,00**	**24,00**	-	-	-	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	Unit	Unit	20,00	20,00	20,00				Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**2.02**			**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Meningkatnya peranan nelayan kecil di bidang perikanan tangkap**		**Persen**		**2**		**-**	**43.999.859,00**	**43.999.859,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	2.02	0003		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Unit Usaha		10			43.999.859,00	43.999.859,00	
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik**	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**60.000.000,00**	**59.998.844,00**	**59.998.844,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan (TPI)	Layanan	Layanan	1	1	1	60.000.000	59.998.844	59.998.844	
3	**25**	**03**	**2.06**		**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran SampaiDengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau,Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran SampaiDengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau,Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen pendaftaran kapal berukuran sampai dengan 10 GT**	**Dokumen pendaftaran kapal berukuran sampai dengan 10 GT**	**Dok**	**Dok**	**1**	**1**	**1**	-	-	-	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	2.06	0002	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	Rekomendasi							
3	**25**	**04**			**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Produksi Perikanan Budidaya**	**Produksi Perikanan Budidaya**	**Ton**	**Ton**	**140,69**	**140,69**	**140,69**	**95.000.000,00**	**82.340.404,00**	**82.340.404,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan**	**Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan**	**Persen**	**Persen**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kolompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Jumlah Kolompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	Kelompok							Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan	Kelompok	Kelompok	10	10	10	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya**	**Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya**	**Persen**	**Persen**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**60.000.000,00**	**47.340.404,00**	**47.340.404,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota	Dok	Dok	**1**	**1**	**1**				Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Unit	Unit	2,00	2,00	2,00	60.000.000,00	47.340.404,00	47.340.404,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	**Compliance (Persentase Kepatuhan) Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan**	**Compliance (Persentase Kepatuhan) Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan**	**Persen**	**Persen**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**45.000.000,00**	**44.999.921,00**	**44.999.921,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	**25**	**05**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan kawasan yang dipantau dari kegiatan ilegal fishing dan RZKAW**	**Persentase cakupan kawasan yang dipantau dari kegiatan ilegal fishing dan RZKAW**	**Persen**	**Persen**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**45.000.000,00**	**44.999.921,00**	**44.999.921,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	45.000.000,00	44.999.921,00	44.999.921,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Angka Konsumsi Ikan**	**Angka Konsumsi Ikan**	**Kg/Kap/Th**	**Kg/Kap/Th**	**40,22**	**40,22**	**40,22**	**145.873.375,00**	**99.001.809,00**	**99.001.809,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Terbitnya surat ijin usaha perikanan**	**Terbitnya surat ijin usaha perikanan**	**Dokumen**	**Dokumen**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**35.000.000,00**	**31.970.000,00**	**31.970.000,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	Dokumen	1	1	1	35.000.000	31.970.000	31.970.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Terbitnya ijin edar dan halal produk**	**Terbitnya ijin edar dan halal produk**	**Dok**	**Dok**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**40.000.000,00**	-	-	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	Unit Usaha	7	7	7	40.000.000			Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai ekspor hasil perikanan**	**Nilai ekspor hasil perikanan**	**USD**	**USD**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**70.873.375,00**	**67.031.809,00**	**67.031.809,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	1	1	1	70.873.375,00	67.031.809,00	67.031.809,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**26**				**PARIWISATA**									**7.601.085.630,00**	**9.329.522.286,00**	**7.879.522.286,00**	
					DINAS PARIWISATA									**7.601.085.630,00**	**9.329.522.286,00**	**7.879.522.286,00**	
3	**26**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.051.085.630,00**	**5.879.522.286,00**	**4.429.522.286,00**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**127.000.000,00**	**93.119.948,00**	**93.119.948,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	12	12	12	127.000.000,00	93.119.948,00	93.119.948,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.870.811.262,00**	**4.753.613.185,00**	**3.303.613.185,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	35	35	35	3.757.811.262,00	4.659.522.286,00	3.209.522.286,00	
3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	113.000.000,00	94.090.899,00	94.090.899,00	
3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**30.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	2	2	2	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**252.086.868,00**	**120.381.466,00**	**120.381.466,00**	**Dinas Pariwisata**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.086.868,00	6.808.335,00	6.808.335,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	60.000.000,00	35.157.201,00	35.157.201,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.500.000,00	9.718.043,00	9.718.043,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	9.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	50.000.000,00	25.165.564,00	25.165.564,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	27.032.323,00	27.032.323,00	
3	**26**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**176.000.000,00**	**271.355.687,00**	**271.355.687,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.07	0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang disediakan		Unit		1,00	1,00		110.000.000,00	110.000.000,00	
3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	52.000.000,00			Dinas Pariwisata
3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	124.000.000,00	161.355.687,00	161.355.687,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**521.000.000,00**	**520.000.000,00**	**520.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	65.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	456.000.000,00	456.000.000,00	456.000.000,00	
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**74.187.500,00**	**111.052.000,00**	**111.052.000,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	29.121.500,00	44.486.000,00	44.486.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	2	2	2	15.666.000,00	5.866.000,00	5.866.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	8.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	16.800.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**			**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase Kunjungan wisata**	**Persentase Kunjungan wisata**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**450.000.000,00**	**708.269.917,00**	**708.269.917,00**	**Dinas Pariwisata**
							PAD Sektor Pariwisata	**PAD Sektor Pariwisata**	**Persen**	**Persen**	**25,55**	**25,55**	**25,55**				
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara**	**Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara**	**orang**	**orang**	**903.489,93**	**903.489,93**	**903.489,93**	**197.500.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
							Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara	**Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara**	**orang**	**orang**	**1.948,12**	**1.948,12**	**1.948,12**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
							Jumlah Destinasi Baru yang dikembangkan	**Jumlah Destinasi Baru yang dikembangkan**	**lokasi**	**lokasi**	**2 Lokasi**	**2 Lokasi**	**2 Lokasi**				
3	26	02	2.01	0002	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Dokumen		1			197.500.000,00			Dinas Pariwisata
3	26	02	2.01	0009		Perencanaan dan Perencangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan kabupaten/kota		Dokumen		1	1		50.000.000,00	50.000.000,00	
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola**	**Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola**	**Laporan**	**Laporan**	**1**	**1**	**1**	**252.500.000,00**	**658.269.917,00**	**658.269.917,00**	
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	Lokasi	2	2	2	212.500.000,00	508.269.917,00	508.269.917,00	Dinas Pariwisata
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1	1	1	40.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**03**			**Program Pemasaran Pariwisata**	**Program Pemasaran Pariwisata**	**Lama kunjungan Wisata**	**Lama kunjungan Wisata**	**Hari**	**Hari**	**1,80**	**1,80**	**1,80**	**525.000.000,00**	**525.000.000,00**	**525.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
							Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara	**Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara**	**Rupiah/ Kunjungan**	**Rupiah/ Kunjungan**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**				
							Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara	**Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara**	**Rupiah/ Kunjungan**	**Rupiah/ Kunjungan**	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**				
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Lama Kunjungan wisatawan Nusantara**	**Lama Kunjungan wisatawan Nusantara**	**hari**	**hari**	**1,80**	**1,80**	**1,80**	**525.000.000,00**	**525.000.000,00**	**525.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
							Lama Kunjungan wisatawan mancanegara	**Lama Kunjungan wisatawan mancanegara**	**hari**	**hari**	**1,80**	**1,80**	**1,80**				
							Jumlah event promosi yang diikuti	**Jumlah event promosi yang diikuti**	**event**	**event**	**20,00**	**20,00**	**20,00**				
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	Dokumen	1	1	1	407.000.000,00	407.000.000,00	407.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	Laporan	1	1	1	118.000.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**04**			**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Persen**	**Persen**	**2,37**	**2,37**	**2,37**	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**04**	**2.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif**	**UMKM**	**UMKM**	**460,00**	**460,00**	**460,00**	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	04	2.02	0002	Pengembangan Pendidikan	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	100.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**05**			**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif**	**Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**1.475.000.000,00**	**2.156.730.083,00**	**2.156.730.083,00**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah industri baru yang mendukung MICE (jasa usaha)**	**Jumlah industri baru yang mendukung MICE (jasa usaha)**	**Jasa Usaha**	**Jasa Usaha**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**1.475.000.000,00**	**2.156.730.083,00**	**2.156.730.083,00**	**Dinas Pariwisata**
							Jumlah SDM Pariwisata yang profesional	**Jumlah SDM Pariwisata yang profesional**	**Orang**	**Orang**	**50,00**	**50,00**	**50,00**				
3	26	05	2.01	0001	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya (Jumlah Duta Wisata Kota Bandar Lampung)		Orang		24			475.000.000,00			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	26	05	2.01	0002	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Jumlah Ragam Festival Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan)		Orang		300			600.000.000,00			
3	26	05	2.01	0003	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) (Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Sadar Wisata)		Orang		50			75.000.000,00			Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	0004	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Jumlah Lokakarya dan Dialog Jasa Usaha Pariwisata (Hotel, Restoran, Tempat Hiburan) yang dilaksanakan)		Orang		50			75.000.000,00			Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Jumlah Event Festival yang dilaksanakan)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Jumlah Event Festival yang dilaksanakan)	Laporan	Laporan	1	1	1	250.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.02	0006		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif		Orang		50	50		60.000.000,00	60.000.000,00	
3	26	05	2.03	0008		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI		Jumlah SDM pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkan pada SKKNI		Orang		24	24		386.730.083,00	386.730.083,00	
3	26	05	2.04	0009		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata		Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata		Orang		300	300		450.000.000,00	450.000.000,00	
3	26	05	2.05	0010		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata		Orang		50,00	50,00	-	60.000.000,00	60.000.000,00	
3	**27**				**PERTANIAN**									**11.055.588.511,00**	**13.458.887.084,00**	**9.323.758.010,00**	**4.135.129.074,00**
					DINAS PERTANIAN									**11.055.588.511,00**	**13.458.887.084,00**	**9.323.758.010,00**	
3	**27**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**10.673.915.115,00**	**13.225.573.539,00**	**8.628.950.539,00**	**DINAS PERTANIAN**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BID AKU URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**47.319.541,00**	**27.937.933,00**	**46.978.376,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	47.319.541,00	27.937.933,00	46.978.376,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**8.568.304.439,00**	**11.122.793.200,00**	**6.465.803.344,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	8.402.879.626,00	10.991.253.200,00	6.334.263.344,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	165.424.813,00	131.540.000,00	131.540.000,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	**2.05**	**09**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	5 orang	5 orang	5 orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**144.857.175,00**	**150.369.684,00**	**162.809.940,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket				6.000.000,00	5.999.504,00	5.999.504,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	54.512.800,00	60.994.580,00	60.994.580,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.644.750,00	6.640.969,00	6.640.969,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	34.699.625,00	33.734.631,00	46.174.887,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemenuhan Kebutuhan inventaris kantor**		**Laporan**		**1 Laporan**		-	**73.772.722,00**	**102.658.879,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	27	01	2.07	006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Paket		1 Paket			50.477.116,00	79.477.116,00	
3	27	01	2.07	011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Paket		1 Paket			23.295.606,00	23.181.763,00	
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.466.750.000,00**	**1.422.750.000,00**	**1.422.750.000,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	190.750.000,00	150.750.000,00	150.750.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.276.000.000,00	1.272.000.000,00	1.272.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**436.683.960,00**	**417.950.000,00**	**417.950.000,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	33.532.088,00	42.430.000,00	42.430.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	393.151.872,00	366.750.000,00	366.750.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	8.770.000,00	8.770.000,00	DINAS PERTANIAN
	27	**02**			**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Produktivitas Padi**	**Produktivitas Padi**	**kw/ha**	**kw/ha**	**58,95 kw/ha**	**58,95 kw/ha**	**58,95 kw/ha**	**110.000.000,00**	**183.863.545,00**	**561.784.471,00**	**DINAS PERTANIAN**
							Produktivitas Jagung	**Produktivitas Jagung**	**kw/ha**	**kw/ha**	**49,15 kw/ha**	**49,15 kw/ha**	**49,15 kw/ha**				
							Produksi Daging	**Produksi Daging**	**Ton/Tahun**	**Ton/Tahun**	**5.389,52 ton/ha**	**5.389,52 ton/ha**	**5.389,52 ton/ha**				
							Produksi Telur	**Produksi Telur**	**Ton/Tahun**	**Ton/Tahun**	**132,03 ton/ha**	**132,03 ton/ha**	**132,03 ton/ha**				
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Sarana pertanian dan partisipasi promosi produk pertanian yang tersedia**	**Sarana pertanian dan partisipasi promosi produk pertanian yang tersedia**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**30.000.000,00**	**65.519.583,00**	**65.519.583,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	65.519.583,00	65.519.583,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Bibit tanaman hias, buah-buahan, sayuran, dan tanaman perkebunan yang ditanam**	**Jumlah Bibit tanaman hias, buah-buahan, sayuran, dan tanaman perkebunan yang ditanam**	**Paket**	**Paket**	**4 Paket**	**4 Paket**	**4 Paket**	**80.000.000,00**	**118.343.962,00**	**496.264.888,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	88.343.962,00	88.343.962,00	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	407.920.926,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**04**			**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Angka Kejadian Penyakit**	**Angka Kejadian Penyakit**	**Persen**	**Persen**	**5,40**	**5,40**	**5,40**	**181.575.000,00**	**49.450.000,00**	**133.023.000,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000,00**	-	-	**DINAS PERTANIAN**
3	27	04	2.01	0001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00			DINAS PERTANIAN
3	**27**	**04**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana**	**Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000,00**	**18.450.000,00**	**18.450.000,00**	**DINAS PERTANIAN**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	18.450.000,00	18.450.000,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola**	**Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**81.575.000,00**	**31.000.000,00**	**114.573.000,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	81.575.000,00	31.000.000,00	114.573.000,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**07**			**Program Penyuluhan Pertanian**	**Program Penyuluhan Pertanian**	**Cakupan Bina Kelompok Petani**	**Cakupan Bina Kelompok Petani**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**90.098.396,00**	**-**	**-**	**DINAS PERTANIAN**
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Penyuluhan pertanian yang terlaksana**	**Penyuluhan pertanian yang terlaksana**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**90.098.396,00**	**-**	**-**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	55.598.396,00			DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan pertanian	Unit	Unit				34.500.000,00			DINAS PERTANIAN
3	**30**				**PERDAGANGAN**									**13.423.725.527,49**	**15.316.503.624,00**	**14.171.737.388,00**	**- 1.144.766.236,00**
					DINAS PERDAGANGAN									**13.423.725.527,49**	**15.316.503.624,00**	**14.171.737.388,00**	
3	**30**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**11.145.465.902,49**	**13.331.139.069,00**	**11.981.139.069,00**	**Dinas Perdagangan**
3	**30**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**98.774.240,00**	**103.944.000,00**	**103.944.000,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan		98.774.240,00	103.944.000,00	103.944.000,00	
3	**30**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**8.118.396.932,00**	**10.058.095.092,00**	**8.708.095.092,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	95 Orang/Bulan	95 Orang/Bulan		7.983.696.932,00	9.876.475.092,00	8.526.475.092,00	
3	30	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		134.700.000,00	181.620.000,00	181.620.000,00	
3	**30**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**10.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.95	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	4	4		10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dinas Perdagangan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	**30**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**274.730.630,38**	**329.137.897,00**	**329.137.897,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		5.000.000,00	9.495.968,00	9.495.968,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		37.403.202,38	40.205.375,00	40.205.375,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		7.500.000,00	12.680.915,00	12.680.915,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		97.327.428,00	102.366.256,00	102.366.256,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan		90.000.000,00	126.889.383,00	126.889.383,00	
3	**30**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**282.450.000,00**	**400.720.000,00**	**400.720.000,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	5 Unit	5 Unit		100.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	70 Unit	70 Unit		82.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	
3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	3 Unit	3 Unit		54.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	
3	30	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	10 Unit	10 Unit		46.450.000,00	107.720.000,00	107.720.000,00	
3	**30**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**1.895.340.552,11**	**1.879.643.279,00**	**1.879.643.279,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan		100.840.552,11	103.643.279,00	103.643.279,00	
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan		1.794.500.000,00	1.776.000.000,00	1.776.000.000,00	
3	**30**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**465.773.548,00**	**539.598.801,00**	**539.598.801,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit		46.138.147,00	74.430.000,00	74.430.000,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	11 Unit	11 Unit		264.035.401,00	272.130.000,00	272.130.000,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	14 Unit	14 Unit		5.600.000,00	17.040.000,00	17.040.000,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	Unit	16 Unit	16 Unit		150.000.000,00	175.998.801,00	175.998.801,00	Dinas Perdagangan
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PENTING**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PENTING**	**Presentase Jumlah Pasar Yang Ditata**	**Presentase Jumlah Pasar Yang Ditata**	**Persen**	**Persen**	**20**	**20**		**727.500.000,00**	**430.409.943,00**	**625.143.707,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persen**	**Persen**	**2 Unit**	**2 Unit**		**500.000.000,00**	**250.000.000,00**	**444.733.764,00**	
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit		250.000.000,00	-	-	
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit		250.000.000,00	250.000.000,00	444.733.764,00	
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**	**Kelompok Pelaku Usaha**	**Kelompok Pelaku Usaha**	**3 Kelompok Pelaku Usaha**	**3 Kelompok Pelaku Usaha**		**227.500.000,00**	**180.409.943,00**	**180.409.943,00**	
3	30	04	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		75.000.000,00	70.909.943,00	70.909.943,00	
3	30	04	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		152.500.000,00	109.500.000,00	109.500.000,00	
3	**30**	**04**			**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting**	**Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting**	**Persen**	**Persen**	**17,00**	**17,00**		**744.550.000,00**	**719.087.726,00**	**719.087.726,00**	**Dinas Perdagangan**
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional**	**Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional**	**Pasar**	**Pasar**	**9 Pasar**	**9 Pasar**		**644.550.000,00**	**719.087.726,00**	**719.087.726,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintergrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintergrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan		80.000.000,00	154.537.726,00	154.537.726,00	
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan		564.550.000,00	564.550.000,00	564.550.000,00	
3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Besubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Besubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Tersedianya Laporan Realisasi Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi**	**Tersedianya Laporan Realisasi Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi**			**3 Laporan**	**3 Laporan**		**100.000.000,00**	-	-	
3	30	04	2.03	00003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal			3 Laporan	3 Laporan		100.000.000,00			
3	**30**	**05**			**Program Pengembangan Ekspor**	**Program Pengembangan Ekspor**	**Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan**	**Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**406.209.625,00**	**494.207.797,00**	**504.707.797,00**	**Dinas Perdagangan**
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti**	**Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti**	**Kali**	**Kali**	**5 Kali**	**5 Kali**		**406.209.625,00**	**494.207.797,00**	**504.707.797,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha		406.209.625,00	494.207.797,00	504.707.797,00	
3	**30**	**06**			**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang**	**Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang**	**Persen**	**Persen**	**86,80**	**86,80**					**Dinas Perdagangan**
							Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi	**Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi**	**Persen**	**Persen**	**86,80**	**86,80**		**200.000.000,00**	**200.014.492,00**	**200.014.492,00**	
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Penrawasan**	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Penrawasan**	**Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang**	**Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang**	**UTTP**	**UTTP**	**2100 UTTP**	**2100 UTTP**		**200.000.000,00**	**200.014.492,00**	**200.014.492,00**	**Dinas Perdagangan**
							Jumlah UTTP BDKT dan SN yang sudah diawasi	**Jumlah UTTP BDKT dan SN yang sudah diawasi**	**UTTP**	**UTTP**	**1100 UTTP**	**1100 UTTP**					
							Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi	**Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi**	**Kasus**	**Kasus**	**3 Kasus**	**3 Kasus**					
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	Unit	2100 Unit	2100 Unit		100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	Orang	190 Orang	190 Orang		100.000.000,00	100.014.492,00	100.014.492,00	
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah**	**Persentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah**	**Persen**	**Persen**	**65,00**	**65,00**		**200.000.000,00**	**141.644.597,00**	**141.644.597,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online**	**Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online**	**UMKM**	**UMKM**	**20 UMKM**	**20 UMKM**		**200.000.000,00**	**141.644.597,00**	**141.644.597,00**	
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	UMKM	20 UMKM	20 UMKM		100.000.000,00	141.644.597,00	141.644.597,00	
3	30	07	2.01	0003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		100.000.000,00	-	-	
3	**31**				**PERINDUSTRIAN**									**5.048.020.655,00**	**5.528.278.183,00**	**5.428.278.183,00**	
					DINAS PERINDUSTRIAN									**5.048.020.655,00**	**5.528.278.183,00**	**5.428.278.183,00**	**100.000.000,00**
3	**31**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian**			**98,00**	**98,00**		**3.052.705.170,00**	**3.784.278.183,00**	**3.369.961.166,00**	**Dinas Perindustrian**
3	**31**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**34.103.800,00**	**33.943.283,00**	**33.943.283,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		8.400.000,00	8.412.758,00	8.412.758,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ihktisar realisasi [illegible]	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ihktisar realisasi [illegible]	Laporan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan		25.703.800,00	25.530.525,00	25.530.525,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntable**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntable**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**2.181.337.855,00**	**2.711.506.108,00**	**2.384.506.108,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan		2.081.020.655,00	2.585.278.183,00	2.285.278.183,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.02	0003	Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		92.317.200,00	118.700.000,00	91.700.000,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan		8.000.000,00	7.527.925,00	7.527.925,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	2 Orang	2 Orang		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**		**217.548.115,00**	**192.130.104,00**	**192.130.104,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		5.000.000,00	5.209.296,00	5.209.296,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		44.475.515,00	33.247.151,00	33.247.151,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		14.672.000,00	4.660.736,00	4.660.736,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		38.000.600,00	35.972.890,00	35.972.890,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan		100.000.000,00	97.640.031,00	97.640.031,00	Dinas Perindustrian

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	**31**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**		**50.000.000,00**	**289.318.688,00**	**190.280.071,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional dan lapangan		Jumlah Kendaraan Bermotor		unit	unit					170.000.000,00		Dinas Perindustrian
3	31	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah		unit	unit					64.318.688,00	64.318.688,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	unit	3 Unit	3 Unit		50.000.000,00	55.000.000,00	125.961.383,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**		**493.500.000,00**	**478.000.000,00**	**489.721.600,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan		109.500.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan		384.000.000,00	396.000.000,00	407.721.600,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**		**68.215.400,00**	**71.380.000,00**	**71.380.000,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	3	3		48.215.400,00	54.770.000,00	54.770.000,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	8 Unit	8 Unit		5.000.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	2 Unit	2 Unit		15.000.000,00	11.660.000,00	11.660.000,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**02**			**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Pertumbuhan Industri**	**Pertumbuhan Industri**	**Persen**	**Persen**	**2,71**	**2,71**	**2,71**	**1.945.315.485,00**	**1.615.000.000,00**	**1.929.317.017,00**	**Dinas Perindustrian**
							Cakupan IKM yang mendapatkan Pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (incremental)	**Cakupan IKM yang mendapatkan Pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (incremental)**	**Persen**	**Persen**	**12,75**	**12,75**	**12,75**				
							Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**	**Persen**	**Persen**	**22,73**	**22,73**	**22,73**				
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**%**	**%**	**91,00**	**91,00**		**1.945.315.485,00**	**1.615.000.000,00**	**1.929.317.017,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1.945.315.485,00	1.615.000.000,00	1.929.317.017,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**03**			**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**	**Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait**	**Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait**	**Persen**	**Persen**	**64,71**	**64,71**		**50.000.000,00**	**129.000.000,00**	**129.000.000,00**	**Dinas Perindustrian**
3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) Kecil dan IUI menegah yang diterbitkan**	**Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) Kecil dan IUI menegah yang diterbitkan**	**%**	**%**	**80,00**	**80,00**		**50.000.000,00**	**129.000.000,00**	**129.000.000,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri dalam lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan perizinan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri dalam lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan perizinan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		50.000.000,00	129.000.000,00	129.000.000,00	Dinas Perindustrian
4					**UNSUR PENDUKUNG**									**205.560.260.898,00**	**242.283.362.195,00**	**292.534.086.259,00**	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**									**106.495.089.687,00**	**131.055.052.054,00**	**178.031.616.054,00**	
4	**01**	**01**	**2.01**		**Program Administrasi Umum**	**Program Administrasi Umum**	**Tingkat Layanan Administrasi Umum**	**Tingkat Layanan Administrasi Umum**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**77.085.858.303,35**	**98.979.263.599,00**	**101.888.898.620,00**	**Sekretariat Daerah**
							Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tepat Waktu	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tepat Waktu**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase OPD yang Mengumpulkan Laporan Kinerja (LAKIP) secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	**Persentase OPD yang Mengumpulkan Laporan Kinerja (LAKIP) secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
							Persentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik	**Persentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase peningkatan kualitas pelayanan terhadap KDH/WKDH	**Persentase peningkatan kualitas pelayanan terhadap KDH/WKDH**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase kebijakan pemerintah daerah yang terpublikasi	**Persentase kebijakan pemerintah daerah yang terpublikasi**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**	**Persen**	**Persen**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**		**464.000.000,00**	**573.999.765,00**	**573.999.765,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	5	5		185.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Dokumen	Dokumen	5	5		150.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3		129.000.000,00	153.999.765,00	153.999.765,00	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Meningkatkan adminitrasi keuangan perangkat daerah dan kinerja aparatur yang baik.**	**Meningkatkan adminitrasi keuangan perangkat daerah dan kinerja aparatur yang baik.**	**Persen**	**Persen**	**14 Bulan**	**14 Bulan**		**32.050.120.113,00**	**44.423.652.865,00**	**27.583.287.886,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	437	437		31.157.201.104,00	43.379.162.480,00	26.538.797.501,00	
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	8	8		371.000.000,00	397.074.546,00	397.074.546,00	
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		424.415.906,00	467.415.889,00	467.415.889,00	
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1		27.002.103,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	Laporan	4	4		70.501.000,00	99.999.950,00	99.999.950,00	
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatkan kualitas SDM ASN dan meningkatkan disiplin aparatur pemerintah**	**Meningkatkan kualitas SDM ASN dan meningkatkan disiplin aparatur pemerintah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**349.939.250,00**	**404.500.000,00**	**479.500.000,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Paket	7	7		248.125.000,00	301.000.000,00	376.000.000,00	
4	01	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan tugas	Laporan	Laporan	2	2		26.814.250,00	28.500.000,00	28.500.000,00	
4	01	01	2.05	0011	Bimbinan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbinan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang	50	50		75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	**Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**1 paket**	**1 paket**		**8.440.277.600,84**	**8.688.648.187,00**	**15.747.431.471,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		66.717.500,00	65.217.552,00	91.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		371.000.000,00	320.208.068,00	550.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		420.221.912,00	417.288.492,00	500.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		1.296.000.000,00	1.224.500.000,00	1.500.000.000,00	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		350.000.000,00	261.937.500,00	461.937.500,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		1.494.493.971,00	1.594.493.971,00	4.394.493.971,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1		3.700.000.000,00	3.750.000.000,00	6.750.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		741.844.217,84	1.055.002.604,00	1.500.000.000,00	
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**6.900.000.000,00**	**11.350.443.796,00**	**20.942.896.211,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Unit	Unit	1	1		1.000.000.000,00	5.309.600.000,00	6.574.035.405,00	
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	8	8		3.780.000.000,00	360.000.000,00	7.508.000.000,00	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	150	150		499.000.000,00	819.982.990,00	1.000.000.000,00	
4	01	01	2.07	0011	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	15	15		1.621.000.000,00	4.860.860.806,00	5.860.860.806,00	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Bulan**	**Bulan**	**100**	**100**		**15.006.510.000,00**	**18.951.000.000,00**	**19.905.000.000,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		4.155.385.000,00	8.105.000.000,00	8.500.000.000,00	
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		500.875.000,00	355.000.000,00	405.000.000,00	
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		10.350.250.000,00	10.491.000.000,00	11.000.000.000,00	
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah terpelihara dengan baik**	**Barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah terpelihara dengan baik**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**8.527.316.536,00**	**8.854.005.699,00**	**9.673.770.000,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	101	101		3.256.316.536,00	3.253.540.000,00	3.553.540.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	101	101		200.000.000,00	200.110.000,00	200.110.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	120	120		270.000.000,00	270.120.000,00	420.120.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7	7		561.000.000,00	559.300.000,00	650.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7	7		4.240.000.000,00	4.570.935.699,00	4.850.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**			**100,00**	**100,00**		**1.430.503.824,00**	**1.430.503.824,00**	**1.430.503.824,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	Orang/Bulan	2	2		1.430.503.824,00	1.430.503.824,00	1.430.503.824,00	
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Penataan Organisasi**	**Persentase adanya Dokumen ABK OPD dibagi jumlah OPD**	**Persentase adanya Dokumen ABK OPD dibagi jumlah OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**479.367.329,51**	**479.366.813,00**	**479.366.813,00**	**Sekretariat Daerah**
							Persentase adanya dokumen anjab OPD dibagi jumlah OPD	**Persentase adanya dokumen anjab OPD dibagi jumlah OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase pengaduan pelayanan publik yang ditangani	**Persentase pengaduan pelayanan publik yang ditangani**			**B**	**B**					
							Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**			**100,00**	**100,00**					
							Persentase OPD yang melakukan surve IKM dibanding OPD yang seharusnya melakukan pelayanan IKM	**Persentase OPD yang melakukan surve IKM dibanding OPD yang seharusnya melakukan pelayanan IKM**			**65 OPD, 10 Perwali**	**65 OPD, 10 Perwali**					
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	Dokumen	1	1		207.489.329,51	198.477.611,00	198.477.611,00	
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	Laporan	1	1		143.464.500,00	143.464.132,00	143.464.132,00	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	Dokumen	1	1		128.413.500,00	137.425.070,00	137.425.070,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan**	**Persentase fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**3.437.823.650,00**	**3.823.142.650,00**	**5.073.142.650,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	Laporan	1	1		1.519.013.750,00	1.519.013.750,00	1.519.013.750,00	
4	01	01	2.14	0002	fasilitasi Komunikasi Pimpinan	fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	Laporan	1	1		406.942.470,00	456.942.470,00	456.942.470,00	
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	Laporan	1	1		1.511.867.430,00	1.847.186.430,00	3.097.186.430,00	
4	**01**	**02**			**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang Terlaksana dengan Baik**	**Persentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang Terlaksana dengan Baik**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**75,00**		**26.059.565.104,13**	**28.726.123.548,00**	**69.720.462.527,00**	**Sekretariat Daerah**
							Persentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	**Persentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang Terfasilitasi**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	**Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan	**Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase Penanganan Konflik Pertanahan	**Persentase Penanganan Konflik Pertanahan**	**Persen**	**Persen**	**60,00**	**60,00**					
							Persentase Luas Lahan Bersertifikat	**Persentase Luas Lahan Bersertifikat**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase Kebijakan Daerah yang Telah Disahkan, Diputuskan dan Didokumentasikan	**Persentase Kebijakan Daerah yang Telah Disahkan, Diputuskan dan Didokumentasikan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas	**Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani dapat Diselesaikan	**Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani dapat Diselesaikan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Meningkatnya Pengelolaan Tata Pemerintahan**	**Meningkatnya Pengelolaan Tata Pemerintahan**	**Persen**	**Persen**				**1.083.147.767,13**	**1.133.147.691,00**	**1.133.147.691,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	Dokumen	2	2		50.050.000,00	50.049.926,00	50.049.926,00	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	Dokumen	3	3		517.518.947,13	497.598.945,00	497.598.945,00	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3		515.578.820,00	585.498.820,00	585.498.820,00	
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Meningkatnya Implementasi Kebijakan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**	**Meningkatnya Implementasi Kebijakan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**75,00**		**23.017.173.437,00**	**24.999.999.901,00**	**65.815.364.880,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	Dokumen	6	6		22.267.173.437,00	23.900.000.000,00	64.715.364.979,00	
4	01	02	2.02	0002		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		Dokumen		1			349.999.901,00	349.999.901,00	
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	Dokumen	1	1		250.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	
4	01	02	2.02	0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat		Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat		Keluarga		100			250.000.000,00			
4	01	02	2.02	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing		Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Menujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		Keluarga		100			250.000.000,00			
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Kebijakan Daerah yang telah disahkan,diputuskan dan didokumentasikan**	**Jumlah Kebijakan Daerah yang telah disahkan,diputuskan dan didokumentasikan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**1.104.600.000,00**	**1.538.332.293,00**	**1.717.306.293,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	700	700		194.425.000,00	277.275.000,00	277.275.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	kasus	kasus	2	2		521.545.000,00	769.227.293,00	948.201.293,00	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	Dokumen	Dokumen	700	700		388.630.000,00	491.830.000,00	491.830.000,00	
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase KSD yang Terfasilitasi (Terbit MoU) dibandingkan dengan usulan KSD**	**Persentase KSD yang Terfasilitasi (Terbit MoU) dibandingkan dengan usulan KSD**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**		**854.643.900,00**	**1.054.643.663,00**	**1.054.643.663,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	Dokumen	1	1		599.285.995,25	514.443.887,00	514.443.887,00	
4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	Dokumen	1	1		118.515.600,00	258.320.147,00	258.320.147,00	
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Dokumen	Dokumen	1	1		136.842.304,75	281.879.629,00	281.879.629,00	
4	**01**	**03**			**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persentase Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti dan Digunakan untuk Analisa Kebijakan**	**Persentase Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti dan Digunakan untuk Analisa Kebijakan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**3.349.666.279,52**	**3.349.664.907,00**	**3.422.254.907,00**	**Sekretariat Daerah**
							BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik	**BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik**	**Angka**	**Angka**	**5**	**5**					
							Persentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang	**Persentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase OPD yang melaporkan kegiatan secara online melalui TEPRA tepat waktu	**Persentase OPD yang melaporkan kegiatan secara online melalui TEPRA tepat waktu**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Tingkat partisipasi OPD, Swasta dan LSM dalam pelaksanaan evaluasi program Pembangunan	**Tingkat partisipasi OPD, Swasta dan LSM dalam pelaksanaan evaluasi program Pembangunan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BID AKU URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
							Persentase Paket Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	**Persentase Paket Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan PBJ	**Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan PBJ**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**	**Persentase Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**487.115.000,00**	**487.113.657,00**	**559.703.657,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	Dokumen	3	3		167.115.000,00	167.114.506,00	167.114.506,00	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	Laporan	3	3		215.000.000,00	214.999.539,00	287.589.539,00	
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Mikro Kecil	Perencanaan dan Pengawasan Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	Dokumen	1	1		105.000.000,00	104.999.612,00	104.999.612,00	
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Laporan Penyusunan Program, Pengendalian Program Pembangunan dan Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**	**Persentase Laporan Penyusunan Program, Pengendalian Program Pembangunan dan Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**1.611.456.979,52**	**1.611.456.950,00**	**1.611.456.950,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	03	2.02	0001	fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	Dokumen	1	1		113.675.000,00	113.675.000,00	113.675.000,00	
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	Dokumen	1	1		1.128.560.000,00	1.128.560.000,00	1.128.560.000,00	
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	Dokumen	1	1		369.221.979,52	369.221.950,00	369.221.950,00	
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang**	**Pengelolaan Pengadaan Barang**	**- Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama - Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif - Rasio nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan**	**- Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama - Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif - Rasio nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan**	**Persen**	**Persen**	**- 0,5 % - 8,5 % - 40 %**	**- 0,5 % - 8,5 % - 40 %**		**1.251.094.300,00**	**1.251.094.300,00**	**1.251.094.300,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	dokumen	1	1		389.238.888,00	422.879.432,00	422.879.432,00	
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	dokumen	dokumen	1	1		605.504.624,00	605.790.270,00	605.790.270,00	
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	- Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan	- Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan	orang	orang	5	5		256.350.788,00	222.424.598,00	222.424.598,00	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**									**99.065.171.211,00**	**111.228.310.141,00**	**117.502.470.205,00**	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**			**Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota**	**Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota**	**Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**62.056.067.313,00**	**65.627.697.781,00**	**67.503.708.935,00**	**Sekretariat DPRD**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**473.244.191,00**	**473.235.880,00**	**473.235.880,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	4,00	4,00	4,00	143.435.000,00	143.434.784	143.434.784	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	53.004.000,00	53.000.801	53.000.801	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan	Dokumen	1	1	1	53.004.000,00	53.000.801	53.000.801	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3	3	3	127.000.000,00	126.998.562	126.998.562	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	2,00	2,00	2,00	96.801.191,00	96.800.932	96.800.932	Sekretariat DPRD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**6.502.907.049,00**	**7.953.721.048,00**	**6.553.721.048,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	58	58	58	5.646.713.049,00	7.145.979.142	5.745.979.142	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	507.200.000,00	405.495.783	405.495.783	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	78.020.000,00	78.013.546	78.013.546	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	16	16	16	235.615.000,00	288.874.441	288.874.441	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Dokumen	2	2	2	35.359.000,00	35.358.136	35.358.136	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian SETWAN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian SETWAN**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**550.000.000,00**	**583.994.762,00**	**583.994.762,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	**Paket**	1	1	1	45.000.000,00	79.000.000	79.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	**Orang**	30	30	30	505.000.000,00	504.994.762	504.994.762	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.398.256.925,00**	**2.803.041.945,00**	**2.803.041.945,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	**Paket**	1	1	1	51.550.000,00	51.548.688	51.548.688	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	**Paket**	1	1	1	150.000.000,00	223.781.646	223.781.646	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	**Paket**	1	1	1	111.385.500,00	111.377.696	111.377.696	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	**Paket**	1	1	1	596.500.000,00	876.500.000	876.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	**Paket**	1	1	1	148.000.000,00	177.291.307	177.291.307	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	684.250.000,00	478.299.793	478.299.793	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	**Laporan**	1	1	1	165.000.000,00	165.000.000	165.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	**Laporan**	1	1	1	491.571.425,00	719.242.815	719.242.815	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.870.097.743,00**	**3.526.833.755,00**	**4.923.040.809,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	**Unit**	4	4	4	80.000.000,00	470.004.000	470.004.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	**Unit**	8	8	8	662.137.550,00	304.330.490	581.050.490	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	**Unit**	4	4	4	305.808.766,00	492.656.597	717.656.597	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	**Unit**	7	7	7	1.822.151.427,00	2.259.842.668	3.154.329.722	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**6.326.350.000,00**	**5.805.000.000,00**	**6.195.000.000,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	**Laporan**	1	0	0	53.100.000,00	-	-	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	**Laporan**	1	1	1	516.000.000,00	693.000.000	693.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	**Laporan**	1	1	1	5.757.250.000,00	5.112.000.000	5.502.000.000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.065.980.000,00**	**2.039.217.244,00**	**3.394.293.244,00**	**Sekretariat DPRD**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	**Unit**	1	1	1	47.675.000,00	45.130.000	45.130.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	**Unit**	17	17	17	585.805.000,00	384.000.000	384.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	**Unit**	3	3	3	182.500.000,00	371.790.000	371.790.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	**Unit**	1	1	1	550.000.000,00	430.000.000	1.785.076.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	**Unit**	1	1	1	700.000.000,00	808.297.244	808.297.244	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**39.162.691.715,00**	**39.424.291.715,00**	**39.424.291.715,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	**Orang/Bulan**	12	12	12	37.271.191.715,00	37.532.791.715	37.532.791.715	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	**Paket**	50	50	50	1.741.500.000,00	1.741.500.000	1.741.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	**Orang**	50	50	50	150.000.000,00	150.000.000	150.000.000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.706.539.690,00**	**3.018.361.432,00**	**3.153.089.532,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	dokumen	**dokumen**	1	1	1	276.000.000,00	426.000.000	426.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	**Laporan**	1	1	1	49.000.000,00	48.999.680	48.999.680	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	**Laporan**	1	1	1	392.808.506,00	1.392.808.404	1.392.808.404	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	**Paket**	1	1	1	988.731.184,00	1.150.553.348	1.285.281.448	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**			**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**37.009.103.898,00**	**45.600.612.360,00**	**49.998.761.270,00**	**Sekretariat DPRD**
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**6.601.276.047,00**	**7.908.791.145,00**	**8.872.732.555,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	1.055.338.821,00	1.483.083.669	1.827.757.179	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	**Dokumen**	7	7	7	4.103.737.226	5.275.707.476	5.747.435.296	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	150.000.000	300.000.000	447.540.080	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	**Dokumen**	6	6	6	1.192.200.000	450.000.000	450.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen tata tertib DPRD yang disusun	Jumlah Dokumen tata tertib DPRD yang disusun	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	100.000.000,00	400.000.000	400.000.000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.500.000.000,00**	**4.582.083.610,00**	**4.596.291.110,00**	**Sekretariat DPRD**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	700.000.000,00	914.112.383	914.112.383	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	700.000.000,00	913.898.430	913.898.430	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	700.000.000,00	912.418.585	926.626.085	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	700.000.000,00	909.298.585	909.298.585	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	700.000.000,00	932.355.627	932.355.627	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**6.878.092.885,00**	**6.425.174.617,00**	**6.425.174.617,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	**Laporan**	2,00	2,00	2,00	1.257.000.000,00	995.926.683	995.926.683	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	**Laporan**	2,00	2,00	2,00	1.170.000.000,00	905.011.232	905.011.232	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	**Laporan**	2,00	2,00	2,00	1.262.000.000,00	1.042.429.475	1.042.429.475	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	**Laporan**	2,00	2,00	2,00	1.220.000.000,00	949.397.308	949.397.308	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	**Dokumen**	1,00	1,00	1,00	1.321.360.000,00	1.854.483.365	1.854.483.365	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	**Dokumen**	1,00	1,00	1,00	167.032.885,00	17.021.689	17.021.689	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	**Dokumen**	1,00	1,00	1,00	480.700.000,00	660.904.865	660.904.865	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**16.552.582.185,00**	**16.636.935.566,00**	**16.636.935.566,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	Dokumen	**Dokumen**	1,00	1,00	1,00	100.000.000,00	500.000.103	500.000.103	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	**Dokumen**	6,00	6,00	6,00	2.803.625.800,00	4.100.997.423	4.100.997.423	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumentasi publikasi dan dokumentasi DPRD	Dokumen	**Dokumen**	1,00	1,00	1,00	1.352.044.710,00	1.728.000.000	1.728.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	**Orang**	36	36	36	1.728.000.000,00	384.000.000	384.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	**Orang**	8	8	8	384.000.000,00	7.989.223.330	7.989.223.330	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Hubungan Masyarakat	Dokumen	**Dokumen**	2,00	2,00	2,00	9.886.911.675,00	298.000.000	298.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	**Dokumen**	1,00	1,00	1,00	298.000.000,00	1.636.714.710	1.636.714.710	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**494.522.791,00**	**415.801.662,00**	**415.801.662,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	**Laporan**	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	100.000.000,00	99.999.803	99.999.803	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	**Dokumen**	3,00	3,00	3,00	294.522.791,00	215.801.859	215.801.859	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**750.000.000,00**	**1.280.746.908,00**	**1.280.746.908,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik DPRD pada Badan Kehormatan DPRD Kota Bandar Lampung	Jumlah Kode Etik dan tata beracara DPRD	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	100.000.000	400.000.000	400.000.000	Sekretariat DPRD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	**Laporan**	1	1	1	650.000.000,00	880.746.908	880.746.908	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.232.629.990,00**	**8.351.078.852,00**	**11.771.078.852,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	1.259.126.000,00	6.034.379.808	9.454.379.808	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	**Laporan**	1	1	1	50.735.990,00	50.735.652	50.735.652	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	922.768.000,00	2.265.963.392	2.265.963.392	Sekretariat DPRD
5					**UNSUR PENUNJANG**									**249.385.917.987,89**	**247.748.390.664,00**	**209.506.105.167,00**	
5	**01**				**PERENCANAAN**									**11.958.880.101,00**	**14.356.908.915,00**	**13.436.908.915,00**	
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH									**11.958.880.101,00**	**14.356.908.915,00**	**13.436.908.915,00**	
5	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**8.388.880.101,00**	**10.912.555.251,00**	**9.892.555.251,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**225.000.000,00**	**224.997.235,00**	**224.997.235,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2	2	50.000.000,00	49.998.844,00	49.998.844,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	30.000.000,00	29.999.997,00	29.999.997,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	30.000.000,00	29.999.576,00	29.999.576,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3	3	3	55.000.000,00	54.999.924,00	54.999.924,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	6	6	6	60.000.000,00	59.998.894,00	59.998.894,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.705.880.101,00**	**8.918.843.862,00**	**7.868.843.862,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/ Bulan	70	70	60	6.430.880.101,00	8.645.845.967,00	7.595.845.967,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	190.000.000,00	188.000.000,00	188.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	Laporan	1	1	1	35.000.000,00	34.997.914,00	34.997.914,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	12	12	12	50.000.000,00	49.999.981,00	49.999.981,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**100.000.000,00**	**99.997.962,00**	**99.997.962,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Dokumen	1	1	1	50.000.000,00	49.997.962,00	49.997.962,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	10	10	10	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**583.500.000,00**	**799.036.192,00**	**799.036.192,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.000.000,00	4.999.082,00	4.999.082,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	100.000.000,00	99.999.831,00	99.999.831,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	30.000.000,00	29.997.984,00	29.997.984,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	100.000.000,00	99.997.814,00	99.997.814,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporam	1	1	1	250.000.000,00	465.541.481,00	465.541.481,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**150.000.000,00**	**225.400.000,00**	**255.400.000,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Unit	1	13	1	100.000.000,00	120.000.000,00	66.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	10	17	11	50.000.000,00	105.400.000,00	189.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**323.750.000,00**	**270.000.000,00**	**270.000.000,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	130.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	193.750.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**300.750.000,00**	**374.280.000,00**	**374.280.000,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	01	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	6	1	1	170.000.000,00	45.430.000,00	45.430.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	7	12	12	40.750.000,00	232.240.000,00	232.240.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	20	20	20	40.000.000,00	46.610.000,00	46.610.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	Unit	Unit	1	1	1	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**02**			**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.010.000.000,00**	**1.969.996.235,00**	**1.969.996.235,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
							Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	**Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya	**Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya**	**Persen**	**Persen**	**89,32**	**89,32**	**89,32**				
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA**	**Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**1.240.000.000,00**	**1.239.998.366,00**	**1.239.998.366,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
							Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	**Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada (Teknokratik RPJMD)**	**Ada (Teknokratik RPJMD)**	**Ada (Teknokratik RPJMD)**				
							Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	**Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**				
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	Dokumen	2	2	2	250.000.000,00	249.999.613,00	249.999.613,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Berita Acara	1	1	1	80.000.000,00	79.999.742,00	79.999.742,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	Berita Acara	2	2	2	135.000.000,00	134.999.749,00	134.999.749,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	Berita Acara	2	2	2	350.000.000,00	349.999.480,00	349.999.480,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Dokumen	Dokumen	3	3	3	425.000.000,00	424.999.782,00	424.999.782,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen**	**Dokumen**	**6**	**6**	**6**	**550.000.000,00**	**509.999.394,00**	**509.999.394,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Laporan	1	1	1	200.000.000,00	159.999.925,00	159.999.925,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Laporan	5	5	5	350.000.000,00	349.999.469,00	349.999.469,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**02**	**2.04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung**	**Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung**	**Dokumen Laporan**	**Dokumen Laporan**	**1**	**1**	**1**	**220.000.000,00**	**219.998.475,00**	**219.998.475,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	Dokumen	1	1	1	70.000.000,00	69.999.651,00	69.999.651,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	150.000.000,00	149.998.824,00	149.998.824,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**03**			**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**	**Persen**	**Persen**	**90,98**	**90,98**	**90,98**	**1.560.000.000,00**	**1.474.357.429,00**	**1.574.357.429,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
							Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	**Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya	**Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya**	**Persen**	**Persen**	**89,88**	**89,88**	**89,88**				
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Dokumen**	**Dokumen**	**2**	**2**	**2**	**660.000.000,00**	**625.509.260,00**	**625.509.260,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
							Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Dokumen**	**Dokumen**	**2**	**2**	**2**				
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	2	2	2	150.000.000,00	115.515.593,00	115.515.593,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	Laporan	8	1	1	80.000.000,00	79.998.839,00	79.998.839,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Laporan	1	1	1	80.000.000,00	79.999.575,00	79.999.575,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	2	2	2	150.000.000,00	149.997.422,00	149.997.422,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Laporan	10	1	1	100.000.000,00	99.998.550,00	99.998.550,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Laporan	10	1	1	100.000.000,00	99.999.281,00	99.999.281,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekononomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekononomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**300.000.000,00**	**299.999.676,00**	**299.999.676,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
							Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**				
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	60.000.000,00	59.999.969,00	59.999.969,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Laporan	6	1	1	60.000.000,00	59.999.969,00	59.999.969,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Laporan	6	1	1	60.000.000,00	59.999.969,00	59.999.969,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	40.000.000,00	39.999.923,00	39.999.923,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah	Laporan	4	1	1	40.000.000,00	39.999.923,00	39.999.923,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah	Laporan	4	1	1	40.000.000,00	39.999.923,00	39.999.923,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**600.000.000,00**	**548.848.493,00**	**648.848.493,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
							Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan	**Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan dan Kewilayahan**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	-			
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastuktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastuktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan	Dokumen	3	4	5	250.000.000,00	228.849.036,00	328.849.036,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastuktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastuktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Laporan	7	1	1	70.000.000,00	64.999.755,00	64.999.755,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastuktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastuktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Laporan	7	1	1	70.000.000,00	59.999.825,00	59.999.825,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	70.000.000,00	64.999.943,00	64.999.943,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Laporan	20	1	1	70.000.000,00	64.999.941,00	64.999.941,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Laporan	20	1	1	70.000.000,00	64.999.993,00	64.999.993,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**02**				**KEUANGAN**									**228.837.807.692,89**	**223.477.858.523,00**	**186.745.180.388,00**	
					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									**168.147.318.403,89**	**162.280.268.169,00**	**126.047.590.034,00**	
5	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**87.972.195.275,89**	**87.353.587.147,00**	**54.120.909.012,00**	**BKAD**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**564.090.138,00**	**644.182.421,00**	**644.182.421,00**	**BKAD**
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	dokumen	2	2	2	116.170.460,00	136.179.514	136.179.514	BKAD
6	02	01	2.02	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	dokumen	1	1	1	57.024.241,00	62.071.414	62.071.414	BKAD
7	02	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	dokumen	1	1	1	54.192.655,00	59.194.228	59.194.228	BKAD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
8	02	01	2.04	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	dokumen	1	1	1	65.939.740,00	70.952.058	70.952.058	BKAD
9	02	01	2.05	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	dokumen	1	1	1	59.169.677,00	64.174.243	64.174.243	BKAD
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3	3	3	107.588.045,00	124.015.631	124.015.631	BKAD
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	Laporan	5	5	5	104.005.320,00	127.595.333	127.595.333	BKAD
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib**	**Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**80.745.972.935,34**	**79.767.116.110,00**	**46.429.437.975,00**	**BKAD**
							Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang/bulan	127	127	127	80.178.775.535,34	79.031.253.479	45.693.575.344	BKAD
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1.240	1.240	1.240	298.949.400,00	430.114.778	430.114.778	BKAD
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan / semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteraan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteraan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	13	13	13	268.248.000,00	305.747.853	305.747.853	BKAD
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**155.466.875,00**			**BKAD**
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		2			155.466.875,00			BKAD
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**74.870.350,00**	**388.037.608,00**	**388.037.608,00**	**BKAD**
5	02	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket		1,00	1,00		200.000.000,00	200.000.000,00	BKAD
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	7	7	7	74.870.350,00	188.037.608	188.037.608	BKAD
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.221.835.820,19**	**1.507.496.834,00**	**1.507.496.834,00**	**BKAD**
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	3	3	3	115.004.500,00	115.003.087	115.003.087	BKAD
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	4	4	4	180.008.936,00	180.006.938	180.006.938	BKAD
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	6	6	6	78.321.478,00	78.310.194	78.310.194	BKAD
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	7	7	7	79.625.000,00	78.000.000	78.000.000	BKAD
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	9	9	9	188.719.597,00	188.707.290	188.707.290	BKAD
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	6	6	6	38.040.000,00	38.040.000	38.040.000	BKAD
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	10	10	10	161.789.950,00	162.000.000	162.000.000	BKAD
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	8	8	8	120.782.847,19	267.222.545	267.222.545	BKAD
5	02	01	2.06	0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	259.543.512,00	400.206.780	400.206.780	BKAD
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**804.816.477,36**	**502.540.674,00**	**607.540.674,00**	**BKAD**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	unit	8	8	13	650.000.000,00	256.323.138	361.323.138	BKAD
5	02	01	2.07	0011	Pengadaaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Pengadaaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	unit	5	5	5	154.816.477,36	246.217.536	246.217.536	BKAD
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD**	**Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.759.874.000,00**	**3.971.626.000,00**	**3.971.626.000,00**	**BKAD**
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	174.810.000,00	174.810.000	174.810.000	BKAD
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.585.064.000,00	3.796.816.000	3.796.816.000	BKAD
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemmerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemmerintahan Daerah**	**Inventaris kantor yang tersedia**	**Inventaris kantor yang tersedia**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**645.268.680,00**	**572.587.500,00**	**572.587.500,00**	**BKAD**
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	52.966.675,00	52.430.000	52.430.000	BKAD
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	18	18	18	392.302.005,00	313.957.500	313.957.500	BKAD
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	10	10	10	80.000.000,00	78.500.000	78.500.000	BKAD
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	120.000.000,00	127.700.000	127.700.000	BKAD
5	**02**	**02**			**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Opini BPK atas LKPD**	**Opini BPK atas LKPD**	**Predikat**	**Predikat**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**77.897.615.695,00**	**72.246.122.554,00**	**69.246.122.554,00**	**BKAD**
							Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	**Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan	**Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah**	**Persentase koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.831.695.084,00**	**4.680.235.738,00**	**4.680.235.738,00**	**BKAD**
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	Dokumen	2	2	2	702.072.863,00	745.820.815	745.820.815	BKAD
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	Dokumen	2	2	2	354.431.669,00	442.312.817	442.312.817	BKAD
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	Dokumen	2	2	2	503.000.000,00	593.807.231	593.807.231	BKAD
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Dokumen	Dokumen	2	2	2	628.880.000,00	614.521.438	614.521.438	BKAD
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	Dokumen	2	2	2	444.797.892,00	479.080.311	479.080.311	BKAD
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	Dokumen	3	3	3	1.560.575.538,00	1.125.510.229	1.125.510.229	BKAD
5	02	02	2.01	0011	Koordiansi perencanaan anggaran belanja daerah	Koordiansi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah Dokument Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokument Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3	3	637.937.122,00	679.182.897	679.182.897	BKAD
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**	**Persentase koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.276.892.755,00**	**6.173.573.734,00**	**6.173.573.734,00**	**BKAD**
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	Dokumen	12	12	12	3.190.199.705,00	1.854.240.000	1.854.240.000	BKAD
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	Dokumen	3	3	3	1.158.273.185,00	1.329.175.133	1.329.175.133	BKAD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Dokumen	Dokumen	12	12	12	350.773.100,00	690.000.000	690.000.000	BKAD
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koodinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koodinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	Laporan	5	5	5	430.601.327,00	675.113.555	675.113.555	BKAD
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Dokumen	Dokumen	12	12	12	93.327.538,00	114.565.046	114.565.046	BKAD
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Dokumen	Dokumen	54	54	54	603.325.000,00	915.480.000	915.480.000	BKAD
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan denga npenerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan denga npenerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Dokumen	Dokumen	15	15	15	450.392.900,00	595.000.000	595.000.000	BKAD
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Opini BPK atas LKPD**	**Opini BPK atas LKPD**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**992.612.764,00**	**1.121.312.539,00**	**1.121.312.539,00**	**BKAD**
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bulanan, triwulanan dan semesteran	Laporan	Laporan	14	14	14	191.455.500,00	211.304.312	211.304.312	BKAD
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	Konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	Laporan	Laporan	1	1	1	139.080.597,00	155.400.582	155.400.582	BKAD
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Dokumen	Dokumen	5	5	5	187.035.000,00	263.006.373	263.006.373	BKAD
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	73.964.375,00	82.143.930	82.143.930	BKAD
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban pemerintah kabupaten kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban pemerintah kabupaten kota	Orang	Orang	162	162	162	348.306.042,00	348.512.515	348.512.515	BKAD
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kab/kota	Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kab/kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	Lembaga	Lembaga	32	32	32	52.771.250,00	60.944.827	60.944.827	BKAD
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat**	**Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat**	**Persen**	**Persen**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**63.861.402.323,00**	**58.352.061.368,00**	**55.352.061.368,00**	**BKAD**
5	02	02	2.04	0003	Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Penrencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Penrencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	43.000.000,00	58.362.221	58.362.221	BKAD
5	02	02	2.04	0004	Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Laporan	Laporan	6	6	6	12.675.516.689,00	12.675.516.689	12.675.516.689	BKAD
5	02	02	2.04	0008	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Laporan	Laporan	12	12	12	18.067.885.634,00	30.204.257.068	29.954.257.068	BKAD
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Laporan	Laporan	12	12	12	33.075.000.000,00	15.413.925.390	12.663.925.390	BKAD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.935.012.769,00**	**1.918.939.175,00**	**1.918.939.175,00**	**BKAD**
5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Dokumen	Dokumen	4	4	4	281.600.000,00	217.622.541	217.622.541	BKAD
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistim informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistim informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	dokumen	dokumen	12	12	12	310.862.000,00	299.428.474	299.428.474	BKAD
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistim informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistim informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Orang	Orang	30	30	30	1.342.550.769,00	1.401.888.160	1.401.888.160	BKAD
5	**02**	**03**			**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah**	**Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.277.507.433,00**	**2.680.558.468,00**	**2.680.558.468,00**	**BKAD**
							Persentase Penilaian dan Penghapusan BMD sesuai dengan Usulan OPD	**Persentase Penilaian dan Penghapusan BMD sesuai dengan Usulan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah**	**Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.277.507.433,00**	**2.680.558.468,00**	**2.680.558.468,00**	**BKAD**
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan standar harga	Penyusunan standar harga	Jumlah standar harga yang disusun	Jumlah standar harga yang disusun	dokumen	dokumen	1	1	1	195.000.000,00	194.208.663	194.208.663	BKAD
5	02	03	2.01	0003		Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		1	1		130.160.873	130.160.873	BKAD
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan barang milik daerah	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	laporan	laporan	1	1	1	60.003.125,00	60.112.850	60.112.850	BKAD
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan barang milik daerah	Pengamanan barang milik daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	laporan	laporan	1	1	1	877.241.875,00	960.659.566	960.659.566	BKAD
5	02	03	2.01	0008	Penilaian barang milik daerah	Penilaian barang milik daerah	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	laporan	laporan	1	1	1	103.595.574,00	109.038.798	109.038.798	BKAD
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	dokumen	dokumen	20	20	20	264.946.301,00	436.794.647	436.794.647	BKAD
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	laporan	laporan	2	2	2	572.753.432,00	677.484.149	677.484.149	BKAD
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah	dokumen	dokumen	1	1	1	203.967.126,00	112.098.922	112.098.922	BKAD
					BADAN PENDAPATAN DAERAH									**60.690.489.289,00**	**61.197.590.354,00**	**60.697.590.354,00**	
5	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**53.094.264.289,00**	**53.969.154.271,00**	**53.469.154.271,00**	**BAPENDA**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**253.000.000,00**	**252.999.742,00**	**252.999.742,00**	**BAPENDA**
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3	3	53.000.000,00	52.999.850,00	52.999.850,00	BAPENDA
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3	3	3	200.000.000,00	199.999.892,00	199.999.892,00	BAPENDA
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**44.439.253.483,00**	**45.068.108.783,00**	**44.568.108.783,00**	**BAPENDA**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	193	193	193	43.353.745.483,00	43.980.846.548,00	43.480.846.548,00	BAPENDA
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	260	260	260	189.008.000,00	160.763.000,00	160.763.000,00	BAPENDA
5	02	01	2.02	0005	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	196.500.000,00	226.499.235,00	226.499.235,00	BAPENDA
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	11	11	11	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	BAPENDA
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**BAPENDA**
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Paket							BAPENDA
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	8	8	8	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	BAPENDA
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**816.000.000,00**	**761.427.761,00**	**761.427.761,00**	**BAPENDA**
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.000.000,00	19.994.305,00	19.994.305,00	BAPENDA
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	4	4	4	198.000.000,00	197.999.082,00	197.999.082,00	BAPENDA
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	67.000.000,00	68.026.981,00	68.026.981,00	BAPENDA
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	8	8	8	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	BAPENDA
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	4	4	4	170.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	BAPENDA
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	4	4	4	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	BAPENDA
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	4	4	4	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	BAPENDA
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	5	5	5	200.000.000,00	169.407.393,00	169.407.393,00	BAPENDA
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**0,98**	**0,98**	**0,98**	**572.000.000,00**	**904.373.674,00**	**904.373.674,00**	**BAPENDA**
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	Unit							BAPENDA
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	Unit	23	23	23	50.000.000,00	215.506.200,00	215.506.200,00	BAPENDA

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Unit	Unit	18	18	18	297.000.000,00	476.408.186,00	505.013.651,00	BAPENDA
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	125.000.000,00	65.959.288,00	65.959.288,00	BAPENDA
5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	Unit	1	1	1	100.000.000,00	146.500.000,00	117.894.535,00	BAPENDA
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.032.000.000,00**	**4.961.376.537,00**	**4.961.376.537,00**	**BAPENDA**
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	Laporan	4	4	4	250.000.000,00	257.376.537,00	257.376.537,00	BAPENDA
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	4.782.000.000,00	4.704.000.000,00	4.704.000.000,00	BAPENDA
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.882.010.806,00**	**1.920.867.774,00**	**1.920.867.774,00**	**BAPENDA**
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	50.000.000,00	44.530.000,00	50.853.774,00	BAPENDA
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	11 Unit mobil, 10 motor	11 Unit mobil, 10 motor	11 Unit mobil, 10 motor	498.230.000,00	451.450.000,00	431.882.000,00	BAPENDA
5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	29.200.000,00	15.845.774,00	29.090.000,00	BAPENDA

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	44.338.806,00	129.400.000,00	129.400.000,00	BAPENDA
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	1.260.242.000,00	1.279.642.000,00	1.279.642.000,00	BAPENDA
5	**02**	**04**			**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pajak Daerah terhadap PAD**	**Persentase Pajak Daerah terhadap PAD**	**Persen**	**Persen**	**65,02**	**65,02**	**65,02**	**7.596.225.000,00**	**7.228.436.083,00**	**7.228.436.083,00**	**BAPENDA**
5	**02**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pajak Daerah terhadap PAD**	**Persentase Pajak Daerah terhadap PAD**	**Persen**	**Persen**	**65,02**	**65,02**	**65,02**	**7.596.225.000,00**	**7.228.436.083,00**	**7.228.436.083,00**	**BAPENDA**
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2	2	850.000.000	904.900.000	904.900.000	BAPENDA
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah Serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah Serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	214.500.000,00	214.228.480,00	214.228.480,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	195.000.000,00	237.080.000,00	237.080.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	Unit	1	1	1	700.000.000,00	822.500.000,00	822.500.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	Laporan	10	10	10	100.000.000,00	380.500.000,00	380.500.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0006	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Laporan		7			550.000.000,00			BAPENDA
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak Daerah	Objek Pajak Daerah	7.812	7.812	7.812	500.000.000,00	365.000.000,00	365.000.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2	2	850.000.000,00	846.000.000,00	846.000.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	Layanan	10	10	10	186.725.000,00	150.014.026,00	150.014.026,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	Dokumen	2	2	2	750.000.000,00	744.299.893,00	744.299.893,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	6	6	6	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Prosentase data pajak yang sesuai dengan omzet	Prosentase data pajak yang sesuai dengan omzet	Persen	Persen	231	231	231	200.000.000,00	657.500.000,00	657.500.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	10	10	10	1.550.000.000,00	953.410.000,00	953.410.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	Laporan	2	2	2	100.000.000,00	100.003.684,00	100.003.684,00	BAPENDA

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	02	04	2.01	0015	Elektronika Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronika Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan	3	3	3	300.000.000,00	303.000.000,00	303.000.000,00	BAPENDA
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**									**7.209.280.900,00**	**8.435.874.903,00**	**7.976.267.541,00**	
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									**7.209.280.900,00**	**8.435.874.903,00**	**7.976.267.541,00**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	%	%	**98,00**	**98,00**		**4.894.828.608,00**	**5.848.164.719,00**	**5.348.161.269,00**	**BKPSDM**
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	%	%	**100,00**	**100,00**		**98.270.000,00**	**109.678.531,00**	**109.678.531,00**	**BKPSDM**
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2		20.000.000,00	18.094.652,00	18.094.652,00	BKPSDM
5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		21.000.000,00	34.314.661,00	34.314.661,00	BKPSDM
5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		15.000.000,00	14.999.826,00	14.999.826,00	BKPSDM
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Laporan	3	3		16.000.000,00	15.999.602,00	15.999.602,00	BKPSDM
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	4	4		26.270.000,00	26.269.790,00	26.269.790,00	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	%	%	**100,00**	**100,00**		**3.926.506.803,00**	**4.816.176.530,00**	**4.316.176.530,00**	**BKPSDM**
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	50	50		3.625.230.194,00	4.532.686.174,00	4.032.686.174,00	BKPSDM
5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	4	4		212.826.609,00	207.033.523,00	207.033.523,00	BKPSDM
5	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		24.000.000,00	16.007.793,00	16.007.793,00	BKPSDM
5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1		30.450.000,00	30.449.516,00	30.449.516,00	BKPSDM
5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	Laporan	12	12		25.000.000,00	24.999.839,00	24.999.839,00	BKPSDM
5	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Dokumen	1	1		9.000.000,00	4.999.685,00	4.999.685,00	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	%	%	**100,00**	**100,00**		**20.000.000,00**	**24.949.424,00**	**24.949.424,00**	**BKPSDM**
5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	1	1		5.000.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Pungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Pungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	60	60		15.000.000,00	19.999.424,00	19.999.424,00	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	%	%	**100,00**	**100,00**		**271.296.719,00**	**281.755.767,00**	**296.658.963,00**	**BKPSDM**
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		5.000.000,00	4.991.139,00	4.991.139,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		65.307.051,00	77.959.857,00	105.331.217,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		30.003.218,00	19.997.905,00	19.997.905,00	BKPSDM

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		20.000.000,00	25.000.000,00	22.500.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		65.486.450,00	39.666.600,00	39.666.600,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1		20.500.000,00	10.000.000,00	9.500.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		60.000.000,00	99.140.266,00	89.672.102,00	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**		**45.815.086,00**	**84.738.804,00**	**84.832.158,00**	**BKPSDM**
5	03	01	2.07	0005	Pengadan Mebel	Pengadan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		4.500.000,00	4.325.492,00	4.325.492,00	BKPSDM
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		31.315.086,00	70.546.646,00	70.640.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		10.000.000,00	9.866.666,00	9.866.666,00	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**		**378.000.000,00**	**380.000.000,00**	**380.000.000,00**	**BKPSDM**
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		18.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan inventaris kantor yang terpelihara**	**Persentase pemenuhan inventaris kantor yang terpelihara**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**		**154.940.000,00**	**150.865.663,00**	**135.865.663,00**	**BKPSDM**
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	2	2		40.670.000,00	44.430.000,00	44.430.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	3	3		51.270.000,00	59.137.136,00	59.137.136,00	BKPSDM
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1		25.000.000,00	24.870.000,00	24.870.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1		30.000.000,00	15.000.000,00		BKPSDM
5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1		3.000.000,00	4.428.527,00	4.428.527,00	BKPSDM
5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1		5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	BKPSDM
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Formal**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Formal**	**%**	**%**	**18,30**	**18,30**		**2.314.452.292,00**	**2.587.710.184,00**	**2.628.106.272,00**	**BKPSDM**
							Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Struktural	**Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Struktural**	**%**	**%**	**82,05**	**82,05**					
							Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	**Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah**	**Jabatan**	**Jabatan**	**39**	**39**					
							Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	**Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah**	**Jabatan**	**Jabatan**	**207**	**207**					
							Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	**Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah**	**Jabatan**	**Jabatan**	**3485**	**3485**					
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN Pelamar Umum dan khusus, yang akan dilakukan penetapan NIP, peningkatan Status ASN, dan sumpah ASN**	**Jumlah CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN Pelamar Umum dan khusus, yang akan dilakukan penetapan NIP, peningkatan Status ASN, dan sumpah ASN**	**CPNS**	**CPNS**	**1400**	**1400**		**491.000.000,00**	**593.008.470,00**	**603.508.470,00**	**BKPSDM**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
							Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang diterbitkan BKN	**Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang diterbitkan BKN**	**SK Pensiun**	**SK Pensiun**	**490**	**490**					
							Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	**Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN**	**Lembaga**	**Lembaga**	**1**	**1**					
							Jumlah data sistem informasi kepegawaian ASN yang tervalidasi	**Jumlah data sistem informasi kepegawaian ASN yang tervalidasi**	**Data ASN**	**Data ASN**	**10500**	**10500**					
							Jumlah updating data kepegawaian yang akurat	**Jumlah updating data kepegawaian yang akurat**	**Data ASN**	**Data ASN**	**10500**	**10500**					
							Jumlah penyelesaian data kepegawaian karpeg, karis, karsu yang di terbitkan BKN dan surat cuti ASN yang diterbitkan BKD	**Jumlah penyelesaian data kepegawaian karpeg, karis, karsu yang di terbitkan BKN dan surat cuti ASN yang diterbitkan BKD**	**Kartu Karpeg, Karis, Karsu dan Surat Cuti ASN**	**Kartu Karpeg, Karis, Karsu dan Surat Cuti ASN**	**1800**	**1800**					
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	Dokumen	1	1		25.000.000,00	24.676.869,00	24.676.869,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	Dokumen	1	1		167.100.000,00	169.585.501,00	169.585.501,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	Laporan	1	1		59.000.000,00	81.561.305,00	81.561.305,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	Dokumen	1	1		41.000.000,00	49.941.400,00	60.441.400,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	Lembaga	1	1		78.900.000,00	112.278.541,00	112.278.541,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Dokumen	1	1		85.000.000,00	119.963.331,00	119.963.331,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	Dokumen	1	1		15.000.000,00	15.000.529,00	15.000.529,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	Laporan	1	1		20.000.000,00	20.000.994,00	20.000.994,00	BKPSDM
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan**	**Jumlah mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan**	**ASN**	**ASN**	**150**	**150**		**295.000.000,00**	**302.478.127,00**	**332.370.765,00**	**BKPSDM**
							Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	**Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah**	**Jabatan**	**Jabatan**	**39**	**39**					
							Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	**Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah**	**Jabatan**	**Jabatan**	**207**	**207**					
							Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah	**Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah**	**Jabatan**	**Jabatan**	**3485**	**3485**					
							Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober dan kenaikan gaji berkala tepat waktu	**Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober dan kenaikan gaji berkala tepat waktu**	**SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala ASN**	**SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala ASN**	**6000**	**6000**					
							Jumlah ASN yang lulus promosi ujian penyesuaian dan ujian dinas	**Jumlah ASN yang lulus promosi ujian penyesuaian dan ujian dinas**	**ASN**	**ASN**	**600**	**600**					
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2		100.000.000,00	117.498.461,00	131.516.099,00	BKPSDM
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	Dokumen	1	1		115.000.000,00	104.980.299,00	120.855.299,00	BKPSDM
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	Dokumen	1	1		80.000.000,00	79.999.367,00	79.999.367,00	BKPSDM
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN yang mengikuti pendidkan dan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan**	**Jumlah ASN yang mengikuti pendidkan dan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan**	**ASN**	**ASN**	**300**	**300**		**1.338.452.292,00**	**1.526.255.642,00**	**1.526.259.092,00**	**BKPSDM**
							Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural serta Sertifikasi ASN	**Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural serta Sertifikasi ASN**	**Pejabat**	**Pejabat**	**1349**	**1349**					

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
							Jumlah ASN yang mendapatkan izin belajar, tugas belajar, beasiswa dan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	**Jumlah ASN yang mendapatkan izin belajar, tugas belajar, beasiswa dan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas**	**ASN**	**ASN**	**100**	**100**					
							Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK)	**Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK)**	**ASN**	**ASN**	**250**	**250**					
							Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota Bandar Lampung	**Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota Bandar Lampung**	**laporan**	**laporan**	**12**	**12**					
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	Orang	90	90		10.697.378,00	60.697.129,00	60.697.129,00	BKPSDM
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	Dokumen	1	1		280.000.000,00	279.998.385,00	259.901.835,00	BKPSDM
5	03	02	2.03	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	Dokumen	1	1		305.884.914,00	261.884.908,00	261.884.908,00	BKPSDM
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	Orang	100	100		680.000.000,00	820.000.000,00	840.100.000,00	BKPSDM
5	03	02	2.03	0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	Orang	90	90		32.000.000,00	46.075.718,00	46.075.718,00	BKPSDM
5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	Orang	250	250		19.600.000,00	19.599.751,00	19.599.751,00	BKPSDM
5	03	02	2.03	00015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	Laporan	12	12		10.270.000,00	37.999.751,00	37.999.751,00	BKPSDM
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah SKP ASN Kota Bandar Lampung yang mendapatkan nilai baik pada aplikasi e-kinerja**	**Jumlah SKP ASN Kota Bandar Lampung yang mendapatkan nilai baik pada aplikasi e-kinerja**	**SKP ASN**	**SKP ASN**	**8500**	**8500**		**190.000.000,00**	**165.967.945,00**	**165.967.945,00**	**BKPSDM**
							Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	**Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya**	**ASN**	**ASN**	**1000**	**1000**					
							Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	**Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN**	**ASN**	**ASN**	**100**	**100**					
							Jumlah penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	**Jumlah penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN**	**Kasus**	**Kasus**	**40**	**40**					
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	Dokumen	1	1		75.000.000,00	30.999.623,00	30.999.623,00	BKPSDM
5	03	02	2.04	0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	Dokumen	1	1		45.000.000,00	44.994.536,00	44.994.536,00	BKPSDM
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	Orang	60	60		25.000.000,00	34.995.961,00	34.995.961,00	BKPSDM
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	Laporan	1	1		30.000.000,00	39.984.562,00	39.984.562,00	BKPSDM
5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	Dokumen	1	1		15.000.000,00	14.993.263,00	14.993.263,00	BKPSDM
																396.811.271,00	
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									**739.949.294,00**	**396.811.271,00**	**396.811.271,00**	
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									**739.949.294,00**	**396.811.271,00**	**396.811.271,00**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	**%**	**%**	**100**	**100**		**739.949.294,00**	**396.811.271,00**	**396.811.271,00**	**BKPSDM**
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	**%**	**%**	**100**	**100**		**739.949.294,00**	**396.811.271,00**	**396.811.271,00**	**BKPSDM**
							Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik	**Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik**	**Pejabat**	**Pejabat**	**10**	**10**					
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	Laporan	1	1		448.949.294,00	4.999.789,00	4.999.789,00	BKPSDM

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	04	02	2.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan danTenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi ,Kepemimpinan dan Prajabatan	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan danTenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi ,Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	Dokumen	1	1		291.000.000,00	391.811.482,00	391.811.482,00	BKPSDM
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									**640.000.000,00**	**1.080.937.052,00**	**950.937.052,00**	
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH									**640.000.000,00**	**1.080.937.052,00**	**950.937.052,00**	
5	**05**	**02**			**Program Penelitian dan Pengembangan**	**Program Penelitian dan Pengembangan**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**640.000.000,00**	**1.080.937.052,00**	**950.937.052,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
							Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	**Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah**	**Persen**	**Persen**	**92,59**	**92,59**	**92,59**				
5	**01**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**2**	**2**	**390.000.000,00**	**739.997.931,00**	**609.997.931,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Laporan	Dokumen	1	2	2	390.000.000,00	739.997.931,00	609.997.931,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**2**	**2**	**250.000.000,00**	**340.939.121,00**	**340.939.121,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	05	02	2.04	0001	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	Dokumen	1	2	2	250.000.000,00	340.939.121,00	340.939.121,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6	**01**				**UNSUR PENGAWAS**									**18.012.000.000,00**	**21.462.821.244,00**	**21.700.403.192,00**	
					INSPEKTORAT									**18.012.000.000,00**	**21.462.821.244,00**	**21.700.403.192,00**	
6	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Inspektorat**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Inspektorat**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**13.213.471.722,00**	**16.695.357.109,00**	**16.944.983.169,00**	**Inspektorat**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**92.792.586,60**	**142.640.858,00**	**142.640.858,00**	**Inspektorat**
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	6	6	6	46.160.222,85	48.497.033,00	48.497.033,00	Inspektorat
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	6	6	6	46.632.363,75	94.143.825,00	94.143.825,00	Inspektorat
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**11.068.168.717,55**	**14.518.970.226,00**	**14.756.552.391,00**	**Inspektorat**
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	79	79	79	10.892.000.000,00	14.342.821.244,00	14.580.403.192,00	Inspektorat
6	01	01	2.01	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	5	5	5	125.408.294,55	125.388.996,00	125.388.996,00	
	01	01	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	6	6	6	50.760.423,00	50.759.986,00	50.760.203,00	Inspektorat
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**330.000.000,00**	**475.967.052,00**	**475.967.047,00**	**Inspektorat**
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Paket		1			-			Inspektorat
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	83	83	83	100.000.000,00	243.467.052,00	243.467.047,00	Inspektorat
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang	83	83	83	230.000.000,00	232.500.000,00	232.500.000,00	Inspektorat
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**973.209.194,85**	**773.218.973,00**	**795.262.873,00**	**Inspektorat**
6	01	01	2.05	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.994.671,00	15.994.573,00	15.994.573,00	Inspektorat
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	123.597.614,00	61.799.160,00	61.799.160,00	Inspektorat
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		1			15.000.000,00		-	Inspektorat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BID AN URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	72.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	116.455.369,00	58.227.490,00	80.271.653,00	Inspektorat
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	76.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	532.561.540,85	541.597.750,00	541.597.487,00	
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**195.000.000,00**	**80.000.000,00**	**70.000.000,00**	**Inspektorat**
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	1			-		-	Inspektorat
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	25	1 unit	1 unit	10.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Inspektorat
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	20	1 unit	1 unit	185.000.000,00	10.000.000,00	-	Inspektorat
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**156.520.000,00**	**265.000.000,00**	**265.000.000,00**	**Inspektorat**
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	12.520.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	144.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**397.781.223,00**	**439.560.000,00**	**439.560.000,00**	**Inspektorat**
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.088,00	47.430.000,00	47.430.000,00	Inspektorat
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	7	7	7	261.749.135,00	239.640.000,00	239.640.000,00	Inspektorat
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	72	72	72	52.500.000,00	52.490.000,00	52.490.000,00	Inspektorat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	215	10 meter	10 meter	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Inspektorat
6	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD**	**Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**2.532.048.578,00**	**2.599.536.221,00**	**2.587.492.109,00**	**Inspektorat**
							Presentase Tindak Lanjut Temuan	**Presentase Tindak Lanjut Temuan**	%		**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Presentase Penangan Kasus Pengaduan	**Presentase Penangan Kasus Pengaduan**	%	%	**90,00**	**90,00**	**90,00**				
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD**	**Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**2.242.050.000,00**	**2.242.041.489,00**	**2.229.997.377,00**	**Inspektorat**
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan	85	85	85	1.230.000.000,00	1.229.998.302,00	1.303.368.316,00	Inspektorat
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan	13	13	13	330.000.000,00	329.999.697,00	329.999.817,00	Inspektorat
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviu Kinerja	Laporan Hasil Reviu Kinerja	Laporan	Laporan	11	11	11	370.000.000,00	369.999.831,00	296.629.787,00	Inspektorat
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu Keuangan	Laporan Hasil Reviu Keuangan	Laporan	Laporan	4	4	4	140.000.000,00	139.999.962,00	139.999.962,00	Inspektorat
6	01	02	2.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Kesepakatan	Kesepakatan	1	1	1	22.050.000,00	22.044.202,00	-	Inspektorat
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil	Dokumen	Dokumen	3	3	3	150.000.000,00	149.999.495,00	159.999.495,00	Inspektorat
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Presentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Presentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**289.998.578,00**	**357.494.732,00**	**357.494.732,00**	**Inspektorat**
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang ditangani	Laporan	Laporan	5	5	5	32.498.584,00	19.796.279,00	19.796.279,00	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	Laporan	35	90%	90%	257.499.994,00	337.698.453,00	337.698.453,00	
6	**01**	**03**			**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP**	**Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.266.479.700,00**	**2.167.927.914,00**	**2.167.927.914,00**	**Inspektorat**
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Pendampingan dan Asistensi**	**Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP**	**Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.266.479.700,00**	**2.167.927.914,00**	**2.167.927.914,00**	**Inspektorat**
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	10	10	10	182.500.000,00	182.499.793,00	182.499.793,00	Inspektorat
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dilakukan Penilaian Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dilakukan Penilaian Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	5	5	5	75.000.000,00	45.999.964,00	45.999.964,00	Inspektorat
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantaasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantaasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantaasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantaasan Korupsi	Kegiatan	Kegiatan	6	6	6	1.995.000.000,00	1.925.448.513,00	1.925.448.513,00	Inspektorat
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	52	52	52	13.979.700,00	13.979.644,00	13.979.644,00	Inspektorat
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									**219.561.890.158,00**	**240.196.635.139,00**	**235.154.600.139,00**	
7	**01**				**KECAMATAN**									**219.561.890.158,00**	**240.196.635.139,00**	**235.154.600.139,00**	
					KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT									**11.948.945.180,00**	**13.124.960.119,00**	**12.774.960.119,00**	**350.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.523.800.433,00**	**6.728.058.947,00**	**6.378.058.947,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja**	**Presentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**39.287.394,00**	**19.321.849,00**	**19.321.849,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	11.488.229,00	6.603.727,00	6.603.727,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Laporan	1	1	1	16.537.261,00	6.277.782,00	6.277.782,00	
7	01	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	11.261.904,00	6.440.340,00	6.440.340,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.294.345.180,00**	**5.481.560.119,00**	**5.131.560.119,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	49	49	49	4.200.595.180,00	5.380.810.119,00	5.030.810.119,00	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	93.750.000,00	100.750.000,00	100.750.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	98,00	98,00	98,00	54.914.047,00	62.363.965,00	62.363.965,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.357.110,00	4.356.115,00	4.356.115,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	19.386.437,00	19.383.593,00	19.383.593,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.633.000,00	11.624.257,00	11.624.257,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.537.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	-	-	-	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	98,00	98,00	98,00	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	%	%	100,00	100,00	100,00	995.050.000,00	1.019.270.926,00	1.007.655.526,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	38.400.000,00	38.620.926,00	39.005.526,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	Laporan	1	1	1	956.650.000,00	980.650.000,00	968.650.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	%	%	98,00	98,00	98,00	140.203.812,00	145.542.088,00	157.157.488,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.088,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	104.671.724,00	106.692.088,00	118.307.488,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	-			Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	2.000.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	100,00	100,00	100,00	3.490.344.747,00	3.478.031.467,00	3.478.031.467,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	100,00	100,00	100,00	33.400.000,00	33.395.018,00	33.395.018,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1,00	1,00	1,00	33.400.000,00	33.395.018,00	33.395.018,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	100,00	100,00	100,00	3.456.944.747,00	3.444.636.449,00	3.444.636.449,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1,00	1,00	1,00	3.456.944.747,00	3.444.636.449,00	3.444.636.449,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	85,00	85,00	85,00	649.500.000,00	649.495.558,00	649.495.558,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**579.500.000,00**	**579.495.558,00**	**579.495.558,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	579.500.000,00	579.495.558,00	579.495.558,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.283.300.000,00**	**2.267.391.047,00**	**2.267.391.047,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.283.300.000,00**	**2.267.391.047,00**	**2.267.391.047,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.260.300.000,00	2.244.394.856,00	2.244.394.856,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	23.000.000,00	22.996.191,00	22.996.191,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**991.550,00**	**991.550,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**991.550,00**	**991.550,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	500.000,00	495.775,00	495.775,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	orang	orang	20	20	20	500.000,00	495.775,00	495.775,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**991.550,00**	**991.550,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**991.550,00**	**991.550,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	500.000,00	495.775,00	495.775,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	500.000,00	495.775,00	495.775,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
					KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT									**11.616.694.968,00**	**12.749.174.142,00**	**12.349.174.142,00**	**400.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.330.312.045,00**	**6.502.182.172,00**	**6.102.182.172,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.806.759,00**	**5.771.523,00**	**5.771.523,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.938.472,00	1.923.841,00	1.923.841,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.938.472,00	1.923.841,00	1.923.841,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	1.929.815,00	1.923.841,00	1.923.841,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.406.797.439,00**	**5.550.678.452,00**	**5.150.678.452,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	50	50	50	4.312.494.968,00	5.447.524.142,00	5.047.524.142,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	94.302.471,00	103.154.310,00	103.154.310,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**53.875.453,00**	**56.229.327,00**	**56.229.327,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.231.502,00	3.202.880,00	3.202.880,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.405.814,00	15.385.234,00	15.385.234,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.613.037,00	7.523.829,00	7.523.829,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.125.000,00	15.625.000,00	15.625.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.500.100,00	3.492.384,00	3.492.384,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**12.435.450,00**	**12.019.014,00**	**12.019.014,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	12.435.450,00	12.019.014,00	12.019.014,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	10	10	10	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**665.650.000,00**	**679.300.000,00**	**679.300.000,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	625.650.000,00	639.300.000,00	639.300.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**185.746.944,00**	**198.183.856,00**	**198.183.856,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	34.728.692,00	40.798.692,00	40.798.692,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	7	7	7	73.395.980,00	79.438.692,00	79.438.692,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	10	10	10	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	2	2	2	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	56.002.272,00	56.876.472,00	56.876.472,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7	7	7	15.120.000,00	14.570.000,00	14.570.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.265.909.806,00**	**3.253.153.735,00**	**3.253.153.735,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**37.183.827,00**	**36.630.841,00**	**36.630.841,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	37.183.827,00	36.630.841,00	36.630.841,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.228.725.979,00**	**3.216.522.894,00**	**3.216.522.894,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.228.725.979,00	3.216.522.894,00	3.216.522.894,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**818.488.979,00**	**809.124.591,00**	**809.124.591,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**748.488.979,00**	**739.130.841,00**	**739.130.841,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	748.488.979,00	739.130.841,00	739.130.841,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**70.000.000,00**	**69.993.750,00**	**69.993.750,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan mencegahan tindak kriminal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan mencegahan tindak kriminal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.188.472.028,00**	**2.172.345.788,00**	**2.172.345.788,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.188.472.028,00**	**2.172.345.788,00**	**2.172.345.788,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.164.203.021,00	2.148.522.894,00	2.148.522.894,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.269.007,00	23.822.894,00	23.822.894,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**7.103.510,00**	**6.183.928,00**	**6.183.928,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**7.103.510,00**	**6.183.928,00**	**6.183.928,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.204.300,00	3.091.964,00	3.091.964,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	3.899.210,00	3.091.964,00	3.091.964,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.408.600,00**	**6.183.928,00**	**6.183.928,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.408.600,00**	**6.183.928,00**	**6.183.928,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.204.300,00	3.091.964,00	3.091.964,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.204.300,00	3.091.964,00	3.091.964,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
					KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR									**9.371.311.868,00**	**10.285.543.542,00**	**10.000.543.542,00**	**285.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.546.000.768,00**	**5.481.688.294,00**	**5.196.688.294,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.500.000,00**	**6.498.519,00**	**6.498.519,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	1.999.636,00	1.999.636,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	2.500.000,00	2.499.682,00	2.499.682,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	2.000.000,00	1.999.201,00	1.999.201,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.526.711.868,00**	**4.462.393.542,00**	**4.162.393.542,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	38	38	38	3.448.711.868,00	4.384.393.542,00	4.084.393.542,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**68.975.750,00**	**68.971.310,00**	**68.971.310,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.000.000,00	4.998.561,00	4.998.561,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.125.332,00	11.125.171,00	11.125.171,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.850.418,00	6.847.793,00	6.847.793,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.000.000,00	5.999.785,00	5.999.785,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**17.000.000,00**	**16.973.288,00**	**31.973.288,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	1.000.000,00	973.288,00	973.288,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**729.370.000,00**	**729.370.000,00**	**729.370.000,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	706.370.000,00	706.370.000,00	706.370.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**197.443.150,00**	**197.481.635,00**	**197.481.635,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.530.000,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	81.473.150,00	118.022.400,00	118.022.400,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	6	6	6	50.000.000,00	9.999.235,00	9.999.235,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	25.440.000,00	25.440.000,00	25.440.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.558.711.100,00**	**2.549.710.416,00**	**2.549.710.416,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**27.240.000,00**	**27.239.746,00**	**27.239.746,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	27.240.000,00	27.239.746,00	27.239.746,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.531.471.100,00**	**2.522.470.670,00**	**2.522.470.670,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.531.471.100,00	2.522.470.670,00	2.522.470.670,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**477.350.000,00**	**477.348.474,00**	**477.348.474,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**427.350.000,00**	**427.349.804,00**	**427.349.804,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	427.350.000,00	427.349.804,00	427.349.804,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**50.000.000,00**	**49.998.670,00**	**49.998.670,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.775.250.000,00**	**1.762.797.786,00**	**1.762.797.786,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.775.250.000,00**	**1.762.797.786,00**	**1.762.797.786,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.750.500.000,00	1.738.049.501,00	1.738.049.501,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	24.748.285,00	24.748.285,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**7.000.000,00**	**6.999.286,00**	**6.999.286,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**7.000.000,00**	**6.999.286,00**	**6.999.286,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.000.000,00	3.999.463,00	3.999.463,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	4.000.000,00	2.999.823,00	2.999.823,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**7.000.000,00**	**6.999.286,00**	**6.999.286,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**7.000.000,00**	**6.999.286,00**	**6.999.286,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.000.000,00	3.999.463,00	3.999.463,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	4.000.000,00	2.999.823,00	2.999.823,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
					KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA									**11.218.628.771,00**	**12.236.188.245,00**	**12.036.188.245,00**	**- 200.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.604.578.771,00**	**5.655.254.185,00**	**5.455.254.185,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**9.000.000,00**	**4.473.711,00**	**4.473.711,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.000.000,00	1.493.312,00	1.493.312,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	3.000.000,00	1.499.619,00	1.499.619,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	3.000.000,00	1.480.780,00	1.480.780,00	Kecamatan Telukbetung Utara

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.641.678.771,00**	**4.698.038.245,00**	**4.498.038.245,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	45	45	45	3.546.678.771,00	4.593.038.245,00	4.393.038.245,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	95.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**21.089.412,00**	**41.265.254,00**	**41.265.254,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.000.000,00	6.275.181,00	6.275.181,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.089.412,00	10.395.537,00	10.395.537,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.000.000,00	6.607.216,00	6.607.216,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.000.000,00	3.487.320,00	3.487.320,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**50.500.000,00**	**36.300.000,00**	**36.300.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	24.500.000,00	36.300.000,00	36.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	13.000.000,00			Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	13.000.000,00			Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**710.760.000,00**	**701.560.000,00**	**701.560.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	681.760.000,00	672.560.000,00	672.560.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**171.550.588,00**	**173.616.975,00**	**173.616.975,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	33.532.088,00	40.030.000,00	40.030.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	126.018.500,00	112.790.000,00	112.790.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	3.000.000,00	1.296.975,00	1.296.975,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	3.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.700.050.000,00**	**3.686.994.224,00**	**3.686.994.224,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**30.000.000,00**	**29.998.672,00**	**29.998.672,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	30.000.000,00	29.998.672,00	29.998.672,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.670.050.000,00**	**3.656.995.552,00**	**3.656.995.552,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.670.050.000,00	3.656.995.552,00	3.656.995.552,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**684.750.000,00**	**683.999.503,00**	**683.999.503,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**624.750.000,00**	**623.999.503,00**	**623.999.503,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	624.750.000,00	623.999.503,00	623.999.503,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan [illegible]	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan [illegible]	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.219.250.000,00**	**2.203.909.727,00**	**2.203.909.727,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.219.250.000,00**	**2.203.909.727,00**	**2.203.909.727,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.195.750.000,00	2.180.409.764,00	2.180.409.764,00	Kecamatan Telukbetung Utara

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	23.500.000,00	23.499.963,00	23.499.963,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**3.030.968,00**	**3.030.968,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**3.030.968,00**	**3.030.968,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1,00	1,00	1,00	3.000.000,00	1.531.149,00	1.531.149,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	1,00	1,00	1,00	2.000.000,00	1.499.819,00	1.499.819,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**2.999.638,00**	**2.999.638,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**2.999.638,00**	**2.999.638,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.000.000,00	1.499.819,00	1.499.819,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	1.499.819,00	1.499.819,00	Kecamatan Telukbetung Utara
					KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT									**8.319.968.599,00**	**9.165.703.024,00**	**9.365.703.024,00**	**200.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.619.171.012,00**	**4.464.943.330,00**	**4.664.943.330,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**12.777.030,00**	**12.776.524,00**	**12.776.524,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	4.259.010,00	4.258.854,00	4.258.854,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	4.259.010,00	4.258.835,00	4.258.835,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	4.259.010,00	4.258.835,00	4.258.835,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**2.756.818.599,00**	**3.599.613.024,00**	**3.799.613.024,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	29	29	29	2.680.718.599,00	3.522.553.024,00	3.722.553.024,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	76.100.000,00	77.060.000,00	77.060.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**66.493.578,00**	**65.610.800,00**	**65.610.800,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.986.510,00	7.829.134,00	7.829.134,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	19.320.000,00	18.985.028,00	18.985.028,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.598.123,00	7.592.462,00	7.592.462,00	Kecamatan Telukbetung Barat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.125.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.837.437,00	11.837.337,00	11.837.337,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	6.626.508,00	6.266.839,00	6.266.839,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**42.341.250,00**	**31.732.967,00**	**31.732.967,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	11.550.000,00	6.825.544,00	6.825.544,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	11.550.000,00	11.526.807,00	11.526.807,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	19.241.250,00	13.380.616,00	13.380.616,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**540.300.000,00**	**561.840.000,00**	**561.840.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	26.460.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	513.840.000,00	537.840.000,00	537.840.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**200.440.555,00**	**193.370.015,00**	**193.370.015,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	43.840.000,00	39.020.000,00	39.020.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	122.005.540,00	120.810.000,00	120.810.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	11.040.015,00	11.040.015,00	11.040.015,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	10.955.000,00	10.790.000,00	10.790.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	6.300.000,00	11.710.000,00	11.710.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	6.300.000,00			Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.388.697.983,00**	**2.380.297.660,00**	**2.380.297.660,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**26.113.182,00**	**26.112.946,00**	**26.112.946,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	26.113.182,00	26.112.946,00	26.112.946,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.362.584.801,00**	**2.354.184.714,00**	**2.354.184.714,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.362.584.801,00	2.354.184.714,00	2.354.184.714,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**603.362.703,00**	**623.272.488,00**	**623.272.488,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**553.362.703,00**	**573.272.488,00**	**573.272.488,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	553.362.703,00	573.272.488,00	573.272.488,00	Kecamatan Telukbetung Barat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.680.872.670,00**	**1.669.156.751,00**	**1.669.156.751,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.680.872.670,00**	**1.669.156.751,00**	**1.669.156.751,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.655.872.670,00	1.644.156.869,00	1.644.156.869,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	25.000.000,00	24.999.882,00	24.999.882,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**11.260.231,00**	**11.260.017,00**	**11.260.017,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**11.260.231,00**	**11.260.017,00**	**11.260.017,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	5.998.000,00	5.262.082,00	5.262.082,00	Kecamatan Telukbetung Barat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	5.262.231,00	5.997.935,00	5.997.935,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**16.604.000,00**	**16.772.778,00**	**16.772.778,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**16.604.000,00**	**16.772.778,00**	**16.772.778,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.979.000,00	10.978.998,00	10.978.998,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	5.625.000,00	5.793.780,00	5.793.780,00	Kecamatan Telukbetung Barat
					KECAMATAN TELUKBETUNG SELATAN									**10.381.726.229,00**	**11.327.529.816,00**	**10.927.529.816,00**	**400.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.360.333.529,00**	**5.332.989.347,00**	**4.932.989.347,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**2.100.000,00**	**2.100.459,00**	**2.100.459,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	700.000,00	700.153,00	700.153,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	700.000,00	700.153,00	700.153,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	700.000,00	700.153,00	700.153,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.192.726.229,00**	**4.161.629.816,00**	**3.761.629.816,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	27	27	27	3.077.226.229,00	4.049.879.816,00	3.649.879.816,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	115.500.000,00	111.750.000,00	111.750.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98.227.490,00**	**103.224.848,00**	**103.224.848,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.634.535,00	10.632.850,00	10.632.850,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	36.875.111,00	36.874.254,00	36.874.254,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	3	3	3	16.014.207,00	16.014.207,00	16.014.207,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	2	2	2	15.703.637,00	15.703.537,00	15.703.537,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1				Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	-	-	-	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	-	-	-	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	-	-	-	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	4	4	4	-	-	-	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**853.980.000,00**	**855.180.000,00**	**855.180.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BID AKU URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	820.980.000,00	822.180.000,00	822.180.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**213.299.810,00**	**210.854.224,00**	**210.854.224,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	33.532.088,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	146.039.122,00	144.080.000,00	144.080.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	-	-	-	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dirawat/Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dirawat/Dipelihara	Unit	Unit	18,00	18,00	18,00	6.500.000,00	6.570.000,00	6.570.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	3,00	3,00	3,00	12.128.600,00	13.184.224,00	13.184.224,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	24,00	24,00	24,00	15.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.316.904.200,00**	**3.305.199.571,00**	**3.305.199.571,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**29.088.700,00**	**29.087.412,00**	**29.087.412,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	29.088.700,00	29.087.412,00	29.087.412,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.287.815.500,00**	**3.276.112.159,00**	**3.276.112.159,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.287.815.500,00	3.276.112.159,00	3.276.112.159,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**555.873.000,00**	**555.890.040,00**	**555.890.040,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**495.873.000,00**	**495.886.180,00**	**495.886.180,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	495.873.000,00	495.886.180,00	495.886.180,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**60.000.000,00**	**60.003.860,00**	**60.003.860,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal**	**Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.144.015.500,00**	**2.128.847.972,00**	**2.128.847.972,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.144.015.500,00**	**2.128.847.972,00**	**2.128.847.972,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.121.400.000,00	2.106.233.200,00	2.106.233.200,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	22.615.500,00	22.614.772,00	22.614.772,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.300.000,00**	**2.301.391,00**	**2.301.391,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.300.000,00**	**2.301.391,00**	**2.301.391,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.150.000,00	1.150.800,00	1.150.800,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	1.150.000,00	1.150.591,00	1.150.591,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.300.000,00**	**2.301.495,00**	**2.301.495,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.300.000,00**	**2.301.495,00**	**2.301.495,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.150.000,00	1.151.427,00	1.151.427,00	Kecamatan Telukbetung Selatan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.150.000,00	1.150.068,00	1.150.068,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
					KECAMATAN KEDATON									**11.200.678.339,00**	**12.348.900.701,00**	**12.148.900.701,00**	**- 200.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.084.364.041,00**	**6.246.109.108,00**	**6.046.109.108,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**19.048.135,00**	**19.149.319,00**	**19.149.319,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.116.619,00	6.499.181,00	6.499.181,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	6.436.846,00	6.371.290,00	6.371.290,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	6.494.670,00	6.278.848,00	6.278.848,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.846.328.340,00**	**5.050.140.701,00**	**4.850.140.701,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	40	40	40	3.745.628.340,00	4.921.000.701,00	4.721.000.701,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	100.700.000,00	129.140.000,00	129.140.000,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**78.193.721,00**	**75.022.231,00**	**75.022.231,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	9.345.390,00	9.612.820,00	9.612.820,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	18.471.950,00	17.941.589,00	17.941.589,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.685.491,00	12.648.534,00	12.648.534,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.625.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	16.065.890,00	10.602.916,00	10.602.916,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	4.216.372,00	4.216.372,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**13.994.077,00**	**27.528.862,00**	**27.528.862,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	1.000.000,00	14.523.300,00	14.523.300,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	494.077,00	505.562,00	505.562,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**870.736.000,00**	**821.200.000,00**	**821.200.000,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	22.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	848.736.000,00	798.200.000,00	798.200.000,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**256.063.768,00**	**253.067.995,00**	**253.067.995,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.076,00	39.020.000,00	39.020.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	178.915.005,00	125.080.000,00	125.080.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	375.000,00	375.000,00	375.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	10	10	10	1.900.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	Kecamatan Kedaton

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7	7	7	25.141.687,00	70.542.995,00	70.542.995,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.364.834.986,00**	**3.353.214.008,00**	**3.353.214.008,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**34.137.521,00**	**34.498.193,00**	**34.498.193,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	34.137.521,00	34.498.193,00	34.498.193,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.330.697.465,00**	**3.318.715.815,00**	**3.318.715.815,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.330.697.465,00	3.318.715.815,00	3.318.715.815,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**503.405.498,00**	**515.826.356,00**	**515.826.356,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**433.405.498,00**	**445.827.136,00**	**445.827.136,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	433.405.498,00	445.827.136,00	445.827.136,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**70.000.000,00**	**69.999.220,00**	**69.999.220,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrkat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrkat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.245.022.470,00**	**2.229.955.870,00**	**2.229.955.870,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.245.022.470,00**	**2.229.955.870,00**	**2.229.955.870,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.187.816.735,00	2.172.781.480,00	2.172.781.480,00	Kecamatan Kedaton
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	57.205.735,00	57.174.390,00	57.174.390,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.686.418,00**	**1.702.080,00**	**1.702.080,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.686.418,00**	**1.702.080,00**	**1.702.080,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	874.924,00	708.603,00	708.603,00	Kecamatan Kedaton
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	orang	orang	20	20	20	811.494,00	993.477,00	993.477,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.364.926,00**	**2.093.279,00**	**2.093.279,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.364.926,00**	**2.093.279,00**	**2.093.279,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	682.688,00	847.619,00	847.619,00	Kecamatan Kedaton
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	682.238,00	1.245.660,00	1.245.660,00	Kecamatan Kedaton
					KECAMATAN SUKARAME									**10.816.440.526,00**	**11.981.058.918,00**	**11.495.858.918,00**	**485.200.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.393.332.981,00**	**6.523.721.961,00**	**6.038.821.961,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.342.440.526,00**	**5.537.998.918,00**	**5.037.998.918,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Orang/Bulan	Orang/Bulan	51	51	51	4.267.140.526,00	5.455.158.918,00	4.955.158.918,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	75.300.000,00	82.840.000,00	82.840.000,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**31.526.386,00**	**33.359.500,00**	**33.359.500,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	2.754.254,00	2.570.500,00	2.570.500,00	Kecamatan Sukarame

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.555.440,00	13.788.500,00	13.788.500,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.278.422,00	5.270.500,00	5.270.500,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	937.500,00	250.000,00	250.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.000.770,00	10.010.000,00	10.010.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	2.000.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**10.000.000,00**	**2.420.687,00**	**2.420.687,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	10.000.000,00	2.420.687,00	2.420.687,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	-	-	-	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	-	-	-	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**857.440.000,00**	**694.174.100,00**	**694.174.100,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	18.000.000,00	10.224.100,00	10.224.100,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	839.440.000,00	683.950.000,00	683.950.000,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**148.926.069,00**	**252.768.756,00**	**267.568.756,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	11.780.000,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1	1	1	97.327.669,00	167.960.000,00	167.960.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	1.250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	250.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	2	2	2	28.218.400,00	41.038.505,00	41.038.505,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	10.100.000,00	3.520.251,00	18.320.251,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.875.155.225,00**	**2.864.695.332,00**	**2.864.695.332,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**29.500.000,00**	**29.499.303,00**	**29.499.303,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	29.500.000,00	29.499.303,00	29.499.303,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.845.655.225,00**	**2.835.196.029,00**	**2.835.196.029,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.845.655.225,00	2.835.196.029,00	2.835.196.029,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**626.574.324,00**	**684.646.699,00**	**684.646.699,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**566.574.324,00**	**624.646.699,00**	**624.646.699,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	566.574.324,00	624.646.699,00	624.646.699,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**Kecamatan Sukarame**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.917.377.996,00**	**1.903.994.926,00**	**1.903.994.926,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.917.377.996,00**	**1.903.994.926,00**	**1.903.994.926,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.894.577.996,00	1.881.196.029,00	1.881.196.029,00	Kecamatan Sukarame
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	22.800.000,00	22.798.897,00	22.798.897,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Sukarame**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Sukarame
					KECAMATAN PANJANG									**13.985.841.385,00**	**15.062.109.890,00**	**14.662.109.890,00**	**400.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.635.057.041,00**	**5.722.052.703,00**	**5.322.052.703,00**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.834.070,81**	**6.831.671,00**	**6.831.671,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.315.000,00	2.313.543,00	2.313.543,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	2.058.875,81	2.057.979,00	2.057.979,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	2.460.195,00	2.460.149,00	2.460.149,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.329.716.385,00**	**4.485.709.890,00**	**4.085.709.890,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	31	31	31	3.260.716.385,00	4.401.709.890,00	4.001.709.890,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	69.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**78.984.871,00**	**63.220.421,00**	**63.220.421,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.775.000,00	3.773.058,00	3.773.058,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.717.521,00	14.705.256,00	14.705.256,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.655.350,00	5.655.139,00	5.655.139,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.250.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.587.000,00	5.586.968,00	5.586.968,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	24.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2				Kecamatan Panjang
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2				Kecamatan Panjang
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**894.660.000,00**	**839.126.000,00**	**839.126.000,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	30.360.000,00	30.360.000,00	30.360.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	864.300.000,00	808.766.000,00	808.766.000,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**309.861.714,19**	**312.164.721,00**	**312.164.721,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	27.075.000,00	42.520.000,00	42.520.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	257.264.550,00	234.720.000,00	234.720.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3				Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3				Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	2	2	2	5.406.164,19	14.509.715,00	14.509.715,00	Kecamatan Panjang

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	20.116.000,00	20.415.006,00	20.415.006,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.254.350.800,00**	**5.236.418.551,00**	**5.236.418.551,00**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**38.435.000,00**	**38.434.105,00**	**38.434.105,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	38.435.000,00	38.434.105,00	38.434.105,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.215.915.800,00**	**5.197.984.446,00**	**5.197.984.446,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	5.215.915.800,00	5.197.984.446,00	5.197.984.446,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**965.500.000,00**	**1.015.483.918,00**	**1.015.483.918,00**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**885.500.000,00**	**965.499.405,00**	**965.499.405,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	885.500.000,00	965.499.405,00	965.499.405,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**80.000.000,00**	**49.984.513,00**	**49.984.513,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	4.999.530,00	4.999.530,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	4.991.654,00	4.991.654,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	4.997.504,00	4.997.504,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	4.999.685,00	4.999.685,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	4.997.283,00	4.997.283,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	4.998.857,00	4.998.857,00	Kecamatan Panjang

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Penegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Penegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.126.933.544,00**	**3.077.410.580,00**	**3.077.410.580,00**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.126.933.544,00**	**3.077.410.580,00**	**3.077.410.580,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.102.320.000,00	3.052.798.117,00	3.052.798.117,00	Kecamatan Panjang
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.613.544,00	24.612.463,00	24.612.463,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**5.995.214,00**	**5.995.214,00**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**5.995.214,00**	**5.995.214,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	2.997.257,00	2.997.257,00	Kecamatan Panjang
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	1.000.000,00	2.997.957,00	2.997.957,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**4.748.924,00**	**4.748.924,00**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**4.748.924,00**	**4.748.924,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	2.249.176,00	2.249.176,00	Kecamatan Panjang
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	2.499.748,00	2.499.748,00	Kecamatan Panjang
					KECAMATAN RAJABASA									**11.351.786.932,00**	**12.615.688.229,00**	**12.093.853.229,00**	**- 521.835.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.939.831.932,00**	**7.227.354.690,00**	**6.705.519.690,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**14.650.000,00**	**14.519.582,00**	**14.519.582,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	4.950.000,00	4.909.342,00	4.909.342,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Laporan	1	1	1	4.850.000,00	4.805.120,00	4.805.120,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	4.850.000,00	4.805.120,00	4.805.120,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.961.860.332,00**	**6.282.278.925,00**	**5.732.278.925,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	57	57	57	4.882.786.932,00	6.169.038.229,00	5.619.038.229,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	79.073.400,00	113.240.696,00	113.240.696,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**40.890.746,00**	**40.877.475,00**	**40.877.475,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.890.000,00	3.887.596,00	3.887.596,00	Kecamatan Rajabasa

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	22.152.100,00	22.152.067,00	22.152.067,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.583.396,00	3.582.603,00	3.582.603,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.465.250,00	5.465.209,00	5.465.209,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	990.000,00	990.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**37.325.211,00**	**31.737.270,00**	**31.737.270,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	16.000.000,00			Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	15.000.000,00	19.737.270,00	19.737.270,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	6.325.211,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**664.260.000,00**	**626.560.000,00**	**626.560.000,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	40.000.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	624.260.000,00	602.260.000,00	602.260.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**220.845.643,00**	**231.381.438,00**	**259.546.438,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.088,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1	1	1	144.948.555,00	144.280.000,00	172.445.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	2.500.000,00	-	-	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	28.050.000,00	37.766.438,00	37.766.438,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	9.315.000,00	9.315.000,00	9.315.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.712.102.500,00**	**2.701.460.493,00**	**2.701.460.493,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**37.090.000,00**	**36.897.993,00**	**36.897.993,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	37.090.000,00	36.897.993,00	36.897.993,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.675.012.500,00**	**2.664.562.500,00**	**2.664.562.500,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.675.012.500,00	2.664.562.500,00	2.664.562.500,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**752.205.000,00**	**752.204.475,00**	**752.204.475,00**	**Kecamatan Rajabasa**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**682.205.000,00**	**682.204.475,00**	**682.204.475,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	682.205.000,00	682.204.475,00	682.204.475,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.937.647.500,00**	**1.924.672.351,00**	**1.924.672.351,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggarnah Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggarnah Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.937.647.500,00**	**1.924.672.351,00**	**1.924.672.351,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.913.085.000,00	1.900.109.920,00	1.900.109.920,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.562.500,00	24.562.431,00	24.562.431,00	Kecamatan Rajabasa

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	%	100,00	100,00	100,00	5.000.000,00	4.998.110,00	4.998.110,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	%	%	100,00	100,00	100,00	5.000.000,00	4.998.110,00	4.998.110,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.500.000,00	2.499.055,00	2.499.055,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	1	1	1	2.500.000,00	2.499.055,00	2.499.055,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	100,00	100,00	100,00	5.000.000,00	4.998.110,00	4.998.110,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	100,00	100,00	100,00	5.000.000,00	4.998.110,00	4.998.110,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.500.000,00	2.499.055,00	2.499.055,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.500.000,00	2.499.055,00	2.499.055,00	Kecamatan Rajabasa
					KECAMATAN TANJUNG SENANG									**9.208.307.894,00**	**10.113.390.724,00**	**9.913.390.724,00**	**200.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	%	98,00	98,00	98,00	4.141.236.515,00	5.068.775.592,00	4.868.775.592,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	%	%	98,00	98,00	98,00	32.311.270,00	31.658.370,00	31.658.370,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	11.031.850,00	10.638.215,00	10.638.215,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Laporan	1	1	1	10.792.790,00	10.533.626,00	10.533.626,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	10.486.630,00	10.486.529,00	10.486.529,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	98,00	98,00	98,00	3.403.312.894,00	4.316.340.724,00	4.116.340.724,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Orang/Bulan	Orang/Bulan	37	37	37	3.334.232.894,00	4.237.740.724,00	4.037.740.724,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	69.080.000,00	78.600.000,00	78.600.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	98,00	98,00	98,00	40.951.651,00	52.922.498,00	52.922.498,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	1.122.375,00	1.103.768,00	1.103.768,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.873.492,00	13.867.561,00	13.867.561,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.131.200,00	10.145.170,00	10.145.170,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.762.500,00	10.750.000,00	10.750.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1				Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	5.062.084,00	17.055.999,00	17.055.999,00	Kecamatan Tanjung Senang

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	-	**21.004.000,00**	**21.004.000,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2		5.700.000,00	5.700.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2		15.304.000,00	15.304.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2				Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**449.420.000,00**	**454.740.000,00**	**454.740.000,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	32.100.000,00	24.900.000,00	24.900.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	417.320.000,00	429.840.000,00	429.840.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**215.240.700,00**	**192.110.000,00**	**192.110.000,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.350.000,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	16	16	16	146.140.700,00	129.180.000,00	129.180.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	250.000,00			Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	6	6	6	2.500.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	5	5	5	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	28.000.000,00	16.220.000,00	16.220.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.688.780.117,00**	**2.673.736.346,00**	**2.673.736.346,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**26.605.850,00**	**26.552.111,00**	**26.552.111,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	26.605.850,00	26.552.111,00	26.552.111,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.662.174.267,00**	**2.647.184.235,00**	**2.647.184.235,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.662.174.267,00	2.647.184.235,00	2.647.184.235,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**526.750.000,00**	**521.750.000,00**	**521.750.000,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**476.750.000,00**	**471.750.000,00**	**471.750.000,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	476.750.000,00	471.750.000,00	471.750.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Penegahan Tindak Kriminal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Penegahan Tindak Kriminal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.833.755.660,00**	**1.832.935.446,00**	**1.832.935.446,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.833.755.660,00**	**1.832.935.446,00**	**1.832.935.446,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.811.212.300,00	1.810.380.098,00	1.810.380.098,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	22.543.360,00	22.555.348,00	22.555.348,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.469.226,00**	**4.379.962,00**	**4.379.962,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.469.226,00**	**4.379.962,00**	**4.379.962,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.291.676,00	1.663.788,00	1.663.788,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	3.177.550,00	2.716.174,00	2.716.174,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**13.316.376,00**	**11.813.378,00**	**11.813.378,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**13.316.376,00**	**11.813.378,00**	**11.813.378,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.166.676,00	1.663.788,00	1.663.788,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.149.700,00	10.149.590,00	10.149.590,00	Kecamatan Tanjung Senang
					KECAMATAN SUKABUMI									**12.164.427.942,00**	**13.317.427.525,00**	**13.317.427.525,00**	-
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.366.928.863,00**	**6.707.132.199,00**	**6.707.132.199,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**10.814.434,00**	**10.256.173,00**	**10.256.173,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.042.247,00	4.056.121,00	4.056.121,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	4.340.361,00	3.501.260,00	3.501.260,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	3.431.826,00	2.698.792,00	2.698.792,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.893.585.753,00**	**5.055.956.664,00**	**5.055.956.664,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	40	40	40	3.794.977.942,00	4.953.527.525,00	4.953.527.525,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	98.607.811,00	102.429.139,00	102.429.139,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**42.788.112,00**	**99.208.371,00**	**99.208.371,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.514.319,00	10.193.467,00	10.193.467,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.170.776,00	13.395.435,00	13.395.435,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.580.315,00	12.027.176,00	12.027.176,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.125.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.325.452,00	11.590.075,00	11.590.075,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.072.250,00	27.002.218,00	27.002.218,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**22.464.000,00**	**38.010.678,00**	**38.010.678,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	12.000.000,00	5.284.158,00	5.284.158,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	10.000.000,00	27.126.520,00	27.126.520,00	Kecamatan Sukabumi

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	464.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.164.436.000,00**	**1.182.236.000,00**	**1.182.236.000,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	23.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.141.436.000,00	1.154.736.000,00	1.154.736.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**232.840.564,00**	**321.464.313,00**	**321.464.313,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	33.532.076,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10,00	10,00	10,00	168.947.536,00	227.700.000,00	227.700.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3,00	3,00	3,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	2,00	2,00	2,00	725.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	6,00	6,00	6,00	21.935.952,00	37.494.313,00	37.494.313,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	7.500.000,00	16.450.000,00	16.450.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.692.660.088,00**	**3.676.848.474,00**	**3.676.848.474,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**43.094.262,00**	**39.290.667,00**	**39.290.667,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	43.094.262,00	39.290.667,00	39.290.667,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.649.565.826,00**	**3.637.557.807,00**	**3.637.557.807,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.649.565.826,00	3.637.557.807,00	3.637.557.807,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**721.883.046,00**	**577.038.814,00**	**577.038.814,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**651.883.046,00**	**507.040.984,00**	**507.040.984,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	651.883.046,00	507.040.984,00	507.040.984,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**70.000.000,00**	**69.997.830,00**	**69.997.830,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.365.119.497,00**	**2.348.648.968,00**	**2.348.648.968,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.365.119.497,00**	**2.348.648.968,00**	**2.348.648.968,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.342.048.429,00	2.325.675.566,00	2.325.675.566,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	23.071.068,00	22.973.402,00	22.973.402,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.672.270,00**	**4.103.831,00**	**4.103.831,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.672.270,00**	**4.103.831,00**	**4.103.831,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.230.344,00	2.001.317,00	2.001.317,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	6.441.926,00	2.102.514,00	2.102.514,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.164.178,00**	**3.655.239,00**	**3.655.239,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.164.178,00**	**3.655.239,00**	**3.655.239,00**	**Kecamatan Sukabumi**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.950.109,00	1.805.026,00	1.805.026,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.214.069,00	1.850.213,00	1.850.213,00	Kecamatan Sukabumi
					KECAMATAN KEMILING									**16.863.795.208,00**	**18.006.008.569,00**	**18.156.008.569,00**	**150.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.699.976.558,00**	**7.872.693.613,00**	**8.022.693.613,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.000.000,00**	**2.964.000,00**	**2.964.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	988.000,00	988.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	988.000,00	988.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	988.000,00	988.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.424.858.208,00**	**6.627.063.569,00**	**6.777.063.569,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	63	63	63	5.341.020.208,00	6.528.608.569,00	6.678.608.569,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	83.838.000,00	98.455.000,00	98.455.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**23.587.250,00**	**22.741.719,00**	**22.741.719,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	2.300.500,00	2.517.037,00	2.517.037,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.000.000,00	10.124.355,00	10.124.355,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	1.616.750,00	1.610.327,00	1.610.327,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	2.670.000,00	6.490.000,00	6.490.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1				Kecamatan Kemiling
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**10.000.000,00**	**8.499.000,00**	**8.499.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2				Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	5.000.000,00			Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	5.000.000,00	8.499.000,00	8.499.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**833.009.800,00**	**825.105.325,00**	**825.105.325,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	41.200.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	791.809.800,00	783.905.325,00	783.905.325,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**405.521.300,00**	**386.320.000,00**	**386.320.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	2	2	2	33.540.678,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	20	20	20	363.980.622,00	333.990.000,00	333.990.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kecamatan Kemiling

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	4	4	4	2.000.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	11	11	11	2.000.000,00	7.410.000,00	7.410.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	5	5	5	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.918.818.650,00**	**5.878.088.021,00**	**5.878.088.021,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**70.210.000,00**	**61.088.021,00**	**61.088.021,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	70.210.000,00	61.088.021,00	61.088.021,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.848.608.650,00**	**5.817.000.000,00**	**5.817.000.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	5.848.608.650,00	5.817.000.000,00	5.817.000.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**806.500.000,00**	**840.485.510,00**	**840.485.510,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**716.500.000,00**	**750.500.000,00**	**750.500.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	716.500.000,00	750.500.000,00	750.500.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**90.000.000,00**	**89.985.510,00**	**89.985.510,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.434.500.000,00**	**3.410.741.425,00**	**3.410.741.425,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.434.500.000,00**	**3.410.741.425,00**	**3.410.741.425,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.412.000.000,00	3.388.241.425,00	3.388.241.425,00	Kecamatan Kemiling
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Kemiling
					KECAMATAN ENGGAL									**9.725.014.877,00**	**10.752.856.101,00**	**10.752.856.101,00**	**-**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.433.962.404,00**	**5.471.978.659,00**	**5.485.634.739,00**	**Kecamatan Enggal**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**8.935.800,00**	**8.935.599,00**	**8.935.599,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.978.600,00	2.978.533,00	2.978.533,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	2.978.600,00	2.978.533,00	2.978.533,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	2.978.600,00	2.978.533,00	2.978.533,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.566.239.877,00**	**4.617.256.101,00**	**4.617.256.101,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	38	38	38	3.483.439.877,00	4.534.456.101,00	4.534.456.101,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	82.800.000,00	82.800.000,00	82.800.000,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**78.611.026,00**	**69.285.696,00**	**82.941.776,00**	**Kecamatan Enggal**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	1.804.041,00	1.822.847,00	1.822.847,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	19.133.537,00	9.660.705,00	9.660.705,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.770.680,00	15.899.382,00	29.555.462,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.402.768,00	15.402.762,00	15.402.762,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**17.000.000,00**	**27.583.096,00**	**27.583.096,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2		10.950.000,00	10.950.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	17.000.000,00	16.633.096,00	16.633.096,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2				Kecamatan Enggal
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**553.120.000,00**	**553.140.000,00**	**553.140.000,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	541.120.000,00	541.140.000,00	541.140.000,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**210.055.701,00**	**195.778.167,00**	**195.778.167,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	43.535.088,00	39.040.000,00	39.040.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	125.029.813,00	113.830.000,00	113.830.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	6	6	6	11.876.800,00	13.428.812,00	13.428.812,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	20.864.000,00	20.729.355,00	20.729.355,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.719.209.764,00**	**2.719.209.837,00**	**2.719.209.837,00**	**Kecamatan Enggal**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**38.810.000,00**	**38.810.099,00**	**38.810.099,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	38.810.000,00	38.810.099,00	38.810.099,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.680.399.764,00**	**2.680.399.738,00**	**2.680.399.738,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.680.399.764,00	2.680.399.738,00	2.680.399.738,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**643.909.370,00**	**633.734.788,00**	**620.078.708,00**	**Kecamatan Enggal**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**593.909.370,00**	**583.735.548,00**	**570.079.468,00**	**Kecamatan Enggal**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	593.909.370,00	583.735.548,00	570.079.468,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**50.000.000,00**	**49.999.240,00**	**49.999.240,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.917.933.339,00**	**1.917.932.879,00**	**1.917.932.879,00**	**Kecamatan Enggal**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.917.933.339,00**	**1.917.932.879,00**	**1.917.932.879,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.889.433.339,00	1.889.432.879,00	1.889.432.879,00	Kecamatan Enggal
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**4.999.938,00**	**4.999.938,00**	**Kecamatan Enggal**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**4.999.938,00**	**4.999.938,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.500.000,00	2.499.969,00	2.499.969,00	Kecamatan Enggal
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	2.500.000,00	2.499.969,00	2.499.969,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**Kecamatan Enggal**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kecamatan Enggal
					KECAMATAN KEDAMAIAN									**11.193.470.717,00**	**12.303.067.798,00**	**11.703.067.798,00**	**600.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.209.785.617,00**	**6.469.614.092,00**	**5.869.614.092,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.300.000,00**	**6.306.261,00**	**6.306.261,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.100.000,00	2.102.087,00	2.102.087,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Laporan	1	1	1	2.100.000,00	2.102.087,00	2.102.087,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	2.100.000,00	2.102.087,00	2.102.087,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.918.705.717,00**	**5.052.279.085,00**	**4.452.279.085,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	42	42	42	3.850.545.717,00	4.961.417.798,00	4.361.417.798,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	68.160.000,00	90.861.287,00	90.861.287,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**53.447.118,00**	**77.985.563,00**	**77.985.563,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.092.816,00	6.093.566,00	6.093.566,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.376.912,00	12.381.787,00	12.381.787,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.509.490,00	10.518.710,00	10.518.710,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.717.900,00	10.831.500,00	10.831.500,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	25.410.000,00	25.410.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**72.000.000,00**	**115.907.970,00**	**115.907.970,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	20.000.000,00			Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	35.000.000,00	115.907.970,00	115.907.970,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	17.000.000,00			Kecamatan Kedamaian

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**909.500.000,00**	**933.500.000,00**	**933.500.000,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	895.500.000,00	919.500.000,00	919.500.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**249.832.782,00**	**283.635.213,00**	**283.635.213,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.088,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	159.472.390,00	157.240.000,00	157.240.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7	7	7	33.736.304,00	66.283.213,00	66.283.213,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	16.592.000,00	16.592.000,00	16.592.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.072.441.200,00**	**3.061.642.933,00**	**3.061.642.933,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**35.685.600,00**	**35.687.557,00**	**35.687.557,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	35.685.600,00	3.025.955.376,00	3.025.955.376,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.036.755.600,00**	**3.025.955.376,00**	**3.025.955.376,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.036.755.600,00	3.025.955.376,00	3.025.955.376,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**790.385.500,00**	**664.394.136,00**	**664.394.136,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**720.385.500,00**	**594.394.186,00**	**594.394.186,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	720.385.500,00	594.394.186,00	594.394.186,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**70.000.000,00**	**69.999.950,00**	**69.999.950,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.112.858.400,00**	**2.099.411.337,00**	**2.099.411.337,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.112.858.400,00**	**2.099.411.337,00**	**2.099.411.337,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.090.258.400,00	2.076.808.991,00	2.076.808.991,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	22.600.000,00	22.602.346,00	22.602.346,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**4.002.650,00**	**4.002.650,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**4.002.650,00**	**4.002.650,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	20	20	20	2.000.000,00	2.001.325,00	2.001.325,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	2.000.000,00	2.001.325,00	2.001.325,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**4.002.650,00**	**4.002.650,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**4.002.650,00**	**4.002.650,00**	**Kecamatan Kedamaian**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	2.001.325,00	2.001.325,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	2.001.325,00	2.001.325,00	Kecamatan Kedamaian
					KECAMATAN TELUKBETUNG TIMUR									**8.948.373.436,00**	**9.842.643.323,00**	**9.192.643.323,00**	**650.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.128.926.622,00**	**5.044.535.493,00**	**4.394.535.493,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**9.420.797,00**	**9.373.382,00**	**9.373.382,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.063.776,00	3.106.944,00	3.106.944,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar [illegible]	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar [illegible]	Laporan	Laporan	1	1	1	3.282.513,00	3.185.419,00	3.185.419,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	3.074.508,00	3.081.019,00	3.081.019,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**2.839.448.436,00**	**3.757.353.323,00**	**3.107.353.323,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	25	25	25	2.743.448.436,00	3.658.493.323,00	3.008.493.323,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	96.000.000,00	98.860.000,00	98.860.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**70.380.725,00**	**64.898.821,00**	**64.898.821,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.320.878,00	8.392.348,00	8.392.348,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.436.573,00	16.608.797,00	16.608.797,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.131.277,00	12.334.966,00	12.334.966,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.212.424,00	9.152.710,00	9.152.710,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	6.279.573,00	5.410.000,00	5.410.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**34.250.000,00**	**40.896.712,00**	**40.896.712,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	11.250.000,00	12.966.061,00	12.966.061,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	12.500.000,00	16.064.467,00	16.064.467,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	10.500.000,00	11.866.184,00	11.866.184,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**958.000.000,00**	**955.600.000,00**	**955.600.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	932.500.000,00	930.100.000,00	930.100.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**217.426.664,00**	**216.413.255,00**	**216.413.255,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	33.532.088,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10,00	10,00	10,00	126.654.576,00	124.000.000,00	124.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3,00	3,00	3,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3,00	3,00	3,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	35.000.000,00	35.653.255,00	35.653.255,00	Kecamatan Telukbetung Timur

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	20.740.000,00	18.240.000,00	18.240.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.463.093.569,00**	**2.455.410.239,00**	**2.455.410.239,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**29.772.824,00**	**29.772.157,00**	**29.772.157,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	29.772.824,00	29.772.157,00	29.772.157,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.433.320.745,00**	**2.425.638.082,00**	**2.425.638.082,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.433.320.745,00	2.425.638.082,00	2.425.638.082,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**550.204.502,00**	**550.204.883,00**	**550.204.883,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**490.204.502,00**	**490.204.883,00**	**490.204.883,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	490.204.502,00	490.204.883,00	490.204.883,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BID AKU URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Penecegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Penecegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.786.148.743,00**	**1.776.828.932,00**	**1.776.828.932,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.786.148.743,00**	**1.776.828.932,00**	**1.776.828.932,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.762.427.368,00	1.753.096.226,00	1.753.096.226,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	23.721.375,00	23.732.706,00	23.732.706,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**7.834.464,00**	**7.834.464,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**7.834.464,00**	**7.834.464,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	20,00	20,00	20,00	5.000.000,00	3.919.808,00	3.919.808,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	1,00	1,00	1,00	5.000.000,00	3.914.656,00	3.914.656,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**7.829.312,00**	**7.829.312,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**7.829.312,00**	**7.829.312,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	5.000.000,00	3.914.656,00	3.914.656,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	5.000.000,00	3.914.656,00	3.914.656,00	Kecamatan Telukbetung Timur
					KECAMATAN BUMI WARAS									**10.359.678.956,00**	**11.227.722.024,00**	**10.677.722.024,00**	**- 550.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.075.372.529,00**	**4.956.128.548,00**	**4.406.128.548,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**31.656.000,00**	**31.656.064,00**	**31.656.064,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1	1	1	10.552.000,00	10.552.064,00	10.552.064,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		1	1	1	10.552.000,00	10.552.000,00	10.552.000,00	Kecamatan Bumi Waras

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		1	1	1	10.552.000,00	10.552.000,00	10.552.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**2.953.103.956,00**	**3.830.022.024,00**	**3.280.022.024,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		34	34	34	2.870.603.956,00	3.742.322.024,00	3.192.322.024,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1	1	1	82.500.000,00	87.700.000,00	87.700.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**72.887.569,00**	**74.600.226,00**	**74.600.226,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	1	1	10.275.000,00	10.275.000,00	10.275.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	1	1	18.593.959,00	18.821.616,00	18.821.616,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1	1	1	11.582.859,00	11.582.859,00	11.582.859,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	1	1	15.000.000,00	22.485.000,00	22.485.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	1	1	10.435.751,00	10.435.751,00	10.435.751,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	1	1	7.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**34.603.565,00**	**34.603.565,00**	**34.603.565,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		2	2	2	11.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		2	2	2	11.103.565,00	10.103.565,00	10.103.565,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2	2	2	12.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**872.950.000,00**	**872.950.000,00**	**872.950.000,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1	1	1	8.200.000,00	14.450.000,00	14.450.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	1	1	864.750.000,00	858.500.000,00	858.500.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**110.171.439,00**	**112.296.669,00**	**112.296.669,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1	1	1	33.532.088,00	42.430.000,00	42.430.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10	10	10	48.261.377,91	47.620.001,00	47.620.001,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		4	4	4	4.589.036,00	500.000,00	500.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		4	4	4	2.668.937,09	500.000,00	500.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		6	6	6	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	1	1	10.120.000,00	10.246.668,00	10.246.668,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.423.200.645,00**	**3.425.975.645,00**	**3.425.975.645,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**26.470.000,00**	**25.570.000,00**	**25.570.000,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		1	1	1	26.470.000,00	25.570.000,00	25.570.000,00	Kecamatan Bumi Waras

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.396.730.645,00**	**3.400.405.645,00**	**3.400.405.645,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		1	1	1	3.396.730.645,00	3.400.405.645,00	3.400.405.645,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%		**85,00**	**85,00**	**85,00**	**684.648.480,00**	**684.667.278,00**	**684.667.278,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	%		**85,00**	**85,00**	**85,00**	**634.648.480,00**	**634.667.278,00**	**634.667.278,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		1	1	1	634.648.480,00	634.667.278,00	634.667.278,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%		**85,00**	**85,00**	**85,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	%		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.156.457.302,00**	**2.140.854.670,00**	**2.140.854.670,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	%		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.156.457.302,00**	**2.140.854.670,00**	**2.140.854.670,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		1	1	1	2.132.457.302,00	2.116.855.917,00	2.116.855.917,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		1	1	1	24.000.000,00	23.998.753,00	23.998.753,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**10.095.883,00**	**10.095.883,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	%		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**10.095.883,00**	**10.095.883,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen		1	1	1	5.000.000,00	5.096.059,00	5.096.059,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang		20	20	20	5.000.000,00	4.999.824,00	4.999.824,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		1	1	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen		1	1	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
					KECAMATAN LABUHAN RATU									**10.125.996.877,00**	**11.279.220.316,00**	**10.979.220.316,00**	**300.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.466.446.951,00**	**6.621.877.641,00**	**6.321.877.641,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.000.000,00**	**5.999.103,00**	**5.999.103,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	1.999.701,00	1.999.701,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	1.999.701,00	1.999.701,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	2.000.000,00	1.999.701,00	1.999.701,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.676.346.877,00**	**5.828.020.316,00**	**5.828.020.316,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	55	55	55	4.584.546.877,00	5.734.320.316,00	5.434.320.316,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	91.800.000,00	93.700.000,00	93.700.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**68.373.670,00**	**66.364.953,00**	**66.364.953,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.000.000,00	12.993.911,00	12.993.911,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	14.003.132,00	14.002.284,00	14.002.284,00	Kecamatan Labuhan Ratu

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.967.538,00	13.965.856,00	13.965.856,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.303.000,00	13.302.902,00	13.302.902,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	2.000.000,00			Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**37.500.000,00**	**35.397.376,00**	**35.397.376,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	22.500.000,00	4.931.184,00	4.931.184,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2				Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	15.000.000,00	30.466.192,00	30.466.192,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**500.500.000,00**	**524.300.000,00**	**524.300.000,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	488.500.000,00	512.300.000,00	512.300.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**177.726.404,00**	**161.795.893,00**	**161.795.893,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.088,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	65.194.316,00	65.140.000,00	65.140.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	500.000,00			Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	500.000,00			Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	2	2	2	57.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	21.000.000,00	14.635.893,00	14.635.893,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.411.140.809,00**	**2.411.139.784,00**	**2.411.139.784,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**29.475.078,00**	**29.474.128,00**	**29.474.128,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	29.475.078,00	29.474.128,00	29.474.128,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.381.665.731,00**	**2.381.665.656,00**	**2.381.665.656,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.381.665.731,00	2.381.665.656,00	2.381.665.656,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**467.033.653,00**	**467.031.332,00**	**467.031.332,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**407.033.653,00**	**407.031.332,00**	**407.031.332,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	407.033.653,00	407.031.332,00	407.031.332,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.773.375.464,00**	**1.771.172.263,00**	**1.771.172.263,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraah Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraah Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.773.375.464,00**	**1.771.172.263,00**	**1.771.172.263,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.750.497.500,00	1.748.295.266,00	1.748.295.266,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	22.877.964,00	22.876.997,00	22.876.997,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**3.999.648,00**	**3.999.648,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**3.999.648,00**	**3.999.648,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	1.999.824,00	1.999.824,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	2.000.000,00	1.999.824,00	1.999.824,00	Kecamatan Labuhan Ratu

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**3.999.648,00**	**3.999.648,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**3.999.648,00**	**3.999.648,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	1.999.824,00	1.999.824,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	1.999.824,00	1.999.824,00	Kecamatan Labuhan Ratu
					KECAMATAN WAY HALIM									**12.755.587.706,00**	**13.579.930.357,00**	**13.579.930.357,00**	**.**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.216.082.301,00**	**6.098.088.232,00**	**6.102.380.800,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.086.277,00**	**3.045.141,00**	**3.045.141,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.028.759,00	1.015.047,00	1.015.047,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Laporan	1	1	1	1.028.759,00	1.015.047,00	1.015.047,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	1.028.759,00	1.015.047,00	1.015.047,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.987.192.706,00**	**4.812.770.357,00**	**4.812.770.357,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	43	43	43	3.852.162.706,00	4.686.030.357,00	4.686.030.357,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	135.030.000,00	126.740.000,00	126.740.000,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**62.564.134,00**	**53.017.973,00**	**53.017.973,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.217.808,00	4.532.270,00	4.532.270,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.767.842,50	13.323.773,00	13.323.773,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.443.911,50	4.996.930,00	4.996.930,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.500.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.634.572,00	3.915.000,00	3.915.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	11.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**29.082.928,00**	**65.256.456,00**	**75.606.456,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	10.500.000,00	14.954.400,00	14.954.400,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	7.875.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	10.707.928,00	42.602.056,00	52.952.056,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.065.400.000,00**	**1.078.100.000,00**	**1.078.100.000,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	29.500.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.035.900.000,00	1.037.300.000,00	1.037.300.000,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**68.756.256,00**	**85.898.305,00**	**79.840.873,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	33.530.000,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Way Halim

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10,00	10,00	10,00	20.771.700,00	35.370.000,00	35.370.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3,00	3,00	3,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5,00	5,00	5,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7,00	7,00	7,00	10.475.756,00	8.847.185,00	2.789.753,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	2.228.800,00	2.911.120,00	2.911.120,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.245.758.796,00**	**4.230.291.706,00**	**4.230.291.706,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**29.412.478,00**	**29.411.782,00**	**29.411.782,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	29.412.478,00	29.411.782,00	29.411.782,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.216.346.318,00**	**4.200.879.924,00**	**4.200.879.924,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	4.216.346.318,00	4.200.879.924,00	4.200.879.924,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**694.822.300,00**	**697.304.204,00**	**672.053.636,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**629.122.890,00**	**597.291.154,00**	**597.291.154,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	629.122.890,00	597.291.154,00	597.291.154,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**65.699.410,00**	**100.013.050,00**	**74.762.482,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	3.688.663,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	3.688.663,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	3.688.663,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	3.688.663,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	10.001.305,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	10.001.305,00	Kecamatan Way Halim

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	10.001.305,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	10.001.305,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	10.001.305,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	10.001.305,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.553.568.738,00**	**2.535.169.951,00**	**2.535.169.951,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.553.568.738,00**	**2.535.169.951,00**	**2.535.169.951,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.530.777.964,00	2.512.381.930,00	2.512.381.930,00	Kecamatan Way Halim
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	22.790.774,00	22.788.021,00	22.788.021,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**22.296.047,00**	**9.538.132,00**	**30.496.132,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**22.296.047,00**	**9.538.132,00**	**30.496.132,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	11.285.035,00	4.769.066,00	15.248.066,00	Kecamatan Way Halim
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	11.011.012,00	4.769.066,00	15.248.066,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**23.059.524,00**	**9.538.132,00**	**9.538.132,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**23.059.524,00**	**9.538.132,00**	**9.538.132,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	06	2.01	002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	11.548.512,00	4.769.066,00	4.769.066,00	Kecamatan Way Halim
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	11.511.012,00	4.769.066,00	4.769.066,00	Kecamatan Way Halim
					KECAMATAN LANGKAPURA									**8.005.213.748,00**	**8.877.511.776,00**	**9.027.511.776,00**	**150.000.000,00**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	%	98,00	98,00	98,00	4.002.067.548,00	4.891.032.770,00	5.041.032.770,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	%	%	98,00	98,00	98,00	26.378.700,00	26.378.533,00	26.378.533,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	8.792.900,00	8.792.733,00	8.792.733,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Laporan	1	1	1	8.792.900,00	8.792.900,00	8.792.900,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	8.792.900,00	8.792.900,00	8.792.900,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	98,00	98,00	98,00	3.055.133.748,00	3.910.811.776,00	4.060.811.776,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	34	34	34	2.975.513.748,00	3.840.611.776,00	3.990.611.776,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	79.620.000,00	70.200.000,00	70.200.000,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	98,00	98,00	98,00	55.716.828,00	57.576.823,00	57.576.823,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.859.200,00	7.064.730,00	7.064.730,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	19.722.628,00	19.722.549,00	19.722.549,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.925.000,00	7.924.610,00	7.924.610,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	9.010.000,00	10.664.934,00	10.664.934,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	98,00	98,00	98,00	23.000.000,00	33.635.638,00	33.635.638,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	1.000.000,00	11.627.558,00	11.627.558,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	11.000.000,00	11.008.080,00	11.008.080,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	%	%	98,00	98,00	98,00	700.700.000,00	719.700.000,00	719.700.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	686.500.000,00	705.500.000,00	705.500.000,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	%	%	98,00	98,00	98,00	141.138.272,00	142.930.000,00	142.930.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	29.232.088,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	81.406.184,00	70.080.000,00	70.080.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	4	4	4	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	4	4	4	3.000.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	6	6	6	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	1.000.000,00	6.410.000,00	6.410.000,00	Kecamatan Langkapura

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.951.717.450,00**	**1.944.966.879,00**	**1.944.966.879,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**38.707.200,00**	**38.706.840,00**	**38.706.840,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	38.707.200,00	38.706.840,00	38.706.840,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.913.010.250,00**	**1.906.260.039,00**	**1.906.260.039,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.913.010.250,00	1.906.260.039,00	1.906.260.039,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**531.250.750,00**	**531.385.260,00**	**531.385.260,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**481.250.750,00**	**481.385.260,00**	**481.385.260,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	481.250.750,00	481.385.260,00	481.385.260,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.496.178.000,00**	**1.486.127.143,00**	**1.486.127.143,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.496.178.000,00**	**1.486.127.143,00**	**1.486.127.143,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.473.003.000,00	1.462.952.971,00	1.462.952.971,00	Kecamatan Langkapura
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	23.175.000,00	23.174.172,00	23.174.172,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.000.000,00**	**11.999.862,00**	**11.999.862,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.000.000,00**	**11.999.862,00**	**11.999.862,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.000.000,00	5.999.931,00	5.999.931,00	Kecamatan Langkapura
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	6.000.000,00	5.999.931,00	5.999.931,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.000.000,00**	**11.999.862,00**	**11.999.862,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.000.000,00**	**11.999.862,00**	**11.999.862,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.000.000,00	5.999.931,00	5.999.931,00	Kecamatan Langkapura
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.000.000,00	5.999.931,00	5.999.931,00	Kecamatan Langkapura
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									**55.230.305.034,00**	**47.661.019.841,00**	**47.696.594.841,00**	
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									**55.230.305.034,00**	**47.661.019.841,00**	**47.696.594.841,00**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**2.930.562.634,00**	**4.003.913.417,00**	**3.803.913.417,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**50.000.000,00**	**49.999.697,00**	**49.999.697,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	4	4		25.000.000	24.999.827,00	24.999.827,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	4	4		25.000.000	24.999.870,00	24.999.870,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**2.535.287.634,00**	**3.116.602.441,00**	**2.916.602.441,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	25	25		2.342.687.634	2.899.402.441,00	2.699.402.441,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		192.600.000	217.200.000,00	217.200.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional**	**Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**2.500.000,00**			**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	Laporan	1	1		2.500.000,00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**135.042.653,00**	**132.631.279,00**	**132.631.279,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		30.000.000	29.999.258,00	29.999.258,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		7.500.000	7.492.762,00	7.492.762,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		15.000.000	27.500.000,00	27.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		10.000.000	12.499.827,00	12.499.827,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		6.000.000	6.000.000,00	6.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		66.542.653	49.139.432,00	49.139.432,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**70.000.000,00**	**482.600.000,00**	**482.600.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	5	5		35.000.000,00	455.000.000,00	455.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	10	10		35.000.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**92.000.000,00**	**92.000.000,00**	**92.000.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**45.732.347,00**	**130.080.000,00**	**130.080.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00		33.532.088	44.680.000,00	44.680.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1,00	1,00		6.200.259	79.760.000,00	79.760.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5,00	5,00		6.000.000	5.640.000,00	5.640.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**02**			**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**		**875.000.000,00**	**617.301.272,00**	**617.301.272,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**		**875.000.000,00**	**617.301.272,00**	**617.301.272,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	02	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	1		75.000.000,00	82.199.839,00	82.199.839,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	Orang	Orang	100	100		100.000.000,00	74.999.774,00	74.999.774,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Orang	Orang	200	200		700.000.000,00	49.999.871,00	49.999.871,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	0008		Pembetukan Paskibra		Jumlah Paskibraka		Orang		136			410.101.788,00	410.101.788,00	
8	**01**	**03**				**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**		**48.407.542.400,00**	**39.672.506.843,00**	**39.672.506.843,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**		**48.407.542.400,00**	**39.672.506.843,00**	**39.672.506.843,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Orang	100	100		125.000.000	99.999.795,00	99.999.795,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Orang	Orang	100	100		0	-	-	
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	Laporan	Laporan	1	1		48.282.542.400	39.522.507.341,00	39.522.507.341,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	0006		Pelaksanaan Tugas Paskibra		Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka		Kegiatan		3			49.999.707,00	49.999.707,00	
8	**01**	**04**			**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Ormas yang dibina**	**Persentase Ormas yang dibina**	**Persen**	**Persen**	**50,00**	**50,00**		**2.100.000.000,00**	**2.049.999.746,00**	**2.084.574.746,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Laporan Keberadaan & Pembinaan ORMAS**	**Laporan Keberadaan & Pembinaan ORMAS**	**Persen**	**Persen**	**50,00**	**50,00**		**2.100.000.000,00**	**2.049.999.746,00**	**2.084.574.746,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1,00	1,00		2.000.000.000,00	1.949.999.768,00	1.968.049.768,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	Laporan	1,00	1,00		100.000.000,00	99.999.978,00	116.524.978,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**05**			**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Persentase Penanganan Konflik Keagamaan dan Ras**	**Persentase Penanganan Konflik Keagamaan dan Ras**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**342.200.000,00**	**767.299.389,00**	**782.149.389,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani**	**Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**342.200.000,00**	**767.299.389,00**	**782.149.389,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Orang	50	50		100.000.000	550.099.593,00	564.949.593,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Orang	60	60		75.000.000	49.999.848,00	49.999.848,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	Laporan	Laporan	1	1		167.200.000	167.199.948,00	167.199.948,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**06**			**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan**	**Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**575.000.000,00**	**549.999.174,00**	**736.149.174,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
							Persentase SDM yang mempunyai kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Diniterhadap Kerawanan Konflik Sosial	**Persentase SDM yang mempunyai kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Diniterhadap Kerawanan Konflik Sosial**	**Persen**	**Persen**	**60,00**	**60,00**					
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Konflik Sosial yang terselesaikan dan Kemampuan SDM dalam Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial**	**Konflik Sosial yang terselesaikan dan Kemampuan SDM dalam Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**		**575.000.000,00**	**549.999.174,00**	**736.149.174,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1		75.000.000	74.999.832,00	106.324.832,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di DAerah	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di DAerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Orang	300	300		75.000.000	49.999.779,00	49.999.779,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Orang	Orang	40	40		200.000.000	199.999.779,00	258.374.779,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	Laporan	Laporan	1	1		75.000.000	74.999.906,00	109.449.906,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1		150.000.000	149.999.878,00	211.999.878,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
										JUMLAH TOTAL				2.390.686.508.575,11	2.690.120.777.526,00	2.910.030.685.923,00	

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA KECAMATAN TELUKBETUNG BARAT KOTA BANDAR LAMPUNG
TRIWULAN II TAHUN 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan Tahun n-2 (2022, 2023 ,2024, 2025)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun n-1 (2022)			Realisasi Kinerja Tahun 2022 pada triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran OPD pada Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran Renja OPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Akhir Periode Pelaksanaan Renja Pada Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2020		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
														I			II			III			IV														
					K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	RP.	K	Sat	RP.	K	Sat	RP.	K	Sat	RP.	K	Sat	Rp	K	Rp	K	Sat	Rp	K	Rp		
		7 01	KECAMATAN																																	
			KECAMATAN TELUKBETUNG BARAT																																	
Terwujudnya Tata kelola pemerintah yang efektif,efisisen,akuntabel transparan dan inovatif	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan	7 01 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan**	100	%	25.396.389.474,00	50	%	-	100	%	3.790.673.004,45	5	%	447.317.592,00	5	%	905.318.007,00			-			-	10	%	1.352.635.599,00	0,4		60	%	1.352.635.599	60,0	43,2		
		7 01 01 2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	98	%	20.248.036.291,42	12	Bln	-	12	Bln	2.894.758.673,45	3	Bln	390.317.592,00	3	Bln	717.920.057,00		Bln	-		Bln	-	6	Bln	1.108.237.649,00	0,4	0,41	18	Bln	1.108.237.649	18,4	5,5	Kec Telukbetung Barat	
		7 01 01 2 02 01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	72	Bln	19.758.064.754,40	12	Bln		12	Bln	2.810.308.673,45	3	Bln	390.317.592,00	3	Bln	716.670.057,00		Bln			Bln	-	6	Bln	1.106.987.649	0,4	0,4	18	Bln	1.106.987.649	25,0	5,6	Kec Telukbetung Barat	
		7 01 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	72	Bln	489.971.537,02	12	Bln		12	Bln	84.450.000,00	3	Bln	-	3	Bln	1.250.000,00		Bln			Bln	-	6	Bln	1.250.000	0,0	0,0	18	Bln	1.250.000	25,0	0,3	Kec Telukbetung Barat	
			Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	98	%	67.239.196,44						14.961.545,00			-			7.846.100,00																		
		7 01 01 2 1 1	Penyusunan dokumen perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan Bappeda	72	Bln	22.413.065,48						4.998.686,00						2.902.500,00																		
		7 01 01 2 1 6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah laporan capaian kinerja	72	Bln	22.413.065,48						4.980.798,00						2.890.600,00																		
		7 01 01 2 1 7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	72	Bln	22.413.065,48						4.982.061,00						2.053.000,00																		
		7 01 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	98	%	410.868.577,10	12	Bln	-	12	Bln	62.525.787,00	3	Bln	-	3	Bln	28.134.100,00		Bln	-		Bln	-	6	Bln	28.134.100	0,4	45,0	18	Bln	28.134.100	18,4	6,8	Kec Telukbetung Barat	
		7 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	72	Bln	42.029.056,41	12	Bln		12	Bln	7.244.000,00	3	Bln	-	3	Bln	3.917.500,00		Bln	-		Bln	-	6	Bln	3.917.500	0,5	54,1	18	Bln	3.917.500	25,0	9,3	Kec Telukbetung Barat	
		7 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	Bln	101.671.615,00	12	Bln		12	Bln	17.522.912,00	3	Bln	-	3	Bln	12.051.000,00		Bln	-		Bln	-	6	Bln	12.051.000	0,7	68,8	18	Bln	12.051.000	25,0	11,9	Kec Telukbetung Barat	
		7 01 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	72	Bln	39.985.168,51	12	Bln		12	Bln	6.687.000,00	3	Bln	-	3	Bln	3.877.250,00		Bln	-		Bln	-	6	Bln	3.877.250	0,6	58,0	18	Bln	3.877.250	25,0	9,7	Kec Telukbetung Barat	
		7 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	72	Bln	82.003.683,13	12	Bln		12	BLN	9.300.000,00	3	Bln	-	3	Bln	4.125.000,00		Bln	-		Bln	-	6	Bln	4.125.000	0,4	44,4	1	Keg	4.125.000	1,4	5,0	Kec Telukbetung Barat	
		7 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	72	Bln	62.294.585,30	12	Bln		12	Bln	5.852.775,00	3	Bln	-	3	Bln	4.163.350,00		Bln	-		Bln	-	6	Bln	4.163.350	0,7	71,1	18	Bln	4.163.350	25,0	6,7	Kec Telukbetung Barat	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	72	Bln	82.884.468,75	12	Bln		12	Bln	15.919.100,00	3	Bln	-	3	Bln	-		Bln	-		Bln	-	6	Bln	-	0,0	0,0	18	Bln	-	25,0	0,0	Kec Telukbetung Barat	
		7 01 01 2 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	100	%	222.821.080,16	12	Bln	-	100	%	47.000.000,00	3	%	-	5	%	-			-			-	10	%	-	0,0	0,0	60	%	-	60,0	0,0		
		7 01 01 2 07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	72	bln	60.781.943,75	12	Bln		12	Bln	10.500.000,00	3	Bln	-	3	Bln	-		Bln	-		Bln	-	6	Bln	-	0,0	0,0	18	Bln	-	25,0	0,0	Kec Telukbetung Barat	
		7 01 01 2 07 06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	72	bln	60.781.943,75	12	Bln		12	Bln	-	3	Bln	-	3	Bln	-		Bln	-		Bln	-	6	Bln	-	#DIV/0!	#DIV/0!	18	Bln	-	25,0	0,0	Kec Telukbetung Barat	
		7 01 01 2 07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	72	bln	101.257.192,66	12	Bln		12	Bln	36.500.000,00	3	Bln	-	3	Bln	-		Bln	-		Bln	-	6	Bln	-	0,0	0,0	18	Bln	-	25,0	0,0	Kec Telukbetung Barat	
		7 01 01 2 08	**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	72	bln	3.370.248.263,39	12	Bln	-	12	Bln	608.730.000,00	3	Bln	57.000.000,00	3	Bln	136.020.000,00		Bln	-		Bln		6	Bln	193.020.000	0,3	0,1			193.020.000				
		7 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	72	bln	139.245.907,50	12	Bln		12	Bln	24.000.000,00	3	Bln	-	3	Bln	-		Bln	-		Bln	-	6	Bln	-	0,0	0,0	18	Bln	-	25,0	0,0	Kec Telukbetung Barat	
		7 01 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	72	bln	3.231.002.355,89	12	Bln		12	Bln	584.730.000,00	3	Bln	57.000.000,00	3	Bln	136.020.000,00		Bln	-		Bln	-	6	Bln	193.020.000	0,3	0,1	18	Bln	193.020.000	25,0	6,0	Kec Telukbetung Barat	
		7 01 01 2 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	72	bln	1.077.176.065,49	12	Bln	-	12	Bln	177.658.544,00	3	Bln	-	3	Bln	23.243.850,00		Bln	-		Bln	-	6	Bln	23.243.850	0,1	13,1	18	Bln	23.243.850	25,0	2,2	Kec Telukbetung Barat	
		7 01 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	72	bln	206.141.962,23	12	Bln		12	Bln	35.530.000,00	3	Bln	-	3	Bln	-		Bln	-		Bln	-	6	Bln	-	0,0	0,0	18	Bln	-	25,0	0,0	Kec Telukbetung Barat	
		7 01 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	72	bln	688.974.383,67	12	Bln		12	Bln	125.035.000,00	3	Bln		3	Bln	23.243.850,00		Bln			Bln	-	6	Bln	23.243.850	0,2	18,6	18	Bln	23.243.850	25,0	3,4	Kec Telukbetung Barat	
		7 01 01 2 09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	72	bln	58.098.144,65	12	Bln		12	Bln	-	3	Bln	-	3	Bln	-		Bln	-		Bln	-	6	Bln	-	#DIV/0!	#DIV/0!	18	Bln	-	25,0	0,0	Kec Telukbetung Barat	
		7 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	72	bln	57.653.999,94	12	Bln		12	Bln	10.966.000,00	3	Bln		3	Bln	-		Bln	-		Bln	-	6	Bln	-	0,0	0,0	18	Bln	-	25,0	0,0	Kec Telukbetung Barat	
		7 01 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	72	bln	33.153.787,50	12	Bln		12	Bln	6.127.544,00	3	Bln	-	3	Bln	-		Bln	-		Bln	-	6	Bln	-	0,0	0,0	18	Bln	-	25,0	0,0	Kec Telukbetung Barat	
		7 01 01 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	72	bln	33.153.787,50	12	Bln		12	Bln	-	3	Bln		3	Bln	-		Bln	-		Bln	-	6	Bln	-	#DIV/0!	#DIV/0!	18	Bln	-	25,0	0,0	Kec Telukbetung Barat	
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta Toleransi umat beragama	7 01 02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	100	%	20.031.858.233,82	50	%	-	100	%	2.387.130.000,00	20	%	577.500.000	30	%	581.250.000,00			-				50	%	1.158.750.000,00	0,5	0,0	60	%	1.158.750.000	60,0	5,8		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan Tahun n-2 (2022, 2023 ,2024, 2025)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun n-1 (2022)			Realisasi Kinerja Tahun 2022 pada triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran OPD pada Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran Renja OPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Akhir Periode Pelaksanaan Renja Pada Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2020		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
1	2	3		4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7*100%		14= 6+12			15=14/5*100%		16	17
		7 01 02 2 01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**72**	**Bln**	**13.917.164.301,60**	**12**	**Bln**	-	**12**	**Bln**	**26.255.000,00**	**3**	**Bln**	-	**3**	**Bln**	-		**Bln**	-		**Bln**	-	**6**	**Bln**	-	0,0	**0,0**	**18**	**Bln**	-	**25,0**	**0,0**	**Kec Telukbetung Barat**	
		7 01 02 2 01 01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Presentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	72	Bln	152.329.220,89	12			12	Bln	26.255.000,00														-										
		7 01 02 2 01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD, Tersedianya Laporan Keuangan, Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Kinerja OPD	72	Bln	13.764.835.080,71	12			12	Bln	-														-										
		7 01 02 2 02	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100**	**%**	**6.114.693.932,22**	**12**	**Bln**	-	**100**	**%**	**2.360.875.000,00**	**10**	**%**	**577.500.000**	**15**	**%**	**581.250.000,00**	**15**	**%**	-				**35**	**%**	**1.158.750.000**	**0,5**	**0,0**	**60**	**%**	**1.158.750.000,00**	60,0	19,0		
		7 01 02 2 02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Presentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	72	Bln	6.114.693.932,22	12	Bln		12	Bln	2.360.875.000,00	3	Bln	577.500.000	3	Bln	581.250.000,00	1	Bln			Bln	-	7	Bln	1.158.750.000	0,5	0,2	19	Bln	1.158.750.000,00	26,389	19,0	**Kec Telukbetung Barat**	
		7 01 03	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**100**	**%**	**5.504.453.044,95**	**50**	**%**	-	**100**	**%**	**507.335.460,00**	**10**	**%**	-	**10**	**%**	**4.687.500**			-			-	**20**	**%**	**4.687.500**	**0,0**	**0,0**	**60**		**4.687.500**	60,0	0,1		
		7 01 03 2 01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**72**	**Bln**	**5.504.453.044,95**	**12**	**Bln**	-	**12**	**Bln**	**507.335.460,00**	**3**	**Bln**	-	**3**	**Bln**	**4.687.500**		**Bln**	-		**Bln**	-	**6**	**Bln**	**4.687.500**	0,0	0,0	**18**	**Bln**	**4.687.500**	**25,0**	**0,1**	**Kec Telukbetung Barat**	
		7 01 03 2 01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peresentase pkk,lpm ,mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	72	Bln	5.504.453.044,95	12	Bln		12	Bln	507.335.460,00	3	Bln	-	3	Bln	4.687.500		Bln	-		Bln	-	6	Bln	4.687.500	0,0	0,0	18	Bln	4.687.500	25,0	0,1	**Kec Telukbetung Barat**	
		7 01 04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	**100**	**%**	**10.118.768.021,51**	**50**	**%**	-	**100**	**%**	**1.644.356.530**	**10**	**%**	**411.000.000**	**10**	**%**	**411.000.000,00**		**%**	-		**%**		**20**	**%**	**822.000.000**	**0,5**	**0,0**	**60**		**822.000.000**				
		7 01 04 2 01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**72**	**Bln**	**10.118.768.021,51**	**12**	**Bln**	-	**12**	**Bln**	**1.644.356.530**	**3**	**Bln**	**411.000.000**	**3**	**Bln**	**411.000.000,00**		**Bln**	-		**Bln**	-	**6**	**Bln**	**822.000.000**	0,5	0,2	**18**	**Bln**	**822.000.000**	**25,0**	**8,1**	**Kec Telukbetung Barat**	
		7 01 04 2 01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Presenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	72	Bln	10.118.768.021,51	12	Bln		12	Bln	1.644.356.530,00	3	Bln	411.000.000	3	Bln	411.000.000,00		Bln			Bln	-	6	Bln	822.000.000	0,5	0,2	18	Bln	822.000.000	25,0	8,1	**Kec Telukbetung Barat**	
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Persentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	72	bln	131.175.000,00	12	Bln		12	Bln	42.000.000,00	12	Bln		12	Bln		12	Bln	-	12	Bln		12	Bln		0,0		24	Bln		33,3			
			Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100**	**%**	**290.095.640,63**			-	**100**	**%**	**9.998.825,00**	**20**	**%**	-	**30**	**%**	-		**%**	-		**%**	-	**50**	**%**	-	**0,0**	**0,0**			-	0,0	0,0		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**72**	**Bln**	**290.095.640,63**	**12**	**Bln**	-	**0**	**Bln**	**9.998.825,00**	**3**	**Bln**	-	**3**	**Bln**	-		**Bln**	-		**Bln**	-	**6**	**Bln**	-	0,0	0,0	**18**	**Bln**	-	**25,0**	**0,0**	**Kec Telukbetung Barat**	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	72	Bln	124.326.703,13	12	Bln		0	Bln	4.998.986,00	3	Bln	-	3	Bln	-		Bln	-		Bln	-	6	Bln	-	0,0	0,0	18	Bln	-	25,0	0,0	**Kec Telukbetung Barat**	
			Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Bimtek dan Sosalisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional oleh Babinsa/Babinkamtibmas	72	Bln	165.768.937,50	12	Bln		0	Bln	4.999.839,00	3	Bln	-	3	Bln	-		Bln	-		Bln	-	6	Bln	-	0,0	0,0	18	Bln	-	25,0	0,0	**Kec Telukbetung Barat**	
			Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**100**	**%**	**290.095.640,63**	**50**	**%**	-	**0**	**Bln**	**9.977.765,00**	**3**	**Bln**	-	**3**	**Bln**	-		**Bln**	-		**Bln**	-	**6**	**Bln**	-	**0,0**	**0,0**	**56**	**Bln**	-	**56,0**	**0,0**	**Kec Telukbetung Barat**	
			Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**72**	**Bln**	**290.095.640,63**	**12**	**Bln**	-	**0**	**Bln**	**9.977.765,00**	**3**	**Bln**	-	**3**	**Bln**	-		**Bln**	-		**Bln**	-	**6**	**Bln**	-	0,0	0,0	**18**	**Bln**	-	**25,0**	**0,0**	**Kec Telukbetung Barat**	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	72	Bln	165.768.937,50	12	Bln		0	Bln	4.979.112,00	3	Bln	-	3	Bln	-		Bln	-		Bln	-	6	Bln	-	0,0	0,0	18	Bln	-	25,0	0,0	**Kec Telukbetung Barat**	
			fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	72	Bln	124.326.703,13	12	Bln		0	Bln	4.998.653,00	3	Bln	-	3	Bln	-		Bln	-		Bln	-	6	Bln	-	0,0	0,0	18	Bln	-	25,0	0,0	**Kec Telukbetung Barat**	

Bandar Lampung, Juli 2022

CAMAT TELUKBETUNG BARAT

IDHAM BASYAR SYAHPUTRA, SH
NIP. 19710723 20003 1 004

TABEL 5.1
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									1.414.053.711.342,73	1.614.767.345.575,00	1.828.505.325.502,00	
1	01				PENDIDIKAN									649.023.517.494,00	718.176.019.842,00	691.976.919.842,00	
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									649.023.517.494,00	718.176.019.842,00	691.976.919.842,00	
1	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	Persen	98,00	98,00	98,00	466.160.756.561,00	481.651.254.817,00	438.952.154.817,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	Persen	100,00	100,00	100,00	90.000.000,00	89.999.936,00	89.999.936,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3	3	30.000.000,00	30.000.150,00	30.000.150,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen RKA Dinas Pendidikan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	30.000.000,00	29.999.845,00	29.999.845,00	
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	3	3	3	30.000.000,00	29.999.941,00	29.999.941,00	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	Persen	100,00	100,00	100,00	462.213.883.494,00	477.163.473.250,00	434.464.373.250,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	3.377	3.377	3.377	461.628.433.494,00	476.578.023.250,00	433.878.923.250,00	
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	585.450.000,00	585.450.000,00	585.450.000,00	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	Persen	98,00	98,00	98,00	287.724.317,00	446.751.631,00	446.751.631,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.000.000,00	10.999.043,00	10.999.043,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	45.762.087,00	158.000.000,00	158.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.000.000,00	10.991.467,00	10.991.467,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	28.712.230,00	51.669.000,00	51.669.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	153.842.121,00	153.842.121,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**95.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	01	2.07	0006	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	15	15	15	95.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**2.260.000.000,00**	**2.484.000.000,00**	**2.484.000.000,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.160.000.000,00	2.184.000.000,00	2.184.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.244.148.750,00**	**1.267.030.000,00**	**1.267.030.000,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	4	4	4	170.000.000,00	44.930.000,00	44.930.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	60.000.000,00	210.280.000,00	210.280.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	Paket	4	4	4	11.550.000,00	11.820.000,00	11.820.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	Paket	1	1	1	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	-	Paket	Paket	1	-	-	2.598.750,00	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**			**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**APK PAUD**	**APK PAUD**	**Angka**	**Angka**	**72,27**	**72,27**	**72,27**	**177.074.703.433,00**	**229.536.707.924,00**	**246.036.707.924,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
							APK SD	**APK SD**	**Angka**	**Angka**	**126,37**	**126,37**	**126,37**				
							APM SD	**APM SD**	**Angka**	**Angka**	**99,63**	**99,63**	**99,63**				
							APK SMP	**APK SMP**	**Angka**	**Angka**	**112,74**	**112,74**	**112,74**				
							APM SMP	**APM SMP**	**Angka**	**Angka**	**88,49**	**88,49**	**88,49**				
							Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini	**Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini**	**Persen**	**Persen**	**99,72**	**99,72**	**99,72**				
							Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar	**Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar**	**Persen**	**Persen**	**98,96**	**98,96**	**98,96**				
							Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan	**Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Meningkatkan APK SD**	**Meningkatkan APK SD**	**Angka**	**Angka**	**126,37**	**126,37**	**126,37**	**86.377.284.000,00**	**99.138.704.538,00**	**100.549.685.561,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
							Meningkatkan APM SD	**Meningkatkan APM SD**	**Angka**	**Angka**	**99,63**	**99,63**	**99,63**				
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	Paket	5	5	5	500.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	Peserta Didik	360	360	360	300.000.000,00	298.658.559,00	298.658.559,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	Orang	100	100	100	125.000.000,00	1.342.299.812,00	1.342.299.812,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	168	168	168	150.000.000,00	147.173.944,00	1.647.173.944,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan dana Bos Sekolah Dasar	Pengelolaan dana Bos Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	182	182	182	76.770.900.000,00	77.774.499.821,00	77.774.499.821,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Siswa	Siswa	13.275	13.275	13.275	2.500.000.000,00	8.674.999.856,00	8.674.999.856,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Ruang	17	17	17	6.031.384.000,00	9.651.072.546,00	9.562.053.569,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pendidikan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama**	**Pendidikan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama**	**Meningkatkan APK SMP**	**Meningkatkan APK SMP**	**Angka**	**Angka**	**113**	**113**	**113**	**70.606.319.433,00**	**109.647.965.860,00**	**119.736.984.837,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
							Meningkatkan APM SMP	**Meningkatkan APM SMP**	**Angka**	**Angka**	**88**	**88**	**88**				
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	Unit	23	23	23	271.589.683,00	3.946.849.000,00	3.772.373.327,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	Paket	5	5	5	1.500.000.000,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	Unit	3	3	3	2.101.863.000,00	-	263.494.650,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	Peserta Didik	243	243	243	400.000.000,00	400.022.000,00	400.022.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	Orang	Orang	200	200	200	125.000.000,00	122.299.812,00	122.299.812,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	45	45	45	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	138	138	138	50.441.100.000,00	49.338.499.821	49.338.499.821,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0058	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	Peserta Didik	99.339	99.339	99.339	8.540.166.750,00	8.521.579.783,00	18.521.579.783,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0059	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	Ruang	9	9	9	4.526.600.000,00	38.229.245.444,00	38.229.245.444,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket	Paket	7.250	7.250	7.250	2.500.000.000,00	7.039.470.000,00	7.039.470.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Meningkatkan APK PAUD**	**Meningkatkan APK PAUD**	**Angka**	**Angka**	**72**	**72**	**72**	**13.757.000.000,00**	**13.438.537.526,00**	**13.438.537.526,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	02	2.03	0012	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	-	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	-	Paket	0	1	1	0	264.942.000,00	264.942.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Paud	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Paud	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	5	5	5	350.000.000,00	349.999.975,00	349.999.975,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan dana BOP PAUD	Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	600	600	600	13.407.000.000,00	12.823.595.551,00	12.823.595.551,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Disalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal**	**Disalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal**	**Lembaga Non Formal**	**Lembaga Non Formal**	**21**	**21**	**21**	**6.334.100.000,00**	**7.311.500.000,00**	**12.311.500.000,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan dana Bop Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan dana Bop Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	60	60	60	5.234.100.000,00	6.211.500.000	6.211.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	Peserta Didik	14.165	14.165	14.165	1.100.000.000,00	1.100.000.000	6.100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**04**			**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Kualifikasi Guru S1/D.IV**	**Kualifikasi Guru S1/D.IV**	**Persen**	**Persen**	**88,06**	**88,06**	**88,06**	**5.788.057.500,00**	**6.988.057.101,00**	**6.988.057.101,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Dilaksanakannya Pengelolaan Manajemen Pendataan Sertifikasi**	**Dilaksanakannya Pengelolaan Manajemen Pendataan Sertifikasi**	**Bulan**	**Bulan**	**88**	**88**	**88**	**5.788.057.500,00**	**6.988.057.101,00**	**6.988.057.101,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Buku	Buku	1	1	1	200.000.000,00	1.399.999.916,00	1.399.999.916,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan*	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan*	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	Laporan	5	5	5	5.588.057.500,00	5.588.057.185,00	5.588.057.185,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**02**				**KESEHATAN**									**341.959.735.536,73**	**430.229.951.160,00**	**482.515.065.874,00**	
					DINAS KESEHATAN									**256.711.967.599,73**	**355.131.167.097,00**	**407.512.385.123,00**	
1	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Kesehatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Kesehatan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**166.492.518.822**	**212.928.141.709**	**225.755.280.759**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**25.000.000,00**	**24.999.748,00**	**24.999.748,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)		25.000.000,00	24.999.748,00	24.999.748,00	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**77.754.723.222,00**	**112.110.092.619,00**	**110.810.092.619,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	1.194	1.194		77.538.723.222	111.907.198.719	110.607.198.719	
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		216.000.000	202.893.900	202.893.900	
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	10	10		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**282.560.763,00**	**437.555.518,00**	**437.555.518,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		20.000.000	29.994.779	29.994.779	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		50.000.000	75.000.000	75.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		12.060.763	17.060.763	17.060.763	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0004	Peneyediaan bahan logistik kantor	Peneyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		30.000.000	50.000.000	50.000.000	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		50.000.000	77.499.976	77.499.976	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	10	10		7.500.000	10.000.000	10.000.000	
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	12	12		8.000.000	28.000.000	28.000.000	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	12	12		75.000.000	150.000.000	150.000.000	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**848.018.926,73**	**676.018.927,00**	**676.018.927,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		450.000.000	550.000.000	550.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit		1			220.000.000			Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit		1			100.000.000			Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		78.018.927	126.018.927	126.018.927	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**20.169.500.000,00**	**20.185.000.000,00**	**20.262.100.000,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		170.000.000	186.000.000	204.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		19.999.500.000	19.999.000.000	20.058.100.000	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**		**695.869.910,00**	**747.628.897,00**	**862.708.147,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1		30.000.000	47.430.000	47.430.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	8 unit mobil. 38 unit motor	8 unit mobil. 38 unit motor		455.869.910	478.557.552	497.336.802	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Direlihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Direlihara	Unit	Unit	1	1		10.000.000	20.000.000	20.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1		150.000.000	151.753.745	248.053.745	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	Unit	1	1		50.000.000	49.887.600	49.887.600	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan pelayanan BLUD**	**Peningkatan pelayanan BLUD**	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**	**Unit**	**Unit**	**31**	**31**		**66.696.846.000,00**	**78.696.846.000,00**	**92.631.805.800,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	Unit	31	31		66.696.846.000	78.696.846.000	92.631.805.800	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup**	**Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup**	**Angka**	**Angka**	**2**	**2**		**88.369.448.778,00**	**139.042.453.855,00**	**178.479.700.831,00**	**Dinas Kesehatan**
							Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	**Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup**	**Kasus**	**Kasus**	**10**	**10**					
							Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	**Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)**	**Persen**	**Persen**	**6,30**	**6,30**					
							Tingkat Prevalensi Tubercolosis per 100.000 Penduduk	**Tingkat Prevalensi Tubercolosis per 100.000 Penduduk**	**Kasus**	**Kasus**	**384**	**384**					
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persen**	**Persen**	**82,00**	**82,00**		**13.833.613.000,00**	**18.465.841.795,00**	**19.118.313.622,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	02	2.01	0007		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Unit		1			179.535.500	1.333.113.500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		Unit		3			6.000.000.000			Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		Unit		1			150.000.000			Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		3.500.000.000	8.279.685.000	8.279.685.000	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Vaksin	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang	Paket	Paket	1	10		3.000.000.000	9.666.835.659	9.165.729.486	
1	02	02	2.01	0026	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Jumlah Obat, vaksin, Bahan Medis Habis Paka (BMHP Makanan dan Minuman serta	Paket	Paket	1	10		1.000.000.000	159.999.436	159.999.436	
1	02	02	2.01	0020	Pemelihraan rutin dan berkala alat kesehatan/Alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan	Pemelihraan rutin dan berkala alat kesehatan/Alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/Ala penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/Ala penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan	Unit	Unit	1	1		183.613.000	179.786.200	179.786.200	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persen**	**Persen**	**82,00**	**82,00**		**74.385.835.778,00**	**120.284.612.895,00**	**159.069.388.044,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	19592	19592		500.000.000	1.038.870.000	1.038.870.000	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	18702	18702		300.000.000	991.300.000	991.300.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	Orang	17.811	17.811		250.000.000	372.000.000	372.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	86.512	86.512		250.000.000	142.499.863	142.499.863	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	155442	155442		300.000.000	1.064.500.000	1.064.500.000	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	754465	754465		350.000.000	149.999.746	183.279.746	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	92994	92994		250.000.000	150.000.000	150.000.000	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	200001	200001		300.000.000	99.999.887	99.999.887	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	18644	18644		300.000.000	1.812.506.060	1.812.506.060	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Orang	1882	1882		250.000.000	149.999.584	149.999.584	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Orang	23474	23474		500.000.000	3.502.760.000	3.502.760.000	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Orang	28060	28060		300.000.000	407.300.000	407.300.000	
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana danatau Berpotensi Bencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana danatau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	Dokumen	1	1		750.000.000	952.286.000	963.018.500	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Dokumen	1	1		500.000.000	7.966.517.000	7.966.517.000	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Dokumen	1	1		200.000.000	99.999.707	99.999.707	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	Dokumen	1	1		200.000.000	908.475.000	908.475.000	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Dokumen	1	1		500.000.000	823.644.600	823.644.600	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Dokumen	1	1		200.000.000	1.552.379.097	1.552.379.097	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	Orang	1.851	1.851		200.000.000	99.999.957	132.639.957	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	Orang	1.851	1.851		200.000.000	40.500.000	68.660.000	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	Dokumen	1	1		200.000.000	7.104.464.036	7.774.306.209	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Dokumen	1	1		32.369.821.778	49.310.091.378	87.023.349.604	
1	02	02	2.02	0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke LaboratoriumRujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusika		Paket		1			90.200.000	90.200.000	
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	Dokumen	1	1		200.000.000	99.999.835	99.999.835	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Dokumen	1	1		18.242.514.000	6.011.467.000	6.011.467.000	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	Dokumen	1	1		14.573.500.000	31.075.532.900	31.091.937.650	
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	Unit	12	12		1.150.000.000	74.998.419	91.018.419	
1	02	02	2.02	0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian		Laporan		1			116.900.000	116.900.000	
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	Dokumen	1	1		300.000.000	124.999.802	308.797.302	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah Orang dengan tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	orang	80	80		250.000.000	384.300.000	464.940.000	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan HIV (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	orang	70	70		250.000.000	195.700.000	195.700.000	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah Orang dmenderita malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang dmenderita malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	orang	30	30		250.000.000	84.913.024	84.913.024	
1	02	02	2.02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		Dokumen		1			951.500.000	951.500.000	
1	02	02	2.02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		Dokumen		1			2.334.010.000	2.334.010.000	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**150.000.000,00**	**291.999.165,00**	**291.999.165,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	02	2.03	0001	Pengelolaan Data dan informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Dokumen		1			100.000.000		192.000.000	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	Dokumen	1	1		50.000.000	291.999.165	99.999.165	
1	**02**	**03**			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase SDM Kesehatan dengan Kompetensi sesuai Standar**	**Persentase SDM Kesehatan dengan Kompetensi sesuai Standar**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**450.000.000,00**	**1.824.223.761,00**	**1.847.623.761,00**	**Dinas Kesehatan**
									Persen	**Persen**							
							Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar	**Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar**	**Persen**	**Persen**	**60,00**	**60,00**					
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**persen**	**persen**	**82,00**	**82,00**		**300.000.000,00**	**313.354.820,00**	**336.754.820,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Orang	Orang	50	50		150.000.000	99.999.820	99.999.820	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	dokumen	1	1		150.000.000	213.355.000	236.755.000	
1	02	03	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	persen	persen	**82**	**82**		**150.000.000,00**	**1.510.868.941,00**	**1.510.868.941,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan	orang	orang	200	200		150.000.000	1.510.868.941	1.510.868.941	
1	**02**	**04**			**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar**	**Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**		**500.000.000,00**	**333.331.000,00**	**351.763.000,00**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase pengelolaan apotek,toko obat,toko alat kedehatan, optik dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar**	**Persentase pengelolaan apotek,toko obat,toko alat kedehatan, optik dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar**	**persen**	**persen**	**100**	**100**		**150.000.000,00**	**63.730.000,00**	**63.730.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.01**	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat	**dokumen**	**dokumen**	**1**	**1**		150.000.000	63.730.000	63.730.000	
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase industri rumah tangga sesuai standar**	**Persentase industri rumah tangga sesuai standar**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**200.000.000,00**	**85.387.000,00**	**103.819.000,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	Dokumen	1	1		200.000.000	85.387.000	103.819.000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindaak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga**	**Pemeriksaan dan Tindaak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar**	**Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**150.000.000,00**	**184.214.000,00**	**184.214.000,00**	**Dinas Kesehatan**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka	Unit	Unit	50	50		150.000.000	184.214.000	184.214.000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Persentase Masyarakat ber PHBS**	**Persentase Masyarakat ber PHBS**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**75,00**		**900.000.000,00**	**1.003.016.772,00**	**1.078.016.772,00**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persen**	**persen**	**74,00**	**74,00**		**500.000.000,00**	**501.499.918,00**	**576.499.918,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan		Dokumen		1		500.000.000,00	501.499.918	576.499.918	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	**2.02**			**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**		**persen**		**82,00**		**250.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Dokumen		1		250.000.000	100.000.000	100.000.000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	**2.03**			**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**		**persen**		**82,00**		**150.000.000,00**	**401.516.854,00**	**401.516.854,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan		Dokumen		1		150.000.000	401.516.854	401.516.854	Dinas Kesehatan
					RSUD A. DADI TJOKRODIPO									**85.247.767.937,00**	**75.098.784.063,00**	**75.002.680.751,00**	
1	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**22.818.896.437,00**	**26.474.351.535,00**	**26.378.248.223,00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**6,00**	**6,00**		**56.895.300,00**	**6.007.272,00**	**6.007.272,00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	01.	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Laporan	6	6		56.895.300,00	6.007.272,00	6.007.272,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**24,00**	**24,00**		**15.046.031.137,00**	**19.604.344.263,00**	**19.508.240.951,00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	241	241		15.008.831.137,00	19.530.904.263,00	19.434.800.951,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12		37.200.000,00	73.440.000,00	73.440.000,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Persen**		**100.00**			**911.970.000,00**			**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang		Paket		12			911.970.000,00			RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**		**6.804.000.000,00**	**6.864.000.000,00**	**6.864.000.000,00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		924.000.000,00	984.000.000,00	984.000.000,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		5.880.000.000,00	5.880.000.000,00	5.880.000.000,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	**02**	**02**	**2**		**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**62.428.871.500,00**	**48.624.432.528,00**	**48.624.432.528,00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
							Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk	**Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk**	**Perbandingan**	**Perbandingan**	**1:6042**	**1:6042**					
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengadaan Alat Kesehatan E-Catalog dan Obat Bagi Pasien**	**Pengadaan Alat Kesehatan E-Catalog dan Obat Bagi Pasien**	**Paket**	**Paket**	**2**	**2**		**29.290.065.640,00**	**11.957.695.728,00**	**11.957.695.728,00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	Unit	1	1		26.312.200.000,00	11.641.103.000,00	11.641.103.000,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Vaksin	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		2.977.865.640,00	316.592.728,00	316.592.728,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tk.Daerah Kab/Kota**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tk.Daerah Kab/Kota**	**Sarana dan Prasarana Pelayanan RSUD yang Tersedia**	**Sarana dan Prasarana Pelayanan RSUD yang Tersedia**	**Bulan**	**Bulan**	**12**	**12**		**33.138.805.860,00**	**36.666.736.800,00**	**36.666.736.800,00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Disediakan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Disediakan	Dokumen	Dokumen	12	12		33.138.805.860,00	36.666.736.800,00	36.666.736.800,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	**03**				**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									**341.916.611.613,00**	**351.223.166.874,00**	**532.027.982.117,00**	
					DINAS PEKERJAAN UMUM									**339.614.451.613,00**	**348.996.828.249,00**	**529.722.116.402,00**	
1	**03**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**87.381.468.736,00**	**89.359.396.252,00**	**105.504.053.422,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**190.000.000,00**	**168.000.000,00**	**265.545.701,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	4 Laporan (1 Laporan Evaluasi Renja, 1 Laporan Evaluasi LPJ, 1 Laporan LKIP, Laporan Realisasi Fisik dan	4 Laporan (1 Laporan Evaluasi Renja, 1 Laporan Evaluasi LPJ, 1 Laporan LKIP, Laporan Realisasi Fisik dan	4 Laporan (1 Laporan Evaluasi Renja, 1 Laporan Evaluasi LPJ, 1 Laporan LKIP, Laporan Realisasi Fisik dan	190.000.000,00	168.000.000,00	265.545.701,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.836.211.613,00**	**8.815.275.249,00**	**8.165.275.249,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	Orang / Bulan	90	90	90	6.518.451.613,00	8.240.835.249,00	7.590.835.249,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	251.760.000,00	526.440.000,00	526.440.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	66.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000,00**	**277.882.464,00**	**123.303.664,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	Orang	10	10	10	50.000.000,00	277.882.464,00	123.303.664,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**698.301.773,00**	**684.490.400,00**	**737.833.115,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	273.763.806,00	348.333.973,00	353.227.065,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	150.137.967,00	58.691.892,00	78.691.892,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	56.300.000,00	59.364.535,00	59.364.535,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	12	12	12	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	150.000.000,00	150.000.000,00	178.449.623,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**20.000.000,00**	**42.226.275,00**	**42.226.275,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	25	25	25	20.000.000,00	42.226.275,00	42.226.275,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**77.670.350.000,00**	**77.635.600.000,00**	**94.635.600.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	74.020.000.000,00	74.020.000.000,00	91.020.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disebikan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disebikan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.650.350.000,00	3.615.600.000,00	3.615.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.916.605.350,00**	**1.735.921.864,00**	**1.534.269.418,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	2	2	2	67.100.000,00	42.430.000,00	42.430.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	27	27	27	1.811.005.350,00	1.639.011.864,00	1.437.359.418,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	38.500.000,00	54.480.000,00	54.480.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**02**			**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenagan Kota**	**Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenagan Kota**	**Persen**	**Persen**	**8,576**	**8,576**	**8,576**	**8.200.000.000,00**	**5.808.000.000,00**	**6.923.622.100,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenagan Kab/Kota**	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenagan Kab/Kota**	**Ha**	**Ha**	**17,15**	**17,15**	**17,15**	**8.200.000.000,00**	**5.808.000.000,00**	**6.923.622.100,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	02	2.01	0014	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	Unit	3	4	4	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km	Km	15	15	15	8.000.000.000,00	5.608.000.000,00	6.723.622.100,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**03**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum**	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum**	**Persen**	**Persen**	**46,82**	**46,82**	**46,82**	**5.000.000.000,00**	**20.008.000.000,00**	**20.727.470.610,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
							Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan	**Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan**	**Persen**	**Persen**	**63,80**	**63,80**	**63,80**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penduduk berakses air minum**	**Persentase penduduk berakses air minum**	**Persen**	**Persen**	**46,32**	**46,32**	**46,32**	**5.000.000.000,00**	**20.008.000.000,00**	**20.727.470.610,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
							Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	**Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan**	**Persen**	**Persen**	**63,30**	**63,30**	**63,30**				
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	liter/ detik	liter/ detik	630,00	1.157,10	1.157,10	5.000.000.000,00	20.008.000.000,00	20.727.470.610,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**05**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**	**Persen**	**Persen**	**62,00**	**62,00**	**62,00**	**2.700.000.000,00**	**668.000.000,00**	**2.231.935.254,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase rumah Tinggal Bersanitasi**	**Persentase rumah Tinggal Bersanitasi**	**Persen**	**Persen**	**61,50**	**61,50**	**61,50**	**2.700.000.000,00**	**668.000.000,00**	**2.231.935.254,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Rumah Tangga	M3/hari	250	200	200	2.500.000.000,00	668.000.000,00	2.231.935.254,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	05	2.01	0016	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT		Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	-	M3/hari	-	2	-	-	200.000.000,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**06**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**Persen**	**Persen**	**69,47**	**69,47**	**69,47**	**15.500.000.000,00**	**16.435.047.835,00**	**21.140.443.659,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**Persen**	**Persen**	**68,47**	**68,47**	**68,47**	**15.500.000.000,00**	**16.435.047.835,00**	**21.140.443.659,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	M	Sistem Drainase Perkotaan	25.772,5	3	3	10.000.000.000,00	9.514.974.835,00	13.385.751.209,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	M	Sistem Drainase Perkotaan	1.990	3	3	5.500.000.000,00	6.920.073.000,00	7.754.692.450,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**07**			**Program Pengembangan Permukiman**	-	**Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantab**	-	**Persen**	-	**87,09**	-	-	**77.283.249.313,00**	-	-	**Dinas Pekerjaan Umum**
							Rasio Jumlah Lampu PJU terhadap Panjang Jalan Kota	-	**Angka**	-	**22,20**	-	-				
1	**03**	**07**	**2.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	-	**Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi mantab**	-	**Persen**	-	**86,59**	-	-	**77.283.249.313,00**	-	-	**Dinas Pekerjaan Umum**
							Rasio jumlah lampu PJU terhadap panjang jalan kota	-	**Titik Lampu /Km**	-	**21,70**	-	-				
1	03	07	2.01	0001	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	Sistem Jaringan	-	7	-	-	77.283.249.313,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**08**			**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Persentase Pemenuhan Gedung Kantor Pemerintah**	**Persentase Pemenuhan Gedung Kantor Pemerintah**	**Persen**	**Persen**	**79,00**	**79,00**	**79,00**	**99.346.923.766,00**	**68.952.746.684,00**	**141.295.337.394,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri**	**Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri**	**Persen**	**Persen**	**79,00**	**79,00**	**79,00**	**99.346.923.766,00**	**68.952.746.684,00**	**141.295.337.394,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	08	2.01	0021	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	60	60	60	99.346.923.766,00	68.952.746.684,00	141.295.337.394,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**10**			**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap**	**Persen**	**Persen**	**89,64**	**89,64**	**86,81**	**42.702.809.798,00**	**146.265.637.478,00**	**230.793.824.963,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
								Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantap	-	**Persen**	-	**87,09**	**87,09**				
							Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	**Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk**	**Angka**	**Angka**	**1,46**	**1,46**	**1,46**				
								Rasio Jumlah Lampu PJU terhadap Panjang Jalan Kota	-	**Angka**	-	**22,20**	**22,20**				
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**	**Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**42.702.809.798,00**	**146.265.637.478,00**	**230.793.824.963,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
								Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantap	-	**Persen**		**87,09**	**87,09**				
							Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	**Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk**	**Angka**	**Angka**	**1,47**	**1,46**	**1,46**				
								Rasio Jumlah Lampu PJU terhadap Panjang Jalan Kota	-	**Angka**		**22,20**	**22,20**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	KM	20,81	20,81	20,81	11.639.344.308,00	115.639.435.514,00	179.041.174.679,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	KM	13,45	15,45	15,45	15.000.000.000,00	15.500.000.000,00	22.210.885.150,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Jumlah Jembatan yang Dibangun	M	Jembatan	116,98	5,00	5,00	13.063.465.490,00	12.626.201.964,00	24.712.215.614,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	M	Jembatan	3.021,98	5,00	5,00	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	4.829.549.520,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**11**			**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi**	**Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi**	**Angka**	**Angka**	**55,00**	**55,00**	**55,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.105.429.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
							Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi	**Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi**	**Angka**	**Persen**	**45,00**	**45,00**	**45,00**				
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Rasio tenaga operator/teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Rasio tenaga operator/teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Angka**	**Angka**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**777.000.000,00**	**650.000.000,00**	**583.897.625,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
							Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi	**Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi**	**Persen**	**Persen**	**35,00**	**35,00**	**35,00**				
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	Orang	50,00	55,00	55,00	777.000.000,00	650.000.000,00	583.897.625,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**11**	**2.02**		**-**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	-	**Ketersediaanya Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kota Bandar Lampung**	-		**-**	**100,00**	**100,00**	**-**	**250.000.000,00**	**108.412.897,00**	
1	03	11	2.02	0012	-	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	-	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	-	Perangkat Pendukung	-	1,00	1,00	-	200.000.000,00	78.412.897,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	11	2.02	0014	-	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	-	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	Orang	-	2,00	2,00	-	50.000.000,00	30.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Rasio tenaga operator/teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Rasio tenaga operator/teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Orang**	**Orang**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**723.000.000,00**	**600.000.000,00**	**413.118.478,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
							Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi	**Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi**	**Persen**	**Persen**	**35,00**	**35,00**	**35,00**				
1	03	11	2.04	0006	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Orang	Lembaga	50	55	55	350.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Laporan	Badan Usaha	5	5	5	373.000.000,00	300.000.000,00	213.118.478,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**				**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**									**2.302.160.000,00**	**2.226.338.625,00**	**2.305.835.715,00**	
1	**03**	**08**			**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Persentase SLF yang Diterbitkan**	**Persentase SLF yang Diterbitkan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**442.160.000,00**	**440.213.312,00**	**440.213.312,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
							Persentase KRK yang Terbit	**Persentase KRK yang Terbit**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**		**Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan**		**Persen**		**100,00**			**442.160.000,00**	**440.213.312,00**	**440.213.312,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	03	08	2.01	0001	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Dokumen		20			442.160.000,00			
				0023		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim		Dokumen		25	25		440.213.312,00	440.213.312	
1	**03**	**09**			**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda**	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**160.000.000,00**	**151.000.022,00**	**151.000.022,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda**		**Persen**		**100,00**			**160.000.000,00**	**151.000.022,00**	**151.000.022,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	03	09	2.01	0006	Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Dokumen		**1,00**			160.000.000,00			
1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan		Dokumen		1	1		151.000.022,00	151.000.022	
1	**03**	**12**			**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**	**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**	**Persen**	**Persen**	**55,65**	**55,65**	**55,65**	**1.700.000.000,00**	**1.635.125.291,00**	**1.714.622.381,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
							Luasan RTH Publik sebesar 20Persen dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan	**Luasan RTH Publik sebesar 20Persen dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan**	**Persen**	**Persen**	**4,70**	**4,70**	**4,70**			**79.497.090,00**	
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**		**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**		**Persen**		**55,15**			**1.450.000.000,00**	**1.436.763.390,00**	**1.516.260.480,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
							Luasan RTH Publik sebesar 20Persen dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan		**Persen**		**4,80**						
1	03	12	2.01	0001	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		Dokumen		1			1.400.000.000,00			
1	03	12	2.01	0006		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kot	Dokumen			1			1.327.536.856,00	1.327.536.856	
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		Dokumen		1						
1	03	12	2.01	0003		Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen			1	1	50.000.000,00	109.226.534,00	188.723.624	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah**		**Dokumen**		**12**			**250.000.000,00**	**198.361.901,00**	**198.361.901,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	03	12	2.03	0002	Sistem Informasi Penataan Ruang		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang		Dokumen		1			250.000.000,00			Dinas Perumahan dan Permukiman
1	03	12	2.03	0006		Sistem Informasi Penataan Ruang		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen		1	1			198.361.901,00	198.361.901	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**				**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									**4.943.017.285,00**	**6.077.990.910,00**	**6.013.493.820,00**	
					DINAS PEKERJAAN UMUM									**360.000.000,00**	**500.000.000,00**	**515.000.000,00**	
1	**04**	**02**			**Program Pengembangan Perumahan**	**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase Rusunawa yang Terpelihara**	**Persentase Rusunawa yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**360.000.000,00**	**500.000.000,00**	**515.000.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Persentase luas kawasan kumuh di kota Bandar Lampung**	**Persentase luas kawasan kumuh di kota Bandar Lampung**	**Persen**	**Persen**	**3,84**	**3,84**	**3,84**	**360.000.000,00**	**500.000.000,00**	**515.000.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	Dokumen	247	257	257	360.000.000,00	500.000.000,00	515.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
					DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN									**4.583.017.285,00**	**5.577.990.910,00**	**5.498.493.820,00**	
														-	79.497.090,00	**79.497.090,00**	
1	**04**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**	**persen**	**persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.283.017.285,00**	**5.306.254.541,00**	**5.226.757.451,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**		**Persen**		**100,00**			**25.000.000,00**	**30.488.893,00**	**30.488.893,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	25.000.000,00	30.488.893,00	30.488.893	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**		**Persen**		**100,00**			**3.497.217.285,00**	**4.474.969.535,00**	**4.421.669.535,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	55	12	12	3.325.177.285,00	4.220.329.535,00	4.220.329.535	
1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	172.040.000,00	254.640.000,00	201.340.000	
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persen**		**100,00**			**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	20	20	20	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000	
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**		**Persen**		**98,00**			**255.800.000,00**	**216.806.113,00**	**215.609.023,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1,00	1,00	1,00	10.000.000,00	9.997.128,00	9.997.128	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	40.000.000,00	39.986.466,00	39.986.466	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.000.000,00	10.001.786,00	10.001.786	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	25.000.000,00	20.750.000,00	20.750.000	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	25.000.000,00	24.799.000,00	24.799.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000	
1	04	01	2.06	0009	Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	6	6	6	135.000.000,00	100.471.733,00	99.274.643	
1	04	01	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**		Persen		98	98		**60.500.000,00**	**35.500.000,00**	
1	04	01	2.07	0005		Penyadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit		10	10		28.500.000,00	28.500.000	
1	04	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		10	10		32.000.000,00	7.000.000	
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**		**Persen**		**98,00**			**410.000.000,00**	**419.000.000,00**	**419.000.000,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	50.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000	
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	360.000.000,00	384.000.000,00	384.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**		**98,00**			**85.000.000,00**	**94.490.000,00**	**94.490.000,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	35.000.000,00	44.430.000,00	44.430.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	3	3	3	50.000.000,00	50.060.000,00	50.060.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**	**02**			**Program Pengembangan Perumahan**	**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**200.000.000,00**	**139.722.614,00**	**139.722.614,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**				**persen**		**100,00**			**100.000.000,00**	**89.722.614,00**	**89.722.614,00**	
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	dokumen	dokumen	1,00	1,00	1,00	100.000.000,00	89.722.614,00	89.722.614	
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten/kota**				**Persen**		**100,00**			**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/kota yang terehabilitasi	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/kota yang terehabilitasi	Unit Rumah	Unit Rumah	2,00	1,00	1,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000	
1	**04**	**03**			**Program Kawasan Permukiman**	**Program Kawasan Permukiman**	**Persentase RTLH Yang Tertangani**	**Persentase RTLH Yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**64.14**	**64.14**	**64.14**	**100.000.000,00**	**132.013.755,00**	**132.013.755,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase RTLH yang Tertangani**	**Persentase RTLH yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**43,89**	**43,89**	**43,89**	**100.000.000,00**	**132.013.755,00**	**132.013.755,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	Laporan	2	2	2	100.000.000,00	**132.013.755,00**	132.013.755	
1	**05**				**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									**58.680.652.430,00**	**69.954.287.593,00**	**72.284.144.993,00**	
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									**37.502.444.808,00**	**38.817.040.664,00**	**40.072.120.664,00**	
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**36.967.444.808,00**	**38.599.184.780,00**	**39.854.264.780,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**20.000.000,00**	**29.411.798,00**	**29.411.798,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Dokumen	Dokumen	3	3		20.000.000,00	29.411.798,00	29.411.798,00	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**6.614.444.808,00**	**7.771.600.664,00**	**6.871.600.664,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	88	88		6.484.444.808,00	7.539.040.664,00	6.639.040.664,00	
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	5	5		130.000.000,00	232.560.000,00	232.560.000,00	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**100.000.000,00**	**1.050.000.000,00**	**2.002.704.000,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket		4			1.000.000.000,00	1.952.704.000,00	
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	Orang	10	10		100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**112.000.000,00**	**125.542.318,00**	**127.135.318,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		1.500.000,00	4.153.187,00	4.153.187,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		37.000.000,00	24.570.445,00	24.570.445,00	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		2.000.000,00	2.876.327,00	2.876.327,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		10.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		20.000.000,00	17.491.974,00	17.491.974,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1		10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		30.000.000,00	47.550.385,00	49.143.385,00	
1	**05**	**01**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**248.000.000,00**	**150.000.000,00**	**319.703.000,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit		1			150.000.000,00	150.000.000,00	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		100.000.000,00		63.753.000,00	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		100.000.000,00		105.950.000,00	
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Unit		1	1		48.000.000,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**29.010.000.000,00**	**28.956.000.000,00**	**29.987.080.000,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		29.000.000.000,00	28.950.000.000,00	29.981.080.000,00	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**863.000.000,00**	**516.630.000,00**	**516.630.000,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1		33.000.000,00	44.430.000,00	44.430.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	20	20		800.000.000,00	472.200.000,00	472.200.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Direlihara		Unit	Unit	1	1		20.000.000,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		Unit	Unit	1	1		10.000.000,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**			**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**535.000.000,00**	**217.855.884,00**	**217.855.884,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
							Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3	**Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3**	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**335.000.000,00**	**153.158.548,00**	**153.158.548,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	02	2.01	0016	Penindakkan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penindakkan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus gangguan ketntraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertibandan penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Jumlah kasus gangguan ketntraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertibandan penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Kasus	Kasus	50	50		100.000.000,00	50.224.963,00	50.224.963,00	
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentrama, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentrama, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Dokumen	Dokumen	1	1		30.000.000,00	22.848.844,00	22.848.844,00	
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	Dokumen	1	1		100.000.000,00	34.949.888,00	34.949.888,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Orang	150	150		100.000.000,00	40.134.853,00	40.134.853,00	
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	Laporan	1	1		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**200.000.000,00**	**64.697.336,00**	**64.697.336,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Laporan	Laporan	12	12		100.000.000,00	31.064.819,00	31.064.819,00	
1	05	02	2.02	0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Bupati/Walikota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota yang dapat ditangani sesuai SOP	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota yang dapat ditangani sesuai SOP	Laporan	Laporan	6	6		100.000.000,00	33.632.517,00	33.632.517,00	
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									**11.483.274.990,00**	**13.928.899.250,00**	**13.263.024.250,00**	
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**10.353.274.990,00**	**12.798.906.503,00**	**12.126.777.619,00**	**BPBD**
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.410.514.990,00**	**5.723.339.250,00**	**4.423.339.250,00**	**BPBD**
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	14	14	14	4.107.674.990,00	5.420.499.250,00	4.120.499.250,00	BPBD
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	302.840.000,00	302.840.000,00	302.840.000,00	BPBD
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**221.000.000,00**	**221.000.000,00**	**231.000.000,00**	**BPBD**
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	80	80	80	201.000.000,00	201.000.000,00	201.000.000,00	BPBD
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	80	80	80	20.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	BPBD
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**359.410.000,00**	**362.137.484,00**	**362.137.484,00**	**BPBD**
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	30.000.000,00	29.999.746,00	29.999.746,00	BPBD
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	35.309.516,00	35.309.363,00	35.309.363,00	BPBD
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.178.357,00	8.678.357,00	8.678.357,00	BPBD
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	100	100	100	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	BPBD
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	Bulan	1	1	1	14.322.127,00	14.322.000,00	14.322.000,00	BPBD
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	BPBD
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	120.000.000,00	120.228.018,00	120.228.018,00	BPBD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**342.000.000,00**	**941.789.226,00**	**941.789.226,00**	**BPBD**
1	05	01	2.07	0002	.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	Unit	-	1	1	-	600.000.000,00	600.000.000,00	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	117.000.000,00	116.789.226,00	116.789.226,00	BPBD
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	BPBD
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.039.600.000,00**	**4.569.900.000,00**	**5.187.771.116,00**	**BPBD**
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	148.000.000,00	148.000.000,00	131.746.116,00	BPBD
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	3.891.600.000,00	4.421.900.000,00	5.056.025.000,00	BPBD
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**980.750.000,00**	**980.740.543,00**	**980.740.543,00**	**BPBD**
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	5	5	5	38.000.000,00	37.992.750,00	37.992.750,00	BPBD
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	7	7	7	750.000.000,00	749.997.793,00	749.997.793,00	BPBD
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	42.750.000,00	42.750.000,00	42.750.000,00	BPBD
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	BPBD
1	**05**	**03**			**Program Penanggulangan Bencana**	**Program Penanggulangan Bencana**	**Cakupan Pelayanan Bencana Daerah**	**Cakupan Pelayanan Bencana Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.130.000.000,00**	**1.129.992.747,00**	**1.136.246.631,00**	**BPBD**
							Kelurahan Siaga Bencana	**Kelurahan Siaga Bencana**	**Angka**	**Angka**	**10**	**10**	**10**				
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi**	**Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**500.000.000,00**	**499.997.897,00**	**487.847.897,00**	**BPBD**
1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	400.000.000,00	400.000.000,00	387.850.000,00	BPBD
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di	Orang	Orang	100	100	100	100.000.000,00	99.997.897,00	99.997.897,00	BPBD
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**330.000.000,00**	**329.994.850,00**	**371.464.850,00**	**BPBD**
1	05	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	-	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	BPBD
1	05	03	2.02	0002	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	Orang	-	0	-	-	-	-	-	BPBD
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	Unit	1	1	1	100.000.000,00	99.996.762,00	99.996.762,00	BPBD
1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	Kawasan	5	5	5	100.000.000,00	99.999.901,00	129.469.901,00	BPBD
1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	Orang	100	100	100	130.000.000,00	129.998.187,00	141.998.187,00	BPBD
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan**	**Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan**	**Orang**	**Orang**	**100**	**100**	**100**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**276.933.884,00**	**BPBD**
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	-	Laporan		100						BPBD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK PDB yang dietapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK PDB yang dietapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	dokumen	dokumen	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-	Orang	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	Orang	100	100	100	200.000.000,00	200.000.000,00	176.933.884,00	BPBD
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	-	**Jumlah Dok Rencana Penanggulangan Bencana dan Jumlah Raperda Penanggulangan Bencana yang tersusun**	-	-	-	-	-	-				**BPBD**
1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	-	Laporan	-	-	-	-				BPBD
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	-	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	-	Desa / Kelurahan	-	1	-	-				BPBD
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	Laporan	-	1	-	-				BPBD
					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN									**9.694.932.632,00**	**17.208.347.679,00**	**18.949.000.079,00**	
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Persen**	**Persen**	**98**	**98**	**98**	**9.542.377.632,00**	**17.013.001.919,00**	**18.753.654.319,00**	**Dinas Damkar dan Penyelamatan**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	-	**Persen**	**-**	**100**	**-**	**-**	-	-	-	**Dinas Damkar dan Penyelamatan**
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.930.377.632,00**	**3.642.747.679,00**	**4.442.747.679,00**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	38	38	38	2.744.932.632	3.440.747.679	4.240.747.679	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	185.445.000	202.000.000	202.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Laporan	-	12	-	-	-	-	-	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**-**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	Paket	-	250	-	-	-			Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	30	30	30	-	20.000.000	20.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**160.000.000,00**	**247.104.240,00**	**247.104.240,00**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	12	12	12	-	4.981.312	4.981.312	Dinas Damkar dan Penyelamatan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	60.000.000	58.531.959	58.531.959	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	-	7.562.252	7.562.252	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	-	54.250.000	54.250.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	50.000.000	32.417.600	32.417.600	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	12	12	12	-	10.000.000	10.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	12	12	12	50.000.000	79.361.117	79.361.117	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**255.000.000,00**	**2.449.610.000,00**	**2.449.610.000,00**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	150.000.000	2.150.000.000	2.150.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	25.000.000	14.000.000	14.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	80.000.000	285.610.000	285.610.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.132.000.000,00**	**9.504.500.000,00**	**10.373.900.000,00**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	82.000.000	135.000.000	141.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	5.050.000.000	9.369.500.000	10.232.900.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.065.000.000,00**	**1.149.040.000,00**	**1.220.292.400,00**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	2	2	2	60.000.000	43.430.000	43.430.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	27	27	27	1.000.000.000	1.055.550.000	1.126.802.400	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	20	20	20	5.000.000	15.060.000	15.060.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	Unit	2	2	2	-	35.000.000	35.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**TINGKAT WAKTU TANGGAP (RESPONSE TIME RATE) DAERAH LAYANAN WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WMK)**	**TINGKAT WAKTU TANGGAP (RESPONSE TIME RATE) DAERAH LAYANAN WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WMK)**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**152.555.000**	**195.345.760**	**195.345.760**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**152.555.000**	**195.345.760**	**195.345.760**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	-	Dokumen	-	2	-	-	15.000.000	-	-	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	2	2	2	85.000.000	5.845.760	5.845.760	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non-Kebakaran	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan penyelamatan/evakuasi saat	-	Dokumen	-	2	-	-	15.000.000	-	-	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Dokumen	-	5	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Unit	Unit	1	1	1	37.555.000	189.500.000	189.500.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	-	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memiliki Sertifikasi Ketermpilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	-	Orang	-	5	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	-	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan	-	Desa / Kelurahan	-	2	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran**	-	**Jumlah Warga Masyarakat dan relawan yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dalam rangka sistem ketahanan kebakaran lingkungan**	-	**Orang**	-	**252**	-	-	-	-	-	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	-	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-	Orang	-	200	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	-	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan	-	Desa/Kelurahan	-	50	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**04**	**2.05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	-	**Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia**	-	**Laporan**	-	**14**	-	-	-	-	-	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	-	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	-	Laporan	-	2	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	-	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	-	Dokumen	-	2	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.05	0003	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	-	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	-	Unit	-	6	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	-	Laporan	-	2	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**06**				**SOSIAL**									**17.530.176.984,00**	**39.105.929.196,00**	**43.687.748.856,00**	
					DINAS SOSIAL									**17.530.176.984,00**	**39.105.929.196,00**	**43.687.748.856,00**	
1	**06**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**3.808.980.259,00**	**6.060.156.667,00**	**5.960.156.667,00**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**18.762.558,00**	**42.579.680,00**	**42.579.680,00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3		18.762.558,00	**42.579.680,00**	**42.579.680,00**	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**2.991.076.858,00**	**3.694.234.311,00**	**3.594.234.311,00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	33	33		2.896.876.858,00	3.586.114.311,00	3.486.114.311,00	
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	4	4		94.200.000,00	108.120.000,00	108.120.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	5	5		5.000.000,00	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**151.600.000,00**	**270.281.890,00**	**270.281.890,00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		9.000.000,00	8.999.777,00	8.999.777,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0002	Penyediaaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		41.400.000,00	41.393.261,00	41.393.261,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		10.000.000,00	9.998.617,00	9.998.617,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		6.025.000,00	24.120.000,00	24.120.000,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		11.200.000,00	13.863.864,00	13.863.864,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1		3.975.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		65.000.000,00	144.906.371,00	144.906.371,00	
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**50.000.000,00**	**1.288.874.120,00**	**1.288.874.120,00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.07	0001	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		unit		1,00			500.000.000,00	500.000.000,00	
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan							400.000.000,00	400.000.000,00	
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mabel	Pengadaan Mabel	Pengadaan Mabel	jumlah paket mebel yang disediakan		unit		1,00			140.173.592,00	140.173.592,00	
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Di Sediakan	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Di Sediakan	Unit	Unit	1	1		50.000.000,00	248.700.528,00	248.700.528,00	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**354.576.666,00**	**402.576.666,00**	**402.576.666,00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		90.576.666,00	90.576.666,00	90.576.666,00	
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		264.000.000,00	312.000.000,00	312.000.000,00	
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**237.964.177,00**	**356.610.000,00**	**356.610.000,00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1		35.032.089,00	44.430.000,00	44.430.000,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1	1		30.932.088,00	148.180.000,00	148.180.000,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	15	15		22.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	3	3		150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Dinas Sosial
1	**06**	**02**			**Program Pemberdayaan Sosial**	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial**	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial**	**Persen**	**Persen**	**84,00**	**84,00**		**6.665.000.000,00**	**23.604.206.871,00**	**27.203.776.531,00**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase pelayanan pengelolaan kelembagaan sosial**	**Presentase pelayanan pengelolaan kelembagaan sosial**	**Persen**	**Persen**	**81,00**	**81,00**		**6.665.000.000,00**	**23.604.206.871,00**	**27.203.776.531,00**	**Dinas Sosial**
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		Orang		198,00			99.999.815,00	99.999.815,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		Keluarga		55.948,00			1.217.066.820,00	1.595.066.820,00		
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	Keluarga	100	100		80.000.000,00	122.735.440,00	122.735.440,00	
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	Lembaga	250	250		6.285.000.000,00	21.914.404.907,00	25.135.974.567,00	
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	Sertifikat	15	15		300.000.000,00	249.999.889,00	249.999.889,00	
1	**06**	**04**			**Program Rehabilitasi Sosial**	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial**	**Persen**	**Persen**	**84,00**	**84,00**		**448.812.114,00**	**804.469.738,00**	**804.469.738,00**	**Dinas Sosial**
							Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	**Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					**Dinas Sosial**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial**	**Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial**	**Presentase pelayanan Rehabilitasi lansia, penyandang cacat dan orang terlantar yang tertangani**	**Presentase pelayanan Rehabilitasi lansia, penyandang cacat dan orang terlantar yang tertangani**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**		**334.812.114,00**	**559.647.341,00**	**559.647.341,00**	**Dinas Sosial**
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan permakanan	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	50	50		60.650.126,00	69.999.808,00	69.999.808,00	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan sandang	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	134	134		60.000.000,00	90.998.652,00	90.998.652,00	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	Orang	Orang	50	50		214.161.988,00	398.648.881,00	398.648.881,00	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA diluar panti sosial**	**Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA diluar panti sosial**	**Presentase pelayanan pengelolaan rehabilitasi sosial**	**Presentase pelayanan pengelolaan rehabilitasi sosial**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**		**114.000.000,00**	**244.822.397,00**	**244.822.397,00**	**Dinas Sosial**
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	110	110		20.000.000,00	24.999.927,00	24.999.927,00	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	0014	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kot	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kot	Dokumen	Dokumen	1	1		94.000.000,00	219.822.470,00	219.822.470,00	
1	**06**	**05**			**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial**	**Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial**	**Persen**	**Persen**	**23,00**	**23,00**		**6.380.000.000,00**	**8.409.721.760,00**	**8.491.971.760,00**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota**	**Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota**	**Terlaksananya Tugas Pendamping Dalam Pencairan Bantuan**	**Terlaksananya Tugas Pendamping Dalam Pencairan Bantuan**	**Persen**	**Persen**	**23**	**23**		**6.380.000.000,00**	**8.409.721.760,00**	**8.491.971.760,00**	**Dinas Sosial**
1	06	05	2.02	0001	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	Orang	198	198		450.000.000,00	241.131.823,00	241.131.823,00	
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	Keluarga	Keluarga	55948	55948		1.080.000.000,00	2.821.082.218,00	2.903.332.218,00	
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	Keluarga	71.590	71.590		4.850.000.000,00	5.347.507.719,00	5.347.507.719,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**06**	**06**			**Program Penanganan Bencana**	**Program Penanganan Bencana**	**Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat**	**Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**227.384.611,00**	**227.374.160,00**	**1.227.374.160,00**	**Dinas Sosial**
							Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Mengunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	**Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Mengunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Pengelolaan, Pendamping PKH dan data PMKS dan PSKS**	**Pelayanan Pengelolaan, Pendamping PKH dan data PMKS dan PSKS**	**Petugas**	**Petugas**	**169**	**169**		**227.384.611,00**	**227.374.160,00**	**1.227.374.160,00**	**Dinas Sosial**
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan makanan	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	1.800	1.800		150.000.000,00	150.000.000,00	1.150.000.000,00	
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan sandang	Penyediaan sandang	Jumlah orang yg mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yg tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenagan kab/kota.	Jumlah orang yg mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yg tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenagan kab/kota.	Orang	Orang	2.250	2.250		27.718.438,00	27.707.988,00	27.707.988,00	Dinas Sosial
1	06	06	201	0003	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi kewenangan kab/kota	Jumlah tempat penampungan pengungsi kewenangan kab/kota	Unit	Unit	20	20		31.396.418,00	31.396.417,00	31.396.417,00	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan dukungan psikososial	Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yg mendapatkan pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yg mendapatkan pelayanan dukungan psikososial	Orang	Orang	200	200		18.269.755,00	18.269.755,00	18.269.755,00	Dinas Sosial
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									**187.413.612.899,00**	**227.380.170.512,00**	**233.392.433.777,00**	
2	**07**				**TENAGA KERJA**									**5.517.278.944,00**	**5.095.097.723,00**	**4.745.097.723,00**	
					DINAS TENAGA KERJA									**5.517.278.944,00**	**5.095.097.723,00**	**4.745.097.723,00**	
2	**07**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**4.481.054.360,00**	**4.681.209.784,00**	**4.553.840.290,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**27.000.000,00**	**77.399.961,00**	**91.172.161,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	dokumen	2	2		27.000.000,00	77.399.961,00	91.172.161,00	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**3.211.848.375,00**	**3.848.443.972,00**	**3.527.212.708,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	36	36		3.053.053.555,00	3.759.097.723,00	3.409.097.723,00	
2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		124.794.820,00	66.480.000,00	66.480.000,00	
2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1		34.000.000,00	22.866.249,00	51.634.985,00	
2	**07**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Pendapatan Daerah**		dokumen		1			**175.000.000,00**			
2	07	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		dokumen		1			175.000.000,00			
2	**07**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**persen**					**65.000.000,00**			
2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		orang					65.000.000,00			
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**227.414.575,00**	**261.769.651,00**	**274.514.221,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		7.101.400,00	9.998.934,00	9.998.934,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		48.238.132,00	58.499.365,00	58.499.365,00	Dinas Tenaga Kerja

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	07	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		9.992.401,00	12.998.414,00	12.998.414,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		11.550.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		56.714.338,00	57.999.942,00	57.999.942,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1		15.958.304,00	19.000.000,00	19.000.000,00	
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		73.000.000,00	80.412.996,00	93.157.566,00	
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**280.541.410,00**	**10.966.200,00**	**178.311.200,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.07	0005	Pengadan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit		47			98.707.658,00		98.445.000,00	
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		9			171.833.752,00		68.900.000,00	
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	123	123		10.000.000,00	10.966.200,00	10.966.200,00	
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**366.600.000,00**	**356.040.000,00**	**356.040.000,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.08	0002	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		30.600.000,00	20.040.000,00	20.040.000,00	
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		336.000.000,00	336.000.000,00	336.000.000,00	
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**127.650.000,00**	**126.590.000,00**	**126.590.000,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1		30.600.000,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	7	7		86.050.000,00	73.190.000,00	73.190.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	27	27		11.000.000,00	16.380.000,00	16.380.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi Dipelihara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi Dipelihara	unit	unit							
2	**07**	**02**			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**		**Persentase Informasi Data Ketenagakerjaan yang Disusun Berbasis Sistem Informasi**		**Persen**		**100,00**			**80.000.000,00**		**0,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		**Penyediaan informasi ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung**		**Persen**		**100,00**			**80.000.000,00**		**0,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro		**Dokumen**		**1,00**			-		**0,00**	
2	07	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro		Perusahaan		20			80.000.000,00		0,00	
2	**07**	**03**			**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja**	**Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja**	**Persen**	**Persen**	**31,25**	**31,25**		**373.658.034,00**	**141.129.814,00**	**0,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
							Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi	**Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**75,00**				**0,00**	
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri**	**Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri**	**Orang**	**Orang**	**40**	**40**		**297.420.000,00**	**99.930.188,00**	**0,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	Orang	40	40		187.420.000,00	74.932.399,00	0,00	Dinas Tenaga Kerja

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	07	04	2.01	0002	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun	Lembaga	Lembaga	10	10		110.000.000,00	24.997.789,00	0,00	
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Meningkatnya Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina**	**Meningkatnya Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina**	**LPK**	**LPK**	50	50		**36.238.034,00**	**16.199.964,00**	**0,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	Lembaga	50	50		36.238.034,00	16.199.964,00	0,00	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya**	**Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya**	**perusahaan**	**perusahaan**	**20**	**20**		**40.000.000,00**	**24.999.662,00**	**0,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	Perusahaan	20	20		40.000.000,00	24.999.662,00	0,00	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Rasio penduduk yang bekerja**	**Rasio penduduk yang bekerja**	**Persen**	**Persen**	**94,81**	**94,81**		**215.000.000,00**	**81.500.692,00**	**0,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
							Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	**Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas**	**Persen**	**Persen**	**93,97**	**93,97**					
							Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	**Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**Persen**	**Persen**	**4,79**	**4,79**					
							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**	**Persen**	**Persen**	**76,62**	**76,62**					
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar kerja di daerah kabupaten/kota**		**Meningkatnya Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kota Bandar Lampung**		**Persen**	**Persen**	100,00	100,00		**140.000.000,00**	**51.500.962,00**	**0,00**	
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		orang		100,00			75.000.000,00		0,00	
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan	orang	orang	35,00	35,00		65.000.000,00	51.500.962,00	0,00	
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		**Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri**		orang					-		0,00	
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja		orang		7,00					0,00	
2	**07**	**04**	**2.04**		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Menigkatnya perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan Di Kota Bnadar Lmapung**	**Menigkatnya perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan Di Kota Bnadar Lmapung**	**Persen**	**Persen**	100,00	100,00		**75.000.000,00**	**29.999.730,00**	**0,00**	
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Diberdayakan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Diberdayakan	orang	orang	7,00	7,00		75.000.000,00	29.999.730,00	0,00	
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun**	**Persentase Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun**	**Persen**	**Persen**	**52,32**	**52,32**		**367.566.550,00**	**191.257.433,00**	**191.257.433,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
							Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	**Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**	**Persen**	**Persen**	**52,63**	**52,63**					
							Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan**	**Persen**	**Persen**	**79,00**	**79,00**					
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan penetapan UMK dan sosialisasi KHL Kota Bandar Lampung.**	**Pelaksanaan penetapan UMK dan sosialisasi KHL Kota Bandar Lampung.**	**SK**	**SK**	**1**	**1**		**367.566.550,00**	**191.257.433,00**	**191.257.433,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	Laporan	12	12		367.566.550,00	191.257.433,00	191.257.433,00	
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan**		**Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota**		Persen		100			-			
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di Lawan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		perkara		36						
2	**07**	**06**			**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**		**Cakupan Masyarakat di Wilayah Kumuh yang Mendapatkan Pemahaman Transmigrasi Dibandingkan Total Wilayah Kumuh**		**Persen**		**12**			-			**Dinas Tenaga Kerja**
2	**07**	**06**	**2.01**		**Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian**		**Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman**		**Persen**		**85**			-			
2	07	06	2.01	0001	Penguatan SDM Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina		kepala keluarga		40						

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	08				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									4.963.604.183,00	9.750.984.913,00	9.400.984.913,00	
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									4.963.604.183,00	9.750.984.913,00	9.400.984.913,00	
2	08	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak	Persen	Persen	98,00	98,00		3.639.804.183,00	4.301.022.208,00	3.951.022.208,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	Persen	100,00	100,00		48.125.000,00	61.624.902,00	61.624.902,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	5 Dokumen (Renja, LKIP, LPPD, LPJ dan PKA)	5 Dokumen (Renja, LKIP, LPPD, LPJ dan PKA)		48.125.000,00	61.624.902,00	61.624.902,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	Persen	100,00	100,00		3.101.668.788,00	3.714.678.528,00	3.364.678.528,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.02	0001	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	32	32		2.904.804.183,00	3.600.984.913,00	3.250.984.913,00	
2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		168.199.605,00	84.313.406,00	84.313.406,00	
2	08	01	2.02	0005	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		28.665.000,00	29.380.209,00	29.380.209,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	Persen	Persen	80,00	80,00		30.000.000,00	24.570.000,00	24.570.000,00	
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	Orang	15,00	15,00		30.000.000,00	24.570.000,00	24.570.000,00	
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	Persen	98,00	98,00		126.241.360,00	168.413.307,00	168.413.307,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		3.656.800,00	3.655.091,00	3.655.091,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		23.465.000,00	25.398.733,00	25.398.733,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		6.955.560,00	6.941.432,00	6.941.432,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		22.289.000,00	23.297.426,00	23.297.426,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		50.000.000,00	89.245.625,00	89.245.625,00	
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	Persen	98,00	98,00		73.246.227,00	62.643.383,00	62.643.383,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor		Unit		1			29.618.383,00	29.618.383,00	
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		33.025.000,00	33.025.000,00	33.025.000,00	
2	08	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			1		40.221.227,00			
2	08	01	2.08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	Persen	98,00	98,00		158.700.000,00	169.500.000,00	169.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		145.200.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BID AKU URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**101.822.808,00**	**99.592.088,00**	**99.592.088,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1		36.674.662,00	44.430.000,00	44.430.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	Unit	Unit	2	2		49.256.000,00	39.270.000,00	39.270.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang	Unit	Unit	1	1		15.892.146,00	15.892.088,00	15.892.088,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**02**			**Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Peremouan**	**Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Peremouan**	**IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)**	**IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)**	**Angka**	**Angka**	**73,50**	**73,50**		**390.000.000,00**	**1.534.999.884,00**	**1.534.999.884,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
							Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	**Persentase ARG pada belanja Langsung APBD**	**Lembaga**	**Lembaga**	**93**	**93**					
							Presentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	**Presentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan**	**Persen**	**Persen**	**90,63**	**90,63**					
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi**	**Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**60.000.000,00**	**59.999.905,00**	**59.999.905,00**	
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan	Dokumen	Dokumen	1	1		60.000.000,00	59.999.905,00	59.999.905,00	
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga**	**Orang**	**Orang**	**1.500**	**1.500**		**330.000.000,00**	**1.474.999.979,00**	**1.474.999.979,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang	Orang	Orang	1.500	1.500		330.000.000,00	1.474.999.979,00	1.474.999.979,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**			**Program Perlindungan Perempuan**	**Program Perlindungan Perempuan**	**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan**	**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**294.454.000,00**	**294.256.956,00**	**294.256.956,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
							Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah**	**Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**		**109.700.000,00**	**101.500.000,00**	**101.500.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan , Program & Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan , Program & Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1		109.700.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00	
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota**	**Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**	**Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**	**Layanan**	**Layanan**	**20,00**	**20,00**		**109.754.000,00**	**117.757.000,00**	**117.757.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Layanan	Layanan	20	20		109.754.000,00	117.757.000,00	117.757.000,00	
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkataan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**75.000.000,00**	**74.999.956,00**	**74.999.956,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	2	2		75.000.000,00	74.999.956,00	74.999.956,00	
2	**08**	**04**			**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Presentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Presentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Persen**	**Persen**	**67,78**	**67,78**		**190.000.000,00**	**3.158.999.722,00**	**3.158.999.722,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Persen**	**Persen**	**52,00**	**52,00**		**190.000.000,00**	**3.158.999.722,00**	**3.158.999.722,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kg dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kg dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	Dokumen	1	1		35.000.000,00	34.999.959,00	34.999.959,00	
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	Laporan	Laporan	1	1		155.000.000,00	3.123.999.763,00	3.123.999.763,00	
2	**08**	**05**			**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persen**	**Persen**	**3,29**	**3,29**		**40.000.000,00**	**34.998.048,00**	**34.998.048,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
							Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	**Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta**	**Persen**	**Persen**	**63,37**	**63,37**					
							Rasio KDRT yang Tertangani	**Rasio KDRT yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**1,28**	**1,28**					
							Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**Persen**	**Persen**	**56,06**	**56,06**					
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persen**	**Persen**	**3,29**	**3,29**		**40.000.000,00**	**34.998.048,00**	**34.998.048,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
							Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	**Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta**	**Persen**	**Persen**	**63,37**	**63,37**					
							Rasio KDRT yang Tertangani	**Rasio KDRT yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**1,28**	**1,28**					
							Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**Persen**	**Persen**	**56,06**	**56,06**					
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	Dokumen	1	1		40.000.000,00	34.998.048,00	34.998.048,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**06**			**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Tingkat Capaian**	**Tingkat Capaian**	**Nindya**	**Nindya**		**85.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
							Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	**Persen**	**Persen**	**71,70**	**71,70**					
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Tingkat Capaian**	**Tingkat Capaian**	**Nindya**	**Nindya**		**85.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
							Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	**Persen**	**Persen**	**71,70**	**71,70**					
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah , Non Pemerintah, Media & Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah , Non Pemerintah, Media & Dunia Usaha	Organisasi	Organisasi	37	37		85.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2	**08**	**07**			**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan**	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**324.346.000,00**	**326.708.095,00**	**326.708.095,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
							Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	**Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat**	**Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**249.750.000,00**	**257.688.095,00**	**257.688.095,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	07	2.02	0005		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah		Jumlah AMPK yang Mendapatkan layanan		Orang		5			139.965.095,00	139.965.095,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.02	0006		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK (DAK)		Jumlah AMPK yang Mendapatkan layanan		Layanan		1			117.723.000,00	117.723.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota (DAK)		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Layanan		30			144.750.000,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan		Dokumen		1			105.000.000,00			
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemenuhan Hak-hak Anak**	**Pemenuhan Hak-hak Anak**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**		**74.596.000,00**	**69.020.000,00**	**69.020.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	07	2.02	0006		Peningkatan Kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah		Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		Orang		1			69.020.000,00	69.020.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (DAK)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan		Dokumen		1			74.596.000,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**09**				**PANGAN**									**6.229.246.688,00**	**8.412.151.345,00**	**7.712.151.345,00**	**700.000.000,00**
					DINAS PANGAN									**6.229.246.688,00**	**8.412.151.345,00**	**7.712.151.345,00**	
2	**09**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.246.246.688,00**	**6.185.245.899,00**	**5.485.245.899,00**	**Dinas Pangan**
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**60.000.000,00**	**309.999.767,00**	**309.999.767,00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	6 dokumen (RKA, Renstra, RENJA, LKIP, LPJ, LPPD)	6 dokumen (RKA, Renstra, RENJA, LKIP, LPJ, LPPD)	6 dokumen (RKA, Renstra, RENJA, LKIP, LPJ, LPPD)	60.000.000,00	309.999.767,00	309.999.767,00	Dinas Pangan
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.549.558.259,00**	**4.406.299.487,00**	**3.706.299.487,00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	32	32	32	3.436.038.259,00	4.313.734.487,00	3.613.734.487,00	
2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	98.520.000,00	66.360.000,00	66.360.000,00	
2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan						15.000.000,00	26.205.000,00	26.205.000,00	
2	**09**	**01**	**2.05**		**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**45.030.446,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Dokumen	1	1	1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	2	2	2	30.030.446,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dinas Pangan
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**117.832.150,00**	**187.561.144,00**	**187.561.144,00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	paket	1	1	1	5.000.000,00	14.999.816,00	14.999.816,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	paket	1	1	1	25.000.000,00	59.999.604,00	59.999.604,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	paket	1	1	1	22.332.150,00	24.999.937,00	24.999.937,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	13.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	35.000.000,00	45.061.787,00	45.061.787,00	
2	09	01	2.06	0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Laporan Penata Usahaan arsip dinasmis pada SKPD		Laporan		1			10.000.000,00	10.000.000,00	
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**25.000.000,00**	**763.586.373,00**	**763.586.373,00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Persen		1			477.980.000,00	477.980.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	25.000.000,00	44.980.732,00	44.980.732,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		1		-	129.000.000,00	129.000.000,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.07	0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit		1			111.625.641,00	111.625.641,00	
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**300.000.000,00**	**330.000.000,00**	**330.000.000,00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.08	0002	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Kpmunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Unit		1			30.000.000,00	30.000.000,00	
2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	288.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00	
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**148.825.833,00**	**157.799.128,00**	**157.799.128,00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.456.705,00	42.430.000,00	42.430.000,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	16	16	16	115.369.128,00	115.369.128,00	115.369.128,00	Dinas Pangan
2	**09**	**03**			**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**Persen**	**Persen**	**105,00**	**105,00**	**105,00**	**1.703.000.000,00**	**1.839.098.780,00**	**1.839.098.780,00**	**Dinas Pangan**
							Ketersediaan Energi per kapita	**Ketersediaan Energi per kapita**	**(kkal/kap hari)**	**(kkal/kap hari)**	**2.530,00**	**2.530,00**	**2.530,00**				
							Ketersediaan Protein per Kapita	**Ketersediaan Protein per Kapita**	**(gr/kap/hari)**	**(gr/kap/hari)**	**72,20**	**72,20**	**72,20**				
							Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	**Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah**	**Persen**	**Persen**	**50,00**	**50,00**	**50,00**				
							Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	**Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)**	**skor**	**skor**	**86,75**	**86,75**	**86,75**				
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**Persen**	**Persen**	**102,00**	**102,00**	**102,00**	**273.000.000,00**	**409.098.780,00**	**409.098.780,00**	**Dinas Pangan**
2	09	03	2.01	0001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	Laporan				48.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Pangan
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya	Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	Laporan				50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dinas Pangan
2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Laporan	Laporan				75.000.000,00	211.100.000,00	211.100.000,00	Dinas Pangan
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan pangan keluarga	Peningkatan Ketahanan pangan keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti ketahanan pangan keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti ketahanan pangan keluarga	Keluarga	Keluarga	30	30	30	100.000.000,00	47.998.780,00	47.998.780,00	
2	**09**	**03**	**2.02.**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/kota**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/kota**	**Penguatan cadangan pangan pemerintah**	**Penguatan cadangan pangan pemerintah**	**Persen**	**Persen**				**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**Dinas Pangan**
2	09	03	2.02.	0003	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton	ton	10,00	10,00	10,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Dinas Pangan
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**PPH konsumsi**	**PPH konsumsi**	**skor**	**skor**	**86,50**	**86,50**	**86,50**	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**	**Dinas Pangan**
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	dokumen	dokumen	1	1	1	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Pangan
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	Laporan	1	1	1	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	
2	**09**	**04**			**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Persentase Daerah Rawan Pangan**	**Persentase Daerah Rawan Pangan**	**Persen**	**Persen**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**150.000.000,00**	**187.815.284,00**	**187.815.284,00**	**Dinas Pangan**
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Dihasilkan**	**Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Dihasilkan**	**Dokumen**	**Dokumen**	**2**	**2**	**2**	**50.000.000,00**	**79.815.864,00**	**79.815.864,00**	**Dinas Pangan**
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan,	Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan,	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	Dokumen	Dokumen	2	2	2	50.000.000,00	79.815.864,00	79.815.864,00	Dinas Pangan
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan kerawanan pangan kewenangan kab/kota**	**Penanganan kerawanan pangan kewenangan kab/kota**	**Jumlah Lokasi Tertangani**	**Jumlah Lokasi Tertangani**	**Kelurahan/ Kecamatan**	**Kelurahan/ Kecamatan**				**100.000.000,00**	**107.999.420,00**	**107.999.420,00**	
2	09	04	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	107.999.420,00	107.999.420,00	
2	**09**	**05**			**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**	**Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**	**Persen**	**Persen**	**87,50**	**87,50**	**87,50**	**130.000.000,00**	**199.991.382,00**	**199.991.382,00**	**Dinas Pangan**
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern**	**Persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern**	**Persen**	**Persen**	**87,50**	**87,50**	**87,50**	**130.000.000,00**	**199.991.382,00**	**199.991.382,00**	**Dinas Pangan**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	09	05	2.01	0009	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	Dokumen	1	1	1	50.000.000,00	79.992.164,00	79.992.164,00	
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	80.000.000,00	119.999.218,00	119.999.218,00	
2	**11**				**LINGKUNGAN HIDUP**									**65.936.169.557,00**	**66.345.099.170,00**	**67.101.725.095,00**	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP									**65.936.169.557,00**	**66.345.099.170,00**	**67.101.725.095,00**	
2	**11**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**51.015.560.171,00**	**62.781.136.850,00**	**56.909.532.775,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**150.000.000,00**	**57.999.114,00**	**57.999.114,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	2	3	3	75.000.000,00	27.999.925	27.999.925	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3	2	2	75.000.000,00	29.999.189	29.999.189	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**17.259.369.557,00**	**20.468.099.170,00**	**19.268.099.170,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	246	246/14	246/14	17.014.169.557,00	20.227.099.170	19.027.099.170	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	220.200.000,00	241.000.000	241.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	Dokumen	1	0	0	25.000.000,00			Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persen**		**90,00**			**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang	5,00	5,00	5,00	75.000.000,00	75.000.000	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**tahun**	**tahun**	**1 tahun**	**1 tahun**	**1 tahun**	**555.510.000,00**	**645.523.961,00**	**645.523.961,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.010.000,00	20.009.901	20.009.901	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	100.000.000,00	189.999.554	189.999.554	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	50.000.000,00	49.990.351	49.990.351	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	142.500.000,00	142.495.000	142.495.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tahun	Tahun	1	1	1	110.000.000,00	109.999.770	109.999.770	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	12	1	1	18.000.000,00	18.000.000	18.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	15.000.000,00	15.000.000	15.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	100.029.385	100.029.385	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**331.846.814,00**	**9.014.330.805,00**	**2.542.100.805,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	5	1	1	0	8.600.000.000,00	2.127.770.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	201.846.814,00	201.839.680	201.839.680	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	130.000.000,00	212.491.125	212.491.125	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**23.001.700.000,00**	**22.752.100.000,00**	**23.272.725.925,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		384.100.000,00	384.100.000	388.725.925	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		22.617.600.000,00	22.368.000.000	22.884.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**9.642.133.800,00**	**9.768.083.800,00**	**11.048.083.800,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1			48.400.000,00	42.430.000	42.430.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	211	211	211	8.896.450.000,00	9.028.370.000	10.308.370.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	09	0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dirselihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dirselihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	155	155	155	697.283.800,00	697.283.800	697.283.800	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**02**			**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**RPPLH Kabupaten/Kota**	**RPPLH Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**Dokumen**				**1.000.000.000,00**	**999.999.877,00**	**999.999.877,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
							RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	**RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**				
							KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota	**KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**				
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota**	**RPPLH Kota Bandar Lampung**	**RPPLH Kota Bandar Lampung**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	-	**249.999.959,00**	**17.999.959,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	02	2.01	0006		PenyusunanRPPLH Kab/Kota		Jumlah Dokumen RPPLH Kab/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kab/kota dan Mengakomodir arahan RPPLH Provinsi		dokumen	0	1	1	0	249.999.959,00	**17.999.959**	
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota**	**Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota**	**KLHS Kota Bandar Lampung**	**KLHS Kota Bandar Lampung**	**dokumen**	**dokumen**	**1**	**1**	**1**	**1.000.000.000,00**	**749.999.918,00**	**981.999.918,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	1	1	300.000.000,00	499.999.959,00	549.999.959	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	2.02	0005	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	dokumen	dokumen	2	1	1	700.000.000,00	249.999.959,00	431.999.959	
2	**11**	**03**			**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Hasil pengukuran Indeks Kualitas air**	**Hasil pengukuran Indeks Kualitas air**	**indeks**	**indeks**	**58,60**	**58,60**	**58,60**	**650.000.000,00**		**969.999.683,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
							Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara**	**indeks**	**indeks**	**81,40**	**81,40**	**81,40**		**969.999.683,00**		
							Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan**	**indeks**	**indeks**	**34,13**	**34,13**	**34,13**				
							Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	**Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca**	**Persen**	**Persen**	**8,00**	**8,00**	**8,00**				
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Pencegahan, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium**	**DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**550.000.000,00**	**269.999.759,00**	**160.010.839,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	dokumen	1	0	0	300.000.000,00	0		Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	-	119.999.759,00	10.010.839	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang	Dokumen	Dokumen	1	1		250.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota**	**Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota**	**DIKPLHD Kota Bandar Lampung**	**DIKPLHD Kota Bandar Lampung**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**			**100.000.000,00**	**115.000.000,00**	**106.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	03	2.02	0001	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	Laporan	1			100.000.000,00	115.000.000,00	106.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota**	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota**	**Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara**	**Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara**	**lokasi**	**lokasi**	**lokasi**			-	**584.999.924,00**	**703.988.844,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	03	2.03	0008		Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanaka		Kegiatan	**0**	**1,00**	**1,00**	**0**	100.000.000,00	100.000.000	
2	11	03	2.03	0013		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dolumen	Kegiatan	1			-	484.999.924,00	603.988.844	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**04**			**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**Dokumen**	**Dokumen**				**506.125.000,00**		**471.999.760,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
							Master Plan Ruang Terbuka Hijau	**Master Plan Ruang Terbuka Hijau**	**Dokumen**	**Dokumen**					**375.999.760,00**		
							Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau	**Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau**	**Persen**	**Persen**	**4,70**	**4,70**	**4,70**				
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH**	**Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH**	**paket**	**paket**	**paket**	**1,00**	**1,00**	**506.125.000,00**	**375.999.760,00**	**471.999.760,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		Dokumen				1	125.000.000,00			
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/kota	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/kota	Ha	Ha	469,58	439,60	439,60	381.125.000,00	375.999.760,00	471.999.760	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persen**		**63,00**			**100.000.000,00**	**174.999.753,00**	**174.999.753,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan**	**Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan**	**Persen**	**Persen**	**63,00**	**63,00**	**63,00**	**100.000.000,00**	**174.999.753,00**	**174.999.753,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	06	2.01	0003	Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pengawasan IL dan IPPLH)		Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Laporan		1			100.000.000,00			Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	0005		Pengawasan PerizinanBerusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yangditerbitkanolehPemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		Badan Usaha	1	1	1		174.999.753,00	174.999.753	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**09**			**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**sekolah**	**sekolah**	**3**	**3**	**3**	**100.000.000,00**	**79.999.929,00**	**79.999.929,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**sekolah**	**sekolah**	**3**	**3**	**3**	**100.000.000,00**	**79.999.929,00**	**79.999.929,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/DuniaUsaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	sekolah	Entitas	3	3	3	100.000.000,00	79.999.929,00	79.999.929	Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**11**	**10**			**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**		**Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota**		**Persen**		**100,00**			**50.000.000,00**	**99.999.756,00**	**99.999.756,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH**		**Persen**		**100,00**			**50.000.000,00**	**99.999.756,00**	**99.999.756,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota (Pengelolaan Pengaduan)	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Jumlahpengaduanpermasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangan	Dokumen	Pengaduan	1	1	1	50.000.000,00	99.999.756,00	99.999.756	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**11**			**Program Pengelolaan Persampahan**	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Timbulan Sampah yang Ditangani**	**Timbulan Sampah yang Ditangani**	**Persen**	**Persen**	**82,00**	**82,00**	**82,00**	**12.514.484.386,00**	**862.963.562,00**	**7.395.193.562,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
							Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	**Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R**	**Persen**	**Persen**	**18,00**	**18,00**	**18,00**				
							Persentase Cakupan Area Pelayanan	**Persentase Cakupan Area Pelayanan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	**Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Pengelolaan Sampah**	**Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung**	**Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.514.484.386,00**	**862.963.562,00**	**7.395.193.562,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	11	2.01	0002	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Laporan		1			200.000.000,00			Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA /TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Ton		266,450			100.000.000,00		-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	0004		Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis		kelompok		7	7	282.996.950,00	282.963.826,00	282.963.826	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		Dokumen		1	1	11.931.487.436,00	300.000.000,00	6.772.230.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	0019		Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah		Jumlah sampah yang terdaur ulang		TON	0	1			179.999.865,00	179.999.865	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	0020		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		jumlah sampah yang tertangani melalui pemerosesan akhir sampah di TPA/TPST kab/kota ata TPA/TPST regional		TON			266,450	-	99.999.871,00	159.999.871	
2	**12**				**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									**9.181.417.299,00**	**10.540.485.119,00**	**11.357.179.189,00**	
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									**9.181.417.299,00**	**10.540.485.119,00**	**11.357.179.189,00**	
2	**12**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**7.682.014.969,00**	**9.123.513.499,00**	**9.181.082.899,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**60,00**	**60,00**		**31.000.000,00**	**31.664.805,00**	**31.664.805,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BID AKU URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2021, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2021, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun		31.000.000,00	31.664.805,00	31.664.805,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**4.812.812.299,00**	**6.197.143.119,00**	**6.028.012.519,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tersedia	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kali	Orang/Bulan					6.040.485.119,00	5.871.354.519,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan		53	53		4.633.417.299,00			
2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terlaksana	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	Dokumen				179.395.000,00	156.658.000,00	156.658.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		5	5					
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**653.393.770,00**	**661.928.910,00**	**661.928.910,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		14.700.000,00	14.654.535,00	14.654.535,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		189.929.746,00	183.765.880,00	183.765.880,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		23.000.000,00	22.225.279,00	22.225.279,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		4.005.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		195.763.024,00	194.549.400,00	194.549.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	12	12		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	12	12		16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	12	12		173.055.000,00	190.924.221,00	190.924.221,00	
2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		30.941.000,00	29.804.595,00	29.804.595,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**339.750.000,00**	**565.796.665,00**	**792.496.665,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		51.750.000,00	139.369.572,00	139.369.572,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	7	7		262.000.000,00	396.100.621,00	622.800.621,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	8	8		26.000.000,00	30.326.472,00	30.326.472,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**12 BULAN**	**12 BULAN**		**1.630.800.000,00**	**1.432.800.000,00**	**1.432.800.000,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		1.602.000.000,00	1.404.000.000,00	1.404.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BID AND URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**214.258.900,00**	**234.180.000,00**	**234.180.000,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00		40.052.950,00	44.430.000,00	44.430.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	3,00	3,00		67.005.950,00	49.360.000,00	49.360.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	8,00	8,00		79.200.000,00	97.390.000,00	97.390.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	Unit	2,00	2,00		28.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**			**Program Pendaftaran Penduduk**	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**	**Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**793.792.705,00**	**498.908.458,00**	**1.258.033.128,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
							Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	**Sudah**	**Sudah**	**Sudah**	**Sudah**					
							IKM Pelayanan	**IKM Pelayanan**	**Persen**	**Persen**	**86,62**	**86,62**					
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Penerapan KTP Berbasis NIK**	**Penerapan KTP Berbasis NIK**	**Kecamatan**	**Kecamatan**	**20**	**20**		**673.792.705,00**	**395.099.632,00**	**1.196.624.302,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	Dokumen	250.000	250.000		673.792.705,00	395.099.632,00	1.196.624.302,00	
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**	**Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**	**Kecamatan**	**Kecamatan**	**20,00**	**20,00**		**120.000.000,00**	**103.808.826,00**	**61.408.826,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	02	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	Laporan	12	12		120.000.000,00	103.808.826,00	61.408.826,00	
2	**12**	**03**			**Program Pencatatan Sipil**	**Program Pencatatan Sipil**	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**107.600.000,00**	**228.555.325,00**	**228.555.325,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
							Cakupan Penerbitan Akta Nikah	**Cakupan Penerbitan Akta Nikah**	**Persen**	**Persen**	**60,00**	**60,00**					
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah Akta Kelahiran yang terbit**	**Jumlah Akta Kelahiran yang terbit**	**Persen**	**Persen**	**20,00**	**20,00**		**107.600.000,00**	**228.555.325,00**	**228.555.325,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	Laporan	1	1		107.600.000,00	228.555.325,00	228.555.325,00	
2	**12**	**04**			**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update**	**Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update**	**Persen**	**Persen**	**97,00**	**97,00**		**598.009.625,00**	**689.507.837,00**	**689.507.837,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	**Persen**	**Persen**	**44,00**	**44,00**		**598.009.625,00**	**689.507.837,00**	**689.507.837,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Laporan	12	12		150.000.000,00	231.034.070,00	231.034.070,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	Dokumen	12	12		79.000.000,00	80.187.138,00	80.187.138,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Laporan	20	20		369.009.625,00	378.286.629,00	378.286.629,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**				**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									**3.719.723.875,00**	**4.293.397.694,00**	**4.193.397.694,00**	
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									**3.719.723.875,00**	**4.293.397.694,00**	**4.193.397.694,00**	- **100.000.000,00**
329	**13**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**2.609.359.204,00**	**3.294.576.091,00**	**3.194.576.091,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**18.783.740,00**	**3.599.700,00**	**3.599.700,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen			4.848.990,00	899.925,00	899.925,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen			13.934.750,00	2.699.775,00	2.699.775,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100,00**	**100,00**	**98,00**			**2.243.877.125,00**	**2.876.197.544,00**	**2.776.197.544,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Orang/Bulan	Orang/Bulan	21			2.147.723.875,00	2.721.397.694,00	2.621.397.694,00	
2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1			91.080.000,00	153.000.000,00	153.000.000,00	
2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	2			5.073.250,00	1.799.850,00	1.799.850,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**10.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0rang	0rang	3			10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**87.432.019,48**	**149.007.709,00**	**149.007.709,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1			28.953.344,00	64.755.182,00	64.755.182,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1			21.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1			14.891.570,00	17.890.000,00	17.890.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1			3.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1			19.587.105,48	47.762.527,00	47.762.527,00	
2	**13**	**01**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**46.750.000,00**	**76.311.138,00**	**76.311.138,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2			16.750.000,00	25.921.614,00	25.921.614,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2			30.000.000,00	50.389.524,00	50.389.524,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**72.000.000,00**	**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1			72.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	
2	**13**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**130.516.319,52**	**96.460.000,00**	**96.460.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1			47.389.319,52	44.430.000,00	44.430.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	8			71.117.000,00	41.360.000,00	41.360.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	13	01	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	15			12.010.000,00	10.670.000,00	10.670.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**04**			**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL Milik Kemendagri**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL Milik Kemendagri**	**Persen**	**Persen**	**75,00**			**215.766.256,00**	**378.355.945,00**	**378.355.945,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri**	**Persen**	**Persen**	**100,00**			**215.766.256,00**	**378.355.945,00**	**378.355.945,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	Dokumen	1			104.189.818,00	246.824.250,00	246.824.250,00	
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	Dokumen	1			111.576.438,00	131.531.695,00	131.531.695,00	
2	**13**	**05**			**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**	**Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**	**Persen**	**Persen**	**95,00**			**894.598.415,00**	**620.465.658,00**	**620.465.658,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
							Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	**Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persen**	**Persen**	**95,00**						
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga , Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga , Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)**	**Persen**	**Persen**	**80,00**			**894.598.415,00**	**620.465.658,00**	**620.465.658,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	Dokumen	1			129.531.386,00	121.599.224,00	121.599.224,00	
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	Laporan	1			62.429.616,00	93.061.550,00	93.061.550,00	
2	13	05	2.02	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Laporan		1			47.492.013,00			
2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Dokumen	Dokumen	1			301.252.925,00	260.022.574,00	260.022.574,00	
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	Dokumen	1			353.892.475,00	145.782.310,00	145.782.310,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**14**				**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									**25.996.810.527,00**	**37.618.936.144,00**	**41.951.463.144,00**	
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									**25.996.810.527,00**	**37.618.936.144,00**	**41.951.463.144,00**	
2	**14**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**4.591.607.329,00**	**5.592.607.060,00**	**5.847.769.593,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	**14**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**37.500.000,00**	**14.996.639,00**	**14.996.639,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BID AKU URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	4	4		37.500.000,00	14.996.639,00	14.996.639,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**2.792.130.225,00**	**3.546.596.337,00**	**3.746.596.337,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	29	29		2.601.729.527,00	3.356.197.272,00	3.556.197.272,00	
2	14	1	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		182.951.000,00	182.950.872,00	182.950.872,00	
2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1		7.449.698,00	7.448.193,00	7.448.193,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**25.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	29	29		25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**384.476.604,00**	**232.917.380,00**	**232.917.380,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		4.880.000,00	4.878.514,00	4.878.514,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		54.476.000,00	54.474.722,00	54.474.722,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		5.000.000,00	4.996.629,00	4.996.629,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		195.170.000,00	39.960.538,00	39.960.538,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.07	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		96.350.604,00	100.006.977,00	100.006.977,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Invetaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Invetaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**179.700.500,00**	**593.500.000,00**	**593.500.000,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.07	0001	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit		5			550.000.000,00	550.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.07	0005	Pengadaan mebel	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	5	5		106.700.500,00	43.500.000,00	43.500.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit		1			73.000.000,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**762.000.000,00**	**787.100.000,00**	**787.100.000,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		186.000.000,00	211.100.000,00	211.100.000,00	
2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		576.000.000,00	576.000.000,00	576.000.000,00	
2	**14**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**410.800.000,00**	**402.496.704,00**	**457.659.237,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1		30.000.000,00	66.829.450,00	47.430.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	3	3		123.150.000,00	101.018.017,00	175.580.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5		12.650.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.09	0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1		245.000.000,00	221.999.237,00	221.999.237,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**02**			**Program Pengendalian Penduduk**	**Program Pengendalian Penduduk**	**Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun**	**Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**170.000.000,00**	**317.599.059,00**	**317.599.059,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**170.000.000,00**	**317.599.059,00**	**317.599.059,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	02	2.02	0019	Pemetaan Kependudukan	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	Dokumen	1	1		45.000.000,00	29.999.922,00	29.999.922,00	
2	14	02	2.02	0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	Dokumen	1	1		50.000.000,00	29.999.748,00	29.999.748,00	
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	Dokumen	1	1		75.000.000,00	257.599.389,00	257.599.389,00	
2	**14**	**03**			**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Total Fertility Rate (TFR)**	**Total Fertility Rate (TFR)**	**Persen**	**Persen**	**2,20**	**2,20**		**15.420.823.698,00**	**15.597.928.672,00**	**14.382.528.672,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
							Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	**Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun**	**Persen**	**Persen**	**0,26**	**0,26**					
							Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	**Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif**	**Persen**	**Persen**	**67,55**	**67,55**					
							Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)**	**Persen**	**Persen**	**18,08**	**18,08**					
							Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	**Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)**	**Persen**	**Persen**	**64,90**	**64,90**					
							Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	**Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**	**Persen**	**Persen**	**67,15**	**67,15**					
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**102.880.698,00**	**92.279.600,00**	**92.279.600,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya	Dokumen	Dokumen	1	1		82.880.698,00	72.279.807,00	72.279.807,00	
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	Laporan	12	12		20.000.000,00	19.999.793,00	19.999.793,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**7.144.911.500,00**	**13.600.982.360,00**	**12.385.582.360,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	Unit	1	1		248.929.000,00	200.000.000,00	212.000.000,00	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	Orang	2.900	2.900		6.895.982.500,00	13.400.982.360,00	12.173.582.360,00	
2	**14**	**03**	**203**		**Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsiili serta pelaksanaan Pellayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsiili serta pelaksanaan Pellayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan**	**Laporan**	1	1		**7.918.031.500,00**	**906.939.488,00**	**906.939.488,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	03	203	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Dokumen		1			50.000.000,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	14	03	203	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	Unit	1	1		300.000.000,00	135.999.679,00	135.999.679,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	203	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Laporan	12	12		43.879.500,00	672.339.809,00	672.339.809,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	203	0009	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Repsroduksi Di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatann		Orang		2.900			7.410.152.000,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	203	0011	Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	Laporan	12	12		114.000.000,00	98.600.000,00	98.600.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**3**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**255.000.000,00**	**997.727.224,00**	**997.727.224,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	3	2.04	0001	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	Organisasi	1	1		45.000.000,00	445.998.499,00	445.998.499,00	
2	14	3	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Dokumen		1			85.000.000,00			
2	14	3	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Dokumen	Dokumen	1	1		125.000.000,00	551.728.725,00	551.728.725,00	
2	**14**	**04**			**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB**	**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB**	**Persen**	**Persen**	**94,00**	**94,00**		**5.814.379.500,00**	**16.110.801.353,00**	**21.403.565.820,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persen**	**Persen**	**94,00**	**94,00**		**5.759.379.500,00**	**16.023.551.847,00**	**17.955.662.314,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok	Kelompok	134	134		5.644.379.500,00	9.648.752.393,00	9.218.062.860,00	
2	14	04	2.01	0026	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB BKR BKL PPKS PIK R dan usaha peningkatan keluarga akseptor UPPKA	Jumlah Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya	Kelompok	Kelompok	134	134		100.000.000,00	6.354.799.957,00	8.717.599.957,00	
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	Laporan	1	1		15.000.000,00	19.999.497,00	19.999.497,00	
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**55.000.000,00**	**87.249.506,00**	**3.447.903.506,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKRBKL,	Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKRBKL,	Jumlah Poktan yang dibina Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ((BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R)	Jumlah Poktan yang dibina Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ((BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R)	Laporan	Laporan	1	1		20.000.000,00	52.249.654,00	52.249.654,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		35.000.000,00	34.999.852,00	1.984.999.852,00	
2	14	04	2.02	0004		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejateraan Keluarga bagi Mitra Kerja		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesej		Laporan		1				1.410.654.000,00	
2	**15**				**PERHUBUNGAN**									**23.354.774.956,00**	**25.371.512.049,00**	**24.410.362.049,00**	
					DINAS PERHUBUNGAN									**23.354.774.956,00**	**25.371.512.049,00**	**24.410.362.049,00**	**961.150.000,00**
2	**15**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**20.327.559.856,00**	**22.391.512.049,00**	**21.140.912.049,00**	**Dinas Perhubungan**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**24.000.500,00**	**37.108.639,00**	**37.108.639,00**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	6	6	6	24.000.500,00	37.108.639,00	37.108.639	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**11.651.184.956,00**	**13.803.312.049,00**	**12.528.712.049,00**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	165	165	165	11.352.774.956,00	13.585.512.049,00	12.339.412.049,00	
2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	298.410.000,00	217.800.000,00	189.300.000,00	
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**			-	-	-	**Dinas Perhubungan**
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**41.999.500,00**	**158.808.165,00**	**182.808.165,00**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		36.000.000,00	11.630.116,00	11.630.116,00	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket						24.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.999.500,00	60.149.750,00	60.149.750	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	-	87.028.299,00	87.028.299	
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**		**Persen**		**98,00**			**150.000.000,00**	-	-	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit		2			150.000.000,00			Dinas Perhubungan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**8.107.800.000,00**	**8.107.800.000,00**	**8.107.800.000,00**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	355.800.000,00	355.800.000,00	355.800.000	
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	7.752.000.000,00	7.752.000.000,00	7.752.000.000	
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**352.574.900,00**	**284.483.196,00**	**284.483.196,00**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	52.000.000,00	43.930.000,00	43.930.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	22	22	22	300.574.900,00	221.258.760,00	221.258.760	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	-	19.294.436,00	19.294.436	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Persentase Pelayanan Angkutan Darat**	**Persentase Pelayanan Angkutan Darat**	**Persen**	**Persen**	**0,0925**	**0,0925**	**0,0925**	**2.792.015.100,00**	**2.743.000.000,00**	**3.032.450.000,00**	**Dinas Perhubungan**
							Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar dalam Kondisi Baik	**Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar dalam Kondisi Baik**	**Persen**	**Persen**	**97,00**	**97,00**	**97,00**				
							Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Kependudukan	**Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Kependudukan**	**Kejadian**	**Kejadian**	**185,00**	**185,00**	**185,00**				
2	**15**	**02**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Tingkat Pelayanan Pada Jalan Arteri**	**Tingkat Pelayanan Pada Jalan Arteri**	**tingkat pelayanan**	**tingkat pelayanan**	**C**	**C**	**C**	**1.600.000.000,00**	**1.600.000.000,00**	**1.889.450.000,00**	**Dinas Perhubungan**
							Tingkat Pelayanan Pada Jalan Kolektor	**Tingkat Pelayanan Pada Jalan Kolektor**	**tingkat pelayanan**	**tingkat pelayanan**	**C**	**C**	**C**				
							Rasio volume lalu lintas pada jalan arteri	**Rasio volume lalu lintas pada jalan arteri**	**rasio**	**rasio**	**0,45**	**0,45**	**0,45**				
							Rasio volume lalu lintas pada jalan kolektor	**Rasio volume lalu lintas pada jalan kolektor**	**rasio**	**rasio**	**0,45**	**0,45**	**0,45**				
							Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali	**Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali**	**rasio**	**rasio**	**75,00**	**75,00**	**75,00**				
							Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi**	**rasio**	**rasio**	**0,72**	**0,72**	**0,72**				
							Rasio Konektivitas Nasional	**Rasio Konektivitas Nasional**	**rasio**	**rasio**	**29,15**	**29,15**	**29,15**				
2	15	02	2.01	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Laporan		1			1.600.000.000,00		289.450.000,00	
2	15	02	2.01	0007		Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Laporan	0	1	1		1.600.000.000,00	1.600.000.000	
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**0,92**	**0,92**	**0,92**	**819.015.100,00**	**530.000.000,00**	**530.000.000,00**	**Dinas Perhubungan**
							Persentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,guardril) pada jalan kota dalam kondisi baik		**Persen**	**Persen**	**0,80**	**0,80**	**0,80**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Paket	Unit	2 paket	95,00	95,00	819.015.100,00	400.000.000,00	**400.000.000**	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Paket	Unit	4 paket	1.514		-	130.000.000,00	130.000.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) lokasi perparkiran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**	**Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) lokasi perparkiran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**	**Persen**	**Persen**		**0,18**		**-**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	2.04	0001	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Dokumen		1		-	20.000.000,00	20.000.000	
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**	**Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**	**Persen**	**Persen**	**1,00**			**373.000.000,00**	**543.000.000,00**	**543.000.000,00**	**Dinas Perhubungan**
							Jumlah Uji KIR angkutan umum	**Jumlah Uji KIR angkutan umum**	**uji**	**uji**	**13.700**						
							Tersediannya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	**Tersediannya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji**	**unit**	**unit**	**1**						
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	Unit	2	1		-	170.000.000,00	**170.000.000**	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	Dokumen	1	1		350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	Unit	1	7		23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**2.11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum**	**Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum**	**orang/ barang**	**orang/ barang**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**-**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Dinas Perhubungan**
							Meningkatnya Load Faktor angkutan umum	**Meningkatnya Load Faktor angkutan umum**	**Persen**	**Persen**	**60,37**	**60,37**	**60,37**				
							Jumlah Arus penumpang angkutan umum	**Jumlah Arus penumpang angkutan umum**	**orang**	**orang**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**				
							Rasio Ijin Trayek	**Rasio Ijin Trayek**	**rasio**	**rasio**	**0,02**	**0,02**	**0,02**				
2	15	02	2.11	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana UmumJaringan Trayek Perkotaandalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen		1	1	-	50.000.000,00	50.000.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**05**			**Program Pengelolaan Perkeretaapian**	**Program Pengelolaan Perkeretaapian**	**Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Yang dijaga**	**Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Yang dijaga**	**Kejadian**	**Kejadian**	**1**	**1**	**1**	**235.200.000,00**	**237.000.000,00**	**237.000.000,00**	**Dinas Perhubungan**
2	**15**	**05**	**2.03**		**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat pertumbuhan Perlintasan Sebidang Kereta Api Dengan Jalan Raya**	**Tingkat pertumbuhan Perlintasan Sebidang Kereta Api Dengan Jalan Raya**	**Persen**	**Persen**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**-**	**-**		**Dinas Perhubungan**
2	**15**	**05**	**2.05**		**Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Kecelakaan di pintu Perlintasan Kereta Api Yang dijaga**	**Tingkat Kecelakaan di pintu Perlintasan Kereta Api Yang dijaga**	**Kejadian**	**Kejadian**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**235.200.000,00**	**237.000.000,00**	**237.000.000,00**	**Dinas Perhubungan**
							Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Bandar Lampung	**Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Bandar Lampung**	**Kejadian**	**Kejadian**	**7,00**	**7,00**	**7,00**				
2	15	05	2.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi	Laporan	Laporan	1	1	1	235.200.000,00	237.000.000,00	**237.000.000,00**	
2	**16**				**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									**9.120.019.593,00**	**10.512.137.428,00**	**14.010.738.698,00**	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									**9.120.019.593,00**	**10.512.137.428,00**	**14.010.738.698,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**16**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.486.141.604,00**	**5.825.431.354,00**	**5.323.621.323,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**22.000.000,00**	**60.000.000,00**	**24.000.000,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	11.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	Laporan	1	1	1	11.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.596.174.593,00**	**4.424.583.337,00**	**3.815.483.337,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	45	45	45	3.475.174.593,00	4.167.784.298,00	3.567.784.298,00	
2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	111.000.000,00	226.800.000,00	226.800.000,00	
2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	10.000.000,00	29.999.039,00	20.899.039,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan**	**Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**10.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	20	20	20	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**110.467.011,00**	**117.798.017,00**	**183.898.386,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persen	Persen	1,00	1,00	1,00	15.000.000,00	29.998.479,00	38.503.178,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persen	Persen	1,00	1,00	1,00	10.000.000,00	14.990.045,00	22.265.715,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.467.011,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persen	Persen	1,00	1,00	1,00	9.000.000,00	9.999.954,00	15.219.954,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1,00	1,00	1,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	50.000.000,00	21.809.539,00	66.909.539,00	
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	-	-	**75.189.600,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit				-	-		
2	16	01	2.07	0011	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung								-		75.189.600,00	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**	**698.000.000,00**	**768.000.000,00**	**768.000.000,00**	
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	696.000.000,00	744.000.000,00	744.000.000,00	gak masuk dalam rincian
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**49.500.000,00**	**440.050.000,00**	**442.050.000,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	29.400.000,00	42.430.000,00	42.430.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1	1	1	17.600.000,00	41.620.000,00	41.620.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	2.500.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan gedung kantor	jumlah pemeliharaan gedung kantor	Unit	Unit	1	1	1	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	-	300.000.000,00	302.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**02**			**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentase Infrastruktur IT yang berfungsi baik**	**Persentase Infrastruktur IT yang berfungsi baik**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**2.848.845.000,00**	**2.957.319.174,00**	**6.509.730.475,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**1. Tersusunnya Informasi Layak Anak (ILA) Kota Bandar Lampung 2. Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Media Center dan Pelayanan PPID 4. Tersedianya Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah**	**1. Tersusunnya Informasi Layak Anak (ILA) Kota Bandar Lampung 2. Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Media Center dan Pelayanan PPID 4. Tersedianya Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**2.848.845.000,00**	**2.957.319.174,00**	**6.509.730.475,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi publik	Pengelolaan Media Komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	Dokumen	1	1	1	-	-		
2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.248.500.000,00	1.248.500.000,00	2.713.911.301,00	
2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	Orang	20	20	20	15.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	
2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.585.345.000,00	1.661.819.174,00	3.748.819.174,00	
2	**16**	**03**			**Program Aplikasi Informatika**	**Program Aplikasi Informatika**	**Presentase aplikasi IT dan aplikasi e-government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik**	**Presentase aplikasi IT dan aplikasi e-government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**1.785.032.989,00**	**1.729.386.900,00**	**2.177.386.900,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
									Persen	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**				
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik**	**Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**1.525.032.989,00**	**1.537.534.708,00**	**1.837.534.708,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	Unit	1	1	1	1.525.032.989,00	1.537.534.708,00	1.837.534.708,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**1. Tersedianya Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTEL) 2. Terbentuknya Pengembangan dan Pengelolaan Data Center 3. Tersedianya Pengkajian dan**	**1. Tersedianya Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTEL) 2. Terbentuknya Pengembangan dan Pengelolaan Data Center 3. Tersedianya Pengkajian dan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**260.000.000,00**	**191.852.192,00**	**339.852.192,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan e government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penatalaksanaan dan Pengawasan e government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	160.000.000,00	109.996.900,00	157.996.900,00	
2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	Unit	1	1	1	100.000.000,00	81.855.292,00	181.855.292,00	
2	**17**				**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									**5.213.045.961,00**	**5.442.935.330,00**	**5.292.935.330,00**	
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								**5.213.045.961,00**	**5.442.935.330,00**	**5.292.935.330,00**	**150.000.000,00**
2	**17**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan menengah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan menengah**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.168.972.211,00**	**3.826.952.282,00**	**3.526.952.282,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**66.000.000,00**	**79.560.971,00**	**79.560.971,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	5	5	5	66.000.000,00	79.560.971,00	79.560.971,00	
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.390.875.961,00**	**2.975.715.330,00**	**2.675.715.330,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	26	26	26	2.291.875.961,00	2.931.935.330,00	2.631.935.330,00	
2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	99.000.000,00	43.780.000,00	43.780.000,00	
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	5	5	5	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**172.036.928,00**	**186.979.433,00**	**186.979.433,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	25.636.928,00	25.583.814,00	25.583.814,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.000.000,00	2.996.700,00	2.996.700,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	**1**	**1**	**1**	11.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	27.000.000,00	26.998.919,00	26.998.919,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
2	17	01	2.06	0009	Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**50.000.000,00**	**43.086.548,00**	**43.086.548,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.07	0002	Jumlah pengadaan kendaraan dinas bermotor	-	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	-	Unit	Unit				-	-	-	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	Unit	15	15	15	50.000.000,00	43.086.548,00	43.086.548,00	
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	Unit	Unit				-	-	-	
2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	Unit	Unit				-	-	-	
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**362.000.000,00**	**414.000.000,00**	**414.000.000,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	26.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	336.000.000,00	348.000.000,00	348.000.000,00	
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**78.059.322,00**	**77.610.000,00**	**77.610.000,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.088,00	42.430.000,00	42.430.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinmnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	6	6	6	39.527.234,00	27.350.000,00	27.350.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	5.000.000,00	7.830.000,00	7.830.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	**17**	**04**			**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Persentase koperasi aktif**	**Persentase koperasi aktif**	**Persen**	**Persen**	**47,21**	**47,21**	**47,21**	**75.000.000,00**	**75.009.081,00**	**75.009.081,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dama 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dama 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi**	**Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi**			**35.18**	**35.18**	**35.18**	**75.000.000,00**	**75.009.081,00**	**75.009.081,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	Unit Usaha	80	80	80	75.000.000,00	75.009.081,00	75.009.081,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	**17**	**05**			**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	-	**Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi**	-	**Persen**	**Persen**	**0,43**	**0,43**	**0,43**	**410.170.000,00**	-	-	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi**	-			**48,80**	**48,80**	**48,80**	**410.170.000,00**	-	-	**Dinas Koperasi dan UKM**
						-	**Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian**	-			**0,12**	**0,12**	**0,12**				
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	-	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	Orang	Orang	150	150	150	410.170.000,00			Dinas Koperasi dan UKM
2	**17**	**06**			**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	**Persen**	**Persen**	**4,87**	**4,87**	**4,87**	**729.903.750,00**	**575.000.129,00**	**575.000.129,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
							Persentase fasilitasi penerbitan Sertifikat Nomor induk Koperasi (NIK)	**Persentase fasilitasi penerbitan Sertifikat Nomor induk Koperasi (NIK)**	**Persen**	**Persen**	**27,12**	**27,12**	**27,12**				
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi**	**Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi**			**1,01**	**1,01**	**1,01**	**729.903.750,00**	**575.000.129,00**	**575.000.129,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	06	2.01	0001	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	Orang	50	50	50	729.903.750,00			Dinas Koperasi dan UKM
2	17	06	2.01	0009		pemberdayaan koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota								-	575.000.129,00	575.000.129,00	
2	**17**	**07**			**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro**	**Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro**	**Persen**	**Persen**	**23,60**	**23,60**	**23,60**	**170.000.000,00**	**312.784.742,00**	**462.784.742,00**	
							Persentase UKM Non BPR LKM Aktif	**Persentase UKM Non BPR LKM Aktif**	**Persen**	**Persen**	**40,50**	**40,50**	**40,50**				
							Persentase BPR/LKM Aktif	**Persentase BPR/LKM Aktif**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				**Dinas Koperasi dan UKM**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk**			**3,90**	**3,90**	**3,90**	**170.000.000,00**	**312.784.742,00**	**462.784.742,00**	
							Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	**Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan**			**7,50**	**7,50**	**7,50**				Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	0001	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Unit Usaha	Unit Usaha	30	30	30	50.000.000,00			Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	Unit Usaha				-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	0003	Fasiiitasi Kemudahan perizinan Usaha Mikro	Fasiiitasi Kemudahan perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	Unit Usaha	30	30	30	120.000.000,00	312.784.742,00	462.784.742,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam	Orang	Orang	-	-	-	-	-	-	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	**17**	**08**			**Program Pengembangan UMKM**	**Potensi dan Pengembangan Usaha**	**Persentase Usaha Mikro dan Kecil**	**Persentase Usaha Mikro dan Kecil**	**Persen**	**Persen**	**67,30**	**67,30**	**67,30**	**659.000.000,00**	**653.189.096,00**	**653.189.096,00**	
						Mikro	**Pertumbuhan Produktivitas UMKM**	**Pertumbuhan Produktivitas UMKM**	**Persen**	**Persen**	**5,40**	**5,40**	**5,40**				**Dinas Koperasi dan UKM**
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran**	**Persen**	**Persen**	**2,40**	**2,40**	**2,40**	**659.000.000,00**	**653.189.096,00**	**653.189.096,00**	
2	17	08	2.01	0001	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,	Unit Usaha	Unit Usaha	30,00	30,00	30,00	659.000.000,00	-	-	
2	17	08	2.02	0006		Produksi dan Penghołahan, pdemasaran Sumber daya manusia, serta desain dan tehnologi		...							653.189.096,00	653.189.096,00	
2	**18**				**PENANAMAN MODAL**									**8.595.677.489,00**	**10.879.194.191,00**	**10.629.194.191,00**	
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									**8.595.677.489,00**	**10.879.194.191,00**	**10.629.194.191,00**	
2	**18**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**7.574.077.489,00**	**9.869.865.455,00**	**9.619.865.455,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**23.250.000,00**	**23.248.884,00**	**23.248.884,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	3	3	3	23.250.000,00	23.248.884,00	23.248.884,00	
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.183.477.486,00**	**7.821.612.191,00**	**7.571.612.191,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	72	72	72	6.083.077.486,00	7.751.452.191,00	7.501.452.191,00	
2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	100.400.000,00	70.160.000,00	70.160.000,00	
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	-	-	-	-			**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	-	-	-	-			Dinas Penanaman Modal dan PTSP

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**284.467.915,00**	**391.676.409,00**	**391.676.409,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	100.900.449,00	85.849.764,00	85.849.764,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	16.567.466,00	14.991.946,00	14.991.946,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	95.000.000,00	85.726.826,00	85.726.826,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	7.000.000,00	4.999.891,00	4.999.891,00	
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	20.000.000,00	19.990.000,00	19.990.000,00	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	45.000.000,00	180.117.982,00	180.117.982,00	
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**139.500.000,00**	**713.000.000,00**	**713.000.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	139.500.000,00	713.000.000,00	713.000.000,00	
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**790.500.000,00**	**771.000.000,00**	**771.000.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	190.500.000,00	171.000.000,00	171.000.000,00	
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**152.882.088,00**	**149.327.971,00**	**149.327.971,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	5	5	5	33.532.088,00	33.527.971,00	33.527.971,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	14 Unit (3 Unit Mobil, 11 Unit Motor)	14 Unit (3 Unit Mobil, 11 Unit Motor)	14 Unit (3 Unit Mobil, 11 Unit Motor)	99.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	20.350.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**02**			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Jumlah/Nilai Investasi PMA**	**Jumlah/Nilai Investasi PMA**	**Dolar ($)**	**Dolar ($)**	**669.294.277,84**	**669.294.277,84**	**669.294.277,84**	**55.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
							Jumlah/Nilai Investasi PMDN	**Jumlah/Nilai Investasi PMDN**	**Juta Rupiah (Rp)**	**Juta Rupiah (Rp)**	**2.345.964,76**	**2.345.964,76**	**2.345.964,76**				
							Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja**	**Orang/ Perusahaan**	**Orang/ Perusahaan**	**9,85**	**9,85**	**9,85**				
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau**	**Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau**	**persentase**	**persentase**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	02	2.02	0002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Dokumen		1			55.000.000,00			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	02	2.02	0004		Penyusunan Peta Potensi		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Dokumen		1	1		70.000.000,00	70.000.000,00	
2	**18**	**03**			**Program Promosi Penanaman Modal**	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Persentase Promosi Penanaman Modal**	**Persentase Promosi Penanaman Modal**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000,00**	**100.086.784,00**	**100.086.784,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Promosi Investasi Daerah**	**Promosi Investasi Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000,00**	**100.086.784,00**	**100.086.784,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	50.000.000,00	100.086.784,00	100.086.784,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**04**			**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**IKM Bidang Perizinan**	**IKM Bidang Perizinan**	**Angka**	**Angka**	**86,70**	**86,70**	**86,70**	**614.000.000,00**	**450.999.952,00**	**450.999.952,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Ketepatan Waktu Pemenuhan Pelayanan Perizinan**	**Ketepatan Waktu Pemenuhan Pelayanan Perizinan**	**hari**	**hari**	**14**	**14**	**14**	**614.000.000,00**	**450.999.952,00**	**450.999.952,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	04	2.01	0001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Pelaku Usaha		500			354.000.000,00			
2	18	04	2.01	0002	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal		Kegiatan Usaha		500			260.000.000,00			
2	18	04	2.01	0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melaluiSistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Pelaku Usaha		15.000	15.000		276.000.000,00	276.000.000,00	
2	18	04	2.01	0008		Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha		Kegiatan Usaha		70	70		174.999.952,00	174.999.952,00	
2	**18**	**05**			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN**	**Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN**	**Persen**	**Persen**	**21,95**	**21,95**	**21,95**	**302.600.000,00**	**388.242.000,00**	**388.242.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengendalian Nilai Investasi PMDN**	**Persentase Pengendalian Nilai Investasi PMDN**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**302.600.000,00**	**388.242.000,00**	**388.242.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sikronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Pelaku Usaha		500			287.240.000,00			
2	18	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		Kegiatan Usaha		500			15.360.000,00			
2	18	05	2.02	0004		Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		Kegiatan Usaha		10	10		58.236.000,00	58.236.000,00	
2	18	05	2.03	0005		Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha		Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha		Pelaku Usaha		291	291		213.534.000,00	213.534.000,00	
2	18	05	2.04	0006		Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inpeksi lapangan serta dilakukan		Kegiatan Usaha		85	85		116.472.000,00	116.472.000,00	
2	**18**	**06**			**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase Penyajian Data Penanaman Modal**	**Persentase Penyajian Data Penanaman Modal**	**PERSEN**	**PERSEN**							**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan secara Terpadu**	**Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan secara Terpadu**	**PERSEN**	**PERSEN**							**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	06	2.01	0001	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Beusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Beusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	Dokumen							

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**19**				**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									**12.335.453.946,00**	**13.900.773.180,00**	**13.600.773.180,00**	
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									**12.335.453.946,00**	**13.900.773.180,00**	**13.600.773.180,00**	
2	**19**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.498.051.725,00**	**4.277.696.804,00**	**4.037.135.804,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**38.991.974,00**	**38.991.295,00**	**38.991.295,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	7	7	7	38.991.974,00	38.991.295,00	38.991.295,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.752.327.870,00**	**3.514.171.378,00**	**3.214.171.378,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	28	28	28	2.638.078.096,00	3.403.986.330,00	3.103.986.330,00	
2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	114.249.774,00	110.185.048,00	110.185.048,00	
2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	-	-	-	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	Paket	-	59	0	0	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Orang	-	2	0	0	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**104.018.962,00**	**120.790.166,00**	**120.790.166,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	14.795.479,00	28.513.994,00	43.695.935,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Paket	-	1	0	0	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.285.983,00	4.285.881,00	4.285.881,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	19.937.500,00	19.250.000,00	4.068.059,00	
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	50.000.000,00	53.740.291,00	53.740.291,00	
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kabutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kabutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**35.000.000,00**	**38.093.965,00**	**61.053.965,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Unit	-	0	0	0	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	35.000.000,00	38.093.965,00	38.093.965,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	0	0	1	-	-	22.960.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**456.000.000,00**	**456.000.000,00**	**456.000.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	456.000.000,00	456.000.000,00	456.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**Persen**	**111.712.919,00**	**109.650.000,00**	**146.129.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	36.000.000,00	42.430.000,00	42.430.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1	1	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	4	4	4	73.712.919,00	65.220.000,00	101.699.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**02**			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif**	**Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**249.112.169,00**	**249.111.151,00**	**249.111.151,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
							Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	**Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**	**Persen**	**Persen**	**3,88**	**3,88**	**3,88**				
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**49.112.169,00**	**49.111.151,00**	**49.111.151,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	Orang	20,00	20,00	20,00	27.155.140,00	27.154.159,00	27.154.159,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Wira Usaha Pemula	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemula Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Wirausaha Pemula Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	Orang	30,00	30,00	30,00	21.957.029,00	21.956.992,00	21.956.992,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-	Orang	-	30,00	0,00	0,00	-	-		Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi Perlindungan Pemuda, Advokasi Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	-	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan	-	Orang	-	60,00	0,00	0,00	-			Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
2	**19**	**03**			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Cakupan Pembinaan Olahraga**	**Cakupan Pembinaan Olahraga**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**7.588.290.052,00**	**8.292.465.225,00**	**8.233.026.225,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
							Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi	**Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara	**Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**83,33**	**83,33**	**83,33**				
							Peningkatan Prestasi Olahraga	**Peningkatan Prestasi Olahraga**	**Jumlah**	**Jumlah**	**10,00**	**10,00**	**10,00**				
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	**Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	**Persen**	**-**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	-	-		**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	-	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	-	Orang	-	20,00	0,00	0,00	-	-		Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah kabupaten/Kota**	-	**Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	**Persen**	**0**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**453.160.000,00**	-	-	**Dinas Pemuda dan Olahraga**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-	Dokumen	0	1	0	0	453.160.000,00	-	-	
2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	-	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	-	Dokumen	0	1	0	0	-	-	-	
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**-**	**Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**-**	**Persen**		**98,00**		**0,00**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	03	2.03	0001	Seleksi Atlit Daerah	-	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-	Orang		100		0	-	-	-	
2	19	03	2.03	0005	Koordinas dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	-	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	-	Dokumen		1		0	-	-	-	
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan**	**Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelolahragaan**	**Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelolahragaan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.529.951.400,00**	**7.407.731.541,00**	**7.407.731.541,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Pembinaan Organisasi Keolahragaan		Organisasi		1	1		6.529.951.400,00	7.407.731.541,00	7.407.731.541,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**605.178.652,00**	**884.733.684,00**	**825.294.684,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	468.511.154,00	748.066.463,00	688.627.463,00	
2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Dokumen	Dokumen	1	1	1	136.667.498,00	136.667.221,00	136.667.221,00	
2	**19**	**04**			**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.000.000.000,00**	**1.081.500.000,00**	**1.081.500.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.000.000.000,00**	**1.081.500.000,00**	**1.081.500.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat	Organisasi	Organisasi	1	1	1	1.000.000.000,00	1.081.500.000,00	1.081.500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**20**				**STATISTIK**									**115.000.000,00**	**181.598.645,00**	**205.363.645,00**	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									**115.000.000,00**	**181.598.645,00**	**205.363.645,00**	
2	**20**	**02**			**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi**	**Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi**	**Ada/Tidak**	**Ada/Tidak**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**115.000.000,00**	**181.598.645,00**	**205.363.645,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**1. Terevaluasinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Bandar Lampung 2. Terbentuknya Operasional Literasi Data dan Informasi 3. Tersedianya Penyusunan Data Sektoral 4. Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Data Elektronik**	**1. Terevaluasinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Bandar Lampung 2. Terbentuknya Operasional Literasi Data dan Informasi 3. Tersedianya Penyusunan Data Sektoral 4. Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Data Elektronik**	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	**115.000.000,00**	**181.598.645,00**	**205.363.645,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	Dokumen	1	1	1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	20	02	2.01	0002	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	Orang	20	20	20	15.000.000,00			
2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	Dokumen	1	1	1	75.000.000,00	106.598.645,00	106.598.645,00	
2	20	02	2.01	0005	Pengembangan Infrastruktur	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	Unit	1	1	1	10.000.000,00	60.000.000,00	83.765.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
					PERSANDIAN									**45.000.000,00**	**167.633.225,00**	**162.833.225,00**	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									**45.000.000,00**	**167.633.225,00**	**162.833.225,00**	
2	**21**	**02**			**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik**	**Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**45.000.000,00**	**167.633.225,00**	**162.833.225,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1. Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Postelsus dan Penyiaran 2. Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bandar Lampung 3. Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Persandian**	**1. Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Postelsus dan Penyiaran 2. Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bandar Lampung 3. Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Persandian**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**45.000.000,00**	**167.633.225,00**	**162.833.225,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	15.000.000,00	69.996.679,00	69.996.679,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	Laporan	1	1	1	15.000.000,00	37.641.601,00	32.841.601,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	20	20	20	15.000.000,00	59.994.945,00	59.994.945,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**22**				**KEBUDAYAAN**									**1.898.900.000,00**	**1.898.899.408,00**	**1.898.899.408,00**	
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									**1.898.900.000,00**	**1.898.899.408,00**	**1.898.899.408,00**	
2	**22**	**02**			**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi**	**Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi**	**Jumlah**	**Jumlah**	**92**	**92**	**92**	**700.000.000,00**	**699.999.256,00**	**699.999.256,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dilaksanakannya Pentas Seni Pengembangan dan Pembinaan Budaya**	**Dilaksanakannya Pentas Seni Pengembangan dan Pembinaan Budaya**	**Kegiatan**	**Kegiatan**	**5**	**5**	**5**	**700.000.000,00**	**699.999.256,00**	**699.999.256,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	Objek	4	4	4	700.000.000,00	699.999.256,00	699.999.256,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**03**			**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan**	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Jumlah**	**Jumlah**	**5**	**5**	**5**	**1.123.900.000,00**	**1.123.900.243,00**	**1.123.900.243,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan**	**Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan**	**Keg**	**Keg**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1.123.900.000,00**	**1.123.900.243,00**	**1.123.900.243,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
							Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/ Pendukung Pertunjukan Seni	**Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/ Pendukung Pertunjukan Seni**	**Persen**	**Persen**	**0,93**	**0,93**	**0,93**				
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional*	Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional*	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	Orang	5,00	5,00	5,00	75.000.000,00	75.000.243,00	75.000.243,00	
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan	Lembaga	Lembaga	1	1	1	1.048.900.000,00	1.048.900.000,00	1.048.900.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**04**			**Program Pembinaan Sejarah**	**Program Pembinaan Sejarah**	**Jumlah Sejarah yang Dilakukan Pembinaan**	**Jumlah Sejarah yang Dilakukan Pembinaan**	**Kegiatan**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**1**	**75.000.000,00**	**74.999.909,00**	**74.999.909,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cagar Budaya Yang Di Lestarikan**	**Jumlah Cagar Budaya Yang Di Lestarikan**	**Keg**	**Keg**	**1**	**1**	**1**	**75.000.000,00**	**74.999.909,00**	**74.999.909,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
							Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Yang Dilindungi	**Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Yang Dilindungi**	**Unit**	**Unit**	**5**	**5**	**5**				
							Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan	**Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan**	**Unit**	**Unit**	**8**	**8**	**8**				
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data Dan Informasi Sejarah*	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data Dan Informasi Sejarah*	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Buku	Buku	1	1	1	75.000.000,00	74.999.909,00	74.999.909,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**23**				**PERPUSTAKAAN**									**5.002.008.881,00**	**16.754.334.948,00**	**16.504.334.948,00**	
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									**5.002.008.881,00**	**16.754.334.948,00**	**16.504.334.948,00**	
2	**23**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.706.961.881,00**	**5.614.338.322,00**	**5.364.338.322,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**50.000.000,00**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Laporan	5	5	5	40.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.846.083.312,10**	**4.887.750.222,00**	**4.637.750.222,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	39	39	39	3.721.083.312,10	4.727.334.948,00	4.477.334.948,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasin Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasin Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	125.000.000,00	160.415.274,00	160.415.274,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**35.000.000,00**	-	-	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	4	4	4	35.000.000,00	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**185.001.599,90**	**172.488.100,00**	**192.495.500,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	35.000.000,00	34.999.745,00	34.999.745,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.000.000,00	14.999.359,00	14.999.359,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.000.000,00	20.000.000,00	40.007.400,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	18.501.599,90	22.408.622,00	22.408.622,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	7	7	7	24.000.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	12	12	12	5.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	5	5	5	57.000.000,00	54.280.374,00	54.280.374,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barak Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barak Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	-	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	unit	0	0	0	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	unit	0	0	0	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	unit	0	1	1	-	5.500.000,00	5.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**272.400.000,00**	**292.000.000,00**	**271.992.600,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	78.400.000,00	100.000.000,00	79.992.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	194.000.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**318.476.969,00**	**201.600.000**	**201.600.000**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	23	01	2.09	0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	45.532.088,00	42.430.000	42.430.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	6	6	6	180.944.881,00	129.550.000	129.550.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaaan peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	26	26	26	15.000.000,00	14.620.000	14.620.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	0011	Pemeliharaan/rehabitilasi sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabitilasi sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	2	2	2	77.000.000,00	15.000.000	15.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**			**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun**	**Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun**	**Angka**	**Angka**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**270.047.000,00**	**11.114.996.626,00**	**11.114.996.626,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Persen**	**Persen**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**140.000.000,00**	**139.999.674**	**139.999.674**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen TIK berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen TIK berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	Layanan	Layanan	3	3	3	30.000.000,00	29.999.674	29.999.674	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksemplar	Eksemplar	100	0	0	25.000.000,00	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	Perpustakaan	25	25	25	20.000.000,00	25.000.000	25.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Orang	50	50	50	30.000.000,00	25.000.000	25.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	Eksemplar	100	100	100	35.000.000,00	60.000.000	60.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Persen, Peserta, Perpustakaan, TBM, Kelurahan, Sekolah**	**Persen, Peserta, Perpustakaan, TBM, Kelurahan, Sekolah**	**450 Peserta dan 5 Perpustakaan**	**450 Peserta dan 5 Perpustakaan**	**450 Peserta dan 5 Perpustakaan**	**130.047.000,00**	**10.974.996.952**	**10.974.996.952**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	02	2.02	0001	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	Lokus	2	2	2	30.047.000,00	19.998.270	19.998.270	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	0002	Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di Tempat-tempat umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di Tempat-tempat umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	Perpustakaan	5	5	5	20.000.000,00	10.849.999.784	10.849.999.784	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Baca Membaca	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Baca Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	Orang	50	50	50	50.000.000,00	70.000.000	70.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	Perpustakaan	8	8	8	30.000.000,00	34.998.898	34.998.898	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**03**			**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan**	**Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan**	**Jumlah**	**Jumlah**	**7**	**7**	**7**	**25.000.000,00**	**25.000.000**	**25.000.000**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**23**	**03**	**2.02**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Koleksi Budaya Etnis Nusantara di Kota Bandar Lampung**	**Koleksi Budaya Etnis Nusantara di Kota Bandar Lampung**	**Naskah**	**Naskah**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	03	2.02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Eksemplar	Eksemplar	75,00	75,00	75,00	25.000.000,00	25.000.000	25.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**24**				**KEARSIPAN**									**189.481.000,00**	**215.000.000,00**	**215.000.000,00**	
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									**189.481.000,00**	**215.000.000,00**	**215.000.000,00**	
2	**24**	**02**			**Program Pengelolaan Arsip**	**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku**	**Persen**	**Persen**	**22,20**	**22,20**	**22,20**	**169.481.000,00**	**215.000.000,00**	**215.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kapasitas SDM Bagi Pengelola Arsip tentang Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta**	**Kapasitas SDM Bagi Pengelola Arsip tentang Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta**	**Persen**	**Persen**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**80.000.000,00**	**105.000.000,00**	**105.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	Berkas	50	50	50	30.000.000,00	90.000.000	90.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	Berkas	100	100	100	50.000.000,00	15.000.000	15.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Jumlah Arsip yang tertata dan terpublikasi**	**Meningkatnya Jumlah Arsip yang tertata dan terpublikasi**	**Persen**	**Persen**	**1000 Berkas**	**1000 Berkas**	**1000 Berkas**	**30.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	02	2.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip	Arsip		50	50		50.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	Arsip	140	140	140	30.000.000,00	20.000.000	20.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Pembinaan Secara Teknis Terhadap ASN dan Pegawai Swasta**	**Pelaksanaan Pembinaan Secara Teknis Terhadap ASN dan Pegawai Swasta**	**Paket**	**Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**59.481.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	Pengguna	54	54	54	29.481.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Terbinanya ASN Unit Kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1	0	0	**30.000.000,00**	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**			**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Jumlah Arsip yang dimusnahkan**	**Jumlah Arsip yang dimusnahkan**	**Jumlah**	**Jumlah**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	-	-	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun**	**Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliikin retensi di bawah 10 tahun**	**Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Mmeiliiki retensi di Bawah 10 Tahun**	**Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Mmeiliiki retensi di Bawah 10 Tahun**	**Arsip**	**Arsip**	**150 Arsip**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	-	-	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	03	2.01	0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	Berkas	180	0	0	20.000.000,00	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**	**2.03**		**Peyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Peyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Jumlah Arsip Daerah Terselamatkan**	**Jumlah Arsip Daerah Terselamatkan**	**Berkas, Paket**	**Berkas, Paket**	**1 Paket**	**0,00**	**0,00**				**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	03	2.03	0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Arsip	Arsip							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									**41.468.810.255,49**	**48.621.032.356,00**	**41.541.137.046,00**	
3	**25**				**KELAUTAN DAN PERIKANAN**									**4.340.389.932,00**	**4.987.841.179,00**	**4.737.841.179,00**	
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									**4.340.389.932,00**	**4.987.841.179,00**	**4.737.841.179,00**	
3	**25**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.994.516.557,00**	**4.657.500.342,00**	**4.407.500.342,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**26.000.000,00**	**25.999.766,00**	**25.999.766,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	4	4	4	26.000.000,00	25.999.766,00	25.999.766,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.816.389.932,00**	**3.463.841.179,00**	**3.213.841.179,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	33	33	33	2.692.389.932,00	3.339.841.179,00	3.089.841.179,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	124.000.000	124.000.000	124.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	1	1	1				Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	3	3	3	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**198.400.000,00**	**190.309.958,00**	**190.309.958,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.000.000	9.896.824	9.896.824	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	45.000.000	44.998.504	44.998.504	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.000.000	14.997.791	14.997.791	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	25.000.000	24.999.839	24.999.839	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	12	12	12	5.400.000	5.400.000	5.400.000	
3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	58.000.000	50.017.000	50.017.000	
3	**25**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	15	15	15	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
3	25	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1				
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**694.200.000,00**	**694.200.000,00**	**694.200.000,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	46.200.000,00	46.200.000,00	46.200.000,00	
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	648.000.000,00	648.000.000,00	648.000.000,00	
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**179.526.625,00**	**203.149.439,00**	**203.149.439,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.530.000	42.430.000	42.430.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	16	16	16	136.496.625	122.320.000	122.320.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	Unit	16	16	16	9.500.000	9.740.000	9.740.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1		28.659.439,00	28.659.439,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	10	10	10				Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman**	**Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman**	**Persen**	**Persen**	**0,032**	**0,032**	**0,032**	**60.000.000,00**	**103.998.703,00**	**103.998.703,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
							Cakupan Bina Kelompok Nelayan	**Cakupan Bina Kelompok Nelayan**	**Persen**	**Persen**	**38,00**	**38,00**	**38,00**				
							Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	**Produksi Perikanan Kelompok Nelayan**	**Persen**	**Persen**	**58,47**	**58,47**	**58,47**				
							Produksi Perikanan Tangkap	**Produksi Perikanan Tangkap**	**Ton**	**Ton**	**3.244,23**	**3.244,23**	**3.244,23**				
3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**24,00**	**24,00**	**24,00**	-	-	-	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	Unit	Unit	20,00	20,00	20,00				Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**2.02**			**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Meningkatnya peranan nelayan kecil di bidang perikanan tangkap**		**Persen**		**2**		**-**	**43.999.859,00**	**43.999.859,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	2.02	0003		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Unit Usaha		10			43.999.859,00	43.999.859,00	
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik**	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**60.000.000,00**	**59.998.844,00**	**59.998.844,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan (TPI)	Layanan	Layanan	1	1	1	60.000.000	59.998.844	59.998.844	
3	**25**	**03**	**2.06**		**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran SampaiDengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau,Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran SampaiDengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau,Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen pendaftaran kapal berukuran sampai dengan 10 GT**	**Dokumen pendaftaran kapal berukuran sampai dengan 10 GT**	**Dok**	**Dok**	**1**	**1**	**1**	-	-	-	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	2.06	0002	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	Rekomendasi							
3	**25**	**04**			**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Produksi Perikanan Budidaya**	**Produksi Perikanan Budidaya**	**Ton**	**Ton**	**140,69**	**140,69**	**140,69**	**95.000.000,00**	**82.340.404,00**	**82.340.404,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan**	**Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan**	**Persen**	**Persen**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kolompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Jumlah Kolompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	Kelompok							Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan	Kelompok	Kelompok	10	10	10	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya**	**Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya**	**Persen**	**Persen**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**60.000.000,00**	**47.340.404,00**	**47.340.404,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota	Dok	Dok	**1**	**1**	**1**				Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Unit	Unit	2,00	2,00	2,00	60.000.000,00	47.340.404,00	47.340.404,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	**Compliance (Persentase Kepatuhan) Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan**	**Compliance (Persentase Kepatuhan) Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan**	**Persen**	**Persen**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**45.000.000,00**	**44.999.921,00**	**44.999.921,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	**25**	**05**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan kawasan yang dipantau dari kegiatan ilegal fishing dan RZKAW**	**Persentase cakupan kawasan yang dipantau dari kegiatan ilegal fishing dan RZKAW**	**Persen**	**Persen**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**45.000.000,00**	**44.999.921,00**	**44.999.921,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	45.000.000,00	44.999.921,00	44.999.921,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Angka Konsumsi Ikan**	**Angka Konsumsi Ikan**	**Kg/Kap/Th**	**Kg/Kap/Th**	**40,22**	**40,22**	**40,22**	**145.873.375,00**	**99.001.809,00**	**99.001.809,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Terbitnya surat ijin usaha perikanan**	**Terbitnya surat ijin usaha perikanan**	**Dokumen**	**Dokumen**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**35.000.000,00**	**31.970.000,00**	**31.970.000,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	Dokumen	1	1	1	35.000.000	31.970.000	31.970.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Terbitnya ijin edar dan halal produk**	**Terbitnya ijin edar dan halal produk**	**Dok**	**Dok**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**40.000.000,00**	-	-	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	Unit Usaha	7	7	7	40.000.000			Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai ekspor hasil perikanan**	**Nilai ekspor hasil perikanan**	**USD**	**USD**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**70.873.375,00**	**67.031.809,00**	**67.031.809,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	1	1	1	70.873.375,00	67.031.809,00	67.031.809,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**26**				**PARIWISATA**									**7.601.085.630,00**	**9.329.522.286,00**	**7.879.522.286,00**	
					DINAS PARIWISATA									**7.601.085.630,00**	**9.329.522.286,00**	**7.879.522.286,00**	
3	**26**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.051.085.630,00**	**5.879.522.286,00**	**4.429.522.286,00**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**127.000.000,00**	**93.119.948,00**	**93.119.948,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	12	12	12	127.000.000,00	93.119.948,00	93.119.948,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.870.811.262,00**	**4.753.613.185,00**	**3.303.613.185,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	35	35	35	3.757.811.262,00	4.659.522.286,00	3.209.522.286,00	
3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	113.000.000,00	94.090.899,00	94.090.899,00	
3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**30.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	2	2	2	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**252.086.868,00**	**120.381.466,00**	**120.381.466,00**	**Dinas Pariwisata**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.086.868,00	6.808.335,00	6.808.335,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	60.000.000,00	35.157.201,00	35.157.201,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.500.000,00	9.718.043,00	9.718.043,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	9.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	50.000.000,00	25.165.564,00	25.165.564,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	27.032.323,00	27.032.323,00	
3	**26**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**176.000.000,00**	**271.355.687,00**	**271.355.687,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.07	0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang disediakan		Unit		1,00	1,00		110.000.000,00	110.000.000,00	
3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	52.000.000,00			Dinas Pariwisata
3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	124.000.000,00	161.355.687,00	161.355.687,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**521.000.000,00**	**520.000.000,00**	**520.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	65.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	456.000.000,00	456.000.000,00	456.000.000,00	
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**74.187.500,00**	**111.052.000,00**	**111.052.000,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	29.121.500,00	44.486.000,00	44.486.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	2	2	2	15.666.000,00	5.866.000,00	5.866.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	8.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	16.800.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**			**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase Kunjungan wisata**	**Persentase Kunjungan wisata**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**450.000.000,00**	**708.269.917,00**	**708.269.917,00**	**Dinas Pariwisata**
							PAD Sektor Pariwisata	**PAD Sektor Pariwisata**	**Persen**	**Persen**	**25,55**	**25,55**	**25,55**				
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara**	**Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara**	**orang**	**orang**	**903.489,93**	**903.489,93**	**903.489,93**	**197.500.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
							Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara	**Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara**	**orang**	**orang**	**1.948,12**	**1.948,12**	**1.948,12**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
							Jumlah Destinasi Baru yang dikembangkan	**Jumlah Destinasi Baru yang dikembangkan**	**lokasi**	**lokasi**	**2 Lokasi**	**2 Lokasi**	**2 Lokasi**				
3	26	02	2.01	0002	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Dokumen		1			197.500.000,00			Dinas Pariwisata
3	26	02	2.01	0009		Perencanaan dan Perencangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan kabupaten/kota		Dokumen		1	1		50.000.000,00	50.000.000,00	
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola**	**Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola**	**Laporan**	**Laporan**	**1**	**1**	**1**	**252.500.000,00**	**658.269.917,00**	**658.269.917,00**	
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	Lokasi	2	2	2	212.500.000,00	508.269.917,00	508.269.917,00	Dinas Pariwisata
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1	1	1	40.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**03**			**Program Pemasaran Pariwisata**	**Program Pemasaran Pariwisata**	**Lama kunjungan Wisata**	**Lama kunjungan Wisata**	**Hari**	**Hari**	**1,80**	**1,80**	**1,80**	**525.000.000,00**	**525.000.000,00**	**525.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
							Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara	**Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara**	**Rupiah/ Kunjungan**	**Rupiah/ Kunjungan**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**				
							Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara	**Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara**	**Rupiah/ Kunjungan**	**Rupiah/ Kunjungan**	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**				
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Lama Kunjungan wisatawan Nusantara**	**Lama Kunjungan wisatawan Nusantara**	**hari**	**hari**	**1,80**	**1,80**	**1,80**	**525.000.000,00**	**525.000.000,00**	**525.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
							Lama Kunjungan wisatawan mancanegara	**Lama Kunjungan wisatawan mancanegara**	**hari**	**hari**	**1,80**	**1,80**	**1,80**				
							Jumlah event promosi yang diikuti	**Jumlah event promosi yang diikuti**	**event**	**event**	**20,00**	**20,00**	**20,00**				
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	Dokumen	1	1	1	407.000.000,00	407.000.000,00	407.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	Laporan	1	1	1	118.000.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**04**			**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Persen**	**Persen**	**2,37**	**2,37**	**2,37**	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**04**	**2.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif**	**UMKM**	**UMKM**	**460,00**	**460,00**	**460,00**	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	04	2.02	0002	Pengembangan Pendidikan	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	100.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**05**			**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif**	**Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**1.475.000.000,00**	**2.156.730.083,00**	**2.156.730.083,00**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah industri baru yang mendukung MICE (jasa usaha)**	**Jumlah industri baru yang mendukung MICE (jasa usaha)**	**Jasa Usaha**	**Jasa Usaha**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**1.475.000.000,00**	**2.156.730.083,00**	**2.156.730.083,00**	**Dinas Pariwisata**
							Jumlah SDM Pariwisata yang profesional	**Jumlah SDM Pariwisata yang profesional**	**Orang**	**Orang**	**50,00**	**50,00**	**50,00**				
3	26	05	2.01	0001	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya (Jumlah Duta Wisata Kota Bandar Lampung)		Orang		24			475.000.000,00			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	26	05	2.01	0002	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Jumlah Ragam Festival Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan)		Orang		300			600.000.000,00			
3	26	05	2.01	0003	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) (Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Sadar Wisata)		Orang		50			75.000.000,00			Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	0004	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Jumlah Lokakarya dan Dialog Jasa Usaha Pariwisata (Hotel, Restoran, Tempat Hiburan) yang dilaksanakan)		Orang		50			75.000.000,00			Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Jumlah Event Festival yang dilaksanakan)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Jumlah Event Festival yang dilaksanakan)	Laporan	Laporan	1	1	1	250.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.02	0006		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif		Orang		50	50		60.000.000,00	60.000.000,00	
3	26	05	2.03	0008		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI		Jumlah SDM pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkan pada SKKNI		Orang		24	24		386.730.083,00	386.730.083,00	
3	26	05	2.04	0009		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata		Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata		Orang		300	300		450.000.000,00	450.000.000,00	
3	26	05	2.05	0010		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata		Orang		50,00	50,00	-	60.000.000,00	60.000.000,00	
3	**27**				**PERTANIAN**									**11.055.588.511,00**	**13.458.887.084,00**	**9.323.758.010,00**	**4.135.129.074,00**
					DINAS PERTANIAN									**11.055.588.511,00**	**13.458.887.084,00**	**9.323.758.010,00**	
3	**27**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**10.673.915.115,00**	**13.225.573.539,00**	**8.628.950.539,00**	**DINAS PERTANIAN**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BID AKU URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**47.319.541,00**	**27.937.933,00**	**46.978.376,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	47.319.541,00	27.937.933,00	46.978.376,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**8.568.304.439,00**	**11.122.793.200,00**	**6.465.803.344,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	8.402.879.626,00	10.991.253.200,00	6.334.263.344,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	165.424.813,00	131.540.000,00	131.540.000,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	**2.05**	**09**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	5 orang	5 orang	5 orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**144.857.175,00**	**150.369.684,00**	**162.809.940,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket				6.000.000,00	5.999.504,00	5.999.504,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	54.512.800,00	60.994.580,00	60.994.580,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.644.750,00	6.640.969,00	6.640.969,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	34.699.625,00	33.734.631,00	46.174.887,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemenuhan Kebutuhan inventaris kantor**		**Laporan**		**1 Laporan**		-	**73.772.722,00**	**102.658.879,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	27	01	2.07	006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Paket		1 Paket			50.477.116,00	79.477.116,00	
3	27	01	2.07	011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Paket		1 Paket			23.295.606,00	23.181.763,00	
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.466.750.000,00**	**1.422.750.000,00**	**1.422.750.000,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	190.750.000,00	150.750.000,00	150.750.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.276.000.000,00	1.272.000.000,00	1.272.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**436.683.960,00**	**417.950.000,00**	**417.950.000,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	33.532.088,00	42.430.000,00	42.430.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	393.151.872,00	366.750.000,00	366.750.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	8.770.000,00	8.770.000,00	DINAS PERTANIAN
	27	**02**			**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Produktivitas Padi**	**Produktivitas Padi**	**kw/ha**	**kw/ha**	**58,95 kw/ha**	**58,95 kw/ha**	**58,95 kw/ha**	**110.000.000,00**	**183.863.545,00**	**561.784.471,00**	**DINAS PERTANIAN**
							Produktivitas Jagung	**Produktivitas Jagung**	**kw/ha**	**kw/ha**	**49,15 kw/ha**	**49,15 kw/ha**	**49,15 kw/ha**				
							Produksi Daging	**Produksi Daging**	**Ton/Tahun**	**Ton/Tahun**	**5.389,52 ton/ha**	**5.389,52 ton/ha**	**5.389,52 ton/ha**				
							Produksi Telur	**Produksi Telur**	**Ton/Tahun**	**Ton/Tahun**	**132,03 ton/ha**	**132,03 ton/ha**	**132,03 ton/ha**				
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Sarana pertanian dan partisipasi promosi produk pertanian yang tersedia**	**Sarana pertanian dan partisipasi promosi produk pertanian yang tersedia**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**30.000.000,00**	**65.519.583,00**	**65.519.583,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	65.519.583,00	65.519.583,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Bibit tanaman hias, buah-buahan, sayuran, dan tanaman perkebunan yang ditanam**	**Jumlah Bibit tanaman hias, buah-buahan, sayuran, dan tanaman perkebunan yang ditanam**	**Paket**	**Paket**	**4 Paket**	**4 Paket**	**4 Paket**	**80.000.000,00**	**118.343.962,00**	**496.264.888,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	88.343.962,00	88.343.962,00	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	407.920.926,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**04**			**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Angka Kejadian Penyakit**	**Angka Kejadian Penyakit**	**Persen**	**Persen**	**5,40**	**5,40**	**5,40**	**181.575.000,00**	**49.450.000,00**	**133.023.000,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000,00**	-	-	**DINAS PERTANIAN**
3	27	04	2.01	0001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00			DINAS PERTANIAN
3	**27**	**04**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana**	**Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000,00**	**18.450.000,00**	**18.450.000,00**	**DINAS PERTANIAN**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	18.450.000,00	18.450.000,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola**	**Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**81.575.000,00**	**31.000.000,00**	**114.573.000,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	81.575.000,00	31.000.000,00	114.573.000,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**07**			**Program Penyuluhan Pertanian**	**Program Penyuluhan Pertanian**	**Cakupan Bina Kelompok Petani**	**Cakupan Bina Kelompok Petani**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**90.098.396,00**	**-**	**-**	**DINAS PERTANIAN**
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Penyuluhan pertanian yang terlaksana**	**Penyuluhan pertanian yang terlaksana**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**90.098.396,00**	**-**	**-**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	55.598.396,00			DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan pertanian	Unit	Unit				34.500.000,00			DINAS PERTANIAN
3	**30**				**PERDAGANGAN**									**13.423.725.527,49**	**15.316.503.624,00**	**14.171.737.388,00**	**- 1.144.766.236,00**
					DINAS PERDAGANGAN									**13.423.725.527,49**	**15.316.503.624,00**	**14.171.737.388,00**	
3	**30**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**11.145.465.902,49**	**13.331.139.069,00**	**11.981.139.069,00**	**Dinas Perdagangan**
3	**30**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**98.774.240,00**	**103.944.000,00**	**103.944.000,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan		98.774.240,00	103.944.000,00	103.944.000,00	
3	**30**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**8.118.396.932,00**	**10.058.095.092,00**	**8.708.095.092,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	95 Orang/Bulan	95 Orang/Bulan		7.983.696.932,00	9.876.475.092,00	8.526.475.092,00	
3	30	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		134.700.000,00	181.620.000,00	181.620.000,00	
3	**30**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**10.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.95	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	4	4		10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dinas Perdagangan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	**30**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**274.730.630,38**	**329.137.897,00**	**329.137.897,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		5.000.000,00	9.495.968,00	9.495.968,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		37.403.202,38	40.205.375,00	40.205.375,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		7.500.000,00	12.680.915,00	12.680.915,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		97.327.428,00	102.366.256,00	102.366.256,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan		90.000.000,00	126.889.383,00	126.889.383,00	
3	**30**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**282.450.000,00**	**400.720.000,00**	**400.720.000,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	5 Unit	5 Unit		100.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	70 Unit	70 Unit		82.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	
3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	3 Unit	3 Unit		54.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	
3	30	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	10 Unit	10 Unit		46.450.000,00	107.720.000,00	107.720.000,00	
3	**30**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**1.895.340.552,11**	**1.879.643.279,00**	**1.879.643.279,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan		100.840.552,11	103.643.279,00	103.643.279,00	
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan		1.794.500.000,00	1.776.000.000,00	1.776.000.000,00	
3	**30**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**465.773.548,00**	**539.598.801,00**	**539.598.801,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit		46.138.147,00	74.430.000,00	74.430.000,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	11 Unit	11 Unit		264.035.401,00	272.130.000,00	272.130.000,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	14 Unit	14 Unit		5.600.000,00	17.040.000,00	17.040.000,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	Unit	16 Unit	16 Unit		150.000.000,00	175.998.801,00	175.998.801,00	Dinas Perdagangan
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PENTING**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PENTING**	**Presentase Jumlah Pasar Yang Ditata**	**Presentase Jumlah Pasar Yang Ditata**	**Persen**	**Persen**	**20**	**20**		**727.500.000,00**	**430.409.943,00**	**625.143.707,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persen**	**Persen**	**2 Unit**	**2 Unit**		**500.000.000,00**	**250.000.000,00**	**444.733.764,00**	
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit		250.000.000,00	-	-	
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit		250.000.000,00	250.000.000,00	444.733.764,00	
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**	**Kelompok Pelaku Usaha**	**Kelompok Pelaku Usaha**	**3 Kelompok Pelaku Usaha**	**3 Kelompok Pelaku Usaha**		**227.500.000,00**	**180.409.943,00**	**180.409.943,00**	
3	30	04	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		75.000.000,00	70.909.943,00	70.909.943,00	
3	30	04	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		152.500.000,00	109.500.000,00	109.500.000,00	
3	**30**	**04**			**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting**	**Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting**	**Persen**	**Persen**	**17,00**	**17,00**		**744.550.000,00**	**719.087.726,00**	**719.087.726,00**	**Dinas Perdagangan**
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional**	**Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional**	**Pasar**	**Pasar**	**9 Pasar**	**9 Pasar**		**644.550.000,00**	**719.087.726,00**	**719.087.726,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintergrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintergrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan		80.000.000,00	154.537.726,00	154.537.726,00	
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan		564.550.000,00	564.550.000,00	564.550.000,00	
3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Besubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Besubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Tersedianya Laporan Realisasi Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi**	**Tersedianya Laporan Realisasi Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi**			**3 Laporan**	**3 Laporan**		**100.000.000,00**	-	-	
3	30	04	2.03	00003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal			3 Laporan	3 Laporan		100.000.000,00			
3	**30**	**05**			**Program Pengembangan Ekspor**	**Program Pengembangan Ekspor**	**Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan**	**Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**406.209.625,00**	**494.207.797,00**	**504.707.797,00**	**Dinas Perdagangan**
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti**	**Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti**	**Kali**	**Kali**	**5 Kali**	**5 Kali**		**406.209.625,00**	**494.207.797,00**	**504.707.797,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha		406.209.625,00	494.207.797,00	504.707.797,00	
3	**30**	**06**			**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang**	**Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang**	**Persen**	**Persen**	**86,80**	**86,80**					**Dinas Perdagangan**
							Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi	**Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi**	**Persen**	**Persen**	**86,80**	**86,80**		**200.000.000,00**	**200.014.492,00**	**200.014.492,00**	
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Penrawasan**	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Penrawasan**	**Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang**	**Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang**	**UTTP**	**UTTP**	**2100 UTTP**	**2100 UTTP**		**200.000.000,00**	**200.014.492,00**	**200.014.492,00**	**Dinas Perdagangan**
							Jumlah UTTP BDKT dan SN yang sudah diawasi	**Jumlah UTTP BDKT dan SN yang sudah diawasi**	**UTTP**	**UTTP**	**1100 UTTP**	**1100 UTTP**					
							Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi	**Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi**	**Kasus**	**Kasus**	**3 Kasus**	**3 Kasus**					
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	Unit	2100 Unit	2100 Unit		100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	Orang	190 Orang	190 Orang		100.000.000,00	100.014.492,00	100.014.492,00	
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah**	**Persentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah**	**Persen**	**Persen**	**65,00**	**65,00**		**200.000.000,00**	**141.644.597,00**	**141.644.597,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online**	**Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online**	**UMKM**	**UMKM**	**20 UMKM**	**20 UMKM**		**200.000.000,00**	**141.644.597,00**	**141.644.597,00**	
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	UMKM	20 UMKM	20 UMKM		100.000.000,00	141.644.597,00	141.644.597,00	
3	30	07	2.01	0003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		100.000.000,00	-	-	
3	**31**				**PERINDUSTRIAN**									**5.048.020.655,00**	**5.528.278.183,00**	**5.428.278.183,00**	
					DINAS PERINDUSTRIAN									**5.048.020.655,00**	**5.528.278.183,00**	**5.428.278.183,00**	**100.000.000,00**
3	**31**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian**			**98,00**	**98,00**		**3.052.705.170,00**	**3.784.278.183,00**	**3.369.961.166,00**	**Dinas Perindustrian**
3	**31**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**34.103.800,00**	**33.943.283,00**	**33.943.283,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		8.400.000,00	8.412.758,00	8.412.758,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ihktisar realisasi [illegible]	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ihktisar realisasi [illegible]	Laporan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan		25.703.800,00	25.530.525,00	25.530.525,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntable**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntable**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**2.181.337.855,00**	**2.711.506.108,00**	**2.384.506.108,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan		2.081.020.655,00	2.585.278.183,00	2.285.278.183,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.02	0003	Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		92.317.200,00	118.700.000,00	91.700.000,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan		8.000.000,00	7.527.925,00	7.527.925,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	2 Orang	2 Orang		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**		**217.548.115,00**	**192.130.104,00**	**192.130.104,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		5.000.000,00	5.209.296,00	5.209.296,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		44.475.515,00	33.247.151,00	33.247.151,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		14.672.000,00	4.660.736,00	4.660.736,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		38.000.600,00	35.972.890,00	35.972.890,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan		100.000.000,00	97.640.031,00	97.640.031,00	Dinas Perindustrian

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	**31**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**		**50.000.000,00**	**289.318.688,00**	**190.280.071,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional dan lapangan		Jumlah Kendaraan Bermotor		unit	unit					170.000.000,00		Dinas Perindustrian
3	31	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah		unit	unit					64.318.688,00	64.318.688,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	unit	3 Unit	3 Unit		50.000.000,00	55.000.000,00	125.961.383,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**		**493.500.000,00**	**478.000.000,00**	**489.721.600,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan		109.500.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan		384.000.000,00	396.000.000,00	407.721.600,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**		**68.215.400,00**	**71.380.000,00**	**71.380.000,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	3	3		48.215.400,00	54.770.000,00	54.770.000,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	8 Unit	8 Unit		5.000.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	2 Unit	2 Unit		15.000.000,00	11.660.000,00	11.660.000,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**02**			**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Pertumbuhan Industri**	**Pertumbuhan Industri**	**Persen**	**Persen**	**2,71**	**2,71**	**2,71**	**1.945.315.485,00**	**1.615.000.000,00**	**1.929.317.017,00**	**Dinas Perindustrian**
							Cakupan IKM yang mendapatkan Pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (incremental)	**Cakupan IKM yang mendapatkan Pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (incremental)**	**Persen**	**Persen**	**12,75**	**12,75**	**12,75**				
							Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**	**Persen**	**Persen**	**22,73**	**22,73**	**22,73**				
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**%**	**%**	**91,00**	**91,00**		**1.945.315.485,00**	**1.615.000.000,00**	**1.929.317.017,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1.945.315.485,00	1.615.000.000,00	1.929.317.017,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**03**			**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**	**Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait**	**Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait**	**Persen**	**Persen**	**64,71**	**64,71**		**50.000.000,00**	**129.000.000,00**	**129.000.000,00**	**Dinas Perindustrian**
3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) Kecil dan IUI menegah yang diterbitkan**	**Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) Kecil dan IUI menegah yang diterbitkan**	**%**	**%**	**80,00**	**80,00**		**50.000.000,00**	**129.000.000,00**	**129.000.000,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri dalam lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan perizinan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri dalam lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan perizinan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		50.000.000,00	129.000.000,00	129.000.000,00	Dinas Perindustrian
4					**UNSUR PENDUKUNG**									**205.560.260.898,00**	**242.283.362.195,00**	**292.534.086.259,00**	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**									**106.495.089.687,00**	**131.055.052.054,00**	**178.031.616.054,00**	
4	**01**	**01**	**2.01**		**Program Administrasi Umum**	**Program Administrasi Umum**	**Tingkat Layanan Administrasi Umum**	**Tingkat Layanan Administrasi Umum**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**77.085.858.303,35**	**98.979.263.599,00**	**101.888.898.620,00**	**Sekretariat Daerah**
							Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tepat Waktu	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tepat Waktu**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase OPD yang Mengumpulkan Laporan Kinerja (LAKIP) secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	**Persentase OPD yang Mengumpulkan Laporan Kinerja (LAKIP) secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
							Persentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik	**Persentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase peningkatan kualitas pelayanan terhadap KDH/WKDH	**Persentase peningkatan kualitas pelayanan terhadap KDH/WKDH**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase kebijakan pemerintah daerah yang terpublikasi	**Persentase kebijakan pemerintah daerah yang terpublikasi**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**	**Persen**	**Persen**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**		**464.000.000,00**	**573.999.765,00**	**573.999.765,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	5	5		185.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Dokumen	Dokumen	5	5		150.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3		129.000.000,00	153.999.765,00	153.999.765,00	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Meningkatkan adminitrasi keuangan perangkat daerah dan kinerja aparatur yang baik.**	**Meningkatkan adminitrasi keuangan perangkat daerah dan kinerja aparatur yang baik.**	**Persen**	**Persen**	**14 Bulan**	**14 Bulan**		**32.050.120.113,00**	**44.423.652.865,00**	**27.583.287.886,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	437	437		31.157.201.104,00	43.379.162.480,00	26.538.797.501,00	
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	8	8		371.000.000,00	397.074.546,00	397.074.546,00	
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		424.415.906,00	467.415.889,00	467.415.889,00	
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1		27.002.103,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	Laporan	4	4		70.501.000,00	99.999.950,00	99.999.950,00	
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatkan kualitas SDM ASN dan meningkatkan disiplin aparatur pemerintah**	**Meningkatkan kualitas SDM ASN dan meningkatkan disiplin aparatur pemerintah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**349.939.250,00**	**404.500.000,00**	**479.500.000,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Paket	7	7		248.125.000,00	301.000.000,00	376.000.000,00	
4	01	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan tugas	Laporan	Laporan	2	2		26.814.250,00	28.500.000,00	28.500.000,00	
4	01	01	2.05	0011	Bimbinan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbinan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang	50	50		75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	**Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**1 paket**	**1 paket**		**8.440.277.600,84**	**8.688.648.187,00**	**15.747.431.471,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		66.717.500,00	65.217.552,00	91.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		371.000.000,00	320.208.068,00	550.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		420.221.912,00	417.288.492,00	500.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		1.296.000.000,00	1.224.500.000,00	1.500.000.000,00	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		350.000.000,00	261.937.500,00	461.937.500,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		1.494.493.971,00	1.594.493.971,00	4.394.493.971,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1		3.700.000.000,00	3.750.000.000,00	6.750.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		741.844.217,84	1.055.002.604,00	1.500.000.000,00	
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**6.900.000.000,00**	**11.350.443.796,00**	**20.942.896.211,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Unit	Unit	1	1		1.000.000.000,00	5.309.600.000,00	6.574.035.405,00	
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	8	8		3.780.000.000,00	360.000.000,00	7.508.000.000,00	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	150	150		499.000.000,00	819.982.990,00	1.000.000.000,00	
4	01	01	2.07	0011	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	15	15		1.621.000.000,00	4.860.860.806,00	5.860.860.806,00	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Bulan**	**Bulan**	**100**	**100**		**15.006.510.000,00**	**18.951.000.000,00**	**19.905.000.000,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		4.155.385.000,00	8.105.000.000,00	8.500.000.000,00	
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		500.875.000,00	355.000.000,00	405.000.000,00	
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		10.350.250.000,00	10.491.000.000,00	11.000.000.000,00	
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah terpelihara dengan baik**	**Barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah terpelihara dengan baik**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**8.527.316.536,00**	**8.854.005.699,00**	**9.673.770.000,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	101	101		3.256.316.536,00	3.253.540.000,00	3.553.540.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	101	101		200.000.000,00	200.110.000,00	200.110.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	120	120		270.000.000,00	270.120.000,00	420.120.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7	7		561.000.000,00	559.300.000,00	650.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7	7		4.240.000.000,00	4.570.935.699,00	4.850.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**			**100,00**	**100,00**		**1.430.503.824,00**	**1.430.503.824,00**	**1.430.503.824,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	Orang/Bulan	2	2		1.430.503.824,00	1.430.503.824,00	1.430.503.824,00	
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Penataan Organisasi**	**Persentase adanya Dokumen ABK OPD dibagi jumlah OPD**	**Persentase adanya Dokumen ABK OPD dibagi jumlah OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**479.367.329,51**	**479.366.813,00**	**479.366.813,00**	**Sekretariat Daerah**
							Persentase adanya dokumen anjab OPD dibagi jumlah OPD	**Persentase adanya dokumen anjab OPD dibagi jumlah OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase pengaduan pelayanan publik yang ditangani	**Persentase pengaduan pelayanan publik yang ditangani**			**B**	**B**					
							Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**			**100,00**	**100,00**					
							Persentase OPD yang melakukan surve IKM dibanding OPD yang seharusnya melakukan pelayanan IKM	**Persentase OPD yang melakukan surve IKM dibanding OPD yang seharusnya melakukan pelayanan IKM**			**65 OPD, 10 Perwali**	**65 OPD, 10 Perwali**					
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	Dokumen	1	1		207.489.329,51	198.477.611,00	198.477.611,00	
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	Laporan	1	1		143.464.500,00	143.464.132,00	143.464.132,00	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	Dokumen	1	1		128.413.500,00	137.425.070,00	137.425.070,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan**	**Persentase fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**3.437.823.650,00**	**3.823.142.650,00**	**5.073.142.650,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	Laporan	1	1		1.519.013.750,00	1.519.013.750,00	1.519.013.750,00	
4	01	01	2.14	0002	fasilitasi Komunikasi Pimpinan	fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	Laporan	1	1		406.942.470,00	456.942.470,00	456.942.470,00	
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	Laporan	1	1		1.511.867.430,00	1.847.186.430,00	3.097.186.430,00	
4	**01**	**02**			**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang Terlaksana dengan Baik**	**Persentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang Terlaksana dengan Baik**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**75,00**		**26.059.565.104,13**	**28.726.123.548,00**	**69.720.462.527,00**	**Sekretariat Daerah**
							Persentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	**Persentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang Terfasilitasi**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	**Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan	**Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase Penanganan Konflik Pertanahan	**Persentase Penanganan Konflik Pertanahan**	**Persen**	**Persen**	**60,00**	**60,00**					
							Persentase Luas Lahan Bersertifikat	**Persentase Luas Lahan Bersertifikat**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase Kebijakan Daerah yang Telah Disahkan, Diputuskan dan Didokumentasikan	**Persentase Kebijakan Daerah yang Telah Disahkan, Diputuskan dan Didokumentasikan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas	**Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani dapat Diselesaikan	**Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani dapat Diselesaikan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Meningkatnya Pengelolaan Tata Pemerintahan**	**Meningkatnya Pengelolaan Tata Pemerintahan**	**Persen**	**Persen**				**1.083.147.767,13**	**1.133.147.691,00**	**1.133.147.691,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	Dokumen	2	2		50.050.000,00	50.049.926,00	50.049.926,00	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	Dokumen	3	3		517.518.947,13	497.598.945,00	497.598.945,00	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3		515.578.820,00	585.498.820,00	585.498.820,00	
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Meningkatnya Implementasi Kebijakan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**	**Meningkatnya Implementasi Kebijakan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**75,00**		**23.017.173.437,00**	**24.999.999.901,00**	**65.815.364.880,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	Dokumen	6	6		22.267.173.437,00	23.900.000.000,00	64.715.364.979,00	
4	01	02	2.02	0002		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		Dokumen		1			349.999.901,00	349.999.901,00	
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	Dokumen	1	1		250.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	
4	01	02	2.02	0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat		Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat		Keluarga		100			250.000.000,00			
4	01	02	2.02	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing		Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Menujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		Keluarga		100			250.000.000,00			
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Kebijakan Daerah yang telah disahkan,diputuskan dan didokumentasikan**	**Jumlah Kebijakan Daerah yang telah disahkan,diputuskan dan didokumentasikan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**1.104.600.000,00**	**1.538.332.293,00**	**1.717.306.293,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	700	700		194.425.000,00	277.275.000,00	277.275.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	kasus	kasus	2	2		521.545.000,00	769.227.293,00	948.201.293,00	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	Dokumen	Dokumen	700	700		388.630.000,00	491.830.000,00	491.830.000,00	
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase KSD yang Terfasilitasi (Terbit MoU) dibandingkan dengan usulan KSD**	**Persentase KSD yang Terfasilitasi (Terbit MoU) dibandingkan dengan usulan KSD**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**		**854.643.900,00**	**1.054.643.663,00**	**1.054.643.663,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	Dokumen	1	1		599.285.995,25	514.443.887,00	514.443.887,00	
4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	Dokumen	1	1		118.515.600,00	258.320.147,00	258.320.147,00	
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Dokumen	Dokumen	1	1		136.842.304,75	281.879.629,00	281.879.629,00	
4	**01**	**03**			**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persentase Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti dan Digunakan untuk Analisa Kebijakan**	**Persentase Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti dan Digunakan untuk Analisa Kebijakan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**3.349.666.279,52**	**3.349.664.907,00**	**3.422.254.907,00**	**Sekretariat Daerah**
							BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik	**BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik**	**Angka**	**Angka**	**5**	**5**					
							Persentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang	**Persentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase OPD yang melaporkan kegiatan secara online melalui TEPRA tepat waktu	**Persentase OPD yang melaporkan kegiatan secara online melalui TEPRA tepat waktu**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Tingkat partisipasi OPD, Swasta dan LSM dalam pelaksanaan evaluasi program Pembangunan	**Tingkat partisipasi OPD, Swasta dan LSM dalam pelaksanaan evaluasi program Pembangunan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BID AKU URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
							Persentase Paket Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	**Persentase Paket Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan PBJ	**Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan PBJ**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**	**Persentase Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**487.115.000,00**	**487.113.657,00**	**559.703.657,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	Dokumen	3	3		167.115.000,00	167.114.506,00	167.114.506,00	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	Laporan	3	3		215.000.000,00	214.999.539,00	287.589.539,00	
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Mikro Kecil	Perencanaan dan Pengawasan Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	Dokumen	1	1		105.000.000,00	104.999.612,00	104.999.612,00	
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Laporan Penyusunan Program, Pengendalian Program Pembangunan dan Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**	**Persentase Laporan Penyusunan Program, Pengendalian Program Pembangunan dan Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**1.611.456.979,52**	**1.611.456.950,00**	**1.611.456.950,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	03	2.02	0001	fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	Dokumen	1	1		113.675.000,00	113.675.000,00	113.675.000,00	
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	Dokumen	1	1		1.128.560.000,00	1.128.560.000,00	1.128.560.000,00	
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	Dokumen	1	1		369.221.979,52	369.221.950,00	369.221.950,00	
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang**	**Pengelolaan Pengadaan Barang**	**- Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama - Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif - Rasio nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan**	**- Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama - Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif - Rasio nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan**	**Persen**	**Persen**	**- 0,5 % - 8,5 % - 40 %**	**- 0,5 % - 8,5 % - 40 %**		**1.251.094.300,00**	**1.251.094.300,00**	**1.251.094.300,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	dokumen	1	1		389.238.888,00	422.879.432,00	422.879.432,00	
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	dokumen	dokumen	1	1		605.504.624,00	605.790.270,00	605.790.270,00	
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	- Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan	- Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan	orang	orang	5	5		256.350.788,00	222.424.598,00	222.424.598,00	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**									**99.065.171.211,00**	**111.228.310.141,00**	**117.502.470.205,00**	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**			**Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota**	**Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota**	**Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**62.056.067.313,00**	**65.627.697.781,00**	**67.503.708.935,00**	**Sekretariat DPRD**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**473.244.191,00**	**473.235.880,00**	**473.235.880,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	4,00	4,00	4,00	143.435.000,00	143.434.784	143.434.784	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	53.004.000,00	53.000.801	53.000.801	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan	Dokumen	1	1	1	53.004.000,00	53.000.801	53.000.801	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3	3	3	127.000.000,00	126.998.562	126.998.562	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	2,00	2,00	2,00	96.801.191,00	96.800.932	96.800.932	Sekretariat DPRD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**6.502.907.049,00**	**7.953.721.048,00**	**6.553.721.048,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	58	58	58	5.646.713.049,00	7.145.979.142	5.745.979.142	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	507.200.000,00	405.495.783	405.495.783	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	78.020.000,00	78.013.546	78.013.546	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	16	16	16	235.615.000,00	288.874.441	288.874.441	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Dokumen	2	2	2	35.359.000,00	35.358.136	35.358.136	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian SETWAN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian SETWAN**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**550.000.000,00**	**583.994.762,00**	**583.994.762,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	**Paket**	1	1	1	45.000.000,00	79.000.000	79.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	**Orang**	30	30	30	505.000.000,00	504.994.762	504.994.762	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.398.256.925,00**	**2.803.041.945,00**	**2.803.041.945,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	**Paket**	1	1	1	51.550.000,00	51.548.688	51.548.688	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	**Paket**	1	1	1	150.000.000,00	223.781.646	223.781.646	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	**Paket**	1	1	1	111.385.500,00	111.377.696	111.377.696	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	**Paket**	1	1	1	596.500.000,00	876.500.000	876.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	**Paket**	1	1	1	148.000.000,00	177.291.307	177.291.307	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	684.250.000,00	478.299.793	478.299.793	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	**Laporan**	1	1	1	165.000.000,00	165.000.000	165.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	**Laporan**	1	1	1	491.571.425,00	719.242.815	719.242.815	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.870.097.743,00**	**3.526.833.755,00**	**4.923.040.809,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	**Unit**	4	4	4	80.000.000,00	470.004.000	470.004.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	**Unit**	8	8	8	662.137.550,00	304.330.490	581.050.490	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	**Unit**	4	4	4	305.808.766,00	492.656.597	717.656.597	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	**Unit**	7	7	7	1.822.151.427,00	2.259.842.668	3.154.329.722	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**6.326.350.000,00**	**5.805.000.000,00**	**6.195.000.000,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	**Laporan**	1	0	0	53.100.000,00	-	-	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	**Laporan**	1	1	1	516.000.000,00	693.000.000	693.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	**Laporan**	1	1	1	5.757.250.000,00	5.112.000.000	5.502.000.000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.065.980.000,00**	**2.039.217.244,00**	**3.394.293.244,00**	**Sekretariat DPRD**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	**Unit**	1	1	1	47.675.000,00	45.130.000	45.130.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	**Unit**	17	17	17	585.805.000,00	384.000.000	384.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	**Unit**	3	3	3	182.500.000,00	371.790.000	371.790.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	**Unit**	1	1	1	550.000.000,00	430.000.000	1.785.076.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	**Unit**	1	1	1	700.000.000,00	808.297.244	808.297.244	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**39.162.691.715,00**	**39.424.291.715,00**	**39.424.291.715,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	**Orang/Bulan**	12	12	12	37.271.191.715,00	37.532.791.715	37.532.791.715	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	**Paket**	50	50	50	1.741.500.000,00	1.741.500.000	1.741.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	**Orang**	50	50	50	150.000.000,00	150.000.000	150.000.000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.706.539.690,00**	**3.018.361.432,00**	**3.153.089.532,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	dokumen	**dokumen**	1	1	1	276.000.000,00	426.000.000	426.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	**Laporan**	1	1	1	49.000.000,00	48.999.680	48.999.680	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	**Laporan**	1	1	1	392.808.506,00	1.392.808.404	1.392.808.404	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	**Paket**	1	1	1	988.731.184,00	1.150.553.348	1.285.281.448	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**			**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**37.009.103.898,00**	**45.600.612.360,00**	**49.998.761.270,00**	**Sekretariat DPRD**
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**6.601.276.047,00**	**7.908.791.145,00**	**8.872.732.555,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	1.055.338.821,00	1.483.083.669	1.827.757.179	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	**Dokumen**	7	7	7	4.103.737.226	5.275.707.476	5.747.435.296	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	150.000.000	300.000.000	447.540.080	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	**Dokumen**	6	6	6	1.192.200.000	450.000.000	450.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen tata tertib DPRD yang disusun	Jumlah Dokumen tata tertib DPRD yang disusun	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	100.000.000,00	400.000.000	400.000.000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.500.000.000,00**	**4.582.083.610,00**	**4.596.291.110,00**	**Sekretariat DPRD**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	700.000.000,00	914.112.383	914.112.383	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	700.000.000,00	913.898.430	913.898.430	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	700.000.000,00	912.418.585	926.626.085	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	700.000.000,00	909.298.585	909.298.585	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	700.000.000,00	932.355.627	932.355.627	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**6.878.092.885,00**	**6.425.174.617,00**	**6.425.174.617,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	**Laporan**	2,00	2,00	2,00	1.257.000.000,00	995.926.683	995.926.683	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	**Laporan**	2,00	2,00	2,00	1.170.000.000,00	905.011.232	905.011.232	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	**Laporan**	2,00	2,00	2,00	1.262.000.000,00	1.042.429.475	1.042.429.475	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	**Laporan**	2,00	2,00	2,00	1.220.000.000,00	949.397.308	949.397.308	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	**Dokumen**	1,00	1,00	1,00	1.321.360.000,00	1.854.483.365	1.854.483.365	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	**Dokumen**	1,00	1,00	1,00	167.032.885,00	17.021.689	17.021.689	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	**Dokumen**	1,00	1,00	1,00	480.700.000,00	660.904.865	660.904.865	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**16.552.582.185,00**	**16.636.935.566,00**	**16.636.935.566,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	Dokumen	**Dokumen**	1,00	1,00	1,00	100.000.000,00	500.000.103	500.000.103	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	**Dokumen**	6,00	6,00	6,00	2.803.625.800,00	4.100.997.423	4.100.997.423	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumentasi publikasi dan dokumentasi DPRD	Dokumen	**Dokumen**	1,00	1,00	1,00	1.352.044.710,00	1.728.000.000	1.728.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	**Orang**	36	36	36	1.728.000.000,00	384.000.000	384.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	**Orang**	8	8	8	384.000.000,00	7.989.223.330	7.989.223.330	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Hubungan Masyarakat	Dokumen	**Dokumen**	2,00	2,00	2,00	9.886.911.675,00	298.000.000	298.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	**Dokumen**	1,00	1,00	1,00	298.000.000,00	1.636.714.710	1.636.714.710	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**494.522.791,00**	**415.801.662,00**	**415.801.662,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	**Laporan**	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	100.000.000,00	99.999.803	99.999.803	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	**Dokumen**	3,00	3,00	3,00	294.522.791,00	215.801.859	215.801.859	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**750.000.000,00**	**1.280.746.908,00**	**1.280.746.908,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik DPRD pada Badan Kehormatan DPRD Kota Bandar Lampung	Jumlah Kode Etik dan tata beracara DPRD	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	100.000.000	400.000.000	400.000.000	Sekretariat DPRD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	**Laporan**	1	1	1	650.000.000,00	880.746.908	880.746.908	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.232.629.990,00**	**8.351.078.852,00**	**11.771.078.852,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	1.259.126.000,00	6.034.379.808	9.454.379.808	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	**Laporan**	1	1	1	50.735.990,00	50.735.652	50.735.652	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	922.768.000,00	2.265.963.392	2.265.963.392	Sekretariat DPRD
5					**UNSUR PENUNJANG**									**249.385.917.987,89**	**247.748.390.664,00**	**209.506.105.167,00**	
5	**01**				**PERENCANAAN**									**11.958.880.101,00**	**14.356.908.915,00**	**13.436.908.915,00**	
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH									**11.958.880.101,00**	**14.356.908.915,00**	**13.436.908.915,00**	
5	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**8.388.880.101,00**	**10.912.555.251,00**	**9.892.555.251,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**225.000.000,00**	**224.997.235,00**	**224.997.235,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2	2	50.000.000,00	49.998.844,00	49.998.844,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	30.000.000,00	29.999.997,00	29.999.997,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	30.000.000,00	29.999.576,00	29.999.576,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3	3	3	55.000.000,00	54.999.924,00	54.999.924,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	6	6	6	60.000.000,00	59.998.894,00	59.998.894,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.705.880.101,00**	**8.918.843.862,00**	**7.868.843.862,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/ Bulan	70	70	60	6.430.880.101,00	8.645.845.967,00	7.595.845.967,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	190.000.000,00	188.000.000,00	188.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	Laporan	1	1	1	35.000.000,00	34.997.914,00	34.997.914,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	12	12	12	50.000.000,00	49.999.981,00	49.999.981,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**100.000.000,00**	**99.997.962,00**	**99.997.962,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Dokumen	1	1	1	50.000.000,00	49.997.962,00	49.997.962,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	10	10	10	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**583.500.000,00**	**799.036.192,00**	**799.036.192,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.000.000,00	4.999.082,00	4.999.082,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	100.000.000,00	99.999.831,00	99.999.831,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	30.000.000,00	29.997.984,00	29.997.984,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	100.000.000,00	99.997.814,00	99.997.814,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporam	1	1	1	250.000.000,00	465.541.481,00	465.541.481,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**150.000.000,00**	**225.400.000,00**	**255.400.000,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Unit	1	13	1	100.000.000,00	120.000.000,00	66.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	10	17	11	50.000.000,00	105.400.000,00	189.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**323.750.000,00**	**270.000.000,00**	**270.000.000,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	130.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	193.750.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**300.750.000,00**	**374.280.000,00**	**374.280.000,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	01	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	6	1	1	170.000.000,00	45.430.000,00	45.430.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	7	12	12	40.750.000,00	232.240.000,00	232.240.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	20	20	20	40.000.000,00	46.610.000,00	46.610.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	Unit	Unit	1	1	1	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**02**			**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.010.000.000,00**	**1.969.996.235,00**	**1.969.996.235,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
							Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	**Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya	**Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya**	**Persen**	**Persen**	**89,32**	**89,32**	**89,32**				
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA**	**Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**1.240.000.000,00**	**1.239.998.366,00**	**1.239.998.366,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
							Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	**Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada (Teknokratik RPJMD)**	**Ada (Teknokratik RPJMD)**	**Ada (Teknokratik RPJMD)**				
							Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	**Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**				
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	Dokumen	2	2	2	250.000.000,00	249.999.613,00	249.999.613,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Berita Acara	1	1	1	80.000.000,00	79.999.742,00	79.999.742,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	Berita Acara	2	2	2	135.000.000,00	134.999.749,00	134.999.749,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	Berita Acara	2	2	2	350.000.000,00	349.999.480,00	349.999.480,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Dokumen	Dokumen	3	3	3	425.000.000,00	424.999.782,00	424.999.782,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen**	**Dokumen**	**6**	**6**	**6**	**550.000.000,00**	**509.999.394,00**	**509.999.394,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Laporan	1	1	1	200.000.000,00	159.999.925,00	159.999.925,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Laporan	5	5	5	350.000.000,00	349.999.469,00	349.999.469,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**02**	**2.04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung**	**Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung**	**Dokumen Laporan**	**Dokumen Laporan**	**1**	**1**	**1**	**220.000.000,00**	**219.998.475,00**	**219.998.475,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	Dokumen	1	1	1	70.000.000,00	69.999.651,00	69.999.651,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	150.000.000,00	149.998.824,00	149.998.824,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**03**			**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**	**Persen**	**Persen**	**90,98**	**90,98**	**90,98**	**1.560.000.000,00**	**1.474.357.429,00**	**1.574.357.429,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
							Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	**Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya	**Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya**	**Persen**	**Persen**	**89,88**	**89,88**	**89,88**				
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Dokumen**	**Dokumen**	**2**	**2**	**2**	**660.000.000,00**	**625.509.260,00**	**625.509.260,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
							Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Dokumen**	**Dokumen**	**2**	**2**	**2**				
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	2	2	2	150.000.000,00	115.515.593,00	115.515.593,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	Laporan	8	1	1	80.000.000,00	79.998.839,00	79.998.839,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Laporan	1	1	1	80.000.000,00	79.999.575,00	79.999.575,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	2	2	2	150.000.000,00	149.997.422,00	149.997.422,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Laporan	10	1	1	100.000.000,00	99.998.550,00	99.998.550,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Laporan	10	1	1	100.000.000,00	99.999.281,00	99.999.281,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekononomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekononomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**300.000.000,00**	**299.999.676,00**	**299.999.676,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
							Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**				
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	60.000.000,00	59.999.969,00	59.999.969,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Laporan	6	1	1	60.000.000,00	59.999.969,00	59.999.969,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Laporan	6	1	1	60.000.000,00	59.999.969,00	59.999.969,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	40.000.000,00	39.999.923,00	39.999.923,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah	Laporan	4	1	1	40.000.000,00	39.999.923,00	39.999.923,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah	Laporan	4	1	1	40.000.000,00	39.999.923,00	39.999.923,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**600.000.000,00**	**548.848.493,00**	**648.848.493,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
							Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan	**Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan dan Kewilayahan**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	-			
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastuktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastuktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan	Dokumen	3	4	5	250.000.000,00	228.849.036,00	328.849.036,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastuktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastuktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Laporan	7	1	1	70.000.000,00	64.999.755,00	64.999.755,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastuktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastuktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Laporan	7	1	1	70.000.000,00	59.999.825,00	59.999.825,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	70.000.000,00	64.999.943,00	64.999.943,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Laporan	20	1	1	70.000.000,00	64.999.941,00	64.999.941,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Laporan	20	1	1	70.000.000,00	64.999.993,00	64.999.993,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**02**				**KEUANGAN**									**228.837.807.692,89**	**223.477.858.523,00**	**186.745.180.388,00**	
					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									**168.147.318.403,89**	**162.280.268.169,00**	**126.047.590.034,00**	
5	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**87.972.195.275,89**	**87.353.587.147,00**	**54.120.909.012,00**	**BKAD**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**564.090.138,00**	**644.182.421,00**	**644.182.421,00**	**BKAD**
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	dokumen	2	2	2	116.170.460,00	136.179.514	136.179.514	BKAD
6	02	01	2.02	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	dokumen	1	1	1	57.024.241,00	62.071.414	62.071.414	BKAD
7	02	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	dokumen	1	1	1	54.192.655,00	59.194.228	59.194.228	BKAD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
8	02	01	2.04	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	dokumen	1	1	1	65.939.740,00	70.952.058	70.952.058	BKAD
9	02	01	2.05	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	dokumen	1	1	1	59.169.677,00	64.174.243	64.174.243	BKAD
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3	3	3	107.588.045,00	124.015.631	124.015.631	BKAD
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	Laporan	5	5	5	104.005.320,00	127.595.333	127.595.333	BKAD
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib**	**Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**80.745.972.935,34**	**79.767.116.110,00**	**46.429.437.975,00**	**BKAD**
							Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang/bulan	127	127	127	80.178.775.535,34	79.031.253.479	45.693.575.344	BKAD
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1.240	1.240	1.240	298.949.400,00	430.114.778	430.114.778	BKAD
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan / semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteraan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteraan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	13	13	13	268.248.000,00	305.747.853	305.747.853	BKAD
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**155.466.875,00**			**BKAD**
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		2			155.466.875,00			BKAD
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**74.870.350,00**	**388.037.608,00**	**388.037.608,00**	**BKAD**
5	02	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket		1,00	1,00		200.000.000,00	200.000.000,00	BKAD
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	7	7	7	74.870.350,00	188.037.608	188.037.608	BKAD
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.221.835.820,19**	**1.507.496.834,00**	**1.507.496.834,00**	**BKAD**
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	3	3	3	115.004.500,00	115.003.087	115.003.087	BKAD
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	4	4	4	180.008.936,00	180.006.938	180.006.938	BKAD
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	6	6	6	78.321.478,00	78.310.194	78.310.194	BKAD
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	7	7	7	79.625.000,00	78.000.000	78.000.000	BKAD
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	9	9	9	188.719.597,00	188.707.290	188.707.290	BKAD
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	6	6	6	38.040.000,00	38.040.000	38.040.000	BKAD
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	10	10	10	161.789.950,00	162.000.000	162.000.000	BKAD
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	8	8	8	120.782.847,19	267.222.545	267.222.545	BKAD
5	02	01	2.06	0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	259.543.512,00	400.206.780	400.206.780	BKAD
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**804.816.477,36**	**502.540.674,00**	**607.540.674,00**	**BKAD**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	unit	8	8	13	650.000.000,00	256.323.138	361.323.138	BKAD
5	02	01	2.07	0011	Pengadaaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Pengadaaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	unit	5	5	5	154.816.477,36	246.217.536	246.217.536	BKAD
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD**	**Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.759.874.000,00**	**3.971.626.000,00**	**3.971.626.000,00**	**BKAD**
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	174.810.000,00	174.810.000	174.810.000	BKAD
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.585.064.000,00	3.796.816.000	3.796.816.000	BKAD
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemmerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemmerintahan Daerah**	**Inventaris kantor yang tersedia**	**Inventaris kantor yang tersedia**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**645.268.680,00**	**572.587.500,00**	**572.587.500,00**	**BKAD**
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	52.966.675,00	52.430.000	52.430.000	BKAD
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	18	18	18	392.302.005,00	313.957.500	313.957.500	BKAD
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	10	10	10	80.000.000,00	78.500.000	78.500.000	BKAD
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	120.000.000,00	127.700.000	127.700.000	BKAD
5	**02**	**02**			**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Opini BPK atas LKPD**	**Opini BPK atas LKPD**	**Predikat**	**Predikat**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**77.897.615.695,00**	**72.246.122.554,00**	**69.246.122.554,00**	**BKAD**
							Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	**Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan	**Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah**	**Persentase koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.831.695.084,00**	**4.680.235.738,00**	**4.680.235.738,00**	**BKAD**
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	Dokumen	2	2	2	702.072.863,00	745.820.815	745.820.815	BKAD
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	Dokumen	2	2	2	354.431.669,00	442.312.817	442.312.817	BKAD
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	Dokumen	2	2	2	503.000.000,00	593.807.231	593.807.231	BKAD
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Dokumen	Dokumen	2	2	2	628.880.000,00	614.521.438	614.521.438	BKAD
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	Dokumen	2	2	2	444.797.892,00	479.080.311	479.080.311	BKAD
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	Dokumen	3	3	3	1.560.575.538,00	1.125.510.229	1.125.510.229	BKAD
5	02	02	2.01	0011	Koordiansi perencanaan anggaran belanja daerah	Koordiansi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah Dokument Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokument Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3	3	637.937.122,00	679.182.897	679.182.897	BKAD
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**	**Persentase koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.276.892.755,00**	**6.173.573.734,00**	**6.173.573.734,00**	**BKAD**
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	Dokumen	12	12	12	3.190.199.705,00	1.854.240.000	1.854.240.000	BKAD
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	Dokumen	3	3	3	1.158.273.185,00	1.329.175.133	1.329.175.133	BKAD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Dokumen	Dokumen	12	12	12	350.773.100,00	690.000.000	690.000.000	BKAD
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koodinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koodinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	Laporan	5	5	5	430.601.327,00	675.113.555	675.113.555	BKAD
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Dokumen	Dokumen	12	12	12	93.327.538,00	114.565.046	114.565.046	BKAD
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Dokumen	Dokumen	54	54	54	603.325.000,00	915.480.000	915.480.000	BKAD
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan denga npenerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan denga npenerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Dokumen	Dokumen	15	15	15	450.392.900,00	595.000.000	595.000.000	BKAD
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Opini BPK atas LKPD**	**Opini BPK atas LKPD**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**992.612.764,00**	**1.121.312.539,00**	**1.121.312.539,00**	**BKAD**
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bulanan, triwulanan dan semesteran	Laporan	Laporan	14	14	14	191.455.500,00	211.304.312	211.304.312	BKAD
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	Konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	Laporan	Laporan	1	1	1	139.080.597,00	155.400.582	155.400.582	BKAD
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Dokumen	Dokumen	5	5	5	187.035.000,00	263.006.373	263.006.373	BKAD
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	73.964.375,00	82.143.930	82.143.930	BKAD
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban pemerintah kabupaten kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban pemerintah kabupaten kota	Orang	Orang	162	162	162	348.306.042,00	348.512.515	348.512.515	BKAD
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kab/kota	Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kab/kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	Lembaga	Lembaga	32	32	32	52.771.250,00	60.944.827	60.944.827	BKAD
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat**	**Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat**	**Persen**	**Persen**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**63.861.402.323,00**	**58.352.061.368,00**	**55.352.061.368,00**	**BKAD**
5	02	02	2.04	0003	Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Penrencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Penrencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	43.000.000,00	58.362.221	58.362.221	BKAD
5	02	02	2.04	0004	Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Laporan	Laporan	6	6	6	12.675.516.689,00	12.675.516.689	12.675.516.689	BKAD
5	02	02	2.04	0008	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Laporan	Laporan	12	12	12	18.067.885.634,00	30.204.257.068	29.954.257.068	BKAD
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Laporan	Laporan	12	12	12	33.075.000.000,00	15.413.925.390	12.663.925.390	BKAD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.935.012.769,00**	**1.918.939.175,00**	**1.918.939.175,00**	**BKAD**
5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Dokumen	Dokumen	4	4	4	281.600.000,00	217.622.541	217.622.541	BKAD
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistim informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistim informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	dokumen	dokumen	12	12	12	310.862.000,00	299.428.474	299.428.474	BKAD
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistim informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistim informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Orang	Orang	30	30	30	1.342.550.769,00	1.401.888.160	1.401.888.160	BKAD
5	**02**	**03**			**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah**	**Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.277.507.433,00**	**2.680.558.468,00**	**2.680.558.468,00**	**BKAD**
							Persentase Penilaian dan Penghapusan BMD sesuai dengan Usulan OPD	**Persentase Penilaian dan Penghapusan BMD sesuai dengan Usulan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah**	**Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.277.507.433,00**	**2.680.558.468,00**	**2.680.558.468,00**	**BKAD**
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan standar harga	Penyusunan standar harga	Jumlah standar harga yang disusun	Jumlah standar harga yang disusun	dokumen	dokumen	1	1	1	195.000.000,00	194.208.663	194.208.663	BKAD
5	02	03	2.01	0003		Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		1	1		130.160.873	130.160.873	BKAD
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan barang milik daerah	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	laporan	laporan	1	1	1	60.003.125,00	60.112.850	60.112.850	BKAD
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan barang milik daerah	Pengamanan barang milik daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	laporan	laporan	1	1	1	877.241.875,00	960.659.566	960.659.566	BKAD
5	02	03	2.01	0008	Penilaian barang milik daerah	Penilaian barang milik daerah	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	laporan	laporan	1	1	1	103.595.574,00	109.038.798	109.038.798	BKAD
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	dokumen	dokumen	20	20	20	264.946.301,00	436.794.647	436.794.647	BKAD
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	laporan	laporan	2	2	2	572.753.432,00	677.484.149	677.484.149	BKAD
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah	dokumen	dokumen	1	1	1	203.967.126,00	112.098.922	112.098.922	BKAD
					BADAN PENDAPATAN DAERAH									**60.690.489.289,00**	**61.197.590.354,00**	**60.697.590.354,00**	
5	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**53.094.264.289,00**	**53.969.154.271,00**	**53.469.154.271,00**	**BAPENDA**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**253.000.000,00**	**252.999.742,00**	**252.999.742,00**	**BAPENDA**
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3	3	53.000.000,00	52.999.850,00	52.999.850,00	BAPENDA
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3	3	3	200.000.000,00	199.999.892,00	199.999.892,00	BAPENDA
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**44.439.253.483,00**	**45.068.108.783,00**	**44.568.108.783,00**	**BAPENDA**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	193	193	193	43.353.745.483,00	43.980.846.548,00	43.480.846.548,00	BAPENDA
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	260	260	260	189.008.000,00	160.763.000,00	160.763.000,00	BAPENDA
5	02	01	2.02	0005	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	196.500.000,00	226.499.235,00	226.499.235,00	BAPENDA
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	11	11	11	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	BAPENDA
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**BAPENDA**
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Paket							BAPENDA
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	8	8	8	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	BAPENDA
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**816.000.000,00**	**761.427.761,00**	**761.427.761,00**	**BAPENDA**
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.000.000,00	19.994.305,00	19.994.305,00	BAPENDA
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	4	4	4	198.000.000,00	197.999.082,00	197.999.082,00	BAPENDA
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	67.000.000,00	68.026.981,00	68.026.981,00	BAPENDA
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	8	8	8	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	BAPENDA
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	4	4	4	170.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	BAPENDA
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	4	4	4	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	BAPENDA
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	4	4	4	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	BAPENDA
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	5	5	5	200.000.000,00	169.407.393,00	169.407.393,00	BAPENDA
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**0,98**	**0,98**	**0,98**	**572.000.000,00**	**904.373.674,00**	**904.373.674,00**	**BAPENDA**
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	Unit							BAPENDA
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	Unit	23	23	23	50.000.000,00	215.506.200,00	215.506.200,00	BAPENDA

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Unit	Unit	18	18	18	297.000.000,00	476.408.186,00	505.013.651,00	BAPENDA
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	125.000.000,00	65.959.288,00	65.959.288,00	BAPENDA
5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	Unit	1	1	1	100.000.000,00	146.500.000,00	117.894.535,00	BAPENDA
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.032.000.000,00**	**4.961.376.537,00**	**4.961.376.537,00**	**BAPENDA**
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	Laporan	4	4	4	250.000.000,00	257.376.537,00	257.376.537,00	BAPENDA
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	4.782.000.000,00	4.704.000.000,00	4.704.000.000,00	BAPENDA
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.882.010.806,00**	**1.920.867.774,00**	**1.920.867.774,00**	**BAPENDA**
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	50.000.000,00	44.530.000,00	50.853.774,00	BAPENDA
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	11 Unit mobil, 10 motor	11 Unit mobil, 10 motor	11 Unit mobil, 10 motor	498.230.000,00	451.450.000,00	431.882.000,00	BAPENDA
5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	29.200.000,00	15.845.774,00	29.090.000,00	BAPENDA

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	44.338.806,00	129.400.000,00	129.400.000,00	BAPENDA
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	1.260.242.000,00	1.279.642.000,00	1.279.642.000,00	BAPENDA
5	**02**	**04**			**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pajak Daerah terhadap PAD**	**Persentase Pajak Daerah terhadap PAD**	**Persen**	**Persen**	**65,02**	**65,02**	**65,02**	**7.596.225.000,00**	**7.228.436.083,00**	**7.228.436.083,00**	**BAPENDA**
5	**02**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pajak Daerah terhadap PAD**	**Persentase Pajak Daerah terhadap PAD**	**Persen**	**Persen**	**65,02**	**65,02**	**65,02**	**7.596.225.000,00**	**7.228.436.083,00**	**7.228.436.083,00**	**BAPENDA**
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2	2	850.000.000	904.900.000	904.900.000	BAPENDA
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah Serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah Serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	214.500.000,00	214.228.480,00	214.228.480,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	195.000.000,00	237.080.000,00	237.080.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	Unit	1	1	1	700.000.000,00	822.500.000,00	822.500.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	Laporan	10	10	10	100.000.000,00	380.500.000,00	380.500.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0006	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Laporan		7			550.000.000,00			BAPENDA
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak Daerah	Objek Pajak Daerah	7.812	7.812	7.812	500.000.000,00	365.000.000,00	365.000.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2	2	850.000.000,00	846.000.000,00	846.000.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	Layanan	10	10	10	186.725.000,00	150.014.026,00	150.014.026,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	Dokumen	2	2	2	750.000.000,00	744.299.893,00	744.299.893,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	6	6	6	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Prosentase data pajak yang sesuai dengan omzet	Prosentase data pajak yang sesuai dengan omzet	Persen	Persen	231	231	231	200.000.000,00	657.500.000,00	657.500.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	10	10	10	1.550.000.000,00	953.410.000,00	953.410.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	Laporan	2	2	2	100.000.000,00	100.003.684,00	100.003.684,00	BAPENDA

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	02	04	2.01	0015	Elektronika Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronika Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan	3	3	3	300.000.000,00	303.000.000,00	303.000.000,00	BAPENDA
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**									**7.209.280.900,00**	**8.435.874.903,00**	**7.976.267.541,00**	
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									**7.209.280.900,00**	**8.435.874.903,00**	**7.976.267.541,00**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	%	%	**98,00**	**98,00**		**4.894.828.608,00**	**5.848.164.719,00**	**5.348.161.269,00**	**BKPSDM**
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	%	%	**100,00**	**100,00**		**98.270.000,00**	**109.678.531,00**	**109.678.531,00**	**BKPSDM**
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2		20.000.000,00	18.094.652,00	18.094.652,00	BKPSDM
5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		21.000.000,00	34.314.661,00	34.314.661,00	BKPSDM
5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		15.000.000,00	14.999.826,00	14.999.826,00	BKPSDM
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Laporan	3	3		16.000.000,00	15.999.602,00	15.999.602,00	BKPSDM
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	4	4		26.270.000,00	26.269.790,00	26.269.790,00	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	%	%	**100,00**	**100,00**		**3.926.506.803,00**	**4.816.176.530,00**	**4.316.176.530,00**	**BKPSDM**
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	50	50		3.625.230.194,00	4.532.686.174,00	4.032.686.174,00	BKPSDM
5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	4	4		212.826.609,00	207.033.523,00	207.033.523,00	BKPSDM
5	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		24.000.000,00	16.007.793,00	16.007.793,00	BKPSDM
5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1		30.450.000,00	30.449.516,00	30.449.516,00	BKPSDM
5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	Laporan	12	12		25.000.000,00	24.999.839,00	24.999.839,00	BKPSDM
5	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Dokumen	1	1		9.000.000,00	4.999.685,00	4.999.685,00	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	%	%	**100,00**	**100,00**		**20.000.000,00**	**24.949.424,00**	**24.949.424,00**	**BKPSDM**
5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	1	1		5.000.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Pungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Pungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	60	60		15.000.000,00	19.999.424,00	19.999.424,00	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	%	%	**100,00**	**100,00**		**271.296.719,00**	**281.755.767,00**	**296.658.963,00**	**BKPSDM**
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		5.000.000,00	4.991.139,00	4.991.139,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		65.307.051,00	77.959.857,00	105.331.217,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		30.003.218,00	19.997.905,00	19.997.905,00	BKPSDM

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		20.000.000,00	25.000.000,00	22.500.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		65.486.450,00	39.666.600,00	39.666.600,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1		20.500.000,00	10.000.000,00	9.500.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		60.000.000,00	99.140.266,00	89.672.102,00	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**		**45.815.086,00**	**84.738.804,00**	**84.832.158,00**	**BKPSDM**
5	03	01	2.07	0005	Pengadan Mebel	Pengadan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		4.500.000,00	4.325.492,00	4.325.492,00	BKPSDM
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		31.315.086,00	70.546.646,00	70.640.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		10.000.000,00	9.866.666,00	9.866.666,00	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**		**378.000.000,00**	**380.000.000,00**	**380.000.000,00**	**BKPSDM**
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		18.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan inventaris kantor yang terpelihara**	**Persentase pemenuhan inventaris kantor yang terpelihara**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**		**154.940.000,00**	**150.865.663,00**	**135.865.663,00**	**BKPSDM**
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	2	2		40.670.000,00	44.430.000,00	44.430.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	3	3		51.270.000,00	59.137.136,00	59.137.136,00	BKPSDM
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1		25.000.000,00	24.870.000,00	24.870.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1		30.000.000,00	15.000.000,00		BKPSDM
5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1		3.000.000,00	4.428.527,00	4.428.527,00	BKPSDM
5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1		5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	BKPSDM
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Formal**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Formal**	**%**	**%**	**18,30**	**18,30**		**2.314.452.292,00**	**2.587.710.184,00**	**2.628.106.272,00**	**BKPSDM**
							Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Struktural	**Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Struktural**	**%**	**%**	**82,05**	**82,05**					
							Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	**Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah**	**Jabatan**	**Jabatan**	**39**	**39**					
							Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	**Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah**	**Jabatan**	**Jabatan**	**207**	**207**					
							Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	**Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah**	**Jabatan**	**Jabatan**	**3485**	**3485**					
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN Pelamar Umum dan khusus, yang akan dilakukan penetapan NIP, peningkatan Status ASN, dan sumpah ASN**	**Jumlah CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN Pelamar Umum dan khusus, yang akan dilakukan penetapan NIP, peningkatan Status ASN, dan sumpah ASN**	**CPNS**	**CPNS**	**1400**	**1400**		**491.000.000,00**	**593.008.470,00**	**603.508.470,00**	**BKPSDM**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
							Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang diterbitkan BKN	**Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang diterbitkan BKN**	**SK Pensiun**	**SK Pensiun**	**490**	**490**					
							Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	**Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN**	**Lembaga**	**Lembaga**	**1**	**1**					
							Jumlah data sistem informasi kepegawaian ASN yang tervalidasi	**Jumlah data sistem informasi kepegawaian ASN yang tervalidasi**	**Data ASN**	**Data ASN**	**10500**	**10500**					
							Jumlah updating data kepegawaian yang akurat	**Jumlah updating data kepegawaian yang akurat**	**Data ASN**	**Data ASN**	**10500**	**10500**					
							Jumlah penyelesaian data kepegawaian karpeg, karis, karsu yang di terbitkan BKN dan surat cuti ASN yang diterbitkan BKD	**Jumlah penyelesaian data kepegawaian karpeg, karis, karsu yang di terbitkan BKN dan surat cuti ASN yang diterbitkan BKD**	**Kartu Karpeg, Karis, Karsu dan Surat Cuti ASN**	**Kartu Karpeg, Karis, Karsu dan Surat Cuti ASN**	**1800**	**1800**					
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	Dokumen	1	1		25.000.000,00	24.676.869,00	24.676.869,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	Dokumen	1	1		167.100.000,00	169.585.501,00	169.585.501,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	Laporan	1	1		59.000.000,00	81.561.305,00	81.561.305,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	Dokumen	1	1		41.000.000,00	49.941.400,00	60.441.400,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	Lembaga	1	1		78.900.000,00	112.278.541,00	112.278.541,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Dokumen	1	1		85.000.000,00	119.963.331,00	119.963.331,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	Dokumen	1	1		15.000.000,00	15.000.529,00	15.000.529,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	Laporan	1	1		20.000.000,00	20.000.994,00	20.000.994,00	BKPSDM
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan**	**Jumlah mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan**	**ASN**	**ASN**	**150**	**150**		**295.000.000,00**	**302.478.127,00**	**332.370.765,00**	**BKPSDM**
							Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	**Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah**	**Jabatan**	**Jabatan**	**39**	**39**					
							Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	**Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah**	**Jabatan**	**Jabatan**	**207**	**207**					
							Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah	**Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah**	**Jabatan**	**Jabatan**	**3485**	**3485**					
							Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober dan kenaikan gaji berkala tepat waktu	**Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober dan kenaikan gaji berkala tepat waktu**	**SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala ASN**	**SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala ASN**	**6000**	**6000**					
							Jumlah ASN yang lulus promosi ujian penyesuaian dan ujian dinas	**Jumlah ASN yang lulus promosi ujian penyesuaian dan ujian dinas**	**ASN**	**ASN**	**600**	**600**					
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2		100.000.000,00	117.498.461,00	131.516.099,00	BKPSDM
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	Dokumen	1	1		115.000.000,00	104.980.299,00	120.855.299,00	BKPSDM
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	Dokumen	1	1		80.000.000,00	79.999.367,00	79.999.367,00	BKPSDM
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN yang mengikuti pendidkan dan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan**	**Jumlah ASN yang mengikuti pendidkan dan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan**	**ASN**	**ASN**	**300**	**300**		**1.338.452.292,00**	**1.526.255.642,00**	**1.526.259.092,00**	**BKPSDM**
							Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural serta Sertifikasi ASN	**Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural serta Sertifikasi ASN**	**Pejabat**	**Pejabat**	**1349**	**1349**					

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
							Jumlah ASN yang mendapatkan izin belajar, tugas belajar, beasiswa dan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	**Jumlah ASN yang mendapatkan izin belajar, tugas belajar, beasiswa dan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas**	**ASN**	**ASN**	**100**	**100**					
							Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK)	**Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK)**	**ASN**	**ASN**	**250**	**250**					
							Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota Bandar Lampung	**Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota Bandar Lampung**	**laporan**	**laporan**	**12**	**12**					
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	Orang	90	90		10.697.378,00	60.697.129,00	60.697.129,00	BKPSDM
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	Dokumen	1	1		280.000.000,00	279.998.385,00	259.901.835,00	BKPSDM
5	03	02	2.03	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	Dokumen	1	1		305.884.914,00	261.884.908,00	261.884.908,00	BKPSDM
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	Orang	100	100		680.000.000,00	820.000.000,00	840.100.000,00	BKPSDM
5	03	02	2.03	0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	Orang	90	90		32.000.000,00	46.075.718,00	46.075.718,00	BKPSDM
5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	Orang	250	250		19.600.000,00	19.599.751,00	19.599.751,00	BKPSDM
5	03	02	2.03	00015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	Laporan	12	12		10.270.000,00	37.999.751,00	37.999.751,00	BKPSDM
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah SKP ASN Kota Bandar Lampung yang mendapatkan nilai baik pada aplikasi e-kinerja**	**Jumlah SKP ASN Kota Bandar Lampung yang mendapatkan nilai baik pada aplikasi e-kinerja**	**SKP ASN**	**SKP ASN**	**8500**	**8500**		**190.000.000,00**	**165.967.945,00**	**165.967.945,00**	**BKPSDM**
							Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	**Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya**	**ASN**	**ASN**	**1000**	**1000**					
							Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	**Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN**	**ASN**	**ASN**	**100**	**100**					
							Jumlah penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	**Jumlah penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN**	**Kasus**	**Kasus**	**40**	**40**					
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	Dokumen	1	1		75.000.000,00	30.999.623,00	30.999.623,00	BKPSDM
5	03	02	2.04	0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	Dokumen	1	1		45.000.000,00	44.994.536,00	44.994.536,00	BKPSDM
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	Orang	60	60		25.000.000,00	34.995.961,00	34.995.961,00	BKPSDM
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	Laporan	1	1		30.000.000,00	39.984.562,00	39.984.562,00	BKPSDM
5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	Dokumen	1	1		15.000.000,00	14.993.263,00	14.993.263,00	BKPSDM
																396.811.271,00	
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									**739.949.294,00**	**396.811.271,00**	**396.811.271,00**	
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									**739.949.294,00**	**396.811.271,00**	**396.811.271,00**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	**%**	**%**	**100**	**100**		**739.949.294,00**	**396.811.271,00**	**396.811.271,00**	**BKPSDM**
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	**%**	**%**	**100**	**100**		**739.949.294,00**	**396.811.271,00**	**396.811.271,00**	**BKPSDM**
							Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik	**Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik**	**Pejabat**	**Pejabat**	**10**	**10**					
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	Laporan	1	1		448.949.294,00	4.999.789,00	4.999.789,00	BKPSDM

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	04	02	2.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan danTenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi ,Kepemimpinan dan Prajabatan	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan danTenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi ,Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	Dokumen	1	1		291.000.000,00	391.811.482,00	391.811.482,00	BKPSDM
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									**640.000.000,00**	**1.080.937.052,00**	**950.937.052,00**	
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH									**640.000.000,00**	**1.080.937.052,00**	**950.937.052,00**	
5	**05**	**02**			**Program Penelitian dan Pengembangan**	**Program Penelitian dan Pengembangan**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**640.000.000,00**	**1.080.937.052,00**	**950.937.052,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
							Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	**Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah**	**Persen**	**Persen**	**92,59**	**92,59**	**92,59**				
5	**01**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**2**	**2**	**390.000.000,00**	**739.997.931,00**	**609.997.931,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Laporan	Dokumen	1	2	2	390.000.000,00	739.997.931,00	609.997.931,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**2**	**2**	**250.000.000,00**	**340.939.121,00**	**340.939.121,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	05	02	2.04	0001	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	Dokumen	1	2	2	250.000.000,00	340.939.121,00	340.939.121,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6	**01**				**UNSUR PENGAWAS**									**18.012.000.000,00**	**21.462.821.244,00**	**21.700.403.192,00**	
					INSPEKTORAT									**18.012.000.000,00**	**21.462.821.244,00**	**21.700.403.192,00**	
6	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Inspektorat**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Inspektorat**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**13.213.471.722,00**	**16.695.357.109,00**	**16.944.983.169,00**	**Inspektorat**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**92.792.586,60**	**142.640.858,00**	**142.640.858,00**	**Inspektorat**
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	6	6	6	46.160.222,85	48.497.033,00	48.497.033,00	Inspektorat
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	6	6	6	46.632.363,75	94.143.825,00	94.143.825,00	Inspektorat
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**11.068.168.717,55**	**14.518.970.226,00**	**14.756.552.391,00**	**Inspektorat**
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	79	79	79	10.892.000.000,00	14.342.821.244,00	14.580.403.192,00	Inspektorat
6	01	01	2.01	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	5	5	5	125.408.294,55	125.388.996,00	125.388.996,00	
	01	01	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	6	6	6	50.760.423,00	50.759.986,00	50.760.203,00	Inspektorat
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**330.000.000,00**	**475.967.052,00**	**475.967.047,00**	**Inspektorat**
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Paket		1			-			Inspektorat
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	83	83	83	100.000.000,00	243.467.052,00	243.467.047,00	Inspektorat
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang	83	83	83	230.000.000,00	232.500.000,00	232.500.000,00	Inspektorat
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**973.209.194,85**	**773.218.973,00**	**795.262.873,00**	**Inspektorat**
6	01	01	2.05	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.994.671,00	15.994.573,00	15.994.573,00	Inspektorat
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	123.597.614,00	61.799.160,00	61.799.160,00	Inspektorat
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		1			15.000.000,00		-	Inspektorat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BID AN URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	72.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	116.455.369,00	58.227.490,00	80.271.653,00	Inspektorat
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	76.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	532.561.540,85	541.597.750,00	541.597.487,00	
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**195.000.000,00**	**80.000.000,00**	**70.000.000,00**	**Inspektorat**
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	1			-		-	Inspektorat
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	25	1 unit	1 unit	10.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Inspektorat
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	20	1 unit	1 unit	185.000.000,00	10.000.000,00	-	Inspektorat
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**156.520.000,00**	**265.000.000,00**	**265.000.000,00**	**Inspektorat**
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	12.520.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	144.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**397.781.223,00**	**439.560.000,00**	**439.560.000,00**	**Inspektorat**
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.088,00	47.430.000,00	47.430.000,00	Inspektorat
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	7	7	7	261.749.135,00	239.640.000,00	239.640.000,00	Inspektorat
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	72	72	72	52.500.000,00	52.490.000,00	52.490.000,00	Inspektorat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	215	10 meter	10 meter	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Inspektorat
6	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD**	**Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**2.532.048.578,00**	**2.599.536.221,00**	**2.587.492.109,00**	**Inspektorat**
							Presentase Tindak Lanjut Temuan	**Presentase Tindak Lanjut Temuan**	%		**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Presentase Penangan Kasus Pengaduan	**Presentase Penangan Kasus Pengaduan**	%	%	**90,00**	**90,00**	**90,00**				
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD**	**Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**2.242.050.000,00**	**2.242.041.489,00**	**2.229.997.377,00**	**Inspektorat**
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan	85	85	85	1.230.000.000,00	1.229.998.302,00	1.303.368.316,00	Inspektorat
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan	13	13	13	330.000.000,00	329.999.697,00	329.999.817,00	Inspektorat
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviu Kinerja	Laporan Hasil Reviu Kinerja	Laporan	Laporan	11	11	11	370.000.000,00	369.999.831,00	296.629.787,00	Inspektorat
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu Keuangan	Laporan Hasil Reviu Keuangan	Laporan	Laporan	4	4	4	140.000.000,00	139.999.962,00	139.999.962,00	Inspektorat
6	01	02	2.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Kesepakatan	Kesepakatan	1	1	1	22.050.000,00	22.044.202,00	-	Inspektorat
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil	Dokumen	Dokumen	3	3	3	150.000.000,00	149.999.495,00	159.999.495,00	Inspektorat
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Presentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Presentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**289.998.578,00**	**357.494.732,00**	**357.494.732,00**	**Inspektorat**
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang ditangani	Laporan	Laporan	5	5	5	32.498.584,00	19.796.279,00	19.796.279,00	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	Laporan	35	90%	90%	257.499.994,00	337.698.453,00	337.698.453,00	
6	**01**	**03**			**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP**	**Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.266.479.700,00**	**2.167.927.914,00**	**2.167.927.914,00**	**Inspektorat**
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Pendampingan dan Asistensi**	**Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP**	**Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.266.479.700,00**	**2.167.927.914,00**	**2.167.927.914,00**	**Inspektorat**
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	10	10	10	182.500.000,00	182.499.793,00	182.499.793,00	Inspektorat
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dilakukan Penilaian Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dilakukan Penilaian Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	5	5	5	75.000.000,00	45.999.964,00	45.999.964,00	Inspektorat
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantaasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantaasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantaasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantaasan Korupsi	Kegiatan	Kegiatan	6	6	6	1.995.000.000,00	1.925.448.513,00	1.925.448.513,00	Inspektorat
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	52	52	52	13.979.700,00	13.979.644,00	13.979.644,00	Inspektorat
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									**219.561.890.158,00**	**240.196.635.139,00**	**235.154.600.139,00**	
7	**01**				**KECAMATAN**									**219.561.890.158,00**	**240.196.635.139,00**	**235.154.600.139,00**	
					KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT									**11.948.945.180,00**	**13.124.960.119,00**	**12.774.960.119,00**	**350.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.523.800.433,00**	**6.728.058.947,00**	**6.378.058.947,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja**	**Presentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**39.287.394,00**	**19.321.849,00**	**19.321.849,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	11.488.229,00	6.603.727,00	6.603.727,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Laporan	1	1	1	16.537.261,00	6.277.782,00	6.277.782,00	
7	01	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	11.261.904,00	6.440.340,00	6.440.340,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.294.345.180,00**	**5.481.560.119,00**	**5.131.560.119,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	49	49	49	4.200.595.180,00	5.380.810.119,00	5.030.810.119,00	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	93.750.000,00	100.750.000,00	100.750.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	98,00	98,00	98,00	54.914.047,00	62.363.965,00	62.363.965,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.357.110,00	4.356.115,00	4.356.115,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	19.386.437,00	19.383.593,00	19.383.593,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.633.000,00	11.624.257,00	11.624.257,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.537.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	-	-	-	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	98,00	98,00	98,00	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	%	%	100,00	100,00	100,00	995.050.000,00	1.019.270.926,00	1.007.655.526,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	38.400.000,00	38.620.926,00	39.005.526,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	Laporan	1	1	1	956.650.000,00	980.650.000,00	968.650.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	%	%	98,00	98,00	98,00	140.203.812,00	145.542.088,00	157.157.488,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.088,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	104.671.724,00	106.692.088,00	118.307.488,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	-			Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	2.000.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	100,00	100,00	100,00	3.490.344.747,00	3.478.031.467,00	3.478.031.467,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	100,00	100,00	100,00	33.400.000,00	33.395.018,00	33.395.018,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1,00	1,00	1,00	33.400.000,00	33.395.018,00	33.395.018,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	100,00	100,00	100,00	3.456.944.747,00	3.444.636.449,00	3.444.636.449,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1,00	1,00	1,00	3.456.944.747,00	3.444.636.449,00	3.444.636.449,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	85,00	85,00	85,00	649.500.000,00	649.495.558,00	649.495.558,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**579.500.000,00**	**579.495.558,00**	**579.495.558,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	579.500.000,00	579.495.558,00	579.495.558,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.283.300.000,00**	**2.267.391.047,00**	**2.267.391.047,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.283.300.000,00**	**2.267.391.047,00**	**2.267.391.047,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.260.300.000,00	2.244.394.856,00	2.244.394.856,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	23.000.000,00	22.996.191,00	22.996.191,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**991.550,00**	**991.550,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**991.550,00**	**991.550,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	500.000,00	495.775,00	495.775,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	orang	orang	20	20	20	500.000,00	495.775,00	495.775,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**991.550,00**	**991.550,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**991.550,00**	**991.550,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	500.000,00	495.775,00	495.775,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	500.000,00	495.775,00	495.775,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
					KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT									**11.616.694.968,00**	**12.749.174.142,00**	**12.349.174.142,00**	**400.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.330.312.045,00**	**6.502.182.172,00**	**6.102.182.172,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.806.759,00**	**5.771.523,00**	**5.771.523,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.938.472,00	1.923.841,00	1.923.841,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.938.472,00	1.923.841,00	1.923.841,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	1.929.815,00	1.923.841,00	1.923.841,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.406.797.439,00**	**5.550.678.452,00**	**5.150.678.452,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	50	50	50	4.312.494.968,00	5.447.524.142,00	5.047.524.142,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	94.302.471,00	103.154.310,00	103.154.310,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**53.875.453,00**	**56.229.327,00**	**56.229.327,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.231.502,00	3.202.880,00	3.202.880,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.405.814,00	15.385.234,00	15.385.234,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.613.037,00	7.523.829,00	7.523.829,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.125.000,00	15.625.000,00	15.625.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.500.100,00	3.492.384,00	3.492.384,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**12.435.450,00**	**12.019.014,00**	**12.019.014,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	12.435.450,00	12.019.014,00	12.019.014,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	10	10	10	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**665.650.000,00**	**679.300.000,00**	**679.300.000,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	625.650.000,00	639.300.000,00	639.300.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**185.746.944,00**	**198.183.856,00**	**198.183.856,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	34.728.692,00	40.798.692,00	40.798.692,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	7	7	7	73.395.980,00	79.438.692,00	79.438.692,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	10	10	10	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	2	2	2	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	56.002.272,00	56.876.472,00	56.876.472,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7	7	7	15.120.000,00	14.570.000,00	14.570.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.265.909.806,00**	**3.253.153.735,00**	**3.253.153.735,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**37.183.827,00**	**36.630.841,00**	**36.630.841,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	37.183.827,00	36.630.841,00	36.630.841,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.228.725.979,00**	**3.216.522.894,00**	**3.216.522.894,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.228.725.979,00	3.216.522.894,00	3.216.522.894,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**818.488.979,00**	**809.124.591,00**	**809.124.591,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**748.488.979,00**	**739.130.841,00**	**739.130.841,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	748.488.979,00	739.130.841,00	739.130.841,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**70.000.000,00**	**69.993.750,00**	**69.993.750,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan mencegahan tindak kriminal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan mencegahan tindak kriminal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.188.472.028,00**	**2.172.345.788,00**	**2.172.345.788,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.188.472.028,00**	**2.172.345.788,00**	**2.172.345.788,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.164.203.021,00	2.148.522.894,00	2.148.522.894,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.269.007,00	23.822.894,00	23.822.894,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**7.103.510,00**	**6.183.928,00**	**6.183.928,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**7.103.510,00**	**6.183.928,00**	**6.183.928,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.204.300,00	3.091.964,00	3.091.964,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	3.899.210,00	3.091.964,00	3.091.964,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.408.600,00**	**6.183.928,00**	**6.183.928,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.408.600,00**	**6.183.928,00**	**6.183.928,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.204.300,00	3.091.964,00	3.091.964,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.204.300,00	3.091.964,00	3.091.964,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
					KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR									**9.371.311.868,00**	**10.285.543.542,00**	**10.000.543.542,00**	**285.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.546.000.768,00**	**5.481.688.294,00**	**5.196.688.294,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.500.000,00**	**6.498.519,00**	**6.498.519,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	1.999.636,00	1.999.636,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	2.500.000,00	2.499.682,00	2.499.682,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	2.000.000,00	1.999.201,00	1.999.201,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.526.711.868,00**	**4.462.393.542,00**	**4.162.393.542,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	38	38	38	3.448.711.868,00	4.384.393.542,00	4.084.393.542,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**68.975.750,00**	**68.971.310,00**	**68.971.310,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.000.000,00	4.998.561,00	4.998.561,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.125.332,00	11.125.171,00	11.125.171,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.850.418,00	6.847.793,00	6.847.793,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.000.000,00	5.999.785,00	5.999.785,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**17.000.000,00**	**16.973.288,00**	**31.973.288,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	1.000.000,00	973.288,00	973.288,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**729.370.000,00**	**729.370.000,00**	**729.370.000,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	706.370.000,00	706.370.000,00	706.370.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**197.443.150,00**	**197.481.635,00**	**197.481.635,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.530.000,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	81.473.150,00	118.022.400,00	118.022.400,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	6	6	6	50.000.000,00	9.999.235,00	9.999.235,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	25.440.000,00	25.440.000,00	25.440.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.558.711.100,00**	**2.549.710.416,00**	**2.549.710.416,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**27.240.000,00**	**27.239.746,00**	**27.239.746,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	27.240.000,00	27.239.746,00	27.239.746,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.531.471.100,00**	**2.522.470.670,00**	**2.522.470.670,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.531.471.100,00	2.522.470.670,00	2.522.470.670,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**477.350.000,00**	**477.348.474,00**	**477.348.474,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**427.350.000,00**	**427.349.804,00**	**427.349.804,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	427.350.000,00	427.349.804,00	427.349.804,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**50.000.000,00**	**49.998.670,00**	**49.998.670,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.775.250.000,00**	**1.762.797.786,00**	**1.762.797.786,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.775.250.000,00**	**1.762.797.786,00**	**1.762.797.786,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.750.500.000,00	1.738.049.501,00	1.738.049.501,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	24.748.285,00	24.748.285,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**7.000.000,00**	**6.999.286,00**	**6.999.286,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**7.000.000,00**	**6.999.286,00**	**6.999.286,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.000.000,00	3.999.463,00	3.999.463,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	4.000.000,00	2.999.823,00	2.999.823,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**7.000.000,00**	**6.999.286,00**	**6.999.286,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**7.000.000,00**	**6.999.286,00**	**6.999.286,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.000.000,00	3.999.463,00	3.999.463,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	4.000.000,00	2.999.823,00	2.999.823,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
					KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA									**11.218.628.771,00**	**12.236.188.245,00**	**12.036.188.245,00**	**- 200.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.604.578.771,00**	**5.655.254.185,00**	**5.455.254.185,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**9.000.000,00**	**4.473.711,00**	**4.473.711,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.000.000,00	1.493.312,00	1.493.312,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	3.000.000,00	1.499.619,00	1.499.619,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	3.000.000,00	1.480.780,00	1.480.780,00	Kecamatan Telukbetung Utara

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.641.678.771,00**	**4.698.038.245,00**	**4.498.038.245,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	45	45	45	3.546.678.771,00	4.593.038.245,00	4.393.038.245,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	95.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**21.089.412,00**	**41.265.254,00**	**41.265.254,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.000.000,00	6.275.181,00	6.275.181,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.089.412,00	10.395.537,00	10.395.537,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.000.000,00	6.607.216,00	6.607.216,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.000.000,00	3.487.320,00	3.487.320,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**50.500.000,00**	**36.300.000,00**	**36.300.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	24.500.000,00	36.300.000,00	36.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	13.000.000,00			Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	13.000.000,00			Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**710.760.000,00**	**701.560.000,00**	**701.560.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	681.760.000,00	672.560.000,00	672.560.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**171.550.588,00**	**173.616.975,00**	**173.616.975,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	33.532.088,00	40.030.000,00	40.030.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	126.018.500,00	112.790.000,00	112.790.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	3.000.000,00	1.296.975,00	1.296.975,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	3.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.700.050.000,00**	**3.686.994.224,00**	**3.686.994.224,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**30.000.000,00**	**29.998.672,00**	**29.998.672,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	30.000.000,00	29.998.672,00	29.998.672,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.670.050.000,00**	**3.656.995.552,00**	**3.656.995.552,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.670.050.000,00	3.656.995.552,00	3.656.995.552,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**684.750.000,00**	**683.999.503,00**	**683.999.503,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**624.750.000,00**	**623.999.503,00**	**623.999.503,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	624.750.000,00	623.999.503,00	623.999.503,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan [illegible]	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan [illegible]	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.219.250.000,00**	**2.203.909.727,00**	**2.203.909.727,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.219.250.000,00**	**2.203.909.727,00**	**2.203.909.727,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.195.750.000,00	2.180.409.764,00	2.180.409.764,00	Kecamatan Telukbetung Utara

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	23.500.000,00	23.499.963,00	23.499.963,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**3.030.968,00**	**3.030.968,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**3.030.968,00**	**3.030.968,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1,00	1,00	1,00	3.000.000,00	1.531.149,00	1.531.149,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	1,00	1,00	1,00	2.000.000,00	1.499.819,00	1.499.819,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**2.999.638,00**	**2.999.638,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**2.999.638,00**	**2.999.638,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.000.000,00	1.499.819,00	1.499.819,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	1.499.819,00	1.499.819,00	Kecamatan Telukbetung Utara
					KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT									**8.319.968.599,00**	**9.165.703.024,00**	**9.365.703.024,00**	**200.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.619.171.012,00**	**4.464.943.330,00**	**4.664.943.330,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**12.777.030,00**	**12.776.524,00**	**12.776.524,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	4.259.010,00	4.258.854,00	4.258.854,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	4.259.010,00	4.258.835,00	4.258.835,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	4.259.010,00	4.258.835,00	4.258.835,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**2.756.818.599,00**	**3.599.613.024,00**	**3.799.613.024,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	29	29	29	2.680.718.599,00	3.522.553.024,00	3.722.553.024,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	76.100.000,00	77.060.000,00	77.060.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**66.493.578,00**	**65.610.800,00**	**65.610.800,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.986.510,00	7.829.134,00	7.829.134,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	19.320.000,00	18.985.028,00	18.985.028,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.598.123,00	7.592.462,00	7.592.462,00	Kecamatan Telukbetung Barat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.125.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.837.437,00	11.837.337,00	11.837.337,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	6.626.508,00	6.266.839,00	6.266.839,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**42.341.250,00**	**31.732.967,00**	**31.732.967,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	11.550.000,00	6.825.544,00	6.825.544,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	11.550.000,00	11.526.807,00	11.526.807,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	19.241.250,00	13.380.616,00	13.380.616,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**540.300.000,00**	**561.840.000,00**	**561.840.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	26.460.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	513.840.000,00	537.840.000,00	537.840.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**200.440.555,00**	**193.370.015,00**	**193.370.015,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	43.840.000,00	39.020.000,00	39.020.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	122.005.540,00	120.810.000,00	120.810.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	11.040.015,00	11.040.015,00	11.040.015,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	10.955.000,00	10.790.000,00	10.790.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	6.300.000,00	11.710.000,00	11.710.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	6.300.000,00			Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.388.697.983,00**	**2.380.297.660,00**	**2.380.297.660,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**26.113.182,00**	**26.112.946,00**	**26.112.946,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	26.113.182,00	26.112.946,00	26.112.946,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.362.584.801,00**	**2.354.184.714,00**	**2.354.184.714,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.362.584.801,00	2.354.184.714,00	2.354.184.714,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**603.362.703,00**	**623.272.488,00**	**623.272.488,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**553.362.703,00**	**573.272.488,00**	**573.272.488,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	553.362.703,00	573.272.488,00	573.272.488,00	Kecamatan Telukbetung Barat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.680.872.670,00**	**1.669.156.751,00**	**1.669.156.751,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.680.872.670,00**	**1.669.156.751,00**	**1.669.156.751,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.655.872.670,00	1.644.156.869,00	1.644.156.869,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	25.000.000,00	24.999.882,00	24.999.882,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**11.260.231,00**	**11.260.017,00**	**11.260.017,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**11.260.231,00**	**11.260.017,00**	**11.260.017,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	5.998.000,00	5.262.082,00	5.262.082,00	Kecamatan Telukbetung Barat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	5.262.231,00	5.997.935,00	5.997.935,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**16.604.000,00**	**16.772.778,00**	**16.772.778,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**16.604.000,00**	**16.772.778,00**	**16.772.778,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.979.000,00	10.978.998,00	10.978.998,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	5.625.000,00	5.793.780,00	5.793.780,00	Kecamatan Telukbetung Barat
					KECAMATAN TELUKBETUNG SELATAN									**10.381.726.229,00**	**11.327.529.816,00**	**10.927.529.816,00**	**400.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.360.333.529,00**	**5.332.989.347,00**	**4.932.989.347,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**2.100.000,00**	**2.100.459,00**	**2.100.459,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	700.000,00	700.153,00	700.153,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	700.000,00	700.153,00	700.153,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	700.000,00	700.153,00	700.153,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.192.726.229,00**	**4.161.629.816,00**	**3.761.629.816,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	27	27	27	3.077.226.229,00	4.049.879.816,00	3.649.879.816,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	115.500.000,00	111.750.000,00	111.750.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98.227.490,00**	**103.224.848,00**	**103.224.848,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.634.535,00	10.632.850,00	10.632.850,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	36.875.111,00	36.874.254,00	36.874.254,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	3	3	3	16.014.207,00	16.014.207,00	16.014.207,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	2	2	2	15.703.637,00	15.703.537,00	15.703.537,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1				Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	-	-	-	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	-	-	-	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	-	-	-	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	4	4	4	-	-	-	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**853.980.000,00**	**855.180.000,00**	**855.180.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BID AKU URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	820.980.000,00	822.180.000,00	822.180.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**213.299.810,00**	**210.854.224,00**	**210.854.224,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	33.532.088,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	146.039.122,00	144.080.000,00	144.080.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	-	-	-	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dirawat/Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dirawat/Dipelihara	Unit	Unit	18,00	18,00	18,00	6.500.000,00	6.570.000,00	6.570.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	3,00	3,00	3,00	12.128.600,00	13.184.224,00	13.184.224,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	24,00	24,00	24,00	15.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.316.904.200,00**	**3.305.199.571,00**	**3.305.199.571,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**29.088.700,00**	**29.087.412,00**	**29.087.412,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	29.088.700,00	29.087.412,00	29.087.412,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.287.815.500,00**	**3.276.112.159,00**	**3.276.112.159,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.287.815.500,00	3.276.112.159,00	3.276.112.159,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**555.873.000,00**	**555.890.040,00**	**555.890.040,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**495.873.000,00**	**495.886.180,00**	**495.886.180,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	495.873.000,00	495.886.180,00	495.886.180,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**60.000.000,00**	**60.003.860,00**	**60.003.860,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal**	**Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.144.015.500,00**	**2.128.847.972,00**	**2.128.847.972,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.144.015.500,00**	**2.128.847.972,00**	**2.128.847.972,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.121.400.000,00	2.106.233.200,00	2.106.233.200,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	22.615.500,00	22.614.772,00	22.614.772,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.300.000,00**	**2.301.391,00**	**2.301.391,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.300.000,00**	**2.301.391,00**	**2.301.391,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.150.000,00	1.150.800,00	1.150.800,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	1.150.000,00	1.150.591,00	1.150.591,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.300.000,00**	**2.301.495,00**	**2.301.495,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.300.000,00**	**2.301.495,00**	**2.301.495,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.150.000,00	1.151.427,00	1.151.427,00	Kecamatan Telukbetung Selatan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.150.000,00	1.150.068,00	1.150.068,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
					KECAMATAN KEDATON									**11.200.678.339,00**	**12.348.900.701,00**	**12.148.900.701,00**	**- 200.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.084.364.041,00**	**6.246.109.108,00**	**6.046.109.108,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**19.048.135,00**	**19.149.319,00**	**19.149.319,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.116.619,00	6.499.181,00	6.499.181,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	6.436.846,00	6.371.290,00	6.371.290,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	6.494.670,00	6.278.848,00	6.278.848,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.846.328.340,00**	**5.050.140.701,00**	**4.850.140.701,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	40	40	40	3.745.628.340,00	4.921.000.701,00	4.721.000.701,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	100.700.000,00	129.140.000,00	129.140.000,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**78.193.721,00**	**75.022.231,00**	**75.022.231,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	9.345.390,00	9.612.820,00	9.612.820,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	18.471.950,00	17.941.589,00	17.941.589,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.685.491,00	12.648.534,00	12.648.534,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.625.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	16.065.890,00	10.602.916,00	10.602.916,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	4.216.372,00	4.216.372,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**13.994.077,00**	**27.528.862,00**	**27.528.862,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	1.000.000,00	14.523.300,00	14.523.300,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	494.077,00	505.562,00	505.562,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**870.736.000,00**	**821.200.000,00**	**821.200.000,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	22.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	848.736.000,00	798.200.000,00	798.200.000,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**256.063.768,00**	**253.067.995,00**	**253.067.995,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.076,00	39.020.000,00	39.020.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	178.915.005,00	125.080.000,00	125.080.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	375.000,00	375.000,00	375.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	10	10	10	1.900.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	Kecamatan Kedaton

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7	7	7	25.141.687,00	70.542.995,00	70.542.995,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.364.834.986,00**	**3.353.214.008,00**	**3.353.214.008,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**34.137.521,00**	**34.498.193,00**	**34.498.193,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	34.137.521,00	34.498.193,00	34.498.193,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.330.697.465,00**	**3.318.715.815,00**	**3.318.715.815,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.330.697.465,00	3.318.715.815,00	3.318.715.815,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**503.405.498,00**	**515.826.356,00**	**515.826.356,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**433.405.498,00**	**445.827.136,00**	**445.827.136,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	433.405.498,00	445.827.136,00	445.827.136,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**70.000.000,00**	**69.999.220,00**	**69.999.220,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrkat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrkat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.245.022.470,00**	**2.229.955.870,00**	**2.229.955.870,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.245.022.470,00**	**2.229.955.870,00**	**2.229.955.870,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.187.816.735,00	2.172.781.480,00	2.172.781.480,00	Kecamatan Kedaton
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	57.205.735,00	57.174.390,00	57.174.390,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.686.418,00**	**1.702.080,00**	**1.702.080,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.686.418,00**	**1.702.080,00**	**1.702.080,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	874.924,00	708.603,00	708.603,00	Kecamatan Kedaton
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	orang	orang	20	20	20	811.494,00	993.477,00	993.477,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.364.926,00**	**2.093.279,00**	**2.093.279,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.364.926,00**	**2.093.279,00**	**2.093.279,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	682.688,00	847.619,00	847.619,00	Kecamatan Kedaton
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	682.238,00	1.245.660,00	1.245.660,00	Kecamatan Kedaton
					KECAMATAN SUKARAME									**10.816.440.526,00**	**11.981.058.918,00**	**11.495.858.918,00**	**485.200.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.393.332.981,00**	**6.523.721.961,00**	**6.038.821.961,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.342.440.526,00**	**5.537.998.918,00**	**5.037.998.918,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Orang/Bulan	Orang/Bulan	51	51	51	4.267.140.526,00	5.455.158.918,00	4.955.158.918,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	75.300.000,00	82.840.000,00	82.840.000,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**31.526.386,00**	**33.359.500,00**	**33.359.500,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	2.754.254,00	2.570.500,00	2.570.500,00	Kecamatan Sukarame

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.555.440,00	13.788.500,00	13.788.500,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.278.422,00	5.270.500,00	5.270.500,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	937.500,00	250.000,00	250.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.000.770,00	10.010.000,00	10.010.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	2.000.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**10.000.000,00**	**2.420.687,00**	**2.420.687,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	10.000.000,00	2.420.687,00	2.420.687,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	-	-	-	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	-	-	-	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**857.440.000,00**	**694.174.100,00**	**694.174.100,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	18.000.000,00	10.224.100,00	10.224.100,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	839.440.000,00	683.950.000,00	683.950.000,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**148.926.069,00**	**252.768.756,00**	**267.568.756,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	11.780.000,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1	1	1	97.327.669,00	167.960.000,00	167.960.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	1.250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	250.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	2	2	2	28.218.400,00	41.038.505,00	41.038.505,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	10.100.000,00	3.520.251,00	18.320.251,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.875.155.225,00**	**2.864.695.332,00**	**2.864.695.332,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**29.500.000,00**	**29.499.303,00**	**29.499.303,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	29.500.000,00	29.499.303,00	29.499.303,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.845.655.225,00**	**2.835.196.029,00**	**2.835.196.029,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.845.655.225,00	2.835.196.029,00	2.835.196.029,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**626.574.324,00**	**684.646.699,00**	**684.646.699,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**566.574.324,00**	**624.646.699,00**	**624.646.699,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	566.574.324,00	624.646.699,00	624.646.699,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**Kecamatan Sukarame**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.917.377.996,00**	**1.903.994.926,00**	**1.903.994.926,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.917.377.996,00**	**1.903.994.926,00**	**1.903.994.926,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.894.577.996,00	1.881.196.029,00	1.881.196.029,00	Kecamatan Sukarame
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	22.800.000,00	22.798.897,00	22.798.897,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Sukarame**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Sukarame
					KECAMATAN PANJANG									**13.985.841.385,00**	**15.062.109.890,00**	**14.662.109.890,00**	**400.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.635.057.041,00**	**5.722.052.703,00**	**5.322.052.703,00**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.834.070,81**	**6.831.671,00**	**6.831.671,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.315.000,00	2.313.543,00	2.313.543,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	2.058.875,81	2.057.979,00	2.057.979,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	2.460.195,00	2.460.149,00	2.460.149,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.329.716.385,00**	**4.485.709.890,00**	**4.085.709.890,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	31	31	31	3.260.716.385,00	4.401.709.890,00	4.001.709.890,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	69.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**78.984.871,00**	**63.220.421,00**	**63.220.421,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.775.000,00	3.773.058,00	3.773.058,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.717.521,00	14.705.256,00	14.705.256,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.655.350,00	5.655.139,00	5.655.139,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.250.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.587.000,00	5.586.968,00	5.586.968,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	24.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2				Kecamatan Panjang
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2				Kecamatan Panjang
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**894.660.000,00**	**839.126.000,00**	**839.126.000,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	30.360.000,00	30.360.000,00	30.360.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	864.300.000,00	808.766.000,00	808.766.000,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**309.861.714,19**	**312.164.721,00**	**312.164.721,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	27.075.000,00	42.520.000,00	42.520.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	257.264.550,00	234.720.000,00	234.720.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3				Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3				Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	2	2	2	5.406.164,19	14.509.715,00	14.509.715,00	Kecamatan Panjang

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	20.116.000,00	20.415.006,00	20.415.006,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.254.350.800,00**	**5.236.418.551,00**	**5.236.418.551,00**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**38.435.000,00**	**38.434.105,00**	**38.434.105,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	38.435.000,00	38.434.105,00	38.434.105,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.215.915.800,00**	**5.197.984.446,00**	**5.197.984.446,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	5.215.915.800,00	5.197.984.446,00	5.197.984.446,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**965.500.000,00**	**1.015.483.918,00**	**1.015.483.918,00**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**885.500.000,00**	**965.499.405,00**	**965.499.405,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	885.500.000,00	965.499.405,00	965.499.405,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**80.000.000,00**	**49.984.513,00**	**49.984.513,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	4.999.530,00	4.999.530,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	4.991.654,00	4.991.654,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	4.997.504,00	4.997.504,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	4.999.685,00	4.999.685,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	4.997.283,00	4.997.283,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	4.998.857,00	4.998.857,00	Kecamatan Panjang

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Penegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Penegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.126.933.544,00**	**3.077.410.580,00**	**3.077.410.580,00**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.126.933.544,00**	**3.077.410.580,00**	**3.077.410.580,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.102.320.000,00	3.052.798.117,00	3.052.798.117,00	Kecamatan Panjang
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.613.544,00	24.612.463,00	24.612.463,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**5.995.214,00**	**5.995.214,00**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**5.995.214,00**	**5.995.214,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	2.997.257,00	2.997.257,00	Kecamatan Panjang
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	1.000.000,00	2.997.957,00	2.997.957,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**4.748.924,00**	**4.748.924,00**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**4.748.924,00**	**4.748.924,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	2.249.176,00	2.249.176,00	Kecamatan Panjang
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	2.499.748,00	2.499.748,00	Kecamatan Panjang
					KECAMATAN RAJABASA									**11.351.786.932,00**	**12.615.688.229,00**	**12.093.853.229,00**	**- 521.835.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.939.831.932,00**	**7.227.354.690,00**	**6.705.519.690,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**14.650.000,00**	**14.519.582,00**	**14.519.582,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	4.950.000,00	4.909.342,00	4.909.342,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Laporan	1	1	1	4.850.000,00	4.805.120,00	4.805.120,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	4.850.000,00	4.805.120,00	4.805.120,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.961.860.332,00**	**6.282.278.925,00**	**5.732.278.925,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	57	57	57	4.882.786.932,00	6.169.038.229,00	5.619.038.229,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	79.073.400,00	113.240.696,00	113.240.696,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**40.890.746,00**	**40.877.475,00**	**40.877.475,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.890.000,00	3.887.596,00	3.887.596,00	Kecamatan Rajabasa

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	22.152.100,00	22.152.067,00	22.152.067,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.583.396,00	3.582.603,00	3.582.603,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.465.250,00	5.465.209,00	5.465.209,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	990.000,00	990.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**37.325.211,00**	**31.737.270,00**	**31.737.270,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	16.000.000,00			Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	15.000.000,00	19.737.270,00	19.737.270,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	6.325.211,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**664.260.000,00**	**626.560.000,00**	**626.560.000,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	40.000.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	624.260.000,00	602.260.000,00	602.260.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**220.845.643,00**	**231.381.438,00**	**259.546.438,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.088,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1	1	1	144.948.555,00	144.280.000,00	172.445.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	2.500.000,00	-	-	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	28.050.000,00	37.766.438,00	37.766.438,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	9.315.000,00	9.315.000,00	9.315.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.712.102.500,00**	**2.701.460.493,00**	**2.701.460.493,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**37.090.000,00**	**36.897.993,00**	**36.897.993,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	37.090.000,00	36.897.993,00	36.897.993,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.675.012.500,00**	**2.664.562.500,00**	**2.664.562.500,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.675.012.500,00	2.664.562.500,00	2.664.562.500,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**752.205.000,00**	**752.204.475,00**	**752.204.475,00**	**Kecamatan Rajabasa**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**682.205.000,00**	**682.204.475,00**	**682.204.475,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	682.205.000,00	682.204.475,00	682.204.475,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.937.647.500,00**	**1.924.672.351,00**	**1.924.672.351,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggarnah Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggarnah Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.937.647.500,00**	**1.924.672.351,00**	**1.924.672.351,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.913.085.000,00	1.900.109.920,00	1.900.109.920,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.562.500,00	24.562.431,00	24.562.431,00	Kecamatan Rajabasa

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	%	100,00	100,00	100,00	5.000.000,00	4.998.110,00	4.998.110,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	%	%	100,00	100,00	100,00	5.000.000,00	4.998.110,00	4.998.110,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.500.000,00	2.499.055,00	2.499.055,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	1	1	1	2.500.000,00	2.499.055,00	2.499.055,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	100,00	100,00	100,00	5.000.000,00	4.998.110,00	4.998.110,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	100,00	100,00	100,00	5.000.000,00	4.998.110,00	4.998.110,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.500.000,00	2.499.055,00	2.499.055,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.500.000,00	2.499.055,00	2.499.055,00	Kecamatan Rajabasa
					KECAMATAN TANJUNG SENANG									**9.208.307.894,00**	**10.113.390.724,00**	**9.913.390.724,00**	**200.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	%	98,00	98,00	98,00	4.141.236.515,00	5.068.775.592,00	4.868.775.592,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	%	%	98,00	98,00	98,00	32.311.270,00	31.658.370,00	31.658.370,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	11.031.850,00	10.638.215,00	10.638.215,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Laporan	1	1	1	10.792.790,00	10.533.626,00	10.533.626,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	10.486.630,00	10.486.529,00	10.486.529,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	98,00	98,00	98,00	3.403.312.894,00	4.316.340.724,00	4.116.340.724,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Orang/Bulan	Orang/Bulan	37	37	37	3.334.232.894,00	4.237.740.724,00	4.037.740.724,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	69.080.000,00	78.600.000,00	78.600.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	98,00	98,00	98,00	40.951.651,00	52.922.498,00	52.922.498,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	1.122.375,00	1.103.768,00	1.103.768,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.873.492,00	13.867.561,00	13.867.561,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.131.200,00	10.145.170,00	10.145.170,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.762.500,00	10.750.000,00	10.750.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1				Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	5.062.084,00	17.055.999,00	17.055.999,00	Kecamatan Tanjung Senang

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	-	**21.004.000,00**	**21.004.000,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2		5.700.000,00	5.700.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2		15.304.000,00	15.304.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2				Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**449.420.000,00**	**454.740.000,00**	**454.740.000,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	32.100.000,00	24.900.000,00	24.900.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	417.320.000,00	429.840.000,00	429.840.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**215.240.700,00**	**192.110.000,00**	**192.110.000,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.350.000,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	16	16	16	146.140.700,00	129.180.000,00	129.180.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	250.000,00			Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	6	6	6	2.500.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	5	5	5	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	28.000.000,00	16.220.000,00	16.220.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.688.780.117,00**	**2.673.736.346,00**	**2.673.736.346,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**26.605.850,00**	**26.552.111,00**	**26.552.111,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	26.605.850,00	26.552.111,00	26.552.111,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.662.174.267,00**	**2.647.184.235,00**	**2.647.184.235,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.662.174.267,00	2.647.184.235,00	2.647.184.235,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**526.750.000,00**	**521.750.000,00**	**521.750.000,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**476.750.000,00**	**471.750.000,00**	**471.750.000,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	476.750.000,00	471.750.000,00	471.750.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Penegahan Tindak Kriminal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Penegahan Tindak Kriminal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.833.755.660,00**	**1.832.935.446,00**	**1.832.935.446,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.833.755.660,00**	**1.832.935.446,00**	**1.832.935.446,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.811.212.300,00	1.810.380.098,00	1.810.380.098,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	22.543.360,00	22.555.348,00	22.555.348,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.469.226,00**	**4.379.962,00**	**4.379.962,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.469.226,00**	**4.379.962,00**	**4.379.962,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.291.676,00	1.663.788,00	1.663.788,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	3.177.550,00	2.716.174,00	2.716.174,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**13.316.376,00**	**11.813.378,00**	**11.813.378,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**13.316.376,00**	**11.813.378,00**	**11.813.378,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.166.676,00	1.663.788,00	1.663.788,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.149.700,00	10.149.590,00	10.149.590,00	Kecamatan Tanjung Senang
					KECAMATAN SUKABUMI									**12.164.427.942,00**	**13.317.427.525,00**	**13.317.427.525,00**	-
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.366.928.863,00**	**6.707.132.199,00**	**6.707.132.199,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**10.814.434,00**	**10.256.173,00**	**10.256.173,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.042.247,00	4.056.121,00	4.056.121,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	4.340.361,00	3.501.260,00	3.501.260,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	3.431.826,00	2.698.792,00	2.698.792,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.893.585.753,00**	**5.055.956.664,00**	**5.055.956.664,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	40	40	40	3.794.977.942,00	4.953.527.525,00	4.953.527.525,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	98.607.811,00	102.429.139,00	102.429.139,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**42.788.112,00**	**99.208.371,00**	**99.208.371,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.514.319,00	10.193.467,00	10.193.467,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.170.776,00	13.395.435,00	13.395.435,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.580.315,00	12.027.176,00	12.027.176,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.125.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.325.452,00	11.590.075,00	11.590.075,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.072.250,00	27.002.218,00	27.002.218,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**22.464.000,00**	**38.010.678,00**	**38.010.678,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	12.000.000,00	5.284.158,00	5.284.158,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	10.000.000,00	27.126.520,00	27.126.520,00	Kecamatan Sukabumi

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	464.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.164.436.000,00**	**1.182.236.000,00**	**1.182.236.000,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	23.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.141.436.000,00	1.154.736.000,00	1.154.736.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**232.840.564,00**	**321.464.313,00**	**321.464.313,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	33.532.076,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10,00	10,00	10,00	168.947.536,00	227.700.000,00	227.700.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3,00	3,00	3,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	2,00	2,00	2,00	725.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	6,00	6,00	6,00	21.935.952,00	37.494.313,00	37.494.313,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	7.500.000,00	16.450.000,00	16.450.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.692.660.088,00**	**3.676.848.474,00**	**3.676.848.474,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**43.094.262,00**	**39.290.667,00**	**39.290.667,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	43.094.262,00	39.290.667,00	39.290.667,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.649.565.826,00**	**3.637.557.807,00**	**3.637.557.807,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.649.565.826,00	3.637.557.807,00	3.637.557.807,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**721.883.046,00**	**577.038.814,00**	**577.038.814,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**651.883.046,00**	**507.040.984,00**	**507.040.984,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	651.883.046,00	507.040.984,00	507.040.984,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**70.000.000,00**	**69.997.830,00**	**69.997.830,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.365.119.497,00**	**2.348.648.968,00**	**2.348.648.968,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.365.119.497,00**	**2.348.648.968,00**	**2.348.648.968,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.342.048.429,00	2.325.675.566,00	2.325.675.566,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	23.071.068,00	22.973.402,00	22.973.402,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.672.270,00**	**4.103.831,00**	**4.103.831,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.672.270,00**	**4.103.831,00**	**4.103.831,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.230.344,00	2.001.317,00	2.001.317,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	6.441.926,00	2.102.514,00	2.102.514,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.164.178,00**	**3.655.239,00**	**3.655.239,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.164.178,00**	**3.655.239,00**	**3.655.239,00**	**Kecamatan Sukabumi**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.950.109,00	1.805.026,00	1.805.026,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.214.069,00	1.850.213,00	1.850.213,00	Kecamatan Sukabumi
					KECAMATAN KEMILING									**16.863.795.208,00**	**18.006.008.569,00**	**18.156.008.569,00**	**150.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.699.976.558,00**	**7.872.693.613,00**	**8.022.693.613,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.000.000,00**	**2.964.000,00**	**2.964.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	988.000,00	988.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	988.000,00	988.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	988.000,00	988.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.424.858.208,00**	**6.627.063.569,00**	**6.777.063.569,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	63	63	63	5.341.020.208,00	6.528.608.569,00	6.678.608.569,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	83.838.000,00	98.455.000,00	98.455.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**23.587.250,00**	**22.741.719,00**	**22.741.719,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	2.300.500,00	2.517.037,00	2.517.037,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.000.000,00	10.124.355,00	10.124.355,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	1.616.750,00	1.610.327,00	1.610.327,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	2.670.000,00	6.490.000,00	6.490.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1				Kecamatan Kemiling
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**10.000.000,00**	**8.499.000,00**	**8.499.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2				Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	5.000.000,00			Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	5.000.000,00	8.499.000,00	8.499.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**833.009.800,00**	**825.105.325,00**	**825.105.325,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	41.200.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	791.809.800,00	783.905.325,00	783.905.325,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**405.521.300,00**	**386.320.000,00**	**386.320.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	2	2	2	33.540.678,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	20	20	20	363.980.622,00	333.990.000,00	333.990.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kecamatan Kemiling

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	4	4	4	2.000.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	11	11	11	2.000.000,00	7.410.000,00	7.410.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	5	5	5	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.918.818.650,00**	**5.878.088.021,00**	**5.878.088.021,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**70.210.000,00**	**61.088.021,00**	**61.088.021,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	70.210.000,00	61.088.021,00	61.088.021,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.848.608.650,00**	**5.817.000.000,00**	**5.817.000.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	5.848.608.650,00	5.817.000.000,00	5.817.000.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**806.500.000,00**	**840.485.510,00**	**840.485.510,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**716.500.000,00**	**750.500.000,00**	**750.500.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	716.500.000,00	750.500.000,00	750.500.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**90.000.000,00**	**89.985.510,00**	**89.985.510,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.434.500.000,00**	**3.410.741.425,00**	**3.410.741.425,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.434.500.000,00**	**3.410.741.425,00**	**3.410.741.425,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.412.000.000,00	3.388.241.425,00	3.388.241.425,00	Kecamatan Kemiling
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Kemiling
					KECAMATAN ENGGAL									**9.725.014.877,00**	**10.752.856.101,00**	**10.752.856.101,00**	**-**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.433.962.404,00**	**5.471.978.659,00**	**5.485.634.739,00**	**Kecamatan Enggal**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**8.935.800,00**	**8.935.599,00**	**8.935.599,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.978.600,00	2.978.533,00	2.978.533,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	2.978.600,00	2.978.533,00	2.978.533,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	2.978.600,00	2.978.533,00	2.978.533,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.566.239.877,00**	**4.617.256.101,00**	**4.617.256.101,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	38	38	38	3.483.439.877,00	4.534.456.101,00	4.534.456.101,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	82.800.000,00	82.800.000,00	82.800.000,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**78.611.026,00**	**69.285.696,00**	**82.941.776,00**	**Kecamatan Enggal**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	1.804.041,00	1.822.847,00	1.822.847,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	19.133.537,00	9.660.705,00	9.660.705,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.770.680,00	15.899.382,00	29.555.462,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.402.768,00	15.402.762,00	15.402.762,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**17.000.000,00**	**27.583.096,00**	**27.583.096,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2		10.950.000,00	10.950.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	17.000.000,00	16.633.096,00	16.633.096,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2				Kecamatan Enggal
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**553.120.000,00**	**553.140.000,00**	**553.140.000,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	541.120.000,00	541.140.000,00	541.140.000,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**210.055.701,00**	**195.778.167,00**	**195.778.167,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	43.535.088,00	39.040.000,00	39.040.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	125.029.813,00	113.830.000,00	113.830.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	6	6	6	11.876.800,00	13.428.812,00	13.428.812,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	20.864.000,00	20.729.355,00	20.729.355,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.719.209.764,00**	**2.719.209.837,00**	**2.719.209.837,00**	**Kecamatan Enggal**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**38.810.000,00**	**38.810.099,00**	**38.810.099,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	38.810.000,00	38.810.099,00	38.810.099,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.680.399.764,00**	**2.680.399.738,00**	**2.680.399.738,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.680.399.764,00	2.680.399.738,00	2.680.399.738,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**643.909.370,00**	**633.734.788,00**	**620.078.708,00**	**Kecamatan Enggal**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**593.909.370,00**	**583.735.548,00**	**570.079.468,00**	**Kecamatan Enggal**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	593.909.370,00	583.735.548,00	570.079.468,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**50.000.000,00**	**49.999.240,00**	**49.999.240,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.917.933.339,00**	**1.917.932.879,00**	**1.917.932.879,00**	**Kecamatan Enggal**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.917.933.339,00**	**1.917.932.879,00**	**1.917.932.879,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.889.433.339,00	1.889.432.879,00	1.889.432.879,00	Kecamatan Enggal
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**4.999.938,00**	**4.999.938,00**	**Kecamatan Enggal**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**4.999.938,00**	**4.999.938,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.500.000,00	2.499.969,00	2.499.969,00	Kecamatan Enggal
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	2.500.000,00	2.499.969,00	2.499.969,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**Kecamatan Enggal**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kecamatan Enggal
					KECAMATAN KEDAMAIAN									**11.193.470.717,00**	**12.303.067.798,00**	**11.703.067.798,00**	**600.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.209.785.617,00**	**6.469.614.092,00**	**5.869.614.092,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.300.000,00**	**6.306.261,00**	**6.306.261,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.100.000,00	2.102.087,00	2.102.087,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Laporan	1	1	1	2.100.000,00	2.102.087,00	2.102.087,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	2.100.000,00	2.102.087,00	2.102.087,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.918.705.717,00**	**5.052.279.085,00**	**4.452.279.085,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	42	42	42	3.850.545.717,00	4.961.417.798,00	4.361.417.798,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	68.160.000,00	90.861.287,00	90.861.287,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**53.447.118,00**	**77.985.563,00**	**77.985.563,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.092.816,00	6.093.566,00	6.093.566,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.376.912,00	12.381.787,00	12.381.787,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.509.490,00	10.518.710,00	10.518.710,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.717.900,00	10.831.500,00	10.831.500,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	25.410.000,00	25.410.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**72.000.000,00**	**115.907.970,00**	**115.907.970,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	20.000.000,00			Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	35.000.000,00	115.907.970,00	115.907.970,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	17.000.000,00			Kecamatan Kedamaian

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**909.500.000,00**	**933.500.000,00**	**933.500.000,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	895.500.000,00	919.500.000,00	919.500.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**249.832.782,00**	**283.635.213,00**	**283.635.213,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.088,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	159.472.390,00	157.240.000,00	157.240.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7	7	7	33.736.304,00	66.283.213,00	66.283.213,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	16.592.000,00	16.592.000,00	16.592.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.072.441.200,00**	**3.061.642.933,00**	**3.061.642.933,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**35.685.600,00**	**35.687.557,00**	**35.687.557,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	35.685.600,00	3.025.955.376,00	3.025.955.376,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.036.755.600,00**	**3.025.955.376,00**	**3.025.955.376,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.036.755.600,00	3.025.955.376,00	3.025.955.376,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**790.385.500,00**	**664.394.136,00**	**664.394.136,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**720.385.500,00**	**594.394.186,00**	**594.394.186,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	720.385.500,00	594.394.186,00	594.394.186,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**70.000.000,00**	**69.999.950,00**	**69.999.950,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.112.858.400,00**	**2.099.411.337,00**	**2.099.411.337,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.112.858.400,00**	**2.099.411.337,00**	**2.099.411.337,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.090.258.400,00	2.076.808.991,00	2.076.808.991,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	22.600.000,00	22.602.346,00	22.602.346,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**4.002.650,00**	**4.002.650,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**4.002.650,00**	**4.002.650,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	20	20	20	2.000.000,00	2.001.325,00	2.001.325,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	2.000.000,00	2.001.325,00	2.001.325,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**4.002.650,00**	**4.002.650,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**4.002.650,00**	**4.002.650,00**	**Kecamatan Kedamaian**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	2.001.325,00	2.001.325,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	2.001.325,00	2.001.325,00	Kecamatan Kedamaian
					KECAMATAN TELUKBETUNG TIMUR									**8.948.373.436,00**	**9.842.643.323,00**	**9.192.643.323,00**	**650.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.128.926.622,00**	**5.044.535.493,00**	**4.394.535.493,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**9.420.797,00**	**9.373.382,00**	**9.373.382,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.063.776,00	3.106.944,00	3.106.944,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar [illegible]	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar [illegible]	Laporan	Laporan	1	1	1	3.282.513,00	3.185.419,00	3.185.419,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	3.074.508,00	3.081.019,00	3.081.019,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**2.839.448.436,00**	**3.757.353.323,00**	**3.107.353.323,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	25	25	25	2.743.448.436,00	3.658.493.323,00	3.008.493.323,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	96.000.000,00	98.860.000,00	98.860.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**70.380.725,00**	**64.898.821,00**	**64.898.821,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.320.878,00	8.392.348,00	8.392.348,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.436.573,00	16.608.797,00	16.608.797,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.131.277,00	12.334.966,00	12.334.966,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.212.424,00	9.152.710,00	9.152.710,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	6.279.573,00	5.410.000,00	5.410.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**34.250.000,00**	**40.896.712,00**	**40.896.712,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	11.250.000,00	12.966.061,00	12.966.061,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	12.500.000,00	16.064.467,00	16.064.467,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	10.500.000,00	11.866.184,00	11.866.184,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**958.000.000,00**	**955.600.000,00**	**955.600.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	932.500.000,00	930.100.000,00	930.100.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**217.426.664,00**	**216.413.255,00**	**216.413.255,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	33.532.088,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10,00	10,00	10,00	126.654.576,00	124.000.000,00	124.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3,00	3,00	3,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3,00	3,00	3,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	35.000.000,00	35.653.255,00	35.653.255,00	Kecamatan Telukbetung Timur

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	20.740.000,00	18.240.000,00	18.240.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.463.093.569,00**	**2.455.410.239,00**	**2.455.410.239,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**29.772.824,00**	**29.772.157,00**	**29.772.157,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	29.772.824,00	29.772.157,00	29.772.157,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.433.320.745,00**	**2.425.638.082,00**	**2.425.638.082,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.433.320.745,00	2.425.638.082,00	2.425.638.082,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**550.204.502,00**	**550.204.883,00**	**550.204.883,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**490.204.502,00**	**490.204.883,00**	**490.204.883,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	490.204.502,00	490.204.883,00	490.204.883,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BID AKU URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Penecegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Penecegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.786.148.743,00**	**1.776.828.932,00**	**1.776.828.932,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.786.148.743,00**	**1.776.828.932,00**	**1.776.828.932,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.762.427.368,00	1.753.096.226,00	1.753.096.226,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	23.721.375,00	23.732.706,00	23.732.706,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**7.834.464,00**	**7.834.464,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**7.834.464,00**	**7.834.464,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	20,00	20,00	20,00	5.000.000,00	3.919.808,00	3.919.808,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	1,00	1,00	1,00	5.000.000,00	3.914.656,00	3.914.656,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**7.829.312,00**	**7.829.312,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**7.829.312,00**	**7.829.312,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	5.000.000,00	3.914.656,00	3.914.656,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	5.000.000,00	3.914.656,00	3.914.656,00	Kecamatan Telukbetung Timur
					KECAMATAN BUMI WARAS									**10.359.678.956,00**	**11.227.722.024,00**	**10.677.722.024,00**	**- 550.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.075.372.529,00**	**4.956.128.548,00**	**4.406.128.548,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**31.656.000,00**	**31.656.064,00**	**31.656.064,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1	1	1	10.552.000,00	10.552.064,00	10.552.064,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		1	1	1	10.552.000,00	10.552.000,00	10.552.000,00	Kecamatan Bumi Waras

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		1	1	1	10.552.000,00	10.552.000,00	10.552.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**2.953.103.956,00**	**3.830.022.024,00**	**3.280.022.024,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		34	34	34	2.870.603.956,00	3.742.322.024,00	3.192.322.024,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1	1	1	82.500.000,00	87.700.000,00	87.700.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**72.887.569,00**	**74.600.226,00**	**74.600.226,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	1	1	10.275.000,00	10.275.000,00	10.275.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	1	1	18.593.959,00	18.821.616,00	18.821.616,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1	1	1	11.582.859,00	11.582.859,00	11.582.859,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	1	1	15.000.000,00	22.485.000,00	22.485.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	1	1	10.435.751,00	10.435.751,00	10.435.751,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	1	1	7.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**34.603.565,00**	**34.603.565,00**	**34.603.565,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		2	2	2	11.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		2	2	2	11.103.565,00	10.103.565,00	10.103.565,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2	2	2	12.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**872.950.000,00**	**872.950.000,00**	**872.950.000,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1	1	1	8.200.000,00	14.450.000,00	14.450.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	1	1	864.750.000,00	858.500.000,00	858.500.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**110.171.439,00**	**112.296.669,00**	**112.296.669,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1	1	1	33.532.088,00	42.430.000,00	42.430.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10	10	10	48.261.377,91	47.620.001,00	47.620.001,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		4	4	4	4.589.036,00	500.000,00	500.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		4	4	4	2.668.937,09	500.000,00	500.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		6	6	6	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	1	1	10.120.000,00	10.246.668,00	10.246.668,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.423.200.645,00**	**3.425.975.645,00**	**3.425.975.645,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**26.470.000,00**	**25.570.000,00**	**25.570.000,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		1	1	1	26.470.000,00	25.570.000,00	25.570.000,00	Kecamatan Bumi Waras

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.396.730.645,00**	**3.400.405.645,00**	**3.400.405.645,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		1	1	1	3.396.730.645,00	3.400.405.645,00	3.400.405.645,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%		**85,00**	**85,00**	**85,00**	**684.648.480,00**	**684.667.278,00**	**684.667.278,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	%		**85,00**	**85,00**	**85,00**	**634.648.480,00**	**634.667.278,00**	**634.667.278,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		1	1	1	634.648.480,00	634.667.278,00	634.667.278,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%		**85,00**	**85,00**	**85,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	%		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.156.457.302,00**	**2.140.854.670,00**	**2.140.854.670,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	%		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.156.457.302,00**	**2.140.854.670,00**	**2.140.854.670,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		1	1	1	2.132.457.302,00	2.116.855.917,00	2.116.855.917,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		1	1	1	24.000.000,00	23.998.753,00	23.998.753,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**10.095.883,00**	**10.095.883,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	%		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**10.095.883,00**	**10.095.883,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen		1	1	1	5.000.000,00	5.096.059,00	5.096.059,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang		20	20	20	5.000.000,00	4.999.824,00	4.999.824,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		1	1	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen		1	1	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
					KECAMATAN LABUHAN RATU									**10.125.996.877,00**	**11.279.220.316,00**	**10.979.220.316,00**	**300.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.466.446.951,00**	**6.621.877.641,00**	**6.321.877.641,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.000.000,00**	**5.999.103,00**	**5.999.103,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	1.999.701,00	1.999.701,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	1.999.701,00	1.999.701,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	2.000.000,00	1.999.701,00	1.999.701,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.676.346.877,00**	**5.828.020.316,00**	**5.828.020.316,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	55	55	55	4.584.546.877,00	5.734.320.316,00	5.434.320.316,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	91.800.000,00	93.700.000,00	93.700.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**68.373.670,00**	**66.364.953,00**	**66.364.953,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.000.000,00	12.993.911,00	12.993.911,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	14.003.132,00	14.002.284,00	14.002.284,00	Kecamatan Labuhan Ratu

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.967.538,00	13.965.856,00	13.965.856,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.303.000,00	13.302.902,00	13.302.902,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	2.000.000,00			Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**37.500.000,00**	**35.397.376,00**	**35.397.376,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	22.500.000,00	4.931.184,00	4.931.184,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2				Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	15.000.000,00	30.466.192,00	30.466.192,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**500.500.000,00**	**524.300.000,00**	**524.300.000,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	488.500.000,00	512.300.000,00	512.300.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**177.726.404,00**	**161.795.893,00**	**161.795.893,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.088,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	65.194.316,00	65.140.000,00	65.140.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	500.000,00			Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	500.000,00			Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	2	2	2	57.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	21.000.000,00	14.635.893,00	14.635.893,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.411.140.809,00**	**2.411.139.784,00**	**2.411.139.784,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**29.475.078,00**	**29.474.128,00**	**29.474.128,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	29.475.078,00	29.474.128,00	29.474.128,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.381.665.731,00**	**2.381.665.656,00**	**2.381.665.656,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.381.665.731,00	2.381.665.656,00	2.381.665.656,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**467.033.653,00**	**467.031.332,00**	**467.031.332,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**407.033.653,00**	**407.031.332,00**	**407.031.332,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	407.033.653,00	407.031.332,00	407.031.332,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.773.375.464,00**	**1.771.172.263,00**	**1.771.172.263,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraah Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraah Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.773.375.464,00**	**1.771.172.263,00**	**1.771.172.263,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.750.497.500,00	1.748.295.266,00	1.748.295.266,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	22.877.964,00	22.876.997,00	22.876.997,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**3.999.648,00**	**3.999.648,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**3.999.648,00**	**3.999.648,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	1.999.824,00	1.999.824,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	2.000.000,00	1.999.824,00	1.999.824,00	Kecamatan Labuhan Ratu

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**3.999.648,00**	**3.999.648,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**3.999.648,00**	**3.999.648,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	1.999.824,00	1.999.824,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	1.999.824,00	1.999.824,00	Kecamatan Labuhan Ratu
					KECAMATAN WAY HALIM									**12.755.587.706,00**	**13.579.930.357,00**	**13.579.930.357,00**	**.**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.216.082.301,00**	**6.098.088.232,00**	**6.102.380.800,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.086.277,00**	**3.045.141,00**	**3.045.141,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.028.759,00	1.015.047,00	1.015.047,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Laporan	1	1	1	1.028.759,00	1.015.047,00	1.015.047,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	1.028.759,00	1.015.047,00	1.015.047,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.987.192.706,00**	**4.812.770.357,00**	**4.812.770.357,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	43	43	43	3.852.162.706,00	4.686.030.357,00	4.686.030.357,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	135.030.000,00	126.740.000,00	126.740.000,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**62.564.134,00**	**53.017.973,00**	**53.017.973,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.217.808,00	4.532.270,00	4.532.270,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.767.842,50	13.323.773,00	13.323.773,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.443.911,50	4.996.930,00	4.996.930,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.500.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.634.572,00	3.915.000,00	3.915.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	11.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**29.082.928,00**	**65.256.456,00**	**75.606.456,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	10.500.000,00	14.954.400,00	14.954.400,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	7.875.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	10.707.928,00	42.602.056,00	52.952.056,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.065.400.000,00**	**1.078.100.000,00**	**1.078.100.000,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	29.500.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.035.900.000,00	1.037.300.000,00	1.037.300.000,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**68.756.256,00**	**85.898.305,00**	**79.840.873,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	33.530.000,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Way Halim

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10,00	10,00	10,00	20.771.700,00	35.370.000,00	35.370.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3,00	3,00	3,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5,00	5,00	5,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7,00	7,00	7,00	10.475.756,00	8.847.185,00	2.789.753,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	2.228.800,00	2.911.120,00	2.911.120,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.245.758.796,00**	**4.230.291.706,00**	**4.230.291.706,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**29.412.478,00**	**29.411.782,00**	**29.411.782,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	29.412.478,00	29.411.782,00	29.411.782,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.216.346.318,00**	**4.200.879.924,00**	**4.200.879.924,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	4.216.346.318,00	4.200.879.924,00	4.200.879.924,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**694.822.300,00**	**697.304.204,00**	**672.053.636,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**629.122.890,00**	**597.291.154,00**	**597.291.154,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	629.122.890,00	597.291.154,00	597.291.154,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**65.699.410,00**	**100.013.050,00**	**74.762.482,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	3.688.663,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	3.688.663,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	3.688.663,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	3.688.663,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	10.001.305,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	10.001.305,00	Kecamatan Way Halim

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	10.001.305,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	10.001.305,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	10.001.305,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	10.001.305,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.553.568.738,00**	**2.535.169.951,00**	**2.535.169.951,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.553.568.738,00**	**2.535.169.951,00**	**2.535.169.951,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.530.777.964,00	2.512.381.930,00	2.512.381.930,00	Kecamatan Way Halim
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	22.790.774,00	22.788.021,00	22.788.021,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**22.296.047,00**	**9.538.132,00**	**30.496.132,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**22.296.047,00**	**9.538.132,00**	**30.496.132,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	11.285.035,00	4.769.066,00	15.248.066,00	Kecamatan Way Halim
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	11.011.012,00	4.769.066,00	15.248.066,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**23.059.524,00**	**9.538.132,00**	**9.538.132,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**23.059.524,00**	**9.538.132,00**	**9.538.132,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	06	2.01	002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	11.548.512,00	4.769.066,00	4.769.066,00	Kecamatan Way Halim
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	11.511.012,00	4.769.066,00	4.769.066,00	Kecamatan Way Halim
					KECAMATAN LANGKAPURA									**8.005.213.748,00**	**8.877.511.776,00**	**9.027.511.776,00**	**150.000.000,00**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	%	98,00	98,00	98,00	4.002.067.548,00	4.891.032.770,00	5.041.032.770,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	%	%	98,00	98,00	98,00	26.378.700,00	26.378.533,00	26.378.533,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	8.792.900,00	8.792.733,00	8.792.733,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Laporan	1	1	1	8.792.900,00	8.792.900,00	8.792.900,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	8.792.900,00	8.792.900,00	8.792.900,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	98,00	98,00	98,00	3.055.133.748,00	3.910.811.776,00	4.060.811.776,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	34	34	34	2.975.513.748,00	3.840.611.776,00	3.990.611.776,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	79.620.000,00	70.200.000,00	70.200.000,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	98,00	98,00	98,00	55.716.828,00	57.576.823,00	57.576.823,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.859.200,00	7.064.730,00	7.064.730,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	19.722.628,00	19.722.549,00	19.722.549,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.925.000,00	7.924.610,00	7.924.610,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	9.010.000,00	10.664.934,00	10.664.934,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	98,00	98,00	98,00	23.000.000,00	33.635.638,00	33.635.638,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	1.000.000,00	11.627.558,00	11.627.558,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	11.000.000,00	11.008.080,00	11.008.080,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	%	%	98,00	98,00	98,00	700.700.000,00	719.700.000,00	719.700.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	686.500.000,00	705.500.000,00	705.500.000,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	%	%	98,00	98,00	98,00	141.138.272,00	142.930.000,00	142.930.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	29.232.088,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	81.406.184,00	70.080.000,00	70.080.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	4	4	4	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	4	4	4	3.000.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	6	6	6	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	1.000.000,00	6.410.000,00	6.410.000,00	Kecamatan Langkapura

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.951.717.450,00**	**1.944.966.879,00**	**1.944.966.879,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**38.707.200,00**	**38.706.840,00**	**38.706.840,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	38.707.200,00	38.706.840,00	38.706.840,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.913.010.250,00**	**1.906.260.039,00**	**1.906.260.039,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.913.010.250,00	1.906.260.039,00	1.906.260.039,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**531.250.750,00**	**531.385.260,00**	**531.385.260,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**481.250.750,00**	**481.385.260,00**	**481.385.260,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	481.250.750,00	481.385.260,00	481.385.260,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.496.178.000,00**	**1.486.127.143,00**	**1.486.127.143,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.496.178.000,00**	**1.486.127.143,00**	**1.486.127.143,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.473.003.000,00	1.462.952.971,00	1.462.952.971,00	Kecamatan Langkapura
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	23.175.000,00	23.174.172,00	23.174.172,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.000.000,00**	**11.999.862,00**	**11.999.862,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.000.000,00**	**11.999.862,00**	**11.999.862,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.000.000,00	5.999.931,00	5.999.931,00	Kecamatan Langkapura
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	6.000.000,00	5.999.931,00	5.999.931,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.000.000,00**	**11.999.862,00**	**11.999.862,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.000.000,00**	**11.999.862,00**	**11.999.862,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.000.000,00	5.999.931,00	5.999.931,00	Kecamatan Langkapura
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.000.000,00	5.999.931,00	5.999.931,00	Kecamatan Langkapura
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									**55.230.305.034,00**	**47.661.019.841,00**	**47.696.594.841,00**	
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									**55.230.305.034,00**	**47.661.019.841,00**	**47.696.594.841,00**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**2.930.562.634,00**	**4.003.913.417,00**	**3.803.913.417,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**50.000.000,00**	**49.999.697,00**	**49.999.697,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	4	4		25.000.000	24.999.827,00	24.999.827,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	4	4		25.000.000	24.999.870,00	24.999.870,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**2.535.287.634,00**	**3.116.602.441,00**	**2.916.602.441,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	25	25		2.342.687.634	2.899.402.441,00	2.699.402.441,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		192.600.000	217.200.000,00	217.200.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional**	**Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**2.500.000,00**			**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	Laporan	1	1		2.500.000,00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**135.042.653,00**	**132.631.279,00**	**132.631.279,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		30.000.000	29.999.258,00	29.999.258,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		7.500.000	7.492.762,00	7.492.762,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		15.000.000	27.500.000,00	27.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		10.000.000	12.499.827,00	12.499.827,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		6.000.000	6.000.000,00	6.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		66.542.653	49.139.432,00	49.139.432,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**70.000.000,00**	**482.600.000,00**	**482.600.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	5	5		35.000.000,00	455.000.000,00	455.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	10	10		35.000.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**92.000.000,00**	**92.000.000,00**	**92.000.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**45.732.347,00**	**130.080.000,00**	**130.080.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00		33.532.088	44.680.000,00	44.680.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1,00	1,00		6.200.259	79.760.000,00	79.760.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5,00	5,00		6.000.000	5.640.000,00	5.640.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**02**			**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**		**875.000.000,00**	**617.301.272,00**	**617.301.272,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**		**875.000.000,00**	**617.301.272,00**	**617.301.272,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	02	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	1		75.000.000,00	82.199.839,00	82.199.839,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	Orang	Orang	100	100		100.000.000,00	74.999.774,00	74.999.774,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Orang	Orang	200	200		700.000.000,00	49.999.871,00	49.999.871,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	0008		Pembetukan Paskibra		Jumlah Paskibraka		Orang		136			410.101.788,00	410.101.788,00	
8	**01**	**03**				**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**		**48.407.542.400,00**	**39.672.506.843,00**	**39.672.506.843,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**		**48.407.542.400,00**	**39.672.506.843,00**	**39.672.506.843,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Orang	100	100		125.000.000	99.999.795,00	99.999.795,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Orang	Orang	100	100		0	-	-	
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	Laporan	Laporan	1	1		48.282.542.400	39.522.507.341,00	39.522.507.341,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	0006		Pelaksanaan Tugas Paskibra		Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka		Kegiatan		3			49.999.707,00	49.999.707,00	
8	**01**	**04**			**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Ormas yang dibina**	**Persentase Ormas yang dibina**	**Persen**	**Persen**	**50,00**	**50,00**		**2.100.000.000,00**	**2.049.999.746,00**	**2.084.574.746,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Laporan Keberadaan & Pembinaan ORMAS**	**Laporan Keberadaan & Pembinaan ORMAS**	**Persen**	**Persen**	**50,00**	**50,00**		**2.100.000.000,00**	**2.049.999.746,00**	**2.084.574.746,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1,00	1,00		2.000.000.000,00	1.949.999.768,00	1.968.049.768,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	Laporan	1,00	1,00		100.000.000,00	99.999.978,00	116.524.978,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**05**			**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Persentase Penanganan Konflik Keagamaan dan Ras**	**Persentase Penanganan Konflik Keagamaan dan Ras**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**342.200.000,00**	**767.299.389,00**	**782.149.389,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani**	**Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**342.200.000,00**	**767.299.389,00**	**782.149.389,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Orang	50	50		100.000.000	550.099.593,00	564.949.593,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Orang	60	60		75.000.000	49.999.848,00	49.999.848,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	Laporan	Laporan	1	1		167.200.000	167.199.948,00	167.199.948,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**06**			**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan**	**Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**575.000.000,00**	**549.999.174,00**	**736.149.174,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
							Persentase SDM yang mempunyai kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Diniterhadap Kerawanan Konflik Sosial	**Persentase SDM yang mempunyai kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Diniterhadap Kerawanan Konflik Sosial**	**Persen**	**Persen**	**60,00**	**60,00**					
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Konflik Sosial yang terselesaikan dan Kemampuan SDM dalam Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial**	**Konflik Sosial yang terselesaikan dan Kemampuan SDM dalam Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**		**575.000.000,00**	**549.999.174,00**	**736.149.174,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1		75.000.000	74.999.832,00	106.324.832,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di DAerah	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di DAerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Orang	300	300		75.000.000	49.999.779,00	49.999.779,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Orang	Orang	40	40		200.000.000	199.999.779,00	258.374.779,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	Laporan	Laporan	1	1		75.000.000	74.999.906,00	109.449.906,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1		150.000.000	149.999.878,00	211.999.878,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
										JUMLAH TOTAL				2.390.686.508.575,11	2.690.120.777.526,00	2.910.030.685.923,00	

TABEL TC 27

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN 2025				TAHUN 2026				TAHUN 2027				TAHUN 2028				TAHUN 2029				TAHUN 2030						
							TARGET KINERJA	RUPIAH			TARGET KINERJA	RUPIAH			TARGET KINERJA	RUPIAH			TARGET KINERJA	RUPIAH			TARGET KINERJA	RUPIAH			TARGET KINERJA	RUPIAH					
								APBD	DAK	TOTAL BELANJA		APBD	DAK	TOTAL BELANJA		APBD	DAK	TOTAL BELANJA		APBD	DAK	TOTAL BELANJA		APBD	DAK	TOTAL BELANJA		APBD	DAK	TOTAL BELANJA			
terwujudnya tata kelola pemerintahan urusan kewilayahan yang efektif,efisien,akuntabel, transparan dan inovatif				**Presentase tata kelola pemerintahan urusan kewilayahan**	%	90,00	90,00				90,00				90,00				90,00				90,00				90,00						
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan			**Indeks Kepuasan masyarakat**	%	90,00	90,00				90,00				90,00				90,00				90,00				90,00						
		7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Sebutahan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	90,00	90,00	5.303.174.316,00	-	5.303.174.316,00	90,00	5.462.160.220,14	-	5.462.160.220,14	90,00	5.749.813.541,37	-	5.749.813.541,37	90,00	5.949.666.699,42	-	5.949.666.699,42	90,00	6.022.302.620,63	-	6.022.302.620,63	90,00	6.185.489.659,26	-	6.185.489.659,26	90,00	28.487.117.397,55	#REF!	28.487.117.397,55	Kecamatan Tebakbetung Barat	Bandar Lampung	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang**	%	90,00	90,00	4.297.936.224,00	-	4.297.936.224,00	90,00	4.426.785.708,44	-	4.426.785.708,44	90,00	4.659.913.181,83	-	4.659.913.181,83	90,00	4.821.883.367,29	-	4.821.883.367,29	90,00	4.880.750.856,52	-	4.880.750.856,52	90,00	5.013.005.133,45	-	5.013.005.133,45	90,00	23.087.269.338,88	#REF!	23.087.269.338,88			
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	30,00	29,00	4.242.301.224,00	-	4.242.301.224,00	29,00	4.369.482.885,36	-	4.369.482.885,36	29,00	4.599.592.540,48	-	4.599.592.540,48	29,00	4.759.466.089,05	-	4.759.466.089,05	29,00	4.817.571.543,07	-	4.817.571.543,07	29,00	4.968.113.863,38	-	4.968.113.863,38	29,00	22.788.434.221,88	#REF!				
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	55.635.000,00	-	55.635.000,00	1	57.302.903,88	-	57.302.903,88	1	60.320.641,43	-	60.320.641,43	1	62.417.278,24	-	62.417.278,24	1,00	63.179.293,44	-	63.179.293,44	1,00	64.891.270,15	-	64.891.270,15	1,00	298.855.196,30	#REF!				
			Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,anggaran sesuai dan southeast**	%	90,00	90,00	14.012.428,00	-	14.012.428,00	90,00	14.432.511,97	-	14.432.511,97	90,00	15.192.570,23	-	15.192.570,23	90,00	15.720.636,60	-	15.720.636,60	90,00	15.912.560,45	-	15.912.560,45	90,00	16.343.744,96	-	16.343.744,96	90,00	75.270.707,25		75.270.707,25			1.003.238.092,08
			Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,	Dokumen	1	1	4.510.727,00	-	4.510.727,00	1	4.649.645,35	-	4.649.645,35	1	4.915.562,52	-	4.915.562,52	1	5.086.418,61	-	5.086.418,61	1	5.148.515,66	-	5.148.515,66	1	5.288.025,59	-	5.288.025,59	1,00	24.353.860,34		24.353.860,34			
			Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD akhir	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD akhir	Laporan	1	1	4.609.750,00	-	4.609.750,00	1	4.747.956,74	-	4.747.956,74	1	4.997.998,02	-	4.997.998,02	1	5.171.739,42	-	5.171.739,42	1,00	5.234.857,85	-	5.234.857,85	1,00	5.376.707,41	-	5.376.707,41	1,00	24.762.294,03	#REF!				
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	1	1	4.868.942,00	-	4.868.942,00	1	5.014.909,89	-	5.014.909,89	1	5.279.009,70	-	5.279.009,70	1	5.462.498,56	-	5.462.498,56	1,00	5.529.186,94	-	5.529.186,94	1,00	5.679.011,96	-	5.679.011,96	1,00	26.154.547,09	#REF!				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Pemenuhan Sebutahan investaris Kantor**		90,00	90,00	71.229.595,00	-	71.229.595,00	90,00	73.365.014,45	-	73.365.014,45	90,00	77.228.630,53	-	77.228.630,53	90,00	79.912.958,57	-	79.912.958,57	90,00	80.888.568,07	-	80.888.568,07	90,00	83.080.415,06	-	83.080.415,06	90,00	382.624.764,61		382.624.764,61			
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	1	1	7.183.714,00	-	7.183.714,00	1	7.399.077,33	-	7.399.077,33	1	7.788.734,36	-	7.788.734,36	1	8.059.456,74	-	8.059.456,74	1	8.157.849,02	-	8.157.849,02	1,00	8.378.904,03	-	8.378.904,03	1,00	38.588.832,25		38.588.832,25			
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	1	1	18.503.727,00	-	18.503.727,00	1	19.058.457,35	-	19.058.457,35	1	20.062.131,42	-	20.062.131,42	1	20.759.454,96	-	20.759.454,96	1	21.012.894,72	-	21.012.894,72	1,00	21.582.283,59	-	21.582.283,59	1,00	99.396.445,46	#REF!				
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Paket	1	1	6.382.391,00	-	6.382.391,00	1	6.573.731,16	-	6.573.731,16	1	6.919.923,05	-	6.919.923,05	1	7.160.447,11	-	7.160.447,11	1	7.247.864,72	-	7.247.864,72	1,00	7.444.260,96	-	7.444.260,96	1,00	34.286.357,66	#REF!				
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang	Paket	1	1	13.250.000,00	-	13.250.000,00	1	13.647.226,85	-	13.647.226,85	1	14.363.929,70	-	14.363.929,70	1	14.865.260,53	-	14.865.260,53	1	15.046.744,64	-	15.046.744,64	1,00	15.454.468,04	-	15.454.468,04	1,00	71.175.164,73	#REF!				
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	1	1	11.303.417,00	-	11.303.417,00	1	11.642.286,49	-	11.642.286,49	1	12.255.483,32	-	12.255.483,32	1	12.681.379,06	-	12.681.379,06	1	12.836.198,43	-	12.836.198,43	1,00	13.184.022,40	-	13.184.022,40	1,00	63.710.686,30	#REF!				
			Pesperlenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Laporan	1	1	14.606.346,00	-	14.606.346,00	1	15.094.235,27	-	15.094.235,27	1	15.836.588,67	-	15.836.588,67	1	16.386.957,17	-	16.386.957,17	1	16.587.015,73	-	16.587.015,73	1,00	17.036.476,03	-	17.036.476,03	1,00	78.461.062,66	#REF!				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemenuhan Sebutahan investaris Kantor**	%	90,00	90,00	44.559.870,00	-	44.559.870,00	90,00	45.895.755,73	-	45.895.755,73	90,00	48.312.760,37	-	48.312.760,37	90,00	49.992.024,86	-	49.992.024,86	90,00	50.602.347,59	-	50.602.347,59	90,00	51.973.525,32	-	51.973.525,32	90,00	239.362.766,56		239.362.766,56			
		7.01.01.2.07.01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	2	12.147.895,00	-	12.147.895,00	2	12.511.988,72	-	12.511.988,72	2	13.170.906,62	-	13.170.906,62	2	13.628.703,68	-	13.628.703,68	2	13.795.088,29	-	13.795.088,29	2	14.168.895,41	-	14.168.895,41	1,00	65.254.492,22	#REF!				
			Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	2	9.614.421,00	-	9.614.421,00	2	9.902.653,63	-	9.902.653,63	2	10.424.158,20	-	10.424.158,20	2	10.786.488,16	-	10.786.488,16	2	10.910.148,88	-	10.910.148,88	2	11.214.019,78	-	11.214.019,78	1,00	51.645.886,67	#REF!				
		7.01.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2	22.787.652,00	-	22.787.652,00	2	23.481.111,58	-	23.481.111,58	2	24.717.695,52	-	24.717.695,52	2	25.576.838,11	-	25.576.838,11	2	25.889.090,42	-	25.889.090,42	2	26.590.610,13	-	26.590.610,13	1,00	122.462.387,66	#REF!				
			Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	**Pemenuhan Jasa Penunjang Sebutahan OPD**	%	90,00	90,00	701.432.000,00	-	701.432.000,00	90,00	722.466.499,93	-	722.466.499,93	90,00	760.507.381,36	-	760.507.381,36	90,00	786.941.247,57	-	786.941.247,57	90,00	796.548.542,45	-	796.548.542,45	90,00	818.132.711,49	-	818.132.711,49	90,00	3.767.889.671,31		3.767.889.671,31			
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	1	1	20.000.000,00	-	20.000.000,00	1	20.590.587,78	-	20.590.587,78	1	21.684.422,19	-	21.684.422,19	1	22.438.133,63	-	22.438.133,63	1	22.712.067,38	-	22.712.067,38	1	23.327.498,93	-	23.327.498,93	1,00	107.434.210,91	#REF!				
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	1	1	681.432.000,00	-	681.432.000,00	1	701.860.912,15	-	701.860.912,15	1	738.822.959,17	-	738.822.959,17	1	764.503.113,93	-	764.503.113,93	1	773.836.475,07	-	773.836.475,07	1	794.805.212,52	-	794.805.212,52	1,00	3.660.452.460,40	#REF!				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**investaris Kantor yang Terpelihara**	%	90,00	90,00	174.004.191,00	-	174.004.191,00	90,00	179.220.729,62	-	179.220.729,62	90,00	188.659.017,04	-	188.659.017,04	90,00	195.216.464,53	-	195.216.464,53	90,00	197.599.745,55	-	197.599.745,55	90,00	202.954.128,97	-	202.954.128,97	90,00	934.700.147,74		934.700.147,74			
		7.01.01.2.09.01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-					
		7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	10	10	143.890.000	-	143.890.000,00	-	148.208.733,70	-	148.208.733,70	-	156.088.575,46	-	156.088.575,46	-	161.431.152,43	-	161.431.152,43	-	163.401.968,79	-	163.401.968,79	-	167.829.691,86	-	167.829.691,86	1,00	772.935.430,38		772.935.430,38			
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Tahun	6		7.324.191,00	-	7.324.191,00		7.543.765,76	-	7.543.765,76		7.941.042,49	-	7.941.042,49		8.217.058,82	-	8.217.058,82		8.317.375,98	-	8.317.375,98		8.542.752,89	-	8.542.752,89	1,00	39.342.436,03		39.342.436,03			
		7.01.01.2.09.04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Tahun	6		10.790.000,00	-	10.790.000,00		11.113.477,56	-	11.113.477,56		11.498.745,77	-	11.498.745,77		12.105.373,10	-	12.105.373,10		12.253.160,35	-	12.253.160,35		12.585.185,67	-	12.585.185,67	1,00	57.960.756,79		57.960.756,79			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	3		-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	3	-					
		7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dimiliki/atau Dikelola/atau	Unit	1	1	6.000.000,00	-	6.000.000,00	1	6.179.876,31	-	6.179.876,31	1	6.585.326,66	-	6.585.326,66	1	6.731.440,09	-	6.731.440,09	1	6.813.620,22	-	6.813.620,22	1	6.998.249,68	-	6.998.249,68	1,00	32.230.263,27		32.230.263,27			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	6.000.000,00	-	6.000.000,00	1	6.179.876,31	-	6.179.876,31	1	6.585.326,66	-	6.585.326,66	1	6.731.440,09	-	6.731.440,09	1	6.813.620,22	-	6.813.620,22	1	6.998.249,68	-	6.998.249,68	1,00	32.230.263,27		32.230.263,27			
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta**	%	100,00	100,00	8.344.340,00	-	8.344.340,00	100,00	9.090.728,70	-	9.090.728,70	100,00	9.199.634,85	-	9.199.634,85	100,00	9.404.602,71	-	9.404.602,71	100,00	9.519.861,94	-	9.519.861,94	100,00	9.770.579,60	-	9.770.579,60	100,00	45.559.148,20	-	#REF!	Kecamatan Tebakbetung Barat	Bandar Lampung	
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dilingkup kecamatan**	%	100,00	100,00	8.344.340,00	-	8.344.340,00	100,00	9.090.728,70	-	9.090.728,70	100,00	9.199.634,85	-	9.199.634,85	100,00	9.404.602,71	-	9.404.602,71	100,00	9.519.861,94	-	9.519.861,94	100,00	9.770.579,60	-	9.770.579,60	100,00	45.559.148,20		45.559.148,20			
		7.01.05.2.01.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1	4.172.165,00	-	4.172.165,00	1	4.545.350,90	-	4.545.350,90	1	4.599.811,91	-	4.599.811,91	1	4.702.295,72	-	4.702.295,72	1	4.759.915,27	-	4.759.915,27	1	4.889.203,94	-	4.889.203,94	1,00	22.779.546,80		22.779.546,80			
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	Orang	20	20	4.172.175,00	-	4.172.175,00	20	4.545.369,88	-	4.545.369,88	20	4.599.822,94	-	4.599.822,94	20	4.702.386,99	-	4.702.386,99	20	4.759.926,67	-	4.759.926,67	20	4.889.295,66	-	4.889.295,66	1,00	22.779.605,48		22.779.605,48			
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan**	%	90,00	90,00	5.933.370,00	-	5.933.370,00	95,00	6.464.101,05	-	6.464.101,05	100,00	6.541.540,43	-	6.541.540,43	100,00	6.687.285,95	-	6.687.285,95	100,00	6.769.228,55	-	6.769.228,55	100,00	6.953.207,90	-	6.953.207,90	100,00	32.395.525,97	-	32.395.525,97			
		7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	%	90,00	90,00	5.933.370,00	-	5.933.370,00	95,00	6.464.101,05	-	6.464.101,05	100,00	6.541.540,43	-	6.541.540,43	100,00	6.687.285,95	-	6.687.285,95	100,00	6.769.228,55	-	6.769.228,55	100,00	6.953.207,90	-	6.953.207,90	100,00	32.395.525,97	-	32.395.525,97			
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Dikoordinasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	Dokumen	1	1	3.163.829,00	-	3.163.829,00	1	3.446.826,76	-	3.446.826,76	1	3.488.121,47	-	3.488.121,47	1	3.565.836,82	-	3.565.836,82		3.609.538,77	-	3.609.538,77		3.707.633,40	-	3.707.633,40	1,00	17.274.146,82	#REF!				
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembentukan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	2.769.541,00	-	2.769.541,00	1	3.017.272,29	-	3.017.272,29		3.053.418,95	-	3.053.418,95		3.121.449,13	-	3.121.449,13		3.159.697,78	-	3.159.697,78		3.245.574,50	-	3.245.574,50	1,00	15.121.379,65	#REF!				
	Meningkatnya kualitas pelayanan Masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan				**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**	%	100,00	100,00				100,00				100,00				100,00				100,00				100,00						
		7.01.04	**Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum**	**Persentase Iuman (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga ketaman,ketertiba n,dan penegakan hukum kriminal**	%	100,00	100,00	1.786.304.326,00	-	1.786.304.326,00	100,00	1.946.086.568,50	-	1.946.086.568,50	100,00	1.969.400.519,42	-	1.969.400.519,42	100,00	2.013.278.762,99	-	2.013.278.762,99	100,00	2.037.948.458,59	-	2.037.948.458,59	100,00	2.093.337.405,09	-	2.093.337.405,09	100,00	9.753.018.635,50	-	9.753.018.635,50	Kecamatan Tebakbetung Barat	Bandar Lampung	
		7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	100,00	100,00	1.786.304.326,00	-	1.786.304.326,00	100,00	1.946.086.568,50	-	1.946.086.568,50	100,00	1.969.400.519,42	-	1.969.400.519,42	100,00	2.013.278.762,99	-	2.013.278.762,99	100,00	2.037.948.458,59	-	2.037.948.458,59	100,00	2.093.337.405,09	-	2.093.337.405,09	100,00	9.753.018.635,50	-	9.753.018.635,50			

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2025				TAHUN 2026				TAHUN 2027				TAHUN 2028				TAHUN 2029				TAHUN 2030								
							TARGET KINERJA	RUPIAH			TARGET KINERJA	RUPIAH			TARGET KINERJA	RUPIAH			TARGET KINERJA	RUPIAH			TARGET KINERJA	RUPIAH			TARGET KINERJA	RUPIAH			TARGET KINERJA	RUPIAH			
								APBD	DAK	TOTAL BELANJA		APBD	DAK	TOTAL BELANJA		APBD	DAK	TOTAL BELANJA		APBD	DAK	TOTAL BELANJA		APBD	DAK	TOTAL BELANJA		APBD	DAK	TOTAL BELANJA		APBD	DAK	TOTAL BELANJA		
		7.01.04.2.01.01	Energetikan dengan Kepublish Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepublisan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Laporan		1	1.761.160.772,00		1.761.160.772,00		1.918.900.956,53		1.918.900.956,53		1.941.889.226,13		1.941.889.226,13		1.985.154.538,09		1.985.154.538,09		2.089.479.550,48		2.089.479.550,48		2.064.894.791,96		2.064.894.791,96		1,00	9.616.775.066,23		9.616.775.066,23		
		7.01.04.2.01.02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan	Laporan		1	24.953.554,00		24.953.554,00		27.185.611,97		27.185.611,97		27.511.293,29		27.511.293,29		28.124.244,90		28.124.244,90		28.668.865,11		28.668.865,11		29.262.614,05		29.262.614,05		1,00	136.243.569,27		136.243.569,27		
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam**	**%**	**100,00**	**100,00**	**1.990.137.504,00**		**1.990.137.504,00**	**100,00**	**2.168.152.318,53**		**2.168.152.318,53**	**100,00**	**2.194.126.598,16**	-	**2.194.126.598,16**	**100,00**	**2.243.011.738,77**	-	**2.243.011.738,77**	**100,00**	**2.270.496.465,60**	-	**2.270.496.465,60**	**100,00**	**2.332.285.782,49**	-	**2.332.285.782,49**	**100,00**	10.865.924.625,06	#REF!	**10.865.924.625,06**	**Kecamatan Telukbetung Barat**	**Bandar Lampung**
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di tingkat Kecamatan	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan**	**%**	**100,00**	**100,00**	**26.492.385,00**		**26.492.385,00**	**100,00**	**28.862.089,10**		**28.862.089,10**	**100,00**	**29.207.854,46**		**29.207.854,46**	**100,00**	**29.858.605,46**		**29.858.605,46**	**100,00**	**30.224.477,65**	-	**30.224.477,65**	**100,00**	**31.045.941,98**	-	**31.045.941,98**	**100,00**	144.645.411,67	#REF!	**144.645.411,67**		
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan/Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Laporan		1	26.492.385,00		26.492.385,00		28.862.089,10		28.862.089,10		29.207.854,46		29.207.854,46		29.858.605,46		29.858.605,46		30.224.477,65		30.224.477,65		31.045.941,98		31.045.941,98	1,00	144.645.411,67		144.645.411,67		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tk. Kecamatan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pelestrikan Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Tahun																														
			Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan olehunit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan dilingkut kecamatan**	**%**	**100,00**	**100,00**	**1.963.645.119,00**	-	**1.963.645.119,00**	**100,00**	**2.139.290.229,43**	-	**2.139.290.229,43**	**100,00**	**2.164.918.743,70**	-	**2.164.918.743,70**	**100,00**	**2.213.153.133,31**	-	**2.213.153.133,31**	**100,00**	**2.240.271.987,95**	-	**2.240.271.987,95**	**100,00**	**2.301.159.840,51**	-	**2.301.159.840,51**	**100,00**	10.721.279.213,39		**10.721.279.213,39**		
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan dan kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		1	1.963.645.119,00		1.963.645.119,00		2.139.290.229,43		2.139.290.229,43		2.164.918.743,70		2.164.918.743,70		2.213.153.133,31		2.213.153.133,31		2.240.271.987,95		2.240.271.987,95		2.301.159.840,51		2.301.159.840,51	1,00	10.721.279.213,39		10.721.279.213,39		
		7.01.03	**Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan**	**%**	**00,00**	**00,00**	**659.557.368,00**	-	**659.557.368,00**	**80,00**	**710.553.705,23**	-	**710.553.705,23**	**85,00**	**727.161.998,22**	-	**727.161.998,22**	**90,00**	**743.363.167,54**	-	**743.363.167,54**	**100,00**	**752.471.962,31**	-	**752.471.962,31**	**100,00**	**772.923.229,90**	-	**772.923.229,90**	**100,00**	**3.601.108.201,31**		**3.601.108.201,31**	**Kecamatan Telukbetung Barat**	**Bandar Lampung**
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase koordinasi pemberdayaan**	**%**	**00,00**	**00,00**	**644.057.368,00**	-	**644.057.368,00**	**00,00**	**701.667.333,48**	-	**701.667.333,48**	**85,00**	**710.073.240,22**	-	**710.073.240,22**	**90,00**	**725.093.680,19**	-	**725.093.680,19**	**100,00**	**734.788.412,74**	-	**734.788.412,74**	**100,00**	**754.759.063,88**	-	**754.759.063,88**	**100,00**	**3.516.480.042,63**		**3.516.480.042,63**		
		7.01.02.2.02.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan		1	644.057.368,00	-	644.057.368,00	1	701.667.333,48	-	701.667.333,48	1	710.073.240,22	-	710.073.240,22	1259	725.093.680,19	-	725.093.680,19	1259	734.788.412,74	-	734.788.412,74	1259	754.759.063,88	-	754.759.063,88	5000	3.516.480.042,63		3.516.480.042,63		
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	**Presentase pemberdayaan dan**	**%**			**15.500.000,00**		15.500.000,00	80	**16.886.451,75**		16.886.451,75	80	**17.088.750,00**	-	**17.088.750,00**	80	**17.469.487,35**	-	**17.469.487,35**	80	**17.683.549,58**	-	**17.683.549,58**	80	**18.164.166,83**	-	**18.164.166,83**	80	84.628.238,68	#REF!	**84.628.238,68**		
			Pembentukan dan Pemantauhan Kerakter Keluarga Melalui	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan	Keluarga			1.550.000,00		1.550.000,00	1250	1.688.645,18		1.688.645,18	1250	1.788.075,00	-	1.788.075,00	1250	1.746.948,74	-	1.746.948,74	1250	1.768.354,96	-	1.768.354,96	1250	1.816.416,68	-	1.816.416,68	5000	8.462.823,07	#REF!	8.462.823,07		
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	Keluarga			1.550.000,00		1.550.000,00	1250	1.688.645,18		1.688.645,18	1250	1.788.075,00	-	1.788.075,00	1250	1.746.948,74	-	1.746.948,74	1250	1.768.354,96	-	1.768.354,96	1250	1.816.416,68	-	1.816.416,68	5000	8.462.823,07	#REF!	8.462.823,07		
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	Keluarga			1.550.000,00		1.550.000,00	1250	1.688.645,18		1.688.645,18	1250	1.788.075,00	-	1.788.075,00	1250	1.746.948,74	-	1.746.948,74	1250	1.768.354,96	-	1.768.354,96	1250	1.816.416,68	-	1.816.416,68	5000	8.462.823,07	#REF!	8.462.823,07		
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan	Keluarga			1.550.000,00		1.550.000,00	1250	1.688.645,18		1.688.645,18	1250	1.788.075,00	-	1.788.075,00	1250	1.746.948,74	-	1.746.948,74	1250	1.768.354,96	-	1.768.354,96	1250	1.816.416,68	-	1.816.416,68	5000	8.462.823,07	#REF!	8.462.823,07		
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	Keluarga			1.550.000,00		1.550.000,00	1250	1.688.645,18		1.688.645,18	1250	1.788.075,00	-	1.788.075,00	1250	1.746.948,74	-	1.746.948,74	1250	1.768.354,96	-	1.768.354,96	1250	1.816.416,68	-	1.816.416,68	5000	8.462.823,07	#REF!	8.462.823,07		
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Pendidikan dan Ketrampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran	Keluarga			1.550.000,00		1.550.000,00	1250	1.688.645,18		1.688.645,18	1250	1.788.075,00	-	1.788.075,00	1250	1.746.948,74	-	1.746.948,74	1250	1.768.354,96	-	1.768.354,96	1250	1.816.416,68	-	1.816.416,68	5000	8.462.823,07	#REF!	8.462.823,07		
			Pemantauhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemantauhan	Keluarga			1.550.000,00		1.550.000,00	1250	1.688.645,18		1.688.645,18	1250	1.788.075,00	-	1.788.075,00	1250	1.746.948,74	-	1.746.948,74	1250	1.768.354,96	-	1.768.354,96	1250	1.816.416,68	-	1.816.416,68	5000	8.462.823,07	#REF!	8.462.823,07		
			Pemantauhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemantauhan Kesadaran	Keluarga			1.550.000,00		1.550.000,00	1250	1.688.645,18		1.688.645,18	1250	1.788.075,00	-	1.788.075,00	1250	1.746.948,74	-	1.746.948,74	1250	1.768.354,96	-	1.768.354,96	1250	1.816.416,68	-	1.816.416,68	5000	8.462.823,07	#REF!	8.462.823,07		
			Pemantauhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Kesehatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemantauhan dan Peningkatan	Keluarga			1.550.000,00		1.550.000,00	1250	1.688.645,18		1.688.645,18	1250	1.788.075,00	-	1.788.075,00	1250	1.746.948,74	-	1.746.948,74	1250	1.768.354,96	-	1.768.354,96	1250	1.816.416,68	-	1.816.416,68	5000	8.462.823,07	#REF!	8.462.823,07		

Bandar Lampung 2025

CAMAT TELUKBETUNG BARAT

EDILSIH BAGUSA TAMPUTRA, SE

NIP. 19710715 200003 1 004

Tabel 5.1 Daftar Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGAIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
					KECAMATAN TELUK BETUNGBARAT							**8.319.968.599,00**							**8.735.967.028,95**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.619.171.012,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**		**98,00**	**3.800.129.562,60**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**12.777.030,00**						**98,00**	**13.415.881,50**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	4.259.010,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	4.471.960,50	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	1	1	4.259.010,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	4.471.960,50	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	4.259.010,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	4.471.960,50	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	**98,00**	**90,00**	**98,00**	**98,00**	**2.756.818.599,00**						**98,00**	**2.894.659.528,95**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	29	29	29	29	2.680.718.599,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	29	2.814.754.528,95	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	76.100.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	79.905.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat

7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98,00**	**80,00**	**98,00**	**98,00**	**66.493.578,00**						**98,00**	**69.818.256,90**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	7.986.510,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	8.385.835,50	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	19.320.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	20.286.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	7.598.123,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	7.978.029,15	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	13.125.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	13.781.250,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	11.837.437,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	12.429.308,85	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	6.626.508,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	6.957.833,40	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98,00**		**98,00**	**98,00**	**42.341.250,00**						**98,00**	**44.458.312,50**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10		2	2	11.550.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	2	12.127.500,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10		1	1	11.550.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	12.127.500,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10		1	1	19.241.250,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	20.203.312,50	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98,00**	**60,00**	**98,00**	**98,00**	**540.300.000,00**						**98,00**	**567.315.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	26.460.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	27.783.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat

7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	513.840.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	539.532.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98,00**	**60,00**	**98,00**	**98,00**	**200.440.555,00**						**98,00**	**210.462.582,75**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	43.840.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	46.032.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	10	10	122.005.540,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	10	128.105.817,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	1	5	5	11.040.015,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	5	11.592.015,75	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	1	3	3	10.955.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	3	11.502.750,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	6.300.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	6.615.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	6.300.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	6.615.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100,00**	**90,00**	**100,00**	**100,00**	**2.388.697.983,00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Telukbetung Barat**	**100,00**	**2.508.132.882,15**	**Kecamatan Telukbetung Barat**

7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**90,00**	**100,00**	**100,00**	**26.113.182,00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Barat**	**100,00**	**27.418.841,10**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	1	1	1	26.113.182,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	27.418.841,10	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.362.584.801,00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Barat**	**100,00**	**2.480.714.041,05**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	2.362.584.801,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	2.480.714.041,05	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**100,00**	**75,00**	**80,00**	**85,00**	**603.362.703,00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan**	**Kecamatan Telukbetung Barat**	**90,00**	**633.530.838,15**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**100,00**	**75,00**	**80,00**	**85,00**	**553.362.703,00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Barat**	**90,00**	**581.030.838,15**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	553.362.703,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	581.030.838,15	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80,00**		**80,00**	**80,00**	**50.000.000,00**					**Kecamatan Telukbetung Barat**	**80,00**	**52.500.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**

7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat

7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5.000		1.250	1.250	5.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1.250	5.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**%**	**100,00**	**90,00**	**100,00**	**100,00**	**1.680.872.670,00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal**	**Kecamatan Telukbetung Barat**	**100,00**	**1.764.916.303,50**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100,00**	**90,00**	**100,00**	**100,00**	**1.680.872.670,00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Barat**	**100,00**	**1.764.916.303,50**	**Kecamatan Telukbetung Barat**

7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	1	1	1.655.872.670,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	1.738.666.303,50	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	1	1	1	25.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	26.250.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**100,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	**11.260.231,00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	**Kecamatan Telukbetung Barat**	**100,00**	**11.823.242,55**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	**11.260.231,00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Barat**	**100,00**	**11.823.242,55**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	1	1	5.998.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	6	6.297.900,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	100	20	20	20	5.262.231,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	20	5.525.342,55	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**100,00**	**45,00**	**95,00**	**100,00**	**16.604.000,00**	**Bandar Lampung**	**APBD**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daera**	**Kecamatan Telukbetung Barat**	**100,00**	**17.434.200,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**100,00**	**45,00**	**95,00**	**100,00**	**16.604.000,00**	**Bandar Lampung**	**APBD**			**Kecamatan Telukbetung Barat**	**100,00**	**17.434.200,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**

7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	1	1	1	10.979.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	11.527.950,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	1	1	5.625.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kecamatan Telukbetung Barat	1	5.906.250,00	Kecamatan Telukbetung Barat

Mengetahui
Camat Telukbetung Barat

IDHAM BASYAR SYAHPUTRA, SH
NIP. 19710723 20003 1 004

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan/ 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Bappeda yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar

pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;
b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
18. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ;

I.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2024, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan/ 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 sampai dengan triwulan II, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2025.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang perubahan program, kegiatan, serta subkegiatan dan pagu Tahun 2025 yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan/ Tahun 2025

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum tersebut.Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pelaksanaan misi melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung selama tahun 2021 s.d 2026 dan perkiraan target tahun 2025 . Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenui target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
b) Realisasi program/kegiatan yang telah memenui target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
c) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Realisasi program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dari tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun anggaran berjalan 2025 Triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								I		II		III		IV													
(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14/8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG																															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									Rp 575.577.325.577.79																					
1	X3	X1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Keberadaan Penunjang Umum Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan	%	98	Rp 19.188.374.659.90	95.76	Rp.104,760,266,245.00	98	Rp 18.269.128.774.00		Rp -																		Dinas Pekerjaan Umum
1	X3	X1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	%	100	Rp 179.400.000.00	99.28	Rp. 263,645,701.00	100	Rp 179.400.000.00		Rp -																		Dinas Pekerjaan Umum
1	X3	X1	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	Rp 179.400.000.00	99.28	Rp 263,645,701.00	4	Rp 179.400.000.00																				Dinas Pekerjaan Umum
1	X3	X1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	%	100	Rp 8.544.757.949.00	83.49	Rp. 6,817,180,230.00	100	Rp 8.544.757.949.00																				Dinas Pekerjaan Umum
1	X3	X1	2.02	003	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	75	Rp 8.297.422.949.00	87.30	Rp. 6,626,800,230.00	75	Rp 8.297.422.949.00	80%	Rp 4.272.378.974.00																Dinas Pekerjaan Umum
1	X3	X1	2.02	005	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	Rp 224.535.000.00	32.46	Rp. 170,880,000.00	12	Rp 224.535.000.00																		Dinas Pekerjaan Umum
1	X3	X1	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Rp 22.800.000.00	40.63	Rp.19,500,000.00	1	Rp 22.800.000.00																		Dinas Pekerjaan Umum
1	X3	X1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	80	Rp 264.668.091.00	46.61	Rp. 47,112,120.00	80	Rp 264.668.091.00																				Dinas Pekerjaan Umum
					Pengadaan Pakaian Khusus Harian/ Tertentu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	10	Rp 264.668.091.00	46.61	Rp .47,112,120.00	10	Rp 264.668.091.00																				Dinas Pekerjaan Umum
1	X3	X1	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang																							Dinas Pekerjaan Umum
1	X3	X1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	%	98	Rp 969.407.735.00	39.99	Rp. 323,072,968.00	98	Rp 969.407.735.00																				Dinas Pekerjaan Umum
1	X3	X1	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp 502.365.028.00	22.76	Rp.80,385,692.00	1	Rp 502.365.028.00																		Dinas Pekerjaan Umum
1	X3	X1	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	Rp 47.182.037.00	19.09	Rp. 28,391,500.00	1	Rp 47.182.037.00																		Dinas Pekerjaan Umum
1	X3	X1	2.06	004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp 117.500.000.00	73.05	Rp. 31,045,000.00	1	Rp 117.500.000.00																		Dinas Pekerjaan Umum
1	X3	X1	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Rp 76.360.670.00	39.45	Rp. 23,418,500.00	1	Rp 76.360.670.00																		Dinas Pekerjaan Umum
1	X3	X1	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	Rp 16.000.000.00	71.59	Rp. 11,168,000.00	1	Rp 16.000.000.00																		Dinas Pekerjaan Umum
1	X3	X1	2.06	008	Pavilion Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Pavilion Kunjungan Tamu	Laporan	1	Rp 10.000.000.00	0.00		1	Rp 10.000.000.00																		Dinas Pekerjaan Umum
1	X3	X1	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	Rp 200.000.000.00	83.30	Rp. 148,664,276.00	1	Rp 200.000.000.00																		Dinas Pekerjaan Umum

| | | |

| | | |

| | | |

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PAGU PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan di bidang pekerjaan umum dan perumahan.

Sejalan dengan visi Kota Bandar Lampung tahun 2025-2029 yaitu **"Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat"** dan sesuai visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 yaitu **" Tersedianya Infrastruktur Kota dan Pemukiman Yang Aman, Nyaman, Maju dan Modern "**, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2025 sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Pemerintah kota Bandar Lampung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sesuai dengan Misi 2 Walikota Bandar Lampung yaitu :

"Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur Dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial".

Dinas Pekerjaan Umum pada Perubahan Renja 2025 Mengusung 11 Program, 18 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan total pagu Rp. 599.472.865.431 Dapat dilihat di Tabel 3.1

Tabel 3.1 Rencana Perubahan Renja 2025 Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
						DINAS PEKERJAAN UMUM									281.336.178.249,00	422.402.326.949,00	599.472.865.431,00	
14	1	03	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Cakupan Pemenuhan	Cakupan Pemenuhan	%	%	98	98	98	106.338.513.788,00	Rp. 18.269.128.774,00	**18.347.952.257**	
	1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan**	**Persentase Pemenuhan**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**175.000.000,00**	**Rp. 179.400.000,00**	**120.000.000**	
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	Laporan	4	4	4	175.000.000,00	Rp. 179.400.000,00	120.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan**	**Persentase Pemenuhan**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**8.815.275.249,00**	**Rp. 8.544.757.949,00**	**8.544.757.949**	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/bulan	Orang/bulan	90	90	90	8.240.835.249,00	Rp. 8.297.422.949,00	8.297.422.949	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	Dokumen	12	12	12	526.440.000,00	Rp. 224.535.000,00	224.535.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	Laporan	Laporan	1	1	1	48.000.000,00	Rp. 22.800.000,00	22.800.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan**	**Persentase Peningkatan**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**250.000.000,00**	**Rp. 264.668.091,00**	**175.949.896**	
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	Orang	Orang	10	10	10	250.000.000,00	Rp. 264.668.091,00	175.949.896	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan**	**Persentase Pemenuhan**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**684.490.400,00**	**Rp. 969.407.735,00**	**850.668.478**	
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	Paket	1	1	1	348.333.973,00	Rp. 502.365.028,00	490.514.763	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	Paket	1	1	1	58.691.892,00	Rp. 47.182.037,00	47.182.037	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	Paket	1	1	1	42.500.000,00	Rp. 117.500.000,00	117.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Paket	Paket	1	1	1	59.364.535,00	Rp. 76.360.670,00	60.853.422	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	15.600.000,00	Rp. 16.000.000,00	16.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Laporan	Laporan	1	1	1	10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	7.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Laporan	Laporan	1	1	1	150.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	111.118.256	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Pemenuhan Kebutuhan	Pemenuhan Kebutuhan	%	%	98	98	98	42.226.275,00	Rp. 51.048.099,00	**118.291.689**	
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	25	25	25 Unit	42.226.275,00	Rp. 51.048.099,00	118.291.689	DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang**	**Pemenuhan Jasa Penunjang**	%	%	98	98	98	**94.635.600.000,00**	**Rp. 5.064.000.000,00**	**5.122.059.145**	
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	Laporan	1	1	1	91.020.000.000,00	Rp. 1.209.000.000,00	1.267.059.145	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	Laporan	1	1	1	3.615.600.000,00	Rp. 3.855.000.000,00	3.855.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**1.735.921.864,00**	**Rp. 3.195.846.900,00**	**3.416.225.100**	
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	Unit	Unit	2	2	2	42.430.000,00	Rp. 192.881.400,00	192.881.400	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	Unit	27	27	27	1.639.011.864,00	Rp. 2.937.465.500,00	3.157.843.700	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	Unit	1	1	1	54.480.000,00	Rp. 65.500.000,00	65.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
15	**1**	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Luas Kawasan	Persentase Luas Kawasan	Ha	Ha	8,576	8,576	8,576	4.300.000.000,00	Rp. 6.200.000.000,00	**10.051.386.450**	
	1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah**	**Rasio luas kawasan permukiman rawan**	**Rasio luas kawasan permukiman rawan**	**Ha**	**Ha**	**8,576**	**8,576**	**8,576**	**4.300.000.000,00**	**Rp. 6.200.000.000,00**	**10.051.386.450**	
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direst	KM	KM	12,5	12,5	12,5	4.000.000.000,00	Rp. 6.000.000.000,00	9.851.386.450	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	02	2.01	0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air	Jumlah Embung dan Penampung Air	Unit	Unit	3	3	3	300.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
16	**1**	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM**	**Persentase Penduduk Berakses**	**Persentase Penduduk Berakses**	**Persen**	**Persen**	**64,3**	**64,3**	**64,3**	**20.000.000.000,00**	**Rp.25.626.644.175,00**	**41.891.437.955**	
	1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Persentase Penduduk Berakses**	**Persentase Penduduk Berakses**	**Persen**	**Persen**	**46.82 63.8**	**46.82 63.9**	**46.82 63.10**	**20.000.000.000,00**	**Rp 25.626.644.175,00**	**41.891.437.955**	
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air	Kapasitas Sistem Penyediaan Air	Liter/Detik	Liter/Detik	600	600	600	20.000.000.000,00	Rp. 25.626.644.175,00	41.891.437.955	DINAS PEKERJAAN UMUM
17	**1**	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR**	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**	**Persen**	**Persen**	**61,5 62**	**61,5 62**	**61,5 64**	**668.000.000,00**	**Rp. 5.500.000.000,00**	**6.547.883.700**	
	1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam**	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**	**Persen**	**Persen**	**46.82 63.8**	**46.82 63.9**	**46.82 63.10**	**668.000.000,00**	**Rp. 5.500.000.000,00**	**6.547.883.700**	
	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air	M^3/Hari	M^3/Hari	2	2	2	668.000.000,00	Rp. 5.500.000.000,00	6.547.883.700	DINAS PEKERJAAN UMUM
18	**1**	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase drainase dalam	Persentase drainase dalam	**Persen**	**Persen**	**70,47**	**70,47**	**70,48**	**13.000.000.000,00**	**Rp. 25.000.000.000,00**	**29.593.846.595**	
	1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung**	**Persentase drainase dalam**	**Persentase drainase dalam kondisi**	**Persen**	**Persen**	**70,47**	**70,47**	**70,48**	**13.000.000.000,00**	**Rp25.000.000.000,00**	**29.593.846.595**	
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase	Sistem Drainase	3	3	3	6.000.000.000,00	Rp. 7.000.000.000,00	9.256.537.250	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase	Sistem Drainase	3	3	3	7.000.000.000,00	Rp. 18.000.000.000,00	20.337.309.345	DINAS PEKERJAAN UMUM
19	**1**	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Pemenuhan**	**Persentase Pemenuhan Gedung**	**Persen**	**Persen**	**79**	**79**	**79**	**45.000.000.000,00**	**Rp157.000.000.000,00**	**192.640.909.530**	
	1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,**	**Jumlah Dokumen Perencanaan,**	**Jumlah Dokumen Perencanaan,**	**dokumen**	**dokumen**	**60**	**60**	**60**	**45.000.000.000,00**	**Rp157.000.000.000,00**	**192.640.909.530**	
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran	Jumlah Dokumen Pembangunan,	Jumlah Dokumen Pembangunan,	Dokumen	Dokumen	60	60	60	45.000.000.000,00	Rp. 157.000.000.000,00	192.640.909.530	DINAS PEKERJAAN UMUM

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	**1**	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan**	**% Angka**	**% Angka**	**87,09 1,46**	**87,09 1,46**	**87,09 1,46**	90.529.664.461,00	Rp. 33.893.920.000,00	**94.642.631.280**	
	1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam**	**% Angka**	**% Angka**	**87,09 1,46**	**87,09 1,46**	**87,09 1,46**	**90.529.664.461,00**	**Rp. 33.893.920.000,00**	**94.642.631.280**	
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	KM	20,81	20,81	20,81	75.529.664.461,00	Rp. 14.621.000.000,00	61.596.021.160	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara	Jumlah Jembatan yang Dipelihara	Jembatan	Jembatan	5	5	5	2.500.000.000,00	Rp. 1.750.000.000,00	1.750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	Jembatan	5	5	5	2.500.000.000,00	Rp. 2.522.920.000,00	10.675.939.120	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara	KM	KM	13,45	13,45	13,45	10.000.000.000,00	Rp. 15.000.000.000,00	20.620.671.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
21	**1**	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio Proyek yang Menjadi**	**Rasio Proyek yang Menjadi**	**Angka %**	**Angka %**	**55 45**	**55 45**	**55 45**	**1.000.000.000,00**	**Rp. 1.500.000.000,00**	**1.713.631.000**	
	1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Rasio Proyek yang Menjadi**	**Rasio Proyek yang Menjadi**	**% Angka**	**% Angka**	**35 50**	**35 50**	**35 50**	**350.000.000,00**	**Rp. 1.100.000.000,00**	**1.100.000.000**	
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi	Orang	Orang	50	50	50	350.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	1.100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah**	**ketersedianya layanan informasi**	**ketersedianya layanan informasi**	**persen**	-	**100**			**150.000.000,00**		**69.590.000**	
	1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan	Perangkat	Perangkat	1	1	1	100.000.000,00		69.590.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang	Orang	Orang	2	2	2	50.000.000,00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib**	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib**	**Rasio Proyek Yang Menjadi**	**Rasio Proyek Yang Menjadi**	**orang persen**	**orang persen**	**55 50**	**55 50**	**55 50**	**500.000.000,00**	**Rp. 400.000.000,00**	**544.041.000**	
	1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang	Lembaga	Lembaga	8	8	8	300.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	218.541.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi	Badan Usaha	Badan Usaha	53	53	53	200.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	325.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	**107.043.186.664**	
22	**1**	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh di**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh di**	**Persen**	**Persen**	**2,84**	**2,84**	**2,84**	**500.000.000,00**	**Rp. 500.000.000,00**	**515.000.000**	
	1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah**	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Jumlah Dokumen Pemnafaatan**	**Jumlah Dokumen Pemnafaatan**	**Persen**	**Persen**	2,84 100	2,84 100	2,84 100	500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	**515.000.000**	
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan	247 Dokume	247 Dokume	247 Dokume	247 Dokume	247 Dokume	500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	515.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS**									Rp. 51.912.634.000,00	**106.528.186.664**	
	1	**04**	**05**	**2,01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**										Rp. 51.912.634.000,00	**106.528.186.664**	
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Jumlah lokasi perumahan yang		lokasi				0,00	Rp. 51.912.634.000,00	1.144.640.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	4	5	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan										Rp. 51.912.634.000,00	105.383.546.664	
	2	15				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**											**97.000.000.000**	
						DINAS PEKERJAAN UMUM												
	2	15	02				**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**									**Rp. 97.000.000.000,00**	**97.000.000.000**	
	2	**15**	**02**	**2,02**			**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**									**Rp. 97.000.000.000,00**	**97.000.000.000**	
	2	15	02	2,02	002		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		jumlah Perlengkapan Jalan		Unit	0			-	Rp. 97.000.000.000,00	97.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

PERUBAHAN RENCANA KERJA

KECAMATAN TELUKBETUNG SELATAN
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	LandasanHukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	√			
		Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/tahun 2025				
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		TabelRincianPerubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada PerubahanRencanaKerjaPerangkat Daerah Tahun 2025				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, Juli 2025
CAMAT TELUK BETUNG SELATAN

ICHWAN ADIL WIBOWO.S.Pt.MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19720625 200003 1003

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST., M.SI Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda	
2	Zeldayatl Ningsih, S.H., M.M Fungsional Perencana Ahli Madya	

Bandar Lampung, 2025
Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIRPENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampaidengantriwulan II tahunberkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
5.	Dokumen PerubahanRenja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025
CAMAT TELUK BETUNG SELATAN

ICHWAN ADHI WIBOWO.S.Pt.MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19720623 200003 1003

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST., M.SI Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda	
2	Zeldayati Ningsih, S.H., M.M Fungsional Perencana Ahli Madya	

Bandar Lampung, 2025
Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi RenjaPerangkat Daerah kabupaten/kota telahsampai dengan triwulan II tahun berkenaanberdasarkanrealisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkatdaerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerahserta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST., M.SI Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda	
2	Zeldayati Ningsih, S.H., M.M Fungsional Perencana Ahli Madya	

Bandar Lampung, 2025

Mengetahui,

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP.19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

HALAMAN

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN ..... I – 1

1.1. LATAR BELAKANG ..... I – 1

1.2. LANDASAN HUKUM ..... I – 4

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ..... I – 10

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ..... I – 11

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENEN ..... II – 1

2.1. EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN / TAHUN 2025 II – 1

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... III – 1

BAB IV PENUTUP ..... IV – 1

LAMPIRAN 40
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR /IV.01/HK/2025 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAHTAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Kecamatan Telukbetung Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Telukbetung Selatan yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Telukbetung Selatan Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yangotomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;
b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Telukbetung Selatan yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Kecamatan Telukbetung Selatan Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Telukbetung Selatan Tahun 2025adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 136);
8. Peraturan presiden nomor 85 Tahun 2021 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2022 (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
9. Peraturan presiden Nomor 98 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standart Tehnis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
17. Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2025 (Lembaran daerah Provinsi Lampung

Tahun 2021 Nomor 12 Tambahan Lembaran daerah Provinsi Lampung 521);

18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentangAPBD Tahun Angaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 05);
21. Peraturan Gubernur Lampung nomor 23 Tahun 2021 Tentang rencana Kerja Pemerintah daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 23);
22. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 09);
23. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 36);
24. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

I.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kecamatan Telukbetung Selatan Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Telukbetung Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022.

Tujuan penyusunan PerubahanRenja Kecamatan Telukbetung Selatan Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Kecamatan Telukbetung Selatan dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Telukbetung Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi RENJA Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung merupakanperubahan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Telukbetung Selatan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telahdisusun dapat dilihat berdasarkan capaian Kinerja. Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Telukbetung SelatanKotaBandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, yang dijabarkan dalam6 Program 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sampai dengan 31 Juni 2025 pada Kecamatan Telukbetung selatan Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 4.210.511.457,- atau 37,10 % dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sebesar Rp. 11.327.529.816,- sedangkan realisasi kinerja rata-rata mencapai 50 %. Evaluasi kinerja dan keuangan Renja Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung sampaidengan triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.1.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Telukbetung Selatan, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota Bandar Lampung kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Bandar Lampung;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan

tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Formulir E. 81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN KOTA BANDAR LAMPUNG
PERIODE PELAKSANAAN s.d. TRIWULAN IV Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:
1. .....

NO.	SASARAN	KODE REKENING URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
																I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH									
c																																			
kecamatan																																			
Kecamatan Teluklbetung Selatan										98,00	83.393.373.497,79	50,00	9.143.115.064,00	98,00	11.347.882.816,00	25,00	2.162.709.133,00	25,00	1.595.802.324,00	25,00	-	25,00	-	50,00	4.210.511.457,00	51,02	38,19	60,00	13.358.566.521,00	61,22	16,17	Kecamatan TBS	Bandar Lampung
x	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan	7						Indeks kepuasan masyarakat	persen	98,00	83.393.373.497,79	50,00	9.143.115.064,00	98,00	11.347.882.816,00	25,00	2.162.709.133,00	25,00	1.595.802.324,00	25,00	-	25,00	-	100	4.210.511.457,00	102,04	37,10	60,00	13.358.566.521,00	61,22	16,02	Kecamatan TBS	Bandar Lampung
xx		7	01	2			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan	persen	98,00	37.914.239.042,53	50,00	3.739.325.064	98,00	5.697.241.049	20	1.164.709.133	20	1.020.802.324	20	-	20	-	80	2.185.511.457,00	81,63	38,36	130,00	5.924.836.521,00	132,65	15,63	Kecamatan TBS	Bandar Lampung
xxx		7	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib	persen	98,00	27.464.705.675,69	50,00	2.874.437.964,00	98,00	4.300.585.566,00	20	965.151.533	20	778.096.693	20	-	20	-	80	1.743.248.226,00	81,63	40,54	130,00	4.617.686.190,00	132,65	16,81	Kecamatan TBS	Bandar Lampung
		7	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	26.743.297.141,00	35	2.804.717.964,00	35	4.178.832.816,00	35	940.221.533	35	761.476.693	35		35		35	1.701.698.226,00	35,00	40,72	35	4.506.416.190,00	35,00	16,85	Kecamatan TBS	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	35																							
		7	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	721.408.534,69	1	69.720.000,00	1	121.752.750,00	0,25	24.930.000	0,25	16.620.000	0,25		0,25		1	41.550.000	100,00	34,13	2	111.270.000,00	40,00	15,42	Kecamatan TBS	Bandar Lampung
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5																							
xxx		7	01				Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	persen	98,00	31.496.098,14	50,00	-	98,00	2.103.918	20		20		20		20		80	-	81,63	-	50,00	-	51,02	-	Kecamatan TBS	Bandar Lampung
		7	01	2	1	1	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	10.498.699,38	1		1	701.306	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	100,00	0,00	2	-	40,00	0,00	Kecamatan TBS	Bandar Lampung
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5																							
		7	01	2	1	6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	10.498.699,38	1		1	701.306	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	100,00	0,00	2	-	40,00	0,00	Kecamatan TBS	Bandar Lampung
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	Laporan	5																							
		7	01	2	1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	10.498.699,38	1		1	701.306	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	100,00	0,00	2	-	40,00	0,00	Kecamatan TBS	Bandar Lampung
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5																							
		7	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	persen	98,00	596.881.517,16	50,00	100.789.600	98,00	110.347.376	20		20	23.705.631	20	-	20	-	80	23.705.631,00	81,63	21,48	50,00	124.495.231,00	51,02	20,86	Kecamatan TBS	Bandar Lampung
		7	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	45.724.598,59	1	10.474.000	1	11.963.598	0,25		0,25	11.801.631	0,25		0,25		1	11.801.631	100,00	98,65	2	22.275.631,00	40,00	48,72		
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	5																							
		7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	126.532.309,69	1	35.971.600,00	1	32.366.795,00	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	100,00	0,00	2	35.971.600,00	40,00	28,43	Kecamatan TBS	Bandar Lampung
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5																							
		7	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	85.436.827,14	1	15.833.000,00	1	17.246.207,00	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	100,00	0,00	2	15.833.000,00	40,00	18,53	Kecamatan TBS	Bandar Lampung
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5																							
		7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	120.724.178,13	1	23.520.000,00	1	24.000.000,00	0,25		0,25	11.904.000	0,25		0,25		1	11.904.000	100,00	49,60	2	35.424.000,00	40,00	29,34	Kecamatan TBS	Bandar Lampung
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5																							
		7	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	120.579.134,86	1	14.991.000,00	1	13.570.776,00	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	100,00	0,00	2	14.991.000,00	40,00	12,43	Kecamatan TBS	Bandar Lampung
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5																							

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2028 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV												
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
		7	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	97.884.468,75	1		1	11.200.000,00	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	100,00		2	-	40,00	0,00	Kecamatan TBS	*Bandar Lampung*
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5																					
		7	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98,00**	**275.170.085,63**	**50,00**	-		**140.250.098**	**20**		**20**		**20**		**20**		**80**				**50**	-	**51,02**	**0,00**	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
		7	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	110.935.731,25				**48800000,00**																	
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12																					
		7	01	2	07		Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	55.256.312,50				**50080028,00**																	
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	10																					
		7	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	108.978.041,88	2,00			**41370070,00**											0,00		2	-	20,00	0,00	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10																					
		7	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**98,00**	**6.966.042.968,67**	**50,00**	**706.000.000**	**98,00**	**959.940.000**	20	**172.000.000**	20	**219.000.000**	20	-	20	-	**80**	**391.000.000,00**	**81,63**	**40,73**	**50,00**	**1.097.000.000,00**	**51,02**		**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
		7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	220.381.975,13	1		1	33.000.000,00	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	100,00	0,00	2	-	40,00	0,00	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5																					
		7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	6.745.660.993,54	1	*706.000.000,00*	1	*926.940.000,00*	0,25	*172.000.000,00*	0,25	219.000.000	0,25		0,25		1	**391.000.000,00**	100,00	42,18	2	1.097.000.000,00	40,00	16,26	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	5																					
		7	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98,00**	**2.611.438.795,38**	**50,00**	**58.097.500**	**98,00**	**184.014.091**	20	*27.557.600,00*	20	-	20	-	20	-	**80**	**27.557.600,00**	**81,63**	**14,98**	**50,00**	**733.557.600,00**	**51,02**	**28,09**	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
		7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	218.818.041,33	1,00		1,00	*37.020.000,00*	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	100,00	0,00	1	-	100,00	0,00	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Unit	1																					
		7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1.846.238.785,36	1,00	*45.097.000,00*	5,00	*111.022.270,00*	0,25	27.557.600	0,25		0,25		0,25		1	27.557.600	20,00	24,82	2	72.654.600,00	40,00	3,94	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit	5																					
		7	01	2	09	06	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	42.416.603,13	1,00	-	1,00	-	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	100,00	#DIV/0!	2	-	200,00	0,00	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1																					
		7	01	2	09	08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	405.428.333,68	1,00		6,00	*6.570.000,00*	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	16,67	0,00	2	-	33,33	0,00	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6																					
		7	01	2	09	11	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	98.537.031,88	1,00	*13.000.500,00*	1,00	*25.401.821,00*	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	100,00	0,00	2	13.000.500,00	1,00	13,19	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita	Unit	1																					
		7	**01**				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	98.537.031,88	1,00		1,00	*4.000.000,00*	0,25		0		0		0		0,25	-	25,00	0,00	1,25	4.940.000,00	125,00	5,01	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Unit**	1																					

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (14/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
							Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**persen**	**100**	**290.095.604,63**	**100**	-	**100**	***1.402.612,00***	20								**20**	-	**20,00**		**120,00**		**120,00**		**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**290.095.604,63**	**100**		**100**	*1.402.612,00*	20								**20**		**20,00**		**120,00**		**120,00**		**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
		7	**01**				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	**Dokumen**	5	124.326.667,13	25		100		20		20		20		20		**80**		**80,00**		**105,00**		**2100,00**		**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
		7	01					jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	Tahun	1		1		1	*701.306,00*	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	100,00	0,00	2	-	200,00	#DIV/0!	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
							Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	**orang**	100	165.768.937,50																					
		7	01					jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1		20		20	*701.306,00*	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	5,00	#REF!	21	-	2100,00	#DIV/0!	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
		7	**01**				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**290.095.604,63**	**25**	-	**100**	***1.402.612,00***	20		20		20		20		**80**	-	**80,00**		**50,00**		**50,00**		**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
		7	01				**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**persen**	**100**	290.095.604,63	**25**	-	**100**	***1.402.612,00***	20		20		20		20		**80**				**50,00**		**50,00**		**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
		7	01				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Dokumen**	5	165.768.937,50	1		1	*701.306,00*	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	100,00	0,00	2	-	40,00	0,00	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
								jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1																					
		7	01				fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkroniasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	**Dokumen**	5	124.326.667,13	1		1	*701.306,00*	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	100,00	0,00	2	-	40,00	0,00	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
								jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1																					
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta Toleransi	7	01					**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**																								**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
		7	**01**	**2**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**persen**	**100**	**22.528.643.995,00**	**50,00**	**3.032.000.000**	**100**	**2.759.203.910**	20	**546.000.000**	*20,00*	**575.000.000**	#####	-	####	-	**80**	**1.121.000.000,00**	**80,00**	**40,63**	**50,00**	**4.153.000.000,00**	**50,00**	**18,43**	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
		7	01	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**244.792.000,00**	**50**	*29.000.000,00*	**100**	*29.089.704,00*	20		*20,00*	*29.000.000,00*	#####	-	####	-	**80**	**29.000.000,00**	**80,00**	**99,69**	**50,00**	**58.000.000,00**	**50,00**	**23,69**	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
		7	01	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	244.792.000,00	1	*29.000.000,00*	1	*29.089.704,00*	0,25		0,25	29.000.000	0,25		0,25		1	29.000.000	100,00	99,69	2	58.000.000,00	40,00	23,69	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5																					

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV												
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
		7	01	2	02		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**22.283.851.995,00**	**50,00**	*3.003.000.000,00*	**100**	*2.730.114.206,00*	20	**546.000.000**	20	**546.000.000**	20	-	20	-	**80**	**1.092.000.000,00**	**80,00**	-	**50,00**	**4.095.000.000,00**	**50,00**	**18,38**	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
		7	01	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	22.283.851.995,00	1	*3.003.000.000,00*	1	*2.730.114.206,00*	0,25	*546.000.000,00*	0,25	*546.000.000,00*	0,25		0,25		1	**1.092.000.000,00**	100,00	40,00	2	**4.095.000.000,00**	40,00	18,38	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5																					
		7	01	03			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**persen**	**80**	**7.089.145.622,00**	**50,00**	***418.790.000,00***	**100**	***605.894.709,00***	20	-	20		20	-	20	-	**80**	-	**80,00**	-	**50,00**	**418.790.000,00**	**62,50**	**5,91**	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
		7	01	03	01		**Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**persen**	**80**	**7.089.145.622,00**	**50,00**	**418.790.000**	**100**	**545.886.509**	**20**	-	**20**		**20**	-	**20**	-	**80**	-	**80,00**	-	**130,00**	**418.790.000,00**	**162,50**	**5,91**	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
		7	01	03	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	6.789.145.622,00	1	*418.790.000,00*	1	*545.886.509,00*	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	100,00	0,00	2	-	40,00	0,00	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
							Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						-		-																	
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tahun	1																					
								Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																					
							Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan**	Keluarga	80	**300.000.000,00**		-		**60.008.200**	**20**		**20,00**		**20,00**		**20,00**	**0,00**	**80**	-		-	**80,00**	-	**100,00**	-		
							Pembentukan dan Pemantapan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Pemantapan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan	Keluarga	5000,00	30.000.000,00			1250,00	6.000.820	0,25		0,25		0,25		0,25	-	1	-	0,08	0,00	1	-	0,02	0,00	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
							Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok	Keluarga	5000,00	30.000.000,00			1250,00	6.000.820	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	0,08	0,00	1	-	0,02	0,00	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
							Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5000,00	30.000.000,00			1250,00	6.000.820	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	0,08	0,00	1	-	0,02	0,00	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
							Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam	Keluarga	5000,00	30.000.000,00			1250,00	6.000.820	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	0,08	0,00	1	-	0,02	0,00	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
							Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	Keluarga	5000,00	30.000.000,00			1250,00	6.000.820	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	0,08	0,00	1	-	0,02	0,00	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
							Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk	Keluarga	5000,00	30.000.000,00			1250,00	6.000.820	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	0,08	0,00	1	-	0,02	0,00	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
							Pemunbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemunbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Keluarga	5000,00	30.000.000,00			1250,00	6.000.820	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	0,08	0,00	1	-	0,02	0,00	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
							Pemunbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemunbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi	Keluarga	5000,00	30.000.000,00			1250,00	6.000.820	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	0,08	0,00	1	-	0,02	0,00	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
							Pemunbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemunbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5000,00	30.000.000,00			1250,00	6.000.820	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	0,08	0,00	1	-	0,02	0,00	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
							Pemunbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemunbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan	Keluarga	5000,00	30.000.000,00			1250,00	6.000.820	0,25		0,25		0,25		0,25		1	-	0,08	0,00	1	-	0,02	0,00	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
		7	01	04			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**persen**	**100**	**15.281.153.629,00**	**50**	*1.953.000.000,00*	**100**	*2.282.737.924,00*	20	*452.000.000,00*	*20,00*		#####	-	####	-	**80**	**904.000.000,00**	**80,00**	**39,60**	**50,00**	**2.857.000.000,00**	**50,00**	**18,70**	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
		7	01	04	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**persen**	**100**	**15.281.153.629,00**	**50**	**1.953.000.000**	**100**	**2.282.737.924**	**20**	**452.000.000**	**20**	**452.000.000**	**20**	-	**20**	-	**80**	**904.000.000,00**	**80,00**	**39,60**	**50,00**	**2.857.000.000,00**	**50,00**	**18,70**	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*
		7	01	04	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	15.149.978.629,00	1	*1.930.500.000,00*	1	*2.260.131.781,00*	0,25	*452.000.000,00*	0,25	*452.000.000,00*	0,25		0,25		1	904.000.000,00	100,00	40,00	2	2.834.500.000,00	0,04	18,71	**Kecamatan TBS**	*Bandar Lampung*

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Laporan	5																									
							Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	131.175.000,00	1	22.500.000,00	1	22.606.143,00	0,25		0,25		0,25		0,25		1	0,00	1,25	0,00	2	22.500.000,00	0,04	17,15		
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5																									
																								0									
									*				9.143.115.064,00		11.347.882.816,00		2.162.709.133,00		1.595.802.324,00		-		-		4.210.511.457,00		37,10		13.353.626.521,00				
							TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			xxx		xxx				xxx			
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			xxx		xxx				xxx			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:																																	

Bandar Lampung, Maret 2025
Plt CAMAT TELUK BETUNG SELATAN

ICHWAN ADJI WIBOWO, S.Pt.,M.M
Pembina Tingkat I
NIP.19720623 200003 1 003

Catatan :

*) Nama OPD

**) Klasifikasi Interval Capaian Kinerja :



Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2025 ini rencana Kerja OPD Kecamatan Telukbetung Selatan mengalami perubahan anggaran dari sebelumnya secara keseluruhan pada rencana kerja OPD Kecamatan Telukbetung Selatan yang terdiri dari 6(Enam) Program,12 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
   1.2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a) Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
      b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      d) Penyediaan Bahan Logistik
      e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   1.4. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a) Pengadaan Mebel

b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c) Pemeliharaan Mebel

d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a) Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

a) Peningkatan Efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan dan kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

3.3. Pemberdayaan dan Kesejateraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

a) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

b) Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar Keluarga Warga, dan Kelompok Masyarakat

c) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

d) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Pengguna dan Pemanfaatan Sandang Prodiuksi Dalam Negeri

e) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemikiran Rumah

f) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Meningkatkan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

g) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

h) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pembangunan Ekonomi Lainnya

i) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

j) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4. Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

b) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

b) fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah

a) fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan

b) fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan

Dengan terbitnya peraturan baru yaitu Perat uran Walikota Bandar Lampung Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru, selanjutnya rencana kerja Telukbetung Selatan juga mengalami Perubahan. Format Perubahan untuk Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung yang telah disesuaikan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 24 Tahun 2022 tertuang dalam Tabel 3.1.

TABEL 5.1
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RENJA TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024	RENJA TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					KECAMATAN TELUKBETUNG SELATAN									##########	##########	10.927.529.816,00	##########
														-	-	-	
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	%	%	98,00	98,00	98,00	##########	##########	4.932.989.347,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen	%	%	98,00	98,00	98,00	##########	2.100.459,00	2.100.459,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	700.000,00	700.153,00	700.153,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	Laporan	1	1	1	700.000,00	700.153,00	700.153,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	700.000,00	700.153,00	700.153,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan	%	%	98,00	98,00	98,00	##########	##########	3.761.629.816,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan ...	Penyediaan Gaji dan ...	Jumlah Orang yang ...	Jumlah Orang yang ...	Orang/Bulan	Orang/Bulan	27	27	27	##########	##########	3.649.879.816,00	Kecamatan Telukbetung ...
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	##########	111.750.000,00	111.750.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	%	%	98,00	98,00	98,00	##########	103.224.848,00	103.224.848,00	Kecamatan Telukbetung Selatan

7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	##########	10.632.850,00	10.632.850,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	##########	36.874.254,00	36.874.254,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	3	3	3	##########	16.014.207,00	16.014.207,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	##########	24.000.000,00	24.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	2	2	2	##########	15.703.537,00	15.703.537,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	Laporan	1	1	1				Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	-	-	-	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	-	-	-	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung	Unit	Unit	4	4	4	-	-	-	Kecamatan Telukbetung Selatan

7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**##########**	**855.180.000,00**	**855.180.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	##########	33.000.000,00	33.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	##########	822.180.000,00	822.180.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**##########**	**210.854.224,00**	**210.854.224,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	##########	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	##########	144.080.000,00	144.080.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00		-	-	Kecamatan Telukbetung Selatan

7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	18,00	18,00	18,00	##########	6.570.000,00	6.570.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	3,00	3,00	3,00	##########	13.184.224,00	13.184.224,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	24,00	24,00	24,00	##########	10.000.000,00	10.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**##########**	**##############**	**3.305.199.571,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**##########**	**29.087.412,00**	**29.087.412,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Laporan	Laporan	1	1	1	##########	29.087.412,00	29.087.412,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintah**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintah**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintah**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintah**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**##########**	**##############**	**3.276.112.159,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**

7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Laporan	Laporan	1	1	1	##########	##############	3.276.112.159,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**##########**	**555.890.040,00**	**555.890.040,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan**	**Persentase koordinasi pemberdayaan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**##########**	**495.886.180,00**	**495.886.180,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	Laporan	Laporan	1	1	1	##########	495.886.180,00	495.886.180,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**##########**	**60.003.860,00**	**60.003.860,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	##########	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	##########	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan

7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	##########	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	##########	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	##########	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	##########	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan

7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	##########	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	##########	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	##########	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	##########	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan

7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan**	**Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**##########**	**##########**	**2.128.847.972,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**##########**	**##########**	**2.128.847.972,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	Laporan	Laporan	1	1	1	##########	##########	2.106.233.200,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh	harmonisasi hubungan dengan Tokoh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	Laporan	Laporan	1	1	1	##########	22.614.772,00	22.614.772,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintah**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**##########**	**2.301.391,00**	**2.301.391,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan pemerintah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintah**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**##########**	**2.301.391,00**	**2.301.391,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	##########	1.150.800,00	1.150.800,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi	orang	orang	20	20	20	##########	1.150.591,00	1.150.591,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**##########**	**2.301.495,00**	**2.301.495,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan**	**Persentase pembinaan dan**	**Persentase pembinaan dan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**##########**	**2.301.495,00**	**2.301.495,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata	fasilitasi Administrasi Tata	Jumlah Dokumen yang	Jumlah Dokumen yang	Dokumen	Dokumen	1	1	1	##########	1.151.427,00	1.151.427,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	##########	1.150.068,00	1.150.068,00	Kecamatan Telukbetung Selatan

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Kecamatan Telukbetung Selatan selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Kecamatan Telukbetung Selatan juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Telukbetung Selatan dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

RENCANA KERJA PERUBAHAN

KECAMATAN KEDATON
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025
CAMAT KEDATON
Kota Bandar Lampung,

SAPTO HARYANTO, S.IP.
NIP. 19761102 200701 1005

Diverifikasi : Tanggal		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST., M.Si	
	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda	
2	Zeldayati Ningsih, S.H., M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tk.I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Diverifikasi : Tanggal		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST., M.Si	
	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda	
2	Zeldayati Ningsih, S.H., M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Bandar Lampung, 2025
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tk.I
NIP.19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN 41
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Kecamatan Kedaton adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Kedaton yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Kedaton Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;
b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Kedaton yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Kecamatan Kedaton Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kedaton Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 108);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
8. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173)
9. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 tentang APBD tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 10);
25. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 20);
26. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 47).
27. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

I.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kecamatan Kedaton Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2024, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Kedaton dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kedaton Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Kecamatan Kedaton dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Kedaton Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Kedaton. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan capaian Kinerja. Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, yang dijabarkan dalam 6 Program, 13 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Realisasi Anggaran Belanja Operasi sampai dengan 28 Juni 2025 pada Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 6.391.214.020 atau 47,06% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp 13.579.930.357. Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 0 atau 0% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sebesar Rp. 75.606.456,00 sedangkan realisasi kinerja rata-rata mencapai 50%. Evaluasi kinerja dan keuangan Renja Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.1.

2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kedaton, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota Bandar Lampung kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Bandar Lampung;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta

pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

BAB III
RENCANA DALAM KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2025 ini rencana Kerja OPD Kecamatan Kedaton mengalami perubahan anggaran dari sebelumnya secara keseluruhan pada rencana kerja OPD Kecamatan Kedaton yang terdiri dari 6 (Enam) Program, 13 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a) Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
      b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
   1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      d) Penyediaan Bahan Logistik
      e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Pengadaan Mebel
b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c) Pemeliharaan Mebel
d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a) Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan pelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

a) Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

a) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

b) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

c. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

d) Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri

d) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

e) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

f) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

g) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

h) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

i) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4. Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum
   4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
      a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
      b) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
      a) fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional
      b) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah
   6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
      a) fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan
      b) fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan

Dengan terbitnya peraturan baru yaitu Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru, selanjutnya rencana kerja Kecamatan Kedaton juga mengalami Perubahan. Format Perubahan untuk Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung yang telah disesuaikan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2024 tertuang dalam Tabel 3.1. (Tabel 5.1)

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Kecamatan Kedaton selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Kecamatan Kedaton juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Kedaton dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

PERUBAHAN RENCANA KERJA

KECAMATAN SUKARAME

TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	√			
	2.1	Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sapai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/tahun 2023	√			
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, Juli 2025
Camat Sukarame

ZOLAHUDDIN AL ZAM ZAMI, S. Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19720519 199203 1 002

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Fitri Yanti ST. M. Si** Plt Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda	
2	**ZELDAYATI NINGSIH, SH. MH** Fungsional Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tk.I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025
Camat Sukarame

ZOLAHUDDIN AL ZAM ZAMI, S. Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19720519 199203 1 002

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Fitri Yanti ST. M. Si**	
	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda	
2	**ZELDAYATI NINGSIH, SH. MH**	
	Fungsional Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tk.I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, Juli 2025
Camat Sukarame

ZOLAHUDDIN AL ZAM ZAMI, S. Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19720519 199203 1 002

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	**Fitri Yanti ST. M. Si**	
	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda	
2	**ZELDAYATI NINGSIH, SH. MH**	
	Fungsional Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.SI.
Pembina Tk.I
NIP.19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN 42
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Kecamatan Sukarame adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Bappeda yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Perubahan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang memuat perubahan pagu anggaran, program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta perubahan indikator kinerja program dan kegiatan maupun penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru. Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Sukarame Tahun 2025.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan perubahan RKPD tahun 2025 sebagai dasar dalam penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun 2025. Secara garis besar, perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 didasarkan pada :

1. Perubahan proyeksi dan alokasi belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik seiring dengan perubahan proyeksi pendapatan daerah.
2. Penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024.
3. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan atas evaluasi APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.

Selain itu perubahan RKPD tahun 2025 dilakukan dalam rangka menyesuaikan perencanaan pembangunan dengan kondisi ekonomi terkini (realitas ekonomi). Kondisi tersebut tentunya perlu direspon secara tepat dengan mengoptimalkan peluang yang ada guna memastikan relevansi pada sasaran ekonomi makro yang ditetapkan.

Perubahan Renja Kecamatan Sukarame Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sukarame Tahun 2025 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PTR/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 685);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 tentang APBD tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);
29. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kota Bandar Lampung tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor).
30. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

I.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kecamatan Sukarame Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 yang secara otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Sukarame dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sukarame Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Kecamatan Sukarame dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Perubahan PPAS Kecamatan Sukarame Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam RAPBDP Tahun 2025;
c. Menjadi pedoman bagi Kecamatan Sukarame untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (perubahan Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Sukarame;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Sukarame Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung merupakan perubahan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Sukarame. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan capaian Kinerja. Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, yang dijabarkan dalam 6 Program, 13 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan.

Secara umum kinerja OPD Kecamatan Sukarame sudah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu melaksanakan dan memberikan berbagai macam pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun 2025 sampai dengan triwulan II saat ini, kegiatan pelayanan yang telah dilaksanakan diantaranya:

a) Perekaman data bagi warga yang belum memiliki E-KTP
b) Pemantauan atas pelaksanaan bantuan pembangunan kepada masyarakat;
c) Pembuatan Surat keterangan Ahli waris, Pembuatan AJB dan Pembuatan Dokumen terkait Kepemilikan Lahan;
d) Pencatatan data kependudukan dan data Realisasi PBB
e) Pendistribusian bantuan untuk warga, pengurus masjid, Guru ngaji, dan Perkumpulan keagamaan se-kecamatan Sukarame.
f) Penerbitan Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Pada Tahun 2025 Anggaran RKPD Kecamatan Sukarame sebelum perubahan sebesar Rp. 11.855.029.118,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 13.618.687.790,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 1.838.862.400,00 atau mengalami kenaikan sebesar 15,51%. Hal ini dikarenakan ada penyesuaian pada beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan akibat adanya perubahan kebijakan terkait adanya perubahan situasi dan kondisi.

Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2025 ini anggaran APBD Kecamatan Sukarame sudah terealisasi sebesar Rp. 5.192.165.615,00 atau mencapai 43% yang telah dibelanjakan dari dana yang tersedia sesuai DPA OPD Tahun 2025 sebesar Rp. 11.855.029.118,00. Sedangkan realisasi kinerja rata-rata mencapai 50%. Evaluasi kinerja dan keuangan Renja Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung sampai dengan triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.1.

2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Mencermati perkembangan dalam masyarakat Kecamatan Sukarame pada tahun 2025 yang banyak berubah maka pemetaan isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 dan tahun selanjutnya antara lain:

1. Perlu adanya upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan *stakeholder* terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana strategis sehingga diperoleh output yang lebih aspiratif.
2. Dalam upaya mendukung pengentasan kemiskinan yang angkanya masih cukup tinggi maka dibutuhkan pendampingan kepada keluarga miskin secara lebih intensif, terutama melalui program

bantuan sosial yang digulirkan baik oleh Pemerintah Kota maupun Pemerintah Pusat.

3. Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir yang dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu sebagai modal database dalam menyusun perencanaan pembangunan. Untuk mencapai hal ini maka dibutuhkan personil yang dinamis dalam melakukan pengumpulan data, rekapitulasi data dan penyusunan *database*.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

BAB III

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adanya perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Sukarame untuk tahun 2025 berkaitan dengan adanya desain perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2025 yang disusun pada tahun 2024 dan telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 yang pada pelaksanaannya harus mengalami penyesuaian atau perubahan mengingat pada tahun berjalan menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah. Selain itu perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 juga memperhatikan hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2025 serta asumsi dan kondisi terkini sehingga rencana pembangunan Kota Bandar Lampung pada beberapa sektor mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan proses kerja. Namun demikian terdapat beberapa hal yang tetap menjadi perhatian seperti tantangan global dan dukungan terhadap pelaksanaan pilkada tahun 2025 maupun program-program yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi misi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2025 ini Anggaran pada rencana Kerja OPD Kecamatan Sukarame mengalami turut mengalami perubahan. Secara keseluruhan pada Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Sukarame terdiri dari 6 (enam) Program, 13 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan antara lain:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
    1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

1.2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah

b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

d) Penyediaan Bahan Logistik

e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Pengadaan Mebel

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c) Pemeliharaan Mebel
d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

a) Peningkatan Efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan dan kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

a) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

b) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
c) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
d) Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
e) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
f) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
g) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
h) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
i) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
j) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4. Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

b) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

b) fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah

a) fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan

b) fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan

Dengan terbitnya peraturan baru yaitu Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang memuat perubahan pagu RKPD pada program, kegiatan dan sub kegiatan serta perubahan indikator kinerja program dan kegiatan Tahun 2025 secara otomatis Rencana Kerja Kecamatan Sukarame Tahun 2025 juga mengalami perubahan. Format Perubahan untuk Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang telah disesuaikan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang perubahan Rencana Kerja Kota Bandar Lampung Tahun 2025 yang tertuang dalam Tabel 3.1.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) schingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Kecamatan Sukarame selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Kecamatan Sukarame juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Sukarame dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kincrja kc arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Formulir E. 81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG
PERIODE PELAKSANAAN s.d. TRIWULAN I TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:
1. .....

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7					UNSUR KEWILAYAHAN																									
7	01				KECAMATAN																									
7	01				Kecamatan Sukarame			98	88.959.037.258,09	50	20.154.661.730,00	98	11.855.029.118,00		2.760.135.664,00		2.688.160.130,00						5.448.295.794,00		45,96		25.602.957.524,00		28,78		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN	PERSEN	98	46.804.362.287,52	50	9.318.450.176,00	98	6.737.519.118,00		1.492.635.664,00		1.784.660.130,00					90	3.277.295.794,00	91,84	48,64	40	12.595.745.970,00	41	26,91	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100	116.038.256,25	50	5.567.000,00	100	3.000.000,00		-		-					80	-	80,00	-	40	5.567.000,00	40	4,80	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	38.679.418,75	7	2.000.000,00	1	1.000.000,00	0,25								0	-	25,00	-	7	2.000.000,00	1	5,17	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5																					
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	38.679.418,75	4	1.780.000,00	1	1.000.000,00	0,25								0	-	25,00	-	4	1.780.000,00	1	4,60	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5																					
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	38.679.418,75	4	1.787.000,00	1	1.000.000,00	0,25								0	-	25,00	-	4	1.787.000,00	1	4,62	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5																					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	Persen	100	35.630.363.523,80	50	13.394.946.734,00	100	5.630.930.618,00		1.231.853.264,00		1.613.660.130,00					90	2.845.513.394,00	90,00	50,53	40	16.240.460.128,00	40	45,58	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	35.113.533.528,80	51	13.242.643.734,00	51	5.576.629.118,00	0,25	1.219.547.264,00		1.594.442.630,00					0	2.813.989.894,00	0,49	50,46	0	16.056.633.628,00	25	45,73	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	51																					
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	516.829.995,00	4	152.303.000,00	1	54.301.500,00	0,25	12.306.000,00		19.217.500,00					0	31.523.500,00	25,00	58,05	0	183.826.500,00	25	35,57	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5																					
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98	654.924.174,15	50	69.270.465,00	98	45.088.926,00		-		-					0	-	-	-	50	69.270.465,00	51	10,58	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	41.431.364,28	4	5.689.850,00	1	2.838.000,00	0,25								0		25,00	-	0	5.689.850,00	0	13,73	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	114.198.546,88	4	26.788.500,00	1	13.547.000,00	0,25								0	-	25,00	-	0	26.788.500,00	0	23,46	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	80.709.272,25	4	13.404.249,00	1	5.369.000,00	0,25								0	-	25,00	-	0	13.404.249,00	0	16,61	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	159.796.925,13	4	520.000,00	1	500.000,00	0,25								0	-	25,00	-	0	520.000,00	0	0,33	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	125.512.625,00	4	22.867.866,00	1	10.018.000,00	0,25								0	-	25,00	-	0	22.867.866,00	0	18,22	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5																					

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	133.275.440,63	4	-	1	12.816.926,00	0,25								0	-	25,00	-	0	-	0	-	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5																						
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98**	**286.713.877,99**	**50**	**107.000.000,00**	**98**	**60.729.574,00**		-		-					**0**	-	-	-	**50**	**107.000.000,00**	**51**	**37,32**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	108.182.124,87	4	32.000.000,00	2	26.805.838,00									0	-	-	-	4	32.000.000,00	400	29,58	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4																						
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	65.256.312,50	4	65.000.000,00	2	33.923.736,00									0	-	-	-	-	65.000.000,00	-	99,61	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4														0								
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	113.275.440,63	4	10.000.000,00	2										0				4	10.000.000,00	400	8,83	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4																						
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100**	**6.965.263.027,31**	**50**	**2.229.188.500,00**	**100**	**794.800.000,00**		**222.144.000,00**		**171.000.000,00**					**40**	**393.144.000,00**	**40,00**	**49,46**	**40**	**2.622.332.500,00**	**40**	**37,65**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	330.196.941,25	4	34.665.000,00	1	13.000.000,00	0,25								0	-	25,00	-	0	34.665.000,00	25	10,50	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5																						
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	6.635.066.086,06	4	2.194.523.500,00	1	781.800.000,00	0,25	222.144.000,00		171.000.000,00					0	393.144.000,00	25,00	50,29	0	2.587.667.500,00	25	39,00	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5																						
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98**	**3.151.059.428,02**	**50**	**585.582.830,00**	**98**	**202.970.000,00**		**38.638.400,00**		-					**40**	**38.638.400,00**	**40,82**	**19,04**	**40**	**624.221.230,00**	**41**	**19,81**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	218.818.041,33	1	56.239.750,00	1	38.670.000,00	0,25								0	-	25,00	-	0	56.239.750,00	25	25,70	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1																						
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1.496.307.942,81	10	377.681.580,00	1	110.070.000,00	0,25	38.638.400,00							0	38.638.400,00	25,00	35,10	0	416.319.980,00	25	27,82	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10																						
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	11.051.262,50	3			1.200.000,00	0,25									-		-					
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3																						
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	32.628.156,25	3	3.780.000,00	3	2.030.000,00	0,25								0	-	8,33	-	0	3.780.000,00	25	11,59	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3																						
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	1.300.895.187,50	2	133.337.100,00	2	39.000.000,00	0,25								0		12,50	-	0	133.337.100,00	25	10,25	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2																						
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	91.358.837,63	1	14.544.400,00	1	12.000.000,00	0,25								0	1.550.000,00	25,00	12,92	0	16.094.400,00	25	17,62	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN**	**PERSEN**	**100**	**18.918.019.749,24**	**100**	**9.341.948.612,00**	**100**	**2.392.104.000,00**		**708.750.000,00**		**501.500.000,00**					**50**	**1.210.250.000,00**	**50,00**	**50,59**	**50**	**10.552.198.612,00**	**50**	**55,78**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persen**	**100**	**226.308.891,75**	**100**	49.679.303,00	**100**	**29.302.000,00**		-		**29.000.000,00**					**0**	**29.000.000,00**	-	**98,97**	**100**	**78.679.303,00**	**100**	**34,77**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	226.308.891,75	4	49.679.303,00	1	29.302.000,00	0,25			29.000.000,00					0	29.000.000,00	25,00	98,97	0	78.679.303,00	25	34,77	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5																							
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persen**	**100**	**18.691.710.857,49**	**100**	9.292.269.309,00	**100**	**2.362.802.000,00**		**708.750.000,00**		**472.500.000,00**					**100**	**1.181.250.000,00**	**100,00**	**49,99**	**100**	**10.473.519.309,00**	**100**	**56,03**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	18.691.710.857,49	4	9.292.269.309,00	1	2.362.802.000,00	0,25	708.750.000,00		472.500.000,00					0	1.181.250.000,00	25,00	49,99	0	10.473.519.309,00	25	56,03	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN**	**PERSEN**	**90**	**8.965.777.096,87**	**90**	**740.578.448,00**	**80**	**684.302.000,00**		-							**0**	-	-	-	**90**	**740.578.448,00**	**100**	**8,26**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persen**	**90**	**7.672.739.596,87**	**90**	**740.578.448,00**	**80**	**624.302.000,00**		-							**0**	-	-	-	**90**	**740.578.448,00**	**100**	**9,65**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	7.672.739.596,87	4	740.578.448,00	1	624.302.000,00	0,25								0		25,00	-	0	740.578.448,00	25	9,65	
7	**1**	**3**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80**	**1.293.037.500,00**		-	**80**	**60.000.000,00**									**0**		-	-	-	-	-	-	
7	**1**	**3**	2.06	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.000	6.000.000,00									0		-	-	-				
7	**1**	**3**	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.000	6.000.000,00									0		-	-	-				
7	**1**	**3**	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.000	6.000.000,00									0		-	-	-				
7	**1**	**3**	2.06	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.000	6.000.000,00									0		-	-	-				
7	**1**	**3**	2.06	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.000	6.000.000,00									0		-	-	-				
7	**1**	**3**	2.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.000	6.000.000,00									0		-	-	-				
7	**1**	**3**	2.06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.000	6.000.000,00									0		-	-	-				
7	**1**	**3**	2.06	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.000	6.000.000,00									0		-	-	-				
7	**1**	**3**	2.06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.000	6.000.000,00									0		-	-	-				
7	1	3	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6.000	129.303.750,00		-	1.000	6.000.000,00									0		-	-	-	-	-	-	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL**	**PERSEN**	**100**	**13.690.686.843,22**	**100**	**5.213.029.606,00**	**100**	**2.033.104.000,00**		**558.750.000,00**		**402.000.000,00**					**0**	960.750.000,00	-	**47,26**	**50**	**6.173.779.606,00**	**50**	**45,09**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**Persen**	**100**	**13.690.686.843,22**	**100**	5.213.029.606,00	**100**	**2.033.104.000,00**		**558.750.000,00**		**402.000.000,00**					**0**	960.750.000,00	-	**47,26**	**50**	**6.173.779.606,00**	**50**	**45,09**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	13.559.511.843,22	4	5.156.200.258,00	1	2.010.302.000,00	0,25	558.750.000,00		402.000.000,00					0	960.750.000,00	25,00	47,79	0	6.116.950.258,00	25	45,11	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5													-									
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	131.175.000,00	4	56.829.348,00	1	22.802.000,00	0,25							0		25,00	-	0	56.829.348,00	25	43,32	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN**	**PERSEN**	**100**	**290.095.640,63**	**100**	**2.000.000,00**	**100**	**4.000.000,00**		-							**0**		-	-	**100**	**2.000.000,00**	**100**	**0,69**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persen**	**100**	**290.095.640,63**	**100**	**2.000.000,00**	**100**	**4.000.000,00**		-							**0**		-	-	**100**	**2.000.000,00**	**100**	**0,69**	
7	01	05	2.01	02	Pasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165.768.937,50	100	1.000.000,00	20	2.000.000,00	0,25								0		1,25	-	0	1.000.000,00	25	0,60	
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100													-									
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1													-									
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5	124.326.703,13	4	1.000.000,00	1	2.000.000,00	0,25								0		25,00	-	0	1.000.000,00	5	0,80	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN**	**PERSEN**	**100**	**290.095.640,63**	**100**	**2.000.000,00**	**90**	**4.000.000,00**		-							**0**		-	-	-	2.000.000,00	-	0,69	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**100**	**290.095.640,63**	**100**	2.000.000,00	**90**	**4.000.000,00**		-							**0**		-	-	-	2.000.000,00	-	0,69	
7	01	06	2.01	02	Pasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165.768.937,50	4	1.000.000,00	1	2.000.000,00	0,25								0		25,00	-	0	1.000.000,00	25	0,60	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5													-									
7	01	06	2.01	09	Pasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124.326.703,13	4	1.000.000,00	1	2.000.000,00	0,25								0		25,00	-	0	1.000.000,00	25	0,80	
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5													-									
																						Rata-Rata Capaian Kinerja		#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	
																						Predikat Kinerja		#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				**88.959.037.258,09**		**24.618.006.842,00**		**11.855.029.118,00**		**2.760.135.664,00**		**2.688.160.130,00**		-		-		**5.448.295.794,00**	#DIV/0!	**45,96**				############		
																						-								
					TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																											
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																											

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

Bandar Lampung, April 2025
CAMAT SUKARAME

ZULHUDDIN ALHAM ZAMI, S.Sos., MM
NIP. 19720519 199203 1 002

Catata
*) Nama OPD

** Klasifikasi Interval Capaian Kinerja :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi (ST)
2	76 ≤ 90	Tinggi (T)
3	66 ≤ 75	Sedang (S)
4	51 ≤ 65	Rendah (R)
5	≤ 50	Sangat Rendah (SR)

Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

TABEL 5.1

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						KECAMATAN									11.195.058.918,00	11.855.029.118,00	13.618.687.790,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									11.195.058.918,00	11.855.029.118,00	13.618.687.790,00	
	7	01				KECAMATAN									11.195.058.918,00	11.855.029.118,00	13.618.687.790,00	
188	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	98%	98%	98%	98%	98%	6.523.721.961,00	6.737.519.118,00	6.840.677.790,00	Perubahan Efisiensi, Tambahan Utang Tahun 2024 dan Usulan Tahun 2025
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,pengang garan dan evaluasi kinerja presentase pemenuhan dokumen Perencanaan,pengang garan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,pengang garan dan evaluasi kinerja presentase pemenuhan dokumen Perencanaan,pengang garan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	98%	98%	98%	98%	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.537.998.918,00	5.630.930.618,00	5.643.320.618,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	5.455.158.918,00	5.576.629.118,00	5.576.629.118,00	
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	82.840.000,00	54.301.500,00	66.691.500,00	Utang 2024 senilai Rp. 11.580.000 dan Penambahan Efisiensi senilai Rp. 810.000
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	98%	98%	98%	98%	33.359.500,00	45.088.926,00	32.272.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.570.500,00	2.838.000,00	2.838.000,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	13.788.500,00	13.547.000,00	13.547.000,00	
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.270.500,00	5.369.000,00	5.369.000,00	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	250,00	500.000,00	500.000,00	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.010.000,00	10.018.000,00	10.018.000,00	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.470.000,00	12.816.926,00	0,00	Pengurangan Efisiensi Senilai Rp. 12.816.926
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	2.420.687,00	60.729.574,00	0,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2.420.687,00	26.805.838,00	0,00	Pengurangan Efisiensi Senilai Rp. 26.805.838
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya											
								Jumlah Paket Peralatan yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0,00	33.923.736,00	0,00	Pengurangan Efisiensi Senilai Rp. 33.923.736
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	95%	95%	95%	95%	694.174.100,00	794.800.000,00	922.944.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.224.100,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	683.950.000,00	781.800.000,00	909.944.000,00	Utang 2024 Senilai Rp. 142.144.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	252.768.756,00	202.970.000,00	239.141.172,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	38.670.000	38.670.000	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	167.960.000,00	110.070.000	158.241.172	Utang Tahun 2024 Senilai Rp. 38.638.400 dan Penambahan Efisiensi senilai Rp. 9.532.772
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel											
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.200.000,00	1.200.000	1.200.000	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	41.038.505,00	39.000.000	39.000.000	
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.520.251,00	12.000.000	0	
189	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan massyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan massyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.392.195.332,00	2.392.104.000,00	3.266.604.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	29.499.303,00	29.302.000,00	29.302.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	29.499.303,00	29.302.000,00	29.302.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.362.696.029,00	2.362.802.000,00	3.237.302.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.362.696.029,00	2.362.802.000,00	3.237.302.000,00	Utang Tahun 2024 Senilai Rp. 236.500.000 dan Usulan Tahun 2025 Senilai Rp. 472.500.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
190	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan dan Kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Sukarame	Persentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan dan Kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Sukarame	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	684.646.699,00	684.302.000,00	684.302.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	624.646.699,00	624.302.000,00	624.302.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	624.646.699,00	624.302.000,00	624.302.000,00	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
191	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Sukarame	Persentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Sukarame	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	1.590.494.926,00	2.033.104.000,00	2.819.104.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	1.590.494.926,00	2.033.104.000,00	2.819.104.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.567.696.029,00	2.010.302.000,00	2.796.302.000,00	Utang Tahun 2024 Senilai Rp. 156.750.000 dan Usulan Tahun 2025 Senilai 558.750.000
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.798.897,00	22.802.000,00	22.802.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
192	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Sukarame	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Sukarame	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional											
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Sukarame Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Koordinasi dalam Penyelenggaraan Permerintahan Kelurahan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Sukarame Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Koordinasi dalam Penyelenggaraan Permerintahan Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

Bandar Lampung Juli 2025
CAMAT SUKARAME

ZOLAHUDDIN AL ZAM ZAMI, S.Sos, MM
NIP 19720519 199203 1 002

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PANJANG
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	√			
		Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/tahun 2024				
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, Juli 2025
CAMAT PANJANG
Kota Bandar Lampung,

HENDRY SATRIA JAYA, SP., MM.
Pembina
NIP. 19780907 200604 1 008

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tk.I
NIP.19700218 199303 2 002

Diverifikasi : Tanggal		Tanda Tangan
1.	**FITRI YANTI, S.T.,M.Si**	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayah Bappeda	
2	**Zeldayati Ningsih, S.H., M.M**	
	Perencana Ahli Madya	

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025
CAMAT PANJANG
Kota Bandar Lampung,

HENDRY SATRIA JAYA, SP., MM.
Pembina
NIP. 19780907 200604 1 008

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tk.I
NIP.19700218 199303 2 002

Diverifikasi : Tanggal		Tanda Tangan
1.	**FITRI YANTI, S.T.,M.Si**	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayah Bappeda	
2	**Zeldayati Ningsih, S.H., M.M**	
	Perencana Ahli Madya	

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Diverifikasi : Tanggal		Tanda Tangan
1	AZWAR, ST., MM. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda	
2	ZELDAYATI NINGSIH, S.H., M.M Fungsional Ahli Madya	

Bandar Lampung, 2025
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tk.I
NIP 19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN ..... I – 1
1.1. Latar Belakang ..... I – 1
1.2. Landasan Hukum ..... I – 2
1.3. Maksud dan Tujuan ..... I – 7
1.4. Sistematika Penulisan ..... I – 7

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN..... II – 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan. II – 1
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... II – 1

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... III – 1

BAB IV PENUTUP ..... IV – 1

LAMPIRAN 53
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Kecamatan Panjang adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Panjang yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Panjang Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;
b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Panjang yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Kecamatan Panjang Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Panjang Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 108);
10. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);

11. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173)
12. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2019 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);

25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 tentang APBD tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);
31. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 20);
32. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 47).

I.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kecamatan Panjang Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2024, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Panjang Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Kecamatan Panjang dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2024
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2024;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Panjang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan capaian Kinerja. Pada tahun anggaran 2024, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, yang dijabarkan dalam 6 Program, 13 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Realisasi Anggaran Belanja Operasi sampai dengan 30 Juni 2025 pada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung adalah sebesar **Rp. 5.068.475.904,00** atau **34,11%** dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar **Rp 14.857.348.290**. Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 0 atau 0% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sebesar Rp. 14.857.348.290,00 sedangkan realisasi kinerja rata-rata mencapai 34,11%. Evaluasi kinerja dan keuangan Renja Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.1.

2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Panjang, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Wali kota Bandar Lampung kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Bandar Lampung;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta

pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

BAB III
RENCANA DALAM KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2025 ini rencana Kerja OPD Kecamatan Panjang mengalami perubahan anggaran dari sebelumnya secara keseluruhan pada rencana kerja OPD Kecamatan Panjang yang terdiri dari 6 (Enam) Program, 13 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a) Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
      b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
   1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      d) Penyediaan Bahan Logistik
      e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Pengadaan Mebel
b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c) Pemeliharaan Mebel
d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a) Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan pelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

a) Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

a) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

b) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

c. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

d) Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri

d) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

e) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

f) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

g) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

h) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

i) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4. Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum
   4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
      a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
      b) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
      a) fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional
      b) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah
   6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
      a) fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan
      b) fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan

Dengan terbitnya peraturan baru yaitu Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru, selanjutnya rencana kerja Kecamatan Panjang juga mengalami Perubahan. Format Perubahan untuk Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung yang telah disesuaikan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2024 tertuang dalam Tabel 3.1.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Kecamatan Panjang selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Kecamatan Panjang juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Panjang dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

REALISASI FISIK DAN PEMBANGUNAN

KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG

SAMPAI DENGAN 18 Juni 2025

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KETERANGAN
					TOTAL			
					ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*23*
1	**KECAMATAN PANJANG**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.313.076,00	-	0,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2.090.075,00	-	0,00%	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.461.250,00	-	0,00%	
			Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.733.448.290,00	1.603.641.448,00	33,88%	Gaji dan Tukin
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84.120.000,00	18.920.000,00	22,49%	Honor Pengelola Keuangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.773.005,00		0,00%	
				Penyediaan Peralatan dan	14.704.385,00	7.314.456,00	49,74%	ATK
				Penyediaan Peralatan Rumah	5.654.910,00		0,00%	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.000.000,00	9.900.000,00	47,14%	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.586.013,00		0,00%	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12.500.000,00		0,00%	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor lainnya	14.936.653,00		0,00%	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.360.000,00		0,00%	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	921.654.000,00	354.200.000,00	38,43%	Honor Tenaga Kontrak dan Pramubhakti
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	42.520.000,00		0,00%	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	213.720.000,00			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	14.512.482,00	-	0,00%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	20.116.000,00		0,00%	

		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	38.434.299,00	37.000.000,00	96,27%	TPPK dan TKPK
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di	4.325.444.090,00	1.725.500.000,00	39,89%	RT dan KALING JAN s/d April 2025
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	986.501.409,00		0,00%	
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga		45.808.331,00			
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di	3.281.000.282,00	1.312.000.000,00	39,99%	LINMAS DAN BABINSA/BABINKAMTIBMAS JAN s?d apr 2025
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan	24.599.794,00		0,00%	MARBOT
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	3.058.206,00	-	0,00%	
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.501.545,00	-	0,00%	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan*	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.114.438,00	-	0,00%	
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	2.415.757,00	-	0,00%	
Jumlah Belanja Operasi					-	-	0,00%	
Jumlah Belanja Modal					-	-	0,00%	
Jumlah Belanja Tidak Terduga					-	-	0,00%	
Jumlah Belanja Transfer					-	-	0,00%	
Total					**14.857.348.290,00**	**5.068.475.904,00**	**34,11%**	

Bandar Lampung, 18 Juni 2025
Pengguna Anggaran
Camat Panjang

HENDRY SATRIA JAYA,SP.,MM.
NIP.19780907 200604 1 008

36.000.000,00

21.600.000,00

40.800.000,00

36.000.000,00

36.000.000,00

170.400.000,00

april	mei	Juni	JUMLAH	juli	13 agustus	sept	rapel	
			733.547.860,00					
				144050242	143843107	144050242	138332925	19083338	589.359.854
					80135754	80135754		160.271.508

	jul	agus	sept		
	40000000	42000000	42000000	124000000	



-

1475936585

2.193.001.302,00

TABEL 4.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PANJANG
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2030

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2025)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030					
							TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD		
				Presentase tata kelola pemerintahan urusan kewilayahan	**%**	**98,00**	**98,00**	14.857.348.290,00	**98,00**		**98,00**		**98,00**		**98,00**		**98,00**						
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Urusan Kewilayahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel,	**Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilay**			**Indeks Kepuasan masyarakat**	**%**	**98,00**	**98,00**		**98,00**	**15.820.850.137,6278**	**98,00**		**98,00**		**98,00**		**98,00**						
		7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98,00**	**98,00**	**6.145.470.139,00**	**98,00**	**6.329.707.553,84**	**98,00**	**6.663.048.453,20**	**98,00**	**6.894.644.011,22**	**98,00**	**6.978.816.595,08**	**98,00**	**7.167.922.404,77**	**98,00**	**33.011.686.752,34**	**Kecamatan Panjang**	**Bandar Lampung**
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98,00**	**98,00**	**4.817.568.290,00**	**98,00**	**4.961.996.024,17**	**98,00**	**5.223.309.237,02**	**98,00**	**5.404.862.054,17**	**98,00**	**5.470.846.781,40**	**98,00**	**5.619.090.956,65**	**98,00**	**25.878.582.386,76**	**Kecamatan Panjang**	**Bandar Lampung**
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	34	34	4.733.448.290,00	34	4.875.354.158,31	34	5.132.104.557,28	34	5.310.487.264,10	34	5.375.319.825,99	34	5.520.975.496,15	34	25.426.714.095,68	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	84.120.000,00	1	86.641.865,86	1	91.204.679,74	1	94.374.790,07	1	95.526.955,42	1	98.115.460,50	5	451.868.291,08	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**%**	**98,00**	**98,00**	**6.864.401,00**	**98,00**	**7.070.191,52**	**98,00**	**7.442.528,47**	**98,00**	**7.701.217,35**	**98,00**	**7.795.236,90**	**98,00**	**8.006.465,35**	**98,00**	**36.873.575,24**	**Kecamatan Panjang**	**Bandar Lampung**
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	2.313.076,00	1	2.382.420,60	1	2.507.885,83	1	2.595.055,42	1	2.626.736,90	1	2.697.913,90	5	12.425.174,74	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	2.090.075,00	1	2.152.734,16	1	2.266.103,44	1	2.344.869,11	1	2.373.496,21	1	2.437.811,12	5	11.227.277,92	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	2.461.250,00	1	2.535.036,76	1	2.668.539,21	1	2.761.292,82	1	2.795.003,79	1	2.870.740,34	5	13.221.122,58	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98,00**	**98,00**	**63.218.313,00**	**98,00**	**65.113.559,14**	**98,00**	**68.542.629,47**	**98,00**	**70.925.047,76**	**98,00**	**71.790.929,24**	**98,00**	**73.736.256,45**	**98,00**	**339.590.478,61**	**Kecamatan Panjang**	**Bandar Lampung**
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	3.773.005,00	1	3.886.117,37	1	4.090.771,67	1	4.232.959,52	1	4.284.637,19	1	4.400.738,51	5	20.267.490,75	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	14.704.385,00	1	15.145.213,42	1	15.942.804,62	1	16.496.947,78	1	16.698.349,15	1	17.150.826,27	5	78.987.699,97	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	5.654.910,00	1	5.824.440,72	1	6.131.172,79	1	6.344.281,31	1	6.421.734,85	1	6.595.745,35	5	30.376.539,68	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	21.000.000,00	1	21.629.567,08	1	22.768.643,30	1	23.560.040,32	1	23.847.670,75	1	24.493.873,88	5	112.805.921,45	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	5.586.013,00	1	5.753.478,23	1	6.056.473,21	1	6.266.985,31	1	6.343.495,18	1	6.515.385,61	5	30.006.444,94	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	12.500.000,00	1	12.874.742,31	1	13.552.763,87	1	14.023.833,52	1	14.195.042,11	1	14.579.686,83	5	67.146.381,82	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98,00**	**98,00**	**14.936.653,00**	**98,00**	**15.384.444,67**	**98,00**	**16.194.634,49**	**98,00**	**16.757.530,80**	**98,00**	**16.962.113,47**	**98,00**	**17.421.737,84**	**98,00**	**80.235.376,43**	**Kecamatan Panjang**	**Bandar Lampung**
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	10	-	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	2	14.936.653,00	2	15.384.444,67	2	16.194.634,49	2	16.757.530,80	2	16.962.113,47	2	17.421.737,84	10	80.235.376,43	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	10	-	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98,00**	**98,00**	**952.014.000,00**	**98,00**	**980.554.794,16**	**98,00**	**1.032.193.675,45**	**98,00**	**1.068.070.867,69**	**98,00**	**1.081.110.305,91**	**98,00**	**1.110.405.278,35**	**98,00**	**5.113.943.643,20**	**Kecamatan Panjang**	**Bandar Lampung**
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	30.360.000,00	1	31.270.174,13	1	32.916.952,89	1	34.061.086,86	1	34.476.918,29	1	35.411.143,38	5	163.085.132,16	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	921.654.000,00	1	949.284.620,03	1	999.276.722,56	1	1.034.009.780,83	1	1.046.633.387,62	1	1.074.994.134,97	5	4.950.858.511,04	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2025)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030					
							TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD		
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98,00**	**98,00**	**290.868.482,00**	**98,00**	**299.588.540,18**	**98,00**	**315.365.748,31**	**98,00**	**326.327.293,46**	**98,00**	**330.311.228,15**	**98,00**	**339.261.710,14**	**98,00**	**1.562.461.292,09**	**Kecamatan Panjang**	**Bandar Lampung**
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	42.520.000,00	1	43.794.723,45	1	46.101.081,58	1	47.703.472,11	1	48.285.855,26	1	49.594.262,73	1	228.405.132,39	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	213.720.000,00	10	220.127.194,15	10	231.719.735,55	10	239.773.896,02	10	242.701.152,06	10	249.277.653,57	10	1.148.041.977,77	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	14.512.482,00	1	14.947.557,28	1	15.734.739,34	1	16.281.650,52	1	16.480.423,45	1	16.926.995,42	1	77.956.852,60	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	20.116.000,00	1	20.719.065,31	1	21.810.191,84	1	22.568.274,81	1	22.843.797,37	1	23.462.798,42	1	108.057.329,33	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel,	**Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan**	**7.01.05**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100,00**	**100,00**	**5.559.751,00**	**100,00**	**6.057.062,39**	**100,00**	**6.129.625,48**	**100,00**	**6.266.193,53**	**100,00**	**6.342.976,29**	**100,00**	**6.515.370,62**	**100,00**	**30.355.608,68**	**Kecamatan Panjang**	**Bandar Lampung**
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**100,00**	**5.559.751,00**	**100,00**	**6.057.062,39**	**100,00**	**6.129.625,48**	**100,00**	**6.266.193,53**	**100,00**	**6.342.976,29**	**100,00**	**6.515.370,62**	**100,00**	**30.355.608,68**	**Kecamatan Panjang**	**Bandar Lampung**
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	2.501.545,00	1	2.725.304,45	1	2.757.953,36	1	2.819.400,56	1	2.853.948,07	1	2.931.514,88	1	13.658.151,44	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100	20	3.058.206,00	20	3.331.757,94	20	3.371.672,12	20	3.446.792,97	20	3.489.028,22	20	3.583.855,74	100	16.697.457,24	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**%**	**90,00**	**90,00**	**4.530.195,00**	**90,00**	**4.935.414,15**	**95,00**	**4.994.539,99**	**100,00**	**5.105.818,34**	**100,00**	**5.168.382,44**	**100,00**	**5.308.852,76**	**100,00**	**24.734.349,92**	**Kecamatan Panjang**	**Bandar Lampung**
		7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**90,00**	**90,00**	**4.530.195,00**	**90,00**	**4.935.414,15**	**95,00**	**4.994.539,99**	**100,00**	**5.105.818,34**	**100,00**	**5.168.382,44**	**100,00**	**5.308.852,76**	**100,00**	**24.734.349,92**	**Kecamatan Panjang**	**Bandar Lampung**
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	1	2.114.438,00	1	2.303.571,31	1	2.331.167,90	1	2.383.106,32	1	2.412.307,69	1	2.477.871,26	1	11.544.591,21	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1	2.415.757,00	1	2.631.842,84	1	2.663.372,09	1	2.722.712,02	1	2.756.074,75	1	2.830.981,49	1	13.189.758,71	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang aman, tentram dan damai berdasarkan nilai nilai	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta toleransi antar umat beragama**			**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**			**Kecamatan Panjang**	
		7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal**	**%**	**100,00**	**100,00**	**3.305.600.076,00**	**100,00**	**3.601.281.044,40**	**100,00**	**3.644.424.083,79**	**100,00**	**3.725.621.852,38**	**100,00**	**3.771.273.730,66**	**100,00**	**3.873.772.338,02**	**100,00**	**18.048.200.787,23**	**Kecamatan Panjang**	**Bandar Lampung**
		7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100,00**	**100,00**	**3.305.600.076,00**	**100,00**	**3.601.281.044,40**	**100,00**	**3.644.424.083,79**	**100,00**	**3.725.621.852,38**	**100,00**	**3.771.273.730,66**	**100,00**	**3.873.772.338,02**	**100,00**	**18.048.200.787,23**	**Kecamatan Panjang**	**Bandar Lampung**
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	3.281.000.282,00	1	3.574.480.835,72	1	3.617.302.810,91	1	3.697.896.317,53	1	3.743.208.461,19	1	3.844.944.288,86	1	17.913.888.707,35	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	1	24.599.794,00	1	26.800.208,67	1	27.121.272,89	1	27.725.534,84	1	28.065.269,47	1	28.828.049,17	1	134.312.079,87	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2025)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030					
							TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD		
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan	**Meningkatnya penerapan kebijakan reformasi birokrasi di**	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam**	**%**	**100,00**	**100,00**	**4.363.878.389,00**	**100,00**	**4.754.220.765,08**	**100,00**	**4.811.175.923,87**	**100,00**	**4.918.368.923,46**	**100,00**	**4.978.636.118,67**	**100,00**	**5.113.949.359,01**	**100,00**	**23.826.280.120,07**	**Kecamatan Panjang**	**Bandar Lampung**
		7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**100,00**	**38.434.299,00**	**100**	**41.872.189,39**	**100**	**42.373.814,65**	**100,00**	**43.317.903,24**	**100,00**	**43.848.698,83**	**100,00**	**45.040.452,83**	**100**	**209.846.905,11**	**Kecamatan Panjang**	**Bandar Lampung**
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	1	38.434.299,00	1	41.872.189,39	1	42.373.814,65	1	43.317.903,24	1	43.848.698,83	1	45.040.452,83	1	209.846.905,11	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraaan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**100,00**	**4.325.444.090,00**	**100,00**	**4.712.348.575,68**	**100,00**	**4.768.802.109,23**	**100,00**	**4.875.051.020,22**	**100,00**	**4.934.787.419,84**	**100,00**	**5.068.908.906,18**	**100,00**	**23.616.433.214,97**	**Kecamatan Panjang**	**Bandar Lampung**
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan dan kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5	1	4.325.444.090,00	1	4.712.348.575,68	1	4.768.802.109,23	1	4.875.051.020,22	1	4.934.787.419,84	1	5.068.908.906,18	1	23.616.433.214,97	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui	**Meningkatnya kesejahteraan rakyat**	**7.01.03**	**Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80,00**	**80,00**	**1.032.309.740,00**	**80,00**	1.124.648.297,78	**80,00**	**1.138.121.488,35**	**85,00**	**1.163.478.835,11**	**90,00**	**1.177.735.513,93**	**90,00**	**1.209.744.924,72**	**100,00**	**5.636.293.875,17**	**Kecamatan Panjang**	**Bandar Lampung**
		7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**80,00**	**80,00**	**986.501.409,00**	**80,00**	1.074.742.480,28	**80,00**	**1.087.617.803,42**	**85,00**	**1.111.849.928,08**	**90,00**	**1.125.473.972,50**	**90,00**	**1.156.062.978,50**	**100,00**	**5.386.185.593,29**	**Kecamatan Panjang**	**Bandar Lampung**
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	986.501.409	1	1.074.742.480,28	1	1.087.617.803,42	1	1.111.849.928,08	1	1.125.473.972,50	1	1.156.062.978,50	1	5.386.185.593,29	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80**	**80**	**45.808.331,00**	**80**	49.905.817,50	**80**	**50.503.684,93**	**80**	**51.628.907,03**	**80**	**52.261.541,44**	**80**	**53.681.946,21**	**80**	**250.108.281,89**	**Kecamatan Panjang**	**Bandar Lampung**
		7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5000	1250	4.999.726	1250	5.446.943,99	1250	5.512.197,92	1250	5.635.009,68	1250	5.704.058,23	1250	5.859.087,56	5000	27.297.935,82	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5000	1250	4.979.567	1250	5.424.981,80	1250	5.489.972,62	1250	5.612.289,21	1250	5.681.059,35	1250	5.835.463,59	5000	27.187.869,97	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5000	1250	4.997.152	1250	5.444.139,75	1250	5.509.360,08	1250	5.632.108,62	1250	5.701.121,62	1250	5.856.071,13	5000	27.283.882,07	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5000	1250	4.129.582	1250	4.498.966,92	1250	4.552.864,16	1250	4.654.301,97	1250	4.711.333,42	1250	4.839.381,70	5000	22.547.048,46	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	5000	1250	2.172.244	1250	2.366.547,97	1250	2.394.899,01	1250	2.448.257,36	1250	2.478.257,06	1250	2.545.613,06	5000	11.860.205,40	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5000	1250	5.233.111,00	1250	5.701.204,93	1250	5.769.504,88	1250	5.898.049,45	1250	5.970.321,15	1250	6.132.587,18	5000	28.572.191,40	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5000	1250	4.486.183,00	1250	4.887.465,34	1250	4.946.016,76	1250	5.056.214,01	1250	5.118.170,29	1250	5.257.275,90	5000	24.494.049,40	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5000	1250	4.797.430	1250	5.226.552,92	1250	5.289.166,58	1250	5.407.009,21	1250	5.473.263,95	1250	5.622.020,57	5000	26.193.422,65	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2025)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030					
							TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD	TARGET KINERJA	RUPIAH APBD		
		7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5000	1250	5.763.196,00	1250	6.278.705,24	1250	6.353.923,59	1250	6.495.489,01	1250	6.575.081,43	1250	6.753.784,10	5000	31.466.395,27	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung
		7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5000	1250	4.250.140,00	1250	4.630.308,65	1250	4.685.779,35	1250	4.790.178,51	1250	4.848.874,93	1250	4.980.661,42	5000	23.205.281,44	Kecamatan Panjang	Bandar Lampung

Bandar Lampung, 09 Januari 2025

HENDRY SATRIA JAYA, SP., MM

NIP. 19780907 200604 1 008

PERUBAHAN RENCANA KERJA

KECAMATAN RAJABASA

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	√			
	2.1	Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/tahun 2025				
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
	3.1	Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, Agustus 2025
Camat Rajabasa Kota Bandar Lampung,

RACHMATSYAH, SPi
Penata Tingkat I
NIP. 19810314 200604 1 001

Diverifikasi : Agustus 2025		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST, M.Si	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida	
2	ZELDAYATI NINGSIH, SH, MM	
	Perencana Ahli Muda	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung,

DINI PURNAMAWATY, SE, M.SI.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, Agustus 2025
Camat Rajabasa Kota Bandar Lampung,

RACHMATSYAH, SPi
Penata Tingkat I
NIP. 19810314 200604 1 001

Diverifikasi : Agustus 2025		Tanda Tangan
1	**FITRI YANTI, ST, M.Si**	
	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida	
2	**ZELDAYATI NINGSIH, SH, MM**	
	Perencana Ahli Muda	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung,

DINI PURNAMAWATY, SE, M.SI.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendataan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Agustus 2025
Camat Rajabasa Kota Bandar Lampung,

RACHMATSYAH, SPI
Penata Tingkat I
NIP. 19810314 200604 1 001

Diverifikasi : Agustus 2025		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST, M.Si	
	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida	
2	ZELDAYATI NINGSIH, SH, MM	
	Perencana Ahli Muda	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung.

DINI PURNAMAWATY, SE, M.SI.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN ..... I – 1

1.1. LATAR BELAKANG ..... I – 1

1.2. LANDASAN HUKUM ..... I – 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ..... I – 3

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ..... I – 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ..... II – 1

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025..... II – 1

2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH II – 2

- TABEL 2.1. EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA KECAMATAN RAJABASA II – 3

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA ..... III – 1

- TABEL 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU 2025 KECAMATAN RAJABASA..... III – 2

BAB IV PENUTUP ..... IV – 1

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

LAMPIRAN 44

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN RAJABASA
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

LAMPIRAN 44
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Kecamatan Rajabasa adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Bappeda yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran hprogram dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Rajabasa Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;
b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Rajabasa yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Kecamatan Rajabasa Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rajabasa Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman

dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2019 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2025;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 55);
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);

19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor….Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

I.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kecamatan Rajabasa Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Rajabasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rajabasa Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Kecamatan Rajabasa dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Rajabasa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang
I.2 Landasan Hukum
I.3 Maksud dan Tujuan
I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung merupakan perubahan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Rajabasa. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan capaian Kinerja. Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, yang dijabarkan dalam 6 Program dan 13 Kegiatan. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai sampai dengan 31 Agustus 2025 pada Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 6.381.363.866,00 atau 52,52% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp 12.148.440.520,00 Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.417.551.000,00 atau 39,57% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sebesar Rp. 6.108.912.730,00 sedangkan Belanja Modal sebesar Rp. 00,00. Evaluasi kinerja dan keuangan Renja Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung sampai dengan triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.1.

2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rajabasa, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota Bandar Lampung kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Bandar Lampung;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta

pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2025 ini rencana Kerja OPD Kecamatan Rajabasa mengalami perubahan anggaran dari sebelumnya secara keseluruhan pada rencana kerja OPD Kecamatan Rajabasa yang terdiri dari 6 (Enam) Program, 13 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
e. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
i. Penyediaan Bahan Logistik
j. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

k. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

l. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

m. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

n. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

o. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a) Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan pelaksanaan

KegiatanPemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

a) Peningkatan Efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan dan kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

3.3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan

a) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

b) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

c) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

d) Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri

e) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

f) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan

Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

g) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

h) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

i) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

j) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4. Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

b) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a) fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional

b) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah

a) fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan
b) fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan

Dengan terbitnya peraturan baru yaitu Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru, selanjutnya rencana kerja Kecamatan Rajabasa juga mengalami Perubahan. Format Perubahan untuk Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang telah disesuaikan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2025 tertuang dalam Tabel 3.1.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Kecamatan Rajabasa selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 bagi seluruh jajaran Kecamatan Rajabasa juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Rajabasa dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

TABEL TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN 2026
KOTA BANDAR LAMPUNG

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (2025)		
												Target Renja PD tahun lalu (2025)		Realisasi Renja PD tahun lalu (2025)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x100%		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4) x100%
							Tolak Ukur	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan			Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	
4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						
4.05 FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																						
						KECAMATAN RAJABASA																
7	**01**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan kewilayahan**	**98**	**%**	**98**	**%**	**98**	**%**	**98**	**%**	**100.00**	**98**	**%**	**98**	**%**	**100.00**
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**98**	**%**	**98**	**%**	**98**	**%**	**98**	**%**	**100.00**	**98**	**%**	**98**	**%**	**100.00**
						Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100.00	12	Bulan	48	Bulan	66.67
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100.00	12	Bulan	48	Bulan	66.67
7	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**presentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja**	**98**	**%**	**98**	**%**	**98**	**%**	**98**	**%**	**100.00**	**98**	**%**	**98**	**%**	**100.00**
						penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	12	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100.00	2	dokumen	6	dokumen	50.00
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja	12	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100.00	2	dokumen	6	dokumen	50.00
						evaluasi kinerja perangkat daerah	jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	12	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100.00	2	dokumen	6	dokumen	50.00
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**98**	**%**	**98**	**%**	**98**	**%**	**98**	**%**	**100.00**	**98**	**%**	**98**	**%**	**100.00**
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100.00	12	Bulan	48	Bulan	66.67

1						2	Tolak Ukur	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	(7/6) x100%	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	(10/4) x100%
4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
4.05 FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																					
						KECAMATAN RAJABASA															
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100.00	12	Bulan	48	Bulan	66.67
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100.00	12	Bulan	48	Bulan	66.67
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100.00	12	Bulan	48	Bulan	66.67
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100.00	12	Bulan	48	Bulan	66.67
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100.00	12	Bulan	48	Bulan	66.67
7	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**98**	**%**	**98**	**%**	**98**	**%**	**98**	**%**	**100.00**	**98**	**%**	**98**	**%**	**100.00**
						Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	6	tahun	1	tahun	1	tahun	-	tahun	-	1	tahun	2	tahun	33.33
						Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Komputer/Note Book dan Printer Kecamatan dan Kelurahan	6	tahun	1	tahun	1	tahun	-	tahun	-	1	tahun	2	tahun	33.33
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Studio dan Komunikasi	6	tahun	1	tahun	1	tahun	-	tahun	-	1	tahun	2	tahun	33.33
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98**	**%**	**98**	**%**	**98**	**%**	**98**	**%**	**100.00**	**98**	**%**	**98**	**%**	**100.00**
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100.00	12	Bulan	48	Bulan	66.67
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100.00	12	Bulan	48	Bulan	66.67
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100.00	1	tahun	4	tahun	66.67
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100.00	1	tahun	4	tahun	66.67
						Pemeliharaan Mebel	jumlah mebeul yang terpelihara	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100.00	1	tahun	4	tahun	66.67
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100.00	1	tahun	4	tahun	66.67
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100.00	1	tahun	4	tahun	66.67

1						2	Tolak Ukur	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	(7/6) x100%	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	(10/4) x100%
4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
4.05 FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																					
						KECAMATAN RAJABASA															
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100.00	1	tahun	4	tahun	66.67
7	**01**	**02**				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
						Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	presentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100.00	1	tahun	4	tahun	66.67
						Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	presentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100.00	1	tahun	4	tahun	66.67
7	**01**	**03**				**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	peresentase pkk,lpm ,mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100.00	1	tahun	4	tahun	66.67
						Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**

1						2	Tolak Ukur	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	(7/6) x100%	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	(10/4) x100%
4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
4.05 FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																					
						KECAMATAN RAJABASA															
						Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	7	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	100.00	1	Keluarga	4	Keluarga	57.14
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	7	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	100.00	1	Keluarga	4	Keluarga	57.14
						Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	100.00	1	Keluarga	4	Keluarga	57.14
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	7	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	100.00	1	Keluarga	4	Keluarga	57.14
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	100.00	1	Keluarga	4	Keluarga	57.14
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	100.00	1	Keluarga	4	Keluarga	57.14
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	100.00	1	Keluarga	4	Keluarga	57.14
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	100.00	1	Keluarga	4	Keluarga	57.14

1						2	Tolak Ukur	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	(7/6) x100%	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	(10/4) x100%
4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
4.05 FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																					
						KECAMATAN RAJABASA															
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	100.00	1	Keluarga	4	Keluarga	57.14
						Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	100.00	1	Keluarga	4	Keluarga	57.14
7	**01**	**04**				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
						Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	presenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100.00	1	tahun	4	tahun	66.67
						harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100.00	1	tahun	4	tahun	66.67
7	**01**	**05**				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100.00	1	tahun	4	tahun	66.67
						fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Bimtek dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional oleh Babinsa/Babinkamtibmas	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100.00	1	tahun	4	tahun	66.67
7	**01**	**06**				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**
						Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100.00**

1						2	Tolak Ukur	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	(7/6) x100%	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	(10/4) x100%
4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
4.05 FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																					
						KECAMATAN RAJABASA															
						fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100.00	1	tahun	4	tahun	66.67
						fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100.00	1	tahun	4	tahun	66.67

Mengetahui,
CAMAT RAJABASA

RACHMATSYAH, S.Pi
NIP. 19810314 200604 1 001

TABEL 3.1
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN RAJABASA TAHUN 2025
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						KECAMATAN RAJABASA	KECAMATAN RAJABASA								11,859,188,229.00	12,246,123,429.00	13,904,801,520.00	KECAMATAN RAJABASA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN	UNSUR KEWILAYAHAN								11,859,188,229.00	12,246,123,429.00	13,904,801,520.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01				KECAMATAN	KECAMATAN								11,859,188,229.00	12,246,123,429.00	13,904,801,520.00	KECAMATAN RAJABASA
200	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	98%	98%	98%	98%	98%	7,226,365,680.00	7,176,794,044.00	7,250,972,135.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	98%	98%	98%	98%	14,519,582.00	14,519,238.00	14,519,238.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,909,342.00	4,909,306.00	4,909,306.00	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4,805,120.00	4,804,966.00	4,804,966.00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4,805,120.00	4,804,966.00	4,804,966.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %		100 %	100 %	100 %	6,282,278,925.00	6,164,714,075.00	6,156,694,075.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	6,169,038,229.00	6,051,473,429.00	6,051,473,429.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	113,240,696.00	113,240,646.00	105,220,646.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	98%	98%	98%	98%	39,888,465.00	42,801,964.00	39,885,526.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3,887,596.00	3,887,433.00	3,887,433.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	22,152,067.00	22,151,002.00	22,151,002.00	KECAMATAN RAJABASA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3,582,603.00	3,581,920.00	3,581,920.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5,465,209.00	5,465,171.00	5,465,171.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	990.00	2,916,438.00	0	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	31,737,270.00	85,737,270.00	42,262,730.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	19,737,270.00	69,737,270.00	30,262,730.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	12,000,000.00	16,000,000.00	12,000,000.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	95%	95%	95%	95%	626,560,000.00	698,560,000.00	774,760,000.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24,300,000.00	24,300,000.00	24,300,000.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	602,260,000.00	674,260,000.00	750,460,000.00	(berkurang Efisiensi sebesar 28.800.000 dan bertambah utang OP Kelurahan 105.000.000) KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	231,381,438.00	170,461,497.00	222,850,566.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37,020,000.00	33,670,000.00	45,772,400.00	(+utang BBM Jabatan sebesar 12.102.400 Tahun 2025) KECAMATAN RAJABASA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	144,280,000.00	123,770,000.00	163,528,600.00	(+ utang BBM Operasional Tahun 2025 sebesar 39.758.600) KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3,000,000.00	2,920,000.00	2,920,000.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37,766,438.00	700,000.00	700,000.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	9,315,000.00	9,401,497.00	9,929,566.00	(+ 528.069 Penambahan Anggaran) KECAMATAN RAJABASA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Rajabasa)	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Rajabasa)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,260,460,493.00	2,260,460,347.00	3,142,460,347.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	36,897,993.00	36,897,858.00	36,897,858.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	36,897,993.00	36,897,858.00	36,897,858.00	KECAMATAN RAJABASA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,223,562,500.00	2,223,562,489.00	3,105,562,489.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,223,562,500.00	2,223,562,489.00	3,105,562,489.00	(+utang RT 2bln sebesar 441.000.000 dan usulan RT 2bln sebesar 441.000.000) KECAMATAN RAJABASA
202	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Rajabasa	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Rajabasa	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	752,204,475.00	757,204,337.00	742,204,337.00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	682,204,475.00	752,204,337.00	737,204,337.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	682,204,475.00	752,204,337.00	737,204,337.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan	100%	100%	100%	100%	100%	70,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	7,000,000.00	500,000.00	500,000.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	7,000,000.00	500,000.00	500,000.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	7,000,000.00	500,000.00	500,000.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	7,000,000.00	500,000.00	500,000.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	7,000,000.00	500,000.00	500,000.00	KECAMATAN RAJABASA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	7,000,000.00	500,000.00	500,000.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	7,000,000.00	500,000.00	500,000.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	7,000,000.00	500,000.00	500,000.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	7,000,000.00	500,000.00	500,000.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	7,000,000.00	500,000.00	500,000.00	KECAMATAN RAJABASA
203	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Rajabasa	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Rajabasa	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	1,609,172,351.00	2,041,669,857.00	2,759,169,857.00	KECAMATAN RAJABASA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	1,609,172,351.00	2,041,669,857.00	2,759,169,857.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,584,609,920.00	2,017,107,952.00	2,734,607,952.00	(+Utang Babinsa dan Linmas 2 bln sebesar 315.000.000 dan usulan babin 2 bulan dan penambahan gaji linmas 2 bln sebesar 402.000.000) KECAMATAN RAJABASA
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24,562,431.00	24,561,905.00	24,561,905.00	KECAMATAN RAJABASA
204	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Rajabasa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Rajabasa	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4,998,110.00	4,997,422.00	4,997,422.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4,998,110.00	4,997,422.00	4,997,422.00	KECAMATAN RAJABASA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional											
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	2,499,055.00	2,498,711.00	2,498,711.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,499,055.00	2,498,711.00	2,498,711.00	KECAMATAN RAJABASA
205	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Rajabasa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Rajabasa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,998,110.00	4,997,422.00	4,997,422.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	4,998,110.00	4,997,422.00	4,997,422.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,499,055.00	2,498,711.00	2,498,711.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,499,055.00	2,498,711.00	2,498,711.00	KECAMATAN RAJABASA
	J U M L A H														**11,859,188,229.00**	**12,246,123,429.00**	**13,904,801,520.00**	

Bandar Lampung, Juli 2025

CAMAT RAJABASA

RACHMATSYAH, S.Pi
Penata Tingkat I
NIP. 19810314 200604 1 001

1,658,678,091.00

TABEL 5.1
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									667,076,019,250.00	674,066,353,650.00		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									666,026,019,842.00	674,066,353,650.00		
	1	01				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									666,026,019,842.00	674,066,353,650.00		
1	1	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		persen		98			482,233,370,736.00	475,904,728,960.00		
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas		persen		100			91,499,795.00	259,999,558.00		
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		3			31,500,000.00	109,999,837.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		1			29,999,854.00	29,999,827.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		3			29,999,941.00	119,999,894.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan Opd Yang Akuntabel		persen		100			477,163,473,250.00	471,106,725,441.00		
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan		3377			476,578,023,250.00	470,521,275,650.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		1			585,450,000.00	585,449,791.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Peningkatan Kompetensi Pegawai		persen		98			400,000,000.00	200,000,000.00		
	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Paket		1			400,000,000.00	200,000,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		persen					346,751,631.00	380,998,973.00		
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		1			10,999,043.00	9,999,734.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		1			58,000,000.00	99,999,949.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		1			10,991,467.00	9,999,542.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket		1			50,000,000.00	50,000,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Dokumen		1			51,669,000.00	49,999,748.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Laporan		1			8,250,000.00	8,000,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan		1			3,000,000.00	3,000,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							153,842,121.00	150,000,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		Unit		15			200,000,000.00	199,999,896.00		
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							200,000,000.00	199,999,896.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		Laporan		1			2,484,000,000.00	2,482,000,000.00		
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		1			300,000,000.00	250,000,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan					2,184,000,000.00	2,232,000,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor Yang Terpelihara		Unit		5			1,547,646,060.00	1,275,005,092.00		
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		10			44,930,000.00	45,000,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit		4 Unit			210,280,000.00	210,000,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit		1 Unit			28,993,919.00	20,005,092.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							1,263,442,141.00	1,000,000,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		APK PAUD APK SD APM SD APK SMP APM SMP Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini Kemampuan Literasi SMP Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan Kemampuan Literasi SD Kemampuan Numerasi SMP Kemampuan Numerasi SD		99.72 % 126.37 Angka 100 % 112.74 Angka 99.63 Angka 88.49 Angka 72.27 Angka 98.96 %		99.72 % 126.37 Angka 100 % 112.74 Angka 99.63 Angka 88.49 Angka 72.27 Angka 98.96 %			177,954,591,921.00	191,185,568,802.00		
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Kemampuan Numerasi SD		126.37 Angka 99.63 Angka		126.37 Angka 99.63 Angka			91,368,690,926.00	98,318,569,339.00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		5 Paket		5 Paket			500,000,000.00	500,000,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		360 Peserta Didik		360 Peserta Didik			298,658,559.00	Rp 298658559		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		100 Orang		100 Orang			125,000,000.00	319,999,899.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		168 Satuan Pendidikan		168 Satuan Pendidikan			150,000,000.00	10,049,999,773.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		182 Satuan Pendidikan		182 Satuan Pendidikan			77,814,499,821.00	77,094,049,980.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		13275 Paket		13275 Paket			50,000,000.00	49,999,833.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi							24,000,000.00	24,000,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK										493,828,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia							2,453,460,000.00	2,453,460,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah							302,000,000.00	854,154,996.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		17 Ruang		17 Ruang			9,651,072,546.00	6,180,418,299.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Kemampuan Literasi SMP Kemampuan Numerasi SMP Meningkatkan APM SMP Meningkatnya APK SMP		113 angka 88 angka		113 angka 88 angka			66,176,805,444.00	71,884,599,989.00		
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		5 Ruang		5 Ruang			3,546,849,000.00	2,459,399,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		5 Paket		5 Paket			500,000,000.00	500,000,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		243 Peserta Didik		243 Peserta Didik			5,700,000,000.00	15,649,999,855.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		200 Orang		200 Orang			400,022,000.00	400,022,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		200 Orang		200 Orang			122,299,812.00	319,999,899.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		45 Satuan Pendidikan		45 Satuan Pendidikan			300,000,000.00	300,000,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		138 Satuan Pendidikan		138 Satuan Pendidikan			49,378,499,821.00	49,220,199,988.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							50,000,000.00	49,999,833.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi							50,000,000.00	49,999,755.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		99339.00 Satuan Pendidikan		99339.00 Satuan Pendidikan			2,821,579,783.00	481,579,659.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		9 Ruang		9 Ruang			854,155,028.00	0.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		7250 Paket		7250 Paket			2,453,400,000.00	2,453,400,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Meningkatkan APK PAUD		72 angka		72 angka			13,147,595,551.00	13,454,199,600.00		
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		5 Satuan Pendidikan		5 Satuan Pendidikan			250,000,000.00	250,000,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		600 Satuan Pendidikan		600 Satuan Pendidikan			12,823,595,551.00	13,130,199,803.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan							50,000,000.00	50,000,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi							24,000,000.00	23,999,797.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Disalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		126Lembaga Non Formal		126Lembaga Non Formal			7,261,500,000.00	7,528,199,874.00		
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik							1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		60 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan			6,211,500,000.00	6,428,200,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		14165 Peserta Didik		14165 Peserta Didik			50,000,000.00	99,999,874.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	1	01	04			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		Kualifikasi Guru SI/D4 Tingkat pelayanan administrasi umum		88.06 %		88.06 %			5,838,057,185.00	5,688,056,852.00		
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Dilaksananya Pengelolaan Manajemen Pendataan Sertifikasi Kualifikasi Guru S1/D IV		88 Persen		88 Persen			5,838,057,185.00	5,688,056,852.00		
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1 Dokumen		1 Dokumen			250,000,000.00	99,999,847.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		5 Lporan		5 Lporan			5,588,057,185.00	5588057005 Rp		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									1,049,999,408.00			
	2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									1,049,999,408.00			
4	**2**	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi		92 jumlah		92 jumlah			699,999,256.00	699,999,256.00		
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Dilaksanakannya Pentas Seni Pengembangan Dan Pembinaan Budaya.		5 kegiatan		5 kegiatan			699,999,256.00	699,999,256.00		
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		5 Objek		5 Objek			699,999,256.00	699,999,256.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	**2**	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		Jumlah Kesenian yang di Lestarikan		5 Jumlah		5 Jumlah			275,000,243.00	512,999,957.00		
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan		1 kegiatan		1 kegiatan			275,000,243.00	512,999,957.00		
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		5 Orang		5 Orang			75,000,243.00	150,000,000.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		3 Lembaga		3 Lembaga			200,000,000.00	362,999,957.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Jumlah Sejarah yang Dilakukan Pembinaan		1 kegiatan		1 kegiatan			74,999,909.00	74,999,823.00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Cagar Budaya Yang Di Lestarikan Jumlah Sejarah Yang Dilakukan Pembinaan		8 unit 5 unit 1 kegiatan		8 unit 5 unit 1 kegiatan			74,999,909.00	74,999,823.00		
	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat							74,999,909.00	74,999,823.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						DINAS KESEHATAN									341,173,667,097.00			
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									341,173,667,097.00			
	1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									341,173,667,097.00			
7	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kesehatan** **Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**		98 %		98 %			212,928,141,709.00			
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		100 %		100 %			24,999,748.00			
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen		2 Dokumen			24,999,748.00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		"Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel "		98%		98%			112,110,092,619.00			
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1194 Orang/bulan		1194 Orang/bulan			111,907,198,719.00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		10 Dokumen		10 Dokumen			202,893,900.00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		100 %			50,000,000.00			
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang		10 Orang			50,000,000.00			DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		98 %		98 %			437,555,518.00			
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			29,994,779.00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			75,000,000.00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			17,060,763.00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			50,000,000.00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			77,499,976.00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		10 Dokumen		10 Dokumen			10,000,000.00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan		12 Laporan			28,000,000.00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan		12 Laporan			150,000,000.00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kanto		98 %		98 %			676,018,927.00			
	1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			550,000,000.00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			126,018,927.00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		98 %		98 %			20,185,000,000.00			
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			186,000,000.00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			19,999,000,000.00			DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		100%		100%			747,628,897.00			
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			47,430,000.00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		46 Unit		46 Unit			478,557,552.00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit		1 Unit			20,000,000.00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			151,753,745.00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			49,887,600.00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan							78,696,846,000.00			
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		31 unit		31 unit			78,696,846,000.00			DINAS KESEHATAN
8	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) Tingkat Prevalensi Tubercolosis per 100.000 Penduduk							125,084,953,855.00	126.125.467.888,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota		82 persen		82 persen			18,465,841,795.00	13.184.428.336,00		
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		3 Unit		3 Unit			179,535,500.00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			8,279,685,000.00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		1 Unit		1 Unit			179,786,200.00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		1 Paket		1 Paket			9,666,835,659.00	13.109.428.572,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		1 Paket		1 Paket			159,999,436.00	74.999.764,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		"Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota"		82 %		82 %			106,327,112,895.00	112.783.484.527,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		19592 Orang		19592 Orang			1,038,870,000.00	1.341.389.821,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		18702 Orang		18702 Orang			991,300,000.00	99.999.812,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		17811 Orang		17811 Orang			372,000,000.00	99.999.882,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		86512 Orang		86512 Orang			142,499,863.00	99.999.856,00		DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		155442 Orang		155442 Orang			1,064,500,000.00	679.899.875,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		754465 Orang		754465 Orang			149,999,746.00	79.999.920,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		92994 Orang		92994 Orang			150,000,000.00	45.299.903,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		200001 Orang		200001 Orang			99,999,887.00	109.999.928,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		18644 Orang		18644 Orang			1,812,506,060.00	94.995.684,00 Rp		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		1882 Orang		1882 Orang			149,999,584.00	394.399.876,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		23474 Orang		23474 Orang			3,502,760,000.00	939.550.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		28060 Orang		28060 Orang			407,300,000.00	100.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		1 Dokumen		1 Dokumen			952,286,000.00	963.018.500,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1 Dokumen		1 Dokumen			7,966,517,000.00	4.988.129.051,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen		1 Dokumen			99,999,707.00	276.639.948,00		DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1 Dokumen		1 Dokumen			908,475,000.00	576.699.959,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1 Dokumen		1 Dokumen			823,644,600.00	212.109.525,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1.00 Dokumen		1.00 Dokumen			1,552,379,097.00	1.579.634.904,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1851.00 Orang		1851.00 Orang			99,999,957.00	210.799.760,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1851.00 Orang		1851.00 Orang			40,500,000.00	0.00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen		1 Dokumen			7,104,464,036.00	4.885.350.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		1 Dokumen		1 Dokumen			49,310,091,378.00	68.310.091.252,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		1 Dokumen		1 Dokumen			90,200,000.00	175.180.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat							99,999,835.00	0.00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 Dokumen		1 Dokumen			6,011,467,000.00	7.623.137.677,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		1 Dokumen		1 Dokumen			17,118,032,900.00	16.848.186.900,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		12 Unit		12 Unit			74,998,419.00	49.999.792,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		1 Laporan		1 Laporan			116,900,000.00	74.999.792,00		DINAS KESEHATAN
						Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		1 Dokumen		1 Dokumen			124,999,802.00	75.000.000,00		DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		80 Orang		80 Orang			384,300,000.00	100.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		70 Orang		70 Orang			195,700,000.00	75.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		30 Orang		30 Orang			84,913,024.00	49.699.936,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen		1 Dokumen			951,500,000.00	752.184.932,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen		1 Dokumen			2,334,010,000.00	472.088.042,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		"tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota"		80 %		80 %			291,999,165.00	157.555.025,00		
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1 Dokumen		1 Dokumen			291,999,165.00	157.555.025,00		DINAS KESEHATAN
9	**1**	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar Persentase SDM Kesehatan dengan Kompetensi sesuai Standar		62 % 83%		62 % 83%			1,824,223,761.00	1.336.373.398,00		
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		"Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota"		82 %		82 %			313,354,820.00	74.999.942,00		
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		50 Orang		50 Orang			99,999,820.00	74.999.942,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		1 Dokumen		1 Dokumen			213,355,000.00	0.00		DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		"Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota"		82 %		82 %			1,510,868,941.00	1.261.373.456,00		
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		200 Orang		200 Orang			1,510,868,941.00	1.261.373.456,00		DINAS KESEHATAN
10	1	02	04			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar		95 %		95 %			333,331,000.00	317.854.659,00		
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase pengelolaan apotek,toko obat,toko alat kedehatan, optik dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar		100 %		100 %			63,730,000.00	142.214.659,00		
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		1 Dokumen		1 Dokumen			63,730,000.00	142.214.659,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase industri rumah tangga sesuai standar		80 %		80 %			85,387,000.00	0.00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		1 Dokumen		1 Dokumen			85,387,000.00	0.00		DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar		-		-			184,214,000.00	175.640.000,00		
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		50 Unit		50 Unit			184,214,000.00	175.640.000,00		DINAS KESEHATAN
11	1	02	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		Persentase Masyarakat ber PHBS		75 %		75 %			1,003,016,772.00	1.089.529.901,00		
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		74 %		74 %			501,499,918.00	600.499.778,00		
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen		1 Dokumen			501,499,918.00	600.499.778,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan		82 %		82 %			100,000,000.00	100.000.000,00		
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		1 Dokumen		1 Dokumen			100,000,000.00	100.000.000,00		DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan		82 Persen		82 Persen			401,516,854.00	389.030.123,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1 Dokumen		1 Dokumen			401,516,854.00	389.030.123,00		DINAS KESEHATAN
						RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO									76,098,784,063.00			
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									76,098,784,063.00			
	1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									76,098,784,063.00			
12	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Kesehatan		98%		98%			26,790,944,263.00			
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dok.Perencanaan,Penganggaran &Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		100%		100%			6,007,272.00			
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan		4 Laporan			6,007,272.00			RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		98%		98%			19,604,344,263.00			
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		90 Orang/bulan		90 Orang/bulan			19,530,904,263.00			RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen		12 Dokumen			73,440,000.00			RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tata Kelola Pelayanan Perkantoran yang Tertib Administrasi		98 %		98 %			7,180,592,728.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan			1,300,592,728.00			RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan			5,880,000,000.00			RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO
13	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		Cakupan Pelayanan BLUD		100%		100%			49,307,839,800.00			
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Pengadaan alat kesehatan e katalog dan obat bagi pasien		2 Paket		2 Paket			12,641,103,000.00			
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		1 Unit		1 Unit			11,641,103,000.00			RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		1 Paket		1 Paket			1,000,000,000.00			RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan RSUD		-		-			36,666,736,800.00			
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		12 Dokumen		12 Dokumen			36,666,736,800.00			RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO
						DINAS PEKERJAAN UMUM									281,336,178,249.00			
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									281,336,178,249.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									280,836,178,249.00			
14	**1**	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan sertta Penelitian dan Pengembangan		98 %		98 %			106,338,513,788.00			
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		100 %		100 %			175,000,000.00			
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan		4 Laporan			175,000,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		100 %		100 %			8,815,275,249.00			
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		90 Orang/bulan		90 Orang/bulan			8,240,835,249.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen		12 Dokumen			526,440,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan		1 Laporan			48,000,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		100 %			250,000,000.00			
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang		10 Orang			250,000,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		98 %		98 %			684,490,400.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			348,333,973.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			58,691,892.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			42,500,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			59,364,535.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen		1 Dokumen			15,600,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan		1 Laporan			10,000,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			150,000,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		98 %		98 %			42,226,275.00			
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		25 Unit		25 Unit			42,226,275.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		98 %		98 %			94,635,600,000.00			
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			91,020,000,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			3,615,600,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 %		98 %			1,735,921,864.00			
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2.00 Unit		2.00 Unit			42,430,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		27 Unit		27 Unit			1,639,011,864.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit		1 Unit			54,480,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
15	**1**	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenagan Kota		8.576 Ha		8.576 Ha			4,300,000,000.00			
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenagan Kab/Kota		8.576 Ha		8.576 Ha			4,300,000,000.00			
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		12.5 KM		12.5 KM			4,000,000,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	02	2.01	0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi		3 Unit		3 Unit			300,000,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
16	**1**	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**		Persentase Penduduk Berakses Air Minum Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan		-		-			20,000,000,000.00			
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penduduk Berakses Air Minum Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan		46.82 % 63.8 %		46.82 % 63.8 %			20,000,000,000.00			
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		600 Liter/Detik		600 Liter/Detik			20,000,000,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
17	**1**	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi		61,5 % 62 %		61,5 % 62 %			668,000,000.00			
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi							668,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		2 M³/Hari		2 M³/Hari			668,000,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
18	**1**	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat							13,000,000,000.00			
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat							13,000,000,000.00			
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi		3 Sistem Drainase Perkotaan		3 Sistem Drainase Perkotaan			6,000,000,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		3 Sistem Drainase Perkotaan		3 Sistem Drainase Perkotaan			7,000,000,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
19	**1**	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		Persentase Pemenuhan Gedung Kantor Pemerintah		79 %		79 %			45,000,000,000.00			
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri		79 %		79 %			45,000,000,000.00			
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		60 Dokumen		60 Dokumen			45,000,000,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
20	**1**	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk		87,09 % 1,46 Angka		87,09 % 1,46 Angka			90,529,664,461.00			
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Rasio jumlah lampu PJU terhadap panjang jalan kota Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk		87,09 % 1.46 %		87,09 % 1.46 %			90,529,664,461.00			
						Pembangunan Jalan		Panjang Jalan yang Dibangun		20.81 KM		20.81 KM			75,529,664,461.00			DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		5 Jembatan		5 Jembatan			2,500,000,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dibangun		5 Jembatan		5 Jembatan			2,500,000,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		13.45 KM		13.45 KM			10,000,000,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
21	**1**	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**		Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi		55 Angka 45 %		55 Angka 45 %			1,000,000,000.00			
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi		35 % 50 Angka		35 % 50 Angka			350,000,000.00			
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi		50 Orang		50 Orang			350,000,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		ketersediannya layanan informasi jasa konstruksi tingkat kota bandar lampung		-		-			150,000,000.00			
	1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi		Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan		1 Perangkat Pendukung		1 Perangkat Pendukung			100,000,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI		Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya		2 Orang		2 Orang			50,000,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi Rasio tenaga operator / teknisi / Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi							500,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk							300,000,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota		Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha							200,000,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									500,000,000.00			
22	**1**	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		Persentase Luas Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung Persentase Rusunawa yang Terpelihara							500,000,000.00			
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Jumlah Dokumen Pemnafaatan Rumah Ssun Umum dan/ atau Rumah Khusus Persentase luas kawasan kumuh di kota Bandar Lampung							500,000,000.00			
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		247 Dokumen		247 Dokumen			500,000,000.00			DINAS PEKERJAAN UMUM
						DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN									7,804,329,535.00			
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									7,804,329,535.00			
	1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									2,300,000,000.00			
23	**1**	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		Persentase KRK yang Terbit Persentase SLF yang Diterbitkan		100%		100%			450,000,000.00			
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan Persentase KRK yang Terbit Persentase SLF yang Terbit		100 %		100 %			450,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		20.00 Dokumen		20.00 Dokumen			450,000,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
24	**1**	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda		100 %		100 %			150,000,000.00			
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda		100 %		100 %			150,000,000.00			
	1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan		1.00 Dokumen		1.00 Dokumen			150,000,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
25	**1**	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan Persentase Ketaataan terhadap RTRW		56.2 % 4.8 %		56.2 % 4.8 %			1,700,000,000.00			
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan Persentase Ketaataan terhadap RTRW		4.8 % 56.2 %		4.8 % 56.2 %			1,500,000,000.00			
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		1.00 Dokumen		1.00 Dokumen			100,000,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota		1.00 Dokumen		1.00 Dokumen			1,400,000,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Luasan RTH publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan Persentase Ketaataan terhadap RTRW		100 %		100 %			200,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang							200,000,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									5,504,329,535.00			
26	**1**	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		98 %		98 %			5,254,329,535.00			
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		100 %		100 %			30,000,000.00			
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan		3 Laporan			30,000,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		100 %		100 %			4,474,969,535.00			
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		55 Orang/bulan		55 Orang/bulan			4,220,329,535.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			254,640,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							10,000,000.00			
	1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20 Orang		20 Orang			10,000,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		98 %		98 %			181,870,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1.00 Paket		1.00 Paket			10,000,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			40,000,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			10,000,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			20,000,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			25,000,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen		1 Dokumen			10,800,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6 Laporan		6 Laporan			66,070,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		98 %		98 %			44,000,000.00			
	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							12,000,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							32,000,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		98 %		98 %			419,000,000.00			
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							35,000,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							384,000,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		100 %		100 %			94,490,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							44,430,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							50,060,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
27	**1**	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana							150,000,000.00			
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Tersusun							100,000,000.00			
	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							100,000,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota							50,000,000.00			
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		10 Unit Rumah		10 Unit Rumah			50,000,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
28	**1**	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		Persentase RTLH yang Tertangani		83,11 %		83,11 %			100,000,000.00			
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Persentase RTLH yang Tertangani		64,14 %		64,14 %			100,000,000.00			
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		2 Laporan		2 Laporan			100,000,000.00			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									37,817,040,664.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									37,817,040,664.00			
	1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									37,817,040,664.00			
29	**1**	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan sertta Penelitian dan Pengembangan		98 %		98 %			37,602,481,208.00			
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan,Penganggarandan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas		100 %		100 %			29,411,798.00			
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Laporan		5 Laporan			29,411,798.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang akuntablel		98%		98%			7,771,600,664.00			
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		80 Orang/bulan		80 Orang/bulan			7,539,040,664.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			232,560,000.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur		100 %		100 %			50,000,000.00			
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-		-			0.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang		10 Orang			50,000,000.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar Operasional OPD		98 %		98 %			123,838,746.00			
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			5,000,000.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			24,570,445.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			2,876,327.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			25,000,000.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			17,491,974.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen		1 Dokumen			900.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1.00 Laporan		1.00 Laporan			3,000,000.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			45,000,000.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		98 %		98 %			150,000,000.00			
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-		-			150,000,000.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			0.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			0.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			0.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		98 %		98 %			28,956,000,000.00			
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			6,000,000.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			28,950,000,000.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang terpelihara		98%		98%			521,630,000.00			
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			44,430,000.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		20 Unit		20 Unit			472,200,000.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit		1 Unit			5,000,000.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-		-			0.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-		-			0.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
30	**1**	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3 Persentase Penegakan Perda		100%		100%			214,559,456.00			
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3		100%		100%			144,559,456.00			
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		1 Dokumen		1 Dokumen			24,500,000.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 Dokumen		1 Dokumen			33,059,456.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		150 Orang		150 Orang			39,000,000.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		50 Laporan		50 Laporan			39,000,000.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		1 Laporan		1 Laporan			9,000,000.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Penegakan Perda		100%		100%			70,000,000.00			
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		6 Laporan		6 Laporan			35,000,000.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12 Laporan		12 Laporan			35,000,000.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN									15,208,347,679.00			
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									15,208,347,679.00			
	1	05				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									15,208,347,679.00			
31	1	05	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamata		98 %		98 %			14,803,347,679.00			
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran		100 %		100 %			30,000,000.00			
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							15,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							15,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		12 BULAN		12 BULAN			3,641,192,679.00			
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							3,440,747,679.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							185,445,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan		1 Laporan			15,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		12BULAN		12BULAN			300,000,000.00			
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket		1 Paket			200,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							100,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		98 %		98 %			300,000,000.00			
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket		12 Paket			15,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							60,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							15,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							50,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							40,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							20,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							100,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		98 %		98 %			255,000,000.00			
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							150,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							25,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							80,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		98 %		98 %			9,112,155,000.00			
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							82,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							9,030,155,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		12BULAN		12BULAN			1,165,000,000.00			
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2 Unit		2 Unit			60,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		27 Unit		27 Unit			1,000,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit		10 Unit			5,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							100,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
32	**1**	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		80 persen		80 persen			405,000,000.00			
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase daerah rawan bencana yang dibina							325,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya							15,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							15,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran							15,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal							15,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran							15,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait							250,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Jumlah Masyarakat yang sudah mengikuti Penyuluhan dan Sosialisasi dalam Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran							80,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya							15,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya							40,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana		Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar							25,000,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									13,478,899,250.00			
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									13,478,899,250.00			
	1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									13,478,899,250.00			
33	**1**	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat							12,078,899,250.00			
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas							125,000,000.00			
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		98 %		98 %			75,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							50,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							4,312,119,250.00			
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							4,009,279,250.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							302,840,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD							270,000,000.00			
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							250,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							20,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							453,600,000.00			
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							35,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							40,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							35,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							150,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							40,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							3,600,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							150,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD							750,000,000.00			
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							150,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							300,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							300,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD							5,033,000,000.00			
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							180,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							4,853,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD							1,135,180,000.00			
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							42,430,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							950,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							42,750,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							100,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	**1**	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		Cakupan Pelayanan Bencana Daerah Kelurahan Siaga Bencana							1,400,000,000.00			
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun							150,000,000.00			
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun							150,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase daerah rawan bencana yang dibina							850,000,000.00			
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya							200,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana							100,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana							150,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun							400,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan							400,000,000.00			
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat							200,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							200,000,000.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						DINAS SOSIAL									31,398,279,070.00			
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									31,398,279,070.00			
	1	06				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									31,398,279,070.00			
35	1	06	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		98 %		98 %			4,489,025,118.00			
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas		100 %		100 %			20,500,000.00			
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen		5 Dokumen			20,500,000.00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pelayanan Administrasi Keuangan		100 %		100 %			3,695,923,321.00			
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		32 Orang/bulan		32 Orang/bulan			3,586,114,321.00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			109,809,000.00			DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		100 %		100 %			5,000,000.00			
	1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang		5 Orang			5,000,000.00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar OPD		98 %		98 %			229,753,000.00			
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			10,000,000.00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			30,000,000.00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			11,000,000.00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			6,500,000.00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1.00 Paket		1.00 Paket			12,348,000.00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen		1 Dokumen			5,515,000.00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1.00 Laporan		1.00 Laporan			4,390,000.00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			150,000,000.00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan jasa kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		98 %		98 %			411,860,670.00			
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan			99,860,670.00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			312,000,000.00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		100 %		100 %			125,988,127.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			38,622,877.00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit		4 Unit			24,365,250.00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		11 Unit		11 Unit			13,000,000.00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			50,000,000.00			DINAS SOSIAL
36	**1**	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		Peningkatan kapasitas kelembagaan sosial		84 %		84 %			19,749,414,480.00			
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Presentase pelayanan pengelolaan kelembagaan sosial		84 %		84 %			19,749,414,480.00			
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota							332,298,500.00			DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		80 Keluarga		80 Keluarga			107,115,980.00			DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Lembaga		5 Lembaga			19,160,000,000.00			DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota		15 Sertifikat		15 Sertifikat			150,000,000.00			DINAS SOSIAL
37	1	06	04			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		84 %		84 %			749,324,713.00			
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Lansia, Penyandang Cacat dan Orang Terlantar yang Tertangani		100 %		100 %			629,324,713.00			
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		50 Orang		50 Orang			141,298,500.00			DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		134 Orang		134 Orang			60,000,000.00			DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota							428,026,213.00			DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase Pelayanan Pengelolaan Rehabilitasi Sosial		50 Orang		50 Orang			120,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota		110.00 Orang		110.00 Orang			20,000,000.00			DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		0		4 Dokumen		4 Dokumen			100,000,000.00			DINAS SOSIAL
38	1	06	05			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		23 %		23 %			5,860,514,759.00			
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Pelayanan Pengelolaan Pendampingan PKH dan Data PMKS PSKS		23 %		23 %			5,860,514,759.00			
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		198 Orang		198 Orang			250,000,000.00			DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		52755 Keluarga		52755 Keluarga			1,302,000,000.00			DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		67430 Keluarga		67430 Keluarga			4,308,514,759.00			DINAS SOSIAL
39	1	06	06			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100 %		100 %			550,000,000.00			
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Pelayanan Pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial Pelayanan Pengelolaan Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial		20 Kec		20 Kec			550,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		1175 Orang		1175 Orang			250,000,000.00			DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		200 Orang		200 Orang			100,000,000.00			DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Unit		2 Unit			100,000,000.00			DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		200 Orang		200 Orang			100,000,000.00			DINAS SOSIAL
						DINAS TENAGA KERJA									5,595,097,723.00			
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									5,595,097,723.00			
	2	07				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									5,595,097,723.00			
40	2	07	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi		98.00 %		98.00 %			5,055,097,723.00			
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		100.00 %		100.00 %			80,000,000.00			
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan		2 Laporan			80,000,000.00			DINAS TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		-		-			3,825,577,723.00			
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		36 Orang/bulan		36 Orang/bulan			3,759,097,723.00			DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							66,480,000.00			DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD							465,210,000.00			
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			30,000,000.00			DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			80,000,000.00			DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			50,000,000.00			DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			35,000,000.00			DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			75,000,000.00			DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen		1 Dokumen			12,000,000.00			DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan		1 Laporan			40,000,000.00			DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			143,210,000.00			DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		98.00 %		98.00 %			152,000,000.00			
	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		47 Unit		47 Unit			47,000,000.00			DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		9 Unit		9 Unit			88,000,000.00			DINAS TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		123 Unit		123 Unit			17,000,000.00			DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		-		-			396,400,000.00			
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		-		-			60,400,000.00			DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12.00 Laporan		12.00 Laporan			336,000,000.00			DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara Umum Kantor yang disediakan		12 Bulan		12 Bulan			135,910,000.00			
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1.00 Unit		1.00 Unit			37,020,000.00			DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7.00 Unit		7.00 Unit			73,190,000.00			DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		27.00 Unit		27.00 Unit			25,700,000.00			DINAS TENAGA KERJA
41	2	07	03			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja		-		-			260,000,000.00			
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri		-		-			195,000,000.00			
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		40 Orang		40 Orang			160,000,000.00			DINAS TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		10 Lembaga		10 Lembaga			35,000,000.00			DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Meningkatnya jumlah lembaga pelatihan kerja (LPK) yang dibina		-		-			30,000,000.00			
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		50 Lembaga		50 Lembaga			30,000,000.00			DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya		20 Perusahaan		20 Perusahaan			35,000,000.00			
	2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas		20 Perusahaan		20 Perusahaan			35,000,000.00			DINAS TENAGA KERJA
42	**2**	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Rasio penduduk yang bekerja Rasio Kesempatan Kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas		78,26 Persen 4,79 Persen 95,7 Persen 94.42 %		78,26 Persen 4,79 Persen 95,7 Persen 94.42 %			70,000,000.00			
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan didalam negeri/luar negeri		75orang		75orang			35,000,000.00			
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja							35,000,000.00			DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah CPMI dan PMI yang mendapatkan peningkatkan kompetensi		-		-			35,000,000.00			
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		7 Orang		7 Orang			35,000,000.00			DINAS TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	2	07	05			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan. Persentase sengketa pengusaha - pekerja per tahun		52.32 % 52.63 % 79 %		52.32 % 52.63 % 79 %			210,000,000.00			
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan penetapan UMK dan sosialisasi KHL Kota Bandar Lampung		1 SK		1 SK			210,000,000.00			
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		12 Laporan		12 Laporan			210,000,000.00			DINAS TENAGA KERJA
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									8,238,984,913.00			
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									8,238,984,913.00			
	2	08				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									8,238,984,913.00			
44	2	08	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas		-		-			4,301,022,208.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		5 Dokumen (Renja, LKIP, LPPD, LPJ dan RKA) Dokumen		5 Dokumen (Renja, LKIP, LPPD, LPJ dan RKA) Dokumen			61,624,902.00			
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Laporan		5 Laporan			61,624,902.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD		-		-			3,714,678,528.00			
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		32 Orang/bulan		32 Orang/bulan			3,600,984,913.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			84,313,406.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan		1 Laporan			29,380,209.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		hasil terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD		100 %		100 %			24,570,000.00			
	2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		15 Orang		15 Orang			24,570,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		-		-			168,413,307.00			
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			3,655,091.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			25,398,733.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			6,941,432.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			3,975,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			23,297,426.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen		1 Dokumen			3,900,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan		1 Laporan			12,000,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			89,245,625.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		-		-			62,643,383.00			
	2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			29,618,383.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			33,025,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		-		-			169,500,000.00			
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			13,500,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			156,000,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventris Kantor yang Terpelihara		-		-			99,592,088.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			44,430,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 Unit		2 Unit			39,270,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			15,892,088.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
45	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) Persentase ARG pada belanja Langsung APBD Presentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan		-		-			1,534,999,884.00			
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		hasil peningkatan penguatan dan pengembangan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan		-		-			59,999,905.00			
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen		1 Dokumen			59,999,905.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga		-		-			1,474,999,979.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		2150 Orang		2150 Orang			1,474,999,979.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
46	2	08	03			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif		-		-			294,256,956.00			
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		-		-			101,500,000.00			
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen		1 Dokumen			101,500,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan		20 Kasus		20 Kasus			117,757,000.00			
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		25 Layanan		25 Layanan			117,757,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Peningkataan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan		-		-			74,999,956.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen		1 Dokumen			74,999,956.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
47	2	08	04			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender		-		-			1,646,999,722.00			
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender		51.67 %		51.67 %			1,646,999,722.00			
	2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Dokumen		1 Dokumen			34,999,959.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen		1 Dokumen			1,611,999,763.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
48	2	08	05			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Rasio KDRT yang Tertangani Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta		-		-			34,998,048.00			
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah terlaksananya penyusunan laporan data gender dan anak , input data simfoni PPA		-		-			34,998,048.00			
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Dokumen		1 Dokumen			34,998,048.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	2	08	06			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak Kota Bandar Lampung menjadi kota layak anak		-		-			100,000,000.00			
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak tercapainya kota bandar lampung menjadi kota layak anak		-		-			100,000,000.00			
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		37 Organisasi		37 Organisasi			100,000,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
50	2	08	07			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan		-		-			326,708,095.00			
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		terlaksananya layanan bagi anak yang memerlukan pendampingan khusus		-		-			257,688,095.00			
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		1 Orang		1 Orang			139,965,095.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		20 Orang		20 Orang			117,723,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		terlaksananya layanan bagi anak yang memerlukan pendampingan khusus		-		-			69,020,000.00			
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/		Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		1 Orang		1 Orang			69,020,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						DINAS PANGAN									8,412,151,345.00			
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									8,412,151,345.00			
	2	09				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									8,412,151,345.00			
51	2	09	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		98 %		98 %			4,302,151,345.00			
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		"Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas "		100 %		100 %			63,000,000.00			
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6.00 Dokumen		6.00 Dokumen			63,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		"Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel "		100%		100%			3,225,744,387.00			
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		32.00 Orang/bulan		32.00 Orang/bulan			3,110,744,387.00			DINAS PANGAN
	2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			100,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan		1 Laporan			15,000,000.00			DINAS PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		"Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur "		-		-			80,000,000.00			
	2	09	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1.00 Dokumen		1.00 Dokumen			30,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4.00 Orang		4.00 Orang			50,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Dasar operasional OPD		98%		98%			132,546,958.00			
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			5,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			25,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			15,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			20,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen		1 Dokumen			2,500,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan		1 Laporan			15,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			50,046,958.00			DINAS PANGAN
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		pemenuhan kebutuhan Inventaris Kantor Persentase pemenuhan kebutuhan Inventaris Kantor		98%		98%			235,000,000.00			
	2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			85,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit			50,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							100,000,000.00			DINAS PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang kebutuhan OPD		98%		98%			321,000,000.00			
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							18,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			15,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			288,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris kantor yang Terpelihara		98 %		98 %			244,860,000.00			
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			42,430,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		16.00 Unit		16.00 Unit			202,430,000.00			DINAS PANGAN
52	2	09	03			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		ketersediaan energi per kapita Ketersediaan Energi per kapita Ketersediaan Energi Per Kapita Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan Pangan Utama ketersediaan protein per kapita Ketersediaan Protein Perkapita Ketersediaan Protein Per Kapita pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah							3,535,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Ketersediaan Pangan Utama							1,825,000,000.00			
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya												
								Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		1 Laporan		1 Laporan			50,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		30 Keluarga		30 Keluarga			150,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota												
								Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota							1,425,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	03	2.01	0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota												
								Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota		1 Dokumen		1 Dokumen			50,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan												
								Informasi Harga dan Pasokan Pangan		1 Dokumen		1 Dokumen			100,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)												
								Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)		1 Dokumen		1 Dokumen			50,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Penguatan cadangan pangan pemerintah							1,400,000,000.00			
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		100 Ton		100 Ton			1,200,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota												
								Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota							200,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		PPH konsumsi		87skor		87skor			310,000,000.00			
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun												
								Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun							60,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal												
								Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		1 Laporan		1 Laporan			200,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun												
								Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun		1 Laporan		1 Laporan			50,000,000.00			DINAS PANGAN
53	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase Daerah Rawan Pangan		5 % 5.0 %		5 % 5.0 %			325,000,000.00			
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Persentase pemutakhiranpeta analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		100%		100%			75,000,000.00			
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan												
								Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan		1 Dokumen		1 Dokumen			75,000,000.00			DINAS PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		jumlah lokasi tertangani		2 kelurahan		2 kelurahan			250,000,000.00			
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota												
								Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota		1 Laporan		1 Laporan			50,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi												
								Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi							150,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota												
								Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota							50,000,000.00			DINAS PANGAN
54	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan		88 % 88 %		88 % 88 %			250,000,000.00			
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern		88 %		88 %			250,000,000.00			
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota												
								Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota							50,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota							100,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan												
								Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan							50,000,000.00			DINAS PANGAN
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan												
								Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan							50,000,000.00			DINAS PANGAN
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP									61,395,099,455.00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									61,395,099,455.00			
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									61,395,099,455.00			
55	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		98 %		98 %			57574695942,50			
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		100 %		100 %			150,000,000.00			
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan		2 Laporan			75,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan		2 Laporan			75,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		100 %		100 %			17,259,369,557.00			
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		246 Orang/bulan		246 Orang/bulan			17,014,169,557.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			220,200,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan		1 Laporan			25,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100 %		100 %			100,000,000.00			
	2	11	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai												
								Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							0.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							100,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		98 %		98 %			625,510,000.00			
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			20,010,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			100,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			50,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			212,500,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			110,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen		1 Dokumen			18,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan		1 Laporan			15,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			100,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		98 %		98 %			4,551,846,814.00			
	2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							4,120,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							201,846,814.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							230,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		98 %		98 %			22,752,100,000.00			
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan			384,100,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan			22,368,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris kantor yang terpelihara		-tahun		-tahun			12135869571,50			
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							48,400,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							11190185771,50			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							897,283,800.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
56	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten/Kota RPPLH dalam rencana Pembangunan Kab/Kota RPPLH dalam rencana pembangunan Kab/Kota yang terintegrasi RPPLH Kabupaten/Kota RPPLH Kabupaten/Kota							743,101,250.00			
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		-							243,101,250.00			
	2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota												
								Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota							243,101,250.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		KLHS Kota Bandar Lampung							500,000,000.00			
	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang												
								Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun							500,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
57	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca							646,202,500.00			
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan sarana dan Prasarana Laboratorium							396,202,500.00			
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim												
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan							146,202,500.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota												
								Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan							250,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		DIKPLHD Kota Bandar Lampung							100,000,000.00			
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan							100,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara Peningkatan Kualitas Air,Sungai dan Udara		1 Lokasi		1 Lokasi			150,000,000.00			
	2	11	03	2.03	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi												
								jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan							0.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi												
								jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan							150,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
58	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Master Plan Ruang Terbuka Hijau Master Plan Ruang Terbuka Hijau Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau Peningkatan Presentase Ruang Terbuka Hijau Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati							598102812,50			
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH							598102812,50			
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)												
								Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota							381,125,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola							216977812,50			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
59	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							100,000,000.00			
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan					100,000,000.00			
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH												
								Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan							0.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup												
								Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi							100,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan							100,000,000.00			
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan							100,000,000.00			
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup												
								Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH							100,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
61	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota							50,000,000.00			
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH							50,000,000.00			
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani							50,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
62	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase Jumlah Sampah yang terkurangi melalui 3R Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Timbulan Sampah yang Ditangani							1,582,996,950.00			
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah		Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung							1,582,996,950.00			
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan												
								Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		7 Kelompok		7 Kelompok			282,996,950.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan												
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		1 Dokumen		1 Dokumen			1,000,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah												
								Jumlah sampah yang terdaur ulang							200,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional												
								jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional							100,000,000.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									10,540,485,119.00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									10,540,485,119.00			
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									10,540,485,119.00			
63	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil							8,967,513,499.00			
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas							31,664,805.00			
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Laporan		5 Laporan			31,664,805.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan OPD yang Akuntabel Persentase Pemenuh Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		-		-			6,197,143,119.00			
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		53 Orang/bulan		53 Orang/bulan			6,040,485,119.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		5 Dokumen		5 Dokumen			156,658,000.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD Persentase Pemenuh Kebutuhan Dasar Operasional OPD		-		-			661,928,910.00			
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			14,654,535.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			183,765,880.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			22,225,279.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			4,005,000.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			194,549,400.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen		12 Dokumen			6,000,000.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan		12 Laporan			16,000,000.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan		12 Laporan			190,924,221.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
								Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 Dokumen		12 Dokumen			29,804,595.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor Pemenuh Kebutuhan Inventaris Kantor		-		-			565,796,665.00			
	2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			139,369,572.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		7 Unit		7 Unit			396,100,621.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		8 Unit		8 Unit			30,326,472.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		-		-			1,276,800,000.00			
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan			28,800,000.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan			1,248,000,000.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		-			234,180,000.00			
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			44,430,000.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 Unit		3 Unit			49,360,000.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8 Unit		8 Unit			97,390,000.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit		2 Unit			43,000,000.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
64	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) IKM Pelayanan		- -		- -			654,908,458.00			
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk		Penerapan KTP berbasis NIK		-		-			551,099,632.00			
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan												
								Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		250 Dokumen		250 Dokumen			551,099,632.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk		-		-			103,808,826.00			
	2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		20 Laporan		20 Laporan			103,808,826.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
65	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan Akta Nikah		-		-			228,555,325.00			
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan Akta Nikah Jumlah Akta Kelahiran Yang Terbit		-		-			228,555,325.00			
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil												
								Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		20 Layanan		20 Layanan			228,555,325.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
66	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update		-		-			689,507,837.00			
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK		-		-			689,507,837.00			
	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		12 Laporan		12 Laporan			231,034,070.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan												
								Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		12 Dokumen		12 Dokumen			80,187,138.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												
								Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		20 Laporan		20 Laporan			378,286,629.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									4,043,397,694.00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									4,043,397,694.00			
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									4,043,397,694.00			
67	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		98 %		98 %			3,243,397,694.00			
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		98 %		98 %			3,500,000.00			
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.00 Dokumen		1.00 Dokumen			1,000,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan		3 Laporan			2,500,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		98 %		98 %			2,876,397,694.00			
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		21 Orang/bulan		21 Orang/bulan			2,721,397,694.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			153,000,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan		2 Laporan			2,000,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		98 %		98 %			0.00			
	2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang		2 Orang			0.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		98 %		98 %			134,710,000.00			
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			70,000,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			10,000,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			10,000,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen		1 Dokumen			5,000,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			39,710,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		-		-			60,000,000.00			
	2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			15,000,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			30,000,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-		-			15,000,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		98 %		98 %			78,000,000.00			
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			78,000,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 %		98 %			90,790,000.00			
	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			44,430,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		8 Unit		8 Unit			41,360,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15 Unit		15 Unit			5,000,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
68	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri		-		-			250,000,000.00			
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri		-		-			250,000,000.00			
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa												
								Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun		-		-			150,000,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan												
								Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		-		-			100,000,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
69	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase PKK Aktif Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat		-		-			550,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga , Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)		-		-			550,000,000.00			
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat												
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		-		-			75,000,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa												
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		-		-			0.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna												
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		-		-			150,000,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa												
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			0.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga												
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		1 Dokumen		1 Dokumen			325,000,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									24,440,386,144.00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									24,440,386,144.00			
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									24,440,386,144.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		98 %		98 %			4,819,735,965.00			
	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		100 %		100 %			14,996,639.00			
	2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 laporan		4 laporan			14,996,639.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		-		-			3,546,600,298.00			
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		29 orang/bulan		29 orang/bulan			3,356,200,633.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			182,950,872.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan		1 Laporan			7,448,793.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		100 %			15,000,000.00			
	2	14	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		29 orang		29 orang			15,000,000.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		98 %		98 %			252,389,028.00			
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket		1 paket			4,878,514.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket		1 paket			54,474,722.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 paket		1 paket			4,996,629.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket		1 paket			25,000,000.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket		1 paket			109,439,163.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen		1 Dokumen			3,600,000.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			50,000,000.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		98 %		98 %			777,100,000.00			
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan			201,100,000.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			576,000,000.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		-		-			213,650,000.00			
	2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			46,000,000.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit		4 Unit			155,000,000.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 unit		5 unit			12,650,000.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
71	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun		-		-			317,599,406.00			
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		3 kegiatan		3 kegiatan			317,599,406.00			
	2	14	02	2.02	0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan												
								Jumlah Kajian Dampak Kependudukan		1 Dokumen		1 Dokumen			29,999,922.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga												
								Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya		1 Dokumen		1 Dokumen			257,599,736.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)												
								Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		1 Dokumen		1 Dokumen			29,999,748.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
72	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmeet need) Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Total Fertility Rate Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun		-		-			8,735,751,813.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		4 kegiatan		4 kegiatan			102,279,600.00			
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK												
								Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		12 Laporan		12 Laporan			19,999,793.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal												
								Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan		1 Dokumen		1 Dokumen			82,279,807.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		2 kegiatan		2 kegiatan			6,749,805,180.00			
	2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB												
								Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia		1 unit		1 unit			179,314,000.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)												
								Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		2900 orang		2900 orang			6,570,491,180.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota		4 kegiatan		4 kegiatan			885,939,809.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB												
								Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		1 Unit		1 Unit			115,000,000.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya												
								Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		12 Laporan		12 Laporan			672,339,809.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak												
								Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		12 Laporan		12 Laporan			98,600,000.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		-		-			997,727,224.00			
	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB												
								Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		1 organisasi		1 organisasi			445,998,499.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas												
								Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		1 kampung		1 kampung			551,728,725.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
73	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB		-		-			10,567,298,960.00			
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarg Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		2 kegiatan		2 kegiatan			10,480,049,454.00			
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)												
								Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)		3 Laporan		3 Laporan			19,999,497.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)												
								Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		716 kelompok		716 kelompok			5,065,999,957.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)												
								Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk		134 kelompok		134 kelompok			5,394,050,000.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		2 kegiatan		2 kegiatan			87,249,506.00			
	2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)												
								Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		3 Laporan		3 Laporan			52,249,654.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)												
								Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		1 organisasi		1 organisasi			34,999,852.00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						DINAS PERHUBUNGAN									25,871,512,049.00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									25,871,512,049.00			
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									25,871,512,049.00			
74	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		98 %		98 %			23,235,392,049.00			
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		100 %		100 %			28,500,000.00			
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6 Laporan		6 Laporan			28,500,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		100 %		100 %			13,858,012,049.00			
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		139 Orang/bulan		139 Orang/bulan			13,585,512,049.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			232,500,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan		1 Laporan			20,000,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan												
								Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen		1 Dokumen			20,000,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		98 %		98 %			203,000,000.00			
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			30,000,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			15,000,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket		2 Paket			35,000,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			73,000,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			50,000,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		98 %		98 %			173,190,000.00			
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		150 Unit		150 Unit			75,000,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20 Unit		20 Unit			98,190,000.00			DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		98 %		98 %			8,107,800,000.00			
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			355,800,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			7,752,000,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 %		98 %			864,890,000.00			
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			43,930,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		29 Unit		29 Unit			720,960,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			100,000,000.00			DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Pelayanan Angkutan Darat Persentase sarana dan Prasarana yang memenuhi standar dalam Kondisi Baik Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan		0.095 % 98 % 180 Kejadian		0.095 % 98 % 180 Kejadian			2,373,630,000.00			
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Rasio Konektivitas Nasional Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali Rasio volume lalu lintas pada jalan arteri Rasio volume lalu lintas pada jalan kolektor Tingkat Pelayanan Pada Jalan Arteri Tingkat Pelayanan Pada Jalan Kolektor		0,725 RASIO 29.25 Rasio 80 Rasio 0,40 RASIO 0.45 Rasio B tingkat pelayanan B TINGKAT PELAYANAN		0,725 RASIO 29.25 Rasio 80 Rasio 0,40 RASIO 0.45 Rasio B tingkat pelayanan B TINGKAT PELAYANAN			1,650,000,000.00			
	2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota												
								Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		1 Dokumen		1 Dokumen			50,000,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota												
								Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		2 Laporan		2 Laporan			1,600,000,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik Persentase tersediannya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,guardril) pada jalan kota dalam kondisi baik		94 % 85 %		94 % 85 %			300,000,000.00			
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Unit		1 Unit			200,000,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan												
								Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		1224 Unit		1224 Unit			100,000,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun		320000 orang/barang 320000 orang/ barang		320000 orang/barang 320000 orang/ barang			86,400,000.00			
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)												
								Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara		6 Unit		6 Unit			86,400,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) lokasi perparkiran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.		25%		25%			40,000,000.00			
	2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik												
								Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1 Dokumen		1 Dokumen			40,000,000.00			DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Uji KIR angkutan umum Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Tersediannya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji		13900 Uji 100 % 1 UNIT		13900 Uji 100 % 1 UNIT			267,230,000.00			
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		1 Unit		1 Unit			50,000,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor												
								Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1 Dokumen		1 Dokumen			154,230,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		18 Unit		18 Unit			53,000,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor												
								Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1 Laporan		1 Laporan			10,000,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Arus penumpang angkutan umum Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Meningkatnya Load Faktor angkutan umum Rasio Ijin Trayek							30,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	15	02	2.11	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
								Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen		1 Dokumen			30,000,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
76	2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Yang dijaga		1 Kejadian		1 Kejadian			262,490,000.00			
	2	15	05	2.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat pertumbuhan Perlintasan Sebidang Kereta Api Dengan Jalan Raya		20 %		20 %			20,000,000.00			
	2	15	05	2.03	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota												
								Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen		1 Dokumen			20,000,000.00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	05	2.05		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1. Tingkat Kecelakaan di pintu Perlintasan Kereta Api Yang dijaga 2. Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Bandar Lampung		5 Kejadian		5 Kejadian			242,490,000.00			
	2	15	05	2.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota												
								Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Laporan		1 Laporan			242,490,000.00			DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									9,261,784,298.00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									9,261,784,298.00			
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									8,831,782,943.00			
77	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian		98 Persen		98 Persen			5,481,782,943.00			
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		98 Persen		98 Persen			30,000,000.00			
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			15,000,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan		1 Laporan			15,000,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		100 persen		100 persen			4,414,584,298.00			
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		45 Orang/bulan		45 Orang/bulan			4,167,784,298.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			226,800,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan		1 Laporan			20,000,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 persen		100 persen			15,000,000.00			
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20 Orang		20 Orang			15,000,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		98 persen		98 persen			150,148,645.00			
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			35,000,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			15,000,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			15,000,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1.00 Paket		1.00 Paket			10,000,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen		1 Dokumen			6,000,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			69,148,645.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		100 persen		100 persen			768,000,000.00			
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			24,000,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			744,000,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		100 persen		100 persen			104,050,000.00			
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			42,430,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit		1 Unit			41,620,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit		1 Unit			5,000,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit		3 Unit			15,000,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
78	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Presentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi		95 persen 95 Persen		95 persen 95 Persen			1,750,000,000.00			
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik		95 persen		95 persen			1,750,000,000.00			
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat												
								Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		20 Komunitas		20 Komunitas			868,000,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik												
								Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		1 Permohonan		1 Permohonan			835,000,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan		20 Orang		20 Orang			47,000,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
79	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik Presentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang Mendukung Smart City dan layanan Publik Yang berfungsi Baik		0 persen 100 persen		0 persen 100 persen			1,600,000,000.00			
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikas (SIDALMENTAL)		100 persen		100 persen			1,600,000,000.00			
	2	16	03	2.02	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi												
								Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			83,426,201.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah												
								Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			30,925,614.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota												
								Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		63 Perangkat Daerah		63 Perangkat Daerah			1,485,648,185.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									190,001,355.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Data dan Infirmasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik		Ada Ada/Tidak		Ada Ada/Tidak			190,001,355.00			
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		pengembangan dan implementasi sistem informasi data statistik		Ada persen		Ada persen			190,001,355.00			
	2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral												
								Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		20 Orang		20 Orang			15,000,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral												
								Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu		95 Persentase		95 Persentase			106,600,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia												
								Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		1 Dokumen		1 Dokumen			68,401,355.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									240,000,000.00			
81	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik		95 persen		95 persen			240,000,000.00			
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunkasi Perangkat Daerah		95 persen		95 persen			240,000,000.00			
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
								Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		1 Dokumen		1 Dokumen			70,000,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		1 Laporan		1 Laporan			100,000,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
								Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		1 Perangkat Daerah		1 Perangkat Daerah			70,000,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH									5,101,935,330.00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									5,101,935,330.00			
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									5,101,935,330.00			
82	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan menengah		98 %		98 %			3,817,815,330.00			
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas		100 %		100 %			60,000,000.00			
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Laporan		5 Laporan			60,000,000.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		100 %		100 %			2,986,635,330.00			
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		26 Orang/bulan		26 Orang/bulan			2,931,935,330.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			54,700,000.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100 %		100 %			50,000,000.00			
	2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang		5 Orang			50,000,000.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD		98 %		98 %			179,400,000.00			
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			25,000,000.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			3,000,000.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			21,000,000.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			25,000,000.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen		1 Dokumen			5,400,000.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			100,000,000.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98 %		98 %			43,000,000.00			
	2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 Unit		3 Unit			20,000,000.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Unit		3 Unit			23,000,000.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD		98 %		98 %			424,000,000.00			
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan			88,000,000.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan			336,000,000.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris kantor yang terpelihara		98 %		98 %			74,780,000.00			
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			42,430,000.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 Unit		5 Unit			27,350,000.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		11 Unit		11 Unit			5,000,000.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
83	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Koperasi Aktif		47.85 %		47.85 %			70,000,000.00			
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase usaha simpan pinjam oleh kopperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi		37.50 % 37.50 %		37.50 % 37.50 %			70,000,000.00			
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota												
								Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		80 Unit Usaha		80 Unit Usaha			70,000,000.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi		0.50 %		0.50 %			50,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi		0.13%		0.13%			50,000,000.00			
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi												
								Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		30 Orang		30 Orang			50,000,000.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
85	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase fasilitasi penerbitan Sertifikat Nomor induk Koperasi (NIK) Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		5.38Persen 29.54Persen		5.38Persen 29.54Persen			205,120,000.00			
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi		1.26 %		1.26 %			205,120,000.00			
	2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota												
								Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota		50 Unit Usaha		50 Unit Usaha			205,120,000.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
86	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro Persentase BPR/LKM Aktif Persentase UKM Non BPR LKM Aktif		26.80 % 100 % 42.75 %		26.80 % 100 % 42.75 %			300,000,000.00			
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk Rasio usaha mikro yag diberikan dukungan fasilitas pelatihan		4.24 % 7.80 %		4.24 % 7.80 %			300,000,000.00			
	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro												
								Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		30 Unit Usaha		30 Unit Usaha			0.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro												
								Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		100 Unit Usaha		100 Unit Usaha			300,000,000.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro												
								Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata		100 Unit Usaha		100 Unit Usaha			0.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
87	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Usaha Mikro dan Kecil Pertumbuhan Produktivitas UMKM		8.20 % 68.50 %		8.20 % 68.50 %			659,000,000.00			
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		2.70 %		2.70 %			659,000,000.00			
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi												
								Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		30 Unit Usaha		30 Unit Usaha			659,000,000.00			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									10,825,694,191.00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									10,825,694,191.00			
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									10,825,694,191.00			
88	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal							9,736,365,455.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas							23,000,000.00			
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							23,000,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel							7,821,612,191.00			
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							7,751,452,191.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							70,160,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD							285,425,293.00			
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							65,849,764.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							10,991,946.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							58,726,826.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							4,999,891.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu							12,990,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							131,866,866.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor							713,000,000.00			
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							713,000,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD							771,000,000.00			
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							171,000,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							600,000,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara							122,327,971.00			
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							33,527,971.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							77,000,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							11,800,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
89	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Jumlah/Nilai Investasi PMA Jumlah/Nilai Investasi PMDN							150,000,000.00			
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau							150,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota												
								Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							150,000,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
90	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		PERSENTASE PROMOSI PENANAMAN MODAL							100,086,784.00			
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Promosi Investasi Daerah							100,086,784.00			
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota												
								Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota							100,086,784.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
91	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		IKM Bidang Perizinan							450,999,952.00			
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Ketepatan Waktu Pemenuhan Pelayanan Perizinan							450,999,952.00			
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik												
								Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							276,000,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha							174,999,952.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
92	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN							388,242,000.00			
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengendalian Nilai Investasi PMDN							388,242,000.00			
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya												
								Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya							58,236,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha												
								Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko							213,534,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal												
								Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha							116,472,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
							SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									11,711,541,639.00			
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									11,711,541,639.00			
	2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									11,711,541,639.00			
93	2	19	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		-		-			4,443,799,711.00			
	2	19	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		-		-			43,000,000.00			
	2	19	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
									Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 dokumen		7 dokumen			43,000,000.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-		-			3,528,986,330.00			
	2	19	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
									Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		28 orang/bulan		28 orang/bulan			3,403,986,330.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
									Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 dokumen		12 dokumen			125,000,000.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-		-			15,000,000.00			
	2	19	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
									Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-		-			15,000,000.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD							129,500,000.00			
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		-						
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-		-			40,000,000.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket		1 paket			20,000,000.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		-		-			5,000,000.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 paket		1 paket			4,500,000.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 paket		1 paket			10,000,000.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			50,000,000.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kabutuhan Inventaris Kantor							141,883,381.00			
	2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				1 laporan		1 laporan						
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							80,000,000.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 laporan		1 laporan						
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-		-			61,883,381.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD							456,000,000.00			
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		-						
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							456,000,000.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		-		-			129,430,000.00			
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-						
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							42,430,000.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 laporan		1 laporan						
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		-		-			2,000,000.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit		1 unit			85,000,000.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
94	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri							292,002,499.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		1 unit		1 unit			57,111,151.00			
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota												
								Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		4 unit		4 unit			26,956,992.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota				-		-						
								Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		-		-			0.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota												
								Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda		-		-			30,154,159.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							234,891,348.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				-		-						
								Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya							234,891,348.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
95	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi Peningkatan Prestasi Olahraga Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara		-		-			5,975,739,429.00			
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							300,000,000.00			
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				-		-						
								Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota							300,000,000.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				-		-						
								Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota		-		-			0.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi							0.00			
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah				-		-						
								Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		-		-			0.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan organisasi keolahragaan		-		-			5,000,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait												
								Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota		-		-			5,000,000,000.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				-		-			675,739,429.00			
	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan												
								Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		-		-			136,667,221.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional												
								Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		-		-			539,072,208.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
96	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan		-		-			1,000,000,000.00			
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							1,000,000,000.00			
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				-		-						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya							1,000,000,000.00			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				-		-			16,719,334,948.00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				-		-			16,719,334,948.00			
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									16,509,334,948.00			
97	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang perpustakaan dan kearsipan							5,619,838,322.00			
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja							55,000,000.00			
	2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			10,000,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Laporan		5 Laporan			45,000,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presntase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keiangan OPD yang Akuntabel		100%		100%			4,867,395,022.00			
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		39 Orang/Bulan		39 Orang/Bulan			4,727,334,948.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen		12 Dokumen			140,060,074.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		80 %		80 %			0.00			
	2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4 Orang		4 Orang			0.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		95%		95%			161,175,478.00			
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			10,000,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			34,999,745.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			14,999,359.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			20,000,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			11,096,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		7 Dokumen		7 Dokumen			10,800,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan		12 Laporan			5,000,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5 Laporan		5 Laporan			54,280,374.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		-		-			45,000,000.00			
	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit		0 Unit			25,000,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit			20,000,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			0.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan JAsa Penunjang Kebutuhan OPD		-		-			289,667,822.00			
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan			97,667,822.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan			192,000,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		inventaris kantor yang terpelihra							201,600,000.00			
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			42,430,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit		6 Unit			129,550,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		44 Unit		44 Unit			14,620,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit		2 Unit			15,000,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
98	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Rasio Pengunjung Perpustakaan							10,864,496,626.00			
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan							239,999,674.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan												
								Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		25 Perpustakaan		25 Perpustakaan			25,000,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
								Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		50 Orang		50 Orang			25,000,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan												
								Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		100 Eksemplar		100 Eksemplar			125,000,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota												
								Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		100 Eksemplar		100 Eksemplar			35,000,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik												
								Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK		3 Layanan		3 Layanan			29,999,674.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan							10,624,496,952.00			
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial												
								Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan							34,998,898.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												
								Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							10,499,999,784.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca												
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		50 Orang		50 Orang			70,000,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat												
								Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat		2 Lokus		2 Lokus			19,498,270.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
99	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan		0		0			25,000,000.00			
	2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Koleksi Budaya Etnis Nusantara di Kota Bandar Lampung		0		0			25,000,000.00			
						Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota		75 Eksemplar		75 Eksemplar			25,000,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									210,000,000.00			
100	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku							190,000,000.00			
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Kapasitas SDM Bagi Pengelola Arsip tentang Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta							75,000,000.00			
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis												
								Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan		50 Berkas		50 Berkas			60,000,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis												
								Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		120 Berkas		120 Berkas			15,000,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Tertatanya Arsip Daerahh							60,000,000.00			
	2	24	02	2.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI												
								Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI							40,000,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis												
								Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		140 Arsip		140 Arsip			20,000,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Pembinaan Secara Teknis Terhadap ASN dan Pegawai Swasta		1 Paket		1 Paket			55,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN												
								Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		54 Pengguna		54 Pengguna			35,000,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota												
								Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan		1 Laporan			20,000,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
101	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Arsip yang Teridentifikasi untuk Dimusnahkan							20,000,000.00			
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Resensi dibawah 10 Tahun							20,000,000.00			
	2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun												
								Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan		150 Berkas		150 Berkas			20,000,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		Jumlah Arsip Daerah Terselamatkan							0.00			
	2	24	03	2.03	0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan												
								Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan		0 Arsip		0 Arsip			0.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									4,987,841,179.00			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									4,987,841,179.00			
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									4,987,841,179.00			
102	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		98 %		98 %			4,657,500,342.00			
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		100 %		100 %			25,999,766.00			
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan		4 Laporan			25,999,766.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		100 %		100 %			3,463,841,179.00			
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33 Orang/bulan		33 Orang/bulan			3,339,841,179.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen		12 Dokumen			124,000,000.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		100 %			20,000,000.00			
	3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 Orang		3 Orang			20,000,000.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		98 %		98 %			190,309,958.00			
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			9,896,824.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			44,998,504.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			14,997,791.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			35,000,000.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			24,999,839.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen		12 Dokumen			5,400,000.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan		1 Laporan			5,000,000.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			50,017,000.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		98 %		98 %			60,000,000.00			
	3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		15 Unit		15 Unit			25,000,000.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Unit		3 Unit			35,000,000.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		98 %		98 %			694,200,000.00			
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			46,200,000.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			648,000,000.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 %		98 %			203,149,439.00			
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			42,430,000.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		16 Unit		16 Unit			122,320,000.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit		10 Unit			9,740,000.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			28,659,439.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
103	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Cakupan bina kelompok nelayan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Produksi Perikanan Tangkap Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman		0,032 5,71 3.505,93 3.340		0,032 5,71 3.505,93 3.340			103,998,703.00			
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya peranan nelayan kecil di bidang perikanan tangkap		2 %		2 %			43,999,859.00			
	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha												
								Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		10 Unit Usaha		10 Unit Usaha			43,999,859.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik		100 %		100 %			59,998,844.00			
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)												
								Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		1 Layanan		1 Layanan			59,998,844.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
104	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi perikanan budidaya		143.50 Ton		143.50 Ton			82,340,404.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan		2 %		2 %			35,000,000.00			
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan												
								Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		10 Kelompok		10 Kelompok			35,000,000.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya		2 %		2 %			47,340,404.00			
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
								Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		4 Unit		4 Unit			47,340,404.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
105	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Compliance (Persentase Kepatuhan) Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan		9 % 9.0 % 0 % 5 % 9 %		9 % 9.0 % 0 % 5 % 9 %			44,999,921.00			
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		Persentase cakupan kawasan yang dipantau dari kegiatan ilegal fishing dan RZKAW		5 %		5 %			44,999,921.00			
	3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota												
								Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota		1 Pelaku Usaha		1 Pelaku Usaha			44,999,921.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Angka Konsumsi Ikan		43,14 Kg/Kap/Tahun		43,14 Kg/Kap/Tahun			99,001,809.00			
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Terbitnya surat ijin usaha perikanan		17 Dok		17 Dok			31,970,000.00			
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko												
								Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko		7 Rekomendasi		7 Rekomendasi			31,970,000.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Terbitnya izin edar dan halal produk							0.00			
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen		1 Dokumen						
								Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		125000 USD		125000 USD			0.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai ekspor hasil perikanan							67,031,809.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Ton		4 Ton						
								Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							0.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Pelaku Usaha		1 Pelaku Usaha						
								Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi							67,031,809.00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						DINAS PARIWISATA									9,229,522,286.00			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									9,229,522,286.00			
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									9,229,522,286.00			
107	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penujang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)		-		-			5,879,522,286.00			
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		-		-			93,119,948.00			
	3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan		12 Laporan			93,119,948.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang akuntabel Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		-		-			4,753,613,185.00			
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		35 Orang/bulan		35 Orang/bulan			4,659,522,286.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			94,090,899.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-		-			10,000,000.00			
	3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2.00 Orang		2.00 Orang			10,000,000.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		-		-			120,381,466.00			
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			6,808,335.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			35,157,201.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			9,718,043.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			6,500,000.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			25,165,564.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen		1 Dokumen			4,000,000.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan		1 Laporan			6,000,000.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			27,032,323.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		-		-			271,355,687.00			
	3	26	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-		-			110,000,000.00			DINAS PARIWISATA
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			161,355,687.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		-		-			520,000,000.00			
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			64,000,000.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			456,000,000.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris kantor yang terpelihara Inventaris Kantor yang Terpelihara		-		-			111,052,000.00			
	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1.00 Unit		1.00 Unit			44,486,000.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 Unit		2 Unit			5,866,000.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8 Unit		8 Unit			4,000,000.00			DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			52,500,000.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		6 Unit		6 Unit			4,200,000.00			DINAS PARIWISATA
108	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase Kunjungan wisata Persentase Kunjungan Wisata PAD Sektor Pariwisata PAD SEKTOR PARIWISATA		100%		100%			658,269,917.00			
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Baru yang dikembangkan Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara		25,55 Persen 100 Persen		25,55 Persen 100 Persen			50,000,000.00			
	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota												
								Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		1 Dokumen		1 Dokumen			50,000,000.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah destinasi baru yang dikembangkan Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola		-		-			608,269,917.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												
								Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		4 Lokasi		4 Lokasi			458,269,917.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												
								Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1 Laporan		1 Laporan			150,000,000.00			DINAS PARIWISATA
109	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara Lama kunjungan Wisata Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara Lama kunjungan wisata		-		-			525,000,000.00			
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah event promosi yang diikuti Lama Kunjungan wisatawan mancanegara Lama Kunjungan wisatawan mancanegara Lama Kunjungan wisatawan Nusantara Lama Kunjungan wisatawan Nusantara		-		-			525,000,000.00			
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota												
								Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		1 Kegiatan		1 Kegiatan			118,000,000.00			DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri												
								Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		1 Promosi		1 Promosi			407,000,000.00			DINAS PARIWISATA
110	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif		-		-			60,000,000.00			
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Jumlah pelaku ekonomi kreatif Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif		-		-			60,000,000.00			
	3	26	04	2.02	0002	Pengembangan Pendidikan												
								Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan		1 Dokumen		1 Dokumen			60,000,000.00			DINAS PARIWISATA
111	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase penyelenggaraan event ekonomi kreatif Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif		100 Persen		100 Persen			2,106,730,083.00			
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah industri baru yang mendukung MICE (Jasa Usaha) Jumlah indutri baru yang mendukung MICE (jasa usaha) Jumlah SDM Pariwisata yang profesional Jumlah SDM Pariwisata yang profesional		100 Persen		100 Persen			2,106,730,083.00			
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif												
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		-		-			1,150,000,000.00			DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif												
								Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		24 Orang		24 Orang			60,000,000.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI												
								Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI		300 Orang		300 Orang			386,730,083.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata												
								Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata		50.00 Orang		50.00 Orang			450,000,000.00			DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		-		-			60,000,000.00			DINAS PARIWISATA
						DINAS PERTANIAN									13,458,887,084.00			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									13,458,887,084.00			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									13,458,887,084.00			
112	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							11,108,887,084.00			
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas							60,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan		1 Laporan			60,000,000.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel							8,258,984,013.00			
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		63 Orang/bulan		63 Orang/bulan			8,082,984,013.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			176,000,000.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							15,000,000.00			
	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang		5 Orang			15,000,000.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)							242,973,071.00			
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			25,000,000.00			DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			57,238,440.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			25,000,000.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			18,000,000.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			33,734,631.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen		1 Dokumen			9,000,000.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			75,000,000.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor							600,000,000.00			
	3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			180,000,000.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			200,000,000.00			DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							20,000,000.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit		1 Unit						
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							200,000,000.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50 Unit		50 Unit			1,422,750,000.00			
								Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD										
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			150,750,000.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				59,10 kw/ha 10 kw/ha 49,30 kw/ha 134,67 ton/tahun 5497,32 ton/tahun 1,29 kw/ha		59,10 kw/ha 10 kw/ha 49,30 kw/ha 134,67 ton/tahun 5497,32 ton/tahun 1,29 kw/ha						
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100 persen		100 persen			1,272,000,000.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									509,180,000.00			
								Inventaris Kantor Yang Terpelihara										
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Laporan		1 Laporan						
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							42,430,000.00			DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Dokumen		1 Dokumen			366,750,000.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Dokumen		1 Dokumen			100,000,000.00			DINAS PERTANIAN
113	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Produktivitas Jagung Produksi Daging Produksi Telur Produktivitas Kopi Produktivitas Padi							550,000,000.00			
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Sarana Pertanian dan Partisipasi Promosi Produk Pertanian yang Tersedia							150,000,000.00			
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian												
								Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian							150,000,000.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Bibit tanaman hias, buah-buahan, sayuran, dan tanaman perkebunan yang ditanam							400,000,000.00			
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman												
								Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman							200,000,000.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 laporan		1 laporan						
								Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		100persen		100persen			200,000,000.00			DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Jumlah Sumur Bor untuk Peningkatan Produksi Pertanian Persentase Pembangunan, Rrehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian							1,100,000,000.00			
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian yang Terpantau							250,000,000.00			
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya												
								Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya							50,000,000.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian												
								Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan		1 Unit		1 Unit			100,000,000.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian												
								Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian		1 Unit		1 Unit			100,000,000.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian							850,000,000.00			
	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya												
								Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara							350,000,000.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan												
								Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi							500,000,000.00			DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Angka Kejadian Penyakit							500,000,000.00			
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana							200,000,000.00			
	3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)												
								Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM							200,000,000.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana							300,000,000.00			
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner												
								Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner							300,000,000.00			DINAS PERTANIAN
116	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Cakupan Bina Kelompok Tani							200,000,000.00			
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Penyuluhan Pertanian yang terlaksana							200,000,000.00			
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa												
								Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya							150,000,000.00			DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian							50,000,000.00			DINAS PERTANIAN
						DINAS PERDAGANGAN									15,316,503,624.00			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									15,316,503,624.00			
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									15,316,503,624.00			
117	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		98 %		98 %			12,895,689,069.00			
	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		100 %		100 %			103,944,000.00			
	3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan		12 Laporan			103,944,000.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		-		-			9,622,645,092.00			
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		95 Orang/bulan		95 Orang/bulan			9,441,025,092.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen		12 Dokumen			181,620,000.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		100 %			20,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	30	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4 Orang		4 Orang			20,000,000.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		98%		98%			329,137,897.00			
	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			9,495,968.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			40,205,375.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			12,680,915.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			33,000,000.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			102,366,256.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		6 Dokumen		6 Dokumen			4,500,000.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			126,889,383.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		98 %		98 %			400,720,000.00			
	3	30	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		5.00 Unit		5.00 Unit			63,000,000.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		70 Unit		70 Unit			88,000,000.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20 Unit		20 Unit			142,000,000.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		10.00 Unit		10.00 Unit			107,720,000.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		98 %		98 %			1,879,643,279.00			
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan			103,643,279.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan			1,776,000,000.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		-		-			539,598,801.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			74,430,000.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 Unit		11 Unit			272,130,000.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		14 Unit		14 Unit			17,040,000.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		16.00 Unit		16.00 Unit			175,998,801.00			DINAS PERDAGANGAN
118	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Presentase Jumlah Pasar Yang Ditata		20%		20%			430,409,943.00			
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		1 Pasar		1 Pasar			250,000,000.00			
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan												
								Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		1 Unit		1 Unit			0.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		1 Unit		1 Unit			250,000,000.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		3Pelaku Usaha		3Pelaku Usaha			180,409,943.00			
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan												
								Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		1 Dokumen		1 Dokumen			70,909,943.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan												
								Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		1 Dokumen		1 Dokumen			109,500,000.00			DINAS PERDAGANGAN
119	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting		16%		16%			1,154,537,726.00			
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisonal		9Pasar		9Pasar			1,154,537,726.00			
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan												
								Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		1 Laporan		1 Laporan			154,537,726.00			DINAS PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1.00 Laporan		1.00 Laporan			1,000,000,000.00			DINAS PERDAGANGAN
120	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		60%		60%			494,207,797.00			
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti		5Kali		5Kali			494,207,797.00			
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional												
								Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha			494,207,797.00			DINAS PERDAGANGAN
121	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/ Tera Ulang		87% 87%		87% 87%			200,014,492.00			
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi Jumlah UTTP BDKT dan SN yang sudah di awasi Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang							200,014,492.00			
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang												
								Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		2100 Unit		2100 Unit			100,000,000.00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal												
								Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		190 Orang		190 Orang			100,014,492.00			DINAS PERDAGANGAN
122	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Keikutsertaan pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah							141,644,597.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online							141,644,597.00			
	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota												
								Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		20 UMKM		20 UMKM			141,644,597.00			DINAS PERDAGANGAN
						DINAS PERINDUSTRIAN									5,349,278,183.00			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									5,349,278,183.00			
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									5,349,278,183.00			
123	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian		98 %		98 %			3,784,278,183.00			
	3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasikinerja perangkat daerah yang berkualiatas		-		-			33,943,283.00			
	3	31	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			8,412,758.00			DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan		3 Laporan			25,530,525.00			DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntable		-		-			2,711,506,108.00			
	3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		20 Orang/bulan		20 Orang/bulan			2,585,278,183.00			DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen		12 Dokumen			118,700,000.00			DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan		12 Laporan			7,527,925.00			DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-		-			8,000,000.00			
	3	31	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2.00 Orang		2.00 Orang			8,000,000.00			DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional (OPD)		-		-			192,130,104.00			
	3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1.00 Paket		1.00 Paket			5,209,296.00			DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1.00 Paket		1.00 Paket			33,247,151.00			DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1.00 Paket		1.00 Paket			4,660,736.00			DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1.00 Paket		1.00 Paket			10,000,000.00			DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1.00 Paket		1.00 Paket			35,972,890.00			DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1.00 Dokumen		1.00 Dokumen			5,400,000.00			DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.00 Laporan		1.00 Laporan			97,640,031.00			DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		-		-			289,318,688.00			
	3	31	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3.00 Unit		3.00 Unit			170,000,000.00			DINAS PERINDUSTRIAN
						Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-		-			64,318,688.00			DINAS PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	31	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-		-			55,000,000.00			DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		pemenuhan jasa penujnjang kebutuhan OPD							478,000,000.00			
	3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							82,000,000.00			DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							396,000,000.00			DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		inventaris kantor yang terpelihara							71,380,000.00			
	3	31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3.00 Unit		3.00 Unit			54,770,000.00			DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8.00 Unit		8.00 Unit			4,950,000.00			DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1.00 Unit		1.00 Unit			11,660,000.00			DINAS PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Cakupan IKM yang mendapatkan Pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (incremental) Pertumbuhan Industri		-		-			1,436,000,000.00			
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Pembangunan Industri		-		-			1,436,000,000.00			
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat												
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1 Dokumen		1 Dokumen			1,436,000,000.00			DINAS PERINDUSTRIAN
125	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait Persentase jumlah hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang di keluarkan oleh Instansi Terkait		-		-			129,000,000.00			
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) Kecil dan IUI menegah yang diterbitkan		-		-			129,000,000.00			
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		1 Dokumen		1 Dokumen			129,000,000.00			DINAS PERINDUSTRIAN
						SEKRETARIAT DAERAH									116,412,852,054.00			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									116,412,852,054.00			
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH									116,412,852,054.00			
126	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase Perangkat Daerah Yang Bekinerja Baik Presentase Kebijakan Pemerintah Daerah Yang Terpublikasi Presentase OPD Yang Mengumpulkan Laporan Kinerja (LAKIP) Secara Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan Presentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap KDH/WKDH Presentase Penyusunan DOKUMEN Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tepat Waktu Tingkat pelayanan administrasi umum		98 %		98 %			89,186,913,599.00			
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu		100 %		100 %			573,999,765.00			
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 dokumen		5 dokumen			225,000,000.00			SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 laporan		4 laporan			195,000,000.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan		3 Laporan			153,999,765.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatkan adminitrasi keuangan perangkat daerah dan kinerja aparatur yang baik.		-		-			44,342,891,665.00			
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		437 orang/bulan		437 orang/bulan			43,298,401,280.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		8 dokumen		8 dokumen			397,074,546.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 dokumen		1 dokumen			467,415,889.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan		1 laporan			80,000,000.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 laporan		4 laporan			99,999,950.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas SDM ASN dan Meningkatkan Disiplin Aparatur Pemerintah		-		-			401,812,069.00			
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		7 paket		7 paket			301,000,000.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas												
								Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		2 laporan		2 laporan			25,812,069.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		50 orang		50 orang			75,000,000.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD		-		-			8,688,648,187.00			
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket		1 paket			65,217,552.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket		1 paket			320,208,068.00			SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 paket		1 paket			417,288,492.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket		1 paket			1,224,500,000.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket		1 paket			261,937,500.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 dokumen		1 dokumen			1,594,493,971.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 laporan		1 laporan			3,750,000,000.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 laporan		1 laporan			1,055,002,604.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		-		-			5,866,898,626.00			
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 unit		1 unit			2,216,898,626.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		8 unit		8 unit			2,350,000,000.00			SEKRETARIAT DAERAH
						Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		150 unit		150 unit			350,000,000.00			SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		15 unit		15 unit			950,000,000.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		-		-			15,046,000,000.00			
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan		1 laporan			4,200,000,000.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 laporan		1 laporan			355,000,000.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 laporan		1 laporan			10,491,000,000.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah terpeliharanya dengan baik		-		-			8,533,650,000.00			
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		101 unit		101 unit			3,253,540,000.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		101 unit		101 unit			200,110,000.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		120 unit		120 unit			270,000,000.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 unit		7 unit			560,000,000.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 unit		7 unit			4,250,000,000.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib		-		-			1,430,503,824.00			
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 orang/bulan		2 orang/bulan			1,430,503,824.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi		Persentasi Adanya Dokumen ABK OPD dibagi Jumlah OPD		-		-			479,366,813.00			
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan												
								Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		1 dokumen		1 dokumen			198,477,611.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana												
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1 laporan		1 laporan			143,464,132.00			SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi												
								Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		1 dokumen		1 dokumen			137,425,070.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan		-		-			3,823,142,650.00			
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan												
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		12 laporan		12 laporan			1,519,013,750.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan												
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		1 laporan		1 laporan			456,942,470.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan												
								Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		1 laporan		1 laporan			1,847,186,430.00			SEKRETARIAT DAERAH
127	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Presentase Peningkatan Adminitrasi Pemerintahan dan Kewilayahan ersentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang Terlaksana dengan Baik Persentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang Terfasilitasi Presentase Kebijakan Daerah yang telah di Sahkan, Diputuskan dan Didokumentasikan. Presentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang terlaksana dengan baik. Presentase Luas Lahan Bersertifikat Presentase Penanganan Konflik		100%		100%			24,326,173,548.00			
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan		Meningkatnya Pengelolaan Tata Pemerintahan		100 %		100 %			933,147,691.00			
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan												
								Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		2 dokumen		2 dokumen			50,049,926.00			SEKRETARIAT DAERAH
						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		3 dokumen		3 dokumen			297,598,945.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah												
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		3 dokumen		3 dokumen			585,498,820.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Meningkatnya Implementasi Kebijakan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat		-		-			20,999,999,901.00			
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual												
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		6 dokumen		6 dokumen			20,499,999,901.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial												
								Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		-		-			250,000,000.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		1 dokumen		1 dokumen			250,000,000.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Jumlah Kebijakan Daerah yang telah disahkan,diputuskan dan Didokumentasikan		-		-			1,538,382,293.00			
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah												
								Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		700 dokumen		700 dokumen			277,275,000.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum												
								Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		2 kasus		2 kasus			769,277,293.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum												
								Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		700 dokumen		700 dokumen			491,830,000.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persentase KSD yang Terfasilitasi (Terbit MoU) dibandingkan dengan usulan KSD		-		-			854,643,663.00			
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri												
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		1 dokumen		1 dokumen			314,443,887.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri												
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		1 dokumen		1 dokumen			258,320,147.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama												
								Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		1 laporan		1 laporan			281,879,629.00			SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
128	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Presentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang Presentase Paket Pengadaan yang dilakukan dengan Metode yang Kompetitif Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan PBJ. Tingkat Partisipasi OPD,Swasta dan LSM dalam pelaksanaan Evaluasi Program Pembangunan Presentase OPD yang melaporkan kegiatan secara Online melalui TEPRA tepat waktu BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik Persentase Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang		100%		100%			2,899,764,907.00			
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		100%		100%			337,113,657.00			
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD												
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		3 dokumen		3 dokumen			117,114,506.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian												
								Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		3 Laporan		3 Laporan			139,999,539.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil												
								Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		1 dokumen		1 dokumen			79,999,612.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase Laporan Penyusunan Program, Pengendalian Program Pembangunan dan Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		-		-			1,611,456,950.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan												
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		1 dokumen		1 dokumen			113,675,000.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan												
								Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		1 laporan		1 laporan			1,128,560,000.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan												
								Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		1 laporan		1 laporan			369,221,950.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentasi Jumlah Total Proyeksi Kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama		0.50%		0.50%			951,194,300.00			
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa												
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1 dokumen		1 dokumen			188,979,432.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik												
								Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		1 dokumen		1 dokumen			599,790,270.00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		5 orang		5 orang			162,424,598.00			SEKRETARIAT DAERAH
						SEKRETARIAT DPRD									104,228,310,141.00			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									104,228,310,141.00			
						SEKRETARIAT DPRD									104,228,310,141.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
129	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran		-		-			63,652,697,781.00			
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-		-			473,235,880.00			
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen		4 Dokumen			143,434,784.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			53,000,801.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.00 Dokumen		1.00 Dokumen			53,000,801.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan		3 Laporan			126,998,562.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan		2 Laporan			96,800,932.00			SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		-		-			7,953,721,048.00			
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		58 Orang/bulan		58 Orang/bulan			7,145,979,142.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12.00 Dokumen		12.00 Dokumen			405,495,783.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan		1 Laporan			78,013,546.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		16 Laporan		16 Laporan			288,874,441.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2 Dokumen		2 Dokumen			35,358,136.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian SETWAN		-		-			583,994,762.00			
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket		1 Paket			79,000,000.00			SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		30 Orang		30 Orang			504,994,762.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		-		-			2,803,041,945.00			
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			51,548,688.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			223,781,646.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			111,377,696.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			876,500,000.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			177,291,307.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen		1 Dokumen			478,299,793.00			SEKRETARIAT DPRD
						Fasilitasi Kunjungan Tamu												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan		1 Laporan			165,000,000.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			719,242,815.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengadaan Barang Milik Daerah		-		-			2,526,833,755.00			
	4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		4 Unit		4 Unit			470,004,000.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		8 Unit		8 Unit			304,330,490.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4 Unit		4 Unit			492,656,597.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		7 Unit		7 Unit			1,259,842,668.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		-		-			5,830,000,000.00			
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan		1 Laporan			25,000,000.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			693,000,000.00			SEKRETARIAT DPRD
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			5,112,000,000.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemeliharaan Barang Milik Daerah		-		-			2,039,217,244.00			
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			45,130,000.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		17 Unit		17 Unit			384,000,000.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 Unit		3 Unit			371,790,000.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			430,000,000.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			808,297,244.00			SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		-		-			38,949,291,715.00			
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD												
								Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		12 Orang/Bulan		12 Orang/Bulan			37,532,791,715.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD												
								Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		50 Paket		50 Paket			1,266,500,000.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		50 Orang		50 Orang			150,000,000.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi DPRD		-		-			2,493,361,432.00			
	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD												
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		1 Dokumen		1 Dokumen			426,000,000.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD												
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		1 Laporan		1 Laporan			48,999,680.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD												
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		1 Laporan		1 Laporan			867,808,404.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD												
								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			1,150,553,348.00			SEKRETARIAT DPRD
130	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran		-		-			40,575,612,360.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		-		-			6,258,791,145.00			
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah												
								Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		1.00 Dokumen		1.00 Dokumen			1,483,083,669.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah												
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		7 Dokumen		7 Dokumen			3,975,707,476.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan												
								Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		1.00 Dokumen		1.00 Dokumen			300,000,000.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik												
								Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		6.00 Dokumen		6.00 Dokumen			450,000,000.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD												
								Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		1 Dokumen		1 Dokumen			50,000,000.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran		-		-			4,582,083,610.00			
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS												
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		1 Dokumen		1 Dokumen			914,112,383.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS												
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1 Dokumen		1 Dokumen			913,898,430.00			SEKRETARIAT DPRD
						Pembahasan APBD												
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		1 Dokumen		1 Dokumen			912,418,585.00			SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan												
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		1 Dokumen		1 Dokumen			909,298,585.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD												
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		1 Dokumen		1 Dokumen			932,355,627.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		-		-			6,425,174,617.00			
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum												
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		2 Laporan		2 Laporan			995,926,683.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur												
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		2 Laporan		2 Laporan			905,011,232.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat												
								Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		2 Laporan		2 Laporan			1,042,429,475.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian												
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		2 Laporan		2 Laporan			949,397,308.00			SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan												
								Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		1 Dokumen		1 Dokumen			1,854,483,365.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran												
								Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		1 Dokumen		1 Dokumen			17,021,689.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah												
								Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			660,904,865.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		-		-			13,261,935,566.00			
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD												
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		1 Dokumen		1 Dokumen			50,000,103.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD												
								Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		6 Dokumen		6 Dokumen			3,550,997,423.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli												
								Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		36 Orang		36 Orang			1,728,000,000.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi												
								Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		8 Orang		8 Orang			384,000,000.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat												
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		2 Dokumen		2 Dokumen			5,989,223,330.00			SEKRETARIAT DPRD
						Penyusunan Program Kerja DPRD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		1 Dokumen		1 Dokumen			100,000,000.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD												
								Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		1 Dokumen		1 Dokumen			1,459,714,710.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		-		-			415,801,662.00			
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah												
								Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		1 Laporan		1 Laporan			100,000,000.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD												
								Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		1 Dokumen		1 Dokumen			99,999,803.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses												
								Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		3 Dokumen		3 Dokumen			215,801,859.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		-		-			1,280,746,908.00			
	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD												
								Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		1 Dokumen		1 Dokumen			400,000,000.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD												
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		1 Laporan		1 Laporan			880,746,908.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Pelaksanaan Kegiatas Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		-		-			8,351,078,852.00			
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD												
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		1 Dokumen		1 Dokumen			6,034,379,808.00			SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD												
								Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		1 Laporan		1 Laporan			50,735,652.00			SEKRETARIAT DPRD
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		1 Dokumen		1 Dokumen			2,265,963,392.00			SEKRETARIAT DPRD
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH									14,944,035,967.00			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									14,944,035,967.00			
	5	01				PERENCANAAN									14,179,035,967.00			
131	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		98 Persen		98 Persen			10,704,035,967.00			
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		100 Persen		100 Persen			225,000,000.00			
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen		2 Dokumen			50,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			30,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			30,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan		3 Laporan			55,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Laporan		6 Laporan			60,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		"Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel "		100 Persen		100 Persen			8,918,845,967.00			
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		70 Orang/Bulan		70 Orang/Bulan			8,645,845,967.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			188,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan		1 Laporan			35,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan		12 Laporan			50,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		"Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur "		80 Persen		80 Persen			100,000,000.00			
	5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
								Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen		1 Dokumen			50,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang		10 Orang			50,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		"Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD "		98 Persen		98 Persen			583,500,000.00			
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			5,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			100,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			30,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			38,500,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			100,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen		1 Dokumen			25,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan		1 Laporan			35,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			250,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		"Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor "		98 Persen		98 Persen			200,000,000.00			
	5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan			100,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		17 Unit		17 Unit			50,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan			50,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		100 Persen		100 Persen			262,000,000.00			
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			80,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			182,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 Persen		98 Persen			414,690,000.00			
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			45,430,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12 Unit		12 Unit			269,260,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		20 Unit		20 Unit			50,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			50,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		100 Persen 89,32 Persen 100 Persen		100 Persen 89,32 Persen 100 Persen			1,935,000,000.00			
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada Dokumen Ada Dokumen Ada Dokumen		Ada Dokumen Ada Dokumen Ada Dokumen			1,215,000,000.00			
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah												
								Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		2 Dokumen		2 Dokumen			200,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik												
								Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		1 Berita Acara		1 Berita Acara			120,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah												
								Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		2 Berita Acara		2 Berita Acara			120,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		2 Berita Acara		2 Berita Acara			350,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		3 Dokumen		3 Dokumen			425,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		6 Dokumen		6 Dokumen			500,000,000.00			
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota												
								Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		1 Laporan		1 Laporan			200,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah												
								Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		5 Laporan		5 Laporan			300,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung		1 Dokumen Laporan		1 Dokumen Laporan			220,000,000.00			
	5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola		1 Dokumen		1 Dokumen			70,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah												
								Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			150,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
133	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		90,98 Persen 89,88 Persen 100 Persen		90,98 Persen 89,88 Persen 100 Persen			1,540,000,000.00			
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		2 Dokumen 2 Dokumen		2 Dokumen 2 Dokumen			640,000,000.00			
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen		2 Dokumen			150,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		0 Laporan		0 Laporan			80,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan												
								Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		1 Laporan		1 Laporan			80,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen		2 Dokumen			130,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia												
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		0 Laporan		0 Laporan			100,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia												
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1 Laporan		1 Laporan			100,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekononomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		1 Dokumen 1 Dokumen		1 Dokumen 1 Dokumen			300,000,000.00			
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen		1 Dokumen			60,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1 Laporan		1 Laporan			60,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian												
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1 Laporan		1 Laporan			60,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen		1 Dokumen			40,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA												
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		1 Laporan		1 Laporan			40,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		1 Laporan		1 Laporan			40,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan dan Kewilayahan Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		1 Dokumen 1 Dokumen		1 Dokumen 1 Dokumen			600,000,000.00			
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		4 Dokumen		4 Dokumen			250,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur												
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1 Laporan		1 Laporan			70,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1 Laporan		1 Laporan			70,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen		1 Dokumen			70,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan												
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		1 Laporan		1 Laporan			70,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan												
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		1 Laporan		1 Laporan			70,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									765,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
134	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah		100 Persen 92,59 Persen		100 Persen 92,59 Persen			765,000,000.00			
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		0 Dokumen		0 Dokumen			0.00			
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan												
								Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		0 Laporan		0 Laporan			0.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		2 Dokumen		2 Dokumen			0.00			
	5	05	02	2.02	0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga												
								Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga		0 Dokumen		0 Dokumen			0.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata												
								Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		2 Dokumen		2 Dokumen			0.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		0 Dokumen		0 Dokumen			500,000,000.00			
	5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah												
								Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		0 Dokumen		0 Dokumen			250,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan												
								Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		0 Dokumen		0 Dokumen			250,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum												
								Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		0 Dokumen		0 Dokumen			0.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah		2 Dokumen		2 Dokumen			265,000,000.00			
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi												
								Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		2 Dokumen		2 Dokumen			265,000,000.00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
						BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									205,620,947,169.00			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									205,620,947,169.00			
	5	02				KEUANGAN									205,620,947,169.00			
135	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan		98 %		98 %			136,262,512,537.00			
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas		100 %		100 %			644,182,421.00			
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen		2 Dokumen			136,179,514.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			62,071,414.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			59,194,228.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			70,952,058.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			64,174,243.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan		3 Laporan			124,015,631.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Laporan		5 Laporan			127,595,333.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib		100 %		100 %			128,767,116,110.00			
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		137 Orang/bulan		137 Orang/bulan			128,031,253,479.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1240 Dokumen		1240 Dokumen			430,114,778.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		13 Laporan		13 Laporan			305,747,853.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100 %		100 %			288,037,608.00			
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket		1 Paket			100,000,000.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		7 Orang		7 Orang			188,037,608.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan dasar opeasional OPD		98 %		98 %			1,516,422,224.00			
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3 Paket		3 Paket			115,003,087.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket		4 Paket			180,006,938.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6 Paket		6 Paket			78,310,194.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7 Paket		7 Paket			78,000,000.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		9 Paket		9 Paket			188,707,290.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		6 Dokumen		6 Dokumen			38,040,000.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		10 Laporan		10 Laporan			162,000,000.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		8 Laporan		8 Laporan			276,147,935.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
								Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			400,206,780.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98 %		98 %			502,540,674.00			
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		8 Unit		8 Unit			256,323,138.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 Unit		5 Unit			246,217,536.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD		98 %		98 %			3,971,626,000.00			
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			174,810,000.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			3,796,816,000.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris kantor yang tersedia		98 %		98 %			572,587,500.00			
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			52,430,000.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		18 Unit		18 Unit			313,957,500.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit		10 Unit			78,500,000.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			127,700,000.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
136	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P Opini BPK atas LKPD		WTP Predikat 100 Persen 100 Persen		WTP Predikat 100 Persen 100 Persen			66,677,876,164.00			
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah Persentase terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah		100 % 100 %		100 % 100 %			4,680,235,738.00			
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS												
								Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		2 Dokumen		2 Dokumen			745,820,815.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS												
								Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		2 Dokumen		2 Dokumen			442,312,817.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD												
								Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		2 Dokumen		2 Dokumen			593,807,231.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD												
								Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		2 Dokumen		2 Dokumen			614,521,438.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran												
								Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		2 Dokumen		2 Dokumen			479,080,311.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan												
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		3 Dokumen		3 Dokumen			1,125,510,229.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah												
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		3 Dokumen		3 Dokumen			679,182,897.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah		100 %		100 %			5,923,573,734.00			
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah												
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		12 Dokumen		12 Dokumen			1,604,240,000.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD												
								Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		3 Dokumen		3 Dokumen			1,329,175,133.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank												
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		12 Dokumen		12 Dokumen			690,000,000.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)												
								Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		5 Laporan		5 Laporan			675,113,555.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas												
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		12 Dokumen		12 Dokumen			114,565,046.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait												
								Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		54 Dokumen		54 Dokumen			915,480,000.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan												
								Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		15 Dokumen		15 Dokumen			595,000,000.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Hasil Opini BPK atas LKPD Opini BPK atas LKPD		WTP Predikat WTP Opini		WTP Predikat WTP Opini			1,121,312,539.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran												
								Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		14 Laporan		14 Laporan			211,304,312.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah												
								Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		1 Laporan		1 Laporan			155,400,582.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota												
								Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		5 Dokumen		5 Dokumen			263,006,373.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah												
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			82,143,930.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		162 Orang		162 Orang			348,512,515.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota												
								Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina		32 Lembaga		32 Lembaga			60,944,827.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan uusan darurat		100 %		100 %			53,033,814,978.00			
	5	02	02	2.04	0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah												
								Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah		1 Laporan		1 Laporan			58,362,221.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah												
								Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		6 Laporan		6 Laporan			10,675,516,689.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan												
								Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		12 Laporan		12 Laporan			24,299,936,068.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		12 Laporan		12 Laporan			18,000,000,000.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah, dan bansos dan urusan darurat		100 % 100 % 100 %		100 % 100 % 100 %			1,918,939,175.00			
	5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah												
								Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah		4 Dokumen		4 Dokumen			217,622,541.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah												
								Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		12 Dokumen		12 Dokumen			299,428,474.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		30 Orang		30 Orang			1,401,888,160.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
137	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase penilaian dan penghapusan BMD sesuai dengan usulan OPD Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Daerah		100 % 100 %		100 % 100 %			2,680,558,468.00			
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah		100 % 100 %		100 % 100 %			2,680,558,468.00			
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga												
								Jumlah Standar Harga yang Disusun		1 Dokumen		1 Dokumen			194,208,663.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah												
								Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		2 Dokumen		2 Dokumen			130,160,873.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah												
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		1 Laporan		1 Laporan			60,112,850.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah												
								Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		1 Laporan		1 Laporan			960,659,566.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah												
								Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		1 Laporan		1 Laporan			109,038,798.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah												
								Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		20 Dokumen		20 Dokumen			436,794,647.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		2 Laporan		2 Laporan			677,484,149.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah												
								Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		1 Laporan		1 Laporan			112,098,922.00			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						BADAN PENDAPATAN DAERAH									63,885,866,160.00			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									63,885,866,160.00			
	5	02				KEUANGAN									63,885,866,160.00			
138	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan		98 %		98 %			56,609,430,077.00			
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		100 %		100 %			252,999,742.00			
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen		3 Dokumen			52,999,850.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan		3 Laporan			199,999,892.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		100 %		100 %			47,756,384,589.00			
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		193 Orang/bulan		193 Orang/bulan			46,669,122,354.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		260 Dokumen		260 Dokumen			160,763,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan		1 Laporan			226,499,235.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		11 Laporan		11 Laporan			700,000,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		100 %			100,000,000.00			
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		8 Orang		8 Orang			100,000,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		98 %		98 %			761,427,761.00			
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			19,994,305.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket		4 Paket			197,999,082.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			68,026,981.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		8 Paket		8 Paket			80,000,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket		4 Paket			145,000,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4 Dokumen		4 Dokumen			6,000,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4 Laporan		4 Laporan			75,000,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5 Laporan		5 Laporan			169,407,393.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		98 %		98 %			904,373,674.00			
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		23 Unit		23 Unit			215,506,200.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		18 Unit		18 Unit			476,408,186.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			65,959,288.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			146,500,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		100 %		100 %			4,913,376,537.00			
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan		4 Laporan			257,376,537.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan			4,656,000,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 %		98 %			1,920,867,774.00			
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			44,530,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		21 Unit		21 Unit			451,450,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		25 Unit		25 Unit			15,845,774.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4 Unit		4 Unit			129,400,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		20 Unit		20 Unit			1,279,642,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
139	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		persentase pajak daerah terhadap PAD		65.02 %		65.02 %			7,276,436,083.00			
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		persentase pajak daerah terhadap PAD		65.02 %		65.02 %			7,276,436,083.00			
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah												
								Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		2 Dokumen		2 Dokumen			904,900,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah												
								Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			214,228,480.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		2 Laporan		2 Laporan			285,080,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		1 Unit		1 Unit			822,500,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah												
								Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		10 Laporan		10 Laporan			380,500,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)												
								Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		7812 Obyek Pajak		7812 Obyek Pajak			365,000,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah												
								Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		2 Dokumen		2 Dokumen			846,000,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah												
								Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		10 Layanan		10 Layanan			150,014,026.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah												
								Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		2 Dokumen		2 Dokumen			744,299,893.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah												
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		6 Dokumen		6 Dokumen			550,000,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah												
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		231 Dokumen		231 Dokumen			657,500,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		10 Dokumen		10 Dokumen			953,410,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah												
								Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		2 Laporan		2 Laporan			100,003,684.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah												
								Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		3 Laporan		3 Laporan			303,000,000.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									8,832,686,174.00			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									8,832,686,174.00			
	5	03				KEPEGAWAIAN									8,435,874,903.00			
140	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		-		-			5,848,164,719.00			
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		100%		100%			109,678,531.00			
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen		2 Dokumen			18,094,652.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			34,314,661.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			14,999,826.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan		3 Laporan			15,999,602.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan		4 Laporan			26,269,790.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		100%		100%			4,816,176,530.00			
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang/bulan		50 Orang/bulan			4,532,686,174.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4 Dokumen		4 Dokumen			207,033,523.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
								Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			16,007,793.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan		1 Laporan			30,449,516.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan		12 Laporan			24,999,839.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen		1 Dokumen			4,999,685.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		100 %			24,949,424.00			
	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket		1 Paket			4,950,000.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		60 Orang		60 Orang			19,999,424.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuha Dasar Operasional OPD		100%		100%			281,755,767.00			
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			4,991,139.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			77,959,857.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			19,997,905.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			25,000,000.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			39,666,600.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1Dokumen		1Dokumen			5,000,000.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan		1 Laporan			10,000,000.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			99,140,266.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		98 %		98 %			84,738,804.00			
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			4,325,492.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit		10 Unit			70,546,646.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		10 Unit		10 Unit			9,866,666.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		98 %		98 %			380,000,000.00			
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			20,000,000.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			360,000,000.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan inventaris kantor yang terpelihara		100 %		100 %			150,865,663.00			
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2 Unit		2 Unit			44,430,000.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit		4 Unit			59,137,136.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit		10 Unit			24,870,000.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			15,000,000.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			4,428,527.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			3,000,000.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
141	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Struktural Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Formal		21.04 Persen 0 Jabatan 3485 Jabatan 207 Jabatan 93,91 % 39 Jabatan 4741 Jabatan 93.91 Persen 21,04 % 0 JABATAN		21.04 Persen 0 Jabatan 3485 Jabatan 207 Jabatan 93,91 % 39 Jabatan 4741 Jabatan 93.91 Persen 21,04 % 0 JABATAN			2,587,710,184.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN Pelamar Umum dan khusus, yang akan dilakukan penetapan NIP, peningkatan Status ASN, dan sumpah ASN Jumlah data sistem informasi kepegawaian ASN yang tervalidasi Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah penyelesaian data kepegawaian karpeg, karis, karsu yang di terbitkan BKN dan surat cuti ASN yang diterbitkan BKD Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang diterbitkan BKN Jumlah updating data kepegawaian yang akurat		1600 CPNS 11000 Data ASN 1 Lembaga 2000 Kartu Karpeg, Karis, Karsu dan Surat Cuti 500 SK Pensiun 11000 Data ASN		1600 CPNS 11000 Data ASN 1 Lembaga 2000 Kartu Karpeg, Karis, Karsu dan Surat Cuti 500 SK Pensiun 11000 Data ASN			593,008,470.00			
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN												
								Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		1 Dokumen		1 Dokumen			24,676,869.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK												
								Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1 Dokumen		1 Dokumen			169,585,501.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN												
								Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN		1 Laporan		1 Laporan			81,561,305.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian												
								Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		1 Dokumen		1 Dokumen			49,941,400.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN												
								Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		1 Lembaga		1 Lembaga			112,278,541.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian												
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dokumen		1 Dokumen			119,963,331.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian												
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		1 Dokumen		1 Dokumen			15,000,529.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian												
								Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Laporan		1 Laporan			20,000,994.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah ASN yang Lulus Promosi Ujian Penyesuain dan Ujian Dinas Jumlah jabatan Administrator pada instansi pemerintah Jumlah jabatan pengawas pada instansi pemerintah Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Jumlah mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober dan kenaikan gaji berkala tepat waktu		700 ASN 207 Jabatan 4741 Jabatan 3845 JABATAN 39 Jabatan 0 JABATAN 150 ASN 6250 SK Kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala ASN		700 ASN 207 Jabatan 4741 Jabatan 3845 JABATAN 39 Jabatan 0 JABATAN 150 ASN 6250 SK Kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala ASN			302,478,127.00			
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		2 Dokumen		2 Dokumen			117,498,461.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN												
								Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		1 Dokumen		1 Dokumen			104,980,299.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN												
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		1 Dokumen		1 Dokumen			79,999,367.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK) Jumlah ASN yang mendapatkan izin belajar, tugas belajar, beasiswa dan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah ASN yang mengikuti pendidkan dan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota Bandar Lampung Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural serta Sertifikasi ASN		-		-			1,526,255,642.00			
	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN												
								Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya		90 Orang		90 Orang			60,697,129.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center												
								Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		1 Dokumen		1 Dokumen			279,998,385.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN												
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		1.00 Dokumen		1.00 Dokumen			261,884,908.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN												
								Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		100 Orang		100 Orang			820,000,000.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional												
								Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional		90 Orang		90 Orang			46,075,718.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional												
								Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir		250 Orang		250 Orang			19,599,751.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional												
								Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		12 Laporan		12 Laporan			37,999,751.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN Jumlah penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN Jumlah SKP ASN Kota Bandar Lampung yang mendapatkan nilai baik pada aplikasi e-kinerja		-		-			165,967,945.00			
						Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 Dokumen		1 Dokumen			30,999,623.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur												
								Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		1 Dokumen		1 Dokumen			44,994,536.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN												
								Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		60 Orang		60 Orang			34,995,961.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN												
								Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		1 Laporan		1 Laporan			39,984,562.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai												
								Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani		1 Dokumen		1 Dokumen			14,993,263.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									396,811,271.00			
142	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase CASN yang Lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum		-		-			396,811,271.00			
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik Persentase CASN yang lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum		-		-			396,811,271.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan												
								Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		1 Laporan		1 Laporan			4,999,789.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan												
								Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama		1 Dokumen		1 Dokumen			391,811,482.00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						INSPEKTORAT									21,462,821,244.00			
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									21,462,821,244.00			
						INSPEKTORAT DAERAH									21,462,821,244.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu		100 %		100 %			16,695,357,109.00			
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		100 %		100 %			142,640,858.00			
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen		6 Dokumen			48,497,033.00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6 Laporan		6 Laporan			94,143,825.00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		-		-			14,518,970,226.00			
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		79.00 Orang/bulan		79.00 Orang/bulan			14,342,821,244.00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		5.00 Dokumen		5.00 Dokumen			125,388,996.00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		6.00 Laporan		6.00 Laporan			50,759,986.00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		100 %			520,967,052.00			
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1.00 Paket		1.00 Paket			45,000,000.00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		83.00 Orang		83.00 Orang			243,467,052.00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		83.00 Orang		83.00 Orang			232,500,000.00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		98 %		98 %			788,218,973.00			
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			15,994,573.00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			70,799,160.00			INSPEKTORAT
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			36,000,000.00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			64,227,490.00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen		1 Dokumen			21,600,000.00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan		1 Laporan			38,000,000.00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			541,597,750.00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		98 %		98 %			110,000,000.00			
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		25 Unit		25 Unit			40,000,000.00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20 Unit		20 Unit			70,000,000.00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		98 %		98 %			265,000,000.00			
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan			25,000,000.00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan			240,000,000.00			INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 %		98 %			349,560,000.00			
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			47,430,000.00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7 Unit		7 Unit			239,640,000.00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		72 Unit		72 Unit			52,490,000.00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		215 Unit		215 Unit			10,000,000.00			INSPEKTORAT
144	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Persentase Tindak Lanjut Temuan		-		-			2,599,536,221.00			
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD		-		-			2,242,041,489.00			
						Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		85.00 Laporan		85.00 Laporan			1,229,998,302.00			INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah												
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		13 Laporan		13 Laporan			329,999,697.00			INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja												
								Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		11 Laporan		11 Laporan			369,999,831.00			INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan												
								Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		4 Laporan		4 Laporan			139,999,962.00			INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal												
								Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		1 Kesepakatan		1 Kesepakatan			22,044,202.00			INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP												
								Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		3 Dokumen		3 Dokumen			149,999,495.00			INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Presentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		90 %		90 %			357,494,732.00			
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah												
								Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		5 Laporan		5 Laporan			19,796,279.00			INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu												
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		35 Laporan		35 Laporan			337,698,453.00			INSPEKTORAT
145	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP		85 % 80 Persen		85 % 80 Persen			2,167,927,914.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi		Presentase Pendampingan dan Asistensi		85 %		85 %			2,167,927,914.00			
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah												
								Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		10.00 perangkat daerah		10.00 perangkat daerah			182,499,793.00			INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi												
								Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		5.00 perangkat daerah		5.00 perangkat daerah			45,999,964.00			INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi												
								Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		6.00 Kegiatan		6.00 Kegiatan			1,925,448,513.00			INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas												
								Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		52.00 perangkat daerah		52.00 perangkat daerah			13,979,644.00			INSPEKTORAT
						KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT									12,176,960,119.00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									12,176,960,119.00			
	7	01				KECAMATAN									12,176,960,119.00			
146	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan		98 %		98 %			6,728,058,947.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas		100 %		100 %			19,321,849.00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			6,603,727.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan		1 Laporan			6,277,782.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		1 Laporan			6,440,340.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		100 %		100 %			5,481,560,119.00			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		49 Orang/bulan		49 Orang/bulan			5,380,810,119.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			100,750,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		95%		95%			62,363,965.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			4,356,115.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			19,383,593.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			11,624,257.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			20,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			7,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		100%		100%			1,019,270,926.00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			38,620,926.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			980,650,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 %		98 %			145,542,088.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			37,020,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit		1 Unit			106,692,088.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 Unit		3 Unit			1,830,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
147	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Tanjung Karang Pusat)		100 Persen		100 Persen			2,904,031,467.00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan		100Persen		100Persen			33,395,018.00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan		1 Laporan			33,395,018.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan		100Persen		100Persen			2,870,636,449.00			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		5 Laporan		5 Laporan			2,870,636,449.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
148	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Tanjung Karang Pusat		85 Persen		85 Persen			649,495,558.00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		90 %		90 %			579,495,558.00			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			579,495,558.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan		90 Persen		90 Persen			70,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1 Keluarga		1 Keluarga			7,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1 Keluarga		1 Keluarga			7,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1 Keluarga		1 Keluarga			7,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		1 Keluarga		1 Keluarga			7,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		1 Keluarga		1 Keluarga			7,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1 Keluarga		1 Keluarga			7,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1 Keluarga		1 Keluarga			7,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		1 Keluarga		1 Keluarga			7,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		1 Keluarga		1 Keluarga			7,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		1 Keluarga		1 Keluarga			7,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Tanjung Karang Pusat		100Persen		100Persen			1,893,391,047.00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan		100 Persern		100 Persern			1,893,391,047.00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			1,870,394,856.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan		1 Laporan			22,996,191.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
150	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat		100 Persen		100 Persen			99,155.00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan		100Persen		100Persen			99,155.00			
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
							SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		1 Orang		1 Orang			495,775.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
									Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen			495,775.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
151	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat		100 Persen		100 Persen			99,155.00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan		100Persen		100Persen			99,155.00			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
									Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			495,775.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
									Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			495,775.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
						KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT										11,856,174,142.00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN										11,856,174,142.00			
	7	01				KECAMATAN										11,856,174,142.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
152	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan		98 %		98 %			6,482,819,752.00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas		98 %		98 %			5,771,523.00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			1,923,841.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			1,923,841.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		1 Laporan			1,923,841.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		98 %		98 %			5,537,768,452.00			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		75 Orang/bulan		75 Orang/bulan			5,447,524,142.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			90,244,310.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98 %		98 %			50,229,212.00			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			3,202,880.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			15,385,209.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			7,523,739.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			10,375,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			3,492,384.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			10,250,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98 %		98 %			11,547,753.00			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			11,547,753.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		98 %		98 %			674,050,000.00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			32,500,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			641,550,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 %		98 %			203,452,812.00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			40,798,692.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7 Unit		7 Unit			79,438,692.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		10 Unit		10 Unit			1,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2 Unit		2 Unit			5,500,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			62,145,428.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 Unit		7 Unit			14,570,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
153	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Tanjung Karang Barat)		100 %		100 %			2,715,666,247.00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan		100 %		100 %			35,637,095.00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		12 Laporan		12 Laporan			35,637,095.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 %		100 %			2,680,029,152.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			2,680,029,152.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
154	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Tanjung Karang Barat		100 %		100 %			835,137,095.00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan		100 %		100 %			802,137,095.00			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			802,137,095.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan		100 %		100 %			33,000,000.00			
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1750 Keluarga		1750 Keluarga			3,300,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1750 Keluarga		1750 Keluarga			3,300,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1750 Keluarga		1750 Keluarga			3,300,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		1750 Keluarga		1750 Keluarga			3,300,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		1750 Keluarga		1750 Keluarga			3,300,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1750 Keluarga		1750 Keluarga			3,300,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1750 Keluarga		1750 Keluarga			3,300,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		1750 Keluarga		1750 Keluarga			3,300,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		1750 Keluarga		1750 Keluarga			3,300,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		1750 Keluarga		1750 Keluarga			3,300,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
155	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Tanjung Karang Barat		100Persen		100Persen			1,812,858,304.00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan		100 Persern		100 Persern			1,812,858,304.00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			1,789,029,152.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan		1 Laporan			23,829,152.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
156	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Tanjung Karang Barat		100 %		100 %			5,096,372.00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan		100 %		100 %			5,096,372.00			
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		1 Orang		1 Orang			2,798,186.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen			2,298,186.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
157	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Barat		100 %		100 %			4,596,372.00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan		100 %		100 %			4,596,372.00			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			2,298,186.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			2,298,186.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
						KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR									9,576,543,542.00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									9,576,543,542.00			
	7	01				KECAMATAN									9,576,543,542.00			
158	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan		98%		98%			5,481,688,294.00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas		98%		98%			6,498,519.00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			1,999,636.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan		1 Laporan			2,499,682.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		1 Laporan			1,999,201.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		98 %		98 %			4,462,393,542.00			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		38 Orang/bulan		38 Orang/bulan			4,384,393,542.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			78,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98%		98%			68,971,310.00			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			4,998,561.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			11,125,171.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			6,847,793.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket			30,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			5,999,785.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			10,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98 %		98 %			16,973,288.00			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			973,288.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			15,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			1,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		95%		95%			729,370,000.00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			23,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			706,370,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 %		98 %			197,481,635.00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			37,020,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit		10 Unit			118,022,400.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		3 Unit		3 Unit			3,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 Unit		3 Unit			4,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			9,999,235.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			25,440,000.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
159	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Tanjung Karang Timur)		100 %		100 %			2,129,710,416.00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan		100 %		100 %			2,129,710,416.00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan		1 Laporan			27,239,746.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen			2,102,470,670.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
160	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Tanjung Karang Timur		85 Persen		85 Persen			477,348,474.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		90 %		90 %			427,349,804.00			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			427,349,804.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan		100 %		100 %			49,998,670.00			
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1250 Keluarga		1250 Keluarga			4,999,867.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1250 Keluarga		1250 Keluarga			4,999,867.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		1250 Keluarga		1250 Keluarga			4,999,867.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		1250 Keluarga		1250 Keluarga			4,999,867.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1250 Keluarga		1250 Keluarga			4,999,867.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		1250 Keluarga		1250 Keluarga			4,999,867.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		1250 Keluarga		1250 Keluarga			4,999,867.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		1250 Keluarga		1250 Keluarga			4,999,867.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		1250 Keluarga		1250 Keluarga			4,999,867.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		1250 Keluarga		1250 Keluarga			4,999,867.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
161	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Tanjung Karang Timur		100Persen		100Persen			1,473,797,786.00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan		100 Persern		100 Persern			1,473,797,786.00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		0 Laporan		0 Laporan			1,449,049,501.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan		1 Laporan			24,748,285.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
162	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Tanjung Karang Timur		100 Persen		100 Persen			6,999,286.00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 Persen		100 Persen			6,999,286.00			
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		1 Orang		1 Orang			3,999,463.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen			2,999,823.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Timur		100 %		100 %			6,999,286.00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan		100%		100%			6,999,286.00			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			3,999,463.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			2,999,823.00			KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
						KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA									11,264,188,245.00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									11,264,188,245.00			
	7	01				KECAMATAN									11,264,188,245.00			
164	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan		98 %		98 %			5,595,254,185.00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan		72 Bulan		72 Bulan			4,473,711.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			1,493,312.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan		1 Laporan			1,499,619.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		1 Laporan			1,480,780.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan		100 %		100 %			4,713,038,245.00			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang/bulan		50 Orang/bulan			4,593,038,245.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			120,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan		1 Paket		1 Paket			128,945,254.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			11,955,181.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			10,395,537.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			6,607,216.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			76,500,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			3,487,320.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			20,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan		98 %		98 %			76,300,000.00			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 Unit		3 Unit			76,300,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan		95%		95%			480,200,000.00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			29,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			451,200,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan		98 %		98 %			192,296,975.00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			40,030,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit		10 Unit			112,790,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		3 Unit		3 Unit			3,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 Unit		3 Unit			3,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			1,296,975.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 Unit		7 Unit			32,180,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
165	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan		100 %		100 %			3,077,994,224.00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan		100 %		100 %			29,998,672.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan		1 Laporan			29,998,672.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan												
								persentase penyelanggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			3,047,995,552.00			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			3,047,995,552.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
166	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Teluk Betung Utara		90 %		90 %			743,999,503.00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		presentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		1 Laporan		1 Laporan			683,999,503.00			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			683,999,503.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan		100%		100%			60,000,000.00			
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
167	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Teluk Betung Utara		100Persen		100Persen			1,840,909,727.00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan		100 Persern		100 Persern			1,840,909,727.00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			1,817,409,764.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan		1 Laporan			23,499,963.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
168	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Presentase penyelenggaran urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan dikecamtaan		100 %		100 %			3,030,968.00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		persentase penyelanggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan		72 bulan		72 bulan			3,030,968.00			
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		1 Orang		1 Orang			1,531,149.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen			1,499,819.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
169	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Utara		100 %		100 %			2,999,638.00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan		72 Dokumen		72 Dokumen			2,999,638.00			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			1,499,819.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			1,499,819.00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
						KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT									8,499,703,024.00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									8,499,703,024.00			
	7	01				KECAMATAN									8,499,703,024.00			
170	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan		98%		98%			4,464,943,330.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja,		98%		98%			12,776,524.00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			4,258,854.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan		1 Laporan			4,258,835.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		1 Laporan			4,258,835.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		100 %		100 %			3,599,613,024.00			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								0		29 Orang		29 Orang			3,522,553,024.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			77,060,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98%		98%			65,610,800.00			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			7,829,134.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			18,985,028.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			7,592,462.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			13,100,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			11,837,337.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			6,266,839.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98 %		98 %			31,732,967.00			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			6,825,544.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			11,526,807.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			13,380,616.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		95%		95%			561,840,000.00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			24,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			537,840,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 %		98 %			193,370,015.00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			39,020,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit		10 Unit			120,810,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		5 Unit		5 Unit			11,040,015.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 Unit		3 Unit			10,790,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			11,710,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			0.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
171	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Teluk Betung Barat)		100 %		100 %			1,988,297,660.00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan		100 %		100 %			26,112,946.00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan		1 Laporan			26,112,946.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 %		100 %			1,962,184,714.00			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			1,962,184,714.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
172	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Teluk Betung Barat		85 Persen		85 Persen			623,272,488.00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		90 %		90 %			573,272,488.00			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			573,272,488.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan		100%		100%			50,000,000.00			
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		5 Keluarga		5 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		5 Keluarga		5 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		5 Keluarga		5 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		5 Keluarga		5 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		5 Keluarga		5 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		5 Keluarga		5 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		5 Keluarga		5 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		5 Keluarga		5 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		5 Keluarga		5 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		5 Keluarga		5 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Teluk Betung Barat		100Persen		100Persen			1,395,156,751.00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan		100 Persern		100 Persern			1,395,156,751.00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			1,370,156,869.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan		1 Laporan			24,999,882.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
174	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Teluk Betung Barat		100 Persen		100 Persen			11,260,017.00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 Persen		100 Persen			11,260,017.00			
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		20 Orang		20 Orang			5,262,082.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen			5,997,935.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
175	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Barat		100 %		100 %			16,772,778.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase fasilitasi,rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan		72 Dokumen		72 Dokumen			16,772,778.00			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			10,978,998.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			5,793,780.00			KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
						KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN									10,430,529,816.00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									10,430,529,816.00			
	7	01				KECAMATAN									10,430,529,816.00			
176	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan		98%		98%			5,333,109,965.00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		98%		98%			2,100,459.00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			700,153.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan		1 Laporan			700,153.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		1 Laporan			700,153.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		100 %		100 %			4,161,629,816.00			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		27 Orang/bulan		27 Orang/bulan			4,049,879,816.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			111,750,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98%		98%			103,224,848.00			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			10,632,850.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			36,874,254.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket		3 Paket			16,014,207.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			24,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket		2 Paket			15,703,537.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		98 %		98 %			120,618.00			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			29,368.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 Unit		6 Unit			50.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			4,125.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		98%		98%			855,180,000.00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			33,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			822,180,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris kantor yang terpelihara		98 %		98 %			210,854,224.00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			37,020,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit		1 Unit			144,080,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		18 Unit		18 Unit			6,570,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit		3 Unit			13,184,224.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		24 Unit		24 Unit			10,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
177	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Teluk Betung Selatan)		100 %		100 %			2,759,158,321.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		persentase koordinasi penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan		100%		100%			29,087,412.00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan		1 Laporan			29,087,412.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan		1 laporan		1 laporan			2,730,070,909.00			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			2,730,070,909.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
178	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Teluk Betung Selatan		85 Persen		85 Persen			555,890,040.00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		90 %		90 %			495,886,180.00			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			495,886,180.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		presentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		1500 keluarga		1500 keluarga			60,003,860.00			
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,386.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,386.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,386.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,386.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,386.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,386.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,386.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,386.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,386.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,386.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
179	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Teluk Betung Selatan		100Persen		100Persen			1,777,768,604.00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan		100 Persern		100 Persern			1,777,768,604.00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			1,755,153,832.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan		1 Laporan			22,614,772.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
180	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan		100 %		100 %			2,301,391.00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan		100 %		100 %			2,301,391.00			
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		20 Orang		20 Orang			1,150,800.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen			1,150,591.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
181	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan		100%		100%			2,301,495.00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan di tingkat kecamatan		100%		100%			2,301,495.00			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			1,151,427.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			1,150,068.00			KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
						KECAMATAN KEDATON									11,433,900,701.00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									11,433,900,701.00			
	7	01				KECAMATAN									11,433,900,701.00			
182	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		"Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan "		98%		98%			6,242,309,108.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja,		98%		98%			19,149,319.00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			19,149,319.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		98%		98%			5,050,140,701.00			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang/bulan		50 Orang/bulan			5,050,140,701.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98%		98%			75,022,231.00			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			9,612,820.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			17,941,589.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			12,648,534.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			20,000,000.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			10,602,916.00			KECAMATAN KEDATON
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			4,216,372.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98 %		98 %			27,528,862.00			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			14,523,300.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			12,500,000.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			505,562.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		95%		95%			817,400,000.00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			23,000,000.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			794,400,000.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 %		98 %			253,067,995.00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			39,020,000.00			KECAMATAN KEDATON

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit		10 Unit			125,080,000.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		5 Unit		5 Unit			375.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit		10 Unit			1,850,000.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 Unit		7 Unit			70,542,995.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			16,200,000.00			KECAMATAN KEDATON
183	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Kedaton)		100 %		100 %			2,798,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan		100 %		100 %			33,000,000.00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan		1 Laporan			33,000,000.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 %		100 %			2,765,000,000.00			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			2,765,000,000.00			KECAMATAN KEDATON
184	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Kedaton		85 Persen		85 Persen			557,296,234.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		90 %		90 %			487,297,014.00			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			487,297,014.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan		100%		100%			69,999,220.00			
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,999,922.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,999,922.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,999,922.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,999,922.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,999,922.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,999,922.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,999,922.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,999,922.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,999,922.00			KECAMATAN KEDATON

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,999,922.00			KECAMATAN KEDATON
185	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Kedaton		100Persen		100Persen			1,832,500,000.00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal		100 Persern		100 Persern			1,832,500,000.00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			1,810,000,000.00			KECAMATAN KEDATON
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan		1 Laporan			22,500,000.00			KECAMATAN KEDATON
186	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Kedaton		100 Persen		100 Persen			1,702,080.00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan		100 Persen		100 Persen			1,702,080.00			
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		20 Orang		20 Orang			708,603.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen			993,477.00			KECAMATAN KEDATON

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
187	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Kedaton Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan		100 %		100 %			2,093,279.00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-		100%		100%			2,093,279.00			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			847,619.00			KECAMATAN KEDATON
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			1,245,660.00			KECAMATAN KEDATON
						KECAMATAN SUKARAME									11,195,058,918.00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									11,195,058,918.00			
	7	01				KECAMATAN									11,195,058,918.00			
188	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		98%		98%			6,523,721,961.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja presentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas		98%		98%			3,000,000.00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			1,000,000.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan		1 Laporan			1,000,000.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		1 Laporan			1,000,000.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		100 %		100 %			5,537,998,918.00			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		51 Orang/bulan		51 Orang/bulan			5,455,158,918.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			82,840,000.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98%		98%			33,359,500.00			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			2,570,500.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			13,788,500.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			5,270,500.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			250.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			10,010,000.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			1,470,000.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98 %		98 %			2,420,687.00			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			2,420,687.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		95%		95%			694,174,100.00			
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			10,224,100.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			683,950,000.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 %		98 %			252,768,756.00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			37,020,000.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit		1 Unit			167,960,000.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		1 Unit		1 Unit			1,200,000.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit		1 Unit			2,030,000.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			41,038,505.00			KECAMATAN SUKARAME

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			3,520,251.00			KECAMATAN SUKARAME
189	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan massyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan		100 %		100 %			2,392,195,332.00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan		100 %		100 %			29,499,303.00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan		1 Laporan			29,499,303.00			KECAMATAN SUKARAME

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 %		100 %			2,362,696,029.00			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			2,362,696,029.00			KECAMATAN SUKARAME
190	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan dan Kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Sukarame		85 Persen		85 Persen			684,646,699.00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		90 %		90 %			624,646,699.00			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			624,646,699.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan		100%		100%			60,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN SUKARAME

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
191	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Sukarame		100Persen		100Persen			1,590,494,926.00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan		100 Persern		100 Persern			1,590,494,926.00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			1,567,696,029.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan		1 Laporan			22,798,897.00			KECAMATAN SUKARAME

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
192	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Sukarame		100 Persen		100 Persen			2,000,000.00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 Persen		100 Persen			2,000,000.00			
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		20 Orang		20 Orang			1,000,000.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen			1,000,000.00			KECAMATAN SUKARAME
193	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Sukarame Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Koordinasi dalam Penyelenggaraan Permerintahan Kelurahan		100 %		100 %			2,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan		100%		100%			2,000,000.00			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			1,000,000.00			KECAMATAN SUKARAME
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			1,000,000.00			KECAMATAN SUKARAME
						KECAMATAN PANJANG									13,689,609,890.00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									13,689,609,890.00			
	7	01				KECAMATAN									13,689,609,890.00			
194	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota		98%		98%			5,737,835,266.00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas		98%		98%			6,831,671.00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			2,313,543.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan		1 Laporan			2,057,979.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		1 Laporan			2,460,149.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		100 %		100 %			4,485,709,890.00			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		29 Orang/bulan		29 Orang/bulan			4,401,709,890.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			84,000,000.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98%		98%			63,220,421.00			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			3,773,058.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			14,705,256.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			5,655,139.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			21,000,000.00			KECAMATAN PANJANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			5,586,968.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			12,500,000.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98 %		98 %			15,000,000.00			
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			15,000,000.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		95%		95%			854,908,563.00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			30,360,000.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			824,548,563.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 %		98 %			312,164,721.00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			42,520,000.00			KECAMATAN PANJANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit		10 Unit			234,720,000.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			14,509,715.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			20,415,006.00			KECAMATAN PANJANG
195	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Panjang)		100 %		100 %			4,365,925,759.00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan		100 %		100 %			43,425,759.00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan		1 Laporan			38,434,105.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Dokumen		2 Dokumen			4,991,654.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 %		100 %			4,322,500,000.00			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			4,322,500,000.00			KECAMATAN PANJANG
196	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Panjang		85 Persen		85 Persen			1,010,492,264.00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		90 %		90 %			885,499,405.00			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			885,499,405.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan		100%		100%			124,992,859.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		2 Keluarga		2 Keluarga			12,999,530.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		2 Keluarga		2 Keluarga			8,000,000.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		2 Keluarga		2 Keluarga			12,997,504.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		2 Keluarga		2 Keluarga			12,999,685.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		2 Keluarga		2 Keluarga			12,997,283.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		2 Keluarga		2 Keluarga			13,000,000.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		2 Keluarga		2 Keluarga			13,000,000.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		2 Keluarga		2 Keluarga			12,998,857.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		2 Keluarga		2 Keluarga			13,000,000.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		2 Keluarga		2 Keluarga			13,000,000.00			KECAMATAN PANJANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
197	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Panjang Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal		100Persen		100Persen			2,564,612,463.00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan		100 Persern		100 Persern			2,564,612,463.00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			2,540,000,000.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan		1 Laporan			24,612,463.00			KECAMATAN PANJANG
198	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Panjang		100 Persen		100 Persen			5,995,214.00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase Penyelenggaraan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan		100 Persen		100 Persen			5,995,214.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		20 Orang		20 Orang			2,997,257.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen			2,997,957.00			KECAMATAN PANJANG
199	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan		100 %		100 %			4,748,924.00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan		100%		100%			4,748,924.00			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			2,249,176.00			KECAMATAN PANJANG
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			2,499,748.00			KECAMATAN PANJANG
						KECAMATAN RAJABASA									11,859,188,229.00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									11,859,188,229.00			
						KECAMATAN									11,859,188,229.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
200	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan		98%		98%			7,227,354,690.00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas		98%		98%			14,519,582.00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			4,909,342.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan		1 Laporan			4,805,120.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		1 Laporan			4,805,120.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		100 %		100 %			6,282,278,925.00			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		57 Orang/bulan		57 Orang/bulan			6,169,038,229.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			113,240,696.00			KECAMATAN RAJABASA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98%		98%			40,877,475.00			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			3,887,596.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			22,152,067.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			3,582,603.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			4,800,000.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			5,465,209.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			990.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98 %		98 %			31,737,270.00			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			0.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			19,737,270.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			12,000,000.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		95%		95%			626,560,000.00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			24,300,000.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			602,260,000.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 %		98 %			231,381,438.00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			37,020,000.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit		10 Unit			144,280,000.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		1 Unit		1 Unit			0.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit		1 Unit			3,000,000.00			KECAMATAN RAJABASA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			37,766,438.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			9,315,000.00			KECAMATAN RAJABASA
201	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Rajabasa)		100 %		100 %			2,260,460,493.00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah		100 %		100 %			36,897,993.00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan		1 Laporan			36,897,993.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 %		100 %			2,223,562,500.00			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			2,223,562,500.00			KECAMATAN RAJABASA
202	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Rajabasa		85 Persen		85 Persen			752,204,475.00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		90 %		90 %			682,204,475.00			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			682,204,475.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan		100%		100%			70,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1750 Keluarga		1750 Keluarga			7,000,000.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1750 Keluarga		1750 Keluarga			7,000,000.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1750 Keluarga		1750 Keluarga			7,000,000.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		1750 Keluarga		1750 Keluarga			7,000,000.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		1750 Keluarga		1750 Keluarga			7,000,000.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1750 Keluarga		1750 Keluarga			7,000,000.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1750 Keluarga		1750 Keluarga			7,000,000.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		1750 Keluarga		1750 Keluarga			7,000,000.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		1750 Keluarga		1750 Keluarga			7,000,000.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		1750 Keluarga		1750 Keluarga			7,000,000.00			KECAMATAN RAJABASA
203	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Rajabasa		100Persen		100Persen			1,609,172,351.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan		100 Persern		100 Persern			1,609,172,351.00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			1,584,609,920.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan		1 Laporan			24,562,431.00			KECAMATAN RAJABASA
204	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Rajabasa		100 Persen		100 Persen			4,998,110.00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 Persen		100 Persen			4,998,110.00			
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		90 Orang		90 Orang			2,499,055.00			KECAMATAN RAJABASA
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen			2,499,055.00			KECAMATAN RAJABASA
205	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Rajabasa		100 %		100 %			4,998,110.00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan		100%		100%			4,998,110.00			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			2,499,055.00			KECAMATAN RAJABASA
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			2,499,055.00			KECAMATAN RAJABASA
						KECAMATAN TANJUNG SENANG									9,372,890,724.00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									9,372,890,724.00			
	7	01				KECAMATAN									9,372,890,724.00			
206	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan		98%		98%			5,068,775,592.00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas		98%		98%			31,658,370.00			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			10,638,215.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan		1 Laporan			10,533,626.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		1 Laporan			10,486,529.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		100 %		100 %			4,316,340,724.00			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang/bulan		50 Orang/bulan			4,237,740,724.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			78,600,000.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98%		98%			52,922,498.00			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			1,103,768.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			13,867,561.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			10,145,170.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			10,750,000.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			17,055,999.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhanan kebutuhan inventaris kantor		98 %		98 %			21,004,000.00			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 Unit		3 Unit			5,700,000.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			15,304,000.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD		95%		95%			454,740,000.00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			24,900,000.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			429,840,000.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris kantor yang terpelihara		98 %		98 %			192,110,000.00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			37,020,000.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		16 Unit		16 Unit			129,180,000.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 Unit		3 Unit			2,190,000.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		6 Unit		6 Unit			7,500,000.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			16,220,000.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
207	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan		100 %		100 %			2,232,736,346.00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan		100 %		100 %			26,552,111.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan		1 Laporan			26,552,111.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan		100 %		100 %			2,206,184,235.00			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			2,206,184,235.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
208	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Tanjung Senang Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan		85 Persen		85 Persen			521,750,000.00			
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		90 %		90 %			471,750,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			471,750,000.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan		100%		100%			50,000,000.00			
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
						Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
209	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Tanjung Senang		100Persen		100Persen			1,533,435,446.00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan		100 Persern		100 Persern			1,533,435,446.00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			1,510,880,098.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan		1 Laporan			22,555,348.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
210	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Tanjung Senang		100 Persen		100 Persen			4,379,962.00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 Persen		100 Persen			4,379,962.00			
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		20 Orang		20 Orang			1,663,788.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen			2,716,174.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
211	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase fasilitasi,rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa		100 %		100 %			11,813,378.00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan		100%		100%			11,813,378.00			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			1,663,788.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			10,149,590.00			KECAMATAN TANJUNG SENANG
						KECAMATAN SUKABUMI									12,324,427,525.00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									12,324,427,525.00			
	7	01				KECAMATAN									12,324,427,525.00			
212	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan		98%		98%			6,637,132,199.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas		98%		98%			10,256,173.00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			4,056,121.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan		1 Laporan			3,501,260.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		1 Laporan			2,698,792.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		100 %		100 %			5,043,916,664.00			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 Orang/bulan		40 Orang/bulan			4,953,527,525.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			90,389,139.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98%		98%			55,874,891.00			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			10,193,467.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			11,532,678.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			10,379,180.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			12,500,000.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			10,785,745.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			483,821.00			KECAMATAN SUKABUMI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98 %		98 %			25,884,158.00			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			5,284,158.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			15,000,000.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			5,600,000.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		95%		95%			1,179,736,000.00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			25,000,000.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			1,154,736,000.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 %		98 %			321,464,313.00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			37,020,000.00			KECAMATAN SUKABUMI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit		10 Unit			227,700,000.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		3 Unit		3 Unit			500.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2 Unit		2 Unit			2,300,000.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		6 Unit		6 Unit			37,494,313.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			16,450,000.00			KECAMATAN SUKABUMI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
213	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Sukabumi)		100 %		100 %			3,071,348,474.00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan		100 %		100 %			39,290,667.00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan		1 Laporan			39,290,667.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 %		100 %			3,032,057,807.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			3,032,057,807.00			KECAMATAN SUKABUMI
214	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Sukabumi		85 Persen		85 Persen			647,038,814.00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		90 %		90 %			577,040,984.00			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			577,040,984.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan		100%		100%			69,997,830.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,999,783.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,999,783.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,999,783.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,999,783.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,999,783.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,999,783.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,999,783.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,999,783.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,999,783.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,999,783.00			KECAMATAN SUKABUMI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
215	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Sukabumi Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal		100Persen		100Persen			1,961,148,968.00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan		100 Persern		100 Persern			1,961,148,968.00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			1,938,175,566.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan		1 Laporan			22,973,402.00			KECAMATAN SUKABUMI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
216	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Sukabumi		100 Persen		100 Persen			4,103,831.00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 Persen		100 Persen			4,103,831.00			
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		20 Orang		20 Orang			2,001,317.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen			2,102,514.00			KECAMATAN SUKABUMI
217	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Sukabumi		100 %		100 %			3,655,239.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan		100%		100%			3,655,239.00			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			1,805,026.00			KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			1,850,213.00			KECAMATAN SUKABUMI
						KECAMATAN KEMILING									16,472,508,569.00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									16,472,508,569.00			
	7	01				KECAMATAN									16,472,508,569.00			
218	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan		98%		98%			7,893,208,103.00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas		98%		98%			2,994,000.00			
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan		3 Laporan			2,994,000.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		100 %		100 %			6,627,063,569.00			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		29 Orang/bulan		29 Orang/bulan			6,528,608,569.00			KECAMATAN KEMILING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			98,455,000.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98%		98%			45,395,119.00			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			25,170,437.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			10,124,355.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			1,610,327.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			6,490,000.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			2,000,000.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			0.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98 %		98 %			8,499,000.00			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			0.00			KECAMATAN KEMILING
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			0.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			8,499,000.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		95%		95%			825,105,325.00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan		4 Laporan			41,200,000.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 Laporan		4 Laporan			783,905,325.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 %		98 %			384,151,090.00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			37,020,000.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		25 Unit		25 Unit			333,990,000.00			KECAMATAN KEMILING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		4 Unit		4 Unit			2,000,000.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit		1 Unit			1616527,50			KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			2,000,000.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit		2 Unit			7524562,50			KECAMATAN KEMILING
219	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Kemiling)		100 %		100 %			5,548,588,021.00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan		100 %		100 %			701,088,021.00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan		1 Laporan			61,088,021.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Dokumen		2 Dokumen			640,000,000.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 %		100 %			4,847,500,000.00			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			4,847,500,000.00			KECAMATAN KEMILING
220	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Kemiling Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan		85 Persen		85 Persen			179,971,020.00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		90 %		90 %			89,985,510.00			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			89,985,510.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan		100%		100%			89,985,510.00			
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		9 Keluarga		9 Keluarga			8,998,551.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		9 Keluarga		9 Keluarga			8,998,551.00			KECAMATAN KEMILING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		9 Keluarga		9 Keluarga			8,998,551.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		9 Keluarga		9 Keluarga			8,998,551.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		9 Keluarga		9 Keluarga			8,998,551.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		9 Keluarga		9 Keluarga			8,998,551.00			KECAMATAN KEMILING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		9 Keluarga		9 Keluarga			8,998,551.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		9 Keluarga		9 Keluarga			8,998,551.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		9 Keluarga		9 Keluarga			8,998,551.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		9 Keluarga		9 Keluarga			8,998,551.00			KECAMATAN KEMILING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
221	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Kemiling		100Persen		100Persen			2,846,741,425.00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan		100 Persern		100 Persern			2,846,741,425.00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			2,824,241,425.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan		1 Laporan			22,500,000.00			KECAMATAN KEMILING
222	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Kemiling		100 Persen		100 Persen			2,000,000.00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan		100 Persen		100 Persen			2,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		18 Orang		18 Orang			1,000,000.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen			1,000,000.00			KECAMATAN KEMILING
223	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Kemiling		100 %		100 %			2,000,000.00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan		100%		100%			2,000,000.00			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			1,000,000.00			KECAMATAN KEMILING
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			1,000,000.00			KECAMATAN KEMILING
						KECAMATAN ENGGAL									9,975,356,101.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									9,975,356,101.00			
	7	01				KECAMATAN									9,975,356,101.00			
224	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan		98%		98%			5,447,478,659.00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas		98%		98%			8,935,599.00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			2,978,533.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan		1 Laporan			2,978,533.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		1 Laporan			2,978,533.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib		100 %		100 %			4,592,756,101.00			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25 Orang/bulan		25 Orang/bulan			4,509,956,101.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			82,800,000.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		98%		98%			69,285,696.00			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			1,822,847.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			9,660,705.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			15,899,382.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			11,500,000.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			15,402,762.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			15,000,000.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		98 %		98 %			27,583,096.00			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			10,950,000.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			16,633,096.00			KECAMATAN ENGGAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			0.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		95%		95%			553,140,000.00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			12,000,000.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			541,140,000.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 %		98 %			195,778,167.00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			39,040,000.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit		1 Unit			113,830,000.00			KECAMATAN ENGGAL
						Pemeliharaan Mebel												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		20 Unit		20 Unit			6,000,000.00			KECAMATAN ENGGAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit		5 Unit			2,750,000.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Unit		5 Unit			13,428,812.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			20,729,355.00			KECAMATAN ENGGAL
225	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan		100 %		100 %			2,278,209,837.00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan		100 %		100 %			38,810,099.00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan		1 Laporan			38,810,099.00			KECAMATAN ENGGAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 %		100 %			2,239,399,738.00			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			2,239,399,738.00			KECAMATAN ENGGAL
226	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan		85 Persen		85 Persen			633,734,788.00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		90 %		90 %			583,735,548.00			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			583,735,548.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN		100%		100%			49,999,240.00			
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1500 Keluarga		1500 Keluarga			4,999,924.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1500 Keluarga		1500 Keluarga			4,999,924.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1500 Keluarga		1500 Keluarga			4,999,924.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		1500 Keluarga		1500 Keluarga			4,999,924.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		1500 Keluarga		1500 Keluarga			4,999,924.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1500 Keluarga		1500 Keluarga			4,999,924.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1500 Keluarga		1500 Keluarga			4,999,924.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		1500 Keluarga		1500 Keluarga			4,999,924.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		1500 Keluarga		1500 Keluarga			4,999,924.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		1500 Keluarga		1500 Keluarga			4,999,924.00			KECAMATAN ENGGAL
227	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Enggal		100Persen		100Persen			1,605,932,879.00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 Persern		100 Persern			1,605,932,879.00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			1,577,432,879.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan		1 Laporan			28,500,000.00			KECAMATAN ENGGAL
228	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan		100 Persen		100 Persen			4,999,938.00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 Persen		100 Persen			4,999,938.00			
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		20 Orang		20 Orang			2,499,969.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen			2,499,969.00			KECAMATAN ENGGAL
229	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa		100 %		100 %			5,000,000.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan		100%		100%			5,000,000.00			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			2,500,000.00			KECAMATAN ENGGAL
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			2,500,000.00			KECAMATAN ENGGAL
						KECAMATAN KEDAMAIAN									11,453,567,798.00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									11,453,567,798.00			
	7	01				KECAMATAN									11,453,567,798.00			
230	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan		95%		95%			6,469,614,092.00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas		95%		95%			6,306,261.00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			2,102,087.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan		1 Laporan			2,102,087.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		1 Laporan			2,102,087.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		100 %		100 %			5,052,279,085.00			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		34 Orang/bulan		34 Orang/bulan			4,961,417,798.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen		12 Dokumen			90,861,287.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		95%		95%			77,985,563.00			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			6,093,566.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			12,381,787.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			10,518,710.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			12,750,000.00			KECAMATAN KEDAMAIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket		4 Paket			10,831,500.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			25,410,000.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98 %		98 %			115,907,970.00			
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			115,907,970.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		95%		95%			933,500,000.00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			14,000,000.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			919,500,000.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		95%		95%			283,635,213.00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			37,020,000.00			KECAMATAN KEDAMAIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit		1 Unit			157,240,000.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		1 Unit		1 Unit			3,000,000.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit		5 Unit			3,500,000.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 Unit		7 Unit			66,283,213.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			16,592,000.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
231	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Kedamaian)		100 %		100 %			2,557,642,933.00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan		100 %		100 %			35,687,557.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan		1 Laporan			35,687,557.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 Persen		100 Persen			2,521,955,376.00			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			2,521,955,376.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
232	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Kedamaian		85 Persen		85 Persen			664,394,136.00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		90 %		90 %			594,394,186.00			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			594,394,186.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan		80 Persen		80 Persen			69,999,950.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,999,995.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,999,995.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,999,995.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,999,995.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,999,995.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,999,995.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,999,995.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,999,995.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,999,995.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		1750 Keluarga		1750 Keluarga			6,999,995.00			KECAMATAN KEDAMAIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
233	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Kedamaian		100 Persen		100 Persen			1,753,911,337.00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan		100 Persen		100 Persen			1,753,911,337.00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			1,731,308,991.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan		1 Laporan			22,602,346.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
234	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Kedamaian		100 Persen		100 Persen			4,002,650.00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 Persen		100 Persen			4,002,650.00			
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100 Orang		100 Orang			2,001,325.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen			2,001,325.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
235	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Kedamaian		100 Persen		100 Persen			4,002,650.00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan		100 Persen		100 Persen			4,002,650.00			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		4 Dokumen		4 Dokumen			2,001,325.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		4 Dokumen		4 Dokumen			2,001,325.00			KECAMATAN KEDAMAIAN
						KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR									9,149,143,323.00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									9,149,143,323.00			
	7	01				KECAMATAN									9,149,143,323.00			
236	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan		98 %		98 %			5,044,535,493.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		98 %		98 %			9,373,382.00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			3,106,944.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan		1 Laporan			3,185,419.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		1 Laporan			3,081,019.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		1 Tahun		1 Tahun			3,757,353,323.00			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25 Orang/bulan		25 Orang/bulan			3,658,493,323.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			98,860,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		1 Tahun		1 Tahun			64,898,821.00			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			8,392,348.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			16,608,797.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			12,334,966.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			13,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			9,152,710.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			5,410,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		1 Tahun		1 Tahun			40,896,712.00			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			12,966,061.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			16,064,467.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit		1 Unit			11,866,184.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		1 Tahun		1 Tahun			955,600,000.00			
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			25,500,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			930,100,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 %		98 %			216,413,255.00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			37,020,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		8 Unit		8 Unit			124,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		1 Unit		1 Unit			500.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2 Unit		2 Unit			1,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit		2 Unit			35,653,255.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			18,240,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
237	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan		100 %		100 %			2,052,910,239.00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan		100 %		100 %			29,772,157.00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan		1 Laporan			29,772,157.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 % 100 %		100 % 100 %			2,023,138,082.00			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			2,023,138,082.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
238	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan		100 %		100 %			550,204,883.00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		100 %		100 %			490,204,883.00			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			490,204,883.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan		1 Keluarga		1 Keluarga			60,000,000.00			
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1 Keluarga		1 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1 Keluarga		1 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1 Keluarga		1 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		1 Keluarga		1 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		1 Keluarga		1 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1 Keluarga		1 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1 Keluarga		1 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		1 Keluarga		1 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		1 Keluarga		1 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		1 Keluarga		1 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
239	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal		100Persen		100Persen			1,485,828,932.00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan		100 Persern		100 Persern			1,485,828,932.00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			1,462,096,226.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan		1 Laporan			23,732,706.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
240	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan		100 %		100 %			7,834,464.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan		1 Tahun		1 Tahun			7,834,464.00			
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		20 Orang		20 Orang			3,919,808.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen			3,914,656.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
241	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase fasilitasi,rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan		100 % 100 %		100 % 100 %			7,829,312.00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan		1 Tahun		1 Tahun			7,829,312.00			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			3,914,656.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
							SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			3,914,656.00			KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
							KECAMATAN BUMI WARAS									10,312,222,024.00			
	7						UNSUR KEWILAYAHAN									10,312,222,024.00			
	7	01					KECAMATAN									10,312,222,024.00			
242	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan bidang kecamatan		98%		98%			4,956,128,548.00			
	7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		presentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja		98%		98%			31,656,064.00			
	7	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
									Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			10,552,064.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
									Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan		1 Laporan			10,552,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
									Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		1 Laporan			10,552,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib		100 %		100 %			3,830,022,024.00			
	7	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
									Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		45 Orang/bulan		45 Orang/bulan			3,742,322,024.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			87,700,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		98%		98%			74,600,226.00			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			10,275,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			18,821,616.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			11,582,859.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			22,485,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			10,435,751.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			1,000,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		pemenuhan jasa penunjang kebutuhan opd		98 %		98 %			34,603,565.00			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			14,000,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			10,103,565.00			KECAMATAN BUMI WARAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			10,500,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		95%		95%			872,950,000.00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			14,450,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			858,500,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		inventaris kantor yang terpelihara		98 %		98 %			112,296,669.00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			37,020,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit		10 Unit			47,620,001.00			KECAMATAN BUMI WARAS
						Pemeliharaan Mebel												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		5 Unit		5 Unit			500.00			KECAMATAN BUMI WARAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 Unit		3 Unit			500.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			16,410,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			10,246,668.00			KECAMATAN BUMI WARAS
243	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Bumi Waras)		100 %		100 %			2,862,475,645.00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntable		100 %		100 %			25,570,000.00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan		1 Laporan			25,570,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 %		100 %			2,836,905,645.00			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			2,836,905,645.00			KECAMATAN BUMI WARAS
244	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Bumi Waras		85 Persen		85 Persen			684,667,278.00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		90 %		90 %			634,667,278.00			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			634,667,278.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		PRESENTASE KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		100%		100%			50,000,000.00			
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
245	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Bumi Waras		100Persen		100Persen			1,788,854,670.00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		100 Persern		100 Persern			1,788,854,670.00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			1,764,855,917.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan		1 Laporan			23,998,753.00			KECAMATAN BUMI WARAS
246	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Bumi Waras		100 Persen		100 Persen			10,095,883.00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 Persen		100 Persen			10,095,883.00			
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		20 Orang		20 Orang			5,096,059.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen			4,999,824.00			KECAMATAN BUMI WARAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Bumi Waras		100 %		100 %			10,000,000.00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan		100%		100%			10,000,000.00			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			5,000,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			5,000,000.00			KECAMATAN BUMI WARAS
						KECAMATAN LABUHAN RATU									10,594,220,316.00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									10,594,220,316.00			
	7	01				KECAMATAN									10,594,220,316.00			
248	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan		98%		98%			6,621,877,641.00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas		98%		98%			5,999,103.00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			1,999,701.00			KECAMATAN LABUHAN RATU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan		1 Laporan			1,999,701.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		1 Laporan			1,999,701.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		100 %		100 %			5,828,020,316.00			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		55 Orang/bulan		55 Orang/bulan			5,734,320,316.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			93,700,000.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98%		98%			68,364,953.00			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			12,993,911.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			14,002,284.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			13,965,856.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			12,100,000.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			13,302,902.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			2,000,000.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98 %		98 %			33,397,376.00			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			4,931,184.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			3,000,000.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			25,466,192.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		95%		95%			524,300,000.00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			12,000,000.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			512,300,000.00			KECAMATAN LABUHAN RATU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 %		98 %			161,795,893.00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			37,020,000.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit		10 Unit			65,140,000.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		5 Unit		5 Unit			500.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 Unit		3 Unit			500.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit		2 Unit			44,000,000.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			14,635,893.00			KECAMATAN LABUHAN RATU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
249	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan		100 %		100 %			2,015,639,784.00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan		100 %		100 %			29,474,128.00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan		1 Laporan			29,474,128.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 %		100 %			1,986,165,656.00			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			1,986,165,656.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
250	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Labuhan Ratu		85 Persen		85 Persen			467,031,332.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		90 %		90 %			407,031,332.00			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			407,031,332.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan		100%		100%			60,000,000.00			
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN LABUHAN RATU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN LABUHAN RATU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		1500 Keluarga		1500 Keluarga			6,000,000.00			KECAMATAN LABUHAN RATU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
251	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Labuhan Ratu		100 persen		100 persen			1,481,672,263.00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan		100 persen		100 persen			1,481,672,263.00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			1,458,795,266.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan		1 Laporan			22,876,997.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
252	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Labuhan Ratu		100 Persen		100 Persen			3,999,648.00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 persen		100 persen			3,999,648.00			
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		20 Orang		20 Orang			1,999,824.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen			1,999,824.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
253	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Labuhan Ratu		100 Persen		100 Persen			3,999,648.00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan		100 persen		100 persen			3,999,648.00			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			1,999,824.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			1,999,824.00			KECAMATAN LABUHAN RATU
						KECAMATAN WAY HALIM									12,461,430,357.00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									12,461,430,357.00			
	7	01				KECAMATAN									12,461,430,357.00			
254	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan		95%		95%			6,098,088,232.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas		98%		98%			3,045,141.00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			1,015,047.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan		1 Laporan			1,015,047.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		1 Laporan			1,015,047.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		100 %		100 %			4,812,770,357.00			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		43 Orang/bulan		43 Orang/bulan			4,686,030,357.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			126,740,000.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98%		98%			53,017,973.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			4,532,270.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			13,323,773.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			4,996,930.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			10,250,000.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			3,915,000.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5 Laporan		5 Laporan			16,000,000.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98 %		98 %			65,256,456.00			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		12 Unit		12 Unit			14,954,400.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		12 Unit		12 Unit			7,700,000.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		12 Unit		12 Unit			42,602,056.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		95%		95%			1,078,100,000.00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		5 Laporan		5 Laporan			40,800,000.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5 Laporan		5 Laporan			1,037,300,000.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 %		98 %			85,898,305.00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			37,020,000.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit		10 Unit			35,370,000.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		5 Unit		5 Unit			875.00			KECAMATAN WAY HALIM
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 Unit		3 Unit			875.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			8,847,185.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			2,911,120.00			KECAMATAN WAY HALIM
255	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Way Halim)		100 %		100 %			3,530,291,706.00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan undefined		100 %		100 %			29,411,782.00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan		1 Laporan			29,411,782.00			KECAMATAN WAY HALIM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 %		100 %			3,500,879,924.00			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		5 Laporan		5 Laporan			3,500,879,924.00			KECAMATAN WAY HALIM
256	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Way Halim		85 Persen		85 Persen			697,304,204.00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		90 %		90 %			597,291,154.00			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		5 Laporan		5 Laporan			597,291,154.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan		100%		100%			100,013,050.00			
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1500 Keluarga		1500 Keluarga			10,001,305.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1500 Keluarga		1500 Keluarga			10,001,305.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1500 Keluarga		1500 Keluarga			10,001,305.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		1500 Keluarga		1500 Keluarga			10,001,305.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		1500 Keluarga		1500 Keluarga			10,001,305.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1500 Keluarga		1500 Keluarga			10,001,305.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1500 Keluarga		1500 Keluarga			10,001,305.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		1500 Keluarga		1500 Keluarga			10,001,305.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		1500 Keluarga		1500 Keluarga			10,001,305.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		1500 Keluarga		1500 Keluarga			10,001,305.00			KECAMATAN WAY HALIM
257	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Way Halim		100Persen		100Persen			2,116,669,951.00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan		100 Persern		100 Persern			2,116,669,951.00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		5 Laporan		5 Laporan			2,093,881,930.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		5 Laporan		5 Laporan			22,788,021.00			KECAMATAN WAY HALIM
258	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Way Halim		100 Persen		100 Persen			9,538,132.00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 Persen		100 Persen			9,538,132.00			
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100 Orang		100 Orang			4,769,066.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen			4,769,066.00			KECAMATAN WAY HALIM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
259	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Way Halim		100 %		100 %			9,538,132.00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase fasilitasi,rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa persentase pembinaan dan pengawasan ditingkat kelurahan		100%		100%			9,538,132.00			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			4,769,066.00			KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			4,769,066.00			KECAMATAN WAY HALIM
						KECAMATAN LANGKAPURA									8,321,511,776.00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									8,321,511,776.00			
	7	01				KECAMATAN									8,321,511,776.00			
260	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan		98 %		98 %			4,891,032,770.00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas		98 %		98 %			26,378,533.00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			8,792,733.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan		1 Laporan			8,792,900.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		1 Laporan			8,792,900.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		100 %		100 %			3,910,811,776.00			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		34 Orang/bulan		34 Orang/bulan			3,840,611,776.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			70,200,000.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98%		98%			57,576,823.00			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			7,064,730.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			19,722,549.00			KECAMATAN LANGKAPURA
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			7,924,610.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			11,200,000.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			10,664,934.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		1 Laporan			1,000,000.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98 %		98 %			33,635,638.00			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			11,627,558.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			11,000,000.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit		2 Unit			11,008,080.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		95%		95%			719,700,000.00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			14,200,000.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan		1 Laporan			705,500,000.00			KECAMATAN LANGKAPURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 %		98 %			142,930,000.00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			37,020,000.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit		10 Unit			70,080,000.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		4 Unit		4 Unit			1,500,000.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4 Unit		4 Unit			2,920,000.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		6 Unit		6 Unit			25,000,000.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			6,410,000.00			KECAMATAN LANGKAPURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
261	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Langkapura))		100 %		100 %			1,629,966,879.00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan		100 %		100 %			38,706,840.00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan		1 Laporan			38,706,840.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 %		100 %			1,591,260,039.00			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			1,591,260,039.00			KECAMATAN LANGKAPURA
262	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan langkapura		90 persen		90 persen			531,385,260.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		90 persen		90 persen			481,385,260.00			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			481,385,260.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan		100%		100%			50,000,000.00			
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN LANGKAPURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN LANGKAPURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		1250 Keluarga		1250 Keluarga			5,000,000.00			KECAMATAN LANGKAPURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
263	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Presentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Langkapura		100Persen		100Persen			1,245,127,143.00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan		100 Persern		100 Persern			1,245,127,143.00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan		1 Laporan			1,221,952,971.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan		1 Laporan			23,174,172.00			KECAMATAN LANGKAPURA
264	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan		100 %		100 %			11,999,862.00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %		100 %			11,999,862.00			
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		20 Orang		20 Orang			5,999,931.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen			5,999,931.00			KECAMATAN LANGKAPURA
265	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan		100 %		100 %			11,999,862.00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan		100 %		100 %			11,999,862.00			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			5,999,931.00			KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			5,999,931.00			KECAMATAN LANGKAPURA
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									7,958,944,841.00			
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									7,958,944,841.00			
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									7,958,944,841.00			
266	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung		98%		98%			3,540,040,417.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		100%		100%			49,999,697.00			
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 dokumen		4 dokumen			24,999,827.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 laporan		4 laporan			24,999,870.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		98%		98%			3,072,802,441.00			
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25 orang/bulan		25 orang/bulan			2,899,402,441.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 dokumen		1 dokumen			173,400,000.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		-		-			139,838,279.00			
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket		1 paket			29,999,258.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 paket		1 paket			7,492,762.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket		1 paket			27,500,000.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket		1 paket			15,000,000.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 dokumen		1 dokumen			6,000,000.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 laporan		1 laporan			53,846,259.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		-		-			90,000,000.00			
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 unit		5 unit			45,000,000.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		10 unit		10 unit			45,000,000.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		98 %		98 %			116,000,000.00			
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan		1 laporan			20,000,000.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 laporan		1 laporan			96,000,000.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara Inventaris Kantor yang Terpelihara		98%		98%			71,400,000.00			
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit		1 unit			44,680,000.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 unit		1 unit			21,080,000.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 unit		5 unit			5,640,000.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
267	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan		70%		70%			604,599,272.00			
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan		70%		70%			604,599,272.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan												
								Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		1 dokumen		1 dokumen			82,199,839.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		60 orang		60 orang			64,999,774.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1000 orang		1000 orang			49,999,871.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka												
								Jumlah Paskibraka		-		-			407,399,788.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
268	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu		-		-			1,947,506,843.00			
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu		-		-			1,947,506,843.00			
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		100 orang		100 orang			74,999,795.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah												
								Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1 laporan		1 laporan			1,822,507,341.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka												
								Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka		-		-			49,999,707.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
269	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Laporan Keberadaan ORMAS dan Pembinaan ORMAS		50%		50%			1,024,499,746.00			
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Laporan Keberadaan & Pembinaan ORMAS		50%		50%			1,024,499,746.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah												
								Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		1 dokumen		1 dokumen			949,499,768.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah												
								Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1 laporan		1 laporan			74,999,978.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
270	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Penanganan Konflik Keagamaan dan Ras		-		-			292,299,389.00			
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani		-		-			292,299,389.00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		100 orang		100 orang			75,099,593.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		60 orang		60 orang			49,999,848.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
								Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1 laporan		1 laporan			167,199,948.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
271	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan		80%		80%			549,999,174.00			
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Konflik Sosial yang terselesaikan dan Kemampuan SDM dalam Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial		70%		70%			549,999,174.00			
	8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		1 dokumen		1 dokumen			74,999,832.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
								Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		300 orang		300 orang			49,999,779.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		30 orang		30 orang			199,999,779.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
								Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1 laporan		1 laporan			74,999,906.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota												
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen		1 dokumen			149,999,878.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
H															**2,487,656,580,950.00**			

Formulir E. 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG

RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG

PERIODE PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN 4 TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Kecamatan Rajabasa

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN											I		II		III		
											K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
unsur kewilayahan																							
kecamatan																							
kecamatan Rajabasa											*98.00*	80,541,109,906.22	50.00	-	*98*	13,904,801,520.00	20.00	3,111,826,032.00		3,269,537,834.00	20	2,747,681,317.00	35
x	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan	7	01						Indeks kepuasan masyarakat														
xx		7	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan	persen	98.00	46,922,493,017.91	60.00		98.00	7,250,972,135.00	20	1,890,576,032.00		1,972,037,834.00		1,012,281,317.00	
xxx		7	01	01	2	01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100.00	94,928,019.32	60.00		98.00	14,519,238	20	-		-		-	
		7	01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	32,097,462.33	3	-	1.00	4,909,306.00	0.25	-		-		-	
									Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5												
		7	01	01	2	01	06	Kooedinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	31,415,278.49	2		*1*	4,804,966.00	0.25	-		-		-	

Indikator dan target kinerja Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Kecamatan Rajabasa

NO.	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				IV											
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH		K		K	RUPIAH	K			
unsur kewilayahan																							
kecamatan																	xxx		xxx		xxx		
kecamatan Rajabasa										*98.00*	80,541,109,906.22	3,571,643,387.00	75	11,598,188,570.00	40.82	83.41	60.00	20,749,219,005.00		xxx		
x	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan	7	01					Indeks kepuasan masyarakat													Kecamtan Rajabasa	Bandar Lampung
xx		7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan	persen	98.00	46,922,493,017.91	1,625,293,887.00	20	6,500,189,070.00	20.41	89.65	60.00	15,651,219,505.00	61.22	33.36	Kecamtan Rajabasa	Bandar Lampung
xxx		7	01	01	2	01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100.00	94,928,019.32	-	20	-	20.41	-	60.00	-	60.00	-	Kecamtan Rajabasa	Bandar Lampung
		7	01	01	2	01	01 Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	32,097,462.33	-	0.25	-	25.00	-	3.25	-	65.00	-	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5											Kecamtan Rajabasa	
		7	01	01	2	01	06 Kooedinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	31,415,278.49	-	0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa	*Bandar Lampung*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III	
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14												K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
28										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5												
29			7	01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	31,415,278.49	2	-	*1*	4,804,966.00	0.25	-		-		-	
30										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5												
31	xxx		**7**	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**100.00**	**40,305,427,655.88**	132	**9,115,702,555.00**	**98.00**	**6,144,654,075.00**	**23**	**1,762,576,032.00**		**1,763,676,834.00**		**805,959,680.00**	
32			7	01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	39,565,050,631.17	57		57	6,051,473,429.00	**57**	1,762,576,032.00		1,745,736,834.00		789,359,680.00	
33										Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	57												
34			7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	740,377,024.71	2		1	93,180,646.00	0.25	-		17,940,000.00		16,600,000.00	
35										Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5			-		-		-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH			
28										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5														
29			7	01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	31,415,278.49	-	0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa	*Bandar Lampung*	
30										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5													
31	xxx		**7**	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**100.00**	**40,305,427,655.88**	**1,324,930,913.00**	**23**	**5,657,143,459.00**	**23.47**	**92.07**	**155.00**	**14,772,846,014.00**	**155.00**	**36.65**	Kecamtan Rajabasa		
32			7	01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	39,565,050,631.17	1,283,590,913.00	**57**	5,581,263,459.00	100.00	92.23	57.00	5,581,263,459.00	100.00	**14.11**			
33										Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	57													
34			7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	740,377,024.71	41,340,000.00	0.25	75,880,000.00	25.00	81.43	2.25	75,880,000.00	45.00	**10.25**			
35										Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5				-				-			Kecamtan Rajabasa		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING									CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
10																								
11																		I		II		III		
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN													
13												(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
36			**7**	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**279,842,899.86**	120	**35,327,880.00**	**98.00**	**41,925,526.00**	**20**	**-**		**-**		**-**	
37			7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	25,416,369.30	2		1	3,887,433.00	0.25	-		-			
38										Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5					-		-					
39			7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	144,825,144.81	2		1	22,151,002.00	0.25	-		-			
40										Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5					-		-		-			
41			7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	23,418,899.19	2		1	3,581,920.00	0.25	-		-			
42										Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5					-		-					
43			7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	31,382,810.36	2		1	4,800,000.00	0.25	-		-			
44										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5					-		-					
45			7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	35,731,755.23	2		1	5,465,171.00	0.25	-		-			
46										Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5					-		-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH			
36			**7**	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**279,842,899.86**	**24,288,900.00**	**20**	**24,288,900.00**	**20.41**	**57.93**	**140.00**	**59,616,780.00**	**142.86**	**21.30**	Kecamtan Rajabasa		
37			7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	25,416,369.30		0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa		
38										Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5				-				-					
39			7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	144,825,144.81	14,864,900.00	0.25	14,864,900.00	25.00	67.11	2.25	14,864,900.00	45.00	**10.26**	Kecamtan Rajabasa		
40										Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5				-				-					
41			7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	23,418,899.19	2,405,000.00	0.25	2,405,000.00	25.00	67.14	2.25	2,405,000.00	45.00	**10.27**	Kecamtan Rajabasa		
42										Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5				-				-					
43			7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	31,382,810.36	4,800,000.00	0.25	4,800,000.00	25.00	100.00	2.25	4,800,000.00	45.00	**15.29**	Kecamtan Rajabasa		
44										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5				-				-					
45			7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	35,731,755.23	2,219,000.00	0.25	2,219,000.00	25.00	40.60	2.25	2,219,000.00	45.00	**6.21**	Kecamtan Rajabasa		
46										Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5				-				-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING									CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
10																								
11																		I		II		III		
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN													
13												(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
47			7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	19,067,920.98	1.00		1	2,040,000.00	0.25	-					
48										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5					-		-		-			
49			**7**	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**560,557,601.11**	**80.00**		**98**	**42,262,730.00**	**20.00**	**-**		**-**		**41,631,660**	
50			7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	-	1.00		*1*	-	0.25	-					
51										Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10					-		-		-			
52			7	01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	455,948,233.24	1.00		*3*	30,262,730.00	0.25	-		-		29,637,000.00	
53										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10					-		-		-			
54			7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	104,609,367.87	1.00		*1*	12,000,000.00	0.25	-		-		11,994,660.00	
55										Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10					-		-		-			
56			**7**	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**100.00**	**4,567,245,001.27**	120		**98.00**	**784,760,000.00**	**20.00**	**128,000,000.00**		**156,500,000.00**		**118,500,000**	

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN																
											(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
		7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	19,067,920.98		0.25	-	25.00	-	1.25	-	25.00	-	Kecamtan Rajabasa	
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5				-				-				
		7	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**560,557,601.11**	**-**	**20**	**41,631,660.00**	**20.41**	**98.51**	**100.00**	**41,631,660.00**	**102.04**	**7.43**	Kecamtan Rajabasa	
		7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	-		0.25	-	25.00		1.25	-	12.50	######	Kecamtan Rajabasa	
									Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10				-				-				
		7	01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	455,948,233.24		0.25	29,637,000.00	8.33	97.93	1.25	29,637,000.00	12.50	**6.50**	Kecamtan Rajabasa	
									Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10				-				-				
		7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	104,609,367.87		0.25	11,994,660.00	25.00	99.96	1.25	11,994,660.00	12.50	**11.47**	Kecamtan Rajabasa	
									Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10				-				-				
		7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**100.00**	**4,567,245,001.27**	**226,875,536**	**20**	**629,875,536.00**	**20.41**	**80.26**	**140.00**	**629,875,536.00**	**140.00**	**13.79**	Kecamtan Rajabasa	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III	
13												(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
57			7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	158,875,477.45	2		1	24,300,000.00	0.25	-		-			
58										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5					-		-		-			
59			7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	4,408,369,523.81	2		1	760, 460, 000. 00	0.25	128,000,000.00		156,500,000.00		118,500,000.00	
60										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5					-		-		-			
61			**7**	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98.00**	**1,114,491,840.47**	120		**98**	**222,850,566.00**	**20**	**-**		**51,861,000.00**		**46,189,977**	
62			7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	220,137,338.51	2		1	45,772,400.00	0.25	-		12,102,400.00		13,077,097.00	
63										Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	1					-		-		-			
64			7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	809,218,841.34	2		3	163,528,600.00	0.25	-		39,758,600.00		33,112,880.00	
65										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit	10					-		-		-			
66			7	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	-	1.00		3	-	0.25	-					
67										Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8					-		-					
68			7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	19,091,209.64	1.00		3	2,920,000.00	0.25	-		-			
69										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5					-		-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH			
57			7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	158,875,477.45	12,015,536.00	0.25	12,015,536.00	25.00	49.45	2.25	12,015,536.00	45.00	**7.56**	Kecamtan Rajabasa		
58										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5				-				-					
59			7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	4,408,369,523.81	214,860,000.00	0.25	617,860,000.00	25.00	81.25	2.25	617,860,000.00	45.00	**14.02**	Kecamtan Rajabasa		
60										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5				-				-					
61			**7**	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98.00**	**1,114,491,840.47**	**49,198,538**	**20**	**147,249,515.00**	**20.41**	**66.08**	**140.00**	**147,249,515.00**	**142.86**	**13.21**	Kecamtan Rajabasa		
62			7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	220,137,338.51	15,226,125.00	0.25	40,405,622.00	25.00	88.28	2.25	40,405,622.00	225.00	**18.35**	Kecamtan Rajabasa		
63										Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	1				-				-					
64			7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	809,218,841.34	33,972,413.00	0.25	106,843,893.00	8.33	65.34	2.25	106,843,893.00	22.50	**13.20**	Kecamtan Rajabasa		
65										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit	10				-				-					
66			7	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	-		0.25	-	8.33		1.25	-	15.63	######	Kecamtan Rajabasa		
67										Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8				-				-					
68			7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	19,091,209.64		0.25	-	8.33	-	1.25	-	25.00	**-**	Kecamtan Rajabasa		
69										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5				-				-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III		
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14												K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
70			7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	4,576,659.84	2		1	700,000.00	0.25	-		-			
71										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1			-		-		-					
72			7	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	61,467,791.14	2		1	9,929,566.00	0.25	-		-			
73										Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1			-		-		-					
74			**7**	**01**	**05**				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di**	**%**	**100.00**	**33,141,743.79**	30		**100**	**4,997,422.00**	**20.00**	**-**		**-**		**-**	
75			**7**	**01**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**33,141,743.79**	30		**100**	**4,997,422.00**	**20.00**	**-**		**-**		**-**	
76			7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	16,570,871.89	2		*1*	2,498,711.00	0.25	-		-			
77										Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5					-		-					
78			7	01	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	16,570,871.89	2		*1*	2,498,711.00	0.25	-		-			
79										Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan	Orang	100					-		-					
80			**7**	**01**	**06**				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**33,141,743.79**	105		**100**	**4,997,422.00**	**20.00**	**-**		**-**		**-**	
81			**7**	**01**	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100**	**33,141,743.79**	105		**100**	**4,997,422.00**	**20.00**	**-**		**-**		**-**	
82			7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	16,570,871.89	2		*1*	2,498,711.00	0.25	-		-			
83										Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	5					-		-					
84			7	01	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	16,570,871.89	2		*1*	2,498,711.00	0.25	-		-			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH			
70			7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	4,576,659.84		0.25	-	25.00	-	2.25	-	225.00	-	Kecamtan Rajabasa		
71										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1				-				-					
72			7	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	61,467,791.14		0.25	-	25.00	-	2.25	-	225.00	-	Kecamtan Rajabasa		
73										Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1				-				-					
74			**7**	**01**	**05**				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di**	**%**	**100.00**	**33,141,743.79**	**-**	**20**	**-**	**20.00**	**-**	**50.00**	**-**	**50.00**	**-**	Kecamtan Rajabasa		
75			**7**	**01**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**33,141,743.79**	**-**	**20**	**-**	**20.00**	**-**	**50.00**	**-**	**50.00**	**-**	Kecamtan Rajabasa		
76			7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	16,570,871.89		0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa		
77										Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5				-				-					
78			7	01	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	16,570,871.89		0.25	-	25.00	-	2.25	-	2.25	-	Kecamtan Rajabasa		
79										Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan	Orang	100				-				-					
80			**7**	**01**	**06**				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**33,141,743.79**	**-**	**20**	**-**	**20.00**	**-**	**125.00**	**-**	**125.00**	**-**	Kecamtan Rajabasa		
81			**7**	**01**	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100**	**33,141,743.79**	**-**	**20**	**-**	**20.00**	**-**	**125.00**	**-**	**125.00**	**-**	Kecamtan Rajabasa		
82			7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	16,570,871.89		0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa		
83										Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	5				-				-					
84			7	01	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	16,570,871.89		0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III	
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14												K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
85										Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5					-		-					
86		Meningkatnya keamanan dan ketertiban	7	01						Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan														
87			7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan	%	100.00	14,990,848,814	140		100	3,142,460,347.00	25.00	661,500,000.00		694,500,000.00		441,000,000.00	
88			7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100.00	244,698,037.53	140		100	36,897,858.00	25.00	-		33,000,000.00		-	
89			7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	244,698,037.53	2		1	36,897,858.00	0.25	-		33,000,000.00		-	
90										Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Laporan	5			-		-		-					
91			7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100	14,746,150,776.10	80		100	3,105,562,489.00	10	661,500,000.00		661,500,000.00		441,000,000.00	
92			7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	14,746,150,776.10	2		1	3,105,562,489.00	0.25	661,500,000.00		661,500,000.00		441,000,000.0000	
93										Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5			-		-		-					
94			7	01	03				Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan	%	100	5,021,603,564.98	140		100	742,204,337.00	25	-		-		451,400,000.00	
95			7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	%	100	4,988,444,724.49	140		100	737,204,337.00	25	-		-		451,400,000.00	
96			7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	4,988,444,724.49	2		1	737,204,337.00	0.25	-		-		451,400,000.0000	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA			
85										Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5				-				-					
86		Meningkatnya keamanan dan ketertiban	7	01					Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan						-	-							Kecamtan Rajabasa		
87			7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan	%	100.00	14,990,848,814	661,500,000.00	25	2,458,500,000.00	25.00	78.23	165.00	2,458,500,000.00	165.00	16.40	Kecamtan Rajabasa		
88			7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100.00	244,698,037.53	-	25	33,000,000.00	25.00	89.44	165.00	33,000,000.00	165.00	13.49	Kecamtan Rajabasa		
89			7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	244,698,037.53	-	0.25	33,000,000.00	25.00	89.44	2.25	33,000,000.00	45.00	13.49	Kecamtan Rajabasa		
90										Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Laporan	5				-				-					
91			7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100	14,746,150,776.10	661,500,000.00	10	2,425,500,000.00	10.00	78.10	90.00	2,425,500,000.00	90.00	16.45	Kecamtan Rajabasa		
92			7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	14,746,150,776.10	661,500,000.0000	0.25	2,425,500,000.00	25.00	78.10	2.25	2,425,500,000.00	45.00	16.45	Kecamtan Rajabasa		
93										Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5				-				-					
94			7	01	03				Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan	%	100	5,021,603,564.98	15,000,000.00	25	466,400,000.00	25.00	62.84	165.00	466,400,000.00	165.00	9.29	Kecamtan Rajabasa		
95			7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	%	100	4,988,444,724.49	15,000,000.00	25	466,400,000.00	25.00	63.27	165.00	466,400,000.00	165.00	9.35	Kecamtan Rajabasa		
96			7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, rntq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	4,988,444,724.49	15,000,000.0000	0.25	466,400,000.00	25.00	63.27	2.25	466,400,000.00	45.00	9.35	Kecamtan Rajabasa		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING									CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
10																								
11																		I		II		III		
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN													
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14												K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
97										Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	5			-		-		-					
98			7	01	03	2	02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**%**	**80.00**		25.00		**80.00**	**-**							
99			7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit	7		0.25		7	-							
100			**7**	**01**	**03**	**2**	**06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan**	**%**	**100**	**33,158,840.48**	40.00		**100**	**5,000,000.00**	**10**	**-**		**-**		**-**	
101									Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter	keluarga	7,000	3,315,884.05	1.00		1750	500,000.00	0.25	-				
102									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	keluarga	7,000	3,315,884.05	1.00		1750	500,000.00	0.25	-				
103									Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	keluarga	7,000	3,315,884.05	1.00		1750	500,000.00	0.25	-				
104									Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam	keluarga	7,000	3,315,884.05	1.00		1750	500,000.00	0.25	-				
105									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan	keluarga	7,000	3,315,884.05	1.00		1750	500,000.00	0.25	-				
106									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		keluarga	7,000	3,315,884.05	1.00		1750	500,000.00	0.25	-				
107									Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		keluarga	7,000	3,315,884.05	1.00		1750	500,000.00	0.25	-				

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
											K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA		
97									Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	5				-				-				
98		7	01	03	2	02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**%**	**80.00**			**-**	**-**	**0.00**	**#DIV/0!**	**25.00**	**-**	**31.25**	**######**		
99		7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit	7			0.00	-	0.00		0.25	-	0.25	######		
100		**7**	**01**	**03**	**2**	**06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan**	**%**	**100**	**33,158,840.48**	**-**	**10**	**-**	**10.00**	**-**	**50.00**	**-**	**50.00**	**-**	Kecamtan Rajabasa	
101								Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter	keluarga	7,000	3,315,884.05		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-		
102								Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	keluarga	7,000	3,315,884.05		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-		
103								Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	keluarga	7,000	3,315,884.05		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-		
104								Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam	keluarga	7,000	3,315,884.05		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-		
105								Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan	keluarga	7,000	3,315,884.05		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-		
106								Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		keluarga	7,000	3,315,884.05		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-		
107								Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		keluarga	7,000	3,315,884.05		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-		

NO.	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN											I		II		III	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
108							Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		keluarga	7,000	3,315,884.05	1.00		1750	500,000.00	0.25	-					
109							Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		keluarga	7,000	3,315,884.05	1.00		1750	500,000.00	0.25	-					
110							Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		keluarga	7,000	3,315,884.05	1.00		1750	500,000.00	0.25	-					
111		**7**	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak**	**%**	**100**	**13,539,881,022**	**140**		**100**	**2,759,169,857.00**	**25**	**559,750,000.00**		**603,000,000.00**		**402,000,000**	
112		**7**	**01**	**04**	**2**	**01**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100**	**13,539,881,022.13**	**140**		**100**	**2,759,169,857.00**	**25**	**559,750,000.00**		**603,000,000.00**		**402,000,000**	
113		7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	13,376,992,164.15	2		1	2,734,607,952.00	0.25	559,750,000.00		603,000,000.00		402,000,000.0000	
114								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Laporan	5			-		-		-					
115		7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	162,888,857.98	2		1	24,561,905.00	0.25	-		-			
116								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	Laporan	5			-		-		-					
117																						
118																						
119							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				80,541,109,906.22				13,904,801,520.00		3,111,826,032.00		3,269,537,834.00		2,306,681,317.00	
120																						
121							TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															
122							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															
123																						
124	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																					
125	Faktor penghambat pencapaian kinerja:																					
126	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																					
127	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:																					
128																						
129																						
130																						

NO.	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA		
							Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		keluarga	7,000	3,315,884.05		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-		
							Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		keluarga	7,000	3,315,884.05		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-		
							Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		keluarga	7,000	3,315,884.05		0.25	-	0.01	-	1.25	-	1.25	-		
		7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tiodak**	**%**	**100**	**13,539,881,022**	**608,349,500**	**25**	**2,173,099,500.00**	**25.00**	**78.76**	**165.00**	**2,173,099,500.00**	**165.00**	**16.05**		
		7	**01**	**04**	**2**	**01**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100**	**13,539,881,022.13**	**608,349,500**	**25**	**2,173,099,500.00**	**25.00**	**78.76**	**165.00**	**2,173,099,500.00**	**165.00**	**16.05**	Kecamtan Rajabasa	
		7	01	04	2	01	01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	13,376,992,164.15	608,349,500.0000	0.25	2,173,099,500.00	25.00	79.47	2.25	2,173,099,500.00	45.00	**16.25**	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Laporan	5				-				-				
		7	01	04	2	01	02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	162,888,857.98		0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	Laporan	5				-				-				
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				**80,541,109,906.22**	**2,910,143,387.00**		**11,598,188,570.00**						**75.09**		
							TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								**xxx**	**83.41**			**xxx**	**xxx**		
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM								**xxx**	**xxx**			**xxx**	**xxx**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

Bandar Lampung, 2025

CAMAT RAJABASA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9	NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																		I		II		III		
12			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14												K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
131																								
132																								
133																								
134																								
135																								
136																								
137																								
138																								
139																								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
9			KODE REKENING																						
10																									
11																									
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH			
131																									
132																									
133																									
134																									
135																									
136																									
137																									
138																									
139																									

RACHMATSYAH, S.Pi

NIP. 19810314 200604 1 001

Formulir E. 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG

RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG

PERIODE PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN 3 TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Kecamatan Rajabasa

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN										I		II		III		
											K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
unsur kewilayahan																							
kecamatan																							
kecamatan Rajabasa											*98.00*	80,541,109,906.22	50.00	-	*98*	13,904,801,520.00	20.00	3,111,826,032.00		3,269,537,834.00	20	2,747,681,317.00	35
x	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan	7	01						Indeks kepuasan masyarakat														
xx		7	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan	persen	98.00	46,922,493,017.91	60.00		98.00	7,250,972,135.00	20	1,890,576,032.00		1,972,037,834.00		1,012,281,317.00	
xxx		7	01	01	2	01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100.00	94,928,019.32	60.00		98.00	14,519,238	20	-		-		-	
		7	01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	32,097,462.33	3	-	**1.00**	4,909,306.00	0.25	-		-		-	
									Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5												
		7	01	01	2	01	06	Kooedinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	31,415,278.49	2		*1*	4,804,966.00	0.25	-		-		-	

Indikator dan target kinerja Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Kecamatan Rajabasa

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					K	RUPIAH		RUPIAH	K		K	RUPIAH	K			
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
unsur kewilayahan																								
kecamatan																		xxx		xxx		xxx		
kecamatan Rajabasa											*98.00*	80,541,109,906.22	-	75	8,688,045,183.00	40.82	62.48	60.00	17,839,075,618.00		xxx		
x	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan	7	01						Indeks kepuasan masyarakat													Kecamtan Rajabasa	Bandar Lampung
xx		7	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan	persen	98.00	46,922,493,017.91	-	20	4,874,895,183.00	20.41	67.23	60.00	14,025,925,618.00	61.22	29.89	Kecamtan Rajabasa	Bandar Lampung
xxx		7	01	01	2	01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100.00	94,928,019.32	-	20	-	20.41	-	60.00	-	60.00	-	Kecamtan Rajabasa	Bandar Lampung
		7	01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	32,097,462.33	-	0.25	-	25.00	-	3.25	-	65.00	-	Kecamtan Rajabasa	
									Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5											Kecamtan Rajabasa	
		7	01	01	2	01	06	Kooedinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	31,415,278.49	-	0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa	*Bandar Lampung*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING									CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																		I		II		III		
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN													
13												(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
28										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5													
29			7	01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	31,415,278.49	2	-	*1*	4,804,966.00	0.25	-		-		-	
30										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5													
31	xxx		**7**	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**100.00**	**40,305,427,655.88**	132	**9,115,702,555.00**	**98.00**	**6,156,694,075.00**	**23**	**1,762,576,032.00**		**1,763,676,834.00**		**805,959,680.00**	
32			7	01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	39,565,050,631.17	57		57	6,051,473,429.00	**57**	1,762,576,032.00		1,745,736,834.00		789,359,680.00	
33										Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	57													
34			7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	740,377,024.71	2		1	105,220,646.00	0.25	-		17,940,000.00		16,600,000.00	
35										Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5			-		-		-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AM
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA			
28										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5														
29			7	01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	31,415,278.49	-	0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa	*Bandar Lampung*	
30										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5													
31	**xxx**		**7**	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**100.00**	**40,305,427,655.88**	**-**	**23**	**4,332,212,546.00**	**23.47**	**70.37**	**155.00**	**13,447,915,101.00**	**155.00**	**33.37**	Kecamtan Rajabasa		
32			7	01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	39,565,050,631.17	-	**57**	4,297,672,546.00	100.00	71.02	57.00	4,297,672,546.00	100.00	**10.86**			
33										Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	57													
34			7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	740,377,024.71		0.25	34,540,000.00	25.00	32.83	2.25	34,540,000.00	45.00	**4.67**			
35										Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5				-				**-**			Kecamtan Rajabasa		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING									CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																		I		II		III		
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN													
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14												K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
36			**7**	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**279,842,899.86**	120	**35,327,880.00**	**98.00**	**39,885,526.00**	**20**	**-**		**-**		**-**	
37			7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	25,416,369.30	2		1	3,887,433.00	0.25	-		-			
38										Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5					-		-					
39			7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	144,825,144.81	2		1	22,151,002.00	0.25	-		-			
40										Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5					-		-		-			
41			7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	23,418,899.19	2		1	3,581,920.00	0.25	-		-			
42										Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5					-		-					
43			7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	31,382,810.36	2		1	4,800,000.00	0.25	-		-			
44										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5					-		-					
45			7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	35,731,755.23	2		1	5,465,171.00	0.25	-		-			
46										Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5					-		-					

NO.	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA		
		7	01	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	persen	98.00	279,842,899.86	-	20	-	20.41	-	140.00	35,327,880.00	142.86	12.62	Kecamtan Rajabasa	
		7	01	01	2	06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	25,416,369.30		0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5				-				-				
		7	01	01	2	06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	144,825,144.81		0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5				-				-				
		7	01	01	2	06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	23,418,899.19		0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5				-				-				
		7	01	01	2	06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	31,382,810.36		0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5				-				-				
		7	01	01	2	06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	35,731,755.23		0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5				-				-				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III		
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14												K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
47			7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	19,067,920.98	1.00		1	-	0.25	-					
48										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5					-		-		-			
49			**7**	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**560,557,601.11**	**80.00**		**98**	**42,262,730.00**	**20.00**	**-**		**-**		**41,631,660**	
50			7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	-	1.00		*1*	-	0.25	-					
51										Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10					-		-		-			
52			7	01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	455,948,233.24	1.00		*3*	30,262,730.00	0.25	-		-		29,637,000.00	
53										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10					-		-		-			
54			7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	104,609,367.87	1.00		*1*	12,000,000.00	0.25	-		-		11,994,660.00	
55										Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10					-		-		-			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA			
47			7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	19,067,920.98		0.25	-	25.00	#DIV/0!	1.25	-	25.00	-	Kecamtan Rajabasa		
48										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5				-				-					
49			**7**	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**560,557,601.11**	**-**	**20**	**41,631,660.00**	**20.41**	**98.51**	**100.00**	**41,631,660.00**	**102.04**	**7.43**	Kecamtan Rajabasa		
50			7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	-		0.25	-	25.00		1.25	-	12.50	#####	Kecamtan Rajabasa		
51										Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10				-				-					
52			7	01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	455,948,233.24		0.25	29,637,000.00	8.33	97.93	1.25	29,637,000.00	12.50	**6.50**	Kecamtan Rajabasa		
53										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10				-				-					
54			7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	104,609,367.87		0.25	11,994,660.00	25.00	99.96	1.25	11,994,660.00	12.50	**11.47**	Kecamtan Rajabasa		
55										Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10				-				-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING									CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
10																								
11																		I		II		III		
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN													
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14												K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
56			**7**	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**100.00**	**4,567,245,001.27**	120		**98.00**	**774,760,000.00**	**20.00**	**128,000,000.00**		**156,500,000.00**		**118,500,000**	
57			7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	158,875,477.45	2		1	24,300,000.00	0.25	-		-			
58										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5					-		-		-			
59			7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	4,408,369,523.81	2		1	750, 460, 000. 00	0.25	128,000,000.00		156,500,000.00		118,500,000.00	
60										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5					-		-		-			
61			**7**	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98.00**	**1,114,491,840.47**	120		**98**	**222,850,566.00**	**20**	**-**		**51,861,000.00**		**46,189,977**	
62			7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	220,137,338.51	2		1	45,772,400.00	0.25	-		12,102,400.00		13,077,097.00	
63										Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	1					-		-					
64			7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	809,218,841.34	2		3	163,528,600.00	0.25	-		39,758,600.00		33,112,880.00	
65										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit	10					-		-					
66			7	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	-	**1.00**		3	-	0.25	-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA			
56			**7**	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**100.00**	**4,567,245,001.27**	**-**	**20**	**403,000,000.00**	**20.41**	**52.02**	**140.00**	**403,000,000.00**	**140.00**	**8.82**	Kecamtan Rajabasa	
57			7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	158,875,477.45		0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa	
58										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5				-				-				
59			7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	4,408,369,523.81	-	0.25	403,000,000.00	25.00	53.70	2.25	403,000,000.00	45.00	**9.14**	Kecamtan Rajabasa	
60										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5				-				-				
61			**7**	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98.00**	**1,114,491,840.47**	**-**	**20**	**98,050,977.00**	**20.41**	**44.00**	**140.00**	**98,050,977.00**	**142.86**	**8.80**	Kecamtan Rajabasa	
62			7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	220,137,338.51		0.25	25,179,497.00	25.00	55.01	2.25	25,179,497.00	225.00	**11.44**	Kecamtan Rajabasa	
63										Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	1				-				-				
64			7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	809,218,841.34	-	0.25	72,871,480.00	8.33	44.56	2.25	72,871,480.00	22.50	**9.01**	Kecamtan Rajabasa	
65										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit	10				-				-				
66			7	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	-		0.25	-	8.33		1.25	-	15.63	#####	Kecamtan Rajabasa	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III	
13												(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
67										Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8					-		-					
68			7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	19,091,209.64	1.00		3	2,920,000.00	0.25	-		-			
69										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5					-		-					
70			7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	4,576,659.84	2		1	700,000.00	0.25	-		-			
71										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1			-		-		-					
72			7	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	61,467,791.14	2		1	9,929,566.00	0.25	-		-			
73										Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1			-		-		-					
74			**7**	**01**	**05**				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di**	**%**	**100.00**	**33,141,743.79**	30		**100**	**4,997,422.00**	**20.00**	**-**		**-**		**-**	
75			**7**	**01**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**33,141,743.79**	30		**100**	**4,997,422.00**	**20.00**	**-**		**-**		**-**	
76			7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	16,570,871.89	2		*1*	2,498,711.00	0.25	-		-			
77										Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat	dokumen	5					-		-					
78			7	01	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	16,570,871.89	2		*1*	2,498,711.00	0.25	-		-			
79										Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan	Orang	100					-		-					
80			**7**	**01**	**06**				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**33,141,743.79**	105		**100**	**4,997,422.00**	**20.00**	**-**		**-**		**-**	
81			**7**	**01**	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100**	**33,141,743.79**	105		**100**	**4,997,422.00**	**20.00**	**-**		**-**		**-**	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA			
67										Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8				-				-					
68			7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	19,091,209.64		0.25	-	8.33	-	1.25	-	25.00	-	Kecamtan Rajabasa	
69										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5				-				-					
70			7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	4,576,659.84		0.25	-	25.00	-	2.25	-	225.00	-	Kecamtan Rajabasa	
71										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1				-				-					
72			7	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	61,467,791.14		0.25	-	25.00	-	2.25	-	225.00	-	Kecamtan Rajabasa	
73										Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1				-				-					
74			**7**	**01**	**05**				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di**	**%**	**100.00**	**33,141,743.79**	**-**	**20**	**-**	**20.00**	**-**	**50.00**	**-**	**50.00**	**-**	Kecamtan Rajabasa	
75			**7**	**01**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**33,141,743.79**	**-**	**20**	**-**	**20.00**	**-**	**50.00**	**-**	**50.00**	**-**	Kecamtan Rajabasa	
76			7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	16,570,871.89		0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa	
77										Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat	dokumen	5				-				-					
78			7	01	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	16,570,871.89		0.25	-	25.00	-	2.25	-	2.25	-	Kecamtan Rajabasa	
79										Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan	Orang	100				-				-					
80			**7**	**01**	**06**				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**33,141,743.79**	**-**	**20**	**-**	**20.00**	**-**	**125.00**	**-**	**125.00**	**-**	Kecamtan Rajabasa	
81			**7**	**01**	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100**	**33,141,743.79**	**-**	**20**	**-**	**20.00**	**-**	**125.00**	**-**	**125.00**	**-**	Kecamtan Rajabasa	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III	
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14												K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
82			7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	16,570,871.89	2		*1*	2,498,711.00	0.25	-		-			
83										Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	5					-		-					
84			7	01	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	16,570,871.89	2		*1*	2,498,711.00	0.25	-		-			
85										Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Dokumen	5					-		-					
86		Meningkatnya keamanan dan ketertiban	**7**	**01**						Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan														
87			**7**	**01**	**02**				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan**	**%**	**100.00**	**14,990,848,814**	140		**100**	**3,142,460,347.00**	**25.00**	**661,500,000.00**		**694,500,000.00**		**441,000,000.00**	
88			**7**	**01**	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**244,698,037.53**	140		**100**	**36,897,858.00**	**25.00**	**-**		**33,000,000.00**		**-**	
89			7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	244,698,037.53	2		1	36,897,858.00	0.25	-		33,000,000.00		-	
90										Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Laporan	5			-		-		-					
91			**7**	**01**	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**14,746,150,776.10**	80		**100**	**3,105,562,489.00**	**10**	**661,500,000.00**		**661,500,000.00**		**441,000,000.00**	
92			7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	14,746,150,776.10	2		1	3,105,562,489.00	0.25	661,500,000.00		661,500,000.00		441,000,000.0000	
93										Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5			-		-		-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA			
82			7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	16,570,871.89		0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa		
83										Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	5				-				-					
84			7	01	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	16,570,871.89		0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa		
85										Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Dokumen	5				-				-					
86		Meningkatnya keamanan dan ketertiban	7	01						Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan					-	-							Kecamtan Rajabasa		
87			7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan	%	100.00	14,990,848,814	-	25	1,797,000,000.00	25.00	57.18	165.00	1,797,000,000.00	165.00	11.99	Kecamtan Rajabasa		
88			7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100.00	244,698,037.53	-	25	33,000,000.00	25.00	89.44	165.00	33,000,000.00	165.00	13.49	Kecamtan Rajabasa		
89			7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	244,698,037.53	-	0.25	33,000,000.00	25.00	89.44	2.25	33,000,000.00	45.00	13.49	Kecamtan Rajabasa		
90										Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Laporan	5				-				-					
91			7	01	02	2	02		Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100	14,746,150,776.10	-	10	1,764,000,000.00	10.00	56.80	90.00	1,764,000,000.00	90.00	11.96	Kecamtan Rajabasa		
92			7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	14,746,150,776.10	-	0.25	1,764,000,000.00	25.00	56.80	2.25	1,764,000,000.00	45.00	11.96	Kecamtan Rajabasa		
93										Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5				-				-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III	
13												(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
94			**7**	**01**	**03**				**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	**%**	**100**	**5,021,603,564.98**	140		**100**	**742,204,337.00**	**25**	**-**		**-**		**451,400,000.00**	
95			**7**	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**100**	**4,988,444,724.49**	140		**100**	**737,204,337.00**	**25**	**-**		**-**		**451,400,000.00**	
96			7	01	**03**	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	4,988,444,724.49	2		*1*	737,204,337.00	0.25	-		-		451,400,000.0000	
97										Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	5			-		-		-		-			
98			7	01	03	2	02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**%**	**80.00**		25.00		**80.00**	**-**							
99			7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang	unit	7		0.25		7	-							
100			**7**	**01**	**03**	**2**	**06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan**	**%**	**100**	**33,158,840.48**	40.00		**100**	**5,000,000.00**	**10**	**-**		**-**		**-**	
101									Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter	keluarga	7,000	3,315,884.05	1.00		1750	500,000.00	0.25	-					
102									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	keluarga	7,000	3,315,884.05	1.00		1750	500,000.00	0.25	-					
103									Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	keluarga	7,000	3,315,884.05	1.00		1750	500,000.00	0.25	-					
104									Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam	keluarga	7,000	3,315,884.05	1.00		1750	500,000.00	0.25	-					
105									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan	keluarga	7,000	3,315,884.05	1.00		1750	500,000.00	0.25	-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AM
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA			
94			**7**	**01**	**03**				**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	**%**	**100**	**5,021,603,564.98**	**-**	**25**	**451,400,000.00**	**25.00**	**60.82**	**165.00**	**451,400,000.00**	**165.00**	**8.99**	Kecamtan Rajabasa		
95			**7**	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**100**	**4,988,444,724.49**	**-**	**25**	**451,400,000.00**	**25.00**	**61.23**	**165.00**	**451,400,000.00**	**165.00**	**9.05**	Kecamtan Rajabasa		
96			7	01	**03**	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	4,988,444,724.49	-	0.25	451,400,000.00	25.00	61.23	2.25	451,400,000.00	45.00	**9.05**	Kecamtan Rajabasa		
97										Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	5				-				-					
98			7	01	03	2	02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**%**	**80.00**			**-**	**-**	**0.00**	**#DIV/0!**	**25.00**	**-**	**31.25**	**#####**			
99			7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang	unit	7			0.00	-	0.00		0.25	-	0.25	#####			
100			**7**	**01**	**03**	**2**	**06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan**	**%**	**100**	**33,158,840.48**	**-**	**10**	**-**	**10.00**	**-**	**50.00**	**-**	**50.00**	**-**	Kecamtan Rajabasa		
101									Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter	keluarga	7,000	3,315,884.05		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-			
102									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	keluarga	7,000	3,315,884.05		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-			
103									Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	keluarga	7,000	3,315,884.05		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-			
104									Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam	keluarga	7,000	3,315,884.05		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-			
105									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan	keluarga	7,000	3,315,884.05		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING									CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					
10																								
11																		I		II		III		
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN													
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14												K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
106									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		keluarga	7,000	3,315,884.05	1.00		1750	500,000.00	0.25	-				
107									Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		keluarga	7,000	3,315,884.05	1.00		1750	500,000.00	0.25	-				
108									Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		keluarga	7,000	3,315,884.05	1.00		1750	500,000.00	0.25	-				
109									Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		keluarga	7,000	3,315,884.05	1.00		1750	500,000.00	0.25	-				
110									Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		keluarga	7,000	3,315,884.05	1.00		1750	500,000.00	0.25	-				
111			**7**	**01**	**04**				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak**	**%**	**100**	**13,539,881,022**	**140**		**100**	**2,759,169,857.00**	**25**	**559,750,000.00**		**603,000,000.00**		**402,000,000**	
112			**7**	**01**	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah**	**%**	**100**	**13,539,881,022.13**	**140**		**100**	**2,759,169,857.00**	**25**	**559,750,000.00**		**603,000,000.00**		**402,000,000**	
113			7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	13,376,992,164.15	2		1	2,734,607,952.00	0.25	559,750,000.00		603,000,000.00		402,000,000.0000	
114										Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Laporan	5			-		-		-					
115			7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	162,888,857.98	2		1	24,561,905.00	0.25	-		-			
116										Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	Laporan	5			-		-		-					
117																								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA			
106									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		keluarga	7,000	3,315,884.05		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-			
107									Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		keluarga	7,000	3,315,884.05		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-			
108									Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		keluarga	7,000	3,315,884.05		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-			
109									Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		keluarga	7,000	3,315,884.05		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-			
110									Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		keluarga	7,000	3,315,884.05		0.25	-	0.01	-	1.25	-	1.25	-			
111			**7**	**01**	**04**				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak**	**%**	**100**	**13,539,881,022**	**-**	**25**	**1,564,750,000.00**	**25.00**	**56.71**	**165.00**	**1,564,750,000.00**	**165.00**	**11.56**			
112			**7**	**01**	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah**	**%**	**100**	**13,539,881,022.13**	**-**	**25**	**1,564,750,000.00**	**25.00**	**56.71**	**165.00**	**1,564,750,000.00**	**165.00**	**11.56**	Kecamtan Rajabasa		
113			7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	13,376,992,164.15	-	0.25	1,564,750,000.00	25.00	57.22	2.25	1,564,750,000.00	45.00	**11.70**	Kecamtan Rajabasa		
114										Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Laporan	5				-				-					
115			7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	162,888,857.98		0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa		
116										Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	Laporan	5				-				-					
117																									

NO.	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				80,541,109,906.22				13,904,801,520.00		3,111,826,032.00		3,269,537,834.00		2,306,681,317.00	
							TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:																					

NO.	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					IV								
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											80,541,109,906.22	-		8,688,045,183.00						62.42		
TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															xxx	62.48			xxx	xxx		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															xxx	xxx			xxx	xxx		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

Bandar Lampung, 2025

CAMAT RAJABASA

RACHMATSYAH, S.Pi

NIP. 19810314 200604 1 001

Formulir E. 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG

RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG

PERIODE PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2 TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Kecamatan Rajabasa

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN											I		II		III		
											K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
unsur kewilayahan																							
kecamatan																							
kecamatan Rajabasa											*98.00*	87,004,832,169.86	50.00	19,362,230,173.00	*98*	12,148,440,520.00	20.00	3,111,826,032.00		3,269,537,834.00	20	-	35
x	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan	7	01						Indeks kepuasan masyarakat														
xx		7	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan	persen	98.00	45,885,438,798.33	60.00	10,390,077,787.00	98.00	7,094,111,135.00	20	1,890,576,032.00		1,972,037,834.00		-	
xxx		7	01	01	2	01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100.00	197,193,366.57	60.00	2,312,800.00	98.00	14,519,238	20	-		-		-	
		7	01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	65,731,122.19	3	-	1.00	4,909,306.00	0.25	-		-		-	
									Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5												
		7	01	01	2	01	06	Kooedinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	65,731,122.19	2	2,312,800.00	*1*	4,804,966.00	0.25	-		-		-	

Indikator dan target kinerja Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Kecamatan Rajabasa

NO.	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH			K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)			(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
unsur kewilayahan																							
kecamatan																	xxx		xxx		xxx		
kecamatan Rajabasa										*98.00*	87,004,832,169.86	-	75	6,381,363,866.00	40.82	52.53	60.00	25,743,594,039.00		xxx		
x	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan	7	01					Indeks kepuasan masyarakat													Kecamtan Rajabasa	Bandar Lampung
xx		7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan	persen	98.00	45,885,438,798.33	-	20	3,862,613,866.00	20.41	54.45	60.00	14,252,691,653.00	61.22	31.06	Kecamtan Rajabasa	Bandar Lampung
xxx		7	01	01	2	01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100.00	197,193,366.57	-	20	-	20.41	-	60.00	2,312,800.00	60.00	1.17	Kecamtan Rajabasa	Bandar Lampung
		7	01	01	2	01	01 Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	65,731,122.19	-	0.25	-	25.00	-	3.25	-	65.00	-	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5											Kecamtan Rajabasa	
		7	01	01	2	01	06 Kooedinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	65,731,122.19	-	0.25	-	25.00	-	2.25	2,312,800.00	45.00	**3.52**	Kecamtan Rajabasa	*Bandar Lampung*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III	
13												(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
28										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5													
29			7	01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	65,731,122.19	2	-	*1*	4,804,966.00	0.25	-		-		-	
30										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5												
31	xxx		**7**	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**100.00**	**38,444,066,394.63**	132	**9,115,702,555.00**	**98.00**	**6,156,694,075.00**	**23**	**1,762,576,032.00**		**1,763,676,834.00**		**-**	
32			7	01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	37,904,570,272.06	57	9,002,179,155.00	57	6,051,473,429.00	**57**	1,762,576,032.00		1,745,736,834.00		-	
33										Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	57												
34			7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	539,496,122.57	2	113,523,400.00	1	105,220,646.00	0.25	-		17,940,000.00			
35										Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5			-		-		-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA			
28										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5														
29			7	01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	65,731,122.19	-	0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa	*Bandar Lampung*	
30										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5													
31	xxx		**7**	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**100.00**	**38,444,066,394.63**	**-**	**23**	**3,526,252,866.00**	**23.47**	**57.28**	**155.00**	**12,641,955,421.00**	**155.00**	**32.88**	Kecamtan Rajabasa		
32			7	01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	37,904,570,272.06	-	**57**	3,508,312,866.00	100.00	57.97	57.00	12,510,492,021.00	100.00	**33.01**			
33										Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	57													
34			7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	539,496,122.57		0.25	17,940,000.00	25.00	17.05	2.25	131,463,400.00	45.00	**24.37**			
35										Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5				-				**-**			Kecamtan Rajabasa		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III	
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14												K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
36			**7**	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**483,824,022.15**	120	**35,327,880.00**	**98.00**	**39,885,526.00**	**20**	**-**		**-**		**-**	
37			7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	25,384,705.56	2	4,385,000.00	1	3,887,433.00	0.25	-		-			
38										Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5					-	-						
39			7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	136,505,173.51	2	17,086,065.00	1	22,151,002.00	0.25	-		-			
40										Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5					-	-		-			
41			7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	23,383,920.91	2	4,761,815.00	1	3,581,920.00	0.25	-		-			
42										Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5					-	-		-			
43			7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	141,835,655.00	2	6,600,000.00	1	4,800,000.00	0.25	-		-			
44										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5					-	-		-			
45			7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	46,201,942.17	2	2,495,000.00	1	5,465,171.00	0.25	-		-			
46										Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5					-	-		-			

NO.	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		URUSAN	BIDANG URUSAN PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN																
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA		
		7	**01**	**01**	**2**	**06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**483,824,022.15**	**-**	**20**	**-**	**20.41**	**-**	**140.00**	**35,327,880.00**	**142.86**	**7.30**	Kecamtan Rajabasa	
		7	01	01	2	06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	25,384,705.56		0.25	-	25.00	-	2.25	4,385,000.00	45.00	**17.27**	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	-			-			-	**-**			
		7	01	01	2	06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	136,505,173.51		0.25	-	25.00	-	2.25	17,086,065.00	45.00	**12.52**	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	-			-			-	**-**			
		7	01	01	2	06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	23,383,920.91		0.25	-	25.00	-	2.25	4,761,815.00	45.00	**20.36**	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	-			-			-	**-**			
		7	01	01	2	06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	141,835,655.00		0.25	-	25.00	-	2.25	6,600,000.00	45.00	**4.65**	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	-			-			-	**-**			
		7	01	01	2	06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	46,201,942.17		0.25	-	25.00	-	2.25	2,495,000.00	45.00	**5.40**	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	-			-			-	**-**			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III		
13												(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
47			7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	110,512,625.00	1.00	0.00	1	-	0.25	-					
48										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5					-		-		-			
49			**7**	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**259,519,300.78**	**80.00**	**0.00**	**98**	**42,262,730.00**	**20.00**	**-**		**-**		**-**	
50			7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	139,512,625.00	1.00	0.00	*1*	-	0.25	-					
51										Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10					-		-					
52			7	01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	78,730,681.25	1.00	0.00	*3*	30,262,730.00	0.25	-		-			
53										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10					-		-					
54			7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	41,275,994.53	1.00	0.00	*1*	12,000,000.00	0.25	-		-			
55										Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10					-		-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA			
47			7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	110,512,625.00		0.25	-	25.00	#DIV/0!	1.25	-	25.00	-	Kecamtan Rajabasa		
48										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5				-				-					
49			**7**	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**259,519,300.78**	**-**	**20**	**-**	**20.41**	**-**	**100.00**	**-**	**102.04**	**-**	Kecamtan Rajabasa		
50			7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	139,512,625.00		0.25	-	25.00		1.25	-	12.50	-	Kecamtan Rajabasa		
51										Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10				-				-					
52			7	01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	78,730,681.25		0.25	-	8.33	-	1.25	-	12.50	-	Kecamtan Rajabasa		
53										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10				-				-					
54			7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	41,275,994.53		0.25	-	25.00	-	1.25	-	12.50	-	Kecamtan Rajabasa		
55										Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10				-				-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III	
13												(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
56			**7**	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**100.00**	**4,557,349,603.50**	120	**1,002,015,202.00**	**98.00**	**669,760,000.00**	**20.00**	**128,000,000.00**		**156,500,000.00**		**-**	
57			7	01	01	2	08	02	Penyediaaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	272,076,512.50	2	29,940,202.00	1	24,300,000.00	0.25	-		-			
58										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5					-		-					
59			7	01	01	2	08	04	Penyediaaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	4,285,273,091.00	2	972,075,000.00	1	645, 460, 000. 00	0.25	128,000,000.00		156,500,000.00		-	
60										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5					-		-					
61			**7**	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98.00**	**1,943,486,110.70**	120	**234,719,350.00**	**98**	**170,989,566.00**	**20**	**-**		**51,861,000.00**		**-**	
62			7	01	01	2	09	01	Penyediaaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	228,082,338.98	2	42,828,100.00	1	33,670,000.00	0.25	-		12,102,400.00			
63										Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	1					-		-					
64			7	01	01	2	09	02	Penyediaaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1,423,945,403.84	2	142,691,250.00	3	123,770,000.00	0.25	-		39,758,600.00		-	
65										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit	10					-		-					
66			7	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	13,814,078.12	**1.00**	**0.00**	3	-	0.25	-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA			
56			**7**	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**100.00**	**4,557,349,603.50**	**-**	**20**	**284,500,000.00**	**20.41**	**42.48**	**140.00**	**1,286,515,202.00**	**140.00**	**28.23**	Kecamtan Rajabasa		
57			7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	272,076,512.50		0.25	-	25.00	-	2.25	29,940,202.00	45.00	**11.00**	Kecamtan Rajabasa		
58										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5				-				-					
59			7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	4,285,273,091.00	-	0.25	284,500,000.00	25.00	44.08	2.25	1,256,575,000.00	45.00	**29.32**	Kecamtan Rajabasa		
60										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5				-				-					
61			**7**	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98.00**	**1,943,486,110.70**	**-**	**20**	**51,861,000.00**	**20.41**	**30.33**	**140.00**	**286,580,350.00**	**142.86**	**14.75**	Kecamtan Rajabasa		
62			7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	228,082,338.98		0.25	12,102,400.00	25.00	35.94	2.25	54,930,500.00	225.00	**24.08**	Kecamtan Rajabasa		
63										Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	1				-				-					
64			7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1,423,945,403.84	-	0.25	39,758,600.00	8.33	32.12	2.25	182,449,850.00	22.50	**12.81**	Kecamtan Rajabasa		
65										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit	10				-				-					
66			7	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	13,814,078.12		0.25	-	8.33		1.25	-	15.63	**-**	Kecamtan Rajabasa		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III	
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14												K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
67										Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8					-		-					
68			7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	13,814,078.12	1.00	0.00	3	2,920,000.00	0.25	-		-			
69										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5					-		-					
70			7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	203,043,956.56	2	47,500,000.00	1	700,000.00	0.25	-		-			
71										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1			-		-		-					
72			7	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	60,786,255.08	2	1,700,000.00	1	9,929,566.00	0.25	-		-			
73										Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1			-		-		-					
74			**7**	**01**	**05**				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di**	**%**	**100.00**	**290,095,604.63**	30	**0.00**	**100**	**4,997,422.00**	**20.00**	**-**		**-**		**-**	
75			**7**	**01**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**290,095,604.63**	30	**0.00**	**100**	**4,997,422.00**	**20.00**	**-**		**-**		**-**	
76			7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124,326,667.13	2	0.00	*1*	2,498,711.00	0.25	-		-			
77										Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat	dokumen	5					-		-					
78			7	01	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165,768,937.50	2	0.00	*1*	2,498,711.00	0.25	-		-			
79										Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan	Orang	100					-		-					
80			**7**	**01**	**06**				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290,095,604.63**	105	**0.00**	**100**	**4,997,422.00**	**20.00**	**-**		**-**		**-**	
81			**7**	**01**	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100**	**290,095,604.63**	105	**0.00**	**100**	**4,997,422.00**	**20.00**	**-**		**-**		**-**	

NO.	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA		
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8				-				-				
		7	01	01	2	09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	13,814,078.12		0.25	-	8.33	-	1.25	-	25.00	-	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5				-				-				
		7	01	01	2	09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	203,043,956.56		0.25	-	25.00	-	2.25	47,500,000.00	225.00	23.39	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1				-				-				
		7	01	01	2	09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	60,786,255.08		0.25	-	25.00	-	2.25	1,700,000.00	225.00	2.80	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1				-				-				
		7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di**	**%**	**100.00**	**290,095,604.63**	**-**	**20**	**-**	**20.00**	**-**	**50.00**	**-**	**50.00**	**-**	Kecamtan Rajabasa	
		7	**01**	**05**	**2**	**01**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**290,095,604.63**	**-**	**20**	**-**	**20.00**	**-**	**50.00**	**-**	**50.00**	**-**	Kecamtan Rajabasa	
		7	01	05	2	01	08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124,326,667.13		0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat	dokumen	5				-				-				
		7	01	05	2	01	02 Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165,768,937.50		0.25	-	25.00	-	2.25	-	2.25	-	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan	Orang	100				-				-				
		7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290,095,604.63**	**-**	**20**	**-**	**20.00**	**-**	**125.00**	**-**	**125.00**	**-**	Kecamtan Rajabasa	
		7	**01**	**06**	**2**	**01**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100**	**290,095,604.63**	**-**	**20**	**-**	**20.00**	**-**	**125.00**	**-**	**125.00**	**-**	Kecamtan Rajabasa	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III	
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14												K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
82			7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165,768,937.50	2	0.00	*1*	2,498,711.00	0.25	-		-			
83										Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	5					-		-					
84			7	01	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124,326,667.13	2	0.00	*1*	2,498,711.00	0.25	-		-			
85										Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Dokumen	5					-		-					
86		**Meningkatnya keamanan dan ketertiban**	**7**	**01**						**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**														
87			**7**	**01**	**02**				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan**	**%**	**100.00**	**18,612,215,813**	140	**5,086,364,386.00**	**100**	**2,260,460,347.00**	**25.00**	**661,500,000.00**		**694,500,000.00**		**-**		
88			**7**	**01**	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**294,974,846.59**	140	21,156,882.00	**100**	**36,897,858.00**	**25.00**	**-**		**33,000,000.00**		**-**		
89			7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	294,974,846.59	2	21,156,882.00	1	36,897,858.00	0.25	-		33,000,000.00		-		
90										Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Laporan	5			-		-		-							
91			**7**	**01**	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**18,317,240,966.27**	80	**5,065,207,504.00**	**100**	**2,223,562,489.00**	**10**	**661,500,000.00**		**661,500,000.00**		**-**		
92			7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	18,317,240,966.27	2	5,065,207,504.00	1	2,223,562,489.00	0.25	661,500,000.00		661,500,000.00		-		
93										Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5			-		-		-						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA			
82			7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165,768,937.50		0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa		
83										Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	5				-				-					
84			7	01	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124,326,667.13		0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa		
85										Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Dokumen	5				-				-					
86		Meningkatnya keamanan dan ketertiban	7	01						Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan					-	-							Kecamtan Rajabasa		
87			7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan	%	100.00	18,612,215,813	-	25	1,356,000,000.00	25.00	59.99	165.00	6,442,364,386.00	165.00	34.61	Kecamtan Rajabasa		
88			7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100.00	294,974,846.59	-	25	33,000,000.00	25.00	89.44	165.00	54,156,882.00	165.00	18.36	Kecamtan Rajabasa		
89			7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	294,974,846.59	-	0.25	33,000,000.00	25.00	89.44	2.25	54,156,882.00	45.00	18.36	Kecamtan Rajabasa		
90										Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Laporan	5				-				-					
91			7	01	02	2	02		Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100	18,317,240,966.27	-	10	1,323,000,000.00	10.00	59.50	90.00	6,388,207,504.00	90.00	34.88	Kecamtan Rajabasa		
92			7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	18,317,240,966.27	-	0.25	1,323,000,000.00	25.00	59.50	2.25	6,388,207,504.00	45.00	34.88	Kecamtan Rajabasa		
93										Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5				-				-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III		
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14												K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
94			**7**	**01**	**03**				**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	**%**	**100**	**8,098,731,499.77**	140	215,313,000.00	**100**	**742,204,337.00**	**25**	**-**		**-**		**-**	
95			**7**	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**100**	**8,098,731,499.77**	140	215,313,000.00	**100**	**737,204,337.00**	**25**	**-**		**-**		**-**	
96			7	01	**03**	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	8,098,731,499.77	2	215,313,000.00	*1*	737,204,337.00	0.25	-		-		-	
97										Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	5			-		-		-		-			
98			7	01	03	2	02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**%**	**80.00**	**700,000,000**	25.00	**0.00**	**80.00**	**-**							
99			7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang	unit	7		0.25	**0.00**	7	-							
100			**7**	**01**	**03**	**2**	**06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan**	**%**	**100**	**350,000,000.00**	40.00	**0.00**	**100**	**5,000,000.00**	**10**	**-**		**-**		**-**	
101									Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter	keluarga	7,000	35,000,000.00	1.00	0.00	1750	500,000.00	0.25	-					
102									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	keluarga	7,000	35,000,000.00	1.00	0.00	1750	500,000.00	0.25	-					
103									Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	keluarga	7,000	35,000,000.00	1.00	0.00	1750	500,000.00	0.25	-					
104									Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam	keluarga	7,000	35,000,000.00	1.00	0.00	1750	500,000.00	0.25	-					
105									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan	keluarga	7,000	35,000,000.00	1.00	0.00	1750	500,000.00	0.25	-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA			
94			**7**	**01**	**03**				**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	**%**	**100**	**8,098,731,499.77**	**-**	**25**	**-**	**25.00**	**-**	**165.00**	**215,313,000.00**	**165.00**	**2.66**	Kecamtan Rajabasa	
95			**7**	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**100**	**8,098,731,499.77**	**-**	**25**	**-**	**25.00**	**-**	**165.00**	**215,313,000.00**	**165.00**	**2.66**	Kecamtan Rajabasa	
96			7	01	**03**	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	8,098,731,499.77	-	0.25	-	25.00	-	2.25	215,313,000.00	45.00	**2.66**	Kecamtan Rajabasa	
97										Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	5				-				-					
98			7	01	03	2	02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**%**	**80.00**	**700,000,000**		**-**	**-**	**0.00**	**#DIV/0!**	**25.00**	**-**	**31.25**	**-**		
99			7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang	unit	7			0.00	-	0.00		0.25	-	0.25	#####		
100			**7**	**01**	**03**	**2**	**06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan**	**%**	**100**	**350,000,000.00**	**-**	**10**	**-**	**10.00**	**-**	**50.00**	**-**	**50.00**	**-**	Kecamtan Rajabasa	
101									Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter	keluarga	7,000	35,000,000.00		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-		
102									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	keluarga	7,000	35,000,000.00		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-		
103									Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	keluarga	7,000	35,000,000.00		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-		
104									Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam	keluarga	7,000	35,000,000.00		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-		
105									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan	keluarga	7,000	35,000,000.00		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III		
13												(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
106									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		keluarga	7,000	35,000,000.00	1.00	0.00	1750	500,000.00	0.25	-				
107									Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		keluarga	7,000	35,000,000.00	1.00	0.00	1750	500,000.00	0.25	-				
108									Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		keluarga	7,000	35,000,000.00	1.00	0.00	1750	500,000.00	0.25	-				
109									Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		keluarga	7,000	35,000,000.00	1.00	0.00	1750	500,000.00	0.25	-				
110									Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		keluarga	7,000	35,000,000.00	1.00	0.00	1750	500,000.00	0.25	-				
111			**7**	**01**	**04**				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak**	**%**	**100**	**13,828,254,850**	**140**	**3,670,475,000.00**	**100**	**2,041,669,857.00**	**25**	**559,750,000.00**		**603,000,000.00**		**-**	
112			**7**	**01**	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah**	**%**	**100**	**13,828,254,849.64**	**140**	3,670,475,000.00	**100**	**2,041,669,857.00**	**25**	**559,750,000.00**		**603,000,000.00**		**-**	
113			7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	13,697,079,849.64	2	3,638,225,000.00	1	2,017,107,952.00	0.25	559,750,000.00		603,000,000.00		-	
114										Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Laporan	5			-		-		-					
115			7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	131,175,000.00	2	32,250,000.00	1	24,561,905.00	0.25	-		-			
116										Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	Laporan	5			-		-		-					
117																								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA			
106									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		keluarga	7,000	35,000,000.00		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-			
107									Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		keluarga	7,000	35,000,000.00		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-			
108									Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		keluarga	7,000	35,000,000.00		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-			
109									Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		keluarga	7,000	35,000,000.00		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-			
110									Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		keluarga	7,000	35,000,000.00		0.25	-	0.01	-	1.25	-	1.25	-			
111			**7**	**01**	**04**				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak**	**%**	**100**	**13,828,254,850**	**-**	**25**	**1,162,750,000.00**	**25.00**	**56.95**	**165.00**	**4,833,225,000.00**	**165.00**	**34.95**			
112			**7**	**01**	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah**	**%**	**100**	**13,828,254,849.64**	**-**	**25**	**1,162,750,000.00**	**25.00**	**56.95**	**165.00**	**4,833,225,000.00**	**165.00**	**34.95**	Kecamtan Rajabasa		
113			7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	13,697,079,849.64	-	0.25	1,162,750,000.00	25.00	57.64	2.25	4,800,975,000.00	45.00	**35.05**	Kecamtan Rajabasa		
114										Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Laporan	5				-				-					
115			7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	131,175,000.00		0.25	-	25.00	-	2.25	32,250,000.00	45.00	**24.59**	Kecamtan Rajabasa		
116										Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	Laporan	5				-				-					
117																									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III	
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14												K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
118																								
119	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												87,004,832,169.86				12,148,440,520.00		3,111,826,032.00		3,269,537,834.00		-	
120																								
121	TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																							
122	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																							
123																								
124	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																							
125	Faktor penghambat pencapaian kinerja:																							
126	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																							
127	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:																							
128																								
129																								
130																								
131																								
132																								
133																								
134																								
135																								
136																								
137																								
138																								
139																								

NO.	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN															
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											87,004,832,169.86	-		6,381,363,866.00						####		
TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															xxx	52.53			xxx	xxx		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															xxx	xxx			xxx	xxx		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

Bandar Lampung, 2025

CAMAT RAJABASA

RACHMATSYAH, S.Pi

NIP. 19810314 200604 1 001

Formulir E. 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG

RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG

PERIODE PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Kecamatan Rajabasa

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN											I		II		III		
											K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
unsur kewilayahan																							
kecamatan																							
kecamatan Rajabasa											*98.00*	87,004,832,169.86	50.00	19,362,230,173.00	*98*	12,199,732,451.00	20.00	3,111,826,032.00		-	20	-	35
x	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan	7	01						Indeks kepuasan masyarakat														
xx		7	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan	persen	98.00	45,885,438,798.33	60.00	10,390,077,787.00	98.00		20	1,890,576,032.00		-		-		
xxx		7	01	01	2	01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100.00	197,193,366.57	60.00	2,312,800.00	98.00	14,519,238	20	-		-		-		
		7	01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	65,731,122.19	3	-	1.00	4,909,306.00	0.25	-		-		-		
									Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5													
		7	01	01	2	01	06	Kooedinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	65,731,122.19	2	2,312,800.00	*1*	4,804,966.00	0.25	-		-		-		

Indikator dan target kinerja Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Kecamatan Rajabasa

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
											K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K		K	RUPIAH	K			
unsur kewilayahan																							
kecamatan																	xxx		xxx		xxx		
kecamatan Rajabasa											*98.00*	87,004,832,169.86	-	75	3,111,826,032.00	40.82	25.51	60.00	22,474,056,205.00		xxx		
x	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan	7	01						Indeks kepuasan masyarakat													Kecamtan Rajabasa	Bandar Lampung
xx		7	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan	persen	98.00	45,885,438,798.33	-	20	1,890,576,032.00	20.41	26.51	60.00	12,280,653,819.00	61.22	26.76	Kecamtan Rajabasa	Bandar Lampung
xxx		7	01	01	2	01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100.00	197,193,366.57	-	20	-	20.41	-	60.00	2,312,800.00	60.00	1.17	Kecamtan Rajabasa	Bandar Lampung
		7	01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	65,731,122.19	-	0.25	-	25.00	-	3.25	-	65.00	-	Kecamtan Rajabasa	
									Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5											Kecamtan Rajabasa	
		7	01	01	2	01	06	Kooedinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	65,731,122.19	-	0.25	-	25.00	-	2.25	2,312,800.00	45.00	**3.52**	Kecamtan Rajabasa	*Bandar Lampung*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III	
13												(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
28										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5													
29			7	01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	65,731,122.19	2	-	*1*	4,804,966.00	0.25	-		-		-	
30										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5												
31	xxx		**7**	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**100.00**	**38,444,066,394.63**	132	**9,115,702,555.00**	**98.00**	**6,164,714,075.00**	**23**	**1,762,576,032.00**		**-**		**-**	
32			7	01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	37,904,570,272.06	57	9,002,179,155.00	57	6,051,473,429.00	**57**	1,762,576,032.00		-		-	
33										Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	57												
34			7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	539,496,122.57	2	113,523,400.00	1	113,240,646.00	0.25	-					
35										Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5			-		-		-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA			
28										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5														
29			7	01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	65,731,122.19	-	0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa	*Bandar Lampung*	
30										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5													
31	**xxx**		**7**	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**100.00**	**38,444,066,394.63**	**-**	**23**	**1,762,576,032.00**	**23.47**	**28.59**	**155.00**	**10,878,278,587.00**	**155.00**	**28.30**	Kecamtan Rajabasa		
32			7	01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	37,904,570,272.06	-	**57**	4,549,368,172.00	100.00	75.18	57.00	13,551,547,327.00	100.00	**35.75**			
33										Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	57													
34			7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	539,496,122.57		0.25	52,850,000.00	25.00	46.67	2.25	166,373,400.00	45.00	**30.84**			
35										Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5				-				**-**			Kecamtan Rajabasa		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III	
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14												K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
36			**7**	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**483,824,022.15**	120	**35,327,880.00**	**98.00**	**39,885,526.00**	**20**	**-**		**-**		**-**	
37			7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	25,384,705.56	2	4,385,000.00	1	3,887,433.00	0.25	-					
38										Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5					-	-						
39			7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	136,505,173.51	2	17,086,065.00	1	22,151,002.00	0.25	-					
40										Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5					-	-						
41			7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	23,383,920.91	2	4,761,815.00	1	3,581,920.00	0.25	-					
42										Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5					-	-						
43			7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	141,835,655.00	2	6,600,000.00	1	4,800,000.00	0.25	-					
44										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5					-	-						
45			7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	46,201,942.17	2	2,495,000.00	1	5,465,171.00	0.25	-					
46										Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5					-	-						

NO.	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA		
		7	**01**	**01**	**2**	**06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**483,824,022.15**	**-**	**20**	**-**	**20.41**	**-**	**140.00**	**35,327,880.00**	**142.86**	**7.30**	Kecamtan Rajabasa	
		7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	25,384,705.56		0.25	-	25.00	-	2.25	4,385,000.00	45.00	**17.27**	Kecamtan Rajabasa	
									Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5				-				**-**			
		7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	136,505,173.51		0.25	-	25.00	-	2.25	17,086,065.00	45.00	**12.52**	Kecamtan Rajabasa	
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5				-				**-**			
		7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	23,383,920.91		0.25	-	25.00	-	2.25	4,761,815.00	45.00	**20.36**	Kecamtan Rajabasa	
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5				-				**-**			
		7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	141,835,655.00		0.25	-	25.00	-	2.25	6,600,000.00	45.00	**4.65**	Kecamtan Rajabasa	
									Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5				-				**-**			
		7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	46,201,942.17		0.25	-	25.00	-	2.25	2,495,000.00	45.00	**5.40**	Kecamtan Rajabasa	
									Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5				-				**-**			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III	
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14												K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
47			7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	110,512,625.00	1.00	0.00	1	-	0.25	-					
48										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5					-		-					
49			**7**	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**259,519,300.78**	**80.00**	**0.00**	**98**	**42,262,730.00**	**20.00**	**-**		**-**		**-**	
50			7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	139,512,625.00	1.00	0.00	*1*	-	0.25	-					
51										Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10					-		-					
52			7	01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	78,730,681.25	1.00	0.00	*3*	30,262,730.00	0.25	-					
53										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10					-		-					
54			7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	41,275,994.53	1.00	0.00	*1*	12,000,000.00	0.25	-					
55										Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10					-		-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA			
47			7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	110,512,625.00		0.25	-	25.00	#DIV/0!	1.25	-	25.00	-	Kecamtan Rajabasa		
48										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5				-				-					
49			**7**	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**259,519,300.78**	**-**	**20**	**-**	**20.41**	**-**	**100.00**	**-**	**102.04**	**-**	Kecamtan Rajabasa		
50			7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	139,512,625.00		0.25	-	25.00		1.25	-	12.50	-	Kecamtan Rajabasa		
51										Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10				-				-					
52			7	01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	78,730,681.25		0.25	-	8.33	-	1.25	-	12.50	-	Kecamtan Rajabasa		
53										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10				-				-					
54			7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	41,275,994.53		0.25	-	25.00	-	1.25	-	12.50	-	Kecamtan Rajabasa		
55										Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10				-				-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III	
13												(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
56			**7**	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**100.00**	**4,557,349,603.50**	120	**1,002,015,202.00**	**98.00**	**698,560,000.00**	**20.00**	**128,000,000.00**		**-**		**-**	
57			7	01	01	2	08	02	Penyediaaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	272,076,512.50	2	29,940,202.00	1	24,300,000.00	0.25	-					
58										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5					-	-						
59			7	01	01	2	08	04	Penyediaaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	4,285,273,091.00	2	972,075,000.00	1	674, 260, 000. 00	0.25	128,000,000.00		-		-	
60										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5					-	-						
61			**7**	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98.00**	**1,943,486,110.70**	120	**234,719,350.00**	**98**	**170,461,497.00**	**20**	**-**		**-**		**-**	
62			7	01	01	2	09	01	Penyediaaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	228,082,338.98	2	42,828,100.00	1	33,670,000.00	0.25	-					
63										Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	1					-	-						
64			7	01	01	2	09	02	Penyediaaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1,423,945,403.84	2	142,691,250.00	3	123,770,000.00	0.25	-		-		-	
65										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit	10					-	-						
66			7	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	13,814,078.12	**1.00**	**0.00**	3	-	0.25	-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA			
56			**7**	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**100.00**	**4,557,349,603.50**	**-**	**20**	**128,000,000.00**	**20.41**	**18.32**	**140.00**	**1,130,015,202.00**	**140.00**	**24.80**	Kecamtan Rajabasa	
57			7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	272,076,512.50		0.25	-	25.00	-	2.25	29,940,202.00	45.00	**11.00**	Kecamtan Rajabasa	
58										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5				-				**-**				
59			7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	4,285,273,091.00	-	0.25	128,000,000.00	25.00	18.98	2.25	1,100,075,000.00	45.00	**25.67**	Kecamtan Rajabasa	
60										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5				-				**-**				
61			**7**	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98.00**	**1,943,486,110.70**	**-**	**20**	**-**	**20.41**	**-**	**140.00**	**234,719,350.00**	**142.86**	**12.08**	Kecamtan Rajabasa	
62			7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	228,082,338.98		0.25	-	25.00	-	2.25	42,828,100.00	225.00	**18.78**	Kecamtan Rajabasa	
63										Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	1				-				**-**				
64			7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1,423,945,403.84	-	0.25	-	8.33	-	2.25	142,691,250.00	22.50	**10.02**	Kecamtan Rajabasa	
65										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit	10				-				**-**				
66			7	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	13,814,078.12		0.25	-	8.33		1.25	-	15.63	**-**	Kecamtan Rajabasa	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III		
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14												K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
67										Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8					-		-					
68			7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	13,814,078.12	1.00	0.00	3	2,920,000.00	0.25	-					
69										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5					-		-					
70			7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	203,043,956.56	2	47,500,000.00	1	700,000.00	0.25	-					
71										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1			-		-		-					
72			7	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	60,786,255.08	2	1,700,000.00	1	9,401,497.00	0.25	-					
73										Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1			-		-		-					
74			**7**	**01**	**05**				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di**	**%**	**100.00**	**290,095,604.63**	30	**0.00**	**100**	**4,997,422.00**	**20.00**	**-**		**-**		**-**	
75			**7**	**01**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**290,095,604.63**	30	**0.00**	**100**	**4,997,422**	**20.00**	**-**		**-**		**-**	
76			7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124,326,667.13	2	0.00	*1*	2,498,711.00	0.25	-					
77										Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat	dokumen	5					-		-					
78			7	01	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165,768,937.50	2	0.00	*1*	2,498,711.00	0.25	-					
79										Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan	Orang	100					-		-					
80			**7**	**01**	**06**				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290,095,604.63**	105	**0.00**	**100**	**4,997,422.00**	**20.00**	**-**		**-**		**-**	
81			**7**	**01**	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100**	**290,095,604.63**	105	**0.00**	**100**	**4,997,422**	**20.00**	**-**		**-**		**-**	

NO.	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA		
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8				-				-				
		7	01	01	2	09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	13,814,078.12		0.25	-	8.33	-	1.25	-	25.00	-	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5				-				-				
		7	01	01	2	09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	203,043,956.56		0.25	-	25.00	-	2.25	47,500,000.00	225.00	23.39	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1				-				-				
		7	01	01	2	09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	60,786,255.08		0.25	-	25.00	-	2.25	1,700,000.00	225.00	2.80	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1				-				-				
		7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di**	**%**	**100.00**	**290,095,604.63**	**-**	**20**	**-**	**20.00**	**-**	**50.00**	**-**	**50.00**	**-**	Kecamtan Rajabasa	
		7	**01**	**05**	**2**	**01**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**290,095,604.63**	**-**	**20**	**-**	**20.00**	**-**	**50.00**	**-**	**50.00**	**-**	Kecamtan Rajabasa	
		7	01	05	2	01	08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124,326,667.13		0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat	dokumen	5				-				-				
		7	01	05	2	01	02 Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165,768,937.50		0.25	-	25.00	-	2.25	-	2.25	-	Kecamtan Rajabasa	
								Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan	Orang	100				-				-				
		7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290,095,604.63**	**-**	**20**	**-**	**20.00**	**-**	**125.00**	**-**	**125.00**	**-**	Kecamtan Rajabasa	
		7	**01**	**06**	**2**	**01**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100**	**290,095,604.63**	**-**	**20**	**-**	**20.00**	**-**	**125.00**	**-**	**125.00**	**-**	Kecamtan Rajabasa	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III	
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14												K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
82			7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165,768,937.50	2	0.00	*1*	2,498,711.00	0.25	-					
83										Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	5					-		-					
84			7	01	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124,326,667.13	2	0.00	*1*	2,498,711.00	0.25	-					
85										Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Dokumen	5					-		-					
86		Meningkatnya keamanan dan ketertiban	**7**	**01**						Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan														
87			**7**	**01**	**02**				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan**	**%**	**100.00**	**18,612,215,813**	140	**5,086,364,386.00**	**100**	**2,260,460,347.00**	**25.00**	**661,500,000**		**-**		**-**	
88			**7**	**01**	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100.00**	**294,974,846.59**	140	21,156,882.00	**100**	**36,897,858.00**	**25.00**	**-**		**-**		**-**	
89			7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	294,974,846.59	2	21,156,882.00	1	36,897,858.00	0.25	-		-		-	
90										Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Laporan	5			-		-		-		-				
91			**7**	**01**	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**18,317,240,966.27**	80	**5,065,207,504**	**100**	**2,223,562,489**	**10**	**661,500,000**		**-**		**-**	
92			7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	18,317,240,966.27	2	5,065,207,504.00	1	2,223,562,489.00	0.25	661,500,000.00		-		-	
93										Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5			-		-		-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA			
82			7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165,768,937.50		0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa		
83										Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	5				-				-					
84			7	01	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124,326,667.13		0.25	-	25.00	-	2.25	-	45.00	-	Kecamtan Rajabasa		
85										Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Dokumen	5				-				-					
86		Meningkatnya keamanan dan ketertiban	7	01						Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan					-	-							Kecamtan Rajabasa		
87			7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan	%	100.00	18,612,215,813	-	25	661,500,000.00	25.00	29.26	165.00	5,747,864,386.00	165.00	30.88	Kecamtan Rajabasa		
88			7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100.00	294,974,846.59	-	25	-	25.00	-	165.00	21,156,882.00	165.00	7.17	Kecamtan Rajabasa		
89			7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	294,974,846.59	-	0.25	-	25.00	-	2.25	21,156,882.00	45.00	7.17	Kecamtan Rajabasa		
90										Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Laporan	5				-				-					
91			7	01	02	2	02		Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100	18,317,240,966.27	-	10	661,500,000.00	10.00	29.75	90.00	5,726,707,504.00	90.00	31.26	Kecamtan Rajabasa		
92			7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	18,317,240,966.27	-	0.25	661,500,000.00	25.00	29.75	2.25	5,726,707,504.00	45.00	31.26	Kecamtan Rajabasa		
93										Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5				-				-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III		
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14												K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
94			**7**	**01**	**03**				**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	**%**	**100**	**8,098,731,499.77**	140	215,313,000.00	**100**	**757,204,337.00**	**25**	**-**		**-**		**-**	
95			**7**	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**100**	**8,098,731,499.77**	140	215,313,000.00	**100**	**752,204,337.00**	**25**	**-**		**-**		**-**	
96			7	01	**03**	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	8,098,731,499.77	2	215,313,000.00	*1*	752,204,337.00	0.25	-		-		-	
97										Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	5			-		-		-		-			
98			7	01	03	2	02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**%**	**80.00**	**700,000,000**	25.00	**0.00**	**80.00**	**-**							
99			7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang	unit	7		0.25	**0.00**	7	-							
100			**7**	**01**	**03**	**2**	**06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan**	**%**	**100**	**350,000,000.00**	40.00	**0.00**	**100**	**5,000,000.00**	**10**	**-**		**-**		**-**	
101									Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter	keluarga	7,000	35,000,000.00	1.00	0.00	1750	500,000.00	0.25	-					
102									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	keluarga	7,000	35,000,000.00	1.00	0.00	1750	500,000.00	0.25	-					
103									Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	keluarga	7,000	35,000,000.00	1.00	0.00	1750	500,000.00	0.25	-					
104									Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam	keluarga	7,000	35,000,000.00	1.00	0.00	1750	500,000.00	0.25	-					
105									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan	keluarga	7,000	35,000,000.00	1.00	0.00	1750	500,000.00	0.25	-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AM
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA			
94			**7**	**01**	**03**				**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	**%**	**100**	**8,098,731,499.77**	**-**	**25**	**-**	**25.00**	**-**	**165.00**	**215,313,000.00**	**165.00**	**2.66**	Kecamtan Rajabasa	
95			**7**	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**100**	**8,098,731,499.77**	**-**	**25**	**-**	**25.00**	**-**	**165.00**	**215,313,000.00**	**165.00**	**2.66**	Kecamtan Rajabasa	
96			7	01	**03**	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	8,098,731,499.77	-	0.25	-	25.00	-	2.25	215,313,000.00	45.00	**2.66**	Kecamtan Rajabasa	
97										Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	5				-				-					
98			7	01	03	2	02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**%**	**80.00**	**700,000,000**		**-**	**-**	**0.00**	**#DIV/0!**	**25.00**	**-**	**31.25**	**-**		
99			7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang	unit	7			0.00	-	0.00		0.25	-	0.25	#####		
100			**7**	**01**	**03**	**2**	**06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan**	**%**	**100**	**350,000,000.00**	**-**	**10**	**-**	**10.00**	**-**	**50.00**	**-**	**50.00**	**-**	Kecamtan Rajabasa	
101									Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter	keluarga	7,000	35,000,000.00		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-		
102									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	keluarga	7,000	35,000,000.00		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-		
103									Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	keluarga	7,000	35,000,000.00		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-		
104									Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam	keluarga	7,000	35,000,000.00		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-		
105									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan	keluarga	7,000	35,000,000.00		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III	
13												(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
106									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		keluarga	7,000	35,000,000.00	1.00	0.00	1750	500,000.00	0.25	-				
107									Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		keluarga	7,000	35,000,000.00	1.00	0.00	1750	500,000.00	0.25	-				
108									Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		keluarga	7,000	35,000,000.00	1.00	0.00	1750	500,000.00	0.25	-				
109									Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		keluarga	7,000	35,000,000.00	1.00	0.00	1750	500,000.00	0.25	-				
110									Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		keluarga	7,000	35,000,000.00	1.00	0.00	1750	500,000.00	0.25	-				
111			**7**	**01**	**04**				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak**	**%**	**100**	**13,828,254,850**	**140**	**3,670,475,000.00**	**100**	**2,041,669,857.00**	**25**	**559,750,000**		**-**		**-**	
112			**7**	**01**	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah**	**%**	**100**	**13,828,254,849.64**	**140**	3,670,475,000.00	**100**	**2,041,669,857.00**	**25**	**559,750,000**		**-**		**-**	
113			7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	13,697,079,849.64	2	3,638,225,000.00	1	2,017,107,952.00	0.25	559,750,000.00		-		-	
114										Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Laporan	5			-		-		-					
115			7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	131,175,000.00	2	32,250,000.00	1	24,561,905.00	0.25	-					
116										Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	Laporan	5			-		-		-					
117																								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
9			KODE REKENING																						
10																									
11	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
12																									
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(13)	(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)		
14												K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIA			
106									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		keluarga	7,000	35,000,000.00		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-			
107									Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		keluarga	7,000	35,000,000.00		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-			
108									Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		keluarga	7,000	35,000,000.00		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-			
109									Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		keluarga	7,000	35,000,000.00		0.25	-	0.01	-	1.25	-	0.02	-			
110									Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		keluarga	7,000	35,000,000.00		0.25	-	0.01	-	1.25	-	1.25	-			
111			**7**	**01**	**04**				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak**	**%**	**100**	**13,828,254,850**	**-**	**25**	**559,750,000.00**	**25.00**	**27.42**	**165.00**	**4,230,225,000.00**	**165.00**	**30.59**			
112			**7**	**01**	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah**	**%**	**100**	**13,828,254,849.64**	**-**	**25**	**559,750,000.00**	**25.00**	**27.42**	**165.00**	**4,230,225,000.00**	**165.00**	**30.59**	Kecamtan Rajabasa		
113			7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	13,697,079,849.64	-	0.25	559,750,000.00	25.00	27.75	2.25	4,197,975,000.00	45.00	**30.65**	Kecamtan Rajabasa		
114										Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Laporan	5				-				-					
115			7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	131,175,000.00		0.25	-	25.00	-	2.25	32,250,000.00	45.00	**24.59**	Kecamtan Rajabasa		
116										Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	Laporan	5				-				-					
117																									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9			KODE REKENING															REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						
10																								
11																								
12	NO.	SASARAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		I		II		III	
13	(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
14												K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K
118																								
119									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				87,004,832,169.86				12,199,732,451.00		3,111,826,032.00		-		-	
120																								
121									TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															
122									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															
123																								
124	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																							
125	Faktor penghambat pencapaian kinerja:																							
126	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																							
127	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:																							
128																								
129																								
130																								
131																								
132																								
133																								
134																								
135																								
136																								
137																								
138																								
139																								

NO.	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					IV									
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	RUPIAH		RUPIAH		K	RUPIAH	K	RUPIA	K	RUPIA		
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				87,004,832,169.86	-		3,111,826,032.00							90.90		
							TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									xxx	25.51			xxx	xxx		
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									xxx	xxx			xxx	xxx		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

Bandar Lampung, 2025

CAMAT RAJABASA

RACHMATSYAH, S.Pi

NIP. 19810314 200604 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN TANJUNG SENANG
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	LandasanHukum	√			
	1.3	MaksuddanTujuan	√			
	1.4	Sistematika Penullsan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN				
		Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/ Tahun 2025	√			
		Formulir E.81				
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Keglatan, sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, Juli 2025

CAMAT TANJUNG SENANG,

M. ERI ARIFANDI, S.T.,M.M
NIP. 19790320 200312 1 002

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	FITRIYANTI, ST, M.Si	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkajl hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan			Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025

CAMAT TANJUNG SENANG,

M. ERI ARIFANDI, S.T.,M.M
NIP. 19790320 200312 1 002

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	**FITRIYANTI, ST, M.Si**	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	**ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M**	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan ii tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkatdaerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerahserta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, Juli 2025

CAMAT TANJUNG SENANG,

M. ERI ARIFANDI, S.T.,M.M
NIP. 19790320 200312 1 002

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	**FITRIYANTI, ST, M.Si** Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	**ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M** Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

		HALAMAN
HALAMAN JUDUL		
LEMBAR VERIFIKASI		
KATA PENGANTAR	.....	**i**
DAFTAR ISI	.....	**ii**
DAFTAR TABEL	.....	**iii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**I – 1**
	1.1. Latar Belakang	I – 1
	1.2. Landasan Hukum	I – 2
	1.3. Maksud dan Tujuan	I – 6
	1.4. Sistematika Penulisan	I – 7
BAB II	**HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU.....**	**II – 1**
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/ tahun 2025.....	II – 1
	2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II – 2
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	**III – 1**
BAB IV	**PENUTUP**	**IV – 1**

DAFTAR TABEL

		HALAMAN
Tabel : 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Bandar Lampung Kecamatan Tanjung Senang Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2025 (E-81)	II – 3
Tabel : 3.1.	Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Pemerintah Kota Bandar Lampung	III – 6

LAMPIRAN 45
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, merupakan rencana pembangunan tahunan Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Tanjung Senang Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;
b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Tanjung Senang yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Senang Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Senang Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57),

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 108);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah TAHUN 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);

8. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
9. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 tentang APBD tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 10);
25. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah TAHUN 2025 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 20);
26. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 47).
27. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 33 TAHUN 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Senang Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Tanjung Senang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Senang Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Kecamatan Tanjung Senang dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang
I.2 Landasan Hukum
I.3 Maksud dan Tujuan
I.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/ Tahun 2025
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan/ Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Senang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan capaian Kinerja. Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, yang dijabarkan dalam 6 Program, 13 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Realisasi Anggaran Belanja Operasi sampai dengan 28 Juni 2025 pada Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 4.397.752.075 ,- atau 43,71 % dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp 10.061.933.019 ,-. Evaluasi kinerja dan keuangan Renja Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.1.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, ditentukan isu-isu penting, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik apalagi dengan adanya perubahan system manajemen kepegawaian;

3. Modernisasi penyelenggaraan pemerintahan didukung aparatur profesional, inovatif dan amanah khususnya dalam perubahan system manajemen keuangan;
4. Adanya keterbukaaan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan;
5. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan;
6. Peningkatan Pengamanan gangguan keamanan;
7. Perkembangan perdagangan dan jasa serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
8. Pengembangan Agro Wisata;
9. Program Nasional Pembangunan Berkelanjutan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2025 ini Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung mengalami perubahan anggaran dari sebelumnya. Secara keseluruhan Rencana Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Senang yang terdiri dari 6 Program, 13 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

a. Sub. Kegiatan Penyusunan dokumen perangkat daerah,
b. Sub. Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd,
c. Sub. Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

a. Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
b. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

a. Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
b. Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
c. Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,
d. Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor,

e. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4. Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Pengadaan Mebel
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
b. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,
b. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
c. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
d. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,
e. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik,

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

a. Sub. Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.

a. Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan,

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

a. Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

a. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

c. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri

e. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

f. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan

Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

g. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
h. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
i. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
j. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum,

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

a. Sub. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.
b. Sub. Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

a. Sub. Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
b. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan,

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

a. Sub. Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di Kelurahan,

b. Sub. Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Kelurahan.

Dengan terbitnya peraturan baru yaitu Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru, selanjutnya rencana kerja Kecamatan Way Halim juga mengalami Perubahan. Format Perubahan untuk Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung yang telah disesuaikan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2025 tertuang dalam Tabel 3.1.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan dan dinamika pembangunan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksanaan. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TANJUNG SENANG KOTA BANDAR LAMPUNG
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025
Formulir E. 81

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (BARU)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) s.d TRIWULAN I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 s.d TRIWULAN 1 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV									
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)	(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14÷8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
7 UNSUR KEWILAYAHAN																														
7.01 KECAMATAN																														
KECAMATAN TANJUNG SENANG										98	76,306,388,745	50	8,398,953,298	98	10,148,167,724	20	2,469,978,763	20	-		-		-		2,469,978,763				10,868,932,061			
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan	7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan	%	98.00	38,150,961,029.91	0.88	4,171,149,048.00	98.00	5,376,663,856	0.24	1,280,978,763.00	-	-	-	-	-	-	0.24	1,280,978,763.00	0.2	23.8	1.12	5,452,127,811	1.1	1.1	Kec. Tanjung Senang
		7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	98.00	187,739,243.97	0.68	21,487,529.00	98.00	31,079,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.0	0.0	0.68	21,487,529	0.7	0.7	Kec. Tanjung Senang
		7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	69,646,189.69	1	10,626,300.00	1	10,348,102.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.0	0.0	1	10,626,300	0.2	15.3	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5																						
		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	59,046,527.14	1	10,528,300.00	1	10,356,318.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.0	0.0	1	10,528,300	0.2	17.8	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	5																						
		7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	59,046,527.14	1	332,929.00	1	10,374,780.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.0	0.0	1	332,929	0.2	0.6	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5																						
		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib	%	98	31,678,050,972.73	0.89	3,671,207,698.00	98.00	4,565,807,599.00	0.27	1,210,978,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	1,210,978,763.00	0.3	26.5	1.15	4,882,186,461	1.2	15.4	Kec. Tanjung Senang
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	31,114,236,432.73	38	3,631,847,698.00	38	4,508,517,724.00	0.27	1,210,978,763.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.27	1,210,978,763.00	0.7	26.9	38.3	4,842,826,461	1.0	15.6	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	38																						
		7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	563,814,540.00	1	39,360,000.00	1	57,289,875.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.0	0.0	1	39,360,000	0.2	7.0	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5																						
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98	416,051,050.76	0.88	11,843,000.00	98.0	51,954,869.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.0	0.0	0.88	11,843,000	0.9	2.8	Kec. Tanjung Senang
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	14,888,227.70	1	1,093,000.00	1	1,107,374.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	1	1,093,000	0.2	7.3	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5																						
		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	85,185,016.08	1	0.00	1	15,516,393.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	1	-	0.2	0.0	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5																						
		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	81,687,851.99	1	0.00	1	11,068,057.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	1	-	0.2	0.0	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5																						
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	56,637,720.31	1	10,750,000.00	1	10,750,000.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	1	10,750,000	0.2	19.0	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5																						
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	67,139,609.68																	0	-	0.0	0.0	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5																						
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	110,512,625.00	1	0.00	1	13,513,045.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	1	-	0.2	0.0	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	5																						
		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98	207,211,171.88		15,200,000.00		56,232,188.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00							Kec. Tanjung Senang
		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	96,698,546.88	1	0.00	1	17,532,188.00	0.00	0.00	-	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	1	-	0.1	0.0	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12																						
		7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	82,884,468.75	1	15,200,000.00	1	38,700,000.00	0.00	0.00	-	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	1	15,200,000	0.1	18.3	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10																						

		7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	27,628,156.25																												Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10																															
		7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**98**	**3,528,343,560.56**	**0.90**	**329,200,000.00**	**98.00**	**589,160,000.00**	**0.14**	**70,000,000.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**-**	**0.00**	**-**	**0.14**	**70,000,000.00**	**0.1**	**13.7**	**1.03**	**399,200,000**	**1.1**	**11.3**	Kec. Tanjung Senang
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	199,684,316.25	1	0.00	1	24,900,000.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	1	-	0.2	0.0	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Laporan	5																													
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	3,328,659,244.31	1	329,200,000.00	1	484,260,000	0.14	70,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.14	70,000,000.00	14.5	14.5	1.14	399,200,000	0.2	12.0	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	5																													
		7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98**	**2,133,565,030.01**	**0.74**	**122,210,821.00**	**98.00**	**162,430,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0**	**0.0**	**0.74**	**122,210,821**	**0.8**	**5.7**	Kec. Tanjung Senang
		7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	218,817,963.02	1	14,700,000.00	1	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	DIV/0	14,700,000	#DIV/0!	6.7	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1																															
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1,596,804,647.85	1	86,153,821.00	1	133,640,000.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	1	86,153,821	0.2	5.4	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5																															
		7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	2,762,815.63																												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3																														
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	27,628,156.25	1	2,157,000.00	1	3,570,000.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	1	2,157,000	1.0	7.8	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1																													
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	150,121,653.13	1	6000000.00	1	18,000,000.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	1	6,000,000	0.2	4.0	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	6																													
		7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	137,429,794.13	1	13,200,000.00	1	7,220,000.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	1	13,200,000	1.0	9.6	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1																													
	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan	**7**	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100**	**18,465,952,166.71**	**0.99**	**2,231,226,150.00**	**100**	**2,232,434,449.00**	**0.30**	**661,500,000.00**	**-**	**0.00**	**-**	**0.00**	**-**	**0.00**	**0.30**	**661,500,000.00**	**0.3**	**29.6**	**1.29**	**2,892,726,150**	**1.3**	**15.7**	**Kec. Tanjung Senang**
		7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**358,081,425.88**	**0.47**	**25,052,000.00**	**100**	**26,837,458.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0**	**0.0**	**0.47**	**25,052,000**	**0.5**	**7.0**	Kec. Tanjung Senang
		7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	358,081,425.88	1	25,052,000.00	1	26,837,458.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	1	25,052,000	0.2	7.0	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Laporan	5																															
		7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**18,107,870,740.83**	**50**	**2,206,174,150.00**	**100**	**2,205,596,991.00**	**0.30**	**661,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.30**	**661,500,000.00**	**0.3**	**30.0**	**50.3**	**2,867,674,150**	**50.3**	**15.8**	**Kec. Tanjung Senang**
		7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	18,107,870,740.83	1	2,206,174,150.00	1	2,205,596,991.00	0.30	661,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.30	661,500,000.00	30.0	30.0	1.3	2,867,674,150	0.3	15.8	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5																															
		7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**80**	**6,049,033,393.32**	**0.11**	**471,504,000.00**	**90.00**	**566,765,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**0.0**	**0.0**	**0.11**	**471,504,000**	**0.1**	**7.8**	**Kec. Tanjung Senang**
		7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**80**	**6,049,033,393.32**	**0.06**	**446,750,000.00**	**100**	**556,765,000.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.0**	**0.0**	**0.06**	**446,750,000**	**0.1**	**7.4**	**Kec. Tanjung Senang**
		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	6,049,033,393.32	1	446,750,000.00	1	556,765,000.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0	0.00	0.00	0.0	0.0	1	446,750,000	0.2	7.4	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	5																													

| | | |

		7	01	06	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124,326,703.13	1	10,059,600.00	1	10,409,640	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	1	10,059,600	0.2	8.1	Kec. Tanjung Senang
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5																											
																						0.00					24.339			#DIV/0!		
		Rata-Rata Capaian Kinerja																									24.339			#DIV/0!	#DIV/0!	
		Predikat Kinerja																																				
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									76,306,388,745.19				10,148,167,724.00		2,469,978,763.00		-		-		2,469,978,763.00				10,868,932,061.00					
		TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																																				
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																																				
		Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																				
		Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																				
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																																				
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:																																				

CAMAT TANJUNG SENANG
KOTA BANDAR LAMPUNG

MUHAMMAD FIR ARIFANDI, ST, MM.
NIP. 19791120 200312 1 002

TABEL 2.1.3
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN 2025
KOTA BANDAR LAMPUNG
(T-C. 29)

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TANJUNG SENANG

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (Renja PD Tahun Berjalan)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2025)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegaiatn						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) (8/7)*100		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7/8) x 100	(10)	(11) = 6+8+10	(12) = (11/5) x 100
UNSUR KEWILAYAHAN															
KECAMATAN															
7	**01**	**2**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98**	**98**	**98**	**95**	**97**	**98**	**60**	**61**
7	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**98**	**90**	**98**	**95**	**97**	**98**	**60**	**61**
7	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	35	35	35	35	**100**	35	35	**100**
					Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	bln	72	12						
7	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**

					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bln	72	12						
7	**01**				**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98**	**85**	**98**	**95**	**97**	**98**	**60**	**61**
7	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5.00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
7	01	2	01	06	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Bappeda	Bln	72	12						
					Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5.00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah laporan capaian kinerja	Bln	72	12						
7	01	02	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5.00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	Bln	72	12						
7	**01**	**02**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98**	**85**	**98**	**95**	**97**	**98**	**60**	**61**
7	**01**	**02**	**06**	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**

					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bln	72	12						
7	**01**	**02**	**06**	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bln	72	12						
7	**01**	**02**	**06**	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5.00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bln	72	12						
7	**01**	**02**	**06**	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5.00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bln	72	12						
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5.00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bln	72	12						
7	**01**	**02**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98**	**85**	**98**	**95**	**97**	**98**	**60**	**61**
7	01	02	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	**1**	1	1	**100**	**1**	**3**	**25**
					Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	Bln	72	12						
7	01	02	07		Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	**1**	1	1	**100**	**1**	**3**	**30**

					Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Bln	72	12						
7	01	02	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	**1**	1	1	**100**	**1**	**3**	**30**
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Bln	72	12						
7	**01**	**02**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**98**	**80**	**98**	**95**	**97**	**98**	**60**	**61**
7	01	02	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5.00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bln	72	12						
7	01	02	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5.00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bln	72	12						
7	**01**	**02**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**80**	**98**	**95**	**97**	**98**	**60**	**61**

7	01	02	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	**100**	**1**	**1**	**100**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bln	72	12						
7	01	02	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	1	1	1	**100**	**1**	**2**	**40**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bln	72	12						
7	01	02	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	1	1	1	**100**	**1**	**2**	**67**
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Bln	72	12						
7	01	02	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	1	1	**100**	**1**	**1**	**100**
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bln	72	12						
7	01	02	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1	1	1	**100**	**1**	**2**	**33**
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bln	72	12						

7	01	02	09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	**100**	**1**	**1**	**100**
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Bln	72	12						
7	**01**				**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**persen**	**100**	**90**	**100**	**95**	**95**	**100**	**80**	**80**
7	**01**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**90**	**100**	**95**	**95**	**100**	**80**	**80**
7	01				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	**Dokumen**	5	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan di tingkat kecamatan	Bln	72	12						
7	01				Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	**orang**	100	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**3**

					Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Bimtek dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional oleh Babinsa/ Babinkamtibmas	Bln	72	12						
7	**01**				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**90**	**95**	**80**	**84**	**100**	**80**	**80**
7	**01**				**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**persen**	**100**	**90**	**95**	**80**	**84**	**100**	**80**	**80**
7	01				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Dokumen**	5	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan di kelurahan	Bln	72	12						
7	01				Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	**Dokumen**	5	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Bln	72	12						

7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**persen**	**100**	**90**	**100**	**95**	**95**	**100**	**70**	**70**
7	**01**	**02**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**90**	**100**	**95**	**95**	**100**	**70**	**70**
7	**01**	**02**	**01**	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5.00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bln	72	12						
7	**01**	**02**	**02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**90**	**100**	**80**	**80**	**100**	**100**	**100**

7	**01**	**02**	**02**	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5.00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Bln	72	12						
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**persen**	**100**	**90**	**80**	**80**	**100**	**85**	**70**	**70**
7	**01**	**03**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**persen**	**100**	**90**	**80**	**80**	**100**	**85**	**70**	**70**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5.00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase PKK, LPM, MTQ dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Bln	72	12						

7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100.00**	**90**	**80**	**80**	**100**	**85**	**70**	**70**
7	**01**	**03**	**2.06**	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	7000	0,25	1250	0,25	0,5	1250	0,5	0,5
7	**01**	**03**	**2.06**	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	7000	0,25	1250	0,25	0,5	1250	0,5	0,5
7	**01**	**03**	**2.06**	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	7000	0,25	1250	0,25	0,5	1250	0,5	0,5
7	**01**	**03**	**2.06**	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	7000	0,25	1250	0,25	0,5	1250	0,5	0,5

7	**01**	**03**	**2.06**	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	7000	0,25	1250	0,25	0,5	1250	0,5	0,5
7	**01**	**03**	**2.06**	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	7000	0,25	1250	0,25	0,5	1250	0,5	0,5
7	**01**	**03**	**2.06**	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	7000	0,25	1250	0,25	0,5	1250	0,5	0,5
7	**01**	**03**	**2.06**	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	7000	0,25	1250	0,25	0,5	1250	0,5	0,5

7	**01**	**03**	**2.06**	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	7000	0,25	1250	0,25	0,5	1250	0,5	0,5
7	**01**	**03**	**2.06**	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	7000	0,25	1250	0,25	0,5	1250	0,5	0,5
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal**	**persen**	**100**	**90**	**100**	**90**	**90**	**100**	**80**	**80**
7	**01**	**04**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**persen**	**100**	**90**	**100**	**90**	**90**	**100**	**80**	**80**
7	01	04	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5.00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**

					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat degan forkopimda di wilayah kecamatan	Bln	72	12						
					harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5.00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Bln	72	12						

CAMAT TANJUNG SENANG
KOTA BANDAR LAMPUNG

MUHAMMAD ERI ARIFANDI, ST.,MM.
NIP. 19790320 200312 1 002

TABEL 5.1

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
															PAGU INDIKATIF (Rp)			
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15
						KECAMATAN TANJUNG SENANG									**9,372,890,724.00**	**10,148,167,724.00**	**11,797,709,387.00**	**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									**9,372,890,724.00**	**10,148,167,724.00**	**11,797,709,387.00**	**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	7	**01**				**KECAMATAN**									**9,372,890,724.00**	**10,148,167,724.00**	**11,797,709,387.00**	**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
206	**7**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**5,068,775,592.00**	**5,376,663,856.00**	**5,508,320,519.00**	**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	98%	98%	98%	98%	31,658,370.00	31,079,200.00	11,035,200.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,638,215.00	10,348,102.00	284,102.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10,533,626.00	10,356,318.00	292,318.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10,486,529.00	10,374,780.00	10,458,780.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,316,340,724.00	4,565,807,599	4,563,767,599	KECAMATAN TANJUNG SENANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
															PAGU INDIKATIF (Rp)			
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	4,237,740,724.00	4,508,517,724.00	4,508,517,724.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	78,600,000.00	57,289,875.00	55,249,875.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	98%	98%	98%	98%	52,922,498.00	51,954,869.00	70,296,164.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1,103,768.00	1,107,374.00	1,107,374.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	13,867,561.00	15,516,393.00	28,979,393.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10,145,170.00	11,068,057.00	21,134,057.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10,750,000.00	10,750,000.00	10,750,000.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	17,055,999.00	13,513,045.00	8,325,340.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhanan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhanan kebutuhan inventaris kantor	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	21,004,000.00	56,232,188	56,232,188	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	5,700,000.00	17,532,188.00	17,532,188.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	15,304,000.00	38,700,000.00	38,700,000.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD	95%	95%	95%	95%	95%	454,740,000.00	509,160,000.00	621,359,368.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24,900,000.00	24,900,000.00	38,099,368.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Pramubakti (1) org		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	429,840,000.00	484,260,000.00	583,260,000.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang terpelihara	Inventaris kantor yang terpelihara	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	192,110,000.00	162,430,000.00	185,630,000.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37,020,000.00	0.00	10,350,000.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
															PAGU INDIKATIF (Rp)			
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	16 Unit	16 Unit	16 Unit	129,180,000.00	133,640,000.00	146,490,000.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	2,190,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	7,500,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	16,220,000.00	7,220,000.00	7,220,000.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
207	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,232,736,346.00	2,232,434,449.00	3,114,434,449.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
															PAGU INDIKATIF (Rp)			
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	26,552,111.00	26,837,458.00	26,837,458.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	26,552,111.00	26,837,458.00	26,837,458.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,206,184,235.00	2,205,596,991.00	3,087,596,991.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,206,184,235.00	2,205,596,991.00	3,087,596,991.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
															PAGU INDIKATIF (Rp)			
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15
208	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Tanjung Senang Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Tanjung Senang Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	521,750,000.00	566,765,000	531,750,000	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	471,750,000.00	556,765,000	521,750,000	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	471,750,000.00	556,765,000.00	521,750,000.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	50,000,000.00	10,000,000	10,000,000	KECAMATAN TANJUNG SENANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
															PAGU INDIKATIF (Rp)			
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara										
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
															PAGU INDIKATIF (Rp)			
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
															PAGU INDIKATIF (Rp)			
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
															PAGU INDIKATIF (Rp)			
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
209	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Tanjung Senang	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Tanjung Senang	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	1,533,435,446.00	1,955,320,272.00	2,636,320,272.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	1,533,435,446.00	1,955,320,272.00	2,636,320,272.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,510,880,098.00	1,932,610,230.00	2,613,610,230.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22,555,348.00	22,710,042.00	22,710,042.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
															PAGU INDIKATIF (Rp)			
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15
210	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Tanjung Senang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Tanjung Senang	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4,379,962.00	4,507,681	4,507,681	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4,379,962.00	4,507,681	4,507,681	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional											
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	1,663,788.00	2,429,993.00	2,429,993.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,716,174.00	2,077,688.00	2,077,688.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
211	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11,813,378.00	12,476,466	2,376,466	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	11,813,378.00	12,476,466	2,376,466	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,663,788.00	2,066,826.00	2,066,826.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,149,590.00	10,409,640.00	309,640.00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	J U M L A H															**10,148,167,724.00**	**11,797,709,387.00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SUKABUMI
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	√			
		Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/tahun 2025				
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 2025

CAMAT SUKABUMI

SAHRIAL, S.Sos.,MM.

NIP. 19721215 199503 1 004

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST., M.Si	
	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengemnbangan Wilayah Bappeda	
2	Zeldayati Ningsih, S.H., M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025
CAMAT SUKABUMI

SAHRIAL, S.Sos.,MM.
NIP. 19721215 199503 1 004

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST., M.SI	
	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengemnbangan Wilayah Bappeda	
2	Zeldayati Ningsih, S.H., M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	**FITRI YANTI, ST., M.SI**	
	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengemnbangan Wilayah Bappeda	
2	**Zeldayati Ningsih, S.H., M.M**	
	Pungsional Perencana Ahli Madya	

Bandar Lampung, 2025

Mengetahui,

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP.19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

		HALAMAN
KATA PENGANTAR ……		**i**
DAFTAR ISI ……...		**ii**
BAB I	**PENDAHULUAN ……..**	I-1
	1.1 Latar Belakang ……..	I-1
	1.2 Landasan Hukum ……..	I-3
	1.3 Maksud dan Tujuan ……..	I-6
	1.4 Sistematika Penulisan ……..	I-6
BAB II	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN……**	II-1
	2.1 Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/tahun 2025 ……	II-1
	2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH ……..	II-1
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	III-1
	Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	
BAB IV	**PENUTUP ……..**	IV-1

LAMPIRAN 46
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Kecamatan Sukabumi adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Sukabumi yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indicator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Sukabumi Tahun 2025, yaitu :

Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;

Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Sukabumi yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Kecamatan Sukabumi Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sukabumi Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 108);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
8. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173)
9. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 2019 Nomor 13, TambahanLembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 10);
25. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Kecamatan Sukabumi Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Sukabumi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sukabumi Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan bagi Kecamatan Sukabumi dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025
2. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
3. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
4. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Sukabumi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV.Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Sukabumi. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan capaian Kinerja. Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, yang dijabarkan dalam 6 Program, 13 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Realisasi Anggaran Belanja Operasi sampai dengan 28 Maret 2025 pada Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 3.263.465.919,00 atau 24,17%dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp 13.502.027.025,00 Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 0 atau 0% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sebesar Rp. 90.000.000,00 sedangkan realisasi kinerja rata-rata mencapai 50%. Evaluasi kinerja dan keuangan Renja Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.1.

2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sukabumi, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota Bandar Lampung kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Bandar Lampung;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan

Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2025 ini rencana Kerja OPD Kecamatan Sukabumi mengalami perubahan anggaran dari sebelumnya secara keseluruhan pada rencana kerja OPD Kecamatan Sukabumi yang terdiri dari 6 (Enam) Program, 13 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     - a) Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
     - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
     - c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
   - 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
     - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
     - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
     - d) Penyediaan Bahan Logistik
     - e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - 1.4. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Pengadaan Mebel
b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c) Pemeliharaan Mebel
d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
a) Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan pelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

a) Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

a) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

b) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

c. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

d) Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri

d) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

e) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

f) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
g) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
h) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
i) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4. Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum
   4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
      a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
      b) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
      a) fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional
      b) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah
   6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah

a) fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan
b) fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan

Dengan terbitnya peraturan baru yaitu Peraturan Wali kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru, selanjutnya rencana kerja Kecamatan Sukabumi juga mengalami Perubahan. Format Perubahan untuk Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung yang telah disesuaikan dengan Peraturan Wali kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tertuang dalam Tabel 3.1.

BAB IV
PENUTUP

Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Kecamatan Sukabumi menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Formulir E. 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG

RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG

PERIODE PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2 TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung yang menacu pada sasaran RKPD:

1. .....

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
Unsur kewilayahan																																
Kecamatan											**88.835.984.282,65**		-	**15.605.505.821,00**		**3.263.465.919,00**		**9.655.185.982,00**		-				**12.918.651.901,00**		**82,78**		**12.918.651.901,00**		**14,54**	
Kecamatan SUKABUMI											**88.835.984.282,65**		-	**15.605.505.821,00**		**3.263.465.919,00**		**9.655.185.982,00**		-		-		**12.918.651.901,00**		**82,78**		**12.918.651.901,00**		**14,54**	
1	**Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan**	**7**	**01**					**Indeks kepuasan masyarakat**	**persen**	**98,00**				**98,00**																		
		7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98,00**	**47.698.755.763,17**	**98,00**	**-**	**98,00**	**7.362.502.206,00**	**20**	**1.663.465.919,00**	**20**	**4.766.935.982,00**		**-**		**-**	**40**	**6.430.401.901,00**	**40,82**	**87,34**	**138,00**	**6.430.401.901,00**		**13,48**	**Kec. SUKABUMI**
		7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98,00**	**61.971.870,99**	**98,00**	**-**	**98,00**	**9.478.596,00**	**20**	**-**	**20**	**-**		**-**		**-**	**40,00**	**-**		**-**	**138,00**	**-**		**-**	**Kec.SUKABUMI**
		7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1																						
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	20.657.290,33	1	-	1	3.159.532,00	0,25		0,25						0,5	-	0,1	0,0	1,5	-		0,0	Kec. SUKABUMI	
		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1																						
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	20.657.290,33	1	-	1	3.159.532,00	0,25		0,25						0,5	-	0,1	0,0	0,02	-		0,0	Kec. SUKABUMI	
		7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1																						
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	20.657.290,33	1	-	1	3.159.532,00	0,25		0,25						0,5	-	0,1	0,0	0,02	-		0,0	Kec. SUKABUMI	
		7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**98,00**	**36.592.956.502,30**	**98,00**	**-**	**98,00**	**5.627.701.712,00**	**20**	**1.435.956.919,00**	**20**	**4.010.554.778,00**		**-**		**-**	**40**	**5.446.511.697,00**	**40,82**	**96,78**	**138,00**	**5.446.511.697,00**		**14,88**	**Kec.SUKABUMI**
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1																						
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	45	36.159.712.313,60	45	-	45	5.530.627.025,00	45	1.421.166.919,00	45	3.966.184.778,00					90	5.387.351.697,00	200,0	97,4	4,44444	5.387.351.697,00		14,9	Kec. SUKABUMI	**#REF!**
		7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1																						
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	433.244.188,70	1	-	1	97.074.687,00	0,25	14.790.000,00	0,25	44.370.000,00					0,5	59.160.000,00	0,1	60,9	0,02	59.160.000,00		13,7	Kec. SUKABUMI	#REF!
		7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98,00**	**488.058.915,58**	**98,00**	**-**	**98**	**54.317.394,00**	**20**	**-**	**20**	**-**		**-**		**-**	**40**	**-**	**40,8**	**0,0**	**138**	**-**		**-**	**Kec.SUKABUMI**
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1																						
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	42.757.601,51	1	-		6.539.774,00	0,25	-	0,25	-					0,5	-	0,1	0,0	0,02	-		0,0	Kec. SUKABUMI	#REF!
		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1																						
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	104.891.734,71	1	-	1	16.043.188,00	0,25	-	0,25	-					0,5	-	0,1	0,0	0,02	-		0,0	Kec. SUKABUMI	#REF!
		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1																						
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	68.978.076,87	1	-	1	10.550.195,00	0,25	-	0,25	-					0,5	-	0,1	0,0	0,02	-		0,0	Kec. SUKABUMI	#REF!
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1																						
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	81.726.068,65	1		1	12.500.000,00	0,25	-	0,25	-					0,5	-	0,1	0,0	0,02	-		0,0	Kec. SUKABUMI	
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1																						
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	26.956.663,78	1		1	4.123.021,00	0,25	-	0,25	-					0,5	-	0,1	0,0	0,02	-		0,0	Kec. SUKABUMI	
		7	01	01	2.06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1																						

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
															I		II		III		IV											
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)	(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	162.748.770,06	1		1	4.561.216,00	0,25	-	0,25	-				0,5	-	0,1	0,0	0,02	-		0,0	Kec. SUKABUMI	
		7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98**	**588.427.694,28**	**98**	**-**	**98**	**76.500.000,00**	**20**	**-**	**20**	**-**		**-**		**40**	**-**	**40,8**	**0,0**	**138**	**-**		**-**	**Kec.SUKABUMI**	
		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1																					
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	294.213.847,14	1		1	31.500.000,00	1	-	1	-				2	-	0,2	0,0	0,02	-		0,0	Kec. SUKABUMI	
		7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1																					
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	261.523.419,68	1		1	40.000.000,00	1	-	1	-				2	-	0,2	0,0	0,02	-		0,0	Kec. SUKABUMI	
		7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1																					
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	32.690.427,46	1		1	5.000.000,00	1	-	1	-				2	-	0,2	0,0	0,02	-		0,0	Kec. SUKABUMI	
		7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**98**	**8.200.629.099,37**	**98**	**-**	**98**	**1.324.286.000,00**	**20**	**227.509.000,00**	**20**	**730.277.000,00**		**-**		**40**	**957.786.000,00**	**40,8**	**72,3**	**138**	**957.786.000,00**		**11,68**	**Kec.SUKABUMI**	
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1																					
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	235.371.077,71	1	-	1	31.000.000,00	0,25	-	0,25	-		-		0,5	-	0,1	0,0	0,02	-		0,0	Kec. SUKABUMI	-
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1																					
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	7.965.258.021,66	1	-	1	1.293.286.000,00	0,25	227.509.000,00	0,25	730.277.000,00				0,5	957.786.000,00	0,1	74,1	0,02	957.786.000,00		12,0	Kec. SUKABUMI	-
		7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**1.766.711.680,65**	**98**	**-**	**98**	**270.218.504,00**	**20**	**-**	**20**	**26.104.204,00**		**-**		**40**	**26.104.204,00**	**5,0**	**9,7**	**138**	**26.104.204,00**		**1,48**	**Kec. SUKABUMI**	
		7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1																					
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	220.137.338,51	1	-	1	33.670.000,00	0,25	-	0,25					0,5	-	0,5	0,0	0,5	-		0,0	Kec. SUKABUMI	#REF!
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1																					
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1.252.222.410,64	1	-	1	191.527.384,00	0,25	-	0,25	26.104.204,00				0,5	26.104.204,00	0,1	13,6	0,005	26.104.204,00		2,1	Kec. SUKABUMI	#REF!
		7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1		1		1		0,25		0,25					0,5		0,2		0,16667				Kec. SUKABUMI	
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	3.988.232,15				610.000,00		-							-		0,0		-		0,0		
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1		1		1		0,25		0,25					0,5		0,3		0,25				Kec. SUKABUMI	-
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	22.883.299,22		-		3.500.000,00		-							-		0,0		-		0,0		
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1		1		1		0,25		0,25					0,5		0,1		0,08333				Kec. SUKABUMI	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	248.447.248,69		-		38.000.000,00		-							-		0,0		-		0,0		-
		7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1		1		1		0,25		0,25					0,5		0,5		0,5				Kec. SUKABUMI	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	19.033.151,44		-		2.911.120,00		-							-		0,0		-		0,0		-

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								I		II		III		IV										
														(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)																(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
		7	01	02			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**persen**	**100**	**20.387.008.247,69**	**100**	**-**	**100**	**4.285.143.720,00**	**20**	**908.250.000,00**	**20**	**2.757.750.000,00**		**-**	**-**	**40**	**3.666.000.000,00**	**40,0**	**85,6**	**140**	**3.666.000.000,00**		**17,98**	**Kec. SUKABUMI**
		7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**230.930.500,22**	**100**	**-**	**100**	**34.821.860,00**	**20**	**-**	**20**	**33.000.000,00**		**-**	**-**	**40**	**33.000.000,00**	**40,0**	**94,8**	**140**	**33.000.000,00**		**14,29**	**Kec. SUKABUMI**
		7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1						0,25		0,25				0,5		0,1		0,1				Kec. SUKABUMI
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	230.930.500,22	1	-	1	34.821.860,00		-		33.000.000,00		-				33.000.000,00		94,8		33.000.000,00		14,3		
		7	01	02	2.02		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**20.156.077.747,47**	**100**	**-**	**100**	**4.250.321.860,00**	**20**	**908.250.000,00**	**20**	**2.724.750.000,00**		**-**	**-**	**40**	**3.633.000.000,00**	**40,0**	**85,5**	**140**	**3.633.000.000,00**		**18,02**	**Kec. SUKABUMI**
		7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1						0,25		0,25				0,5		0,1		0,1				Kec. SUKABUMI
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	20.156.077.747,47	1	-	1	4.250.321.860,00		908.250.000,00		2.724.750.000,00						3.633.000.000,00		85,5		3.633.000.000,00		18,0		
		7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**persen**	**100**	**3.993.690.279,93**	**80**	**-**	**80**	**542.205.961,00**	**20**	**-**	**20**	**-**		**-**	**-**	**40**	**-**	**50,0**	**0,0**	**120**	**-**		**0,00**	**Kec. SUKABUMI**
		7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**persen**	**100**	**3.785.493.746,03**	**80**	**-**	**80**	**525.812.141,00**	**20**	**-**	**20**	**-**		**-**	**-**	**40**	**-**	**50,0**	**0,0**	**120**	**-**		**-**	**Kec. SUKABUMI**
		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase plkk, lpm, mtq dan sarana kesgamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1						0,25		0,25				0,5		0,1		0,1				Kec. SUKABUMI
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	3.785.493.746,03	1	-	1	525.812.141,00										-		0,0		-		0,0		
		7	01	03	2.01		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	100,00	**208.196.533,90**		**-**	**80**	**16.393.820,00**	**20**	**-**	**20**	**-**		**-**	**-**	**40**	**-**	**50,0**	**0,0**	**40**	**-**		**-**	**Kec. SUKABUMI**
		7	01	03	2.01	01	Pembentukkan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa,	Keluarga	6000,00	20.819.653,39		-	1500	1.639.382,00	0,25		0,25						0,5	-	0,0	0,0	0,5	-		0,0	#DIV/0!
							Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok	Keluarga	6000,00	20.819.653,39		-	1500	1.639.382,00	0,25		0,25						0,5	-	0,0	0,0	0,5	-		0,0	
							Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6000,00	20.819.653,39		-	1500	1.639.382,00	0,25		0,25						0,5	-	0,0	0,0	0,5	-		0,0	
							Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6000,00	20.819.653,39		-	1500	1.639.382,00	0,25		0,25						0,5	-	0,0	0,0	0,5	-		0,0	
							Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikkan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang	Keluarga	6000,00	20.819.653,39		-	1500	1.639.382,00	0,25		0,25						0,5	-	0,0	0,0	0,5	-		0,0	
							Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	Keluarga	6000,00	20.819.653,39		-	1500	1.639.382,00	0,25		0,25						0,5	-	0,0	0,0	0,5	-		0,0	
							Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan	Keluarga	6000,00	20.819.653,39		-	1500	1.639.382,00	0,25		0,25						0,5	-	0,0	0,0	0,5	-		0,0	
							Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Keluarga	6000,00	20.819.653,39		-	1500	1.639.382,00	0,25		0,25						0,5	-	0,0	0,0	0,5	-		0,0	

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								I		II		III		IV											
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
							Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6000,00	20.819.653,39		-	1500	1.639.382,00	0,25		0,25						0,5	-	0,0	0,0	0,5	-		0,0		
							Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Keluarga	6000,00	20.819.653,39		-	1500	1.639.382,00	0,25		0,25						0,5	-	0,0	0,0	0,5	-		0,0		
		7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal**	**persen**	**100**	**16.661.389.280,58**	**100**	**-**	**100**	**3.401.307.728,00**	**20**	**691.750.000,00**	**20**	**2.130.500.000,00**		**-**		**-**	**40**	**2.822.250.000,00**	**40,0**	**83,0**	**140**	**2.822.250.000,00**		**16,94**	**Kec. SUKABUMI**
		7	**01**	**04**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**persen**	**100**	**16.661.389.280,58**	**100**	**-**	**100**	**3.401.307.728,00**	**20**	**691.750.000,00**	**20**	**2.130.500.000,00**		**-**		**-**	**40**	**2.822.250.000,00**	**40,0**	**83,0**	**140**	**2.822.250.000,00**		**16,94**	**Kec. SUKABUMI**
		7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1						0,25		0,25						0,5		0,1		0,1				Kec. SUKABUMI
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	16.532.623.701,31	1	-	1	3.378.443.580,00		691.750.000,00		2.130.500.000,00				2.822.250.000,00		83,5		2.822.250.000,00		17,1		
		7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1						0,25		0,25						0,5		0,1		0,1				Kec. SUKABUMI
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Laporan	5	128.765.579,27	1	-	1	22.864.148,00		-		-		-		-		0,0		-		0,0		
		7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**persen**	**100**	**51.584.120,55**	**100**	**-**		**7.778.336,00**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00**	**Kec. SUKABUMI**
		7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**51.584.120,55**	**100**	**-**	**100**	**7.778.336,00**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**Kec. SUKABUMI**
		7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh bahinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1						0,25		0,25						0,5		0,0		0,005				Kec. SUKABUMI
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100	26.530.680,08	1	-	1	4.000.544,00		-		-				-		0,0		-		0,0		
		7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1						0,25		0,25						0,5		50,0		0,1				Kec. SUKABUMI
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	25.053.440,47	1	-	1	3.777.792,00		-		-				-		0,0		-		0,0		
		7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**43.556.590,73**	**100**	**-**	**100**	**6.567.870,00**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00**	**Kec. SUKABUMI**
		7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**persen**	**100**	**43.556.590,73**	**100**	**-**	**100**	**6.567.870,00**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**Kec. SUKABUMI**
		7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1						0,25		0,25						0,5		50,0		50				Kec. SUKABUMI
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	25.094.179,41	1	-	1	3.783.935,00		-		-				-		0,0		-		0,0		
		7	01	06	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1						0,25		0,25						0,5		50,0		50				Kec. SUKABUMI
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	18.462.411,32	1	-	1	2.783.935,00		-		-				-		0,0		-		0,0		
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				**88.835.984.282,65**				**15.605.505.821,00**		**3.263.465.919,00**						**12.918.651.901,00**				**12.918.651.901,00**				

NO.	URAIAN	KODE KLASIFIKASI: BIDANG	SUB BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	PERSOALAN/ MASALAH KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA (TOLOK UKUR KINERJA DAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN SESUAI PERUBAHAN RANCANGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA SERTA REALISASI ANGGARAN YANG DIREALISASIKAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN LAPORAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH YANG DIREVISI (TAHUN 2025)	REALISASI KINERJA YANG DIPERLUKAN				REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN YANG DIREALISASIKAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN LAPORAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH YANG DIREVISI TAHUN 2025 (%)	REALISASI KINERJA YANG DIPERLUKAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (TARGET TAHUN 2025 + SISA LEBIH/KURANG REALISASI TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		KET. PENGISIAN SESUAI PENJABARAN DIVISI
												I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	(14) = (13)/(7)*100	(15)		(16) = (13)/(15)*100		(17)
												K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH			K	RUPIAH	K	RUPIAH		
TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SUB BIDANG PRODUK																										
PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN SUB BIDANG PRODUK																										
Kabid / pembimbing Subkoordinator Operasi																										
Kabid / pembimbing Koordinator pengendali Operasi																										
Mengetahui, Kepala Seksi yang Operasional di SUB BIDANG PRODUK																										
Mengetahui, Kepala Seksi yang Operasional di SUB BIDANG PRODUK																										

Catatan:
- *) Kepala OPD
- **) Kepala Bidang/Kepala Seksi/Koordinator Operasi

No.	Kepala Seksi/Koordinator Operasi	Kepala Bidang/Koordinator Operasi
1	75 - 100	Sangat Tinggi / A
2	50 - 74	Tinggi / B
3	25 - 49	Sedang / C
4	1 - 24	Rendah / D
5	0	Sangat Rendah / E

Kepala Perangkat Daerah dapat Edit Kolom merahnya pada Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2026

TABEL 5.1

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						KECAMATAN SUKABUMI									12.324.427.525,00	13.502.027.025,00	15.605.505.821,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									12.324.427.525,00	13.502.027.025,00	15.605.505.821,00	
	7	01				KECAMATAN									12.324.427.525,00	13.502.027.025,00	15.605.505.821,00	
212	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang		98%	98%	98%	98%	98%	6.637.132.199,00	7.295.523.410,00	7.362.502.206,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang		98%	98%	98%	98%	98%	10.256.173,00	9.478.596,00	9.478.596,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.056.121,00	3.159.532,00	3.159.532,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.501.260,00	3.159.532,00	3.159.532,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.698.792,00	3.159.532,00	3.159.532,00	KECAMATAN SUKABUMI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.043.916.664,00	5.596.891.712,00	5.611.681.712,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.953.527.525,00	5.530.627.025,00	5.530.627.025,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	90.389.139,00	66.264.687,00	81.054.687,00	14.790.000 + 66.264.687
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98%	98%	98%	98%	98%	55.874.891,00	74.648.598,00	62.337.394,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.193.467,00	6.539.774,00	6.539.774,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.532.678,00	16.043.188,00	16.043.188,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.379.180,00	10.550.195,00	10.550.195,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.785.745,00	4.123.021,00	4.123.021,00	KECAMATAN SUKABUMI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	483.821,00	24.892.420,00	12.581.216,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	25.884.158,00	90.000.000,00	84.500.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	5.284.158,00	45.000.000,00	39.500.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	5.600.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		95%	95%	95%	95%	95%	1.179.736.000,00	1.254.286.000,00	1.324.286.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	36.000.000,00	31.000.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.154.736.000,00	1.218.286.000,00	1.293.286.000,00	105.000.000 + 1.188.286.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara Inventaris Kantor yang Terpelihara		98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	321.464.313,00	270.218.504,00	270.218.504,00	KECAMATAN SUKABUMI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	33.670.000,00	33.670.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan		10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	227.700.000,00	191.527.384,00	191.527.384,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	500,00	610.000,00	610.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2.300.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang		6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	37.494.313,00	38.000.000,00	38.000.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	16.450.000,00	2.911.120,00	2.911.120,00	KECAMATAN SUKABUMI
213	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan(Wilayah		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3.071.348.474,00	3.074.143.720,00	4.285.143.720,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	39.290.667,00	34.821.860,00	34.821.860,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal												
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	39.290.667,00	34.821.860,00	34.821.860,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat		Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3.032.057.807,00	3.039.321.860,00	4.250.321.860,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.032.057.807,00	3.039.321.860,00	4.250.321.860,00	1.211.000.000 + 3.039.321.860
214	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan		85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	647.038.814,00	602.205.961,00	542.205.961,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase koordinasi		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	577.040.984,00	570.812.141,00	525.812.141,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	577.040.984,00	570.812.141,00	525.812.141,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan		Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%	69.997.830,00	31.393.820,00	16.393.820,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek		1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.999.783,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan		1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.999.783,00		1.639.382,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.999.783,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan		1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.999.783,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum		1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.999.783,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang		1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.999.783,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan		1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.999.783,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan		1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.999.783,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian		1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.999.783,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN SUKABUMI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kebidunan Menuju												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan		1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.999.783,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN SUKABUMI
215	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,d		100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	1.961.148.968,00	2.515.807.728,00	3.401.307.728,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan		100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	1.961.148.968,00	2.515.807.728,00	3.401.307.728,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.938.175.566,00	2.492.943.580,00	3.378.443.580,00	885.500.000 + 2.492.943.580
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.973.402,00	22.864.148,00	22.864.148,00	KECAMATAN SUKABUMI
216	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.103.831,00	7.778.336,00	7.778.336,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala		Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.103.831,00	7.778.336,00	7.778.336,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan												

No	Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan		20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	2.001.317,00	4.000.544,00	4.000.544,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di												
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.102.514,00	3.777.792,00	3.777.792,00	KECAMATAN SUKABUMI
217	7	01	06			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	6.955.199,00	6.567.870,00	6.567.870,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan		Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	6.955.199,00	6.567.870,00	6.567.870,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.865.026,00	3.783.935,00	3.783.935,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.850.213,00	2.783.935,00	2.783.935,00	KECAMATAN SUKABUMI
						JUMLAH										13.501.027.049,00	15.806.908.921,00	

Bandar Lampung, 2025
CAMAT SUKABUMI

SUKRIAL, S.Sos, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19721215 199503 1 004

PERUBAHAN RENCANA KERJA

KECAMATAN KEMILING
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	√			
		Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/tahun 2025				
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, Januari 2025

Camat Kemiling

ANDI DARMA PUTRA,S.STP.,M.IP.
NIP.19900830 201206 1 001

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST., M.Si	
	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengemnbangan Wilayah Bappeda	
2	Zeldayati Ningsih, S.H., M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Januari 2025

Camat Kemiling

ANDI DARMA PUTRA,S.STP.,M.IP.
NIP.19900830 201206 1 001

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST., M.SI	
	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengemnbangan Wilayah Bappeda	
2	Zeldayati Ningsih, S.H., M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	**FITRI YANTI, ST., M.Si**	
	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengemnbangan Wilayah Bappeda	
2	**Zeldayati Ningsih, S.H., M.M**	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Bandar Lampung, 2025

Mengetahui,

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP.19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB.I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 9

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB.II EVALUASI HASIL KINERJA PERANGKAT DAERAH

BAB. III SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB . IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB . V PENUTUP

LAMPIRAN 46
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR :
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah di tahap terakhir dari RPJPD Kota Bandar Lampung. RPJMD tersebut memuat perkiraan maju rencana pengeluaran selama 5 tahun sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tiap tahunnya dengan memperhatikan kondisi perekonomian, isu-isu strategis, asumsi ekonomi dan estimasi penerimaan/pengeluaran Kota Bandar Lampung yang dalam perjalannannya dapat terjadi perubahan-perubahan. Oleh karenanya untuk memastikan tercapainya target rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang jika diperlukan dilakukan perubahan terhadap RKPD tahun berjalan yang disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam perjalanan pelaksanaan rencana pembangunan tahunan tersebut.

Desain perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2025 yang disusun pada tahun 2024 dan telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025, saat ini dalam pelaksanaannya harus mengalami penyesuaian atau perubahan mengingat pada tahun

berjalan menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah. Selain itu, perubahan RKPD Tahun 2025 juga memperhatikan hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2025 serta asumsidan kondisi terkini sehingga rencana pembangunan Kota Bandar Lampung pada beberapa sektor mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan proses kerja. Namun demikian terdapat beberapa hal yang tetap menjadi perhatian seperti tantangan global dan dukungan terhadap pelaksanaan pilkada tahun 2024 maupun program-program yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi misi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan sinergi yang erat dari semua pihak dan pelaku kepentingan baik pemerintah, swasta, pelaku usaha serta seluruh masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan perubahan RKPD tahun 2025 sebagai dasar dalam penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun 2025. Secara garis besar, perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 didasarkan pada :

1. Perubahan proyeksi dan alokasi belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik seiring dengan perubahan proyeksi pendapatan daerah.

2. adanya efisiensiyang harus di sesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi terhadap Alat Tulis Kantor, Perjalanan Dinas dan Belanja Modal

3. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan atas evaluasi APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.

Perubahan RKPD tahun 2025 disusun dengan tahapan (a) Penyusunan rancangan perubahan RKPD; (b) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (c) penetapan perubahan RKPD. Adapun Perubahan RKPD 2025 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berjalan. Perumusan rancangan Perubahan RKPD mencakup analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi triwulan II tahun berjalan, penelaahan terhadapkebijakan, perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah beserta perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif. Pada perumusan rancangan perubahan RKPD, DPRD dapat memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada Kepala Derah melalui aplikasi e-planning ataupun secara tertulis dalam rapat dengar pendapat. Bila rancangan perubahan RKPD telah disetujui oleh Kepala Daerah, ditindak lanjuti dengan membuat surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan rancangan peraturan kepala daerah tentang perubahan RKPD setelah difasilitasi oleh Gubernur selanjutnya dapat ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD 2025 sekaligus juga sebagai dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah, dan pedoman penyusunan KUA Perubahan APBD serta Perubahan PPAS.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 108);
11. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
12. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006)
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);

29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 15);
31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 tentang APBD tahun Anggaran 2024(Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);
37. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 33).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar level/tingkat pemerintahan, serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dengan menitikberatkan pada upaya percepatan pemulihan ekonomi dan kebangkitan seluruh sektor terkait yang terdampak pandemi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk :

1. Tersusunnya perubahan rencana pembangunan tahunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi ditingkat nasional, provinsi dan daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Perubahan PPAS Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam RAPBDP Tahun 2025.
3. Menjadi pedoman Bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (perubahan Renja) Perangkat Daerah;
4. Menyediakan Informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD tahun 2025 disusun dengan sitematika berdasarkan pasal 349 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

I. Pendahuluan
II. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2025
III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
VI. Penutup.

BAB.II
EVALUASI HASIL KINERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 diukur dengan cara membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target yang harus dicapai di akhir tahun 2025. Untuk menentukan perubahan RKPD, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II menjadi salah satu faktor penentu yang dilakukan dengan cara membandingkan realisasi capaian kinerja program sampai dengan triwulan kedua tersebut dengan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2025 dalam satuan persentase.

Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, yang dijabarkan dalam 5 Program dan 26 Kegiatan. maka dari target kinerja program yang telah ditetapkan tahun 2025 tingkat pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 mencapai kurang lebih 56 persen.

Selanjutnya, pada Tabel 2.1 berikut ini, disajikan rincian Evaluasi Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah dilingkungan Kecamatan Kemiling Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

BAB.III
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana termuat pada draf Review RPJMD pada tahun rencana.

Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan SKPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya.

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah.Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dalam mengahadiri acara pembuikaan forum perangkat Daerah/Lintas Daerah kota bandar lampung mengatakan bahwa ingin agar dalam penyusunan pembangunan tahun 2025 mengakomodasi usulan-usulan masyarakat.

Adapun Sejumlah program – program unggulan walikota Bandar Lampung yang menjadi proritas yaitu :

1) Mendirikan Taman UMKM Bung Karno sebagai sentra UMKM
2) Menyulap terminal Sukaraja menjadi Pusat Pemekaran UMKM
3) Peningkatan Sumber Daya Manusia melaluin pemantapan pelayanan pada kesehatan dan pendidikan
4) Memacu perekonommian daerah melaluui peningkatan investasi dan ekonomi kerakyatan
5) Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal
6) Meningkatkan pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan treknologi digital dan sistem informasi daerah.

BAB.IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.Rangkaian rencana kerja diAkhiri dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplist rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan.Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas 44 pencapaian sasaran dimaksud.Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan

pembangunan Perangkat Daerah, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan Perangkat Daerah. Secara rinci, rumusan rencanaSecara rinci, rumusan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Kemiling tahun 2024, dapat diuraikan sebagaimana tabel 5.1. berikut :

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA BANDAR LAMPUNG
Tahun Anggaran 2025

FORMULIR DPA- BELANJA SKPD PERGESERAN

Organisasi : **47 KECAMATAN KEMILING**

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah Sebelum Pergeseran						Jumlah Setelah Pergeseran						Selisih
				T - 1	T				T + 1	T - 1	T				T + 1	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11	12	13	14	15	16	17=13+14+15+16	18	19 = 17 - 10
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**18,326,824,289**	**51,462,480**	**0**	**0**	**18,378,286,769**	**0**		**18,228,126,112**	**46,866,480**	**0**	**0**	**18,274,992,592**	**0**	**(103,294,177)**
7.01	**KECAMATAN**				**18,326,824,289**	**51,462,480**	**0**	**0**	**18,378,286,769**	**0**		**18,228,126,112**	**46,866,480**	**0**	**0**	**18,274,992,592**	**0**	**(103,294,177)**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**8,700,960,720**	**51,462,480**	**0**	**0**	**8,752,423,200**	**0**		**8,662,262,543**	**46,866,480**	**0**	**0**	**8,709,129,023**	**0**	**(43,294,177)**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,964,000**	**0**	**0**	**0**	**2,964,000**	**0**		**2,964,000**	**0**	**0**	**0**	**2,964,000**	**0**	**0**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KOTA BANDAR LAMPUNG		988,000	0	0	0	988,000	0		988,000	0	0	0	988,000	0	0
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KOTA BANDAR LAMPUNG		988,000	0	0	0	988,000	0		988,000	0	0	0	988,000	0	0
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KOTA BANDAR LAMPUNG		988,000	0	0	0	988,000	0		988,000	0	0	0	988,000	0	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**7,523,998,820**	**0**	**0**	**0**	**7,523,998,820**	**0**		**7,486,968,820**	**0**	**0**	**0**	**7,486,968,820**	**0**	**(37,030,000)**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		7,419,886,769	0	0	0	7,419,886,769	0		7,419,886,769	0	0	0	7,419,886,769	0	0
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		104,112,051	0	0	0	104,112,051	0		67,082,051	0	0	0	67,082,051	0	(37,030,000)
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**25,079,017**	**0**	**0**	**0**	**25,079,017**	**0**		**23,350,732**	**0**	**0**	**0**	**23,350,732**	**0**	**(1,728,285)**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		2,639,698	0	0	0	2,639,698	0		2,639,698	0	0	0	2,639,698	0	0
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		11,122,498	0	0	0	11,122,498	0		9,394,213	0	0	0	9,394,213	0	(1,728,285)
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		2,686,290	0	0	0	2,686,290	0		2,686,290	0	0	0	2,686,290	0	0
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		6,490,000	0	0	0	6,490,000	0		6,490,000	0	0	0	6,490,000	0	0
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		2,140,531	0	0	0	2,140,531	0		2,140,531	0	0	0	2,140,531	0	0
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**51,462,480**	**0**	**0**	**51,462,480**	**0**		**0**	**46,866,480**	**0**	**0**	**46,866,480**	**0**	**(4,596,000)**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		0	10,000,000	0	0	10,000,000	0		0	5,404,000	0	0	5,404,000	0	(4,596,000)
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		0	32,962,480	0	0	32,962,480	0		0	32,962,480	0	0	32,962,480	0	0
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		0	8,500,000	0	0	8,500,000	0		0	8,500,000	0	0	8,500,000	0	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**872,518,000**	**0**	**0**	**0**	**872,518,000**	**0**		**872,518,000**	**0**	**0**	**0**	**872,518,000**	**0**	**0**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		41,200,000	0	0	0	41,200,000	0		41,200,000	0	0	0	41,200,000	0	0
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		806,400,000	0	0	0	806,400,000	0		806,400,000	0	0	0	806,400,000	0	0
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	KOTA BANDAR LAMPUNG		24,918,000	0	0	0	24,918,000	0		24,918,000	0	0	0	24,918,000	0	0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**276,400,883**	**0**	**0**	**0**	**276,400,883**	**0**		**276,460,991**	**0**	**0**	**0**	**276,460,991**	**0**	**60,108**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		67,340,000	0	0	0	67,340,000	0		67,340,000	0	0	0	67,340,000	0	0
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		198,750,000	0	0	0	198,750,000	0		198,750,000	0	0	0	198,750,000	0	0
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		2,000,000	0	0	0	2,000,000	0		2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		3,900,000	0	0	0	3,900,000	0		3,900,000	0	0	0	3,900,000	0	0
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		2,410,883	0	0	0	2,410,883	0		2,470,991	0	0	0	2,470,991	0	60,108

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah Sebelum Pergeseran						Jumlah Setelah Pergeseran							Selisih
				T - 1	T				T + 1	T - 1	T				T + 1		
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11	12	13	14	15	16	17=13+14+15+16	18	19 = 17 - 10
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		2,000,000	0	0	0	2,000,000	0		2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**5,027,488,107**	**0**	**0**	**0**	**5,027,488,107**	**0**		**5,027,488,107**	**0**	**0**	**0**	**5,027,488,107**	**0**	**0**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**57,488,107**	**0**	**0**	**0**	**57,488,107**	**0**		**57,488,107**	**0**	**0**	**0**	**57,488,107**	**0**	**0**
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		57,488,107	0	0	0	57,488,107	0		57,488,107	0	0	0	57,488,107	0	0
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**4,970,000,000**	**0**	**0**	**0**	**4,970,000,000**	**0**		**4,970,000,000**	**0**	**0**	**0**	**4,970,000,000**	**0**	**0**
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		4,970,000,000	0	0	0	4,970,000,000	0		4,970,000,000	0	0	0	4,970,000,000	0	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**928,499,190**	**0**	**0**	**0**	**928,499,190**	**0**		**868,499,190**	**0**	**0**	**0**	**868,499,190**	**0**	**(60,000,000)**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**838,500,000**	**0**	**0**	**0**	**838,500,000**	**0**		**808,500,000**	**0**	**0**	**0**	**808,500,000**	**0**	**(30,000,000)**
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		838,500,000	0	0	0	838,500,000	0		808,500,000	0	0	0	808,500,000	0	(30,000,000)
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**89,999,190**	**0**	**0**	**0**	**89,999,190**	**0**		**59,999,190**	**0**	**0**	**0**	**59,999,190**	**0**	**(30,000,000)**
7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		8,999,919	0	0	0	8,999,919	0		5,999,919	0	0	0	5,999,919	0	(3,000,000)
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		8,999,919	0	0	0	8,999,919	0		5,999,919	0	0	0	5,999,919	0	(3,000,000)
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		8,999,919	0	0	0	8,999,919	0		5,999,919	0	0	0	5,999,919	0	(3,000,000)
7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		8,999,919	0	0	0	8,999,919	0		5,999,919	0	0	0	5,999,919	0	(3,000,000)
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		8,999,919	0	0	0	8,999,919	0		5,999,919	0	0	0	5,999,919	0	(3,000,000)
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		8,999,919	0	0	0	8,999,919	0		5,999,919	0	0	0	5,999,919	0	(3,000,000)
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		8,999,919	0	0	0	8,999,919	0		5,999,919	0	0	0	5,999,919	0	(3,000,000)
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		8,999,919	0	0	0	8,999,919	0		5,999,919	0	0	0	5,999,919	0	(3,000,000)
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		8,999,919	0	0	0	8,999,919	0		5,999,919	0	0	0	5,999,919	0	(3,000,000)
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		8,999,919	0	0	0	8,999,919	0		5,999,919	0	0	0	5,999,919	0	(3,000,000)
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**3,665,876,272**	**0**	**0**	**0**	**3,665,876,272**	**0**		**3,665,876,272**	**0**	**0**	**0**	**3,665,876,272**	**0**	**0**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**3,665,876,272**	**0**	**0**	**0**	**3,665,876,272**	**0**		**3,665,876,272**	**0**	**0**	**0**	**3,665,876,272**	**0**	**0**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		3,643,376,272	0	0	0	3,643,376,272	0		3,643,376,272	0	0	0	3,643,376,272	0	0
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		22,500,000	0	0	0	22,500,000	0		22,500,000	0	0	0	22,500,000	0	0
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**2,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**0**		**2,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**0**	**0**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**2,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**0**		**2,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**0**	**0**
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah Sebelum Pergeseran							Jumlah Setelah Pergeseran							Selisih
				T - 1	T					T + 1	T - 1	T					T + 1	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11	12	13	14	15	16	17=13+14+15+16	18	19 = 17 - 10
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**2,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**0**		**2,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**0**	**0**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**2,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**0**		**2,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**0**	**0**
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0
			Jumlah		**18,326,824,289**	**51,462,480**	**0**	**0**	**18,378,286,769**	**0**		**18,228,126,112**	**46,866,480**	**0**	**0**	**18,274,992,592**	**0**	**(103,294,177)**

Bandar Lampung, 24 Februari 2025

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(Dr. MUHAMAD NUR RAM'DHAN, M.Acc., Akt.,)
NIP. 19741007 200501 1 006

Kepala SKPD

(ANDI DARMA PUTRA, S.STP., M.IP)
NIP. 19900830 201206 1 001

Formulir E. 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG

RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG

PERIODE PELAKSANAAN s.d. TRIWULAN I TAHUN 2025

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024) YANG DIEVALUASI 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV													
(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
unsur kewilayahan																																	
kecamatan									117.914.064.968,17	50	15.444.822.731,00	98	18.378.286.769,00	20,00	4.423.770.785,00	20,00	-	-		-	40,00	4.423.770.785,00	40,82	6,60	60,00	19.868.593.516,00	61,22	16,55		
Kecamatan Kemiling									117.914.064.968,17	50	15.444.822.731,00	98	18.378.286.769,00	20,00	4.423.770.785,00	20,00	-	-		-	40	4.423.770.785	40,82	24,07	60,00	19.868.593.516,00	61,22	16,55		
7	01					Indeks kepuasan masyarakat	persen	98,00																						Kec.Kemiling	Bandar Lampung
7	01	2			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan	persen	98	54.169.163.015,30	50	7.027.958.031	98	8.752.423.200	20	1.935.020.785	20	0		0,00	20	0,00	60	1.935.020.785	61,22	22,11	60	8.962.978.816	61,22	16,55	Kec.Kmg	Bandar Lampung
7	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan	persen	98	44.342.928.183,74	50	6.192.604.487	98	7.523.998.820	20	1.759.141.317,00	20	0		0	20	0	60	1.759.141.317	61,22	23,38	60	7.951.745.804	61,22	17,93	Kec.Kmg	Bandar Lampung
7	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	65	43.733.186.251	62	6.130.474.487	62	7.419.886.769	62	1.759.141.317	62				62		62	1.759.141.317	62	23,71	62	7.889.615.804	95,38	18,04	Kec.Kmg	
						Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1																							
7	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	609.741.933	1	62.130.000	1	104.112.051	0,25	-	0,25				0,25		0,25	-	0,25	-	1	62.130.000	25,00	10,19	Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1																							
7	01				Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan,	persen	98	59.676.817,50	98	2.964.000	98	2.964.000	20	0,00	20	0,00		0,00	20	-	60	-	61,22	-	158	2.964.000	161,22	4,97	Kec.Kmg	Bandar Lampung
7	01	2	1	1	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.892.273	1	988.000	1	988.000	0,25	-	0,25	-		-	0,25		0,75	-	75,00		2		25,00	-	Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1																							
7	01	2	1	6	Kooedinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	4	19.892.273	1	988.000	1	988.000	0,25	-	0,25	-		-	0,25		0,75	-	75,00		2		43,75	-	Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1																							
7	01	2	1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	19.892.273	1	988.000	1	988.000	0,25	-	0,25	-		-	0,25		0,75	-	75,00		2		43,75	-	Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1																							
7	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	persen	98,00	491.660.678,28	98	19.284.300	98,00	25.079.017	20	-	20	-		-	20	-	60	-	61,22		158	19.284.300	161,22	3,92	Kec.Kmg	Bandar Lampung
7	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	4	59.555.337	1	2.494.200	1	2.639.698	0,25		0,25	-		-	0,25		0,75	-	75,00		2		43,75			
						Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1		1		1					-													
7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket	4	221.477.948	1	8.453.800	1	11.122.498	0,25		0,25	-		-	0,25		0,75	-	75,00		2	8.453.800	43,75	3,82	Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1		1		1																			
7	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	8.933.564	1	1.601.300	1	2.686.290	0,25		0,25	-		-	0,25		0,75	-	75,00	-	2	*1.601.300*	43,75	*17,92*	Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1		1		1																			
7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	116.038.256	1	4.735.000	1	6.490.000	0,25		0,25	-		-	0,25		0,75	-	75,00	-	2	*4.735.000*	43,75	*4,08*	Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1		1		1																			
7	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	85.655.573	1	2.000.000	1	2.140.531	0,25		0,25	-		-	0,25		0,75	-	75,00	-	2		43,75		Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1																							
7	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	persen	98,00	331.537.875,01	50	0,00		51.462.480,00											-				50	-	51,02	-	Kec.Kmg	Bandar Lampung
7	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	129.852.334	1			10.000.000								-						-		Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Jumlah mebel	Tahun	1																							
7	01	2	07		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	10	88.410.100	1			32.962.480								-					1	-	10,00	-	Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1																							
7	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Unit	10	113.275.441	1			8.500.000								-		-				-	0,00	-	Kec.Kmg	Bandar Lampung
7	01	2	08		Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	persen	98	5.487.005.982,44	90	618.740.544,00	98	872.518.000,00	20	145.033.468	20	0,00		0		0,00	40	145.033.468	40,82	16,62	130	763.774.012	132,65		Kec.Kmg	Bandar Lampung
7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	227.656.007,50	1	12.564.044	1	41.200.000	0,25	*12.260.468*	0,25						0,5	12.260.468,00	50,00	29,76	2	24.824.512	37,50	10,90	Kec.Kmg	Bandar Lampung
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	5.259.349.975	1	606.176.500	1	831.318.000	0,25	132.773.000	0,25						0,5	132.773.000,00	50,00	15,97	2	738.949.500	37,50	14,05	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
						Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1																						Kec.Kmg	
7	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	persen	98	3.456.353.478,33	90	194.364.700	98	276.400.883	20	30.846.000	20	0,00		0,00		0,00	40	30.846.000	40,82	11,16	130	649.586.544	132,65	18,79	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	185.286.854	1	28.818.300	1	67.340.000	1		1						2	-	50	-	0,5	28.818.300	50,00	15,55	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024) YANG DIEVALUASI 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV													
(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	2.011.222.699	1	158.866.400	5	198.750.000	1	30.846.000	1						1	30.846.000,00	20,00	15,52	2	189.712.400	40,00	9,43	Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1							-														
7	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	22.102.525	1	2.000.000	5	2.000.000	1		1	-					1	-	20,00		2,00	2.000.000	66,67	9,05	Kec.Kmg	Bandar Lampung
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	22.102.525	1	2.680.000,00	1	3.900.000	1		1	-					0,5	-	50	-	0,5	#REF!	50,00	#REF!	Kec.Kmg	Bandar Lampung
7	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1.215.638.875	1		6	2.410.883	1		1	-					1		16,67		2,00	-	33,33	-	Kec.Kmg	Bandar Lampung
7	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		1	2.000.000	1	2.000.000	1		1	-					0,5	-	50	-	0,5	2.000.000	50,00	#DIV/0!	Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1							-														
7	**01**				**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**persen**	**100**	**290.095.604,63**	**90**	**-**	**100**	**2.000.000**	10	**0**	10	**0**		**0**		**0**	**20**	-	**20,00**		**110**		**110,00**		Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	**01**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**290.095.604,63**	**90**	**-**	**100**	**2.000.000**	10		10	-					**20**		20,00		110		110,00		Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	01				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	124.326.703,13			1	1.000.000	0,25		0,25	-			-		0,5	-	50	-	0,5	-	50,00	-	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
					Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1					1.000.000				-			-										
7	**01**				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**290.095.640,63**		**-**	**100**	**2.000.000**	10	**0**	10						**20**	-	20,00		**20**		**20,00**		Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	01				**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	persen	**100**	290.095.641		-	**100**	**2.000.000**	20		20	-					**40**				**40**		**40,00**		Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	01				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	165.768.937,50	1		1	1.000.000	0,25		0,25	-			-		0,5	-	50	-	0,5	-	50,00	-	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
						Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1							-														Kec.Kmg	
7	01				fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	4	124.326.703,13	1		1	1.000.000	0,25		0,25	-			-		0,5	-	50	-	0,5	-	50,00	-	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
						Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan	Tahun	1							-														
7	01					Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan									-														Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	**01**	**2**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan**	**persen**	**100**	**34.247.060.994,68**	**90**	**4.890.864.700**	**100**	**5.027.488.107**	20	**1.478.750.000**	20	**0,00**		**-**		**-**	**40**	**1.478.750.000**	**40,00**	**29,41**	**130,00**	**6.369.614.700**	**130,00**	**18,60**	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	01	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di**	persen	**100**	**443.210.882,56**	**90**	**43.364.700**	**1**	**57.488.107**	20		20			-			**40**	-	**4000,00**	-	130,00	43.364.700	130,00	9,78	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	01	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	443.210.883	1	43.364.700	1	57.488.107	0,25	1.478.750.000	0,25							1.478.750.000,00	50	2.572,27	0,5	1.522.114.700	50,00	343,43	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
						Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan	Tahun	1																						
7	01	**2**	**02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	persen	**100**	**33.803.850.112,12**		**4.847.500.000**	**100**	**4.970.000.000**	20		20						**40**	-	40,00	-	40	4.847.500.000	40,00	14,34	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	01	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	33.803.850.112	1	4.847.500.000	1	4.970.000.000	0,25		0,25						0,5	-	50	-	0,5	4.847.500.000	12,5	14,34	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
						Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1																				Kec.Kmg	
7	01	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan**	**persen**	**100**	**7.991.258.810,38**		**683.500.000**	**100**	**928.499.190**	**20**	**-**	**20**	**-**		**-**		**-**	**40**	**-**	**40,00**	**-**	**40**	**683.500.000**	**40,00**	**8,55**	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	01	**03**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**persen**	**100**	**7.991.258.810,38**	**100**	**683.500.000**	**100**	**838.500.000**	**20**	-	**20**						**40**	-	40,00	-	140	683.500.000	140,00	8,55	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	01	03	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	7.991.258.810	**1**	683.500.000	1	838.500.000	0,25		0,25						0,5		50,00	-	1	683.500.000	12,50	8,55	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
						Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1																						
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	80	**1.939.556.250**		**-**	**80**	**89.999.190**	**20**		**20**							-									
					Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	9000	193.955.625			**9.000**	8.999.919	0,25		0,25						0,5	-	50	-	0,5					

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024) YANG DIEVALUASI 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV											
(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	9000	193.955.625			9.000	8.999.919	0,25		0,25						0,5	-	50	-	0,5					
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	9000	193.955.625			9.000	8.999.919	0,25		0,25						0,5	-	50	-	0,5					
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	9000	193.955.625			9.000	8.999.919	0,25		0,25						0,5	-	50	-	0,5					
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	9000	193.955.625,00			9.000	8.999.919	0,25		0,25						0,5	-	50	-	0,5					
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	9000	193.955.625,00			9.000	8.999.919	0,25		0,25						0,5	-	50	-	0,5					
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	9000	193.955.625,00			9.000	8.999.919	0,25		0,25						0,5	-	50	-	0,5					
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	9000	193.955.625,00			9.000	8.999.919	0,25		0,25						0,5	-	50	-	0,5					
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	9000	193.955.625,00			9.000	8.999.919	0,25		0,25						0,5	-	50	-	0,5					
					Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	9000	193.955.625,00			9.000	8.999.919	0,25		0,25						0,5	-	50	-	0,5					
7	01	04			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**persen**	**100**	**20.926.390.902,56**		**2.842.500.000**	**100**	**3.665.876.272**	20	**1.010.000.000**	20	**-**		**-**		**-**	**40**	**1.010.000.000,00**	**40,00**	**27,55**	**40**	**3.852.500.000**	**40,00**	**18,41**	**Kec.Kmg**	*Bandar Lampung*
7	01	04	01		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**persen**	**100**	20.926.390.903		**2.842.500.000**	**100**	**3.665.876.272**	**20**		**20**						40	-	**40,00**		40	**2.842.500.000**	**40,00**	**13,58**	**Kec.Kmg**	*Bandar Lampung*
7	01	04	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	20.795.215.903		2.820.000.000	1	3.643.376.272	0,25	1.010.000.000,00	0,25					0,5	**1.010.000.000,00**	**50,00**	**27,72**	**1**	**3.830.000.000**	**12,50**	**18,42**	**Kec.Kmg**	*Bandar Lampung*
					harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	131.175.000		22.500.000	1	22.500.000	0,25		0,25					0,5	-	**50,00**	-	**1**	**22.500.000**	**12,50**	**17,15**		
						presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1																							
																						0									
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				**151.815.718.789,42**		**15.444.822.731**		**18.378.286.769**		**4.423.770.785,00**		**-**		**-**		**-**		**4.423.770.785,00**		**24,07**		**19.868.593.516,00**				
					TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			**xxx**	**xxx**			**xxx**	**xxx**		
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			**xxx**	**xxx**			**xxx**	**xxx**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

Bandar Lampung, 2025
CAMAT KEMILING

(ANDI DARMA PUTRA, S.STP., M.IP)
NIP. 19900830 201206 1 001

Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Formulir E. 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG

RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG

PERIODE PELAKSANAAN s.d. TRIWULAN II TAHUN 2025

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024) YANG DIEVALUASI 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV													
(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
unsur kewilayahan																																
kecamatan									117.914.064.968,17	50	15.444.822.731,00	98	18.274.992.592,00	20,00	4.423.770.785,00	20,00	8.402.952.589		-		-	40,00	12.826.723.374,00	40,82	6,60	60,00	28.271.546.105,00	61,22	23,98		
Kecamatan Kemiling									117.914.064.968,17	50	15.444.822.731,00	98	18.274.992.592,00	20,00	4.423.770.785,00	20,00	8.402.952.589		-		-	40	12.826.723.374	40,82	70,19	60,00	28.271.546.105,00	61,22	23,98		
7	01				Indeks kepuasan masyarakat		persen	98,00																								Kec.Kemiling	Bandar Lampung
7	01	2			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan	persen	98	54.169.163.015,30	50	7.027.958.031	98	8.709.129.023	20	1.935.020.785	20	4.151.202.589		0,00	20	0,00	60	6.086.223.374	61,22	69,88	60	13.114.181.405	61,22	24,21	Kec.Kmg	Bandar Lampung
7	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan	persen	98	44.342.928.183,74	50	6.192.604.487	98	7.486.968.820	20	1.759.141.317,00	20	3.697.133.221		0	20	0	60	5.456.274.538	61,22	72,88	60	11.648.879.025	61,22	26,27	Kec.Kmg	Bandar Lampung
7	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	65	43.733.186.251	62	6.130.474.487	62	7.419.886.769	62	1.759.141.317	62	3.684.773.221			62		62	5.443.914.538	62	73,37	62	11.574.389.025	95,38	26,47	Kec.Kmg	
						Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1																								
7	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	609.741.933	1	62.130.000	1	67.082.051	0,25	-	0,25	12.360.000			0,25		0,25	12.360.000	0,25	18,43	1	74.490.000	25,00	12,22	Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1																						
7	01				Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan,	persen	98	59.676.817,50	98	2.964.000	98	2.964.000	20	0,00	20	0,00		0,00	20	-	60	-	61,22	-	158	2.964.000	161,22	4,97	Kec.Kmg	Bandar Lampung
7	01	2	1	1	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.892.273	1	988.000	1	988.000	0,25		0,25	-		-	0,25		0,75	-	75,00		2		25,00	-	Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1																						
7	01	2	1	6	Kooedinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	4	19.892.273	1	988.000	1	988.000	0,25		0,25	-		-	0,25		0,75	-	75,00		2		43,75	-	Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1																						
7	01	2	1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	19.892.273	1	988.000	1	988.000	0,25		0,25	-		-	0,25		0,75	-	75,00		2		43,75	-	Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1																						
7	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	persen	98,00	491.660.678,28	98	19.284.300	98,00	23.350.732	20	-	20	-		-	20	-	60	-	61,22		158	19.284.300	161,22	3,92	Kec.Kmg	Bandar Lampung
7	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	4	59.555.337	1	2.494.200	1	2.639.698	0,25		0,25	-		-	0,25		0,75	-	75,00		2		43,75			
						Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1		1		1					-		-											
7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket	4	221.477.948	1	8.453.800	1	9.394.213	0,25		0,25	-		-	0,25		0,75	-	75,00		2	8.453.800	43,75	3,82	Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1		1		1																			
7	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	8.933.564	1	1.601.300	1	2.686.290	0,25		0,25	-		-	0,25		0,75	-	75,00	-	2	*1.601.300*	43,75	*17,92*	Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1		1		1																			
7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	116.038.256	1	4.735.000	1	6.490.000	0,25		0,25	-		-	0,25		0,75	-	75,00	-	2	*4.735.000*	43,75	*4,08*	Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1		1		1																			
7	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	85.655.573	1	2.000.000	1	2.140.531	0,25		0,25	-		-	0,25		0,75	-	75,00	-	2		43,75		Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1																						
7	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	persen	98,00	331.537.875,01	50	0,00		46.866.480,00										-			50	-	51,02	-	Kec.Kmg	Bandar Lampung
7	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	129.852.334	1			5.404.000								-						-	-	Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Jumlah mebel	Tahun	1																						
7	01	2	07		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	10	88.410.100	1			32.962.480								-					1	-	10,00	-	Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1																						
7	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Unit	10	113.275.441	1			8.500.000								-		-				-	0,00	-	Kec.Kmg	Bandar Lampung
7	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	persen	98	5.487.005.982,44	90	618.740.544,00	98	872.518.000,00	20	145.033.468,00	20	388.762.968,00		0		0,00	40	533.796.436	40,82	61,18	130	1.152.536.980	132,65		Kec.Kmg	Bandar Lampung
7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	227.656.007,50	1	12.564.044	1	41.200.000	0,25	*12.260.468*	0,25	12.260.468					0,5	24.520.936,00	50,00	59,52	2	37.084.980	37,50	16,29	Kec.Kmg	Bandar Lampung
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	5.259.349.975	1	606.176.500	1	806.400.000	0,25	132.773.000	0,25	326.502.500					0,5	459.275.500,00	50,00	56,95	2	1.065.452.000	37,50	20,26	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
						Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1																						Kec.Kmg	
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							24.918.000				50.000.000														
						Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Pramubakti yang Tersedia	Tahun	1																							
7	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	persen	98	3.456.353.478,33	90	194.364.700	98	276.460.991	20	30.846.000	20	65.306.400,00		0,00		0,00	40	96.152.400	40,82	34,78	130	714.892.944	132,65	20,68	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	185.286.854	1	28.818.300	1	67.340.000	1		1						2	-	50	-	0,5	28.818.300	50,00	15,55	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	2.011.222.699	1	158.866.400	5	198.750.000	1	30.846.000	1	65.306.400					1	96.152.400,00	20,00	48,38	2	255.018.800	40,00	12,68	Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1									-													

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024) YANG DIEVALUASI 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV											
(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
7	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	22.102.525	1	2.000.000	5	2.000.000	1		1	-					1	-	20,00		2,00	2.000.000	66,67	9,05	Kec.Kmg	Bandar Lampung
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	22.102.525	1	2.680.000,00	1	3.900.000	1		1	-					0,5	-	50	-	0,5	#REF!	50,00	#REF!	Kec.Kmg	Bandar Lampung
7	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1.215.638.875	1		6	2.470.991	1		1	-					1		16,67		2,00	-	33,33	-	Kec.Kmg	Bandar Lampung
7	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		1	2.000.000	1	2.000.000	1		1	-					0,5	-	50	-	0,5	2.000.000	50,00	#DIV/0!	Kec.Kmg	Bandar Lampung
						Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1									-													
7	**01**				**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**persen**	**100**	**290.095.604,63**	**90**	**-**	**100**	**2.000.000**	10	**0**	10	**0**		**0**		**0**	**20**	**-**	**20,00**		**110**		**110,00**		Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	**01**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**290.095.604,63**	**90**	**-**	**100**	**2.000.000**	10		10	-					20		20,00		110		110,00		Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	01				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	124.326.703,13			1	1.000.000	0,25		0,25	-				-	0,5	-	50	-	0,5	-	50,00	-	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
					Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1					1.000.000				-				-									
7	**01**				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**290.095.640,63**		**-**	**100**	**2.000.000**	10	**0**	10						**20**	**-**	**20,00**		**20**		**20,00**		Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	01				**Fasilitasi,,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	persen	**100**	290.095.641		**-**	**100**	**2.000.000**	20		20	-					**40**				**40**		**40,00**		Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	01				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi T ata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	165.768.937,50	1		1	1.000.000	0,25		0,25	-				-	0,5	-	50	-	0,5	-	50,00	-	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
						Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1									-												Kec.Kmg	
7	01				fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	4	124.326.703,13	1		1	1.000.000	0,25		0,25	-				-	0,5	-	50	-	0,5	-	50,00	-	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
						Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan	Tahun	1									-													
7	01					Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan											-													Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	**01**	**2**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan**	**persen**	**100**	**34.247.060.994,68**	**90**	**4.890.864.700**	**100**	**5.027.488.107**	20	**1.478.750.000**	20	**2.513.750.000,00**		**-**		**-**	**40**	**3.992.500.000**	**40,00**	**79,41**	**130,00**	**8.883.364.700**	**130,00**	**25,94**	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	01	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di**	persen	**100**	**443.210.882,56**	**90**	**43.364.700**	**1**	**57.488.107**	20		20			**-**			**40**	**-**	**4000,00**	**-**	**130,00**	**43.364.700**	**130,00**	**9,78**	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	01	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal T erkait	Laporan	4	443.210.883	1	43.364.700	1	57.488.107	0,25	1.478.750.000	0,25	41.000.000						1.519.750.000,00	50	**2.643,59**	0,5	**1.563.114.700**	**50,00**	**352,68**	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
						Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan	Tahun	1																					
7	01	**2**	**02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	persen	**100**	**33.803.850.112,12**		**4.847.500.000**	**100**	**4.970.000.000**	20		20						**40**	**-**	**40,00**	**-**	**40**	**4.847.500.000**	**40,00**	**14,34**	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	01	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	33.803.850.112	1	4.847.500.000	1	4.970.000.000	0,25		0,25	2.472.750.000					0,5	2.472.750.000,00	50	**49,75**	0,5	**7.320.250.000**	**12,5**	**21,66**	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
						Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1																					Kec.Kmg	
7	01	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan**	**persen**	**100**	**7.991.258.810,38**		**683.500.000**	**100**	**868.499.190**	**20**	**-**	**20**	**-**		**-**		**-**	**40**	**-**	**40,00**	**-**	**40**	**683.500.000**	**40,00**	**8,55**	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	01	**03**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**persen**	**100**	**7.991.258.810,38**	**100**	**683.500.000**	**100**	**808.500.000**	**20**	**-**	**20**						**40**	-	40,00	-	**140**	**683.500.000**	**140,00**	**8,55**	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
7	01	03	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	7.991.258.810	**1**	683.500.000	1	808.500.000	0,25		0,25						0,5		**50,00**	-	**1**	**683.500.000**	**12,50**	**8,55**	Kec.Kmg	*Bandar Lampung*
						Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1																					
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	80	**1.939.556.250**		**-**	**80**	**59.999.190**	**20**		**20**															
					Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyerakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	9000	193.955.625			**9.000**	5.999.919	0,25		0,25						0,5	-	50	-	0,5					
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	9000	193.955.625			**9.000**	5.999.919	0,25		0,25						0,5	-	50	-	0,5					

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024) YANG DIEVALUASI 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV											
(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	9000	193.955.625			9.000	5.999.919	0,25		0,25						0,5	-	50	-	0,5						
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	9000	193.955.625			9.000	5.999.919	0,25		0,25						0,5	-	50	-	0,5						
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	9000	193.955.625,00			9.000	5.999.919	0,25		0,25						0,5	-	50	-	0,5						
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	9000	193.955.625,00			9.000	5.999.919	0,25		0,25						0,5	-	50	-	0,5						
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	9000	193.955.625,00			9.000	5.999.919	0,25		0,25						0,5	-	50	-	0,5						
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	9000	193.955.625,00			9.000	5.999.919	0,25		0,25						0,5	-	50	-	0,5						
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	9000	193.955.625,00			9.000	5.999.919	0,25		0,25						0,5	-	50	-	0,5						
					Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	9000	193.955.625,00			9.000	5.999.919	0,25		0,25						0,5	-	50	-	0,5						
7	01	04			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**persen**	**100**	**20.926.390.902,56**		**2.842.500.000**	**100**	**3.665.876.272**	20	**1.010.000.000**	20	**1.738.000.000**		**-**		**-**	**40**	**2.748.000.000,00**	**40,00**	**74,96**	**40**	**5.590.500.000**	**40,00**	**26,72**	**Kec.Kmg**	*Bandar Lampung*
7	01	04	01		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**persen**	**100**	20.926.390.903		**2.842.500.000**	**100**	**3.665.876.272**	**20**		**20**						40	-	40,00		40	**2.842.500.000**	40,00	13,58	**Kec.Kmg**	*Bandar Lampung*
7	01	04	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Laporan	4	20.795.215.903		2.820.000.000	1	3.643.376.272	0,25	1.010.000.000,00	0,25	1.738.000.000					0,5	**2.748.000.000,00**	**50,00**	**75,42**	**1**	**5.568.000.000**	**12,50**	**26,78**	**Kec.Kmg**	*Bandar Lampung*
					harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	131.175.000		22.500.000	1	22.500.000	0,25		0,25					0,5	-	**50,00**	-	**1**	**22.500.000**	**12,50**	17,15		
						presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1																							
																						0									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**151.815.718.789,42**		**15.444.822.731**		**18.274.992.592**		**4.423.770.785,00**		**8.402.952.589,00**		**-**		**-**		**12.826.723.374,00**		**70,19**		**28.271.546.105,00**			
TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																								**xxx**	**xxx**			**xxx**	**xxx**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																								**xxx**	**xxx**			**xxx**	**xxx**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

Bandar Lampung, 10 Juli 2025
CAMAT KEMILING

(ANDI DARMA PUTRA, S.STP., M.IP)

NIP. 19900830 201206 1 001

Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

TABEL 5.1
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
						KECAMATAN KEMILING									**16.472.508.569,00**	**18.378.286.769,00**	**21.722.455.060,00**	KECAMATAN KEMILING
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									16.472.508.569,00	18.378.286.769,00	**21.722.455.060,00**	KECAMATAN KEMILING
	7	01				KECAMATAN											21.722.455.060,00	KECAMATAN KEMILING
158	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	98%	98%	98%	98%	98%	7.887.683.540,50	8.752.423.200,00	8.901.091.491,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,pengangar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,pengangar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	98%	98%	98%	98%	2.994.000,00	2.964.000,00	2.964.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	998.000,00	988.000,00	988.000,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	998.000,00	988.000,00	988.000,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	998.000,00	988.000,00	988.000,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	6.627.063.569,00	7.523.998.820,00	7.486.968.820,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	6.528.608.569,00	7.419.886.769,00	7.419.886.769,00	KECAMATAN KEMILING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	98.455.000,00	104.112.051,00	67.082.051,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	98%	98%	98%	98%	45.395.119,00	25.079.017,00	23.350.732,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25.170.437,00	2.639.698,00	2.639.698,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.124.355,00	11.122.498,00	9.394.213,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.610.327,00	2.686.290,00	2.686.290,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	6.490.000,00	6.490.000,00	6.490.000,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.140.531,00	2.140.531,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	8.499.000,00	51.462.480,00	46.866.480,00	
			01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	10.000.000,00	5.404.000,00	KECAMATAN KEMILING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0,00	32.962.480,00	32.962.480,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	8.499.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	95%	95%	95%	95%	825.105.325,00	872.518.000,00	1.043.778.468,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	41.200.000,00	41.200.000,00	53.460.468,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	783.905.325,00	831.318.000,00	965.400.000,00	KECAMATAN KEMILING
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						keg baru	keg baru			24.918.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	378.626.527,50	276.400.883,00	297.162.991,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	67.340.000,00	67.340.000,00	KECAMATAN KEMILING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	333.990.000,00	198.750.000,00	219.452.000,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel											
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1.616.527,50	3.900.000,00	3.900.000,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.410.883,00	2.470.991,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	KECAMATAN KEMILING
159	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah KECAMATAN KEMILING)	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah KECAMATAN KEMILING)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.548.588.021,00	5.027.488.107,00	6.990.988.107,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								701.088.021,00	57.488.107,00	2.020.988.107,00	
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				KECAMATAN KEMILING
	7	01	02	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								4.847.500.000,00			
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		4.970.000.000,00	4.970.000.000,00	KECAMATAN KEMILING
160	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan KECAMATAN KEMILING	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan KECAMATAN KEMILING	85%	85%	85%	85%	85%	179.971.020,00	928.499.190,00	868.499.190,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %				
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								89.985.510,00	838.500.000,00	808.500.000,00	
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	89.985.510,00	89.999.190,00	59.999.190,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara								8.998.551,00	8.999.919,00	5.999.919,00	
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga				KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	8.998.551,00	8.999.919,00	5.999.919,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	8.998.551,00	8.999.919,00	5.999.919,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah								8.998.551,00	8.999.919,00	5.999.919,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga				KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat								8.998.551,00	8.999.919,00	5.999.919,00	
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga				KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya								8.998.551,00	8.999.919,00	5.999.919,00	
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga				KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup								8.998.551,00	8.999.919,00	5.999.919,00	
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga				KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam								8.998.551,00	8.999.919,00	5.999.919,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga				KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga								8.998.551,00	8.999.919,00	5.999.919,00	
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga				KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas								8.998.551,00	8.999.919,00	5.999.919,00	
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga				KECAMATAN KEMILING
161	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di KECAMATAN KEMILING	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di KECAMATAN KEMILING	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.846.741.425,00	3.665.876.272,00	4.957.876.272,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											#REF!
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	2.824.241.425,00	3.643.376.272,00	4.935.376.272,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	KECAMATAN KEMILING
162	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di KECAMATAN KEMILING	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di KECAMATAN KEMILING	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional											
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	KECAMATAN KEMILING
163	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di KECAMATAN KEMILING	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di KECAMATAN KEMILING	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%				
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN KEMILING
	J U M L A H														**16.472.508.569,00**	**18.378.286.769,00**	**21.722.455.060,00**	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA BANDAR LAMPUNG
Tahun Anggaran 2025

FORMULIR DPA- BELANJA SKPD PERGESERAN

Organisasi : **47 KECAMATAN KEMILING**

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah Sebelum Pergeseran						Jumlah Setelah Pergeseran						Selisih
				T - 1	T				T + 1	T - 1	T				T + 1	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11	12	13	14	15	16	17=13+14+15+16	18	19 = 17 - 10
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**18,326,824,289**	**51,462,480**	**0**	**0**	**18,378,286,769**	**0**		**18,228,126,112**	**46,866,480**	**0**	**0**	**18,274,992,592**	**0**	**(103,294,177)**
7.01	**KECAMATAN**				**18,326,824,289**	**51,462,480**	**0**	**0**	**18,378,286,769**	**0**		**18,228,126,112**	**46,866,480**	**0**	**0**	**18,274,992,592**	**0**	**(103,294,177)**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**8,700,960,720**	**51,462,480**	**0**	**0**	**8,752,423,200**	**0**		**8,662,262,543**	**46,866,480**	**0**	**0**	**8,709,129,023**	**0**	**(43,294,177)**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,964,000**	**0**	**0**	**0**	**2,964,000**	**0**		**2,964,000**	**0**	**0**	**0**	**2,964,000**	**0**	**0**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KOTA BANDAR LAMPUNG		988,000	0	0	0	988,000	0		988,000	0	0	0	988,000	0	0
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KOTA BANDAR LAMPUNG		988,000	0	0	0	988,000	0		988,000	0	0	0	988,000	0	0
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KOTA BANDAR LAMPUNG		988,000	0	0	0	988,000	0		988,000	0	0	0	988,000	0	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**7,523,998,820**	**0**	**0**	**0**	**7,523,998,820**	**0**		**7,486,968,820**	**0**	**0**	**0**	**7,486,968,820**	**0**	**(37,030,000)**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		7,419,886,769	0	0	0	7,419,886,769	0		7,419,886,769	0	0	0	7,419,886,769	0	0
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		104,112,051	0	0	0	104,112,051	0		67,082,051	0	0	0	67,082,051	0	(37,030,000)
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**25,079,017**	**0**	**0**	**0**	**25,079,017**	**0**		**23,350,732**	**0**	**0**	**0**	**23,350,732**	**0**	**(1,728,285)**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		2,639,698	0	0	0	2,639,698	0		2,639,698	0	0	0	2,639,698	0	0
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		11,122,498	0	0	0	11,122,498	0		9,394,213	0	0	0	9,394,213	0	(1,728,285)
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		2,686,290	0	0	0	2,686,290	0		2,686,290	0	0	0	2,686,290	0	0
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		6,490,000	0	0	0	6,490,000	0		6,490,000	0	0	0	6,490,000	0	0
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		2,140,531	0	0	0	2,140,531	0		2,140,531	0	0	0	2,140,531	0	0
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**51,462,480**	**0**	**0**	**51,462,480**	**0**		**0**	**46,866,480**	**0**	**0**	**46,866,480**	**0**	**(4,596,000)**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		0	10,000,000	0	0	10,000,000	0		0	5,404,000	0	0	5,404,000	0	(4,596,000)
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		0	32,962,480	0	0	32,962,480	0		0	32,962,480	0	0	32,962,480	0	0
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		0	8,500,000	0	0	8,500,000	0		0	8,500,000	0	0	8,500,000	0	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**872,518,000**	**0**	**0**	**0**	**872,518,000**	**0**		**872,518,000**	**0**	**0**	**0**	**872,518,000**	**0**	**0**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		41,200,000	0	0	0	41,200,000	0		41,200,000	0	0	0	41,200,000	0	0
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		806,400,000	0	0	0	806,400,000	0		806,400,000	0	0	0	806,400,000	0	0
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	KOTA BANDAR LAMPUNG		24,918,000	0	0	0	24,918,000	0		24,918,000	0	0	0	24,918,000	0	0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**276,400,883**	**0**	**0**	**0**	**276,400,883**	**0**		**276,460,991**	**0**	**0**	**0**	**276,460,991**	**0**	**60,108**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		67,340,000	0	0	0	67,340,000	0		67,340,000	0	0	0	67,340,000	0	0
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		198,750,000	0	0	0	198,750,000	0		198,750,000	0	0	0	198,750,000	0	0
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		2,000,000	0	0	0	2,000,000	0		2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		3,900,000	0	0	0	3,900,000	0		3,900,000	0	0	0	3,900,000	0	0
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		2,410,883	0	0	0	2,410,883	0		2,470,991	0	0	0	2,470,991	0	60,108

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah Sebelum Pergeseran						Jumlah Setelah Pergeseran							Selisih
				T - 1	T				T + 1	T - 1	T				T + 1		
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11	12	13	14	15	16	17=13+14+15+16	18	19 = 17 - 10
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		2,000,000	0	0	0	2,000,000	0		2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**5,027,488,107**	**0**	**0**	**0**	**5,027,488,107**	**0**		**5,027,488,107**	**0**	**0**	**0**	**5,027,488,107**	**0**	**0**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**57,488,107**	**0**	**0**	**0**	**57,488,107**	**0**		**57,488,107**	**0**	**0**	**0**	**57,488,107**	**0**	**0**
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		57,488,107	0	0	0	57,488,107	0		57,488,107	0	0	0	57,488,107	0	0
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**4,970,000,000**	**0**	**0**	**0**	**4,970,000,000**	**0**		**4,970,000,000**	**0**	**0**	**0**	**4,970,000,000**	**0**	**0**
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		4,970,000,000	0	0	0	4,970,000,000	0		4,970,000,000	0	0	0	4,970,000,000	0	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**928,499,190**	**0**	**0**	**0**	**928,499,190**	**0**		**868,499,190**	**0**	**0**	**0**	**868,499,190**	**0**	**(60,000,000)**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**838,500,000**	**0**	**0**	**0**	**838,500,000**	**0**		**808,500,000**	**0**	**0**	**0**	**808,500,000**	**0**	**(30,000,000)**
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		838,500,000	0	0	0	838,500,000	0		808,500,000	0	0	0	808,500,000	0	(30,000,000)
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**89,999,190**	**0**	**0**	**0**	**89,999,190**	**0**		**59,999,190**	**0**	**0**	**0**	**59,999,190**	**0**	**(30,000,000)**
7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		8,999,919	0	0	0	8,999,919	0		5,999,919	0	0	0	5,999,919	0	(3,000,000)
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		8,999,919	0	0	0	8,999,919	0		5,999,919	0	0	0	5,999,919	0	(3,000,000)
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		8,999,919	0	0	0	8,999,919	0		5,999,919	0	0	0	5,999,919	0	(3,000,000)
7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		8,999,919	0	0	0	8,999,919	0		5,999,919	0	0	0	5,999,919	0	(3,000,000)
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		8,999,919	0	0	0	8,999,919	0		5,999,919	0	0	0	5,999,919	0	(3,000,000)
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		8,999,919	0	0	0	8,999,919	0		5,999,919	0	0	0	5,999,919	0	(3,000,000)
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		8,999,919	0	0	0	8,999,919	0		5,999,919	0	0	0	5,999,919	0	(3,000,000)
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		8,999,919	0	0	0	8,999,919	0		5,999,919	0	0	0	5,999,919	0	(3,000,000)
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		8,999,919	0	0	0	8,999,919	0		5,999,919	0	0	0	5,999,919	0	(3,000,000)
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		8,999,919	0	0	0	8,999,919	0		5,999,919	0	0	0	5,999,919	0	(3,000,000)
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**3,665,876,272**	**0**	**0**	**0**	**3,665,876,272**	**0**		**3,665,876,272**	**0**	**0**	**0**	**3,665,876,272**	**0**	**0**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**3,665,876,272**	**0**	**0**	**0**	**3,665,876,272**	**0**		**3,665,876,272**	**0**	**0**	**0**	**3,665,876,272**	**0**	**0**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		3,643,376,272	0	0	0	3,643,376,272	0		3,643,376,272	0	0	0	3,643,376,272	0	0
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		22,500,000	0	0	0	22,500,000	0		22,500,000	0	0	0	22,500,000	0	0
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**2,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**0**		**2,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**0**	**0**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**2,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**0**		**2,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**0**	**0**
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah Sebelum Pergeseran							Jumlah Setelah Pergeseran							Selisih
				T - 1	T					T + 1	T - 1	T					T + 1	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11	12	13	14	15	16	17=13+14+15+16	18	19 = 17 - 10
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**2,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**0**		**2,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**0**	**0**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**2,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**0**		**2,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**0**	**0**
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0
			Jumlah		**18,326,824,289**	**51,462,480**	**0**	**0**	**18,378,286,769**	**0**		**18,228,126,112**	**46,866,480**	**0**	**0**	**18,274,992,592**	**0**	**(103,294,177)**

Bandar Lampung, 24 Februari 2025

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(Dr. MUHAMAD NUR RAM'DHAN, M.Acc., Akt.,)
NIP. 19741007 200501 1 006

Kepala SKPD

(ANDI DARMA PUTRA, S.STP., M.IP)
NIP. 19900830 201206 1 001

BAB.V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat daerah Kecamatan Kemiling merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan kemiling selama jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan tahun 2025, sebagai dasar dan referensi untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD) dalam rangka hal tersebut Kecamatan kemiling kota bandar lampung menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Kemiling, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kota Bandar Lampung serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN ENGGAL
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

Lampiran 1 Surat Nomor :
Tanggal :

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	√			
		Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan/tahun 2025				
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, Juli 2025
CAMAT ENGGAL
Kota Bandar Lampung

MUCHAMAD SUPRIYADI, S.Sos.
Pembina
NIP. 19710107 199203 1 311

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST., M.SI	
	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengemnbangan Wilayah Bappeda	
2	Zeldayati Ningsih, S.H., M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025
CAMAT ENGGAL
Kota Bandar Lampung,

MUCHAMAD SUPRIYADI, S.Sos.
Pembina
NIP. 19710107 199203 1 311

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	**FITRI YANTI, ST., M.SI**	
	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengemnbangan Wilayah Bappeda	
2	**Zeldayati Ningsih, S.H., M.M**	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	**FITRI YANTI, ST., M.Si**	
	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengemnbangan Wilayah Bappeda	
2	**Zeldayati Ningsih, S.H., M.M**	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Bandar Lampung, 2025

Mengetahui,

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP.19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

		HALAMAN
KATA PENGANTAR ……		**i**
DAFTAR ISI ……...		**ii**
DAFTAR TABEL ……..		**iii**
BAB I	**PENDAHULUAN ……**	I-1
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Landasan Hukum ……	I-3
	1.3 Maksud dan Tujuan ……	I-6
	1.4 Sistematika Penulisan ……	I-6
BAB II	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN……**	II-1
	2.1 Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/tahun 2025 ……	II-1
	2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH …….	II-1
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	III-1
	Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	
BAB IV	**PENUTUP …….**	IV-1

LAMPIRAN 48
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Kecamatan Enggal adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Enggal yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Enggal Tahun 2025, yaitu :

Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;

Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Enggal yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Kecamatan Enggal Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Enggal Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 108);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
8. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173)
9. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 2019 Nomor 13, TambahanLembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 10);
25. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Kecamatan Enggal Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Enggal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan PerubahanRenja Kecamatan Enggal Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan bagi Kecamatan Enggal dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025
2. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
3. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
4. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Enggal Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV.Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Enggal. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan capaian Kinerja. Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, yang dijabarkan dalam 6 Program, 13 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan. Realisasi Anggaran Belanja Operasi sampai dengan 28 Maret 2025 pada Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 2,284,877,628.00 atau 20,6% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp 11,086,200,801.00 Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 0 atau 0% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sebesar Rp. 33,966,562.00 sedangkan realisasi kinerja rata-rata mencapai 50%. Evaluasi kinerja dan keuangan Renja Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.1.

2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Enggal, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota Bandar Lampung kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Bandar Lampung;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan

Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2025 ini rencana Kerja OPD Kecamatan Enggal mengalami perubahan anggaran dari sebelumnya secara keseluruhan pada rencana kerja OPD Kecamatan Enggal yang terdiri dari 6 (Enam) Program, 13 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a) Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
      b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
   1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      d) Penyediaan Bahan Logistik
      e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   1.4. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c) Pemeliharaan Mebel
d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
a) Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan pelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
a) Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

a) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

b) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

c. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

d) Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri

c) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

d) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

e) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

f) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

g) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

i) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4. Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

b) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a) fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional

b) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah

a) fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan

b) fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan

Dengan terbitnya peraturan baru yaitu Peraturan Wali kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang memuat perubahan pagu

anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru, selanjutnya rencana kerja Kecamatan Enggal juga mengalami Perubahan. Format Perubahan untuk Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung yang telah disesuaikan dengan Peraturan Wali kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tertuang dalam Tabel 3.1.

BAB IV
PENUTUP

Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Kecamatan Enggal menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Formulir E. 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG

RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN ENGGAL KOTA BANDAR LAMPUNG

PERIODE PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2 TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. ----------

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2030)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
															I		II		III		IV											
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)	(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14÷8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
Unsur kewilayahan																																
Kecamatan											**72.640.094.144,07**		-		**10.977.379.541,00**		**2.284.877.628,00**		**4.550.240.203,00**		-			**8.692.501.913,00**		**79,19**				-	
Kecamatan Enggal											**72.640.094.144,07**		-		**10.977.379.541,00**		**2.284.877.628,00**		**4.550.240.203,00**		-			**8.692.501.913,00**		**79,19**				-	
1	**Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan**	**7**	**01**					**Indeks kepuasan masyarakat**	**persen**	**98,00**				**98,00**																		
		7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98,00**	**39.659.406.700,47**	**98**	**0**	**98**	**5.988.312.710,00**	**20**	**1.443.877.628,00**	**20**	**2.553.240.203,00**		-		**40**	**4.544.435.082,00**	**40,82**	**75,89**	**138,00**		**140,82**	**0,00**	**Kec. Enggal**	
		7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98,00**	**31.621.385,11**	**98**	**0,00**	**98**	**3.737.546,00**	**20**		**20**	-			-		**3.737.546,00**								**Kec.Enggal**	
		7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	**14.081.924,68**	1	**0,00**	1	1.903.830,00	**0,25**		**0,25**						-		-		-			
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7												0	-	0,0		0	-	0,0	0,0	Kec. Enggal	
		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	**11.630.142,62**	1	**0,00**	1	1.266.858,00	0,25		0,25						-		-		-		0,0	
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5												0	-	0,0		0	-	0,0		Kec. Enggal	
		7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	*5.909.317,81*	1	*0,00*	1	566.858,00	0,25		0,25						-		-		-		0,0	
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5												0	-	0,0		0	-	0,0		Kec. Enggal	
		7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**98,00**	**34.756.786.443,97**	**98**	**0,00**	**98**	**5.235.169.551,00**	**20**	**1.358.947.628,00**	**20**	**2.338.380.203**		-		**40**	**3.876.221.923,00**	**40,82**	**74,04**	**138,00**		**140,82**	**0,00**	**Kec.Enggal**	
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1		49		49		49		49													
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	45	**33.718.873.544,73**		**0,00**		**5.157.300.801,00**		1.358.947.628,00		2.303.730.203				0	2.303.730.203,00	**#DIV/0!**	**44,67**	#DIV/0!	2.303.730.203,00	#DIV/0!	6,8	Kec. Enggal	**#REF!**
		7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1		1		1		0,25		0,25													
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	**1.037.912.899,24**		**0,00**		**77.868.750,00**				34.650.000				0	34.650.000,00	0,0	**44,50**	0	34.650.000,00	0,0	3,3	Kec. Enggal	#REF!
		7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98,00**	**217.370.034,99**	**98**	**0**	**98**	**54.869.051,00**	**20**		**20**					**40**	**54.869.051,00**	**40,8**	**100,0**	**138**	**#REF!**	**140,8**	#REF!	**Kec.Enggal**	
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1		1		1		**0,25**		**0,25**						**#REF!**							
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	31.028.178,07				4.062.374,00							0	-	0,0	-	0	-	0,0	#REF!	Kec. Enggal	#REF!
		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1		1		1		0,25		0,25						#REF!							
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	63.735.741,85				9.748.380,00							0	-	0,0	-	0	-	0,0	#REF!	Kec. Enggal	#REF!
		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1		1		1		0,25		0,25						#REF!							
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	3.165.100,26				377.820,00							0	-	0,0	-	0	-	0,0	#REF!	Kec. Enggal	#REF!
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1		1		1		0,25		0,25						#REF!				-			
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	80.091.547,28				8.750.000,00							0	-	0,0	-	0		0,0	0,0	Kec. Enggal	
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1		1		1		0,25		0,25						#REF!							
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	39.349.467,53				4.884.850,00							0	-	0,0	-	0	#REF!	0,0	#REF!	Kec. Enggal	
		7	01	01	2.06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1														#REF!							

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2030)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
															I		II		III		IV													
															(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)																					
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	98.158.030		0		27.045.627,00				-		-			0	-	0,0	-	0	24.966.562,00	0,0	#REF!	Kec. Enggal	
		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	persen	98	222.076.286,23	98	-	98	24.966.562,00	20	-	20	-	-	-	40	24.966.562,00	40,8	100,0	138	#REF!	140,8	#REF!	Kec.Enggal	
		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel																	-									
								Jumlah mebel	Tahun	1																							
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10			0,00									0	-	0,0	#DIV/0!	0	#REF!	0,0	#REF!	Kec. Enggal	
		7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1								3						#REF!									
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	163.452.137,30		-		20.000.000,00							0	-	0,0	-	0	#REF!	0,0	#REF!	Kec. Enggal	
		7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1														#REF!									
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	58.624.148,93		-		4.966.562,00							0	-	0,0	-	0	523.410.000,00	0,0	#REF!	Kec. Enggal	
		7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**98**	**3.977.378.928,18**	**98**	**-**	**98**	**608.340.000,00**	**20**	**84.930.000,00**	**20**	**214.860.000,00**		**-**			**40**	**523.410.000,00**	**40,8**	**86,0**	**138**	**61.230.000,00**	140,8	**1,5**	**Kec.Enggal**	
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1		1		1		0,25		0,25															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	78.457.025,90		0,00		12.000.000,00							0	-	0,0	-	0	-	140,8	#REF!	Kec. Enggal	#REF!
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1		1		1		0,25		0,25															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	3.898.921.902,28		0,00		596.340.000,00		84.930.000,00		214.860.000				0	299.790.000,00	0,0	**50,27**	0	61.230.000,00	0,0	#REF!	Kec. Enggal	#REF!
		7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**454.173.621,99**	**98**	**-**	**98**	**61.230.000,00**	**20**	**-**	**20**	**-**					**40**	**61.230.000,00**	**5,0**	**100,0**	**138**		140,8	**0,0**	**Kec. Enggal**	
		7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1		1		1		0,25		0,25															
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	281.268.437,86		0,00		43.020.000,00							0	-	0,0	-	0	-	0,0	#REF!	Kec. Enggal	#REF!
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1		1		1		0,25		0,25															
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	66.361.567,74	12	0,00	12	10.150.000,00	0,25		3				3,25	-	0,3	-	0,0325	-	0,3	#REF!	Kec. Enggal	#REF!
		7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Tahun	1														0		0,0	#DIV/0!	0		0,0	#REF!	Kec. Enggal	
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	39.228.512,95		0,00		4.000.000,00								-		-					
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1		1		1		0,25		0,25				0,5		0,2	#DIV/0!	0,166667		16,7	#REF!	Kec. Enggal	#REF!
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	8.930.000,00	12	0,00	12	0,00	3		3					-							
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72	bln		12		12		3		3				6		2,0	#DIV/0!	#VALUE!		#VALUE!	#REF!	Kec. Enggal	
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	58.385.103,44		0		4.060.000,00								-							#REF!
		7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**persen**	**100**	**15.593.776.950,24**	**100**	**-**	**100**	**2.356.500.000,00**	**20**	**441.000.000,00**	**20**	**911.000.000,00**		**-**			**40**	1.915.500.000,00	**40,0**	**81,3**	**140**		140,0	**0,0**	**Kec. Enggal**	
		7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**158.336.704,62**	**100**	**-**	**100**	**29.000.000,00**	**20**	**-**	**20**	**29.000.000,00**		**-**			**40**	29.000.000,00	**40,0**	**100,0**	**140**		140,0	**0,0**	**Kec. Enggal**	
		7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1		1		1		0,25		0,25				0,5		0,1	0,0	0,1		10,0	0,0	Kec. Enggal	-

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2030)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
															I		II		III		IV												
															(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14÷8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)																				
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	158.336.704,62		0		29000000				29.000.000,00						2.327.500.000,00				1.886.500.000,00						
		7	01	02	2.02		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**15.435.440.245,62**	**100**	-	**100**	**2.327.500.000,00**	**20**	**441.000.000,00**	**20**	**882.000.000,00**		-			**40**	1.886.500.000,00	**40,0**	**81,1**	**140**		140,0	**0,0**	**Kec. Enggal**	
		7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1		1		1		0,25		0,25					0,5		0,1	0,0	0,1		10,0	#REF!	Kec. Enggal	#REF!
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	15.435.440.245,62		0,00		2.327.500.000,00		441.000.000,00		882.000.000,00						152.587.259,00		25,7		593.587.259,00						
		7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluruhan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di keluruhan dan kecamatan**	**persen**	**80**	**3.823.214.307,88**	**80**	-	**80**	**593.587.259,00**	**20**	-	**20**	**286.000.000,00**		-			**40**	593.587.259,00	**50,0**	**100,0**	**120**		150,0	**0,0**	**Kec. Enggal**	
		7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**persen**	**80**	**3.823.214.307,88**	**80**	-	**80**	**576.500.000,00**	**20**	-	**20**	**286.000.000,00**		-			**40**	576.500.000,00	**50,0**	**100,0**	**120**		150,0	**0,0**	**Kec. Enggal**	
		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1		1		1		0,25		0,25					0,5		0,1	0,0	0,1		10,0	#REF!	Kec. Enggal	#REF!
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	3.823.214.307,88		-		576.500.000,00				286.000.000						17.087.259,00		3,0		17.087.259,00						
		7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	80,00	1.293.037.500,00			**80**	**17.087.259,00**	**20**	-	**20**	-		-		-	**40**	17.087.259,00	**50,0**	**100,0**	**40**		50,0	**0,0**	**Kec. Enggal**	
		7	01	03	2.06	01	Pembentukkan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Keluarga	6000,00	19.095.135,05			1500	1.879.343,00	0,25		0,25					0,5	1.879.343,00	0,0	100,0	0,5	1.752.379,00	0,0	9,2	#DIV/0!	
							Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	Keluarga	6000,00	18.253.139,24			1500	1.752.379,00	0,25		0,25					0,5	1.752.379,00	0,0	100,0	0,5	1.853.305,00	0,0	10,2		
							Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6000,00	18.922.457,07			1500	1.853.305,00	0,25		0,25					0,5	1.853.305,00	0,0	100,0	0,5	1.715.519,00	0,0	9,1		
							Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6000,00	18.008.692,27			1500	1.715.519,00	0,25		0,25					0,5	1.715.519,00	0,0	100,0	0,5	1.015.519,00	0,0	5,6		
							Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikkan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	Keluarga	6000,00	8.724.216,94			1500	1.015.519,00	0,25		0,25					0,5	1.015.519,00	0,0	100,0	0,5	1.715.519,00	0,0	19,7		
							Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	Keluarga	6000,00	18.008.692,27			1500	1.715.519,00	0,25		0,25					0,5	1.715.519,00	0,0	100,0	0,5	1.688.841,00	0,0	9,4		
							Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Keluarga	6000,00	17.831.769,96			1500	1.688.841,00	0,25		0,25					0,5	1.688.841,00	0,0	100,0	0,5	1.654.989,00	0,0	9,3		
							Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan	Keluarga	6000,00	17.607.271,35			1500	1.654.989,00	0,25		0,25					0,5	1.654.989,00	0,0	100,0	0,5	1.715.519,00	0,0	9,7		
							Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6000,00	18.008.692,27			1500	1.715.519,00	0,25		0,25					0,5	1.715.519,00	0,0	100,0	0,5	2.096.326,00	0,0	11,6		
							Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan	Keluarga	6000,00	33.797.652,18			1500	2.096.326,00	0,25		0,25					0,5	2.096.326,00	0,0	100,0	0,5	1.634.958.258,00	0,0	4837,5		
		7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal**	**persen**	**100**	**13.497.833.244,85**	**100**	-	**100**	**2.034.958.258,00**	**20**	**400.000.000,00**	**20**	**800.000.000,00**		-			**40**	1.634.958.258,00	**40,0**	**80,3**	**140**		140,0	**0,0**	**Kec. Enggal**	
		7	**01**	**04**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**persen**	**100**	**13.497.833.244,85**	**100**	-	**100**	**2.034.958.258,00**	**20**	**400.000.000,00**	**20**	**800.000.000,00**		-			**40**	1.634.958.258,00	**40,0**	**80,3**	**140**		**140,0**	**0,0**	**Kec. Enggal**	

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2030)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14÷8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
		7	01	04	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1		1		1		0,25		0,25						0,5		0,1	0,0	0,1	1.611.157.203,00	10,0	#REF!	Kec. Enggal	#REF!
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	13.337.528.176,78		0,00		2.011.157.203,00		400.000.000,00		800.000.000						1.611.157.203,00		80,1		-				
		7	01	04	01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1		1		1		0,25		0,25						0,5		0,1		0,1	23.801.055,00	10,0	#REF!	Kec. Enggal	#REF!
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Laporan	5	160.305.068,07		0,00		23.801.055,00										23.801.055,00		100,0						
		7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**persen**	**100**	**56.732.348,84**	**100**	**-**		**3.512.950,00**		**-**		**-**		**-**		**-**		3.512.950,00								**Kec. Enggal**	
		7	**01**	**05**			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**56.732.348,84**	**100**	**-**	**100**	**3.512.950,00**		**-**		**-**		**-**		**-**		3.512.950,00								**Kec. Enggal**	
		7	01	05			Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanannn nasional oleh bahinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1						0,25		0,25						0,5		0,0	0,0	0,005	-	0,5	0,0	Kec. Enggal	
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100	18.551.913,66	1		1	1.797.431,00	0,25		0,25						-				-				
		7	01	05			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1						0,25		0,25						0,5		50,0	0,0	0,1	508.364,00	10,0	1,3	Kec. Enggal	
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	38.180.435,18	1		1	1.715.519,00		-		-					508.364,00		29,6						
		7	**01**	***06***			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**9.130.591,79**	**100**	**-**	**100**	**508.364,00**		**-**		**-**		**-**		**-**		508.364,00								**Kec. Enggal**	
		7	**01**	***06***			**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**persen**	**100**	**9.130.591,79**	**100**	**-**	**100**	**508.364,00**		-		-		-				508.364,00								**Kec. Enggal**	
		7	01	*06*			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1						0,25		0,25						0,5		50,0	0,0	50	-	5000,0	0,0	Kec. Enggal	
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	9.130.591,79	1		1	508.364,00	0,25		0,25						-		0,0		-				
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				**72.640.094.144,07**				**10.977.379.541,00**		**2.284.877.628,00**						**8.692.501.913,00**					**8.692.501.913,00**					
							TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	#DIV/0!						xxx			
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	#DIV/0!						xxx			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:																																	

Catatan :

*) Nama OPD

**) Klasifikasi Interval Capaian Kinerja :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Rekode Penilaian Realisasi Kinerja
1	76 - 100	Sangat Tinggi (ST)
2	51 - 75	Tinggi (T)
3	26 - 50	Sedang (S)
4	01 - 25	Rendah (R)
5	0	Sangat Rendah (SR)

Nama Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan menacu nada Renstra Peranakat Daerah Tahun 2021-2026

TABEL 5.1
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			Ket
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						KECAMATAN ENGGAL									9.975.356.101,00	11.086.200.801,00	12.327.579.541,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									9.975.356.101,00	11.086.200.801,00	12.327.579.541,00	
	7	01				KECAMATAN									9.975.356.101,00	11.086.200.801,00	12.327.579.541,00	
224	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan	Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan	98%	98%	98%	98%	98%	5.447.478.659,00	6.079.558.612,00	6.097.638.525,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	98%	98%	98%	98%	8.935.599,00	4.836.490,00	3.737.546,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.978.533,00	2.153.830,00	1.903.830,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.978.533,00	1.778.830,00	1.266.858,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.978.533,00	903.830,00	566.858,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4.592.756.101,00	5.316.049.551,00	5.271.569.551,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			Ket
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	4.509.956.101,00	5.157.300.801,00	5.157.300.801,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	82.800.000,00	158.748.750,00	114.268.750,00	Usulan Utang 18200000 + Efisiensi 77868750
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	98%	98%	98%	98%	69.285.696,00	48.260.009,00	37.794.866,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.822.847,00	4.745.759,00	4.062.374,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.660.705,00	9.748.380,00	6.898.313,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.899.382,00	484.102,00	377.820,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.500.000,00	12.250.000,00	8.750.000,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.402.762,00	6.018.500,00	4.884.850,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			Ket
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.013.268,00	12.821.509,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	27.583.096,00	33.966.562,00	24.966.562,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.950.000,00	0,00	0,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	16.633.096,00	25.000.000,00	20.000.000,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	8.966.562,00	4.966.562,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	95%	95%	95%	95%	95%	553.140.000,00	608.340.000,00	698.340.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	541.140.000,00	596.340.000,00	686.340.000,00	Usulan Utang 90000000 + Efisiensi 548.340.000,00
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	195.778.167,00	68.100.000,00	61.230.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			Ket
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.040.000,00	43.020.000,00	43.020.000,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	113.830.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel											
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	2.750.000,00	0,00	0,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	13.428.812,00	8.930.000,00	4.060.000,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			Ket
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	20.729.355,00	0,00	0,00	KECAMATAN ENGGAL
225	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.278.209.837,00	2.356.500.000,00	3.042.500.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	38.810.099,00	29.000.000,00	29.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	38.810.099,00	29.000.000,00	29.000.000,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.239.399.738,00	2.327.500.000,00	3.013.500.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			Ket
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.239.399.738,00	2.327.500.000,00	3.013.500.000,00	Usulan Utang 686.000.000,00 + Efisiensi 2.327.500.000,00
226	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	633.734.788,00	604.887.259,00	593.587.259,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	583.735.548,00	576.500.000,00	576.500.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	583.735.548,00	576.500.000,00	576.500.000,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	100%	100%	100%	100%	100%	49.999.240,00	28.387.259,00	17.087.259,00	
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			Ket
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	4.999.924,00	2.879.343,00	1.879.343,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	4.999.924,00	2.752.379,00	1.752.379,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	4.999.924,00	2.853.305,00	1.853.305,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	4.999.924,00	2.715.519,00	1.715.519,00	KECAMATAN ENGGAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			Ket
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	4.999.924,00	1.315.519,00	1.015.519,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	4.999.924,00	2.715.519,00	1.715.519,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			Ket
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	4.999.924,00	2.688.841,00	1.688.841,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	4.999.924,00	2.654.989,00	1.654.989,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	4.999.924,00	2.715.519,00	1.715.519,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	4.999.924,00	5.096.326,00	2.096.326,00	KECAMATAN ENGGAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			Ket
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
227	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Enggal	persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Enggal	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	1.605.932.879,00	2.035.329.500,00	2.590.054.360,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	1.605.932.879,00	2.035.329.500,00	2.590.054.360,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.577.432.879,00	2.011.157.203,00	2.566.253.305,00	Usulan Utang 556.000.000,00 + Efisiensi 2.011.157.203,00
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	28.500.000,00	24.172.297,00	23.801.055,00	KECAMATAN ENGGAL
228	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan	persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.999.938,00	8.554.634,00	3.512.950,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			Ket
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.999.938,00	8.554.634,00	3.512.950,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional											
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	2.499.969,00	2.797.431,00	1.797.431,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.499.969,00	5.757.203,00	1.715.519,00	KECAMATAN ENGGAL
229	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.000.000,00	1.376.796,00	286.447,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	5.000.000,00	1.376.796,00	286.447,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	1.376.796,00	286.447,00	KECAMATAN ENGGAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			Ket
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	KECAMATAN ENGGAL
	J U M L A H														**11.086.200.801,00**	**12.327.579.541,00**		

Bandar Lampung, Juli 2025

CAMAT ENGGAL

Muchamad Supriyadi, S.Sos

NIP. 19710105 199203 1 003

RENCANA KERJA PERUBAHAN

KECAMATAN KEDAMAIAN
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025

CAMAT KEDAMAIAN

JONI EFRIADI,SE
NIP. 19771013 200604 1 005

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	FITRIYANTI, ST, M.Si	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan ii tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkatdaerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerahserta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, 2025

CAMAT KEDAMAIAN

JONI EFRIADI,SE
NIP. 19771013 200604 1 005

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	FITRIYANTI, ST, M.Si	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	√			
	2.1	Evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan / tahun 2023.				
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, Juni 2025

CAMAT KEDAMAIAN

JONI EFRIADI,SE
NIP. 19771013 200604 1 005

Diverifikasi : Juni 2025		Tanda Tangan
1.	AZWAR, S.T., M.M.	
	Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayah Bappeda	
2	Zeldayati Ningsih, S.H., M.M	
	Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juni 2025

CAMAT KEDAMAIAN

JONI EFRIADI,SE
NIP. 19771013 200604 1 005

Diverifikasi : Juni 2025		Tanda Tangan
1.	AZWAR, S.T., M.M.	
	Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayah Bappeda	
2	Zeldayati Ningsih, S.H., M.M	
	Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi RenjaPerangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, Juni 2025

Diverifikasi : Juni 2025		Tanda Tangan
1.	AZWAR, S.T., M.M.	
	Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayah Bappeda	
2	Zeldayati Ningsih, S.H., M.M	
	Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP.19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

		HALAMAN
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	I – 1
	1.1. LATAR BELAKANG	I – 1
	1.2. LANDASAN HUKUM	I – 2
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	I – 6
	1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	I – 6
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	II – 1
	2.1. EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN / TAHUN 2024	II – 1
	2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD	II – 2
	2.3. ISU-ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD	II – 3
	2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	II – 5
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	III – 1
	3.1. RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	III – 1
BAB IV	PENUTUP	IV – 1

LAMPIRAN 49
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 2025, TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Kecamatan Kedamaian adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Kedamaian yang mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Kedamaian Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;

b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Kedamaian yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Kecamatan Kedamaian Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kedamaian Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 108);
9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
10. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173)
11. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2019 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
22. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024, tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2024, tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Tahun 2025;

29. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
30. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Kecamatan Kedamaian Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Kedamaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kedamaian Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Kecamatan Kedamaian dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Kedamaian Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan
- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

Bab III. Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

II.1. EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN / TAHUN 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Bidang Urusan Kecamatan yang dijabarkan dalam 6 Program, 13 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan. Realisasi Anggaran Belanja pada Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung sampai dengan 30 Juni 2024 sebagai berikut, realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 4.424.988.313.00 atau 44.88% dari anggaran dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp 13.569.552.302.00. Sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 115.500.000.00 atau 100,00 % dari anggaran dana yang tersedia dalam DPA yaitu sebesar Rp. 115.500.000.00. Sedangkan realisasi kinerja rata-rata Rp. 4.424.988.313.00 atau 44.88% dari anggaran dana yang tersedia dalam DPA yaitu sebesar Rp. 13.569.552.302.00.

Evaluasi kinerja dan keuangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung sampai dengan triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.1.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kedamaian berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kedamaian dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

1. Meningkat nya pelayanan administrasi perkantoran,
2. Meningkat nya sarana dan prasarana aparatur,
3. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan,
4. Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah,
5. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kelurahan,
6. Meningkatnya sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah,
7. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah.

Kecamatan Kedamaian memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Kinerja Pelayanan di bidang Ketentraman dan Ketertiban.
   a). Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat kelurahan atau lingkungan sampai pada tingkat RT,
   b). Mengadakan pembinaan kepada pemerintah Kelurahan,
   c). Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas seatap dan para staf kelurahan.
2. Kinerja Pelayanan di bidang Pemerintahan.
   a). Mengadakan sosialisasi dan monitoring pembayaran PBB,
   b). Pembinaan secara rutin ke kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
3. PelayananUmum.
   a). Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan,

b). Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Sukabumi,

c). Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat Kelurahan secara rutin.

4. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan.

a). Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumberdana lainnya),

b). Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi,

c). Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan.

5. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakatan

a). Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu,

b). Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera,

c). Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin),

d). Monitoring penyaluran Jamkesda,

e). Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga– lembaga keagamaan,

f). Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah,

g). Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan,

h). Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

II.3. ISU-ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kedamaian, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Wali Kota Bandar Lampung kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Wali Kota

kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Bandar Lampung;

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normative harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika nativitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

II.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedamaian Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Kedamaian dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kedamaian pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Wali Kota dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan urusan kewilayahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan inovatif

   Sasaran :

   a. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan;
   b. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Umat Beragama.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2025 ini rencana Kerja OPD Kecamatan Kedamaian mengalami perubahan anggaran dari sebelumnya secara keseluruhan pada rencana kerja OPD Kecamatan Kedamaian yang terdiri 6 Program, 13 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Adapun rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan meliputi

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
    1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
        a. Sub. Kegiatan Penyusunan dokumen perangkat daerah,
        b. Sub. Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd,
        c. Sub. Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah.
    2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
        a. Sub. Kegiatan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN,
        b. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
    2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
        a. Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
        b. Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
        c. Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,
        d. Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor,
        e. Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,
        f. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
    3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel,
b. Sub. Kegiatan Peralatan dan Mesin

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   a. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
   b. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   a. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,
   b. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
   c. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebel,
   d. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
   e. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,
   f. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik,
   1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
      a. Sub. Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
   2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.
      a. Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan,

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa.
    a. Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
    a. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
    b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat;
    c. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga;
    d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;
    e. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
    f. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
    g. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
    h. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
    i. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;
    j. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum,

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
    a. Sub. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.
    b. Sub. Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,
    1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
        a. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan,
        b. Sub. Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.
    1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.
        a. Sub. Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di Kelurahan,
        b. Sub. Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Kelurahan.

Dengan terbitnya peraturan baru yaitu Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025, tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru, selanjutnya rencana kerja Kedamaian juga mengalami Perubahan. Format Perubahan untuk Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung yang telah disesuaikan dengan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025, tertuang dalam Tabel 3.1.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*)sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Kecamatan Kedamaian selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Kecamatan Kedamaian juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Kedamaian dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN				
	2.1	Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan / Tahun 2026	√			
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH				
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	√			
4	BAB IV	PENUTUP				

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung

MUHAIMIN,SH.,MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770424 199603 1 002

Mengetahui,

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI,ST.,M.Si	
	Plt. KABID INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BAPPERIDA KOTA BANDAR LAMPUNG	
2	FITRI YANTI,ST.,M.Si	
	PERENCANA AHLI PERTAMA BAPPERIDA KOTA BANDAR LAMPUNG	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung

MUHAIMIN,SH.,MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770424 199603 1 002

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	**FITRI YANTI,ST.,M.Si**	
	Plt. KABID INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BAPPERIDA KOTA BANDAR LAMPUNG	
2	**FITRI YANTI,ST.,M.Si**	
	PERENCANA AHLI PERTAMA BAPPERIDA KOTA BANDAR LAMPUNG	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi Renja Perangkat Daerah telah sampai dengan triwulan II tahun 2026
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Sasaran rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah telah dirumuskan sesuai RPJMD, RKPD, dan RKP

Kepala Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Bandar Lampung

MUHAIMIN,SH.,MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770424 199603 1 002

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	**FITRI YANTI,ST.,M.Si**	
	Plt. KABID INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BAPPERIDA KOTA BANDAR LAMPUNG	
2	**FITRI YANTI,ST.,M.Si**	
	PERENCANA AHLI PERTAMA BAPPERIDA KOTA BANDAR LAMPUNG	

Bandar Lampung, 2025
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19700218 199303 2 00

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang..... I-1
1.2. Landasan Hukum I-4
1.3. Maksud dan Tujuan..... I-8
1.4. Sistematika Penulisan I-9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU..... II-11

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman II-11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman..... II-34
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-37

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-39

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... III-39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman..... III-39
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan dan permukiman Tahun 2025 ..... III-40

BAB IV PENUTUP IV-58

LAMPIRAN 5
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 35
TENTANG
RENCANA KERJA PERUBAHAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Selanjutnya Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis. Hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan

dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.

Renja Perubahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan demikian Renja Perubahan mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masingmasing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perubahan PD; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Perubahan Tahun 2025 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berkonsep *money follow program* melalui penganggaran berbasis kinerja. Konsep *money follow program* merupakan pendekatan penganggaran yang lebih fokus kepada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat, sedangkan berbasis kinerja merupakan perencanaan kinerja tahunan secara

terintegrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan dan hasil yang diinginkan dari program tersebut.

Renja Perubahan Tahun 2025 juga disusun dengan pendekatan perencanaan partisipatif yakni melibatkan peran serta masyarakat sebagai *stakeholders.* Dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

Penyusunan Renja Perubahan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2025 dan memperhatikan RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025, Rancangan RKP Tahun 2025, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2025 serta Rancangan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025.

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, melalui 6 (enam) tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Persiapan Penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Musrenbang Renja
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja, dan
6. Penetapan Renja

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusun Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;

24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 03);
27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
30. Peraturan walikota No.29 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
31. Peraturan walikota No.29 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam RAPBD Tahun 2025;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai visi misi walikota
6. Sebagai acuan bagi badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan tahun 2025.
7. Sebagai acuan bagi Badan Pembangunan Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan perkiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.
8. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
9. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, hubungan antas dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RESNTRA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dimana LKIP merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih dan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung selama tahun 2024 dan tahun berjalan 2025 serta perkiraan target anggaran Tahun 2026.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung pada tahun 2025 mengajukan usulan sebanyak 6 Program dengan 13 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan total pagu sebesar **Rp. 8.465.141.678,-** Adapun rincian rencana program kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk Tahun 2026 adalah sebagai berikut

1. Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung memiliki 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program penataan bangunan gedung sebesar Rp.385.738.916,- Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebesar Rp. 385.738.916,-. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung memiliki 1 sub kegiatan yaitu:

1. **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG sebesar Rp. 385.738.916,-.

2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya memiliki 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program penataan bangunan dan lingkungannya sebesar Rp.121.943.978,-.Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota sebesar Rp. 121.943.978,-. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota memiliki 1 sub kegiatan yaitu:

1. **Sub Kegiatan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Monitoring Penataan Bangunan dan Lingkungan sebesar Rp. 121.943.978,-.

3. Program Penyelenggaran Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penatan Ruang memiliki 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp. 715.548.792,00,-. Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah:

a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota sebesar Rp. 507.086.723,00,-. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota memiliki 2 sub kegiatan yaitu:

1. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota sebesar Rp. 439.883.404,00,-.

2. **Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang sebesar Rp.67.203.319,-.

b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.208.462.069,-. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota memiliki 1 sub kegiatan yaitu:

3. **Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang sebesar Rp. 208.462.069,-.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki 7 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program penujang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar Rp. 6.176.864.678,00,-. Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar Rp.33.025.076,-. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki 1 sub kegiatan yaitu:

1. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 33.025.076,-.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sebesar Rp.4.843.726.435,-.

Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki 2 sub kegiatan yaitu:

1. **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 4.743.390.935,-.

2. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sebesar Rp.100.335.500,-.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sebesar Rp.56.000.000,-.

Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki 2 sub kegiatan yaitu:

1. **Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi sebesar Rp,-.

2. **Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sebesar Rp. 56.000.000,-.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah sebesar Rp.170.691.652,-.

Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah memiliki 7 sub kegiatan yaitu:

1. **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebesar Rp.9.886.297,-

2. **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp.57.756.693,-.

3. **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan penyediaan peralatan rumah tangga sebesar Rp.10.025.822,-.

4. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp.16.250.000,-.

5. **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp.15.972.840,-.

6. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp.10.800.000,-.

7. **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp.50.000.000,-.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar Rp. 567.600.000,00,-. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 2 sub kegiatan yaitu:

1. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.39.600.000,-.

2. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebesar Rp. 168.000.000,00,-.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebesar Rp. 308.811.515,00,- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 3 sub kegiatan yaitu:

1. **Sub Kegiatan Pengadaan Mebel**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan pengadaan Mebel sebesar Rp. 67.683.460,00,-.

2. **Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp.150.000.000,-.

3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 75.128.055,00,-.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebesar Rp.197.010.000,-. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 4 sub kegiatan yaitu:

4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebesar Rp.40.670.000,-.

5. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebesar Rp.77.740.000,-.

6. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya

Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya sebesar Rp. 65.000.000,-.

7. **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

   Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 13.600.000,-

5. Program Kawasan Permukiman

Program Kawasan Permukiman memiliki 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program kawasan permukiman sebesar Rp.867.545.314,-. Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha sebesar Rp. 867.545.314,-. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha memiliki 2 sub kegiatan yaitu:

1. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh sebesar Rp. 69.598.865,-

2. **Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 797.946.449,-

6. Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan perumahan memiliki 2 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program kawasan permukiman sebesar Rp.197.500.000,-. Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

a. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kabupaten/Kota Sebesar Rp.197.500.000,-. kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kabupaten/Kota memiliki 1 sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Sebesar Rp.197.500.000,-.

TABEL 2.1 TC 29

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANDAR LAMPUNG PERIODE PELAKSANAAN s.d. TRIWULAN II TAHUN 2025

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*), Kegiatan (*output*), dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3) Tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (Renja PD Tahun Berjalan)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2025)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegaiatn						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7/8) x	(10)	(11) = 6+8+10	(12) = (11/5)
Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar															
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
1	03	08			*Program Penataan Bangunan Gedung*	*Persentase SLF yang Diterbitkan*	%	100	100	100	100	100	100	100	100
						Persentase KRK yang	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1	03	08	2.01		*Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*	*Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata*	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1	03	08	2.01	023	*Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai*	*Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran*	*Dokumen*	110	12	25	25	100	25	25	23
1	*03*	*09*			*Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya*	*Persentase Penyelesaian Pelanggaran*	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1	*03*	*09*	*2.01*		*Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda*	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1	*03*	*09*	*2.01*	*07*	*Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan*	*Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan*	*Dokumen*	5	1	1	100	100	1	51	1010
1	*03*	*12*			*Program Penyelenggaraan Penataan Ruang*	*Persentase Ketaatan terhadap RTRW*	%	56.20	55.23	56.20	56.20	100	56.20	56	100
						Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota	%	4.90	4.40	4.80	4.80	100	4.80	4.80	98
1	*03*	*12*	*2.01*		*Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*	*Persentase Ketaatan terhadap RTRW*	%	56.20	55.23	56.20	56.20	100	56.20	56.20	100
1	*03*	*12*	*2.01*	*03*	*Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang*	*Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota*	*Dokumen*	5	1	1	1	100	1	1	20
1	*03*	*12*	*2.01*	*06*	*Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota*	*Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota*	*Dokumen*	5	1	1	1	100	1	1	20
1	*03*	*12*	*2.03*		*Koordinasi dan Sinronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah*	%	100	100	100	100	100	100	100	100

1	*03*	*12*	*2.03*	*06*	*Sistem Informasi Penataan Ruang*	*Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan*	*Dokumen*	4	1	1	1	100	1	1	25
Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar															
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman															
1	*04*	*01*			*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota*	*Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan*	*%*	98	98	98	98	100	98	98	100
1	*04*	*01*	*2.01*		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas*	*%*	100	100	100	-	-	100	50	50
1	*04*	*01*	*2.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Laporan*	15	3	3	-	-	3	2	10
1	*04*	*01*	*2.02*		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel*	*%*	100	100	100	100	100	100	100	100
1	*04*	*01*	*2.02*	*01*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang/Bulan*	60	12	12	12	100	55	34	56
1	*04*	*01*	*2.02*	*03*	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Dokumen*	5	1	1	1	100	1	1	20
1	*04*	*01*	*2.05*		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*	*%*	98	75	98	98	100	98	98	100
1	*04*	*01*	*2.05*	*09*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*Orang*	85	0	1	-	-	20	10	12
1	*04*	*01*	*2.06*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD*	*%*	98	98	1	98	98	98	98	100
1	*04*	*01*	*2.06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	5	1	1	1	100	1	1	20
1	*04*	*01*	*2.06*	*02*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	5	1	1	1	100	1	1	20
1	*04*	*01*	*2.06*	*03*	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*Paket*	5	1	1	1	100	1	1	20
1	*04*	*01*	*2.06*	*04*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*Paket*	5	1	1	1	100	1	1	20
1	*04*	*01*	*2.06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Paket*	5	1	1	1	100	1	1	20
1	*04*	*01*	*2.06*	*06*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*Dokumen*	5	1	1	1	100	1	1	20
1	*04*	*01*	*2.06*	*09*	*Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	30	1	6	6	100	1	4	12
1	*04*	*01*	*2.07*		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD*	*%*	98	98	98	-	-	-	0	0
1	*04*	*01*	*2.07*	*05*	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*Unit*	50	0	10	-	-	1	1	1
1	*04*	*01*	*2.07*	*06*	*Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	50	0	10	-	-	1	1	1

1	*04*	*01*	*2.08*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD*	*%*	**98**	**98**	**98**	**98**	**100**	**98**	**98**	**100**
1	*04*	*01*	*2.08*	*02*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia*	*Laporan*	**60**	**12**	**12**	**12**	**100**	**12**	**12**	**20**
1	*04*	*01*	*2.08*	*04*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia*	*Laporan*	**60**	**12**	**12**	**12**	**100**	**12**	**12**	**20**
1	*04*	*01*	*2.09*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD*	*%*	**98**	**98**	**98**	**98**	**100**	**98**	**98**	**100**
1	*04*	*01*	*2.09*	*01*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*Unit*	**5**	**1**	**1**	**1**	**100**	**1**	**1**	**20**
1	*04*	*01*	*2.09*	*02*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*Unit*	**15**	**3**	**3**	**3**	**100**	**3**	**3**	**20**
1	*04*	*02*			*PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN*	*Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota*	*%*	**100**	**100**	**100**	**-**	**-**	**100**	**50**	**50**
1	*04*	*02*	*2.01*		*Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Persentase Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Tersusun*	*%*	**100**	**0**	**100**	**-**	**-**	**100**	**50**	**50**
1	*04*	*02*	*2.01*	*09*	*Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*	*Dokumen*	**4**	**0**	**1**	**1**	**100**	**1**	**1**	**25**
1	*04*	*02*	*2.03*		*Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota*	*%*	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1	*04*	*02*	*2.03*	*01*	*Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana*	*Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi*	*Unit Rumah*	**42**	**0**	**10**	**-**	**-**	**10**	**10**	**24**
1	*04*	*03*			*Program Kawasan Permukiman*	*Persentase RTLH yang Tertangani*	*%*	**100.00**	**25.00**	**64.14**	**64.14**	**100**	**100**	**82**	**82**
1	*04*	*03*	*2.03*		*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Persentase RTLH yang Tertangani*	*%*	**292.62**	**25.00**	**64.14**	**64.14**	**100**	**100**	**82**	**28**
1	*04*	*03*	*2.03*	*04*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaa n Permukiman kumuh*	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh*	*Laporan*	**10**	**25**	**2**	**2**	**100**	**-**	**1**	**10**

FORMULIR TABEL E81 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANDAR LAMPUNG PERIODE PELAKSANAAN s.d. TRIWULAN II TAHUN 2025

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d.		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGU
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN											179.036.062,584.03		6.893.958.525,00		8.923.390.935,00	10.7	1.254.981.025,00				1858.480.380,00		1.254.981.025,00		14,06		8.148.939.550,00		4,55		
		1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG				32,718,926,956.00		6.893.958.525,00		8.923.390.935,00	100.0	1.254.981.025,00						1.254.981.025,00									
		1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN		Nilai		31,468,926,956.00		2.107.599.633,00		1.523.288.639,00		-						-						62,50			
		1	03	08			PROGRAM PENATAAN	Persentase SLF	Persen	100	6,025,448,394.00	100	429.614.600,00	100	439.998.410,00	25.0								25,00	-	25,00	0,00	62,50	429.614.600,00	62,50	7,13		
								Persentase KBK		100		100		100		25.0							25,00		25,00		62,50		62,50			
		1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan	Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana	Persen	100	6,025,448,394.00	100	429.614.600,00	100	439.998.410,00	25.0	-							25,00	-	25,00	0,00	12,50	429.614.600,00	12,50	7,13		
		1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkara n	Dokumen	110	3,741,698,394.00	12	429.614.600,00	25	439.998.410,00	6.25	-							6,25	-	25,00	0,00	12,50	429.614.600,00	11,36	11,48		
		1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN	Persentase Penyelesaian	Persen	100	3,802,792,668.00	100	141.925.020,00	100	157.008.561,00	25.0	-							25,00	-	25,00	0,00	12,50	141.925.020,00	12,50	3,73		
		1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penyelesaian	Persen	100	3,802,792,668.00	100	141.925.020,00	100	157.008.561,00	25.0	-							25,00	-	25,00	0,00	12,50	141.925.020,00	12,50	3,73		
		1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan	Dokumen	5	2,102,792,668.00	1	141.925.020,00	1	157.008.561,00	0.25	-							0,25	-	25,00	0,00	12,50	141.925.020,00	250,00	6,75		
		1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketataan	Persen	56,2	21,640,685,894.00	55,23	1.536.060.013,00	56.2	926.281.668,00	14.05								14,05	-	25,00	0,00	12,50	1.536.060.013,00	22,24	7,10		
								Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah	persen	4,9		4,40		4.8		1.2								-	0,00		-	-	-			
		1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan	Persentase Ketataan	Persen	56,2	19,090,685,894.00	55,23	1.357.113.120,00	56,2	648.135.447,00	14,05	-							14,5	-	25,00	0,00	12,50	1.357.113.120,00	22,24	7,11		
		1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkad a selain	Dokumen	5	555,125,000.00	1	119.786.948,00	1	74.997.515,00	0.25	-							0,25	-	25,00	0,00	12,50	119.786.948,00	250,00	21,58		
		1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan	Dokumen	5	18,175,000,000.00	1	1.237.326.172,00	1	573.137.932,00	0.25	-							0,25	-	25,00	0,00	12,50	1.237.326.172,00	250,00	6,81		
		1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaat	Persen	100	2,550,000,000.00	100	178.946.893,00	100	278.146.221,00	25.0	-							25,00	-	25,00	0,00	12,50	178.946.893,00	12,50	7,02		
		1	03	12	2.03		Pelaksanaan Singkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Proaram Pemanfaata n Ruang	Dokumen	4	278.146.221,00	0	-	4	278.146.221,00	0,25	-							0,25	-	6,25	0,00	3,13	-	78,13	-		

		1	03	12	2.03	0006	Sistem Informasi Penataan	Jumlah sistem informasi dan komunikasi	Dokumen	4	1,550,000,000.00	1	178.946.893,00	1																			
		1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN**				**1,250,000,000.00**		**4.786.358.892,00**		**7.400.102.296,00**		**1.254.981.025,00**								**1.254.981.025,00**		16,96		6.041.339.917,00				
Rata-Rata Capaian Kinerja																									12,50	0,00			11,12	7,10		
																									SR	SR			SR	SR		
		1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintaha n Bidang Penataan Ruang, Perumaha**	**Persen**	**98**	**34.497.367.587,18**	**98**	4.685.118.946,00	**98**	6.313.594.198,00	**24.5**	1.254.981.025,00							24,50	1.254.981.025,00	25,00	19,88	61,25	5.940.099.971,00	62,50	17,22		
		1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggara n dan Evaluasi**	**Persen**	**100**	**34.497.367.587,18**	**100**	29.931.550,00	**100**	39.213.401,00	**25.0**	-							-	-	0,00	0,00	-	29.931.550,00	-	0,09		
		1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	laporan	15	200,000,000.00	3	29.931.550,00	**3**	39.213.401,00	1.0	-							-	-	0,00	0,00	-	29.931.550,00	-	14,97		
		1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan**	**Persen**	**100**	**25,464,372,873.18**	**100**	3.929.839.001,00	**100**	4.853.085.485,00	**25.0**	1.085.381.025,00							25,00	1.085.381.025,00	25,00	22,36	12,50	5.015.220.026,00	12,50	19,70		
		1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima	Orang/bulan	60	24,822,372,873.18	12	3.760.759.001,00	12	4.743.390.935,00	3.0	1.067.181.025,00							1,00	1.067.181.025,00	25,00	22,50	12,50	4.827.940.026,00	20,83	19,45		
		1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Dokumen	5	642,000,000.00	1	169.080.000,00	1	109.694.550,00	0.25	18.200.000,00							0,25	18.200.000,00	25,00	16,59	12,50	187.280.000,00	250,00	29,17		
		1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**Persentase Peningkatan Kapasitas**	**Persen**	**98**	**330,000,000.00**	**75**		**98**	66.000.000,00	**24.5**	-							24,50	-	25,00	0,00	12,50	-	12,76	-		
		1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Orang	85	**330,000,000.00**	0		20	10,000,000.00	0.0	-							-	-	0,00	0,00	-	-	-	-		
		1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Batik)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapa	Orang	60	56.000.000,00	0		60	56,000,000.00	-										0,00	0,00	-	-	-	-		
		1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar**	**Persen**	**98**	**2,143,363,360.00**	**98**	**172.941.427,00**	**98**	**305.995.742,00**	**24.5**	-							24,50		25,00	0,00	12,50	172.941.427,00	12,76	8,07		
		1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Paket	5	55,352,834.00	1	9.934.300,00	1	9.886.297,00	0.25	-							0,25		25,00	0,00	12,50	9.934.300,00	250,00	17,95		
		1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap	Paket	5	387,515,126.00	1	36.631.850,00	1	108.163.038,00	0.25	-							0,25		25,00	0,00	12,50	36.631.850,00	250,00	9,45		
		1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	5	53,005,400.00	1	9.616.750,00	1	10.025.822,00	0.25	-							0,25		25,00	0,00	12,50	9.616.750,00	250,00	18,14		
		1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Paket	5	296,250,000.00	1	18.130.000,00	1	36.750.000,00	0.25	-							0,25		25,00	0,00	12,50	18.130.000,00	250,00	6,12		
		1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Paket	5	346,440,000.00	1	23.838.500,00	1	24.112.845,00	0.25	-							0,25		25,00	0,00	12,50	23.838.500,00	250,00	6,88		

		1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Dokumen	5	64,800,000.00	1	10.800.000,00	1	10.800.000,00	0.25	-							0,25		25,00	0,00	12,50	10.800.000,00	250,00	16,67	
		1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	laporan	30	940,000,000.00	1	63.990.027,00	6	106.257.740,00	1,5	-							0,50		25,00	0,00	12,50	63.990.027,00	41,67	6,81	
		1	04	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik**	**Persentase Pemenuhan Kebutuha**	**Persen**	**98**	**2,468,762,012.00**	98		**98**	332.689.570,00	**25.0**	-							-		0,00	0,00	-	-	-	-	
		1	04	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Unit	1	150,000,000.00	0		1	150,000,000.00		169.600.000,00								169.600.000,00	0,00	113,07	-	169.600.000,00	-	-	
		1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Unit	50	240,000,000.00			10	76.433.460,00	2.0	-									0,00	0,00	-	-	-	-	
		1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	50	1,646,924,512.00			10	106.256.110,00	2.0	-									0,00	0,00	-	-	-	-	
		1	04	01	2.08		**Penyediaan Jasa**	**Pemenuhan Jasa Penunja**	**Persen**	**98**	**2,229,100,000.00**	**98**	**466.870.000,00**	**98**	**519.600.000,00**	**24,5**	**169.600.000,00**							24,50	169.600.000,00	25,00	32,64	12,50	636.470.000,00	12,76	28,55	
		1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	60	337,600,000.00	12	34.870.000,00	12	39.600.000,00	3.0	39.600.000,00							3,00	39.600.000,00	25,00	100,00	12,50	74.470.000,00	20,83	22,06	
		1	04	01	2.08	0004	Penyedia an Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan	60	1,891,500,000.00	12	432.000.000,00	12	480.000.000,00	3.0	130.000.000,00							3,00	130.000.000,00	25,00	27,08	12,50	562.000.000,00	20,83	29,71	
		1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuha**	**Persen**	**98**	**1,661,769,342.00**	**98**	85.536.968,00	**98**	197.010.000,00	**24,5**	-							24,50		25,00	0,00	12,50	85.536.968,00	12,76	5,15	
		1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	5	201,192,528.00	1	37.342.700,00	1	40.670.000,00	0.25	-							0,25		25,00	0,00	12,50	37.342.700,00	250,00	18,56	
		1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	15	302,586,996.00	3	48.194.268,00	3	77.740.000,00	0,75	-							0,75	-	25,00	0,00	12,50	48.194.268,00	83,33	15,93	
		1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	Unit	1	13.600.000,00	0	-	1	13.600.000,00	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	Unit	1	65.000.000,00	0	-	1	65.000.000,00	-	-							-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
		1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMB**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korba**	**Persen**	**100**	**1,250,000,000.00**	**100**	-	**100**	200.000.000,00	25	-							-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
		1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korba**	**Persen**	**100**	**850,000,000.00**	**100**	-	**100**	200.000.000,00	**25.0**	-							25,00	-	25,00	0,00	12,50	-	12,50	-	
		1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi	Jumlah Rumah Korban Bencana	Unit	42	850,000,000.00		-	10	200.000.000,00	-	-							-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	

		1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIM**	**Persentase RTLH yang**	**Persen**	**100**	**111.819.768.040,85**	**25**	101.239.946,00	64,14	886.508.098,00	**16,035**	**0**	**0**	**16,035**		**16,035**		16,04	-	25,00	0,00	12,50	101.239.946,00	12,50	0,09	
		1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase RTLH yang Tertangani**	**Persen**	**292,62**	**111.819.768.040,85**	**25**	101.239.946,00	64,14	886.508.098,00	**16,035**	-	**16,035**		**16,035**		16,04	-	25,00	0,00	12,50	101.239.946,00	4,27	0,09	
		1	**04**	**03**	**2.03**	**0002**	**Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni**	**Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki**	**Unit**	**25**	**800.999.905,00**	**0**	-		800.999.905,00																
		1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	laporan	10	2,302,500,000.00	**25**	101.239.946,00	2	85.508.193,00	**0.5**	0.5	-	0,5		0,5		0,50	-	25,00	0,00	12,50	101.239.946,00	125,00	4,40	
Rata-Rata Capaian Kinerja																								25,00	0,00			12,50	2,09		
Predikat Kinerja																								SR	SR			SR	SR		
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													8.923.390.935,00		1.254.981.025,00								1.254.981.025,00				8.148.939.550,00			
	TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																							**18**	4			**30**	5		
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																							**SR**	SR			**SR**	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																																

TABEL 5.1

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN									7,804,329,535.00	8,923,390,935.00	8,465,141,678.00	
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									7,804,329,535.00	8,923,390,935.00	8,465,141,678.00	
	1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									2,300,000,000.00	1,523,288,639.00	1,223,231,686.00	
23	**1**	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		Persentase KRK yang Terbit Persentase SLF yang Diterbitkan	Persentase KRK yang Terbit Persentase SLF yang Diterbitkan	%	%	100%	100	100	450,000,000.00	439,998,410.00	385,738,916.00	

	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan Persentase KRK yang Terbit Persentase SLF	Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan Persentase KRK yang Terbit Persentase SLF	%	%	100 %	100	100	450,000,000.00	439,998,410.00	385,738,916.00	
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG),	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG),	Dokumen	Dokumen	20.00 Dokumen	25	25	450,000,000.00	439,998,410.00	385,738,916.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
24	**1**	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	%	%	100 %	100	100	150,000,000.00	157,008,561.00	121,943,978.00	
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	%	%	100 %	100	100	150,000,000.00	157,008,561.00	121,943,978.00	

	1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	Dokumen	1.00 Dokumen	1	1	150,000,000.00	157,008,561.00	121,943,978.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
25	**1**	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGARAAN PENATAAN RUANG**		Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota atau Kawasan Perkotaan persentase ketaatan terhadap RTRW	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota atau Kawasan perkotaan persentase ketaatan terhadap RTRW	%	%	56.2 % 4.8%	56.2 4.8	56.2 4.5	1,700,000,000.00	926,281,668.00	715.548.792.00	
	1	**03**	**12**	2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**		Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota atau Kawasan Perkotaan persentase ketaatan terhadap RTRW	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota atau Kawasan perkotaan persentase ketaatan terhadap RTRW	%	%	4.8% 56.2%	4.8 56.2	4.5 56.2	1,500,000,000.00	648,135,447.00	507,086,723.00	
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1.00 Dokumen	1	1	100,000,000.00	74,997,515.00	67,203,319.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

	1	03	12	2.01	0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1.00 Dokumen	1	1		573,137,932.00	439,883,404.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Luasan RTH publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Luasan RTH publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	%	100 %	4.8 56.2	4.5 56.2	200,000,000.00	278,146,221.00	208,462,069.00	
	1	03	12	2.03	5	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan ruang		Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	Dokumen		1	1		278,146,221.00	208,462,069.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									5,504,329,535.00	7,400,102,296.00	7,241,909,992.00	

26	**1**	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	%	98%	98	98	5,254,329,535.00	6,313,594,198.00	6,176,864,678.00	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	%	%	100%	100	100	30,000,000.00	39,213,401.00	33,025,076.00	
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	Laporan	3 Laporan	3	3	30,000,000.00	39,213,401.00	33,025,076.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	%	%	100 %	98	98	4,474,969,535.00	4,853,085,485.00	4,843,726,435.00	

	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang/bulan	55 Orang/bulan	55	55	4,220,329,535.00	4,743,390,935.00	4,743,390,935.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi ka si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi ka si Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1	1	254,640,000.00	109,694,550.00	100,335,500.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						10,000,000.00	66,000,000.00	56,000,000.00	
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	1	1	1		56,000,000.00	56,000,000.00	

	1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	20 Orang	20	20	10,000,000.00	10,000,000.00	-	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	%	%	98 %	98	98	181,870,000.00	305,995,742.00	170,691,652.00	
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1.00 Paket	1	1	10,000,000.00	9,886,297.00	9,886,297.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1	1	40,000,000.00	108,163,038.00	57,756,693.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1	1	10,000,000.00	10,025,822.00	10,025,822.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1	1	20,000,000.00	36,750,000.00	16,250,000.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1	1	25,000,000.00	24,112,845.00	15,972,840.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1	1	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	6 Laporan	1	1	66,070,000.00	106,257,740.00	50,000,000.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Inventaris Kantor yang Terpelihara Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	%	%	98 %	98	98	44,000,000.00	332,689,570.00	308,811,515.00	
	1	04	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Unit		3	3		150,000,000.00	150,000,000.00	
	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit		1	1	12,000,000.00	76,433,460.00	67,683,460.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit		1	1	32,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit		1	1		90,256,110.00	75,128,055.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	%	98 %	98	98	419,000,000.00	519,600,000.00	567,600,000.00	
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	35,000,000.00	39,600,000.00	39,600,000.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	384,000,000.00	-	168,000,000.00	
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12		480,000,000.00	360,000,000.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Inventaris Kantor yang Terpelihara Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	%	%	100 %	98	98	94,490,000.00	197,010,000.00	197,010,000.00	
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit		1	1	44,430,000.00	40,670,000.00	40,670,000.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit		3	3	50,060,000.00	77,740,000.00	77,740,000.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	Unit		1	1		13,600,000.00	13,600,000.00	
	1	04	01	2.09	00011	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit		1	1		65,000,000.00	65,000,000.00	
27	**1**	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	%	%		100	100	150,000,000.00	200,000,000.00	197,500,000.00	

	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	%		100	100	50,000,000.00	200,000,000.00	197,500,000.00	
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	Unit Rumah	10 Unit Rumah	10	10		200,000,000.00	197,500,000.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
28	**1**	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		Persentase RTLH yang Tertangani	Persentase RTLH yang Tertangani	%	%	83,11 %	100	100	100,000,000.00	886,508,098.00	867,545,314.00	
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Persentase RTLH yang Tertangani	Persentase RTLH yang Tertangani	%	%	64,14 %	83.11	83.11	100,000,000.00	886,508,098.00	867,545,314.00	

	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	Unit		25	25		800,999,905.00	797,946,449.00	
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian, penyelengaraan pemugaran/perem ajaan permukiman kumuh		Jumlah Laporan hasil kordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelengaraan pemugaran/perem ajaan permukiman kumuh	Jumlah Laporan hasil kordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelengaraan pemugaran/perem ajaan permukiman kumuh	Laporan	Laporan		2	2		85,508,193.00	69,598,865.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA, TERPENUHINYA ATAU MELEBIHI TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

a. Terbatasnya sarana transportasi untuk turun ke lapangan, komunikasi yang tidak menemukan titik temu di lapangan serta kondisi cuaca yang buruk dapat menghambat pelaksanaan kegiatan di lapangan;

b. Terbitnya aturan-aturan yang baru di tengah pelaksanaan kegiatan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan yang pada akhirnya pagu anggaran yang sudah dirancang tidak bisa direalisasikan/kembali ke kas daerah;

c. Kurang adanya informasi ter*update* mengenai penerimaan pelatihan dari dalam maupun dari luar pemerintah daerah kota.

IMPLIKASI YANG TIMBUL TERHADAP TARGET CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung pada umumnya;

b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung.

KEBIJAKAN/TINDAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGATASI FAKTOR PENYEBAB TIDAK

TERCAPAINYA, TERPENUHI ATAU MELEBIHI TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

a. Perlu adanya penyediaan tambahan kendaraan dinas guna turun ke lapangan;

b. Perlu adanya sosialisasi mengenai peraturan yang berkaitan dengan tata ruang bangunan dan gedung kepada masyarakat;

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs)*, hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits)* dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai salah satu perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan dalam hal penyusunan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang perumahan, permukiman, tata ruang dan pertanahan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman.

TABEL 2.2 TC 30
PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	2		4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	Persentase RTLH yang Tertangani Per Tahun	32,68	23,63	20,25	20,25	18,97	12,29	15,48	20,25	18,97	
			Persentase Kawasan Kumuh	1,167	0,89	0,65	0,39	0,17	1,31	0,96	0,39	0,17	
	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah	Izin Pemanfaatan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	54,14	54,65	55,15	55,65	56,20	54,65	55,15	55,65	56,20	

	tentang RTRW kabupaten/ kota beserta rencana rincinya												

- SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan
  Reforma Agraria Nasional

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung berpedoman sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perumahan dan Permukiman. Adapun tugas pokok Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung adalah memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan sebagai urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan, Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai Fungsi:

a) Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang perumahan dan tata bangunan, pengendalian permukiman, penataan ruang dan pertanahan ;
b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan meliputi perumahan dan tata bangunan, pengendalian permukiman, penataan ruang dan pertanahan ;
c) Pembinaan teknis perencanaan, arsitektur kota, perumahan dan tata bangunan, kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan ;
d) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain yang berhubungan dengan bidang perumahan dan tata bangunan, pengendalian permukiman, penataan ruang dan pertanahan ;
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, terdapat beberapa isu/permasalahan penting yaitu :

a) Minimnya ketersediaan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman.
b) Rendahnya jumlah permukiman yang berkualitas, layak, sehat dan terjangkau.
c) Adanya ketidaksesuaian antara pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang yang ada.
d) Belum adanya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan baik antar sektor maupun antar wilayah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

Dinas Perumahan dan Permukiman mendukung prioritas pembangunan nasional ke-5 yaitu ***"Memperkuat infrastrukur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar"*** dengan arah kebijakan *pembangunan infrastruktur pelayanan dasar untuk perumahan dan permukiman* yang meliputi :

1. Pemulihan industri perumahan, antara lain melalui subsidi/bantuan perumahan dan relaksasi pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta melanjutkan perluasan akses masyarakat terhadap perumahan permukiman layak dan terjangkau;
2. Penanganan permukiman kumuh serta penyediaan perumahan dan permukiman perkotaan yang terpadu.

Serta prioritas pembangunan nasional ke-6 yaitu ***"Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim"*** dengan arah kebijakan ketahanan bencana yang meliputi Upaya penguatan sistem ketahanan bencana didukung dengan investasi pemulihan pascabencana, penegakan standar bangunan, integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana, penguatan tata kelola pemanfaatan ruang dan penegakan hukum pada pelanggaran tata ruang, serta penguatan literasi dan edukasi kepada masyarakat

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota

Kota Bandar Lampung, tugas Pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Perumahan,Tata Ruang, serta Pertanahan.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah ***"Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas"***

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1) Melaksanakan penataaan kota dan kualitas lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang.
2) Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman melalui peningkatan kualitas perumahan dan sarana penunjangnya
3) Melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan berdasarkan peruntukan serta pemanfaatan lahan yang sesuai dengan tata ruang.
4) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur perencana melalui peningkatan keterampilan, profesionalisme, disiplin dan etos kerja serta pembinaan mental spiritual.
5) Terwujudnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam pelaksanaan penataan ruang kota.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak
2) Meningkatnya Kualitas Tata Ruang

3.3 PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2025

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Perumahan,Tata Ruang Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung pada Tahun 2026 merencanakan pagu anggaran sebesar **Rp. 8.465.141.678,-**

(Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) untuk melaksanakan 6 (Enam) program utama, 13 (Tigasbelas) kegiatan dan 29 (Duapuluh Sembilan) sub kegiatan, yaitu :

3.3.1 Program, kegiatan, dan sub kegiatan dinas Perumahan dan Permukiman

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Bandar Lampung, pada Tahun Anggaran 2026 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung melaksanakan 6 program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan , yaitu:

1. **Program Penataan Bangunan Gedung**

   Program Penataan Bangunan Gedung memiliki 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program penataan bangunan gedung sebesar Rp. 385.738.916,- Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

   a. **Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**

      Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebesar Rp. 385.738.916,-. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung memiliki 1 sub kegiatan yaitu:

      1. **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG sebesar Rp. 385.738.916,-.

2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya memiliki 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program penataan bangunan dan lingkungannya sebesar Rp. 121.943.978,-.Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota sebesar Rp. 121.943.978,-. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota memiliki 1 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Monitoring Penataan Bangunan dan Lingkungan sebesar Rp. 121.943.978,-.

3. Program Penyelenggaran Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penatan Ruang memiliki 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp. 715.548.792,-. Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah:

a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota

sebesar Rp. 507.086.723,-. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota memiliki 2 sub kegiatan yaitu:

1. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota sebesar Rp. 439.883.404,00,-.

2. **Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang sebesar Rp. 67.203.319,-.

b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 208.462.069,-. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota memiliki 1 sub kegiatan yaitu:

3. **Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang sebesar Rp. 208.462.069,-.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki 7 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program penujang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar Rp. 6.176.864.678,00,-. Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar Rp. 33.025.076,-. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki 1 sub kegiatan yaitu:

1. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 33.025.076,-.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sebesar Rp. 4.843.726.435,-.

Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki 2 sub kegiatan yaitu:

1. **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 4.743.390.935,-.

2. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sebesar Rp. 100.335.500,-.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sebesar Rp. 56.000.000,-.

Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki 2 sub kegiatan yaitu:

1. **Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi sebesar Rp,-.

2. **Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sebesar Rp. 56.000.000,-.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah sebesar Rp. 170.691.652,-.

Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah memiliki 7 sub kegiatan yaitu:

1. **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebesar Rp.9.886.297,-

2. **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp. 57.756.693,-.

3. **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan penyediaan peralatan rumah tangga sebesar Rp.10.025.822,-.

4. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 16.250.000,-.

5. **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 15.972.840,-.

6. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp.10.800.000,-.

7. **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp. 50.000.000,-.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar Rp. 567.600.000,00,-. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 2 sub kegiatan yaitu:

1. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.39.600.000,-.

2. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebesar Rp. 168.000.000,00,-.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebesar Rp.

308.811.515,00,- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 3 sub kegiatan yaitu:

1. **Sub Kegiatan Pengadaan Mebel**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan pengadaan Mebel sebesar Rp. 67.683.460,00,-.

2. **Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp.150.000.000,-.

3. **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 75.128.055,00,-.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebesar Rp.197.010.000,-. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 4 sub kegiatan yaitu:

4. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebesar Rp.40.670.000,-.

5. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

   Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebesar Rp.77.740.000,-.

6. **Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya**

   Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya sebesar Rp. 65.000.000,-.

7. **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

   Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 13.600.000,-

5. Program Kawasan Permukiman

Program Kawasan Permukiman memiliki 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program kawasan permukiman sebesar Rp. 867.545.314,-. Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha sebesar Rp. 867.545.314,-. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha memiliki 2 sub kegiatan yaitu:

1. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh sebesar Rp. 69.598.865,-

2. **Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 797.946.449,-

6. Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan perumahan memiliki 2 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program kawasan permukiman sebesar Rp. 197.500.000,-. Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

a. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 197.500.000,-. kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kabupaten/Kota memiliki 1 sub kegiatan yaitu :

1. **Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana**

   Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Sebesar Rp. 197.500.000,-.

Untuk lebih jelasnya berikut table rencana program kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana Tabel 3.1

TABEL 3.1 RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						7.400.102.296,00							7.630.200.075,95	
22	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung Persentase Rusunawa yang Terpelihara	2.84% 100Persen			2.84 % 100 Persen	200.000.000,00						2.84% 100Persen	207.514.000,00	
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitas Rumah Bagi Korban Bencana	3,84%			2.84 %	200.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.		3,84%		
						DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN						8.923.390.935,00							9.210.718.669,11	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.923.390.935,00							9.210.718.669,11	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						1.523.288.639,00							1.580.518.593,16	
23	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase KRK yang Terbit Persentase SLF yang Diterbitkan	100% 100%	100%	100%	100 % 100 %	439.998.410,00						100% 100%	456.529.150,26	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan Persentase KRK yang Terbit Persentase SLF yang Terbit	100% 100% 100%	100%	100 %	100 % 100 % 100 %	439.998.410,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	Masyarakat Kota Bandar Lampung	100% 100% 100%	456.529.150,26	

	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG															
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	100 Dokumen	12 Dokumen	20.00 Dokumen	25 Dokumen	439.998.410,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	Masyarakat Kota Bandar Lampung	25 Dokumen	456.529.150,26	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
24	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	100 Persen	100%	100 %	100 Persen	157.008.561,00						100 Persen	162.907.372,64	
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	100%	100%	100 %	100 %	157.008.561,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	Masyarakat Kota Bandar Lampung	100%	162.907.372,64	
	1	03	09	2.01	007	Pengawasan penataan Bangunan dan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	1 Dokumen	157.008.561,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	Masyarakat Kota Bandar Lampung	1 Dokumen	162.907.372,64	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
25	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan Persentase Ketaatan terhadap RTRW	4.9% 56.2%	55,23 4,4	56.2 % 4.8 %	4.80 Persen 56.2 %	926.281.668,00						4.9% 56.2%	961.082.070,26	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan Persentase Ketaatan terhadap RTRW	56,2%		4.8 % 56.2 %	4.9 % 56,2 %	648.135.447,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	Masyarakat Kota Bandar Lampung	56,2%	672.935.849,00	

															Publik					
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1	1.00 Dokumen	1 Dokumen	74.997.515,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	Masyarakat Kota Bandar Lampung	1 Dokumen	82.797.917,26	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1	1.00 Dokumen	1 Dokumen	573.137.932,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	Masyarakat Kota Bandar Lampung	1 Dokumen	590.137.932,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Luasan RTH publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan Persentase Ketaataan terhadap RTRW	100%	100	100 %	4.9 % 56.2 %	278.146.221,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	Masyarakat Kota Bandar Lampung	100%	288.146.221,00	
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang														
							Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	4 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi	278.146.221,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	Masyarakat Kota Bandar Lampung	1 Sistem Informasi	288.146.221,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BUDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						7.400.102.296,00							7.630.200.075,95	
26	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	98 %	98	98 %	98 %	6.313.594.198,00						98 %	6.502.871.868,71	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100%	100	100 %	100 %	39.213.401.00.			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	100%	41.213.401.00.	

	1	04	01	2.01	0006	Kordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	39.213.401.00.	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	3 Laporan	41.213.401.00.	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	100%	100	100 %	100 %	4.853.085.485,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	100%	4.951.500.613,71	
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	4.743.390.935,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	55 Orang/bulan	4.839.806.063,71	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	109.694.550,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	12 Dokumen	111.694.550,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	98%	75%		98 %	66.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	98%	72.000.000,00	
	1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi													
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	0	20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	20 Orang	12.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 orang				56.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	60 Orang	60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98%	98	98 %	98 %	305.995.742,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	98%	328.951.094,00	
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1.00 Paket	1 Paket	9.886.297,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1 Paket	15.968.297,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan perlengkapan dan peralatan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	108.163.038,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1 Paket	110.163.038,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah tangga													
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.025.822,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1 Paket	12.586.127,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	36.750.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1 Paket	41.955.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan													
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	24.112.845,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1 Paket	26.588.642,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1 Dokumen	12.800.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0009	Penyelengaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	1 Laporan	106.257.740,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	6 Laporan	108.889.990,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98%	98 %	98 %	98 % 98 %	332.689.570,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	98%	343.506.760,00	
	1	04	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit				150.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		152.000.000,00	
	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit		1 Unit	76.433.460,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	10 Unit	80.950.890,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Pralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			1 Unit	106.256.110,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	10 Unit	110.555.870,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98%	98 %	98 %	98 %	519.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	98%	551.900.000,00	
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik													

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	39.600.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	12 Laporan	41.900.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Dan Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	480.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	ASN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	12 Laporan	510.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98%	98	100 %	98%	197.010.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	Masyarakat Kota Bandar Lampung	98%	213.800.000,00	
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		1 Unit	40.670.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	Masyarakat Kota Bandar Lampung	1 Unit	43.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan< pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit		3 Unit	77.740.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	Masyarakat Kota Bandar Lampung	3 Unit	79.800.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya													
							Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya					13.600.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	Masyarakat Kota Bandar Lampung		15.500.000,00	
	1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan / rehabilitas sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	1 Unit				65.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	Masyarakat Kota Bandar		75.000.000,00	

							Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Kecamatan, Semua Kel/Desa		Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Lampung			
27	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100 Persen	100%		100 Persen	200.000.000,00						100 Persen	207.514.000,00	
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%			100 %	200.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	Masyarakat Kota Bandar Lampung	100%	207.514.000,00	
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana														
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah		10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	200.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	Masyarakat Kota Bandar Lampung	10 Unit Rumah	207.514.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
28	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase RTLH yang Tertangani	83,11 %		83,11 %	83,11 %	886.508.098,00						83,11 %	919.814.207,24	
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase RTLH yang Tertangani	100%		64,14 %	64,14 %	885.508.098,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	Masyarakat Kota Bandar Lampung	64,14%	919.814.207,24	
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	25 Unit		25 Unit	25 Unit	800.999.905,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	Masyarakat Kota Bandar Lampung		825.999.905,00	
	1	04	03	2.03	0004	Kordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelengaraan Pemugaran/Peremajaan permukiman Kumuh														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	85.508.193,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur 2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	Masyarakat Kota Bandar Lampung	2 Laporan	93.814.302,24	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2021-2026.

Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA

RENCANA KERJA PERUBAHAN

KECAMATAN TELUKBETUNG TIMUR
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	LandasanHukum	√			
	1.3	MaksuddanTujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN				
		Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/ Tahun 2025	√			
		Formulir E.81				
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 2025

CAMAT TELUKBETUNG TIMUR

ZULKIPLI, SE, MM

NIP. 19701211 199703 1 004

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	**FITRIYANTI, ST, M.Si**	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	**ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M**	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025

CAMAT TELUKBETUNG TIMUR

ZULKIPLI, SE, MM
NIP. 19701211 199703 1 004

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	**FITRIYANTI, ST, M.Si**	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	**ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M**	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan ii tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkatdaerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerahserta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, 2025

CAMAT TELUKBETUNG TIMUR

ZULKIPLI, SE, MM

NIP. 19701211 199703 1 004

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	**FITRIYANTI, ST, M.Si**	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	**ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M**	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL
LEMBAR VERIFIKASI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II Berkenaan 1
2.2 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 1

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 3

BAB V PENUTUP.....

LAMPIRAN 50
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah di tahap terakhir dari RPJPD Kota Bandar Lampung. RPJMD tersebut memuat perkiraan maju rencana pengeluaran selama 5 tahun sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tiap tahunnya dengan memperhatikan kondisi perekonomian, isu-isu strategis, asumsi ekonomi dan estimasi penerimaan/pengeluaran Kota Bandar Lampung yang dalam perjalannannya dapat terjadi perubahan-perubahan. Oleh karenanya untuk memastikan tercapainya target rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang jika diperlukan dilakukan perubahan terhadap RKPD tahun berjalan yang disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam perjalanan pelaksanaan rencana pembangunan tahunan tersebut.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Kecamatan Telukbetung Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Telukbetung Timur yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor ..... tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Telukbetung Timur Tahun 2025, yaitu :

Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;

Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Telukbetung Timur yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Kecamatan Telukbetung Timur Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusun Renja Kecamatan Telukbetung Timur Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025
20. Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 54 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025.
21. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 37);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Kecamatan Telukbetung Timur Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor ……., yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Telukbetung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Telukbetung Timur Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan bagi Kecamatan Telukbetung Timur dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025;
2. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
3. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
4. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Telukbetung Timur Tahun 2025 iniadalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Telukbetung Timur Kota Bandar Lampung merupakan perubahan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Telukbetung Timur. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan capaian Kinerja. Pada tahun anggaran 2026, Kecamatan Telukbetung Timur Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, yang dijabarkan dalam 6 Program, 13 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan. Realisasi Anggaran Belanja opersi sampai dengan 30 Juni 2026 pada Kecamatan Telukbetung Timur Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp.4.099.561.736,00 atau 41,25% dari anggaran yang tersedia dalam DPA yaitu sebesar Rp.9.942.410.300,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai realisasi sebesar Rp.1.342.790.960,00 dari total anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp.4.450.143.022,00 atau 30,18%, kemudian Belanja Barang dan Jasa realisasi sebesar Rp.2.756.770.776,00 dari total anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp.5.414.771.826,00 atau 50,92% sedangkan Belanja Modal belum ada yang terealisasi dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.77.495.452,00 atau 0%. Evaluasi kinerja dan keuangan Renja Kecamatan Telukbetung Timur Kota Bandar Lampung sampai dengan triwulan II Tahun 2026 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.1 (Tabel E81).

2.2. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kecamatan Telukbetung Timur sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Walikota, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kota Bandar Lampung.

Kecamatan Telukbetung Timur masih memerlukan peningkatan pelayananterkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain (1) prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai; (2) Sistem kerja yang belum 0optimal; (3) keterbatasan ketrampilan petugas;

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Telukbetung Timur, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota Bandar Lampung kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Bandar Lampung;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan Kecamatan Telukbetung Timur. Pada Triwulan II tahun 2026 ini rencana Kerja OPD Kecamatan Telukbetung Timur mengalami perubahan anggaran dari sebelumnya secara keseluruhan pada rencana kerja OPD Kecamatan Telukbetung Timur yang terdiri dari 6 (Enam) Program, 13 (Tiga belas) Kegiatan dan 42 (Empat puluh dua) Sub Kegiatan antara lain:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputiSub. Kegiatan, yaitu:
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan, yaitu:
      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan, yaitu:
      1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi Sub Kegiatan, yaitu:
   1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2. Pengadaan Mebel
   3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi Sub Kegiatan, yaitu:
   1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi Sub Kegiatan, yaitu:
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   3. Pemeliharaan Mebel
   4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, Meliputi Kegiatan:

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi Sub. Kegiatan, yaitu:
    1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, meliputi Sub. Kegiatan, yaitu:
    1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Meliputi Kegiatan:
a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi Sub. Kegiatan, yaitu:
    1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, meliputi Sub. Kegiatan, yaitu:
    1. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.
    2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat.
    3. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.
    4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri.
    5. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah.

6. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
7. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
8. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
9. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup.
10. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Meliputi Kegiatan:

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum, meliputi Sub. Kegiatan, yaitu:
   1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
   2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh msyarakat

V. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum, Meliputi Kegiatan:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, meliputi Sub. Kegiatan, yaitu:
   1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
   2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Meliputi Kegiatan:

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi Sub. Kegiatan, yaitu:

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru, selanjutnya rencana kerja Kecamatan Telukbetung Timur juga mengalami Perubahan. Format Perubahan untuk Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Telukbetung Timur Kota Bandar Lampung yang telah disesuaikan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2026 tertuang dalam Tabel 3.1

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Perubahan Kecamatan Telukbetung Timur adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Renstra Kecamatan Telukbetung Timur Tahun 2021-2026.

Renja Kecamatan Telukbetung Timur menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Formulir E. 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TELUKBETUNG TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG
PERIODE PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Kecamatan Telukbetung Timur Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:
1. Kecamatan Telukbetung Timur

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN										I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
											K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	RUPIAH		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
unsur kewilayahan																																
kecamatan												**xxx**				**xxx**		**xxx**		**xxx**		**xxx**		**xxx**				**xxx**		**xxx**	
kecamatan Telukbetung Timur												**xxx**				**xxx**		**xxx**		**xxx**		**xxx**		**xxx**				**xxx**		**xxx**	
x	**Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan**	**7**	**01**						**Indeks kepuasan masyarakat**	**persen**	**98,00**	**73.299.786.344,45**	98,00	**15.819.547.948,00**	**98,00**	**9.494.328.923,00**	**20,00**	**2.078.970.796,00**	**20,00**	**1.728.423.274,00**		**-**		**-**	**40**	**3.807.394.070,00**	**40,82**	135,14	**138,00**	**19.626.942.018,00**	**140,82**	**96,63**	**Kecamtan Tbt**
xx		**7**	**01**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98,00**	**34.672.791.303**	**98,00**	**7.547.447.628,00**	**98,00**	**4.997.500.117,00**	**20**	**957.720.796,00**		**924.923.274,00**		**-**		**-**	**20**	**1.882.644.070,00**	**20,41**	**37,67**	**98,00**	**9.430.091.698,00**	**100,00**	**27,20**	**Kecamtan Tbt**
xxx		**7**	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98,00**	**417.569.191**	**98,00**	**24.368.850,00**	**98,00**	**6.767.862,00**	**0**	**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**98,00**	**24.368.850,00**	**100,00**	**5,84**	**Kecamtan Tbt**
		7	01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	131.822.222	1	7.273.100,00	1	2.866.868,00	1,00	-	1,00	-					2	-	200,00	-	3,00	7.273.100,00	0,60	5,52	
									Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5																						Kecamtan Tbt
		7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	153.924.747	1	12.627.050,00	1	2.866.868,00	1,00	-	1,00	-					2	-	200,00	-	3,00	12.627.050,00	0,60	**8,20**	Kecamtan Tbt
									Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5																						
		7	01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	131.822.222	1	6.895.500,00	1	1.034.126,00	1,00	-	1,00	-					2	-	200,00	-	3,00	6.895.500,00	0,60	**5,23**	Kecamtan Tbt
									Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5																						
xxx		**7**	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**98,00**	**23.294.136.499**	**98,00**	5.246.546.645,00	**98,00**	**3.732.405.323,00**	27	**771.945.796,00**		**624.690.457,00**		**-**		**-**	27	**1.396.636.253,00**	**27,55**	**37,42**	**98,00**	**6.643.182.898,00**	**100,00**	**28,52**	Kecamtan Tbt
		7	01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	22.665.639.755	25	7.424.280.015,00	27	3.618.832.823,00	27	761.425.796,00	27	614.170.457,00					54	1.375.596.253,00	200,00	38,01	79,00	8.799.876.268,00	3,16	**38,82**	
									Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	25																						
		7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	628.496.744	1	211.670.000,00	1	113.572.500,00	1,00	10.520.000,00	1,00	10.520.000,00						21.040.000,00	0,00	18,53	1,00	232.710.000,00	0,20	**37,03**	Kecamtan Tbt
									Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5																						
		7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**98,00**	**585.850.293**		144.805.383,00	**98,00**	**59.732.961,00**		**-**		**42.582.617,00**		**-**		**-**	**-**	**42.582.617,00**	**0,00**	**71,29**	**98,00**	**187.388.000,00**	**100,00**	**31,99**	Kecamtan Tbt
		7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	27.330.086	1	33.473.750,00	1	9.027.232,00	1,00	-	1,00	-					2	-	200,00	-	3,00	33.473.750,00	0,60	122,48	Kecamtan Tbt
									Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5																						
		7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	136.038.256	1	52.043.350,00	1	17.853.699,00	1	-	1	17.120.196,00					2	17.120.196,00	200,00	95,89	3,00	69.163.546,00	0,60	50,84	Kecamtan Tbt
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5																						
		7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	114.295.942	1	40.817.910,00	1	12.861.033,00	1	-	1	12.566.421,00					2	12.566.421,00	200,00	97,71	3,00	53.384.331,00	0,60	46,71	Kecamtan Tbt

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
																	I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
											K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5																						
		7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	102.028.692	1	27.974.000,00	1	13.000.000,00	1	-	1	12.896.000,00					2	12.896.000,00	200,00	99,20	3,00	40.870.000,00	0,60	40,06	Kecamtan Tbt
									Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5																						
		7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	108.272.848	1	35.991.573,00	1	6.990.997,00	1,00	-	1,00	-					2	-	200,00	-	3,00	35.991.573,00	0,60	33,24	Kecamtan Tbt
									Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5																						
		7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	97.884.469	1	0,00	1	-	0,00	-	0,00	-					0	-	0,00	#DIV/0!	1,00	-	0,20	-	Kecamtan Tbt
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5																						
		7	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**771.435.601**	**98,00**	**0,00**	**98**	**55.092.800,00**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**				**-**	**-**	**0,00**	**-**	**98,00**	**-**	**100,00**	**-**	Kecamtan Tbt
		7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	511.843.939		**0,00**	1	15.492.800,00	1,00	-	1,00	-					**2**	**-**	**200,00**	-	2,00	**-**	0,13	**-**	Kecamtan Tbt
									Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15																						
		7	01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	109.949.580		**0,00**	1	30.600.000,00	1,00	-	1,00	-					**2**	**-**	**200,00**	-	2,00	**-**	0,20	**-**	Kecamtan Tbt
									Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10																						
		7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	149.642.082		**0,00**	1	9.000.000,00	1,00	-	1,00	-					**2**	**-**	**200,00**	-	2,00	**-**	2,00	**-**	Kecamtan Tbt
									Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1																						
		7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**7.651.471.723**		1.811.504.550,00	**98,00**	**981.831.171,00**	**20,00**	**185.775.000,00**	**-**	**230.775.000,00**		**-**		**-**	**20**	**416.550.000,00**	**20,41**	**42,43**	**20,00**	**2.228.054.550,00**	**20,41**	**29,12**	Kecamtan Tbt
		7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	512.184.035	1	33.104.750,00	1	30.531.171,00	1,00	-	1,00	-					2	-	200,00	-	3,00	33.104.750,00	0,60	6,46	Kecamtan Tbt
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5																						
		7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	7.139.287.688	1	2.581.650.000,00	1	951.300.000,00	1,00	185.775.000,00	1,00	230.775.000,00					2	416.550.000,00	200,00	43,79	3,00	2.998.200.000,00	0,60	42,00	Kecamtan Tbt
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5																						
		7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**1.952.327.997**		**320.222.200,00**	**98**	**161.670.000,00**	**-**	**-**	**-**	**26.875.200,00**		**-**		**-**	**-**	**26.875.200,00**	**0,00**	**16,62**	**0,00**	**347.097.400,00**	**0,00**	**17,78**	Kecamtan Tbt
		7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	228.082.339	1	77.185.950,00	1	71.340.000,00	1,00	-	1,00	14.422.400,00					2	14.422.400,00	200,00	20,22	3,00	91.608.350,00	3,00	**40,16**	Kecamtan Tbt
									Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1																						
		7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1.234.575.954	1	175.088.400,00	1	56.000.000,00	1,00	-	1,00	12.452.800,00					2	12.452.800,00	**200,00**	22,24	3,00	**187.541.200,00**	0,30	**15,19**	Kecamtan Tbt

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
																	I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14÷8)		(17) = (16/7)*100		(18)
											K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
									Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10																					
		7	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	20.405.738		0,00	1	1.000.000,00	1,00	-	1,00	-					2	-	200,00	-	2,00	-	0,67	-	Kecamtan Tbt
									Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3																					
		7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	22.106.217		0,00	1	3.330.000,00	1,00	-	1,00	-					2	-	200,00	-	2,00	-	0,67	-	Kecamtan Tbt
									Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3																					
		7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	306.086.077	1	90.000.000,00	1	30.000.000,00	1,00	-	1,00	-					2	-	200,00	-	3,00	90.000.000,00	3,00	29,40	Kecamtan Tbt
									Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																					
		7	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	141.071.672	1	43.637.000,00	1	-	1,00	-	1,00	-					2	-	200,00	#DIV/0!	3,00	43.637.000,00	3,00	30,93	Kecamtan Tbt
									Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																					
		7	**01**	**05**				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100**	**290.095.605**		**0,00**	**100**	**2.128.850,00**	**20,00**	**-**	**-**	**-**					**20**	**-**	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**	Kecamtan Tbt
		7	**01**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290.095.605**		**0,00**	**100**	**2.128.850,00**	**20,00**	**-**	**-**	**-**					**20**	**-**	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**	Kecamtan Tbt
		7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124.326.667		0,00	1	1.064.425,00	1,00	-	1,00	-					2	-	**200,00**	-	2,00	-	0,40	-	Kecamtan Tbt
									Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5																					
		7	01	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan babinkamtibmas	Tahun	1	165.768.938		0,00	1	1.064.425,00	1,00	-	1,00	-					2	-	**200,00**	-	2,00	-	0,02	-	Kecamtan Tbt
									Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100																					
		7	**01**	**06**				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290.095.605**		**0,00**	**100**	**2.128.850,00**	**20,00**	**-**	**-**	**-**					**20**	**-**	20,00	-	20,00	-	20,00	-	Kecamtan Tbt
		7	**01**	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100**	**290.095.605**		**0,00**	**100**	**2.128.850,00**	**20,00**	**-**	**-**	**-**					**20**	**-**	20,00	-	20,00	-	20,00	-	Kecamtan Tbt
		7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165.768.938		0,00	1	1.064.425,00	1,00	-	1,00	-					2	-	**200,00**	-	2,00	-	0,40	-	Kecamtan Tbt
									Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5																					
		7	01	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124.326.667		0,00	1	1.064.425,00	1,00	-	1,00	-					2	-	**200,00**	-	2,00	-	0,40	-	Kecamtan Tbt
									Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5																					

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
																I		II		III		IV									
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
											K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
	Meningkatnya penerapan kebijakan reformasi birokrasi di pemerintahan kota bandar lampung	**7**	**01**						**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**																							Kecamtan Tbt
		7	**01**	**02**				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100**	**17.240.976.243**	**100**	**4.664.132.200,00**	**100**	**2.056.254.309,00**	**25,00**	**603.750.000,00**	**-**	**431.500.000,00**		**-**		**-**	**25**	**1.035.250.000,00**	**25,00**	**50,35**	**125,00**	**5.699.382.200,00**	**125,00**	**33,06**	Kecamtan Tbt
		7	**01**	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**244.548.031**	**100**	**14.500.000**	**100**	**31.937.510,00**	**25,00**	**-**	**-**	**29.000.000,00**		**-**		**-**	**25**	**29.000.000,00**	**25,00**	**90,80**	**125,00**	**43.500.000,00**	**125,00**	**17,79**	Kecamtan Tbt
		7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	244.548.031	1	43.500.000,00	1	31.937.510,00	0,00	-	1,00	29.000.000,00					1	29.000.000,00	100,00	90,80	2,00	72.500.000,00	0,40	29,65	Kecamtan Tbt
									Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5																					
		7	**01**	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**16.996.428.212**		**4.649.632.200**	**100**	**2.024.316.799,00**	**25**	**603.750.000,00**	**0**	**402.500.000,00**		**-**		**-**	**25**	**1.006.250.000,00**	**25,00**	**49,71**	**25,00**	**5.655.882.200,00**	**25,00**	**33,28**	Kecamtan Tbt
		7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	16.996.428.212	1	6.671.490.200,00	1	2.024.316.799,00	1,00	603.750.000,00	1,00	402.500.000,00					2	1.006.250.000,00	200,00	49,71	3,00	7.677.740.200,00	0,60	45,17	Kecamtan Tbt
									Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5																					
	Meningkatnya kesejahteraan rakyat	**7**	**01**	**03**				**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**100**	**8.117.141.506**		**209.119.000**	**100**	**548.671.468**	**25**	**-**	**25**	**-**		**-**		**-**	**50**	**-**	**50,00**	**-**	**50,00**	**209.119.000,00**	**50,00**	**2,58**	Kecamtan Tbt
		7	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**100**	**7.163.264.431**		**209.119.000**	**100**	**534.267.068,00**	**25**	**-**	**25**	**-**		**-**		**-**	**50**	**-**	**50,00**	**-**	**50,00**	**209.119.000,00**	**50,00**	**2,92**	Kecamtan Tbt
		7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	7.163.264.431	1	639.329.000,00	1	534.267.068,00	1,00	-	1,00	-					2	-	200,00	-	3,00	639.329.000,00	300,00	8,93	Kecamtan Tbt

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN										I		II		III		IV									
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
											K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
									Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																								
		7	01	03	2	02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	100	695.269.575			100	-	25	-	25	-	25	-	25	-	100	-	100,00	#DIV/0!	100,00	-	100,00	-	Kecamtan Tbt
		7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan PrasaranaKelurahan	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasrana di Kelurahan	Tahun	1	695.269.575	1		1	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	100,00	#DIV/0!	2,00	-	200,00	-	Kecamtan Tbt
		7	01	03	2	06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	100	258.607.500		0,00	100	14.404.400,00	100,00	-	-	-		-		-	100	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Kecamtan Tbt
		7	01	03	2	06	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluarga	5.000	25.860.750		0,00	1.250	1.440.440,00	100,00	-	100,00	-					200	-	16,00	-	200,00	-	0,04	-	Kecamtan Tbt
		7	01	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5.000	25.860.750		0,00	1.250	1.440.440,00	100,00	-	100,00	-					200	-	16,00	-	200,00	-	0,04	-	Kecamtan Tbt
		7	01	03	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5.000	25.860.750		0,00	1.250	1.440.440,00	100,00	-	100,00	-					200	-	16,00	-	200,00	-	0,04	-	Kecamtan Tbt
		7	01	03	2	06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5.000	25.860.750		0,00	1.250	1.440.440,00	100,00	-	100,00	-					200	-	16,00	-	200,00	-	0,04	-	Kecamtan Tbt
		7	01	03	2	06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	5.000	25.860.750		0,00	1.250	1.440.440,00	100,00	-	100,00	-					200	-	16,00	-	200,00	-	0,04	-	Kecamtan Tbt
		7	01	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5.000	25.860.750		0,00	1.250	1.440.440,00	100,00	-	100,00	-					200	-	16,00	-	200,00	-	0,04	-	Kecamtan Tbt
		7	01	03	2	06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5.000	25.860.750		0,00	1.250	1.440.440,00	100,00	-	100,00	-					200	-	16,00	-	200,00	-	0,04	-	Kecamtan Tbt
		7	01	03	2	06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5.000	25.860.750		0,00	1.250	1.440.440,00	100,00	-	100,00	-					200	-	16,00	-	200,00	-	0,04	-	Kecamtan Tbt
		7	01	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5.000	25.860.750		0,00	1.250	1.440.440,00	100,00	-	100,00	-					200	-	16,00	-	200,00	-	0,04	-	Kecamtan Tbt
		7	01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5.000	25.860.750		0,00	1.250	1.440.440,00	100,00	-	100,00	-					200	-	16,00	-	200,00	-	2,00	-	Kecamtan Tbt

NO.	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW IV (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW IV TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
																	I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
											K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta toleransi antar umat beragama	**7**	**01**	**04**				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**%**	**100**	**12.688.686.083**	**100**	**3.398.849.120**	**100**	**1.887.645.329,00**	**25**	**517.500.000,00**	**25**	**372.000.000,00**		**-**		**-**	**50**	**889.500.000,00**	**50,00**	**47,12**	**150,00**	**4.288.349.120,00**	**150,00**	**33,80**	Kecamtan Tbt
		7	**01**	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100**	**12.688.686.083**	**100**	**3.398.849.120**	**100**	**1.887.645.329,00**	**25**	**517.500.000,00**	**25**	**372.000.000,00**		**-**		**-**	**50**	**889.500.000,00**	**50,00**	**47,12**	**150,00**	**4.288.349.120,00**	**150,00**	**33,80**	Kecamtan Tbt
		7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	12.675.568.583	1	4.824.803.120,00	1	1.865.003.469,00	1,00	517.500.000,00	1,00	372.000.000,00					2	889.500.000,00	200,00	47,69	3,00	5.714.303.120,00	0,60	45,08	Kecamtan Tbt
									Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																					
		7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	13.117.500	1	33.750.000,00	1	22.641.860,00	0,00	-	0,00	-					0	-	0,00	-	1,00	33.750.000,00	0,20	257,29	Kecamtan Tbt
									Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5																					
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				**73.299.786.344,45**				**9.494.328.923,00**		**2.078.970.796,00**		**1.728.423.274,00**		**-**		**-**		**3.807.394.070,00**						**96,63**	
								TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			**xxx**	**40,10**			**xxx**	**xxx**	
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			**xxx**	**xxx**			**xxx**	**xxx**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

Bandar Lampung, Juni 2025
CAMAT TELUKBETUNG TIMUR

ZULKIPLI, SE,MM.
Pangkat/IV.b
NIP. 19701211 199703 1 004

TABEL 5.1

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
						KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR									**9.149.143.323,00**	**9.586.482.823,00**	**11.052.328.923,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									**9.149.143.323,00**	**9.586.482.823,00**	**11.052.328.923,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN**									**9.149.143.323,00**	**9.586.482.823,00**	**11.052.328.923,00**	
236	**7**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**5.044.535.493,00**	**5.060.578.305,00**	**5.087.500.117,00**	
	7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**9.373.382,00**	**8.600.604,00**	**6.767.862,00**	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.106.944,00	2.866.868,00	2.866.868,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.185.419,00	2.866.868,00	2.866.868,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.081.019,00	2.866.868,00	1.034.126,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**3.757.353.323,00**	**3.732.405.323,00**	**3.732.405.323,00**	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.658.493.323,00	3.618.832.823,00	3.618.832.823,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	98.860.000,00	113.572.500,00	113.572.500,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**64.898.821,00**	**65.609.578,00**	**59.732.961,00**	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	8.392.348,00	9.027.232,00	9.027.232,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	16.608.797,00	17.853.699,00	17.853.699,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12.334.966,00	12.861.033,00	12.861.033,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.152.710,00	9.129.312,00	6.990.997,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.410.000,00	3.738.302,00	0,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**40.896.712,00**	**55.092.800,00**	**55.092.800,00**	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	12.966.061,00	15.492.800,00	15.492.800,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	16.064.467,00	30.600.000,00	30.600.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	11.866.184,00	9.000.000,00	9.000.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**955.600.000,00**	**1.022.200.000,00**	**1.071.831.171,00**	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.500.000,00	30.500.000,00	30.531.171,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	930.100.000,00	991.700.000,00	1.041.300.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**216.413.255,00**	**176.670.000,00**	**161.670.000,00**	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	71.340.000,00	71.340.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	124.000.000,00	71.000.000,00	56.000.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
			01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	35.653.255,00	30.000.000,00	30.000.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	18.240.000,00	0,00	0,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
237	**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.052.910.239,00**	**2.058.491.606,00**	**2.861.254.309,00**	
	7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**29.772.157,00**	**31.937.510,00**	**31.937.510,00**	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	29.772.157,00	31.937.510,00	31.937.510,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**2.023.138.082,00**	**2.026.554.096,00**	**2.829.316.799,00**	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.023.138.082,00	2.026.554.096,00	2.829.316.799,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
238	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**550.204.883,00**	**566.171.468,00**	**548.671.468,00**	
	7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**490.204.883,00**	**551.767.068,00**	**534.267.068,00**	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	490.204.883,00	551.767.068,00	534.267.068,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
	7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**1 Keluarga**	**1 Keluarga**	**1 Keluarga**	**1 Keluarga**	**1 Keluarga**	**60.000.000,00**	**14.404.400,00**	**14.404.400,00**	
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	6.000.000,00	1.440.440,00	1.440.440,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	6.000.000,00	1.440.440,00	1.440.440,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	6.000.000,00	1.440.440,00	1.440.440,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	6.000.000,00	1.440.440,00	1.440.440,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	6.000.000,00	1.440.440,00	1.440.440,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	6.000.000,00	1.440.440,00	1.440.440,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	6.000.000,00	1.440.440,00	1.440.440,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	6.000.000,00	1.440.440,00	1.440.440,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	6.000.000,00	1.440.440,00	1.440.440,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	6.000.000,00	1.440.440,00	1.440.440,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
239	**7**	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**100Persen**	**100Persen**	**100Persen**	**100Persen**	**100Persen**	**1.485.828.932,00**	**1.892.238.164,00**	**2.550.645.329,00**	
	7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**100 Persern**	**100 Persern**	**100 Persern**	**100 Persern**	**100 Persern**	**1.485.828.932,00**	**1.892.238.164,00**	**2.550.645.329,00**	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.462.096.226,00	1.868.398.724,00	2.528.003.469,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	23.732.706,00	23.839.440,00	22.641.860,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
240	**7**	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**7.834.464,00**	**4.501.640,00**	**2.128.850,00**	
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**7.834.464,00**	**4.501.640,00**	**2.128.850,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	3.919.808,00	2.250.820,00	1.064.425,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.914.656,00	2.250.820,00	1.064.425,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
241	**7**	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**7.829.312,00**	**4.501.640,00**	**2.128.850,00**	
	7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**7.829.312,00**	**4.501.640,00**	**2.128.850,00**	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.914.656,00	2.250.820,00	1.064.425,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.914.656,00	2.250.820,00	1.064.425,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	J U M L A H														**9.149.143.323,00**	**9.586.482.823,00**	**11.052.328.923,00**	

Bandar Lampung, Juli 2025

CAMAT TELUKBETUNG TIMUR

ZULKIPLI, SE.,MM

NIP. 19701211 199703 1 004

TABEL TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN 2024
KOTA BANDAR LAMPUNG

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025				Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (2025)		
												Target Renja PD tahun lalu (2024)		Realisasi Renja PD tahun lalu (2024)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x100%		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4) x100%
							Tolak Ukur	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan			Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	
4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						
4.05 FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																						
						KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR																
7	**01**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan kewilayahan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**
						Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00	12	Bulan	48	Bulan	66,67
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00	12	Bulan	48	Bulan	66,67
7	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**presentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**

1						2	Tolak Ukur	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	8 = (7/6) x100%	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	(10/4) x100%
4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
4.05 FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																					
						KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR															
						penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	12	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00	2	dokumen	6	dokumen	50,00
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja	12	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00	2	dokumen	6	dokumen	50,00
						evaluasi kinerja perangkat daerah	jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	12	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00	2	dokumen	6	dokumen	50,00
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00	12	Bulan	48	Bulan	66,67
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00	12	Bulan	48	Bulan	66,67
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00	12	Bulan	48	Bulan	66,67
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00	12	Bulan	48	Bulan	66,67
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00	12	Bulan	48	Bulan	66,67
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00	12	Bulan	48	Bulan	66,67
7	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**
						Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	6	tahun	1	tahun	1	tahun	-	tahun	-	1	tahun	2	tahun	33,33
						Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Komputer/Note Book dan Printer Kecamatan dan Kelurahan	6	tahun	1	tahun	1	tahun	-	tahun	-	1	tahun	2	tahun	33,33

1						2	Tolak Ukur	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	8 = (7/6) x100%	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	(10/4) x100%
4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
4.05 FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																					
						KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR															
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Studio dan Komunikasi	6	tahun	1	tahun	1	tahun	-	tahun	-	1	tahun	2	tahun	33,33
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00	12	Bulan	48	Bulan	66,67
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00	12	Bulan	48	Bulan	66,67
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100,00	1	tahun	4	tahun	66,67
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100,00	1	tahun	4	tahun	66,67
						Pemeliharaan Mebel	jumlah mebeul yang terpelihara	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100,00	1	tahun	4	tahun	66,67
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100,00	1	tahun	4	tahun	66,67
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100,00	1	tahun	4	tahun	66,67
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100,00	1	tahun	4	tahun	66,67

1						2	Tolak Ukur	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	8 = (7/6) x100%	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	(10/4) x100%
4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
4.05 FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																					
						KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR															
7	**01**	**02**				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**
						Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	presentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100,00	1	tahun	4	tahun	66,67
						Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	presentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100,00	1	tahun	4	tahun	66,67
7	**01**	**03**				**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**

1						2	Tolak Ukur	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	8 = (7/6) x100%	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	(10/4) x100%
4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
4.05 FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																					
						KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR															
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	peresentase pkk,lpm ,mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100,00	1	tahun	4	tahun	66,67
						Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**
						Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	4	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	100,00	1	Keluarga	4	Keluarga	100,00
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	4	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	100,00	1	Keluarga	4	Keluarga	100,00
						Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	4	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	100,00	1	Keluarga	4	Keluarga	100,00
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	4	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	100,00	1	Keluarga	4	Keluarga	100,00
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	4	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	100,00	1	Keluarga	4	Keluarga	100,00

1						2	Tolak Ukur	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	8 = (7/6) x100%	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	(10/4) x100%
4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
4.05 FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																					
						KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR															
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	100,00	1	Keluarga	4	Keluarga	100,00
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	4	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	100,00	1	Keluarga	4	Keluarga	100,00
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	4	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	100,00	1	Keluarga	4	Keluarga	100,00
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	4	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	100,00	1	Keluarga	4	Keluarga	100,00
						Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	4	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	1	Keluarga	100,00	1	Keluarga	4	Keluarga	100,00
7	**01**	**04**				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**

1						2	Tolak Ukur	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	8 = (7/6) x100%	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	(10/4) x100%
4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
4.05 FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																					
						KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR															
						Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	presenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100,00	1	tahun	4	tahun	66,67
						harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100,00	1	tahun	4	tahun	66,67
7	**01**	**05**				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100,00	1	tahun	4	tahun	66,67
						fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Bimtek dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional oleh Babinsa/Babinkamtibmas	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100,00	1	tahun	4	tahun	66,67
7	**01**	**06**				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**
						Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**

1						2	Tolak Ukur	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	8 = (7/6) x100%	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	(10/4) x100%
4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
4.05 FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																					
						KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR															
						fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100,00	1	tahun	4	tahun	66,67
						fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	6	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100,00	1	tahun	4	tahun	66,67

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN BUMI WARAS
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	LandasanHukum	√			
	1.3	MaksuddanTujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN				
		Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/ Tahun 2025	√			
		Formulir E.81				
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 2025

CAMAT BUMI WARAS

BUDI ARDIYANTO, ST,. MM
NIP 19811229 201001 1 006

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	FITRIYANTI, ST, M.Si	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.			Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025

CAMAT BUMI WARAS

BUDI ARDIYANTO, ST,. MM
NIP 19811229 201001 1 006

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	**FITRIYANTI, ST, M.Si**	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	**ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M**	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan ii tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkatdaerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerahserta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung. 2025

CAMAT BUMI WARAS

BUDI ARDIYANTO, ST,. MM
NIP 19811229 201001 1 008

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	**FITRIYANTI, ST, M.Si**	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	**ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M**	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	I – 1
	1.1. Latar Belakang	I – 1
	1.2. Landasan Hukum	I – 2
	1.3. Maksud dan Tujuan	I – 7
	1.4. Sistematika Penulisan	I – 7
BAB II	EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....	II – 1
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.	II – 1
	2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II – 1
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	III – 1
BAB IV	PENUTUP	IV – 1

LAMPIRAN 53
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Kecamatan Bumi Waras adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Bumi Waras yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Bumi Waras Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;
b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Bumi Waras yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Kecamatan Bumi Waras Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Bumi Waras Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Bumi Waras Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bumi Waras Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 108);

10. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
11. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173)
12. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Bumi Waras Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Bumi Waras Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2019 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);

25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Bumi Waras Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 tentang APBD tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);
31. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 20);
32. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 47).

I.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kecamatan Bumi Waras Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2024, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Bumi Waras dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bumi Waras Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Kecamatan Bumi Waras dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2024
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2024;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Bumi Waras Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan
- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Bumi Waras. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan capaian Kinerja. Pada tahun anggaran 2024, Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, yang dijabarkan dalam 6 Program, 13 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Realisasi Anggaran Belanja Operasi sampai dengan 30 Juni 2025 pada Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 4.073.458.727,00 atau 37.76% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp 10.787.585.659. Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 0 atau 0% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sebesar Rp. 33.522.735,00 sedangkan realisasi kinerja rata-rata mencapai 40.30%. Evaluasi kinerja dan keuangan Renja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.1.

2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bumi Waras, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Wali kota Bandar Lampung kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Bandar Lampung;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta

pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

BAB III
RENCANA DALAM KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2025 ini rencana Kerja OPD Kecamatan Bumi Waras mengalami perubahan anggaran dari sebelumnya secara keseluruhan pada rencana kerja OPD Kecamatan Bumi Waras yang terdiri dari 6 (Enam) Program, 13 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a) Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
      b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
   1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      d) Penyediaan Bahan Logistik
      e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Pengadaan Mebel
b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c) Pemeliharaan Mebel
d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a) Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan pelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

a) Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

a) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

b) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

c. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

d) Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri

d) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

e) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

f) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

g) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

h) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

i) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4. Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum
   4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
      a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
      b) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
      a) fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional
      b) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah
   6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
      a) fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan
      b) fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan

Dengan terbitnya peraturan baru yaitu Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru, selanjutnya rencana kerja Kecamatan Bumi Waras juga mengalami Perubahan. Format Perubahan untuk Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yang telah disesuaikan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2024 tertuang dalam Tabel 3.1.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Kecamatan Bumi Waras selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Kecamatan Bumi Waras juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Bumi Waras dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN LABUHAN RATU
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	LandasanHukum	√			
	1.3	MaksuddanTujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN				
		Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/ Tahun 2025	√			
		Formulir E.81				
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 2025

CAMAT LABUHAN RATU

SEPTIA ISPARINA, S. Sos., MM
NIP. 19670902 198711 2 001

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	FITRIYANTI, ST, M.Si	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.SI.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025

CAMAT LABUHAN RATU

SEPTIA ISPARINA, S. Sos., MM
NIP. 19670902 198711 2 001

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	**FITRIYANTI, ST, M.Si**	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	**ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M**	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan ii tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkatdaerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerahserta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, 2025

CAMAT LABUHAN RATU

SEPTIA ISPARINA, S. Sos., MM
NIP. 19670902 198711 2 001

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	FITRIYANTI, ST, M.Si	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN .....
1.1. LATAR BELAKANG ..... I – 1
1.2. LANDASAN HUKUM ..... I – 2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ..... I – 6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ..... I – 7

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .....
2.1. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 ..... II – 1

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....

BAB IV PENUTUP .....

LAMPIRAN 52
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Kecamatan Labuhan Ratu adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Labuhan Ratu yang mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;
b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Labuhan Ratu yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 108);
9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);

10. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173)
11. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2019 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi

Lampung Nomor 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);

25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 tentang APBD tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 10);
30. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 20);
31. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 47).
32. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

I.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Wali Kota Bandar

Lampung Nomor 34 Tahun 2024, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Labuhan Ratu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Kecamatan Labuhan Ratu dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2024;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2024;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan
- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

II.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Kegiatan Pembangunan OPD Kecamatan Labuhan Ratu senantiasa mengacu pada Rencana Visi Misi dan Arah Pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung 5 Tahun Kedepan (Tahun 2021-2026), dengan penyelarasan program dan kegiatan yang direncanakan serta rekomendasi kebijakan pada tahun 2025 dalam rangka implementasi Visi Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut (telah disesuaikan dengan kaidah dan prinsip perencanaan pembangunan Daerah):

"Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat"

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung merupakan perubahan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Labuhan Ratu. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan capaian Kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian yang dijabarkan dalam 6 Program, 13 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan. Realisasi Anggaran Belanja pada Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung sampai dengan 30 Juni 2025 sebagai berikut, realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 5.264.374.286,- atau 47,12 % dari anggaran dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp 11.172.631.528,-.

Evaluasi kinerja dan keuangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung sampai dengan triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.1.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2025 ini rencana Kerja OPD Kecamatan Labuhan Ratu mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 12.475.422.528,- secara keseluruhan pada rencana kerja OPD Kecamatan Labuhan Ratu yang terdiri dari 6 (Enam) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 41 (Empat Puluh Satu) Sub Kegiatan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :
   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
      i. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
      ii. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   b. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
      i. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
      ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP
      iii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
      i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      iii. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      iv. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      v. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      vi. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan :

i. Pengadaan Mebel
ii. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
iii. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
ii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
ii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
iii. Pemeliharaan Mebel
iv. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
v. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
vi. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan, meliputi sub kegiatan :
i. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

b. Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi sub kegiatan :
i. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan

3. Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi kegiatan :
    a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi sub kegiatan :
        i. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, meliputi sub kegiatan :
        i. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
        ii. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
        iii. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
        iv. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
        v. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
        vi. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
        vii. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
        viii. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
        ix. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

x. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi kegiatan :
   a. Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi sub kegiatan :
      i. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
      ii. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum, meliputi kegiatan :
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah, meliputi sub kegiatan :
      i. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
      ii. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, meliputi kegiatan :
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa, meliputi sub kegiatan :
      i. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan
      ii. Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan

Dengan terbitnya peraturan baru yaitu Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru, selanjutnya rencana kerja Kecamatan

Labuhan Ratu juga mengalami Perubahan. Format Perubahan untuk Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung yang telah disesuaikan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2023 tertuang dalam Tabel 3.1.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Kecamatan Labuhan Ratu selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Kecamatan Labuhan Ratu juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Labuhan Ratu dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN WAY HALIM
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST., M.SI	
	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda	
2	Zeldayati Ningsih, S.II., M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Bandar Lampung, 2025

Mengetahui,

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.SI.

Pembina Tingkat I

NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025

CAMAT WAY HALIM

DARWUNO, S. Sos., MM

NIP. 19810301 200902 1 008

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST., M.SI	
	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda	
2	Zelduyati Ningsih, S.H., M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	√			
		Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/tahun 2025				
		Formulir C.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Keglatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 2025

CAMAT WAY HALIM

DARWONO, S. Sos., MM

NIP. 19810301 200902 1 008

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, ST., M.Si	
	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda	
2	Zeldayati Ningsih, S.H., M.M	
	Pungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

HALAMAN

DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN ..... I – 1

1.1. Latar Belakang ..... I – 1

1.2. Landasan Hukum ..... I – 2

1.3. Maksud dan Tujuan ..... I – 6

1.4. Sistematika Penulisan ..... I – 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN ..... II – 1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan ..... II – 1

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... II – 2

BAB IV PENUTUP ..... IV – 1

LAMPIRAN 53
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Kecamatan Way Halim adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Way Halim yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Way Halim Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;
b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Way Halim yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Kecamatan Way Halim Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Way Halim Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 108);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
8. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173)
9. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 10);
25. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

I.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kecamatan Way Halim Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Way Halim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Way Halim Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Kecamatan Way Halim dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Way Halim Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum
I.3 Maksud dan Tujuan
I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Way Halim. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan capaian Kinerja. Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, yang dijabarkan dalam 6 Program, 13 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan. Realisasi Anggaran Belanja Operasi sampai dengan 28 Maret 2025 pada Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 2.845.986.532 atau 21,17% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp 13.441.018.557. Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 0 atau 0% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sebesar Rp. 50.700.000,00 sedangkan realisasi kinerja rata-rata mencapai 50%. Evaluasi kinerja dan keuangan Renja Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.1.

2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Way Halim, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota Bandar Lampung kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Bandar Lampung;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta

pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Formulir E. 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG

RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN WAY HALIM KOTA BANDAR LAMPUNG

PERIODE PELAKSANAAN s.d. TRIWULAN I TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja .....[7] Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. .....

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
Unsur Kewilayahan																																	
Kecamatan										**98,00**	**97.178.732.496**	**40,00**	**11.985.805.375**	**98**	**13.491.718.557**	**25,00**	**2.845.986.532**	**25,00**	**-**		**-**		**-**	**2.845.986.532**		**16,05**		**14.831.791.907**		**13,70**		
Kecamatan Way Halim										*98,00*	**97.178.732.496**	**40,00**	**11.985.805.375**	**98**	**13.491.718.557**	**25,00**	**2.845.986.532**	**25,00**	**-**		**-**		**-**	**2.845.986.532**		**16,05**		**14.831.791.907**		**13,70**		
1	**Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan**							**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Persen**	**98,00**																				**Kec. WH**	**B.Lampung**
		7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98,00**	**42.109.203.249**	**40,00**	**5.265.062.675,00**	**98,00**	**6.525.358.976**	**25,00**	**1.607.486.532**	**25,00**	**-**		**-**		**-**	**50,00**	**1.607.486.532**	**51,02**	**24,63**	**90,00**	**6.872.549.207,00**	**91,84**	**16,32**	**Kec. WH**	**B.Lampung**
		7	**01**	**01**	**2**	**02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98,00**	**31.655.298.448**	**40,00**	**4.157.383.375,00**	**98,00**	**5.182.622.307**	**25,00**	**1.341.961.314**	**25,00**	**-**		**-**		**-**	**50,00**	**1.341.961.314**	**51,02**	**25,89**	**90,00**	**5.499.344.689,00**	**91,84**	**17,37**	**Kec. WH**	**B.Lampung**
		7	01	01	2	02	01 Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	30.976.959.080,00	50	4.068.783.375,00	50	5.050.819.557	50	1.326.841.314	50	-	50	-	-	-	50	1.326.841.314	100,00	26,27	100	5.395.624.689,00	10000,00	17,42	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	50																							
		7	01	01	2	02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	678.339.368,44		88.600.000,00	1	131.803.750	0,25	15.120.000	0,25	-	0,25	-	-	-	0,75	15.120.000	75,00	11,47	0,75	103.720.000,00	75,00	15,29	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5				1																			
		7	**01**	**01**	**2**	**01**	**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinja perangkat daerah yang berkualitas**	**%**	**98,00**	**42.340.701**		**1.005.500,00**	**98,00**	**3.375.219**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**		**-**		**-**	**50,00**	**-**	**51,02**	**0,00**	**50,00**	**1.005.500,00**	**51,02**	**2,37**	**Kec. WH**	**B.Lampung**
		7	01	01	2	01	01 Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	14.113.567			1	1.125.073	0,25	-	0,25	-		-		-	0,5	-	50,00	0,00	0,5	-	50,00	0,00	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5				1																			
		7	01	01	2	01	06 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	14.113.567			1	1.125.073	0,25	-	0,25	-		-		-	0,5	-	50,00	0,00	0,5	-	50,00	0,00	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5				1																			
		7	01	01	2	01	07 Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	14.113.567		1.005.500,00	1	1.125.073	0,25	-	0,25	-		-		-	0,5	-	50,00	0,00	0,5	1.005.500,00	50,00	7,12	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5				1																			
		7	**01**	**01**	**2**	**06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98,00**	**574.001.719**	**40,00**	**32.605.000,00**	**98,00**	**80.569.708**	**25,00**	**27.844.000**	**25,00**	**-**		**-**		**-**	**50,00**	**27.844.000**	**51,02**	**34,56**	**90,00**	**60.449.000,00**	**91,84**	**10,53**	**Kec. WH**	**B.Lampung**
		7	01	01	2	06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	44.081.618	1	4.519.000,00	1	8.919.880	0,25	8.840.000	0,25	-		-		-	0,5	8.840.000	50,00	99,10	1,5	13.359.000,00	150,00	30,31	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5				1																			
		7	01	01	2	06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	93.962.903	1	13.064.000,00	1	14.775.088	0,25	9.644.000	0,25	-		-		-	0,5	9.644.000	50,00	65,27	1,5	22.708.000,00	150,00	24,17	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5				1																			
		7	01	01	2	06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	141.201.941	1	4.977.000,00	1	14.269.740	0,25	9.360.000	0,25	-		-		-	0,5	9.360.000	50,00	65,59	1,5	14.337.000,00	150,00	10,15	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5				1																			
		7	01	01	2	06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	82.884.469	1	10.045.000,00	1	12.000.000	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,75	-	75,00	0,00	1,75	10.045.000,00	175,00	12,12	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5				1																			
		7	01	01	2	06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	113.986.320	1	-	1	4.605.000	0,25	-	0,25	-		-		-	0,5	-	50,00	0,00	1,5	#VALUE!	150,00	#VALUE!	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5				1																			
		7	01	01	2	06	06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	97.884.469			1	26.000.000	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,75	-	75,00	0,00	0,75	#VALUE!	75,00	#VALUE!	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5				1																			
		7	**01**	**01**	**2**	**07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98,00**	**161.192.044**	**45,00**	**70.555.000,00**	**98,00**	**50.700.000**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**45,00**	**70.555.000,00**	**45,92**	**43,77**	**Kec. WH**	**B.Lampung**
		7	01	01	2	07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	82.884.469		10.150.000,00	1	-	0,25	-	0,25	-		-		-	0,5	-	50,00	0,00	0,5	10.850.000,00	50,00	13,09	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5				1																			
		7	01	01	2	07	06 Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	-		7.105.000,00	1	10.750.000	0,25	-	0,25	-		-		-	0,5	-	50,00	0,00	0,5	7.105.000,00	50,00	#DIV/0!	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5				1																			
		7	01	01	2	07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	78.307.575	1	52.600.000,00	1	39.950.000	0,25	-	0,25	-		-		-	0,5	-	50,00	0,00	1,5	52.600.000,00	150,00	67,17	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5				1																			

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
		7	01	01	2	08	**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	%	98,00	7.677.078.884	45,00	959.959.000,00	98,00	1.138.050.000	25,00	234.052.566	0,00	-	-	-	-	25,00	234.052.566	25,51	20,57	70,00	1.194.011.566,00	71,43	15,55	Kec. WH	B.Lampung
		7	01	01	2	08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	182.717.675	1	30.859.000,00	1	44.000.000	0,25	7.352.566,00	0,25	-	0,25	-	-	0,75	7.352.566	75,00	16,71	1,75	38.211.566,00	175,00	20,91	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5				1																	
		7	01	01	2	08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	7.494.361.209	1	929.100.000,00	1	1.094.050.000	0,25	226.700.000,00	0,25	-	0,25	-	-	0,75	226.700.000	75,00	20,72	1,75	1.155.800.000,00	175,00	15,42	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5				1																	
		7	**01**	**01**	**2**	**09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	%	**98,00**	**1.999.291.454**	**45,00**	**43.554.800,00**	**98,00**	**70.041.742**	**25,00**	**3.628.652**	**25,00**	-	-	-	-	**50,00**	**3.628.652**	**51,02**	**5,18**	**50,00**	**47.183.452,00**	**51,02**	**2,36**	**Kec. WH**	**B.Lampung**
		7	01	01	2	09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	231.869.309	1	24.200.000,00	1	33.670.000,00	0,25	2.400.000,00	0,25	-	0,25	-	-	0,75	2.400.000	75,00	7,13	1,75	26.600.000,00	175,00	11,47	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5																					
		7	01	01	2	09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1.148.832.747	1	15.000.000,00	1	27.450.000,00	0,25	1.228.652,00	0,25	-	-	-	-	0,5	1.228.652	50,00	4,48	1,5	16.228.652,00	150,00	1,41	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5																					
		7	01	01	2	09	05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebesl yang terpelihara	Tahun	1	13.814.078		#VALUE!	1	610.000,00	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,5	-	50,00	0,00	0,5	875.000,00	50,00	6,33	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10																					
		7	01	01	2	09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	13.814.078		875.000,00		730.000,00	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,5	-	#DIV/0!	0,00	0,5	875.000,00	50,00	6,33	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2																					
		7	01	01	2	09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	554.678.725	1	-	1	4.670.622,00	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,5	-	50,00	0,00	1,5	#VALUE!	150,00	#VALUE!	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																					
		7	01	01	2	09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	36.282.515	1	2.604.800,00	1	2.911.120,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	0,75	-	75,00	0,00	1,75	2.604.800,00	175,00	7,18	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7																					
																								Rata-Rata Capaian Kinerja		**#DIV/0!**	**16,67**			**646,05**	**#VALUE!**		
																								Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
		7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	%	**100,00**	**290.095.641**	**25,00**	**20.958.000,00**	**100,00**	**8.501.836**	**25,00**	-	**25,00**	-	-	-	-	**50,00**	-	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**20.958.000,00**	**50,00**	**7,22**	**Kec. WH**	**B.Lampung**
		7	**01**	**05**	**2**	**01**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	**100,00**	**290.095.641**	**25,00**	**20.958.000,00**	**100,00**	**8.501.836**	**25,00**	-	**25,00**	-	-	-	-	**50,00**	-	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**20.958.000,00**	**50,00**	**7,22**	**Kec. WH**	**B.Lampung**
		7	01	05	2	01	02 Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165.768.938	1	10.479.000,00	1	4.250.918,00	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,5	-	50,00	0,00	1,5	10.479.000,00	150,00	6,32	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	5																					
		7	01	05	2	01	08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124.326.703	1	10.479.000,00	20	4.250.918,00	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,5	-	2,50	0,00	1,5	10.479.000,00	150,00	8,43	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Dokumen	100																					
																								Rata-Rata Capaian Kinerja		**26,25**	**0,00**			**150,00**	**7,38**		
																								Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
		7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	%	**100,00**	**290.095.641**	**25,00**	**0,00**	**100,00**	**8.501.836**	**10,00**	-	**10,00**	-	-	-	-	**20,00**	-	**20,00**	**0,00**	**45,00**	-	**45,00**	**0,00**	**Kec. WH**	**B.Lampung**
		7	01	**06**	**2**	**01**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	%	**100,00**	**290.095.641**	**25,00**	**0,00**	**100,00**	**8.501.836**	**10,00**	-	**10,00**	-	-	-	-	**20,00**	-	**20,00**	**0,00**	**45,00**	-	**45,00**	**0,00**	**Kec. WH**	**B.Lampung**
		7	01	06	2	01	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165.768.938	1	0,00	1	4.250.918	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	0,75	-	75,00	0,00	1,75	-	175,00	0,00	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5				1																	
		7	01	06	2	01	09 Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124.326.703	1	0,00	1	4.250.918	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	0,75	-	75,00	0,00	1,75	-	175,00	0,00	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5				1																	
																								Rata-Rata Capaian Kinerja		**75,00**	**0,00**			**175,00**	**0,00**		
																								Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV												
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
2	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta Toleransi umat beragama**							**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100,00**				**100,00**										**90,00**		**90,00**		**90,00**		**90,00**			
		7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100,00**	**28.901.139.813**	**50,00**	**3.860.610.400,00**	**100,00**	**3.530.595.390**	**25,00**	**696.500.000**	**25,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**50,00**	**696.500.000**	**50,00**	**19,73**	**50,00**	**4.557.110.400,00**	**50,00**	**15,77**	**Kec. WH**	**B.Lampung**
		7	**01**	**02**	**2**	**01**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**200.282.722**	**50,00**	**29.000.000,00**	**100,00**	**29.572.091**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**50,00**	**-**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**29.000.000,00**	**50,00**	**14,48**	**Kec. WH**	**B.Lampung**
		7	01	02	2	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	200.282.722		29.000.000,00	1	29.572.091	0,25	-	0,25	-	0	-	0	-	0,5	-	50,00	0,00	0,5	29.000.000,00	50,00	14,48	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5				1																			
		7	**01**	**02**	**2**	**02**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**28.700.857.091**		**3.831.610.400,00**	**100,00**	**3.501.023.299**	**25,00**	**696.500.000**	**25,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**50,00**	**696.500.000**	**50,00**	**19,89**	**50,00**	**4.528.110.400,00**	**50,00**	**15,78**	**Kec. WH**	**B.Lampung**
		7	01	02	2	02	03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	28.700.857.091		3.831.610.400,00	1	3.501.023.299	0,25	696.500.000	0,25	-	0,25	-	0	-	0,75	696.500.000	75,00	19,89	0,75	4.528.110.400,00	75,00	15,78	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5				1																			
																								Rata-Rata Capaian Kinerja		**62,50**	**9,95**			**62,50**	**15,13**		
																								Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
		7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**100,00**	**7.748.076.601**		**513.279.200,00**	**100,00**	**683.939.181**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**		**-**		**-**	**50,00**	**-**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**513.279.200,00**	**50,00**	**6,62**	**Kec. WH**	**B.Lampung**
		7	**01**	**03**	**2**	**01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**100,00**	**7.419.579.551**		**513.279.200,00**	**100,00**	**652.545.361**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**		**-**		**-**	**50,00**	**-**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**513.279.200,00**	**50,00**	**6,92**	**Kec. WH**	**B.Lampung**
		7	01	03	2	01	03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	7.419.579.551		513.279.200,00	1	652.545.361	0,25	-	0,25	-	0,25	-		-	0,75	-	75,00	0,00	0,75	513.279.200,00	75,00	6,92	Kec. WH	B.Lampung
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5				1																			
		7	**01**	**03**	**2**	**06**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100,00**	**328.497.050**		**0,00**	**100,00**	**31.393.820**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**		**-**		**-**	**50,00**	**-**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**-**	**50,00**	**0,00**	**Kec. WH**	**B.Lampung**
		7	01	03	2	06	01 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	1750	32.849.705			1750	3.139.382	0,25	-	0,25	-		-		-	0,5	-	0,03	0,00	0,5	#VALUE!	0,03	#VALUE!	Kec. WH	B.Lampung
		7	01	03	2	06	02 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	1750	32.849.705			1750	3.139.382	0,25	-	0,25	-		-		-	0,5	-	0,03	0,00	0,5	#VALUE!	0,03	#VALUE!	Kec. WH	B.Lampung
		7	01	03	2	06	03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	1750	32.849.705			1750	3.139.382	0,25	-	0,25	-		-		-	0,5	-	0,03	0,00	0,5	#VALUE!	0,03	#VALUE!	Kec. WH	B.Lampung
		7	01	03	2	06	04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	1750	32.849.705			1750	3.139.382	0,25	-	0,25	-		-		-	0,5	-	0,03	0,00	0,5	#VALUE!	0,03	#VALUE!	Kec. WH	B.Lampung
		7	01	03	2	06	05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	1750	32.849.705			1750	3.139.382	0,25	-	0,25	-		-		-	0,5	-	0,03	0,00	0,5	#VALUE!	0,03	#VALUE!	Kec. WH	B.Lampung
		7	01	03	2	06	06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	1750	32.849.705			1750	3.139.382	0,25	-	0,25	-		-		-	0,5	-	0,03	0,00	0,5	#VALUE!	0,03	#VALUE!	Kec. WH	B.Lampung
		7	01	03	2	06	07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	1750	32.849.705			1750	3.139.382	0,25	-	0,25	-		-		-	0,5	-	0,03	0,00	0,5	#VALUE!	0,03	#VALUE!	Kec. WH	B.Lampung
		7	01	03	2	06	08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	1750	32.849.705			1750	3.139.382	0,25	-	0,25	-		-		-	0,5	-	0,03	0,00	0,5	#VALUE!	0,03	#VALUE!	Kec. WH	B.Lampung
		7	01	03	2	06	09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	1750	32.849.705			1750	3.139.382	0,25	-	0,25	-		-		-	0,5	-	0,03	0,00	0,5	#VALUE!	0,03	#VALUE!	Kec. WH	B.Lampung
		7	01	03	2	06	12 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	1750	32.849.705			1750	3.139.382	0,25	-	0	-		-		-	0,25	-	0,01	0,00	0,25	#VALUE!	0,01	#VALUE!	Kec. WH	B.Lampung
																								Rata-Rata Capaian Kinerja		**6,84**	**0,00**			**6,84**	**#VALUE!**		
																								Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		

NO.	SASARAN	KODE KLASIFIKASI						PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH S.D. KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-1)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PERANGKAT DAERAH TAHUN TERKAIT (TAHUN 2025) DAN(EVALUASI) (n-1)		REALISASI KINERJA Triwulan TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DINAS PERANGKAT DAERAH TAHUN TERKAIT (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DINAS PERANGKAT DAERAH TAHUN TERKAIT (TAHUN 2025)		REKONSILIASI KINERJA DAN ANGGARAN DINAS/UNIT PERANGKAT DAERAH S.D. TRIWULAN TERAKHIR (TAHUN 2025) (%)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DINAS PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN 2025 (%)		UNIT PENANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
																I		II		III		IV											
											K	RP/M/B	K	RP/M/B	K	RP/M/B	K	RP/M/B	K	RP/M/B	K	RP/M/B	K	RP/M/B	K	RP/M/B	K	RP/M/B	K	RP/M/B		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15) = (14)/K*100		(16) = (14)/T*100		(17) = (14)*1/100		(18)	
		7	01	04				Program Kerukunan Kemasyarakatan dan Kemerdekaan Bangsa	Persentase Lurah/Kepala Kelurahan masyarakat yang mengalami dalam menjaga kerukunan, kemerdekaan dan pemerintahan tingkat kelurahan	%	100.00	17,844,123,333		2,400,000,000	100.00	2,739,078,139	20.00	562,000,000	25.00	-		-		-	80.00	562,000,000	400.0	19.92	80.00	2,367,891,139.00	68.00	16.00	Sec. WS	Kelurahan
		7	01	04	3	01		Koordinasi Upaya Pemeliharaan Kerukunan dan Kemerdekaan Bangsa	Persentase kesadaran upaya pemeliharaan kerukunan dan kemerdekaan di wilayah kecamatan	%	100.00	17,844,123,333		2,400,000,000	100.00	2,739,078,139	20.00	562,000,000	25.00	-		-		-	80.00	562,000,000	400.0	19.92	80.00	2,367,891,139.00	68.00	16.00	Sec. WS	Kelurahan
		7	01	04	3	01	01	Koordinasi Upaya Kepatuhan Negara Kepatuhan Indonesia Semesta Nasional Indonesia dan nasional wawasan di wilayah kecamatan	Persentase kesadaran masyarakat dengan kelengkapan dan Upaya kecamatan	Tahun	1	17,739,916,551		2,301,000,000	1	2,711,439,139	0.25	562,000,000	0.25	-	0.25			-	0.75	562,000,000	75.0	19.99	0.75	2,367,891,139.00	75.00	16.67	Sec. WS	Kelurahan
									Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kepatuhan Negara Kepatuhan Indonesia Semesta Nasional Indonesia dan Nasional Wawasan di Wilayah Kecamatan	Laporan	6				1																			
		7	01	04	3	01	02	Pemantauan Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	persentase kesadaran kerukunan dan kemerdekaan	Tahun	1	123,179,000		50,000,000	1	31,921,139	0.25	-	0.25	-		-		-	0.5	-	50.00	0.00	0.5	22,781,139.00	50.00	17.17	Sec. WS	Kelurahan
									Jumlah Laporan Pemantauan Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6				1																			
																										Rata-Rata Capaian Kinerja		50.00	0.00			50.00	17.17		
																										Prediksi Kinerja		0%	0%			0%	0%		
																												2,040,906,132				84,871,983,007					
																													41.94		16.85		37.96	13.75		
																													0%		0%		0%	0%		
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SUB KEGIATAN				67,239,723,684				13,491,718,617		2,040,906,132		-		-		-											
								TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SUB KEGIATAN																												
								PERSENTASE SERAPAN SUB KEGIATAN																												

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat penyerapan kinerja:

Usulan hasil yang dipertahankan dalam rencana berikutnya

Usulan hasil yang dipertahankan dalam Renja PD tahun berikutnya

Catatan :

*) Nama OPD

**) Klasifikasi Internal Capaian Kinerja :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
1	76 s.d 100	Sangat Tinggi (ST)
2	51 s.d 75	Tinggi (T)
3	26 s.d 50	Sedang (S)
4	0 s.d 25	Rendah (R)
5	< 0	Sangat Rendah (SR)

Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai acuan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024-2026

Bandar Lampung, April 2025

KEPALA UPTD PENGELOLAAN PASAR

[illegible]

NIP [illegible]

TABEL 2.3

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN 2025

KOTA BANDAR LAMPUNG

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WAY HALIM

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-1)	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Renja PD Tahun Berjalan)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2024)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7/8) x 100	(10)	(11) = 6+8+10	(12) = (11/5) x 100
ISI DENGAN KODE URUSAN DAN NAMA URUSAN															
ISI DENGAN KODE BIDANG URUSAN DAN NAMA BIDANG URUSAN															
7	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98.00**		**98.00**	**90.00**	**91.84**	**98.00**	**98.00**	**98.00**
7	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**98.00**		**98.00**	**90.00**	**91.84**	**98.00**	**98.00**	**98.00**
7	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01				**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98.00**		**98.00**	**90.00**	**91.84**	**98.00**	**98.00**	**98.00**
7	01	2	1	1	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01	2	1	6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah laporan capaian kinerja	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01	2	1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**		**98.00**	**90.00**	**91.84**	**98.00**	**98.00**	**98.00**
7	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	persen	**98.00**		**98.00**	**90.00**	**91.84**	**98.00**	**98.00**	**98.00**
7	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7

7	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**90.00**		**98.00**	**90.00**	**91.84**	**98.00**	**98.00**	**98.00**
7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**90.00**		**98**	**90**	**91.84**	**98**	**98**	**100**
7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**persen**	**100**		**100**	**100**	**100.00**	**100**	**100**	**100**
7	01				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**		12	12	**100.00**	12	12	12.0
7	01				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01				Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nalonal	Jumlah Bimtek dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional oleh Babinsa/Babinkamtibmas	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**		100	100	**100.00**	100	100	100

7	01				**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01				fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01	2			**Program Penyelenggarsan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**persen**	100		**100**	**90**	**90.00**	**100**	**100**	**100**
7	01	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**persen**	100		**100**	**90**	**90.00**	**12**	**12**	**100**
7	01	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Presentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD, Tersedianya Laporan Keuangan, Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Kinerja OPD	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01	2	02		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	100		**100**	90	**90.00**	12	12	100
7	01	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Presentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**persen**	100		**100**	90	**90.00**	12	12	100
7	01	03	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**persen**	100		**100**	80	**80.00**	100	100	100
7	01	03	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peresentase pkk,lpm ,mtq dan sarana kegamaan di wilayah kecamatan	Bln	72		12	12	**100.00**	12	12	16.7
7	01	04			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**Bln**	**72**		**12**	**12**	**100.00**	**12**	**12**	**100**
7	01	04	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**persen**	100		**100**	**90**	**90.00**	**100**	**100**	**100**

7	01	04	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Presentase sinergitas masyarakat dogan forkopimda diwilayah kecamatan	Bln	72		12	12	100.00	12	12	16.7
					harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Bln	72					12	12	17

Bandar Lampung, 2025
PENGGUNA ANGGARAN

DARWONO, S.Sos., MM
PEMBINA
NIP. 19810301 200902 1 008

Catat
*) Nama OPD
Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2025 ini rencana Kerja OPD Kecamatan Way Halim mengalami perubahan anggaran dari sebelumnya secara keseluruhan pada rencana kerja OPD Kecamatan Way Halim yang terdiri dari 6 (Enam) Program, 13 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a) Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
      b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
   1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      d) Penyediaan Bahan Logistik
      e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c) Pemeliharaan Mebel

d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a) Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan pelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

a) Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

a) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

b) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

c. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

d) Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri

c) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

d) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

e) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

f) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

g) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

i) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4. Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum
   4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
      a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
      b) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
      a) fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional
      b) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah
   6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
      a) fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
      b) fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Dengan terbitnya peraturan baru yaitu Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru, selanjutnya rencana kerja Kecamatan Way Halim juga mengalami Perubahan. Format Perubahan untuk Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung yang telah disesuaikan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tertuang dalam Tabel 3.1.

TABEL 5.1

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
						KECAMATAN WAY HALIM									12.461.430.357,00	13.491.718.557,00	15.300.064.756,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									12.461.430.357,00	13.491.718.557,00	15.300.064.756,00	
	7	01				KECAMATAN									12.461.430.357,00	13.491.718.557,00	15.300.064.756,00	
254	**7**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**		**95%**		**95%**			**6.098.088.232,00**	**6.525.358.976,00**	**6.599.205.175,00**	
	7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**		**98%**		**98%**			**3.045.141,00**	**3.375.219,00**	**3.375.219,00**	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen			1.015.047,00	1.125.073,00	1.125.073,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan		1 Laporan			1.015.047,00	1.125.073,00	1.125.073,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		1 Laporan			1.015.047,00	1.125.073,00	1.125.073,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**		**100 %**		**100 %**			**4.812.770.357,00**	**5.182.622.307,00**	**5.146.502.307,00**	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		43 Orang/bulan		43 Orang/bulan			4.686.030.357,00	5.050.818.557,00	5.050.818.557,00	KECAMATAN WAY HALIM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen			126.740.000,00	131.803.750,00	95.683.750,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**		**98%**		**98%**			**53.017.973,00**	**80.569.708,00**	**87.318.048,00**	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			4.532.270,00	8.919.880,00	16.148.220,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			13.323.773,00	14.775.088,00	14.775.088,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			4.996.930,00	14.269.740,00	14.269.740,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			10.250.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket			3.915.000,00	4.605.000,00	4.605.000,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5 Laporan		5 Laporan			16.000.000,00	26.000.000,00	25.520.000,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**		**98 %**		**98 %**			**65.256.456,00**	**50.700.000,00**	**50.700.000,00**	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		12 Unit		12 Unit			14.954.400,00	0,00	6.350.000,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		12 Unit		12 Unit			7.700.000,00	10.750.000,00	4.400.000,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		12 Unit		12 Unit			42.602.056,00	39.950.000,00	39.950.000,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**		**95%**		**95%**			**1.078.100.000,00**	**1.138.050.000,00**	**1.235.625.000,00**	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		5 Laporan		5 Laporan			40.800.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5 Laporan		5 Laporan			1.037.300.000,00	1.094.050.000,00	1.191.625.000,00	1077625000 + 24000000 + 90000000
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Inventaris Kantor yang Terpelihara**		**98 %**		**98 %**			**85.898.305,00**	**70.041.742,00**	**75.684.601,00**	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit			37.020.000,00	33.670.000,00	33.670.000,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit		10 Unit			35.370.000,00	27.450.000,00	27.450.000,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		5 Unit		5 Unit			875.000,00	610.000,00	610.000,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 Unit		3 Unit			875.000,00	730.000,00	730.000,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			8.847.185,00	4.670.622,00	10.313.481,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit			2.911.120,00	2.911.120,00	2.911.120,00	KECAMATAN WAY HALIM
255	**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Way Halim)**		**100 %**		**100 %**			**3.530.291.706,00**	**3.530.595.390,00**	**4.578.845.390,00**	
	7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan undefined**		**100 %**		**100 %**			**29.411.782,00**	**29.572.091,00**		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan		1 Laporan			29.411.782,00	29.572.091,00	29.572.091,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 %		100 %			3.500.879.924,00	3.501.023.299,00		
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		5 Laporan		5 Laporan			3.500.879.924,00	3.501.023.299,00	4.549.273.299,00	3501023299+700000000+348250000
256	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Way Halim**		**85 Persen**		**85 Persen**			**697.304.204,00**	**683.939.181,00**	**618.939.181,00**	
	7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**		**90 %**		**90 %**			**597.291.154,00**	**652.545.361,00**	**602.545.361,00**	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		5 Laporan		5 Laporan			597.291.154,00	652.545.361,00	602.545.361,00	KECAMATAN WAY HALIM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
	7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**		**100%**		**100%**			**100.013.050,00**	**31.393.820,00**	**16.393.820,00**	
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1500 Keluarga		1500 Keluarga			10.001.305,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1500 Keluarga		1500 Keluarga			10.001.305,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1500 Keluarga		1500 Keluarga			10.001.305,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN WAY HALIM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		1500 Keluarga		1500 Keluarga			10.001.305,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		1500 Keluarga		1500 Keluarga			10.001.305,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1500 Keluarga		1500 Keluarga			10.001.305,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1500 Keluarga		1500 Keluarga			10.001.305,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		1500 Keluarga		1500 Keluarga			10.001.305,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		1500 Keluarga		1500 Keluarga			10.001.305,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		1500 Keluarga		1500 Keluarga			10.001.305,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN WAY HALIM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
257	**7**	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Way Halim**		**100Persen**		**100Persen**			**2.116.669.951,00**	**2.734.821.338,00**	**3.486.071.338,00**	
	7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**		**100 Persern**		**100 Persern**			**2.116.669.951,00**	**2.734.821.338,00**	**3.486.071.338,00**	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		5 Laporan		5 Laporan			2.093.881.930,00	2.711.429.215,00	3.462.679.215,00	2711429215+542000000+209250000
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		5 Laporan		5 Laporan			22.788.021,00	23.392.123,00	23.392.123,00	KECAMATAN WAY HALIM
258	**7**	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Way Halim**		**100 Persen**		**100 Persen**			**9.538.132,00**	**8.501.836,00**	**8.501.836,00**	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 Persen		100 Persen			9.538.132,00	8.501.836,00	8.501.836,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100 Orang		100 Orang			4,769,066.00	4,250,918.00	4,250,918.00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen			4,769,066.00	4,250,918.00	4,250,918.00	KECAMATAN WAY HALIM
259	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Way Halim		100 %		100 %			9,538,132.00	8,501,836.00	8,501,836.00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemarintahan Desa		Persentase fasilitasi,rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa persentase pembinaan dan pengawasan ditingkat kelurahan		100%		100%			9,538,132.00	8,501,836.00	8,501,836.00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			4,769,066.00	4,250,918.00	4,250,918.00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			4,769,065.00	4,250,918.00	4,250,918.00	KECAMATAN WAY HALIM
	JUMLAH														12,461,936,394.00	13,491,718,557.00	15,300,064,756.00	

Bandar Lampung, Juli 2025
Mengetahui,

SUNARWONO, S.Sos., MM
NIP. 19[illegible]

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Kecamatan Way Halim selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Kecamatan Way Halim juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Way Halim dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

PERUBAHAN RENCANA KERJA

KECAMATAN LANGKAPURA

TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	LandasanHukum	√			
	1.3	MaksuddanTujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN				
		Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/ Tahun 2025	√			
		Formulir E.81				
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 2025

CAMAT LANGKAPURA

ANDI SAPUTRA KESUMA, SE., MM.
NIP. 19790922 201001 1 010

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	FITRIYANTI, ST, M.Si	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025

CAMAT LANGKAPURA

ANDI SAPUTRA KESUMA, SE., MM.
NIP. 19790922 201001 1 010

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	**FITRIYANTI, ST, M.Si**	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	**ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M**	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan ii tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkatdaerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerahserta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, 2025

CAMAT LANGKAPURA

ANDI SAPUTRA KESUMA, SE., MM.
NIP. 19790922 201001 1 010

Diverifikasi : 2025		TandaTangan
1.	FITRIYANTI, ST, M.Si	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	
2.	ZELDAYATI NINGSIH, S.H.,M.M	
	Fungsional Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahKota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN 54
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR /IV.01/HK/2025 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Kecamatan Langkapura adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Langkapura yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan/implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Langkapura Tahun 2025, yaitu :

a. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah;
b. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Langkapura yang mengakibatkan adanya penambahan dan pengurangan kegiatan disamping adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Kecamatan Langkapura Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Langkapura Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 108);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
8. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 11);

25. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
26. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 47).
27. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

I.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kecamatan Langkapura Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Langkapura dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Langkapura Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Kecamatan Langkapura dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Langkapura Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Langkapura. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan capaian Kinerja. Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, yang dijabarkan dalam 6 Program, 13 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Realisasi Anggaran Belanja Operasi sampai dengan 30 Juni 2025 pada Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 4.033.871.706,00 atau 43,63% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp 9.271.839.750,00 Sedangkan realisasi kinerja rata-rata mencapai 48%. Evaluasi kinerja dan keuangan Renja Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.1.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Langkapura, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Wali Kota Bandar Lampung kepada Camat

di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Bandar Lampung;

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2025 ini rencana Kerja OPD Kecamatan Langkapura mengalami perubahan anggaran dari sebelumnya secara keseluruhan pada rencana kerja OPD Kecamatan Langkapura yang terdiri dari 6 (Enam) Program, 13 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a) Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
      b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
   1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      d) Penyediaan Bahan Logistik
      e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   1.4. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a) Pengadaan Mebel

b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c) Pemeliharaan Mebel
d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
a) Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan pelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
a) Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

a) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
b) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
c) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
d) Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
e) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
f) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
g) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
h) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
i) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
j) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4. Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

b) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional

b) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah

a) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di Kelurahan

b) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Kelurahan

Dengan terbitnya peraturan baru yaitu Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru, selanjutnya rencana kerja Kecamatan Langkapura juga mengalami Perubahan. Format Perubahan untuk Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung yang telah disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tertuang dalam Tabel 3.1.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Kecamatan Langkapura selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Kecamatan Langkapura juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Langkapura dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Formulir E. 81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LANGKAPURA KOTA BANDAR LAMPUNG
PERIODE PELAKSANAAN s.d. TRIWULAN III TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:
1. .....

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
Unsur kewilayahan																							
Kecamatan											**61.541.413.310,75**				**10.247.839.750,00**		**1.940.640.306,00**		**2.093.231.400,00**		############		**-**
Kecamatan Langkapura											**61.541.413.310,75**				**10.247.839.750,00**		**1.940.640.306,00**		**2.093.231.400,00**		############		**-**
1	**Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan**	**7**	**01**					**Indeks kepuasan masyarakat**	**persen**	**98,00**	**61.541.413.310,75**			**98,00**	**10.247.839.750,00**	**20,00**	**1.940.640.306,00**	**0**	**2.093.231.400,00**				
		7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98,00**	**36.583.644.810,59**			**98,00**	**5.640.591.207,00**	**20**	**1.317.640.306,00**	**0**	**1.133.731.400,00**		############		**-**
		7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**100**	**29.561.950.943,23**			**100,00**	**4.521.499.601,00**	**20**	**1.165.865.306,00**	**0**	**935.743.192,00**		**913.114.775,00**		**-**
		7	01	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1													
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	34	29.074.429.281,75			34	4.446.933.176	34	1.165.865.306,00	34	921.903.192,00	34	902.734.775,00	0	0,00
		7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1													
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	487.521.661,48			1	74.566.425	0,25	0,00	0,25	13.840.000,00	0,25	10.380.000,00	0	0,00
		7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**100**	**165.925.050,44**			**100,00**	**25.378.232,00**	**20**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		7	01	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1													
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	57.487.568,14			1	8.792.722,00	0,25	0,00	0		0	0,00	0	0,00
		7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1													
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	54.219.048,44			1	8.292.802,00	0,25	0,00	0		0	0,00	0	0,00

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA I
RENJA PERANGKAT DAERAH KI
PERIODE PELAKS/

Indikator dan target kinerja Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RKPD:
1. .....

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
Unsur kewilayahan																				
Kecamatan											**61.541.413.310,75**		**6.136.098.481,00**		**59,88%**		**6.136.098.481,00**		**9,97**	
Kecamatan Langkapura											**61.541.413.310,75**		**6.136.098.481,00**		**59,88%**		**6.136.098.481,00**		**9,97**	
1	**Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan**	**7**	**01**					**Indeks kepuasan masyarakat**	**persen**	**98,00**	**61.541.413.310,75**									
		7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98,00**	**36.583.644.810,59**	**20**	**3.599.598.481,00**	**20,41**	**63,82**	**20,00**	**3.599.598.481,00**	**20,41**	**9,84**	**Kec. Langkapura**
		7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**100**	**29.561.950.943,23**	**20**	**3.014.723.273,00**	**20,00**	**66,68**	**20,00**	**3.014.723.273,00**	**20,00**	**10,20**	**Kec. Langkapura**
		7	01	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1									
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	34	29.074.429.281,75	34	2.990.503.273,00	100,0	67,2	34	2.990.503.273,00	100	10,3	Kec. Langkapura
		7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1									
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	487.521.661,48	0,75	24.220.000,00	75,0	32,5	0,75	24.220.000,00	15,0	5,0	Kec. Langkapura
		7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**100**	**165.925.050,44**	**20**	**-**							**Kec. Langkapura**
		7	01	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1									
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	57.487.568,14	0,25	-	25,0	0,0	0,25	-	5,0	0,0	Kec. Langkapura
		7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1									
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	54.219.048,44	0,25	-	25,0	0,0	0,25	-	5,0	0,0	Kec. Langkapura

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
		7	01	01	2.01	0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1													
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	54.218.433,86			1	8.292.708,00	0,25	0,00	0		0	0,00	0	0,00
		7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98,00**	**376.461.583,09**			**98,00**	**57.166.407,00**	**20**	**0,00**	**0**	**-**		**10.976.000,00**		**-**
		7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1													
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	46.186.755,43			1	7.064.263,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0	0,00
		7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1													
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	128.947.319,20			1	19.722.489,00	0,25	0,00	0,25		0,25	0,00	0	0,00
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1													
		7	01	01	2.06	0003		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	51.810.005,85			1	7.924.339,00	0,25	0,00	0		0,5	10.976.000,00	0	0,00
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1													
		7	01	01	2.06	0004		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	73.226.557,51			1	11.200.000,00	0,25	0,00	0		0	0,00	0	0,00
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1													
		7	01	01	2.06	0005		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	69.727.871,05			1	10.664.876,00	0,25	0,00	0		0	0,00	0	0,00
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1													
		7	01	01	2.06	0008		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	6.563.074,05			1	590.440,00	0,25	0,00	0		0	0,00	0	0,00
		7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98**	**249.296.330**			**98**	**26.866.967,00**	**20**	**-**	**0**	**-**		**11.901.000**		**-**
		7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1													
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	96.467.718,84			2	14.754.735,00	0	-	0	-	0	-	0	-
		7	01	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1													
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	79.190.808,31			2	12.112.232,00	0	-	0	-	2	11.901.000	0	-
		7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1													
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	73.637.803,09			2	-	0	-	0	-	0	-	0	-

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
		7	01	01	2.01	0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1										
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	54.218.433,86	0,25	-							Kec. Langkapura
		7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98,00**	**376.461.583,09**	**20**	**10.976.000,00**	**20,4**	**19,2**	**20**	**10.976.000,00**	**20,4**	**2,9**	**Kec. Langkapura**
		7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1										
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	46.186.755,43	0,75	-	75,0	0,0	0,50	-	10,0	0,0	Kec. Langkapura
		7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1										
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	128.947.319,20	0,75	-	75,0	0,0	0,75	-	15,0	0,0	Kec. Langkapura
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1										
		7	01	01	2.06	0003		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	51.810.005,85	0,75	10.976.000,00	75,0	138,5	0,75	10.976.000,00	15,0	21,2	Kec. Langkapura
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1										
		7	01	01	2.06	0004		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	73.226.557,51	0,25	-	25,0	0,0	0,25	-	5,0	0,0	Kec. Langkapura
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1										
		7	01	01	2.06	0005		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	69.727.871,05	0,25	-	25,0	0,0	0,25	-	5,0	0,0	Kec. Langkapura
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1										
		7	01	01	2.06	0008		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	6.563.074,05	0,25	-	25,0	0,0	0,25	-	5,0	0,0	Kec. Langkapura
		7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98**	**249.296.330**	**20**	**11.901.000,00**	**20,4**	**44,3**	**20**	**11.901.000,00**	20,4	**4,8**	**Kec. Langkapura**
		7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1										
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	96.467.718,84	0	-	0,0	0,0	0	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura
		7	01	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1										
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	79.190.808,31	2	11.901.000,00	100,0	98,3	2	11.901.000,00	20,0	15,0	Kec. Langkapura
		7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1										
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	73.637.803,09	0	-	0,0	#DIV/0!	0	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
		7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**100**	**5.333.116.335,80**			**100**	**872.500.000,00**	**20**	**151.775.000,00**	**20**	**187.275.000,00**		**187.275.000,00**		**-**
		7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	92.840.813,99			1	14.200.000,00	0,25	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	5.240.275.521,81			1	858.300.000,00	0,25	151.775.000,00	0,25	187.275.000,00	0,25	187.275.000,00	0	0,00
		7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**896.894.568**			**98**	**137.180.000,00**	**20**	**-**	**0**	**10.713.208,00**		**24.960.000**		**-**
		7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1									10.713.208,00				
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	220.137.338,51			1	33.670.000,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	458.189.031,28			10	70.080.000,00	10,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	9.807.128,24			4	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
		7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	19.091.209,64			4	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	
		7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	6	163.452.137,30			1	25.000.000,00	0,25	0,00	0	0,00	0,7	24.960.000,00	0	0,00
		7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	26.217.722,82			1	4.010.000,00	0,25	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
		7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**100**	**5.333.116.335,80**	**40**	**526.325.000,00**	**40,0**	**60,3**	**40**	**526.325.000,00**	40,0	**9,9**	**Kec. Langkapura**
		7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1										
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	92.840.813,99	0,25	-	25,0	0,0	0,25	-	5,0	0,0	Kec. Langkapura
		7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1										
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	5.240.275.521,81	0,75	526.325.000,00	75,0	61,3	0,75	526.325.000,00	15,0	10,0	Kec. Langkapura
		7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**896.894.568**	**20,00**	**35.673.208,00**	**20,41**	**26,0**	**20**	**35.673.208,00**	20,4	**4,0**	**Kec. Langkapura**
		7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1			10.713.208,00							
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	220.137.338,51	1	-	100,0	0,0	1	-	100,0	0,0	Kec. Langkapura
		7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1										
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	458.189.031,28	10	-	100,0	0,0	10	-	100,0	0,0	Kec. Langkapura
		7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1										
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	9.807.128,24	0,5	-	12,5	0,0	0,5	-	12,5	0,0	Kec. Langkapura
		7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1										
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	19.091.209,64	0,5	-	12,5	0,0	0,5	-	12,5	0,0	Kec. Langkapura
		7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1										
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	6	163.452.137,30	0,95	24.960.000,00	95,0	99,8	0,95	24.960.000,00	15,8	15,3	Kec. Langkapura
		7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1										
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	26.217.722,82	0,25	-	25,0	0,0	1	-	100,0	0,0	Kec. Langkapura

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
		7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**persen**	**100**	**66.313.463,16**			**100**	**9.999.364,00**	**20**	**-**	**0**	**-**		**-**		**-**
		7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**66.313.463,16**			**100**	**9.999.364,00**	**20**	**-**	**0**	**-**		**-**		**-**
		7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1													
								Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5	33.156.731,58			1	4.999.682,00	0,25	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1													
								Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100	33.156.731,58			20	4.999.682,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**66.313.463,16**			**100**	**9.999.364,00**	**20**	**-**	**0**	**-**		**-**		**-**
		7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**persen**	**100**	**66.313.463,16**			**100**	**9.999.364,00**	**20**	**-**	**0**	**-**		**-**		**-**
		7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1													
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	33.156.731,58			1	4.999.682,00	0,25	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1													
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	33.156.731,58			1	4.999.682,00	0,25	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan	**7**	**01**					**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**															
		7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**persen**	**100**	**10.800.943.011,69**			**100**	**2.101.167.175,00**	**20**	**315.000.000**	**20**	**497.500.000,00**		**315.000.000,00**		**-**

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
		7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**persen**	**100**	**66.313.463,16**	**20**	**-**	**20,0**			**-**			**Kec. Langkapura**
		7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**66.313.463,16**	**20**	**-**	**20,0**			-			**Kec. Langkapura**
		7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1										
								Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5	33.156.731,58	0,25	-	25,0	0,0	0,25	-	5,0	0,0	Kec. Langkapura
		7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1										
								Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100	33.156.731,58	0	-	0,0	0,0	0	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura
		7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**66.313.463,16**		**-**				**-**			**Kec. Langkapura**
		7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**persen**	**100**	**66.313.463,16**		**-**				-			**Kec. Langkapura**
		7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1										
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	33.156.731,58	0,25	-	25,0	0,0	0,25	-	5,0	0,0	Kec. Langkapura
		7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1										
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	33.156.731,58	0,25	-	25,0	0,0	0,25	-	5,0	0,0	Kec. Langkapura
	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan	**7**	**01**					**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**												
		7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**persen**	**100**	**10.800.943.011,69**	**40**	**1.127.500.000,00**	**40,0**	**53,7**	**40**	**1.127.500.000**	40,0	**10,4**	**Kec. Langkapura**

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
		7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**256.694.594,32**			**100**	**38.706.811,00**	**20**	**-**	**20**	**25.000.000,00**		**-**		**-**
		7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1													
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	256.694.594,32			1	38.706.811,00	0,25		0	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00
		7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**10.544.248.417,37**			**100**	**2.062.460.364,00**	**25**	**315.000.000**	**0**	**472.500.000,00**		**315.000.000,00**		**-**
		7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1													
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5	10.544.248.417,37			1	2.062.460.364,00	0,25	315.000.000	0	472.500.000,00	0	315.000.000,00	0	0,00
		7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**persen**	**80**	**3.548.772.803,72**			**80**	**478.000.000,00**	**10**	**-**	**0**	**-**	**0**	**331.000.000,00**	**0**	**-**
		7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**persen**	**80**	**3.515.613.963,22**			**80**	**473.000.000,00**	**10**	**-**	**0**	**-**	**0**	**331.000.000,00**	**0**	**-**
		7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase PKK, LPM, MTQ dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1													
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	3.515.613.963,22			1	473.000.000,00	0,25	0,00	0	0,00	0.40	331.000.000,00	0	0,00
		7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80**	**33.158.840,50**			**80**	**5.000.000,00**	**10**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**		**-**
		7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5000	3.315.884,05			1250	500.000,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
		7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**256.694.594,32**	**40**	**25.000.000,00**	**40,0**	**64,6**	**40**	**25.000.000,00**	40,0	**9,7**	**Kec. Langkapura**
		7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1										
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	256.694.594,32	0,25	25.000.000,00	25,0	64,6	0,25	25.000.000,00	5,0	9,7	Kec. Langkapura
		7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**10.544.248.417,37**	**25**	**1.102.500.000,00**	**25,0**	**53,5**	**25**	**1.102.500.000,00**	25,0	**10,5**	**Kec. Langkapura**
		7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1										
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5	10.544.248.417,37	0,25	1.102.500.000,00	25,0	53,5	0,25	1.102.500.000,00	5,0	10,5	Kec. Langkapura
		7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**persen**	**80**	**3.548.772.803,72**	**10**	**331.000.000**	**12,5**	**69,2**	**10**	**331.000.000**	12,5	**9,3**	**Kec. Langkapura**
		7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**persen**	**80**	**3.515.613.963,22**	**10**	**331.000.000**	**12,5**	**70,0**	**10**	**331.000.000,00**	12,5	**9,4**	**Kec. Langkapura**
		7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase PKK, LPM, MTQ dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1										
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	3.515.613.963,22	#VALUE!	331.000.000,00	#VALUE!	70,0	#VALUE!	331.000.000,00	#VALUE!	9,4	Kec. Langkapura
		7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80**	**33.158.840,50**	**10**	**-**	**12,5**	**0,0**	**10**	**-**	12,5	**0,0**	**Kec. Langkapura**
		7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5000	3.315.884,05	0,25	-	0,0	0,0	0,25	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
		7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5000	3.315.884,05			1250	500.000,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5000	3.315.884,05			1250	500.000,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5000	3.315.884,05			1250	500.000,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	5000	3.315.884,05			1250	500.000,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5000	3.315.884,05			1250	500.000,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5000	3.315.884,05			1250	500.000,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5000	3.315.884,05			1250	500.000,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5000	3.315.884,05			1250	500.000,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5000	3.315.884,05			1250	500.000,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal**	**persen**	**100**	**10.475.425.758,43**			**100**	**2.008.082.640,00**	**10**	**308.000.000**	**0**	**462.000.000,00**	**0**	**308.000.000,00**	**0**	**-**
		7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**persen**	**100**	**10.475.425.758,43**			**100**	**2.008.082.640,00**	**10**	**308.000.000**	**0**	**462.000.000**	**0**	**308.000.000**	**0**	**-**

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
		7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5000	3.315.884,05	0,25	-	0,0	0,0	0,25	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura
		7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5000	3.315.884,05	0,25	-	0,0	0,0	0,25	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura
		7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5000	3.315.884,05	0,25	-	0,0	0,0	0,25	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura
		7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	5000	3.315.884,05	0,25	-	0,0	0,0	0,25	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura
		7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5000	3.315.884,05	0,25	-	0,0	0,0	0,25	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura
		7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5000	3.315.884,05	0,25	-	0,0	0,0	0,25	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura
		7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5000	3.315.884,05	0,25	-	0,0	0,0	0,25	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura
		7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5000	3.315.884,05	0,25	-	0,0	0,0	0,25	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura
		7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5000	3.315.884,05	0,25	-	0,0	0,0	0,25	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura
		7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal**	**persen**	**100**	**10.475.425.758,43**	**10**	**1.078.000.000**	**10,0**	**53,7**	**10**	**1.078.000.000**	10,0	**10,3**	**Kec. Langkapura**
		7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**persen**	**100**	**10.475.425.758,43**	**10**	**1.078.000.000,00**	**10,0**	**53,7**	**10**	**1.078.000.000,00**	**10,0**	**10,3**	**Kec. Langkapura**

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH
								Persentase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1													
		7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	10.321.746.078,69			1	1.984.909.381,00	0,25	308.000.000	0	462.000.000,00	0	308.000.000,00	0	0,00
								persentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1													
		7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	153.679.679,74			1	23.173.259,00	0,25	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				61.541.413.310,75		-		10.247.839.750,00		1.940.640.306,00		2.093.231.400,00		############		-
							TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

Catatan :

*) Nama OPD

**) Klasifikasi Interval Capaian Kinerja :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi (ST)
2	76 ≤ 90	Tinggi (T)
3	66 ≤ 75	Sedang (S)
4	51 ≤ 65	Rendah (R)
5	≤ 50	Sangat Rendah (SR)

Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

NO.	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(14)		(15) = (14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) = (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
								Persentase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1										
		7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	10.321.746.078,69	0,25	1.078.000.000,00	25,0	54,3	0,25	1.078.000.000,00	5,0	10,4	Kec. Langkapura
								persentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1										
		7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	153.679.679,74	0,25	-	25,0	0,0	0,25	-	5,0	0,0	Kec. Langkapura
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											**61.541.413.310,75**		**6.136.098.481,00**				**6.136.098.481,00**			
TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														#DIV/0!	**xxx**			**xxx**	**xxx**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														#DIV/0!	**xxx**			**xxx**	**xxx**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

Bandar Lampung, 02 September 2025
CAMAT LANGKAPURA

ANDI SAPUTRA KESUMA, SE., MM.
PEMBINA
NIP. 19790922 201001 1 010

Catatan :

*) Nama OPD

**) Klasifikasi Interval Capaian Kinerja :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi (ST)
2	76 ≤ 90	Tinggi (T)
3	66 ≤ 75	Sedang (S)
4	51 ≤ 65	Rendah (R)
5	≤ 50	Sangat Rendah (SR)

Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

TABEL 3.1

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						KECAMATAN LANGKAPURA									8.321.511.776,00	9.358.833.176,00	10.247.839.750,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									8.321.511.776,00	9.358.833.176,00	10.247.839.750,00	
	7	01				KECAMATAN									8.321.511.776,00	9.358.833.176,00	10.247.839.750,00	
260	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	4.891.032.770,00	5.595.467.489,00	5.640.591.207,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	26.378.533,00	25.378.232,00	25.378.232,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.792.733,00	8.792.722,00	8.792.722,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.792.900,00	8.292.802,00	8.292.802,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.792.900,00	8.292.708,00	8.292.708,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3.910.811.776,00	4.521.499.601,00	4.521.499.601,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ bulan	34 Orang/ bulan	34 Orang/ bulan	34 Orang/ bulan	34 Orang/ bulan	3.840.611.776,00	4.446.933.176,00	4.446.933.176,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	70.200.000,00	74.566.425,00	74.566.425,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	98%	98%	98%	98%	57.576.823,00	57.579.789,00	57.166.407,00	KECAMATAN LANGKAPURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.064.730,00	7.064.263,00	7.064.263,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	19.722.549,00	19.722.489,00	19.722.489,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.924.610,00	7.924.339,00	7.924.339,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.664.934,00	10.664.876,00	10.664.876,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.003.822,00	590.440,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	33.635.638,00	38.129.867,00	26.866.967,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	11.627.558,00	14.754.735,00	14.754.735,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	11.000.000,00	12.112.232,00	12.112.232,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	11.008.080,00	11.262.900,00	-	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	95%	95%	95%	95%	719.700.000,00	815.700.000,00	872.500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	705.500.000,00	801.500.000,00	858.300.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	142.930.000,00	137.180.000,00	137.180.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	33.670.000,00	33.670.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	70.080.000,00	70.080.000,00	70.080.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	6.410.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
261	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Langkapura))	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Langkapura))	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.629.966.879,00	1.628.667.175,00	2.101.167.175,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	38.706.840,00	38.706.811,00	38.706.811,00	KECAMATAN LANGKAPURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	38.706.840,00	38.706.811,00	38.706.811,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.591.260.039,00	1.589.960.364,00	2.062.460.364,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.591.260.039,00	1.589.960.364,00	2.062.460.364,00	KECAMATAN LANGKAPURA
262	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan langkapura	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan langkapura	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	531.385.260,00	535.117.144,00	478.000.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	481.385.260,00	530.117.144,00	473.000.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	481.385.260,00	530.117.144,00	473.000.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
263	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Langkapura	Presentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Langkapura	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	1.245.127.143,00	1.579.582.640,00	2.008.082.640,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	1.245.127.143,00	1.579.582.640,00	2.008.082.640,00	KECAMATAN LANGKAPURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.221.952.971,00	1.556.409.381,00	1.984.909.381,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	23.174.172,00	23.173.259,00	23.173.259,00	KECAMATAN LANGKAPURA
264	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11.999.862,00	9.999.364,00	9.999.364,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11.999.862,00	9.999.364,00	9.999.364,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	5.999.931,00	4.999.682,00	4.999.682,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.999.931,00	4.999.682,00	4.999.682,00	KECAMATAN LANGKAPURA
265	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11.999.862,00	9.999.364,00	9.999.364,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11.999.862,00	9.999.364,00	9.999.364,00	KECAMATAN LANGKAPURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.999.931,00	4.999.682,00	4.999.682,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.999.931,00	4.999.682,00	4.999.682,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	J U M L A H														**8.321.511.776,00**	**9.358.833.176,00**	**10.247.839.750,00**	

Bandar Lampung, 01 Juli 2025

CAMAT LANGKAPURA

CAMAT LANGKAPURA

ANDI SAPUTRA KESUMA, SE., MM.

NIP. 19790922 201001 1 010

TABEL TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN 2025
KOTA BANDAR LAMPUNG

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LANGKAPURA

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (Renja PD Tahun Berjalan)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2025)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegaiatn						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%) (8/7)*100		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7/8) x 100	(10)	(11) = 6+8+10	(12) = (11/5) x 100
UNSUR KEWILAYAHAN															
KECAMATAN															
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98**	**98**	**98**	**85**	**87**	**98**	**90**	**92**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**98**	**90**	**98**	**85**	**87**	**98**	**90**	**92**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	40	40	40	40	**100**	40	40	**100**
					Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	bln	72	12						
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bln	72	12						
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98**	**85**	**98**	**85**	**87**	**98**	**90**	**92**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Bappeda	Bln	72	12						
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5,00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah laporan capaian kinerja	Bln	72	12						
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	Bln	72	12						

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (Renja PD Tahun Berjalan)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2025)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegaiatn						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%) (8/7)*100		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7/8) x 100	(10)	(11) = 6+8+10	(12) = (11/5) x 100
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98**	**85**	**98**	**90**	**92**	**98**	**98**	**98**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bln	72	12						
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bln	72	12						
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bln	72	12						
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bln	72	12						
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bln	72	12						
7	01	01	2.06	0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bln	72	12						
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98**	**85**	**98**	**90**	**92**	**98**	**98**	**98**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	**1**	1	1	**100**	**1**	**3**	**30**
					Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur	Bln	72	12						
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	**1**	1	1	**100**	**1**	**3**	**30**
					Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Bln	72	12						

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (Renja PD Tahun Berjalan)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2025)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegaiatn						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%) (8/7)*100		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7/8) x 100	(10)	(11) = 6+8+10	(12) = (11/5) x 100
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	**1**	1	1	**100**	**1**	**3**	**30**
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Bln	72	12						
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**98**	**80**	**98**	**80**	**82**	**98**	**98**	**98**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bln	72	12						
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bln	72	12						
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**80**	**98**	**80**	**82**	**98**	**98**	**98**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	**100**	**1**	**1**	**100**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bln	72	12						
7	01	02	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	10	10	**100**	**1**	**10**	**100**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bln	72	12						
7	01	02	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	1	1	1	**100**	**1**	**2**	**50**
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Bln	72	12						

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (Renja PD Tahun Berjalan)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2025)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegaiatn						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%) (8/7)*100		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7/8) x 100	(10)	(11) = 6+8+10	(12) = (11/5) x 100
7	01	02	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	1	1	**100**	**1**	**1**	**100**
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bln	72	12						
7	01	02	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1	1	1	**100**	**1**	**2**	**33**
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bln	72	12						
7	01	02	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	**100**	**1**	**1**	**100**
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Bln	72	12						
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**persen**	**100**	**90**	**100**	**85**	**85**	**100**	**85**	**85**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**90**	**100**	**85**	**85**	**100**	**85**	**85**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	**Dokumen**	5	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan di tingkat kecamatan	Bln	72	12						
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	**orang**	100	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**3**
					Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Bimtek dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional oleh Babinsa/ Babinkamtibmas	Bln	72	12						
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**90**	**95**	**85**	**89**	**100**	**85**	**85**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (Renja PD Tahun Berjalan)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2025)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegaiatn						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%) (8/7)*100		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7/8) x 100	(10)	(11) = 6+8+10	(12) = (11/5) x 100
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**persen**	**100**	**90**	**95**	**85**	**89**	**100**	**85**	**85**
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Dokumen**	5	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan di kelurahan	Bln	72	12						
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	**Dokumen**	5	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Bln	72	12						
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**persen**	**100**	**90**	**100**	**80**	**80**	**100**	**80**	**80**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**90**	**100**	**80**	**80**	**100**	**80**	**80**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5,00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Bln	72	12						
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**90**	**100**	**80**	**80**	**100**	**80**	**80**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (Renja PD Tahun Berjalan)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2025)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegaiatn						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%) (8/7)*100		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7/8) x 100	(10)	(11) = 6+8+10	(12) = (11/5) x 100
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5,00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Bln	72	12						
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**persen**	**100**	**90**	**100**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**persen**	**100**	**90**	**100**	**50**	**50**	**80**	**80**	**80**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase PKK, LPM, MTQ dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Bln	72	12						
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100,00**	**90**	**100**	**50**	**50**	**80**	**80**	**80**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5000	0,25	0,25	1250	0,5	1250	0,5	0,5
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5000	0,25	0,25	1250	0,5	1250	0,5	0,5

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (Renja PD Tahun Berjalan)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2025)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegaiatn						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%) (8/7)*100		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7/8) x 100	(10)	(11) = 6+8+10	(12) = (11/5) x 100
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5000	0,25	0,25	1250	0,5	1250	0,5	0,5
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5000	0,25	0,25	1250	0,5	1250	0,5	0,5
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	5000	0,25	0,25	1250	0,5	1250	0,5	0,5
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5000	0,25	0,25	1250	0,5	1250	0,5	0,5
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5000	0,25	0,25	1250	0,5	1250	0,5	0,5
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5000	0,25	0,25	1250	0,5	1250	0,5	0,5
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5000	0,25	0,25	1250	0,5	1250	0,5	0,5

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (Renja PD Tahun Berjalan)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2025)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatn						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%) (8/7)*100		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7/8) x 100	(10)	(11) = 6+8+10	(12) = (11/5) x 100
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5000	0,25	0,25	1250	0,5	1250	0,5	0,5
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal**	**persen**	**100**	**90**	**100**	**95**	**95**	**100**	**90**	**90**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**persen**	**100**	**90**	**100**	**95**	**95**	**100**	**90**	**90**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat degan forkopimda di wilayah kecamatan	Bln	72	12						
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	1	1	1	**100**	**1**	**3**	**60**
					Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Bln	72	12						

Mengetahui:

ANDI SAPUTRA KESUMA, SE., MM.
CAMAT LANGKAPURA

PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	√			
	2.1	Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/tahun 2025				
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan,Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 2025
Kepala Badan KESBANGPOL
Kota Bandar Lampung

PARYANTO, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651001 198602 1 003

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	**(Dra. Rr. Diah Sulistiorini, M.Si)** Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)	
2	**(KOMSIYAH, S.Sos., M.M)** (Perencana Ahli Muda)	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.	√			
4.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025
Kepala Badan KESBANGPOL
Kota Bandar Lampung

PARYANTO, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651001 198602 1 003

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	**(Dra. Rr. Diah Sulistiorini, M.Si)** Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)	
2	**(KOMSIYAH,S.Sos.,M.M)** (Perencana Ahli Muda)	

Mengetahui,
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten / kota telah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat DaerahKabupaten /Kota	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	**(Dra. Rr. Diah Sulistiorini, M.Si)** Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)	
2	**(KOMSIYAH.S.Sos,M.M)** (Perencana Ahli Muda)	

Mengetahui,
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang 1
1.2.Landasan Hukum..... 3
1.3.Maksud dan Tujuan 6
1.4.Sistematika Penulisan 6

BAB II PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA OPD
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Kerja OPD sampai dengan triwulan I tahun 2025.....10

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN 6
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616/IV.01/HK/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Walikota Bandar Lampung Tahun 2025-2029, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu :

"BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT".

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 9 (Sembilan) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. **Bandar Lampung** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas –batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang

2. **Sehat** : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah;
3. **Cerdas** : Sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efesien dan membrikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya;
4. **Beriman :** Sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia;
5. **Berbudaya** : Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor;
6. **Nyaman** : Kondisi Kota Bandar Lampung dengan Lingkungan Hidup yang Baik mendukung kehidupan masyarakat Kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat.
7. **Unggul** : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
8. **Berdaya Saing** : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
9. **Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat** : Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan

secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah dalam hal Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Dengan demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-4 (Empat) dalam RPJMD Tahun 2021–2029 yaitu ***"Mengembangkan Masyarakat Agamis Berbudaya dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius"***

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusun Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5.-1317 tentang Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 23);
18. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung;
19. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
20. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan

pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025.
2. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
3. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
4. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan Fpenganggaran tahunan Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II
PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA OPD

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Sebagai keberlanjutan pembangunan maka dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dirumuskan dengan mendasarkan pada evaluasi Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi, dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan serta isu-isu penting yang harus disikapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung pada Tahun 2025.

Pada tahun anggaran 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung melaksanakan Politik dan Pemerintahan Umum. Dalam melaksanakan urusan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung melaksanakan 6 Program, 11 Kegiatan dan 37 Sub-Kegiatan.

Program dan Kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.10.660.194.053,- terkait instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri dalam Negri Nomor 900/833/SJ tentang Efesiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggran Pendapatan dan Belanja pada Badan Kesbangpol Menjadi Rp. 9.544.191.814,- Sesuai Asta Cita Presiden, Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Visi dan Misi

Walikota dan Wakil Walikota dan Rapat Koordinasi Jaksa Agung Muda Bidang intelejen 21 mei 2025 dalam rangka pencegahan ATGH Radikalisme dan Terorisme Anggaran Belanja Bertambah RP.545.120.110,00 Anggaran RKA Perubahan Sebesar Rp.10.089.311.924,00 rincian lebih lanjut tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung sampai dengan Bulan Mai Tahun 2025 tersaji dalam lampiran Formulir E.81. Sebagai berikut :

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Renja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung
Pelaksanaan Triwulan I Sampai Mei Tahun 2025

URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						I		II		III		IV										
		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
4	5	8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14+8)		17 = (16/7)*100		12
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			**16.118.308.924**		**10.660.194.053,**		**724.252.860,00**				-		-		**724.252.860,**		**6,79**		**16.842.561.784,67**		**10,38**	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**16.118.308.924,67**		**10.660.194.053,00**		**724.252.860,00**				-		-		**724.252.860,00**		**6,79**		**16.842.561.784,67**		**10,38**	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			**16.118.308.924,67**		**10.660.194.053,00**		**724.252.860,00**				-		-		**724.252.860,00**		**6,79**		**16.842.561.784,67**		**10,38**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**98,00**	**7.239.641.441**	**98,00**	**3.927.306.959**	**18,44**	**724.252.860**							**50,00**	**724.252.860**		**18,44**		**7.963.894.301,00**		**49,30**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**	**100,00**	**99.349.580**	**100,00**	**50.413.699**	-	-							-	-		-		**99.349.580,00**		-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	4,00	26.397.441	-	-							-	-		-		-			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LPJ, LKIP, LPPD, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta TEPRA Sekretariat Daerah	5,00	99.349.580		24.016.258		-							-	-		-		**99.349.580,00**		-	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			5,00		-													-			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100,00**	**6.227.101.944**	**100,00**	**3.226.198.441**	**20,19**	**651.352.860**							20,19	**651.352.860**		**20,19**		**6.878.454.804,00**		**49,97**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Badan KESBANGPOL yang	14,00	5.959.881.944		3.065.758.441		623.752.860							20,35	**623.752.860**		**20,35**		**6.583.634.804,00**		4,74	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			25,00		25,00													-			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Honor Pengelola Administrasi Keuangan	12,00	267.220.000		160.440.000		27.600.000							17,20	**27.600.000**		**17,20**		**294.820.000,00**		4,46	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1,00		1,00													-			

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional**	**100,00**	**2.592.900**	-	-	-	-	-						-			**2.592.900,00**		**14,82**	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembayaran Jasa Pemeliharaan dan	12,00	2.592.900		-	-	-								-			**2.592.900,00**		-	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang			-		-									-			-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**100,00**	**277.610.575**	**98,00**	**259.074.819**	-	-							-	-			**277.610.575,00**		**32,33**	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,00	63.156.227	1,00	43.915.148									-	-		-	**63.156.227,00**		48,58	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12,00	16.658.946	1,00	7.274.915	-	-							-	-		-	**16.658.946,00**		55,53	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Konsumsi	12,00												-	-		-	**41.302.500,00**		-	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		41.302.500	1,00	27.500.000	-	-	-										-			
Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	12,00	32.498.183	1,00	15.334.960		-	-						-	-		-	**32.498.183,00**		36,11	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	12,00				-								-	-		-	**17.000.000,00**		-	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		17.000.000	1,00	7.200.000		-											-			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjaanan Dinas ke Luar Daerah	12,00				-								-	-		-	**106.994.719,00**		-	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		106.994.719	1,00	59.849.796	-	-											-			
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan				1,00	98.000.000		-							-	-		-	-			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	-	**313.345.200**	**98,00**	**175.000.000**	**41,66**	**72.900.000**							41,66	**72.900.000**		**41,66**	**386.245.200,00**		**68,97**	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan													47,63	**71.450.000**		**47,63**	**71.450.000,00**		73,08	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6,00	140.492.900	6,00	150.000.000	6,00	71.450.000											**140.492.900,00**			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6,00	172.852.300	6,00	25.000.000	6,00	1.450.000							5,80	**1.450.000**		**5,80**	**174.302.300,00**		64,56	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan**	**91,67**	**183.834.618**	**100,00**	**116.000.000**	-	-							-	-		-	**183.834.618,00**		**41,36**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Biaya	12,00												-	-		-	**34.834.618,00**		-	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang		34.834.618	1,00	20.000.000	-	-											-			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	10,00												-	-		-	**149.000.000,00**		-	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		149.000.000	1,00	96.000.000	-	-											-			

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98,00**	**135.806.624**	**98,00**	**100.620.000**	-	-							-	-		-		**135.806.624,00**	**45,51**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1,00	97.254.793	1,00	40.920.000	-	-							-	-		-		**97.254.793,00**	48,34
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1,00	18.011.831	1,00	49.470.000	-	-							-	-		-		**18.011.831,00**	48,42
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1,00	20.540.000	5,00	10.230.000	-	-							-	-		-		**20.540.000,00**	34,23
Rata-Rata Capaian															-				-	**49,30**
Predikat Kinerja															-				-	**SR**
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN**	**66,67**	**336.568.540**	**70,00**	**1.157.095.600**	-	-							-	-		-		**336.568.540,00**	**7,92**
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**66,67**	**336.568.540**	**70,00**	**1.157.095.600**	-	-							-	-		-		**336.568.540,00**	**7,92**
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terciptanya Forum Keberagaman Suku dalam Bingkai NKRI di Kota Bandar Lampung	1,00												-	-		-		**58.923.540,00**	-
	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		58.923.540	1,00	60.765.126	-	-												-	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	-	-	60,00	64.460.172	-	-							-	-		-		-	-
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Koordinasi Pemerintah dengan TNI dalam Revolusi Mental	20,00												-	-		-		**277.645.000,00**	-
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan		277.645.000	1.000,00	140.555.189	-	-								-				-	
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	-	-	34,00	891.315.113	-	-							-	-		-		-	
Rata-Rata Capaian															-				-	**7,92**
Predikat Kinerja															-				-	**SR**

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN	**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU**	**100,00**	**3.096.589.830**	**70,00**	**2.312.326.425**	-								-	-		-		**3.096.589.830,00**		**2,59**	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**	**100,00**	**3.096.589.830**	**70,00**	**2.312.326.425**	-								-	-		-		**3.096.589.830,00**		**2,59**	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta		-	100,00	212.112.280	-	-							-	-		-		-		-	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi														-				-		
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Parpol yg Menerima Bantuan Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan	11,00	3.096.589.830		1.896.277.582									-	-		-		**3.096.589.830,00**		0,05	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi			1,00		-											**#DIV/0!**		-			
Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Paskibraka		-	3,00	203.936.563	-	-							-	-		-		-		-	
Rata-Rata Capaian Kinerja															-				-		**2,59**	
Predikat Kinerja															-				-		**SR**	

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**PERSENTASE ORMAS YANG DIBINA**	**100,00**	**3.251.246.180**	**50,00**	**2.094.545.658**	-	-							-	-		-		**3.251.246.180,00**		**47,71**	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Laporan Keberadaan & Pembinaan ORMAS**	**100,00**	**3.251.246.180**	**50,00**	**2.094.545.658**	-	-							-	-		-		**3.251.246.180,00**		**119,19**	
Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	1,00	2.814.045.000	1,00	2.043.225.356	-	-							-	-		-		**2.814.045.000,00**		34,43	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	6,00	384.695.180	-	-	-	-								-				**384.695.180,00**			
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100,00	52.506.000	1,00	51.320.302	-	-							-	-		-		**52.506.000,00**		5,15	
Rata-Rata Capaian															-				-		**47,71**	
Predikat Kinerja															-				-	**SR**	**SR**	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**PERSENTASE PENANGANAN KONFLIK KEAGAMAAN DAN RAS**	**66,67**	**825.425.180**	**100,00**	**602.872.519**	-	-								-				**825.425.180,00**		**26,44**	
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani**	**66,67**	**825.425.180**	**100,00**	**602.872.519**	-	-							-	-		-		**825.425.180,00**		**26,44**	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	50,00	42.300.000	100,00	382.683.369	-	-							-	-		-		**42.300.000,00**		8,06	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	-	-	100,00	52.989.250	-	-							-	-		-		-		-	

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	1,00	783.125.180	1,00	167.199.900	-	-							-	-		-		**783.125.180,00**		44,19	
Rata-Rata Capaian Kinerja															-				-		**26,44**	
Predikat Kinerja															-				-	**SR**	**SR**	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**PERSENTASE KONFLIK SOSIAL YANG TERSELESAIKAN**	**100,00**	**1.358.062.587**	**80,00**	**566.046.892**	-	-							-	-		-		**1.358.062.587,00**		**19,11**	
	PERSENTASE SDM YANG MEMPUNYAI KEMAMPUAN DETEKSI DINI, CEGAH DINI DAN TANGKAL DINI TERHADAP KERAWANAN KONFLIK SOSIAL	**88,89**		**60,00**		-													-			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Konflik Sosial yang terselesaikan dan Kemampuan SDM dalam Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial**	**91,67**	**1.374.225.337**	**70,00**	**566.046.892**	-	-							-	-		-		**1.374.225.337,00**		**18,59**	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1,00	115.545.471	1,00	82.859.707	-	-							-	-		-		**115.545.471,00**		16,37	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pengamanan Cuti Bersama Hari Besar Nasional dan HUT Kota	2,00	303.158.240		81.643.901	-	-							-	-		-		**303.158.240,00**		-	
	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di			300,00		-								-					-			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	Terciptanya Kondisi Kepekaan, Kesiagaan dan Antisipasi Masyarakat	1,00	875.636.180		189.467.287	-	-							-	-		-		**875.636.180,00**		3,50	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan			30,00		-								-					-			

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1,00	47.559.946	1,00	62.285.535	-	-							-	-		-		**47.559.946,00**		20,13	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Peimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1,00	32.325.500	1,00	149.790.462,00	-	-							-	-		-		**32.325.500,00**		22,39	
Rata-Rata Capaian Kinerja																						
Predikat Kinerja																				**SR**	**SR**	

KEPALA KESBANGPOL
KOTA BANDAR LAMPUNG

PARYANTO, S.IP
Pembina utama Muda
NIP. 19651001 198602 1

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung serta Program Pemerintah Kota Bandar Lampung maka Program dan Kegiatan yang dirancang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung pada perubahan anggaran Tahun 2024 terdiri dari :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1)	(2)
8.01.01.2.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
8.01.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
8.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

8.01.02.	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**
8.01.02.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka
8.01.03.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**
8.01.03.2.01.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik**
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01.03.2.01.06	Pelaksanaan Tugas Paskibraka
8.01.04.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**
8.01.04.2.01.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.05.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**
8.01.05.2.01.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.06.	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**
8.01.06.2.01.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Pada perubahan Renja tahun 2025 ini, terdapat perubahan anggaran sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Semula Rp.3.927.306.959 menjadi Rp.3.664.890.892,- Berkurang Rp.262.416.067,-**
    a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dari Rp.160.440.000,- menjadi Rp.157.122.000,- berkurang sebesar Rp.3.318.000,- (Penyesuaian Perpres 72 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satua Regional) ;
    b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dari Rp. 259.074.819,- menjadi Rp. 140.746.752,- berkurang sebesar Rp. 118.328.067,- (Efesiensi);
    c) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dari Rp. 175.000.000,- menjadi Rp. 72.900.000,- berkurang sebesar Rp. 102.100.000,- (Efesiensi);
    d) Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah, dari Rp.116.000.000,- menjadi Rp.111.000.000,- berkurang sebesar Rp.5.000.000,- (Efesiensi);
    e) Kegiatan Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dari Rp.100.620.000,- menjadi Rp. 66.950.000,- berkurang sebesar Rp. 33.670.000,- (Efesiensi);

2. **Program Penguat Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa semula Rp.1.157.095.600,- menjadi Rp.1.120.830.474,- berkurang Rp.36.265.126,-**
    a) Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan,

dari Rp.60.765.126,- menjadi Rp.24.500.000,- berkurang sebesar Rp. 36.265.126,- (Efesiensi);

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik semula Rp.2.312.326.425,- menjadi Rp. 2.100.214.145,- berkurang Rp.212.112.280,-

a) Pelasanaan Kebijakan Dibidang Pendididkan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Kepala daerah, serta Pematauan Situasi Politik di Daerah, dari Rp. 212.112.280,- menjadi Rp. 0,- berkurang sebesar sebesar Rp. 212.112.280,- (Efesiensi);

b) Pelasanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Dibidang Pendididkan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Kepala daerah, serta Pematauan Situasi Politik di Daerah, dari Rp.1.896.277.582,- menjadi Rp. 1.896.277.582,-, tidak ada perubahan;

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan semula Rp.2.094.545.658,- menjadi Rp. 2.067.544.509,- berkurang Rp.27.001.149,-

a) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Orang Asing di Daerah, dari Rp.2.043.225.356,- menjadi Rp. 2.036.572.035 berkurang sebesar Rp.6.653.321,- (Efesiensi);

b) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi Sengketa Ormas dan Ormas asing dib Daerah, dari

Rp.51.320.302,- menjadi Rp.30.927.474,- berkurang sebesar Rp. 20.347.828,- (Efesiensi);

5. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonom, Sosial dan Budaya semula Rp.602.872.519,- menjadi Rp.199.288.177,-**

a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dari Rp.382.683.369,- menjadi Rp. 8.743.848,- **berkurang** sebesar Rp. 373.939.521- (Efesiensi);

b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, **dari Rp.8.743.848,- menjadi Rp. 65.229.842,- bertambah sebesar Rp. 56.486.594,-;**

c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalah gunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah, dari 52.989.250,- menjadi Rp.0.- berkurang sebesar Rp.52.989.250,- Efesiensi);

d) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosisl Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragaman dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, Rp. 167.199.900,- menjadi Rp. 134.058.275,- berkurang sebesar Rp. 33.141.625,-;

6. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penaganan Konflik Sosial semula Rp.566.046.892,- menjadi Rp.936.543.787,- bertambah Rp.370.496.895,-**

a) Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dari Rp. 82.859.707,- menjadi Rp.72.907.147,- berkurang sebesar Rp. 9.952.560,-;

b) Sub Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dari Rp.81.643.901,- menjadi Rp.0,- **berkurang** sebesar Rp.81.643.901,- (Efesiensi);

c) Sub Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dari **Rp 0,- menjadi Rp. 89.641.741,- bertambah sebesar Rp.89.641.741,- ;**

d) Sub Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dari Rp. 189.467.287,- menjadi Rp. 172.879.687,- berkurang sebesar Rp. 16.587.600,-;

e) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan

Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dari Rp. 62.285.535,- menjadi Rp.52.332.975,- berkurang sebesar Rp. 9.952.560,-

f) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dari Rp.149.790.462,- menjadi Rp.548.782.237,- **bertambah** sebesar **Rp.398.991.755,-** *(Pembentukan SATGAS Terpadu Penaganan Premanisme dan Ormas).*

Secara rinci, rencana program dan kegiatan beserta target kinerja dalam perubahan Renja Tahun 2025 disajikan dalam tabel 5.1. Sebagai berikut :

TABEL 5.1
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN EFESIENSI
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								**7.958.944.841,00**	**10.660.194.053,00**	**10.089.311.924,00**	
	8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**								**7.958.944.841,00**	**10.660.194.053,00**	**10.089.311.924,00**	
	8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								**7.958.944.841**	**10.660.194.053**	**10.089.311.924**	
266	**8**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung**	**Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung**	**Persen**	**Persen**	**98**	**98**	**98**	**3.540.040.417**	**3.892.456.959**	**3.664.314.027**	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	Persen	100	100	100	**49.999.697**	**50.413.699**	**50.413.699**	
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	4	4	4	24.999.827,00	26.397.441,00	26.397.441,00	
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	4	4	4	24.999.870,00	24.016.258,00	24.016.258,00	
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	Persen	98	98	98	**3.072.802.441**	**3.226.198.441**	**3.225.238.441**	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	25	25	25	2.899.402.441,00	3.065.758.441,00	3.065.758.441,00	

	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	173.400.000,00	160.440.000,00	159.480.000,00	
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	Persen	98	98	98	**139.838.279**	**259.074.819**	**137.811.887**	
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	29.999.258,00	43.915.148,00	43.915.148,00	
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.492.762,00	7.274.915,00	7.274.915,00	
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.000.000,00	15.334.960,00	15.334.960,00	
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	53.846.259,00	59.849.796,00	36.586.864,00	
	8	01	01	2.06	11	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	0,00	98.000.000,00	0,00	
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	-	-	-			**90.000.000**	**140.150.000**	**72.900.000**	
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	5	5	5	45.000.000,00	113.700.000,00	71.450.000,00	
	8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	10	10	10	45.000.000,00	26.450.000,00	1.450.000,00	
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	Persen	98	98	98	**116.000.000**	**116.000.000**	**111.000.000**	
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	

	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	44.680.000,00	40.920.000,00	40.920.000,00	
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1	1	1	21.080.000,00	49.470.000,00	15.800.000,00	
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	5.640.000,00	10.230.000,00	10.230.000,00	
267	**8**	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persen**	**Persen**	**70**	**70**	**70**	**604.599.272**	**1.181.595.600**	**1.120.830.474**	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	Persen	70	70	70	**604.599.272**	**1.181.595.600**	**1.120.830.474**	
	8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	1	1	82.199.839,00	85.265.126,00	24.500.000,00	
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Orang	60	60	60	64.999.774,00	64.460.172,00	64.460.172,00	
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Orang	1000	1000	1000	49.999.871,00	140.555.189,00	140.555.189,00	
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	Orang	38	38	38	407.399.788,00	891.315.113,00	891.315.113,00	
268	8	01	03			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**	**Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik**	Persen	Persen	70	70	70	**1.947.506.843**	**2.312.326.425**	**2.100.214.145**	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Meningkatnya Etika Dan Budaya Politik.	Persen	Persen	70	70	70	**1.947.506.843**	**2.312.326.425**	**2.100.214.145**	

	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Orang	100	100	100	74.999.795,00	212.112.280,00	0,00	
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	1.822.507.341,00	1.896.277.582,00	1.896.277.582,00	
	8	01	03	2.01	0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kegiatan	Kegiatan	3	3	3	49.999.707,00	203.936.563,00	203.936.563,00	
269	8	01	04			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Laporan Keberadaan ORMAS dan Pembinaan ORMAS**	**Persentase organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif**	**Persen**	**Persen**	**50**	**50**	**50**	**1.024.499.746**	**2.104.895.658**	**2.068.121.374**	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Laporan Keberadaan & Pembinaan ORMAS	Meningkatkan Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan.	Persen	Persen	50	50	50	**1.024.499.746**	**2.104.895.658**	**2.068.121.374**	
	8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	1	1	949.499.768,00	2.043.225.356,00	2.036.572.035,00	
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	74.999.978,00	61.670.302,00	31.549.339,00	

270	8	01	05			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Penanganan Konflik Keagamaan dan Ras**	**Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Yang Dilaksanakan**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**292.299.389**	**602.872.519**	**202.798.202**	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.	**Persen**	**Persen**	100	100	100	**292.299.389**	**602.872.519**	**202.798.202**	
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Orang	100	100	100	75.099.593,00	382.683.369,00	**68.739.927,00**	**59.996.679,00**
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Orang	60	60	60	49.999.848,00	52.989.250,00	0,00	
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	167.199.948,00	167.199.900,00	134.058.275,00	

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026

271	8	01	06			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial** **Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan**	**Pesentase Konflik Sosial yang Diselesaikan.**	**Persen**	**Persen**	**1**	**1**	**1**	**549.999.174**	**566.046.892**	**933.033.702**	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Konflik Sosial yang terselesaikan dan Kemampuan SDM dalam Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	Meningkatnya penangan konflik sosial yang di selesaikan	Persen	Persen	1	1	1	549.999.174	566.046.892	933.033.702	
	8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	1	1	74.999.832,00	82.859.707,00	72.907.147,00	
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Orang	300	300	300	49.999.779,00	81.643.901,00	89.331.656,00	89.331.656,00

RESTORAN BALI DENPASAR DAN KEBAB PODOMORO PUNG TAHUN 2026

	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Orang	30 orang			199.999.779,00	189.467.287,00	172.879.687,00	
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	74.999.906,00	62.285.535,00	52.332.975,00	
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	149.999.878,00	149.790.462,00	545.582.237,0	395.791.775,00
	JUMLAH														2.487.656.580.950,00			545.120.110,00

KEPALA KESBANGPOL
KOTA BANDAR LAMPUNG

PARYANTO, S.IP
Pembina utama Muda
NIP. 19651001 198602 1 00

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *community based development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

EVA DWIANA

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35214
Telepon/Faksimile (0721) 476-838, e-mail kesbangpol.balam@gmail.com

NOTA DINAS

Yth.	:	Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Selaku Ketua TAPD Kota Bandar Lampung
Dari	:	Kepala Badan KESBANGPOL Kota Bandar Lampung
Tanggal	:	16 Mei 2025
Nomor	:	181 /200.1/IV.05/2025
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Hal	:	Permohonan Penambahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200.6.2/e-374/Polpum Tanggal 10 Mei 2025 Hal Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Masyarakat (Ormas) bermasalah yang menggangu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah membentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Oprasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Masyarakat (Ormas) bermasalah yang menggangu Keamanan, Ketertiban Masyaraka, Investasi dan dunia Usaha di Kota Bandar Lampung.

Untuk itu mohon perkenaan Bapak Ketua Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) Kota Bandar Lampung kiranya dapat Menambah Anggran Belanja pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan daerah Kota dengan Kode Rekening 8.01.06.2.01.0006 sebagai Rencana Kerja Anggran terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapakan terima kasih.

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA BANDAR LAMPUNG,

PARYANTO, S.IP.
Pembina Utama Muda
Nip. 19651001 198602 1 003

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR DPA Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 8. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Kegiatan	: 8.01.06.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Sub Kegiatan	: 8.01.006.2.1.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Lokasi Pelaksanaan	: Kota Bandar Lampung
Organisasi	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Tahun n - 1	: Rp. 0.00
Jumlah Tahun n	Rp 568.082.237
Jumlah Tahun n + 1	: Rp. 0.00

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan
Capaian Program	Presentase SDM yang mempunyai kemampuan deteksi dini, cegah dini dan tangkal dini terhadap kerawanan konflik Sosial	60%
	Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan	80%
Keluaran Kegiatan	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Target Kinerja	
	Setelah Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Program	Presentase SDM yang mempunyai kemampuan deteksi dini, cegah dini dan tangkal dini terhadap kerawanan konflik Sosial	60%
	Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan	80%
Keluaran Kegiatan	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Kode Rekening	Uraian	Setelah Perubahan			
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Vol	Sat	Harga				Vol	Sat	Harga	
5	**BELANJA DAERAH**				Rp 149.790.462	5	**BELANJA DAERAH**				Rp 568.082.237
5 1	**BELANJA OPERASI**				Rp 149.790.462	5 1	**BELANJA OPERASI**				Rp 568.082.237
5 1 02	**Belanja Barang dan Jasa**				Rp 149.790.462	5 1 02	**Belanja Barang dan Jasa**				Rp 568.082.237
5 1 02 01	**Belanja Barang**				Rp 2.790.462	5 1 02 01	**Belanja Barang**				Rp 99.782.237
5 1 02 01 01	**Belanja Barang Pakai Habis**				Rp 2.790.462	5 1 02 01 01	**Belanja Barang Pakai Habis**				Rp 99.782.237
5 1 02 01 01 0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**				Rp 1.029.944	5 1 02 01 01 0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**				Rp 2.819.074
	Map Folio Biasa	40	Buah	Rp 2.645	Rp 105.800		Map Folio Biasa	100	Buah	Rp 2.645	Rp 264.500
	Odner Gobi 8401F	4	Buah	Rp 22.526	Rp 90.104		Odner Gobi 8401F	10	Buah	Rp 22.526	Rp 225.260
	Isi Staples Seri Max 03	10	Kotak	Rp 8.191	Rp 81.910		Isi Staples Seri Max 03	10	Kotak	Rp 8.191	Rp 81.910
	Stabilo Faber Castle Campur	5	Buah	Rp 13.900	Rp 69.500		Stabilo Faber Castle Campur	5	Buah	Rp 13.900	Rp 69.500
	Binder Klip No.260 merk Kenko	5	Kotak	Rp 18.430	Rp 92.150		Binder Klip No.260 merk Kenko	10	Kotak	Rp 18.430	Rp 184.300
	Binder Klip No 111 Merk Kenko	6	Kotak	Rp 5.324	Rp 31.944		Binder Klip No 111 Merk Kenko	10	Kotak	Rp 5.324	Rp 53.240
	Amplop 110 PPS	5	Kotak	Rp 21.502	Rp 107.510		Amplop 110 PPS	10	Kotak	Rp 21.502	Rp 215.020
	Amplop 90 PPS	4	Pak	Rp 31.823	Rp 127.292		Amplop 90 PPS	10	Pak	Rp 31.823	Rp 318.230
	Pena Merk : Pilot Balliner	0	Buah	Rp 20.316	Rp -		Pena Merk : Pilot Balliner	15	Buah	Rp 20.316	Rp 304.740
	Tip Ex Kenko ke-01	0	Buah	Rp 6.143	Rp -		Tip Ex Kenko ke-01	3	Buah	Rp 6.143	Rp 18.429
	Gunting Gunting Gunindo KC-888	0	Buah	Rp 14.435	Rp -		Gunting Gunting Gunindo KC-888	2	Buah	Rp 14.435	Rp 28.870
	Binder Clip Nomor 155	0	Kotak	Rp 8.019	Rp -		Binder Clip Nomor 155	10	Kotak	Rp 8.019	Rp 80.190
	Pena Merk Pilot BPTP	0	Buah	Rp 3.311	Rp -		Pena Merk Pilot BPTP	50	Buah	Rp 3.311	Rp 165.550
	Album Foto Gloria Magnetik 3 R, 10 R Jumbo Potrait ini 20 Sheet badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung	2	Buah	Rp 161.867	Rp 323.734		Album Foto Gloria Magnetik 3 R, 10 R Jumbo Potrait ini 20 Sheet badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung	5	Buah	Rp 161.867	Rp 809.335
5 1 02 01 01 0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Kantor-Kertas dan Cover**				Rp 160.068	5 1 02 01 01 0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Kantor-Kertas dan Cover**				Rp 736.933
	HVS A4 70 gram Merk : Sidu	3	Rim	Rp 53.356	Rp 160.068		HVS A4 70 gram Merk : Sidu	8	Rim	Rp 53.356	Rp 426.848
	HVS F4 70 gram merk Sidu	0	Rim	Rp 62.017	Rp -		HVS F4 70 gram merk Sidu	5	Rim	Rp 62.017	Rp 310.085
5 1 02 01 01 0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Bahan Cetak**				Rp 870.340	5 1 02 01 01 0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Bahan Cetak**				Rp 1.535.900
	BARANG CETAKAN Binding/ Jilid Hard Cover Digital Hard cover skripsi/ Tesis/ Desertasi	2	Buah	Rp 102.390	Rp 204.780		BARANG CETAKAN Binding/ Jilid Hard Cover Digital Hard cover skripsi/ Tesis/ Desertasi	4	Buah	Rp 102.390	Rp 409.560
	Cetak Foto	40	Pcs	Rp 10.239	Rp 409.560		Cetak Foto	60	Pcs	Rp 10.239	Rp 614.340
	Fotocopy Folio -	1.000	Lembar	Rp 256	Rp 256.000		Fotocopy Folio -	2.000	Lembar	Rp 256	Rp 512.000
5 1 02 01 01 0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Bahan Komputer**				Rp 730.110	5 1 02 01 01 0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Bahan Komputer**				Rp 2.190.330
	Tinta Epson 001 Black Epson	2	Buah	Rp 179.183	Rp 358.366		Tinta Epson 001 Black Epson	6	Buah	Rp 179.183	Rp 1.075.098
	Tinta 001 Colour Epson	2	Buah	Rp 114.677	Rp 229.354		Tinta 001 Colour Epson	6	Buah	Rp 114.677	Rp 688.062
	Flash disk 8GB Toshiba	2	Buah	Rp 71.195	Rp 142.390		Flash disk 8GB Toshiba	6	Buah	Rp 71.195	Rp 427.170

5	**1**	**02**	**01**	**01**	**0052**	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**				**Rp**	**-**	**5**	**1**	**02**	**01**	**01**	**0052**	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**				**Rp**	**21.000.000**
						Konsumsi Rapat, Makanan dan Minuman di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Nasi Kotak	0	Kotak	Rp	35.000	Rp	-							Konsumsi Rapat, Makanan dan Minuman di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Nasi Kotak	420	Kotak	Rp	35.000	Rp	14.700.000
						Konsumsi Rapat, Makanan dan Minuman di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Snack	0	Kotak	Rp	15.000	Rp	-							Konsumsi Rapat, Makanan dan Minuman di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Snack	420	Kotak	Rp	15.000	Rp	6.300.000
5	**1**	**02**	**01**	**01**	**0053**	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**				**Rp**	**-**	**5**	**1**	**02**	**01**	**01**	**0053**	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**				**Rp**	**5.000.000**
						Konsumsi Rapat, Makanan dan Minuman di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Prasmanan	0	Porsi	Rp	50.000	Rp	-							Konsumsi Rapat, Makanan dan Minuman di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Prasmanan	100	Porsi	Rp	50.000	Rp	5.000.000
5	**1**	**02**	**01**	**01**	**0058**	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**				**Rp**	**-**	**5**	**1**	**02**	**01**	**01**	**0058**	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**				**Rp**	**49.000.000**
						Konsumsi Rapat, Makanan dan Minuman di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Nasi Kotak	0	Kotak	Rp	35.000	Rp	-							Konsumsi Rapat, Makanan dan Minuman di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Nasi Kotak	980	Kotak	Rp	35.000	Rp	34.300.000
						Konsumsi Rapat, Makanan dan Minuman di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Snack	0	Kotak	Rp	15.000	Rp	-							Konsumsi Rapat, Makanan dan Minuman di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Snack	980	Kotak	Rp	15.000	Rp	14.700.000
						Air Mineral 600ml	0	Doze	Rp	40.000	Rp	-							Air Mineral 600ml	80	Doze	Rp	40.000	Rp	3.200.000
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja pakaian Tim**				**Rp**	**-**	**5**	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja pakaian Tim**				**Rp**	**17.500.000**
						Rompi Satgas	0	Buah	Rp	200.000	Rp	-							Rompi Satgas	70	Buah	Rp	250.000	Rp	17.500.000
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**				**Rp**	**138.000.000**	**5**	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**				**Rp**	**459.300.000**
5	**1**	**02**	**02**	**01**		**Belanja Jasa Kantor**				**Rp**	**138.000.000**	**5**	**1**	**02**	**02**	**01**		**Belanja Jasa Kantor**				**Rp**	**459.300.000**
5	**1**	**02**	**02**	**01**	**0004**	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**				**Rp**	**138.000.000**	**5**	**1**	**02**	**02**	**01**	**0004**	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**				**Rp**	**459.300.000**
						FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH FORKOMPIMDA				**Rp**	**63.000.000**							**FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH FORKOMPIMDA**				**Rp**	**63.000.000**
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (WALIKOTA) Tinggi Anggota	84	Orang / bulan	Rp	750.000	Rp	63.000.000							Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (WALIKOTA) Tinggi Anggota	84	Orang / bulan	Rp	750.000	Rp	63.000.000
						Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah FORKOMPINDA				**Rp**	**75.000.000**							**Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah FORKOMPINDA**				**Rp**	**75.000.000**
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (WALIKOTA) Tinggi Ketua	12	Orang/ Bulan	Rp	1.000.000	Rp	12.000.000							Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (WALIKOTA) Tinggi Ketua	12	Orang/ Bulan	Rp	1.000.000	Rp	12.000.000
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh kepala Daerah (Walikota) Tinggi-Anggota	84	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	63.000.000							Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh kepala Daerah (Walikota) Tinggi-Anggota	84	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	63.000.000
						Tim Satuan Tugas Terpadu Penanganan Operasi Premanisme dan Ormas bermasalah												**Tim Satuan Tugas Terpadu Penanganan Operasi Premanisme dan Ormas bermasalah**				**Rp**	**321.300.000**
						Pengarah	0	Orang / Bulan	Rp	1.500.000	Rp	-							Pengarah	42	Orang / Bulan	Rp	1.500.000	Rp	63.000.000
						Penanggungjawab												**Penanggungjawab**					
						Ketua	0	Orang / Bulan	Rp	1.250.000	Rp	-							Ketua	6	Orang / Bulan	Rp	1.250.000	Rp	7.500.000
						Wakil Ketua	0	Orang / Bulan	Rp	850.000	Rp	-							Wakil Ketua	6	Orang / Bulan	Rp	850.000	Rp	5.100.000
						Anggota	0	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	-							Anggota	18	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	13.500.000
						Pelaksana												**Pelaksana**					
						Ketua	0	Orang / Bulan	Rp	1.000.000	Rp	-							Ketua	6	Orang / Bulan	Rp	1.000.000	Rp	6.000.000
						Wakil Ketua I	0	Orang / Bulan	Rp	850.000	Rp	-							Wakil Ketua I	6	Orang / Bulan	Rp	850.000	Rp	5.100.000
						Wakil Ketua II	0	Orang / Bulan	Rp	850.000	Rp	-							Wakil Ketua II	6	Orang / Bulan	Rp	850.000	Rp	5.100.000
						Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan												**Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					
						Sekretaris	0	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	-							Sekretaris	6	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	4.500.000
						Wakil Sekretaris	0	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	-							Wakil Sekretaris	6	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	4.500.000
						Anggota (13 Orang x 6 bulan)	0	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	-							Anggota (13 Orang x 6 bulan)	78	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	58.500.000
						Satuan tugas Pencegahan												**Satuan tugas Pencegahan**					
						Koordinator	0	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	-							Koordinator	6	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	4.500.000
						Anggota (7 orang x 6 bulan)	0	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	-							Anggota (7 orang x 6 bulan)	42	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	31.500.000
						Satuan Tugas Intelijen												**Satuan Tugas Intelijen**					
						Koordinator	0	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	-							Koordinator	6	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	4.500.000
						Anggota (6 orang x 6 bulan)	0	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	-							Anggota (6 orang x 6 bulan)	36	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	27.000.000

						Satuan Tugas Penindakan													**Satuan Tugas Penindakan**					
						Koordinator	0	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	-							Koordinator	6	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	4.500.000
						Anggota (9 Orang x 6 Bulan)	0	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	-							Anggota (9 Orang x 6 Bulan)	54	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	40.500.000
						Satuan Tugas Rehabilitasi													**Satuan Tugas Rehabilitasi**					
						Koordinator	0	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	-							Koordinator	6	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	4.500.000
						Anggota (7 orang x 6 bulan)	0	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	-							Anggota (7 orang x 6 bulan)	42	Orang / Bulan	Rp	750.000	Rp	31.500.000
5	**1**	**02**	**04**			**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp**	**9.000.000**	**5**	**1**	**02**	**04**			**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp**	**9.000.000**
5	**1**	**02**	**04**	**01**		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp**	**9.000.000**	**5**	**1**	**02**	**04**	**01**		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp**	**9.000.000**
5	**1**	**02**	**04**	**01**	**0004**	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp**	**9.000.000**	**5**	**1**	**02**	**04**	**01**	**0004**	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp**	**9.000.000**
						Paket Rapat Halfday Forum Komunilkasi Pimpinan Daerah badan Kesbangpol Kota bandar lampung	1	LS	Rp	9.000.000	Rp	9.000.000							Paket Rapat Halfday Forum Komunilkasi Pimpinan Daerah badan Kesbangpol Kota bandar lampung	1	LS	Rp	9.000.000	Rp	9.000.000
											Rp	**149.790.462**											**TOTATAL ANGGARAN**	**Rp**	**568.082.237**

Bandar Lampung, Mei 2025
KEPALA KESBANGPOL
KOTA BANDAR LAMPUNG

PARYANTO, S.IP
Pembina utama Muda
NIP. 19651001 198602 1 003

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35214
Telepon/Faksimile (0721) 476-838, e-mail kesbangpol.balam@gmail.com

NOTA DINAS

Yth.	:	Ketua Tim TAPD Pemerintah Kota Bandar Lampung
Dari	:	Kepala Badan KESBANGPOL Kota Bandar Lampung
Tanggal	:	18 Juni 2025
Nomor	:	273 /200.1/IV.05/2025
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Hal	:	Permohonan Penambahan Anggaran Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan hasil rapat dengan Koordinator jaksa Agung Muda Bidang Intelijen pada tanggak 21 Mei 2025 dan dalam rangka Pencegahan ATGH radikalisme dan Terorrisme serta hasil dari rapat koordinasi melalui daring terkait pelaksanaan P$GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia sesuai Asta Cita Presiden Repoblik Indonesia dan mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bandar lampung Nomor 15 tahun 2023 tentang P$GN.
Dengan ini kami sampaikan Perubahan anggaran pada badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung :

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, kesesuaian dengan npmor sub kegiatan sebesar Rp. 89.331.656,-
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosisl, dan Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Penghayat Kepercayaan di daerah. Kesesuaian dengan nomor sub kegiatan sebesar Rp.59.996.679,-

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapakan terima kasih.

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA BANDAR LAMPUNG,

PARYANTO, S.IP.
Pembina Utama Muda
Nip. 19651001 198602 1 003

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR DPA Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 8. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program	: 8.01.04 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Kegiatan	: 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
Lokasi Pelaksanaan	: Kota Bandar Lampung
Organisasi	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Tahun n - 1	: Rp. 0.00
Jumlah Tahun n	: Rp. 89.331.656
Jumlah Tahun n + 1	: Rp. 0.00

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Sebelum Perubahan
	Sebelum Perubahan	
Capaian Program	Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan	80%
	Persentase SDM yang mempunyai kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	60%
Keluaran Kegiatan	Konflik Sosial yang terselesaikan dan Kemampuan SDM dalam Deteksi Sini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	70%
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspdaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang	200 Orang

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Target Kinerja	Setelah Perubahan
	Setelah Perubahan	
	Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan	80%
Capaian Program	Persentase SDM yang mempunyai kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	60%
Keluaran Kegiatan	Konflik Sosial yang terselesaikan dan Kemampuan SDM dalam Deteksi Sini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	70%
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspdaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang	200 Orang

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Kode Rekening	Uraian	Setelah Perubahan			
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Vol	Sat	Harga				Vol	Sat	Harga	
5	**BELANJA DAERAH**				**Rp -**	**5**	**BELANJA DAERAH**				**Rp 89.331.656**
5 1	**BELANJA OPERASI**				**Rp -**	**5 1**	**BELANJA OPERASI**				**Rp 89.331.656**
5 1 02	**Belanja Barang dan Jasa**				**Rp -**	**5 1 02**	**Belanja Barang dan Jasa**				**Rp 89.331.656**
5 1 02 01	**Belanja Barang**				**Rp -**	**5 1 02 01**	**Belanja Barang**				**Rp 13.781.656**
5 1 02 01 01	**Belanja Barang Pakai Habis**				**Rp -**	**5 1 02 01 01**	**Belanja Barang Pakai Habis**				**Rp 13.781.656**
5 1 02 01 01 0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**	**1**	**Paket**	**Rp -**	**Rp0**						
	Pertamax	0	Liter	**Rp -**	**Rp0**						
5 1 02 01 01 0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**				**Rp -**	**5 1 02 01 01 0024**	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**				**Rp 8.446.643**
	Map Folio Biasa	0	Buah	Rp 2.645	Rp -		Map Folio Biasa	25	Buah	Rp 2.645	Rp 66.125
							Map Jaring Ziper Bag Revo	200	Buah	Rp 10.239	Rp 2.047.800
	Odner Gobi 8403F	0	Buah	Rp 24.326	Rp -		Odner Gobi 8403F	4	Buah	Rp 24.326	Rp 97.304
	Pena Merk Pilot BPTP	0	Buah	Rp 3.311	Rp -		Pena Merk Pilot BPTP	200	Buah	Rp 3.311	Rp 662.200
	Buku Blok Note 15 Vip only Bergaris SPP	0	Buku	Rp 7.485	Rp -		Blok Note A5 Peperline	200	Buku	Rp 23.524	Rp 4.704.800
	Isi Staples Seri Max 10	0	Kotak	Rp 4.096	Rp -		Isi Staples Seri Max 10	3	Kotak	Rp 4.096	Rp 12.288
	Amplop 104 Royal	0	Kotak	Rp 18.712	Rp -		Amplop 104 Royal	3	Kotak	Rp 18.712	Rp 56.136
	Amplop 90 PPS	0	Pack	Rp 31.823	Rp -		Amplop 90 PPS	2	Pack	Rp 31.823	Rp 63.646
	Binder Clip No 111 Merk Kenko	0	Kotak	Rp 5.324	Rp -		Binder Clip No 111 Merk Kenko	3	Kotak	Rp 5.324	Rp 15.972
	Binder Clip No 111 Merk Kenko	0	Kotak	Rp 18.430	Rp -		Binder Clip No 111 Merk Kenko	3	Kotak	Rp 18.430	Rp 55.290
	Pembolong Kenko 85	0	Buah	Rp 59.386	Rp -		Pembolong Kenko 85	1	Buah	Rp 59.386	Rp 59.386
	Album Foto Gloria Magnetic 3R 10R jumbo potrait isi 20 sheets Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung	0	Buah	Rp 151.424	Rp -		Album Foto Gloria Magnetic 3R 10R jumbo potrait isi 20 sheets Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung	4	Buah	Rp 151.424	Rp 605.696

5	**1**	**02**	**01**	**01**	**0025**	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Kantor-Kertas dan Cover**					**Rp -**	**5**	**1**	**02**	**01**	**01**	**0025**	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Kantor-Kertas dan Cover**				**Rp**	**266.780**
						HVS A4 70 gram Merk : Sidu	0	Rim	Rp	53.356	Rp -							HVS A4 70 gram Merk : Sidu	5	Rim	Rp	53.356	Rp	266.780
						HVS F4 70 gram Merk : Sidu	0	Rim	Rp	62.017	Rp -							HVS F4 70 gram Merk : Sidu	5	Rim	Rp	62.017	Rp	310.085
5	**1**	**02**	**01**	**01**	**0026**	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Bahan Cetak**					**Rp -**	**5**	**1**	**02**	**01**	**01**	**0026**	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Bahan Cetak**				**Rp**	**1.625.208**
						BARANG CETAKAN Binding Jilid Hard Cover Digital Hard cover skripsi Tesis Desertasi	0	Buah	Rp	102.390	Rp -							BARANG CETAKAN Binding Jilid Hard Cover Digital Hard cover skripsi Tesis Desertasi	2	Buah	Rp	102.390	Rp	204.780
						Cetak Spanduk Baliho dan Banner	0	Meter										Cetak Spanduk Baliho dan Banner	6	Meter	Rp	40.478	Rp	242.868
						Cetak Foto	0	Pcs	Rp	10.239	Rp -							Cetak Foto	40	Pcs	Rp	10.239	Rp	409.560
						Fotocopy Folio	0	Lembar	Rp	256	Rp -							Fotocopy Folio	3.000	Lembar	Rp	256	Rp	768.000
												5	**1**	**02**	**01**	**01**	**0027**	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Bahan Pos**				**Rp**	**117.750**
																		Materai	10	Lembar	Rp	11.775	Rp	117.750
5	**1**	**02**	**01**	**01**	**0029**	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Bahan Komputer**					**Rp -**	**5**	**1**	**02**	**01**	**01**	**0029**	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Bahan Komputer**				**Rp**	**1.825.275**
						Tinta Epson 001 Black Epson	0	Buah	Rp	179.183	Rp -							Tinta Epson 001 Black Epson	5	Buah	Rp	179.183	Rp	895.915
																		Tinta Epson 001 Colour Epson	5	Buah	Rp	114.677	Rp	573.385
						Flashdisk 8GB Toshiba	0	Buah	Rp	71.195	Rp -							Flashdisk 8GB Toshiba	5	Buah	Rp	71.195	Rp	355.975
5	**1**	**2**	**1**	**1**	**0052**	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp -**	**5**	**1**	**2**	**1**	**1**	**0052**	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**				**Rp**	**1.500.000**
						Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Nasi Kotak	0	Kotak	Rp	35.000	Rp -							Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Nasi Kotak	30	Kotak	Rp	35.000	Rp	1.050.000
						Konsumsi Rapat Makanan dan Minuman di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung	0	Kotak	Rp	15.000	Rp -							Konsumsi Rapat Makanan dan Minuman di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung	30	Kotak	Rp	15.000	Rp	450.000
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**					**Rp -**	**5**	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**				**Rp**	**13.350.000**
5	**1**	**02**	**02**	**01**		**Belanja Jasa Kantor**					**Rp -**	**5**	**1**	**02**	**02**	**01**		**Belanja Jasa Kantor**				**Rp**	**13.350.000**
5	**1**	**02**	**02**	**01**	**0003**	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp -**	**5**	**1**	**02**	**02**	**01**	**0003**	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**				**Rp**	**13.350.000**
						Eselon IV Sederajat Moderator Sosialiasi Radikalisme Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung	0	Orang/Hari	Rp	750.000	Rp -							Eselon III ke bawah uang sisetarakan Narasumber Pembahas	10	Orang/Jam	Rp	900.000	Rp	9.000.000
						Eselon III ke bawah uang sisetarakan Narasumber Pembahas Sosialiasi Radikalisme Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung	0	Orang/Hari	Rp	1.000.000	Rp -							Moderator	1	Orang/Kegiatan	Rp	700.000	Rp	700.000
						MC Sosialiasi Radikalisme Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung	0	Orang/Kegiatan	Rp	400.000								MC/Pembawa Acara	1	Orang/Kegiatan	Rp	400.000	Rp	400.000
																		Panitia Pelaksana				**Rp**	**3.250.000**
						PERUBAHAN REN												Honorarium Panitia Penanggungjawab	1	Orang/Kegiatan	Rp	450.000	Rp	450.000
																		Honorarium Panitia Ketua Wakil Ketua	1	Orang/Kegiatan	Rp	400.000	Rp	400.000
																		Honorarium Panitia Sekretaris	1	Orang/Kegiatan	Rp	300.000	Rp	300.000
																		Honorarium Panitia Anggota	7	Orang/Kegiatan	Rp	300.000	Rp	2.100.000

5	**1**	**02**	**04**			**Belanja Perjalanan Dinas**						**5**	**1**	**02**	**04**			**Belanja Perjalanan Dinas**				**Rp**	**62.200.000**
5	**1**	**02**	**04**	**01**		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**						**5**	**1**	**02**	**04**	**01**		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**				**Rp**	**62.200.000**
5	**1**	**02**	**04**	**01**	**0004**	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**				**Rp**	**-**	**5**	**1**	**02**	**04**	**01**	**0004**	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**				**Rp**	**62.200.000**
						Paket Halfday Sosialisasi Sosialisasi Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung	0	Ls											Paket Halfday	200	Paket	Rp 216.000	Rp	43.200.000
						Uang Saku Transport Peserta Sosialisasi Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung	0	Orang/Hari	Rp 95.000									Uang Saku Transport Peserta	200	Orang/Hari	Rp 95.000	Rp	19.000.000
						Total Anggaran Belanja				**Rp**	**-**							**Total Anggaran Belanja**				**Rp**	**89.331.656**

Bandar Lampung, Juni 2025
KEPALA KESBANGPOL
KOTA BANDAR LAMPUNG

PARYANTO, S.IP
Pembina utama Muda
NIP. 19651001 198602 1 003

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR DPA Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 8. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
Kegiatan	: 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Penghayat Kepercayaan di Daerah
Lokasi Pelaksanaan	: Kota Bandar Lampung
Organisasi	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Tahun n - 1	: Rp. 0.00
Jumlah Tahun n	**: Rp. 59.996.679**
Jumlah Tahun n + 1	: Rp. 0.00

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Sebelum Perubahan
	Sebelum Perubahan	
Capaian Program	Persentase Penanganan Konflik Keagamaan dan Ras	100%
Keluaran Kegiatan	Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani	100%
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Target Kinerja	Setelah Perubahan
	Setelah Perubahan	
Capaian Program	Persentase Penanganan Konflik Keagamaan dan Ras	100%
Keluaran Kegiatan	Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani	100%
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode	Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Kode	Rekening	Uraian	Setelah Perubahan			
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)				Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Vol	Sat	Harga					Vol	Sat	Harga	
5		**BELANJA DAERAH**				**Rp8.743.248,00**	5		**BELANJA DAERAH**				**Rp 59.996.679**
5 1		**BELANJA OPERASI**				**Rp8.743.248,00**	5 1		**BELANJA OPERASI**				**Rp 59.996.679**
5 1 02		**Belanja Barang dan Jasa**				**Rp8.743.248,00**	5 1 02		**Belanja Barang dan Jasa**				**Rp 59.996.679**
5 1 02 01		**Belanja Barang**				**Rp8.743.248,00**	5 1 02 01		**Belanja Barang**				**Rp 19.396.679**
5 1 02 01 01		**Belanja Barang Pakai Habis**				**Rp8.743.248,00**	5 1 02 01 01		**Belanja Barang Pakai Habis**				**Rp 19.396.679**
5 1 02 01 01	0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**				**Rp0,00**	5 1 02 01 01	0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**				**Rp 5.152.884**
		Map Folio Biasa	0	Buah	Rp 2.645	Rp0,00			Map Folio Biasa	50	Buah	Rp 2.645	Rp 132.250
									Map Jaring Ziper Bag Revo	100	Buah	Rp 10.239	Rp 1.023.900
		Odner Gobi 8403F	0	Buah	Rp 24.326	Rp0,00			Odner Gobi 8403F	5	Buah	Rp 24.326	Rp 121.630
		Isi Staples Seri: Max 10	0	Kotak	Rp 4.096	Rp0,00			Isi Staples Seri: Max 10	5	Kotak	Rp 4.096	Rp 20.480
									Blok Note A5 Peperline	100	Buku	Rp 23.524	Rp 2.352.400
									Pena Merk Pilot BPTP	100	Buah	Rp 3.311	Rp 331.100
		Binder Clip No, 260 Merk Kenko	0	Kotak	Rp 18.430	Rp0,00			Binder Clip No, 260 Merk Kenko	6	Kotak	Rp 18.430	Rp 110.580
		Binder Clip No, 111 Merk Kenko	0	Kotak	Rp 5.324	Rp0,00			Binder Clip No, 111 Merk Kenko	6	Kotak	Rp 5.324	Rp 31.944
		Pena Merk : Pilot Balliner	0	Buah	Rp 20.316	Rp0,00			Pena Merk : Pilot Balliner	10	Buah	Rp 20.316	Rp 203.160
		Tip Ex Kenko 823M	0	Buah	Rp 6.143	Rp0,00			Tip Ex Kenko 823M	5	Buah	Rp 6.143	Rp 30.715
		Amplop 90 PPS	0	Pack	Rp 31.823	Rp0,00			Amplop 90 PPS	3	Pack	Rp 31.823	Rp 95.469
		Amplop 104 Royal	0	Kotak	Rp 18.712	Rp0,00			Amplop 104 Royal	5	Kotak	Rp 18.712	Rp 93.560
		Album Foto Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung	0	Buah	Rp 151.424	Rp0,00			Album Foto Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung	4	Buah	Rp 151.424	Rp 605.696
5 1 02 01 01	0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Kantor-Kertas**				**Rp0,00**	5 1 02 01 01	0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Kantor-Kertas**				**Rp 692.238**

5	**1**	**02**	**01**	**01**	**0026**	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Bahan Cetak**				**Rp8.743.248,00**	**5**	**1**	**02**	**01**	**01**	**0026**	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Bahan Cetak**				**Rp**	**7.649.360**
						BARANG CETAKAN Binding/ Jilid Hard Cover Digital Hard cover	0	Buah	Rp	102.390	Rp0,00							BARANG CETAKAN Binding/ Jilid Hard Cover Digital Hard cover	4	Buah	Rp	53.000	Rp	212.000
						Cetak Spanduk Baliho dan Banner	216	M	Rp	40.478	Rp 8.743.248							Cetak Spanduk Baliho dan Banner	120	M	Rp	40.478		Rp4.857.360,00
						Fotocopy Folio	0	Lembar	Rp	256	Rp0,00							Fotocopy Folio -	10.000	Lembar	Rp	256	Rp	2.560.000
						Cetak Photo	0	Lembar	Rp	10.239	Rp0,00							Cetak Photo	10	Lembar	Rp	2.000	Rp	20.000
5	**1**	**02**	**01**	**01**	**0029**	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Bahan Komputer**				**Rp0,00**	**5**	**1**	**02**	**01**	**01**	**0029**	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Bahan Komputer**				**Rp**	**402.197**
						Tinta Epson 001Black Epson	0	Botol	Rp	84.747	Rp0,00							Tinta Epson L210 black	3	Botol	Rp	84.747	Rp	254.241
						Flashdisk 8GB Toshiba	0	Buah	Rp	73.978	Rp0,00							Flashdisk 8GB Toshiba	2	Buah	Rp	73.978	Rp	147.956
5	**1**	**02**	**01**	**01**	**0052**	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**				**Rp0,00**	**5**	**1**	**02**	**01**	**01**	**0052**	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**				**Rp**	**1.500.000**
						Nasi Kotak Makanan Dan Minuman 10 org x 3 kali	0	Kotak	Rp	35.000	Rp0,00							Nasi Kotak Makanan Dan Minuman	30	Kotak	Rp	35.000	Rp	1.050.000
						Snack Makanan Dan Minuman 10 org x 3 kali	0	Kotak	Rp	15.000	Rp0,00							Snack Makanan Dan Minuman	30	Kotak	Rp	15.000	Rp	450.000
5	**1**	**02**	**01**	**01**	**0064**	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**				**Rp0,00**	**5**	**1**	**02**	**01**	**01**	**0064**	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp4.000.000**
						Baju Rompi Tim Satgas Anti Narkoba Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung	0	Stel	Rp	250.000	Rp0,00							Baju Tim Pelaksana RAD P4GN	20	Stel	Rp	200.000		Rp4.000.000,00
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**				**Rp0,00**	**5**	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**				**Rp**	**40.600.000**
5	**1**	**02**	**02**	**01**		**Belanja Jasa Kantor**				**Rp0,00**	**5**	**1**	**02**	**02**	**01**		**Belanja Jasa Kantor**				**Rp**	**40.600.000**
5	**1**	**02**	**02**	**01**	**0003**	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**				**Rp0,00**	**5**	**1**	**02**	**02**	**01**	**0003**	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**				**Rp**	**6.500.000**
						Narasumber Profesional Narasumber/Pembahas	0	Orang/Kegiatan	Rp	450.000	Rp0,00							Eselon III ke bawah uang sisetarakan Narasumber Pembahas	6	Orang/Jam	Rp	900.000	Rp	5.400.000
						Moderator	0	Orang/Kegiatan	Rp	450.000	Rp0,00							Moderator	1	Orang/Jam/Hari	Rp	700.000	Rp	700.000
						Pembawa Acara/MC	0	Orang/Kegiatan	Rp	300.000	Rp0,00							Pembawa Acara/MC	1	Orang/Kegiatan	Rp	400.000	Rp	400.000
						Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi TP4GN					Rp0,00							**Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi TP4GN**					**Rp**	**3.300.000**
						Honorarium Panitia Penanggungjawab	0	Orang/Kegiatan	Rp	450.000	Rp0,00							Honorarium Panitia Penanggungjawab	1	Orang/Kegiatan	Rp	450.000	Rp	450.000
						Honorarium Panitia Ketua Wakil Ketua	0	Orang/Kegiatan	Rp	450.000	Rp0,00							Honorarium Panitia Ketua Wakil Ketua	1	Orang/Kegiatan	Rp	450.000	Rp	450.000
						Honorarium Panitia Sekretaris	0	Orang/Kegiatan	Rp	300.000	Rp0,00							Honorarium Panitia Sekretaris	1	Orang/Kegiatan	Rp	300.000	Rp	300.000
						Honorarium Panitia Anggota	0	Orang/Kegiatan	Rp	300.000	Rp0,00							Honorarium Panitia Anggota	7	Orang/Kegiatan	Rp	300.000	Rp	2.100.000

5	**1**	**02**	**02**	**01**	**0004**	**Honorarium Tim Pelaksana Kegeiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp0,00**	**5**	**1**	**02**	**02**	**01**	**0004**	**Honorarium Tim Pelaksana Kegeiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					Rp0
						Honorarium Tim Pelaksana Kegeiatan Yang Ditetapkan Kepala Daerah Walikota Tinggi Ketua	0	Orang/Bulan	Rp	1.000.000	Rp0,00													
						Honorarium Tim Pelaksana Kegeiatan Yang Ditetapkan Kepala Daerah Walikota Tinggi Walikota	0	Orang/Bulan	Rp	850.000	Rp0,00													
						Honorarium Tim Pelaksana Kegeiatan Yang Ditetapkan Kepala Daerah Walikota Tinggi Sekretaris	0	Orang/Bulan	Rp	750.000	Rp0,00													
						Honorarium Tim Pelaksana Kegeiatan Yang Ditetapkan Kepala Daerah Walikota Tinggi Anggota	0	Orang/Bulan	Rp	750.000	Rp0,00													
5	**1**	**02**	**04**	**01**	**0004**	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp0,00**	**5**	**1**	**02**	**04**	**01**	**0004**	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp 30.800.000**
						Paket Halfday Sosialisasi TP4GN Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung	0	Ls	Rp	185.000.000	Rp0,00							Paket Halfday Sosialisasi TP4GN Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung	100	Paket	Rp	213.000	Rp21.300.000,00
						Uang Saku Peserta Sosialisasi TP4GN	0	Orang/Hari	Rp	95.000	Rp0,00							Uang Saku/Transport Peserta Sosialisasi	100	Orang/Hari	Rp	95.000	Rp 9.500.000
						Total Anggaran Belanja					**Rp 8.743.248**							**Total Anggaran Belanja**					**Rp 59.996.679**

Bandar Lampung, Juni 2025
KEPALA KESBANGPOL
KOTA BANDAR LAMPUNG

PARYANTO, S.IP
Pembina utama Muda
NIP. 19651001 198602 1 003

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *community based development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

EVA DWIANA

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. Dr. SUSILO No. 2 Telp. (0721) 267126 – 252300 Psw. 826 BANDAR LAMPUNG

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN				
	1.1	Latar Belakang	✓			
	1.2	Landasan Hukum	✓			
	1.3	Maksud dan Tujuan	✓			
	1.4	Sistematika Penulisan	✓			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN				
		Formulir E.81	✓			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH				
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	✓			
4	BAB IV	PENUTUP	✓			

Bandar Lampung, 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bandar Lampung

AHMAD NURIZKI ERWANDI, S.STP.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19820108 200112 1 002

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si NIP.19690801 199303 2 009	
	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
2	KOMSIYAH, S.Sos., MM. NIP. 19711205 199203 2 004	
	Perencana Ahli Muda	

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida,

Hj. Putri Amawaty,S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19680218199303 2002

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL. Dr. SUSILO No. 2 Telp. (0721) 267126 – 252300 Psw. 826 BANDAR LAMPUNG

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan.	✓			
4.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masingPerangkat Daerah sesuai surat edaranwalikota.	✓			
5.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah	✓			
6.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.		√	Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bandar Lampung

AHMAD NURIZKI ERWANDI, S.STP.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19820108 200112 1 002

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	**Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si** **NIP.19690801 199303 2 009**	
	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
2	**KOMSIYAH, S.Sos., MM.** **NIP. 19711205 199203 2 004**	
	Perencana Ahli Muda	

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida,

Purnamawaty,S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19700218199303200 2

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
BAB I	**PENDAHULUAN**		1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	2
	1.3	Maksud dan Tujuan	5
	1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SAMPE DENGAN TRIWULAN I**		7
BAB III	**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**		
BAB IV	**PENUTUP**		

LAMPIRAN 6

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 616/IV.01/HK/2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Renja PD) merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi menngamanaytkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta medukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam rancangan perubahan rencana kerja pemerintah daerah (perubahan RKPD) .

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Dalam pelaksanaan / implementasinya, ada berbagai perkembangan dan ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, yaitu :

A. Adanya perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota Bandar Lampung tahun 2025 yang otomatis akan berdampak pada dokumen perencanaan tahunan di tingkat OPD;
B. Adanya kebutuhan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan pada satuan polisi pamong praja yang mengakibatkan adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan renja satuan polisi pamong praja tahun 2025 disusun dengan tahapan dan sistematika yang mengacu pada peraturan mentri dalam negri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,pengendalin dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaga-Negara Tahun 1956 No.55), Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaga-Negara Tahun 1956 No.56) dan Undang-undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaga-Negara Tahun 1956 No.57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pandemi Corona Virus Disease 2029 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Nehara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Noor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025;
19. Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD Tahun 2025, yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksankan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pmaong Praja Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini adalah :

a. Sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam merumuskan Perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025.
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025.
c. Menjabarkan rencana setrategis kedalam rencana operasional.
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan setratgis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Taun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan (Tahun 2025)

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Sebagai Keberlanjutan pembangunan maka dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dirumuskan dengan mendasarkan pada evaluasi Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi, dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan serta isu-isu penting yang harus disikapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

Pada Tahun anggaran 2025, Satuan Polisi Pmog Praja Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dalam melaksanakan urusan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung melaksanakan 2 Program, 10 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan.

Pada Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung memiliki anggaran sebesar Rp. 38.184.852.564,- Realisasi Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Sebesar Rp. 8.980.934.794,- dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD
3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan bahan logistik kantor
5. Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan jasa komunikasi sumber dan daya listrisk
7. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
9. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

10. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.

Rincian lebih lanjut tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sampai dengan Tw I Tahun 2025 tersaji dalam lampiran tabel.2.1 (Formulir E-81).

NO	SASARAN	KODE RKENING					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (t- 2) (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2025) YANG DIEVALUASI (t- 1) TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II										
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (8+14)		17 = (16/7)*100		18
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																														
1.05.0.00.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA											311.989.303.864,00		138.922.472.829,00		38.184.852.564,00		8.980.934.794,00						8.980.934.794,00		23,52		147.903.407.623,00		47,41		
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung							Hasil Penelitian Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Skor	80,01-81,00		76,01-77,00		77,01-78,00																	
1		1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SATUANPOLISI PAMONG PRAJA	PERSEN	90	304.511.940.420,00	90,00	138.372.369.989,00	90,00	37.859.771.536,00		8.965.334.794,00		-	8.965.334.794,00	-	23,68	49,00	147.338.704.783,00	50,00	48,39	Satuan Polisi Pamong Praja
		1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Person	90%	353.060.400,00	100,00	20.595.100,00	100,00	38.174.101,00								100,00	20.595.100,00	18.204,00	5,83	
		1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	dokumen	5	353.060.400,00	5,00	20.595.100,00		38.174.101,00				-		-		20.595.100,00		5,83	
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20		5,00		5,00				-		-		5,00		25,00		
		1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja	Persen	90	52.411.690.053,00	100,00	26.436.064.081,00	90,00	7.907.045.064,00		1.716.359.516,00		-	1.716.359.516,00	-	21,49	100,00	26.152.423.597,00	102,04	49,90	
		1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Setpol PP yang tersedia	bulan	14	50.868.990.053,00	14,00	23.823.604.081,00		7.773.992.564,00		1.685.959.516,00		-	1.685.959.516,00	-	21,69		25.509.563.597,00		50,15	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/ Bulan	80		84		75,00				-		-		84,00		95,45		
		1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Setpol PP yang tersedia	Bulan	12	1.542.700.000,00	100,00	612.460.000,00		213.052.500,00		30.400.000,00		-	30.400.000,00	-	14,27		642.860.000,00		41,67	
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	5		5		5,00				-		-		5,00		100,00		
		1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja	Persen	80	3.481.722.000,00		1.948.704.000,00	80,00	50.000.000,00				-		-			1.948.704.000,00		55,97	
		1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				1.855.000.000,00	1,00	1.948.704.000,00						-		-			1.948.704.000,00			
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1				1,00				-		-						
		1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	Person	80,00	1.626.722.000,00	-	-		50.000.000,00				-		-					
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50				10,00				-		-						
		1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja	Persen	90	2.027.155.500,00	54,00	408.503.913,00	90,00	211.122.371,00		66.497.100,00		-	66.497.100,00	-	31,50	54,00	475.001.013,00	55,10	23,43	
		1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana listrik dan penerangan kantor yang tersedia	Persen	100,00	215.996.000,00	48,00	29.006.269,00		4.992.584,00				-		-		29.006.269,00		13,43	
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	6		1,00		1,00				-		-		1,00				
		1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Persen	100,00	458.996.500,00	88,00	109.637.931,00		32.541.669,00		17.566.500,00		-	17.566.500,00	-	53,98		127.204.431,00		27,71	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	6				1,00				-		-						
		1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Persen	100,00	183.220.000,00		6.704.100,00		3.107.414,00				-		-		6.704.100,00		3,66	
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6				1,00				-		-						
		1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket		131.500.000,00		94.218.400,00	1,00	75.925.338,00		39.233.600,00		-	39.233.600,00	-	51,67		133.452.000,00			
		1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia	Persen	100,00	374.383.000,00	75,00	75.407.736,00		26.655.256,00		9.697.800,00		-	9.697.800,00	-	36,38		85.104.736,00		22,73	
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6				1,00				-		-						
		1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan kantor dan peraturan dan perundang-	Persen	100,00	144.060.000,00		-		900.000,00				-		-					
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	dokumen	6				1,00				-		-						
		1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu yang disediakan	Laporan		130.000.000,00		897.000,00	1,00	6.000.000,00				-		-					
					09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	389.000.000,00		92.632.477,00		61.000.110,00				-		-		92.632.477,00		23,81	
		1	05	01	2.06			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5		27,00		1,00				-		-		27,00		540,00		
		1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	90	3.225.420.000,00	-	1.224.296.200,00	90,00	350.000.000,00				-		-			1.224.296.200,00	-	37,96	
		1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.426.000.000,00		879.550.000,00		350.000.000,00				-		-			879.550.000,00			
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	5				1,00				-		-						
		1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jum.ah pengadaan Meubelair Kantor	Persen	100,00	515.000.000,00		63.753.000,00						-		-					
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	100				1,00				-		-						
		1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor	Persen	100,00	891.000.000,00		252.573.200,00						-		#DIV/0!		252.573.200,00		28,35	
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60				10,00				-		-						
		1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Rumah Dinas	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukunggedung kantor	Persen	100,00	392.420.000,00		28.420.000,00						-		#DIV/0!		28.420.000,00		7,22	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Rangunan Lainnya yang disediakan	Unit	60				10,00				-		-						
		1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja	Persen	100	237.453.319.443,00	100,00	110.095.432.767,00	100,00	28.776.000.000,00		7.087.219.300,00		-	7.087.219.300,00	-	24,63	100,00	117.182.652.067,00	100,00	49,35	
		1	01	01	2.08	02	Sub. Keg Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Listrik				132.519.443,00		14.451.717,00		6.000.000,00		929.300,00		-	929.300,00	-	15,49		15.381.017,00		11,61	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12				12,00				-		-						
		1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan tenaga kontrak yang tersedia	Person	100,00	237.320.800.000,00	79,00	110.080.981.050,00		28.770.000.000,00		7.086.290.000,00		-	7.086.290.000,00	-	24,63		117.167.271.050,00		49,37	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12				12,00				-		-						
		1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja	Persen	90	5.559.573.024,00	90,00	239.773.928,00	90,00	455.430.000,00		95.258.878,00		-	95.258.878,00	-	20,92	90,00	335.032.806,00	100,00	6,03	
		1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Person	90,00	297.532.088,00	76,00	120.467.992,00		40.670.000,00		4.800.000,00		-	4.800.000,00	-	11,80		125.267.992,00		42,10	
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Diperiksa dan/dihasyarkan Pajaknya	Unit	1				1,00				-		-						
		1	05	01	2.09	02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Person	90,00	4.809.040.936,00	33,00	59.653.418,00		408.670.000,00		90.458.878,00		-	90.458.878,00	-	22,13		150.112.296,00		3,12	
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa yang dihasyarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20		20,00		20,00				-		-		20,00				
		1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Person	90,00	256.750.000,00	19,00	4.000.000,00		6.090.000,00				-		-		4.000.000,00		1,56	
								Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60				10,00				-		-						
		1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Rangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Person	90,00	196.250.000,00	86,00	55.653.418,00		-				-		-		55.653.418,00		28,36	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Rangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	6				1,00				-		-						
																							Rata-Rata Capaian Kinerja		-	23,68		50,00	48,39	
																							Predikat Kinerja		-	SR		SR	SR	
2	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap peraturan daerah	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENEGAKAN PERDA	PERSEN	100	7.477.363.444,00	100,00	549.102.850,00	100,00	325.001.028,00		15.600.000,00		-	15.600.000,00	-	4,80	100,00	564.702.850,00	100,00	7,55	
								TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3	PERSEN	100				100,00								100,00		50,00		50,00		
		1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	100	4.084.950.444,00		464.236.450,00	100,00	142.713.675,00		15.600.000,00		-	15.600.000,00	-	10,93	-	479.836.450,00		11,75	
		1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Satkamling di Kota Bandar Lampung	Person	77	665.472.500,00		37.726.200,00		24.499.863,00				-		-			37.726.200,00		5,67	
								Jumlah Dokumen Hasil Fekalisasian Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Dokumen	6				1,00				-		-						
		1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan SDM Linmas di Kota Bandar Lampung	person	77	1.167.500.000,00		88.962.050,00		33.059.179,00		15.600.000,00		-	15.600.000,00	-	47,19		104.562.050,00		8,96	
								Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dokumen	6				1,00				-		-						
		1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat tersusun dalam Pelaksanaan Tugas yang Berwawasan Hak Asasi Manusia	Peningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM Pol PP	person	77	2.203.017.944,00		242.061.950,00		40.029.468,00				-		-			242.061.950,00		10,99	
								Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	150				150,00				-		-						
		1	05	02	2.01	06	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada terkait Penertiban dan Penanganan Anak Jalanan dan Gelandangan	Jumlah dan penerapan perda/perwali tentang penertiban PKL di Kota Bandar Lampung	Kali	360	24.500.000,00		95.486.250,00		40.125.165,00				-		-			95.486.250,00		389,74	
								Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Anak Jalanan dan Gelandangan yang Ditangani	Laporan	50				12,00				-		-						
								Penyediaan layanan dalam rangka dampak sosialkan perda dan perkada				24.500.000,00				5.000.000,00				-		-						

REN JA PERUBAHAN SATPOLPP TA

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan Kondisi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pmong Praja Kota Bandar Lampung serta Program Pemerintah Kota Bandar Lampug maka Perubahan pada Program dan Kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pmong Praja Kota Bandar Lampung pada perubahan anggaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

11. Sub Kegiatan 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan Terdapat pembayaran hutang BBM kendaraan operasional tahun 2024 .
12. Sub Kegiatan 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor Terdapat Penambahan anggaran akibat pergeseran pembayaran hutang tahun 2024.
13. Sub kegiatan 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan katertiban umum serta perlindungan masyarakat Terdapat pembayaran hutang perjadin kegiatan pemberdayaan linmas Tahun 2024.
14. Sub kegiatan 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan bahan logistik kantor Terdapat penambahan anggaran murni tahun 2025 dan pembayaran hutang makan minum aktifitas lapangan tahun 2024.
15. Sub kegiatan 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan mebeleur Penambahan mebeleur untuk ruangan sekertariat dan bidang Satuan Polisi Pamong Praja.
16. Sub kegiatan 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penambahan Perangkat komputer dan alat pendukung lainnya di Sekretariat dan Bidang.
17. Sub kegiatan 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannyaPenambahan Pakaian dinas lapangan dan beserta atribut kelengkapannya.

Total Perubahan (Penambahan) anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung adalah Sebesar Rp. 3.989.668.111,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah) , rincian recana program dan kegiatan beserta target kinerja dalam perubahan Renja Tahun 2025 disajikan dalam table-3.1.

TABEL 5.1

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA TAHUN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Satuan		Target			PAGU INDIKATIF (Rp)			Ket.
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN	RANCANGAN PRKPD TA	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN PRKPD TAHUN 2025	

													2025	HUN 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									37.817.040.664,00	38.184.852.564,00	41.975.640.910,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN									37.817.040.664,00	38.184.852.564,00	41.975.640.910,00	

						WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
	1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN**										**37.817.040.664,00**	**38.184.852.564,00**	**41.975.640.910,00**	

						DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
1.	**1**	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98%**	**98 %**	**37.602.481.208,00**	**37.859.771.536,00**	**41.603.988.507,00**	

						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Pemerintahan Bidang Perencanaan sertta Penelitian dan Pengembangan**	**Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**									
	1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan,Penganggaran**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan,Penganggaran**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**29.411.798,00**	**30.174.101,00**	**30.174.101,00**	

						Perangkat Daerah	**Perangkat Daerah**	**dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**	**dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**									
	1	**05**	**01**	**2.01**	**006**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtis**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtis**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina**	**5 Laporan**	**5 Laporan**	**5 Laporan**	**5 Laporan**	**5 Laporan**	**29.411.798,00**	**30.174.101,00**	**30.174.101,00**	

						ar Realisasi Kinerja SKPD	**ar Realisasi Kinerja SKPD**	**si Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**si Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**								
	1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang akuntable**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang akuntable**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98%**	**98 %**	**7.771.600.664,00**	**7.987.045.064,00**	**7.985.867.564,00**	

								1	1									
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	70 Orang/bulan	7.539.040.664,00	7.773.992.564,00	7.773.992.564,00	
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	232.560.000,00	213.052.500,00	211.875.000,00	

						si Keuangan SKPD	**si Keuangan SKPD**	**SKPD**	**SKPD**									
	1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**80 %**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**1.246.160.000,00**	
	1	**05**	**01**	**2.05**	**0002**	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta**	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengka**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1.184.160.000,00**	

						Atribut Kelengkapannya	**Atribut Kelengkapannya**	**pan**	**pan**								
	1	**05**	**01**	**2.05**	**009**	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**10 Orang**	**10 Orang**	**10 Orang**	**10 Orang**	**5 Orang**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**62.000.000,00**	

	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar Operasional OPD	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	123.838.746,00	211.122.371,00	340.269.207,00	
	1	05	01	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediaka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediaka	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.992.584,00	4.992.584,00	

						Kantor	**Kantor**	**n**	**n**									
	1	**05**	**01**	**2.06**	**0002**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**24.570.445,00**	**32.541.669,00**	**30.695.481,00**	
	1	**05**	**01**	**2.06**	**0003**	**Penyediaan Peralatan Rumah**	**Penyediaan Peralatan Rumah**	**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang**	**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**2.876.327,00**	**3.107.414,00**	**3.107.414,00**	

						Tanggal	Tanggal	Disediakan	Disediakan									
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	75.925.338,00	240.045.338,00	
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	17.491.974,00	26.655.256,00	24.028.535,00	

						n	n											
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	

	1	05	01	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	61.000.110,00	30.499.855,00	
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusa	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusa	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	150.000.000,00	350.000.000,00	959.187.635,00	

						n Pemerintah Daerah	n Pemerintah Daerah											
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	6 unit	150.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediaka	Jumlah Paket Mebel yang Disediaka	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Paket	0,00	0,00	248.082.124,00	

								n	n									
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10 Unit	0,00	0,00	361.105.511,00	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98 %	98 %	98 %	98 %	100 %	28.956.000.000,00	28.776.000.000,00	30.537.900.000,00	

						n Daerah	n Daerah										
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
	1	05	01	2.00	000	Penyediaan Jasa Pelaya	Penyediaan Jasa Pelaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Lapora	1 Lapora	1 Lapora	1 Lapora	12 Lapora	28.950.000.000,	28.770.000.000,	30.531.900.000,	

				8	4	nan Umum Kantor	nan Umum Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n	n	n	n	n	00	00	00	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha	Inventaris Kantor yang terpelihara	Inventaris Kantor yang terpelihara	98%	98%	98%	98%	98%	521.630.000,00	455.430.000,00	504.430.000,00	

						n Daerah	**n Daerah**										
	1	**05**	**01**	**2.09**	**001**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas**	**Jumlah Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**Jumlah Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**1 Unit**	**1 Unit**	**1 Unit**	**1 Unit**	**1 Unit**	**44.430.000,00**	**40.670.000,00**	**40.670.000,00**	

						atau Kendaraan Dinas Jabatan	**atau Kendaraan Dinas Jabatan**										
	1	**05**	**1**	**2.09**	**002**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizi**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizi**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan**	**20 Unit**	**20 Unit**	**20 Unit**	**20 Unit**	**20 Unit**	**472.200.000,00**	**408.670.000,00**	**457.670.000,00**	

						nan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**nan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**nya**	**nya**								
	1	**05**	**01**	**2.09**	**006**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliharaa**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliharaa**	**1 Unit**	**1 Unit**	**1 Unit**	**1 Unit**	**10 Unit**	**5.000.000,00**	**6.090.000,00**	**6.090.000,00**	

2.	**1**	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3 Persentase Penegakan Perda**	**Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3 Persentase Penegakan Perda**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**214.559.456,00**	**325.081.028,00**	**371.652.403,00**	
	1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**144.559.456,00**	**142.713.675,00**	**221.102.593,00**	

						dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**										
	1	**05**	**02**	**2.01**	**003**	**Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan**	**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelen**	**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**24.500.000,00**	**24.499.863,00**	**13.209.662,00**	

						Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	**Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota**	**ggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota**	**ggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota**									
	1	**05**	**02**	**2.01**	**0004**	**Pemberdayaan Perlindungan**	**Pemberdayaan Perlindungan**	**Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberda**	**Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberda**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**33.059.456,00**	**33.059.179,00**	**48.659.179,00**	

						Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**yaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**yaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum**									
	1	**05**	**02**	**2.01**	**005**	**Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi**	**Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi**	**Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan**	**Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan**	**100 Orang**	**100 Orang**	**100 Orang**	**100 Orang**	**100 Orang**	**39.000.000,00**	**40.029.468,00**	**29.925.304,00**	

						Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi	**Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi**	**Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya**	**Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya**									

						Manusia	**Manusia**											
	1	**05**	**02**	**2.01**	**15**		**Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui**		**Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,**					**6 Laporan**			**100.000.000,00**	

							Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan		**Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan**									

	1	05	02	2.01	016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penert	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penert	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakuka	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakuka	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	12 Laporan	39.000.000,00	40.125.165,00	24.308.448,00	

						iban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	**iban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**	**n Penindakan**	**n Penindakan**								
	1	**05**	**02**	**2.01**	**0017**	**Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak**	**Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak**	**Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada**	**Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**9.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	

						Penegakan Peraturan Daerah dan Pertur an kepala daerah	**Penegakan Peraturan Daerah dan Pertur an kepala daerah**	**yang Terlayani umlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani**	**yang Terlayani umlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani**									

	1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati /Wali Kota**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati /Wali Kota**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persentase Penegakan Perda**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**70.000.000,00**	**0,00**	**40.684.248,00**	

	1	05	02	2.02	011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	4 Laporan	35.000.000,00	35.222.413,00	20.491.417,00	

	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	35.144.940,00	20.192.831,00	

								Daerah	**Daerah**									
	1	**05**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Penyedik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota**				**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		**112.000.000,00**	**109.865.562,00**	

	1	**05**	**02**	**2.03**	**005**	**Dukungan Operasional Sekretariat PPNS**	**Dukungan Operasional Sekretariat PPNS**	**Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS**	**Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**		**112.000.000,00**	**109.865.562,00**	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung tahun ke-5 . Pencapaian kinerja perlu diperhatikan mengingat pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam RPJMD Kota Bandar Lampung.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025 tetap mengacu pada produk-produk hukum terbaru, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Propinsi maupun pusat. Pelaksanan program dan kegiatan tersebut juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Pada akhirnya kesuksesan pelaksanaan Pembanguan Kota Bandar Lampung bergantung pada perencanaannya. Perencanaan yang logis, realitis, faktual dan komperhensif mampu menciptakan produk pembangunan yang tepat sasaran, tepat waktu dan efesien

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	√			
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	√			
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 2025

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Bandar Lampung

IDHAM BASYAR SYAHPUTRA, S.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710723 200003 1004

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E., M.Si.
Pembina Tingkat. I (IV/b)
NIP19700218 199303 2 002

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, S.T., M.Si	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	FITRI YANTI, S.T., M.Si	
	Fungsional Perencanaan Bapperida Kota Bandar Lampung	

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan.				
4.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masingPerangkat Daerah sesuai surat edaranwalikota.				
5.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah				
6.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.		√	Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Bandar Lampung

IDHAM BASYAR SYAHPUTRA, S.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710723 200003 1004

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	**FITRI YANTI, S.T., M.Si**	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	**FITRI YANTI, S.T., M.Si**	
	Fungsional Perencanaan Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP197000218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi RenjaPerangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi Renja Perangkat Daerah telah sampai dengan triwulan II tahun 2025
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Sasaran rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah telah dirumuskan sesuai RPJMD, RKPD, dan RKP

Bandar Lampung, 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY,S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP19700218 199303 2 002

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	**FITRI YANTI, S.T., M.Si**	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	**FITRI YANTI, S.T., M.Si**	
	Fungsional Perencanaan Bapperida Kota Bandar Lampung	

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tabel rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerag Tahun 2024.....15

BAB IV PENUTUP 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja

dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Walikota Bandar Lampung Tahun 2023-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2023-2026 yaitu : ***"BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT"***

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandar Lampung No 40 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah

yang menjadi kewenangan daerah dalam hal penyusunan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan dibidang kebencanaan dan kebakaran meliputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-3 (tiga) dalam RPJMD Tahun 2023-2026 yaitu ***Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur Dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Ekonomi dan Pelayanan Sosial.*** Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, pada Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung 2023-2026 dan RKPD Tahun 2025 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Perda Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.;
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung (Perwali) No. 70 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07);
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 58)

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota.
2. Sebagai acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025.
3. Sebagai acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahhan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tabel rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut.Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pelaksanaan misi melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung sampai tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenui target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
b) Realisasi program/kegiatan yang telah memenui target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
c) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Realisasi program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari tahun anggaran 2023 sampai dengan tahun anggaran berjalan 2026 dapat dilihat pada lampiran ***tabel E-81.***

Tabel E.81

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II S.D TAHUN 2025 KOTA BANDAR LAMPUNG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) s.d TRIWULAN IV		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN IV TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV											
									K	RUPIAH	K	2024	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16		17		18		19		20		21		
Upaya Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana							Cakupan Pelayanan Bencana Daerah	Persen	100		100		100										100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
Pemulihan Pasca Bencana							Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Persen	100		100		100										100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
Terselenggaranya Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana							Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	Persen	100		100		100										100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
	1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persen	98	167.009.086.605,00	98	40.574.906.072,00	98	13.984.527.588	98	2.248.956.528							98	2.248.956.528	100,00	16,08	98	43.032.522.950	100,00	25,77	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100	119.996.136,00		-		39.998.712																	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	59.999.559		-		19.999.853																	
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	59.996.577		-		19.998.859																	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	53.380.492.387	100	13.674.217.652,00	100	3.895.538.050	100	826.792.528,00							100	826.792.528,00	100,00	21,22	100	14.501.010.180	100,00	27,17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gajidan Tunjangan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Tersedia	Orang/ Bulan	14	49.360.102.387	14	13.072.940.852,00	14	3.620.010.550	14	826.792.528,00							14	826.792.528	100,00	22,84	14	13.999.732.680	100,00	28,36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Terlaksana	Dokumen	12	4.020.390.000	12	501277.500,00	12	275.527.500	0	-											12	501277.500	100,00	12,47	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98	5.472.950.000	98	348.946.500,00	98	206.750.000	98	-											98	348.946.500	100,00	6,38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang tersedia	Paket	80	5.352.950.000	80	338.946.500,00	80	186.750.000	0	-											80	338.946.500	100,00	6,33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
	1	05	1	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Orang	80	120.000.000	0	10.000.000,00	80	20.000.000	0	-											80	10.000.000	100,00	8,33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung

| | | |

						PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN				**453.633.500**																		**189.498.000**		**41,77**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
						Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	453.633.500		189.498.000,00											-			1	189.498.000	100,00	41,77	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
	1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Cakupan Pelayanan Bencana Daerah**	**Persen**	**100**	**3.400.000.000**	**100**	**366.020.500,00**	**100**	**754.983.439**	**100**	**66.770.000,00**							**100**	**66.770.000**	**100,00**	**8,84**	**100**	**451.952.850**	**100,00**	**13,29**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
	1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1(satu) tahun**	**Dokumen**	**5**	**5.900.000.000**			**1**	**158.090.147**	**0**	-							**1**	-	**100,00**	-	**5**	**89.256.450**	**100,00**	**1,51**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
	1	05	3	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	450	475.000.000		89.256.450,00	100	158.090.147	0	0							100	-	100,00	-	100	89.256.450	22,22	18,79	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
	1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persen**	**100**	**3.400.000.000**	**100**	**267.170.500,00**	**100**	**469.966.106**	**100**	-												**98.226.400**	**100,00**	**2,89**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung**
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Paket	10	500.000.000		98.226.400,00	1	189.966.106	0	-												98.226.400	100,00	39,65	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
	1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1(satu) tahun	Dokumen	1					350.000.000													-			
	1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase korban yang berhasil dievakuasi dari lokasi berbahaya**	**Persen**	**100**					**4.587.583**		-												-			
	1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	100					4.587.583													-			
	1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase regulasi penanggulangan bencana yang telah disusun**	**Persen**	**100**					**122.339.603**	**100**	**66.770.000,00**							**100**	**66.770.000**	**100,00**	**54,58**	**100**	**66.770.000**	**100,00**		
	1	05	03	2.04	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang	100					102.668.435	100	66.770.000,00							100	66.770.000	100,00	**65,03**	100	66.770.000	100,00		
						Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1					19.671.168										-					-			

d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 s.d 2026 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Dana yang tersedia tidak dapat memenuhi seluruh Kegiatan Kebencanaan sehingga tidak semua usulan pembangunan dari masyarakat dapat terpenuhi.
2. Defisitnya Anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung sehingga menyebabkan tersendatnya pelaksanaan Program dan Kegiatan.
3. Tidak tepatnya penanganan terhadap titik titik permasalahan di lapangan sehingga hasil yang diharapkan tidak optimal.

e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah *shopping list working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melaui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat

tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tesebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung yang membantu Walikota Bandar Lampung dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Ketertiban Umum di Kota Bandar Lampung, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung merupakan cerminan wajah Provinsi Lampung sehingga penataan Kota Bandar Lampung secara terus menerus perlu dilakukan agar bias sejajar dengan Ibukota lain di Indonesia.

Sampai saat ini Kota Bandar Lampung masih dihadapkan dengan berbagai masalah perkotaan, antara lain: kemacetan, lingkungan kumuh dan banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung sampai saat ini masih dihadapkan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan Resiko Bencana dan Kebakaran secara lengkap dan terpadu. Tuntutan tersebut belum dapat terpenuhi secara menyeluruh karena keterbatasan dana.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Tabel rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2025)	TAHUN 2025				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												PAGU MURNI		PERGESERAN / EFISIENSI / PERUBAHAN			
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH		
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG												**98,00**	**Rp 14.163.193.449**	**98,00**	**Rp 14.635.419.088**	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kota Bandar Lampung	**Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**5**	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**Rp 14.163.193.449**	**98,00**	**Rp 14.635.419.088**	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
		1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**			**Persen**		**98**	**Rp 39.998.712**	**98**	**Rp 39.998.712**	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
		1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		3	Rp 19.999.853	3	Rp 19.999.853	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
		1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		2	Rp 19.998.859	2	Rp 19.998.859	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung

		1	05	01	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Persen**	**98,00**	**98**	**Rp**	**3.895.538.050**	**98**	**Rp**	**3.825.914.050**	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
		1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	14	14	Rp	3.620.010.550	14	Rp	3.620.010.550	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
		1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	Rp	275.527.500	12	Rp	205.903.500	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
		1	05	01	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Persen**	**100,00**	**80**	**Rp**	**206.750.000**	**80**	**Rp**	**206.750.000**	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
		1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	80	Rp	186.750.000	80	Rp	186.750.000	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
		1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4,00	80	Rp	20.000.000	80	Rp	20.000.000	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
		1	05	01	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Persen**	**98,00**	**98**	**Rp**	**284.064.435**	**98**	**Rp**	**256.734.067**	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
		1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1	Rp	23.277.521	1	Rp	23.277.521	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
		1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1	Rp	33.015.232	1	Rp	33.015.232	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
		1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Paket	1	1	Rp	12.551.275	1	Rp	12.551.275	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung

1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	100,00	100	Rp	125.000.000	100	Rp	97.669.632	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	1	1	Rp	21.111.320	1	Rp	21.111.320	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Yang Disediakan	Dokumen	1	1	Rp	3.600.000	1	Rp	3.600.000	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	20	Rp	65.509.087	20	Rp	65.509.087	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
1	05	01	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Persen**	**98,00**		**Rp**	**2.267.705.225**	**98**	**Rp**	**2.510.772.618**	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	1	1	Rp	1.006.160.000	1	Rp	1.030.000.000	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	1	1	Rp	1.065.000.000	1	Rp	1.265.850.000	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	Rp	196.545.225	1	Rp	214.922.618	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung

		1	05	01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Persen**	**100,00**		**Rp**	**5.130.120.000**	**100**	**Rp**	**5.835.720.000**	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
		1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	12	Rp	186.120.000	12	Rp	211.120.000	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
		1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	12	Rp	4.944.000.000	12	Rp	5.624.600.000	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
		1	05	01	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Persen**	**98,00**	**98**	**Rp**	**1.405.367.727**	**98**	**Rp**	**1.463.793.535**	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
		1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	Rp	42.430.000	5	Rp	42.430.000	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
		1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	Rp	1.320.187.727	7	Rp	1.378.613.535	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
		1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	1	1	Rp	42.750.000	1	Rp	42.750.000	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung

	Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana	**1**	**05**	**03**			**Program Penanggulangan Bencana**		**Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana**	**Persen**	**98,00**		**Rp 933.649.300**	**98,00**	**Rp 495.736.106**	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
									Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	**Persen**	**98,00**			**98,00**		Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
									Cakupan Pelayanan Bencana Daerah	**Persen**	**98,00**			**98,00**		Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
									Indeks Risiko Bencana	**Indeks**	**119,79**			**119,79**		Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
		1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**			**Persen**	**98,00**	**98**	**Rp 158.090.147**	**98,00**	**Rp -**	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
		1	05	03	2.01	0003	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	100	100	Rp 158.090.147	100		Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung

1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**			**Persen**	**98**	**98**	**Rp**	**469.966.106**	**98**	**Rp**	**419.966.106**	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit		**5**	Rp	119.966.106	**5**	Rp	119.966.106	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen		1	Rp	350.000.000	1	Rp	300.000.000	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan**	**Persen**		**98**	**Rp**	**102.720.679**	**98**	**Rp**	**9.000.000**	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten / Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten / Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganankeadaandarurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang		100	Rp	102.720.679		Rp	9.000.000	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung

		1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**Jumlah Dok Rencana Penanggulangan Bencana dan Jumlah Raperda Penanggulangan Bencana yang tersusun**	**Persen**	**98**	**98**	**Rp**	**202.872.368**	**98**	**Rp**	**66.770.000**	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
		1	05	03	2.04	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang		140	Rp	102.668.435	140	Rp	66.770.000	Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung
		1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kotasampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen		1	Rp	100.203.933	1			Badan Penanggulangan Bencana	Bandar Lampung

BAB IV

PENUTUP

Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG.

EVA DWIANA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN & PENYELAMATAN KOTA BANDAR LAMPUNG





RENCANA KERJA

Perubahan

TAHUN 2025

Jl. Kapten Tendean No 2 Palapa Kec
Tanjungkarang Pusat-Bandar Lampung

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	**BAB I**	**PENDAHULUAN**	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	**BAB II**	**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**	√			
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	√			
		Tabel T-C.29	√			
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√			
		Tabel T-C.30	√			
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√			
3	**BAB III**	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**	√			
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	√			
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	√			
	3.3	Program dan Kegiatan	√			
		Tabel T-C.33.	√			
4	**BAB IV**	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	√			
5	**BAB V**	**PENUTUP**	√			

Bandar Lampung, September 2025

Kepala Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Bandar Lampun

ANTHONI IRAWAN,S.STP,MM
NIP. 19840114 200312 1 001

Mengetahui,

Diverifikasi :		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI.ST.M.SI	
	KABID INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BAPPEDA KOTA BANDAR LAMPUNG	

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tk.I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR E.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, September 2025

Kepala Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Bandar Lampung

ANTHONI IRAWAN,S.STP,MM
NIP. 19840114 200312 1 001

Diverifikasi :		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI.ST.M.SI	
	KABID INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BAPPEDA KOTA BANDAR LAMPUNG	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tk.I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR E.71
KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran tahunan Perangkat Daerah telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan tahunan daerah serta mengacu pada RKPD dan RKP.	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, September 2025,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tk.I
NIP.19700218 199303 2 002

Diverifikasi :		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI.ST.M.SI KABID INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BAPPEDA KOTA BANDAR LAMPUNG	

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum 6
1.3 Maksud dan Tujuan 9
1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenan 2025 12

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **26**

BAB IV PENUTUP **30**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana KerjaDinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Walikota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : ***"BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT"***

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat.
2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
6. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan

masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam hal penyusunan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan dibidang kebakaran dan penyelamatan meliputi Bidang Pencegahan, Bidang Pemadaman, Bidang Penyelamatan, serta Bidang Sarana dan Prasarana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.Dengan demikian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-3 (tiga) dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu ***Terwujudnya Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan.*** Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57),

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden NomorTahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 3406);

14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
17. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampungdimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota.

2. Sebagai acuan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025.
3. Sebagai acuan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja yang meatar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Tahun Lalu danCapaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tersebut. Oleh sebab itu Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dna kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

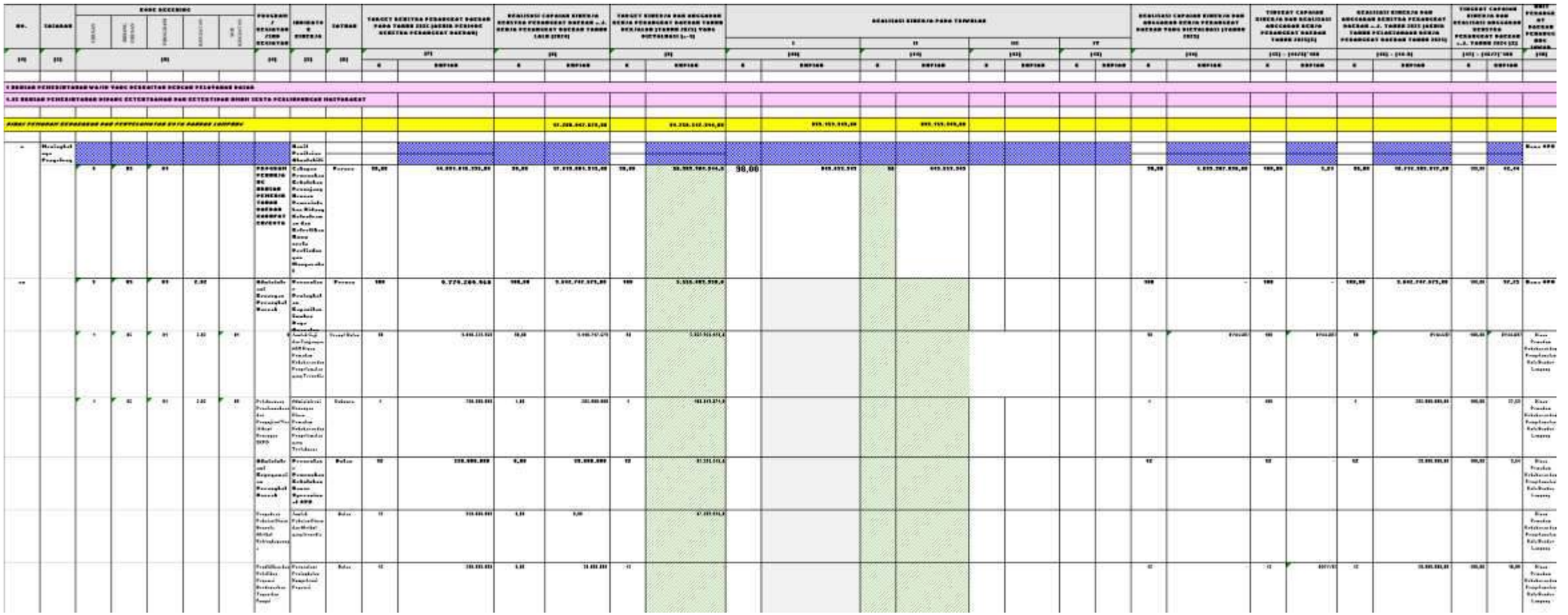
a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksananya.

Terkait dengan hal tersebut Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampungini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenui target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
b) Realisasi program/kegiatan yang telah memenui target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
c) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

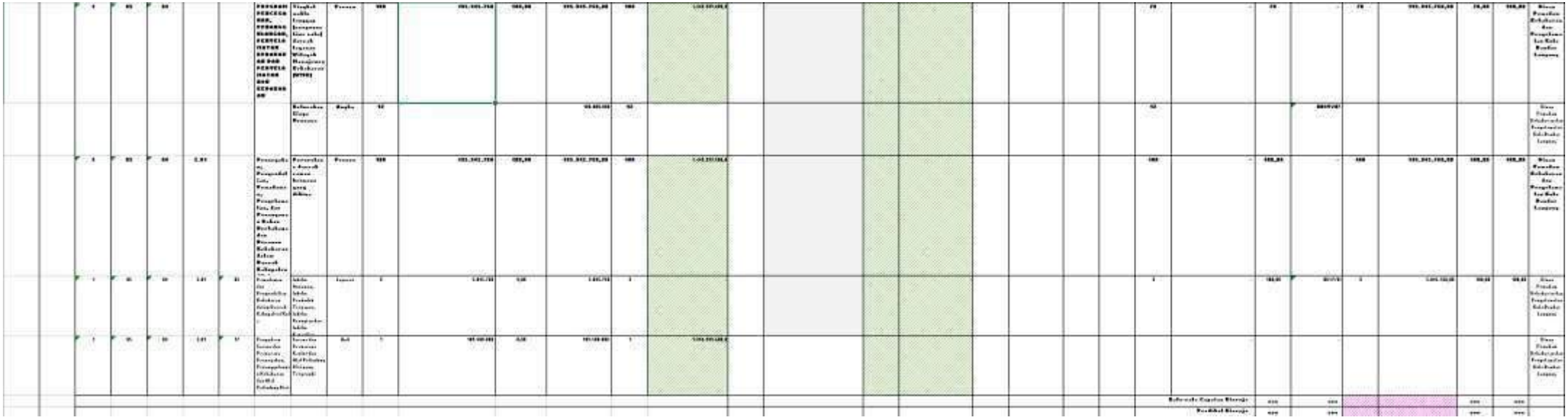
Realisasi program/kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dari tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran berjalan 2026 dapat dilihat pada ***tabel T-C*.29**

Tabel E.81



| | | |

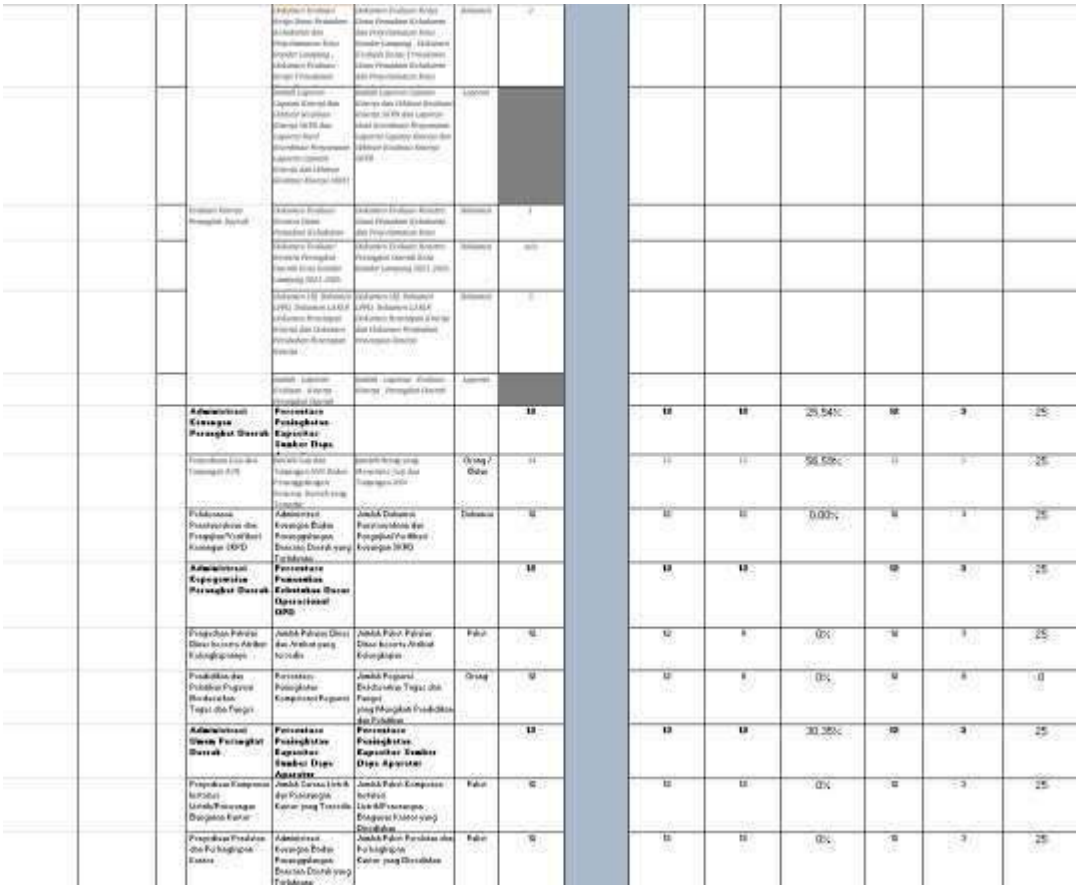
| | | |



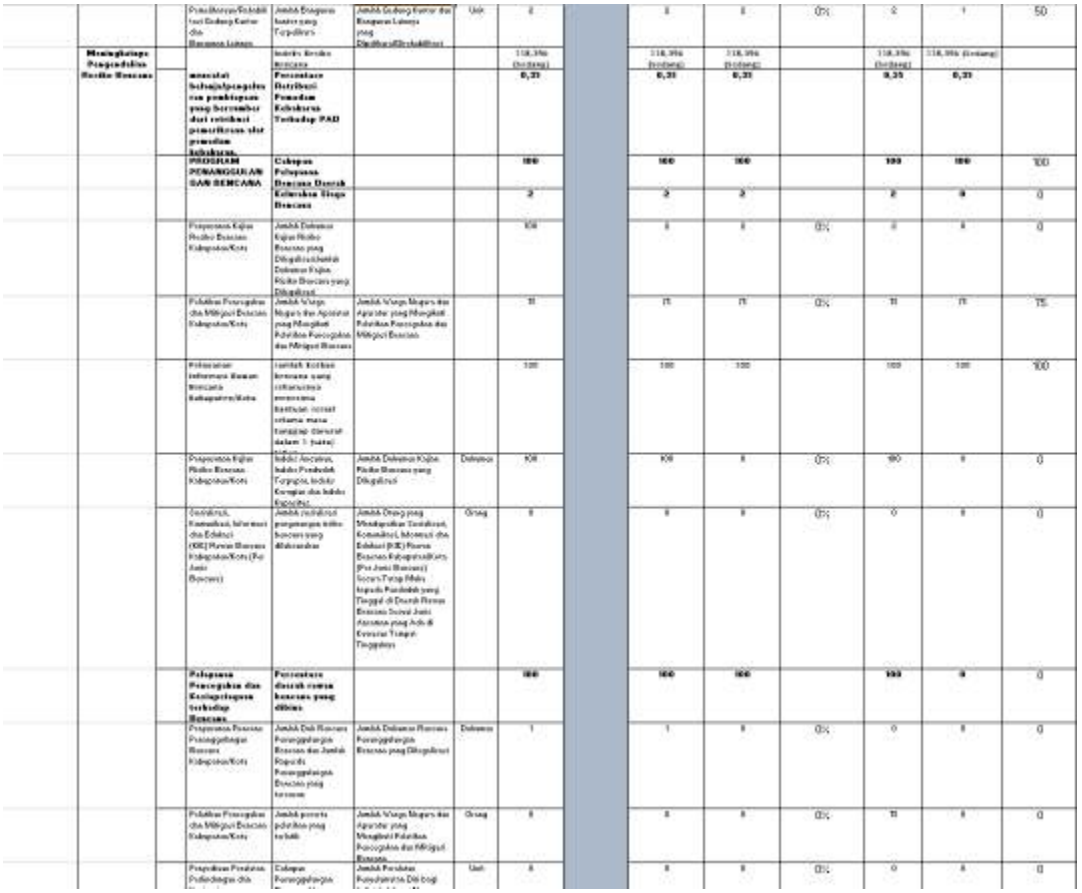
Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SERTA PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2025
KOTA BANDAR LAMPUNG

Nama Perangkat Daerah :Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

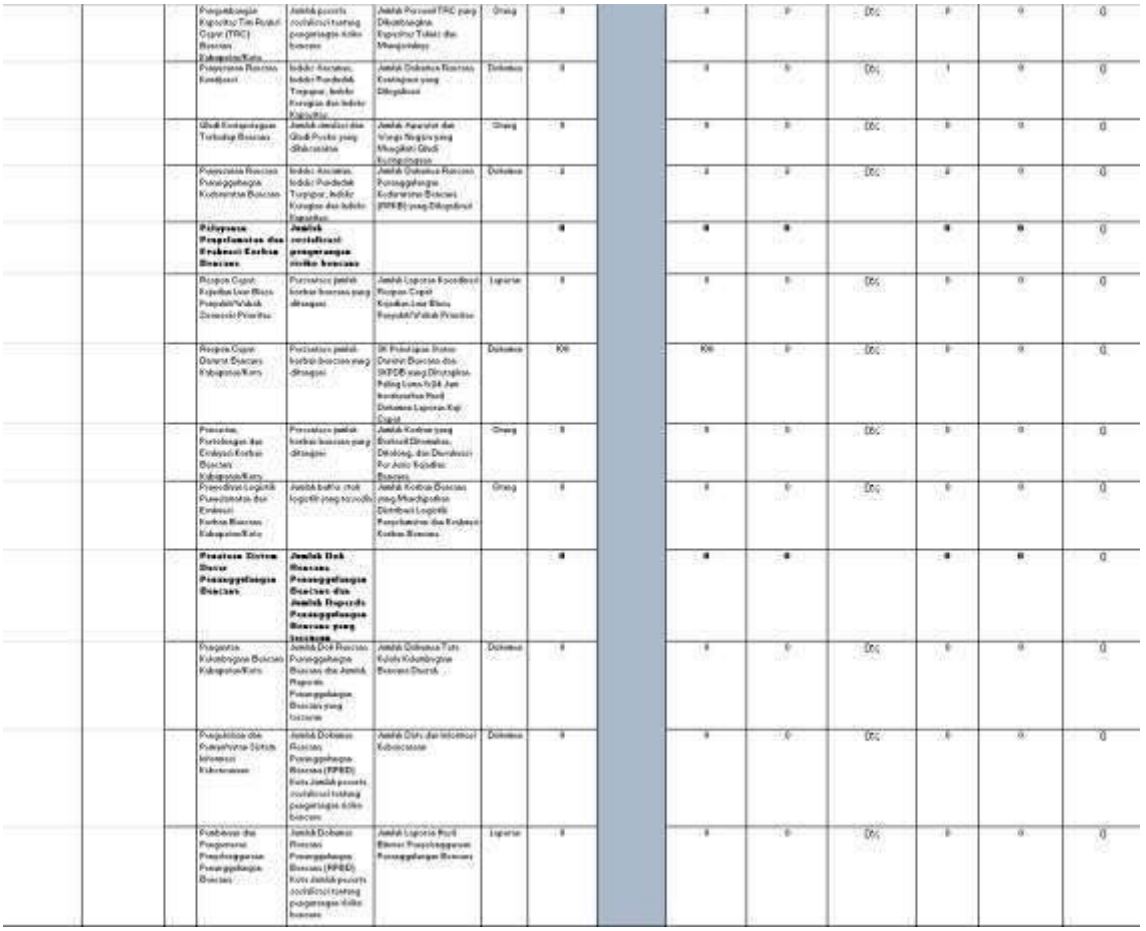
Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan,dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tujuan Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Satuan Tahun 2025	pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2025)	Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun ini-1	Target RENJA PD Tahun 2025	Realisasi RENJA PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi %	Tahun 2025 (RENJA pada Tahun berjalan)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d Tahun berjalan (Tahun ini-1) Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Kesehatanya Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan														
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Administrasi dan Material Jasa serta Perlindungan Masyarakat													
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran Evaluasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Perencanaan Penganggaran Evaluasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen								
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung	Dokumen RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung	Dokumen								
				Dokumen Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung dan Dokumen	Dokumen Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung dan Dokumen Perangkat Daerah Lain	Dokumen								
				Dokumen Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung dan Perubahan Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung	Dokumen Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung dan Perubahan Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung	Dokumen								
				Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen								
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir (LKA) SKPD	Laporan Keuangan Akhir (LKA) SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen LKA SKPD	Laporan Keuangan Akhir (LKA) SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen LKA SKPD	Dokumen								
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Laporan Keuangan Perubahan (LKP) SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan LKA SKPD	Laporan Keuangan Perubahan (LKP) SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan LKA SKPD	Dokumen								
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan LPPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Laporan LPPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Dokumen LKIP	Laporan LPPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Dokumen LKIP	Dokumen								



			Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Perlatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12		12	12	0%	12	0	25
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12		12	12	25,41%	12	0	0
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12		12	12	28,76%	12	0	25
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12		12	12	21,94%	12	0	25
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12		12	12	55,40%	12	0	0
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**			12		12	12		12	9	25
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1		1	1	0%	1	1	100
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2		2	2	0%	2	1	50
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2		2	2	0%	2	1	50
			Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**			12		12	12	71,76%	12	9	25
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dinas Listrik dan Perarsipan Kantor yang Tersedia	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12		12	12	25,08%	12	0	25
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12		12	12	73,84%	12	0	25
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**			12		12	12		12	9	25
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Tersedian	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12		12	12	0%	12	0	25
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Tersedian	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	Unit	12		12	12	99%	12	0	25
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang Tersedian	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12		12	12	0%	12	0	0



		Prasarana/Kendaraan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan kantor yang Terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2		2	2	0%	2	1	50
	Meningkatnya Pengendalian Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana			118,39% (terdiang)		118,39% (terdiang)	118,39% (terdiang)		118,39% (terdiang)	118,39% (terdiang)	
		meningkatnya kebanyakan pembiayaan yang bersumber dari retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.	**Persentase Retribusi Pemadam Kebakaran Terhadap PAD**			**0,31**		**0,31**	**0,31**		**0,31**	**0,31**	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Cakupan Pelayanan Bencana Daerah Kelurahan Siaga Bencana**			**100**		**100**	**100**		**100**	**100**	100
						2		**2**	**2**		**2**	**0**	0
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilaksanakan/Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilaksanakan			KK		1	1	0%	0	1	0
		Pelatihan Penanggulan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Kegiatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Kegiatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		11		11	11	0%	11	11	75
		Penyusunan informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang terevakuasi menerima bantuan sesuai kriteria mulai tanggap darurat dalam 1 (satu)			100		100	100		100	100	100
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Ancaman, Indeks Kerentanan, Indeks Kapasitas, Indeks Kerugian dan Indeks Kapasitas	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilaksanakan	Dokumen	KK		1	1	0%	100	1	0
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah individu/ pengelompok kritis bencana yang dilaksanakan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Evakuasi Tempat Tinggalnya	Orang	0		0	0	0%	0	0	0
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	**Persentase desa rawan bencana yang dilatih**			**100**		**100**	**100**		**100**	**0**	0
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Rencana Penanggulangan Bencana dan Jumlah Rapat/ Penanggulangan Bencana yang tersusun	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilaksanakan	Dokumen	1		1	0	0%	0	0	0
		Pelatihan Penanggulan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan yang terlatih	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Kegiatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	0		0	0	0%	11	0	0
		Penyediaan Peralatan Pelindungan dan	Cakupan Penanggulangan	Jumlah Peralatan Kendaraan Dinas bagi	Unit	0		0	0	0%	0	0	0



Berdasarkan tabel diatas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Dana yang tersedia tidak dapat memenuhi seluruh Kegiatan Penanggulangan Kebakaran dan Non-Kebakaran sehingga tidak semua usulan pembangunan dari masyarakat dapat terpenuhi;
2. Defisitnya Anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung sehingga menyebabkan tersendatnya pelaksanaan Program dan Kegiatan;
3. Tidak tepatnya penanganan terhadap titik titik permasalahan di lapangan sehingga hasil yang diharapkan tidak optimal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah *shopping list working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah- olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melaui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tesebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung yang membantu Walikota Bandar Lampung dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Ketertiban Umum di Kota Bandar Lampung, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung merupakan cerminan wajah Provinsi Lampung sehingga penataan Kota

Bandar Lampung secara terus menerus perlu dilakukan agar bias sejajar dengan Ibukota lain di Indonesia.

Sampai saat ini Kota Bandar Lampung masih dihadapkan dengan berbagai masalah perkotaan, antara lain: kemacetan, lingkungan kumuh dan banjir. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung sampai saat ini masih dihadapkan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan Resiko Bencana dan Kebakaran secara lengkap dan terpadu. Tuntutan tersebut belum dapat terpenuhi secara menyeluruh karena keterbatasan dana.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATDAERAH

3.1 Tabel rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKAP- BELANJA SKPD

KOTA BANDAR LAMPUNG
Tahun Anggaran 2025

Organisasi : 1.03 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah Anggaran Murni						Jumlah Anggaran Perubahan						Bertambah / Berkurang	
				T-1	T				T+1	T-1	T				T+1		
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11	12	13	14	15	16	17=13+14+15+16	18	19 = 17 - 10	20=19/10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				20.188.107.376	11.721.252.103	0	0	31.909.359.479	0		20.451.072.837	12.220.545.703	0	0	32.671.658.540	0	762.299.061	2,39 %
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				20.188.107.376	11.721.252.103	0	0	31.909.359.479	0		20.451.072.837	12.220.545.703	0	0	32.671.658.540	0	762.299.061	2,39 %
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20.178.107.376	10.641.252.103	0	0	30.819.359.479	0		20.441.072.837	10.791.252.103	0	0	31.232.324.940	0	382.965.461	1,18 %
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.620.983.350	0	0	0	5.620.983.350	0		5.555.483.350	0	0	0	5.555.483.350	0	(65.500.000)	-1,17 %
1.03.01.2.02.0021	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		5.367.359.479	0	0	0	5.367.359.479	0		5.367.359.479	0	0	0	5.367.359.479	0	0	0,00 %
1.03.01.2.02.0053	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		253.623.871	0	0	0	253.623.871	0		188.043.871	0	0	0	188.043.871	0	(65.580.000)	-25,86 %
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				257.173.004	0	0	0	257.173.004	0		87.299.916	0	0	0	87.299.916	0	(169.873.088)	-66,05 %
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		87.299.916	0	0	0	87.299.916	0		87.299.916	0	0	0	87.299.916	0	0	0,00 %
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		169.873.088	0	0	0	169.873.088	0		0	0	0	0	0	0	(169.873.088)	-100 %
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				334.425.281	0	0	0	334.425.281	0		357.969.430	0	0	0	357.969.430	0	23.544.149	7,04 %
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		58.451.573	0	0	0	58.451.573	0		58.451.573	0	0	0	58.451.573	0	0	0,00 %
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		14.139.204	0	0	0	14.139.204	0		14.139.204	0	0	0	14.139.204	0	0	0,00 %
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		84.420.000	0	0	0	84.420.000	0		124.740.000	0	0	0	124.740.000	0	40.320.000	47,76 %
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		32.415.504	0	0	0	32.415.504	0		32.415.504	0	0	0	32.415.504	0	0	0,00 %

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah Anggaran Murni						Jumlah Anggaran Perubahan						Bertambah / Berkurang	
				T-1	T				T+1	T-1	T				T+1		
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11	12	13	14	15	16	17=13+14+15+16	18	19 = 17 - 10	20=19/10
1.03.01.2.06.0006	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		45.000.000	0	0	0	45.000.000	0		51.000.000	0	0	0	51.000.000	0	6.000.000	13.33 %
1.03.01.2.06.0003	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		100.000.000	0	0	0	100.000.000	0		77.224.149	0	0	0	77.224.149	0	(22.775.851)	-22.78 %
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**215.000.000**	**10.681.252.103**	**0**	**0**	**10.896.252.103**	**0**		**185.000.000**	**10.791.252.103**	**0**	**0**	**10.976.252.103**	**0**	**70.000.000**	**0.64 %**
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		200.000.000	10.400.000.000	0	0	10.600.000.000	0		170.000.000	10.460.000.000	0	0	10.630.000.000	0	30.000.000	0.28 %
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		0	46.552.103	0	0	46.552.103	0		0	61.552.103	0	0	61.552.103	0	15.000.000	32.22 %
1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		15.000.000	234.700.000	0	0	249.700.000	0		15.000.000	259.700.000	0	0	274.700.000	0	25.000.000	10.01 %
1.03.01.2.09	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**12.354.700.000**	**0**	**0**	**0**	**12.354.700.000**	**0**		**12.536.100.000**	**0**	**0**	**0**	**12.536.100.000**	**0**	**181.400.000**	**1.47 %**
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		135.000.000	0	0	0	135.000.000	0		135.000.000	0	0	0	135.000.000	0	0	0.00 %
1.03.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		12.219.700.000	0	0	0	12.219.700.000	0		12.401.100.000	0	0	0	12.401.100.000	0	181.400.000	1.48 %
1.03.01.2.20	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.295.825.741**	**0**	**0**	**0**	**1.295.825.741**	**0**		**1.719.300.141**	**0**	**0**	**0**	**1.719.300.141**	**0**	**323.474.400**	**23.17 %**
1.03.01.2.20.0002	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		1.140.465.741	0	0	0	1.140.465.741	0		1.267.353.115	0	0	0	1.267.353.115	0	126.887.374	11.12 %
1.03.01.2.20.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		15.340.000	0	0	0	15.340.000	0		15.340.000	0	0	0	15.340.000	0	0	0.00 %
1.03.01.2.20.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		240.000.000	0	0	0	240.000.000	0		436.607.026	0	0	0	436.607.026	0	196.607.026	81.92 %
1.03.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**				**10.000.000**	**1.040.000.000**	**0**	**0**	**1.050.000.000**	**0**		**10.000.000**	**1.439.333.600**	**0**	**0**	**1.449.333.600**	**0**	**399.333.600**	**38.03 %**
1.03.04.2.01	**Penyegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**10.000.000**	**1.040.000.000**	**0**	**0**	**1.050.000.000**	**0**		**10.000.000**	**1.439.333.600**	**0**	**0**	**1.449.333.600**	**0**	**399.333.600**	**38.03 %**
1.03.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alur Pelindung Di	DANA UMUM	KOTA BANDAR LAMPUNG		10.000.000	1.040.000.000	0	0	1.050.000.000	0		10.000.000	1.439.333.600	0	0	1.449.333.600	0	399.333.600	38.03 %
			Jumlah		**20.188.107.376**	**11.721.252.103**	**0**	**0**	**31.909.359.479**	**0**		**20.451.072.857**	**12.230.585.703**	**0**	**0**	**32.671.658.560**	**0**	**762.299.081**	**2.39 %**

BAB IV
PENUTUP

Renja perubahan menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan- persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau*Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung.

Ranwal Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG.

EVA DWIANA

PERUBAHAN
RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL

KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2025

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	√			
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025				
4	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
5	BAB V	Penutup	√			

Bandar Lampung, 2025

KEPALA DINAS SOSIAL

AKLIM SAHADI.,S.Kom., MM
NIP. 19740615 199703 1 003

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si. NIP.19690801 199303 2 009	
	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPERIDA	
2	DIAN STIAWATI, ST, MT NIP 19810310 200501 2 006	
	JF PERENCANAAN AHLI MADYA BAPPERIDA	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah,

DINI PURNAMAWATY,S.E.,M.Si
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak-sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan Data dan Informasi.	√			
3.	Mengkaji Hasil Evaluasi Renja-Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.	√			
4.	Pendanaan Program dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Perubahan Pagu Indikatif Untuk Masing-Masing Perangkat Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	√			
5.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang Telah Disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 2025

KEPALA DINAS SOSIAL

AKLIM SAHADI.,S.Kom., MM
NIP. 19740615 199703 1 003

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si. NIP.19690801 199303 2 009	
	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPERIDA	
2	DIAN STIAWATI, ST, MT NIP 19810310 200501 2 006	
	JF PERENCANAAN AHLI MADYA BAPPERIDA	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah,

DINI PURNAMAWATY,S.E.,M.Si
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Telah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan Berdasarkan Realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Perumusan Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Dalam Rangka Pencapaian Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pencapaian Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah Serta Pencapaian Sasaran Pembangunan Tahunan Nasional	

Bandar Lampung, 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah,

Diverifikasi : 2025		Tanda Tangan
1	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si. NIP.19690801 199303 2 009	
	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPERIDA	
2	DIAN STIAWATI, ST, MT NIP 19810310 200501 2 006	
	JF PERENCANAAN AHLI MADYA BAPPERIDA	

DINI PURNAMAWATY,S.E.,M.Si
NIP. 19700218 199303 2 002

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);

35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 AGUSTUS 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang..... 1

Landasan Hukum..... 3

Maksud dan Tujuan 5

Sistematika Penulisan 6

BAB II PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA OPD

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Sampai Dengan Triwulan II tahun 2025 7

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 11

BAB IV PENUTUP 24

LAMPIRAN 09
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 616/IV.01/HK/2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Dinas Sosial adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan Bappeda yang mengacu pada Peraturan Wali kota Bandar Lampung Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025, yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru.

Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas

dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya visi wali kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu: ***"BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT."***

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
6. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Wali kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal bidang sosial. Dengan demikian Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-3 (tiga) dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu ***Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.*** Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, pada tahun 2025 Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menyusun Renja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2025 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/ Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 Kota Bandar Lampung dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 Kota Bandar Lampung adalah:

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi wali kota.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan tahun 2025.
3. Sebagai acuan bagi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun kedepan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN (TAHUN 2025)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025 merupakan Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029. Sebagai keberlanjutan pembangunan maka dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dirumuskan dengan mendasarkan pada Evaluasi Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi, dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan serta isu-isu penting yang harus disikapi oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pada Tahun 2025.

Pada tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung melaksanakan Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada Tahun 2025 Dinas Sosial Bandar Lampung memiliki Anggaran sebesar Rp. 33.720.396.108. Realisasi Anggaran pada Dinas Sosial sampai dengan triwulan ke 2 Tahun 2025 sebesar Rp. 10.849.833.508. Rincian lebih lanjut tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sampai dengan Bulan Mei Tahun 2025 tersaji dalam lampiran (tabel-2.1).

FORMULIR E.81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA BANDAR LAMPUNG

PROVINSI LAMPUNG

RENJA PERANGKAT DAERAH (DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG)

PERIODE PELAKSANAAN s.d. TRIWULAN I TAHUN 2025

Indikator dan Target Renstra Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Sasaran RKPD :

NO	SASARAN	Kode Nomenklatur: BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2021-2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) s.d TRIWULAN I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH UNTUK TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										(7)		(8)		(9)		I		II		III		IV		14=(8+10+12+13)		(15) =(14/9)*100		(16) = (14+8)		(17) =(14/7)*100		(18)
(1)	(2)							(4)	(5)	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	%	K	RUPIAH	K	%	
DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG										65	Rp 127.510.061.200	52	Rp 126.730.903.000	70	Rp 33.736.223.670.00	4	Rp 4.639.000.000							19	Rp 3.436.947.700	23	10	30	Rp 125.436.435.400	71.6	62.6		Rp 16.138.667.621
1.5	Meningkatnya Pengelolaan dan Utusan Dinas Sosial	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pemanjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Persen	80	Rp 30.512.295.387	65	17.865.723.125.00	90	6.520.168.368.00	16	1.196.871.366.00						19	Rp 1.172.383.696	19	19	91	Rp 18.869.510.322	96.2	105.5		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100	Rp 117.487.674	3	98.867.354	100	45.378.431.00	24	Rp 16.977.000						24	Rp 16.977.000	24	24	88	Rp 980.844.354	88	88		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	Rp 117.487.674	3	98.867.354	3	45.378.431.00	24	Rp 16.977.000						24	Rp 16.977.000	8	24	80	100.844.354.00	16	80		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1.1.3		1	06	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100	Rp 25.394.648.184	58	15.191.303.410	38	4.957.326.311.00	25	1.031.193.722						25	Rp 1.013.193.722	25	25	88	Rp 14.203.625.138	8	56		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	33	Rp 25.394.651.182,71	32	15.189.873.410	33	3.956.168.211	25	Rp 1.013.193.722						25	Rp 1.013.193.722	25	25	88	Rp 14.203.625.138	2	56		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	Rp 523.199.000	5	407.520.000	4	71.760.000	25	Rp 17.790.000						25	Rp 17.790.000	6	25	87	Rp 419.310.000	15	87		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1.1.5		1	06	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	80	Rp 31.750.000	75	16.000.000	75	20.000.000	0	-						0	Rp -	0	0	57	Rp 16.000.000	2	57		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.05	06		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	Rp 31.750.000	10	16.000.000	10	20.000.000	0							0	Rp -	0	0	57	Rp 16.000.000	2	57		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1.1.6		1	06	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dana Operasional OPD	Persen	90	Rp 810.168.083	60	752.168.688.00	90	330.034.991.00	0	11.132.800.00						40+44	Rp 11.132.800	40+44	0	6	Rp 35.165.777	20	166		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	Rp 57.450.000	5	32.045.777	1	6.500.024	0	Rp -						0	Rp -	0	0	62	Rp 35.045.777	12	42		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	Rp 169.575.083	3	142.393.352	1	41.366.043	22	Rp 8.902.000						22	Rp 8.902.000	22	22	80	Rp 151.295.252	16	89		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	Rp 53.025.000	4	46.497.234	1	11.308.844	0	Rp -						0	Rp -	0	0	75	Rp 46.497.234	16	78		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.06	04		Penyediaan Bahan/Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	Rp 99.042.250	5	88.540.000	1	26.133.940	0	Rp -						0	Rp -	0	0	113	Rp 88.540.000	34	113		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	Rp 70.706.000	5	54.157.362	1	26.806.760	5	Rp 1.000.000						5	Rp 1.000.000	5	5	76	Rp 55.157.362	16	78		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	Rp 37.765.000	5	20.000.000	1	5.000.000	25	Rp 1.250.000						25	Rp 1.250.000	25	25	87	Rp 21.250.000	13	87		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.06	09		Pendidikan Kedinasan Tanpa	Jumlah Laporan Pendidikan Kedinasan Tanpa yang di Sediakan	Laporan	3	Rp 24.888.750	3	33.706.000	1	20.000.000	0							0	Rp -	0	0	104	Rp 33.706.000	27	135		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.06	10		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	Rp 420.000.000	3	281.408.331	1	166.109.728	0							0	Rp -	0	0	81	Rp 281.408.331	16	81		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1.1.9		1	06	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jam Perangkap Kebutuhan OPD	Persen	30	Rp 230.000.000		1.000.058.010	30	804.230.000	0	-						0		0	0	525	Rp 1.000.058.010	96	100		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.07	01		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit			1	680.000.000	0		0	Rp -						0	Rp -	0	0		Rp -	-	-		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Disediakan	Unit			1	400.000.000	1	390.000.000	0							0	Rp -	0	0	99	Rp 400.000.000	99	100		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.07	03		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit			1	145.173.282	1	149.919.438	0							0	Rp -	0	0	93	Rp 140.173.282	93	100		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Sediakan	Unit	1	Rp 250.000.000	100	556.784.418	1	160.309.631	0							0	Rp -	0	0	223	Rp 556.784.418	223	223		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1.1.6		1	06	01	2.08			Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jam Perangkap Kebutuhan OPD	Persen	100	Rp 2.230.125.443	91	1.191.808.464	98.05	367.370.000	20	110.084.794						20	Rp 110.084.794	0	20	76	Rp 1.091.891.458	91	72		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	Rp 260.000.000	3	262.336.064	1	113.370.000	7	Rp 8.084.794						7	Rp 8.084.794	7	7	91	Rp 370.391.458	13	69		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.08	08		Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	Rp 1.969.829.379	6	1.216.930.000	1	432.960.000	24	Rp 102.000.000						24	Rp 102.000.000	24	24	75	Rp 1.321.930.000	45	78		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1.1.7		1	06	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kantor yang Terpelihara	Persen	30	Rp 446.728.083	30	824.703.100	30	305.329.000	4	37.334.200						4	Rp 37.334.200	0	4	172	Rp 862.237.300	232	232		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.09	01		Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	Rp 219.202.833	1	150.611.107	1	40.870.000	21	Rp 8.323.340						21	Rp 8.323.340	21	21	77	Rp 169.134.447	77	77		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.09	02		Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	Rp 158.870.250	1	229.752.088	1	262.140.000	7	Rp 16.011.200						7	Rp 16.011.200	7	7	175	Rp 348.773.088	175	175		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	Rp 75.630.000	1	99.330.000	16	17.960.000	0							0	Rp -	0	0	87	Rp 99.330.000	87	87		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	06	01	2.09	11		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	Rp 370.000.000	1	350.000.000	0		0	Rp -						0	Rp -	0	0	387	Rp 370.000.000	387	387		Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
																								Rata-rata Capaian Kinerja		19 NK	11 NK			95 k	103.49 t		

No	SASARAN	Kode Nomenklatur				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU TAHUN 2021-2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 YANG DIEVALUASI (n-1)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025 s.d TRIWULAN I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		KEJADIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PENANGGUNG JAWAB PENGUSULAN/ JAWAB
															I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)=(8)/(7)*100		(15) = (14)/(9)*100		(16) = (8+14)/(7)		(17) = (16)/12*100		(18)
									K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	%	K	RUPIAH	K	%	Rp 19.130.837.331
URAN SOSIAL, KOTA BANDAR LAMPUNG									95	Rp 127.830.941.288	92	Rp 126.718.365.699	78	Rp 33.738.333.670.00	1	Rp 4.830.996.000							14	Rp 3.436.947.700	23	59	80	Rp 129.836.436.699	71.6	62.6	
1.1	Meningkatnya Pelayanan/Layanan Dinas Sosial	1	30	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Peserta/ Warga Pemerlukan Pelayanan Sosial	Persen	30	Rp 30.930.991.387	30	17.965.723.125.00	30	6.326.168.268.00	10	1.196.672.998.00							10	Rp 1.172.183.998	15	50	30	Rp 10.989.510.322	36.3	183.5	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1.2		1	30	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial	Persen	37	Rp 14.909.512.093	30	10.370.996.495	34	13.631.994.158	0	1.377.996.000							0	Rp 1.377.996.000	0	0	414	Rp 61.356.966.495	80	40	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1.2.1		1	30	02	2.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kemasyarakatan Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan pengaduan kelembagaan sosial	Persen	100	Rp 14.909.512.093	30	10.370.996.495	34	13.631.994.158	0	1.377.996.000							0	Rp 1.377.996.000	0	0	414	Rp 61.356.966.495	80	40	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	30	02	2.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pelaraja Sosial Masyarakat Kemasyarakatan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pelaraja Sosial Masyarakat Kemasyarakatan Kabupaten/ Kota	Person	-	-	30.930.913	300	150.905.153	0	4.900.000							0	Rp 4.900.000	0	0	30	Rp 104.790.818	80	80	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	30	02	2.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kemasyarakatan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kemasyarakatan Kabupaten/ Kota Yang Meningkat Kapasitasnya Kemasyarakatan Kabupaten/ Kota	Laporan	-	Rp -	1.324.884.318	100	1.780.905.118	0	8.750.000							0	Rp 8.750.000	0	0	30	Rp 1.030.414.510	91	91	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	30	02	2.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Keluarga Kemasyarakatan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kemasyarakatan Kabupaten/ Kota	Keluarga	440	Rp 4.936.277.384	100	330.126.398	100	248.175.780	0						0	Rp -	0	-	7	Rp 334.126.398	7	7	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	30	02	2.02	04	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kemasyarakatan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kemasyarakatan Kabupaten/ Kota	Lembaga	1250	Rp 4.936.277.384	100	54.703.833.118	200	17.220.120.440	0	Rp 1.380.560.000					0	Rp 1.380.560.000	0	0	1.176	Rp 18.373.353.110	94	12	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	30	02	2.02	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pengisian Lembaga Kemitraan Kesejahteraan Keluarga (LKK)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kemitraan Kesejahteraan Keluarga (LKK) Kemasyarakatan Kabupaten/ Kota	Sertifikat	70	Rp 4.936.277.384	73	1.312.249.885	70	248.995.662	0						0	Rp -	0	-	35	Rp 1.312.249.885	35	35	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
																								Rata-rata Capaian Kinerja	0	7			80	47	
																								Predikat Kinerja	SR	SR			T	K	
1.3		1	30	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	80	Rp 1.325.578.874	80	1.927.791.352	84	995.866.000	0	31.937.700							0	Rp 31.962.700	0	0	75	Rp 1.596.770.455	71	40	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
							Persentase sarana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	100			995.866.000	0	31.937.700							4	Rp 31.962.700	0	0	100	Rp 1.596.770.455	71	40	
1.3.1		1	30	04	2.01		Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis akibat pasti sosial	Persentase pelayanan Rehabilitasi bantu, penyandang sosial dan orang terlantar yang tertangani	Person	100	Rp 2.752.801.296	90	1.193.856.458	100	715.866.000	0	Rp 31.937.700					0	Rp 31.962.700	0	0	167	Rp 1.596.770.455	71	40	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1.3.2		1	30	04	2.01	01	Penyediaan pemakaian	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakaian Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	Orang	60	Rp 438.741.000	50	313.148.334	30	115.000.000	0						0	Rp -	0	-	272	Rp 313.148.334	71	71	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	30	04	2.01	02	Penyediaan vasobag	Jumlah Orang yang Memenuhi Peluas dan Rehabilitasi Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	Orang	673	Rp 380.000.000	100	267.998.452	114	150.000.000	0						0	Rp -	0	-	264	Rp 267.998.452	74	74	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	30	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga di luar lembaga/di Kemasyarakatan Kabupaten/ Kota	Orang	30	Rp 1.354.388.750	40	612.810.885	30	462.500.000	0	Rp 2.820.000					0	Rp 2.820.000	0	1	137	Rp 615.630.885	32	32	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	30	04	2.01	06	Pemberian Bantuangan Sosial bagi/ Kelompok Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial bagi/ Kelompok Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kemasyarakatan Kabupaten/ Kota	Orang		Rp -			30.000.000	0						0	Rp -	0	-	0	Rp -	-	-	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	30	04	2.01	07	Pemberian pemakaian NSK, alas kelaluran, sosial rohadi, dan kartu identitas anak	Jumlah orang yg terpenuhi kebutuhan pemberian NSK, alas kelaluran, sosial rohadi, dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas terlantar/ lain/ kota	Orang		Rp -	-	-	-	0						0	Rp -	0	-	0	Rp -	-	-	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1.3.3		1	30	04	2.02		Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas (penyandang disabilitas sensorik/ mental/ fisik dan disabilitas ganda)	Persentase pelayanan pengelolaan rehabilitasi sosial	Person	100	Rp 273.071.174	100	733.822.387	100	280.000.000	0						0		0							Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	30	04	2.02	05	Pemberian bimbingan sosial bagi/ Kelompok PMKS lainnya korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial bagi/ Kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Rujukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kemasyarakatan/ Kota	Orang	540	Rp 130.535.587	500	78.999.327	400	32.000.000	0	Rp 1.820.000					0	Rp 1.820.000	0	40	0				Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	30	04	2.02	14	Bimbingan sosial lembaga dan komunitas dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Terlaksananya pelayanan/ pelaksanaan rehabilitasi sosial	Person	100	Rp 130.535.587	100	653.822.474	90	200.000.000	0	Rp 11.182.700					0	Rp 11.182.700	0	5	0				Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
																								Rata-rata Capaian Kinerja	0	0			0	0	
																								Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
1.4		1	30	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta kapal serta tidak potensial yang telah memenuhi persyaratan sosial	Person	100	Rp 41.818.265.232	90	32.740.248.311	80	13.265.247.850	0	46.995.000					0	Rp 46.995.000			0	Rp 33.790.343.311	78	38	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1.4.1		1	30	02	2.02		Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pelayanan pengelolaan pendataan PBH dan data PMKS FSES	Person	100	Rp 41.818.265.232	90	32.740.248.311	80	13.265.247.850	0	46.995.000					0	Rp 46.995.000			0	Rp 33.790.343.311	78	38	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	30	02	2.02	01	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Terlaksananya verval data PMKS dan PSKS yang terlaksana	Kecamatan	22	Rp 2.812.376.176	20	1.134.796.316	10	282.736.818	0	Rp 27.000.000					0	Rp 27.000.000	0	11	0	Rp 1.161.796.316	76	52	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	30	02	2.02	02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pangan Pendampingan dalam Pencairan Bantuan	Pangan	100	Rp 15.014.438.756	100	10.376.100.764	80	1.241.438.400	0	Rp -					0	Rp -	0	-	0	Rp 10.376.100.764	76	40	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

NO	SASARAN	Kode Rekening					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU TAHUN 2021-2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) s.d TRIWULAN I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV									
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		14 a=(9+11+12+13)		(15) a (14/9)*100		(16) a (14+8)		(17) a (16/7)*100		(18)
										K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	%	K	RUPIAH	K	%	Rp
DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG										95	Rp 127.855.961.288	92	Rp 126.716.569.699	70	Rp 35.730.333.976.00	4	Rp 4.639.896.606							18	Rp 3.456.947.700	23	19	83	Rp 129.456.439.499	71.8	62.4	
1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Dinas Sosial	1	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Persen	98	Rp 30.073.295.307	95	17.965.723.125.00	98	4.539.148.368.00	98	1.190.873.906.00							19	Rp 1.173.083.906	18	19	83	Rp 18.859.519.323	58.2	103.5	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
								Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengetahuan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	195	Rp -		-		-	0	Rp -					0	Rp -	-	-	-	Rp -	78	-	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	08	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan	20	Rp 15.000.000.000	20	11.225.642.557	20	3.901.084.330	0	Rp 22.865.000							0	Rp 22.865.000	0	0	0	Rp 11.252.037.057	75	75	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
																									Rata-rata Capaian Kinerja	-	2			75	55	
																									Predikat Kinerja	SR	SR			S	K	
1.3		1	08	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Persen	100	Rp 30.349.659.702	98	26.102.619.916	100	1.228.912.898	0	Rp -							0	Rp -				Rp 26.102.619.916	76	69	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
								Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Mengutakan Secara Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	Persen	100	-		-		-	0	Rp -					0	Rp -				26.102.619.916	76	69	
1.3.1		1	08	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial	Petugas	845	Rp 30.349.659.702	100	26.102.619.916	100	1.228.912.898	0	-							0	Rp -			0	Rp 26.102.619.916	76	69	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	08	06	2.01	01	Penyediaan makanan	Terlaksananya bantuan Terhadap masyarakat Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persen	100	Rp 30.349.659.702	98	25.947.867.141	98	1.125.420.989	0								0	Rp -	0	-	0	Rp 25.947.867.141	76	76	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan Jml. Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	95120	Rp -		-		-	0								0	Rp -	0	-	0	Rp -	-	-	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	08	06	2.01	02	Penyediaan sandang	Jumlah orang yg mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yg berada pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kab/kota.	Orang	9000	Rp 2.000.000.000	9000	Rp 55.428.428	2250	Rp 54.457.920	0								0	Rp -	0	-	0	Rp 55.428.428	3	3	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	08	06	2.01	03	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi kewenangan kab/kota	Unit	80	Rp 1.400.000.000	80	Rp 62.792.835	20	Rp 23.969.376	0								0	Rp -	0	-	0	Rp 62.792.835	4	4	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
		1	08	06	2.01	05	Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yg mendapatkan pelayanan dukungan psikososial	Orang	800	Rp 800.000.000	500	Rp 36.539.510	200	Rp 35.064.505	0								0	Rp -	0	-	0	Rp 36.539.510	6	6	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
																									Rata-rata Capaian Kinerja	-	-			75	69	
																									Predikat Kinerja	SR	SR			S	S	

KEPALA DINAS

AKLIM SAHADI.,S.Kom., MM
NIP. 19740615 199703 1 003

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan TugasPokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung serta Program Pemerintah Kota Bandar Lampung maka Program dan Kegiatan yang dirancang Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pada perubahan anggaran Tahun 2025 (terdapat pada tabel 3.1

TABEL 3.1
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2025
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KET
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						DINAS SOSIAL									31.398.279.070	35.730.333.070	34.445.896.108	DINAS SOSIAL
	1					**URUSAN PEMERINTA-HAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTA-HAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								31.398.279.070	35.730.333.070	34.445.896.108	DINAS SOSIAL
	1	06				**URUSAN PEMERINTA-HAN BIDANG SOSIAL**	**URUSAN PEMERINTAH-AN BIDANG SOSIAL**								31.398.279.070	35.730.333.070	34.445.896.108	DINAS SOSIAL
	1	06	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	%	%	98	100		4.489.025.118	6.520.168.268	6.352.726.108	DINAS SOSIAL

	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	%	%	100	100		20.500.000	45.579.431	45.579.431	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	5	3		20.500.000	45.579.431	45.579.431	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Keuangan	Pelayanan Administrasi Keuangan	%	%	100	100		3.695.923.321	4.057.328.311	4.057.328.311	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	Orang/ bulan	32	33		3.586.114.321	3.986.168.311	3.986.168.311	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa-haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	4		109.809.000	71.160.000	71.160.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%	%	100	100		5.000.000	20.000.000	10.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	5	5		5.000.000	20.000.000	10.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar OPD	%	%	98	100		229.753.000	338.934.991	229.001.791	DINAS SOSIAL

	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		10.000.000	8.998.534	8.998.534	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		30.000.000	41.390.553	41.390.553	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		11.000.000	11.506.844	11.506.844	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		6.500.000	24.123.550	20.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1.00	1.00		12.348.000	29.809.782	23.850.868	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		5.515.000	5.000.000	5.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1.00	1.00		4.390.000	22.000.000	16.500.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggara-an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggara-an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengga-raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengga-raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		150.000.000	196.105.728	101.754.992	DINAS SOSIAL

	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	%	100	100		890.228.869	890.228.869	842.719.909	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan Yang Disediakan	Unit	Unit	5	5		580.000.000	580.000.000	580.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	Unit	5	5		149.919.438	149.919.438	102.410.478	
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Di Sediakan	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Di Sediakan	Unit	Unit	4	4		160.309.431	160.309.431	160.309.431	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	%	98	100		411.860.670	547.576.666	547.576.666	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	1		99.860.670	115.576.666	115.576.666	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		312.000.000	432.000.000	432.000.000	DINAS SOSIAL

	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	%	100	100		125.988.127	620.520.000	620.520.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1		38.622.877	40.670.000	40.670.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	4	1		24.365.250	262.190.000	262.190.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	11	15		13.000.000	17.660.000	17.660.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Unit	1	3		50.000.000	300.000.000	300.000.000	DINAS SOSIAL
36	**1**	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYA-AN SOSIAL**	**PROGRAM PEMBERDAYA-AN SOSIAL**	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial	%	%	84	87		19.749.414.480	13.631.004.159	12.890.519.397	

	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Presentase Pelayanan Pengelolaan Kelembagaan Sosial	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Presentase Pelayanan Pengelolaan Kelembagaan Sosial	%	%	84	81		19.749.414.480	13.631.004.159	12.890.519.397	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0 0 0 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	%	%	100	100		332.298.500	126.805.153	54.209.243	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0 0 0 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	%	%	100	100		332.298.500	1.780.895.119	1.304.754.284	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0 0 0 3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluarga	Keluarga	80	100		107.115.980	248.175.785	123.485.709	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.0 3	0 0 0 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Lembaga	Lembaga	5	250		19.160.000.000	11.225.128.440	11.158.070.499	DINAS SOSIAL

	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sertifikat	Sertifikat	15	15		150.000.000	249.999.662	249.999.662	DINAS SOSIAL
37	1	06	04			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	%	84	88		749.324.713	955.000.000	924.977.643	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Lansia, Penyandang Cacat dan Orang Terlantar yang Tertangani	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Lansia, Penyandang Cacat Dan Orang Terlantar Yang Tertangani	%	%	100	100		629.324.713	715.000.000	684.977.643	

	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Orang	50	50		141.298.500	115.000.000	115.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Orang	134	135		60.000.000	100.000.000	100.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Orang		50		428.026.213	450.000.000	419.977.643	DINAS SOSIAL

	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Orang	15	15			50.000.000	50.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Pelayanan Pengelolaan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Pengelolaan Rehabilitasi Sosial	Orang	%	50	100		120.000.000	240.000.000	240.000.000	
	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Orang	110	110		20.000.000	20.000.000	20.000.000	DINAS SOSIAL

	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	Dokumen	Dokumen	4	1		100.000.000	220.000.000	220.000.000	DINAS SOSIAL
38	1	06	05			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	%	23	24		5.860.514.759	13.395.247.653	12.371.273.659	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Pengelolaan Pendampingan PKH dan Data PMKS PSKS	Pelayanan Pengelolaan Pendampingan PKH Dan Data PMKS PSKS	%	%	23	24		5.860.514.759	13.395.247.653	12.371.273.659	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota Yang Didata	Orang	Orang	198	198		250.000.000	250.734.918	238.163.223	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	Keluarga	Keluarga	52755	55948		1.302.000.000	3.243.428.405	2.563.725.959	DINAS SOSIAL

	1	06	05	2.02	0 0 0 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluarga	Keluarga	67430	66550		4.308.514.759	9.901.084.330	9.569.384.477	DINAS SOSIAL
39	1	06	06			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	%	100	100		550.000.000	1.180.899.301	1.180.899.301	
	1	06	06	2.0 1		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Pelayanan Pengelolaan Bantuan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial Pelayanan Pengelolaan Bantuan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Pelayanan Pengelolaan Bantuan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial Pelayanan Pengelolaan Bantuan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Kec	Kec	20	169		550.000.000	1.180.899.301	1.180.899.301	DINAS SOSIAL

	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Orang	1175	37024		250.000.000	1.077.825.345	1.077.825.345	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Orang	200	2250		100.000.000	54.324.850	54.324.850	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	Unit	unit	2	20		100.000.000	23.857.893	23.857.893	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Orang	200	200		100.000.000	24.891.213	24.891.213	DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS

AKLIM SAHADI.,S.Kom., MM
NIP. 19740615 199703 1 003

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika Pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan Pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan Masyarakat dengan mengedepankan perencanaan Pembangunan yang berbasis pada Masyarakat atau *community based development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar di kedepankan.

Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

EVA DWIANA